

Excellent Services for Indonesia's Connectivity

Layanan Prima untuk Konektivitas Nusantara





SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY



Laporan Tahunan ini memuat sejumlah pernyataan mengenai kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, hingga tujuan Perseroan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pengertian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan-pernyataan tersebut bersifat prospektif serta memiliki risiko dan ketidakpastian, sehingga dapat menghadirkan perbedaan material terhadap perkembangan aktual.

Seluruh pernyataan prospektif di dalam laporan tahunan ini disusun berdasarkan kondisi terkini dan berbagai asumsi mengenai kondisi mendatang terkait lingkungan bisnis Perseroan. Perseroan tidak menjamin bahwa informasi prospektif serta tindakan yang diambil berdasarkan informasi tersebut akan menghadirkan hasil yang seluruhnya sesuai dengan yang dinyatakan.

Laporan ini memuat kata "Perusahaan", "Perseroan", "PT PELNI (Persero)", serta "PELNI" yang seluruhnya merujuk pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

This Annual Report contains several statements regarding the company's financial condition, operating results, projections, plans, strategies, policies, and objectives, which are classified as forward-looking statements under applicable laws and regulations. These statements are prospective and involve risks and uncertainties, which may result in material differences from actual developments.

All forward-looking statements in this annual report are based on current conditions and various assumptions regarding future conditions related to the company's business environment. The company does not guarantee that the prospective information and actions taken based on this information will yield results that are entirely consistent with the statements made.

This report includes the terms "Company," "Corporation," "PT PELNI (Persero)," and "PELNI," all of which refer to PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).



TEMA LAPORAN TAHUNAN 2024

2024 ANNUAL REPORT THEME



2024

EXCELLENT SERVICES FOR INDONESIA'S CONNECTIVITY

LAYANAN PRIMA UNTUK
KONEKTIVITAS NUSANTARA

"Excellent Services for Indonesia's Connectivity" mencerminkan komitmen PT PELNI (Persero) dalam menyediakan layanan transportasi laut yang unggul untuk memperkuat konektivitas antarwilayah di seluruh Indonesia. Melalui peningkatan kualitas layanan, digitalisasi, dan modernisasi armada, PT PELNI (Persero) terus memastikan mobilitas masyarakat dan distribusi logistik berjalan andal, aman, dan merata hingga wilayah 3TP (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Hal ini menegaskan peran strategis PT PELNI (Persero) sebagai penghubung Nusantara yang berkontribusi langsung pada pemerataan pembangunan nasional dan mendukung visi perusahaan sebagai pelayaran yang unggul dan berdaya saing global.

"Excellent Services for Indonesia's Connectivity" reflects PT PELNI (Persero)'s commitment to providing superior maritime transportation services to strengthen interregional connectivity across Indonesia. Through continuous improvements in service quality, digitalization, and fleet modernization, PT PELNI (Persero) ensures the reliable, safe, and equitable movement of people and logistics, including to the 3TP areas (Frontier, Outermost, and Underdeveloped regions). This underscores PT PELNI (Persero)'s strategic role as a unifying force across the archipelago, directly contributing to equitable national development and supporting the Company's vision to become a leading and globally competitive shipping enterprise.



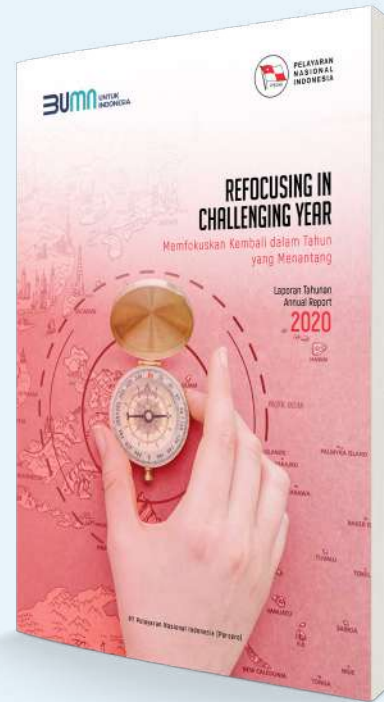
KESINAMBUNGAN TEMA

THEME CONTINUITY

2020

REFOCUSING IN CHALLENGING YEAR

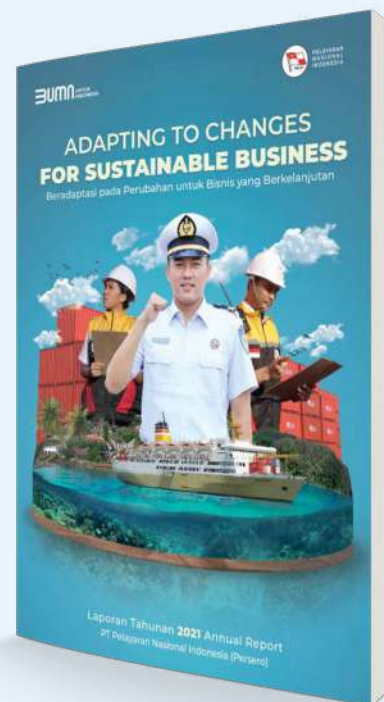
MEMFOKUSKAN KEMBALI DALAM TAHUN YANG MENANTANG



2021

ADAPTING TO CHANGES FOR SUSTAINABLE BUSINESS

BERADAPTASI PADA PERUBAHAN UNTUK BISNIS YANG BERKELANJUTAN



KESINAMBUNGAN TEMA
THEME CONTINUITY

2022

**BUSINESS INTEGRATION
AND MARITIME LOGISTICS
INFRASTRUCTURE
DEVELOPMENT**

PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR
LOGISTIK MARITIM DAN INTEGRASI
BISNIS



2023

**ACCELERATING GROWTH
THROUGH TRANSFORMATION**

AKSELERASI PERTUMBUHAN MELALUI
TRANSFORMASI





DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab Disclaimer and Limitation of Liability	2	PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE	62
Tema Laporan Tahunan 2024 2024 Annual Report Theme	3	Identitas Perusahaan Corporate Identity	64
Kesinambungan Tema Theme Continuity	4	Riwayat Singkat Perusahaan Brief History of the Company	66
KILAS KINERJA 2024 2024 PERFORMANCE HIGHLIGHTS	10	Penjelasan Logo Perusahaan Company Logo Explanation	70
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Consolidated Financial Position Report	12	Jejak Langkah Perusahaan Company Milestones	72
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income	12	Visi dan Misi Perusahaan Company Vision and Mission	74
Laporan Arus Kas Konsolidasian Consolidated Cash Flow Statement	13	Nilai-Nilai Perusahaan Company Values	76
Rasio Keuangan Financial Ratios	14	Bidang Usaha Business Fields	78
Ikhtisar Operasi Operational Highlights	15	Produk dan Jasa Products and Services	86
Grafik Ikhtisar Keuangan Financial Highlights Chart	15	Jaringan Trayek Kapal Penumpang 2024 2024 Passenger Ship Route Network	90
Informasi Saham Stock Highlights	16	Jaringan Trayek Kapal Tol Laut 2024 2024 Sea Toll Ship Route Network	92
Aksi Korporasi Corporate Actions	16	Jaringan Trayek Nasional Kapal Perintis 2024 2024 National Pioneer Ship Route Network	94
Informasi Obligasi, Sukuk, dan/atau Obligasi Konversi Information on Bonds, Sukuk, and/or Convertible Bonds	16	Rute Kapal Ternak 2024 2024 Cattle Ship Route	96
Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications	17	Nama dan Alamat Anak Perusahaan, Kantor Cabang, dan Kantor Perwakilan Names and Addresses of Subsidiaries, Branch Offices, and Representative Offices	98
Peristiwa Penting Significant Events	30	Struktur Organisasi Organizational Structure	102
LAPORAN MANAJEMEN MANAGEMENT REPORT	34	Keanggotaan Perusahaan Di Dalam Asosiasi/ Organisasi Industri Company Membership in Industry Associations/ Organizations	104
Laporan Dewan Komisaris Report from the Board of Commissioners	36	Profil Direksi Board of Directors Profile	106
Laporan Direksi Report from the Board of Directors	46	Perubahan Komposisi Direksi Changes in Board of Directors Composition	113
Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2024 PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Statement of Responsibility of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the 2024 Annual Report of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	60	Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile	114
		Perubahan Komposisi Dewan Komisaris Changes in Board of Commissioners Composition	120
		Sumber daya manusia Human Resources	120



DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

Pejabat Eksekutif (pada 31 Desember 2024) Executive Officers (as of December 31, 2024)	134	Informasi tentang Dampak Nilai Tukar Mata Uang Asing Information on the Impact of Foreign Exchange Rate	226
Informasi Pemegang Saham Shareholder Information	165	Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan Material Information and Facts that Occurred After the Accountant's Reporting Data	226
Struktur Grup Perusahaan Company Group Structure	166	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 Comparison of Target and Realization 2024	227
Entitas Anak dan Entitas Asosiasi Subsidiaries and Associated Entities	167	Tingkat Kesehatan Perusahaan Corporate Health Level	229
Kronologi Pencatatan Saham Chronology of Share Listings	170	<i>Key Performance Indicator</i> Key Performance Indicator	230
Kronologi Pencatatan Efek Lainnya Chronology of Other Securities Listings	170	Rincian Masalah yang Terjadi di Tahun 2024 Issues Arising in 2024	232
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Capital Market Support Institutions and Professions	171	Kebijakan Dividen dan Pembagiannya Dividend Policy and Distribution	233
Informasi pada Situs Web Perusahaan Company Website Information	173	Perpajakan dan PNBP Lainnya; Kontribusi Terhadap Negara Taxation and Other Non-Tax State Revenues (PNBP); Contribution to the State	233
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS	176	Informasi tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Information on the Use of Proceeds from the Public Offering	234
Tinjauan Perekonomian dan Industri Economic and Industrial Overview	178	Laporan Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Report on the Use of Additional PMN (State Capital Injection)	235
Kebijakan Strategis Perusahaan Corporate Strategic Policy	182	Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan Usaha, Akuisisi, dan/atau Restrukturisasi Utang/Modal Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Business Merger, Acquisition, and/or Debt/Capital Restructuring	236
Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha Operational Overview by Business Segment	185	Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/Pihak Berelasi Material Transaction Information Containing Conflicts of Interest and/or Transaction with Affiliated Parties/Related Parties	237
Aspek Pemasaran Marketing Aspects	198	Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian yang Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi Financial Information Containing Extraordinary and Unusual Events	244
Penelitian dan Pengembangan Research and Development	200	Dampak Perubahan Harga Terhadap Pendapatan dan Laba Perusahaan Price Changes Effects on the Company's Revenue and Income	244
Tinjauan Keuangan Financial Overview	201		
Kemampuan Menghasilkan Keuntungan Profit Generating Ability	218		
Kemampuan Membayar Utang Debt Repayment Ability	219		
Tingkat Kolektibilitas Piutang Receivables Collectability	221		
Struktur Modal dan Dasar Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal Perusahaan Capital Structure and Management's Policy Basis on the Company's Capital Structure	222		
Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal Material Commitments for Capital Goods Investments	224		
Realisasi Investasi Barang Modal Realization of Capital Goods Investment	224		



DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perseroan Changes in Laws and Regulation that Significantly Affect the Company	244	Sekretariat Dewan Komisaris Secretariat of the Board of Commissioners	435
Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya Terhadap Perseroan Changes in Accounting Policies and The Impact on the Company	245	Kesekretariatan Perusahaan Corporate Secretariat	438
Informasi Kelangsungan Usaha Information on Business Continuity	246	Satuan Pengawasan Intern Internal Oversight Unit	442
Prospek Usaha Tahun 2025 Business Outlook in 2025	250	Akuntan Publik Public Accountants	450
Rencana Strategis dan Proyeksi Kinerja Perusahaan Tahun 2025 The Company's strategic Plan and Performance Projections for 2025	251	Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	454
TATA KELOLA PERUSAHAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE	258	Manajemen Risiko Risk Management	456
Komitmen Penerapan GCG Commitment to GCG Implementation	260	Perkara Penting yang Dihadapi Significant Legal Cases	472
Rapat Umum Pemegang Saham General Shareholders Meeting	268	Sanksi Administrasi Administrative Sanctions	474
Direksi Board of Directors	304	Akses Informasi dan Data Perusahaan Access to Company Information and Data	474
Dewan Komisaris Board of Commissioners	348	Pedoman Perilaku dan Etika Code of Conduct	475
Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Nomination and Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners	388	Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan/ Manajemen (ESOP/MSOP) Employee Stock Ownership Program (ESOP) / Management Stock Ownership Program (MSOP)	481
Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi Diversity in the Board of Commissioners and Directors	396	Kebijakan Pengungkapan Informasi Mengenai Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Policy on Disclosure of Information Regarding Directors' and Commissioners' Share Ownership	481
Organ di Bawah Dewan Komisaris Subsidiary Bodies of the Board of Commissioners	398	Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System	482
Komite Audit Audit Committee	399	Kebijakan dan Praktik Anti-Korupsi Anti-Corruption Policies and Practices	494
Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	409	Pelaporan LHKPN Reporting of Wealth Report (LHKPN)	497
Komite Pemantau Manajemen Risiko Risk Management Monitoring Committee	417	Pengendalian Gratifikasi Gratuity Control	500
Komite Tata Kelola Terintegrasi Integrated Governance Committee	426	Pengadaan Barang dan Jasa Procurement of Goods and Services	505
		Penilaian Penerapan GCG Assessment of GCG Implementation	506
		Tata Kelola Teknologi Informasi (TI) Information Technology (IT) Governance	528



DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

556

Kebijakan dan Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Policy and Planning of Social and Environmental Responsibility Programs

558

Penerapan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Implementation of the Corporate Social Responsibility and Environmental Program

566

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2024
Social and Environmental Responsibility Program in 2024

578

REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

602

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021: CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED FINANCIAL REPORT

625





01

KILAS KINERJA 2024

2024 PERFORMANCE HIGHLIGHTS







LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020
Aset Lancar Current Assets	7.137.809	5.062.044	4.564.963	4.123.284	3.777.477
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	2.946.079	2.973.988	3.149.015	3.293.457	3.475.562
Jumlah Aset Total Assets	10.083.888	8.036.032	7.713.978	7.416.741	7.253.039
Liabilitas Jangka Pendek Short-Term Liabilities	1.422.771	1.012.238	884.410	760.896	649.131
Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities	138.067	200.053	143.743	232.610	223.313
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.560.838	1.212.291	1.028.153	993.507	872.444
Jumlah Ekuitas Total Equity	8.523.050	6.823.741	6.685.825	6.423.235	6.380.595
Total Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	10.083.888	8.036.032	7.713.978	7.416.741	7.253.039

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | In millions of Rupiah, unless otherwise stated

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020
Pendapatan Usaha Bersih Operating Revenues, Netto	6.177.057	5.766.619	4.906.600	4.330.266	4.167.428
Beban Pokok Usaha Operating Expenses	(5.130.011)	(4.894.058)	(4.118.494)	(3.877.717)	(3.747.497)
Laba (Rugi) Kotor Gross Profit	1.047.046	872.561	788.106	452.549	419.129
Beban Pemasaran dan Distribusi Distribution and Marketing Expenses	(24.615)	(21.181)	15.088	21.613	28.189
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(828.674)	(732.264)	666.989	443.958	561.132
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit or (Loss)	193.757	119.116	106.030	(13.023)	(14.331)
Pendapatan (Beban) Non Usaha Bersih Non Operating Income - Net	108.669	179.405	168.366	104.662	94.404
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	302.426	298.521	274.396	91.639	80.073
Beban Pajak Tax Expenses	(108.175)	(96.890)	(100.777)	(50.538)	(49.106)

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | In millions of Rupiah, unless otherwise stated



LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020
Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi Items That Will Not be Reclassified Subsequently to Profit or Loss					
Keuntungan Aktuarial Periode Berjalan Actuarial Gain (Loss) for the Period	4.201	(69.937)	88.909	555	(17.990)
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Fair Values of Property Gain (Loss) Current Period	855	137.859	262.528	41.656	12.976
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada: Profit for the Current Year Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Owner of the Company	193.873	201.202	173.248	40.928	30.737
Pemilik Non Pengendali Non Controlling Interest	377	429	371	173	229
Laba Tahun Berjalan Profit for the Current Year	194.250	201.631	173.619	41.101	30.967
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	5.057	(63.772)	88.945	41.656	(17.990)
Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada: Comprehensive Income Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Owner of the Company	198.927	137.428	262.145	41.483	12.977
Pemilik Non Pengendali Non Controlling Interest	380	431	383	173	(1)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income of The Current Year	199.307	137.859	262.528	41.656	12.976
Laba Bersih Per Saham Dasar dalam Rp Basic Earnings Per Share	25.459	26.426	22.755	5.365	4.058

Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain | In millions of Rupiah, unless otherwise stated

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS

Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Cash Flows From Operating Activities	670.364	88.197	1.007.468	317.591	207.140
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Cash Flows From Investing Activities	(16.148)	(55.062)	(126.778)	(46.290)	406.611
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows From Financing Activities	(34.050)	20.667	(4.624)	8.542	4.196
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalent	620.166	53.802	876.066	279.843	617.947
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Beginning Balance Cash and Cash Equivalent	3.494.573	3.440.771	2.564.705	2.284.862	1.666.915
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Ending Balance Cash and Cash Equivalent	4.114.739	3.494.573	3.440.771	2.564.705	2.284.862

Dalam jutaan Rupiah | In millions of Rupiah

RASIO KEUANGAN

FINANCIAL RATIO

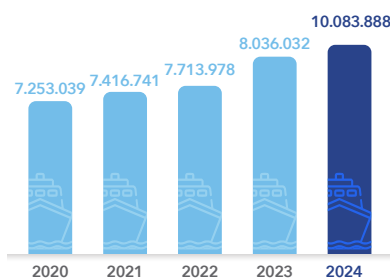
Uraian Description	2024	2023	2022	2021	2020
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio					
Rasio Lancar Current Ratio	501,68	500,08	516,16	541,90	581,93
Rasio Kas Cash Ratio	289,21	345,23	389,05	337,06	351,99
Rasio Cepat Quick Ratio	298,05	356,97	397,45	413,04	395,30
Rasio Leverage Leverage Ratio					
Rasio Liabilitas atas Aset Debt-to-Assets Ratio	15,48	15,09	13,33	13,40	12,03
Rasio Liabilitas atas Ekuitas Debt-to-Equity Ratio	18,31	17,77	15,38	15,47	13,67
Rasio Liabilitas Jangka Panjang atas Ekuitas Long-Term Liabilities to Equity Ratio	1,62	2,93	2,15	3,62	3,50
Rasio Aktivitas Activity Ratio					
Rasio Perputaran Persediaan (dalam satuan kali) Turnover Ratio (in times)	14	14	12	10	9
Rasio Perputaran Aset Asset Turnover Ratio	68,18	73,23	64,86	59,04	58,22
Rasio Penagihan Rata-rata (dalam satuan hari) Average Collection Ratio (in days)	7	8	6	49	25
Rasio Profitabilitas Profitability Ratio					
Laba (Rugi) Terhadap Jumlah Aset Return on Assets	1,93	2,51	2,25	0,55	0,43
Laba (Rugi) Terhadap Ekuitas Return on Equity	2,28	2,95	2,60	0,64	0,49
Imbalan terhadap Investasi Return on Investment	8,24	10,97	9,47	7,17	7,17
Margin Laba Kotor atas Penjualan Gross Profit Margin	16,95	15,13	16,06	10,45	10,06
Margin Laba Bersih atas Penjualan Net Profit Margin on Sales	3,14	3,50	3,54	0,95	0,74
Rasio EBITDA atas Aset EBITDA on Asset Ratio	7,07	9,59	8,39	6,43	6,52

IKHTISAR OPERASI OPERATIONAL HIGHLIGHTS

Perihal Subject	Satuan Unit	2024	2023	2022	2021	2020
Kapal yang Dioperasikan Ships Operated	Kapal Ships	82	102	106	106	112
Gross Register Tonnage (GRT)	Ton	329.095	356.174	384.886	384.886	366.734
Commission Days	Hari Day	20.358	23.974	25.008	22.880	19.068
Frekuensi Voyage Voyage Frequency	Voyage	1.573	1.091	1.879	1.625	1.388
Jumlah Penumpang Total Passenger	Orang Person	5.095.725	5.262.689	4.241.357	2.284.089	2.000.056
Jumlah Muatan Barang Total Cargo Load	Ton/m ³	115.338	139.283	127.398	100.287	76.808
Jumlah Muatan Container Total Container Load	TEUs	23.117	24.758	25.782	24.387	20.633
Jumlah Kendaraan Total Kendaraan Load	Unit	11.146	11.339	12.886	10.870	10.199
Jumlah Muatan Red Pack Total Red Pack Load	Kg	1.085.168	992.122	967.080		
Jumlah Muatan Hewan Ternak Total Cattle Load	Ekor Tail	4.699	7.308	7.886	7.374	6.608

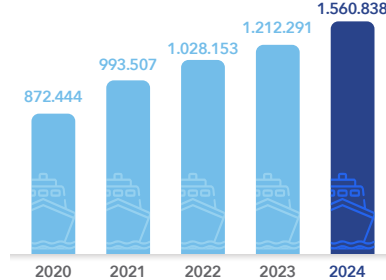
GRAFIK IKHTISAR KEUANGAN FINANCIAL SUMMARY CHART

Jumlah Aset
Total Assets



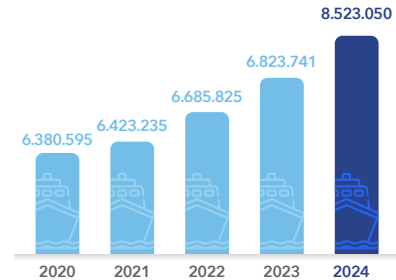
Dalam jutaan Rupiah | In millions of Rupiah

Jumlah Liabilitas
Total Liabilities



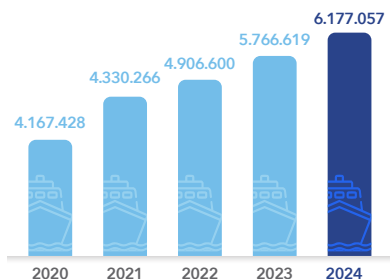
Dalam jutaan Rupiah | In millions of Rupiah

Jumlah Ekuitas
Total Equity



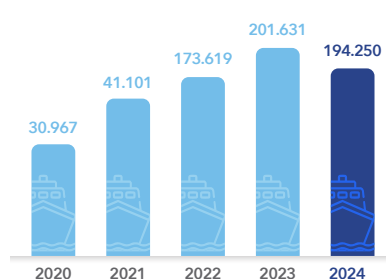
Dalam jutaan Rupiah | In millions of Rupiah

Pendapatan Usaha Bersih
Operating Revenues, Netto



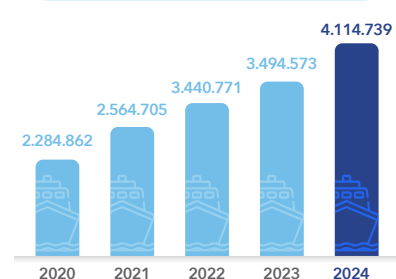
Dalam jutaan Rupiah | In millions of Rupiah

Laba Tahun Berjalan
Profit for the Current Year



Dalam jutaan Rupiah | In millions of Rupiah

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun
Ending Balance Cash and Cash
Equivalent



Dalam jutaan Rupiah | In millions of Rupiah

IKHTISAR SAHAM STOCK HIGHLIGHTS

Perseroan beroperasi dengan modal dasar sejumlah 13.000.000 saham dengan nominal Rp1.000.000,- per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sejumlah 7.629.900 saham, dengan nominal Rp7.629.900.000.000,-. Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan tidak melakukan pencatatan saham pada bursa mana pun. Sehingga tidak terdapat informasi terkait:

1. Jumlah saham yang beredar;
2. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan;
3. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan
4. Volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan.

The Company operates with an authorized capital of 13,000,000 shares, each with a nominal value of Rp1,000,000. As of December 31, 2024, and 2023, the Company's issued and fully paid capital consisted of 7,629,900 shares, with a nominal value of Rp7,629,900,000,000. As of December 31, 2024, the Company had not listed its shares on any stock exchange. Consequently, there is no information available regarding:

1. Number of outstanding shares;
2. Market capitalization based on stock exchange prices where the shares are listed;
3. The highest, lowest, and closing stock prices based on stock exchange prices where the shares are listed; and
4. The trading volume on stock exchanges where the shares are listed.

AKSI KORPORASI CORPORATE ACTIONS

Pada tahun 2024, tidak terdapat aksi korporasi.

In 2024, there were no corporate actions.

INFORMASI OBLIGASI, SUKUK, DAN/ATAU OBLIGASI KONVERSI INFORMATION ON BONDS, SUKUK, AND/OR CONVERTIBLE BONDS

Hingga akhir tahun 2024, Perusahaan tidak pernah menerbitkan obligasi/sukuk/obligasi konversi, maupun efek bersifat utang lainnya, baik yang bersifat publik maupun privat.

As of the end of 2024, the Company has never issued bonds, sukuk, convertible bonds, or any other debt securities, whether public or private.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI AWARD AND CERTIFICATION

PENGHARGAAN

Awards



21 Maret 2024
March 21, 2024

Best CEO Awards 2024 in Shipping Category
Indonesia Best CEO Awards 2024 by Iconomics



28 Maret 2024
March 28, 2024

TOP Digital Corporate Brand - Special Achievement For BUMN, Subsidiary BUMN & BUMND

5th TOP Digital Corporate Brand Award by Info Ekonomi ID



4 April 2024
April 4, 2024

The Best Planning and Portfolio 2024
Digitech Awards by Itch



4 April 2024
April 4, 2024

The Best Women Digital Leader of The Year
Digitech Awards by Itch



25 Januari 2024
January 25, 2024

Best CFO Award 2024
Indonesia Best CFO Awards 2024 by Itch



4 April 2024
April 4, 2024

Penghargaan Pelaksanaan Angkutan Lebaran 2024

Kementerian Perhubungan RI

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

AWARD AND CERTIFICATION



17 Oktober 2024
October 17, 2024

**Tokoh Perempuan Transformasi Bisnis
Pelayanan pada kategori Tokoh Inspirasi Publik
BUMN Detikcom Awards 2024**

Detikcom Awards 2024



16 September 2024
September 16, 2024

Nawacita Awards 2024
Kategori Perintis Transportasi Nusantara



21 November 2024
November 21, 2024

**THE 20th Asia Sustainability Reporting Rating
(ASSRAT) 2024 (Gold Rank)**

Asia Sustainability Reporting Rating



8 November 2024
November 8, 2024

**Outstanding Woman Figure in Shipping
Transformation**

Bisnis Indonesia Logistic Awards 2024



5 Desember 2024
December 5, 2024

Top Digital Implementation 2024
TOP IT Awards 2024 by Majalah It Works



13 Desember 2024
December 13, 2024

BPH Migas Awards 2024
Transportasi Khusus (Angkutan Umum
Penumpang/ Barang) Terbaik Dalam Perencanaan
dan Pemanfaatan

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

AWARD AND CERTIFICATION



The Best Indonesia Woman Leader 2024

Iwola Conference dan Awarding by
Economic Review



Best Usage of UGC Heroes

Marketers Digital Marketing Heroes



Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024

Badan Publik Informatif Kategori BUMN



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

AWARD AND CERTIFICATION

SERTIFIKASI KAPAL

SHIP CERTIFICATION

Data Sertifikat Kapal Penumpang Tahun 2024 | Passenger Ship Certificate Data In 2024

No	Nama Kapal Ship Name	Sertifikat Garis Muat Load Line Certificate			Nomor Sertifikat Certificate Number	
		Nomor Sertifikat Certificate Number	Tanggal Date			
			Dikeluarkan Issued	Jatuh Tempo Due		
1	KM AWU	34108	6 April 2021 April 6, 2021	8 Juni 2026 June 8, 2026	51610	
2	KM BUKIT RAYA	40415	20 Oktober 2023 October 20, 2023	30 Desember 2028 December 30, 2028	60173	
3	KM BINAIYA	28870	3 Mei 2019 May 3, 2019	21 Juni 2024 June 21, 2024	43688	
4	KM BUKIT SIGUNTANG	34091	5 April 2021 April 5, 2021	23 Mei 2026 May 23, 2026	051031	
5	KM CIREMAI	039851	15 Agustus 2023 August 15, 2023	1 Agustus 2028 August 1, 2028	01099-TP	
6	KM DOBONSOLO	039102	19 Mei 2023 May 19, 2023	10 Maret 2028 March 10, 2028	00245-TP	
7	KM DOROLONDA	36582	20 Mei 2022 May 20, 2022	11 Juli 2026 July 11, 2026	52470	
8	KM EGON	15362	10 Juli 2020 July 10, 2020	29 Juni 2025 June 29, 2025	48726	
9	KM G DEMPO	039431	27 Juni 2023 June 27, 2023	20 Juni 2028 June 20, 2028	40449	
10	KM KELIMUTU	31321	20 Maret 2020 March 20, 2020	4 Februari 2025 February 4, 2025	47123	
11	KM KELUD	40448	30 Oktober 2023 October 30, 2023	28 September 2028 September 28, 2028	42499	
12	KM LAWIT	030400	18 November 2019 November 18, 2019	31 Agustus 2024 August 31, 2024	45892	
13	KM LEUSER	039464	4 Juli 2023 July 4, 2023	28 Mei 2028 May 28, 2028	41031	
14	KM LAMBELU	36234	22 Maret 2022 March 22, 2022	15 Mei 2027 May 15, 2027	54120	
15	KM LABOBAR	29317	1 Juli 2019 July 1, 2019	26 Juni 2024 June 26, 2024	44340	
16	KM NGGAPULU	36381	17 April 2022 April 17, 2022	5 April 2027 April 5, 2027	55345	
17	KM PANGRANGO	36185	12 Maret 2022 March 12, 2022	9 November 2026 November 9, 2026	53502	
18	KM SIRIMAU	32093	9 Juni 2020 June 9, 2020	17 Mei 2025 May 17, 2025	48091	
19	KM SINABUNG	36585	19 Mei 2022 May 19, 2022	18 April 2027 April 18, 2027	54327	
20	KM SANGIANG	35346	28 Oktober 2021 October 28, 2021	12 Mei 2024 May 12, 2024	43477	

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

AWARD AND CERTIFICATION

	Sertifikat Lambung Hull Certificate		Sertifikat Mesin Engine Certificate			Penerbit
	Tanggal Date		Nomor Sertifikat Certificate Number	Tanggal Date		
	Dikeluarkan Issued	Jatuh Tempo Due		Dikeluarkan Issued	Jatuh Tempo Due	
	12 Agustus 2021 August 12, 2021	8 Juni 2026 June 8, 2026	33783	12 Agustus 2021 August 12, 2021	8 Juni 2026 June 8, 2026	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	4 Februari 2024 February 4, 2024	30 Desember 2028 December 30, 2028	39325	4 Februari 2024 February 4, 2024	30 Desember 2028 December 30, 2028	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	3 Mei 2019 May 3, 2019	21 September 2024 September 21, 2024	28506	3 Mei 2019 May 3, 2019	21 September 2024 September 21, 2024	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	27 Mei 2021 May 27, 2021	23 Mei 2026 May 23, 2026	033434	27 Mei 2021 May 27, 2021	23 Mei 2026 May 23, 2026	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	14 Agustus 2023 August 14, 2023	16 Juli 2024 July 16, 2024	01099-TP	14 Agustus 2023 August 14, 2023	16 Juli 2024 July 16, 2024	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	24 Februari 2023 February 24, 2023	10 Juli 2024 July 10, 2024	00245-TP	24 Februari 2023 February 24, 2023	10 Juli 2024 July 10, 2024	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	18 November 2021 November 18, 2021	11 Juli 2026 July 11, 2026	34351	18 November 2021 November 18, 2021	11 Juli 2026 July 11, 2026	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	19 Agustus 2020 August 19, 2020	29 Juni 2025 June 29, 2025	31953	19 Agustus 2020 August 19, 2020	29 Juni 2025 June 29, 2025	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	31 Agustus 2023 August 31, 2023	7 Juni 2024 June 7, 2024	26683	31 Agustus 2018 August 31, 2018	7 Juni 2024 June 7, 2024	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	20 Maret 2020 March 20, 2020	4 Februari 2025 February 4, 2025	30856	20 Maret 2020 March 20, 2020	4 Februari 2025 February 4, 2025	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	1 Februari 2019 February 1, 2019	14 September 2024 September 14, 2024	27678	1 Februari 2019 February 1, 2019	14 September 2024 September 14, 2024	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	18 November 2019 November 18, 2019	31 Agustus 2024 August 31, 2024	30012	18 November 2019 November 18, 2019	31 Agustus 2024 August 31, 2024	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	13 Maret 2024 March 13, 2024	12 Juni 2024 June 12, 2024	26669	13 Maret 2024 March 13, 2024	12 Juni 2024 June 12, 2024	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	28 Mei 2022 May 28, 2022	15 Mei 2027 May 15, 2027	35466	28 Mei 2022 May 28, 2022	15 Mei 2027 May 15, 2027	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	1 Juli 2019 July 1, 2019	26 Juni 2024 June 26, 2024	28953	1 Juli 2019 July 1, 2019	26 Juni 2024 June 26, 2024	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	8 Oktober 2022 October 8, 2022	5 April 2027 April 5, 2027	36229	8 Oktober 2022 October 8, 2022	5 April 2027 April 5, 2027	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	12 Maret 2022 March 12, 2022	9 November 2026 November 9, 2026	35003	12 Maret 2022 March 12, 2022	9 November 2026 November 9, 2026	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	9 Juni 2020 June 9, 2020	17 Mei 2025 May 17, 2025	31524	9 Juni 2020 June 9, 2020	17 Mei 2025 May 17, 2025	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	20 Juni 2022 June 20, 2022	19 Agustus 2024 August 19, 2027	35558	20 Juni 2022 June 20, 2022	18 April 2027 April 18, 2027	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	18 April 2019 April 18, 2019	12 Mei 2024 May 12, 2024	28372	18 April 2019 April 18, 2019	12 Mei 2024 May 12, 2024	PT Biro Klasifikasi Indonesia



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

AWARD AND CERTIFICATION

Data Sertifikat Kapal Penumpang Tahun 2024 | Passenger Ship Certificate Data In 2024

No	Nama Kapal Ship Name	Sertifikat Garis Muat Load Line Certificate			Nomor Sertifikat Certificate Number	
		Nomor Sertifikat Certificate Number	Tanggal Date			
			Dikeluarkan Issued	Jatuh Tempo Due		
21	KM TILONGKABILA	31651	30 April 2020 April 30, 2020	4 Maret 2025 March 4, 2025	47545	
22	KM TATAMAILAU	31469	7 April 2020 April 7, 2020	25 Maret 2025 March 25, 2025	47312	
23	KM TIDAR	36417	20 April 2022 April 20, 2022	26 November 2026 November 26, 2026	54374	
24	KM UMSINI	31745	30 April 2020 April 30, 2020	31 Maret 2025 March 31, 2025	47672	
25	KM WILIS	31662	23 April 2020 April 23, 2020	25 Oktober 2024 October 25, 2024	47565	
26	KM JET LINER	40300	9 Oktober 2023 October 9, 2023	4 Juni 2028 June 4, 2028	42713	

Data Sertifikat Kapal Ternak Tahun 2024 | Cattle Ship Certificate Data In 2024

No	Nama Kapal Ship Name	Sertifikat Garis Muat Load Line Certificate			Nomor Sertifikat Certificate Number	
		Nomor Sertifikat Certificate Number	Tanggal Date			
			Dikeluarkan Issued	Jatuh Tempo Due		
1	KM KENDHAGA NUSANTARA	15755	16 November 2020 November 16, 2020	23 November 2025 November 23, 2025	50468	

Data Sertifikat Kapal Tol Laut Tahun 2024 | Sea Toll Ship Certificate Data In 2024

No	Nama Kapal Ship Name	Sertifikat Garis Muat Load Line Certificate			Nomor Sertifikat Certificate Number	
		Nomor Sertifikat Certificate Number	Tanggal Date			
			Dikeluarkan Issued	Jatuh Tempo Due		
1	KM LOGISTIK NUSANTARA 1	34249	26 April 2021 April 26, 2021	24 April 2029 April 24, 2029	51137	
2	KM LOGISTIK NUSANTARA 2	40182	28 September 2023 September 28, 2023	16 September 2027 September 16, 2027	58758	
3	KM LOGISTIK NUSANTARA 3	29530	25 Juli 2019 July 25, 2019	3 Juli 2024 July 3, 2024	44651	
4	KM LOGISTIK NUSANTARA 4	039611	25 Juli 2019 July 25, 2019	4 Juni 2028 June 4, 2028	60018	
5	KM LOGISTIK NUSANTARA 5	039513	12 Juli 2023 July 12, 2023	10 Februari 2028 February 10, 2028	58801	
6	KM LOGISTIK NUSANTARA 6	32476	14 Agustus 2020 August 14, 2020	30 Juli 2025 July 30, 2025	48771	



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

AWARD AND CERTIFICATION

	Sertifikat Lambung Hull Certificate		Sertifikat Mesin Engine Certificate			Penerbit
	Tanggal Date		Nomor Sertifikat Certificate Number	Tanggal Date		
	Dikeluarkan Issued	Jatuh Tempo Due		Dikeluarkan Issued	Jatuh Tempo Due	
	30 April 2020 April 30, 2020	4 Maret 2025 March 4, 2025	31139	30 April 2020 April 30, 2020	4 Maret 2025 March 4, 2025	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	7 April 2020 April 7, 2020	25 Maret 2025 March 25, 2025	30982	7 April 2020 April 7, 2020	25 Maret 2025 March 25, 2025	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	27 Juni 2022 June 27, 2022	26 November 2026 November 26, 2026	35612	27 Juni 2020 June 27, 2020	26 November 2026 November 26, 2026	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	30 April 2020 April 30, 2020	31 Maret 2025 March 31, 2025	31242	30 April 2020 April 30, 2020	31 Maret 2025 March 31, 2025	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	23 April 2020 April 23, 2020	25 Oktober 2024 October 25, 2024	31156	23 April 2020 April 23, 2020	25 Oktober 2024 October 25, 2024	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	18 Februari 2019 February 18, 2019	27 Mei 2024 May 27, 2024	27818	18 Februari 2019 February 18, 2019	27 Mei 2024 May 27, 2024	PT Biro Klasifikasi Indonesia

	Sertifikat Lambung Hull Certificate		Sertifikat Mesin Engine Certificate			Penerbit
	Tanggal Date		Nomor Sertifikat Certificate Number	Tanggal Date		
	Dikeluarkan Issued	Jatuh Tempo Due		Dikeluarkan Issued	Jatuh Tempo Due	
	13 Maret 2021 March 13, 2021	23 November 2025 November 23, 2025	33066	13 Maret 2021 March 13, 2021	23 November 2025 November 23, 2025	PT Biro Klasifikasi Indonesia

	Sertifikat Lambung Hull Certificate		Sertifikat Mesin Engine Certificate			Penerbit
	Tanggal Date		Nomor Sertifikat Certificate Number	Tanggal Date		
	Dikeluarkan Issued	Jatuh Tempo Due		Dikeluarkan Issued	Jatuh Tempo Due	
	7 Juni 2021 June 7, 2021	24 April 2029 April 24, 2029	33508	7 Juni 2021 June 7, 2021	24 April 2026 April 24, 2026	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	26 September 2023 September 28, 2023	16 September 2027 September 16, 2027	38424	28 September 2023 September 28, 2023	16 September 2027 September 16, 2027	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	25 Juli 2019 July 25, 2019	3 Juli 2024 July 3, 2024	29163	25 Juli 2019 July 25, 2019	3 Juli 2024 July 3, 2024	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	17 Januari 2024 January 17, 2024	4 Juni 2028 June 4, 2028	39241	17 Januari 2024 January 17, 2024	4 Juni 2028 June 4, 2028	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	29 September 2023 September 29, 2023	10 Februari 2028 February 10, 2028	38419	29 September 2023 September 29, 2023	10 Februari 2028 February 10, 2028	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	26 Agustus 2020 August 26, 2020	30 Juli 2025 July 30, 2025	31981	26 Agustus 2020 August 26, 2020	30 Juli 2025 July 30, 2025	PT Biro Klasifikasi Indonesia



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

AWARD AND CERTIFICATION

Data Sertifikat Kapal Perintis Tahun 2024 | Pioneer Ship Certificate Data In 2024

No	Nama Kapal Ship Name	Sertifikat Garis Muat Load Line Certificate			Nomor Sertifikat Certificate Number	
		Nomor Sertifikat Certificate Number	Tanggal Date			
			Dikeluarkan Issued	Jatuh Tempo Due		
1	KM SABUK NUSANTARA 48	15193	2 Juni 2020 June 2, 2020	22 Januari 2025 January 22, 2025	48005	
2	KM SABUK NUSANTARA 42	14631	17 Januari 2020 January 17, 2020	31 Desember 2024 December 31, 2024	46518	
3	KM SABUK NUSANTARA 52	14561	20 Desember 2019 December 20, 2019	26 Januari 2025 January 26, 2025	46256	
4	KM SABUK NUSANTARA 53	15240	10 Juni 2020 June 10, 2020	5 Desember 2024 December 5, 2024	48127	
5	KM SABUK NUSANTARA 58	16586	7 Oktober 2021 October 7, 2021	27 Juni 2026 June 27, 2026	52546	
6	KM SABUK NUSANTARA 63	16611	21 Oktober 2021 October 21, 2021	7 Oktober 2026 October 7, 2026	52485	
7	KM SABUK NUSANTARA 80	017572	10 Oktober 2022 October 10, 2022	8 Oktober 2027 October 8, 2027	05538	
8	KM SABUK NUSANTARA 85	018278	5 Juni 2023 June 5, 2023	22 Januari 2028 January 22, 2028	057611	
9	KM SABUK NUSANTARA 86	018373	11 Juli 2023 July 11, 2023	5 April 2028 April 5, 2028	59337	
10	KM SABUK NUSANTARA 95	018283	8 Juni 2023 June 8, 2023	21 Maret 2028 March 21, 2028	058127	
11	KM SABUK NUSANTARA 96	18002	23 Maret 2023 March 23, 2023	30 April 2028 April 30, 2028	058601	
12	KM SABUK NUSANTARA 97	018393	17 Juli 2023 July 17, 2023	21 Maret 2028 March 21, 2028	45126	
13	KM SABUK NUSANTARA 98	058366	13 Juli 2023 July 13, 2023	13 April 2028 April 13, 2028	41914	
14	KM SABUK NUSANTARA 100	018453	1 Agustus 2023 August 1, 2023	8 Maret 2028 March 8, 2028	58880	
15	KM SABUK NUSANTARA 106	18709	5 Oktober 2023 October 5, 2023	13 April 2028 April 13, 2028	58938	
16	KM SABUK NUSANTARA 112	18618	12 September 2023 September 12, 2023	27 April 2028 April 27, 2028	58662	
17	KM SABUK NUSANTARA 104	018565	5 September 2023 September 5, 2023	20 April 2028 April 20, 2028	58894	
18	KM SABUK NUSANTARA 105	018378	7 Desember 2023 December 7, 2023	24 April 2028 April 24, 2028	58975	
19	KM SABUK NUSANTARA 81	017890	2 Februari 2023 February 2, 2023	26 Oktober 2027 October 26, 2027	056353	

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

AWARD AND CERTIFICATION

	Sertifikat Lambung Hull Certificate		Sertifikat Mesin Engine Certificate			Keterangan Description
	Tanggal Date		Nomor Sertifikat Certificate Number	Tanggal Date		
	Dikeluarkan Issued	Jatuh Tempo Due		Dikeluarkan Issued	Jatuh Tempo Due	
	2 Juni 2020 June 2, 2020	22 Januari 2025 January 22, 2025	31463	2 Juni 2020 June 2, 2020	22 Januari 2025 January 22, 2025	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	17 Januari 2020 January 17, 2020	31 Desember 2024 December 31, 2024	30433	17 Januari 2020 January 17, 2020	31 Desember 2024 December 31, 2024	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	20 Desember 2019 December 20, 2019	26 Januari 2025 January 26, 2025	30269	20 Desember 2019 December 20, 2019	26 Januari 2025 January 26, 2025	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	10 Juni 2020 June 10, 2020	5 Desember 2024 December 5, 2024	31548	10 Juni 2020 June 10, 2020	5 Desember 2024 December 5, 2024	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	16 November 2021 November 16, 2021	27 Juni 2026 June 27, 2026	34317	16 November 2021 November 16, 2021	27 Juni 2026 June 27, 2026	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	23 November 2021 November 23, 2021	7 Oktober 2026 October 7, 2026	34338	23 November 2021 November 23, 2021	7 Oktober 2026 October 7, 2026	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	13 Oktober 2022 October 13, 2022	8 Oktober 2027 October 8, 2027	036257	13 Oktober 2022 October 13, 2022	8 Oktober 2027 October 8, 2027	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	26 Juni 2023 June 26, 2023	22 Januari 2028 January 22, 2028	037668	26 Juni 2023 June 26, 2023	22 Januari 2028 January 22, 2028	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	14 November 2023 November 14, 2023	5 April 2028 April 5, 2028	38787	14 November 2023 November 14, 2023	5 April 2028 April 5, 2028	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	9 Agustus 2023 August 9, 2023	21 Maret 2028 March 21, 2028	037988	9 Agustus 2023 August 9, 2023	21 Maret 2028 March 21, 2028	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	13 September 2023 September 13, 2023	30 April 2028 April 30, 2028	038313	13 September 2023 September 13, 2023	30 April 2028 April 30, 2028	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	30 Agustus 2023 August 30, 2023	21 Maret 2028 March 21, 2028	29482	30 Agustus 2019 August 30, 2019	21 Maret 2028 March 21, 2028	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	24 Agustus 2023 August 24, 2023	13 April 2028 April 13, 2028	27269	24 Agustus 2023 August 24, 2023	13 April 2028 April 13, 2028	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	3 Oktober 2023 October 3, 2023	8 Maret 2028 March 8, 2028	38482	3 Oktober 2023 October 3, 2023	28 Maret 2028 March 28, 2028	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	5 Oktober 2023 October 5, 2023	13 April 2028 / April 13, 2028	38536	5 Oktober 2023 October 5, 2023	13 Oktober 2028 October 13, 2028	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	12 September 2023 September 12, 2023	27 April 2028 April 27, 2028	38360	12 September 2023 September 12, 2023	27 April 2028 April 27, 2028	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	4 Oktober 2023 October 4, 2023	20 April 2028 April 20, 2028	38505	4 Oktober 2023 October 4, 2023	20 April 2028 April 20, 2028	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	12 Oktober 2023 October 12, 2023	24 April 2028 April 24, 2028	38562	12 Oktober 2023 October 12, 2023	24 April 2028 April 24, 2028	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	2 Februari 2023 February 2, 2023	26 Oktober 2027 October 26, 2027	036902	2 Februari 2023 February 2, 2023	26 Oktober 2027 October 26, 2027	PT Biro Klasifikasi Indonesia



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

AWARD AND CERTIFICATION

Data Sertifikat Kapal Perintis Tahun 2024 | Pioneer Ship Certificate Data In 2024

No	Nama Kapal Ship Name	Sertifikat Garis Muat Load Line Certificate			Nomor Sertifikat Certificate Number	
		Nomor Sertifikat Certificate Number	Tanggal Date			
			Dikeluarkan Issued	Jatuh Tempo Due		
20	KM SABUK NUSANTARA 68	18697	4 Oktober 2023 October 4, 2023	1 Agustus 2028 August 1, 2028	68886	
21	KM SABUK NUSANTARA 93	18424	24 Juli 2023 July 24, 2023	12 Juli 2028 July 12, 2028	58244	
22	KM SABUK NUSANTARA 92	18577	8 September 2023 September 8, 2023	10 Agustus 2028 August 10, 2028	59205	
23	KM SABUK NUSANTARA 69	19122	16 Januari 2024 January 16, 2024	14 November 2028 November 14, 2028	60284	
24	KM SABUK NUSANTARA 94	18590	9 September 2023 September 9, 2023	12 Juli 2028 July 12, 2028	59055	
25	KM SABUK NUSANTARA 71	018044	3 April 2023 April 3, 2023	27 Februari 2028 February 27, 2028	056826	
26	KM SABUK NUSANTARA 78	018180	12 Mei 2023 May 12, 2023	7 Maret 2028 March 7, 2028	59395	
27	KM SABUK NUSANTARA 75	14108	21 Agustus 2019 August 21, 2019	14 Mei 2024 May 14, 2024	45003	
28	KM SABUK NUSANTARA 90	18756	17 Oktober 2023 October 17, 2023	19 Desember 2028 December 19, 2028	59837	
29	KM SABUK NUSANTARA 91	19243	19 Februari 2024 February 19, 2024	27 Februari 2029 February 27, 2029	44274	
30	KM SABUK NUSANTARA 108	18818	7 November 2023 November 7, 2023	6 Agustus 2028 August 6, 2028	48755	

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

AWARD AND CERTIFICATION

	Sertifikat Lambung Hull Certificate		Sertifikat Mesin Engine Certificate			Keterangan Description
	Tanggal Date		Nomor Sertifikat Certificate Number	Tanggal Date		
	Dikeluarkan Issued	Jatuh Tempo Due		Dikeluarkan Issued	Jatuh Tempo Due	
	4 Oktober 2023 October 4, 2023	1 Agustus 2028 August 1, 2028	38494	4 Oktober 2023 October 4, 2023	1 Agustus 2028 August 1, 2028	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	16 Agustus 2023 August 16, 2023	12 Juli 2028 July 12, 2028	38063	16 Agustus 2023 August 16, 2023	12 Juli 2028 July 12, 2028	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	2 November 2023 November 2, 2023	10 Agustus 2028 August 10, 2028	38704	2 November 2023 November 2, 2023	10 Agustus 2028 August 10, 2028	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	16 Februari 2024 February 16, 2024	14 November 2028 November 14, 2028	39398	16 Februari 2024 February 16, 2024	14 November 2028 November 14, 2028	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	19 Oktober 2023 October 19, 2023	12 Juli 2028 July 12, 2028	38604	19 Oktober 2023 October 19, 2023	12 Juli 2028 July 12, 2028	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	31 Maret 2023 March 31, 2023	27 Februari 2028 February 27, 2028	037186	31 Maret 2023 March 31, 2023	27 Februari 2028 February 27, 2028	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	23 November 2023 November 23, 2023	7 Maret 2028 March 7, 2028	38832	23 November 2023 November 23, 2023	7 Maret 2028 March 7, 2028	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	21 Agustus 2019 August 21, 2019	14 Agustus 2024 August 14, 2024	29408	21 Agustus 2019 August 21, 2019	14 Agustus 2024 August 14, 2024	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	4 Januari 2024 January 4, 2024	19 Desember 2028 December 19, 2028	39116	4 Januari 2024 January 4, 2024	19 Desember 2028 December 19, 2028	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	20 Juni 2019 June 20, 2019	14 Agustus 2024 August 14, 2024	28906	20 Juni 2019 June 20, 2019	14 Agustus 2024 August 14, 2024	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	27 Agustus 2020 August 27, 2020	6 Agustus 2024 August 6, 2024	31986	27 Agustus 2020 August 27, 2020	6 Agustus 2024 August 6, 2024	PT Biro Klasifikasi Indonesia





PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

AWARD AND CERTIFICATION

Data Sertifikat Kapal Perintis Tahun 2024 | Pioneer Ship Certificate Data In 2024

No	Nama Kapal Ship Name	Sertifikat Garis Muat Load Line Certificate			Nomor Sertifikat Certificate Number	
		Nomor Sertifikat Certificate Number	Tanggal Date			
			Dikeluarkan Issued	Jatuh Tempo Due		
1	KM. Gandha Nusantara 4	17347	5 Juli 2022 July 5, 2022	22 Juni 2027 June 22, 2027	54892	
2	KM. Gandha Nusantara 7	17594	18 Oktober 2022 October 18, 2022	26 Juli 2027 July 26, 2027	55408	
3	KM. Gandha Nusantara 8	17593	19 Oktober 2022 October 19, 2022	19 Oktober 2022 October 19, 2022	55741	
4	KM. Gandha Nusantara 10	17280	14 Juni 2022 June 14, 2022	22 Juni 2027 June 22, 2027	55341	
5	KM. Gandha Nusantara 15	16884	28 Januari 2022 January 28, 2022	28 Januari 2027 January 28, 2027	53580	
6	KM. Gandha Nusantara 16	17192	15 Mei 2022 May 15, 2022	25 Maret 2027 March 25, 2027	54006	
7	KM. Gandha Nusantara 13	14985	17 April 2020 April 17, 2020	27 Februari 2025 February 27, 2025	47453	
8	KM. Gandha Nusantara 18	14986	17 April 2020 April 17, 2020	10 Maret 2025 March 10, 2025	47454	
9	KM. Gandha Nusantara 6	14603	7 Januari 2020 January 7, 2020	15 Juli 2024 July 15, 2024	46402	
10	KM. Gandha Nusantara 9	18420	24 Juli 2023 July 24, 2023	22 Juni 2027 June 22, 2027	57805	
11	KM. Gandha Nusantara 12	017818	13 Januari 2023 January 13, 2023	22 Juni 2027 June 22, 2027	056161	
12	KM. Gandha Nusantara 19	17068	24 Februari 2022 February 24, 2022	24 Februari 2027 February 24, 2027	53672	
13	KM. Gandha Nusantara 20	17186	4 Mei 2022 May 4, 2022	24 Februari 2027 February 24, 2027	53970	
14	KM. Gandha Nusantara 5	15082	5 Mei 2020 May 5, 2020	10 Maret 2025 March 10, 2025	47726	
15	KM. Gandha Nusantara 14	14827	17 Maret 2020 March 17, 2020	19 Februari 2025 February 19, 2025	47058	
16	KM. Gandha Nusantara 17	15048	28 April 2020 April 28, 2020	20 Maret 2025 March 20, 2025	47612	



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

AWARD AND CERTIFICATION

	Sertifikat Lambung Hull Certificate		Sertifikat Mesin Engine Certificate			Keterangan Description
	Tanggal Date		Nomor Sertifikat Certificate Number	Tanggal Date		
	Dikeluarkan Issued	Jatuh Tempo Due		Dikeluarkan Issued	Jatuh Tempo Due	
	21 Agustus 2022 August 21, 2022	22 Juni 2027 June 22, 2027	35932	21 Agustus 2022 August 21, 2022	22 Juni 2027 June 22, 2027	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	18 Oktober 2022 October 18, 2022	26 Juli 2027 July 26, 2027	36275	18 Oktober 2022 October 18, 2022	26 Juli 2027 July 26, 2027	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	19 Oktober 2022 October 19, 2022	26 Juli 2027 July 26, 2027	36496	19 Oktober 2022 October 19, 2022	26 Juli 2027 July 26, 2027	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	10 Oktober 2022 October 10, 2022	22 Juni 2027 June 22, 2027	36226	10 Oktober 2022 October 10, 2022	22 Juni 2027 June 22, 2027	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	17 Maret 2022 March 17, 2022	28 Januari 2027 January 28, 2027	35055	17 Maret 2022 March 17, 2022	28 Januari 2027 January 28, 2027	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	15 Mei 2022 May 15, 2022	25 Maret 2027 March 25, 2027	35387	15 Mei 2022 May 15, 2022	25 Maret 2027 March 25, 2027	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	17 April 2020 April 17, 2020	27 Februari 2025 February 27, 2025	31088	17 April 2020 April 17, 2020	27 Februari 2025 February 27, 2025	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	17 April 2020 April 17, 2020	10 Maret 2025 March 10, 2025	31089	17 April 2020 April 17, 2020	10 Maret 2025 March 10, 2025	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	7 Januari 2020 January 7, 2020	15 Juli 2024 July 15, 2024	30359	7 Januari 2020 January 7, 2020	15 Juli 2024 July 15, 2024	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	24 Juli 2023 July 24, 2023	22 Juni 2027 June 22, 2027	37782	24 Juli 2023 July 24, 2023	22 Juni 2027 June 22, 2027	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	12 Januari 2023 January 12, 2023	22 Juni 2027 June 22, 2027	036760	12 Januari 2023 January 12, 2023	22 Juni 2027 June 22, 2027	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	4 April 2022 April 4, 2022	24 Februari 2027 February 24, 2027	53672	4 April 2022 April 4, 2022	24 Februari 2027 February 24, 2027	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	4 Mei 2022 May 4, 2022	24 Februari 2027 February 24, 2027	35359	4 Mei 2022 May 4, 2022	24 Februari 2027 February 24, 2027	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	5 Mei 2020 May 5, 2020	10 Maret 2025 March 10, 2025	31282	5 Mei 2020 May 5, 2020	10 Maret 2025 March 10, 2025	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	17 Maret 2020 March 17, 2020	19 Februari 2025 February 19, 2025	30812	17 Maret 2020 March 17, 2020	19 Februari 2025 February 19, 2025	PT Biro Klasifikasi Indonesia
	28 April 2020 April 28, 2020	20 Maret 2025 March 20, 2025	31190	28 April 2020 April 28, 2020	22 Juni 2027 June 22, 2027	PT Biro Klasifikasi Indonesia



PERISTIWA PENTING 2024 2024 SIGNIFICANT EVENTS



📅 **2 Februari 2024**
February 2, 2024

Pembukaan Kongres GP Anshor di Tanjung Priok, Jakarta
Pembukaan Kongres GP Anshor di Tanjung Priok, Jakarta

The opening of the GP Anshor Congress in Tanjung Priok, Jakarta



📅 **20 Maret 2024**
March 20, 2024

Press Conference Angkutan Lebaran di Hotel Borobudur, Jakarta

Press Conference for Eid Homecoming Season at Borobudur Hotel, Jakarta



📅 **28 Maret 2024**
March 28, 2024

Talkshow Kesiapan Menjelang Mudik Lebaran Tahun 2024 di Gedung Tempo, Jakarta

Talk Show on 2024 Eid Homecoming Season Preparedness at Tempo Building, Jakarta



📅 **22 April 2024**
April 22, 2024

Before After KM Nggapulu & Awu



📅 **6 April 2024**
6 April 2024

Mudik Gratis PT PELNI (Persero) 2024 di Pelabuhan Tanjung Priok

PT PELNI (Persero)'s 2024 Free Eid Homecoming Program at Tanjung Priok



📅 **29 Mei 2024**
May 29, 2024

Audiensi PT PELNI (Persero) ke KASAL di Wisma Elang KASAL, Jakarta

Courtesy Meeting with the Indonesian Navy Chief of Staff at Wisma Elang, Jakarta



📅 **28 Mei 2024**
May 28, 2024

Audiensi PT PELNI (Persero) ke BPKP di Jakarta

Courtesy Meeting with BPKP in Jakarta



📅 **29 Mei 2024**
May 29, 2024

Penandatanganan & Penyerahan LHP BPK RI di Jakarta

Signing and Handover of the BPK RI Audit Report in Jakarta



📅 **1 Juni 2024**
June 1, 2024

Upacara Hari Lahir Pancasila di Kantor Pusat PT PELNI (Persero)

Commemoration Ceremony of Pancasila Day at PT PELNI (Persero) Head Office



📅 **5 Juni 2024**
June 5, 2024

Puncak HUT PT PELNI (Persero) 72 di Kompleks Olahraga Gelora Bung Karno, Jakarta

Peak Event of PT PELNI (Persero) 72nd Anniversary at Gelora Bung Karno Sports Complex in Jakarta



📅 **12 Juli 2024**
July 12, 2024

Serah Terima Perjanjian Jasa Pengangkutan Barang Berharga Milik Negara di Tanjung Priok, Jakarta

Handover Ceremony of the State-Owned Assets Transportation Agreement at Tanjung Priok, Jakarta



📅 **30 Juli 2024**
July 30, 2024

AKHLAK Fest 2024 - Town Hall Meeting 2024 & CEO Talk PT PELNI (Persero) di Kantor Pusat PT PELNI (Persero)

AKHLAK Fest 2024 - Town Hall Meeting & CEO Talk PT PELNI (Persero) at PT PELNI (Persero) Head Office



PERISTIWA PENTING 2024

2024 SIGNIFICANT EVENTS



 **16 Agustus 2024**
August 16, 2024

Serah Terima Jabatan Koordinator Perwira Penghubung Kantor Pusat di Jakarta

Handover Ceremony of the Headquarters Liaison Officer Coordinator Position in Jakarta



 **17 Agustus 2024**
August 17, 2024

Upacara HUT 79 RI PT PELNI (Persero) di Kantor Pusat PT PELNI (Persero)

Commemoration Ceremony of 79th Independence Day of Indonesia at PT PELNI (Persero)



 **30 Agustus 2024**
August 30, 2024

Festival Band Semarak Kemerdekaan RI di Kantor Pusat PT PELNI (Persero)

Independence Day Music Band Festival at Head Office



 **30 Agustus 2024**
August 30, 2024

Penandatanganan MoU dengan IDFOOD di Kantor Pusat PT PELNI (Persero)

MoU Signing with IDFOOD at PT PELNI (Persero) Head Office



 **2 September 2024**
September 2, 2024

MoU PT PELNI (Persero) & Patria Maritime Lines di Jakarta

Signing of Memorandum of Understanding Between PT PELNI (Persero) and Patria Maritime Lines in Jakarta



 **4-10 September 2024**
September 4-10, 2024

Pengoperasian KM Kelud Sebagai Akomodasi Terapung PON XXI Aceh-Sumut di Pelabuhan Malahayati, Aceh

Operation of KM Kelud as Floating Accommodation for XXI National Games (PON) Aceh-North Sumatra at Malahayati Port, Aceh



 **10-13 September 2024**
September 10-13, 2024

Rangkaian RAPIM PT PELNI (Persero) Semester 2 Tahun 2024 di Jakarta

Series of Management Coordination Meetings of PT PELNI (Persero) for the Second Semester of 2024



 **18 September 2024**
September 18, 2024

Penandatanganan dengan Meratus

Signing Ceremony of Partnership Agreement with Meratus



 **20 September 2024**
September 20, 2024

Seremonial Pemusnahan Arsip PT PELNI (Persero) di Kantor Pusat PT PELNI (Persero)

Records Disposal Ceremony at PT PELNI (Persero) Headquarter



 **23 September 2024**
September 23, 2024

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama PT PELNI (Persero) & BRI di Kantor BRILink, Jakarta

Signing of Partnership Agreement between PT PELNI (Persero) and BRI at BRILink Office, JakartaSports Complex in Jakarta



 **1 Oktober 2024**
October 1, 2024

Talkshow Pancasila di Era Modern di Kantor Pusat PT PELNI (Persero)

Talkshow on "Pancasila in the Modern Period" at PT PELNI (Persero) Head Office



 **1 Oktober 2024**
October 1, 2024

Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kantor Pusat PT PELNI (Persero)

Commemoration Ceremony of Pancasila Sanctity Day at PT PELNI (Persero) Head Office

PERISTIWA PENTING 2024

2024 SIGNIFICANT EVENTS



📅 **9 Oktober 2024**
October 9, 2024

Peresmian Kantor Cabang Balikpapan

The opening of the GP Anshor Congress in Tanjung Priok, Jakarta



📅 **23 Oktober 2024**
October 23, 2024

Seminar & Workshop Mental Health PELNI di Kantor Pusat PT PELNI (Persero)

PELNI Seminar & Workshop on Mental Health at PT PELNI (Persero) Head Office



📅 **28 Oktober 2024**
October 28, 2024

Upacara Hari Sumpah Pemuda 2024 Kantor Pusat PT PELNI (Persero)

Commemoration Ceremony of 2024 Youth Pledge Day at PT PELNI (Persero) Head Office



📅 **6 November 2024**
November 6, 2024

Rapat Kesiapan Angkutan Natal dan Tahun Baru

Operational Readiness Meeting for Christmas and New Year Transportation Services



📅 **8 November 2024**
November 8, 2024

Ground Breaking Kantin Pegawai di Kantor Pusat PT PELNI (Persero)

Ground Breaking Ceremony of Employee Canteen at PT PELNI (Persero) Head Office



📅 **13 November 2024**
November 13, 2024

Pertemuan dengan Aspers KASAL di Kantor Pusat PT PELNI (Persero)

Meeting with the Indonesian Navy's Personnel Assistant (Aspers KASAL) at PT PELNI (Persero) Head Office



📅 **13 November 2024**
November 13, 2024

Presentasi Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik di Grand Mercure Kemayoran

Public Information Disclosure Presentation at Grand Mercure Kemayoran



📅 **15 November 2024**
November 15, 2024

Uji Petik KM Ciremai di Pelabuhan Tanjung Priok

Random Sampling Quality Check of KM Ciremai at Tanjung Priok Port



PERISTIWA PENTING 2024

2024 SIGNIFICANT EVENTS



 **5 Desember 2024**
December 5, 2024

Konferensi Pers Angkutan Natal 2024 & Tahun Baru 2025

Press Conference of Transportation Services during 2024 Christmas and 2025 New Year



 **6 Desember 2024**
December 6, 2024

Doa Bersama Nataru 2024/2025 PT PELNI (Persero) dan Santunan Anak Yatim di Kantor Pusat PT PELNI (Persero)

Joint Year-End Prayer and Orphan Charity Event at PT PELNI (Persero) Head Office



 **10 Desember 2024**
December 10, 2024

Serah Terima Sertifikat HACCP bersama Sucofindo di KM Bukit Siguntang di Balikpapan

HACCP Certification Handover Ceremony with Sucofindo aboard MV Bukit Siguntang in Balikpapan



 **11 Desember 2024**
December 11, 2024

AKHLAK Fest 2024 - Town Hall Meeting 2024 & CEO Talk PT PELNI (Persero) di Kantor Pusat PT PELNI (Persero)

Launching of Christmas and New Year Holiday Season Centre of PT PELNI (Persero) in Jakarta



 **16 Desember 2024**
December 16, 2024

Rapat Pleno Harmonisasi tentang PMN di Kantor Pusat PT PELNI (Persero)

Plenary Harmonization Meeting regarding State Equity Participation at PT PELNI (Persero) Head Office



 **29 Desember 2024**
August 17, 2024

Monitoring Nataru Menko AHY, Menteri Perhubungan dan Wakil Menteri BUMN di KM Labobar di Pelabuhan Tanjung Priok

Year-End Holiday Operational Monitoring by Coordinating Minister AHY, Transportation Minister, and Deputy SOE Minister Aboard MV Labobar at Tanjung Priok Port Independence Day of Indonesia at PT PELNI (Persero)



 **31 Desember 2024**
August 30, 2024

Penandatanganan Terpadu Surat Perjanjian Penyelenggaraan Pelayaran - Perintis dan PSO Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi TA 2025 di Jakarta

Integrated Signing of the Shipping Service Agreement - Pioneer Routes and Public Service Obligation (PSO) for Economy Class Passenger Sea Transportation FY 2025 in Jakarta





02

LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORT





LAPORAN DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS REPORT

Para Pemangku Kepentingan yang terhormat, Honorable Stakeholders,

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) menyampaikan Laporan Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi selama tahun buku 2024. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan.

Tahun 2024 merupakan tahun yang strategis bagi Perseroan dalam melanjutkan agenda transformasi menuju entitas pelayaran nasional yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan. Dewan Komisaris menjalankan tugas pengawasan secara aktif dan independen untuk memastikan bahwa arah kebijakan strategis yang ditetapkan Direksi tetap berada dalam koridor prinsip kehati-hatian, kepatuhan, dan akuntabilitas yang tinggi.

Laporan ini juga mencerminkan evaluasi atas kinerja manajemen, penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, pengelolaan risiko, serta sistem pelaporan dan pengendalian internal, termasuk pengawasan terhadap pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) dan kinerja organ pendukung Dewan Komisaris. Dengan penyampaian laporan ini, kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperoleh gambaran yang objektif atas pelaksanaan fungsi pengawasan selama tahun buku 2024.

PANDANGAN ATAS SITUASI EKONOMI DAN INDUSTRI

Dewan Komisaris mencermati bahwa tahun 2024 masih diwarnai dengan ketidakpastian global yang cukup tinggi, termasuk tekanan geopolitik, volatilitas harga komoditas, dan pengetatan kebijakan fiskal di berbagai negara. Namun demikian, perekonomian Indonesia

With gratitude to God Almighty, the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) hereby presents the Supervisory Report on the performance of the Board of Directors for the fiscal year 2024. This report is prepared as a form of accountability in carrying out the supervisory function in accordance with applicable laws and regulations as well as the Company's Articles of Association.

The year 2024 was a strategic period for the Company in advancing its transformation agenda toward becoming a resilient, adaptive, and sustainable national shipping enterprise. The Board of Commissioners exercised its supervisory duties actively and independently to ensure that the strategic policies set by the Board of Directors adhered to the principles of prudence, compliance, and strong accountability.

This report reflects our evaluation of management performance, the implementation of good corporate governance, risk management, internal control systems, and reporting mechanisms—including oversight of the Whistleblowing System (WBS) and the performance of the Board of Commissioners' supporting organs. Through this report, we aim to provide all stakeholders with an objective view of the supervisory function carried out throughout 2024.

OUTLOOK ON THE ECONOMIC AND INDUSTRY LANDSCAPE

The Board of Commissioners observes that 2024 remained a year of elevated global uncertainty, marked by geopolitical tensions, commodity price volatility, and tighter fiscal policies in many countries. Despite these challenges, Indonesia's economy demonstrated relative





Dewan Komisaris memberikan perhatian serius terhadap efektivitas pengawasan dan tata kelola, serta mendorong peningkatan kinerja yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

The Board of Commissioners places strong emphasis on effective oversight and governance, while encouraging continuous and responsible performance improvement.

Muhammad Awaluddin

**Komisaris Utama Merangkap
Komisaris Independen**

President Commissioner Concurrently
Independent Commissioner

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS REPORT

menunjukkan ketahanan yang relatif kuat, dengan pertumbuhan PDB nasional yang stabil dan inflasi yang terkendali. Stabilitas ini turut menciptakan ruang bagi BUMN, termasuk PT PELNI (Persero), untuk melanjutkan agenda strategisnya secara lebih terukur.

Sektor transportasi laut memperlihatkan pemulihan pascapandemi secara bertahap, tercermin dari meningkatnya volume penumpang dan barang. Namun, Dewan Komisaris menilai bahwa industri pelayaran nasional masih menghadapi tantangan struktural, seperti ketergantungan terhadap subsidi pemerintah, keterbatasan infrastruktur pelabuhan, serta perlunya peningkatan efisiensi operasional dan daya saing armada.

Dalam konteks tersebut, peran PT PELNI (Persero) sebagai penyelenggara layanan publik sekaligus entitas bisnis harus dijalankan secara seimbang. Dewan Komisaris menekankan pentingnya kesinambungan strategi yang mampu menjawab kebutuhan konektivitas nasional sekaligus memperkuat posisi komersial perusahaan di tengah dinamika industri pelayaran nasional dan global.

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH DEWAN KOMISARIS ATAS KEBIJAKAN STRATEGIS DIREKSI

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan secara aktif dan sistematis terhadap pelaksanaan kebijakan strategis Direksi. Pengawasan dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk 12 (dua belas) rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, 32 (tiga puluh dua) kunjungan kerja ke cabang dan kapal operasional, serta pemberian 37 (tiga puluh tujuh) rekomendasi atau persetujuan formal kepada Direksi terkait isu strategis perusahaan.

Rapat gabungan menjadi forum evaluasi terhadap laporan kinerja manajemen, pembahasan perkembangan pengadaan kapal, tindak lanjut atas insiden operasional, serta pembahasan RKAP, RJPP, dan rencana transformasi perusahaan. Selain itu, kunjungan

resilience, with stable GDP growth and controlled inflation, providing state-owned enterprises, including PT PELNI (Persero), with a more stable environment to advance their strategic initiatives.

The maritime transportation sector showed signs of gradual post-pandemic recovery, reflected in increased passenger and cargo volumes. Nonetheless, the national shipping industry continues to face structural challenges, such as reliance on government subsidies, port infrastructure limitations, and the need for operational efficiency and fleet competitiveness improvements.

Given this context, PT PELNI (Persero) dual role as a public service provider and a commercial entity must be managed in balance. The Board of Commissioners emphasizes the importance of consistent and forward-looking strategies that can address national connectivity demands while also reinforcing the Company's competitive edge within the evolving landscape of the domestic and global shipping industry.

SUPERVISION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS ON THE BOARD OF DIRECTORS' STRATEGIC POLICIES

Throughout 2024, the Board of Commissioners carried out its supervisory function actively and systematically over the implementation of the Board of Directors' strategic policies. This oversight was conducted through multiple mechanisms, including 12 (twelve) joint meetings with the Board of Directors, 32 (thirty-two) working visits to branches and vessels, and the issuance of 37 (thirty-seven) formal recommendations or approvals to the Board of Directors on strategic corporate matters.

The joint meetings served as key platforms for reviewing management performance reports, discussing progress on fleet acquisition, addressing follow-ups on operational incidents, and deliberating the Company's Work Plan and Budget (RKAP), Long-Term Plan (RJPP),



LAPORAN DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS REPORT

kerja dilakukan untuk memastikan keterhubungan antara laporan manajemen dengan kondisi riil di lapangan, serta menegaskan komitmen Dewan Komisaris dalam memberikan pengawasan langsung terhadap operasional dan implementasi program strategis.

Dewan Komisaris juga mengoptimalkan peran komite-komite pendukung, yang secara teknis menelaah dan memberikan masukan atas kebijakan strategis Direksi. Hasil telaahan tersebut menjadi dasar dalam penyampaian nasihat yang obyektif dan konstruktif. Secara umum, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menjalankan kebijakan strategis dengan tingkat responsivitas dan koordinasi yang baik, serta menunjukkan komitmen terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan oleh RUPS.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI MENGENAI PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAN DASAR PENILAIANNYA

Dewan Komisaris telah melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi PT PELNI (Persero) sepanjang tahun 2024 dengan mengacu pada indikator *Key Performance Indicators* (KPI) yang disusun secara kolegal dan individu. Penilaian ini dilandaskan pada pedoman Kementerian BUMN sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-306/MBU/11/2023 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/03/2023.

Secara kolegal, pencapaian KPI Direksi tahun 2024 mencapai skor sebesar 105,28 dari total bobot 100,00, yang mencerminkan kinerja sangat baik dan melampaui target yang ditetapkan. Penilaian ini mencakup lima perspektif strategis: nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia, inovasi model bisnis, kepemimpinan teknologi, peningkatan investasi, dan pengembangan talenta.

and strategic transformation agenda. The site visits provided direct insights into field operations and reaffirmed the Board of Commissioners' commitment to hands-on supervision of strategic program execution.

The Board also optimized the role of its supporting committees, which performed technical reviews and contributed assessments on the strategic policies of the Board of Directors. These inputs were integral in forming objective and constructive supervisory advice. Overall, the Board of Commissioners concluded that the Board of Directors implemented its strategic policies with a commendable level of responsiveness and coordination, and remained committed to achieving the corporate targets set by the General Meeting of Shareholders.

ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE IN MANAGING THE COMPANY AND ITS EVALUATION BASIS

The Board of Commissioners has conducted an assessment of the performance of PT PELNI (Persero) Board of Directors for the year 2024 based on both collegial and individual Key Performance Indicators (KPIs). This assessment refers to the guidelines of the Ministry of SOEs, as outlined in Ministerial Decree No. SK-306/MBU/11/2023 and Regulation No. PER-02/MBU/03/2023.

Collegially, the Directors achieved a total KPI score of 105,28 out of a maximum weight of 100.00—an outstanding result that exceeds the established targets. This score reflects performance across five strategic perspectives: economic and social value for Indonesia, business model innovation, technological leadership, investment growth, and talent development.



LAPORAN DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS REPORT

Sementara itu, hasil penilaian secara individu yang telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik & Indra juga menunjukkan kinerja yang solid dengan skor sebagai berikut:

- Direksi Usaha Angkutan Penumpang: 101,91
- Direksi Usaha Angkutan Barang & Tol Laut: 97,14
- Direksi Armada & Teknik: 104,51
- Direksi SDM & Umum: 103,06
- Direksi Keuangan & Manajemen Risiko: 105,41

Berdasarkan hasil tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi secara keseluruhan telah menjalankan fungsi pengelolaan perusahaan secara profesional dan akuntabel, dengan menjaga keseimbangan antara keberhasilan operasional dan penguatan aspek tata kelola dan risiko. Respons terhadap arahan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris juga dinilai sangat baik.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Dewan Komisaris memandang bahwa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) di PT PELNI (Persero) telah menunjukkan kemajuan yang signifikan sepanjang tahun 2024. Hal ini tercermin dari hasil penilaian GCG yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan DKI Jakarta, di mana Perseroan memperoleh skor sebesar 87,136 dengan predikat "Sangat Baik."

Penerapan GCG di Perseroan telah mencakup enam aspek utama dengan pencapaian tinggi pada komitmen terhadap keberlanjutan tata kelola, peran Direksi, dan peran Dewan Komisaris. Dewan Komisaris mencermati bahwa hasil penilaian tersebut menjadi acuan penting dalam memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal, serta sebagai dasar dalam menyusun perbaikan berkelanjutan melalui tindak lanjut terhadap 28 *Area of Improvement* (Aol) yang telah diidentifikasi.

Individually, the KPI performance—as reviewed by the Public Accounting Firm Djoko, Sidik & Indra—also demonstrates robust results:

- Director of Passenger Transportation: 101.91
- Director of Freight & Sea Toll Services: 97.14
- Director of Fleet & Engineering: 104.51
- Director of HR & General Affairs: 103.06
- Director of Finance & Risk Management: 105.41

Based on these outcomes, the Board of Commissioners concludes that the Board of Directors has carried out the Company's management professionally and accountably, balancing operational excellence with sound governance and risk control. The Directors' responsiveness to guidance and recommendations from the Board of Commissioners has also been commendable.

VIEWS ON THE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

The Board of Commissioners acknowledges that the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles at PT PELNI (Persero) has demonstrated significant progress throughout 2024. This is reflected in the GCG assessment conducted by the State Audit Board (BPKP) of DKI Jakarta, where the Company achieved a score of 87.136 with a "Very Good" rating.

The GCG practices in the Company have encompassed six core areas, with top scores in sustainability commitment, and the roles of the Board of Directors and the Board of Commissioners. The Board of Commissioners views the assessment results as a critical reference for strengthening oversight and internal control systems, as well as a foundation for continuous improvement through follow-up actions on 28 identified Areas of Improvement (Aol).



LAPORAN DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS REPORT

Dewan Komisaris juga mengapresiasi langkah-langkah penguatan governansi terintegrasi antara induk dan anak perusahaan, termasuk penerapan sistem manajemen anti penyuapan berbasis ISO 37001:2016 dan sistem manajemen kepatuhan 37301:2021.

Melalui keterlibatan aktif seluruh organ tata kelola dan penguatan fungsi pengawasan berbasis teknologi serta transparansi pelaporan, Dewan Komisaris meyakini bahwa Perseroan berada pada jalur yang tepat dalam membangun tata kelola yang berintegritas, akuntabel, dan mendukung keberlanjutan bisnis jangka panjang.

PANDANGAN ATAS PENGELOLAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Dewan Komisaris memandang bahwa pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) di PT PELNI (Persero) telah dilaksanakan secara komprehensif dan progresif sepanjang tahun 2024. Sistem ini berfungsi sebagai instrumen penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas perusahaan melalui mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran oleh insan perusahaan maupun pihak eksternal.

Berdasarkan laporan tahunan WBS tahun 2024, tercatat dua laporan pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti oleh tim pengelola WBS, tanpa adanya laporan yang dinyatakan tidak dapat diproses. Struktur pengelolaan WBS berada di bawah tanggung jawab Direktur Utama, dengan dukungan dari tim lintas fungsi yang terdiri atas perwakilan SPI, Manajemen Risiko, Hukum, SDM, dan Kepatuhan.

Dewan Komisaris memberikan perhatian serius terhadap efektivitas pelaksanaan WBS, termasuk dalam hal perlindungan identitas pelapor, kejelasan alur tindak lanjut, dan keterbukaan akses pelaporan melalui kanal resmi seperti website, email, dan Whatsapp.

The Board of Commissioners also appreciates the efforts to strengthen integrated governance between the parent company and its subsidiaries, including the implementation of the Anti-Bribery Management System based on ISO 37001:2016 and the Compliance Management System in accordance with ISO 37301:2021.

With the active involvement of all governance organs, enhanced oversight mechanisms supported by digital platforms, and improved transparency in reporting, the Board of Commissioners is confident that the Company is on the right path toward building governance practices that are ethical, accountable, and conducive to long-term business sustainability.

VIEWS ON WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) MANAGEMENT

The Board of Commissioners observes that the Whistleblowing System (WBS) at PT PELNI (Persero) was implemented in a comprehensive and proactive manner throughout 2024. This system serves as a vital tool in upholding corporate integrity and accountability by facilitating the reporting of suspected violations by internal personnel and external stakeholders.

According to the 2024 WBS annual report, two reported cases were resolved, with no complaints deemed unprocessable. The WBS is overseen by the President Director and supported by a cross-functional team comprising representatives from Internal Audit (SPI), Risk Management, Legal, Human Resources, and Compliance.

The Board of Commissioners places high importance on the effectiveness of WBS operations, including the protection of whistleblower identity, the clarity of follow-up procedures, and the availability of official reporting channels such as the Company's website,



LAPORAN DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS REPORT

Dewan Komisaris juga mendorong Direksi untuk terus memperkuat budaya pelaporan di seluruh jenjang organisasi, termasuk melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pemasangan materi informasi secara aktif di seluruh lingkungan kerja.

Sebagai bagian dari peran pengawasan, Dewan Komisaris secara berkala meminta laporan evaluasi pelaksanaan WBS dan memberikan masukan terhadap mekanisme perbaikan sistem pengaduan yang ada. Dengan demikian, sistem WBS di PT PELNI (Persero) tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai wujud nyata komitmen perusahaan terhadap prinsip keterbukaan dan tata kelola yang bersih.

PENILAIAN ATAS KINERJA ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang tahun 2024, seluruh organ pendukung telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dalam mendukung pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Tiga komite utama, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi, menjalankan perannya secara aktif, profesional, dan berlandaskan prinsip tata kelola yang baik.

Komite Audit secara rutin melakukan evaluasi atas laporan keuangan manajemen bulanan dan tahunan, serta aktif melakukan rapat dengan Satuan Pengawasan Intern dan Kantor Akuntan Publik. Komite juga melaksanakan kunjungan lapangan dan penugasan khusus dari Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Manajemen Risiko menyelenggarakan evaluasi terhadap laporan manajemen risiko, melakukan rapat rutin dengan unit terkait, serta turut aktif dalam kunjungan lapangan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan operasional.

email, and WhatsApp. The Board also encourages the Directors to continually strengthen the whistleblowing culture through employee training, active socialization, and clear communication materials across all work environments.

As part of its supervisory role, the Board of Commissioners regularly reviews WBS implementation reports and provides feedback for system improvement. Thus, the WBS at PT PELNI (Persero) is not merely a control mechanism but also a reflection of the Company's deep commitment to transparency and clean governance.

ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' SUPPORTING ORGANS

The Board of Commissioners assesses that throughout 2024, all supporting organs have carried out their duties and functions effectively in facilitating oversight and advisory responsibilities to the Board of Directors. The three primary committees—Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee—have performed actively, professionally, and in alignment with good governance principles.

The Audit Committee regularly reviewed monthly and annual financial management reports, held discussions with the Internal Audit Unit and the Public Accounting Firm, and conducted field visits and special assignments from the Board of Commissioners.

The Risk Monitoring Committee held regular evaluations of the Company's risk management reports, organized meetings with the Risk Management Unit, and participated in field visits to ensure the effectiveness of risk mitigation efforts across operations.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS REPORT

Komite Nominasi dan Remunerasi mendukung penyusunan data talent BOD-1, merumuskan usulan tantiem dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, serta melakukan koordinasi strategis dengan fungsi SDM. Komite ini juga berperan aktif dalam pelaksanaan penugasan khusus dan kegiatan pengembangan kompetensi.

Selain itu, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Sekretariat Dewan Komisaris juga telah berperan penting dalam mendukung kegiatan pengawasan, penyusunan dokumen, serta pengelolaan komunikasi internal dan eksternal.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi atas kontribusi strategis dari seluruh organ pendukung yang telah menjalankan perannya secara efektif dan akuntabel, serta berkontribusi terhadap pencapaian target KPI Dewan Komisaris tahun 2024 sebesar 100%.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2024 telah terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris, dimana pada tanggal 16 Januari telah dilakukan pengangkatan Bapak Muhammad Awaluddin yang menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen yang sebelumnya jabatan tersebut kosong sejak 23 November 2023. Lalu pada tanggal yang sama dilakukan pengangkatan Bapak Budi Mantoro sebagai Komisaris untuk menggantikan Bapak Wahyu Adji Herpriarsono.

PANDANGAN ATAS PROYEKSI TAHUN 2025

Memasuki tahun 2025, Dewan Komisaris memandang bahwa PT PELNI (Persero) memiliki peluang strategis untuk memperkuat perannya dalam mendukung agenda konektivitas nasional serta pengembangan logistik maritim. Momentum ekonomi nasional yang relatif stabil, disertai arah pembangunan dalam kerangka RPJPN 2025-2029 dan dorongan terhadap transformasi BUMN, menjadi katalis yang perlu dimanfaatkan secara optimal.

The Nomination and Remuneration Committee contributed to the preparation of BOD-1 talent data, formulated recommendations for Commissioners' and Directors' bonuses and remuneration, and coordinated closely with HR functions. The Committee also actively engaged in special assignments and competency development programs.

Additionally, the Integrated Governance Committee and the Board Secretariat played important roles in supporting oversight activities, documentation, and both internal and external communications management.

Overall, the Board of Commissioners expresses appreciation for the strategic contributions of all supporting organs, whose performance has been effective, accountable, and instrumental in achieving the Board's 2024 KPI target of 100%.

CHANGES IN THE BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

In 2024, there was a change in the composition of the Board of Commissioners. On January 16, Mr. Muhammad Awaluddin was appointed as President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner, filling the position that had been vacant since November 23, 2023. On the same date, Mr. Budi Mantoro was appointed as Commissioner, replacing Mr. Wahyu Adji Herpriarsono.

OUTLOOK FOR 2025

Looking ahead to 2025, the Board of Commissioners believes that PT PELNI (Persero) is well positioned to seize strategic opportunities in strengthening its role in national connectivity and maritime logistics development. With Indonesia's stable economic outlook, the upcoming RPJPN 2025-2029 framework, and the Ministry of SOEs' transformation push, the Company is poised to enter a crucial phase.



LAPORAN DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS REPORT

Dewan Komisaris mengapresiasi rencana strategis Direksi dalam memasuki Fase I transformasi (2025–2026) dengan tema *Quality-Assured Shipping Operator*. Fokus pada standarisasi operasional, peningkatan portofolio bisnis komersial, serta penguatan budaya keselamatan dinilai relevan dengan tantangan eksternal dan kebutuhan internal perusahaan.

Namun demikian, Dewan Komisaris juga memberikan perhatian terhadap sejumlah risiko yang perlu diantisipasi, antara lain: keberlanjutan pendanaan investasi armada, penguatan daya saing segmen komersial di tengah ketergantungan terhadap penugasan, dan kesinambungan regenerasi SDM. Untuk itu, dibutuhkan penguatan manajemen risiko, peningkatan integrasi digital antarproses bisnis, serta penyelarasan strategi bisnis dengan kebijakan Pemerintah dan kondisi pasar.

Dengan pengawasan yang berkelanjutan dan sinergi yang erat antara seluruh organ perusahaan, Dewan Komisaris optimis bahwa tahun 2025 akan menjadi fase penting dalam memperkuat posisi PT PELNI (Persero) sebagai operator pelayaran nasional yang andal dan berstandar tinggi.

APRESIASI DAN PENUTUP

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan atas kepercayaan, dukungan, dan sinergi yang telah terjalin sepanjang tahun 2024. Capaian dan kemajuan Perseroan tidak terlepas dari peran aktif semua pihak dalam menciptakan ekosistem tata kelola yang sehat dan kolaboratif.

The Board commends the Board of Directors' strategic roadmap under Phase I of the transformation (2025–2026), themed *Quality-Assured Shipping Operator*. Emphasizing operational standardization, commercial portfolio growth, and a reinforced safety culture aligns well with the Company's internal needs and external challenges.

Nonetheless, the Board also highlights several key risks that warrant careful attention, including long-term funding for fleet renewal, strengthening competitiveness in commercial segments amidst assignment dependency, and ensuring talent regeneration. These challenges require stronger risk management, improved digital integration across business processes, and alignment between business strategies, government policies, and market conditions.

With continuous oversight and solid collaboration among all corporate governance bodies, the Board of Commissioners remains confident that 2025 will serve as a pivotal year in cementing PT PELNI (Persero) position as a high-standard and reliable national shipping operator.

APPRECIATION AND CLOSING STATEMENT

The Board of Commissioners extends its deepest appreciation to all Shareholders and Stakeholders for their continued trust, support, and collaboration throughout 2024. The Company's achievements and progress were made possible through the active involvement of all parties in fostering a sound and collaborative governance ecosystem.



LAPORAN DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS REPORT

Kami juga memberikan penghargaan kepada Direksi atas kerja keras dan komitmen dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan secara profesional, serta kepada seluruh insan PT PELNI (Persero) yang telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam mendukung transformasi perusahaan. Dewan Komisaris menilai bahwa koordinasi dan komunikasi yang konstruktif antara organ perusahaan menjadi fondasi penting bagi keberhasilan kinerja korporat.

Dengan berakhirnya tahun buku 2024, Dewan Komisaris berharap agar pencapaian yang telah diraih dapat menjadi modal untuk menghadapi tantangan tahun 2025 dengan lebih adaptif dan strategis. Kami menegaskan kembali komitmen untuk terus melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat secara independen, obyektif, dan bertanggung jawab demi keberlanjutan dan pertumbuhan Perseroan ke depan.

We also express our recognition to the Board of Directors for their dedication and professionalism in managing the Company, and to all PT PELNI (Persero) personnel who have demonstrated strong commitment in supporting the Company's transformation agenda. The Board believes that constructive coordination and communication among the Company's governing bodies have been instrumental to its corporate success.

As the 2024 fiscal year comes to a close, the Board of Commissioners hopes that the accomplishments made thus far will serve as a strong foundation to face the challenges of 2025 with greater agility and strategic direction. We reaffirm our commitment to carrying out our supervisory and advisory roles with independence, objectivity, and accountability to ensure the Company's sustainable growth in the future.

Atas Nama Dewan Komisaris
On behalf of the Board of Commissioner
PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)



MUHAMMAD AWALUDDIN
Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen
President Commissioner Concurrently Independent Commissioner



LAPORAN DIREKSI BOARD OF DIRECTORS REPORT

Para Pemangku Kepentingan yang terhormat, Honorable Stakeholders,

Tahun 2024 ditandai dengan dinamika perekonomian global yang masih dibayangi ketidakpastian. Inflasi global secara umum melandai, namun ketegangan geopolitik, proteksionisme perdagangan, perubahan iklim, serta tekanan utang di negara berkembang menjadi tantangan serius bagi stabilitas ekonomi dunia. Di tengah berbagai tekanan tersebut, pertumbuhan ekonomi global tercatat stagnan pada kisaran 3,2%.

Indonesia menunjukkan ketahanan ekonomi yang cukup kuat dengan mencatat pertumbuhan sebesar 5,03% hingga triwulan III 2024. Pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi domestik yang stabil, peningkatan investasi, serta penguatan ekspor, terutama dari sektor industri pengolahan dan pertanian. Pemerintah berhasil menjaga inflasi dalam kisaran target 2,5% $\pm$ 1%, yang turut mendorong stabilitas daya beli masyarakat. Di saat yang sama, kebijakan penurunan suku bunga acuan menjadi 6% pada September 2024 dan surplus neraca perdagangan sebesar USD4,4 miliar turut memperkuat kondisi makroekonomi nasional.

Sektor transportasi dan logistik memainkan peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, volume penumpang angkutan laut dalam negeri meningkat 20,46% menjadi 25,9 juta orang sepanjang Januari-Desember 2024. Peningkatan ini menunjukkan pemulihan sektor transportasi pascapandemi, serta meningkatnya kebutuhan konektivitas antarwilayah di Indonesia. Sementara itu, volume barang yang diangkut melalui laut mencapai 379,2 juta ton atau tumbuh 1,45% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam konteks ini, peran PT PELNI (Persero) semakin krusial. Sebagai badan usaha milik negara yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan transportasi laut perintis dan reguler, PT PELNI (Persero) berkomitmen menyediakan layanan yang terjangkau,

The year 2024 was marked by continued global economic uncertainty. While inflation eased in most regions, ongoing geopolitical tensions, rising protectionism, climate change challenges, and sovereign debt pressures in emerging markets remained significant concerns. As a result, global economic growth stagnated at around 3.2%.

Amid these challenges, Indonesia demonstrated notable resilience, recording an economic growth rate of 5.03% by the third quarter of 2024. This growth was supported by strong domestic consumption, increasing investment, and solid export performance—particularly from the manufacturing and agricultural sectors. The Government effectively maintained inflation within the target range of 2.5% $\pm$ 1%, preserving consumer purchasing power. Additionally, the policy rate was reduced to 6% in September 2024, while the trade balance surplus of USD4.4 billion further strengthened the country's macroeconomic position.

The transportation and logistics sectors continued to play a pivotal role in driving national growth. According to Statistics Indonesia (BPS), the number of domestic sea transport passengers rose by 20.46% to 25.9 million people during January-December 2024. This increase reflects the recovery of the transportation sector post-pandemic and the growing demand for inter-regional connectivity. Meanwhile, the volume of sea cargo transported reached 379.2 million tons, up 1.45% from the previous year.

Against this backdrop, PT PELNI (Persero) holds a vital mandate. As a state-owned enterprise appointed by the Government to provide both pioneer and regular sea transportation, PT PELNI (Persero) remains committed to delivering affordable, safe, and equitable services—



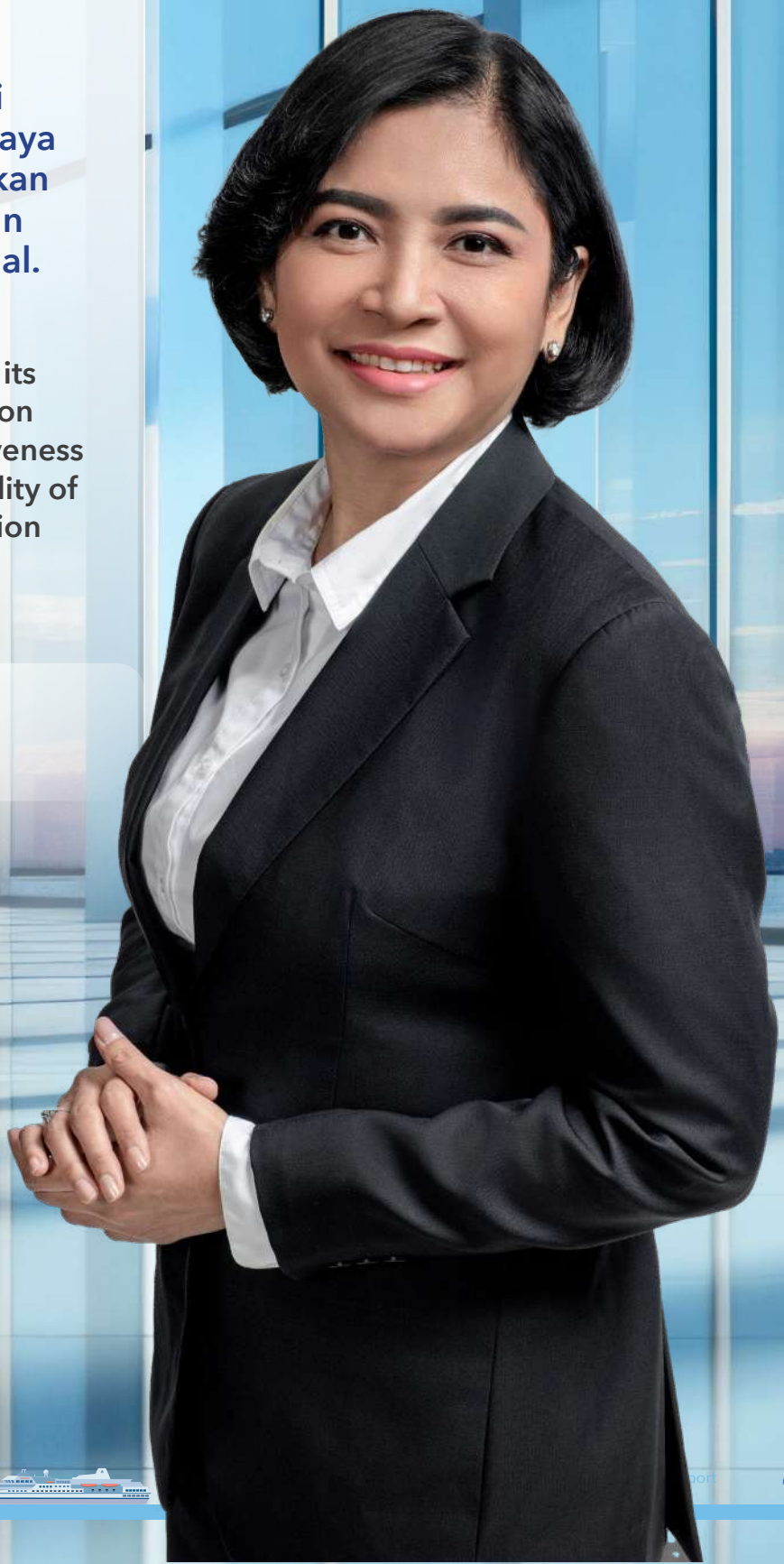


PT PELNI (Persero) terus memperkuat pondasi transformasi dan meningkatkan daya saing guna memastikan keberlanjutan layanan angkutan laut nasional.

PT PELNI (Persero) continues to strengthen its transformation foundation and enhance competitiveness to ensure the sustainability of national sea transportation services.

Tri Andayani

Direktur Utama
President Director



LAPORAN DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS REPORT

aman, dan merata, terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Untuk itu, PT PELNI (Persero) terus melakukan inovasi dalam peningkatan kualitas layanan, digitalisasi operasional, serta menjalin sinergi dengan mitra strategis guna memperkuat kontribusi terhadap konektivitas dan pembangunan nasional.

STRATEGI TAHUN 2024

Sebagai bagian dari komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat konektivitas maritim, PT PELNI (Persero) menetapkan arah strategis yang menekankan pada penyediaan transportasi laut yang adil, berkelanjutan, dan berdaya saing. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi mandat Pemerintah sebagai penyelenggara angkutan laut perintis dan reguler, tetapi juga mencerminkan ambisi PT PELNI (Persero) untuk tumbuh sebagai entitas bisnis yang modern dan tangguh di tengah dinamika industri pelayaran global.

Pada tahun 2024, PT PELNI (Persero) mengadopsi pendekatan Business Expansion yang menjadi pijakan dalam mewujudkan visi sebagai *National Shipping Holding Company*. Strategi ini dilaksanakan melalui berbagai inisiatif penting yang mencerminkan transformasi bisnis jangka panjang:

- Pengajuan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam APBN 2024 dan 2025 sebagai dukungan pembiayaan strategis.
- Peningkatan kerja sama aliansi dan pengangkutan muatan dengan produk-produk klaster BUMN/ BUMS, UMKM, dan instansi lainnya.
- Spin On & Spin Off Strategic Business Unit (SBU), yang bertujuan memfokuskan kegiatan operasional dan pengembangan bisnis sesuai dengan potensi pasar dan karakteristik layanan.
- Digitalisasi proses bisnis Perusahaan.
- Pengembangan talenta di bidang pelayaran dan logistic maritim.

particularly for communities in remote, outermost, and underdeveloped areas. The Company continues to innovate through service improvements, operational digitalization, and strategic partnerships to enhance its contribution to national connectivity and development.

2024 STRATEGY

As part of its commitment to supporting national economic growth and strengthening maritime connectivity, PT PELNI (Persero) has defined a strategic direction centered on the provision of equitable, sustainable, and competitive sea transportation. This strategy not only fulfills the Government's mandate to provide both pioneer and regular sea transportation services, but also reflects PT PELNI (Persero)'s aspiration to grow into a modern and resilient business entity amidst the dynamic global shipping landscape.

In 2024, PT PELNI (Persero) adopted a Business Expansion approach as the foundation to realize its vision of becoming a National Shipping Holding Company. This strategic thrust is executed through several key initiatives aimed at long-term business transformation:

- submission for State Capital Injection (PMN) under the 2024 and 2025 National Budget to support strategic funding needs.
- Strengthening alliance partnerships and cargo transport collaboration with products from SOE/Private sector clusters, MSMEs, and other institutions.
- Spin On & Spin Off of Strategic Business Units (SBUs), aimed at aligning operational focus with market opportunities and service characteristics.
- Digitalization of the Company's business processes.
- talent development in the fields of shipping and maritime logistics.



LAPORAN DIREKSI BOARD OF DIRECTORS REPORT

Seluruh strategi ini telah dirancang selaras dengan 5 (lima) *Formulasi Prioritas Kementerian BUMN 2020-2024*, yang meliputi: nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia, inovasi model bisnis, kepemimpinan teknologi, peningkatan investasi, serta penguatan talenta.

Untuk memastikan pencapaian strategi, PT PELNI (Persero) menerapkan pendekatan manajemen kinerja melalui *balanced scorecard* yang tertuang dalam peta strategi perusahaan. Fokus utama pada tahun 2024 adalah pada peningkatan kinerja keuangan korporat, termasuk:

- Menjaga keberlanjutan usaha melalui penciptaan nilai tambah dan pelayanan prima kepada pelanggan.
- Memperkuat struktur keuangan dan tingkat kesehatan perusahaan.
- Meningkatkan kontribusi pendapatan dari unit bisnis komersial, khususnya yang bersumber dari kegiatan non-penugasan.

Dengan kerangka strategi yang terintegrasi ini, PT PELNI (Persero) tidak hanya memperkuat perannya sebagai penyedia layanan publik, tetapi juga terus tumbuh menjadi perusahaan pelayaran nasional yang tangguh, inovatif, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

PERANAN DIREKSI DALAM PERUMUSAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

Sebagai organ utama dalam pengelolaan perusahaan, Direksi PT PELNI (Persero) memainkan peran sentral dalam merumuskan arah strategis dan kebijakan utama perusahaan. Sepanjang tahun 2024, Direksi menjalankan fungsi kepemimpinan strategis secara aktif dan kolektif untuk merespons tantangan industri pelayaran yang terus berkembang, sekaligus memanfaatkan peluang dari kebijakan pemerintah dalam memperkuat konektivitas maritim nasional.

These strategic initiatives are fully aligned with the Five Priority Formulations of the Ministry of SOEs (2020-2024), which include: delivering economic and social value for Indonesia, innovating business models, fostering technological leadership, boosting investment, and strengthening talent development.

To ensure effective strategy execution, PT PELNI (Persero) applies a performance management framework based on the balanced scorecard, articulated through its corporate strategy map. The primary focus in 2024 is on enhancing financial performance, which includes:

- Ensuring business sustainability through value creation and excellent customer service.
- Strengthening financial structure and corporate health.
- Increasing revenue contribution from commercial business units, particularly from non-assignment services.

With this integrated strategic framework, PT PELNI (Persero) continues to reinforce its role as a public service provider while advancing its transformation into a robust, innovative, and future-ready national shipping company.

THE BOARD OF DIRECTORS' ROLE IN FORMULATING STRATEGY AND STRATEGIC POLICIES

As the primary executive body of the Company, the Board of Directors of PT PELNI (Persero) plays a pivotal role in formulating the Company's strategic direction and key policies. Throughout 2024, the Board actively and collectively exercised strategic leadership to address the evolving dynamics of the shipping industry while leveraging government initiatives aimed at enhancing national maritime connectivity.



LAPORAN DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS REPORT

Perumusan strategi dilakukan melalui proses yang partisipatif dan berbasis data. Direksi secara berkala mengkaji kinerja operasional dan tren makroekonomi, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dinamika eksternal dan internal perusahaan. Berdasarkan kajian tersebut, Direksi menyusun strategi jangka pendek, menengah, dan panjang dengan mengacu pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), serta memperhatikan prioritas nasional dan arah kebijakan Kementerian BUMN.

Dalam praktiknya, Direksi memimpin serangkaian forum internal seperti Rapat Direksi, Komite Strategis, dan Focus Group Discussion lintas unit kerja untuk mengonsolidasikan masukan dari berbagai fungsi. Melalui mekanisme ini, Direksi tidak hanya memastikan keselarasan strategi dengan mandat penugasan, tetapi juga mendorong inovasi dalam pengembangan model bisnis dan penciptaan nilai tambah.

Selain itu, Direksi turut berperan dalam menjalin komunikasi yang intensif dengan pemangku kepentingan eksternal, termasuk Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, serta mitra strategis di sektor pelayaran dan logistik. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga sinergi dan memastikan bahwa strategi perusahaan sejalan dengan kepentingan nasional dalam memperkuat ekosistem logistik maritim Indonesia.

Peranan Direksi dalam merumuskan strategi dan kebijakan strategis juga dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), termasuk prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Dengan pendekatan tersebut, Direksi memastikan bahwa setiap keputusan strategis yang diambil mengarah pada pencapaian visi perusahaan secara berkelanjutan dan berintegritas.

Strategic formulation was carried out through a participative and data-driven approach. The Board of Directors routinely evaluated operational performance and macroeconomic trends, while conducting comprehensive reviews of internal and external factors. Based on these assessments, the Board established short-, medium-, and long-term strategies aligned with the Corporate Long-Term Plan (RJPP) and the Company's Work Plan and Budget (RKAP), in accordance with national priorities and directives from the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs).

In practice, the Board led a series of internal strategic forums, including Directors' Meetings, Strategic Committees, and cross-functional Focus Group Discussions, to consolidate input from various departments. These mechanisms ensured not only strategic alignment with the Company's mandated services but also encouraged innovation in business model development and value creation.

Moreover, the Board maintained active engagement with key external stakeholders, including the Ministry of SOEs, the Ministry of Transportation, and strategic partners in the shipping and logistics sectors. This proactive approach was intended to maintain synergy and ensure the Company's strategies were aligned with national interests in strengthening Indonesia's maritime logistics ecosystem.

The Board's role in strategy and policy formulation was also guided by the principles of Good Corporate Governance (GCG), including transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. Through this approach, the Board ensures that all strategic decisions are made with integrity and contribute to the sustainable realization of the Company's vision.



LAPORAN DIREKSI BOARD OF DIRECTORS REPORT

PROSES YANG DILAKUKAN UNTUK MEMASTIKAN IMPLEMENTASI STRATEGI

Untuk menjamin bahwa strategi yang telah dirumuskan dapat diimplementasikan secara efektif dan konsisten di seluruh lini organisasi, Direksi PT PELNI (Persero) menetapkan berbagai mekanisme pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja secara terstruktur. Langkah ini mencerminkan komitmen Perseroan terhadap pelaksanaan strategi yang terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Direksi secara aktif memimpin forum koordinasi lintas fungsi dan melakukan *monitoring* berkala atas pencapaian indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators/KPI*) yang telah ditetapkan dalam RKAP dan peta strategi. Forum-forum ini menjadi ruang untuk mengevaluasi kemajuan pelaksanaan program prioritas, mengidentifikasi hambatan, serta menetapkan langkah korektif yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran.

Dalam memastikan kualitas pelaksanaan strategi, Direksi juga mengoptimalkan peran Satuan Pengawasan Internal (SPI). SPI berperan memberikan rekomendasi strategis berbasis hasil audit, telaahan kinerja, dan evaluasi efektivitas pengendalian internal. Masukan dari SPI menjadi salah satu referensi penting bagi Direksi dalam mengevaluasi konsistensi implementasi strategi bisnis, mitigasi risiko strategis, serta peningkatan tata kelola dan kepatuhan.

Direksi juga mendorong budaya *performance-driven* di seluruh jajaran organisasi dengan menerapkan *management dashboard* dan sistem pelaporan berbasis teknologi informasi. Inisiatif ini memungkinkan pemantauan real-time terhadap pelaksanaan program kerja serta mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data.

PROCESS TO ENSURE STRATEGY IMPLEMENTATION

To ensure that the formulated strategies are effectively and consistently implemented across the organization, the Board of Directors of PT PELNI (Persero) has established a structured framework for performance monitoring, control, and evaluation. This reflects the Company's strong commitment to results-oriented, measurable, and accountable strategy execution.

The Board actively leads cross-functional coordination forums and regularly monitors the achievement of Key Performance Indicators (KPIs) outlined in the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) and strategic map. These forums serve as a platform to assess the progress of priority programs, identify obstacles, and determine timely corrective actions.

To enhance the quality of strategy execution, the Board also leverages the role of the Internal Audit Unit (*Satuan Pengawasan Internal / SPI*). SPI provides strategic recommendations based on audit results, performance reviews, and evaluations of internal control effectiveness. Feedback from SPI serves as a critical input for the Board in assessing the consistency of business strategy implementation, mitigating strategic risks, and strengthening governance and compliance.

The Board also fosters a performance-driven culture throughout the organization by implementing management dashboards and information technology-based reporting systems. These initiatives enable real-time monitoring of work program execution and accelerate data-driven decision-making.



LAPORAN DIREKSI BOARD OF DIRECTORS REPORT

Sinergi antara Direksi, unit operasional, dan fungsi pengawasan menjadi kunci dalam menjaga keberhasilan implementasi strategi. Melalui pendekatan ini, PT PELNI (Persero) memastikan bahwa setiap kebijakan strategis tidak hanya menjadi dokumen rencana, tetapi diwujudkan secara nyata dalam bentuk pencapaian kinerja dan peningkatan nilai perusahaan.

CAPAIAN KINERJA PERUSAHAAN

Tahun 2024 merupakan periode penting bagi PT PELNI (Persero) dalam menunjukkan ketangguhan bisnis, relevansi publik, dan komitmen keberlanjutan. Melalui dua segmen utama, yakni penugasan dan non-penugasan, PT PELNI (Persero) berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan usaha bersih konsolidasian sebesar 7,12% menjadi Rp6,18 triliun dari Rp5,77 triliun pada tahun sebelumnya.

Segmen penugasan tetap menjadi pilar utama Perseroan, berkontribusi sebesar 82,19% terhadap total pendapatan. Pendapatan dari segmen ini mengalami pertumbuhan sebesar 5,50% menjadi Rp5,08 triliun. Namun demikian, tekanan pada efisiensi dan meningkatnya beban pokok menyebabkan penurunan laba bruto menjadi Rp718,59 miliar atau turun 8,20% dan laba tahun berjalan sebesar Rp324,30 miliar, atau turun 14,89% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sepanjang tahun, PT PELNI (Persero) berhasil mengoperasikan armada yang terdiri atas 26 kapal penumpang yang melayani 602 pelayaran dengan jumlah penumpang mencapai 4,37 juta orang. Selain itu, terdapat 30 kapal perintis yang berhasil mengangkut 722.914 penumpang serta 79.150 ton/m³ muatan. Untuk mendukung konektivitas logistik nasional, Perseroan juga mengoperasikan 9 kapal tol laut yang berhasil mengangkut 12.429 TEUs kontainer. Layanan pengangkutan ternak juga tetap berjalan melalui KM Camara Nusantara I yang mengangkut 4.699 ekor ternak, serta 16 kapal rede yang berperan dalam memperkuat layanan angkutan laut lokal.

The synergy between the Board, operational units, and oversight functions is essential to the successful implementation of strategy. Through this approach, PT PELNI (Persero) ensures that every strategic policy is not merely a planning document but is translated into concrete achievements and enhanced corporate value.

PERFORMANCE ACHIEVEMENTS

The year 2024 marked a pivotal period for PT PELNI (Persero) in demonstrating business resilience, public service relevance, and sustainability commitment. Through its two main segments assignment and non-assignment, PT PELNI (Persero) recorded a consolidated net operating revenue growth of 7.12% to Rp 6.18 trillion, up from Rp 5.77 trillion in the previous year.

The assignment segment remained PT PELNI (Persero)'s core business pillar, contributing 82.19% to total revenue. Revenue from this segment rose by 5.50% to Rp 5.08 trillion. However, gross profit declined by 8.20% to Rp 718.59 billion and net profit for the year decreased by 14.89% to Rp 324.30 billion due to cost pressures.

Throughout the year, PT PELNI (Persero) operated a fleet of 26 passenger ships, delivering 602 voyages and serving 4.37 million passengers. The pioneer fleet comprised 30 vessels that served 722,914 passengers and transported 79,150 tons/m³ of cargo. To support the national logistics connectivity, 9 sea toll cargo vessels were deployed, carrying 12,429 TEUs. The cattle transportation service was operated by KM Camara Nusantara I, transporting 4,699 livestock, while 16 rede ships strengthened local maritime connectivity.



LAPORAN DIREKSI BOARD OF DIRECTORS REPORT

Secara keseluruhan, pendapatan penugasan dari pemerintah melalui skema PSO dan subsidi tercatat sebesar Rp3,09 triliun untuk kapal penumpang, Rp408,5 miliar untuk kapal perintis, Rp172 miliar untuk kapal tol laut, dan Rp10,9 miliar untuk kapal ternak, serta Rp51 miliar untuk kapal rede.

Di sisi lain, segmen non-penugasan mencatat kinerja yang cukup menggembirakan. Pendapatan meningkat sebesar 15,26% menjadi Rp1,10 triliun, dengan laba bruto naik tajam 265,95% menjadi Rp328,46 miliar. Namun demikian, segmen ini masih mencatat rugi tahun berjalan sebesar Rp130,05 miliar. Kontribusi utama berasal dari pendapatan tambang pasasi yang mencapai Rp1,48 triliun, tambang muatan sebesar Rp339,76 miliar, serta pendapatan *charter* kapal sebesar Rp15,67 miliar yang meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Pendapatan lainnya juga berasal dari keagenan kapal sebesar Rp7,02 miliar, usaha pengusahaan aset sebesar Rp8,65 miliar, lifestyle (Add On, MICE & Wisata Bahari) sebesar Rp 30,8 miliar, usaha galangan kapal sebesar Rp23,08 miliar, serta Hotel Bahtera yang menghasilkan pendapatan Rp5,38 miliar.

Secara keuangan, PT PELNI (Persero) mencatat pertumbuhan aset sebesar 25,48% menjadi Rp10,08 triliun, serta kenaikan ekuitas sebesar 24,90% menjadi Rp8,52 triliun. Meskipun laba tahun berjalan mengalami sedikit penurunan sebesar 3,66% menjadi Rp194,25 miliar, total laba komprehensif tahun berjalan justru meningkat signifikan sebesar 44,57% menjadi Rp199,31 miliar.

Kinerja keuangan ini juga tercermin dari rasio profitabilitas perusahaan, di mana margin laba kotor meningkat menjadi 16,95% sementara margin laba bersih sedikit menurun menjadi 3,14%. Return on Assets (ROA) tercatat sebesar 1,93% dan Return on Equity (ROE) sebesar 2,28%.

Dalam hal likuiditas dan solvabilitas, PT PELNI (Persero) menunjukkan posisi keuangan yang sangat sehat dengan rasio lancar mencapai 501,68% dan rasio kas

Total government revenue from PSO and subsidy schemes reached Rp 3.09 trillion for passenger ships, Rp 408.5 billion for pioneer ships, Rp 172 billion for sea toll cargo vessels, and Rp 10.9 billion for cattle ships, also Rp51 billion for rede ships.

Meanwhile, the non-assignment segment showed encouraging performance with revenue increasing by 15.26% to Rp 1.10 trillion and gross profit rising sharply by 265.95% to Rp 328.46 billion. Despite this, the segment still posted a net loss of Rp 130.05 billion. The main contributors included pasasi freight with Rp 1.48 trillion, cargo freight with Rp 339.76 billion, and charter services which surged to Rp 15.67 billion. Additional revenues were derived from shipping agency services (Rp 7.02 billion), asset management (Rp 8.65 billion), lifestyle - Add On, MICE & Marine Tourism (Rp30.8 billion), shipyard operations (Rp 23.08 billion), and Hotel Bahtera (Rp 5.38 billion).

From a financial standpoint, PT PELNI (Persero)'s total assets rose by 25.48% to Rp 10.08 trillion, while total equity grew by 24.90% to Rp 8.52 trillion. Although net profit declined by 3.66% to Rp 194.25 billion, total comprehensive income for the year increased significantly by 44.57% to Rp 199.31 billion.

The Company's profitability ratios reflected these outcomes, with a gross profit margin of 16.95% and a net profit margin of 3.14%. Return on Assets (ROA) stood at 1.93% and Return on Equity (ROE) at 2.28%.

In terms of liquidity and solvency, PT PELNI (Persero) maintained a strong financial position with a current ratio of 501.68% and a cash ratio of 298.21%. The liabilities



LAPORAN DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS REPORT

sebesar 298,21%. Rasio liabilitas terhadap ekuitas tercatat sebesar 18,31% dan liabilitas terhadap aset sebesar 15,48%, mencerminkan tingkat utang yang sangat terkendali.

Dari sisi arus kas, PT PELNI (Persero) mencatat pertumbuhan signifikan pada arus kas dari aktivitas operasi sebesar 660%, mencapai Rp670,36 miliar. Hal ini turut mendorong saldo kas akhir tahun meningkat 17,75% menjadi Rp4,11 triliun. Peningkatan ini terutama berasal dari penerimaan kas pelanggan dan pencairan dana PSO.

TANTANGAN YANG DIHADAPI DAN LANGKAH STRATEGI YANG DITERAPKAN

Sepanjang tahun 2024, PT PELNI (Persero) menghadapi berbagai tantangan signifikan yang berdampak pada aspek operasional, teknis, dan sumber daya manusia. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan pendanaan investasi dalam upaya peremajaan alat produksi, khususnya kapal penumpang. Keterbatasan ini semakin kompleks mengingat sebagian besar armada PT PELNI (Persero) digunakan untuk menjalankan penugasan dari pemerintah, yang membatasi ruang gerak komersialisasi.

Selain itu, profil umur armada kapal menjadi perhatian tersendiri, di mana sekitar 85% kapal yang beroperasi telah berusia lebih dari 25 tahun. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan risiko keselamatan dan ketidakandalan operasional, tetapi juga menimbulkan inefisiensi teknis yang berdampak pada biaya operasional. Di sisi lain, tantangan internal juga muncul dari aspek ketenagakerjaan, dengan adanya kesenjangan usia tenaga kerja dan proses alih pengetahuan yang belum berjalan optimal.

Pada aspek teknologi, integrasi sistem informasi antar proses bisnis belum berjalan secara menyeluruh, sehingga menghambat efisiensi dan akurasi pengambilan keputusan. Sementara itu, tuntutan masyarakat akan akses transportasi laut yang terjangkau

to equity ratio was recorded at 18.31% and liabilities to assets at 15.48%, indicating a well-managed debt level.

On the cash flow side, operating cash flow surged by 660% to Rp 670.36 billion, boosting the year-end cash balance by 17.75% to Rp 4.11 trillion. This growth was primarily driven by increased cash receipts from customers and disbursements from PSO funding.

CHALLENGES ENCOUNTERED AND STRATEGIC RESPONSES TAKEN

Throughout 2024, PT PELNI (Persero) faced a range of strategic and operational challenges that impacted multiple facets of the organization. One of the key issues was the difficulty in securing investment funding for the sustainable renewal of passenger vessel production assets. This constraint was compounded by the fact that most of PT PELNI (Persero) fleet is allocated for government-assigned duties, thereby limiting the Company's potential for commercial expansion.

Fleet aging became a pressing concern, with approximately 85% of the vessels exceeding 25 years of service. This condition has significantly increased the operational and safety risks, while also contributing to inefficiencies in technical performance and cost structures. Internally, the workforce demographic presented challenges, especially the generational gap and the lack of a systematic knowledge transfer mechanism.

On the technology front, the lack of comprehensive integration between business processes and information systems created bottlenecks in operational efficiency and decision-making. Additionally, the



LAPORAN DIREKSI BOARD OF DIRECTORS REPORT

dan aman terus meningkat, memaksa PT PELNI (Persero) untuk terus berinovasi dalam menjaga kualitas layanan di tengah tekanan sumber daya yang terbatas.

Menjawab berbagai tantangan tersebut, PT PELNI (Persero) telah mengambil langkah-langkah strategis yang terukur. Untuk mengatasi keterbatasan pendanaan, PT PELNI (Persero) menjalin kerja sama pembiayaan dengan perbankan melalui skema *Non-Cash Loan* (NCL). Selain itu, telah disusun rencana penggantian kapal secara bertahap dalam 20 tahun ke depan, sebagai bagian dari strategi keberlanjutan armada.

Dalam upaya penguatan sumber daya manusia, PT PELNI (Persero) melakukan perekrutan tenaga profesional serta menyempurnakan sistem pelatihan internal, termasuk pelaksanaan program pelatihan untuk pelatih (*Training of Trainer*). Transformasi digital juga menjadi bagian dari solusi jangka panjang, yang diwujudkan melalui pengembangan sistem aplikasi terpadu berbasis *Super Apps* guna menyatukan layanan pelanggan dan operasional ke dalam satu *platform* yang terintegrasi.

PENERAPAN GOVERNANSI

Pada tahun 2024, PT PELNI (Persero) menunjukkan komitmen kuat dalam mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/ GCG*) secara menyeluruh dan terukur. Penilaian GCG tahun buku 2024 dilakukan bersama Asesor dari BPKP Perwakilan DKI Jakarta dan menghasilkan skor 87,136 dengan predikat "Sangat Baik", meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Penilaian ini meliputi enam aspek utama, dengan capaian tertinggi pada aspek Komitmen terhadap GCG Berkelanjutan (96,74%), dan aspek Direksi (91,47%) serta Dewan Komisaris (91,42%). Meski telah mencapai predikat sangat baik, *assessment* ini juga mengidentifikasi 28 *Areas of Improvement (Aol)*, yang

public's growing demand for affordable and safe sea transportation placed added pressure on the Company to enhance service quality despite limited resources.

To overcome these challenges, PT PELNI (Persero) has taken several deliberate strategic actions. To address funding limitations, the Company entered into working capital loan agreements with banking institutions under a Non-Cash Loan (NCL) scheme. A long-term plan has also been initiated to replace aging passenger vessels gradually over the next 20 years, ensuring operational continuity.

To strengthen human capital, the Company recruited professional talents and refined its training system, including implementing a Training of Trainer (ToT) program. Furthermore, PT PELNI (Persero) embarked on digital transformation by developing an integrated service application known as the Super Apps, aimed at unifying customer services and operational processes under a single, streamlined digital ecosystem.

GOVERNANCE IMPLEMENTATION

In 2024, PT PELNI (Persero) demonstrated a strong commitment to implementing Good Corporate Governance (GCG) comprehensively and measurably. The GCG assessment for fiscal year 2024, conducted with the State Audit Board (BPKP) of DKI Jakarta, resulted in a score of 87.136 with a "Very Good" rating, showing improvement from prior years.

The evaluation covered six core governance aspects, with the highest achievements recorded in the areas of Commitment to Sustainable GCG (96.74%), the Board of Directors (91.47%), and the Board of Commissioners (91.42%). Despite the high rating, the assessment identified 28 *Areas of Improvement (Aol)*, which are



LAPORAN DIREKSI BOARD OF DIRECTORS REPORT

kini menjadi fokus perbaikan dan pemantauan oleh masing-masing unit kerja dengan supervisi dari Divisi Hukum dan Kepatuhan.

Untuk mengawal perbaikan tersebut, pada awal tahun 2025 telah dilakukan monitoring progres tindak lanjut Aol secara periodik bulanan, yang dilaporkan kepada Direktur Penanggung Jawab GCG. Seluruh kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian *assessment* yang dilakukan sejak Januari hingga Maret 2025, termasuk kegiatan *entry meeting*, pengumpulan dokumen, pengisian kuesioner, wawancara pimpinan, hingga *exit meeting*.

Sebagai perusahaan induk BUMN sistemik kategori konglomerasi, PT PELNI juga menerapkan Tata Kelola Terintegrasi yang melibatkan anak perusahaan yaitu : PT PBM Sarana Bandar Nasional dan PT Pelita Indonesia Djaya. Kebijakan integrasi ini mencakup Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis ISO 37001:2016 dan harmonisasi pedoman tata kelola induk dengan anak perusahaan. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris juga telah menandatangani Piagam Komitmen GCG dan *Code of Conduct*.

Satuan Pengawasan Intern (SPI) juga memainkan peran penting, dengan melaksanakan total 38 objek audit selama tahun 2024, melebihi target tahunan. SPI turut terlibat aktif sebagai counterpart dalam pendampingan audit eksternal oleh BPK dan Itjen Kemenkeu, serta melakukan evaluasi implementasi manajemen risiko dan pengendalian internal secara berkala.

Secara keseluruhan, PELNI tidak hanya mempertahankan standar kepatuhan dan akuntabilitas, tetapi juga terus menyempurnakan sistem governansi melalui digitalisasi, pelaporan terintegrasi, dan partisipasi aktif seluruh organ tata kelola.

ANALISIS PROSPEK USAHA

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau menghadapi tantangan besar dalam hal konektivitas antarwilayah.

currently being addressed by each working unit under the coordination of the Compliance Division, with monthly monitoring reports submitted to the Director in charge of GCG.

This assessment process, conducted between January and March 2025, included activities such as entry meetings, document reviews, questionnaires, executive interviews, and exit meetings. It also marked the start of enhanced compliance supervision and policy alignment across all levels.

As a systemic conglomerate state-owned enterprise (SOE), PT PT PELNI (Persero) also applies Integrated Governance, incorporating its subsidiaries: PT PBM Sarana Bandar Nasional and PT Pelita Indonesia Djaya. This includes the implementation of Anti-bribery Management System based on ISO 37001:2016, and harmonized governance guidelines between the parent company and its subsidiaries. All members of the Board of Directors and Commissioners have signed GCG Commitment Charters and the Code of Conduct.

The Internal Audit Unit (SPI) played a vital role, conducting 38 audit objects—surpassing the annual target. SPI was actively involved as a counterpart in external audits by BPK and the Ministry of Finance Inspectorate General, and conducted regular evaluations of risk management and internal controls.

Overall, PT PELNI (Persero) has not only maintained a high standard of compliance and accountability but has also continued to refine its governance framework through digitalization, integrated reporting, and the active participation of all governance bodies.

BUSINESS OUTLOOK ANALYSIS

Indonesia, the world's largest archipelagic nation with over 17,000 islands, faces a major challenge in inter-island connectivity. In this context, the maritime



LAPORAN DIREKSI BOARD OF DIRECTORS REPORT

Dalam konteks ini, peran strategis sektor transportasi laut menjadi sangat penting sebagai tulang punggung penghubung antarpulau dan penggerak pertumbuhan ekonomi. Sepanjang tahun 2024, industri transportasi laut Indonesia menunjukkan kinerja positif dengan peningkatan jumlah penumpang angkutan laut domestik sebesar 20,46% menjadi 25,9 juta orang, serta peningkatan volume muatan barang sebesar 1,45% menjadi 379,2 juta ton.

Tren positif ini menjadi fondasi optimisme dalam menatap prospek tahun 2025, terutama dengan dicanangkannya Visi Indonesia Emas 2045 dan penguatan transformasi nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2029. Dalam dokumen RPJPN tersebut, terdapat delapan agenda strategis transformasi, di antaranya transformasi ekonomi, pengembangan infrastruktur dan konektivitas ramah lingkungan, serta pembangunan kewilayahan yang adil dan merata. Transportasi laut mendapat perhatian strategis sebagai instrumen vital dalam mendukung pembangunan ekonomi kawasan 3TP (Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan), sekaligus memperkuat daya saing nasional sebagai negara kepulauan.

Mengacu pada arah kebijakan Kementerian BUMN yang dituangkan dalam Pedoman Perencanaan Strategis 2024-2034, PT PELNI (Persero) menetapkan strategi Fase 1 (2025-2026) dengan tema *Quality-Assured Shipping Operator*. Strategi ini bertujuan untuk menghadirkan operasi yang terstandarisasi, layanan unggul, portofolio bisnis yang berdaya saing tinggi, ekspansi bisnis komersial, dan penerapan budaya keselamatan dengan target *zero accident*.

Untuk mendukung pencapaian tujuan strategis tersebut, Perseroan telah menetapkan peta strategi berbasis *balanced scorecard* dengan fokus pada empat aspek utama:

1. Aspek Finansial: Meningkatkan kinerja keuangan korporat dengan menjaga keberlanjutan bisnis, memperkuat kesehatan perusahaan, dan meningkatkan kontribusi pendapatan dari unit

transport sector plays a strategic role as a backbone for national integration and economic growth. In 2024, Indonesia's maritime transport industry recorded a solid performance, with domestic passenger numbers rising 20.46% to 25.9 million and cargo volume increasing by 1.45% to 379.2 million tons.

These positive trends form a strong foundation for the 2025 outlook, especially in line with the Golden Indonesia 2045 Vision and the long-term transformation outlined in the National Long-Term Development Plan (RPJPN) 2025-2029. The RPJPN includes eight strategic transformation agendas, such as economic transformation, equitable regional development, and the construction of environmentally sustainable infrastructure and logistics connectivity. Maritime transport plays a crucial role in supporting development in the 3TP (underdeveloped, frontier, outermost, and border) areas while enhancing Indonesia's competitiveness as a maritime nation.

Aligned with the Ministry of SOEs' Strategic Planning Guidelines 2024-2034, PT PELNI (Persero) will adopt the Phase 1 strategy (2025-2026) under the theme *Quality-Assured Shipping Operator*. The objectives include standardized operations, service excellence, competitive business portfolio development, commercial business expansion, and zero-accident safety performance.

To ensure the successful implementation of this strategy, the Company has formulated a strategic map based on the balanced scorecard, focusing on four main perspectives:

1. Financial Perspective: Enhancing corporate financial performance through sustainable business continuity, maintaining sound financial health, and growing income from non-assignment



LAPORAN DIREKSI BOARD OF DIRECTORS REPORT

bisnis non-penugasan.

2. Aspek Pelanggan: Meningkatkan kepuasan pelanggan dan tingkat okupansi alat produksi sebagai cerminan daya saing layanan.
3. Aspek Proses Bisnis Internal: Fokus pada peningkatan efektivitas operasional, penjualan angkutan komersial dan non-komersial, optimalisasi pelaksanaan penugasan pemerintah, serta penguatan standar keselamatan pelayaran.
4. Aspek Pembelajaran dan Pertumbuhan: Penguatan kapabilitas organisasi dan SDM unggul yang kompetitif secara global, serta optimalisasi sistem teknologi untuk mendukung operasional dan bisnis.

Dengan strategi tersebut, PELNI menargetkan pertumbuhan yang berkelanjutan pada tahun 2025 sekaligus memperkuat posisinya sebagai operator pelayaran nasional yang profesional, berstandar tinggi, dan mampu menjawab tantangan konektivitas Indonesia.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Pada tahun 2024 terdapat satu kali perubahan pada komposisi Direksi, dimana Bapak Yossianis Marciano selaku Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut digantikan oleh Bapak Kokok Susanto melalui Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-70/MBU/03/2024 tanggal 18 Maret 2024.

APRESIASI DAN PENUTUP

Direksi PT PELNI (Persero) menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan atas dukungan, kepercayaan, dan kerja sama yang telah diberikan sepanjang tahun 2024. Capaian dan kemajuan yang diraih Perseroan tidak lepas dari kontribusi aktif para pemegang saham,

business units.

2. Customer Perspective: Improving customer satisfaction and production asset occupancy as indicators of service competitiveness.
3. Internal Business Process Perspective: Enhancing operational effectiveness, boosting sales of commercial and non-commercial transport services, optimizing government assignment delivery, and reinforcing maritime safety standards.
4. Learning & Growth Perspective: Strengthening organizational capability and global competitiveness of human capital, and integrating advanced systems and technology to support operations and business.

Through this strategy, PT PELNI (Persero) aims to achieve sustainable growth in 2025 and solidify its position as a high-standard, professional national shipping operator capable of addressing Indonesia's complex connectivity challenges.

CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

In 2024, there was one change in the composition of the Board of Directors, in which Mr. Yossianis Marciano, who served as Director of Cargo and Sea Toll Services, was replaced by Mr. Kokok Susanto pursuant to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. SK-70/MBU/03/2024 dated March 18, 2024.

APPRECIATION AND CLOSING STATEMENT

The Board of Directors of PT PELNI (Persero) extends its highest appreciation and gratitude to all stakeholders for their unwavering support, trust, and collaboration throughout 2024. The Company's achievements and progress would not have been possible without the valuable contributions from shareholders, the Board



LAPORAN DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS REPORT

Dewan Komisaris, seluruh insan PELNI, mitra usaha, pelanggan setia, serta regulator yang senantiasa memberikan arahan dan pengawasan.

Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam perjalanan transformasi Perseroan menuju entitas pelayaran nasional yang andal, efisien, dan berdaya saing tinggi. Dalam menghadapi tantangan, Perseroan tetap konsisten menjaga kualitas layanan publik, sekaligus terus mengembangkan lini usaha komersial untuk memperkuat keberlanjutan bisnis.

Kami menyadari bahwa tahun-tahun ke depan masih akan dipenuhi dengan dinamika dan tantangan yang tidak ringan. Namun dengan semangat kolaborasi, profesionalisme, dan inovasi, kami yakin PT PELNI (Persero) akan mampu mengoptimalkan peran strategisnya dalam mendukung konektivitas maritim nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Direksi berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola perusahaan, memperkuat fondasi bisnis, serta memberikan nilai tambah yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.

of Commissioners, all PT PELNI (Persero) employees, business partners, loyal customers, and regulators who have consistently provided guidance and oversight.

The year 2024 marked a significant milestone in the Company's transformation journey toward becoming a reliable, efficient, and highly competitive national shipping entity. Amidst numerous challenges, PT PELNI (Persero) remained steadfast in delivering high-quality public services while developing its commercial business lines to ensure long-term sustainability.

We recognize that the coming years will continue to present dynamic and complex challenges. Nevertheless, through collaboration, professionalism, and innovation, we are confident that PT PELNI (Persero) will optimize its strategic role in supporting national maritime connectivity and fostering inclusive and sustainable economic growth.

The Board of Directors remains committed to strengthening corporate governance, enhancing business fundamentals, and delivering optimal value to all stakeholders.

Atas Nama Direksi
On behalf of the Board of Directors
PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)



TRI ANDAYANI
Direktur Utama
President Director



SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2024 PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)

STATEMENT OF RESPONSIBILITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
AND THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2024 ANNUAL REPORT OF
PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Mei 2025

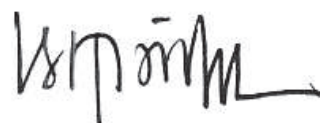
DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners



Muhammad Awaluddin
 Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen
 President Commissioner and Independent Commissioner



Kristia Budiarto
 Komisaris Independen
 Independent Commissioner



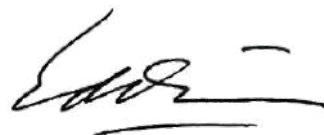
Budi Mantoro
 Komisaris
 Commissioner



Faturohman
 Komisaris
 Commissioner



Raden Suhartono
 Komisaris
 Commissioner



Eddy Susanto Soepadmo
 Komisaris
 Commissioner



**SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN TAHUNAN 2024
PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)**

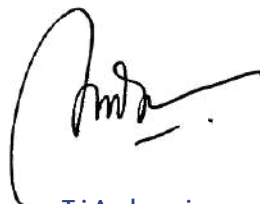
STATEMENT OF RESPONSIBILITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
AND THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2024 ANNUAL REPORT OF
PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)

We, the undersigned, hereby declare that all information in the 2024 Annual Report of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) has been fully disclosed and we bear full responsibility for the accuracy of the contents of the Annual Report and the Financial Statements.

This statement is made truthfully.

Jakarta, May 2025

DIREKSI
Board of Directors



Tri Andayani
Direktur Utama
President Director



Nuraini Dessy W
**Direktur Usaha Angkutan
Penumpang**
Director of Passenger Transportation



Heri Purnomo
Direktur SDM dan Umum
Director of Human Resources and
General Affairs



Anik Hidayati
**Direktur Keuangan dan
Manajemen Risiko**
Director of Finance and
Risk Management



Kokok Susanto
**Direktur Usaha Angkutan Barang
dan Tol Laut**
Director of Freight and Sea Toll
Business



Robert M.P. Sinaga
Direktur Armada dan Teknik
Director of Fleet and Engineering





03

PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE





IDENTITAS PERUSAHAAN COMPANY IDENTITY



Nama Perusahaan
Company Name
PT Pelayaran Nasional Indonesia

Nama Panggilan
Nickname
PELNI



Bidang Usaha
Line of Business
Pelayaran
Shipping



Badan Hukum
Legal Entity
Perseoran Terbatas
Limited Liability Company



Tanggal Pendirian
Date of Establishment
28 April 1952
April 28, 1952

Tanggal Operasi
Date of Establishment
28 April 1952
April 28, 1952



Dasar Pendirian
Deed of Establishment
Akta pendirian No. 92 tanggal 28 April 1952 yang dibuat di hadapan Raden Kadiran Notaris di Jakarta
Establishment Act No. 92 dated April 28, 1952, drawn up before Raden Kadiran, Notary in Jakarta



Status Perusahaan
Company Status
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
State-Owned Enterprise (SOE)



Kepemilikan Saham
Share Ownership
100% Pemerintah Indonesia
100% owned by the Government of Indonesia



IDENTITAS PERUSAHAAN

COMPANY IDENTITY



Modal Dasar
Authorized Capital
Rp13.000.000.000.000,-



Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Taxpayer Identification Number (NPWP)
01.001.637.6-093.000



Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Issued and Fully Paid Capital
Rp7.629.900.000.000,-



Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)
Maritime Transport Business License (SIUPAL)
AL.010/1645/DA-2023



Telepon
Telephone
(021) 6334342



Jumlah Karyawan (31 Desember 2024)
Number of Employees (as of December 31, 2024)
5.011 karyawan
5,011 employees



Faksimili
Facsimile
(021) 63854130



Alamat dan Kontak Perusahaan
Company Address and Contact
Jl. Gajah Mada No. 14 Jakarta Pusat 10130



Email
Email
infopelni162@pelni.co.id



Situs Web
Website
www.pelni.co.id



RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

BRIEF HISTORY OF THE COMPANY

Sejarah PT PELNI (Persero) dimulai melalui dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 5 September 1950 sebagai dasar hukum pendirian Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-kapal (PEPUSKA).

The history of PT PELNI (Persero) began with the issuance of a Joint Decree (SKB) between the Minister of Transportation and the Minister of Public Works on September 5, 1950, which served as the legal basis for establishing the Central Ship Control Foundation (PEPUSKA).



Yayasan PEPUSKA didirikan sebagai tindak lanjut atas penolakan pemerintah Belanda terhadap permintaan Indonesia untuk mengubah status maskapai pelayaran Belanda, yaitu N.V. K.P.M (Koninklijke Paketvaart Matschappij), menjadi Perseroan Terbatas. Di samping itu, Pemerintah Indonesia juga menginginkan agar kapal-kapal KPM menggunakan bendera merah-putih dalam beroperasi di perairan Indonesia. Pemerintah Belanda kembali menolak permintaan yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia.

Dengan 8 (delapan) unit kapal dengan total tonage 4.800 DWT (*Dead Weight Tonnage*) sebagai modal awal, PEPUSKA berlayar berdampingan dengan armada KPM yang telah berpengalaman lebih dari setengah abad. Persaingan tersebut bukanlah persaingan yang seimbang, karena selain telah berpengalaman, armada KPM juga berjumlah lebih banyak serta memiliki kontrak-kontrak monopoli.

Kemudian, pada 28 April 1952, Yayasan PEPUSKA resmi dibubarkan. Pada saat yang sama, PT PELNI (Persero) didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri

The PEPUSKA Foundation was established as a response to the Dutch government's rejection of Indonesia's request to change the status of the Dutch shipping company, N.V. K.P.M (Koninklijke Paketvaart Matschappij), to a Limited Liability Company. Additionally, the Indonesian government desired that KPM ships operate under the Indonesian flag. However, the Dutch government again rejected this request.

With an initial capital of eight vessels totaling 4,800 DWT (Dead Weight Tonnage), PEPUSKA sailed alongside the KPM fleet, which had more than half a century of experience. This competition was unequal, as the KPM fleet not only had more experience but also a larger number of ships and monopoly contracts.

On April 28, 1952, the PEPUSKA Foundation was officially dissolved. Simultaneously, PT PELNI (Persero) was established based on the Decree of the Minister



RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

BRIEF HISTORY OF THE COMPANY



Perhubungan Nomor M.2/1/2 tanggal 28 Februari 1952 dan No. A.2/1/2 tanggal 19 April 1952, serta Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 20 Juni 1952. R. Ma'moen Soemadipraja diangkat sebagai Presiden Direktur pertama PT PELNI (Persero) (1952-1955).

Sebagai modal awal, Yayasan PEPUSKA menyerahkan 8 (delapan) unit kapal yang dimiliki kepada PT PELNI (Persero). Sebagai tambahan, Bank Ekspor Impor menyediakan dana yang kemudian digunakan untuk memesan 45 *coaster* dari Eropa Barat. Sembari menunggu datangnya *coaster* tersebut, PT PELNI (Persero) mencarter kapal-kapal asing yang terdiri dari kapal dengan berbagai macam bendera. Langkah tersebut diambil untuk mengisi trayek-trayek yang ditinggalkan KPM. Setelah itu, satu per satu kapal yang dicarter tersebut diganti dengan yang dipesan dari Eropa, ditambah dengan kapal-kapal rampasan perang dari Jepang.

Sampai dengan saat ini, PT PELNI (Persero) telah mengalami 2 (dua) kali perubahan status. Pertama,

of Transportation No. M.2/1/2 dated February 28, 1952, and No. A.2/1/2 dated April 19, 1952, as well as the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 50 dated June 20, 1952. R. Ma'moen Soemadipraja was appointed as the first President Director of PT PELNI (Persero) (1952-1955).

As initial capital, the PEPUSKA Foundation transferred its 8 (eight) vessels to PT PELNI (Persero). Additionally, the Export-Import Bank provided funds that were used to order 45 *coasters* from Western Europe. While awaiting the arrival of these *coasters*, PT PELNI (Persero) chartered foreign ships flying various flags to cover the routes abandoned by KPM. Subsequently, these chartered ships were replaced one by one with *coasters* ordered from Europe, along with war prize ships from Japan.

To date, PT PELNI (Persero) has undergone two status changes. First, in 1961, the Indonesian government



RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

BRIEF HISTORY OF THE COMPANY

pada tahun 1961, Pemerintah Indonesia menetapkan perubahan status dari Perusahaan Perseroan menjadi Perusahaan Negara (PN), yang dicantumkan dalam Lembaran Negara RI No. LN 1961. , pada tahun 1975, status PT PELNI (Persero) diubah dari Perusahaan Negara menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai Akta Pendirian No.31 tanggal 30 Oktober 1975. Perubahan tersebut termuat di dalam Berita Negara RI No. 562-1976 dan Tambahan Berita Negara RI No. 60 tanggal 27 Juni 1976.

Seiring perkembangan usaha, PT PELNI (Persero) mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan usaha. Pada tahun 1975, PT PELNI (Persero) beroperasi sebagai badan usaha Perseroan sesuai Akta Pendirian Nomor 31 tanggal 30 Oktober 1975 dan Akte Perubahan Nomor 22 tanggal 4 Maret 1998 tentang Anggaran Dasar PT. PT PELNI (Persero) yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 April 1999 Nomor 31 tambahan Berita Negara Nomor 2203.

Kemudian, seiring perkembangan usaha, PT PELNI (Persero) tidak hanya melayani jasa transportasi kapal laut. Dengan dukungan Program Tol Laut oleh Pemerintah Indonesia, saat ini PT PELNI (Persero) mengoperasikan 8 (delapan) Kapal Tol Laut yang melayani angkutan/muatan kontainer berupa bahan makanan pokok maupun bahan bangunan untuk pembangunan infrastruktur. Lebih dari itu, PT PELNI (Persero) juga memiliki layanan keagenan kapal yang siap memenuhi beragam kebutuhan kapal selama berada di perairan Indonesia. PT PELNI (Persero) telah menghadirkan dukungan terhadap pengembangan pariwisata bahari Indonesia dengan memberikan layanan paket wisata bahari ke pulau-pulau yang memiliki keindahan bawah laut dan pemandangan alam yang mengagumkan, antara lain Kepulauan Raja Ampat, Wakatobi, Banda Neira, Pulau Komodo, Takabonerate, Karimun Jawa, Bunaken, Anambas, Derawan dan Tomini.

Sampai dengan saat ini, PT PELNI (Persero) mengoperasikan armada kapal penumpang, kapal cepat dan armada kapal barang. PT PELNI (Persero) melayani rute perjalanan domestik dan telah menyinggahi lebih dari 94 pelabuhan di seluruh pelosok kepulauan

changed its status from a Limited Liability Company to a State-Owned Enterprise (PN), as noted in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. LN 1961. Second, in 1975, PT PELNI (Persero) status was changed from a State-Owned Enterprise to a Limited Liability Company (PT) in accordance with the Deed of Establishment No. 31 dated October 30, 1975. This change was recorded in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 562-1976 and Supplement to the State Gazette No. 60 dated June 27, 1976.

As business developed, PT PELNI (Persero) experienced several changes in its business form. In 1975, PT PELNI (Persero) operated as a Limited Liability Company according to the Deed of Establishment No. 31 dated October 30, 1975, and Deed of Amendment No. 22 dated March 4, 1998, concerning the Articles of Association of PT PELNI (Persero), which was announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia on April 16, 1999, No. 31, Supplement to the State Gazette No. 2203.

Subsequently, as business expanded, PT PELNI (Persero) not only provided sea transportation services. Supported by the Sea Toll Program by the Indonesian government, PT PELNI (Persero) now operates eight Sea Toll Ships transporting container cargo, including staple foods and building materials for infrastructure development. Moreover, PT PELNI (Persero) also offers ship agency services to meet various ship needs while in Indonesian waters. PT PELNI (Persero) has supported the development of Indonesian marine tourism by providing marine tourism packages to islands with stunning underwater beauty and natural scenery, including the Raja Ampat Islands, Wakatobi, Banda Neira, Komodo Island, Takabonerate, Karimun Jawa, Bunaken, Anambas, Derawan, and Tomini.

To date, PT PELNI (Persero) operates passenger ships, fast ferries, and cargo ships. PT PELNI (Persero) serves domestic routes and has visited over 94 ports throughout the Indonesian archipelago. The facilities and services provided on PT PELNI (Persero) fleet



RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

BRIEF HISTORY OF THE COMPANY

Nusantara. Fasilitas dan layanan yang disediakan pada armada kapal PT PELNI (Persero) dirancang untuk menjamin standar keselamatan dan kenyamanan seluruh pelanggan dan kru laut, dengan didukung oleh keberadaan Sumber Daya Manusia yang profesional dan senantiasa mengutamakan kepuasan pelanggan.

Sebagai entitas BUMN, PT PELNI (Persero) beroperasi seiring penerapan core values "AKHLAK" berdasarkan Surat Menteri BUMN No. SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Inti Sumber Daya Manusia BUMN. "AKHLAK" merupakan singkatan dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif, sebagai nilai-nilai budaya yang diterapkan oleh seluruh insan PT PELNI (Persero).

Sejak 2015, PT PELNI (Persero) dipercaya oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai operator Kapal Perintis, Kapal Tol Laut, dan Kapal Ternak yang menjangkau sejumlah titik terjauh di wilayah Indonesia.

Pada tahun 2023, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) resmi meluncurkan logo baru beserta tagline baru "We Connect, We Unify".

PT PELNI (Persero) sebagai Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa pelayaran saat ini mengoperasikan 26 Kapal Penumpang yang melayani 1.058 ruas dan menyinggahi 71 pelabuhan.

Selain angkutan penumpang, PT PELNI (Persero) juga melayani 42 trayek Kapal Perintis yang menjadi sarana aksesibilitas bagi mobilitas penduduk di wilayah 3TP, di mana Kapal Perintis menyinggahi 273 pelabuhan dengan total 3.495 ruas. PT PELNI (Persero) juga mengoperasikan sebanyak 16 Kapal Rede. Untuk pelayanan bisnis logistik, saat ini PT PELNI (Persero) mengoperasikan 10 trayek Tol Laut serta 1 trayek khusus untuk Kapal Ternak.

INFORMASI PERGANTIAN NAMA PERUSAHAAN

Sejak didirikan sampai dengan 31 Desember 2024, PT PELNI (Persero) belum pernah melakukan pergantian nama.

are designed to ensure the safety and comfort of all customers and crew, supported by professional Human Resources who prioritize customer satisfaction.

As a State-Owned Enterprise, PT PELNI (Persero) operates by implementing the core values of "AKHLAK," based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SE-7/MBU/07/2020 concerning Core Values of Human Resources of State-Owned Enterprises. "AKHLAK" stands for Amanah (Trustworthy), Kompeten (Competent), Harmonis (Harmonious), Loyal, Adaptif (Adaptive), and Kolaboratif (Collaborative), as cultural values applied by all PT PELNI (Persero) personnel.

Since 2015, PT PELNI (Persero) has been entrusted by the Government of the Republic of Indonesia as the operator of Pioneer Ships, Sea Toll Ships, and Livestock Ships reaching the farthest points in Indonesia.

In 2023, PT Pelayaran Nasional Indonesia or PT PELNI (Persero) officially launched a new logo and the new tagline "We Connect, We Unify."

As a State-Owned Enterprise engaged in the shipping services sector, PT PELNI (Persero) currently operates 26 Passenger Ships serving 1,058 routes and calling at 71 ports.

In addition to passenger transport, PT PELNI (Persero) also operates 42 Pioneer Ship routes, providing accessibility for the mobility of residents in the 3TP (frontier, outermost, and remote) areas, where Pioneer Ships call at 273 ports with a total of 3,495 routes. PT PELNI (Persero) also operates 16 Rede Ships. For logistics business services, PT PELNI (Persero) currently operates 10 Sea Toll routes and one special route for Livestock Ships.

INFORMATION ON COMPANY NAME CHANGE

Since its establishment until December 31, 2024, PT PELNI (Persero) has not changed its name.



PENJELASAN LOGO PERUSAHAAN

COMPANY LOGO EXPLANATION



FILOSOFI LOGO

PT PELNI (Persero) adalah perusahaan di bidang transportasi laut yang menjadi tulang punggung negara. Selalu bergerak maju (*moving forward*) adalah sebuah credo yang terus ditanamkan bagi perusahaan dalam upaya mempersatukan dan memajukan Indonesia.

Logo terinspirasi dari gerakan maju sebuah kapal memecah laut yang menghasilkan garis-garis arus pada air dan dipadukan dengan segitiga yang membentuk huruf P - sebagai simbol layar kapal - yang melambangkan upaya PT PELNI (Persero) yang konsisten bergerak dan terus maju menjadi perusahaan pelayaran dan logistik maritim terkemuka di Asia Tenggara.

Penggunaan gradasi warna biru, selain merupakan warna laut, juga melambangkan stabilitas, kekuatan, keseriusan, integritas, profesionalisme, kepercayaan dan keandalan.

LOGO PHILOSOPHY

PT PELNI (Persero) is a company in the field of sea transportation that serves as the backbone of the nation. The motto "always moving forward" is instilled in the company as it strives to unite and advance Indonesia.

The logo is inspired by the forward movement of a ship cutting through the sea, creating lines of currents in the water, combined with a triangle forming the letter "P" - symbolizing the ship's sail - which represents PT PELNI (Persero) consistent efforts to move forward and become a leading maritime shipping and logistics company in Southeast Asia.

The use of blue color gradients, besides representing the sea, also symbolizes stability, strength, seriousness, integrity, professionalism, trust, and reliability.



PENJELASAN LOGO PERUSAHAAN

COMPANY LOGO EXPLANATION

Logo baru PT PELNI (Persero) dilengkapi dengan tagline "We Connect, We Unify" yang menunjukkan komitmen perusahaan sebagai agen Pembangunan yang berperan memperkuat konektivitas serta aksesibilitas masyarakat.

Komitmen ini dilakukan melalui penguatan konektivitas transportasi laut di Indonesia guna menunjang terwujudnya Wawasan Nusantara sekaligus menjadikan PT PELNI (Persero) menjadi salah satu perusahaan pelayaran dan logistik maritim terkemuka di Asia Tenggara.

WARNA PRIMER DAN SEKUNDER LOGO

Berikut ini adalah warna primer dari logo PELNI yang bisa diterapkan pada semua media.

The new PT PELNI (Persero) logo is complemented by the tagline "We Connect, We Unify," which demonstrates the company's commitment as an agent of development, playing a role in strengthening community connectivity and accessibility.

This commitment is realized through the enhancement of sea transportation connectivity in Indonesia to support the realization of the Archipelagic Vision, while also positioning PT PELNI (Persero) as one of the leading maritime shipping and logistics companies in Southeast Asia.

PRIMARY AND SECONDARY COLORS OF THE LOGO

The following are the primary colors of the PELNI logo, which can be applied across all media.

Biru Primer

Primary Blue

R: 42 G: 67 B: 138
C: 98 M: 88 Y: 16 K: 0
Pantone: P 2728 C

Biru Sekunder

Secondary Blue

R: 68 G: 127 B: 193
C: 75 M: 54 Y: 0 K: 0
Pantone: P 2172 C

Biru Tertier

Tertiary Blue

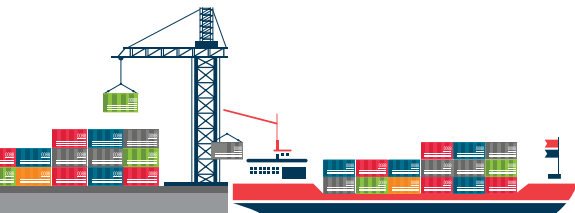
R: 117 G: 190 B: 233
C: 50 M: 10 Y: 0 K: 0
Pantone: P 2190 C

Abu-Abu

Gray

R: 150 G: 153 B: 15
C: 45 M: 35 Y: 35 K: 0
Pantone: P Cool
Grey 7 C

JEJAK LANGKAH PERUSAHAAN COMPANY MILESTONES



1950

Terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 5 September 1950 yang isinya mendirikan Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-kapal (PEPUSKA).

Issuance of a Joint Decree (SKB) between the Minister of Transportation and the Minister of Public Works on September 5, 1950, establishing the Central Ship Control Foundation (PEPUSKA).

1952

PT PELNI (Persero) resmi didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan R. Djuanda No. 2/1/2 tanggal 23 Februari 1952.

PT PELNI (Persero) was officially established based on the Decree of the Minister of Transportation R. Djuanda No. 2/1/2 dated February 23, 1952.

1953



Perubahan status hukum PT PELNI (Persero) menjadi Perusahaan Negara (PN) dan menjadikan PT PELNI (Persero) sebagai Agen Pemerintah (Government Agency).

Legal status change of PT PELNI (Persero) to a State-Owned Enterprise (PN), making PT PELNI (Persero) a Government Agency.

2014

PT PELNI (Persero) mulai menggelar paket wisata Let's Go dan Event onboard.

PT PELNI (Persero) began offering "Let's Go" tourism packages and onboard events.

1981

Penyerahan pengelolaan pelayaran Perintis kepada PT PELNI (Persero) dengan mengoperasikan 35 unit Kapal Perintis.

Management of Pioneer Shipping handed over to PT PELNI (Persero), operating 35 Pioneer Ships.

1975

PT PELNI (Persero) resmi didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan R. Djuanda No. 2/1/2 tanggal 23 Februari 1952.

PT PELNI (Persero) was officially established based on the Decree of the Minister of Transportation R. Djuanda No. 2/1/2 dated February 23, 1952.



Penunjukkan PT PELNI (Persero) oleh Pemerintah RI sebagai operator Kapal Perintis, Kapal Tol Laut dan Kapal Ternak yang menjangkau di wilayah Indonesia.

Appointment of PT PELNI (Persero) by the Indonesian Government as the operator of Pioneer Ships, Sea Toll Ships, and Livestock Ships covering Indonesian regions.

2015

2016

PT PELNI (Persero) meningkatkan kapasitas armadanya dengan mengoperasikan 80 (delapan puluh) kapal.

PT PELNI (Persero) expanded its fleet capacity by operating 80 ships.



JEJAK LANGKAH PERUSAHAAN COMPANY MILESTONES

Perusahaan menerapkan pengembangan layanan bagi pelanggan, antara lain dengan mengadakan paket City Tour bagi penumpang kelas ekonomi. Di samping itu, Perusahaan juga telah menyediakan layanan Super Apps (aplikasi pemesanan digital) pada 28 September 2022 (Google Playstore) dan 15 Oktober 2022 (Apps Store).

The company enhanced customer services, including providing City Tour packages for economy class passengers. Additionally, the company launched the Super Apps (digital booking application) on September 28, 2022 (Google Playstore) and October 15, 2022 (App Store).

2022

2023



PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) resmi meluncurkan logo baru beserta *tagline* baru "We Connect, We Unify".

PT Pelayaran Nasional Indonesia or PT PELNI (Persero) officially launched a new logo and the new *tagline* "We Connect, We Unify."



2021

Perusahaan memiliki strategi sesuai dengan RJPP Transformasi Perusahaan yang meliputi Visi, Misi dan Roadmap tahun 2020-2024 Perubahan yang disahkan melalui RUPS RKAP Perseroan No. 01.29/01/BA/090/2021 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2021.

The company devised a strategy in accordance with the Corporate Transformation Long-Term Plan (RJPP) encompassing Vision, Mission, and Roadmap for 2020-2024, ratified through the GMS RKAP Perseroan No. 01.29/01/BA/090/2021 on the Ratification of the Corporate Work Plan and Budget for 2021.

2020

PT PELNI (Persero) mengimplementasikan Budaya Perusahaan sesuai dengan Surat Menteri BUMN No. SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Utama Sumber Daya Manusia BUMN yaitu AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

PT PELNI (Persero) implemented Corporate Culture in line with the Decree of the Minister of SOEs No. SE-7/MBU/07/2020 on the Core Values of SOE Human Resources, namely AKHLAK (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative).

PT PELNI (Persero) menetapkan Tata Nilai (Integrity, Continuous Improvement, Customer Focus, Competitive), Budaya Perusahaan (Peduli, Ekselen, Inovasi) dan Perilaku "JUARA" (Jujur, Unggul, Adaptasi, Ramah, Akurat).

PT PELNI (Persero) established Core Values (Integrity, Continuous Improvement, Customer Focus, Competitive), Corporate Culture (Caring, Excellence, Innovation), and "CHAMPION" behavior (Honest, Excellent, Adaptive, Friendly, Accurate).

PT PELNI (Persero) menerapkan strategi bisnis berupa sinergi BUMN dan sistem operasi berbasis digital.

PT PELNI (Persero) implemented a business strategy based on SOE synergy and digital operation systems.

PT PELNI (Persero) menetapkan Visi 2020 - 2024: "Menjadi Perusahaan Pelayaran dan Logistik Maritim Terkemuka di Asia Tenggara"

PT PELNI (Persero) set the Vision for 2020-2024: "To Become the Leading Maritime Shipping and Logistics Company in Southeast Asia."

2017

2018

2019

VISI DAN MISI PERUSAHAAN

COMPANY VISION AND MISSION

PENETAPAN VISI DAN MISI

Visi dan Misi PT PELNI (Persero) telah disahkan melalui Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 01.29/01/ BA/090/2021 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2021. Visi dan Misi tersebut juga dievaluasi oleh Dewan Komisaris secara periodik.

VISION AND MISSION ESTABLISHMENT

The Vision and Mission of PT PELNI (Persero) have been ratified through the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.01.29/01/BA/090/2021 on the Ratification of the Corporate Work Plan and Budget for 2021. The Vision and Mission are also periodically evaluated by the Board of Commissioners.



Menjadi Perusahaan Pelayaran dan Logistik Maritim Terkemuka di Asia Tenggara.

To become the Leading Maritime Shipping and Logistics Company in Southeast Asia.

MAKNA VISI PT PELNI (PERSERO)

MEANING OF THE VISION OF PT PELNI (PERSERO)



PERUSAHAAN PELAYARAN

Suatu badan usaha yang menjalankan operasional kapal atau usaha lain yang erat hubungannya dengan kapal yang ditata dalam sistem transportasi yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik mampu melakukan pengangkutan secara massal, menghubungkan, dan menjangkau seluruh wilayah melalui perairan.

SHIPPING COMPANY

An enterprise that operates ships or other businesses closely related to ships, organized within a dynamic transportation system capable of adapting to future advancements, characterized by its ability to perform mass transportation, connect, and reach all regions via waterways.



LOGISTIK MARITIM

Sistem yang mencakup semua kegiatan yang terlibat dalam manajemen transportasi maritim yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap suatu proses perpindahan barang atau sumber daya lainnya, dari titik awal menuju titik penggunaan yang mencakup *inland transport*, *warehousing*, *cargo handling*, *shipping*, dan *port services*.

MARITIME LOGISTICS

A system encompassing all activities involved in the management of maritime transport, including planning, implementation, and supervision of the process of moving goods or other resources from the point of origin to the point of use, which includes inland transport, warehousing, cargo handling, shipping, and port services.



VISI DAN MISI PERUSAHAAN COMPANY VISION AND MISSION



TERKEMUKA

1. Memiliki jaringan trayek yang optimal.
2. Memiliki pertumbuhan kinerja perusahaan yang optimal.
3. Memiliki *operation & service excellence*.
4. *Center of excellence* usaha pelayaran nasional, yang meliputi sumber daya manusia, produksi, distribusi, pelayanan, keselamatan, dan kesehatan lingkungan.

ASIA TENGGARA

PT PELNI (Persero) akan membuka jaringan bisnis untuk menjaga pertumbuhan dengan melakukan ekspansi ke negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara.

LEADING

1. Having an optimal route network.
2. Exhibiting optimal company performance growth.
3. Ensuring operational and service excellence.
4. Being a center of excellence in national shipping business, encompassing human resources, production, distribution, service, safety, and environmental health.

SOUTHEAST ASIA

PT PELNI (Persero) will expand its business network to maintain growth by expanding into countries within the Southeast Asia region.



1. Menjamin aksesibilitas masyarakat dengan mengelola angkutan laut untuk menunjang terwujudnya Wawasan Nusantara.
2. Mengelola dan mengembangkan usaha logistik maritim di Indonesia dan Asia Tenggara.
3. Meningkatkan nilai perusahaan melalui kreativitas, inovasi, digitalisasi proses bisnis, dan pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan.
4. Menjalankan usaha secara adil dengan memperhatikan azas manfaat bagi semua pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip *good corporate governance*.
5. Berkontribusi positif terhadap negara dan karyawan, serta berperan aktif dalam pembangunan lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat.

1. Ensuring community accessibility by managing sea transportation to support the realization of the Archipelagic Vision.
2. Managing and developing maritime logistics businesses in Indonesia and Southeast Asia.
3. Enhancing company value through creativity, innovation, digitalization of business processes, and human resource development to achieve sustainable growth.
4. Conducting business fairly by considering the principles of benefits for all stakeholders by implementing good corporate governance principles.
5. Contributing positively to the country and employees, and actively participating in environmental development and community service.

NILAI-NILAI PERUSAHAAN CORPORATE VALUES

Menindaklanjuti Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Usaha Milik Negara maka Kementerian BUMN melakukan transformasi SDM sebagai wujud peran BUMN sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, *social welfare*, penyedia lapangan kerja dan penyedia talenta. Sehingga dibentuklah nilai-nilai utama yang sama untuk diimplementasikan dan diinternalisasikan di seluruh BUMN sebagai Budaya Perusahaan. Nilai-Nilai Utama tersebut adalah AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

Maksud dan tujuan penetapan Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) AKHLAK di lingkungan PT PELNI (Persero) adalah sebagai berikut:

1. Agar seluruh insan PT PELNI (Persero) mengetahui, mengimplementasikan, dan menginternalisasikan Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) AKHLAK secara sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen sehingga melahirkan perilaku keseharian dan membentuk budaya kerja PT PELNI (Persero) yang selaras dengan Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) tersebut;
2. Membantu seluruh insan PT PELNI (Persero) agar berperilaku secara benar, baik secara hukum maupun secara etis dalam rangka menjaga dan meningkatkan citra perusahaan;
3. Membentuk insan PT PELNI (Persero) berintegritas kuat dan perilaku yang beretika, diharapkan Perusahaan akan memperoleh kepercayaan yang terus-menerus dari para *stakeholders*;
4. Memberikan kejelasan dalam bersikap dan berperilaku bagi insan PT PELNI (Persero) dalam menjalankan aktivitas kerjanya sehingga menghasilkan reputasi yang baik, yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang;
5. Membentuk karakter insan PT PELNI (Persero) yang bertanggungjawab dan beretika dalam berinteraksi baik dengan sesama insan PT PELNI (Persero) maupun dengan pihak di luar Perusahaan;
6. Menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman dengan menjunjung tinggi

Following the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) Decree Number: SE-7/MBU/07/2020 concerning Core Values of State-Owned Enterprise (SOE) Human Resources (HR), the Ministry of BUMN has undertaken HR transformation to fulfill the role of SOEs as engines of economic growth, social welfare, job providers, and talent suppliers. Therefore, common core values were established to be implemented and internalized across all SOEs as Corporate Culture. These core values are AKHLAK (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative).

The purpose and objectives of establishing the AKHLAK Core Values within PT PELNI (Persero) are as follows:

1. To ensure that all individuals at PT PELNI (Persero) understand, implement, and internalize the AKHLAK Core Values sincerely, consistently, and consequently, thus fostering daily behavior and shaping the work culture of PT PELNI (Persero) aligned with these Core Values.
2. To help all individuals at PT PELNI (Persero) behave correctly, both legally and ethically, to maintain and enhance the company's image.
3. To form individuals at PT PELNI (Persero) with strong integrity and ethical behavior, ensuring that the company continuously gains trust from stakeholders.
4. To provide clarity in attitudes and behavior for individuals at PT PELNI (Persero) in performing their work activities, thereby generating a good reputation and ultimately achieving long-term business success.
5. To develop responsible and ethical individuals at PT PELNI (Persero) in their interactions, both within PT PELNI (Persero) and with external parties.
6. To create a healthy and comfortable work environment by upholding the AKHLAK Core

NILAI-NILAI PERUSAHAAN CORPORATE VALUES

Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) AKHLAK sehingga akan mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Mendukung hal tersebut, PT PELNI (Persero) melakukan *launching* budaya perusahaan tersebut pada tanggal 27 Agustus 2020 dan sosialisasi kepada seluruh pegawai pada tanggal 4 September 2020 melalui media daring. Nilai-nilai utama tersebut juga ditetapkan dalam SK Direksi Nomor: 10.07/01/ SK/HKO.01/2020 tentang Penetapan Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara di Lingkungan PT PELNI (Persero). Untuk mensosialisasikan Nilai-Nilai Utama ini, PT PELNI (Persero) juga melakukan sosialisasi ke seluruh unit kerja, anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi terkait dengan implementasi AKHLAK sebagai budaya perusahaan.

Values, thus supporting sustainable performance improvement.

In support of this, PT PELNI (Persero) launched the corporate culture on August 27, 2020, and conducted socialization to all employees on September 4, 2020, through online media. These core values were also established in the Director's Decree Number: 10.07/01/ SK/HKO.01/2020 concerning the Establishment of Core Values for SOE Human Resources within PT PELNI (Persero). To socialize these core values, PT PELNI (Persero) also conducted socialization to all work units, subsidiaries, and affiliated companies regarding the implementation of AKHLAK as corporate culture.

AKHLAK

A

AMANAH

Panduan Perilaku

- Memenuhi janji dan komitmen.
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan.
- Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

K

KOMPETEN

Panduan Perilaku

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

H

HARMONIS

Panduan Perilaku

- Menghargai setiap orang apa pun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

L

LOYAL

Panduan Perilaku

- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara.
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
- Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

A

ADAPTIF

Panduan Perilaku

- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
- Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
- Bertindak proaktif.

K

KOLABORATIF

Panduan Perilaku

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

TRUSTWORTHY

Guidelines for Behavior

- Fulfill promises and commitments.
- Take responsibility for tasks, decisions, and actions.
- Adhere to moral and ethical values.

COMPETENT

Guidelines for Behavior

- Enhance personal competence to address ever-changing challenges.
- Assist others in learning.
- Complete tasks with the highest quality.

HARMONIOUS

Guidelines for Behavior

- Respect everyone regardless of their background.
- Enjoy helping others.
- Build a conducive work environment.

LOYAL

Guidelines for Behavior

- Uphold the good name of fellow employees, leaders, SOEs, and the country.
- Be willing to make sacrifices to achieve greater goals.
- Obey leaders as long as it does not conflict with law and ethics.

ADAPTIVE

Guidelines for Behavior

- Quickly adapt to become better.
- Continuously improve by keeping up with technological developments.
- Act proactively.

COLLABORATIVE

Guidelines for Behavior

- Provide opportunities for various parties to contribute.
- Be open to cooperation to create added value.
- Mobilize the use of various resources for common goals.

BIDANG USAHA

LINE OF BUSINESS



KEGIATAN USAHA PERSEROAN MENURUT ANGGARAN DASAR

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perseroan yaitu untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya serta pembangunan di bidang usaha pelayaran dalam dan luar negeri untuk angkutan penumpang, hewan dan barang dalam bentuk unit curah kering atau cair dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN

Sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Perseroan, kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh PT PELNI (Persero) adalah:

COMPANY BUSINESS ACTIVITIES ACCORDING TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION

In accordance with the Company's Articles of Association, the purpose and objective of the Company are to participate in and support the government's policies and programs in the economic and national development sector in general, as well as development in the domestic and international shipping business sector for passenger, livestock, and cargo transportation in the form of dry or liquid bulk units, by applying the principles of a Limited Liability Company.

BUSINESS ACTIVITIES UNDERTAKEN

In line with the purpose and objectives of the Company's establishment, the business activities conducted by PT PELNI (Persero) include:



BIDANG USAHA LINE OF BUSINESS

1. Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - Hotel Bintang
 - Real Estat yang dimiliki Sendiri atau Disewa
 - Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri untuk Penumpang
 - Angkutan Laut Luar Negeri untuk Wisata
 - Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum
 - Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus
 - Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang
 - Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang
 - Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum
 - Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang
 - Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata
 - Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus
 - Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang
 - Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang
 - Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Penumpang
 - Angkutan Penyeberangan Antarkabupaten/Kota Untuk Penumpang
 - Angkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk Penumpang
 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air
 - Aktivitas Agen Perjalanan Wisata
 2. Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial
 - Aktivitas Konsultansi Pariwisata
 - Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya
 - Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya
 - Jasa Penyelenggara Event Khusus (*Special Event*)
 - Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus
 - Jasa interpreter wisata
1. Business Activities with Effective Business Licenses Before the Implementation of Law Number 11 of 2020 on Job Creation
 - Star-rated Hotels
 - Real Estate Owned or Leased
 - Domestic Port Water Transport for Passengers
 - International Sea Transport for Tourism
 - International Sea Transport for General Cargo
 - International Sea Transport for Special Cargo
 - Domestic Pioneer Sea Transport for Passengers
 - Domestic Liner and Tramper Sea Transport for Passengers
 - Domestic Sea Transport for General Cargo
 - Domestic Liner and Tramper Sea Transport for Passengers
 - Domestic Sea Transport for Tourism
 - Domestic Sea Transport for Special Cargo
 - Domestic Pioneer Sea Transport for Cargo
 - International Liner and Tramper Sea Transport for Passengers
 - Interprovincial Pioneer Ferry Transport for Passengers
 - Inter-regency/City Ferry Transport for Passengers
 - Interprovincial Ferry Transport for Passengers
 - Rental and Leasing Activities Without Option Rights for Water Transportation Equipment
 - Travel Agency Activities
 2. Business Activities Based on Risk-Based Licensing
 - Web Portals and/or Digital Platforms Without Commercial Purpose
 - Tourism Consultancy Activities
 - Other Short-Term Accommodation Services
 - Other Travel Agency Activities
 - Special Event Organizing Services
 - Venue Rental Services for MICE and Special Events
 - Tourist Interpreter Services

BIDANG USAHA

LINE OF BUSINESS

- Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya
- Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya
- Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur
- Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya
- Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan
- Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum
- Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak
- Perdagangan Besar Buah-buahan
- Perdagangan Besar Sayuran
- Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao
- Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani
- Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang Dan Perlengkapannya
- Pergudangan dan Penyimpanan
- Aktivitas Cold Storage
- Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL
- Jasa Informasi Pariwisata
- Jasa Informasi Daya Tarik Wisata
- Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE)
- Kegiatan Penunjang Pendidikan
- Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial
- Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu
- Perdagangan Besar Beras
- Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Laut
- Aktivitas Biro Perjalanan Wisata
- Penyediaan Akomodasi Lainnya
- Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa
- Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut
- Hotel Bintang
- Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung
- Aktivitas Konsultasi Transportasi
- Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya
- Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan
- Perdagangan Besar Hasil Perikanan
- Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya
- Wholesale of Other Agricultural Food and Beverages
- Wholesale of Meat and Other Processed Meat Products
- Wholesale of Eggs and Processed Egg Products
- Wholesale of Other Food and Beverages
- Wholesale of Chicken Meat and Processed Chicken Products
- General-Purpose Machinery Repair Services
- Wholesale on a Fee or Contract Basis
- Wholesale of Fruits
- Wholesale of Vegetables
- Wholesale of Coffee, Tea, and Cocoa
- Wholesale of Animal Oils and Fats
- Wholesale of Marine Transportation Equipment, Spare Parts, and Accessories
- Warehousing and Storage Services
- Cold Storage Activities
- Other Reservation Services Not Elsewhere Classified
- Tourism Information Services
- Tourist Attraction Information Services
- Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) Organizing Services
- Educational Support Activities
- Web Portals and/or Digital Platforms With Commercial Purpose
- Wholesale of Milk and Dairy Products
- Wholesale of Rice
- Services for Marine Fishing Production Facilities
- Travel Bureau Activities
- Other Accommodation Services
- Real Estate Owned or Leased
- Sea Port Services
- Star-Rated Hotels
- Ship, Boat, and Floating Structure Repair
- Transportation Consultancy Activities
- Other Warehousing and Storage Services
- Wholesale of Processed Fishery Products
- Wholesale of Fishery Products
- Other Support Activities for Mining and Quarrying

BIDANG USAHA LINE OF BUSINESS

- Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang
- Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Trampoer untuk Penumpang
- Aktivitas Konsultasi Transportasi.

JASA PERKAPALAN

KAPAL 2 IN 1

Kapal jenis 2 in 1 adalah kapal yang dapat mengangkut penumpang dan sejumlah kontainer, dirancang oleh Meyer Werft dan dibangun di galangan Papenburg, Jerman. Kapal 2 in 1 ini memiliki kapasitas 1.583 penumpang dan 98 kontainer. Salah satu kapal tipe 2 in 1 ini secara resmi diberi nama Kapal Motor (KM) Gunung Dempo, dibuat sejak pertengahan 2006 dan panjang 146,80 m dengan kecepatan berlayar lebih dari 20 knot. Kapal jenis 2 in 1 beroperasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia bagian tengah dan timur seperti kebutuhan pokok masyarakat setempat.

KAPAL:

1. KM Gunung Dempo
2. KM Dobonsolo
3. KM Ciremai
4. KM Nggapulu
5. KM Dorolonda
6. KM Sinabung
7. KM Kelud
8. KM Bukit Siguntang
9. KM Tidar
10. KM Lambelu
11. KM Umsini

KAPAL PENUMPANG SERBAGUNA

Kapal jenis 3 in 1 adalah jenis kapal penumpang serbaguna yang mampu mengangkut kontainer, penumpang dan kendaraan sekaligus. KM Dobonsolo dan KM Ciremai adalah kapal penumpang yang telah dimodifikasi menjadi kapal jenis 3 in 1. Kemampuan kapal 3 in 1 PT PELNI (Persero) dalam mengangkut kontainer dan kendaraan, secara langsung berkontribusi dalam mendistribusikan kebutuhan pokok di wilayah Indonesia bagian timur yang dipasok dari kotakota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Makassar.

- Warehouse Management for Warehouse Receipt System
- Domestic Liner and Trampoer Sea Transport for Passengers
- Transportation Consultancy Activities

SHIPPING SERVICES

2 IN 1 SHIPS

The 2 in 1 ships are vessels that can carry passengers and a number of containers, designed by Meyer Werft and built at the Papenburg shipyard in Germany. These 2 in 1 ships have a capacity of 1,583 passengers and 98 containers. One of these 2 in 1 ships is officially named Motor Vessel (KM) Gunung Dempo, built in mid-2006, with a length of 146.80 meters and a sailing speed of over 20 knots. The 2 in 1 ships operate to meet the needs of the central and eastern regions of Indonesia, such as the basic needs of local communities.

SHIPS:

1. KM Gunung Dempo
2. KM Dobonsolo
3. KM Ciremai
4. KM Nggapulu
5. KM Dorolonda
6. KM Sinabung
7. KM Kelud
8. KM Bukit Siguntang
9. KM Tidar
10. KM Lambelu
11. KM Umsini

MULTIPURPOSE PASSENGER SHIPS

The 3 in 1 ships are multipurpose passenger ships capable of carrying containers, passengers, and vehicles simultaneously. KM Dobonsolo and KM Ciremai are passenger ships that have been modified into 3 in 1 ships. The 3 in 1 ships of PT PELNI (Persero) contribute directly to distributing basic needs in the eastern regions of Indonesia, supplied from major cities such as Jakarta, Surabaya, and Makassar.



BIDANG USAHA

LINE OF BUSINESS



KAPAL BARANG

Untuk keperluan distribusi barang logistik ke seluruh wilayah Indonesia, PELNI menyediakan kapal barang untuk mengangkut kargo volume besar dengan layanan terbaik dan dukungan SDM profesional.

Pada 2024, PT PELNI (Persero) memiliki 9 kapal barang dengan kapasitas muat yang berbeda-beda untuk mengangkut kargo volume besar dengan layanan terbaik dan dukungan SDM profesional, dengan perincian sebagai berikut:

1. KM Caraka Jaya Niaga III - 4, dibangun pada 1988 dengan 3.000 DWT.
2. KM Caraka Jaya Niaga III - 22, dibangun pada 1990 dengan 3.650 DWT.
3. KM Caraka Jaya Niaga - 32, dibangun pada 1993.

CARGO SHIPS

For the logistics distribution needs across Indonesia, PELNI provides cargo ships to transport large volumes of cargo with the best service and support from professional HR.

As of 2024, PT PELNI (Persero) owns nine cargo ships with varying load capacities to transport large volumes of cargo with the best service and support from professional HR, detailed as follows:

1. KM Caraka Jaya Niaga III - 4, built in 1988 with 3,000 DWT.
2. KM Caraka Jaya Niaga III - 22, built in 1990 with 3,650 DWT.
3. KM Caraka Jaya Niaga - 32, built in 1993.



BIDANG USAHA LINE OF BUSINESS

4. Logistik Nusantara 1, dibangun pada tahun 1998 dengan 10822 DWT.
5. Logistik Nusantara 2, dibangun pada tahun 2006 dengan 3893 DWT.
6. Logistik Nusantara 3, dibangun pada tahun 2008 dengan 3901 DWT.
7. Logistik Nusantara 4, dibangun pada tahun 2007 dengan 3901 DWT.
8. Logistik Nusantara 5, dibangun pada tahun 2008 dengan 11184 DWT
9. Logistik Nusantara 6, dibangun pada 2008 dengan 9.021 DWT

KAPAL TOL LAUT

Kapal Tol Laut dioperasikan merujuk pada:

1. Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Publik Untuk Angkutan Barang di Laut.
2. Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
3. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 161 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut.
4. Peraturan Menteri Perhubungan No. 17 Tahun 2017 tentang Tarif Angkutan Barang Di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*).

Saat ini, PT PELNI (Persero) mengoperasikan 10 armada Kapal Tol Laut, yaitu KM Logistik Nusantara I, II, III, IV, V, dan VI, serta KM Kendhaga Nusantara 01, 07, 08, dan 11.

JENIS MUATAN KAPAL TOL LAUT:

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting serta Peraturan Kementerian Perdagangan (Permendag) Nomor 53 tahun 2020, kategorisasi muatan Kapal Tol Laut antara lain sebagai berikut:

4. Logistik Nusantara 1, built in 1998 with 10,822 DWT.
5. Logistik Nusantara 2, built in 2006 with 3,893 DWT.
6. Logistik Nusantara 3, built in 2008 with 3,901 DWT.
7. Logistik Nusantara 4, built in 2007 with 3,901 DWT.
8. Logistik Nusantara 5, built in 2008 with 11,184 DWT.
9. Logistik Nusantara 6, built in 2008 with 9,021 DWT.

SEA TOLL SHIPS

The Sea Toll Ships are operated under:

1. Presidential Regulation No. 70 of 2017 on the Implementation of Public Obligations for Sea Freight Transport.
2. Presidential Regulation No. 71 of 2015 on the Determination and Storage of Basic Needs and Essential Goods.
3. Minister of Transportation Regulation No. PM. 4 of 2016 on the Amendment to Minister of Transportation Regulation No. PM 161 of 2015 on the Implementation of Public Service Obligations for Sea Freight Transport.
4. Minister of Transportation Regulation No. 17 of 2017 on Freight Rates at Sea in the Implementation of Public Service Obligations (PSO).

Currently, PT PELNI (Persero) operates 10 Sea Toll fleets, namely KM Logistik Nusantara I, II, III, IV, V, and VI, as well as KM Kendhaga Nusantara 01, 07, 08, and 11.

TYPES OF CARGO FOR SEA TOLL SHIPS:

According to Presidential Regulation No. 59 of 2020 on the Determination and Storage of Basic Needs and Essential Goods, and Ministry of Trade Regulation (Permendag) No. 53 of 2020, the categorization of cargo for Sea Toll Ships includes:



BIDANG USAHA

LINE OF BUSINESS

Barang Kebutuhan Pokok Basic Necessities		
Barang Kebutuhan Pokok Hasil Pertanian, antara lain: 1. Beras 2. Kedelai bahan baku tahu dan tempe 3. Cabai 4. Bawang Merah	Barang Kebutuhan Pokok Hasil Industri, antara lain: 1. Gula 2. Minyak Goreng 3. Tepung Terigu	Barang Kebutuhan Pokok Hasil Peternakan dan Perikanan, antara lain: 1. Daging Sapi 2. Daging ayam ras 3. Telur ayam ras 4. Ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang
Essential Agricultural Products include: 1. Rice 2. Soybeans for tofu and tempeh production 3. Chili peppers 4. Shallots	Essential Industrial Products include: 1. Sugar 2. Cooking oil 3. Wheat flour	Essential Livestock and Fisheries Products include: 1. Beef 2. Broiler chicken meat 3. Chicken eggs 4. Fresh fish such as milkfish, mackerel, and bonito/tuna/skipjack

Barang Penting Essential Goods	
1. Benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai 2. Pupuk 3. Gas Elpiji 3 (tiga) kilogram 4. Triplek 5. Semen 6. Besi baja konstruksi 7. Baja ringan	1. Seeds, namely rice, corn, and soybean seeds 2. Fertilizer 3. 3-kilogram LPG (Liquefied Petroleum Gas) cylinder 4. Plywood 5. Cement 6. Structural steel 7. Light steel

Sedangkan Sesuai Permendag No 38 tahun 2018 Jenis Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

Meanwhile, according to Ministry of Trade Regulation No. 38 of 2018, the types of goods referred to in Article 2 paragraph (1) letter b are defined as follows:

Barang Kebutuhan Pokok Basic Necessities		
1. Air mineral 2. Bawang putih 3. Garam 4. Kacang hijau 5. Kacang tanah 6. Margarin 7. Mie instan 8. Minuman ringan 9. Obat-obatan 10. Sayuran	11. Susu 12. Teh 13. Kopi 14. Ikan kemasan kaleng 15. Biskuit 16. Pakaian jadi 17. Popok bayi dan dewasa 18. Deterjen/sabun/pasta gigi 19. Alat tulis/peralatan sekolah 20. Gas elpiji 12 kg	21. Pakan ternak atau pakan ikan 22. Asbes/gypsum 23. Paku 24. Seng 25. Aspal
1. Bottled mineral water 2. Garlic 3. Salt 4. Green beans 5. Peanuts 6. Margarine 7. Instant noodles 8. Soft drinks 9. Medicines 10. Vegetables	11. Milk 12. Tea 13. Coffee 14. Canned fish 15. Biscuits 16. Ready-made clothes 17. Baby and adult diapers 18. Detergent/soap/toothpaste 19. Stationery/school supplies 20. 12 kg LPG cylinder	21. Animal feed or fish feed 22. Asbestos/gypsum 23. Nails 24. Zinc 25. Asphalt



BIDANG USAHA

LINE OF BUSINESS

Sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Nomor SE II tahun 2019, kapal tol laut juga memuat produk muatan balik potensi daerah, dengan perincian sebagai berikut:

According to Circular Letter from the Directorate General of Sea Transportation (Dirjen Hubla) Number SE II of 2019, rollon/ roll-off ships also carry potential regional cargo, detailed as follows:

Barang Kebutuhan Pokok Basic Necessities		
1. Abu batu 2. Alumina 3. Alumunium 4. Ammonia 5. Arang 6. Asam 7. Bahan baku kertas 8. Bantalan kayu 9. Barang kerajinan 10. Batu 11. Bauksit 12. Besi 13. Besi tua 14. Beton 15. Biji besi 16. Biji koko/coklat 17. Biji sawit 18. Buah-buahan 19. Cangkang 20. Furniture 21. Gaplek 22. Garam 23. Hasil hutan	24. Hasil perindustrian 25. Hasil laut 26. Hasil pertambangan 27. Hasil pertanian 28. Ikan asin 29. Inti sawit 30. Jagung 31. Jambu 32. Jambu mete 33. Jengkol 34. Kaca 35. Kacang-kacangan 36. Kapas 37. Karet 38. Karung goni 39. Kawat 40. Kayu 41. Kedelai 42. Kelapa 43. Kemiri 44. Kerosin 45. Kertas 46. Kopra	47. Kulit hewan 48. Kulit kayu 49. Pakan ternak 50. Melinjo 51. Minyak daun cengkeh 52. Minyak sawit 53. Nikel 54. Pala 55. Pasir 56. Pisang 57. Rempah-rempah 58. Rotan 59. Rumput laut 60. Tembaga 61. Tembakau 62. Tepung sagu 63. Tepung tapioka 64. Udang 65. Urea 66. Wood chips 67. Wood pulp
1. Crushed stone 2. Alumina 3. Aluminum 4. Ammonia 5. Charcoal 6. Acid 7. Paper raw materials 8. Wooden pallets 9. Handicrafts 10. Stone 11. Bauxite 12. Iron 13. Scrap iron 14. Concrete 15. Iron ore 16. Cocoa beans/chocolate 17. Palm seeds 18. Fruits 19. Shells 20. Furniture 21. Cassava flour 22. Salt 23. Forest products	24. Industrial products 25. Marine products 26. Mining products 27. Agricultural products 28. Salted fish 29. Palm kernel 30. Corn 31. Guava 32. Cashew nuts 33. Jengkol (dogfruit) 34. Glass 35. Nuts 36. Cotton 37. Rubber 38. Jute sacks 39. Wire 40. Wood 41. Soybeans 42. Coconut 43. Candlenut 44. Kerosene 45. Paper 46. Copra	47. Animal skins 48. Bark 49. Animal feed 50. Melinjo 51. Clove leaf oil 52. Palm oil 53. Nickel 54. Nutmeg 55. Sand 56. Bananas 57. Spices 58. Rattan 59. Seaweed 60. Copper 61. Tobacco 62. Sago flour 63. Tapioca flour 64. Shrimp 65. Urea 66. Wood chips 67. Wood pulp

PRODUK DAN JASA

PRODUCTS AND SERVICES



KAPAL TERNAK

PT PELNI (Persero) mengoperasikan 1 (satu) armada Kapal Ternak yaitu KM Camara Nusantara I dengan Rute Kupang - Waingapu - Tg.Priok - Cirebon - Kupang. Kehadiran Kapal Ternak bertujuan untuk membantu Pemerintah menekan harga daging dan mensejahterakan para peternak di sentra peternakan sapi dalam negeri.

KAPAL PERINTIS

Armada Kapal Perintis merupakan bagian dari penugasan Pemerintah kepada PT PELNI (Persero) selain Kapal Tol Laut dan Kapal Ternak. Dasar hukum pengelolaan Kapal Perintis, antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara.

LIVESTOCK SHIP

PT PELNI (Persero) operates one livestock ship fleet, namely KM Camara Nusantara I, with routes Kupang - Waingapu - Tg.Priok - Cirebon - Kupang. The presence of livestock ships aims to assist the government in controlling meat prices and improving the welfare of domestic cattle breeders.

PIONEER SHIP

The Pioneer Ship fleet is part of the government assignment to PT PELNI (Persero) in addition to Ro-Ro (Roll-on/Rolloff) ships and Livestock ships. The legal basis for managing Pioneer Ships includes:

1. Presidential Regulation Number 2 of 2016 concerning the Implementation of Public Service Obligations for State Owned Pioneer Ships.



PRODUK DAN JASA PRODUCTS AND SERVICES

2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 55 Tahun 2019 tentang Komponen Biaya dan Pendapatan yang Diperhitungkan dalam Kegiatan Pelayanan Publik Perintis Negara.
3. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.998/DJPL/2021 tanggal 9 November 2021 tentang Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis Tahun Anggaran 2022.
4. PT PELNI (Persero) mengoperasikan 44 (empat puluh empat) Kapal Perintis utama dan 6 (enam) Kapal Perintis cadangan, yang menjangkau daerah terpencil di seluruh Indonesia.

KAPAL REDE

Kapal Rede merupakan bagian dari penugasan pemerintah kepada PT PELNI (Persero) dengan mengoperasikan 16 Kapal Rede yang tersebar di seluruh Indonesia.

FASILITAS KAPAL

PT PELNI (Persero) menyediakan tenaga kerja profesional dan fasilitas terbaik demi kenyamanan penumpang dalam melakukan perjalanan menggunakan armada PT PELNI (Persero), meliputi:

1. Fasilitas Umum:
 - a. *Live Music*;
 - b. *Charging Spot*;
 - c. Kasur Ekonomi;
 - d. Toilet;
 - e. Mushola;
 - f. Klinik;
 - g. *Hot Water*;
 - h. *Cleaning Service*;
 - i. TV
2. Fasilitas Berbayar:
 - a. *Mini Theatre*;
 - b. *Add On* (Sprei, Selimut, Bantal, dan Amenities).
 - c. *Supplement Food* (Susu UHT, biskuit, jus buah kemasan).
3. Fasilitas Permakanan
 - a. Restoran (Ruang Makan Penumpang Kelas);
 - b. *Bread Toaster*;

2. Minister of Transportation Regulation of the Republic of Indonesia Number PM 55 of 2019 concerning Cost Components and Revenues Calculated in the Activities of State Pioneer Public Services.
3. Decision of the Director General of Sea Transportation Number KP.998/DJPL/2021 dated November 9, 2021, regarding the Network of Pioneer Sea Transportation Routes for Fiscal Year 2022.
4. PT PELNI (Persero) operates 44 main Pioneer Ships and 6 reserve Pioneer Ships, covering remote areas throughout Indonesia.

REDE SHIP

The Rede Ship is part of the government assignment to PT PELNI (Persero) with 16 Rede Ships operating throughout Indonesia.

SHIP FACILITIES

PT PELNI (Persero) provides professional workforce and best facilities for the comfort of passengers traveling on PT PELNI (Persero) fleets, including:

1. General Facilities:
 - a. Live Music;
 - b. Charging Spots;
 - c. Economy Class Beds;
 - d. Toilets;
 - e. Prayer Rooms;
 - f. Clinics;
 - g. Hot Water;
 - h. Cleaning Services;
 - i. TV
2. Paid Facilities:
 - a. Mini Theatre;
 - b. Add-Ons (Sheets, Blankets, Pillows, and Amenities).
 - c. Supplement Food (UHT Milk, Biscuits, Packaged Fruit Juices).
3. Dining Facilities:
 - a. Restaurants (Passenger Dining Areas);
 - b. Bread Toasters;



PRODUK DAN JASA PRODUCTS AND SERVICES

- c. *Combi Oven*;
 - d. Menu Makan (*bento box*);
 - e. Air Minum dalam Kemasan Branding PELNI.
 4. Produk komersial angkutan penumpang atau *Commercial on Board* (COB by PELNI) terdiri dari:
 - a. PELNI *TRAFFIC* merupakan pengelompokan layanan komersial angkutan penumpang yang menawarkan konsep B2B seperti branding, promosi, sewa *space*, dan iklan di kapal
 - b. PELNI *EXPERIENCE* merupakan pengelompokan layanan komersial angkutan penumpang yang menawarkan pengalaman (*experience*) pelanggan di Kapal PELNI dengan mengoptimalkan berbagai kegiatan MICE (*Meeting on Board, Tour on Board, Study on Board, Event on Board*), Kapal Phinisi, wisata dan perjalanan (*traveling*)
 - c. PELNI *PLUS* merupakan pengelompokan layanan komersial angkutan penumpang yang memberikan nilai tambah (*added value*) pada pelanggan dengan berbagai layanan penunjang selama berlayar seperti Layanan Tambahan (*Add on*), Layanan Internet Komersial dan Layanan Antarmoda.
 5. Keagenan Kapal Jenis Layanan Keagenan:
 - a. *Clearance in & out*;
 - b. *Bunker, Fresh Water, Provision Supply*;
 - c. *Crew & Guest Attendance*;
 - d. *Protecting Agent*;
 - e. *Custom & Immigration Clearance*;
 - f. Layanan *Sea Pollution*; dan
 - g. Layanan *Garbage Removal*.
- c. *Combi Ovens*;
 - d. Meal Menu (*bento boxes*);
 - e. Branded Bottled Drinking Water.
 4. Commercial Passenger Transport Products or Commercial on Board (COB by PELNI) consist of:
 - a. PELNI *TRAFFIC* offers commercial passenger transport services with a B2B concept including branding, promotion, space rental, and advertising on ships.
 - b. PELNI *EXPERIENCE* offers commercial passenger transport services enhancing customer experience onboard with various MICE activities (*Meeting on Board, Tour on Board, Study on Board, Event on Board*), Phinisi Ships, tourism, and travel.
 - c. PELNI *PLUS* offers additional value-added services to customers during sailing such as Additional Services (*Add-ons*), Commercial Internet Services, and Intermodal Services.
 5. Ship Agency Services Types of Agency Services:
 - a. *Clearance in & out*;
 - b. *Bunker, Fresh Water, Provision Supply*;
 - c. *Crew & Guest Attendance*;
 - d. *Protecting Agent*;
 - e. *Customs & Immigration Clearance*;
 - f. *Sea Pollution Services*; and
 - g. *Garbage Removal Services*.

MANAJEMEN KESELAMATAN

1. Regulasi IMO:
 - a. SOLAS 1974 *Consolidated 2004* (Chapter IX:ISM Code);
 - b. MARPOL 78 *Consolidated 2006*;
 - c. STCW 95 (KM. 70 tahun 1998, PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan);
 - d. COLREG 72 (*Collision Regulation* tahun 72).

SAFETY MANAGEMENT

1. IMO Regulations:
 - a. SOLAS 1974 *Consolidated 2004* (Chapter IX:ISM Code);
 - b. MARPOL 78 *Consolidated 2006*;
 - c. STCW 95 (Ministerial Decree No. 70 of 1998, Government Regulation No. 7 of 2000 on Seafaring);
 - d. COLREG 72 (*Collision Regulations* of 1972).



PRODUK DAN JASA PRODUCTS AND SERVICES

2. *International Load Line Convention (ILLC) 1966;*
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja;
4. The International Organization for Standardization (ISO) 45001 - Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.

USAHA SAMPINGAN & PENUNJANG TOUR

1. Tour Paket Kapal Phinisi:
 - a. Wisata Pulau Padar;
 - b. Wisata Pulau Rinca;
 - c. Wisata Pulau Komodo.

Hotel Bahtera

Hotel dengan fasilitas untuk acara rapat dan pusat pelatihan dilengkapi dengan fasilitas ruang rapat berkapasitas lebih dari 200 orang dan fasilitas penunjang lainnya.

Galangan Surya

Berdiri sejak 20 Mei 1996 dan mengerjakan kapal PT PELNI (Persero) tipe 500, yaitu KM Sangiang, KM Pangrango, KM Wilis. PT PELNI (Persero) *Maintenance Facilities* (PMF), proyeksi strategis yang dapat menjamin *space* dok dan perbaikan bagi seluruh kapal (termasuk kapal besar) yang dioperasikan oleh PT PELNI (Persero).

Bisnis Properti

Persewaan ruang kantor dari aset gedung PT PELNI (Persero) yang tersebar di seluruh cabang PT PELNI (Persero). Selain itu, bisnis properti juga meliputi persewaan ruang beriklan di atas kapal PT PELNI (Persero) serta persewaan toko dan cafe di atas kapal.

CHARTERING

Kegiatan penyewaan atau pengoperasian kapal bukan milik beserta awak kapal dan peralatannya

BROKING

Broking adalah kegiatan usaha perantara jual beli kapal dan/ atau sewa kapal.

2. International Load Line Convention (ILLC) 1966;
3. Government Regulation (PP) No. 50 of 2012 on the Implementation of Occupational Health and Safety Management System;
4. The International Organization for Standardization (ISO) 45001 - Occupational Health and Safety Management System.

STRATEGIC BUSINESS UNIT (SBU) TOUR

1. Phinisi Ship Package Tours:
 - a. Pulau Padar Tours;
 - b. Pulau Rinca Tours;
 - c. Pulau Komodo Tours.

Bahtera Hotel

A hotel facility for meetings and training centers equipped with meeting rooms that can accommodate more than 200 people and other supporting facilities.

Galangan Surya

Established since May 20, 1996, and involved in the construction of PT PELNI (Persero) type 500 ships such as KM Sangiang, KM Pangrango, KM Wilis. PT PELNI (Persero) *Maintenance Facilities* (PMF), a strategic projection that ensures dry dock space and repairs for all ships (including large ships) operated by PT PELNI (Persero).

Property Business

Rental of office space from PT PELNI (Persero) buildings located across PT PELNI (Persero) branches. In addition, property business also includes advertising space rental on PT PELNI (Persero) ships as well as rental of shops and cafes on ships.

CHARTERING

The activity of renting or operating non-owned ships along with crew and equipment.

BROKING

Broking is the business activity of intermediary in the sale and purchase or lease of ships.



JARINGAN TRAYEK KAPAL PENUMPANG 2024

PASSENGER SHIP ROUTE NETWORK 2024



JARINGAN TRAYEK KAPAL PENUMPANG 2024

PASSENGER SHIP ROUTE NETWORK 2024



JARINGAN TRAYEK KAPAL TOL LAUT 2024

SEA TOLL ROUTE NETWORK 2024

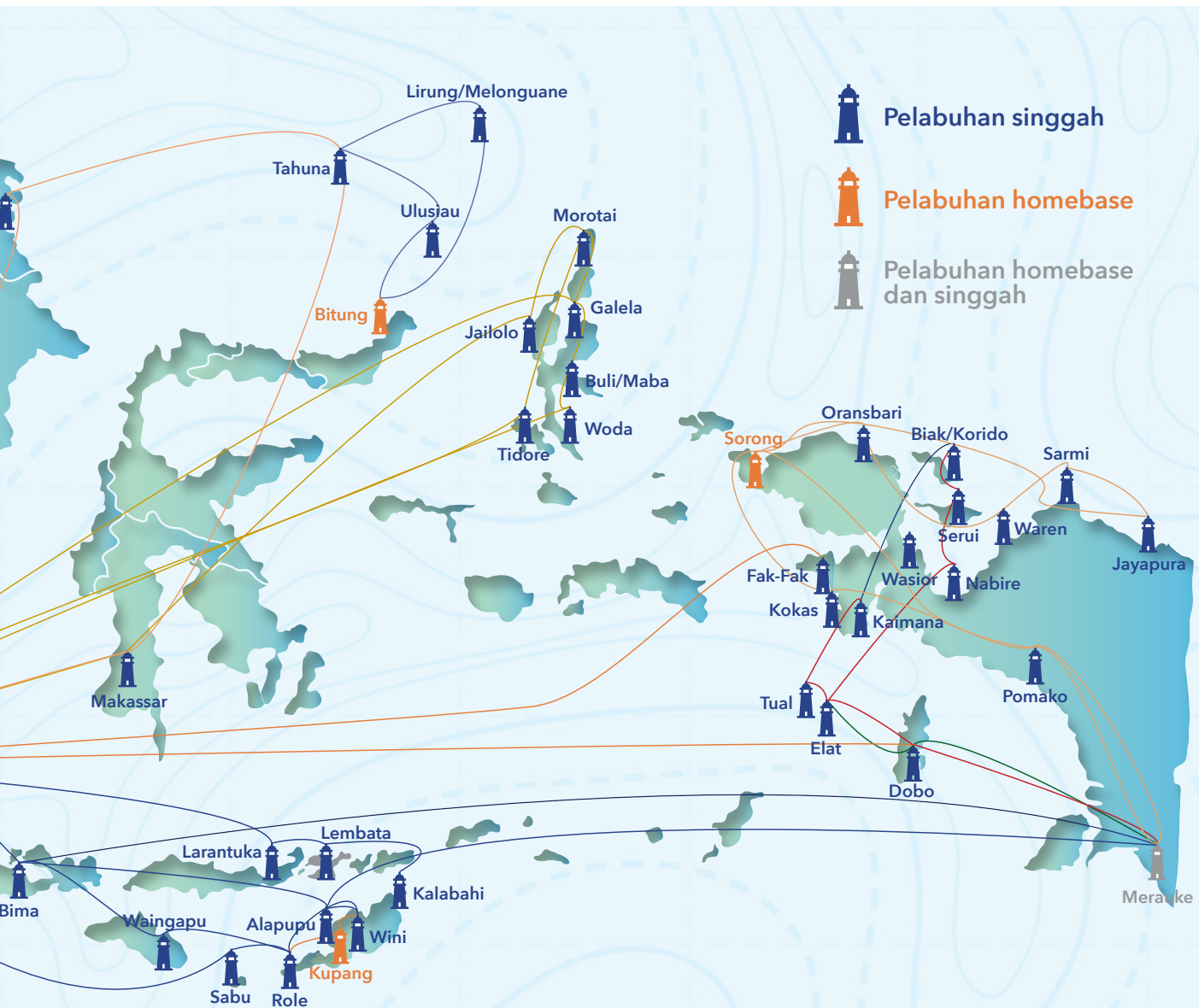


H-1	KM. Lognus 2	Tanjung Perak - Makassar - Tahuna - Nunukan - Tanjung Perak
T-3	KM. Lognus 4	Tanjung Priok - Patimban - Kijang - Letung - Tarempa - Pulau laut - Natuna - Subi - Serasan - Midai - Kijang - Patimban - Tanjung Priok
T-5	KM. Kenus 1	Bitung - Ulu Siau - Tahuna - Lirung/Melangoane - Bitung
T-10	KM. Lognus 5	Tanjung Perak - Tidore - Morotai - Galela - Buli/Maba - Wada - Tanjung Perak
T-11	KM. Lognus 1	Tanjung Perak - Fak-fak - Kaimana - Elat - Dobo - Tanjung Perak
T-13	KM. Kenus 11	Tanjung Perak - Sabu - Rote - Wini - Atapupu - Calabai - Tanjung Perak



JARINGAN TRAYEK KAPAL TOL LAUT 2024

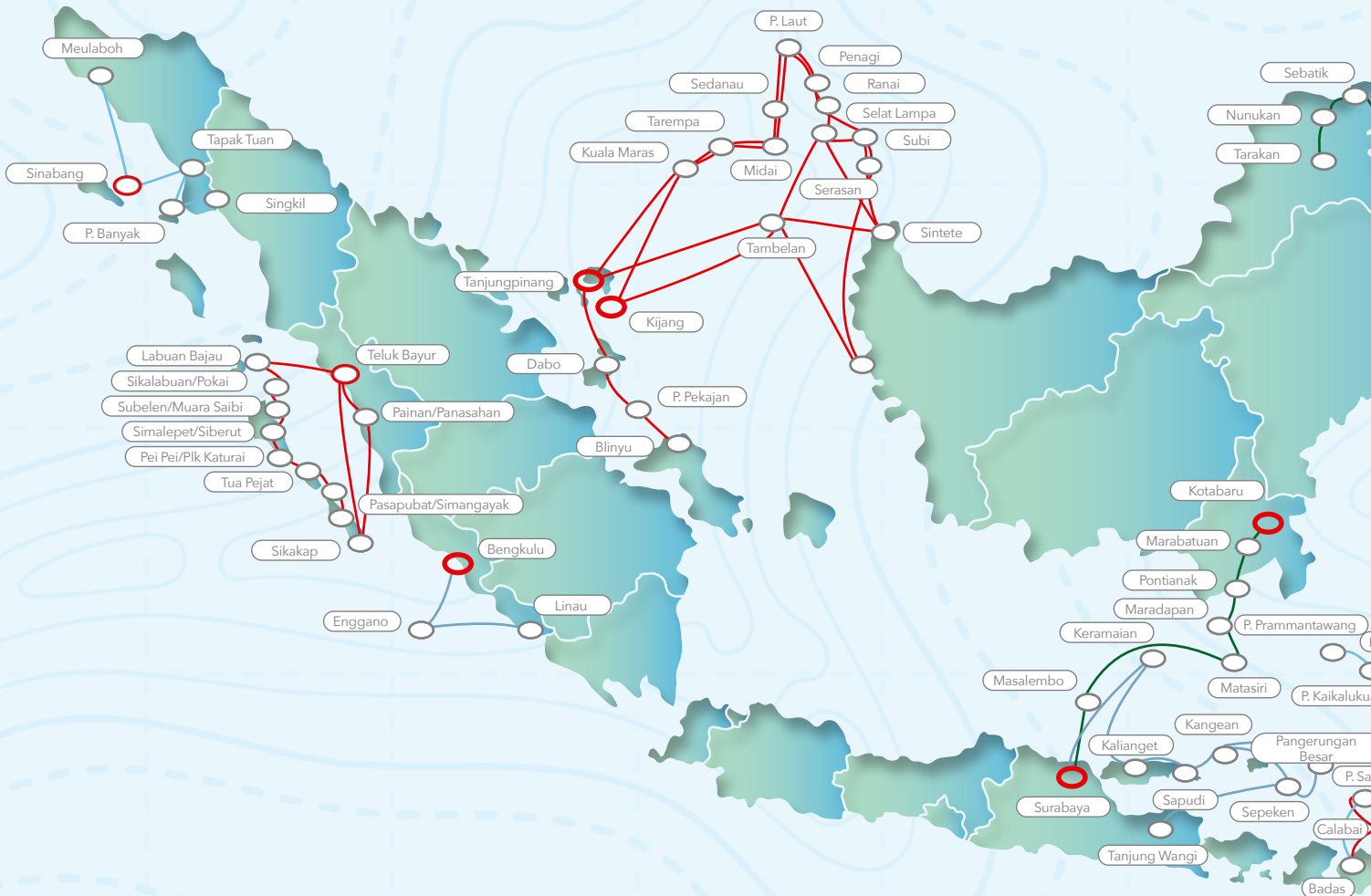
SEA TOLL ROUTE NETWORK 2024



T-14	KM. Kenus 7	Tanjung Perak - Larantuka - Lembata - Kalabahi - Tanjung Perak
T-15	KM. Lognus 3	Tanjung Perak - Makassar - Jailolo - Morotai - Galela - Tanjung Perak
T-19	KM. Kenus 8	Sorong - Oransbari - Woren - Sarmi - Jayapura - Korido - Sorong Pomako - Merauke - Pomako - Kokas - Sorong
T-27	KM. Kenus	Merauke - Dobo - Elat - Tual - Kaimana - Biak - Serui - Nabire - Elat - Merauke
T-28	KM. Kenus	Kupang - Waingapu - Labuan Bajo - Merauke - Ataupu/Wini - Kupang

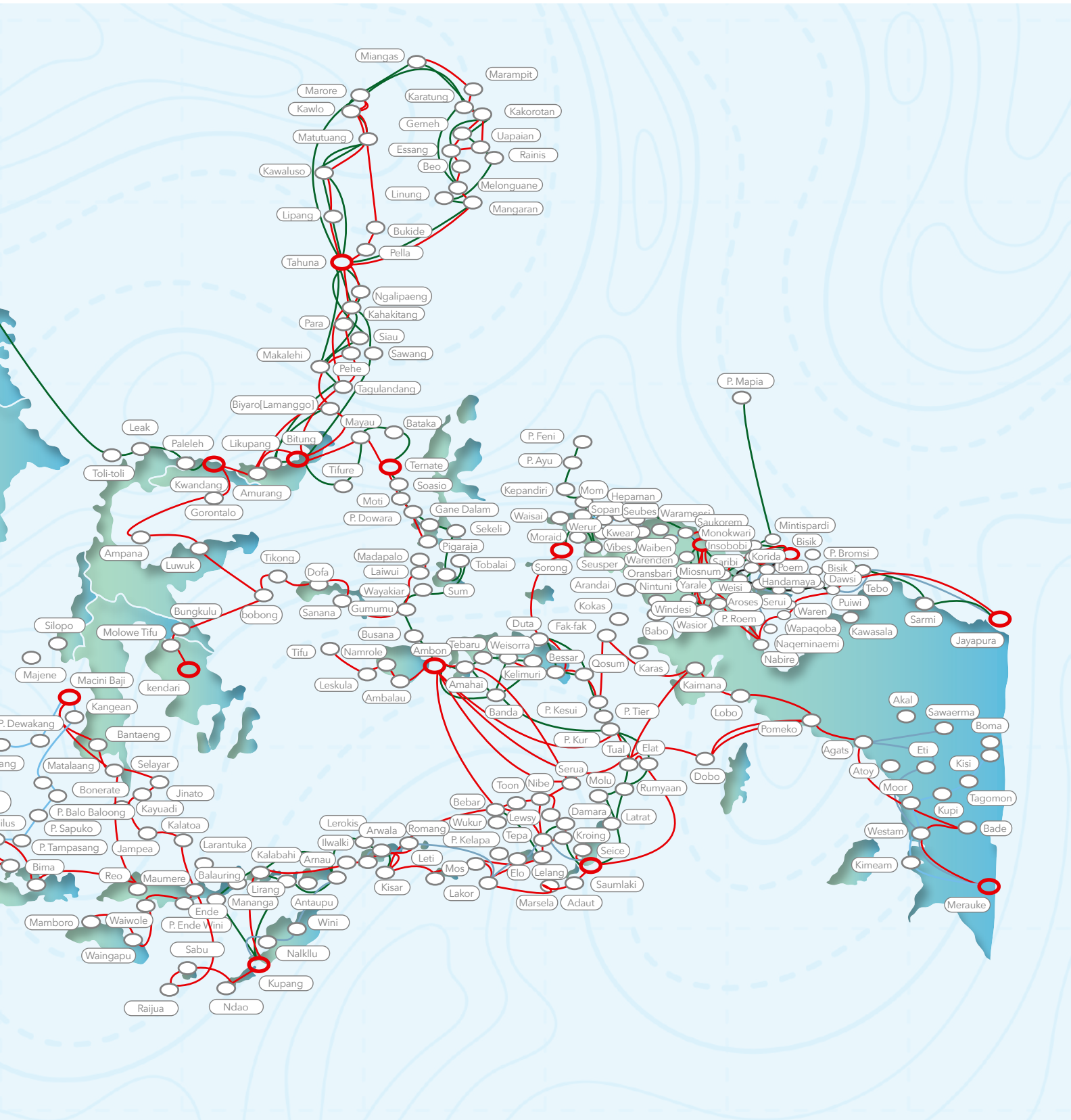
JARINGAN TRAYEK NASIONAL KAPAL PERINTIS 2024

NATIONAL PIONEER SHIP ROUTE NETWORK 2024



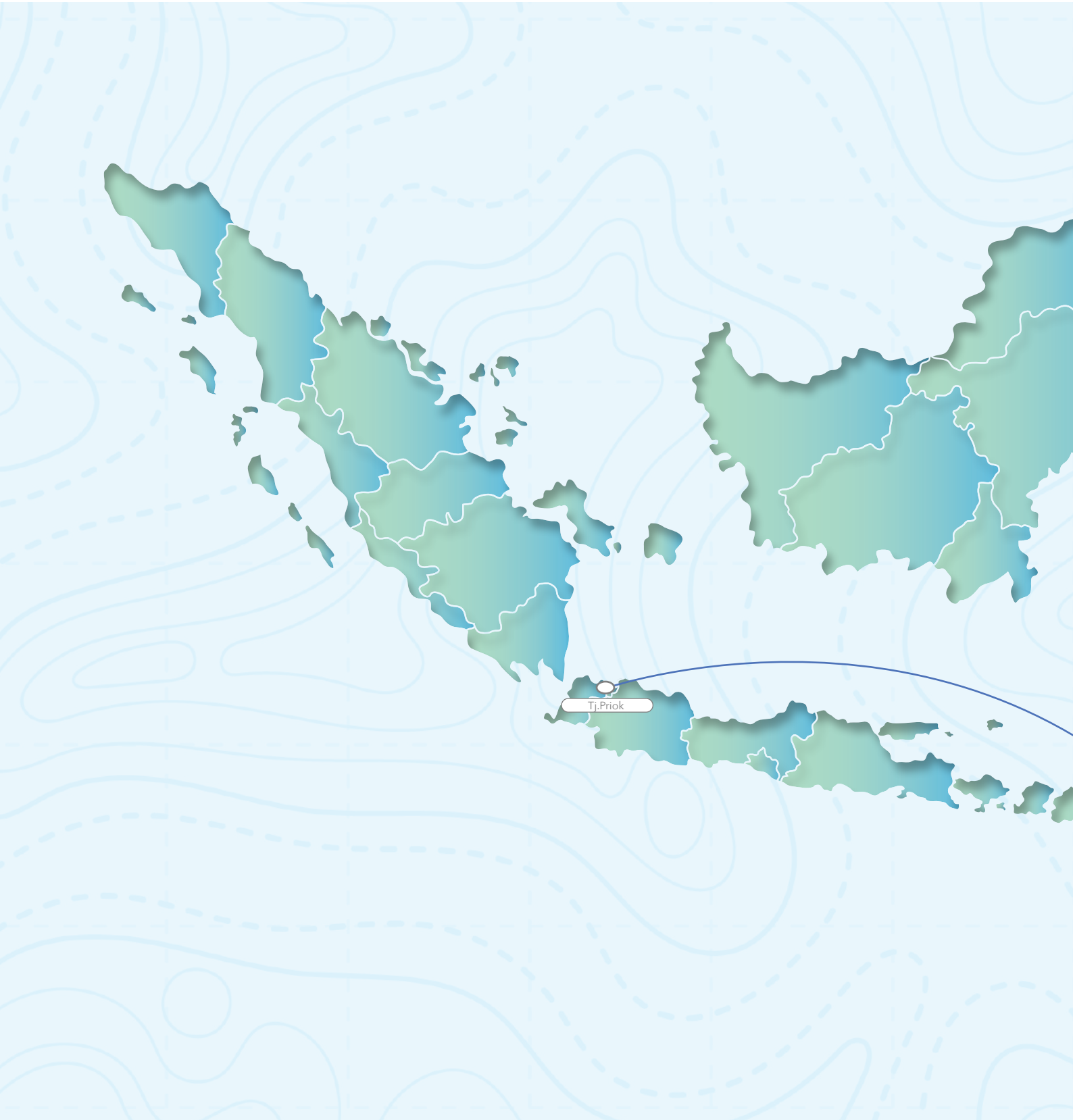
JARINGAN TRAYEK NASIONAL KAPAL PERINTIS 2024

NATIONAL PIONEER SHIP ROUTE NETWORK 2024

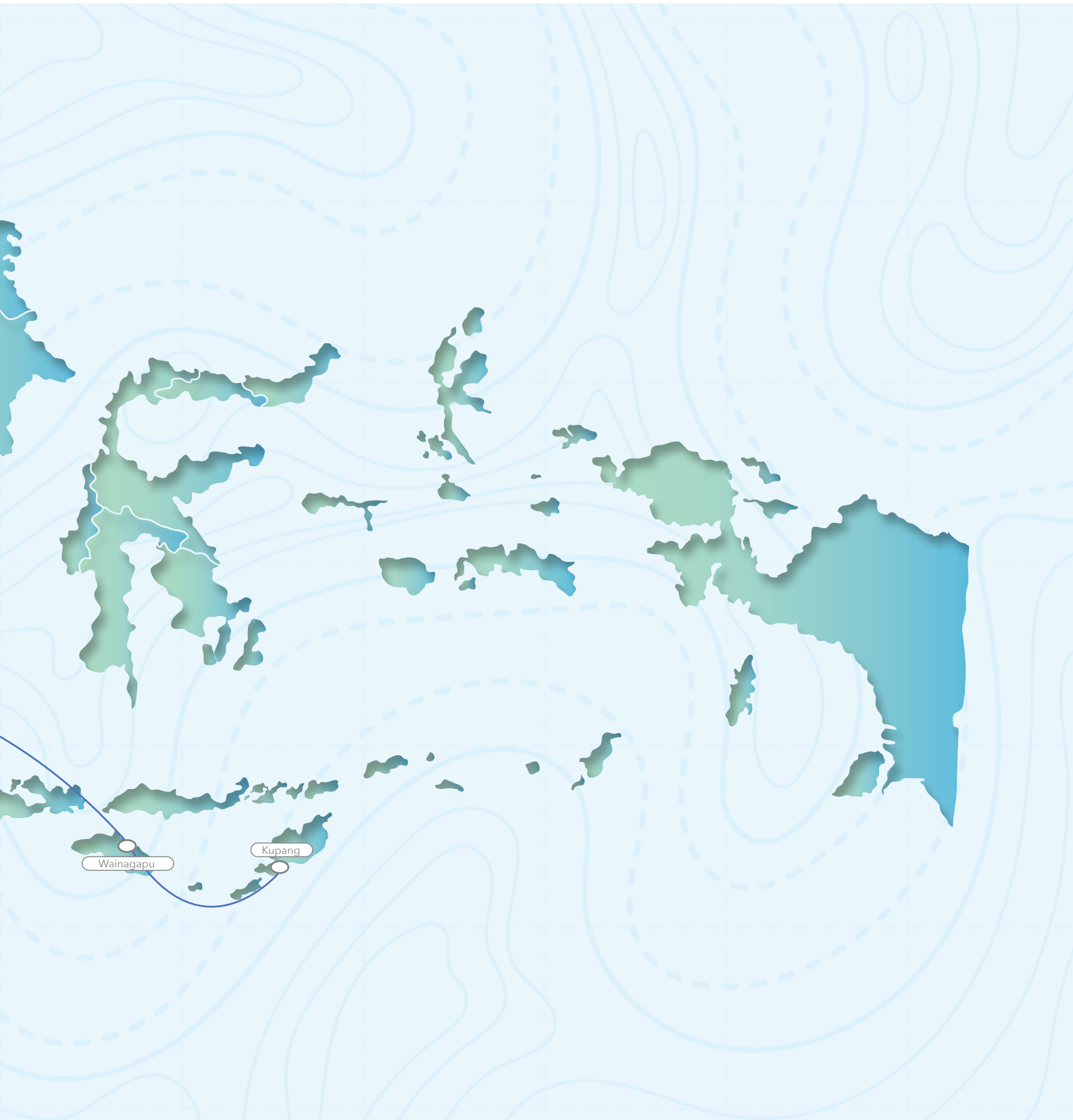


RUTE KAPAL TERNAK 2024

LIVESTOCK SHIP ROUTES 2024



RUTE KAPAL TERNAK 2024
LIVESTOCK SHIP ROUTES 2024



NAMA DAN ALAMAT ANAK PERUSAHAAN, KANTOR CABANG, DAN KANTOR PERWAKILAN

NAME AND ADDRESS OF SUBSIDIARIES, BRANCH OFFICES, AND REPRESENTATIVE OFFICES

PT PELNI (PERSERO)

Kantor Pusat / Head Office

Jl. Gajah Mada No. 14, DKI Jakarta 10130
T. +6221 6334 342
F. +6221 6385 4130
E. humas@pelni.co.id
W. www.pelni.co.id

Pemasaran / Marketing

Jl. Gajah Mada No. 14, DKI Jakarta 10130
T. +6221 6385 50962
E. divisi.pemasaran@pelni.co.id

ANAK PERUSAHAAN SUBSIDIARIES

PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN)

Jl. Cempaka Putih Tengah II
B.13-144, Cempaka Putih, DKI Jakarta - 10510
T. +6221 4287 9000
F. +6221 4287 8389
E. info@ptsbn.co.id
W. www.ptsbn.co.id

PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) Ruko Cempaka Mas

Jl. Suprpto Blok Q No. 5 Jakarta Pusat
T. +6221 4393 3184
F. +6221 4393 1623
E. pt.pidc@gmail.com

STRATEGIC BUSINESS UNIT (SBU)

Galangan Surya Surabaya

Jl. Nilam Barat No. 39, Surabaya 60165
T. +6231 3291 909, +6231 3292 961
F. +6231 3291 909
E. galangan@pelni.co.id

Hotel Bahtera Cipayung

Jl. Raya Puncak Cipayung,
No. 256, Bogor
T. +6251 8254 251, +6251 8257 451
F. +6251 8256 663
E. hotelbahtera@hotelbahterapelni.co.id

CABANG KELAS 1 CLASS 1 BRANCH

Tg Priok

Jl. Palmas No. 2, Tanjung Priok, Jakarta Utara
T. +6221 4393 3184
F. +6221 4393 1623
E. tg-priok@pelni.co.id

Surabaya

Jl. Pahlawan No.112-114, Surabaya
T. +6231 3293 197
F. +6231 3538 958, +6231 3293 195
E. surabaya@pelni.co.id

Makassar

Jl. Sawerigading No. 14, Makassar
T. +62411 3614 861
F. +62411 3631 395, +62411 3614 788
E. makassar@pelni.co.id

Ambon

Jl. D.I. Panjaitan No. 19, Ambon
T. +62911 3482 19, +62911 3531 61, +62911 3423 28
F. +62911 3520 49
E. ambon@pelni.co.id

CABANG KELAS 2 CLASS 2 BRANCH

Jayapura

Jl. Argapura No. 15, Jayapura Selatan, Papua
T. +62967 5332 70, +62967 5330 70, +62967 5314 12
F. +62967 5319 21, +62967 5333 70
E. jayapura@pelni.co.id

Balikpapan

Jl. Yos Sudarso No. 1 Balikpapan
T. +62542 4241 71, +62542 4224 10
F. +62542 7350 09
E. balikpapan@pelni.co.id

Sorong

Jl. Jend. A. Yani, Kompleks Pelabuhan, Sorong
T. +62951 3218 60
F. +62951 323873
E. sorong@pelni.co.id

Kupang

Jl. Pahlawan No.7 Kel. Fatufeto - Kec. Alak Kupang, NTT
T. +62380 8219 44, +62380 8238 98
F. +62380 8336 46
E. kupang@pelni.co.id

Bau-Bau

Jl. Pahlawan No.1, Bau-bau Sulawesi Tenggara
T. +62402 2821 258, +62402 2821 905, +62402 2822 705
F. +62402 2821 188
E. bau-bau@pelni.co.id

Bitung

Jl. Sam Ratulangi No. 7 Bitung, Bitung Kota - Sulawesi Utara
T. +62438 3635 2, +62438 3581 8
F. +62438 3358 8
E. bitung@pelni.co.id



NAMA DAN ALAMAT ANAK PERUSAHAAN, KANTOR CABANG, DAN KANTOR PERWAKILAN

NAME AND ADDRESS OF SUBSIDIARIES, BRANCH OFFICES, AND REPRESENTATIVE OFFICES

	Manokwari Jl. Siliwangi No. 24 Manokwari, Papua Barat T. +62986 2151 66, +62986 2151 67, +62986 2151 65 F. +62986 2151 68 E. manokwari@pelni.co.id
CABANG KELAS 3 CLASS 3 BRANCH	
Batam Jl. DR. Cipto Mangunkusumo No. 4, Tanjung Pinggir, Sekupang, Pulau Batam T. +62778 3221 81, +62778 3210 70 F. +62778 3210 85, +62778 3255 86 E. batam@pelni.co.id	Sampit Jl. Ahmad Yani No 70, Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah 74322 T. (0531) 22006 F. (0531) 24502 E. sampit@pelni.co.id
Pare-Pare Jl. Lasiming No. 44 Pare-pare, Sulawesi Selatan T. +62421 2101 7, +62421 2470 9 F. +62421 2307 9 E. pare-pare@pelni.co.id	Denpasar Jl. Raya Kuta No 299, Kuta, Badung, Bali 80361 T. (0361) 763963 F. (0361) 763964 E. denpasar@pelni.co.id
Nabire Jl. Frans Kaisepo No. 14, Nabire, Papua T. +62984 2285 0, +62984 2318 1, +62984 2507 2 F. +62984 2135 0 E. nabire@pelni.co.id	Maumere Jl. Don Juan No.6, Alok, Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur 96613 T. (0382) 21013 F. (0382) 22020 E. maumere@pelni.co.id
Ternate Jl. Jend.A.Yani, Kompleks Pelabuhan, Ternate, Maluku Utara T. +62921 3121 434, +62921 4124 434, +62921 3125 474 F. +62921 3121 276 E. ternate@pelni.co.id	Larantuka Jl. Don Lorenzo Dvg, Lohayong, Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur 86216 T. 6285342515038 / (0383) 21155 F. (0383) 21153 E. larantuka@pelni.co.id
Medan/Belawan Jl. Gunung Krakatau No. 17A, Medan T. +6261 4206 5268 F. +6261 4206 5267 E. belawan@pelni.co.id	Namlea Jl. BTN Tatanggo, Namlea, Buru, Maluku 97571 T. (0913) 21069 E. namlea@pelni.co.id
Pontianak Jl. ST. Abdurahman No.12 Pontianak, Kalimantan Barat T. +62561 7481 24, +62561 7481 29 F. +62561 7481 31 E. pontianak@pelni.co.id	Fak Fak Jl. D.I. Panjaitan Fak Fak, Papua Barat 98612 T. (0956) 23230 / (0956) 23371 F. (0956) 22556
Kumai Jl. Sudirman, SH No. 16 Pangkalan Bun/Kumai, Kalimantan Tengah T. +62532 2442 0 F. +62532 2407 3 E. kumai@pelni.co.id	Tual Jl. Ahmad Yani No.2, Lodar El, Tual, Maluku 97713 T. (0916) 22520 F. (0916) 21181 E. tual@pelni.co.id
Tarakan Jl. Kusuma Bangsa No. 100, Gunung Lingkas, Tarakan Kota T. +62551 5116 9, +62551 2544 0 F. +62551 21529 E. tarakan@pelni.co.id	Biak Jl. Jend. Sudirman No. 37, Burokub, Biak Kota, Biak Numfor, Papua 98115 T. (0981) 23255 F. (0981) 22225 E. biak@pelni.co.id
Nunukan Jl. A. Yani No. 11, Nunukan, Kalimantan Tenggara T. +62556 2130 9, +62556 2298 4 F. +62556 2102 9 E. nunukan@pelni.co.id	Serui Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kep. Yapen, Serui, Papua 98211 T. (0983) 32309 / (0983) 23256 F. (0983) 31552 E. serui@pelni.co.id



NAMA DAN ALAMAT ANAK PERUSAHAAN, KANTOR CABANG, DAN KANTOR PERWAKILAN

NAME AND ADDRESS OF SUBSIDIARIES, BRANCH OFFICES, AND REPRESENTATIVE OFFICES

Semarang Jl. Mpu Tantular 25-27, Semarang T. +6224 3540 238, +6224 3546 722 F. +6224 3555 156 E. semarang@pelni.co.id	Tg. Pinang Jl. Jend. A. Yani No. 06 Tg. Pinang Kepulauan Riau T. +62771 2151 3, +62771 2193 3 F. +62771 2342 7 E. tg-pinang@pelni.co.id
CABANG KELAS 4 CLASS 4 BRANCH	
Kota Baru / Batulicin Jl. Pelabuhan Samudera No. 125, Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 72211 T. (0518) 70822 F. (0518) 71419 E. kotabaru@pelni.co.id	Waingapu Jl. Hasanuddin No.1, Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur 87116 T. (0387) 61665 F. (0387) 61027 E. waingapu@pelni.co.id
Bima Jl. Kesatria No.2, Penatoi, Mpunda, Bima, Nusa Tenggara Barat 84116 T. 6282144523577 / (0374) 42046 F. (0374) 42625 E. bima@pelni.co.id	Kendari Jl. Mayjen Sutoyo No. 75e, Watu-Watu, Kendari Barat, Kendari, Sulawesi Tenggara T. 6282328887525 / (0401) 3121935 F. (0401) 3122156 E. kendari@pelni.co.id
Palu Jl. Ra Kartini No.96, Palu Timur, Palu, Sulawesi Tengah 94111 T. (0451) 421696 F. (0451) 423237 E. palu@pelni.co.id	Luwuk Jl. Sungai Limboto No. 74, Bungin, Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah 94713 T. (0461) 23013 / (0461) 23013 F. (0461) 21888 E. luwuk@pelni.co.id
Labuan Bajo Jl. Trans Flores, Pasar Baru, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur 86754 T. (0385) 2440304	Kaimana Jl. Diponegoro, Kaimana, Papua Barat 98113 T. (0957) 21009 F. (0957) 21464 E. kaimana@pelni.co.id
Ende Jl. Katedral No.2, Potulando, Ende, Nusa Tenggara Timur 86316 T. (0381) 21043 F. (0381) 21419 E. pelniende@pelni.co.id	Timika Jl. R.A. Kartini No.5, Inauga, Mimika Baru, Papua 99962 T. 6281344833431 / (0901) 3126660 F. (0901) 321106 E. timika@pelni.co.id
Merauke Jl. Sabang No. 318, Merauke, Papua Selatan 99114 T. (0971) 321591 F. (0971) 321631 E. merauke@pelni.co.id	Dobo Jl. Yos Sudarso No.22, Galai Dubu, Kep. Aru, Dobo, Maluku 97613 T. (0917) 21300 F. (0917) 21500 E. dobo@pelni.co.id

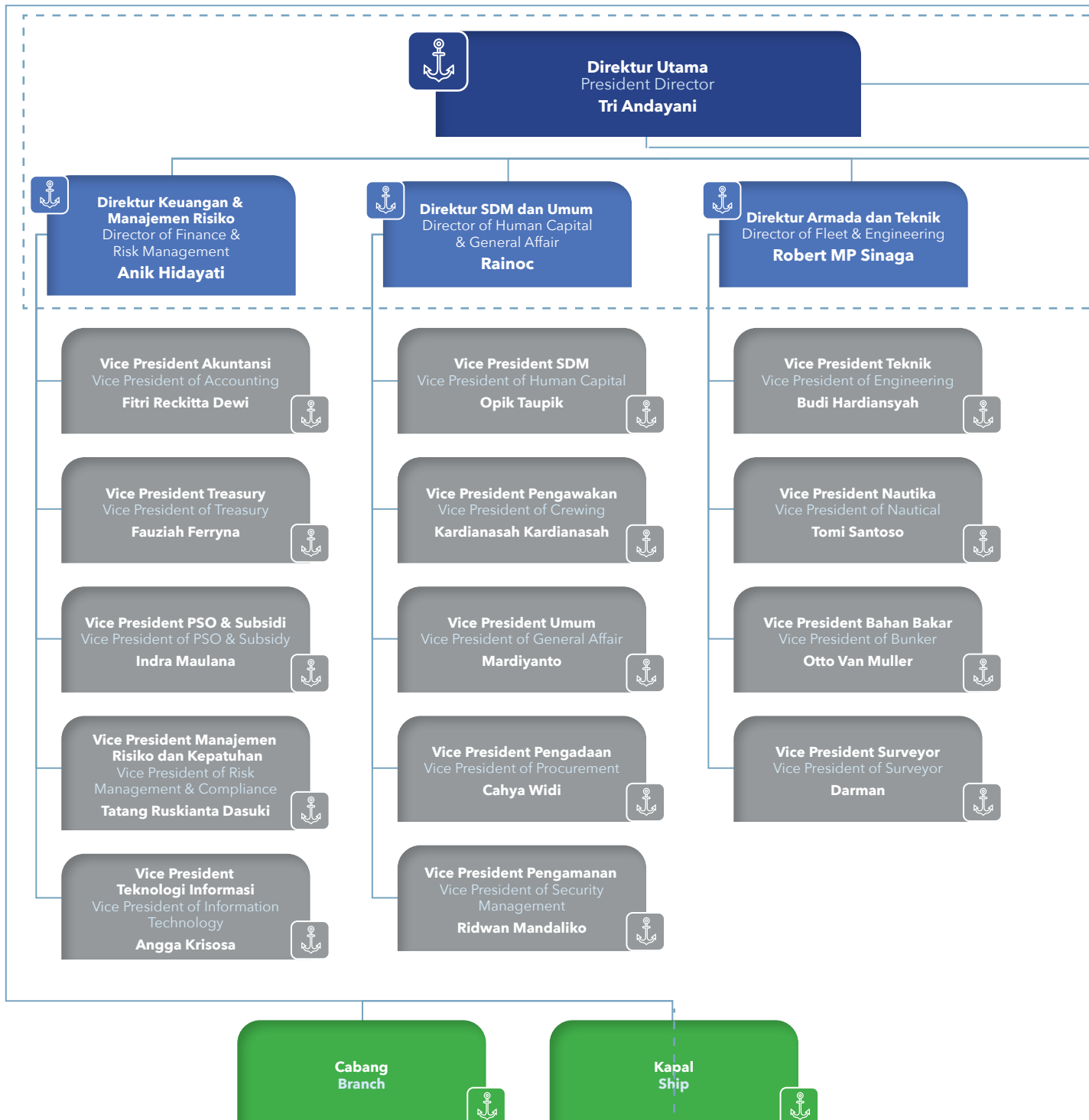




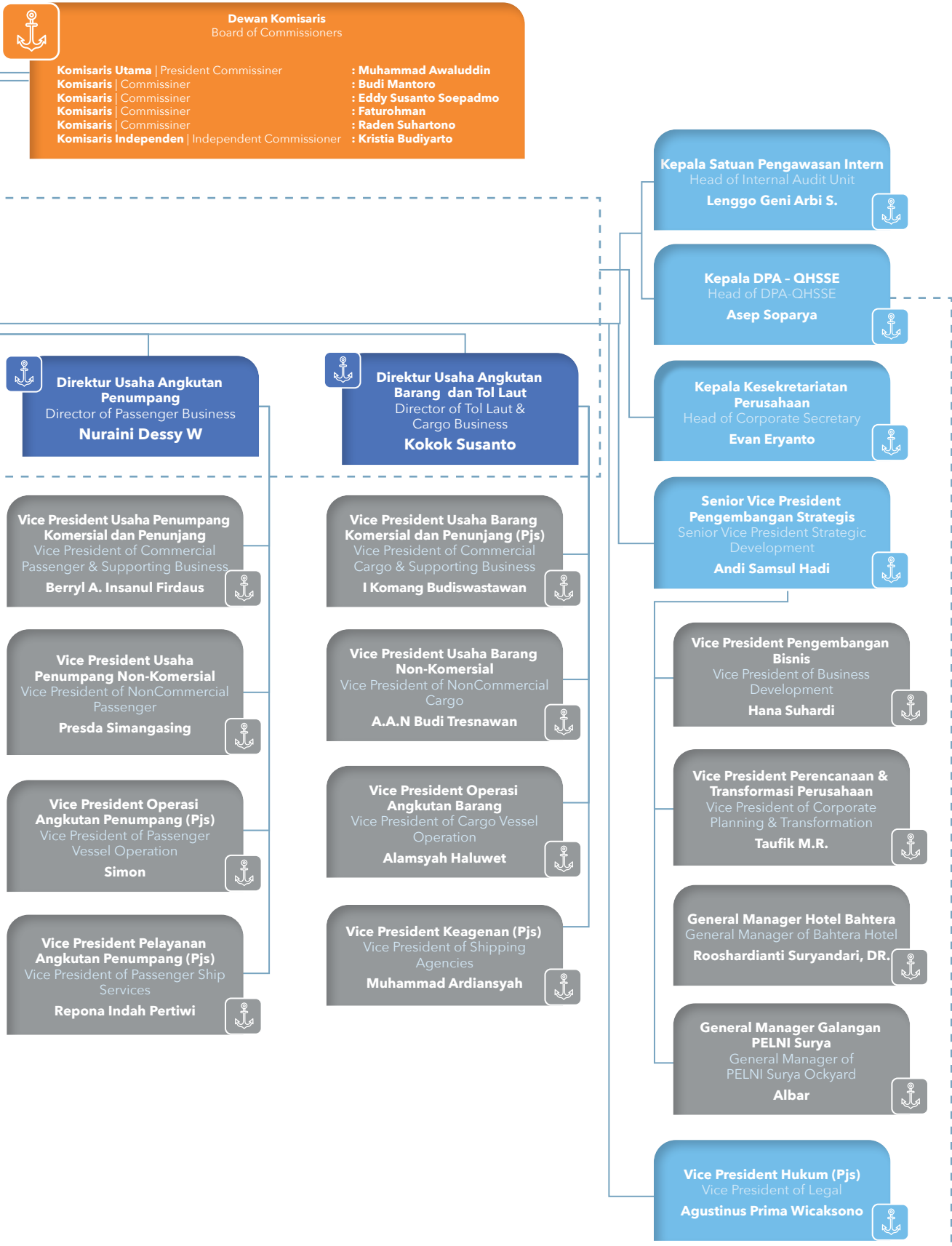
STRUKTUR ORGANISASI ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Struktur Organisasi disahkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 04.17/01/SK/HKO.01/2024 Tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Kantor Pusat di PT PELNI (Persero) tanggal 17 April 2024.

The organizational structure is authorized by Director's Decree Number 04.17/01/SK/HKO.01/2024 Regarding Organizational Structure, Main Duties, and Functions of the Head Office at PT PELNI (Persero) dated April 17, 2024.



STRUKTUR ORGANISASI ORGANIZATIONAL STRUCTURE



KEANGGOTAAN PERUSAHAAN DI DALAM ASOSIASI/ ORGANISASI INDUSTRI

COMPANY MEMBERSHIP IN ASSOCIATIONS/INDUSTRY ORGANIZATIONS

Pada 31 Desember 2024, PELNI terdaftar sebagai anggota pada asosiasi atau organisasi industri dengan rincian sebagai berikut:

As of December 31, 2024, PELNI is registered as a member of the following associations or industry organizations:

Asosiasi atau Organisasi Association or Organization	Alamat Address	Posisi di Asosiasi atau Organisasi Position in Association or Organization
Indonesian National Shipowners Association (INSA)	DPP INSA SECRETARIAT Wisma BSG, Lantai 3A #M04-05 Jl. Abdul Muis No.40 Jakarta Pusat, 10160-Indonesia Wisma BSG, 3 rd Floor #M04-05 Jl. Abdul Muis No.40 Central Jakarta, 10160, Indonesia P: +62 21 3514348 F: +62 21 351 4347	Anggota Member
Forum Human Capital Indonesia (FHCI)	Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto No. Kav 36-38 Lt. 28, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190-Indonesia Mandiri Plaza, 36-38 Gatot Subroto Street, No. Kav, 28 th Floor, Senayan, Kebayoran Baru, South Jakarta 12190, Indonesia. T: +62 21 2709543	Anggota Member





PROFIL DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS PROFILE





TRI ANDAYANI
Direktur Utama
President Director

Usia 51 tahun
Age 51 years old

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Jakarta, 29 Juli 1973
Jakarta, July 29, 1973

Masa Jabatan Term of Office	Periode pertama First term
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-57/MBU/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-57/MBU/02/2022 dated February 25, 2022
Pendidikan Education	- Pascasarjana (S2), Magister Manajemen, Universitas Gadjah Mada (2000) - Sarjana (S1), Sarjana Akuntansi, STIE Perbanas (1996) - Master's Degree (S2), Master of Management, Gadjah Mada University (2000) - Bachelor's Degree (S1), Accounting, STIE Perbanas (1996)
Pengalaman Kerja Work Experience	- Direktur Marketing PT Phapros Tbk (2021-2022) - Komisaris Independen PT Sarana Bandar Nasional (2018-2022) - Direktur Keuangan PT PELNI (Persero) (2017-2019) - Direktur Operasi PT Len Industri (Persero) (2016-2017) - Direktur Keuangan PT Len Industri (Persero) (2015-2016) - Marketing Director of PT Phapros Tbk (2021-2022) - Marketing Director of PT Phapros Tbk (2021-2022) - Independent Commissioner of PT Sarana Bandar Nasional (2018-2022) - Finance Director of PT PELNI (Persero) (2017-2019) - Operations Director of PT Len Industri (Persero) (2016-2017) - Finance Director of PT Len Industri (Persero) (2015-2016) - Marketing Director of PT Phapros Tbk (2021-2022)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak merangkap jabatan sebagai pejabat pada perusahaan atau instansi lain Does not hold concurrent positions in other companies or institutions
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Has no affiliation with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or shareholders

PROFIL DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS PROFILE



ANIK HIDAYATI

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Finance and Risk Management Director

Usia 58 tahun
Age 58 years old

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Gresik, 20 Oktober 1966
Gresik, October 20, 1966

Masa Jabatan Term of Office	Periode pertama First term
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-263/MBU/11/2022 tanggal 21 November 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-263/MBU/11/2022 dated November 21, 2022
Pendidikan Education	- Pascasarjana (S2), Magister Manajemen, Universitas Airlangga (2002) - Sarjana (S1), Perikanan, Universitas Brawijaya (1989) - Master's Degree (S2), Master of Management, Airlangga University (2002) - Bachelor's Degree (S1), Fisheries, Brawijaya University (1989)
Pengalaman Kerja Work Experience	- Senior Executive Vice President, Directorate Of Operation PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2022) - Temporary Substitute, Senior Executive Vice President, Directorate Of Internal Audit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2022) - Chief Regional Audit Jakarta 2, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2021 - 2022) - Direktur Pemasaran & Bisnis Syariah, PT Asuransi BRI Life (2018 - 2021) - Senior Vice President, Mass Funding Division, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2016 - 2018) - Regional Business Head BRI Surabaya (2016) - Regional Business Head BRI Malang (2014 - 2016) - Vice President, Procurement Logistic Management Division, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2012-2014) - Senior Executive Vice President, Directorate of Operation, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2022) - Temporary Substitute, Senior Executive Vice President, Directorate of Internal Audit, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2022) - Chief Regional Audit Jakarta 2, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2021 - 2022) - Marketing & Sharia Business Director, PT Asuransi BRI Life (2018 - 2021) - Senior Vice President, Mass Funding Division, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2016 - 2018) - Regional Business Head BRI Surabaya (2016) - Regional Business Head BRI Malang (2014 - 2016) - Vice President, Procurement Logistic Management Division, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2012-2014)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak merangkap jabatan sebagai pejabat pada perusahaan atau instansi lain Does not hold concurrent positions in other companies or institutions
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Has no affiliation with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or shareholders

PROFIL DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS PROFILE



HERI PURNOMO

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum
Human Resources and General Affairs Director

Usia 53 tahun
Age 53 years old

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Kudus, 27 Februari 1971
Kudus, February 27, 1971

Masa Jabatan Term of Office	Periode pertama First term
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-6/MBU/01/2024 tanggal 9 Januari 2024 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-6/MBU/01/2024 dated January 9, 2024
Pendidikan Education	- Magister Manajemen dari Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (2006) - Sarjana Ekonomi dari Universitas Sebelas Maret (1994) - Master's Degree in Management from Indonesian Business and Informatics Institute (2006) - Bachelor's Degree in Economics from Sebelas Maret University (1994)
Pengalaman Kerja Work Experience	- Asisten Deputy Bidang Industri Mineral Dan Batubara (Juni 2020 – 8 Januari 2024) - Plt. Deputy Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media (18 November 2019 - 8 Juni 2020) - Asisten Deputy Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media II (Januari 2019- Juni 2020) - Asisten Deputy Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan I (18 September 2017- 2 Januari 2019) - Asisten Deputy Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan III (30 Juni 2016- 8 Januari 2019) - Kabid Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan IIIa (Oktober 2015-Juni 2016) - Kabag Organisasi dan Reformasi Birokrasi (Mei 2014-Oktober 2015) - Kabid Jasa III C, Deputy Bidang Usaha Perbankan, Jasa Keuangan, Konstruksi dan Jasa Lainnya (September 2014-Mei 2014) - Kabid Jasa III B, Deputy Bidang Usaha Jasa (Oktober 2010-September 2014) - Komisaris PT Pelindo Multi Terminal (1 Maret 2023- 8 Januari 2024) - Komisaris PT Pelindo Solusi Logistik (September 2021-1 Maret 2023) - Komisaris PT Pelabuhan Indonesia IV (Oktober 2017-September 2021) - Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) (Januari 2017- Oktober 2017) - Komisaris PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero) (Juli 2014-Januari 2017) - Komisaris PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (Maret 2012- Juli 2014)



PROFIL DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS PROFILE

	• Assistant Deputy for Mineral and Coal Industry (June 2020 - January 8, 2024) • Acting Deputy for Mining, Strategic Industry, and Media (November 18, 2019 - June 8, 2020) • Assistant Deputy for Mining, Strategic Industry, and Media II (January 2019 - June 2020) • Assistant Deputy for Construction and Transportation Infrastructure I (September 18, 2017 - January 2, 2019) • Assistant Deputy for Construction and Transportation Infrastructure III (June 30, 2016 - January 8, 2019) • Head of Construction and Transportation Infrastructure IIIa (October 2015 - June 2016) • Head of Organization and Bureaucratic Reform (May 2014 - October 2015) • Head of Services III C, Deputy for Banking, Financial Services, Construction, and Other Services (September 2014 - May 2014) • Head of Services III B, Deputy for Services (October 2010 - September 2014) • Commissioner of PT Pelindo Multi Terminal (March 1, 2023 - January 8, 2024) • Commissioner of PT Pelindo Solusi Logistik (September 2021 - March 1, 2023) • Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia IV (October 2017 - September 2021) • Commissioner of PT Pos Indonesia (Persero) (January 2017 - October 2017) • Commissioner of PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, and Ratu Boko (Persero) (July 2014 - January 2017) • Commissioner of PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (March 2012 - July 2014)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak merangkap jabatan sebagai pejabat pada perusahaan atau instansi lain Does not hold concurrent positions in other companies or institutions
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Has no affiliation with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or shareholders



PROFIL DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS PROFILE





ROBERT M.P. SINAGA

Direktur Armada dan Teknik
Director of Fleet and Engineering

Usia 57 tahun
Age 57 years old

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Medan, 29 Desember 1967
Medan, December 29, 1967

Masa Jabatan Term of Office	Periode pertama First term
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-12/MBU/01/2021 tanggal 12 Januari 2021 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-12/MBU/01/2021 dated January 12, 2021
Pendidikan Education	- Pascasarjana (S2), Manajemen Logistik dan Teknik Transportasi, University of Lille I (1998) - Sarjana (S1), Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung (1992) - Master's Degree (S2), Logistics Management and Transport Engineering, University of Lille I (1998) - Bachelor's Degree (S1), Industrial Engineering, Bandung Institute of Technology (1992)
Pengalaman Kerja Work Experience	- Direktur Utama, PT Prima Multi Terminal (2018-2021) - Presiden Direktur Proyek Organisasi Pengembangan Kuala Tanjung (2017-2018) - Komisaris PT Prima Husada Cipta Medan (2016-2017) - Senior Manager, Bina Usaha (2015-2017) - General Manager, Terminal Peti Kemas Domestik Belawan (2014-2015) - President Director, PT Prima Multi Terminal (2018-2021) - President Director, Kuala Tanjung Development Project Organization (2017-2018) - Commissioner, PT Prima Husada Cipta Medan (2016-2017) - Senior Manager, Business Development (2015-2017) - General Manager, Domestic Container Terminal Belawan (2014-2015)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak merangkap jabatan sebagai pejabat pada perusahaan atau instansi lain Does not hold concurrent positions in other companies or institutions
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Has no affiliation with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or shareholders

PROFIL DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS PROFILE





NURAINI DESSY W
Direktur Usaha Angkutan Penumpang
Director of Passenger Transportation Business

Usia 49 tahun
Age 49 years old

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Sukabumi, 8 Desember 1975
Sukabumi, December 8, 1975

Masa Jabatan Term of Office	Periode pertama First term
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Bogor
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-262/MBU/09/2023 tanggal 21 September 2023 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-262/MBU/09/2023 dated September 21, 2023
Pendidikan Education	Sarjana (S1), Manajemen Transpor Laut, Sekolah Tinggi Manajemen Transpor Trisakti (2010) Bachelor's Degree (S1), Sea Transport Management, Trisakti School of Transport Management (2010)
Pengalaman Kerja Work Experience	• Vice President Pengawakan PT PELNI (Persero) (2023) • Kepala PT PELNI (Persero) Cabang Tg. Priok Jakarta (2021 - 2023) • Vice President Operasi & Layanan Operasional PT PELNI (Persero) (2021) • Pjs. Vice President Operasi & Layanan Operasional PT PELNI (Persero) (2020 - 2021) • Vice President of Crewing, PT PELNI (Persero) (2023) • Head of PT PELNI (Persero) Tanjung Priok Branch, Jakarta (2021 - 2023) • Vice President of Operations & Operational Services, PT PELNI (Persero) (2021) • Acting Vice President of Operations & Operational Services, PT PELNI (Persero) (2020 - 2021)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak merangkap jabatan sebagai pejabat pada perusahaan atau instansi lain Does not hold concurrent positions in other companies or institutions
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Has no affiliation with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or shareholders

PROFIL DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS PROFILE





KOKOK SUSANTO

Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut
Director of Freight and Sea Toll Business

Usia 48 tahun
Age 48 years old

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Semarang, 31 Mei 1976
Semarang, May 31, 1976

Masa Jabatan Term of Office	Periode pertama First term
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-70/MBU/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-70/MBU/03/2024 dated March 18, 2024
Pendidikan Education	Magister Universitas Airlangga tahun 2000 Master's Degree from Airlangga University (2000)
Pengalaman Kerja Work Experience	- Direktur Strategi & Komersial PT Pelindo Multi Terminal (2023 - 2024) - Direktur Komersial & Teknik PT Solusi Logistik (2022 - 2023) - Direktur Komersial PT Pelindo Solusi Logistik (2021 - 2022) - Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis PT Pelabuhan Indonesia III (2020-2021) - Direktur Utama PT Pelindo Energi Logistik (2018-2020) - Direktur Utama PT Pelindo Properti Indonesia (2017-2018) - Senior Manajer Supervisi Teknik PT Pelabuhan Indonesia III (2016-2017) - Strategy & Commercial Director, PT Pelindo Multi Terminal (2023 - 2024) - Commercial & Technical Director, PT Solusi Logistik (2022 - 2023) - Commercial Director, PT Pelindo Solusi Logistik (2021 - 2022) - Director of Transformation and Business Development, PT Pelabuhan Indonesia III (2020 - 2021) - President Director, PT Pelindo Energi Logistik (2018 - 2020) - President Director, PT Pelindo Properti Indonesia (2017 - 2018) - Senior Manager of Technical Supervision, PT Pelabuhan Indonesia III (2016 - 2017)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak merangkap jabatan sebagai pejabat pada perusahaan atau instansi lain Does not hold concurrent positions in other companies or institutions
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Has no affiliation with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or shareholders

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

CHANGE IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Pada tahun 2024 terdapat perubahan susunan komposisi Direksi yaitu diangkatnya Kokok Susanto sebagai Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-70/MBU/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 menggantikan Yossianis Marciano.

PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI SETELAH 31 DESEMBER 2024

Pada tahun 2025, tidak terdapat perubahan komposisi Direksi Perseroan.

In 2024, there was a change in the composition of the Board of Directors with the appointment of Mr. Kokok Susanto as Director of Cargo and Sea Toll Services based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. SK-70/MBU/03/2024 dated March 18, 2024, replacing Mr. Yossianis Marciano.

CHANGE IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS AFTER DECEMBER 31, 2024

Throughout 2025, there were no changes in the composition of the Company's Board of Directors.



PROFIL DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE





MUHAMMAD AWALUDDIN

Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen
President Commissioner Concurrently Independent Commissioner

Usia 56 tahun
Age 56 years old

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Jakarta, 15 Januari 1968
Jakarta, January 15, 1968

Masa Jabatan Term of Office	Periode pertama First term
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-9/MBU/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-9/MBU/01/2024 dated January 16, 2024
Pendidikan Education	• Doctoral Jurusan Doctor of Science in Management, Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung • Magister Jurusan Master of Business Administration, European University Antwerp Belgium (1998) • Sarjana Jurusan Teknik Elektro, Universitas Sriwijaya (1990) • Doctorate in Science in Management, Padjadjaran University (UNPAD) Bandung • Master's Degree in Business Administration, European University Antwerp, Belgium (1998) • Bachelor's Degree in Electrical Engineering, Sriwijaya University (1990)
Pengalaman Kerja Work Experience	• Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) (2016-2023) • CEO of Enterprise Business PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (2016) • Direktur Enterprise & Business Service PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (2012-2016) • Direktur Utama PT Infomedia Nusantara (2010-2012) • President Director, PT Angkasa Pura II (Persero) (2016-2023) • CEO of Enterprise Business, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (2016) • Director of Enterprise & Business Service, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (2012-2016) • President Director, PT Infomedia Nusantara (2010-2012)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak merangkap jabatan sebagai pejabat pada perusahaan atau instansi lain Does not hold concurrent positions in other companies or institutions
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Has no affiliation with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or shareholders

PROFIL DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE





KRISTIA BUDIARTO
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Usia 46 tahun
Age 46 years old

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Cirebon, 17 Januari 1978
Cirebon, January 17, 1978

Masa Jabatan Term of Office	Periode pertama First term
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-354/MBU/11/2020 tanggal 2 November 2020 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-354/MBU/11/2020 dated November 2, 2020
Pendidikan Education	Sarjana Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Hasanuddin (2002) Bachelor's Degree in Communication Science, Hasanuddin University (2002)
Pengalaman Kerja Work Experience	• Staff Asisten Khusus Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (2019-2021) • Media Planner/Social Media Analysis PT-G-Indonesia & APP Sinar Mas (2014-2019) • General Manager E-Commerce PT Planet Tecno (Makanja.com/Online Store) (2012-2013) • Direktur Operasional Jaringan Etnikom Bens Radio Jakarta (Bandung, Cirebon, Batam, Baturaja, Kayuagung, Banten) (2009-2011) • Program Director Bandung Radio, Jaringan Etnikom Network Bens Radio Jakarta (2008-2009) • Special Staff Assistant to the Deputy Minister of Defense of the Republic of Indonesia (2019-2021) • Media Planner/Social Media Analyst, PT-G-Indonesia & APP Sinar Mas (2014-2019) • General Manager of E-Commerce, PT Planet Tecno (Makanja.com/Online Store) (2012-2013) • Operational Director, Etnikom Network Bens Radio Jakarta (Bandung, Cirebon, Batam, Baturaja, Kayuagung, Banten) (2009-2011) • Program Director, Bandung Radio, Etnikom Network Bens Radio Jakarta (2008-2009)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Selain sebagai Komisaris Independen Perseroan, beliau menjabat sebagai: Staff Khusus Menteri Bidang Protokoler pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (2019-sekarang) In addition to serving as an Independent Commissioner of the Company, he also holds the position of: Special Staff to the Minister for Protocol Affairs at the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (2019 - present)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Has no affiliation with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or shareholders

PROFIL DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE



FATUROHMAN

Komisaris
Commissioner

Usia 48 tahun
Age 48 years old

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Tangerang, 26 Juni 1976
Tangerang, June 26, 1976

Masa Jabatan Term of Office	Periode pertama First term
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Bekasi
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-121/MBU/05/2022 tanggal 19 Mei 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-121/MBU/05/2022 dated May 19, 2022
Pendidikan Education	- Magister Jurusan Manajemen, IPB (2018) - Sarjana Jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia (2001) - Master's Degree in Management, IPB University (2018) - Bachelor's Degree in Accounting, University of Indonesia (2001)
Pengalaman Kerja Work Experience	- Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan, Kementerian BUMN (Januari 2024-sekarang) - PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitas Dukungan Strategis, di Kementerian BUMN (2022-Januari 2024) - Koordinator Keasdepan Jasa Infrastruktur, Kementerian BUMN (2020-2022) - Kepala Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana Perhubungan, Kementerian BUMN (2019-2020) - Komisaris PELNI (Persero) (2021-sekarang) - Komisaris PT Hotel Indonesia Natour (2019-2021) - Komisaris/Anggota Dewan Pengawas, PT Angkasa Pura Hotels (2016-2019) - Assistant Deputy for Plantation and Forestry Industry, Ministry of BUMN (January 2024-Present) - Acting Head of Public Relations and Strategic Support Bureau, Ministry of BUMN (2022-January 2024) - Coordinator of Infrastructure Services, Ministry of BUMN (2020-2022) - Head of Construction and Transportation Facilities Business Division, Ministry of BUMN (2019-2020) - Commissioner, PT PELNI (Persero) (2021-Present) - Commissioner, PT Hotel Indonesia Natour (2019-2021) - Commissioner/Member of the Supervisory Board, PT Angkasa Pura Hotels (2016-2019)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Selain sebagai Komisaris Perseroan, beliau menjabat sebagai: PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitas Dukungan Strategis di Kementerian BUMN (2022-Januari 2024) In addition to serving as an Independent Commissioner of the Company, he also holds the position of: Acting Head of Public Relations and Strategic Support Bureau, Ministry of BUMN (2022-January 2024)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Has no affiliation with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or shareholders



PROFIL DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE





BUDI MANTORO

Komisaris
Commissioner

Usia 52 tahun
Age 52 years old

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Magelang, 15 September 1972
Magelang, September 15, 1972

Masa Jabatan Term of Office	Periode pertama First term
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-9/MBU/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-9/MBU/01/2024 dated January 16, 2024
Pendidikan Education	- S2 Ilmu Administrasi, Universitas Syeh Islam Yusuf (2010) - Diploma IV Jurusan Nautika, STIP Jakarta (2001) - Diploma III Jurusan Nautika, BPLP Semarang (1996) - Master's Degree in Administrative Science, Universitas Syeh Islam Yusuf (2010) - Diploma IV in Nautical Science, STIP Jakarta (2001) - Diploma III in Nautical Science, BPLP Semarang (1996)
Pengalaman Kerja Work Experience	- Direktur Kenavigasian, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (2022-sekarang) - Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Pinang, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (2021-2022) - Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan (2020 - 2021) - Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (2018-2020) - Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa terkait, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (2018) - Director of Navigation, Directorate General of Sea Transportation, Ministry of Transportation (2022-present) - Head of Type A Class I Navigation District Tanjung Pinang, Directorate General of Sea Transportation, Ministry of Transportation (2021-2022) - Head of Academic Administration and Cadet Affairs, Human Resources Development Agency for Transportation, Ministry of Transportation (2020-2021) - Head of Domestic Sea Transportation Sub-Directorate, Directorate General of Sea Transportation, Ministry of Transportation (2018-2020) - Head of Special Sea Transportation and Related Services Sub-Directorate, Directorate General of Sea Transportation, Ministry of Transportation (2018)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Selain sebagai Komisaris Perseroan, beliau menjabat sebagai: Direktur Kenavigasian, Ditjen Hubla Kemenhub (2022 sampai dengan Sekarang) In addition to serving as Commissioner of the Company, he also holds the position of: Director of Navigation, Directorate General of Sea Transportation, Ministry of Transportation (2022-present)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Has no affiliation with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or shareholders

PROFIL DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE

RADEN SUHARTONO

Komisaris
Commissioner

Usia 59 tahun
Age 59 years old

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Banyumas, 7 Mei 1965
Banyumas, May 7, 1965

Masa Jabatan Term of Office	Periode pertama First term
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Semarang
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-121/MBU/05/2022 tanggal 19 Mei 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-121/MBU/05/2022 dated May 19, 2022
Pendidikan Education	- Pascasarjana (S2), Magister Akuntansi, Universitas Tanjungpura (2021) - Sarjana (S1), Akuntansi, Universitas Diponegoro (1996) - Diploma (D3), Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1988) - Master's Degree (S2) in Accounting, Tanjungpura University (2021) - Diploma (D3) in Accounting, State College of Accountancy (1988) - Bachelor's Degree (S1) in Accounting, Diponegoro University (1996)
Pengalaman Kerja Work Experience	- Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (2021 - sekarang) - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah (2021) - Kepala Biro Umum (2020) - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat (2018) - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2016) - Kepala Bidang Akuntan Negara (2013) - Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (2010) - Deputy Head of BPKP for Regional Financial Management Oversight (2021 - present) - Head of BPKP Representative Office, Central Java Province (2021) - Head of the General Bureau (2020) - Head of BPKP Representative Office, West Kalimantan Province (2018) - Head of BPKP Representative Office, Bangka Belitung Province (2016) - Head of the State Accountant Division (2013) - Head of the Regional Government Accountability Division (2010)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Selain sebagai Komisaris Perseroan, beliau menjabat sebagai: Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (2021 - sekarang) In addition to serving as Commissioner of the Company, he also holds the position of: Deputy Head of BPKP for Regional Financial Management Oversight (2021 - present)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Has no affiliation with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or shareholders

PROFIL DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE



EDDY SUSANTO SOEPADMO

Komisaris
Commissioner

Usia 65 tahun
Age 65 years old

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Madiun, 26 Januari 1959
Madiun, January 26, 1959

Masa Jabatan Term of Office	Periode pertama First term
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-84/MBU/03/2020 tanggal 19 Maret 2020 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-84/MBU/03/2020 dated March 19, 2020
Pendidikan Education	Sarjana, Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia (2003) Bachelor's Degree in Economics, University of Indonesia (2003)
Pengalaman Kerja Work Experience	• Special Advisor to the Chief of Staff, Executive Office of the President Republic of Indonesia (2018) • Advisor, E bus Technology Innovation, PT Mobil Anak Bangsa (2016) • Deputy Secretary General of Innovation to the Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, (2015) • Advisor, Agricultural Technology Innovation, PT Kencana Artha Raya (2015) • Program Director to the Planet Inovasi Indonesia (2014) • Special Advisor to the Commander of the National Armed Forces (2013-2015) • Special Advisor to the Chief of Staff, Executive Office of the President of the Republic of Indonesia (2018) • Advisor for E-Bus Technology Innovation, PT Mobil Anak Bangsa (2016) • Deputy Secretary General of Innovation, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (2015) • Advisor for Agricultural Technology Innovation, PT Kencana Artha Raya (2015) • Program Director at Planet Inovasi Indonesia (2014) • Special Advisor to the Commander of the National Armed Forces (2013-2015)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak merangkap jabatan sebagai pejabat pada perusahaan atau instansi lain. Does not hold concurrent positions in other companies or institutions.
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Has no affiliation with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, or shareholders

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

CHANGE IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Pada tahun 2024 telah terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris, dimana pada tanggal 16 Januari telah dilakukan pengangkatan Muhammad Awaluddin yang menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen yang sebelumnya jabatan tersebut kosong sejak 23 November 2023. Lalu pada tanggal yang sama dilakukan pengangkatan Budi Mantoro sebagai Komisaris untuk menggantikan Wahyu Adji Herpriarsono.

In 2024, there was a change in the composition of the Board of Commissioners. On January 16, Muhammad Awaluddin was appointed as President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner, filling the position that had been vacant since November 23, 2023. On the same date, Budi Mantoro was appointed as Commissioner, replacing Wahyu Adji Herpriarsono.

PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS SETELAH 31 DESEMBER 2024

Pada tahun 2025, tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris Perseroan.

CHANGE IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AFTER DECEMBER 31, 2024

Throughout 2025, there were no changes in the composition of the Company's Board of Commissioners.

SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES

Perseroan meyakini Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni merupakan ujung tombak dalam upaya mewujudkan visi dan misi Perseroan. Untuk itu, Perseroan secara berkesinambungan menjalankan program pendidikan dan pengembangan kompetensi pekerja agar lebih kompetitif dalam menghadapi perubahan dan perkembangan yang begitu pesat serta meningkatkan efektivitas dan produktivitas kinerja. Perseroan begitu memperhatikan dengan baik kualitas, profesionalitas dan efektivitas SDM dalam menjaga, serta menumbuhkan loyalitas dan produktivitas SDM setiap tahunnya. Komitmen-komitmen tersebut dibuktikan dengan penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan SDM yang dilakukan dengan mengacu pada kerangka pelatihan dan pengembangan yang mencakup seluruh aspek dan metode pengembangan bagi seluruh SDM. Secara mendasar, seluruh proses tersebut diterapkan sesuai rencana jangka panjang yang termuat di dalam *Roadmap* Pengelolaan SDM PELNI 2020-2024.

The Company firmly believes that capable Human Resources (HR) are pivotal in achieving the company's vision and mission. To this end, the Company continuously implements education and competency development programs for employees to be more competitive in dealing with rapid changes and developments, thereby enhancing effectiveness and productivity in performance. The Company pays meticulous attention to the quality, professionalism, and effectiveness of HR in maintaining and fostering loyalty and productivity annually. These commitments are demonstrated through the provision of training and development of HR, adhering to a comprehensive framework that encompasses all aspects and development methods for all HR. Fundamentally, all these processes are implemented according to the long-term plan outlined in the PELNI HR Management Roadmap 2020-2024.

SUMBER DAYA MANUSIA HUMAN RESOURCES

KEBIJAKAN INTERNAL PENGELOLAAN SDM

Sampai dengan 2024, PELNI menerapkan sejumlah kebijakan internal sebagai dasar pengelolaan SDM sesuai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) serta pencapaian visi dan misi Perseroan. Sejumlah aturan internal pengelolaan SDM PELNI adalah sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Direksi Nomor 04.29/03/SK/HKO.01/2021 tentang Hak-Hak Kesejahteraan Pegawai PT PELNI (Persero);
2. Surat Edaran Direktur SDM & Umum Nomor 06.17/01/01/SE/HKO.03/2021 tentang Budaya Berdoa Bersama dan *Morning Briefing* di Lingkungan PT PELNI (Persero);
3. Surat Keputusan Direksi Nomor 06.30/01/SK/HKO.01/2021 tentang Pengawasan Kinerja Kapal dan Cabang di PT PELNI (Persero);
4. Surat Keputusan Direksi Nomor 07.26/02/SK/HKO.01/2021 tentang Penanganan Awak Kapal Meninggal di Atas Kapal PT PELNI (Persero);
5. Surat Keputusan Direksi Nomor 07.07/01/SK/HKO.01/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Unit Bisnis Strategis (*Strategic Business Unit*/SBU) Galangan Pelni Surya;
6. Surat Keputusan Direksi Nomor 09.22/01/SK/HKO.01/2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai PT PELNI (Persero);
7. Surat Keputusan Direksi Nomor 09.24/04/SK/HKO.01/2021 tentang Pedoman Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian (PLH.) dan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT.) di PT PELNI (Persero);
8. Surat Keputusan Direksi Nomor 10.07/01/SK/HKO.01/2021 tentang Protokol Kesehatan Penanganan Pegawai Terpapar COVID-19;
9. Surat Keputusan Direksi Nomor 11.04/01/SK/HKO.01/2021 tentang Pengelolaan Tenaga Kerja Alih Daya di Lingkungan PT PELNI (Persero);
10. Surat Keputusan Direksi Nomor 01.27/01/SK/HKO.01/2023 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pusat di PT. PELNI (Persero);
11. Surat Keputusan Direksi Nomor 02.02/02/SK/HKO.01/2023 tentang Perubahan Atas

INTERNAL HR MANAGEMENT POLICIES

Until 2024, PELNI has implemented several internal policies as the basis for HR management in accordance with the Long-Term Corporate Plan (RJPP) and in achieving the Company's vision and mission. The internal HR management rules for PELNI are as follows:

1. Board of Directors Decision No. 04.29/03/SK/HKO.01/2021 regarding Employee Welfare Rights at PT PELNI (Persero);
2. HR & General Affairs Director Circular No. 06.17/01/01/SE/HKO.03/2021 about the Culture of Joint Prayer and Morning Briefing at PT PELNI (Persero);
3. Board of Directors Decision No. 06.30/01/SK/HKO.01/2021 regarding Performance Supervision of Ships and Branches at PT PELNI (Persero);
4. Board of Directors Decision No. 07.26/02/SK/HKO.01/2021 on Handling Crew Deaths Aboard Ships of PT PELNI (Persero);
5. Board of Directors Decision No. 07.07/01/SK/HKO.01/2022 on the Organizational Structure and Governance of the Strategic Business Unit (SBU) Pelni Surya Yard;
6. Board of Directors Decision No. 09.22/01/SK/HKO.01/2021 on Guidelines for Employee Performance Assessment at PT PELNI (Persero);
7. Board of Directors Decision No. 09.24/04/SK/HKO.01/2021 on Guidelines for Appointment of Acting Daily Officials (PLH.) and Temporary Task Officials (PLT.) at PT PELNI (Persero);
8. Board of Directors Decision No. 10.07/01/SK/HKO.01/2021 on Health Protocols for Handling COVID-19 Exposed Employees;
9. Board of Directors Decision No. 11.04/01/SK/HKO.01/2021 on Management of Outsourced Labor at PT PELNI (Persero);
10. Board of Directors Decision No. 01.27/01/SK/HKO.01/2023 on Organizational Structure, Main Tasks and Functions of the Head Office at PT PELNI (Persero);
11. Board of Directors Decision No. 02.02/02/SK/HKO.01/2023 on Amendment to Board of Directors

SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES

- Surat Keputusan Direksi Nomor 01.27/01/SK/HKO.01/2023 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pusat di PT PELNI (Persero);
- Decision No. 01.27/01/SK/HKO.01/2023 on Organizational Structure, Main Tasks and Functions of the Head Office at PT PELNI (Persero);
12. Surat Keputusan Direksi Nomor 03.02/01/SK/HKO.01/2023 tentang Formasi Unit Kerja dan Jabatan pada Lingkup Kantor Pusat;
 12. Board of Directors Decision No. 03.02/01/SK/HKO.01/2023 on Work Unit and Position Formation within the Head Office Scope;
 13. Surat Keputusan Direksi Nomor 08.07/02/SK/HKO.01/2023 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi Nomor 03.02/01/SK/HKO.01/2023 tentang Formasi Unit Kerja dan Jabatan pada Lingkup Kantor Pusat;
 13. Board of Directors Decision No. 08.07/02/SK/HKO.01/2023 on Amendment to Board of Directors Decision No. 03.02/01/SK/HKO.01/2023 on Work Unit and Position Formation within the Head Office Scope;
 14. Surat Keputusan Direksi Nomor 11.30/03/SK/HKO.01/2021 tentang Standar Kompetensi Direksi Anak Perusahaan dan Pejabat Struktural Satu Level di Bawah Direksi di Lingkungan PT PELNI (Persero);
 14. Board of Directors Decision No. 11.30/03/SK/HKO.01/2021 on Competence Standards for Subsidiary Directors and Structural Officials One Level Below the Board at PT PELNI (Persero);
 15. Surat Keputusan Direksi Nomor 02.02/01/SK/HKO.01/2023 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok & Fungsi Kantor Cabang PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero);
 15. Board of Directors Decision No. 02.02/01/SK/HKO.01/2023 on Organizational Structure, Main Tasks & Functions of Branch Offices of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero);
 16. Surat Keputusan Direksi Nomor 03.30/01/SK/HKO.01/2023 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi Nomor 02.02/01/SK/HKO.01/2023 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok & Fungsi Kantor Cabang PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero);
 16. Board of Directors Decision No. 03.30/01/SK/HKO.01/2023 on Amendment to Board of Directors Decision No. 02.02/01/SK/HKO.01/2023 on Organizational Structure, Main Tasks & Functions of Branch Offices of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero);
 17. Surat Keputusan Direksi nomor 09.22/01/SK/HKO.01/2021 tentang Penilaian Kinerja Pegawai;
 17. Board of Directors Decision No. 09.22/01/SK/HKO.01/2021 on Employee Performance Assessment;
 18. Surat Keputusan Direksi nomor 07.07/02/SK/HKO.01/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola *Unit Business Strategic* (SBU) Hotel Bahtera;
 18. Board of Directors Decision No. 07.07/02/SK/HKO.01/2022 on Organizational Structure and Governance of the Strategic Business Unit (SBU) Hotel Bahtera;
 19. Surat Keputusan Direksi Nomor 01.24/01/SK/HKO.01/2022 tentang Pedoman Tata Nilai Utama (Core Values) Akhlak PT PELNI (Persero);
 19. Board of Directors Decision No. 01.24/01/SK/HKO.01/2022 on Guidelines for Core Values Ethics of PT PELNI (Persero);
 20. Surat Keputusan Direksi Nomor 02.03/02/SK/HKO.01/2022 tentang Pedoman *Knowledge Management System* di PT PELNI (Persero)
 20. Board of Directors Decision No. 02.03/02/SK/HKO.01/2022 on Guidelines for Knowledge Management System at PT PELNI (Persero);
 21. Surat Keputusan Direksi nomor 02.17/01/SK/HKO.01/2022 tentang Pedoman Penilaian Klasifikasi Cabang;
 21. Board of Directors Decision No. 02.17/01/SK/HKO.01/2022 on Guidelines for Branch Classification Assessment;
 22. Instruksi Direktur SDM & Umum Nomor 04.06/01/INS/HKO.03/2022 tentang Pelaksanaan *Self*
 22. HR & General Affairs Director Instruction No. 04.06/01/INS/HKO.03/2022 on Implementation



SUMBER DAYA MANUSIA HUMAN RESOURCES

- Directed Learning (SDL) dan Sharing Knowledge di Lingkungan di PT PELNI (Persero);*
23. Surat Edaran Direktur SDM & Umum Nomor 08.16/SE/ HKO.03/2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan *Medical Check-Up (MCU)* dan General Check-Up (GCU) Pegawai PT PELNI (Persero).
 24. Surat Keputusan Direksi Nomor : 164/HKO.01/DIR/ XII-2010 tentang Pedoman Pengangkatan Dalam Kepangkatan Pegawai Di PT PELNI (Persero);
 25. Surat Keputusan Direksi Nomor : 01.04/01/SK/ HKO.01/2018 tentang Penetapan Jam Kerja Dan Kehadiran Di Lingkungan PT PELNI (Persero);
 26. Surat Keputusan Direksi Nomor 03.04/01/SK/ HKO.01/2020 tentang Peraturan Disiplin Pegawai PT PELNI (Persero);
 27. Nota Dinas Direktur SDM & Umum Nomor 01.08/01/ND-B/DS/2023 perihal Pemberlakuan Jam Kerja di Lingkungan Kantor Pusat, Kantor Cabang dan SBU PT PELNI (Persero);
 28. Surat Keputusan Direksi Nomor 07.08/01/SK/ HKO.01/2023 tentang Penetapan Pemberlakuan PKB Periode 2023 – 2025 Antara PT PELNI (Persero) Dengan Serikat Pekerja PELNI;
 29. Surat Keputusan Direksi Nomor 07.14/01/SK/ HKO.01/2023 tentang Hak Pegawai Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
 30. Surat Keputusan Direksi Nomor 01.02/03/SK/ HKO.01/2024 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Di PT PELNI (Persero);
 31. Surat Keputusan Direksi Nomor 05.06/01/SK/ HKO.01/2024 tentang Pemberian Penghargaan Atas Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Di PT PELNI (Persero)

- of Self Directed Learning (SDL) and Knowledge Sharing at PT PELNI (Persero);
23. HR & General Affairs Director Circular No. 08.16/ SE/ HKO.03/2022 on Medical Check-Up (MCU) and General Check-Up (GCU) Requirements for Employees of PT PELNI (Persero);
 24. Board of Directors Decision No. : 164/HKO.01/DIR/ XII-2010 on Guidelines for Employee Promotion in Rank at PT PELNI (Persero);
 25. Board of Directors Decision No. : 01.04/01/SK/ HKO.01/2018 on Work Hours and Attendance at PT PELNI (Persero);
 26. Board of Directors Decision No. 03.04/01/SK/ HKO.01/2020 on Employee Discipline Regulations at PT PELNI (Persero);
 27. HR & General Affairs Director Memo No. 01.08/01/ ND-B/DS/2023 on Work Hours Implementation in the Head Office, Branch Offices and SBU of PT PELNI (Persero);
 28. Board of Directors Decision No. 07.08/01/SK/ HKO.01/2023 on Implementation of Collective Labor Agreement (CLA) Period 2023 – 2025 Between PT PELNI (Persero) and PELNI Workers Union;
 29. Board of Directors Decision No. 07.14/01/SK/ HKO.01/2023 on Employee Rights Following Termination of Employment;
 30. Board of Directors Decision No. 01.02/03/SK/ HKO.01/2024 on Retirement Age Limits for Employees at PT PELNI (Persero);
 31. Board of Directors Decision No. 05.06/01/SK/ HKO.01/2024 on Awards for Reporting Violations (*Whistleblowing System*) at PT PELNI (Persero).

PETA JALAN PENGELOLAAN SDM

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kunci penting dalam pertumbuhan perusahaan. Oleh sebab itu, penting bagi perusahaan untuk melakukan pengelolaan SDM secara efektif dan efisien, sehingga perusahaan dapat memiliki SDM yang terampil, kompeten, berkarakter, dan memiliki loyalitas kerja. Berangkat dari pemahaman tersebut, PT PELNI (Persero) berkomitmen untuk melakukan pengelolaan SDM secara konsisten dan berkesinambungan yang dituangkan dalam peta jalan pengelolaan SDM 2020-2024.

HR MANAGEMENT ROADMAP

Human Resources (HR) are a key factor in the company's growth. Therefore, it is crucial for the company to manage HR effectively and efficiently, enabling the company to have skilled, competent, characterful, and loyal employees. Building on this understanding, PT PELNI (Persero) is committed to consistently and sustainably managing HR, as outlined in the HR Management Roadmap 2020-2024.

SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES

2020	2021	2022	2023	2024
<i>Survival (Dampak COVID-19)</i> (Impact of COVID-19)	<i>Business Recovery Pasca COVID</i> Post-COVID Business Recovery	<i>Market Expansion</i>	<i>Business Expansion</i>	<i>Profitable Growth</i>
- Strategi Efisiensi Biaya atas dampak pandemic - Divestasi <i>non-core business</i> <i>Operational Excellence</i> - Sosialisasi Budaya (AKHLAK)	- Peningkatan Kapasitas Angkutan Barang - Optimalisasi Rute Komersial dan Penugasan <i>Integrated Talent Management & Performance System</i> - Penguatan Digitalisasi Proses bisnis <i>Roll Out Sistem Online Logistics</i>	- Optimalisasi Aset - Skala Bisnis - Angkutan Barang melalui kerja sama dengan instansi - Peningkatan Bisnis Wisata - Inisiasi pengembangan bisnis Angkutan barang kawasan Asia Tenggara	- Penguatan aktivitas Logistik Maritim melalui restrukturisasi Sarana Bandar <i>Indotrading</i> - Pengembangan Bisnis <i>Crew Manning Maritime Training Centre</i> - Penguatan aktivitas Logistik Maritim melalui restrukturisasi PT SBL	- Optimalisasi Pendapatan dari Portofolio bisnis komersial - Peningkatan kapasitas atas alat produksi Angkutan Barang - Pengembangan <i>Bisnis Crew Manning & Maritime Training Centre</i> ke Asia Tenggara
- Cost Efficiency Strategy due to the Pandemic Impact - Divestment of Non-Core Business - Operational Excellence - Socialization of Culture (AKHLAK)	- Increase in Cargo Transport Capacity - Optimization of Commercial Routes and Assignments - Integrated Talent Management & Performance System - Strengthening of Business Process Digitalization - Roll Out of Online Logistics System	- Asset Optimization - Business Scaling in Cargo Transport through Collaboration with Agencies - Tourism Business Enhancement - Initiation of Cargo Transport Business Development in Southeast Asia	- Strengthening of Maritime Logistics Activities through Restructuring of Sarana Bandar <i>Indotrading</i> - Crew Manning Business Development - Maritime Training Centre - Strengthening of Maritime Logistics Activities through Restructuring of PT SBL	- Optimization of Revenue from Commercial Business Portfolio - Increase in Production Equipment Capacity for Cargo Transport - Development of Crew Manning & Maritime Training Centre to Southeast Asia

PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA

Pada 31 Desember 2024, PELNI beroperasi dengan sejumlah 4.533 orang pegawai. Angka tersebut memperlihatkan Penurunan jumlah pegawai sebesar 9,54% dibanding tahun sebelumnya, yang sejumlah 5.001 pegawai. penurunan jumlah pegawai tersebut sejalan dengan perkembangan usaha Perseroan dan juga untuk mendukung pencapaian rencana jangka menengah dan panjang Perseroan.

Terkait hal tersebut, PELNI menjamin sistem rekrutmen dan pengembangan karier yang diberikan untuk karyawan telah dilaksanakan dengan adil dan setara bagi seluruh pegawai, tanpa praktik diskriminatif apapun berdasarkan latar belakang identitas dari masing-masing pegawai, mencakup latar belakang jenis kelamin, suku bangsa, agama, ras, maupun keterbatasan fisik tertentu.

HUMAN RESOURCES PROFILE

As of December 31, 2024, PELNI operated with a total of 4.533 employees. This number represents a decrease of 9,54% compared to the previous year, which had 5,001 employees. The increase in the number of employees aligns with the company's business growth and supports the achievement of the company's medium and long-term plans.

PELNI ensures that the recruitment and career development system provided to employees is implemented fairly and equally for all employees, without any discriminatory practices based on the individual identities of each employee, including gender, ethnicity, religion, race, or certain physical limitations.



SUMBER DAYA MANUSIA HUMAN RESOURCES

Komposisi pegawai PELNI berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, usia, level jabatan, hingga status kepegawaian adalah sebagai berikut.

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin 89,65% pegawai PELNI merupakan pegawai laki-laki atau bertambah dibanding persentase tahun 2023 yang sebesar 88,43%. Tingginya persentase pegawai laki-laki tersebut disebabkan banyaknya pekerjaan operasional yang lebih diminati dan sesuai untuk laki-laki, misalnya di cabang dan kapal. Meski demikian Perseroan berkomitmen untuk tetap memberikan kesempatan yang setara, baik kepada pegawai laki-laki maupun perempuan, dalam berkarier di dalam Perseroan.

Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin Employee Composition by Gender

Uraian Description	2024		2023	
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female
Pegawai Darat Ashore Employees	891	427	876	520
Pegawai Laut Offshore Employees	3.173	42	3.555	60
Jumlah Total	4.064	469	4.431	580

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Pada tahun 2024 jumlah pegawai lulusan Sarjana mengalami peningkatan sebesar 8,78% dari 852 orang pada tahun 2023 menjadi 934 orang. Peningkatan tersebut bisa menciptakan pegawai yang unggul, kompeten dan berdaya saing. Selain itu, Perseroan juga membekali pegawai dengan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan melalui pelatihan yang diberikan agar pegawai memiliki keahlian yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Perseroan memandang pengembangan kompetensi SDM sebagai investasi jangka panjang yang memberikan dampak nyata bagi peningkatan kinerja Perseroan di masa mendatang.

The composition of PELNI employees based on gender, education level, age, job level, and employment status is as follows:

COMPOSITION OF EMPLOYEES BY GENDER

The composition of employees by gender shows that 89,65% of PELNI employees are male, a slight increase from 88.43% in 2023. The high percentage of male employees is due to the operational nature of the work, which is more preferred and suitable for men, such as positions at branches and on ships. Nevertheless, the company is committed to providing equal opportunities for both male and female employees in their careers within the company.

COMPOSITION OF EMPLOYEES BY EDUCATION LEVEL

In 2024, the number of employees with a Bachelor's degree increased by 8,78%, from 852 in 2023 to 934. This increase has the potential to create excellent, competent, and competitive employees. Additionally, the Company equips its employees with the necessary competencies through training, ensuring they possess the skills required to perform their duties and responsibilities effectively. The Company views the development of human resource competencies as a long-term investment that will have a tangible impact on improving the Company's performance in the future.

SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES

Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Employee Composition by Education Level

Uraian Description	2024		2023	
	Jumlah Total	Komposisi Composition	Jumlah Total	Komposisi Composition
Doktor Doctorate	-	-	-	-
Pascasarjana (S2) Master's Degree	68	1,50%	61	1,22%
Sarjana Bachelor's Degree	934	20,60%	852	17,00%
Diploma	383	8,45%	428	8,54%
< SLTA High School	2.242	49,46%	2.473	49,35%
ANT I	57	1,26%	93	1,86%
ANT II	90	1,99%	107	2,14%
ANT III	207	4,57%	251	5,01%
< ANT IV	98	2,16%	119	2,37%
ATT I	27	0,60%	73	1,46%
ATT II	89	1,96%	82	1,64%
ATT III	223	4,92%	287	5,73%
< ATT IV	115	2,54%	185	3,69%
Jumlah Total	4.533	100,00%	5.011	100,00%

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN USIA

Berdasarkan kelompok usia, komposisi pegawai PELNI pada kelompok umur terbanyak berada pada rentang 31-39 tahun, dengan persentase sebesar 32,10%. Komposisi secara umum pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pegawai yang berusia di bawah 50 tahun sebesar 68,85%, atau menurun dibanding tahun 2023 yang sebesar 68,89%. Terkait hal tersebut, PELNI secara konsisten terus melaksanakan proses regenerasi personil SDM untuk dipersiapkan menggantikan pegawai yang berusia lebih dari 50 tahun.

COMPOSITION OF EMPLOYEES BY AGE

Based on age groups, the largest proportion of PELNI employees is in the 31-39 age range, with a percentage of 32,10%. Overall, in 2024, employees under the age of 50 accounted for 68.85%, a decrease from 68.89% in 2023. PELNI consistently conducts personnel regeneration to prepare employees under 50 to replace those over 50 years old.



SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES

Komposisi Pegawai berdasarkan Usia Employee Composition by Age

Uraian Description	2024		2023	
	Jumlah Total	Komposisi Composition	Jumlah Total	Komposisi Composition
> 55	280	6,18%	191	3,81%
50 - 55	1.132	24,97%	1.368	27,30%
40 - 49	543	11,98%	843	16,82%
31 - 39	1.455	32,10%	1.640	32,73%
< 30	1.123	24,77%	969	19,34%
Jumlah Total	4.533	100,00%	5.011	100,00%

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN LEVEL JABATAN

Berdasarkan level organisasi, pegawai PELNI didominasi oleh personil pada jenjang tamtama (setara staf/pelaksana) sebesar 62,04%. Hal ini sejalan dengan model bisnis Perseroan yang lebih banyak menyerap tenaga kerja operasional di kapal.

COMPOSITION OF EMPLOYEES BY POSITION LEVEL

Based on the organizational level, PELNI employees are predominantly at the enlisted level (equivalent to staff/operational personnel) at 62,04%. This aligns with the company's business model, which primarily absorbs operational labor on ships.

No.	Uraian Description	2024	2023	Komposisi Composition
Pegawai Darat Ashore Employees				
	Direksi Board of Directors	6	6	0,45%
	2 - 4 (Manajer tingkat atas) 2 - 4 (Upper Mgr.)	68	65	5,16%
	5 - 7 (Manajer tingkat menengah) 5 - 7 (Middle Mgr.)	203	200	15,39%
A	8 - 9 (Manajer tingkat bawah) 8 - 9 (Lower Mgr.)	216	244	16,38%
	10 - 13 Staf & Pejabat 10 - 13 (Staff & Officer)	731	759	55,42%
	14 - 16 Staf 14 - 16 Staff	95	122	7,20%
	Jumlah Total	1.319	1.396	100,00%
Pegawai Laut Offshore Employees				



SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES

No.	Uraian Description	2024	2023	Komposisi Composition
B	3 - 9 (Perwira) 3-9 (Commissioned Officer)	932	1.122	29,00%
	10 - 12 (Bintara) 10 - 12 (Non-Commissioned Officer)	288	525	8,96%
	13 - 15 (Tamtama) 13 - 15 (Enlisted Officer)	1994	1.968	62,04%
	Jumlah Total	3214	3.615	100,00%
Jumlah Keseluruhan Grand Total		4533	5.003	100,00%

*) Tidak mencakup Pegawai Darat (Anak Perusahaan)
 *) Excludes Land Employees (Subsidiaries)

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN WILAYAH KERJA DAN STATUS KEPEGAWAIAN

Secara umum pegawai perusahaan terdiri dari pegawai tetap atau organik dan pegawai kontrak atau Non-Organik. Komposisi pegawai PELNI didominasi oleh pegawai tetap dengan persentase 56,19%.

COMPOSITION OF EMPLOYEES BY WORK AREA AND EMPLOYMENT STATUS

In general, the company's employees consist of permanent or organic employees and contract or non-organic employees. The composition of PELNI employees is dominated by permanent employees, making up 56,19% of the workforce.

Uraian Description	2024			2023		
	Non-Organik Non-Organic	Organik Organic	Jumlah Total	Non-Organik Non-Organic	Organik Organic	Jumlah Total
Pegawai Darat Ashore Employees	375	943	1.318	246	1.150	1.396
Pegawai Laut Offshore Employees	1.611	1.604	3.215	1.925	1.690	3.615
Jumlah Total	1.986	2.547	4.533	2.171	2.840	5.011

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM

PELNI memberi kesempatan yang sama bagi setiap pegawainya untuk mengikuti program pengembangan kompetensi yang dapat mendorong peningkatan keahlian dan kapabilitas karyawan. PELNI menyelenggarakan program pengembangan kompetensi ini secara internal dan membuka kesempatan bagi karyawan untuk mengikuti *workshop*, seminar dan program pengembangan kompetensi lainnya dari lembaga pendidikan dan pelatihan

HUMAN RESOURCES COMPETENCY DEVELOPMENT

PELNI provides equal opportunities for all employees to participate in competency development programs that can enhance their skills and capabilities. PELNI conducts these competency development programs internally and also opens opportunities for employees to attend workshops, seminars, and other competency development programs organized by external educational and training institutions. PELNI implements human resources competency development according

SUMBER DAYA MANUSIA HUMAN RESOURCES

eksternal. PELNI menerapkan pengembangan kompetensi SDM sesuai *roadmap* PT PELNI 2020-2024, yang secara mendasar diarahkan untuk memacu motivasi belajar pegawai agar siap bertransformasi sesuai perkembangan internal dan eksternal Perseroan. Program pelatihan pada 2024 terbagi menjadi beberapa jenis pelatihan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Diklat Orientasi

Pelatihan orientasi diselenggarakan bagi calon pegawai agar mengenali ruang lingkup bisnis Perseroan, serta fungsi dan tugas jabatan di lingkungan Perseroan, sehingga memiliki pengetahuan, pemahaman, serta sikap-sikap dasar untuk beradaptasi dengan budaya Perseroan dan siap bekerja guna mendukung perwujudan visi dan misi Perseroan.

2. Diklat Teknis

Pelatihan teknis merupakan pelatihan untuk jabatan-jabatan pelaksana dan staf pada fungsi-fungsi utama organisasi yang mendukung bisnis inti Perseroan, yang terdiri dari:

a. Pelatihan Tingkat Mula

- Pelatihan ini wajib diikuti oleh pegawai agar optimal dalam menjalankan fungsi dan tugas jabatan yang bersifat semi analisis, teknis, dan berdasarkan *value chain* Perseroan.
- Peserta pelatihan tingkat mula adalah pegawai dengan kelas jabatan 13 dan 12.

b. Pelatihan Tingkat Lanjut

- Pelatihan ini wajib diikuti oleh pegawai agar optimal dalam menjalankan fungsi dan tugas jabatan yang bersifat analisis, teknis, dan berdasarkan *value chain* Perseroan.
- Peserta pelatihan tingkat lanjut adalah pegawai dengan kelas jabatan 11 dan 10.

3. Diklat Manajerial

Pelatihan Manajerial diselenggarakan bagi pejabat struktural/fungsional dalam mengembangkan diri dan organisasi agar mampu melaksanakan fungsi dan tugas pokok dari jabatan-jabatan manajerial,

to the PT PELNI 2020-2024 roadmap, which is fundamentally aimed at motivating employees to learn and be ready to transform according to the company's internal and external developments.

Training programs in 2024 are divided into several types, explained as follows:

1. Orientation Training

Orientation training is conducted for prospective employees to familiarize them with the company's business scope, as well as the functions and duties of positions within the company, so they have the knowledge, understanding, and basic attitudes to adapt to the company's culture and be ready to work to support the realization of the company's vision and mission.

2. Technical Training

Technical training is for executive positions and staff in the organization's main functions that support the company's core business, consisting of:

a. Basic Level Training

- This training is mandatory for employees to optimize their performance in semi-analytical, technical, and value chain-based job functions.
- Participants in basic level training are employees with job grades 13 and 12.

b. Advanced Level Training

- This training is mandatory for employees to optimize their performance in analytical, technical, and value chain-based job functions.
- Participants in advanced level training are employees with job grades 11 and 10.

3. Managerial Training

Managerial training is conducted for structural/functional officials to develop themselves and the organization to be able to carry out the main functions and duties of managerial positions, consisting of:

SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES

yang terdiri dari:

a. Pelatihan Manajerial Tingkat Muda

Pelatihan ini wajib diikuti oleh pegawai agar optimal dalam menjalankan fungsi dan tugas jabatan manajerial tingkat muda pada kelas jabatan 9 sampai 8.

b. Pelatihan Manajerial Tingkat Madya

Pelatihan ini wajib diikuti oleh pegawai agar optimal dalam menjalankan fungsi dan tugas jabatan manajerial tingkat madya pada kelas jabatan 7 sampai 5.

c. Pelatihan Manajerial Tingkat Utama

Pelatihan ini wajib diikuti oleh pegawai agar optimal dalam menjalankan fungsi dan tugas jabatan manajerial tingkat utama pada kelas jabatan 4 sampai 1.

4. Pelatihan Pengayaan

Pelatihan pengayaan bertujuan untuk membekali para pegawai dengan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan sikap-sikap pegawai yang baik, agar senantiasa dapat mengantisipasi dan menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan bisnis serta kemajuan teknologi informasi yang menunjang keberhasilan pelaksanaan fungsi dan tugas pokok pada jabatan masing-masing pegawai. Jenis pelatihan pengayaan dapat berupa lokakarya/ *workshop*, seminar, konferensi, simposium, penyuluhan/ sosialisasi yang dikemas dalam bentuk *in-house training* maupun *public training*.

5. Sertifikasi Profesi

Sertifikasi profesi merupakan suatu pengakuan profesional secara non-formal yang diberikan berdasarkan keahlian tertentu, untuk profesi tertentu, berdasarkan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, atau ketentuan International Maritime Organization (IMO) yang berlaku dan bersifat *mandatory*, serta diterbitkan oleh lembaga yang *qualified*. Sertifikasi profesi terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:

a. Sertifikasi profesi pegawai darat

Sertifikasi pegawai darat adalah pelatihan dengan suatu penetapan yang diberikan

a. Junior Managerial Training

This training is mandatory for employees to optimize their performance in junior managerial positions with job grades 9 to 8.

b. Middle Managerial Training

This training is mandatory for employees to optimize their performance in middle managerial positions with job grades 7 to 5.

c. Senior Managerial Training

This training is mandatory for employees to optimize their performance in senior managerial positions with job grades 4 to 1.

4. Enrichment Training

Enrichment training aims to equip employees with good knowledge, understanding, skills, and attitudes so they can anticipate and adapt to business environment developments and technological advancements that support the successful implementation of their job functions and duties. Enrichment training can be in the form of workshops, seminars, conferences, symposiums, or lectures/socialization packaged as in-house or public training.

5. Professional Certification

Professional certification is a non-formal professional recognition given based on specific expertise for specific professions, based on laws and regulations, government regulations, or International Maritime Organization (IMO) provisions that are applicable and mandatory, issued by qualified institutions. Professional certification consists of two types:

a. Shore-Based Professional Certification

Shore-based professional certification is training with a designation given by a specific professional



SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES

oleh organisasi profesional tertentu terhadap pegawai darat untuk menunjukkan bahwa pegawai tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik.

b. Sertifikasi profesi pegawai laut

Sertifikasi pegawai laut adalah pelatihan yang harus dilaksanakan oleh pegawai laut merujuk kepada ketentuan dari *Standards of Training Certification and Watchkeeping* (STCW) sebagai prasyarat untuk dapat berlayar.

organization to shore-based employees to demonstrate that they are capable of performing specific tasks or jobs.

b. Sea-Based Professional Certification

Sea-based professional certification is training that must be conducted by seafarers referring to the Standards of Training Certification and Watchkeeping (STCW) as a prerequisite for sailing.

6. Pelatihan Purnabakti

Pelatihan purnabakti adalah pelatihan yang diselenggarakan guna membekali para pegawai yang hendak menjalani pensiun dengan pengetahuan, keterampilan, sikap mental spiritual serta kewirausahaan untuk menghadapi masa pensiun agar siap dan mampu mandiri serta tetap produktif pada saat menjalani masa pensiunnya.

6. Retirement Training

Retirement training is conducted to equip employees who are about to retire with knowledge, skills, mental and spiritual attitudes, as well as entrepreneurship to face retirement so that they are ready and capable of being independent and productive during their retirement.

Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pelatihan

PELNI telah mengikutsertakan sejumlah pegawai dalam program pelatihan dan pengembangan kompetensi, baik yang diselenggarakan secara in-house maupun diselenggarakan oleh pihak ketiga. Sepanjang tahun 2024, akumulasi karyawan yang mengikut program pelatihan dan pengembangan kompetensi adalah sebanyak 6,751 peserta dengan realisasi anggaran mencapai Rp19,52 miliar.

Number of Employees Receiving Training

PELNI has included a number of employees in its training and competency development programs, both conducted in-house and by third parties. Throughout 2024, the total employees participating in training and competency development programs accumulated to 6,751 participants with investment cost reach Rp19.52 billion.

Kategori Category	Jumlah Pegawai yang Mendapat Pelatihan	Jam Pelatihan Training Hours	Rata-rata Jam Pelatihan per Pegawai
Jenis Kelamin Gender			
Laki-laki Male	5.037	76.702	15,23
Perempuan Female	1.714	31.562	18,41
Jumlah Tingkat Jabatan Level			
EVP	17	135	7,94
Vice President (BOD-1)	470	6.447	13,72
Manager (BOD-2)	832	12.649	15,20



SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES

Kategori Category	Jumlah Pegawai yang Mendapat Pelatihan	Jam Pelatihan Training Hours	Rata-rata Jam Pelatihan per Pegawai
SPV	935	12.338	13,20
Staff	1.797	38.066	21,18
Officer	777	12.984	16,71
Clerk	42	590	14,05
Nakhoda/KKM	131	1.916	14,63
Perwira	582	7.208	12,38
Bintara	269	4.610	17,14
Tamtama	899	11.321	12,59
Total	6.751	116.916	17,32

Rencana Pelatihan SDM 2025

Program pelatihan dan pengembangan PT PELNI (Persero) tahun 2025 berdasarkan hasil rapat pembahasan RKAP bersama Direktur Keuangan, anggaran pelatihan yang sudah disetujui dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Program pengembangan SDM Darat: Rp14,52 miliar
2. Program pengembangan SDM Laut: Rp10,75 miliar

Human Resources Training Plan 2025

The training and development program of PT PELNI (Persero) for the year 2025, based on the results of the discussion meeting of the RKAP with the Finance Director, can be mapped as follows:

1. Onshore Human Resources Development Program: Rp14.52 billion
2. Offshore Human Resources Development Program: Rp10.75 billion



PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2024)

EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2024)



FITRI RECKITA DEWI

Vice President Akuntansi
Vice President of Accounting

Usia
Age
40 tahun
40 years old

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Jakarta, 19 Maret 1984
Jakarta, March 19, 1984

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta Timur East Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	11.10/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	S1 Akuntansi (25-06-2005) Bachelor's Degree in Accounting, June 25, 2005
Pengalaman Kerja Work Experience	• Pjs. Vice President Akuntansi, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (11-10-2023) • Manager Akuntansi Keuangan, 11.30/02/SK/ HKO.01/2021 (30-11-2021) • Senior Supervisor Area I, 09.04/05/S/040/2017 (01-10-2017) • Junior Supervisor Verifikasi Cabang AREA 1, 12.16/1/SK/HKO.01/2015 (16-12-2015) • Pjs. Supervisor Verifikasi Cabang Area 1, 04.01/5/SK/HKO.01/2015 (01-04-2015) • Acting Vice President of Accounting, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (October 11, 2023) • Finance Accounting Manager, 11.30/02/SK/HKO.01/2021 (November 30, 2021) • Senior Supervisor Area I, 09.04/05/S/040/2017 (October 1, 2017) • Junior Supervisor Verification Branch AREA 1, 12.16/1/SK/HKO.01/2015 (December 16, 2015) • Acting Supervisor Verification Branch Area 1, 04.01/5/SK/HKO.01/2015 (April 1, 2015)



PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2024)

EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2024)



FAUZIAH FERRYNA

Vice President Treasury
Vice President of Treasury

Usia
Age
40 tahun
40 years old

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Pekalongan, 29 Februari 1984
Pekalongan, February 29, 1984

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Pekalongan
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	05.08/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	S1 Akuntansi (22-04-2006) Bachelor's Degree in Accounting, April 22, 2006
Pengalaman Kerja Work Experience	• Pjs. Vice President Treasury, 05.08/01/SK/HKO.01/2023 (08-05-2023) • Manager Administrasi Keuangan, 07.04/01/SK/HKO.01/2018 (04-07-2018) • Senior Supervisor Pembayaran & Transaksi Kas, 09.22/28/S/040/2017 (21-11-2017) • Junior Supervisor Pembayaran & Transaksi Kas, 12.16/1/SK/HKO.01/2015 (16-12-2015) • Pjs. Supervisor Pembayaran & Transaksi, 04.01/5/SK/HKO.01/2015 (01-04-2015) • Acting Vice President of Treasury, 05.08/01/SK/HKO.01/2023 (May 8, 2023) • Finance Administration Manager, 07.04/01/SK/HKO.01/2018 (July 4, 2018) • Senior Supervisor of Payment & Cash Transactions, 09.22/28/S/040/2017 (November 21, 2017) • Junior Supervisor of Payment & Cash Transactions, 12.16/1/SK/HKO.01/2015 (December 16, 2015) • Acting Supervisor of Payment & Transactions, 04.01/5/SK/HKO.01/2015 (April 1, 2015)

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2024)

EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2024)



INDRA MAULANA

Vice President PSO dan Subsidi
Vice President PSO and Subsidy

Usia
Age
49 tahun
49 years old

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Jakarta, 26 April 1975
Jakarta, April 26, 1975

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta Timur East Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	07.07/03/SK/HKO.01/2022
Pendidikan Education	Magister Manajemen (15-01-2014) Master's Degree in Management, January 15, 2014
Pengalaman Kerja Work Experience	• Vice President PSO dan Subsidi, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (07-07-2022) • Vice President Pengelolaan PSO & Subsidi, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (07-07-2022) • Kepala Cabang Semarang, 02.22/01/SK/HKO.01/2021 (22-02-2022) • Kepala Cabang Kota Baru, 01.21/01/SK/HKO.01/2020 (21-01-2020) • Manager Monitoring Terminal & Pelabuhan, 05.04/03/SK/HKO.01/2017 (04-05-2017) • Vice President of PSO and Subsidy, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (July 7, 2022) • Vice President of PSO & Subsidy Management, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (July 7, 2022) • Branch Manager of Semarang, 02.22/01/SK/HKO.01/2021 (February 22, 2021) • Branch Manager of Kota Baru, 01.21/01/SK/HKO.01/2020 (January 21, 2020) • Manager of Terminal & Port Monitoring, 05.04/03/SK/HKO.01/2017 (May 4, 2017)



PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2024)

EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2024)



TATANG RUSKIANTA DASUKI
 Vice President Manajemen Risiko dan Kepatuhan
 Vice President of Risk Management and Compliance

Usia
 Age
53 tahun
 53 years old

Tempat dan Tanggal Lahir
 Place and Date of Birth
Semarang, 07 May 1971
 Semarang, May 7, 1971

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Bogor
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	05.25/01/SK/HKO.01/2022
Pendidikan Education	S1 Pendidikan (02-11-1994) Bachelor's Degree in Education, November 2, 1994
Pengalaman Kerja Work Experience	• Vice President Manajemen Risiko dan Kepatuhan, 05.25/01/SK/HKO.01/2022 (25-05-2022) • Vice President SMK3LH, 11.30/02/SK/HKO.01/2021 (30-11-2021) • Vice President SMK3 & Lingkungan Hidup, 01.21/01/SK/HKO.01/2020 (21-01-2020) • Manager Pengelolaan Risiko & Proses Bisnis, 05.04/03/SK/HKO.01/2017 (04-05-2017) • Manager Risk Management, 10.07/3/SK/HKO.01/2015 (10-07-2015) • May 25, 2022, Vice President of Risk Management and Compliance, 05.25/01/SK/HKO.01/2022 • November 30, 2021, Vice President of SMK3LH, 11.30/02/SK/HKO.01/2021 • January 21, 2020, Vice President of SMK3 & Environmental Affairs, 01.21/01/SK/HKO.01/2020 • May 4, 2017, Manager of Risk Management & Business Process, 05.04/03/SK/HKO.01/2017 • July 10, 2015, Manager of Risk Management, 10.07/3/SK/HKO.01/2015

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2024)

EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2024)



ANGGA KRISOSA

Vice President Teknologi Informasi
Vice President of Information Technology

Usia
Age
39 tahun
39 years old

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Bengkulu, 06 April 1985
Bengkulu, April 6, 1985

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	01.28/01/SK/HKO.01/2021
Pendidikan Education	S2 Magister Teknologi Informasi (03-02-2018) Master's Degree in Information Technology, February 3, 2018
Pengalaman Kerja Work Experience	• Pjs. Vice President Teknologi Informasi, 05.08/01/SK/HKO.01/2023 (08-05-2023) • Manager Perencanaan & Tata Kelola Teknologi Informasi, 05.04/03/SK/HKO.01/2017 (04-05-2017) • Pjs. Manager Application Support, 10.07/3/SK/HKO.01/2015 (07-10-2015) • Pjs. Manager Pengendalian Teknologi Informasi, 04.30/1/SK/HKO.01/2015 (30-04-2015) • Plt. Supervisor Network & Infrastruktur, 04.30/1/SK/HKO.01/2014 (11-07-2014) • Pjs. Vice President Teknologi Informasi, 05.08/01/SK/HKO.01/2023 (08-05-2023) • Manager Perencanaan & Tata Kelola Teknologi Informasi, 05.04/03/SK/HKO.01/2017 (04-05- 2017) • Pjs. Manager Application Support, 10.07/3/SK/HKO.01/2015 (07-10-2015) • Pjs. Manager Pengendalian Teknologi Informasi, 04.30/1/SK/HKO.01/2015 (30-04-2015) • Plt. Supervisor Network & Infrastruktur, 04.30/1/SK/HKO.01/2014 (11-07-2014)



PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2024)

EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2024)



OPIK TAUPIK
Vice President SDM
 Vice President of Human Resources

Usia
 Age
42 tahun
 42 years old

Tempat dan Tanggal Lahir
 Place and Date of Birth
Garut, 06 Januari 1982
 Garut, January 6, 1982

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta Selatan South Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	11.10/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	S1 Sistem Komputer (30-04-2008) Bachelor's Degree in Computer Systems, April 30, 2008
Pengalaman Kerja Work Experience	• Vice President SDM, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (10-11-2023) • Kepala Kesekretariatan Perusahaan, 06.23/01/SK/HKO.01/2023 (24-05-2023) • Kepala Kesekretariatan Perusahaan, 06.21/01/SK/HKO.01/2022 (21-08-2022) • Pjs. Kepala Kesekretariatan Perusahaan, 03.21/01/SK/HKO.01/2022 (21-03-2022) • Pjs. Kepala Kesekretariatan Perusahaan, 01.28/01/SK/HKO.01/2021 (01-02-2021) • Vice President of Human Resources, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (November 10, 2023) • Head of Corporate Secretariat, 06.23/01/SK/HKO.01/2023 (May 24, 2023) • Head of Corporate Secretariat, 06.21/01/SK/HKO.01/2022 (August 21, 2022) • Acting Head of Corporate Secretariat, 03.21/01/SK/HKO.01/2022 (March 21, 2022) • Acting Head of Corporate Secretariat, 01.28/01/SK/HKO.01/2021 (February 1, 2021)

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2024)

EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2024)



KARDIANASAH

Vice President Pengawakan
Vice President of Manning

Usia
Age
48 tahun
48 years old

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Subang, 11 April 1976
Subang, April 11, 1976

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta Timur East Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	11.10/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	Master of Business Administration (28-05-2011) Master of Business Administration, May 28, 2011
Pengalaman Kerja Work Experience	• Vice President Pengawakan, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (10-11-2023) • VP Perencanaan & Transformasi Perusahaan, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (07-07-2022) • VP Pengembangan Usaha & Produk AB, 06.25/01/SK/HKO.01/2021 (26-06-2021) • Pjs. VP Pengembangan Usaha dan Produk AB, 10.07/01/SK/HKO.01/2019 (21-10-2019) • Vice President of Crewing, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (November 10, 2023) • Vice President of Corporate Planning & Transformation, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (July 7, 2022) • Vice President of Business & Product Development AB, 06.25/01/SK/HKO.01/2021 (June 26, 2021) • Acting Vice President of Business and Product Development AB, 10.07/01/SK/HKO.01/2019 (October 21, 2019)



PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2024)

EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2024)



MARDIYANTO
 Vice President Umum
 Vice President of General Affairs

Usia
 Age
56 tahun
 56 years old

Tempat dan Tanggal Lahir
 Place and Date of Birth
Jakarta, 04 September 1968
 Jakarta, September 4, 1968

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta Selatan South Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	07.07/03/SK/HKO.01/2022
Pendidikan Education	Magister Manajemen (13-06-2011) Master's Degree in Management, June 13, 2011
Pengalaman Kerja Work Experience	• Vice President Umum, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (07-07-2022) • Manager Pengembangan SDM, 05.04/03/SK/HKO.01/2017 (04-05-2017) • Staff Madya Bid. Perencanaan & Evaluasi, 11.30/02/SK/HKO.01/2021 (07-10-2015) • Manager Strategic Planning, 06/HKO.01/DIR/I/2014 (13-01-2014) • Manager Pemasaran Asset & Usaha Lain, 97/HKO.01/DIR/VIII/2012 (01-06-2010) • Vice President of General Affairs, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (July 7, 2022) • Human Resources Development Manager, 05.04/03/SK/HKO.01/2017 (May 4, 2017) • Senior Staff in Planning & Evaluation, 11.30/02/SK/HKO.01/2021 (October 7, 2015) • Manager of Strategic Planning, 06/HKO.01/DIR/I/2014 (January 13, 2014) • Manager of Asset & Other Business Marketing, 97/HKO.01/DIR/VIII/2012 (June 1, 2010)

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2024)

EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2024)



CAHYA WIDI

Vice President Pengadaan
Vice President of Procurement

Usia
Age
44 tahun
44 years old

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Jakarta, 13 Agustus 1980
Jakarta, August 13, 1980

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta Timur East Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	02.03/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	Magister Manajemen (27-10-2011) Master's Degree in Management, October 27, 2011
Pengalaman Kerja Work Experience	• Vice President Pengadaan, 02.03/01/SK/HKO.01/2023 (03-02-2023) • Diperbantukan sebagai Pejabat di PT Pelita Indonesia Djaya (PID), 05.25/01/SK/HKO.01/2022 (25-05-2022) • General Manager Hotel Bahtera, 02.22/01/SK/HKO.01/2021 (22-02-2021) • Manager Administrasi Penyediaan & Modifikasi, 10.07/3/SK/HKO.01/2015 (07-10-2015) • Manager Operasi, 07.30/SK/HKO.01/2015 (30-07-2015) • Vice President of Procurement, 02.03/01/SK/HKO.01/2023 (February 3, 2023) • Assigned as an Official at PT Pelita Indonesia Djaya (PID), 05.25/01/SK/HKO.01/2022 (May 25, 2022) • General Manager of Hotel Bahtera, 02.22/01/SK/HKO.01/2021 (February 22, 2021) • Manager of Provision & Modification Administration, 10.07/3/SK/HKO.01/2015 (October 7, 2015) • Operations Manager, 07.30/SK/HKO.01/2015 (July 30, 2015)

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2024)

EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2024)



RIDWAN MANDALIKO
 Vice President Pengamanan
 Vice President of Security

Usia
 Age
 54 tahun
 54 years old

Tempat dan Tanggal Lahir
 Place and Date of Birth
 Padang, 01 September 1970
 Padang, September 1, 1970

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Balikpapan
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	03.03/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	S1 Manajemen (18-10-2002) Bachelor's Degree in Management, October 18, 2002
Pengalaman Kerja Work Experience	• Vice President Pengamanan, 02.03/01/SK/HKO.01/2023 (03-02-2023) • Vice President Penjualan Non-Komersial, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (07-07-2022) • Vice President Pemasaran Kapal Barang, 11.01/01/SK/HKO.01/2021 (30-11-2021) • Kepala Cabang Surabaya, 01.21/01/SK/HKO.01/2020 (21-01-2021) • Kepala Cabang Makassar, 02.21/03/SK/HKO.01/2019 (21-02-2010) • Vice President of Security, 02.03/01/SK/HKO.01/2023 (February 3, 2023) • Vice President of Non-Commercial Sales, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (July 7, 2022) • Vice President of Cargo Ship Marketing, 11.01/01/SK/HKO.01/2021 (November 30, 2021) • Branch Manager of Surabaya, 01.21/01/SK/HKO.01/2020 (January 21, 2021) • Branch Manager of Makassar, 02.21/03/SK/HKO.01/2019 (February 21, 2010)

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2024)

EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2024)



BUDI HARDIANSYAH

Vice President Teknik
Vice President of Engineering

Usia
Age
38 tahun
38 years old

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Tasikmalaya, 18 Juni 1986
Tasikmalaya, June 18, 1986

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Bekasi
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	11.10/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	Magister Manajemen (2022) Master's Degree in Management, 2022
Pengalaman Kerja Work Experience	- Vice President Teknik, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (10-11-2023) - Pjs. Vice President Surveyor, 05.31/01/SK/HKO.01/2022 (31-05-2022) - Koordinator Surveyor, 02.22/01/SK/HKO.01/2021 (22-02-2021) - Vice President of Engineering, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (November 10, 2023) - Acting Vice President of Surveyor, 05.31/01/SK/HKO.01/2022 (May 31, 2022) - Surveyor Coordinator, 02.22/01/SK/HKO.01/2021 (February 22, 2021)

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2024)

EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2024)

TOMI SANTOSO
Vice President Nautika
Vice President of Nautical Affairs

Usia
Age
37 tahun
37 years old

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Trenggalek, 13 Januari 1987
Trenggalek, January 13, 1987

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Tulungagung
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	11.10/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	S1 Teknik Perkapalan (04-05-2010) Bachelor's Degree in Naval Engineering, May 4, 2010
Pengalaman Kerja Work Experience	• Vice President Nautika, 11.10/01/SK/HKO.01/2024 (10-11-2024) • Pengawas Administrasi & Evaluasi , 05.25/01/SK/HKO.01/2022 (25-05-2022) • Kepala Bagian Operasi dan Pelayanan Cabang Makassar, 11.01/01/SK/HKO.01/2021 (11-11-2021) • Manager Perencanaan & Pengendalian BBM & Pelumas Kapal, 08.07/01/SK/HKO.01/2020 (07-08-2020) • Manager Monitoring & Evaluasi Perbaikan Kapal, 05.04/03/SK/HKO.01/2017 (04-05-2017) • Vice President of Nautical Affairs, 11.10/01/SK/HKO.01/2024 (November 10, 2024) • Supervisor of Administration & Evaluation, 05.25/01/SK/HKO.01/2022 (May 25, 2022) • Head of Operations and Services Division, Makassar Branch, 11.01/01/SK/HKO.01/2021 (November 11, 2021) • Manager of Fuel and Lubricants Planning & Control for Ships, 08.07/01/SK/HKO.01/2020 (August 7, 2020) • Manager of Ship Repair Monitoring & Evaluation, 05.04/03/SK/HKO.01/2017 (May 4, 2017)

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2024)

EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2024)



OTTO VAN MULLER

Vice President Bahan Bakar
Vice President of Fuel

Usia
Age
51 tahun
51 years old

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Medan, 22 Oktober 1973
Medan, October 22, 1973

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta Timur East Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	01.28/01/SK/HKO.01/2021
Pendidikan Education	Magister Manajemen (06-10-2014) Master's Degree in Management, October 6, 2014,
Pengalaman Kerja Work Experience	• Vice President Bahan Bakar, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (07-07-2022) • Pjs. Vice President Pengelolaan Bahan Bakar, 11.01/01/SK/HKO.01/2021 (01-11-2021) • Manager Monitoring & Evaluasi Perbaikan Kapal, 10.07/02/SK/HKO.01/2020 (07-10-2020) • Manager Perencanaan Strategis & Kajian Bisnis, 05.04/03/SK/HKO.01/2017 (04-05-2021) • Manager Pengembangan Bisnis, 07.30/01/SK/HKO.01/2015 (30-07-2015) • Vice President of Fuel, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (July 7, 2022) • Acting Vice President of Fuel Management, 11.01/01/SK/HKO.01/2021 (November 1, 2021) • Manager of Ship Repair Monitoring & Evaluation, 10.07/02/SK/HKO.01/2020 (October 7, 2020) • Manager of Strategic Planning & Business Analysis, 05.04/03/SK/HKO.01/2017 (May 4, 2021) • Manager of Business Development, 07.30/01/SK/HKO.01/2015 (July 30, 2015)



PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2024)

EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2024)



DARMAN

Vice President Surveyor
Vice President of Surveying

Usia
Age
53 tahun
53 years old

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Ujung Pandang, 11 Januari 1971
Ujung Pandang, January 11, 1971

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Ujung pandang
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	11.10/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	Ahli Teknik Tingkat I (28-10-2016) Level I Technical Expert, October 28, 2016
Pengalaman Kerja Work Experience	• Vice President Surveyor, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (10-11-2023) • Surveyor Utama, 07.01/01/SK/HKO.01/2021 (01-07-2021) • KKM, 548/DIV.SDM/ADM.PERS/XII/2010 (01-01-2011) • Masinis I, 3923/PL/M/VII (23-07-2000) • Masinis II, 0392/PL/M/I/00 (31-01-2000) • Vice President of Surveyor, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (November 10, 2023) • Principal Surveyor, 07.01/01/SK/HKO.01/2021 (July 1, 2021) • Chief Engineer, 548/DIV.SDM/ADM.PERS/XII/2010 (January 1, 2011) • First Engineer, 3923/PL/M/VII (July 23, 2000) • Second Engineer, 0392/PL/M/I/00 (January 31, 2000)

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2024)

EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2024)



BERRYL A. INSANUL FIRDAUS

Vice President Usaha Penumpang Komersial dan Penunjang
Vice President of Commercial Passenger Business and Support

Usia
Age
38 tahun
38 years old

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Bandung, 20 Januari 1986
Bandung, January 20, 1986

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Bandung
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	07.07/03/SK/HKO.01/2022
Pendidikan Education	S1 Manajemen (26-08-2009) Bachelor's Degree in Management, August 26, 2009
Pengalaman Kerja Work Experience	- Vice President Usaha Penumpang Komersial & Penunjang, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (07-07-2023) - Kepala Cabang Fak Fak, 01.28/01/SK/HKO.01/2021 (28-01-2021) - Manager Perencanaan & Evaluasi Pemasaran Angkutan Penumpang, 05.15/01/SK/HKO.01/2019 (15-05-2021) - Manager Pengelolaan Penghasilan Angkutan Penumpang, 05.04/03/SK/HKO.01/2017 (04-05-2021) - Revenue Management Manager, 03.21/02/SK/HKO.01/2017 (21-03-2017) - Vice President of Commercial Passenger Business & Support, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (July 7, 2023) - Branch Manager of Fak Fak, 01.28/01/SK/HKO.01/2021 (January 28, 2021) - Manager of Passenger Transport Marketing Planning & Evaluation, 05.15/01/SK/HKO.01/2019 (May 15, 2021) - Manager of Passenger Transport Revenue Management, 05.04/03/SK/HKO.01/2017 (May 4, 2021) - Revenue Management Manager, 03.21/02/SK/HKO.01/2017 (March 21, 2017)



PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2024)

EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2024)



PRESDA SIMANGASING

Vice President Usaha Penumpang Non Komersial
Vice President of Non-Commercial Passenger Operations

Usia
Age
53 tahun
53 years old

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Surabaya, 2 Februari 1971
Surabaya, February 2, 1971

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Bekasi
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	07.07/03/SK/HKO.01/2022
Pendidikan Education	S1 Hukum Pidana (24-05-1995) Bachelor's Degree in Criminal Law, May 05, 1995
Pengalaman Kerja Work Experience	- Vice President Usaha Penumpang Non-Komersial, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (07-07-2022) - Kepala Satuan Pengawasan Intern, 11.23/01/SK/HKO.01/2020 (21-11-2020) - Kepala Satuan Pengawasan Intern, 02.21/02/SK/HKO.01/2019 (21-02-2019) - Kepala Cabang Surabaya, 123/HKO.01/DIR/XII/2013 (10-12-2013) - Kepala Cabang Bau-Bau, 49/HKO.01/DIR/IV-2012 (30-04-2012) - Vice President of Non-Commercial Passenger Business, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (July 7, 2022) - Head of Internal Audit Unit, 11.23/01/SK/HKO.01/2020 (November 21, 2020) - Head of Internal Audit Unit, 02.21/02/SK/HKO.01/2019 (February 21, 2019) - Branch Manager of Surabaya, 123/HKO.01/DIR/XII/2013 (December 10, 2013) - Branch Manager of Bau-Bau, 49/HKO.01/DIR/IV-2012 (April 30, 2012)

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2024)

EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2024)



SIMON

Vice President Operasi Angkutan Penumpang
Vice President of Passenger Transport Operations

Usia
Age
49 tahun
49 years old

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Tator, 27 September 1975
Tator, September 27, 1975

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta Utara North Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	11.10/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	Ahli Nautika Tk.II (23-10-2013) Level II Nautical Expert, October 23, 2013
Pengalaman Kerja Work Experience	• Pjs. Vice President Operasi Angkutan Penumpang, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (10-11-2023) • Pengawas ISM & ISPS Code, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (07-07-2022) • Pengawas ISM-Code, 05.04/03/SK/HKO.01/17 (16-07-2017) • ISM-Code Auditor, 03.21/02/SK/HKO.01/2017 (21-03-2017) • Pjs Manager Operasional & Keselamat, 10.07/3/SK/HKO.01/2015 (07-10-2015) • Acting Vice President of Passenger Transport Operations, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (November 10, 2023) • ISM & ISPS Code Supervisor, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (July 7, 2022) • ISM Code Supervisor, 05.04/03/SK/HKO.01/2017 (July 16, 2017) • ISM Code Auditor, 03.21/02/SK/HKO.01/2017 (March 21, 2017) • Acting Manager of Operations & Safety, 10.07/3/SK/HKO.01/2015 (October 7, 2015)



PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2024)

EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2024)



REPONA INDAH PERTIWI

Vice President Pelayanan Angkutan Penumpang
 Vice President of Passenger Transport Services

Usia
 Age
36 tahun
 36 years old

Tempat dan Tanggal Lahir
 Place and Date of Birth
Cilacap, 10 November 1988
 Cilacap, November 10, 1988

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Cilacap
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	11.10/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	S1 Ilmu Komunikasi (11-04-2013) Bachelor's Degree in Communication Studies, April 11, 2013
Pengalaman Kerja Work Experience	• Pjs. Vice President Pelayanan Angkutan Penumpang, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (10-11-2023) • Manager Kesekretariatan Direksi dan Komisaris, 06.09/01/SK/HKO.01/2023 (09-06-2023) • Manager Kesekretariatan Direksi & Komisaris, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (07-07-2022) • Manager Pengelolaan Penjualan ABKPP, 03.21/01/SK/HKO.01/2022 (21-03-2022) • Pjs. Manager Pengelolaan Penjualan ABKPP, 07.01/01/SK/HKO.01/2021 (01-07-2021) • Acting Vice President of Passenger Transport Services, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (November 10, 2023) • Manager of Secretariat for Directors and Commissioners, 06.09/01/SK/HKO.01/2023 (June 9, 2023) • Manager of Secretariat for Directors and Commissioners, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (July 7, 2022) • Manager of Sales Management ABKPP, 03.21/01/SK/HKO.01/2022 (March 21, 2022) • Acting Manager of Sales Management ABKPP, 07.01/01/SK/HKO.01/2021 (July 1, 2021)

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2024)

EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2024)



I KOMANG BUDISWASTAWAN

Vice President Usaha Barang Komersial & Penunjang
Vice President of Commercial Goods Business and Support

Usia
Age
38 tahun
38 years old

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Klungkung, 22 Januari 1986
Klungkung, January 22, 1986

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Semarang
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	11.10/01/SK/HKO.01/202303-02-2023
Pendidikan Education	S1 Sains Terapan Pelayaran (15-10-2008) Bachelor's Degree in Applied Science in Maritime, October 15, 2008
Pengalaman Kerja Work Experience	• Pjs. Vice President Usaha Barang Komersial & Penunjang, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (10-11-2023) • Manager Chartering dan Brokering, 02.03/01/SK/HKO.01/2023 (03-02-2023) • Kacab. Merauke, 01.28/01/SK/HKO.01/2021 (01-02-2021) • Kabag. Operasi & Pelayanan/Manokwari, 07.23/01/SK/HKO.01/2019 (23-07-2019) • Pjs. Kabag Usaha/ Cab. Manokwari, 04.09/01/SK/HKO.01/2018 (21-04-2018) • Acting Vice President of Commercial Cargo & Support Business, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (November 10, 2023) • Manager of Chartering and Brokering, 02.03/01/SK/HKO.01/2023 (February 3, 2023) • Branch Manager of Merauke, 01.28/01/SK/HKO.01/2021 (February 1, 2021) • Head of Operations & Services Division/Manokwari, 07.23/01/SK/HKO.01/2019 (July 23, 2019) • Acting Head of Business Division/Branch of Manokwari, 04.09/01/SK/HKO.01/2018 (April 21, 2018)

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2024)

EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2024)



A.A.N BUDI TRESNAWAN
 Vice President Usaha Barang Non-Komersial
 Vice President of Non-Commercial Goods Business

Usia
 Age
 53 tahun
 53 years old

Tempat dan Tanggal Lahir
 Place and Date of Birth
 Denpasar, 24 Maret 1971
 Denpasar, March 24, 1971

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Denpasar
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	11.10/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	Magister Manajemen (M.M) (01-02-2003) Master's Degree in Management (M.M), February 1, 2003
Pengalaman Kerja Work Experience	• Vice President Usaha Barang Non-Komersial, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (10-11-2023) • Kepala Satuan Pengawas Intern, 06.21/01/SK/HKO.01/2022 (21-08-2022) • Kepala Satuan Pengawas Intern, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (07-07-2022) • VP Umum, 10.11/01/S/040/2017 (11-10-2017) • KA. SPI, 01.20/01/SK/HKO.01/2016 (20-01-2016) • Kacab. PELNI Jayapura, 07.30/1/SK/HKO.01/2015 (30-07-2015) • Plt. Mgr. Operasi Kpl Barang, 04.01/5/SK/HKO.01/2015 (01-04-2015) • Vice President SDM, 10.01/1/SK/HKO.01/2014 (01-10-2014) • GM Cabang Semarang, 06.30/1/SK/HKO.01/2014. (30-06-2014) • GM Keagenan , 06/HKO.01/DIR/I/2014 (13-01-2014) • STAF AHLI DIR. OPERASI, 99/HKO.01/DIR/XI/2013 (04-11-2013) • GM Cabang Sorong, 30/HKO.01/DIR/II-2011 (24-02-2011) • Vice President of Non-Commercial Cargo Business, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (November 10, 2023) • Head of Internal Audit Unit, 06.21/01/SK/HKO.01/2022 (August 21, 2022) • Head of Internal Audit Unit, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (July 7, 2022) • Vice President of General Affairs, 10.11/01/S/040/2017 (October 11, 2017) • Head of SPI, 01.20/01/SK/HKO.01/2016 (January 20, 2016) • Branch Manager of PELNI Jayapura, 07.30/1/SK/HKO.01/2015 (July 30, 2015) • Acting Manager of Cargo Operations, 04.01/5/SK/HKO.01/2015 (April 1, 2015) • Vice President of Human Resources, 10.01/1/SK/HKO.01/2014 (October 1, 2014) • General Manager of Semarang Branch, 06.30/1/SK/HKO.01/2014 (June 30, 2014) • General Manager of Agency, 06/HKO.01/DIR/I/2014 (January 13, 2014) • Expert Staff to the Director of Operations, 99/HKO.01/DIR/XI/2013 (November 4, 2013) • General Manager of Sorong Branch, 30/HKO.01/DIR/II-2011 (February 24, 2011)

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2024)

EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2024)



ALAMSYAH HALAUWET

Vice President Operasi Angkutan Barang
Vice President of Goods Transport Operations

Usia
Age
52 tahun
52 years old

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Ujung Pandang, 15 Maret 1972
Ujung Pandang, March 15, 1972

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Bekasi
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	11.10/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	Ahli Nautika Tk I (06-09-2016) Level I Nautical Expert, September 6, 2016
Pengalaman Kerja Work Experience	- Vice President Operasi Angkutan Barang, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (10-11-2023) - Nakhoda, 05.05/01/SK/HKO.01/2021 (21-05-2021) - Mualim I, 11.03/01/ND/310/2016 (03-11-2016) - Mualim II Yr, 548/DIV.SDM/ADM.PERS/XII/2010 (01-01-2011) - Mualim III, 6578/PL/M/XII (05-12-2000) - Vice President of Cargo Transport Operations, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (November 10, 2023) - Captain, 05.05/01/SK/HKO.01/2021 (May 21, 2021) - Chief Officer, 11.03/01/ND/310/2016 (November 3, 2016) - Second Officer, 548/DIV.SDM/ADM.PERS/XII/2010 (January 1, 2011) - Third Officer, 6578/PL/M/XII (December 5, 2000)



PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2024)

EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2024)



MUHAMMAD ARDIANSYAH

Vice President Keagenan
Vice President of Agency

Usia
Age
34 tahun
34 years old

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Jakarta, 15 Januari 1990
Jakarta, January 15, 1990

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Bekasi Selatan South Bekasi
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	11.10/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	S1 Manajemen Transportasi Laut (27-11-2012) Bachelor's Degree in Sea Transportation Management, November 27, 2012
Pengalaman Kerja Work Experience	• Pjs. Vice President Keagenan, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (10-11-2023) • Kepala Cabang Denpasar/Bali, 06.09/01/SK/HKO.01/2023 (09-06-2023) • Manager Perencanaan & Evaluasi Pemasaran Angkutan Kapal Barang, 11.30/02/SK/HKO.01/2021 (07-12-2021) • Kepala Bagian Operasi & Pelayanan, 01.08/01/HKO.01/2018 (09-10-2019) • Pjs. Kepala Bagian Operasi & Pelayanan, 02.28/02/SK/HKO.01/2017 (21-02-2019) • Acting Vice President of Agency, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (November 10, 2023) • Branch Manager of Denpasar/Bali, 06.09/01/SK/HKO.01/2023 (June 9, 2023) • Manager of Planning & Marketing Evaluation for Cargo Transport, 11.30/02/SK/HKO.01/2021 (December 7, 2021) • Head of Operations & Services Division, 01.08/01/HKO.01/2018 (October 9, 2019) • Acting Head of Operations & Services Division, 02.28/02/SK/HKO.01/2017 (February 21, 2019)



PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2024)

EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2024)



LENGGO GENI

Kepala Satuan Pengawas Intern
Head of Internal Audit Unit

Usia
Age
55 tahun
55 years old

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Jakarta 16 Maret 1968
Jakarta, March 16, 1968

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Bekasi
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	11.10/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	S2 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Hukum Master's Degree in Law, Bachelor's Degree in Law
Pengalaman Kerja Work Experience	• Kepala Satuan Pengawasan Intern PT PELNI (Persero) (2023-sekarang) • Vice President Hukum PT PELNI (Persero) (2017-2023) • Vice President Umum PT PELNI (Persero) (2016-2017) • Deputy Aset PT PELNI (Persero) (2015-2016) • Pengawas Intern Area PT PELNI (Persero) (2013-2015) • Head of Internal Audit Unit, PT PELNI (Persero) (2023-present) • Vice President of Legal Affairs, PT PELNI (Persero) (2017-2023) • Vice President of General Affairs, PT PELNI (Persero) (2016-2017) • Deputy of Assets, PT PELNI (Persero) (2015-2016) • Internal Auditor for the Area, PT PELNI (Persero) (2013-2015)



PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2024)

EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2024)



ASEP SOPARYA

Kepala DPA-QHSSE
Head of DPA-QHSSE

Usia
Age
55 tahun
55 years old

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Sumedang, 22 Desember 1969
Sumedang, December 22, 1969

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Sumedang
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	11.10/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	• ANT I, BP3IP (2012) • S1 Manajemen, STMT Trisakti (2009) • ANT II, BP3IP (2008) • MPB 3, AKMI (1993) • ANT I, BP3IP (2012) • Bachelor's Degree in Management, STMT Trisakti (2009) • ANT II, BP3IP (2008) • MPB 3, AKMI (1993)
Pengalaman Kerja Work Experience	• Nakhoda Km. Dorolonda (Maret 2023 - November 2023) • Nakhoda Km. Kelud (November 2020 - Februari 2023) • Nakhoda Km. Kelimutu (September 2018 - September 2020) • Nakhoda Km. Pangrango (Mei 2017- Mei 2018) • Nakhoda Km. Camara N- I (Agustus 2016 - Mei 2017) • Captain of Km. Dorolonda (March 2023 - November 2023) • Captain of Km. Kelud (November 2020 - February 2023) • Captain of Km. Kelimutu (September 2018 - September 2020) • Captain of Km. Pangrango (May 2017 - May 2018) • Captain of Km. Camara N-I (August 2016 - May 2017)

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2024)

EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2024)



EVAN ERYANTO

Pjs. Sekretaris Perusahaan
Acting Corporate Secretary

Usia
Age
35 tahun
35 years old

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Jakarta, 15 Agustus 1989
Jakarta, August 15, 1989

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Surabaya
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	11.10/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	S1 Teknik Perkapalan (02-08-2011) Bachelor's Degree in Naval Engineering, August 2, 2011
Pengalaman Kerja Work Experience	• Pjs. Kepala Kesekretariatan Perusahaan, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (10-11-2023) • Koordinator Executive Assistant, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (07-07-2022) • Staff Madya Divisi Kesekretariatan Perusahaan, 05.24/01/SK/HKO.01/2022 (27-05-2022) • Manager Perencanaan & Pengendalian Bahan Bakar & Pelumas Kapal (01-12-2021) • Senior Personal Assistant, 03.19/01/SK/HKO.01/2019 (09-10-2019) • Acting Head of Corporate Secretariat, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (November 10, 2023) • Coordinator of Executive Assistants, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (July 7, 2022) • Senior Staff of Corporate Secretariat Division, 05.24/01/SK/HKO.01/2022 (May 27, 2022) • Manager of Planning & Control for Ship Fuel and Lubricants (December 1, 2021) • Senior Personal Assistant, 03.19/01/SK/HKO.01/2019 (October 9, 2019)



PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2024)

EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2024)

ANDI SAMSUL HADI

Senior Vice President Pengembangan Strategis
Senior Vice President of Strategic Development

Usia
Age
54 tahun
54 years old

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Kuningan, 07 Mei 1970
Kuningan, May 7, 1970

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta Barat West Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	07.07/03/SK/HKO.01/2022
Pendidikan Education	• Magister Ekonomi Syariah, Universitas Trisakti (2018 - 2020) • Magister Manajemen, Universitas Gajah Mada (2005 - 2007) • Sarjana Teknik, Universitas Trisakti (1989 - 1994) • Master's Degree in Islamic Economics, Universitas Trisakti (2018 - 2020) • Master's Degree in Management, Universitas Gajah Mada (2005 - 2007) • Bachelor's Degree in Engineering, Universitas Trisakti (1989 - 1994)
Pengalaman Kerja Work Experience	• Senior Vice President Pengembangan Strategis, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (07-07-2022) • Vice President Perencanaan Korporat & Manajemen Risiko, 05.04/03/SK/HKO.01/2017 (04-05-2017) • Senior Manager Corporate Planning, 07.30/1/SK/HKO.01/2015 (30-07-2015) • Senior Manager & Penjualan Angkutan Penumpang, 12.03/2/SK/HKO.01/2014 (03-12-2014) • Senior Vice President of Strategic Development, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (July 7, 2022) • Vice President of Corporate Planning & Risk Management, 05.04/03/SK/HKO.01/2017 (May 4, 2017) • Senior Manager of Corporate Planning, 07.30/1/SK/HKO.01/2015 (July 30, 2015) • Senior Manager of Passenger Transport Sales, 12.03/2/SK/HKO.01/2014 (December 3, 2014)

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2024)

EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2024)



HANA SUHARDI

Vice President Pengembangan Bisnis
Vice President of Business Development

Usia
Age
42 tahun
42 years old

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Jakarta, 15 Desember 1982
Jakarta, December 15, 1982

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta Timur East Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	06.09/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	Magister Manajemen (23-10-2012) Master's Degree in Management, October 23, 2012
Pengalaman Kerja Work Experience	- Vice President Pengembangan Bisnis, 06.09/01/SK/HKO.01/2023 (30-03-2023) - Vice President Pengelolaan Asset, 05.25/01/SK/HKO.01/2022 (06-06-2022) - Head of SMO, 02.28/02/SK/HKO.01/2017 (21-2-2019) - Diperbantukan di PT Sarana Bandar Nasional sebagai Manajer Pemasaran dan Pengembangan Usaha, 08.05/19/ND/310/2015 (01-05-2015) - Diperbantukan di PT Sarana Bandar Nasional sebagai Manajer SDM dan Umum, 046/SK/DIR/SBN/X/2014 (06-12-2013) - Vice President of Business Development, 06.09/01/SK/HKO.01/2023 (March 30, 2023) - Vice President of Asset Management, 05.25/01/SK/HKO.01/2022 (June 6, 2022) - Head of SMO, 02.28/02/SK/HKO.01/2017 (February 21, 2019) - Assigned to PT Sarana Bandar Nasional as Marketing and Business Development Manager, 08.05/19/ND/310/2015 (May 1, 2015) - Assigned to PT Sarana Bandar Nasional as HR and General Affairs Manager, 046/SK/DIR/SBN/X/2014 (December 6, 2013)



PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2024)

EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2024)



TAUFIK M.R
 Vice President Perencanaan & Transformasi Perusahaan
 Vice President of Corporate Planning and Transformation

Usia
 Age
 39 tahun
 39 years old

Tempat dan Tanggal Lahir
 Place and Date of Birth
 Lubuk Sikaping, 15 Februari 1985
 Lubuk Sikaping, February 15, 1985

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta Pusat Central Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	11.10/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	Master of Science in Maritime Affairs (02-12-2012) Master of Science in Maritime Affairs, December 2, 2012
Pengalaman Kerja Work Experience	• Vice President Perencanaan dan Transformasi Perusahaan, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (10-11-2023) • Vice President Usaha Barang Komersial & Penunjang, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (07-07-2022) • Vice President Pemasaran Angkutan Barang Kapal Penumpang & Perintis, 05.25/01/SK/HKO.01/2022 (27-05-2022) • Kepala Cabang Nabire, 07.01/01/SK/HKO.01/2021 (01-07-2021) • Manager Pengelolaan Penjualan Angkutan Kapal Barang, 05.15/01/SK/HKO.01/2019 (21-05-2019) • Vice President of Corporate Planning and Transformation, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (November 10, 2023) • Vice President of Commercial Cargo Business & Support, 07.07/03/SK/HKO.01/2022 (July 7, 2022) • Vice President of Cargo Transport Marketing for Passenger and Pioneer Ships, 05.25/01/SK/HKO.01/2022 (May 27, 2022) • Branch Manager of Nabire, 07.01/01/SK/HKO.01/2021 (July 1, 2021) • Manager of Cargo Transport Sales Management, 05.15/01/SK/HKO.01/2019 (May 21, 2019)

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2024)

EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2024)



ROOSHARDIANTI SURYANDARI, dr.

General Manager Hotel Bahtera
General Manager of Hotel Bahtera

Usia
Age
48 tahun
48 years old

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Jakarta, 23 Januari 1976
Jakarta, January 23, 1976

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta Selatan South Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	11.10/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	S1 Kedokteran Umum (09-08-2000) Bachelor of General Medicine, August 9, 2000
Pengalaman Kerja Work Experience	- General Manager Hotel Bahtera, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (10-11-2023) - Direktur Operasi PT PIDC, 02.15/01/SK/HKO.01/2021 (21-03-2021) - Kepala Bagian Manajemen Kinerja & Akreditasi RS PELNI, 810/PUM/XI-2003 (01-11-2003) - General Manager of Hotel Bahtera, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 (November 10, 2023) - Operations Director of PT PIDC, 02.15/01/SK/HKO.01/2021 (March 21, 2021) - Head of Performance Management & Accreditation Division at PELNI Hospital, 810/PUM/XI-2003 (November 1, 2003)



PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2024)

EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2024)



ALBAR
 General Manager SBU Galangan Pelni Surya
 General Manager of SBU Galangan Pelni Surya

Usia
 Age
 52 tahun
 52 years old

Tempat dan Tanggal Lahir
 Place and Date of Birth
 Lamunre, 23 Desember 1972
 Lamunre, December 23, 1972

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta Timur East Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	11.10/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	13-12-2011, Ahli Tehnika Tk. I December 13, 2011, Technical Expert Class I
Pengalaman Kerja Work Experience	• 10-11-2023, General Manager Galangan Pelni Surya, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 • 22-02-2021, Vice President Teknik, 02.22/01/SK/HKO.01/2021 • 16-07-2017, Manager Pemeliharaan & Perbaikan Kapal Penumpang, 05.04/03/SK/HKO.01/17 • 21-03-2017, Manager Passenger Ship Repair & Maintenance, 03.21/02/SK/HKO.01/2017 • 30-04-2015, Manager Passenger Ship Repair & Maintenance, 04.30/1/SK/HKO.01/2015 • November 10, 2023, General Manager of SBU Galangan Pelni Surya, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 • February 22, 2021, Vice President Technical, 02.22/01/SK/HKO.01/2021 • July 16, 2017, Manager of Maintenance & Repair of Passenger Ships, 05.04/03/SK/HKO.01/17 • March 21, 2017, Manager of Passenger Ship Repair & Maintenance, 03.21/02/SK/HKO.01/2017 • April 30, 2015, Manager of Passenger Ship Repair & Maintenance, 04.30/1/SK/HKO.01/2015

PEJABAT EKSEKUTIF (PADA 31 DESEMBER 2024)

EXECUTIVE OFFICERS (AS OF DECEMBER 31, 2024)



AGUSTINUS PRIMA WICAKSONO

Vice President Hukum
Vice President of Legal Affairs

Usia
Age
39 tahun
39 years old

Tempat dan Tanggal Lahir
Place and Date of Birth
Mojokerto, 27 Maret 1985
Mojokerto, March 27, 1985

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta Pusat Central Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	11.10/01/SK/HKO.01/2023
Pendidikan Education	29-03-2008, S1 Hukum Perdata March 29, 2008, Bachelor of Civil Law
Pengalaman Kerja Work Experience	• 10-11-2023, Pjs. Vice President Hukum, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 • 27-05-2022, Kepala Cabang Nabire, 05.25/01/SK/HKO.01/2022 • 01-02-2021, Kepala Cabang Kendari, 01.28/01/SK/HKO.01/2021 • 04-05-2017, Manager Peraturan & Bantuan Hukum, 02.21/01/SK/HKO.01/2019 • 02-02-2015, Pjs. Manager Peraturan & Bantuan Hukum, 05.04/03/SK/HKO.01/2017 • October 11, 2023, Acting Vice President Legal, 11.10/01/SK/HKO.01/2023 • May 27, 2022, Branch Manager Nabire, 05.25/01/SK/HKO.01/2022 • February 1, 2021, Branch Manager Kendari, 01.28/01/SK/HKO.01/2021 • May 4, 2017, Manager of Regulations & Legal Assistance, 02.21/01/SK/HKO.01/2019 • February 2, 2015, Acting Manager of Regulations & Legal Assistance, 05.04/03/SK/HKO.01/2017



INFORMASI PEMEGANG SAHAM

SHAREHOLDER INFORMATION

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI 5% ATAU LEBIH SAHAM

PELNI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan kepemilikan saham 100%.

PERSENTASE KEPEMILIKAN TIDAK LANGSUNG ATAS SAHAM OLEH ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Sampai dengan 31 Desember 2024, tidak terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang memiliki saham.

JUMLAH PEMEGANG SAHAM DAN PERSENTASE KEPEMILIKAN PER AKHIR TAHUN BUKU BERDASARKAN KLASIFIKASI

PELNI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan kepemilikan saham 100%. Dengan demikian, sampai dengan 31 Desember 2024, tidak terdapat jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:

1. Kepemilikan institusi lokal;
2. Kepemilikan institusi asing;
3. Kepemilikan individu lokal; dan
4. Kepemilikan individu asing.

INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

SHAREHOLDER COMPOSITION OF HOLDERS WITH 5% OR MORE SHARES

PELNI is a State-Owned Enterprise (BUMN) wholly owned by the Government of the Republic of Indonesia, with 100% share ownership.

INDIRECT SHARE OWNERSHIP PERCENTAGE BY MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS

As of December 31, 2024, there are no members of the Board of Directors or the Board of Commissioners of the Company who own shares.

NUMBER OF SHAREHOLDERS AND OWNERSHIP PERCENTAGE PER END OF THE FISCAL YEAR BASED ON CLASSIFICATION

PELNI is a State-Owned Enterprise (BUMN) wholly owned by the Government of the Republic of Indonesia, with 100% share ownership. Therefore, as of December 31, 2024, there are no classifications of the number of shareholders and ownership percentages per end of the fiscal year based on the following categories:

1. Local institutional ownership;
2. Foreign institutional ownership;
3. Local individual ownership; and
4. Foreign individual ownership.

INFORMATION REGARDING THE MAJOR AND CONTROLLING SHAREHOLDERS



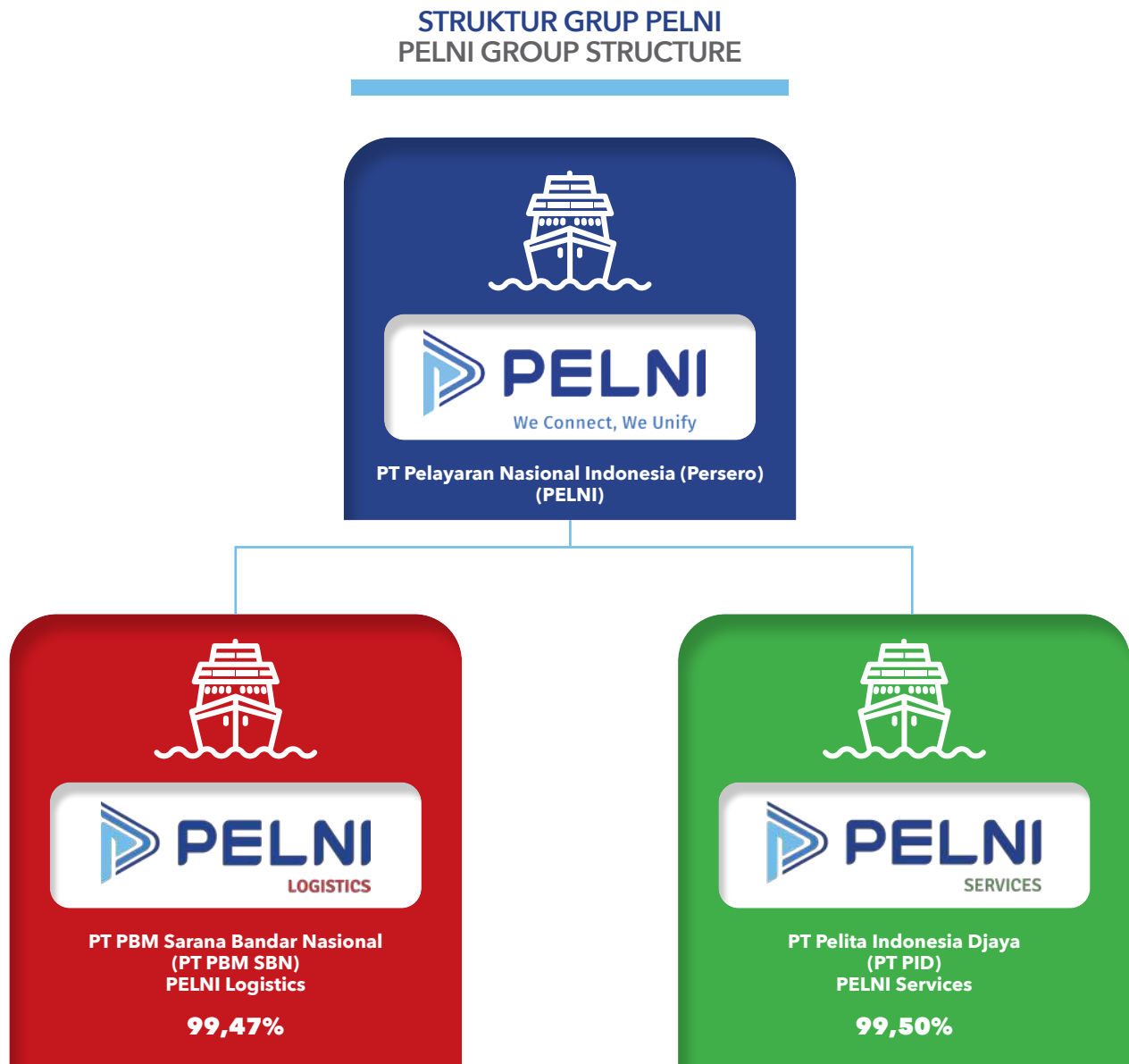
STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN COMPANY GROUP STRUCTURE

Sampai dengan 31 Desember 2024, PELNI beroperasi dengan kepemilikan terhadap 2 (dua) anak perusahaan yaitu PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN) dengan kepemilikan saham 99,47% dan PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) dengan kepemilikan saham 99,50%.

As of December 31, 2024, PELNI operates with ownership of two subsidiaries: PT Perusahaan Bongkar Muat Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN) with a 99.47% shareholding and PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) with a 99.50% shareholding.

Struktur grup PT PELNI (Persero) pada 31 Desember 2024 dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

The group structure of PT PELNI (Persero) as of December 31, 2024, can be seen in the diagram below:



ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

SUBSIDIARIES AND ASSOCIATES

Daftar entitas anak dan entitas asosiasi PT PELNI (Persero) pada 31 Desember 2024 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

The list of subsidiaries and associates of PT PELNI (Persero) as of December 31, 2024, can be seen in the table below:

No	Nama Perusahaan Company Name	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage	Bidang Usaha Line of Business	Status Operasi Operational Status	Total Aset 31 Desember 2024 Total Assets as of December 31, 2024
1	PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN)	99,47%	Angkutan transportasi, bongkar muat, pengiriman barang, pergudangan, operator terminal laut, truk, <i>custom clearance</i> , pedalaman depo. Transportation, loading, logistic, warehouse, marine terminal operator, truck, custom clearance, inland depo.	Beroperasi In Operation	Rp570,19 miliar Rp570,19 billion
2	PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID)	99,50%	Jasa perdagangan umum, jasa kepelabuhan, perusahaan pengutusan kepabeanan, jasa kebersihan, jasa pengamanan, jasa pengelolaan kasur, jasa penyediaan air minum dalam kemasan, jasa pengelolaan hotel, jasa penyediaan hiburan atas kapal General trading services, port services, customs delivery companies, cleaning services, security services, mattress management services, bottled water supply services, hotel management services, entertainment services on board.	Beroperasi In Operation	Rp375,99 miliar Rp375,99 billion

PT PBM SARANA BANDAR NASIONAL (PT PBM SBN)

Bidang Usaha

PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN) merupakan anak perusahaan PELNI yang beroperasi pada bidang usaha Angkutan transportasi, bongkar muat, pengiriman barang, pergudangan, operator terminal laut, truk, *custom clearance*, pedalaman depo/ *transportation, loading, logistic, warehouse, marine terminal operator, truck, custom clearance, inland depo*.

Jumlah Aset Dan Laba

Pada tahun 2024, PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN) membukukan laba sebesar Rp39,17 miliar.

PT PBM SARANA BANDAR NASIONAL (PT PBM SBN)

Line of Business

PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN) is a subsidiary of PELNI that operates in transportation, loading and unloading, goods shipping, warehousing, marine terminal operations, trucking, customs clearance, and inland depot.

Total Assets And Profits

In 2024, PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN) recorded a profit of Rp39,17 billion.



ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

SUBSIDIARIES AND ASSOCIATES

Susunan Manajemen

Susunan dan nama masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN) pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Management Structure

The composition and names of the members of the Board of Commissioners and Directors of PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN) as of December 31, 2024, are as follows:

Susunan Manajemen PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN) Management Structure of PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN)

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Utama President Commissioner	A.A.N. Budi Tresnawan
Komisaris Commissioner	Tatang R. Dasuki
Direksi Board of Director	
Direktur Utama President Director	Edward Tobing
Direktur Keuangan dan SDM Director of Finance and Human Resources	Affan Taufan
Direktur Operasi dan Komersial Director of Operations and Commercial	Antonius L Gaol

Alamat dan Informasi Kontak Address and Contact Information

Alamat Address	Jl. Cempaka Putih Tengah II B.13-14, Cempaka Putih, Jakarta - 10510
Informasi Kontak Contact Information	T : 021- 4287 9000 F : 021-4287 8389
Email	info@saranabandarlogistik.co.id
Situs Web Website	https://saranabandarlogistik.co.id

PT PELITA INDONESIA DJAYA (PT PID)

Bidang Usaha

PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) merupakan anak Perusahaan Perseroan yang bergerak di bidang Jasa Jasa perdagangan umum, jasa kepelabuhan, perusahaan pengutusan kepabeanian, jasa kebersihan, jasa pengamanan, jasa pengelolaan kasur, jasa penyediaan air minum dalam kemasan, jasa pengelolaan hotel, jasa penyediaan hiburan atas kapal.

PT PELITA INDONESIA DJAYA (PT PID)

Line of Business

PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) operates in general trading services, port services, customs delivery companies, cleaning services, security services, mattress management services, bottled water supply services, hotel management services, entertainment services on board.



ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

SUBSIDIARIES AND ASSOCIATES

Jumlah Aset dan Laba

Pada tahun 2024, PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) membukukan aset sejumlah Rp375,98 miliar, dengan perolehan laba mencapai Rp31,17 miliar.

Susunan Manajemen

Susunan dan nama masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Total Assets and Profits

In 2024, PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) recorded assets of Rp375.98 billion, with a profit of Rp31.17 billion.

Management Structure

The composition and names of the Board of Commissioners and Directors of PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) as of December 31, 2024, are as follows:

Susunan Manajemen PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID)

Management Structure of PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID)

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Utama President Commissioner	Mardiyanto
Komisaris Commissioner	Sosialisman Hidayat Hasibuan
Direksi Board of Director	
Direktur Utama President Director	Sukendra
Direktur Keuangan dan SDM Director of Finance and Human Resources	Suparno
Direktur Operasi dan Komersial Director of Operations and Commercial	Didik Martono

Alamat dan Informasi Kontak

Address and Contact Information

Alamat Address	Ruko Cempaka Mas Blok Q No.5 Jl. Letjend Suprpto, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat Ruko Cempaka Mas Blok Q No.5 Jl. Letjend Suprpto, Sumur Batu, Kemayoran, Central Jakarta
Informasi Kontak Contact Information	T: 021-42883740
Email	corporate@pidc.co.id
Situs Web Website	www.pelniservices.co.id



KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM

CHRONOLOGY OF STOCK LISTING

Sampai dengan 31 Desember 2024, PELNI tidak pernah melakukan penawaran umum perdana saham kepada publik. Dengan demikian, tidak terdapat informasi apa pun terkait tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, harga penawaran saham, aksi korporasi, serta nama bursa pencatatan saham untuk diungkapkan di dalam Laporan Tahunan ini.

As of December 31, 2024, PELNI has never conducted an initial public offering. Therefore, there is no information regarding stock issuance years, the number of shares, nominal value of shares, offering prices, corporate actions, or the name of the stock exchange to be disclosed in this Annual Report.

KRONOLOGI PENCATATAN EFEK LAINNYA

CHRONOLOGY OF OTHER SECURITIES LISTING

Sampai dengan 31 Desember 2024, PELNI tidak melakukan pencatatan efek lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat informasi apa pun terkait nama efek, nilai penawaran, nama bursa pencatatan saham, hingga peringkat efek untuk diungkapkan di dalam Laporan Tahunan ini.

As of December 31, 2024, PELNI has not listed any other securities. Consequently, there is no information regarding the names of the securities, offering values, the name of the stock exchange, or the ratings of the securities to be disclosed in this Annual Report.



LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

CAPITAL MARKET SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONS

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

PUBLIC ACCOUNTING FIRM



Nama KAP Public Accounting Firm Name	Djoko, Sidik, & Indra
Alamat Address	Graha Mandiri d/h Plaza Bumi Daya 17 th Floor Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat 10310 Indonesia. Graha Mandiri d/h Plaza Bumi Daya 17 th Floor Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat 10310 Indonesia.
NIUKAP Public Accounting Firm License Number	959/KM.1/2014
Biaya Jasa Audit Audit Service Fee	Rp527.250.000 (Nilai sudah include PPN 11%) Rp527,250,000 (including 11% VAT)
Jasa yang Diberikan Services Provided	Jasa Audit Laporan Keuangan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK), Jasa Audit Kepatuhan, Jasa Laporan Key Performance Indicators dan Jasa Laporan Penyertaan Modal Negara (PMN). Financial Statement Audit Services and Financial Statements for Micro and Small Business Funding Programs (PUMK), Compliance Audit Services, Key Performance Indicator Reporting Services, and State Capital Injection (PMN) Reporting Services.
Periode Penugasan Assignment Period	1 November 2023 s/d 20 April 2024 November 1, 2023, to April 20, 2024
Jasa lain yang diberikan Other Services Provided	Jasa Agreed Upon dan Jasa Reviu Penilaian Key Performance Indicators Manajemen dengan biaya pekerjaan masing-masing sebesar Rp 116.550.000 include PPN 11% periode sampai 30 April 2024. The agreed-upon services and the review of the management's Key Performance Indicators are each priced at Rp 116,550,000, including 11% VAT, for the period ending April 30, 2024.

NOTARIS

NOTARIES



Nama Lembaga Name of Institution	Kantor Notaris Ida Adiningsih, S.H.,
Alamat Address	Jl. Kembang Raya No.15A 7, RT.7/RW.4, Kwitang, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat
Nama Lembaga Name of Institution	Kantor Notaris & PPAT Emmy Yatmini Noordjasmani, S.H.,
Alamat Address	Jl. Panglima Polim Raya No.107D, Jakarta Selatan



LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

CAPITAL MARKET SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONS

KONSULTAN HUKUM LEGAL CONSULTANTS



Nama Lembaga Name of Institution	Kantor Hukum Toni Hendarto, S.H., M.H., MM & Rekan Toni Hendarto, S.H., M.H., MM & Partners Law Office
Alamat Address	Jl. Pemuda Nomor 14B, Pulogadung, Jakarta Timur Jl. Pemuda No. 14B, Pulogadung, East Jakarta
Nama Lembaga Name of Institution	Namora Sabungan Law Firm
Alamat Address	Jl. Semayang 5 No. 11, Cakung, Jakarta Timur Jl. Semayang 5 No. 11, Cakung, East Jakarta
Nama Lembaga Name of Institution	Destivano Wibowo & Associates
Alamat Address	Menara Karya Lantai 7, Unit B & C, Jl. H. R. Rasuna Said Block X-5 Kav 1-2, Jakarta Menara Karya 7 th Floor, Unit B & C, Jl. H. R. Rasuna Said Block X-5 Kav 1-2, Jakarta
Nama Lembaga Name of Institution	Soleman B Ponto & Partners Law Firm
Alamat Address	Wisma NH Jl. Raya Pasar Minggu Kav 2B - C F1.5, Pancoran, Jakarta Selatan Wisma NH Jl. Raya Pasar Minggu Kav 2B - C F1.5, Pancoran, South Jakarta

BIRO ADMINISTRASI EFEK

Sampai dengan 31 Desember 2024, PELNI tidak mencatatkan saham ataupun efek lain pada bursa mana pun.

PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK

Sampai dengan 31 Desember 2024, PELNI tidak mencatatkan saham ataupun efek lain pada bursa mana pun.

SECURITIES ADMINISTRATION BUREAU

As of December 31, 2024, PELNI has not listed shares or other securities on any exchange.

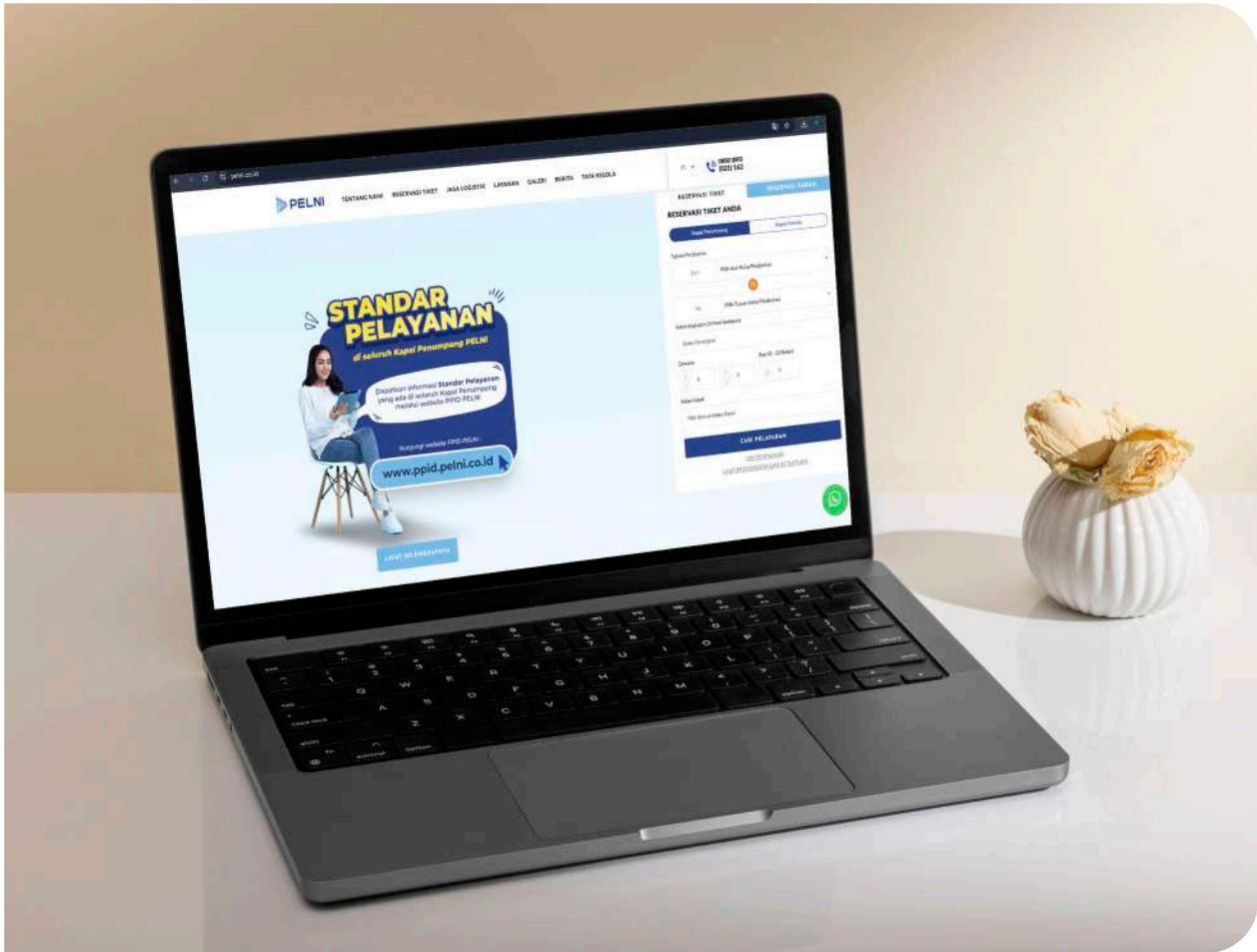
CREDIT RATING AGENCIES

As of December 31, 2024, PELNI has not listed shares or other securities on any exchange.



INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN

COMPANY WEBSITE INFORMATION



PELNI memiliki komitmen yang kuat untuk dapat memberikan kemudahan akses informasi bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan, secara transparan dan akurat. Komitmen tersebut antara lain terwujud melalui keberadaan situs web PELNI yang dapat diakses pada alamat <https://www.pelni.co.id/>.

Dengan mengacu pada standar penerapan terbaik *Good Corporate Governance* (GCG), termasuk ketentuan yang terdapat di dalam Kriteria Penilaian *Annual Report Award* serta Peraturan OJK Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, situs web PELNI telah memuat sejumlah informasi sebagai berikut:

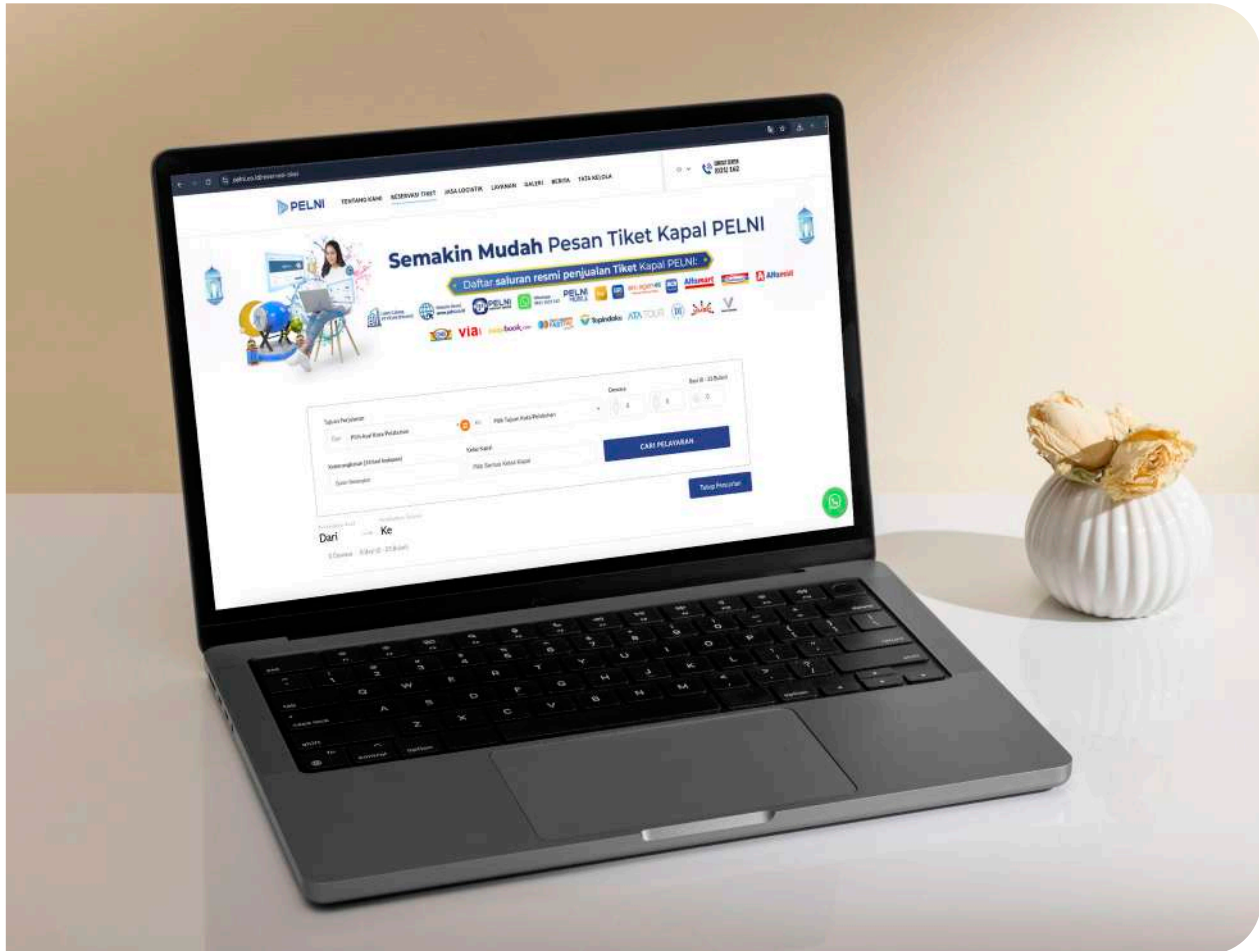
PELNI is committed to providing easy access to information for shareholders and all stakeholders transparently and accurately. This commitment is realized through the PELNI website, which can be accessed at (<https://www.pelni.co.id/>).

In accordance with best practices in Good Corporate Governance (GCG) implementation, including the provisions in the Annual Report Award Criteria and OJK Regulation No. 8/POJK.04/2015 concerning the Website of Issuers or Public Companies, the PELNI website includes the following information:



INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN

COMPANY WEBSITE INFORMATION



1. Nama, alamat dan kontak kantor pusat dan/atau kantor perwakilan; 2. Riwayat singkat; 3. Struktur organisasi; 4. Informasi Pemegang Saham; 5. Isi Kode Etik (Etika Bisnis); 6. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); 7. Profil Direksi dan Dewan Komisaris; 8. Piagam/<i>Charter</i> Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal. 9. Dokumen Anggaran Dasar.	1. Name, address, and contact of the head office and/or representative offices; 2. Brief history; 3. Organizational structure; 4. Shareholder information; 5. Code of Ethics (Business Ethics); 6. General Meeting of Shareholders (GMS) information; 7. Profiles of the Board of Directors and Board of Commissioners; 8. Charters of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit; 9. Articles of Association documents.

Selain informasi yang disebutkan di atas, Website PT PELNI (Persero) juga membuat informasi yang lebih spesifik, yaitu:

In addition to the information mentioned above, PT PELNI (Persero) Website also provides more specific information, including:



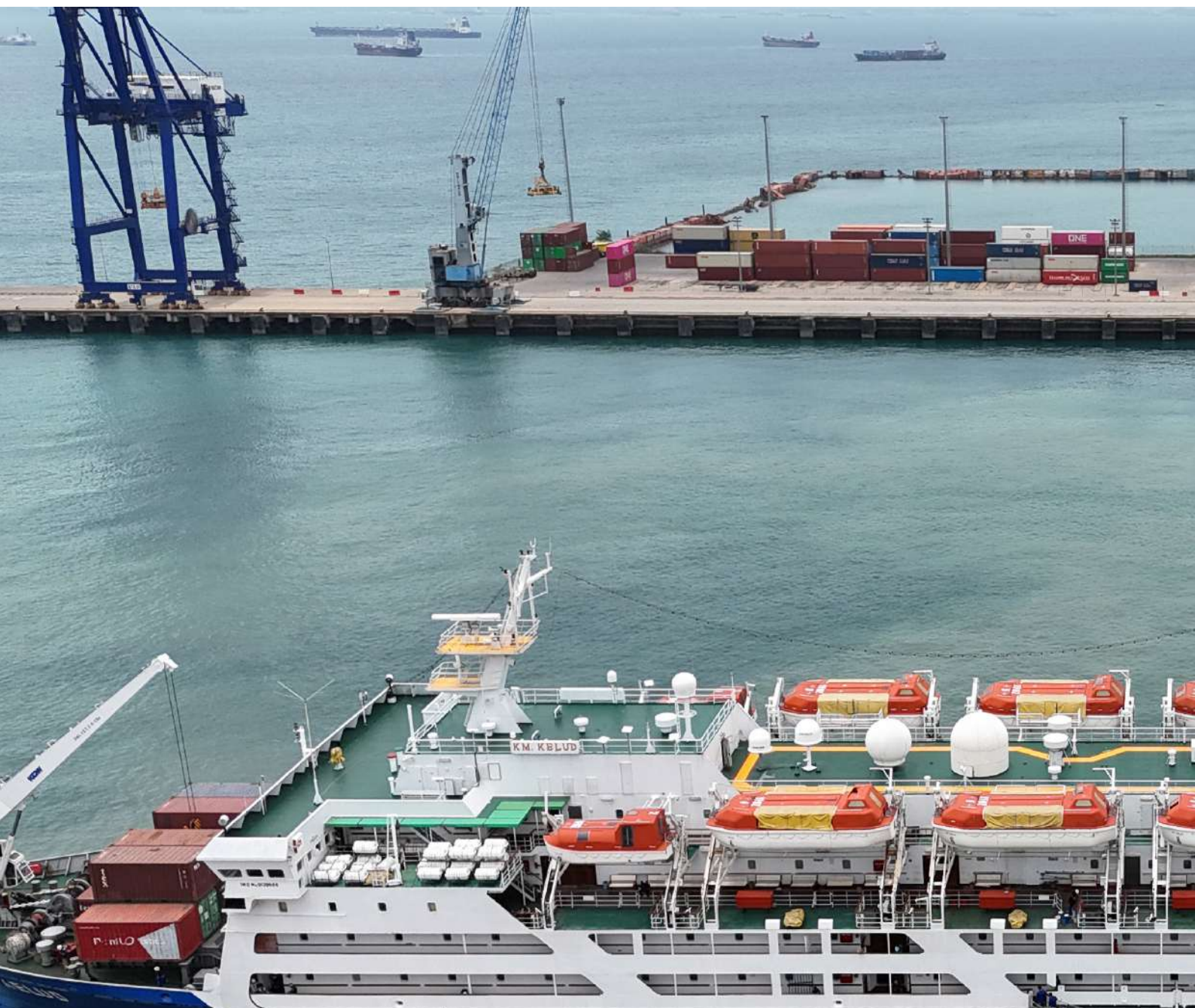
INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN

COMPANY WEBSITE INFORMATION

Tentang Kami About Us	Profil Perusahaan • BOD/BOC	Company Profile • BOD/BOC
	Sejarah	History
	Visi & Misi	Vision & Mission
	Penghargaan	Awards
	Keterbukaan Informasi • Laporan Tahunan • Pemegang Saham • Struktur Organisasi • Nilai Perusahaan	Information Disclosure • Annual Reports • Shareholders • Organizational Structure • Corporate Values
Reservasi Tiket Ticket Reservations	Reservasi Tiket PT PELNI (Persero)	PT PELNI (Persero) Ticket Reservations
Jasa Logistik Logistics Services	• Tol Laut • Kapal Ternak	• Sea Toll • Livestock Ships
Layanan Services	Gaya Hidup • Wisata Bahari • MICE	Lifestyle • Marine Tourism • MICE
Galeri Gallery	Layanan Lainnya • Hotel Bahtera • Galangan Kapal • Keagenan Kapal • PELNI Aset	Other Services • Bahtera Hotel • Shipyard • Ship Agency • PELNI Assets
Berita News	Berita Press Release	News Press Release
	Event	Event
Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance	• Pedoman Bordmanual • Pedoman CoC • Pedoman Gratifikasi • Pedoman WBS • Pedoman UPG • E – LHKPN • Pedoman Sistem Manajemen terintegrasi • Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa • Piagam Audit Internal • Laporan GCG	• Board Manual Guidelines • Code of Conduct (CoC) Guidelines • Gratification Control Guidelines • Whistleblowing System (WBS) Guidelines • Gratification Control Unit (UPG) Guidelines • Electronic Wealth Report (E-LHKPN) • Integrated Management System Guidelines • Procurement of Goods and Services Guidelines • Internal Audit Charter • Good Corporate Governance (GCG) Report







04

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS





TINJAUAN PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI

ECONOMIC AND INDUSTRIAL OVERVIEW

Industri pelayaran dan logistik merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional, hal ini mengingat posisi strategis Indonesia sebagai negara maritim.

The shipping and logistics industry serves as one of the key pillars of Indonesia's national economy, reflecting the country's strategic position as a maritime nation.



KONDISI PEREKONOMIAN GLOBAL DAN INDONESIA

Menjelang akhir tahun 2024, ekonomi global masih diwarnai ketidakpastian. Inflasi umumnya menurun, meski beberapa negara mencatat kenaikan. Kebijakan moneter di negara maju mulai melonggar, sementara negara berkembang menunjukkan respons beragam sesuai tantangan domestik yang tengah dihadapi. Harga komoditas global mayoritas melemah, kecuali minyak sawit yang naik karena tingginya permintaan dan kekhawatiran terhadap kecukupan pasokan. Pertumbuhan ekonomi global stagnan di 3,2% untuk 2024 dan 2025. ASEAN menunjukkan ketahanan lebih baik, sementara Eropa dan AS menghadapi perlambatan akibat risiko politik dan proteksionisme. Tiongkok menghadapi tekanan dari lemahnya permintaan domestik dan krisis properti, sementara India tetap tumbuh meski melambat karena inflasi pangan. Perekonomian global masih menghadapi tantangan yang mencakup tensi geopolitik, proteksionisme, perubahan iklim, dan tekanan utang

GLOBAL AND INDONESIAN ECONOMIC CONDITIONS

Toward the end of 2024, the global economy remained characterized by uncertainty. Inflation generally declined, although some countries experienced an uptick. Monetary policies in advanced economies began to ease, while emerging markets responded with varied measures tailored to their respective domestic challenges. Most global commodity prices weakened, with the exception of palm oil, which rose due to strong demand and concerns over supply adequacy. Global economic growth stagnated at 3.2% for both 2024 and 2025. The ASEAN region demonstrated greater resilience, while Europe and the United States experienced a slowdown driven by political risks and rising protectionism. China faced mounting pressure from weak domestic demand and a persistent property sector crisis, whereas India continued to grow, albeit at a slower pace due to food inflation. The global economy continues to grapple with challenges, including geopolitical tensions, protectionist policies, climate



TINJAUAN PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI

ECONOMIC AND INDUSTRIAL OVERVIEW



di negara berkembang. Kebijakan yang strategis diperlukan untuk mempertahankan stabilitas sekaligus memanfaatkan peluang untuk pertumbuhan.

Di tengah perlambatan global, perekonomian Indonesia menunjukkan daya tahan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,03% (ctc) hingga triwulan III, didukung oleh konsumsi domestik yang kuat, peningkatan investasi, serta kinerja ekspor yang membaik. Sektor utama seperti industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi terus tumbuh, sementara pariwisata meningkat signifikan berkat tingginya kunjungan wisatawan dan penyelenggaraan berbagai acara berskala besar. Pemerintah berhasil menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi, optimalisasi belanja APBN, dan dukungan terhadap daya beli masyarakat. Langkah seperti penurunan suku bunga acuan dan penguatan program perlindungan sosial menjadi kunci menjaga momentum pertumbuhan. Kebijakan hilirisasi, investasi infrastruktur, dan transformasi ekonomi terus diperkuat untuk mendorong daya saing dan keberlanjutan ekonomi.

change, and debt distress in developing countries. Strategic policymaking is crucial to maintaining stability while seizing opportunities for sustainable growth.

Amid the global economic slowdown, Indonesia's economy demonstrated resilience. As of the third quarter, economic growth reached 5.03% (yoy), driven by strong domestic consumption, increased investment, and improved export performance. Key sectors such as manufacturing, trade, and construction continued to expand, while the tourism sector experienced significant growth, supported by rising tourist arrivals and the hosting of large-scale events. The government successfully maintained economic stability through inflation control, optimization of state budget spending, and measures to support household purchasing power. Policies such as benchmark interest rate cuts and the strengthening of social protection programs played a critical role in sustaining growth momentum. Downstream industrialization, infrastructure investment, and economic transformation efforts were further intensified to enhance competitiveness and long-term



TINJAUAN PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI

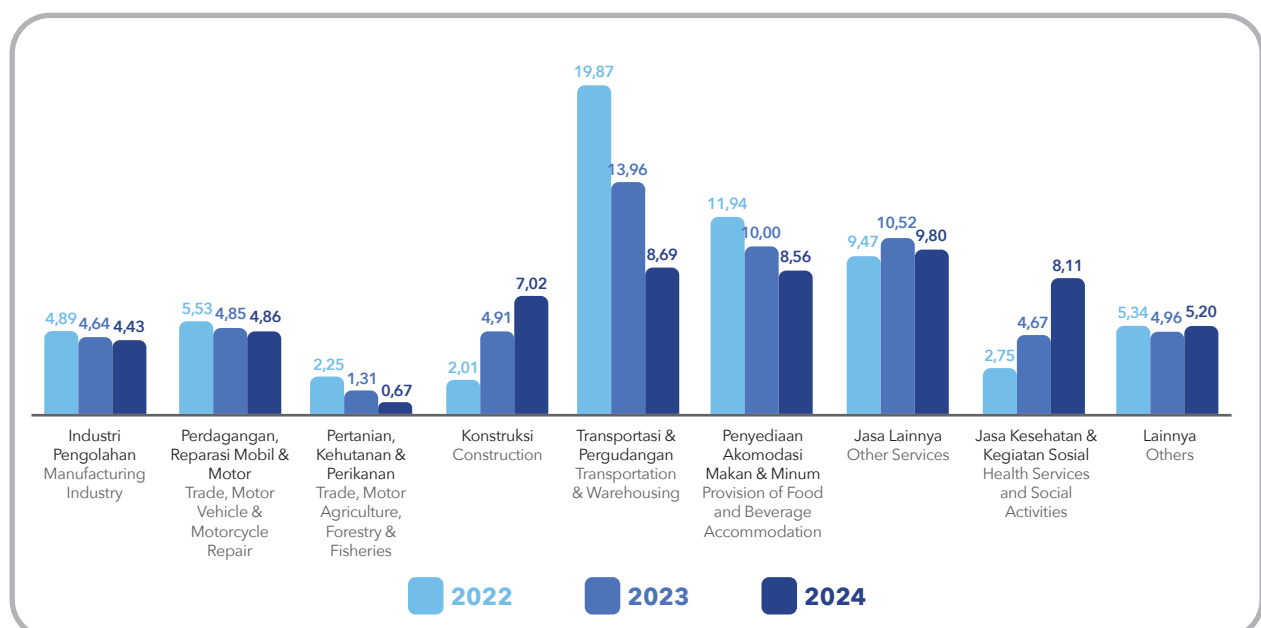
ECONOMIC AND INDUSTRIAL OVERVIEW

Dengan proyeksi pertumbuhan global yang stagnan di 2024-2025, perekonomian Indonesia diharapkan tetap tumbuh solid di atas 5%. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan terus diperkuat untuk menghadapi risiko global sekaligus menciptakan peluang bagi kesejahteraan masyarakat.

Laju inflasi terkendali, namun Pemerintah terus mengantisipasi risiko gejolak harga ke depan. Menjelang akhir 2024, inflasi nasional terkendali dalam kisaran sasaran 2,5% $\pm$ 1%, dengan tingkat inflasi pada November sebesar 1,6% yoy, turun dari 2,12% pada Agustus. Kebijakan moneter Indonesia ini mencerminkan upaya pelonggaran dengan penurunan suku bunga acuan menjadi 6% pada September, sejalan dengan inflasi yang terkendali serta apresiasi nilai tukar Rupiah. Namun, dinamika pasar global yang dipengaruhi oleh ketidakpastian dan peningkatan tensi geopolitik memberikan tekanan pada Rupiah, yang terdepresiasi hingga Rp15.864 per USD pada November. Meskipun demikian, pertumbuhan kredit perbankan tetap menunjukkan tren positif, didorong oleh peningkatan investasi korporasi dan konsumsi rumah tangga, sementara pertumbuhan Dana Pihak Ketiga mengalami perlambatan.

economic sustainability. With global growth projected to stagnate in 2024-2025, Indonesia's economy is expected to maintain solid growth above 5%. The synergy between fiscal, monetary, and financial sector policies will continue to be strengthened to navigate global risks and create opportunities for national prosperity.

Inflation remained under control, although the Government continued to anticipate potential price volatility ahead. Toward the end of 2024, national inflation stayed within the target range of 2.5% $\pm$ 1%, with the inflation rate recorded at 1.6% year-on-year in November, down from 2.12% in August. Indonesia's monetary policy reflected a shift toward easing, marked by a reduction of the benchmark interest rate to 6% in September, in line with manageable inflation and the appreciation of the Rupiah. However, global market dynamics—shaped by persistent uncertainty and rising geopolitical tensions—put pressure on the Rupiah, which depreciated to Rp15,864 per USD in November. Despite this, banking credit growth continued its positive trajectory, supported by rising corporate investment and household consumption, while Third-Party Funds growth experienced a slowdown.



TINJAUAN PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI

ECONOMIC AND INDUSTRIAL OVERVIEW

Ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03%. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Lainnya sebesar 9,80%; diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,69%; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,56%. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh 4,43%. Sedangkan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masing-masing tumbuh sebesar 4,86% dan 0,67%.

Kinerja sektor eksternal juga masih dalam tren yang positif. Neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus USD 4,4 miliar pada November, melanjutkan tren positif selama 55 bulan berturut-turut meski mengalami penurunan secara kumulatif dibandingkan tahun sebelumnya. Ekspor meningkat sebesar 9,1% yoy, didorong oleh sektor pertanian dan industri pengolahan, sementara impor tumbuh moderat, mencerminkan penguatan permintaan domestik. Sementara itu, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mencatat surplus USD 5,9 miliar pada triwulan III, ditopang oleh perbaikan neraca transaksi berjalan dan peningkatan aliran masuk modal melalui investasi langsung dan portofolio. Cadangan devisa naik menjadi USD 149,9 miliar, setara dengan 6,2 bulan impor, memberikan dukungan kuat bagi stabilitas eksternal dan ekonomi nasional di tengah tantangan global.

KONDISI INDUSTRI PELAYARAN

Industri pelayaran dan logistik merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional, hal ini mengingat posisi strategis Indonesia sebagai negara maritim. Berdasarkan berita resmi statistik yang diterbitkan Badan Pusat Statistik tentang perkembangan transportasi nasional yang diterbitkan Desember 2024, selama Januari-Desember 2024, jumlah penumpang angkutan laut dalam negeri mencapai 25,9 juta orang atau naik 20,46% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023. Peningkatan jumlah penumpang terjadi di seluruh pelabuhan utama yang diamati,

Indonesia's economy grew by 5.03% in 2024, with all business sectors recording positive growth. The highest growth was seen in the Other Services sector at 9.80%, followed by Transportation and Warehousing at 8.69%, and Accommodation and Food & Beverage Services at 8.56%. Meanwhile, the Manufacturing sector—being the dominant contributor—grew by 4.43%. Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles, and the Agriculture, Forestry, and Fisheries sector recorded growth of 4.86% and 0.67%, respectively.

Indonesia's external sector performance remained on a positive trajectory. The trade balance recorded a surplus of USD4.4 billion in November, marking 55 consecutive months of surplus, despite a cumulative decline compared to the previous year. Exports rose by 9.1% year-on-year, driven by strong performance in the agricultural and manufacturing sectors, while imports grew at a moderate pace, reflecting strengthened domestic demand. Meanwhile, Indonesia's Balance of Payments (BoP) posted a surplus of USD5.9 billion in the third quarter, supported by improvements in the current account balance and increased capital inflows through both direct and portfolio investment. Foreign exchange reserves rose to USD149.9 billion, equivalent to 6.2 months of imports, providing a strong buffer for external stability and overall economic resilience amid global uncertainties.

SHIPPING INDUSTRY OVERVIEW

The shipping and logistics industry serves as one of the key pillars of Indonesia's national economy, reflecting the country's strategic position as a maritime nation. According to the official statistical release on national transportation developments published by Statistics Indonesia in December 2024, the number of domestic sea transport passengers from January to December 2024 reached 25.9 million—an increase of 20.46% compared to the same period in 2023. Passenger growth was recorded across all major observed ports, with Belawan Port increasing by 12.70%, Balikpapan



TINJAUAN PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI

ECONOMIC AND INDUSTRIAL OVERVIEW

yaitu Pelabuhan Belawan sebesar 12,70%, Balikpapan sebesar 8,25%, Makassar sebesar 6,46%, Tanjung Perak sebesar 5,58%, dan Tanjung Priok sebesar 4,89%.

Sementara itu, Jumlah barang yang diangkut selama Januari-Desember 2024 mencapai 379,2 juta ton atau naik 1,45% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023. Peningkatan jumlah barang yang diangkut terjadi di Pelabuhan Balikpapan sebesar 18,37%, Tanjung Priok sebesar 6,76%, Tanjung Perak sebesar 4,01%, dan Makassar sebesar 2,55%. Sebaliknya, penurunan jumlah barang yang diangkut terjadi di Pelabuhan Panjang sebesar 6,99%.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah memberikan penugasan kepada PT PELNI (Persero) untuk memastikan layanan transportasi laut yang terjangkau, aman, dan berkualitas serta dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama di daerah terpencil dan terluar. Untuk menjalankan penugasan ini, PT PELNI (Persero) berkomitmen untuk senantiasa menjaga kualitas layanan, memprioritaskan keselamatan pelayaran, dan berinovasi melalui digitalisasi untuk memastikan keberhasilan penugasan ini. PT PELNI (Persero) juga berupaya untuk terus bersinergi dengan para mitra strategis dalam mendukung visi pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan melalui konektivitas maritim.

by 8.25%, Makassar by 6.46%, Tanjung Perak by 5.58%, and Tanjung Priok by 4.89%.

Meanwhile, the total volume of cargo transported from January to December 2024 reached 379.2 million tons, marking a 1.45% increase compared to the same period in 2023. Notable increases in cargo volume were recorded at Balikpapan Port 18.37%, Tanjung Priok 6.76%, Tanjung Perak 4.01%, and Makassar 2.55%. Conversely, a decline was observed at Panjang Port, where cargo volume decreased by 6.99%.

To address these conditions, the Government has mandated PT PELNI (Persero) to ensure the provision of affordable, safe, and high-quality sea transportation services accessible to all Indonesians, particularly in remote and outermost regions. In fulfilling this mandate, PT PELNI (Persero) remains committed to maintaining service excellence, prioritizing maritime safety, and driving innovation through digitalization to ensure the successful execution of its public service obligation. PT PELNI (Persero) also continues to foster synergy with strategic partners in support of the Government's vision to promote equitable development through enhanced maritime connectivity.

KEBIJAKAN STRATEGIS PERUSAHAAN

CORPORATE STRATEGIC POLICY

STRATEGI UTAMA

Dalam upaya mendukung dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, PT PELNI (Persero) di tahun 2024 berkomitmen dalam penyediaan transportasi laut yang berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mendukung hal tersebut, PT PELNI (Persero) akan melakukan beberapa inisiatif strategis pada tahun 2024 diantaranya:

KEY STRATEGIES

In its continued efforts to support and contribute positively to national economic growth, PT PELNI (Persero) reaffirmed its commitment in 2024 to providing equitable and sustainable sea transportation services. To realize this goal, the Company has outlined several strategic initiatives for 2024, including:



KEBIJAKAN STRATEGIS PERUSAHAAN

CORPORATE STRATEGIC POLICY

- Pengajuan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam APBN 2024 dan 2025 sebagai dukungan pembiayaan strategis.
- Peningkatan kerja sama aliansi dan pengangkutan muatan dengan produk-produk kluster BUMN/ BUMS, UMKM, dan instansi lainnya.
- *Spin On & Spin Off Strategic Business Unit (SBU)*, yang bertujuan memfokuskan kegiatan operasional dan pengembangan bisnis sesuai dengan potensi pasar dan karakteristik layanan.
- Digitalisasi proses bisnis Perusahaan.
- Pengembangan talenta di bidang pelayaran dan logistic maritim.
- Submission for State Capital Injection (PMN) under the 2024 and 2025 National Budget to support strategic funding needs.
- Strengthening alliance partnerships and cargo transport collaboration with products from SOE/ Private sector clusters, MSMEs, and other institutions.
- Spin On & Spin Off of Strategic Business Units (SBUs), aimed at aligning operational focus with market opportunities and service characteristics.
- Digitalization of the Company's business processes.
- Talent development in the fields of shipping and maritime logistics.

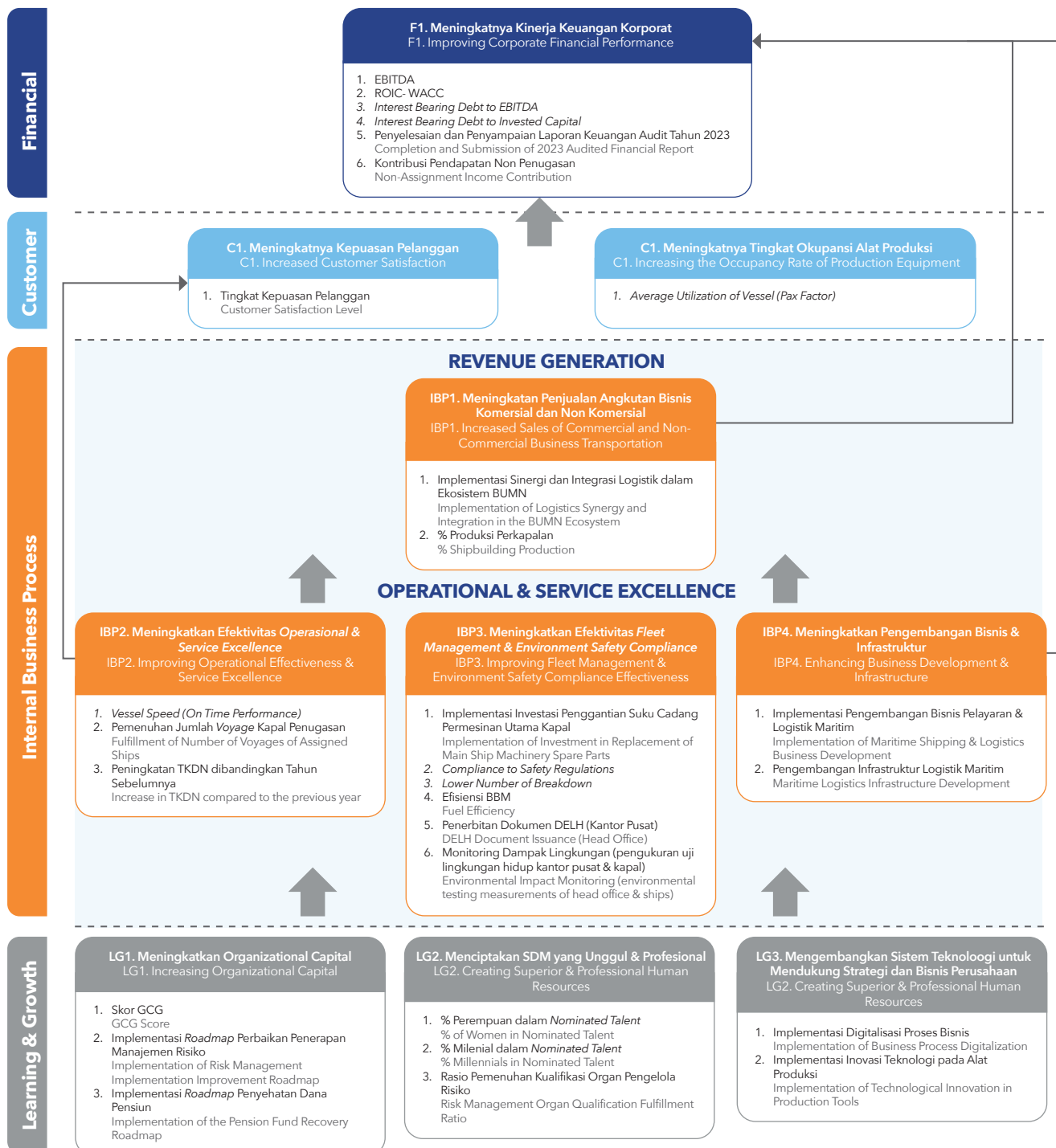
Adapun strategi yang dijalankan oleh PT PELNI (Persero) juga telah diselaraskan dengan 5 (lima) Formulasi Prioritas Kementerian BUMN tahun 2020 - 2024, sebagai berikut:

This strategic direction has been aligned with the five Priority Formulations of the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN) for the 2020-2024 period, as follows:



Guna memastikan tercapainya strategi perusahaan pada tahun 2024, ditetapkan Sasaran Strategis perusahaan yang dituangkan kedalam bentuk peta strategi dengan menggunakan metode *balanced scorecard*, sebagai berikut:

To ensure the successful achievement of the company's strategies in 2024, strategic objectives have been established and outlined in a strategic map using the balanced scorecard method, as follows:



Terdapat 1 (satu) sasaran strategis pada aspek finansial, yaitu "Meningkatnya Kinerja Keuangan Korporat" dengan mengutamakan kelangsungan bisnis perusahaan melalui penciptaan nilai dan layanan kepada pelanggan, menjaga tingkat kesehatan perusahaan, serta berupaya meningkatkan penghasilan dari unit-unit bisnis komersial untuk memberikan kontribusi penghasilan dari bisnis non penugasan.

There is one strategic objective in the financial aspect, which is "Improved Corporate Financial Performance," focusing on ensuring the sustainability of the company's business through value creation and customer service, maintaining the company's financial health, and striving to increase revenue from commercial business units to contribute income from non-mandate businesses.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

OPERATIONAL OVERVIEW BY BUSINESS SEGMENT



Pembahasan tinjauan per segmen usaha pada Laporan Tahunan ini disajikan sesuai dengan pembagian segmen yang tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan sesuai PSAK No. 5 tentang Segmen Operasi. Segmen adalah bagian khusus dari Perseroan dan Entitas Anak yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

The segment review discussion in this Annual Report is presented in accordance with the segment classification outlined in the Company's Consolidated Financial Statements, in accordance with PSAK No. 5 on Operating Segments. A segment is a distinct part of the Company and its Subsidiaries involved either in providing products and services (business segment), or in providing products and services within a specific economic environment (geographical segment), with risks and rewards that differ from other segments.

Untuk tujuan manajemen, Grup dibagi menjadi dua segmen operasi berdasarkan produk dan jasa yang dikelola secara independen. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba rugi bruto dan diukur secara konsisten dengan laba rugi bruto pada laporan keuangan konsolidasi. Grup juga melakukan segmentasi

For management purposes, the Group is divided into two operating segments based on the products and services managed independently. Segment performance is evaluated based on gross profit and is measured consistently with the gross profit presented in the consolidated financial statements. The Group



TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA
 OPERATIONAL OVERVIEW BY BUSINESS SEGMENT

pelaporan berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasi utama dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Direksi adalah pengambil Keputusan operasional Grup.

PT PELNI (Persero) membagi segmen usaha menjadi 2 (dua) segmen, yakni :

1. Segmen Penugasan;
2. Segmen Non-Penugasan;

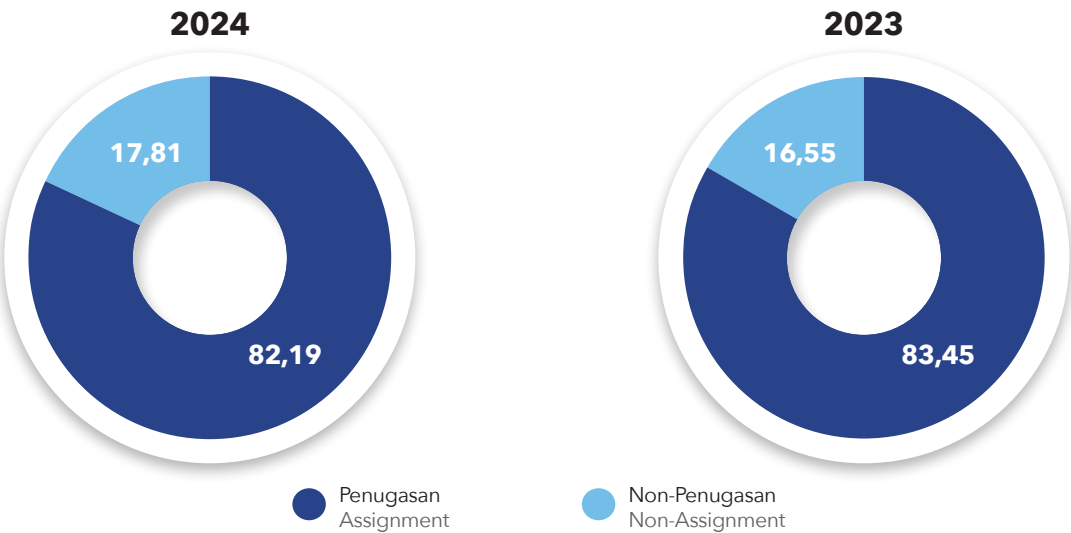
also conducts segment reporting based on financial information used by key decision makers in evaluating segment performance and determining resource allocation. The Board of Directors is the operational decision maker for the Group.

PT PELNI (Persero) divides its business segments into two segments, namely:

1. Assignment Segment (Segmen Penugasan)
2. Non-Assignment Segment (Segmen Non-Penugasan)

Sumber Pendapatan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Konsolidasian
 Sources of Revenue and Contribution to Consolidated Revenue

Pendapatan Revenue	2024		2023		Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024		↑↓
	Jumlah (Rp-ribu) Total (Rp-thousand)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-juta) Total (Rp-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Penugasan Assignment	5.076.941	82,19	4.812.113	83,45	264.828	5,50	↑
Non-Penugasan Non-Assignment	1.100.116	17,81	954.506	16,55	145.610	15,26	↑
Pendapatan Usaha Bersih Konsolidasian Consolidated Net Operating Revenue	6.177.057	100,00	5.766.619	100,00	410.438	7,12	↑



TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

OPERATIONAL OVERVIEW BY BUSINESS SEGMENT

Dari tabel dan bagan di atas, dapat dilihat bahwa pendapatan segmen penugasan berkontribusi paling besar terhadap pendapatan konsolidasian Perusahaan, yang 82,19% di tahun 2024. Berikut disampaikan kegiatan usaha dan pencapaian kinerja dari masing-masing segmen usaha.

PENUGASAN

Dalam menjalankan peran sebagai jembatan nusantara sekaligus agen pembangunan yang melayani kebutuhan transportasi laut seluruh masyarakat Indonesia melalui penugasan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

PT PELNI (Persero) memperoleh kompensasi melalui Kementerian Perhubungan - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atas penyelenggaraan penugasan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation* - PSO) dan subsidi berdasarkan kontrak penugasan yang meliputi:

1. Angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi;
2. Kegiatan pengoperasian kapal ternak;
3. Angkutan barang di laut (tol laut);
4. Kapal perintis milik negara; dan
5. Kapal rede

From the table and chart above, it can be seen that the assignment segment contributes the largest share to the Company's consolidated revenue, accounting for 82.19% in 2024. The following outlines the business activities and performance achievements of each business segment.

ASSIGNMENT

In fulfilling its role as the archipelago bridge and development agent, PT PELNI (Persero) serves the maritime transportation needs of the entire Indonesian population through the assignments given by the Government of the Republic of Indonesia.

PT PELNI (Persero) receives compensation through the Ministry of Transportation - Directorate General of Sea Transportation for the implementation of Public Service Obligation (PSO) and subsidies based on the assignment contract, which includes:

1. Sea transportation for economy-class passengers;
2. Operation of livestock vessels;
3. Sea freight transportation (Tol Laut);
4. State-owned pioneer vessels; and
5. Redeployment vessels.

Kinerja Operasi Segmen Penugasan

Assignment Segment Operating Performance

No.	Uraian Description	Realisasi 2024 2024 Realization	Realisasi 2023 2023 Realization	Anggaran 2024 2024 Budget	Perubahan (yoy) Change (yoy)	Pemenuhan Anggaran 2024 2024 Budget Realization
Kapal Penumpang Passenger Ship						
1	Unit	26	26	26	0	100,00%
2	Jumlah Voyage Total Voyage	602	631	622	29	96,78%
3	Penumpang (Orang) Passenger (People)	4.372.811	4.330.486	3.970.047	42.325	110,15%
4	Muatan Cargo					
	Barang (Ton/M3) Goods (Ton/M3)	36.188	38.826	30.262	(2.638)	119,58%
	Container (TEUs)	10.688	11.105	13.594	(417)	78,62%

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

OPERATIONAL OVERVIEW BY BUSINESS SEGMENT

Kinerja Operasi Segmen Penugasan						
Assignment Segment Operating Performance						
No.	Uraian Description	Realisasi 2024 2024 Realization	Realisasi 2023 2023 Realization	Anggaran 2024 2024 Budget	Perubahan (yoy) Change (yoy)	Pemenuhan Anggaran 2024 2024 Budget Realization
	Kendaraan (Unit) Vehicles (Unit)	11.146	11.339	15.870	(193)	70,23%
5	Pendapatan PSO (Rp-Juta) PSO Income (Rp-Million)	3.089.915	2.642.581	3.203.971	447.334	96,44%
Kapal Perintis Perintis Ship						
1	Unit	30	48	30	18	100,00%
2	Jumlah Voyage Total Voyage	837	1.146	792	(309)	69,11%
3	Penumpang (Orang) Passenger (People)	722.914	932.203	626.264	(209.289)	115,43%
4	Muatan Cargo					
	Barang (Ton/M3) Goods (Ton/M3)	79.150	100.457	68.530	(21.307)	115,50%
5	Pendapatan Subsidi (Rp-Juta) Subsidy Income (Rp-Million)	408.522	578.850	447.923	(170.328)	91,20%
Kapal Barang Tol Laut Sea Toll Cargo Ship						
1	Unit	9	11	9	(2)	100,00%
2	Jumlah Voyage Total Voyage	120	109	120	11	100,00%
3	Penumpang (Orang) Passenger (People)	-	-	-	-	-
4	Muatan Cargo					
	Container (TEUs)	12.429	13.653	14.958	(1.224)	83,09%
5	Pendapatan Subsidi (Rp-Juta) Subsidy Income (Rp-Million)	172.005	174.249	231.741	(2.244)	74,22%
Kapal Ternak Cattle Ship						
1	Unit	1	1	1	0	100,00%
2	Jumlah Voyage Total Voyage	14	15	14	(1)	100,00%
3	Penumpang (Orang) Passenger (People)	-	-	-	-	-
4	Muatan Cargo					
	Ternak (Ekor) Livestock (Cattle)	4.699	7.308	7.200	-2.609	65,26%



TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

OPERATIONAL OVERVIEW BY BUSINESS SEGMENT

Kinerja Operasi Segmen Penugasan

Assignment Segment Operating Performance

No.	Uraian Description	Realisasi 2024 2024 Realization	Realisasi 2023 2023 Realization	Anggaran 2024 2024 Budget	Perubahan (yoy) Change (yoy)	Pemenuhan Anggaran 2024 2024 Budget Realization
5	Pendapatan Subsidi (Rp-Juta) Subsidy Income (Rp-Million)	10.877	8.593	11.241	2.284	96,76%
Kapal Rede						
1	Unit	16	16	16	0	100,00%
2	Jumlah Voyage Total Voyage	-	-	-	-	-
3	Penumpang (Orang) Passenger (People)	-	-	-	-	-
4	Muatan Cargo	-	-	-	-	-
	Barang (Ton/M3) Goods (Ton/M3)	-	-	-	-	-
5	Pendapatan Subsidi (Rp-Juta) Subsidy Income (Rp-Million)	51.485	41.054	44.000	10.431	117,01%

Kapal Penumpang Kelas Ekonomi

Kegiatan angkutan laut untuk penumpang merupakan jasa transportasi yang disediakan oleh PT PELNI (Persero) melalui pengoperasian armada kapal penumpang, dengan rute perjalanan domestik yang menyinggahi lebih dari 72 pelabuhan di seluruh area Indonesia. Fasilitas dan layanan yang diberikan dirancang secara khusus untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pelanggan, didukung Sumber Daya Manusia yang profesional. Sepanjang tahun 2024, PT PELNI (Persero) mengoperasikan 26 unit kapal penumpang dengan jumlah voyage sebanyak 602 dan berhasil mengangkut 4,37 juta penumpang.

Nilai perjanjian penyelenggaraan kegiatan subsidi pengoperasian angkutan laut untuk penumpang tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.870.509.993.000, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-999.07.1.985120/2024 tanggal 29 Desember 2023, Revisi ke 01 tanggal 16 Desember 2024.

Economy-Class Passenger Vessels

The sea transportation services for passengers are provided by PT PELNI (Persero) through the operation of passenger vessels, with domestic routes connecting over 72 ports across Indonesia. The facilities and services provided are specifically designed to ensure passenger safety and comfort, supported by professional human resources. Throughout 2024, PT PELNI (Persero) operated 26 passenger vessels, completing 602 voyages and successfully transporting 4.37 million passengers.

The value of the subsidy agreement for the operation of passenger sea transportation services in the 2024 fiscal year amounted to Rp2,870,509,993,000, charged to the Budget Implementation Document (DIPA) Number SP DIPA-999.07.1.985120/2024 dated December 29, 2023, with Revision 01 dated December 16, 2024.



TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

OPERATIONAL OVERVIEW BY BUSINESS SEGMENT

Selain itu, Perseroan juga melaksanakan Kegiatan Angkutan Barang di Kapal Penumpang menggunakan kapal penumpang sebagai jasa pengangkutan muatan ke seluruh pelabuhan singgah kapal PT PELNI (Persero). Kegiatan ini mencakup jasa angkut muatan *container* (*dry container dan reefer container*), *general cargo*, *red pack*, serta kendaraan. Pada kegiatan angkut ini, PT PELNI (Persero) menghadirkan total estimasi voyage kurang lebih 14 hari pp, dilengkapi dengan kemudahan transaksi berupa layanan pemesanan melalui aplikasi MYCARGOO!. Sepanjang tahun 2024, kapal penumpang berhasil membawa 36.188 ton/m³ barang, 10.688 TEUs *container* dan 11.146 unit kendaraan.

Kapal Perintis

Sepanjang tahun 2024, PT PELNI (Persero) mengoperasikan 30 unit kapal perintis dengan jumlah voyage sebanyak 837. Jumlah penumpang yang berhasil diangkut adalah sebanyak 722.914 orang sedangkan total muatan barang yang berhasil dibawa adalah sebanyak 79.150 ton/m³.

Pendapatan penugasan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis milik negara didasarkan pada Perjanjian Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara Tahun Anggaran 2024 Nomor 01/KTRK/PRTS/PELNI/XII/2023 dan Nomor: TH.12.29-02/KNP/2023 tanggal 29 Desember 2023, yang di amandemen sebanyak 2 kali dengan Nomor: ADD.03/PRTS/PELNI/LALA-2024 pada tanggal 13 November 2024.

Nilai perjanjian penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis milik negara tahun anggaran 2024 sebesar Rp439.208.848.000 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-022.04.1.439454/2024 tanggal 24 November 2023 Revisi ke 12 tanggal 3 November 2024.

Kapal Barang Tol Laut

Jasa angkutan barang di laut dihadirkan sebagai upaya Perseroan bersama Pemerintah dalam menghadirkan konektivitas laut yang efektif secara rutin dan terjadwal, dari wilayah barat hingga timur Indonesia. Tol laut sendiri

Additionally, the Company also carried out Cargo Transportation Services on Passenger Vessels, using passenger ships to transport cargo to all ports where PT PELNI (Persero) vessels dock. This service includes the transportation of containerized goods (dry containers and reefer containers), general cargo, red pack, and vehicles. For these services, PT PELNI (Persero) operates an estimated 14-day round-trip voyage, offering transaction convenience through the MYCARGOO! app. Throughout 2024, passenger vessels successfully carried 36,188 tons/m³ of goods, 10,688 TEUs of containers, and 11,146 units of vehicles.

Pioneer Vessels

Throughout 2024, PT PT PELNI (Persero) (Persero) operated 30 pioneer vessels, completing 837 voyages. The total number of passengers successfully transported was 722,914, while the total cargo carried amounted to 79,150 tons/m³.

The revenue for the public service obligation of the state-owned pioneer vessels is based on the Public Service Obligation Agreement for the Operation of State-Owned Pioneer Vessels for the 2024 Fiscal Year, Agreement Numbers 01/KTRK/PRTS/PELNI/XII/2023 and TH.12.29-02/KNP/2023 dated December 29, 2023, which was amended twice with Agreement Number ADD.03/PRTS/PELNI/LALA-2024 on November 13, 2024.

The value of the agreement for the operation of public service pioneer vessels for the 2024 fiscal year amounts to Rp439,208,848,000, charged to the Budget Implementation Document (DIPA) Number SP DIPA-022.04.1.439454/2024 dated November 24, 2023, with Revision 12 dated November 3, 2024.

Sea Freight Tol Laut Vessels

The sea freight transportation service is presented as an effort by the Company, together with the Government, to provide effective and regularly scheduled maritime connectivity from the western to the eastern regions



TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

OPERATIONAL OVERVIEW BY BUSINESS SEGMENT

merupakan program Pemerintah yang diterapkan dengan maksud dan tujuan untuk menjangkau dan mendistribusikan muatan logistik ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan, serta untuk menjamin ketersediaan barang sehingga mengurangi disparitas harga, sebagai dukungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di tahun 2024, kapal barang tol laut yang beroperasi sebanyak 9 unit dengan jumlah *voyage* sebanyak 120. Kapal barang tol laut juga berhasil membawa muatan container sebanyak 12.429 TEUs.

Nilai perjanjian penyelenggaraan kegiatan subsidi pengoperasian Angkutan Barang di Laut (Tol Laut) tahun anggaran 2024 sebesar sebesar Rp214.300.772.066 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-022.04.1.439454/2024 tanggal 24 November 2023 Revisi ke 11 tanggal 22 Agustus 2024.

Kapal Ternak

Kegiatan Pengoperasian Kapal Ternak Pekerjaan penyelenggaraan kegiatan subsidi pengoperasian kapal ternak tahun anggaran 2024 dilakukan berdasarkan Perjanjian Penyelenggaraan Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak Tahun Anggaran 2024 Nomor: 01/SATKERLALA/RT-1/XII/2023 dan Nomor: TH.12.29-05/KNP/2023 tanggal 29 Desember 2023, yang di amandemen sebanyak 3 kali dengan Nomor: ADD.03/RT-1/LALA-2024 pada tanggal 30 September 2024.

Lama waktu pelayaran kapal maksimal dalam 1 (satu) *round voyage* sesuai dengan trayek yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, terhitung dimulai sejak kapal tiba di pelabuhan pangkal (*home base*) sampai dengan kapal tiba kembali di pelabuhan pangkal, setelah berlayar menurut urutan pelabuhan yang telah ditetapkan.

Kapal yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan subsidi tahun anggaran 2024 untuk pengoperasian kapal ternak adalah KM. Camara Nusantara 1, tanpa menggunakan kapal pengganti kode Trayek: RT-1,

of Indonesia. The Tol Laut program is a government initiative aimed at reaching and distributing logistics cargo to underdeveloped, remote, outer, and border areas, while ensuring the availability of goods to reduce price disparities, as part of the efforts to improve the welfare of the community. In 2024, there were 9 Tol Laut freight vessels in operation, completing 120 voyages. These vessels successfully transported a total of 12,429 TEUs of containerized cargo.

The value of the agreement for the subsidy operation of Sea Freight Transportation (Tol Laut) for the 2024 fiscal year amounts to Rp214,300,772,066, charged to the Budget Implementation Document (DIPA) Number SP DIPA-022.04.1.439454/2024 dated November 24, 2023, with Revision 11 dated August 22, 2024.

Livestock Vessel Operations

The operation of livestock vessels for the 2024 fiscal year is conducted based on the Subsidy Agreement for Livestock Vessel Operations for the 2024 Fiscal Year, Agreement Numbers: 01/SATKERLALA/RT-1/XII/2023 and TH.12.29-05/KNP/2023 dated December 29, 2023, which has been amended three times, with Agreement Number ADD.03/RT-1/LALA-2024 dated September 30, 2024.

The maximum sailing duration for the vessel in one round voyage is in accordance with the route established in the Decree of the Director-General of Sea Transportation, starting from when the ship arrives at the home base port until it returns to the home port after completing the scheduled port visits.

The vessel used for the subsidy operation in the 2024 fiscal year for livestock transportation is the KM. Camara Nusantara 1, which does not utilize a substitute vessel for the route code: RT-1, which covers the following



TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

OPERATIONAL OVERVIEW BY BUSINESS SEGMENT

yaitu Kupang - 201 - Waingapu - 867 - Tanjung Priok/ Patimban - 1179/1005 - Kupang. Waktu pelaksanaan kegiatan KM. Camara Nusantara 1 dengan target frekuensi per tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Nilai perjanjian penyelenggaraan kegiatan subsidi pengoperasian Kapal Ternak tahun anggaran 2024 sebesar Rp11,638,395,002 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-022.04.1.439454/2024 tanggal 24 November 2023.

PT PELNI (Persero) mengoperasikan 1 (satu) armada Kapal Ternak yaitu KM Camara Nusantara I dengan rute Kupang - Waingapu - Tanjung Priok - Cirebon - Kupang. Kehadiran Kapal Ternak bertujuan untuk membantu Pemerintah dalam menekan harga daging dan menyejahterakan peternak di sentra peternakan sapi dalam negeri. Jumlah ternak yang berhasil diangkut sepanjang 2024 adalah 4.699 ekor.

Kapal Rede

Sepanjang tahun 2024, PT PELNI (Persero) mengoperasikan 16 unit kapal rede. Nilai perjanjian penyelenggaraan kegiatan pelayanan angkutan perairan pelabuhan dengan menggunakan Kapal Milik Negara (Kapal Rede) tahun anggaran 2024 adalah sejumlah Rp52.410.233.000 yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat Nomor SP-DIPA-022.04.1.439454/2024 Tanggal 24 November 2023 Revisi ke 12 tanggal 3 November 2024.

route: Kupang - 201 - Waingapu - 867 - Tanjung Priok/ Patimban - 1179/1005 - Kupang. The operation of KM. Camara Nusantara 1 is scheduled to run from January 1, 2024, to December 31, 2024.

The value of the agreement for the subsidy operation of the livestock vessel for the 2024 fiscal year amounts to Rp11,638,395,002, which is charged to the Budget Implementation Document (DIPA) Number SP DIPA-022.04.1.439454/2024 dated November 24, 2023.

PT PELNI (Persero) operates one livestock vessel, KM. Camara Nusantara I, which follows the Kupang - Waingapu - Tanjung Priok - Cirebon - Kupang route. The presence of the livestock vessel is aimed at supporting the Government's efforts to stabilize meat prices and improve the welfare of cattle ranchers in domestic cattle farming areas. A total of 4,699 cattle were successfully transported throughout 2024.

Rede Vessel Operations

Throughout 2024, PT PELNI (Persero) operated 16 rede vessels. The value of the agreement for the provision of port water transport services using state-owned vessels (Rede vessels) for the 2024 fiscal year is Rp52,410,233,000. This amount is charged to the Budget Implementation Document (DIPA) of the Marine Traffic Safety Improvement Unit, under Agreement Number SP-DIPA-022.04.1.439454/2024 dated November 24, 2023, with Revision 12 dated November 3, 2024.

Kinerja Segment Penugasan

Assignment Segment Performance

Uraian Description	2024 (Rp-Juta) (Rp-million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024		↑↓
			Nominal (Rp-Juta) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Pendapatan Usaha Bersih Net Operating Revenue	5.076.941	4.812.113	264.828	5,50	↑



TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

OPERATIONAL OVERVIEW BY BUSINESS SEGMENT

Kinerja Segmen Penugasan Assignment Segment Performance

Uraian Description	2024 (Rp-Juta) (Rp-million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024		↑↓
			Nominal (Rp-Juta) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Beban Pokok Usaha Revenue Operating Expenses	(4.358.356)	(4.029.309)	(329.047)	8,17	↑
Laba Bruto Gross Profit	718.585	782.804	(64.219)	(8,20)	↓
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	385.225	438.784	(53.559)	(12,21)	↓
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	324.302	381.039	(56.737)	(14,89)	↓

Segmen usaha penugasan menghasilkan pendapatan usaha bersih sebesar Rp5,08 triliun di tahun 2024. Nilai ini mengalami peningkatan 5,50% atau setara dengan Rp264,83 miliar dari tahun 2023 yang sebesar Rp4,81 triliun. Disamping itu, laba kotor yang berhasil dicatatkan sebesar Rp718,59 miliar, menurun 8,20% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp782,80 miliar. Segmen usaha penugasan juga mampu mencatatkan laba tahun berjalan sebesar Rp324,20 miliar, nilai ini juga mengalami penurunan dari tahun 2023 yang sebesar Rp381,04 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan pada beban pokok usaha.

The assignment segment generated a net operating income of Rp5.08 trillion in 2024. This figure represents an increase of 5.50%, or Rp264.83 billion, compared to Rp4.81 trillion in 2023. Additionally, the gross profit recorded was Rp718.59 billion, reflecting a decline of 8.20% from the previous year's figure of Rp782.80 billion. The assignment segment was also able to record a profit for the year of Rp324.20 billion, which also represents a decrease from Rp381.04 billion in 2023. This decline was mainly due to an increase in the cost of goods sold.

NON-PENUGASAN

Pendapatan segmen usaha non-penugasan merupakan pendapatan yang diterima selain daripada kompensasi yang diterima dari Pemerintah Republik Indonesia Perhubungan - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atas penyelenggaraan penugasan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation/PSO*) dan subsidi, dimana Segmen Non-Penugasan, meliputi:

1. Usaha Perkapalan Non-Penugasan

- Tambang muatan
Usaha tambang muatan melaksanakan kegiatan angkutan berupa muatan barang tertentu sesuai spesifikasi yang ditentukan, yang

NON-ASSIGNMENT

The revenue from the non-assignment business segment consists of income received aside from the compensation from the Government of the Republic of Indonesia, Ministry of Transportation - Directorate General of Sea Transportation, for the implementation of Public Service Obligation (PSO) and subsidies. The Non-Assignment Segment includes:

1. Non-Assignment Shipping Business

- Cargo Charter
The cargo charter business involves the transportation of specific types of goods according to designated specifications,



TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

OPERATIONAL OVERVIEW BY BUSINESS SEGMENT

dikelola oleh PT PELNI (Persero) Pusat dengan pendapatan tambang muatan diakui sesuai tingkat penyelesaian jasa atas dasar daftar uang tambang daftar tambang muatan (B60). Tambang muatan terdiri dari Tambang Muatan Palka, Muatan *Dry Container* dan Muatan *Reefer Container*.

Usaha tambang muatan membukukan pendapatan sebesar Rp339,76 miliar di tahun 2024, mengalami penurunan dari realisasi tahun 2023 yang sebesar Rp353,75 miliar.

- Tambang Pasasi**
 Tambang Pasasi melaksanakan kegiatan angkutan berupa muatan barang tertentu sesuai spesifikasi yang ditentukan, yang dikelola oleh PT PELNI (Persero) Pusat dengan pendapatan tambang pasasi sesuai tingkat penyelesaian jasa atas dasar daftar uang tambang pasasi (B60A). Tambang Pasasi terdiri dari Tambang pasasi Kelas I, Kelas II, Kelas III, Kelas IV, dan Pasasi Kelas Wisata dan Tambang Pasasi Kelas Ekonomi.

Sepanjang tahun 2024, pendapatan yang diperoleh Perseroan dari usaha tambang pasasi adalah sebesar Rp1,48 triliun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,35 triliun.

- Sewa *Charter***
 Usaha *Charter* kapal merupakan salah satu usaha yang ditawarkan oleh Perseroan. Penumpang dapat memilih rute dan jenis kapal yang diinginkan sehingga dapat memberikan kesan tersendiri serta eksklusifitas bagi penumpangnya.

Sepanjang tahun 2024, usaha *charter* kapal mencatatkan pendapatan sebesar Rp15,67 miliar, nilai ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,53 miliar.

managed by PT PELNI (Persero) Headquarters. The revenue from cargo charter is recognized based on the completion level of services according to the cargo charter list (B60). Cargo charter includes Palka Cargo Charter, Dry Container Cargo, and Reefer Container Cargo.

The cargo charter business recorded a revenue of Rp339.76 billion in 2024, experiencing a decline from Rp353.75 billion in 2023.

- Passenger Charter**
 The passenger cargo charter business involves the transport of specific types of cargo in accordance with predetermined specifications, managed centrally by PT PELNI (Persero) Headquarters. Revenue from this business is recognized based on the percentage of service completion, as stipulated in the passenger cargo charter fare list (B60A). The passenger cargo charter is categorized into Class I, Class II, Class III, Class IV, Tourism Class, and Economy Class.

Throughout 2024, the passenger charter business generated a revenue of Rp1.48 trillion, showing an increase from Rp1.35 trillion in the previous year.

- Charter Rental**
 The charter rental business offers ships for rent, allowing passengers to choose the route and type of vessel, thus providing a personalized and exclusive experience.

Throughout 2024, the ship charter business recorded a revenue of Rp15.67 billion, a significant increase from Rp2.53 billion in the previous year.



TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

OPERATIONAL OVERVIEW BY BUSINESS SEGMENT

2. Usaha Sampingan

- Keagenan

Usaha keagenan merupakan salah satu usaha andalan PT PELNI (Persero) yang dimulai sejak tahun 1960 yang meliputi jasa keagenan kapal-kapal baik domestik maupun luar negeri. Jenis jasa yang dilakukan untuk mendukung segmen usaha ini meliputi *Full Port Agency*, *Husbandry Services*, serta *Other Services*. Keagenan kapal yang banyak diageni oleh PT PELNI (Persero) merupakan kapal barang lokal dan kapal barang dari luar negeri. Saat ini, PT PELNI (Persero) melayani keagenan kapal terutama pada keagenan kapal lokal ataupun kapal barang dari luar negeri, dikarenakan kapal *cruise* belum ada jadwal beroperasi ke Indonesia (hanya ada kegiatan kapal wisata lokal seperti pinisi dan kapal wisata kecil seperti *yacht*).

Realisasi produksi Tahun 2024 adalah sebesar 1.979 *call* kapal mencapai 94,24% dari target Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Sedangkan pencapaian penghasilan Tahun 2024 *Audited* sebesar Rp7,02 miliar nilai ini mencapai 93,51% dari target Tahun 2024.

- Pengusahaan Aset

Pengusahaan Aset adalah Departement yang mengelola aset berupa tanah dan bangunan yang ada di bawah Divisi Umum. Dimana Dept. Pengusahaan Aset ini berfokus untuk mengoptimalkan aset tanah dan bangunan milik PT PELNI (Persero) yang ada di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk membantu meningkatkan penghasilan perusahaan selain dari bisnis perkapalan.

Sepanjang tahun 2024 usaha pengusaan aset membukakan pendapatan sebesar Rp8,65 miliar meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp7,98 miliar.

2. Ancillary Business Activities

- Shipping Agency

The shipping agency business has been one of PT PELNI (Persero) flagship operations since the 1960s, providing agency services for both domestic and international vessels. Services offered under this segment include Full Port Agency, Husbandry Services, and Other Services. The majority of vessels currently handled by PT PELNI (Persero) are domestic cargo ships and international cargo vessels, as cruise ships are not operating routes to Indonesia at present—only local tourism vessels such as pinisi and small yachts are active.

In 2024, PT PELNI (Persero) handled 1,979 vessel calls, achieving 94.24% of the year's target. Audited revenue for the year reached Rp7.02 billion, representing 93.51% of the 2024 revenue target.

- Asset Utilization

Asset Commercialization is a department under the General Affairs Division responsible for managing land and building assets. This department focuses on optimizing PT PELNI (Persero) land and building assets located throughout Indonesia, with the goal of contributing to the Company's revenue beyond its core shipping business.

Throughout 2024, the asset utilization business recorded revenue of Rp8.65 billion, an increase from Rp7.98 billion in the previous year.



TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

OPERATIONAL OVERVIEW BY BUSINESS SEGMENT

- **MICE & Life Style**

Usaha *lifestyle* merupakan salah satu produk pengembangan usaha komersial dari PT PELNI (Persero) yang meliputi *Study on Board*, *Tour on Board*, *MICE on Board* dan *Virtual on Board*. Salah satu jenis layanan yang disediakan oleh Perusahaan adalah paket Kapal Phinisi yang menyediakan paket-paket ke berbagai destinasi di Labuan Bajo.

Produksi lifestyle (MICE, Wisata Bahari & City Tour) Tahun 2024 adalah sebanyak 58 kegiatan. Sedangkan produksi layanan tambahan (add on) Tahun 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 70.335 orang.

3. Usaha Penunjang

- **Galangan Kapal PT PELNI (Persero)**

Usaha perbengkelan adalah jasa pemeliharaan kapal, reparasi kapal yang dilakukan oleh *Strategic Business Unit* PT PELNI (Persero) yakni Galangan "Pelni Surya" yang beroperasi sejak 20 Mei 1996 dan mengerjakan kapal PT PELNI (Persero) tipe 500, yaitu KM Sangiang, KM Pangrango, KM Wilis. PT PELNI (Persero) *Maintenance Facilities* (PMF), proyeksi strategis yang dapat menjamin *space dock* dan perbaikan bagi seluruh kapal (termasuk kapal besar) yang dioperasikan oleh PT PELNI (Persero).

Sepanjang tahun 2024, Galangan Surya Surabaya membukukan pendapatan sebesar Rp23,08 miliar meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp22,74 miliar.

- **Hotel Bahtera Cipayung**

Usaha perhotelan adalah sewa ruangan wisma yang dilakukan oleh *Strategic Business Unit* PT PELNI (Persero) yakni Hotel Bahtera Hotel dengan fasilitas untuk acara rapat dan pusat pelatihan dilengkapi dengan fasilitas ruang rapat berkapasitas lebih dari 200 orang dan

- **MICE & Lifestyle**

The lifestyle business represents one of PT PELNI (Persero) commercial development initiatives, encompassing services such as Study on Board, Tour on Board, MICE on Board, and Virtual on Board. One of the flagship offerings is the Phinisi Boat Package, which provides tailored tourism experiences to various destinations, particularly in Labuan Bajo.

In 2024, the lifestyle segment (MICE, Marine Tourism, and City Tours) hosted 58 events. Meanwhile, add-on services attracted a total of 70,335 participants throughout the year.

3. Supporting Business Activities

- **PT PELNI (Persero) Shipyard**

The shipyard business encompasses ship maintenance and repair services provided by PT PELNI (Persero) Strategic Business Unit, Galangan "Pelni Surya." Operational since May 20, 1996, this unit services PT PELNI (Persero) 500-type vessels, including KM Sangiang, KM Pangrango, and KM Wilis. The PT PELNI (Persero) Maintenance Facilities (PMF) initiative is a strategic projection designed to ensure drydock availability and comprehensive repair services for all vessels, including large-scale ships operated by PT PELNI (Persero).

Throughout 2024, Galangan Surya Surabaya generated revenue of Rp23.08 billion, an increase from Rp22.74 billion in the previous year.

- **Hotel Bahtera Cipayung**

The hospitality business involves the rental of accommodation and meeting rooms at Hotel Bahtera, managed by PT PELNI (Persero) Strategic Business Unit. The hotel offers facilities for meetings and training sessions, with conference rooms accommodating over 200



TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

OPERATIONAL OVERVIEW BY BUSINESS SEGMENT

fasilitas penunjang lainnya.

- Sepanjang tahun 2024, Hotel Bahtera mampu membukukan pendapatan sebesar Rp5,38 miliar mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp5,25 miliar.

4. Usaha Anak Perusahaan

Pendapatan yang dihasilkan dari usaha anak Perusahaan PT PBM Sarana Bandar Nasional di tahun 2024 adalah sebesar Rp511,60 miliar sedangkan PT Pelita Indonesia Djaya mampu menghasilkan pendapatan sebesar Rp661,69 miliar.

participants and various supporting amenities.

- In 2024, Hotel Bahtera recorded revenue of Rp5.38 billion, up from Rp5.25 billion in the previous year.

4. Subsidiary Businesses

The revenue generated from the subsidiary of PT PBM Sarana Bandar Nasional in 2024 was Rp511.60 billion, while PT Pelita Indonesia Djaya was able to generate revenue of Rp661.69 billion.

Kinerja Segmen Non-Penugasan Non-Assignment Segment Performance

Uraian Description	2024 (Rp-Juta) (Rp-million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024	
			Nominal (Rp-Juta) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Pendapatan Usaha Bersih Net Operating Revenue	1.100.115	954.505	145.610	15,26
Beban Pokok Usaha Revenue Operating Expenses	(771.655)	(864.749)	93.094	(10,77)
Laba Bruto Gross Profit	328.460	89.756	238.704	265,95
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	(191.468)	(319.668)	128.200	(40,10)
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	(130.051)	(179.407)	49.356	(27,51)

Segmen usaha non-penugasan mencatat pendapatan usaha bersih sebesar Rp1,10 triliun di tahun 2024. Nilai ini mengalami peningkatan 51,26% atau setara dengan Rp145,61 miliar dari tahun 2023 yang sebesar Rp954,50 miliar. Disamping itu, laba kotor yang berhasil dicatatkan sebesar Rp328,46 miliar, meningkat 265,95% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp89,76 miliar. Segmen usaha non-penugasan mencatat adanya rugi tahun berjalan sebesar Rp130,05 miliar.

The Non-Assignment Business Segment in 2024, the Non-Assignment Business Segment recorded a net operating revenue of Rp1.10 trillion, reflecting a significant increase of 51.26% or equivalent to Rp145.61 billion compared to Rp954.50 billion in 2023. The gross profit also rose sharply to Rp28.46 billion, marking a 265.95% increase from the previous year's Rp89.76 billion. However, the segment recorded a net loss for the year amounting to IDR130.05 billion.



ASPEK PEMASARAN MARKETING ASPECTS

STRATEGI PEMASARAN

Pada 2024, PT PELNI (Persero) melakukan penjualan antara lain melalui sejumlah channel penjualan yang terbagi dalam kategori Mitra B to B (*Online*) serta Agen Penjualan (*Offline*). Khusus pada channel Agen Penjualan, Perseroan bekerja sama dengan 185 travel agent serta 11 mitra penjualan pada 2024, dengan perincian sebagai berikut:

Mitra Penjualan PT PELNI (Persero) 2024

1. PT Anugerah Tetap Abadi
2. PT Bimasakti Multi Sinergi
3. PT Darmawisata Indonesia
4. PT Easybook Teknologi Indonesia
5. PT Indomarco Prismatama
6. Medussa Multi Business Center
7. PT Sumber Alfaria Trijaya
8. PT Teknologi Layanan Pelanggan
9. PT Topindo Solusi Komunika
10. PT Adya Tours
11. PT Versa Technology

Travel Agent Penjualan PT PELNI (Persero) 2024

1. Cabang 144 (Medan/Belawan): 11 travel agent.
2. Cabang 251 (Tanjung Pinang): 6 travel agent.
3. Cabang 256 (Pulau Batam): 6 travel agent.
4. Cabang 266 (Tanjung Balai Karimun): 4 travel agent.
5. Cabang 335 (Pangkal Pinang/Muntok): 2 travel agent.
6. Cabang 431 (Tanjung Priok): 7 travel agent.
7. Cabang 494 (Semarang): 8 travel agent.
8. Cabang 563 (Surabaya): 17 travel agent.
9. Cabang 613 (Denpasar): 1 travel agent.
10. Cabang 655 (Bima): 4 travel agent.
11. Cabang 662 (Labuan Bajo): 2 travel agent.
12. Cabang 681 (Kupang): 2 travel agent.
13. Cabang 683 (Maumere): 3 travel agent.
14. Cabang 685 (Waingapu): 2 travel agent.
15. Cabang 687 (Larantuka): 4 travel agent.
16. Cabang 714 (Pontianak): 3 travel agent.
17. Cabang 746 (Sampit): 4 travel agent.
18. Cabang 747 (Kumai): 5 travel agent.

MARKETING STRATEGY

In 2024, PT PELNI (Persero) made sales through a number of sales channels divided into B-to-B partners (*Online*) and Sales Agents (*Offline*) categories. Specifically, for the Sales Agent channel, the Company worked with 185 travel agents and 11 sales partners in 2024, with the following details:

Sales Partners of PT PELNI (Persero) in 2024

1. PT Anugerah Tetap Abadi
2. PT Bimasakti Multi Sinergi
3. PT Darmawisata Indonesia
4. PT Easybook Teknologi Indonesia
5. PT Indomarco Prismatama
6. Medussa Multi Business Center
7. PT Sumber Alfaria Trijaya
8. PT Teknologi Layanan Pelanggan
9. PT Topindo Solusi Komunika
10. PT Adya Tours
11. PT Versa Technology

Sales Travel Agent of PT PELNI (Persero) in 2024

1. 144 Branch (Medan/Belawan): 11 travel agents.
2. 251 Branch (Tanjung Pinang): 6 travel agents.
3. 256 Branch (Batam Island): 6 travel agents.
4. 266 Branch (Tanjung Balai Karimun): 4 travel agents.
5. 335 Branch (Pangkal Pinang/Muntok): 2 travel agents.
6. 431 Branch (Tanjung Priok): 7 travel agents.
7. 494 Branch (Semarang): 8 travel agents.
8. 563 Branch (Surabaya): 17 travel agents.
9. 613 Branch (Denpasar): 1 travel agent.
10. 655 Branch (Bima): 4 travel agents.
11. 662 Branch (Labuan Bajo): 2 travel agents.
12. 681 Branch (Kupang): 2 travel agents.
13. 683 Branch (Maumere): 3 travel agents.
14. 685 Branch (Waingapu): 2 travel agents.
15. 687 Branch (Larantuka): 4 travel agents.
16. 714 Branch (Pontianak): 3 travel agents.
17. 746 Branch (Sampit): 4 travel agents.
18. 747 Branch (Kumai): 5 travel agents.

ASPEK PEMASARAN MARKETING ASPECTS

19. Cabang 773 (Kotabaru): 4 travel agent.
20. Cabang 803 (Balikpapan): 16 travel agent.
21. Cabang 805 (Samarinda): 2 travel agent.
22. Cabang 808 (Tarakan): 7 travel agent.
23. Cabang 809 (Nunukan): 4 travel agent.
24. Cabang 835 (Bitung): 1 travel agent.
25. Cabang 863 (Palu): 3 travel agent.
26. Cabang 868 (Luwuk): 1 travel agent.
27. Cabang 892 (Pare-Pare): 8 travel agent.
28. Cabang 893 (Makassar): 16 travel agent.
29. Cabang 921 (Baubau): 12 travel agent.
30. Cabang 922 (Kendari): 1 travel agent.
31. Cabang 946 (Ambon): 5 travel agent.
32. Cabang 951 (Namlea): 1 travel agent.
33. Cabang 971 (Sorong): 3 travel agent.
34. Cabang 972 (Manokwari): 2 travel agent.
35. Cabang 974 (Jayapura): 5 travel agent.
36. Cabang 976 (Fak-Fak): 1 travel agent.
37. Cabang 982 (Nabire): 1 travel agent.
38. Cabang 983 (Timika): 1 travel agent.

Adapun, strategi pemasaran yang diterapkan PT PELNI (Persero) adalah "Marketing Mix 8P" (*Product, Partnership, People, Packaging, Programming, Place, Promotion dan Pricing*), sengan penjelasan sebagai berikut:

- Kerja sama pemasaran dengan *tour and travel online* serta channeling penjualan *online*.
- Implementasi *e-ticketing add on*.
- Survei kepuasan pelanggan.
- Pengelolaan sosial media melalui *marketing agency*.
- Kajian *market research* berbasis permintaan *customer* dan melalui *benchmarking*.
- Mengembangkan destinasi wisata bahari dan bekerja sama dengan tour operator asing untuk *domestic selling*.
- Kerja sama angkutan barang dan penumpang melalui sinergi BUMN, BUMD, UMKM, dan swasta.
- Mengadakan *Shipper & Sales Gathering*.
- Kerja sama *advertising* dengan agensi iklan.
- Pemasaran sewa ruang di kapal.

19. 773 Branch (Kotabaru): 4 travel agents.
20. 803 Branch (Balikpapan): 16 travel agents.
21. 805 Branch (Samarinda): 2 travel agents.
22. 808 Branch (Tarakan): 7 travel agents.
23. 809 Branch (Nunukan): 4 travel agents.
24. 835 Branch (Bitung): 1 travel agent.
25. 863 Branch (Palu): 3 travel agents.
26. 868 Branch (Luwuk): 1 travel agent.
27. 892 Branch (Pare-Pare): 8 travel agents.
28. 893 Branch (Makassar): 16 travel agents.
29. 921 Branch (Baubau): 12 travel agents.
30. 922 Branch (Kendari): 1 travel agent.
31. 946 Branch (Ambon): 5 travel agents.
32. 951 Branch (Namlea): 1 travel agent.
33. 971 Branch (Sorong): 3 travel agents.
34. 972 Branch (Manokwari): 2 travel agents.
35. 974 Branch (Jayapura): 5 travel agents.
36. 976 Branch (Fak-Fak): 1 travel agent.
37. 982 Branch (Nabire): 1 travel agent.
38. 983 Branch (Timika): 1 travel agent.

The marketing strategy implemented by PT PELNI (Persero) are "Marketing Mix 8P" (*Product, Partnership, People, Packaging, Programming, Place, Promotion dan Pricing*); With the following details:

- Marketing cooperation with online tour and travel as well as online sales channeling.
- Implementation of add on e-ticketing.
- Customer satisfaction surveys.
- Social media management via marketing agency.
- Market research development based on customer's request and through benchmarking.
- Development of marine tourism and cooperation with foreign tour operators for domestic selling.
- Cooperation of cargo transport through SOE, Regional-Owned Enterprises, MSMEs, and private companies.
- Holding of Shipper & Sales Gathering.
- Advertising cooperation with advertising agencies.
- Marketing of room renting on the ship.



ASPEK PEMASARAN

MARKETING ASPECTS

PANGSA PASAR

Pangsa pasar PT PELNI (Persero) didominasi oleh karakter penumpang menengah ke bawah dengan barang bawaan (kargo) yang signifikan serta penumpang yang tinggal atau menuju daerah tanpa adanya layanan transportasi udara dan juga untuk ruas jarak pendek-menengah. Pangsa pasar Perseroan yang lain adalah *shipper* yang membutuhkan alat angkut terjadwal.

MARKET SHARE

Market share of PT PELNI (Persero) is dominated by middlelow passenger with significant cargo as well as passengers who stay or depart to several areas without airplane transportation service. The other market served by the Company is shipper that needs scheduled transportation. The Company's other market share is shipper that needs scheduled means of transportation.

Tahun Year 2022	2024
Penumpang Pelayaran Domestik Domestic Cruisers	25,9 juta million
Penumpang PT PELNI (Persero) PT PELNI (Persero) Passengers	4,4 juta million
Pangsa Pasar PT PELNI (Persero) (Pelayaran) PT PELNI (Persero) Market Share (Shipping)	16,99%

Sumber: Badan Pusat Statistik
Source: Statistics Indonesia

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

RESEARCH AND DEVELPOMENT

Sepanjang tahun 2024 PT PELNI (Persero) melakukan kajian internal dan eksternal mengenai :

- Kelayakan investasi pengadaan kapal Tongkang/*Tugboat* yang telah disusun dan disetujui oleh Direksi PT PELNI (Persero) dan kemudian telah dilakukan juga studi market untuk kapal Tongkang/*Tugboat* tersebut.
- Proses pengadaan Kapal RoRo sesuai dengan arahan Kementerian BUMN yaitu spesifikasi kapal yang harus mempertimbangkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Throughout 2024, PT PELNI (Persero) conducted both internal and external assessments regarding:

- The feasibility of investing in the procurement of Barge/*Tugboat* vessels, which was prepared and approved by the Board of Directors of PT PELNI (Persero), followed by a market study for the Barge/*Tugboat* vessels.
- The procurement process of RoRo vessels in accordance with the directives of the Ministry of State-Owned Enterprises, which requires the vessel specifications to take into account the Domestic Component Level (TKDN).



TINJAUAN KEUANGAN FINANCIAL REVIEW

Informasi tinjauan keuangan dalam Laporan Tahunan ini mengacu kepada Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Entitas Anak ("Grup") untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik & Indra sesuai dengan Laporan Audit 00126/2.0999/AU.1/06/0139-4/1/IV/2025 tanggal 8 April 2025, dengan opini disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The financial review information presented in this Annual Report refers to the Consolidated Financial Statements of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and Subsidiaries ("the Group") for the years ended December 31, 2024 and 2023, which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Djoko, Sidik & Indra in accordance with Audit Report 00126/2.0999/AU.1/06/0139-4/1/IV/2025 dated April 8, 2025. The audit opinion stated that the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2024, as well as its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, are fairly presented, in all material respects, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Kinerja Posisi Keuangan Secara Keseluruhan, Periode 2023-2024 Overall Financial Position Performance, Period 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-Juta) (Rp-million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024		↑↓
			Nominal (Rp-Juta) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Aset Assets					
Jumlah Aset Total Assets	10.083.888	8.036.032	2.047.856	25,48%	↑
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity					
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.560.838	1.212.291	348.547	28,75%	↑
Jumlah Ekuitas Total Equity	8.523.050	6.823.741	1.699.309	24,90%	↑
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	10.083.888	8.036.032	2.047.856	25,48%	↑

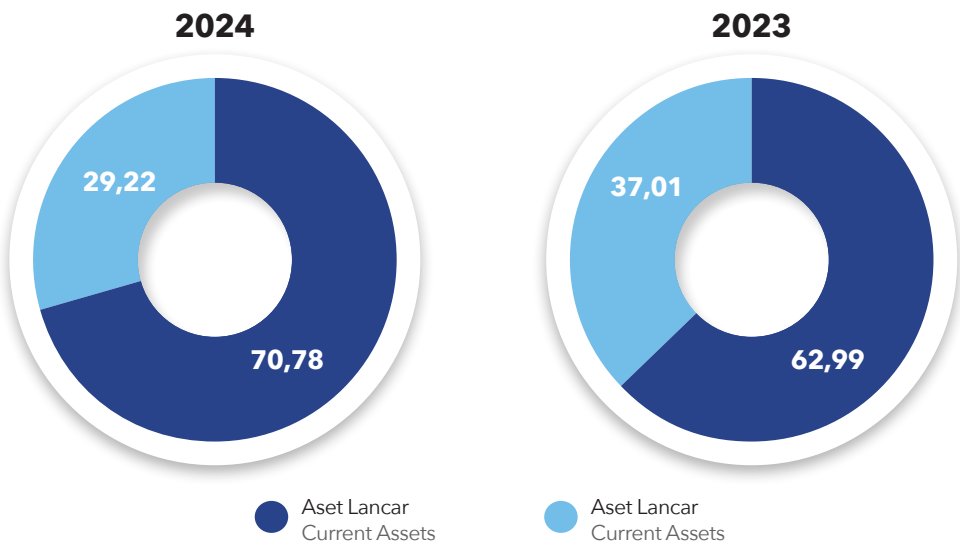


TINJAUAN KEUANGAN
FINANCIAL REVIEW

ASET KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED ASSETS

Pendapatan Revenue	2024		2023		Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024		↑↓
	(Rp-ribu) Total (Rpthousand)	Kontribusi (%) Contribution (%)	(Rp-ribu) Total (Rpthousand)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp-ribu) Nominal (Rp-thousand)	Persentase (%) Percentage (%)	
Aset Lancar Current Assets	7.137.809	70,78	5.062.044	62,99	2.075.765	41,01	↑
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	2.946.079	29,22	2.973.988	37,01	(27.909)	(0,94)	↓
Jumlah Aset Total Assets	10.083.888	100,00	8.036.032	100,00	2.047.856	25,48	↑



Jumlah aset Perseroan pada 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp10,08 triliun, meningkat 25,48% atau senilai Rp2,05 triliun dari tahun 2023 yang sebesar Rp8,04 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada Aset Lancar sebesar 41,01% atau senilai Rp2,08 triliun. Sedangkan jumlah Aset Tidak Lancar mengalami penurunan sebesar 0,94% atau senilai Rp27,91 miliar sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

As of December 31, 2024, the Company's total assets stood at Rp10.08 trillion, marking an increase of 25.48% or Rp2.05 trillion from Rp8.04 trillion in 2023. This growth was primarily driven by a 41.01% increase in Current Assets, equivalent to Rp2.08 trillion. Meanwhile, Non-Current Assets recorded a slight decline of 0.94% or Rp27.91 billion, as further detailed below.



TINJAUAN KEUANGAN

FINANCIAL REVIEW

Aset Lancar Konsolidasian

Consolidated Current Assets

Uraian Description	2024 (Rp-Juta) (Rp-million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024		↑↓
			Nominal (Rp-Juta) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	4.114.739	3.494.572	620.167	17,75	↑
Piutang Usaha Trade Receivables	125.898	118.838	7.060	5,94	↑
Aset Keuangan Lancar Lainnya Other Current Financial Assets	2.053.078	811.020	1.242.058	153,15	↑
Persediaan Inventories	482.190	375.463	106.727	28,43	↑
Pajak Dibayar di Muka Prepaid Taxes	56.360	39.967	16.393	41,02	↑
Uang Muka Advances Payment	223.880	154.888	68.992	44,54	↑
Biaya Dibayar di Muka Prepaid Expenses	81.664	67.296	14.368	21,35	↑
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	7.137.809	5.062.044	2.075.765	41,01	↑

Saldo aset lancar Perseroan di akhir tahun 2024 mencapai Rp7,14 triliun, meningkat 41,01% atau setara Rp2,07 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp5,06 triliun. Kenaikan Aset Lancar utamanya disebabkan oleh kenaikan pada akun Aset keuangan lancar lainnya yang berupa Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya.

Kenaikan aset lancar juga disebabkan oleh adanya kenaikan pada akun Kas dan Setara Kas yang berasal dari penerimaan *Public Service Obligation* (PSO) dibandingkan tahun sebelumnya.

The Company's current assets balance at the end of 2024 reached Rp7.14 trillion, reflecting an increase of 41.01% or Rp2.07 trillion from Rp5.06 trillion in the previous year. This growth was primarily driven by an increase in other current financial assets, particularly Cash and Cash Equivalents with Restricted Use.

The rise in current assets was also attributed to higher Cash and Cash Equivalents resulting from Public Service Obligation (PSO) receipts compared to the previous year.



TINJAUAN KEUANGAN

FINANCIAL REVIEW

Aset Tidak Lancar Konsolidasian

Consolidated Non-Current Assets

Uraian Description	2024 (Rp-Juta) (Rp-million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024		↑↓
			Nominal (Rp-Juta) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Investasi pada Entitas Asosiasi Investment in Associate	218.729	240.325	(21.596)	(8,99)	↓
Properti Investasi Investment Properties	208.542	183.938	24.604	13,38	↑
Alat Produksi Production Equipment	2.089.723	2.157.777	(68.054)	(3,15)	↓
Aset Tetap Fixed Assets	337.057	298.021	39.036	13,10	↑
Aset Tak Berwujud Intangible Assets	18.946	18.294	652	3,56	↑
Aset Hak Guna Right of Use Assets	5.074	3.903	1.171	30,00	↑
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	67.852	71.660	(3.808)	(5,31)	↓
Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non Current Assets	155	70	85	121,43	↑
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	2.946.079	2.973.988	(27.909)	(0,94)	↓

Jumlah aset tidak lancar Perseroan di akhir tahun 2024 mencapai Rp2,95 triliun, turun 0,94% atau setara Rp27,91 miliar dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,97 triliun. Penurunan Aset Tidak Lancar utamanya disebabkan oleh penurunan pada saldo alat produksi serta pada saldo investasi pada entitas asosiasi.

The Company's non-current assets at the end of 2024 amounted to Rp2.95 trillion, a decrease of 0.94% or Rp27.91 billion compared to the previous year's total of Rp2.97 trillion. The decline in non-current assets was primarily due to a reduction in the balance of production equipment and a decrease in the value of investments in associated entities.

LIABILITAS KONSOLIDASIAN

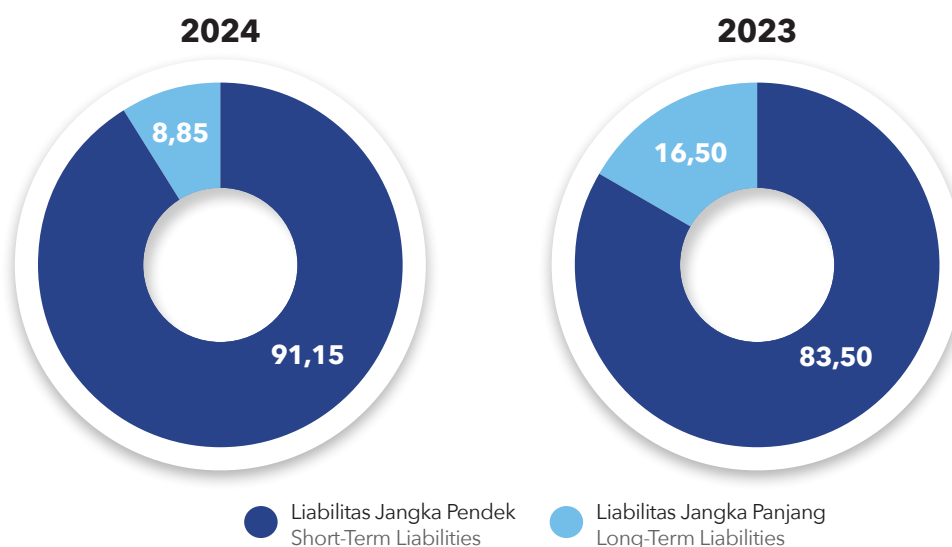
CONSOLIDATES LIABILITIES

Pendapatan Revenue	2024		2023		Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024		↑↓
	(Rp-ribu) (Rp-thousand)	Kontribusi (%) Contribution (%)	(Rp-ribu) (Rp-thousand)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp-ribu) Nominal (Rp-thousand)	Persentase (%) Percentage (%)	
Liabilitas Jangka Pendek Short-Term Liabilities	1.422.771	91,15	1.012.238	83,50	410.533	40,56	↑
Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities	138.067	8,85	200.053	16,50	(61.986)	(30,98)	↓
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.560.838	100,00	1.212.291	100,00	348.547	28,75	↑



TINJAUAN KEUANGAN

FINANCIAL REVIEW



Jumlah liabilitas PT PELNI (Persero) pada 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp1,56 triliun, meningkat 28,75% atau senilai Rp348,55 miliar dari tahun 2023 sebesar Rp1,21 triliun. Peningkatan jumlah liabilitas ini disebabkan oleh kenaikan pada Liabilitas Jangka Panjang Perseroan sebesar 40,56% atau setara Rp410,53 miliar, di sisi lain Liabilitas Jangka Pendek Perseroan mengalami penurunan sebesar 30,98% atau setara Rp61,99 miliar, sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

As of December 31, 2024, PT PELNI (Persero) total liabilities amounted to Rp1.56 trillion, marking an increase of 28.75% or Rp348.55 billion from Rp1.21 trillion in 2023. This increase was primarily driven by a 40.56% rise in the Company's Non-Current Liabilities, equivalent to Rp410.53 billion. On the other hand, the Company's Current Liabilities decreased by 30.98% or Rp61.99 billion, as further explained below.

Liabilitas Jangka Pendek Konsolidasian

Consolidated Short Term Liabilities

Uraian Description	2024 (Rp-Juta) (Rp-million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024		↑↓
			Nominal (Rp-Juta) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Pinjaman Jangka Pendek Short-Term Loans	7.000	22.000	(15.000)	(68,18)	↓
Utang Usaha Trade Payable	218.134	205.463	12.671	6,17	↑
Beban Akrua Accrued Expenses	918.686	599.335	319.351	53,28	↑
Liabilitas kontrak Contract Liability	94.464	78.061	16.403	21,01	↑

TINJAUAN KEUANGAN

FINANCIAL REVIEW

Uraian Description	2024 (Rp-Juta) (Rp-million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024		↑↓
			Nominal (Rp-Juta) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Utang Pajak Tax Payable	31.200	59.341	(28.141)	(47,42)	↓
Bagian Lancar atas: Current Position of:					
Utang Kepada Negara Debt to the State	3.560	3.621	(61)	(1,68)	↓
Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities	279	4.519	(4.240)	(93,83)	↓
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya Other Short-Term Financial Liabilities	149.448	39.898	109.550	274,58	↑
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Short-Term Liabilities	1.422.771	1.012.238	410.533	40,56	↑

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada 31 Desember 2024 adalah Rp1,42 triliun, mengalami peningkatan 40,56% atau senilai Rp410,53 miliar dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp1,01 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada saldo Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya.

As of December 31, 2024, the Company's current liabilities amounted to Rp1.42 trillion, reflecting a 40.56% increase or Rp410.53 billion compared to Rp1.01 trillion in 2023. This increase was primarily due to a rise in the balance of Other Short-Term Financial Liabilities.

Liabilitas Jangka Panjang Konsolidasian

Consolidated Long Term Liabilities

Uraian Description	2024 (Rp-Juta) (Rp-million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024		↑↓
			Nominal (Rp-Juta) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Utang Kepada Negara Debt to the State	24.923	28.972	(4.049)	(13,98)	↓
Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities	10.114	8.228	1.886	22,92	↑
Liabilitas Imbalan Paska Kerja Jangka Panjang Long-Term Employee Benefits	103.029	162.853	(59.824)	(36,73)	↓
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Long-Term Liabilities	138.067	200.053	(61.986)	(30,98)	↓



TINJAUAN KEUANGAN

FINANCIAL REVIEW

Nilai Liabilitas Jangka Panjang Perseroan per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp138,07 miliar mengalami penurunan sebesar 30,98% atau senilai Rp61,99 miliar dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp200,05 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan turunnya saldo Liabilitas Imbalan Paska Kerja Jangka Panjang dan saldo Utang Kepada Negara.

The Company's long-term liabilities as of December 31, 2024, amounted to Rp138.07 billion, showing a decrease of 30.98% or Rp61.99 billion compared to Rp200.05 billion in the previous year. This decline was primarily due to the reduction in the balance of Long-Term Employee Benefits Liabilities and Outstanding Payables to the Government.

EKUITAS KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED EQUITY

Uraian Description	2024 (Rp-Juta) (Rp-million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024		↑↓
			Nominal (Rp-Juta) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Modal Saham Shares Capital	7.629.900	7.629.900	0	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Government Capital	1.500.144	144	1.500.000	10.416,67	↑
Tambahan Modal Disetor Additional Paid-In Capital	397.879	397.879	0	-	↑
Cadangan Appropriated Related Earnings	1.543.867	1.342.665	201.202	14,99	↑
Saldo Laba (Defisit) Accumulated Deficit	(2.460.466)	(2.453.138)	(7.328)	0,30	↑
Komponen Ekuitas Lainnya Other Equity Component	(92.537)	(97.593)	5.056	(5,18)	↓
Jumlah Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada: Total Equity attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Parent Entity	8.518.786	6.819.857	1.698.929	24,91	↑
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interests	4.264	3.884	380	9,78	↑
Jumlah Ekuitas Total Equity	8.523.050	6.823.741	1.699.309	24,90	↑

Pada 31 Desember 2024, saldo ekuitas yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebesar Rp8,52 triliun, nilai ini mengalami peningkatan 24,90% atau senilai Rp1,70 triliun jika dibanding dengan jumlah ekuitas pada 31 Desember 2023 yang sejumlah Rp6,82 triliun. Peningkatan tersebut dikontribusikan oleh adanya peningkatan pada saldo Penyertaan Modal Pemerintah non tunai yang diperoleh di tahun 2024 sebesar Rp1,50 triliun.

As of December 31, 2024, the Company's equity balance amounted to Rp8.52 trillion, reflecting an increase of 24.90% or Rp1.70 trillion compared to the equity balance of Rp6.82 trillion as of December 31, 2023. This increase was primarily attributed to the rise in the Government's non-cash capital contribution, which was acquired in 2024, amounting to Rp1.50 trillion.



TINJAUAN KEUANGAN

FINANCIAL REVIEW

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Uraian Description	2024 (Rp-Juta) (Rp-million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024		↑↓
			Nominal (Rp-Juta) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Pendapatan Usaha Bersih Net Operating Revenues	6.177.057	5.766.619	410.438	7,12	↑
Beban Pokok Usaha Operating Expenses	(5.130.011)	(4.894.058)	(235.953)	4,82	↑
Laba (Rugi) Kotor Gross Profit (Loss)	1.047.046	872.561	174.485	20,00	↑
Beban Pemasaran dan Distribusi Distribution and Marketing Expenses	(24.615)	(21.181)	(3.434)	16,21	↑
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(828.674)	(732.264)	(96.410)	13,17	↑
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	193.757	119.116	74.641	62,66	↑
Pendapatan (Beban) Non Usaha Bersih Non Operating Income - Net	108.669	179.405	(70.736)	(39,43)	↓
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	302.426	298.521	3.905	1,31	↑
Beban Pajak Tax Expense	(108.175)	(96.890)	(11.285)	11,65	↑
Laba Tahun Berjalan Profit for the Current Year	194.251	201.631	(7.380)	(3,66)	↓
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Total Other Comprehensive Income	5.056	(63.773)	68.829	(107,93)	↑
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income of the Current year	199.307	137.859	61.448	44,57	↑
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada: Profit for the Current Year Attributable to:					
Pemilik Entitas Induk Owner of the Company	193.873	201.202	(7.329)	(3,64)	↓
Pemilik Non Pengendali Non-Controlling Interest	377	429	(52)	(12,12)	↓
	194.250	201.631	(7.381)	(3,66)	↓



TINJAUAN KEUANGAN

FINANCIAL REVIEW

Uraian Description	2024 (Rp-Juta) (Rp-million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024		↑↓
			Nominal (Rp-Juta) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada: Total Comprehensive Income of The Current Year					
Pemilik Entitas Induk Owner of the Company	198.927	137.428	61.499	44,75	↑
Pemilik Non Pengendali Non-Controlling Interest	380	431	(51)	(11,83)	↓
	199.307	137.859	61.448	44,57	↑
Laba Bersih Per Saham Dasar (dalam Rp) Basic Earnings Per Share (in Rp)	25.459	26.426	(967)	(3,66%)	↓

Pendapatan Usaha Bersih

Pendapatan PT PELNI (Persero) di tahun 2024 adalah sebesar Rp6,18 triliun, meningkat 7,12% atau senilai dengan Rp410,44 miliar dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp5,77 triliun. Kenaikan ini utamanya disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan yang berasal dari penugasan maupun pendapatan dari non-penugasan.

Net Operating Revenue

PT PELNI (Persero) revenue in 2024 amounted to Rp6.18 trillion, an increase of 7.12% or Rp410.44 billion compared to Rp5.77 trillion in the previous year. This growth was primarily driven by higher revenues from both assigned and non-assigned business segments.

Beban Pokok Usaha

Operating Expenses

Uraian Description	2024 (Rp-Juta) (Rp-million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024		↑↓
			Nominal (Rp-Juta) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Perkapalan Shipping	1.755.186	1.902.893	(147.707)	(7,76)	↓
Penumpang Passenger	1.094.568	540.460	554.108	102,53	↑
Pegawai Employee	762.188	788.042	(25.854)	(3,28)	↓
Pemeliharaan dan Perbaikan Maintenance and Repair	608.931	725.217	(116.286)	(16,03)	↓
Penyusutan dan Amortisasi Depreciation and Amortization	371.274	429.790	(58.516)	(13,62)	↓
Asuransi Insurance	52.181	52.597	(416)	(0,79)	↓



TINJAUAN KEUANGAN

FINANCIAL REVIEW

Uraian Description	2024 (Rp-Juta) (Rp-million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024		↑↓
			Nominal (Rp-Juta) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Muatan Ternak Livestock Cargo	17.801	9.106	8.695	95,49	↑
Kendali Mutu Pelayanan Quality Service Control	16.540	14.209	2.331	16,41	↑
Perbengkelan Workshop	10.213	16.662	(6.449)	(38,70)	↓
Perhotelan Hospitality	6.362	2.553	3.809	149,20	↑
Sewa Rent	1.446	2.932	(1.486)	(50,68)	↓
Pajak dan Retribusi Taxes and Levies	0	21	(21)	100,00	↓
Beban Pokok Lainnya Other Cost of Revenues	433.321	409.575	23.746	5,80	↑
Jumlah Total	5.130.011	4.894.057	235.954	4,82	↑

Beban Pokok Usaha Perseroan mengalami peningkatan sebesar 4,82% atau senilai dengan Rp235,95 miliar, dari Rp4,89 triliun di tahun 2023 menjadi Rp5,13 triliun di tahun 2024. Kenaikan Beban Pokok Usaha ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan Beban Pemeliharaan dan Perbaikan di sepanjang tahun 2024.

The Company's Cost of Goods Sold (COGS) increased by 4.82%, or Rp235.95 billion, from Rp4.89 trillion in 2023 to Rp5.13 trillion in 2024. This rise in COGS was primarily due to an increase in Maintenance and Repair Costs throughout 2024.

Beban Pemasaran dan Distribusi

General and Administrative Expenses

Uraian Description	2024 (Rp-Juta) (Rp-million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024		↑↓
			Nominal (Rp-Juta) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Kehumasan Public Relations	14.212	10.076	4.136	41,05	↑
Penjualan Sales	3.176	5.009	(1.833)	(36,59)	↓
Pemasaran Lainnya Others Marketing	3.260	5.276	(2.016)	(38,21)	↓
Promosi dan Periklanan Promotion and Advertising	3.967	820	3.147	383,78	↑
Jumlah Total	24.615	21.181	3.434	16,21	↑



TINJAUAN KEUANGAN

FINANCIAL REVIEW

Perseroan membukukan beban pemasaran dan distribusi di sepanjang tahun 2024 sebesar Rp24,61 miliar, jumlah ini meningkat 16,21% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp21,18 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah Beban Kehumasan dan Beban Promosi dan Periklanan.

The Company recorded marketing and distribution expenses of Rp24.61 billion in 2024, representing a 16.21% increase from Rp21.18 billion in the previous year. This increase was driven by higher Public Relations expenses and Promotion and Advertising costs.

Beban Umum dan Administrasi

General and Administrative Expense

Uraian Description	2024 (Rp-Juta) (Rp-million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024		↑↓
			Nominal (Rp-Juta) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Pegawai Employees	545.918	478.110	67.808	14,18	↑
Pemeliharaan dan Perbaikan Maintenance and Repair	48.166	41.218	6.948	16,86	↑
Konsultan dan Audit Audit and Consultant	46.077	39.083	6.994	17,90	↑
Penyusutan dan Amortisasi Amortization and Depreciation	38.949	41.374	(2.425)	(5,86)	↓
Administrtasi Perkantoran Office Administration	23.871	18.990	4.881	25,70	↑
Rumah Tangga Household	18.335	18.638	(303)	(1,63)	↓
Sewa Rent	16.979	13.134	3.845	29,28	↑
Imbalan Paska Kerja Post Employment Benefits	16.529	17.418	(889)	(5,10)	↓
Provisi Penurunan Nilai Piutang Provision of Impairment of Receivables	14.912	5.449	9.463	173,66	↑
PKBL PKBL	8.461	8.041	420	5,22	↑
Asuransi Insurance	8.429	8.728	(299)	(3,43)	↓
Pajak dan Restribusi Taxes and Levies	7.196	13.980	(6.784)	(48,53)	↓
Keamanan dan Keselamatan Security and Safety	2.224	827	1.397	168,92	↑
Perencanaan dan Pengembangan Development and Planning	1.361	1.587	(226)	(14,24)	↓
Olah Raga dan Kesenian Sport and Art	1.182	448	734	163,84	↑
Sumbangan Donations	375	993	(618)	(62,24)	↓

TINJAUAN KEUANGAN

FINANCIAL REVIEW

Uraian Description	2024 (Rp-Juta) (Rp-million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024		↑↓
			Nominal (Rp-Juta) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Denda/Klaim Penalties/Claims	36	23	13	56,52	↑
Lainnya Others	29.674	24.223	5.451	22,50	↑
Jumlah Total	828.674	732.264	96.410	13,17	↑

Beban umum dan administrasi Perseroan mengalami peningkatan 13,17% atau setara Rp96,41 miliar, dari Rp732,26 miliar di tahun 2023 menjadi Rp828,67 miliar di tahun 2024. Kenaikan beban umum dan administrasi Perusahaan utamanya disebabkan oleh adanya kenaikan Beban Pegawai karena adanya penampahan jumlah pegawai di sepanjang tahun 2024.

The Company's general and administrative expenses increased by 13.17% or Rp96.41 billion, from Rp732.26 billion in 2023 to Rp828.67 billion in 2024. This increase was primarily driven by higher employee expenses due to an increase in the number of employees throughout 2024.

Pendapatan (Beban) Non-Usaha Bersih

Non-Operating Income (Expenses)

Uraian Description	2024 (Rp-Juta) (Rp-million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024		↑↓
			Nominal (Rp-Juta) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Pendapatan Non Usaha Non-Operating Revenues	290.737	229.931	60.806	26,45	↑
Beban Non Usaha Non-Operating Expenses	(182.067)	(50.526)	(131.541)	260,34	↑
Jumlah Pendapatan Non-Usaha Bersih Total Non-Operating Income - Net	108.670	179.405	(70.735)	(39,43)	↓

Perseroan mencatat Pendapatan Non-Usaha Bersih sebesar Rp293,91 miliar. Jumlah ini meningkat sebesar Rp13,46 miliar atau sebesar 39,43% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp179,40 miliar.

The Company recorded a net non-operating income of Rp293.91 billion. This amount increased by Rp13.46 billion or 39.43% compared to the previous year, which was Rp179.40 billion.

Pendapatan non-usaha yang diperoleh Perseroan adalah sebesar Rp290,74 miliar yang berasal dari pendapatan bunga, keuntungan penjualan aset, jasa administrasi,

The non-operating income earned by the Company amounted to Rp290.74 billion, which was derived from interest income, gains on asset sales, administrative



TINJAUAN KEUANGAN

FINANCIAL REVIEW

keuntungan perubahan nilai wajar aset non keuangan, keuntungan selisih kurs dan lain-lain. Sedangkan beban non-usaha yang dicatatkan Perseroan adalah sebesar Rp182,07 miliar yang berasal dari administrasi bank, kerugian selisih kurs, beban keuangan, dan lainnya.

Beban Pajak

Jumlah beban pajak yang menjadi kewajiban Perseroan tahun 2024 adalah sebesar Rp108,17 miliar, nilai ini mengalami peningkatan sebesar 11,65% atau setara dengan Rp11,28 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp96,89 miliar. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya jumlah beban pajak final serta adanya peningkatan pada beban pajak tangguhan yang dari entitas induk.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Perseroan membukukan laba tahun berjalan sejumlah Rp194,25 miliar turun 3,66% atau senilai Rp7,38 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp201,63 miliar. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh peningkatan Beban Pokok Usaha, Beban Umum dan Administrasi dan Beban Pajak, serta penurunan Pendapatan lain-lain di tahun 2024.

Penghasilan Komprehensif Lain

Di tahun 2024, Perseroan mencatat jumlah Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp5,06 miliar, dimana tahun sebelumnya Perseroan mencatat adanya Beban Komprehensif lain sebesar Rp63,77 miliar. Penghasilan Komprehensif Lain di tahun 2024 berasal dari adanya Keuntungan Aktuarial Periode Berjalan.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Pada tahun 2024, Perseroan membukukan adanya laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp199,31 miliar, nilai ini meningkat 44,56% atau senilai Rp61,45 miliar dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp137,86 miliar.

Laba Bersih Per Saham

Perseroan mencatatkan laba bersih per saham dasar pada tahun 2024 sebesar Rp 25.459 (Rupiah penuh), nilai ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp26.426,46 (Rupiah penuh).

fees, gains from changes in the fair value of non-financial assets, foreign exchange gains, and others. Meanwhile, the non-operating expenses recorded by the Company amounted to Rp182.07 billion, which included bank administration fees, foreign exchange losses, financial expenses, and others.

Tax Expense

The total tax expense liability for the Company in 2024 amounted to Rp108.17 billion, reflecting an increase of 11.65% or Rp11.28 billion compared to the previous year, which was Rp96.89 billion. This increase was driven by a rise in final tax expenses as well as an increase in deferred tax expenses from the parent entity.

Profit (Loss) for the Year

The Company recorded a net income of Rp194.25 billion, down by 3.66% or Rp7.38 billion compared to the previous year, which was Rp201.63 billion. This decrease was primarily caused by an increase in Cost of Goods Sold, General and Administrative Expenses, and Tax Expenses, as well as a decrease in Other Income in 2024.

Other Comprehensive Income

In 2024, the Company recorded other comprehensive income of Rp5.06 billion, whereas in the previous year, the Company had recorded Other Comprehensive Loss of Rp63.77 billion. The Other Comprehensive Income in 2024 resulted from actuarial gains for the current period.

Comprehensive Income in the Current Year

In 2024, the Company recorded comprehensive income for the year of Rp199.31 billion, which increased by 44.56% or Rp61.45 billion compared to the previous year, which amounted to Rp137.86 billion.

Basic Earnings Per Share

The Company recorded basic earnings per share for 2024 of Rp 25.459 (full Rupiah), a decrease from the previous year, which was Rp26,426.46 (full Rupiah).



TINJAUAN KEUANGAN

FINANCIAL REVIEW

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT

Uraian Description	2024 (Rp-Juta) (Rp-million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024		↑↓
			Nominal (Rp-Juta) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Net Cash Flows from Operating Activities	670.364	88.197	582.167	660,08	↑
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Net Cash Flows from Investing Activities	(16.148)	(55.062)	38.914	(70,67)	↓
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Net Cash Flows from Financing Activities	(34.050)	20.667	(54.717)	(264,76)	↓
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase in Cash and Cash Equivalent	620.166	53.802	566.364	1.052,68	↑
Kas dan Setara Kas Saldo Awal Cash and Cash Equivalent Beginning Balance	3.494.573	3.440.771	53.802	1,56	↑
Kas dan Setara Kas Saldo Akhir Cash and Cash Equivalent Ending Balance	4.114.739	3.494.573	620.166	17,75	↑

Per 31 Desember 2024, PELNI mencatat kas dan setara kas sebesar Rp4,11 triliun, meningkat 17,75% atau setara Rp620,17 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp3,49 triliun. Kenaikan kas dan setara kas ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan arus kas dari aktivitas operasi.

As of December 31, 2024, PELNI recorded cash and cash equivalents amounting to IDR 4.11 trillion, an increase of 17.75% or equivalent to IDR 620.17 billion from the previous year's figure of IDR 3.49 trillion. This increase in cash and cash equivalents was primarily due to higher cash inflows from operating activities.



TINJAUAN KEUANGAN

FINANCIAL REVIEW

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Cash Flows from Operating Activities

Uraian Description	2024 (Rp-Juta) (Rp-million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024		↑↓
			Nominal (Rp-Juta) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Penerimaan Kas dari Pelanggan Receipt from Customers	3.042.912	2.705.260	337.652	12,48	↑
Penerimaan Public Service Obligation & Subsidi Receipt from Public Service Obligation (PSO) and Subsidies	3.992.715	3.040.918	951.797	31,30	↑
Pembayaran Kepada Pemasok Payment to Suppliers	(4.128.524)	(3.575.040)	(553.483)	15,48	↑
Penerimaan dari Aktivitas Operasi Lainnya Receipt of other operating activities	41.621	50.650	(9.029)	(17,83)	↓
Pembayaran Biaya Operasional Payment of Operating Expenses	(592.976)	(680.015)	87.039	(12,80)	↓
Pembayaran Biaya Overhead Payment of Overhead Expenses	(1.180.010)	(1.017.019)	(162.991)	16,03	↑
Pengeluaran dari Aktivitas Operasi Lainnya Payment of Other Operating Expenses	(56.536)	(95.382)	38.846	(40,73)	↓
Pembayaran Pajak Tax Payments	(448.839)	(341.174)	(107.665)	31,56	↑
Jumlah Total	670.364	88.197	582.167	660,08	↑

Di tahun 2024, Perusahaan mencatat arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp670,36 miliar, meningkat 660,08% atau setara dengan Rp583,17 miliar dibandingkan arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2023 sebesar Rp88,20 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya kenaikan penerimaan kas dari pelanggan serta penerimaan dari Public Service Obligation (PSO).

In 2024, the Company recorded cash flows from operating activities amounting to Rp670.36 billion, an increase of 660.08% or equivalent to Rp583.17 billion compared to cash flows from operating activities in 2023, which amounted to Rp88.20 billion. This increase was primarily due to higher cash receipts from customers and receipts from Public Service Obligation (PSO).



TINJAUAN KEUANGAN

FINANCIAL REVIEW

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Cash Flows from Investing Activities

Uraian Description	2024 (Rp-Juta) (Rp-million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024		↑↓
			Nominal (Rp-Juta) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Penjualan Aset Tetap Sale of Fixed Assets	11.345	24.840	(13.495)	(54,33)	↓
Penerimaan Bunga Deposito dan Jasa Giro Interest Deposit and Demand Deposit Receipt	154.143	105.674	48.469	45,87	↑
Penerimaan Dividen Dividend Receipt	7.707	0	7.707	-	↑
Perolehan Alat Produksi dan Aset Tetap Acquisition Production Equipment and Fixed Assets	(169.893)	(183.409)	13.516	(7,37)	↓
Perolehan Aset Dalam Konstruksi Acquisition of Asset Under Construction	(19.450)	(932)	(18.518)	1.986,91	↑
Perolehan Aset Tak Berwujud Acquisition Intangible Assets	0	(1.291)	1.291	(100,00)	↓
Investasi Langsung Direct Investment	0	55	(55)	(100,00)	↓
Jumlah Total	(16.148)	(55.062)	63.755	(79,79)	↓

Sepanjang tahun 2024, jumlah arus kas bersih yang digunakan Perseroan untuk aktivitas investasi adalah sejumlah Rp16,15 miliar. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 79,79% dari tahun sebelumnya yang sejumlah Rp55,06 miliar. Penurunan arus kas bersih dari aktivitas operasi Perseroan. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan kas dari Penerimaan Bunga Deposito dan Jasa Giro.

Throughout 2024, the total net cash used by the Company for investment activities amounted to Rp16.15 billion. This represents a decrease of 79.79% compared to the previous year, which was Rp55.06 billion. The decrease in net cash from the Company's operating activities was primarily due to an increase in cash from interest receipts on deposits and giro services.



TINJAUAN KEUANGAN

FINANCIAL REVIEW

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Cash Flows from Financing Activities

Uraian Description	2024 (Rp-Juta) (Rp-million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024		↑↓
			Nominal (Rp-Juta) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Penerimaan Pinjaman Bank/Pihak Ketiga Receipt from Bank Loan/Third Parties	451.000	226.500	224.500	99,12	↑
Pembayaran Pinjaman Bank/Pihak Ketiga Payment of Bank Loan/Third Parties	(485.050)	(205.833)	(279.217)	135,65	↑
Jumlah Total	(34.050)	20.667	(54.717)	(264,76)	↓

Perseroan mencatatkan arus kas bersih yang digunakan dari aktivitas pendanaan pada 2024 mencapai Rp34,05 miliar, sedangkan pada tahun sebelumnya Perseroan mencatatkan penerimaan kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp20,67 miliar. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pada jumlah kas bersih yang digunakan Perseroan untuk melakukan pembayaran pinjaman bank / pihak ketiga.

The Company recorded a net cash outflow from financing activities in 2024 amounting to Rp34.05 billion, whereas in the previous year, the Company recorded a net cash inflow from financing activities of Rp20.67 billion. This was primarily due to an increase in the net cash used by the Company for the repayment of bank loans/third-party loans.



KEMAMPUAN MENGHASILKAN KEUNTUNGAN

PROFIT GENERATING ABILITY

Dalam mengukur kemampuan menghasilkan keuntungan, Perseroan menggunakan beberapa rasio yang dapat digolongkan ke dalam rasio profitabilitas.

In measuring the ability to generate profit, the Company uses several ratios that can be classified into profitability ratios.

Rasio Profitabilitas Profitability Ratio	2024 (%)	2023 (%)	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024	
Imbalan terhadap Aset Return on Asset	1,93	2,51	(0,57)	↓
Imbalan terhadap Ekuitas Return on Equity	2,28	2,95	(0,67)	↓
Imbalan terhadap Investasi Return on Investment	8,24	10,97	(2,73)	↓
Margin Laba Kotor Gross Profit Margin	16,95	15,13	1,82	↑
Margin Laba Bersih Net Profit Margin	3,14	3,50	(0,35)	↓
Perputaran Jumlah Aset Total Asset Turnover	68,18	73,23	(0,05)	↓

Dalam mengukur kemampuan menghasilkan keuntungan, Perusahaan menggunakan beberapa rasio yang dapat digolongkan ke dalam rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan perhitungan yang digunakan dalam mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, sekaligus mengukur efektivitas manajemen dalam mengelola perusahaan. PELNI mengukur rasio profitabilitas melalui perhitungan (1) rasio imbalan terhadap aset, (2) imbalan terhadap ekuitas, (3) imbalan terhadap investasi, (4) margin laba kotor, dan (5) margin laba bersih yang masing-masing sebesar 1,93%, 2,28%, 6,02%, 16,95%, dan 3,15% pada 2024.

Hasil tersebut memperlihatkan kemampuan yang tetap baik dalam memperoleh laba pada tahun 2024. Di samping itu, hasil tersebut memperlihatkan manajemen tetap mampu mempertahankan efektivitas yang baik pada tahun 2024.

In measuring the ability to generate profit, the Company uses several ratios that can be classified into profitability ratios. Profitability ratios are calculations used to measure the company's ability to generate profit, as well as to assess the effectiveness of management in managing the company. PELNI measures profitability ratios through the calculation of (1) return on assets, (2) return on equity, (3) return on investment, (4) gross profit margin, and (5) net profit margin, which were 1.93%, 2.28%, 6.02%, 16.95%, and 3.15% in 2024, respectively.

These results demonstrate a strong ability to generate profit in 2024. Furthermore, they indicate that management was able to maintain a high level of effectiveness throughout the year.



KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

DEBT REPAYMENT ABILITY

Kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh kewajiban, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang, diukur melalui rasio likuiditas dan rasio solvabilitas, sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

RASIO LIKUIDITAS

Likuiditas adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi semua kewajiban yang harus segera dipenuhi (liabilitas jangka pendek). Dalam analisis kemampuan membayar utang, Perseroan menggunakan rasio lancar dan rasio kas.

The Company's ability to meet all obligations, both short-term and long-term, is measured through liquidity ratios and solvency ratios, as explained below.

LIQUIDITY RATIOS

Liquidity refers to the Company's ability to settle all obligations that need to be paid in the short term (current liabilities). In analyzing the ability to pay debts, the Company uses the current ratio and cash ratio.

Rasio Likuiditas Liquidity Ratio	2024 (%)	2023 (%)	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024
Rasio Lancar Current Ratio	501,68	500,08	1,60 ↑
Rasio Kas Cash Ratio	298,21	345,23	(56,02) ↓

Sepanjang tahun 2024, Perseroan tetap mampu mempertahankan posisi keuangan yang solid. Hal ini dapat dilihat dari sisi likuiditas, dimana rasio lancar dan rasio kas tetap terjaga dengan baik. Pada akhir tahun 2024, rasio lancar dan rasio kas PT PELNI (Persero) adalah sebesar 501,68% dan 289,21%, dimana hal ini menunjukkan bahwa Perseroan memiliki tingkat likuiditas yang baik untuk membayar utang usaha yang dimiliki.

Throughout 2024, the Company was able to maintain a solid financial position. This can be seen from the liquidity side, where the current ratio and cash ratio were well maintained. At the end of 2024, PT PELNI (Persero) current ratio and cash ratio were 501.68% and 289.21%, respectively, indicating that the Company has a strong liquidity level to settle its outstanding trade payables.

RASIO SOLVABILITAS

Untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi seluruh kewajiban jangka panjang Perseroan digunakan rasio solvabilitas yang diukur dengan membuat perbandingan seluruh kewajiban terhadap seluruh aset dan perbandingan seluruh kewajiban terhadap ekuitas.

SOLVENCY RATIOS

To measure the ability to meet all long-term obligations, the Company uses solvency ratios, which are calculated by comparing total liabilities to total assets and total liabilities to equity.

Rasio solvabilitas yang menunjukkan kemampuan Perseroan dalam membayar kewajiban-kewajibannya antara lain dapat diukur melalui rasio liabilitas terhadap

The solvency ratios, which reflect the Company's ability to pay its obligations, can be measured by the debt-to-equity ratio, which compares total liabilities to total



KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

DEBT REPAYMENT ABILITY

ekuitas, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas, dan rasio liabilitas terhadap aset, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset. Rasio solvabilitas Perseroan dapat dilihat pada table di bawah ini:

equity, and the debt-to-asset ratio, which compares total liabilities to total assets. The Company’s solvency ratios can be seen in the table below:

Rasio Solvabilitas Solvability Ratio	2024 (%)	2023 (%)	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024	
Liabilitas terhadap Ekuitas Liabilities to Equity	18,31	17,77	0,54	↑
Liabilitas terhadap Aset Liabilities to Assets	15,48	15,09	0,39	↑
Ekuitas terhadap Aset Equity to Assets	84,52	84,91	(0,39)	↓



TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

RECEIVABLES COLECTABILITY

Keterangan Description	Satuan Unit	2024 (%)	2023 (%)	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024
Piutang usaha Trade receivables	Rp-Juta IDR-million	125.898	118.838	7.060
Rata-rata tingkat penagihan piutang Average receivables collection rate	hari days	7,46	7,54	0,08

Perseroan mencatat rata-rata kolektibilitas piutang di tahun 2024 adalah 7,46 hari berselisih 0,08 hari dibandingkan dengan periode 2023 yang sejumlah 7,54 hari. Hal ini membuktikan bahwa Perseroan memiliki sistem pengelolaan piutang yang baik dan tergolong lancar. Perseroan juga tidak membentuk Cadangan provisi atas penurunan nilai, karena Manajemen menyimpulkan bahwa jumlah piutang yang dimiliki dapat tertagih.

Perseroan meninjau tingkat kolektabilitas piutang usaha dan piutang lain-lain secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih, dihapuskan secara langsung dengan mengurangi nilai tercatatnya. Akun penyisihan digunakan Ketika terdapat bukti yang objektif bahwa Perseroan tidak dapat menagih seluruh nilai terutang sesuai dengan persyaratan awal piutang. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami debitur, kemungkinan debitur dinyatakan pailit, melakukan reorganisasi keuangan dan gagal bayar, atau menunggak pembayaran merupakan indikator yang dianggap dapat menunjukkan adanya penurunan nilai piutang.

The Company recorded an average receivables collection period of 7.46 days in 2024, which is 0.08 days shorter compared to the period in 2023, which was 7.54 days. This demonstrates that the Company has a good receivables management system and its collection process is relatively smooth. The Company also did not form a provision for impairment because management concluded that the receivables could be fully collected.

The Company regularly reviews the collectability of trade receivables and other receivables. Receivables that are deemed uncollectible are directly written off by reducing their carrying value. The provision account is used when there is objective evidence that the Company will not be able to collect the full amount owed in accordance with the initial terms of the receivables. Significant financial difficulties experienced by the debtor, the possibility of the debtor being declared bankrupt, financial reorganization, or defaulting on payments are considered indicators that may signal an impairment of receivables.



STRUKTUR MODAL DAN DASAR KEBIJAKAN

MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN

CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT'S POLICY BASIS ON THE COMPANY'S

CAPITAL STRUCTURE

STRUKTUR MODAL

Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara liabilitas dan ekuitas. Perusahaan berkeyakinan bahwa struktur modal yang optimal akan memaksimalkan nilai Perusahaan. Perusahaan mengelola struktur permodalan untuk menjaga rasio modal yang sehat untuk menjalankan kegiatan usaha dan memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan. Perusahaan mengelola struktur modal secara optimal, dengan mempertimbangkan laba Perusahaan saat ini dan proyeksi laba tahun mendatang, proyeksi arus kas operasi, proyeksi investasi barang modal dan proyeksi peluang investasi yang strategis.

Struktur modal Perseroan per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

CAPITAL STRUCTURE

The capital structure is the balance or comparison between liabilities and equity. The Company believes that an optimal capital structure will maximize the Company's value. The Company manages its capital structure to maintain a healthy capital ratio, ensuring smooth operations and providing benefits to stakeholders. The Company strives to manage its capital structure optimally, considering current profits, projected profits for the coming years, projected operating cash flows, capital expenditure investment projections, and projected strategic investment opportunities.

The Company's capital structure as of December 31, 2024 is outlined in the table below.

Uraian Description	2024		2023		Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024		↑↓
	(Rp-Juta) (IDR-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	(Rp-Juta) (IDR-million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Nominal (Rp-Juta) (IDR-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Liabilitas Jangka Pendek Short-Term Liabilities	1.422.771	14,11	1.012.238	12,60	410.533	40,56	↑
Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities	138.067	1,37	200.053	2,49	(61.986)	(30,98)	↓
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.560.838	15,48	1.212.291	15,09	348.547	28,75	↑
Ekuitas Equity	8.523.050	84,52	6.823.741	84,91	1.699.309	24,90	↑
Total Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	10.083.888	100,00	8.036.032	100,00	2.047.856	25,48	↑

Hingga akhir 2024, struktur modal Perseroan didominasi oleh permodalan sendiri yakni sebesar 84,52% berasal dari ekuitas dan 15,48% berasal dari liabilitas. Struktur modal ini mengalami sedikit pergeseran persentase dibandingkan dengan 2023 yang terdiri atas 15,09% liabilitas dan 84,91% ekuitas.

As of the end of 2024, the Company's capital structure was dominated by its own capital, with 84.52% coming from equity and 15.48% from liabilities. This structure showed a slight shift in percentage compared to 2023, which consisted of 15.09% liabilities and 84.91% equity.



STRUKTUR MODAL DAN DASAR KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN

CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT'S POLICY BASIS ON THE COMPANY'S CAPITAL STRUCTURE

KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL

Perusahaan menerapkan kebijakan struktur modal dengan mengutamakan penggunaan dana internal untuk membiayai keperluan modal kerja dan pengembangan usaha. Kebijakan manajemen atas struktur modal didasarkan guna melindungi kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usaha untuk dapat tetap memberikan imbal hasil yang optimal bagi pemegang saham dan manfaat secara luas bagi pemangku kepentingan, di samping mempertahankan struktur permodalan yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Perseroan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman.

DASAR PENENTUAN KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL

Sebagaimana praktik yang berlaku umum, Perseroan mengevaluasi struktur permodalan melalui rasio utang terhadap modal (gearing ratio) yang dihitung melalui pembagian antara utang neto dengan modal. Utang neto adalah jumlah liabilitas dikurangi dengan jumlah kas dan setara kas. Modal yang dikelola oleh manajemen adalah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali.

Kebijakan manajemen atas struktur modal ditentukan atas dasar-dasar pemilihan sebagai berikut. Pertama, Perseroan senantiasa berupaya menetapkan target struktur modal yang optimal. Kedua, penggunaan proporsi utang yang lebih besar (dari ekuitas) dapat dilakukan bila risiko usaha lebih kecil. Ketiga, struktur modal senantiasa ditinjau dengan mempertimbangkan keseimbangan antara risiko keuangan dan tingkat pengembalian dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan. Keempat, struktur modal diusahakan

CAPITAL STRUCTURE POLICY

The Company implements a capital structure policy prioritizing the use of internal funds to finance working capital needs and business development. The management's policy on capital structure is based on protecting the Company's ability to sustain its operations while providing optimal returns for shareholders and broad benefits for stakeholders, as well as maintaining an optimal capital structure to reduce capital costs.

The Company manages its capital structure and adjusts it to changes in economic conditions. To maintain and adjust the capital structure, the Company may adjust dividend payments to shareholders, issue new shares, or seek financing through loans.

BASIS FOR DETERMINING THE CAPITAL STRUCTURE POLICY

As is common practice, the Company evaluates its capital structure through the debt-to-equity ratio (gearing ratio), which is calculated by dividing net debt by capital. Net debt is the total liabilities minus cash and cash equivalents. The capital managed by management is equity attributable to the parent company's owners and non-controlling interests.

Management's policy on capital structure is based on the following selection criteria. First, the Company continually strives to establish an optimal capital structure target. Second, the use of a larger proportion of debt (relative to equity) may be used when business risk is lower. Third, the capital structure is consistently reviewed with consideration of balancing financial risk and the level of return in an effort to increase the company's value. Fourth, the capital structure is aimed at making an optimal contribution by managing the



STRUKTUR MODAL DAN DASAR KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN

CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT'S POLICY BASIS ON THE COMPANY'S CAPITAL STRUCTURE

memberi kontribusi optimal dengan mengatur kombinasi utang dan modal sendiri (ekuitas) yang dapat memaksimalkan nilai Perseroan.

combination of debt and equity to maximize the Company's value.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT

PT PELNI (Persero) tidak memiliki ikatan material terkait investasi barang modal. Investasi barang modal dilakukan secara langsung menggunakan dana yang telah dianggarkan.

PT PELNI (Persero) does not have any material commitments related to capital investment. Capital investments are made directly using allocated funds.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

REALIZATION OF CAPITAL GOODS INVESTMENT

Investasi barang modal atau *capital expenditure* (capex) merupakan aktivitas pembelian sejumlah aset tetap atau untuk menambah nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa yang akan datang.

Capital expenditure (capex) is the activity of purchasing fixed assets or adding value to fixed assets that are expected to provide benefits in the future.

Investasi barang modal yang dilakukan Perseroan sepanjang tahun 2024 berupa penambahan alat produksi dan sarana penunjang. Perseroan telah menganggarkan dana investasi sebesar Rp1,32 triliun pada RKAP 2024, per 31 Desember 2024 Perseroan telah merealisasikan investasi terhadap barang modal sebesar Rp382,33 miliar, atau 28,92% terhadap anggaran.

The capital investment made by the Company throughout 2024 included the addition of production equipment and supporting facilities. The Company had allocated an investment fund of Rp1.32 trillion in the 2024 RKAP, and as of December 31, 2024, the Company had realized an investment in capital goods amounting to Rp382.33 billion, or 28.92% of the budget.

Realisasi Investasi Investment Realization	Nilai Investasi 2024	Nilai Investasi 2023	Tujuan Investasi Objective of Investment
	(Rp-juta) (IDR-million)	(Rp-juta) (IDR-million)	
Alat Produksi Production Equipment			
Repowering Kapal Ship Repowering	286.361	108.285	Mendukung pencapaian rencana bisnis Perseroan dan menghasilkan kinerja operasional yang optimal Supporting the achievement of the Company's business plan and producing optimal operational performance!



REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

REALIZATION OF CAPITAL GOODS INVESTMENT

Realisasi Investasi Investment Realization	Nilai Investasi 2024	Nilai Investasi 2023	Tujuan Investasi Objective of Investment
	(Rp-juta) (IDR-million)	(Rp-juta) (IDR-million)	
Alat Produksi Lainnya Other Production Equipment	25.321	43.787	Mendukung pencapaian rencana bisnis Perseroan dan menghasilkan kinerja operasional yang optimal Supporting the achievement of the Company's business plan and producing optimal operational performance
Jumlah Investasi Alat Produksi Total Production Equipment Investment	311.682	152.072	
Sarana Penunjang Supporting Facilities			
Bangunan Perkantoran Office Building	40.957	22.784	Mendukung kegiatan operasional Perseroan Supporting the Company's operational activities
Tanah & Sertifikat Tanah Land & Land Certificate	350	2.979	Mendukung kegiatan operasional Perseroan Supporting the Company's operational activities
Kendaraan Bermotor Motored Vehicle	436	545	Mendukung kegiatan operasional Perseroan Supporting the Company's operational activities
Investasi Perkantoran Office Investment	28.905	18.415	Mendukung kegiatan operasional Perseroan Supporting the Company's operational activities
Jumlah Investasi Sarana Penunjang Total Supporting Facilities Investment	70.648	44.723	
Jumlah Investasi Total Investment	382.330	196.795	

Total investasi barang modal yang direalisasikan Perseroan sepanjang tahun 2024 berjumlah Rp382,33 miliar. Dimana atas investasi tersebut dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis investasi, yaitu investasi alat produksi dan investasi sarana penunjang, yang masing-masing telah terealisasi sejumlah Rp311,68 miliar dan Rp70,65 miliar. Nilai ini mengalami peningkatan dari tahun 2023 yang sebesar Rp196,79 miliar.

The total capital investment realized by the Company throughout 2024 amounted to Rp382.33 billion. This investment is classified into two types: production equipment investment and supporting facilities investment, with each having been realized in the amounts of Rp311.68 billion and Rp70.65 billion, respectively. This value represents an increase from 2023, which amounted to Rp196.79 billion.



INFORMASI TENTANG DAMPAK NILAI TUKAR MATA UANG ASING

INFORMATION ON THE IMPACT OF FOREIGN EXCHANGE RATE

Perseroan mencatat pendapatan dan beban Grup dalam mata uang Rupiah, sehingga tidak terdapat dampak nilai tukar mata uang asing terhadap Perseroan.

The Company records the revenue and expenses of the Group in Rupiah, so there is no impact from foreign exchange fluctuations on the Company.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

MATERIAL INFORMATION AND FACTS THAT OCCURRED AFTER THE ACCOUNTANT'S REPORTING DATA

5. Berdasarkan pada Akta No. 6 tanggal 20 Maret 2025 oleh Notaris Ida Adiningsih yang telah disahkan melalui Menteri Hukum Republik Indonesia No.AHU.AH.01.03 0085541, adanya persetujuan atas beberapa hal berikut ini.

- Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan sebanuak 1.500.000 saham, masing-masing saham dengan nominal sebesar Rp1.000.000 sehingga seluruhnya seharga Rp1.500.000.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia.
- Menyetujui penambahan modal yang ditempatkan dan disetor pada Perseroan sebesar Rp1.500.000.000 .000 sehingga modal ditempatkan dan disetor yang semua sebesar Rp7.629.900.000.000 menjadi sebesar Rp9.129.900.000.000 yang bersumber dari penambahan Penyertaan Modal Negara berdasarkan Peraturan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2024 tetang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia.

6. Berdasarkan pada Akta No. 7 tanggal 20 Maret 2025 oleh Notaris Ida Adiningsih yang telah disahkan melalui Menteri Hukum Republik Indonesia No.AHU.AH.01.03 0085977, terdapat beberapa perubahan terkait jenis saham. Disetujuinya perubahan jenis saham Perseroan yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B.

5. Based on Deed No. 6 dated March 20, 2025, by Notary Ida Adiningsih, which has been validated by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under No. AHU.AH.01.03 0085541, the approval was given for the following matters:

- Approval for the issuance of shares in the amount of 1,500,000 shares, each with a nominal value of Rp1,000,000, totaling Rp1,500,000,000,000, all of which are fully subscribed by the Republic of Indonesia.
- Approval for an increase in the issued and paid-up capital of the Company by Rp1,500,000,000,000, thus increasing the issued and paid-up capital from Rp7,629,900,000,000 to Rp9,129,900,000,000, sourced from the increase in State Equity Participation based on the State Equity Participation Regulation of the Republic of Indonesia Number 53 of 2024 concerning the Increase of State Equity Participation in the Share Capital of PT Pelayaran Nasional Indonesia.

6. Based on Deed No. 7 dated March 20, 2025, by Notary Ida Adiningsih, which has been validated by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under No. AHU.AH.01.03 0085977, there were several changes regarding the type of shares. The approval was given for the change in the type of the Company's shares, from previously being without series to now consisting of Series A Dwiwarna shares and Series B shares.



PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2024

COMPARISON OF TARGET AND REALIZATION 2024

ASUMSI-ASUMSI YANG DIGUNAKAN DALAM PROSES PERUMUSAN TARGET TAHUN 2024

Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) PT PELNI (Persero) tahun 2024 disusun dengan pertimbangan pokok dan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- Nilai kontrak penugasan dari Kementerian Perhubungan RI dengan Pagu Anggaran PSO dan Subsidi Tahun 2024 sebesar Rp3.938.877 juta, meningkat 21,04% dari Prognosa RKAP Tahun 2023 sebesar Rp3.254.242 juta.
- Jumlah unit kapal yang dioperasikan sebanyak 84 unit dengan 82 unit kapal atau 97,62% melayani trayek penugasan dengan rincian 26 unit Kapal Penumpang, 6 unit Kapal Logistik Nusantara, 3 unit Kapal Kendhaga Nusantara, 30 unit Kapal Perintis, 16 unit Kapal Rede, 1 unit Kapal Ternak. Sedangkan dari kegiatan usaha perkapalan yang bersifat non-penugasan dalam Rencana Kerja dan Anggaran PT PELNI (Persero) Tahun 2024 dianggarkan pengoperasian sebanyak 2 unit kapal komersil tipe Ro-Ro, 1 unit Kapal Logistik Nusantara untuk kegiatan sewa *charter*.
- PT PELNI (Persero) memiliki 1 usaha penunjang yaitu Galangan PELNI Surya, serta mengelola 4 unit usaha sampingan, yaitu Keagenan, Pengusahaan Aset, dan MICE & *Lifestyle* dan Bahtera *Learning Center*. PT PELNI (Persero) juga memiliki 2 anak perusahaan, yaitu PT PBM Sarana Bandar Nasional yang bergerak di bidang Bongkar Muat dan PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) yang bergerak di bidang jasa layanan (*services*).
- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PT PELNI (Persero) Tahun 2024 didasarkan pada Aspirasi Pemegang Saham untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024 No S-491/MBU/09/2023 tanggal 29 September 2023 dengan asumsi makro ekonomi sebagai berikut:
 - » Kurs USD 1 = Rp15.000,-; Suku Bunga 6,70%; dan Inflasi 2,80%; pertumbuhan ekonomi 5,2 %.
 - » Harga BBM Subsidi yaitu sebesar Rp6.818/liter, dan BBM Non Subsidi sebesar Rp25.000/liter, serta Minyak Pelumas Rp40.000,-

ASSUMPTIONS USED IN THE FORMULATION OF THE 2024 TARGETS

The 2024 Work Plan and Budget (RKAP) of PT PELNI (Persero) was formulated with the following key considerations and assumptions:

- The assignment contract value from the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia with a PSO Budget and Subsidy for 2024 is Rp3,938,877 million, an increase of 21.04% from the 2023 RKAP Forecast value of Rp3,254,242 million.
- The number of ships operated is 84 units, with 82 units or 97.62% operating on assignment routes, consisting of 26 Passenger Ships, 6 Nusantara Logistics Ships, 3 Kendhaga Nusantara Ships, 30 Pioneer Ships, 16 Rede Ships, and 1 Livestock Ship. In addition, for non-assignment shipping activities, the 2024 Work Plan and Budget of PT PELNI (Persero) includes the operation of 2 commercial Ro-Ro type ships and 1 Nusantara Logistics Ship for charter activities.
- PT PELNI (Persero) has 1 supporting business, namely the Pelni Shipyard, and manages 4 subsidiary businesses: Agency, Asset Management, MICE & Lifestyle, and Bahtera Learning Center. PT PELNI (Persero) also has 2 subsidiaries, PT PBM Sarana. Bandar.Nasional, which operates in the Stevedoring sector, and PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID), which operates in the services sector.
- The preparation of the 2024 Work Plan and Budget of PT PELNI (Persero) is based on the Shareholder's Aspiration for the preparation of the 2024 Work Plan and Budget of the Company No. S-491/MBU/09/2023 dated September 29, 2023, with the following macroeconomic assumptions:
 - » USD exchange rate: 1 USD = Rp15,000,-; Interest rate: 6.70%; and Inflation rate: 2.80%; Economic growth rate: 5.2%
 - » Subsidized Fuel Price: Rp6,818/liter, Non-Subsidized Fuel Price: Rp25,000/liter, Lubricating Oil Price: Rp 40,000/liter



PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2024

COMPARISON OF TARGET AND REALIZATION 2024

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI 2024

Secara periodik, PELNI melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil operasional yang dicapai pada tahun buku. Hal tersebut dilakukan dengan mengukur kinerja Perseroan berdasarkan perbandingan antara target atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang ditetapkan pada awal tahun dengan realisasi pada tahun anggaran. Perbandingan antara target dan realisasi pada 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

COMPARISON OF TARGETS AND REALIZATION FOR 2024

Periodically, PELNI evaluates the operational results achieved during the fiscal year. This is done by measuring the Company's performance based on the comparison between the target or Work Plan and Budget (RKAP) set at the beginning of the year and the realization for the fiscal year. The comparison between the targets and realization for 2024 can be seen in the table below:

Keterangan	RKAP 2024 2024 Work Plan and Budget	Realisasi 2024 2024 Realization	Pencapaian (%) Achievement (%)	Description
Operasional		Operational		
Kapal Milik				Ships Owned
Kapal Penumpang	26	26	100%	Passenger Ship
Kapal Perintis	30	30	100%	Pioneer Ship
Kapal Tol Laut	9	9	100%	Sea Toll Ship
Kapal Ternak	1	1	100%	Cattle Ship
Kapal Rede	16	16	100%	Rede Ship
Jumlah Kapal Beroperasi	84	82	98%	Total Operating Ships
Produksi		Production		
Angkutan Penumpang (orang)	4.662.769	5.095.725	109,29%	Passenger Transport (person)
Angkutan Barang (Ton/M3)	98.792	115.338	116,75%	Cargo Transport (Ton/M3)
Container (Teus)	28.552	23.117	80,96%	Container
Kendaraan (unit)	23.164	11.146	48,12%	Vehicle (unit)
Efisiensi Operasional		Operational Efficiency		
Commission Day (hari layar)	20.849	20.358	97,64%	Commission Day (sailing days)
Frekuensi (pelayaran)	1.623	1.573	96,92%	Frequency (voyage)
Gross Profit Margin (%)	16,6	16,95	102,25%	Gross Profit Margin (%)
Net Profit Margin (%)	2,86	3,14	111,37%	Net Profit Margin (%)
Keuangan		Financial		
Laba Konsolidasi (Rp juta)	186.123	194.250	104,37%	Consolidated Income (Rp million)
Imbalan terhadap Ekuitas (%)	1,81	2,28	125,57%	Return to Equity (%)
Imbalan terhadap Investasi (%)	6,02	8,24	2,22%	Return to Investment (%)
Rasio Lancar (%)	826	502	60,56%	Current Ratio (%)
Rasio Kas (%)	677	289	42,74%	Cash Ratio (%)



TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN CORPORATE HEALTH LEVEL

Sebagai bagian dari BUMN, PELNI berupaya meratifikasi berbagai ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri BUMN RI. Salah satunya adalah Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, di mana disebutkan bahwa penilaian tingkat kesehatan BUMN dinilai menggunakan peringkat (*rating*) yang didasarkan pada pemeringkatan yang dilakukan oleh perusahaan pemeringkat nasional, perusahaan pemeringkat internasional, atau perusahaan pemeringkat nasional yang terafiliasi dengan perusahaan pemeringkat internasional, yang telah memenuhi berbagai kualifikasi sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-2/MBU/03/2023. Pemeringkatan ini dilakukan dalam rangka membantu BUMN dan kelompok usaha meningkatkan kredibilitasnya dan mempermudah aksesibilitas kepada sumber pendanaan yang kompetitif.

Di tahun 2024, PT Fitch Ratings Indonesia menetapkan peringkat untuk Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagai berikut:

- Peringkat Nasional Jangka Panjang 'AAA(idn)'; Outlook Stabil. Peringkat Nasional Jangka Pendek 'F1+(idn)'

As part of a State-Owned Enterprise (BUMN), PELNI strives to ratify various provisions issued by the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia. One of these is the Regulation of the Minister of BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Corporate Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, which states that the health rating of BUMNs is assessed using a rating based on the ranking carried out by national rating companies, international rating companies, or national rating companies affiliated with international rating companies, which meet various qualifications as outlined in the Regulation of the Minister of BUMN No. PER-2/MBU/03/2023. This rating process aims to assist BUMNs and their business groups in enhancing their credibility and facilitating access to competitive funding sources.

In 2024, PT Fitch Ratings Indonesia assigned the following corporate credit ratings:

- National Long-Term Rating of 'AAA(idn)' with a Stable Outlook, and National Short-Term Rating of 'F1+(idn)'.



KEY PERFORMANCE INDICATOR

KEY PERFORMANCE INDICATOR

Pengukuran *Key Performance Indicators* (KPI) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/08/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, serta Aspirasi Pemegang Saham Nomor: S-491/MBU/09/2023 perihal Aspirasi Pemegang Saham untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024 dimana perspektif yang dipakai berdasarkan pada 5 (lima) Formulasi Prioritas Kementerian BUMN tahun 2020 – 2024. Adapun KPI PT PELNI (Persero) tahun 2024, yaitu:

The measurement of Key Performance Indicators (KPI) for PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) refers to the Minister of BUMN Regulation No. PER-08/MBU/08/2020 concerning the Strategic Plan of the Ministry of State-Owned Enterprises, the Minister of BUMN Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Corporate Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, as well as the Shareholders' Aspiration No. S-491/MBU/09/2023 regarding the Shareholders' Aspiration for the Preparation of the Company's Work Plan and Budget for 2024. The perspective used is based on the five priority formulations of the Ministry of BUMN for the years 2020–2024. The KPIs for PT PELNI (Persero) in 2024 are as follows:

No.	KPI	Satuan Unit	Bobot Weight	Capaian Achievement
A. NILAI EKONOMI DAN SOSIAL UNTUK INDONESIA A. ECONOMIC AND SOCIAL VALUE FOR INDONESIA				
Financial			25	
1	EBITDA	Rupiah (Miliar) IDR (Billion)	5,00	107,57%
2	ROIC ≥ WACC	%	5,00	110,00%
3	<i>Interest Bearing Debt to EBITDA</i>	Kali Times	4,00	110,00%
4	<i>Interest Bearing Debt to Invested Capital</i>	Kali Times	4,00	110,00%
5	Penyelesaian dan Penyampaian Laporan keuangan Audit Tahun 2023 Completion and Submission of 2023 Audited Financial Report	%	7,00	94,00%
Operasional Operational			15	
6	<i>Vessel Speed (On Time Performance)</i>	%	4,00	104,42%
7	<i>Avarage Utilization of Vessel (Pax Factor)</i>	%	4,00	110,00%
8	<i>Compliance to Safety Regulation</i>	%	7,00	110,00%
Sosial Social			10	
9	Pemenuhan Jumlah Voyage Kapal Penumpang Fulfillment of Passenger Ship Voyage Quantity	%	5,00	110,00%
10	Pemenuhan Produk Dalam Negeri Untuk Pengadaan Barang/Jasa Fulfillment of Domestic Products for Goods/Services Procurement	%	5,00	110,00%
Jumlah Nilai Ekonomis dan Sosial Untuk Indonesia Total Economic and Social Value for Indonesia			50	



KEY PERFORMANCE INDICATOR

KEY PERFORMANCE INDICATOR

No.	KPI	Satuan Unit	Bobot Weight	Capaian Achievement
B. INOVASI MODEL BISNIS B. BUSINESS MODEL INNOVATION				
11	Kontribusi Pendapatan Non Penugasan Non-Assignment Revenue Contribution	%	3,00	87,93%
12	Implementasi Pengembangan Bisnis Pelayaran & Logistik Maritim Implementation of Maritime Shipping & Logistics Business Development	%	3,00	110,00%
13	Implementasi Sinergi dan Integrasi Logistik Ekosistem BUMN Implementation of SOE Logistics Ecosystem Synergy and Integration	Instansi Instansi	5,00	110,00%
14	Implementasi Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko Implementation of the Risk Management Improvement Roadmap	%	4,00	100,00%
Jumlah Inovasi Model Bisnis Total of Business Model Innovations			15,00	100 %
C. KEPEMIMPINAN TEKNOLOGI C. TECHNOLOGICAL LEADERSHIP				
15	Implementasi Digitalisasi Proses Bisnis Implementation of Business Process Digitalization	%	5,00	110,00%
16	Implementasi Inovasi Teknologi Pada Alat Produksi Implementation of Technological Innovation in Production Equipment	%	5,00	107,84%
Jumlah Kepemimpinan Teknologi Total of Technology Leadership			10,00	
D. PENINGKATAN INVESTASI D. INVESTMENT ENHANCEMENT				
17	Pengembangan Infrastruktur Logistik Maritim Development of Maritime Logistics Infrastructure	%	5,00	68,38%
18	Implementasi Investasi Penggantian Suku Cadang Permesinan Utama Kapal Implementation of Investment in Replacement of Main Engine Spare Parts for Ships	Implementasi Investasi Penggantian Suku Cadang Permesinan Utama Kapal Implementation of Investment in Replacement of Main Engine Spare Parts for Ships	5,00	110,00%
Jumlah Peningkatan Investasi Total Investment Increase			10,00	
E. PENGEMBANGAN TALENTA E. TALENT DEVELOPMENT				
19	% Perempuan dalam Nominated Talent % Women in Nominated Talent	%	4,00	110,00%
20	% Milenial dalam Nominated Talent % Millennials in Nominated Talent	%	4,00	110,00%
21	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelolaan Risiko Qualification Fulfillment Ratio of Risk Management Committee	%	4,00	110,00%
22	Implementasi Roadmap Penyehatan Dana Pensiun Implementation of Pension Fund Rehabilitation Roadmap	%	3,00	110,00%
Jumlah Pengembangan Talenta Total Talent Development			15,00	



RINCIAN MASALAH YANG TERJADI DI TAHUN 2024

ISSUES ARISING IN 2024

Berikut ini merupakan Rincian masalah yang terjadi sepanjang Tahun 2024:

- Kesulitan dalam melakukan pendanaan investasi dalam hal penggantian alat produksi kapal penumpang secara berkelanjutan.
- Sebagian besar kapal yang dioperasikan digunakan untuk kegiatan penugasa Pemerintah, sehingga memiliki keterbatasan untuk melakukan komersialisasi.
- Adanya *gap* usia karyawan dan *transfer knowledge* yang tidak simultan.
- Implementasi teknologi informasi antar proses bisnis yang belum terintegrasi secara utuh.
- Umur armada kapal (~85% > 25 tahun) yang semakin bertambah memberikan dampak risiko yang semakin meningkat pada aspek keselamatan. Disamping itu juga menimbulkan dampak inefisiensi pada aspek operasional dan aspek teknis.
- Risiko kapal-kapal yang telah melewati umur teknis dan ekonomis berhenti beroperasi.
- Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan moda transportasi laut dengan harga yang terjangkau.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yang telah dilakukan antara lain:

- PT PELNI (Persero) melakukan kerjasama pinjaman modal kerja ke pihak perbankan dalam bentuk *Non Cash Loan* (NCL).
- Melakukan penggantian kapal, salah satunya kapal penumpang, secara berkala dan berkesinambungan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan sehubungan dengan semakin bertambahnya jumlah kapal penumpang yang umurnya akan melewati umur ekonomis dan umur teknis kapal.
- Perekrutan tenaga profesional untuk membantu percepatan program kerja, dan penyempurnaan sistem *training* serta *training of trainer* (TOT).
- Melakukan pengembangan sistem aplikasi *Super Apps*.

Details of Issues Faced in 2024:

- Difficulty in securing funding for the sustainable replacement of passenger ship production equipment.
- The majority of the ships operated are used for government assignment activities, limiting opportunities for commercialization.
- There is a gap in the age of employees and an asynchronous transfer of knowledge.
- The implementation of information technology across business processes has not yet been fully integrated.
- The aging fleet (~85% over 25 years old) increasingly poses higher risks to safety, in addition to causing operational and technical inefficiencies.
- The risk of ships that have exceeded their technical and economic lifespan ceasing operations.
- Meeting the public's demand for affordable maritime transportation.

Efforts Made to Address These Issues:

- PT PELNI (Persero) has entered into a working capital loan agreement with the banking sector in the form of a Non-Cash Loan (NCL).
- Regular and continuous ship replacements, including passenger ships, over the next 20 years to address the growing number of ships that will exceed their economic and technical lifespans.
- Recruitment of professionals to accelerate work programs, as well as enhancing the training system and implementing a "Training of Trainer" (TOT) program.
- Development of the Super Apps application system.



KEBIJAKAN DIVIDEN DAN PEMBAGIANNYA

DIVIDEND POLICY AND DISTRIBUTION

DASAR KEBIJAKAN PEMBAGIAN DIVIDEN PERSEROAN

Mengacu pada Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai "saldo laba yang positif". Pembagian dividen kepada pemegang saham diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada periode di mana dividen dideklarasikan.

PEMBAGIAN DIVIDEN YANG DILAKUKAN DI TAHUN 2024

Pada periode tahun buku 2023 dan 2024, PT PELNI (Persero) tidak membagikan dividen sesuai dengan risalah RUPST yang menetapkan untuk mencadangkan seluruh laba bersih Perseroan.

BASIS OF THE COMPANY'S DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY

Referring to the Indonesian Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, dividends may only be distributed if the Company has a "positive retained earnings balance." Dividend distribution to shareholders is recognized as a liability in the Company's consolidated financial statements in the period in which the dividend is declared.

DIVIDEND DISTRIBUTION IN 2024

For the fiscal years 2023 and 2024, PT PELNI (Persero) did not distribute dividends, in accordance with the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), which resolved to retain all of the Company's net profit.

PERPAJAKAN DAN PNBP LAINNYA; KONTRIBUSI TERHADAP NEGARA

TAXATION AND OTHER NON-TAX STATE REVENUES (PNBP); CONTRIBUTION TO THE STATE

Perseroan berkomitmen untuk dapat berkontribusi kepada negara dan pembangunan nasional, khususnya melalui pemenuhan kewajiban perpajakan dan setoran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Perseroan juga telah melakukan pembayaran pajak yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Potong/Pungut, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pajak daerah lainnya.

Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan telah melakukan pembayaran pajak sebesar Rp489,97 miliar dan PNBP sebesar Rp14,88 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp269,03 miliar untuk kontribusi pajak dan Rp14,04 miliar untuk setoran PNBP.

The Company is committed to contributing to the state and national development, particularly through fulfilling its tax obligations and Non-Tax State Revenue (PNBP) contributions.

The Company has also made tax payments, including Income Tax (PPh) withheld, Value Added Tax (VAT), Land and Building Tax (PBB), as well as other local taxes.

As of December 31, 2024, the Company has made tax payments amounting to Rp489.97 billion and PNBP contributions of Rp14.88 billion, an increase from the previous year's tax contribution of Rp269.03 billion and PNBP contribution of Rp14.04 billion.



TAXATION AND OTHER NON-TAX STATE REVENUES (PNBP); CONTRIBUTION TO THE STATE

Below is the breakdown of the tax contributions and PNPB payments made by the Company.

Jenis Setoran Deposit Types	2024 (Rp-Juta) (Rp-million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024		↑↓
			Nominal (Rp-Juta) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Pajak Pajak					
Pajak Penghasilan (PPh) Income Tax (PPh)	193.712	161.657	32.055	19,83	↑
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Value Added Tax (VAT) & Luxury Goods Sales Tax (PPnBM)	269.180	195.231	73.949	37,88	↑
Bea Masuk/Keluar, Bea & Cukai, dan Bea Materai Import/Exit Duty, Customs & Excise, and Stamp Duty	20.390	0	20.390	-	-
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) termasuk PBB P2 (Perkotaan dan Pedesaan) Regional Taxes and Regional Retributions (PDRD) including PBB P2 (Urban and Rural)	6.692	5.292	1.400	26,46	↑
PNBP PNBP					
Dividen	-	-	-	-	-
PNBP Lainnya Other PNBP	14.885	14.043	842	6,00%	↓

INFORMATION ON THE USE OF PROCEEDS FROM THE PUBLIC OFFERING

As of December 31, 2024, the Company's shares were not publicly listed through Initial Public Offering (IPO). Therefore, the Company has no information regarding the actual use of proceeds from public offerings

LAPORAN PENGGUNAAN TAMBAHAN DANA PENYERTAAN MODAL NEGARA

REPORT ON THE USE OF ADDITIONAL PMN (STATE CAPITAL INJECTION)

Pemerintah Republik Indonesia melakukan penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2015 dengan nilai dana PMN sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus Juta rupiah) yang telah dicairkan pada tanggal 31 Desember 2015. Dalam pelaksanaan penggunaan tambahan dana PMN Tahun 2015 PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) diperuntukan untuk kegiatan pengadaan 6 (enam) unit kapal barang,

The Government of the Republic of Indonesia has increased the State Capital Participation (Penyertaan Modal Negara, PMN) into the share capital of the state-owned company PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), sourced from the 2015 State Budget, through Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 111 of 2015. The value of the PMN fund is Rp500,000,000,000 (five hundred billion Rupiah), which was disbursed on December 31, 2015. In the implementation of the use of the additional PMN funds in 2015, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) allocated the funds for the procurement of six (6) cargo vessels.

Berikut disampaikan realisasi penggunaan tambahan dana PMN sampai dengan Triwulan IV 2024:

Below is the realization of the use of the additional PMN funds up to the fourth quarter of 2024:

Sisa Dana PMN

Remaining PMN Funds

No	Kapal Ship	Kapasitas Capacity	Tipe Type	Tanggal Date		Jumlah Total
				Serah Terima Handover	Beroperasi Operate	
1	KM Logistik Nusantara 1	318 Teus	Cargo Container	10 Feb 2017 Feb 10, 2017	01 Jul 2017 Jul 01, 2017	68.106.636.976
2	KM Logistik Nusantara 2	142 Teus	Cargo Container	18 Sep 2017 Sep 18, 2017	17 Okt 2017 Okt 17, 2017	48.158.821.013
3	KM Logistik Nusantara 3	142 Teus	Cargo Container	07 Nov 2017 Nov 07, 2017	12 Des 2017 Des 12, 2017	51.442.466.140
4	KM Logistik Nusantara 4	142 Teus	Cargo Container	12 Des 2017 Des 12, 2017	22 Feb 2018 Feb 22, 2018	50.777.508.455
5	KM Logistik Nusantara 5	372 Teus	Cargo Container	23 Mei 2018 Mei 23, 2018	13 Jul 2018 Jul 13, 2018	92.549.796.275
6	KM Logistik Nusantara 6	434 Teus	Cargo Container	02 Ags 2019 Ags 02, 2019	18 Okt 2019 Okt 18, 2019	97.997.421.832
Total Penggunaan Dana PMN Total Use of PMN Funds						409.032.650.691
Total Penerimaan Dana PMN Total PMN Fund Receipts						500.000.000.000
Sisa Pokok Dana PMN Remaining Principal of PMN Funds						90.967.349.309
Net Bunga PMN Penempatan Deposito dan Giro Net PMN Interest on Deposits and Giro Placements						96.109.595.513
Sisa Pokok Dana PMN + Bunga Remaining PMN Principal + Interest						187.076.944.823



INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN/ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

MATERIAL INFORMATION REGARDING INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, BUSINESS MERGER, ACQUISITION, AND/OR DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

INVESTASI

Pada tahun 2024, Perseroan melakukan investasi berupa penyertaan pada entitas asosiasi dengan pengungkapan sebagai berikut:

Investasi pada Entitas Asosiasi

Uraian Description	2024 (Rp-Juta) (Rp-million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-million)	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 Increase (Decrease) 2023-2024		↑↓
			Nominal (Rp-Juta) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
PT Rumah Sakit Pelni	218.729	240.325	(21.596)	(8,99%)	↓
Jumlah Total	218.729	240.325	(21.596)	(8,99%)	↓

EKSPANSI

PT PELNI (Persero) tidak melakukan ekspansi pada 2024. Dengan demikian, informasi mengenai hal tersebut tidak tersedia untuk diungkapkan pada bagian ini.

DIVESTASI

PT PELNI (Persero) tidak melakukan divestasi pada 2024. Dengan demikian, informasi mengenai hal tersebut tidak tersedia untuk diungkapkan pada bagian ini.

PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA

PT PELNI (Persero) tidak melakukan penggabungan/ peleburan usaha pada 2024. Dengan demikian, informasi mengenai hal tersebut tidak tersedia untuk diungkapkan pada bagian ini.

AKUISISI

PT PELNI (Persero) tidak melakukan akuisisi pada 2024. Dengan demikian, informasi mengenai hal tersebut tidak tersedia untuk diungkapkan pada bagian ini.

INVESTMENT

In 2024, the Company made investments in the form of equity participation in an associate entity, with the following disclosure:

Investment in Associated Entities

EXPANSION

PT PELNI (Persero) did not undertake any expansion activities in 2024. Therefore, no information is available for disclosure in this section.

DIVESTMENT

PT PELNI (Persero) did not carry out any divestment activities in 2024. Therefore, no information is available for disclosure in this section.

MERGERS/BUSINESS CONSOLIDATIONS

PT PELNI (Persero) did not engage in any mergers or business consolidations in 2024. Therefore, no information is available for disclosure in this section.

ACQUISITIONS

PT PELNI (Persero) did not carry out any acquisitions in 2024. Therefore, no information is available for disclosure in this section.



INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN/ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

MATERIAL INFORMATION REGARDING INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, BUSINESS MERGER, ACQUISITION, AND/OR DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

PT PELNI (Persero) tidak melakukan restrukturisasi utang/modal pada 2024. Dengan demikian, informasi mengenai hal tersebut tidak tersedia untuk diungkapkan pada bagian ini.

DEBT/EQUITY RESTRUCTURING

PT PELNI (Persero) did not undergo any debt or equity restructuring in 2024. Therefore, no information is available for disclosure in this section.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI

MATERIAL TRANSACTION INFORMATION CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTION WITH AFFILIATED PARTIES/RELATED PARTIES

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama. Manajemen memastikan masing-masing transaksi dilakukan secara wajar tanpa adanya benturan kepentingan.

The Company engaged in transactions with related parties through mutually agreed terms and conditions. The Management ensures that each transaction is carried out fairly without any conflict of interest.

Grup Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7, Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.

The Company Group enters into transactions with related parties as defined in SFAS 7, Related Party Disclosures.

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau Entitas yang terkait dengan Entitas pelapor:

Related parties are individuals or entities that have a relationship with the reporting entity

1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor, jika orang tersebut:
 - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - c. Personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).

1. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
 - a. Has control or joint control over the reporting entity;
 - b. Has significant influence over the reporting entity; or
 - c. Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
2. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - a. The entity, and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).



INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI

MATERIAL TRANSACTION INFORMATION CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTION WITH AFFILIATED PARTIES/RELATED PARTIES

b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya). c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama. d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga. e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor. f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a). g. Orang yang diidentifikasi dalam butir (a) angka (1) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas). h. Entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.	b. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member). c. Both of entities are joint ventures of the same third parties. d. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity. e. The entity is a post-employment benefit plan for employees benefit from one of the reporting entities, or entity that are related to reporting entity. If the reporting entity is the entity that administers the program, the sponsoring entity is also related to the reporting entity. f. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a). g. A person who is identified in (a) (1) has significant influence over the entity or key of management entity personnel (or parent of the entity). h. The entity or members of a group of which it's a part of the group it's provides key management personnel services to reporting entity or to parent of entity reporter.

Seluruh transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

All significant transactions with related parties are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Daftar pihak berelasi beserta sifat hubungan dan jenis transaksi dijabarkan sebagai berikut:

NATURE OF TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

The list of related parties and the nature of the relationship and types of transactions is described as follows:

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI

MATERIAL TRANSACTION INFORMATION CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTION WITH AFFILIATED PARTIES/RELATED PARTIES

No.	Pihak-Pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Pihak-Pihak Berelasi Nature of Relationship with Related Parties	Transaksi Transactions
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Institusi Keuangan yang Dikendalikan oleh Pemerintah RI Financial Institution Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Setara Kas, Piutang, Utang Usaha Cash Equivalent, Receivable, Account Payable
2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Institusi Keuangan yang Dikendalikan oleh Pemerintah RI Financial Institution Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Setara Kas, Piutang Cash Equivalent, Receivable
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Institusi Keuangan yang Dikendalikan oleh Pemerintah RI Financial Institution Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Setara Kas Cash Equivalent
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Institusi Keuangan yang Dikendalikan oleh Pemerintah RI Financial Institution Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Setara Kas Cash Equivalent
5	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Institusi Keuangan yang Dikendalikan oleh Pemerintah RI Financial Institution Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Setara Kas Cash Equivalent
6	PT Adhi Karya	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Piutang, Aset Keuangan Lancar Lainnya Receivable, Other Current Financial Asset
7	PT Jembatan Nusantara	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Piutang Receivable
8	Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni	Personil Kunci Common Key Management	Piutang, Aset Keuangan Lancar Lainnya Receivable, Other Current Financial Asset
9	PT Hakaaston	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Aset Keuangan Lancar Lainnya Other Current Financial Asset
10	Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Piutang Receivable
11	PT Telekomunikasi Seluler	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Piutang Receivable
12	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Utang, Piutang, Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya Receivable - Payable - Other Short Term Financial Liabilities
13	PT PP Urban	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Piutang Receivable
14	PT Waskita Karya (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Piutang Receivable
15	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Piutang Receivable

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI

MATERIAL TRANSACTION INFORMATION CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTION WITH AFFILIATED PARTIES/RELATED PARTIES

No.	Pihak-Pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Pihak-Pihak Berelasi Nature of Relationship with Related Parties	Transaksi Transactions
16	PT PINDAD Internasional	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Piutang Receivable
17	PT Jasa Prima Logistik	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Piutang Receivable
18	PT Semen Indogreen Sentosa	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Piutang, Aset Keuangan Lancar Lainnya Receivable - Other Current Financial Asset
19	Perum Bulog	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Utang Payable
20	PT Pertamina Patra Niaga	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Utang Payable
21	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Utang Payable
22	PT Dock Perkapalan Kodja Bahari	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Utang Payable
23	PT Sucofindo (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Utang Payable
24	Kepala Operasi QQ Pelabuhan	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Utang Payable
25	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Utang Payable
26	PT Pertamina (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Utang Payable
27	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Utang Piutang Receivable - Payable
28	PT Jasa Raharja Putera	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya Other Short Term Financial Liabilities
29	PT Netra Setya Santosa	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Aset Keuangan Lancar Lainnya Other Current Financial Asset
30	PT Adhi Persada Gedung	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Aset Keuangan Lancar Lainnya Other Current Financial Asset
31	PT Jasa Raharja (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya Other Short Term Financial Liabilities
32	PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah RI Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Utang Piutang Receivable - Payable



INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI

MATERIAL TRANSACTION INFORMATION CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTION WITH AFFILIATED PARTIES/RELATED PARTIES

Jumlah transaksi dengan pihak-pihak berelasi tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Total transactions with related parties in 2024 and 2023 are as follows:

No.	Pihak-Pihak Berelasi Related Parties	Transaksi Transactions	Jumlah (Rp) Amount (Rp)	
			2024	2023
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent	314.934.424.911	281.575.752.261
		Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya Restricted Cash and Cash Equivalent	187.076.944.823	180.182.740.328
		Piutang Usaha Account Receivable	1.332.000	0
		Utang Usaha Account Payable	73.447.082	0
2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent	861.761.700.152	797.152.408.747
		Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya Restricted Cash and Cash Equivalent	0	0
		Penempatan Jangka Pendek Short Term Investment	0	57.300.000
		Piutang Usaha Account Receivable	802.136.870	119.304.857
3	PT Bank Negara Indonesia	Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent	585.287.997.327	649.778.584.170
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent	731.621.660.858	742.835.165.241
5	PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent	585.287.997.327	649.778.584.170
6	PT Adhi Karya	Piutang Usaha Account Receivable	30.219.016.239	16.688.163.356
		Aset Keuangan Lancar Lainnya Other Current Financial Assets	17.555.993.126	532.617.005
7	PT Jembatan Nusantara	Piutang Usaha Account Receivable	5.252.492.526	8.445.206.939
8	Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni	Piutang Usaha Account Receivable	8.122.532.777	8.115.482.777
		Utang Usaha Account Payable	239.427.329	1.079.238.547
		Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya Other Short-Term Financial Liabilities	0	1.946.534.199
9	PT Hakaaston	Piutang Usaha Account Receivable	260.969.965	7.881.677.596
		Aset Keuangan Lancar Lainnya Other Current Financial Assets	1.139.743.173	1.031.407.690
10	Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat	Piutang Usaha Account Receivable	863.069.200	1.829.078.586
11	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)	Piutang Usaha Account Receivable	2.614.260.530	1.233.546.730
		Utang Usaha Account Payable	582.245.929	0

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI

MATERIAL TRANSACTION INFORMATION CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTION WITH AFFILIATED PARTIES/RELATED PARTIES

No.	Pihak-Pihak Berelasi Related Parties	Transaksi Transactions	Jumlah (Rp) Amount (Rp)	
			2024	2023
12	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Piutang Usaha Account Receivable	547.259.239	1.093.148.035
		Utang Usaha Account Payable	3.561.323.180	6.822.642.017
		Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya Other Short-Term Financial Liabilities	11.333.543.882	10.606.857.460
13	PT PP Urban	Piutang Usaha Account Receivable	687.171.496	1.037.171.496
14	PT Waskita Karya	Piutang Usaha Account Receivable	1.067.443.000	1.067.443.000
15	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Piutang Usaha Account Receivable	860.817.498	860.817.498
16	PT Jasa Prima Logistik	Piutang Usaha Account Receivable	686.531.446	0
17	PT PINDAD Internasional	Piutang Usaha Account Receivable	700.000.000	700.000.000
18	PT Semen Indogreen Sentosa	Aset Keuangan Lancar Lainnya Other Current Financial Assets	7.978.479.160	73.432.043.258
		Piutang Usaha Account Receivable	7.899.847.912	6.114.263.118
19	Perum Bulog	Aset Keuangan Lancar Lainnya Other Current Financial Assets	0	3.984.116.400
20	PT Netra Setya Santosa	Aset Keuangan Lancar Lainnya Other Current Financial Assets	2.838.825.000	0
21	PT Adhi Persada Gedung	Aset Keuangan Lancar Lainnya Other Current Financial Assets	2.194.900.000	0
22	PT Pertamina Patra Niaga	Utang Usaha Account Payable	1.619.081.607	6.200.424.585
23	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Utang Usaha Account Payable	1.483.691.265	2.469.768.877
24	PT Dock Perkapalan Kodja Bahari	Utang Usaha Account Payable	0	1.283.022.367
25	PT Sucofindo (Persero)	Utang Usaha Account Payable	537.915.000	1.237.095.000
26	Kepala Operasi QQ Pelabuhan	Utang Usaha Account Payable	1.023.757.967	748.301.885
27	PT Pertamina (Persero)	Utang Usaha Account Payable	0	628.552.000
28	PT Jasa Raharja Putera	Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya Other Short-Term Financial Liabilities	1.983.539.151	1.297.195.356
29	PT Jasa Raharja (Persero)	Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya Other Short-Term Financial Liabilities	1.684.944.545	77.660.652



INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI

MATERIAL TRANSACTION INFORMATION CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTION WITH AFFILIATED PARTIES/RELATED PARTIES

ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI AFILIASI

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak berelasi berdasarkan prinsip profesionalitas dan situasi saling membutuhkan, dengan maksud menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak.

PERNYATAAN KEWAJARAN TRANSAKSI OLEH DIREKSI

Direksi memastikan bahwa transaksi afiliasi yang dilakukan pada 2024 telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan masing-masing transaksi dilakukan sesuai prinsip *arm's length principle*.

KEBIJAKAN PERUSAHAAN TERKAIT MEKANISME REVIEW TERHADAP TRANSAKSI

Dewan Komisaris bersama Komite Audit Perseroan telah melakukan review terhadap masing-masing transaksi melalui proses audit, di samping proses audit yang dilakukan oleh akuntan publik sebagai auditor eksternal. Mekanisme audit tersebut telah dilakukan sesuai PSAK 7 (revisi 2014) tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Berdasarkan review yang dilakukan pada tahun buku 2023 dan 2024, manajemen menyimpulkan bahwa seluruh transaksi dengan pihak berelasi selama tahun-tahun tersebut telah dilakukan dengan memenuhi peraturan dan ketentuan terkait.

Dewan Komisaris bersama Komite Audit telah melakukan prosedur yang memadai dalam memastikan seluruh transaksi afiliasi telah dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, yaitu dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*).

REASONS FOR AFFILIATE TRANSACTIONS

The Company conducts transactions with related parties based on the principles of professionalism and mutual need, aiming to generate benefits for both parties involved.

DIRECTOR'S STATEMENT ON THE FAIRNESS OF TRANSACTIONS

The Board of Directors ensures that the affiliate transactions conducted in 2024 followed adequate procedures to ensure that each transaction complies with the arm's length principle.

COMPANY POLICY REGARDING REVIEW MECHANISM FOR TRANSACTIONS

The Board of Commissioners, together with the Audit Committee, has reviewed each transaction through an audit process, in addition to the audit carried out by external auditors. This audit mechanism has been conducted in accordance with PSAK 7 (Revised 2014) regarding "Disclosure of Related Party Transactions." Based on the review conducted for the fiscal years 2023 and 2024, management concludes that all transactions with related parties during those years have complied with the applicable regulations and provisions.

The Board of Commissioners, together with the Audit Committee, has undertaken appropriate procedures to ensure that all affiliate transactions have been carried out in accordance with generally accepted business practices, specifically by adhering to the arms-length principle.



INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG BERSIFAT LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

FINANCIAL INFORMATION CONTAINING EXTRAORDINARY AND UNUSUAL EVENTS

Pada 2024, tidak terdapat kejadian luar biasa dan jarang terjadi yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan.

In 2024, there is no occurrence of extraordinary and rare events which affects the Company's financial performance.

DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENDAPATAN DAN LABA PERUSAHAAN

PRICE CHANGES EFFECTS ON THE COMPANY'S REVENUE AND INCOME

DAMPAK PERUBAHAN TARIF PENUMPANG

Tidak terdapat perubahan tarif angkutan penumpang PT PELNI (Persero) pada 2024. Dengan demikian, tidak terdapat informasi dampak perubahan tarif penumpang terhadap pendapatan dan laba perusahaan untuk diungkapkan pada bagian ini.

EFFECTS OF THE PASSENGER FARE CHANGES

There were no changes on PT PELNI (Persero) passenger fare account in 2024. Therefore, no information on the impact of changes on passenger fare on the Company's revenue and income is disclosed in this chapter.

DAMPAK PERUBAHAN HARGA BAHAN BAKAR

Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat perubahan harga bahan bakar yang berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan Perseroan.

EFFECTS OF FUEL PRICE CHANGES

Throughout 2024, there were no changes in fuel prices that had a significant impact on the Company's financial performance.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERSEROAN

CHANGES IN LAWS AND REGULATION THAT SIGNIFICANTLY AFFECT THE COMPANY

Pada tahun 2024 terdapat perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang berpengaruh terhadap Perseroan dijelaskan sebagai berikut:

In 2024, there were amendments to laws and regulations that affected the Company, as explained below:



PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERSEROAN

CHANGES IN LAWS AND REGULATION THAT SIGNIFICANTLY AFFECT THE COMPANY

No.	Undang-Undang	Tanggal Berlaku	Dampak Terhadap Perusahaan
1.	Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Law No. 66 of 2024 on the Third Amendment to Law No. 17 of 2008 on Shipping.	28 Oktober 2024 Oktober 28, 2024	- Perubahan Ketiga UU Pelayaran memberikan peluang terhadap Penugasan Pelayanan Publik yang dapat diberikan kepada selain Badan Usaha Milik Negara; - Adanya jaminan hukum dalam pembiayaan industri Pelayaran Nasional dimana Negara memberikan garansi dan pengakuan bahwa Kapal merupakan infrastruktur yang perlu dibiayai oleh Negara; - Terdapat kriteria pengecualian terhadap kewajiban penggunaan jasa penundaan kapal sarana bantu penundaan Kapal sehingga menjadi perhatian Perusahaan khususnya Nakhoda dalam menjalankan tugas dan fungsinya di atas Kapal - The Third Amendment of the Shipping Law provides opportunities for the Assignment of Public Services, which can now be granted to entities other than State-Owned Enterprises (SOEs). - There is a legal assurance in the financing of the National Shipping Industry, where the Government provides guarantees and recognition that Ships are considered infrastructure that must be financed by the State. - There are exceptions to the obligation to use ship towage services, specifically for the use of tugboats, which has become a point of attention for the Company, especially for the Captains, in carrying out their duties and responsibilities onboard the vessel.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERSEROAN

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES AND THE IMPACT ON THE COMPANY

Amendemen PSAK 201, "Penyajian Laporan Keuangan", tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang; Dampak terhadap Perseroan: Tidak ada dampak signifikan yang materil atas penerapan kebijakan akuntansi kepada Perusahaan.	Amendment to PSAK 201, Presentation of Financial Statements about the classification of liabilities as current or non-current; Impact on the Company: There is no significant material impact from the implementation of the accounting policy on the Company.
Amendemen PSAK 201, "Penyajian Laporan Keuangan", tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan; Dampak terhadap Perseroan: Tidak ada dampak signifikan yang materil atas penerapan kebijakan akuntansi kepada Perseroan.	Amendment to PSAK 201: Presentation of Financial Statements related to Non-Current Liabilities with Covenants; Impact on the Company: There is no significant material impact from the implementation of the accounting policy on the Company.



PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERSEROAN

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES AND THE IMPACT ON THE COMPANY

- Amendemen PSAK 116, "Sewa", tentang Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa Balik;

Dampak terhadap Perseroan:

Tidak ada dampak signifikan yang materil atas penerapan kebijakan akuntansi kepada Perseroan.

- Amendemen PSAK 207, "Laporan Arus Kas" dan amendemen PSAK 107 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", tentang Pengungkapan terkait Pengaturan Pembiayaan Pemasok.

Dampak terhadap Perseroan:

Tidak ada dampak signifikan yang materil atas penerapan kebijakan akuntansi kepada Perseroan.

- Amendment to PSAK 116: "Leases" about lease liability in a sales and leaseback"

Impact on the Company:

There is no significant material impact from the implementation of the accounting policy on the Company.

- Amendment to PSAK 207: "Statement of Cash Flows" and PSAK 107: "Financial Instrument: Disclosure" regarding Supplier Finance Agreement

Impact on the Company:

There is no significant material impact from the implementation of the accounting policy on the Company.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY

HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERUSAHAAN

Dalam melaksanakan aktivitas usaha, Perseroan menghadapi beragam tantangan dengan beberapa di antaranya berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku 2024. Beberapa tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Risiko keselamatan kapal dan penumpang (Armatek, Operasi, *Designated Person Ashore*).
2. Risiko *public service obligation*;
3. Risiko *pax factor* kapal penumpang;
4. Risiko subsidi kapal barang tol laut; dan
5. Risiko kenaikan BBM.

MATTERS WITH POTENTIAL TO SIGNIFICANTLY AFFECT THE COMPANY'S BUSINESS CONTINUITY

In conducting its business, the Company certainly faces a number of challenges. From such challenges, some might potentially have significant impact to the company's business continuity in the fiscal year 2024. The matters are described as follows:

1. Ship and passenger safety risks (Armatek, Operation, *Designated Person Ashore*);
2. Public service obligation risk;
3. Passenger ship *pax factor* risk;
4. Subsidizing Sea Toll carriages risk; and
5. Rising fuel prices risk.



INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY

ASSESSMENT MANAJEMEN ATAS HAL-HAL YANG BERPOTENSI

Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan Assessment manajemen atas hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan, PT PELNI (Persero) mengimplementasikan Sistem Manajemen Risiko sesuai dengan framework ISO 31000 yang menghasilkan praktik manajemen risiko dengan perspektif lebih luas, mudah dipahami, terukur serta mendukung koordinasi dan integrasi antar unit kerja di Perseroan.

Dalam menyikapi perubahan konteks eksternal secara berkala atau periode triwulanan dilakukan pembahasan risiko-risiko yang ada terhadap pengelolaan perusahaan antara unit manajemen risiko, Dewan Komisaris dan Direksi.

ASUMSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN DALAM MELAKUKAN PENGKAJIAN

Dalam penyusunan RKAP 2024, PT PELNI (Persero) salah satu acuannya berdasarkan *Risk Based Budgeting*, dalam hal ini penyusunan anggaran berdasarkan risiko-risiko yang telah terpetakan.

Adapun, beberapa asumsi yang digunakan Perseroan berkaitan dengan kelangsungan usaha PT PELNI (Persero) di antaranya adalah kondisi ekonomi makro, kondisi industry pelayaran nasional serta kebijakan Pemerintah. Adapun data sumsi tersebut sebagai berikut:

THE MANAGEMENT'S ASSESSMENT ON MATTERS WITH POTENTIAL TO SIGNIFICANTLY AFFECT THE COMPANY'S BUSINESS CONTINUITY

For the management's assessment on matters with significant effect on the Company's business continuity, PT PELNI (Persero) implements a Risk Management System in accordance with the ISO 31000 framework which produces risk management practices with broader perspective that are easy to understand, measurable and supports coordination and integration between work units in the Company.

In responding to external changes periodically or quarterly, the Company's management holds discussions on existing risks between the risk management unit, the Board of Commissioners and the Board of Directors

ASSUMPTIONS USED BY THE MANAGEMENT FOR THE ASSESSMENT

In preparing PT PELNI (Persero) 2024 RKAP, one of the assumptions used is Risk Based Budgeting, in which budgeting is carried out based on risks mapped.

Meanwhile, assumptions used by the Company related to business continuity of PT PELNI (Persero) include macroeconomic conditions, of national shipping industry conditions and Government policies. The assumptions are described as follows:



INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY

Indikator Ekonomi Economic Indicator	Asumsi ABPN 2024 2024 APBN (State Budget) Assumption
Pertumbuhan ekonomi Economic Growth	5,2%
Tingkat inflasi Inflation Rate	2,5%
Tingkat Bunga SUN 10 Tahun Interest Rate of 10-Year Government Securities	Rp16.100/USD
Tingkat Suku Bunga Interest Rate	7,0%
Harga Minyak Oil Price	USD82/barel USD82/barrel
Lifting Minyak Oil Lifting	605 ribu barel/hari 605 thousand barrels/day
Lifting Gas Gas Lifting	1.005 ribu barel setara minyak/hari 1.005 thousand barrels of oil equivalents/day

Sumber: APBN 2025
Source: State Budget 2025

Asumsi tersebut juga didukung oleh peran PT PELNI (Persero) dalam beberapa aspek, antara lain:

- Infrastruktur Negara**
PT PELNI (Persero) menyediakan akses transportasi public antar pulau (daerah yang sudah dan sedang berkembang) termasuk angkutan transmigrasi dan TKI (Tenaga Kerja Indonesia).
- Agen Pembangunan**
PT PELNI (Persero) menyediakan akses transportasi public ke wilayah pulau terpencil dan terluar guna mempercepat pembangunan dan membuka isolasi geografis.
- Sistem Logistik**
PT PELNI (Persero) mengangkut kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi masyarakat seluruh Indonesia termasuk di pulau-pulau terpencil dan terluar guna stabilisasi.
- Kedaulatan NKRI**
PT PELNI (Persero) menyediakan akses untuk keperluan sosial politik Negara dan pertahanan nasional melalui kunjungan reguler antar-pulau.

Such assumptions are supported by the role of PT PELNI (Persero) in the following matters:

- National Infrastructure**
PT PELNI (Persero) provides access to inter-island public transportation (developed and developing regions) including for transmigration and TKI (Indonesian Migrant Workers).
- Agent of Development**
PT PELNI (Persero) provides access to public transportation to remote and border island areas in order to accelerate development and eliminate geographical isolation.
- Logistics System**
PT PELNI (Persero) transports basic needs and other needs for people throughout Indonesia, including those in remote and border islands for stabilization.
- State Sovereignty**
PT PELNI (Persero) provides access for socio-political needs of the State and national defense through regular inter-island visits.



INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY

- **Tanggap Darurat**
PT PELNI (Persero) menyediakan angkutan dengan kapasitas besar, cepat dan andal ke seluruh pelosok nusantara untuk kondisi darurat nasional.

- **Emergency Response**
PT PELNI (Persero) provides large capacity, fast and reliable transportation to all corners of the archipelago for national emergency conditions.

ASSESSMENT ATAS KELANGSUNGAN USAHA

Manajemen telah melakukan assessment terhadap kelangsungan usaha Perseroan pada 2024, antara lain dengan menggunakan metode Z-score, yaitu model yang dikembangkan atas kombinasi beberapa formula analisis risiko keuangan.

Hasil *assessment* tersebut adalah sebagai berikut:

Rasio Ratio	Altman Z-Score	
	2024	2023
Likuiditas Liquidity	3,72	3,31
Profitabilitas Profitability	(0,30)	(0,45)
Profitabilitas Profitability	0,13	0,25
Solvabilitas Solvency	5,73	5,91
Jumlah Total	9,28	9,02

Berdasarkan hasil perhitungan Z-Score model pada tahun berjalan diperoleh skor sebesar 9,28 sehingga mengindikasikan sangat jauh diatas batas aman dari kepailitan ($Z > 2,60$) atau dapat diartikan bahwa, dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan dan entitas anaknya secara konsolidasi sangat mampu menjaga kelangsungan usahanya.

ASSESSMENT OF BUSINESS CONTINUITY

The Management has conducted an assessment on business continuity using Z-score model, a model developed by a combination of several financial ratio analysis formula.

Results of the assessment are as follows:

Based on the results of the Z-Score model calculation in the current year a score of 9,28 was obtained, indicating that it is very far above "safe from bankruptcy" limit or it can be interpreted that, in carrying out its activities, the company and its subsidiaries in a consolidated manner are very capable of maintaining business continuity.



PROSPEK USAHA TAHUN 2025

BUSINESS OUTLOOK IN 2025

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan sebaran 17.508 pulau, oleh karena itu meningkatkan konektivitas antar pulau menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan, kapal laut merupakan sarana angkutan yang sangat strategis dalam menghubungkan pulau-pulau di Nusantara. Meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan, industri transportasi laut Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembang. Dengan dukungan dan kebijakan yang tepat serta investasi yang berkelanjutan, sektor maritim Indonesia dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Industri transportasi laut di Indonesia, telah menunjukkan kinerja yang menggembirakan selama tahun 2024. Selama Januari-Desember 2024, jumlah penumpang angkutan laut dalam negeri mencapai 25,9 juta orang atau naik 20,46% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023. Sementara itu, jumlah barang yang diangkut selama Januari-Desember 2024 mencapai 379,2 juta ton atau naik 1,45% persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023. Prestasi ini membuktikan bahwa sektor maritim memiliki andil yang besar dalam menopang mobilitas dan ekonomi nasional.

Disamping itu, untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045 "Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan" harus dilakukan penguatan transformasi total yang ditekankan pada 8 (delapan) agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2029. Adapun yang termasuk dalam 8 (delapan) Agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2029, yaitu Transformasi Sosial; Transformasi Ekonomi; Transformasi Tata Kelola; Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia; Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi; Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan Kestinambungan Pembangunan.

Indonesia is the world's largest archipelagic nation, with a distribution of 17,508 islands. Therefore, improving connectivity between islands is a unique challenge for Indonesia. As an archipelagic country, maritime transport plays a vital role in connecting the islands across the archipelago. Despite facing various challenges, Indonesia's maritime industry has significant potential for growth and development. With the right support, policies, and sustainable investment, Indonesia's maritime sector can become a driving force for national economic growth.

The maritime transport industry in Indonesia has shown encouraging performance in 2024. From January to December 2024, the number of domestic sea passengers reached 25.9 million, a 20.46% increase compared to the same period in 2023. Meanwhile, the amount of goods transported during the same period reached 379.2 million tons, an increase of 1.45% compared to the previous year. This achievement proves that the maritime sector plays a substantial role in supporting national mobility and the economy.

Furthermore, to support Indonesia's Vision 2045 of becoming a "Sovereign, Advanced, and Sustainable Archipelagic Nation," a total transformation must be strengthened, focusing on eight key agendas outlined in the National Long-Term Development Plan (RPJPN) for 2025-2029. These eight agendas include: Social Transformation; Economic Transformation; Governance Transformation; Legal Supremacy, Stability, and Indonesia's Leadership; Social, Cultural, and Ecological Resilience; Equitable and Just Regional Development; High-Quality and Environmentally Friendly Infrastructure; and Sustainable Development.

PROSPEK USAHA TAHUN 2025

BUSINESS OUTLOOK IN 2025

Sektor transportasi laut menjadi bagian penting dalam penguatan transformasi ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur dan konektivitas logistik di daerah 3TP (Tertinggal, Terpencil, Terluas, dan Perbatasan) serta termasuk transformasi transportasi laut yang berdaya saing dalam koridor negara kepulauan melalui kebijakan yang sejalan dengan RPJPN Tahun 2025-2029.

The maritime transport sector is an integral part of strengthening economic transformation to support sustainable economic growth through infrastructure development and logistical connectivity in the 3TP regions (Lagging, Remote, Outermost, and Border areas), as well as the transformation of competitive maritime transport within the archipelagic corridors, in alignment with the RPJPN 2025-2029 policies.

RENCANA STRATEGIS DAN PROYEKSI KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2025

THE COMPANY'S STRATEGIC PLAN AND PERFORMANCE PROJECTIONS FOR 2025

Berdasarkan Pedoman Perencanaan Strategis BUMN Tahun 2024 - 2034, Kementerian BUMN memiliki visi 2034 dalam membangun masa depan Indonesia yang inklusif dan tumbuh berkelanjutan melalui BUMN untuk Indonesia. Adapun visi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam empat tema strategis bagi BUMN untuk berfokus pada Pelopor Ekonomi Hijau, Inovator Teknologi Digital, Pendukung Infrastruktur Berkelas Dunia, dan Pemimpin Inklusi Sosial.

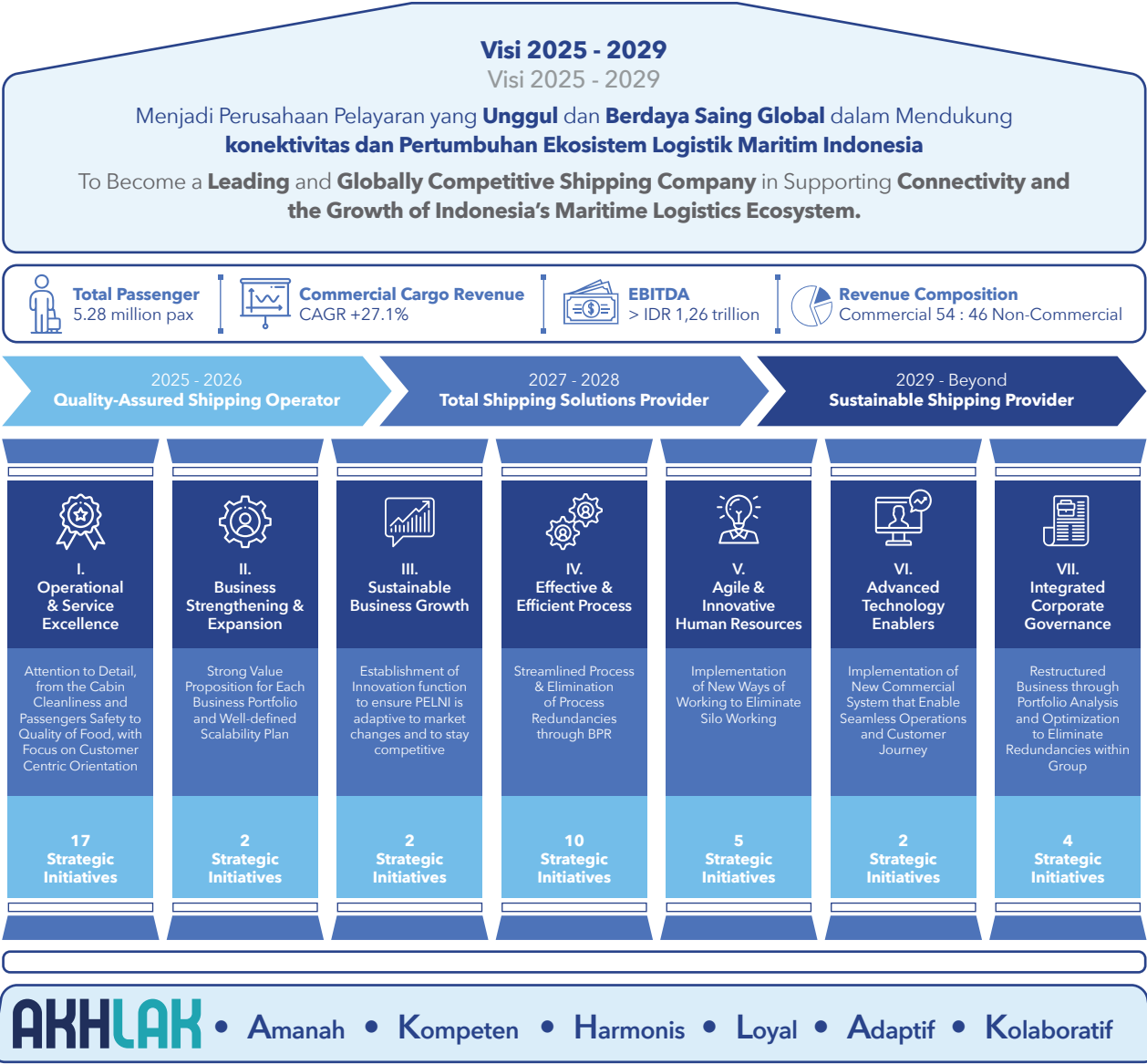
Based on the 2024-2034 Strategic Planning Guidelines for State-Owned Enterprises (SOEs), the Ministry of SOEs has outlined a vision for 2034 to build an inclusive and sustainably growing future for Indonesia through SOEs for Indonesia. This vision is translated into four strategic themes for SOEs to focus on: Pioneering the Green Economy, Innovating Digital Technology, Supporting World-Class Infrastructure, and Leading Social Inclusion.

Menyikapi arahan tersebut, PT PELNI (Persero) telah menyelaraskan Rencana Jangka Panjang (RJP) Tahun 2025-2029 dengan visi tersebut yang tergambar pada *Strategy House* di bawah ini:

In response to this direction, PT PELNI (Persero) has aligned its Long-Term Plan (RJP) for 2025-2029 with this vision, as reflected in the Strategy House below:



RENCANA STRATEGIS DAN PROYEKSI KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2025
 THE COMPANY'S STRATEGIC PLAN AND PERFORMANCE PROJECTIONS FOR 2025



Pada tahun 2025 Perseroan menerapkan strategi Fase 1 (2025 - 2026) yaitu *Quality-Assured Shipping Operator* dengan tujuan akhir pada fase tersebut yaitu Operasional yang terstandarisasi di seluruh wilayah operasional dan layanan yang unggul, Portofolio bisnis dengan kualitas layanan yang unggul dan berdaya saing melalui pengembangan secara organik maupun kemitraan, Ekspansi bisnis komersial baru

In 2025, the Company will implement Phase 1 Strategy (2025-2026), which is to become a Quality-Assured Shipping Operator. The ultimate goal of this phase is to achieve standardized operations across all operational areas and superior services, a business portfolio with high-quality and competitive services through both organic growth and partnerships, expansion of new commercial businesses, zero accidents in operations



RENCANA STRATEGIS DAN PROYEKSI KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2025

THE COMPANY'S STRATEGIC PLAN AND PERFORMANCE PROJECTIONS FOR 2025

dan *zero accident* dalam operasional dengan standar keselamatan dan keamanan pelayaran, serta *safety culture* yang kuat. Guna memastikan tercapainya strategi Perseroan pada tahun 2025, ditetapkan Sasaran Strategis Perseroan yang dituangkan kedalam bentuk peta strategi dengan menggunakan metode *balanced scorecard*, sebagai berikut:

with high standards of maritime safety and security, and a strong safety culture. To ensure the achievement of the Company's strategy in 2025, the Company's Strategic Objectives have been established and outlined in the form of a strategy map using the balanced scorecard method, as follows:

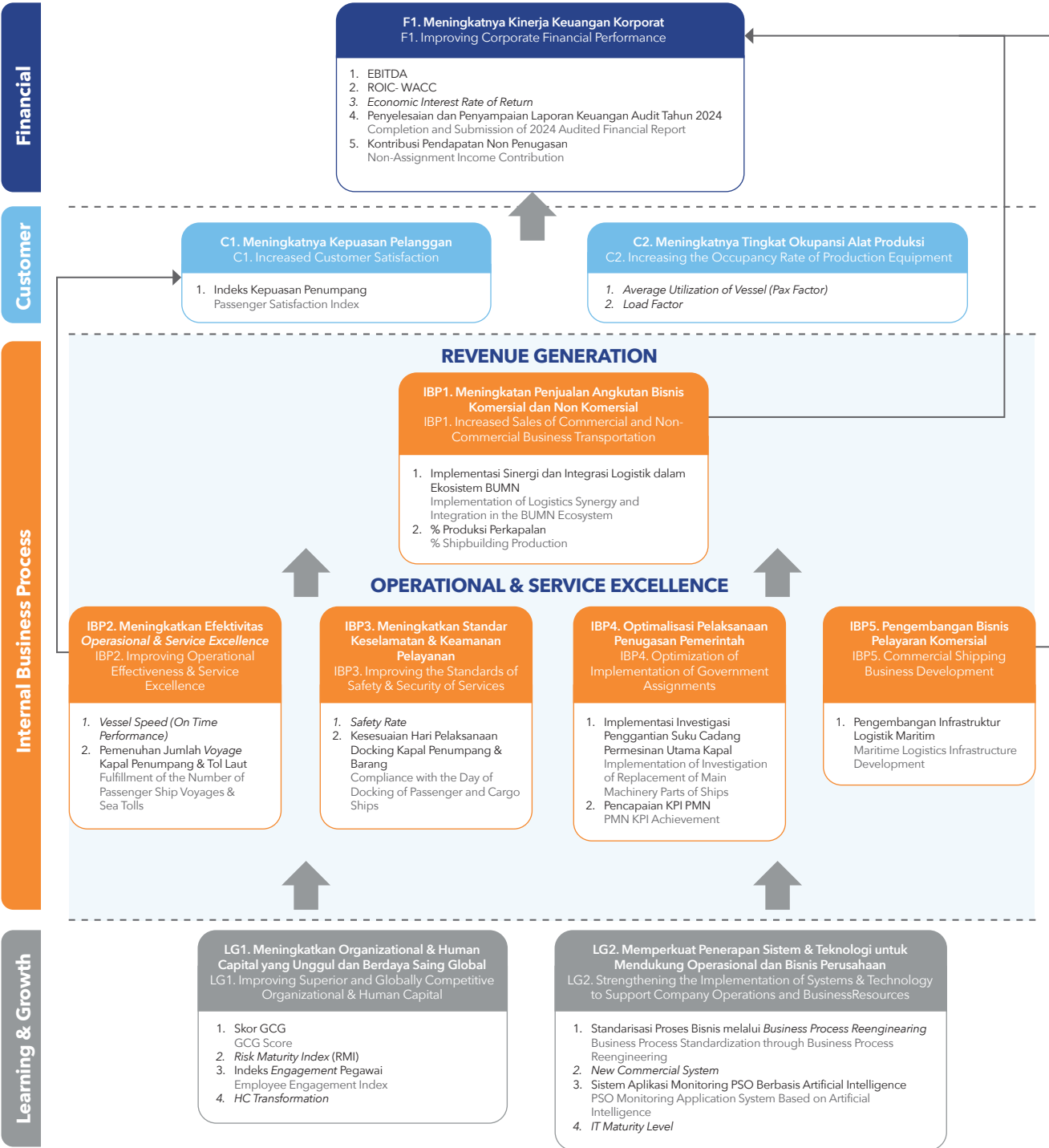
Armada Fleet	Digitalisasi Digitalization	Sumber Daya Manusia Human Capital
1. Peningkatan Efektivitas & Efisiensi Pengelolaan Armada Effectiveness & Efficiency of Fleet Management a. Peningkatan kehandalan kapal melalui revitalisasi alat produksi Increase ship reliability through revitalization of production equipment b. Inovasi Teknologi Pada Alat Produksi untuk meningkatkan efisiensi operasional Technological Innovation in Production Equipment to improve operational efficiency	3. Pengembangan Sistem IT Untuk Mendukung Implementasi Bisnis Development of IT System to Support Business Implementation a. Digitalization for Customer Experiences b. Digitalization for All Operational Processes c. Digitalization for New Business Models	5. Pengembangan Talenta Talent Development a. Performance management & reward system b. Talent acquisition & development c. Organizational & Culture Strengthening d. Pengembangan Knowledge Management System Development of Knowledge Management System

Guna mendukung pencapaian strategi Perseroan tahun 2025, telah disusun peta strategi berbasis *balanced scorecard* yang mencakup tiga fokus utama: Armada, Digitalisasi, dan Sumber Daya Manusia. Strategi Armada difokuskan pada peningkatan keandalan dan efisiensi operasional kapal. Digitalisasi diarahkan untuk mendukung pengalaman pelanggan, proses operasional, dan model bisnis baru. Sementara itu, pengembangan talenta menjadi kunci dalam memperkuat kapabilitas organisasi secara berkelanjutan.

To support the Company's 2025 strategic goals, a strategy map based on the *balanced scorecard* approach has been developed, focusing on three main areas: Fleet, Digitalization, and Human Capital. Fleet strategies aim to enhance ship reliability and operational efficiency. Digitalization supports customer experience, operational processes, and new business models. Meanwhile, talent development strengthens the Company's long-term organizational capabilities.



RENCANA STRATEGIS DAN PROYEKSI KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2025
THE COMPANY'S STRATEGIC PLAN AND PERFORMANCE PROJECTIONS FOR 2025



RENCANA STRATEGIS DAN PROYEKSI KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2025

THE COMPANY'S STRATEGIC PLAN AND PERFORMANCE PROJECTIONS FOR 2025

Terdapat 1 (satu) sasaran strategis pada aspek finansial, yaitu "Meningkatnya Kinerja Keuangan Korporat" dengan mengutamakan kelangsungan bisnis Perseroan melalui penciptaan nilai dan layanan kepada pelanggan, menjaga tingkat kesehatan perusahaan, serta berupaya meningkatkan penghasilan dari unit - unit bisnis komersial untuk memberikan kontribusi penghasilan dari bisnis non penugasan.

Untuk menunjang tercapainya sasaran strategis pada aspek finansial tersebut, terdapat sasaran strategis lainnya yang telah diselaraskan dengan strategi Perseroan berdasarkan metode balance scorecard, antara lain:

- **Aspek Pelanggan (*Customer*)**
 - » C1. Meningkatkan Kepuasan Pelanggan
 - » C2. Meningkatkan Tingkat Okupansi Alat Produksi
- **Aspek Proses Bisnis Internal (*Internal Business Process*)**
 - » IBP1. Meningkatkan Penjualan Angkutan Bisnis Komersial dan Non Komersial
 - » IBP2. Meningkatkan Efektivitas Operational & Service Excellence
 - » IBP3. Meningkatkan Standar Keselamatan dan Keamanan Pelayaran
 - » IBP4. Optimalisasi Pelaksanaan Penugasan Pemerintah
 - » IBP5. Pengembangan Bisnis Pelayaran Komersial
- **Aspek Pertumbuhan & Pembelajaran (*Learning & Growth*)**
 - » LG1. Meningkatkan Organizational & Human Capital yang Unggul dan Berdaya Saing Global
 - » LG2. Memperkuat Penerapan Sistem & Teknologi Untuk Mendukung Operasional dan Bisnis Perusahaan

Atas berbagai agenda dan program strategis tersebut, Perseroan memproyeksikan kinerja di tahun 2025 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

There is one (1) strategic objective in the financial aspect, which is "Improved Corporate Financial Performance," with a focus on ensuring the sustainability of the Company's business through value creation and customer service, maintaining the Company's health, and striving to increase revenue from commercial business units to contribute to income from non-assignment business.

To support the achievement of this strategic objective in the financial aspect, there are other strategic objectives that have been aligned with the Company's strategy based on the balanced scorecard method, as follows:

- **Customer Aspect**
 - » C1. Increased Customer Satisfaction
 - » C2. Improved Production Equipment Occupancy Rate
- **Internal Business Process Aspect**
 - » IBP1. Increased Sales of Commercial and Non-Commercial Transport
 - » IBP2. Improved Operational Effectiveness & Service Excellence
 - » IBP3. Enhanced Maritime Safety and Security Standards
 - » IBP4. Optimization of Government Assignment Implementation
 - » IBP5. Development of Commercial Shipping Business
- **Learning & Growth Aspect**
 - » LG1. Enhanced Organizational & Human Capital that is Excellent and Globally Competitive
 - » LG2. Strengthened Implementation of Systems & Technology to Support the Company's Operations and Business

In line with the various strategic agendas and programs, the Company projects its performance in 2025 as outlined in the table below.



RENCANA STRATEGIS DAN PROYEKSI KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2025

THE COMPANY'S STRATEGIC PLAN AND PERFORMANCE PROJECTIONS FOR 2025

Keterangan Description	RKAP 2025 2025 Work Plan and Budget	Realisasi 2024 2024 Realization	Target Pertumbuhan Growth Target
Alat Produksi Production Tools			
Kapal Kapal Komersil Commercial Ship	2	0	200%
Kapal Penumpang Passenger Ship	25	26	(3,85%)
Kapal Perintis Pioneer Ship	30	30	-
Kapal Tol Laut Sea Toll Ship	9	9	-
Kapal Ternak Cattle Ship	1	1	-
Kapal Rede Rede Ship	18	16	12,50%
Jumlah Kapal Beroperasi Total Operating Ships	85	82	2,44%
Produksi Production			
Angkutan Penumpang (orang) Passenger Transport (person)	4.752.417	5.095.725	(8,50%)
Angkutan Barang (Ton/M3) Cargo Transport (Ton/M3)	85.858	115.338	(14,35%)
Container (Teus) Container	23.767	23.117	23,51%
Kendaraan (unit) Vehicle (unit)	12.778	11.146	107,82%
Ternak (ekor) Cattle (head)	7.125	4.699	51,63%
Efisiensi Operasional Operational Efficiency			
Commission Day (hari layar) Commission Day (sailing days)	20.531	20.358	0,85%
Frekuensi (pelayaran) Frequency (voyage)	1.596	1573	1,46
Gross Profit Margin (%) Gross Profit Margin (%)	14,94	16,95	(6,04%)
Net Profit Margin (%) Net Profit Margin (%)	2,64	2,84	(7,04%)
Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Consolidated Profit or Loss and Other Comprehensive Income			
Pendapatan Usaha Bersih (Rp-Juta) Net Revenue (Rp million)	6.292.998	6.177.057	18,06%
Laba Konsolidasi (Rp juta) Consolidated Income (Rp million)	186.697	194.250	(3,64%)



RENCANA STRATEGIS DAN PROYEKSI KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2025

THE COMPANY'S STRATEGIC PLAN AND PERFORMANCE PROJECTIONS FOR 2025

Keterangan Description	RKAP 2025 2025 Work Plan and Budget	Realisasi 2024 2024 Realization	Target Pertumbuhan Growth Target
Posisi Keuangan Konsolidasian dan Struktur Modal Consolidated Financial Position and Capital Structure			
Aset (Rp-Juta) Assets (Rp million)	12.676.015	10.083.888	25,71%
Liabilitas (Rp-Juta) Liabilities (Rp million)	1.452.996	1.560.838	(6,91%)
Ekuitas (Rp-Juta) Equity (Rp million)	11.223.019	8.523.050	31,68%
Rasio Ratios			
Imbalan terhadap Ekuitas (%) Return to Equity (%)	1,47	2,28	(50,17%)
Rasio Lancar (%) Current Ratio (%)	724,64	501,68	44,90%
Rasio Kas (%) Cash Ratio (%)	230,87	289,21	(33,13%)





05

TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE





KOMITMEN PENERAPAN GCG

COMMITMENT TO GCG IMPLEMENTATION

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, Perseroan menyadari bahwa diperlukan suatu komitmen nyata untuk menjaga kesinambungan usaha di situasi bisnis yang sangat kompetitif. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan tidak hanya bagi *Shareholder* namun juga segenap *Stakeholders*.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan komitmen nyata dari Perseroan dalam menerapkan tata kelola di lingkungan Perseroan. Komitmen penerapan GCG ini tidak hanya sekadar sebagai pemenuhan aturan yang berlaku namun sebagai praktik yang praktiknya dilandasi oleh kesadaran pentingnya GCG di Perseroan untuk menegakkan integritas dalam menjalankan bisnis yang sehat dan berkesinambungan.

Perseroan menjadikan tata kelola perusahaan sebagai instrumen untuk melaksanakan tanggung jawabnya terhadap penyelenggaraan usaha yang berkelanjutan dengan berdasarkan pada praktik-praktik bisnis terbaik (*best practices*). Selain itu, tata kelola juga merupakan upaya perbaikan dan penyempurnaan organisasi secara terus-menerus. Perseroan meyakini komitmen atas penerapan GCG yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan akan membawa dampak positif pada kinerja Perseroan secara keseluruhan. Karena itu, seluruh Insan Perseroan diharapkan untuk berperan aktif dalam penerapan GCG dan menjadikan GCG sebagai nilai utama dalam aktivitas di lingkungan Perseroan.

PRINSIP UMUM GCG

Penerapan GCG di PT PELNI (Persero) mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yang berlaku umum dalam rangka menjalankan praktik bisnis dengan standar etika tertinggi, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

In conducting its business activities, the Company recognizes the need for a genuine commitment to maintaining business sustainability in a highly competitive environment. The implementation of Good Corporate Governance (GCG) is a step towards continuously enhancing business value and long-term growth not only for the Shareholders but also for all Stakeholders.

To achieve these goals, the Company requires a firm commitment to implementing governance within the organization. The commitment to applying GCG is not merely a fulfillment of regulatory requirements but is practiced based on the awareness of its importance for upholding integrity in conducting a healthy and sustainable business.

The Company views corporate governance as an instrument to fulfill its responsibility in managing sustainable business operations based on best practices. Additionally, governance serves as an ongoing effort to improve and refine the organization. The Company believes that a consistent and continuous commitment to implementing GCG will positively impact its overall performance. Therefore, all Company personnel are expected to actively participate in GCG implementation and to embrace GCG as a core value in their activities within the organization.

GENERAL PRINCIPLES OF GCG

The implementation of GCG in PT PELNI (Persero) adheres to five fundamental principles commonly accepted for conducting business practices with the highest ethical standards, as outlined in the following table:

KOMITMEN PENERAPAN GCG

COMMITMENT TO GCG IMPLEMENTATION

Prinsip Principle	Penjelasan Explanation	Bentuk Implementasi di PT PELNI (Persero) Implementation at PT PELNI (Persero)
Transparansi Transparency	Transparansi (<i>transparency</i>), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Transparency, which refers to openness in the decision-making process and the disclosure of material and relevant information about the company.	Pengungkapan informasi yang transparan dilakukan oleh PT PELNI (Persero) dengan tetap mematuhi perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Dalam pelaksanaannya, PT PELNI (Persero) membuat kebijakan tentang klasifikasi informasi yang bersifat terbuka atau tertutup sebagai panduan pelaksanaan bagi seluruh Insan PT PELNI (Persero). Transparansi ini diwujudkan PT PELNI (Persero) dengan selalu mengungkapkan informasi baik keuangan maupun non keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan relevan. Transparansi diartikan terhadap Pemegang Saham dan juga kepada seluruh <i>stakeholders</i> Perusahaan. PT PELNI (Persero) ensures transparent disclosure of information while complying with applicable laws and GCG principles. Implementation includes a policy on classifying information as open or confidential, guiding all PT PELNI (Persero) personnel. Transparency is achieved by consistently disclosing both financial and non-financial information to relevant stakeholders, ensuring clarity for shareholders and all company stakeholders.
Akuntabilitas Accountability	Akuntabilitas (<i>accountability</i>), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Persero sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Accountability, which refers to the clarity of functions, implementation, and accountability of the Company's organs so that the management of the company is conducted effectively.	Persiapan akuntabilitas mengharuskan pimpinan Perusahaan mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Hal tersebut dilaksanakan dengan menetapkan rincian peran dan tanggung jawab masing-masing Organ Perusahaan dan Karyawan dengan menetapkan rincian peran dan tanggung jawab masing-masing Organ Perusahaan dan Karyawan secara jelas sesuai dengan visi, misi, sasaran dan strategi Perusahaan. PT PELNI (Persero) meyakini bahwa akuntabilitas berhubungan dengan keberadaan sistem yang mengatur hubungan antara individu dan/atau organ yang ada di Perusahaan. Accountability requires company leadership to transparently and fairly account for their performance. This is executed by clearly defining the roles and responsibilities of each Company Organ and Employee, aligning them with the Company's vision, mission, goals, and strategies. PT PELNI (Persero) believes accountability is linked to the existence of a system regulating the relationships between individuals and/or organs within the Company.
Pertanggungjawaban Responsibility	Pertanggungjawaban (<i>responsibility</i>), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Responsibility, which refers to the alignment of company management with statutory regulations and sound corporate principles.	Pertanggungjawaban diwujudkan dengan dipenuhinya antara lain kewajiban PT PELNI (Persero) dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat dan Daerah yang terkait dengan bidang usaha korporasi antara lain ketentuan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, kewajiban perpajakan, kesehatan dan keselamatan kerja dan persaingan usaha. Responsibility is realized by PT PELNI (Persero) fulfilling obligations under applicable laws and regulations from both central and local governments, covering areas such as labor, taxation, occupational health and safety, and business competition.
Kemandirian Independency	Kemandirian (<i>independency</i>), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa Benturan Kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Independency, which refers to a condition where the company is managed professionally without conflicts of interest and undue influence/pressure from any party, in accordance with statutory regulations and sound corporate principles.	Dalam pelaksanaannya, kemandirian dapat diwujudkan dengan selalu menghormati hak & kewajiban, tugas & tanggung jawab serta wewenang masing-masing Organ. Independency is manifested by respecting the rights & obligations, duties & responsibilities, and authorities of each Organ.

KOMITMEN PENERAPAN GCG

COMMITMENT TO GCG IMPLEMENTATION

Prinsip Principle	Penjelasan Explanation	Bentuk Implementasi di PT PELNI (Persero) Implementation at PT PELNI (Persero)
Kewajaran Fairness	Kewajaran (<i>fairness</i>), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fairness, which refers to justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders based on agreements and statutory regulations.	Keadilan dapat tercermin dalam pemberian kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberi masukan, saran dan pendapat bagi kepentingan Perusahaan. Sedangkan kesetaraan dapat terwujud dalam pola karir tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin dan juga diberlakukan sistem pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik paling sedikit diwujudkan dalam: 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab RUPS/ Menteri, Dewan Komisaris, dan Direksi; 2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite yang menjalankan fungsi pengendalian intern; 3. Penerapan fungsi kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern; 4. Penerapan Manajemen Risiko; 5. Pedoman Benturan Kepentingan; 6. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan; dan 7. Pedoman perilaku etika (<i>code of conduct</i>). Fairness is reflected in providing opportunities for stakeholders to offer input, suggestions, and opinions in the Company's interest. Equality is realized in career development practices without discrimination based on ethnicity, religion, race, gender, and in the procurement system for goods and services in accordance with applicable laws and regulations. The implementation of Good Corporate Governance principles is at least realized in: 1. The duties and responsibilities of the GMS/ Minister, the Board of Commissioners, and the Board of Directors; 2. The completeness and execution of duties of committees that perform internal control functions; 3. Implementation of compliance, Internal Audit, and External Audit functions; 4. Risk Management implementation; 5. Conflict of Interest Guidelines; 6. Transparency of financial and non-financial conditions; 7. Code of conduct ethics.

DASAR HUKUM PENERAPAN GCG

Penerapan GCG di lingkungan PT PELNI (Persero) mengacu pada sejumlah ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta ketentuan internal Perseroan. Selain itu, Perseroan juga melakukan *benchmark* terhadap *best practices* dalam penerapan GCG. Berbagai peraturan yang dijadikan rujukan penyusunan kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di PELNI antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14

LEGAL BASIS FOR GCG IMPLEMENTATION

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) at PT PELNI (Persero) adheres to various legal provisions in Indonesia and the company's internal regulations. Additionally, the company benchmarks against best practices in GCG implementation. The following regulations serve as references for developing Good Corporate Governance policies at PT PELNI (Persero):

1. Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises.
2. Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
3. Law of the Republic of Indonesia Number 14 of



KOMITMEN PENERAPAN GCG

COMMITMENT TO GCG IMPLEMENTATION

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. 6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. 7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. 8. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan <i>Governance</i> tahun 2021. 9. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran <i>Whistleblowing System</i> (WBS) dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan <i>Governance</i> Tahun 2008. 10. Akta Pendirian PT PELNI (Persero) Nomor 31 tanggal 30 Oktober 1975 yang dibuat dihadapan Soeleman Ardjasmita, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Nomor 10 tanggal 19 Desember 2008 tentang Penyesuaian Anggaran Dasar PT PELNI (Persero) dibuat dihadapan Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H. Sp.N., Notaris di Jakarta dan Akta Nomor 2 tanggal 7 Februari 2022 Tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia dibuat dihadapan Ida Adiningsih, S.H., Notaris di Jakarta beserta perubahan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor 1 tanggal 3 Oktober 2023 yang dibuat dihadapan Ida Adiningsih, S.H., Notaris di Jakarta.	2008 concerning Public Information Disclosure. 4. Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2008 concerning Shipping. 5. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Corporate Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises. 6. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Governance Guidelines and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. 7. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. 8. Indonesian Corporate Governance Manual (PUGKI) 2021 issued by the National Committee on Governance Policy in 2021. 9. Whistleblowing System Reporting Guidelines (WBS) issued by the National Committee on Governance Policy in 2008. 10. Deed of Establishment of PT PELNI (Persero) Number 31 dated October 30, 1975, made before Soeleman Ardjasmita, S.H., Notary in Jakarta; Deed Number 10 dated December 19, 2008, concerning the Adjustment of the Articles of Association of PT PELNI (Persero) made before Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H. Sp.N., Notary in Jakarta; and Deed Number 2 dated February 7, 2022, concerning Amendments to the Articles of Association of PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia made before Ida Adiningsih, S.H., Notary in Jakarta, along with the latest changes in the Deed of Statement of Decisions of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Number 1 dated October 3, 2023, made before Ida Adiningsih, S.H., Notary in Jakarta.



KOMITMEN PENERAPAN GCG

COMMITMENT TO GCG IMPLEMENTATION

TUJUAN PENERAPAN GCG

Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada PT PELNI (Persero) bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan nilai PT PELNI (Persero) agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan PT PELNI (Persero).
2. Mendorong pengelolaan PT PELNI (Persero) secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero;
3. Mendorong agar Organ Persero dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial PT PELNI (Persero) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT PELNI (Persero);
4. Meningkatkan kontribusi PT PELNI (Persero) dalam perekonomian nasional; dan
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

ROADMAP GCG

PT PELNI (Persero) memiliki komitmen yang kuat dan konsisten dalam menerapkan GCG di Perseroan. Perseroan berusaha memperbaiki dan menyempurnakan penerapan GCG di Perseroan, dengan membangun kesadaran pada insan Perseroan akan pentingnya penerapan GCG, maupun penetapan berbagai kebijakan pendukung. Perseroan berharap, melalui konsistensi penerapan GCG dapat mendorong peningkatan nilai Perseroan di hadapan seluruh pemangku kepentingan. Melalui *Roadmap* GCG, PT PELNI (Persero) berusaha untuk memberikan gambaran tentang langkah-langkah konkrit yang perlu dilakukan oleh seluruh elemen Perusahaan. Dengan demikian, penerapan GCG diharapkan dapat terus dilakukan secara menyeluruh dan konsisten dalam rangka mendukung tercapainya level *Good Corporate Citizen*, di mana GCG telah melekat dalam budaya internal

OBJECTIVES OF GCG IMPLEMENTATION

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles at PT PELNI (Persero) aims to:

1. Optimize the value of PT PELNI (Persero) to ensure strong competitiveness both nationally and internationally, enabling it to sustain its existence and achieve its purposes and objectives.
2. Encourage the professional, efficient, and effective management of PT PELNI (Persero), as well as empower and enhance the independence of its corporate organs.
3. Ensure that the corporate organs make decisions and take actions based on high moral values and compliance with regulatory provisions, with an awareness of PT PELNI (Persero) social responsibility towards stakeholders and environmental sustainability.
4. Increase PT PELNI (Persero) contribution to the national economy.
5. Foster a conducive climate for the development of national investment.

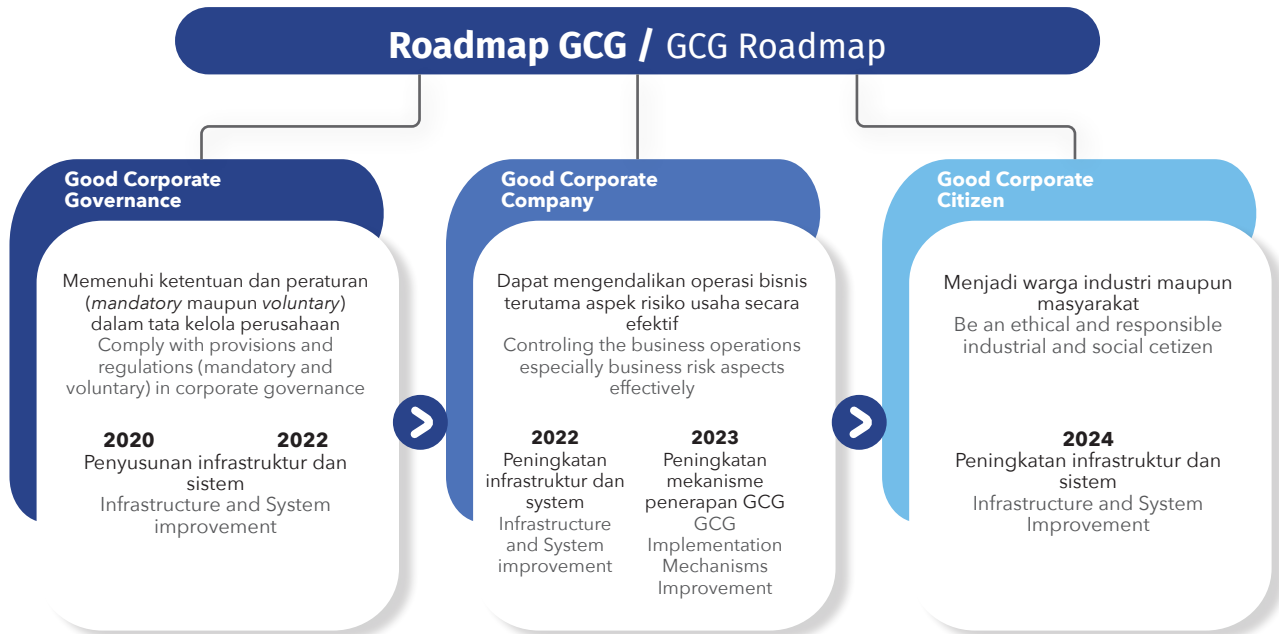
GCG ROADMAP

PT PELNI (Persero) is committed to the consistent and robust implementation of Good Corporate Governance (GCG) within the company. We strive to improve and enhance the application of GCG by fostering awareness among our personnel about its importance and establishing various supporting policies. Through the consistent application of GCG, the company aims to enhance its value in the eyes of all stakeholders. The GCG Roadmap of PT PELNI (Persero) outlines concrete steps to be undertaken by all elements of the company. The comprehensive and consistent implementation of GCG is anticipated to support the achievement of becoming a Good Corporate Citizen, where GCG is embedded in the company's internal culture in the future.

KOMITMEN PENERAPAN GCG

COMMITMENT TO GCG IMPLEMENTATION

perusahaan di masa depan.



MEKANISME PELAKSANAAN GCG

Mekanisme Tata Kelola merupakan proses penerapan prinsip *Corporate Governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perusahaan. Komitmen Perusahaan atas Tata Kelola Perusahaan yang baik dituangkan dalam *soft structure* berupa kebijakan dan prosedur operasional yang terkait GCG senantiasa diterapkan dalam kegiatan sehari-hari dan selalu di-review secara periodik untuk kemudian dikomunikasikan kepada seluruh elemen dan masing-masing level karyawan untuk dijadikan acuan/landasan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam Perseroan sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Perseroan.

STRUKTUR ORGAN GCG PERUSAHAAN

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan GCG, PELNI telah melengkapi Struktur Tata Kelola dengan membentuk unsur-unsur pendukung yang memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang secara individu maupun kolektif dan berperan penting terhadap

GCG IMPLEMENTATION MECHANISM

The Governance Mechanism is the process of applying Corporate Governance principles supported by adequate structure and infrastructure. The company's commitment to Good Corporate Governance (GCG) is reflected in the soft structure, which includes policies and operational procedures related to GCG. These are consistently applied in daily activities and periodically reviewed. The updated policies and procedures are then communicated to all elements and levels of employees to serve as a reference and foundation for applying GCG principles within the company. This ensures outcomes that meet the expectations of the company's stakeholders.

CORPORATE GCG STRUCTURE

To support the effective implementation of Good Corporate Governance (GCG), PT PELNI (Persero) has established a governance structure with supporting elements that have individual and collective duties, responsibilities, and authorities, playing a crucial role in

KOMITMEN PENERAPAN GCG

COMMITMENT TO GCG IMPLEMENTATION

kelancaran pelaksanaan GCG di Perseroan.

Struktur Tata Kelola merupakan organ atau perangkat yang dimiliki oleh Perseroan, baik organ atau perangkat yang dibentuk karena kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maupun organ atau perangkat yang dibentuk karena kebutuhan internal dalam rangka meningkatkan penerapan GCG.

Sesuai Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, struktur organ tata kelola perusahaan PELNI terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Ketiga organ tersebut disebut sebagai organ utama karena menjalankan peran kunci dalam keberhasilan pelaksanaan GCG.

Sementara itu, Organ Pendukung Perseroan merupakan Organ Perseroan yang membantu pelaksanaan tugas dan kewajiban dari Dewan Komisaris dan Direksi. Organ Pendukung Dewan Komisaris adalah perangkat Dewan Komisaris yang berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Organ Pendukung Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Sekretariat Dewan Komisaris. Sedangkan Organ Pendukung Direksi terdiri dari Divisi Kesekretariatan Perusahaan selaku pelaksana fungsi Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawasan Intern yang berada di bawah wewenang Direktorat Utama, serta Divisi Hukum dan Kepatuhan yang berada di bawah wewenang Direktorat Utama. Berikut adalah Struktur GCG PT PELNI (Persero):

the smooth implementation of GCG in the company.

The Governance Structure consists of organs or instruments established either to comply with prevailing laws and regulations or to meet internal needs to enhance GCG implementation.

In accordance with Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the company's Articles of Association, PT PELNI (Persero) corporate governance structure consists of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors. These three organs are referred to as the main organs because they play key roles in the successful implementation of GCG.

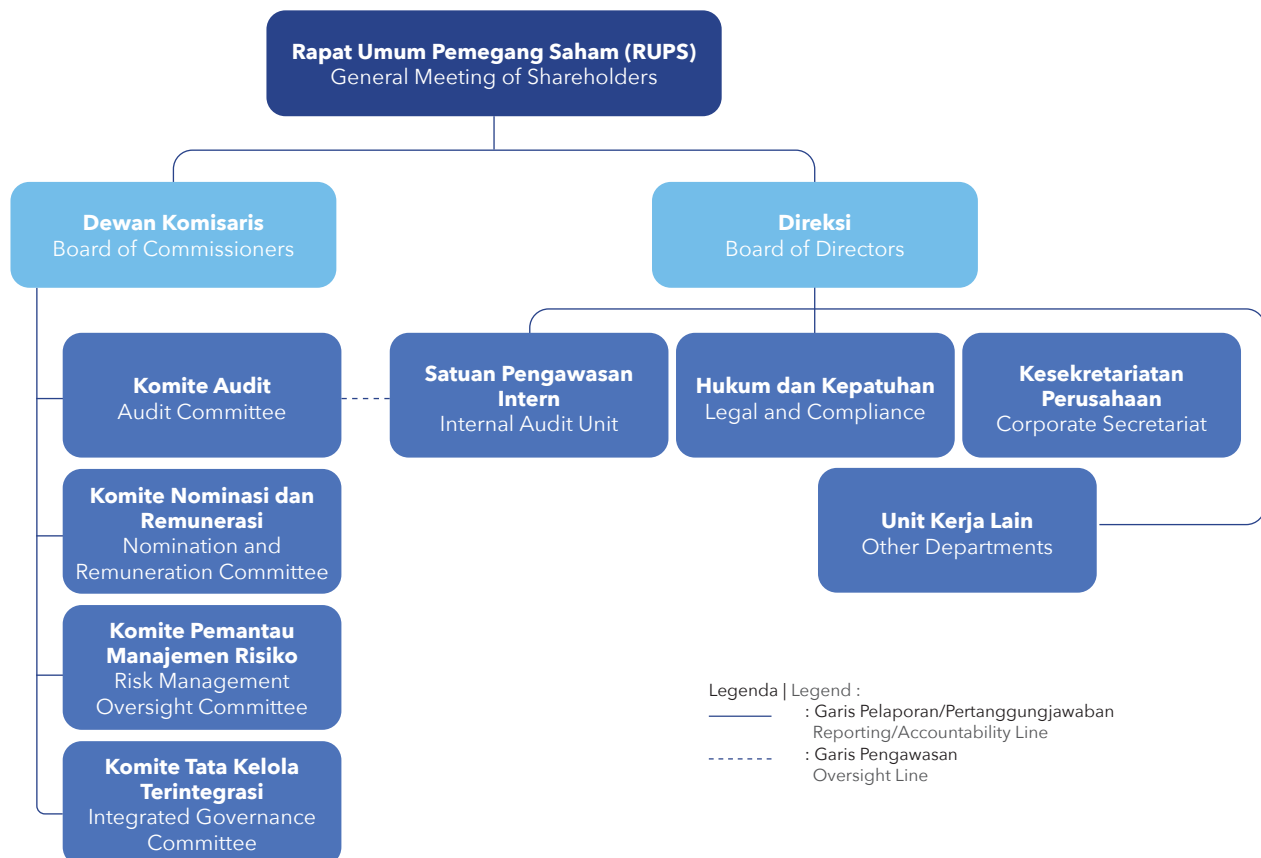
Meanwhile, the Supporting Organs of the Company assist the Board of Commissioners and the Board of Directors in carrying out their duties and obligations. The Supporting Organs of the Board of Commissioners include the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, the Risk Management Monitoring Committee, the Integrated Governance Committee, and the Secretariat of the Board of Commissioners. The Supporting Organs of the Board of Directors include the Corporate Secretariat Division, which performs the function of the Corporate Secretary, the Internal Audit Unit under the authority of the President Director, and the Legal and Compliance Division under the authority of the Finance and President Director. The following is the GCG Structure of PT PELNI (Persero):

KOMITMEN PENERAPAN GCG

COMMITMENT TO GCG IMPLEMENTATION

Struktur GCG PT PELNI (Persero)

Corporate Governance Structure of PT PELNI (Persero)



SOFT STRUCTURE GCG PERUSAHAAN

Dalam mendukung penerapan GCG di Perseroan, PELNI telah memiliki *Governance Soft Structure* yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan, agar senantiasa berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Adapun *Governance Soft Structure* yang dimiliki PELNI, sebagai berikut :

1. Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*);
2. Pedoman Perilaku dan Etika (*Code of Conduct*);
3. Pedoman Tata Laksana Kerja (*Board Manual*) Direksi dan Dewan Komisaris;
4. Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
5. Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan

COMPANY GCG SOFT STRUCTURE

To support the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the company, PT PELNI (Persero) has established a *Governance Soft Structure* that serves as a guideline for conducting the company's operational activities, ensuring they are always based on the principles of good corporate governance. The *Governance Soft Structure* at PT PELNI (Persero) includes the following:

1. General Guidelines for Good Corporate Governance (GCG)
2. Code of Conduct and Ethics
3. Board Manual for the Board of Directors and the Board of Commissioners
4. Guidelines for Gratification Control
5. Guidelines for the Whistleblowing System for Handling Alleged Violations

KOMITMEN PENERAPAN GCG

COMMITMENT TO GCG IMPLEMENTATION

- Pelanggaran (*Whistle Blowing System*);
6. Pedoman Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
 7. Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Perusahaan di Lingkungan PT PELNI (Persero);
 8. Pedoman Manajemen Terintegrasi di Lingkungan PT PELNI (Persero);
 9. Pedoman Sistem Pengendalian Intern PT PELNI (Persero);
 10. Pedoman dan Sistem Manajemen Risiko PT PELNI (Persero);
 11. Tata Kelola Teknologi Informasi PT PELNI (Persero);
 12. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PELNI (Persero);
 13. Pedoman Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000:2018 PT PELNI (Persero);
 6. Guidelines for the Gratification Control Unit (UPG)
 7. Guidelines for Reporting Wealth of Company Officials within PT PELNI (Persero)
 8. Guidelines for the Integrated Management within PT PELNI (Persero)
 9. Guidelines for the Internal Control System of PT PELNI (Persero)
 10. Guidelines and Risk Management System of PT PELNI (Persero)
 11. Information Technology Governance of PT PELNI (Persero)
 12. Guidelines for Procurement of Goods/Services of PT PELNI (Persero)
 13. Risk Management Guidelines Based on ISO 31000:2018 of PT PELNI (Persero)

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Meski demikian, RUPS tidak dapat mengintervensi tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Komisaris serta Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan atau pengurusan Perseroan dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengambilan keputusan di dalam RUPS senantiasa dilakukan secara wajar dan transparan, serta didasarkan pada kepentingan usaha Perseroan dalam jangka panjang.

INFORMASI PEMEGANG SAHAM

Sampai dengan saat ini, pemegang saham utama dan pengendali dari PT PELNI (Persero) adalah Pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN dengan jumlah kepemilikan saham 100% atau kepemilikan penuh.

The General Meeting of Shareholders, hereinafter referred to as GMS, is the highest governing body of the Company, holding all authority not delegated to the Board of Directors or the Board of Commissioners. However, the GMS cannot interfere with the duties, functions, and authorities of the Board of Commissioners and the Board of Directors in managing the Company's operations without diminishing the GMS's authority as stipulated in the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations. Decisions within the GMS are always made fairly and transparently, based on the long-term interests of the Company.

SHAREHOLDER INFORMATION

As of now, the principal and controlling shareholder of PT PELNI (Persero) is the Government of Indonesia, through the Ministry of State-Owned Enterprises, holding 100% of the shares or full ownership.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



HAK PEMEGANG SAHAM

1. PT PELNI (Persero) melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak pemegang saham;
2. PT PELNI (Persero) memastikan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas;
3. Hak pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam angka 1 meliputi:
 - a. Menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS, khusus bagi pemegang saham Persero, dengan ketentuan 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara;
 - b. Memperoleh informasi material mengenai PT PELNI (Persero), secara tepat waktu, terukur, dan teratur;
 - c. Menerima pembagian dari keuntungan PT PELNI (Persero) yang diperuntukkan bagi pemegang saham bentuk dividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham/modal yang dimilikinya;

SHAREHOLDER RIGHTS

1. Protection and Facilitation of Rights: PT PELNI (Persero) protects and facilitates the exercise of shareholder rights.
2. Fair Treatment: PT PELNI (Persero) ensures fair treatment for all shareholders, including minority shareholders.
3. Specific Rights:
 - a. Attendance and Voting: Shareholders can attend and vote at a General Meeting of Shareholders (GMS), with each share granting one vote.
 - b. Information Access: Shareholders are entitled to receive timely, accurate, and regular material information about PT PELNI (Persero).
 - c. Profit Distribution: Shareholders are entitled to dividends and the remaining assets from liquidation proportional to their shareholding.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- d. Hak semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham untuk diperlakukan setara yang didukung aturan dan prosedur PT PELNI (Persero), atau hak untuk menerima pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya;
 - e. PT PELNI (Persero) memiliki kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor;
 - f. PT PELNI (Persero) memastikan bahwa kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik berlaku bagi entitas anak dan entitas pengendali;
 - g. PT PELNI (Persero) memiliki aturan dan prosedur yang mengatur penggabungan, pengambilalihan, peleburan, pemisahan, pembubaran, likuidasi, dan transaksi luar biasa yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar serta melindungi hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya; dan
 - h. hak lainnya berdasarkan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Hak dimiliki pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham.
 5. Hak pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c, berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang yang mengatur perseroan terbatas.
 6. Pemegang saham melalui RUPS/Menteri harus memastikan perusahaan dijalankan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- d. Equal Treatment: All shareholders of the same series and class of shares are treated equally, supported by PT PELNI (Persero)'s rules and procedures, which include the disclosure of rules and procedures, as well as the disclosure of capital structure and arrangements that allow certain shareholders to gain influence or control disproportionately to their share ownership.
 - e. Communication Policy: PT PELNI (Persero) has a communication policy that facilitates and encourages shareholder or investor participation.
 - f. GCG Policies for Subsidiaries: PT PELNI (Persero) ensures that Good Corporate Governance (GCG) policies apply to its subsidiaries and controlled entities.
 - g. Rules for Significant Transactions: PT PELNI (Persero) has rules and procedures for mergers, acquisitions, consolidations, splits, dissolutions, liquidations, and significant extraordinary transactions to ensure they are conducted transparently and fairly, protecting the rights of all shareholders according to their class.
 - h. Other Rights: Shareholders have other rights as specified in the Articles of Association and applicable laws and regulations.
4. Recorded Shareholders: Rights are held by shareholders whose names are recorded in the shareholder register.
 5. Legal Consistency: Shareholder rights as mentioned in points a and c apply as long as they are not otherwise regulated by laws governing limited liability companies.
 6. GMS/MoSOE Responsibilities: Shareholders, through the GMS/Minister of State-Owned Enterprises, must ensure the company operates based on Good Corporate Governance principles.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

WEWENANG PEMEGANG SAHAM

RUPS adalah organ Persero yang memegang wewenang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Pengangkatan Komisaris dan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatuhan (*Fit And Proper Test*).
2. Mengambil keputusan mengenai:
 - a. Perubahan jumlah modal.
 - b. Perubahan Anggaran Dasar.
 - c. Rencana penggunaan laba.
 - d. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran Perusahaan.
 - e. Investasi dan pembiayaan jangka Panjang.
 - f. Kerjasama Perusahaan.
 - g. Pembentukan Anak Perusahaan atau penyertaan.
 - h. Pengalihan aktiva.
3. Menetapkan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi apabila RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi.
4. Menetapkan besar dan jenis penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Menunjuk dan menetapkan Auditor Eksternal Perusahaan dari calon yang diajukan Dewan Komisaris berdasarkan usul Komite Audit.
6. Mengesahkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) beserta perubahannya.
7. Memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS.
8. Menetapkan aturan perangkapan jabatan Dewan Komisaris bagi anggota Komisaris.
9. Anggaran Dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris Utusan.

SHAREHOLDER AUTHORITIES

The General Meeting of Shareholders (RUPS) is the highest authority within PT PELNI (Persero), holding powers not delegated to the Board of Directors or the Board of Commissioners.

1. Appointment and Dismissal: Appoint and dismiss members of the Board of Directors and Board of Commissioners through a Fit and Proper Test mechanism.
2. Decision-Making:
 - a. Change in capital amount.
 - b. Amendments to the Articles of Association.
 - c. Profit utilization plans.
 - d. Mergers, consolidations, acquisitions, splits, and dissolution of the Company.
 - e. Long-term investments and financing.
 - f. Company partnerships.
 - g. Formation of subsidiaries or equity participation.
 - h. Transfer of assets.
3. Delegation of Duties: Establish the division of tasks and management authority among the members of the Board of Directors if not determined by the RUPS.
4. Compensation: Determine the remuneration and type of income for the Board of Directors and the Board of Commissioners.
5. External Auditor: Appoint and determine the Company's External Auditor from candidates proposed by the Board of Commissioners based on the Audit Committee's recommendations.
6. Corporate Plans: Approve the Long-Term Corporate Plan (RJPP) and the Corporate Budget and Work Plan (RKAP) and their amendments.
7. Corporate Actions: Approve corporate actions that require RUPS approval/decision.
8. Concurrent Positions: Establish rules for concurrent positions of the Board of Commissioners for its members.
9. Independent Commissioners: The Articles of Association may specify one or more Independent Commissioners and one Commissioner Representative.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

10. Direksi menyusun dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris mengenai pencapaian kinerja perusahaan berdasarkan target-target kolegiat Direksi.
11. Direksi wajib menandatangani Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target KPI Direksi secara kolegiat dan KPI Direksi secara individual.
12. Selain ditandatangani oleh Direksi, Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target KPI Direksi secara kolegiat, ditandatangani juga oleh Dewan Komisaris dan RUPS/Menteri.
13. RUPS/Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Wakil Menteri untuk masing-masing BUMN yang berada di bawah pembinaannya guna menandatangani Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target KPI Direksi secara kolegiat.
14. Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target KPI Direksi secara individual ditandatangani oleh anggota Direksi dengan Direktur Utama dan Komisaris Utama.
15. Memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha Perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
16. Dewan Komisaris perusahaan melakukan penilaian terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan, serta memberikan penetapan tertulis (setuju atau tidak setuju) terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan Memberikan persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar:
 - a. Memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dan kinerja Dewan Komisaris;
 - b. Menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris;
10. Performance Reporting: The Board of Directors prepares and submits performance reports to the Board of Commissioners based on the collective targets of the Board of Directors.
11. Annual Management Contract: The Board of Directors must sign the Annual Management Contract, which includes collective and individual Key Performance Indicators (KPIs).
12. Signatories of Management Contract: The Annual Management Contract signed by the Board of Directors also requires signatures from the Board of Commissioners and RUPS/Minister.
13. Substitution Authority: The RUPS/Minister may delegate authority with substitution rights to the Deputy Minister for each state-owned enterprise (BUMN) under their supervision to sign the Annual Management Contract with collective KPIs.
14. Individual Management Contract: The Annual Management Contract with individual KPIs is signed by Board members with the President Director and Chief Commissioner.
15. Business Decisions: Provide decisions necessary to safeguard the Company's business interests in the short and long term in accordance with laws and/or the Articles of Association.
16. Sub-Entity Oversight: The Board of Commissioners evaluates the appointment process of the Board of Directors and Board of Commissioners of subsidiaries/joint ventures and provides written approval (agree or disagree) on these appointments. RUPS also approves the Annual Report, including financial statements and the Board of Commissioners' supervisory duties report as required by laws and/or the Articles of Association:
 - a. Evaluate the performance of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
 - b. Determine salaries/honorariums, allowances, facilities, and performance incentives for the Board of Directors and the Board of Commissioners.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

c. Menetapkan Auditor Eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan; d. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan Keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS; e. Menetapkan penggunaan laba bersih; f. Pengumuman neraca dan laporan laba rugi dilakukan paling lambat 7 hari setelah mendapat Pengesahan RUPS. 17. Mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan; 18. Melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya; a. Memberikan arahan/pembinaan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik kepada Direksi dan Dewan Komisaris; b. Memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan; c. Tidak mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi; d. Merespon informasi yang diterima dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris mengenai gejala penurunan kinerja dan kerugian Perusahaan yang signifikan.	c. Appoint an External Auditor to audit the Company's financial statements. d. Approve the Annual Report, including financial statements and the Board of Commissioners' supervisory report. e. Determine the use of net profit. f. Announce the balance sheet and income statement no later than 7 days after RUPS approval. 17. Fair and Transparent Decision-Making: Make decisions through an open, fair, and accountable process. 18. Good Corporate Governance: Implement Good Corporate Governance in accordance with their authority and responsibility: a. Provide guidance on the implementation of Good Corporate Governance to the Board of Directors and the Board of Commissioners. b. Guide the Board of Directors on the implementation of the Company's plans and policies. c. Refrain from interfering with the Company's operational activities, which are the responsibility of the Board of Directors. d. Respond to information received from the Board of Directors and/or the Board of Commissioners regarding significant performance declines and Company losses.

PERLAKUAN SETARA PARA PEMEGANG SAHAM

Pemegang saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama harus diperlakukan setara (*equal treatment*).

EQUAL TREATMENT OF SHAREHOLDERS

Shareholders holding shares of the same classification must be treated equally.

AKUNTABILITAS PEMEGANG SAHAM

1. Perseroan melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak pemegang saham dan memastikan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Perseroan memastikan bahwa sesuai dengan aturan perundangan berlaku, pemegang saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka.

SHAREHOLDER ACCOUNTABILITY

1. The Company protects and facilitates the exercise of shareholder rights and ensures fair treatment of all shareholders, including minority shareholders. The Company ensures that, in accordance with applicable regulations, shareholders have the opportunity to receive effective remedies for any violations of their rights.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

2. Pemegang saham melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
3. Kegiatan operasional perusahaan menjadi tanggung jawab Direksi, tidak dicampuri pemegang saham.

JENIS RUPS

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari:

- a. RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan tiap-tiap tahun meliputi:

- i. Rapat Umum Pemegang Saham mengenai persetujuan laporan tahunan;
- ii. Rapat Umum Pemegang Saham mengenai persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

RUPS/Menteri memberikan persetujuan laporan tahunan telah diaudit (*audited*) termasuk pengesahan atas laporan keuangan tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku yang bersangkutan berakhir dan dalam Rapat tersebut Direksi menyampaikan:

- i. Laporan Tahunan.
- ii. Usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan.
- iii. Hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan Perseroan.

RUPS memberikan pengesahan atas rancangan RKAP paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan dan dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan:

- i. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan termasuk proyeksi laporan keuangan.

2. Shareholders must adhere to Good Corporate Governance principles according to their authority and responsibilities.
3. The operational activities of the company are the responsibility of the Board of Directors and should not be interfered with by shareholders.

TYPES OF GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS

1. The General Meeting of Shareholders (GMS) consists of:

- a. Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)

The Annual General Meeting of Shareholders is held each year and includes:

- i. A General Meeting of Shareholders for the approval of the annual report.
- ii. General Meeting of Shareholders for the approval of the Company's Work Plan and Budget.

The GMS/Minister provides approval for the audited annual report, including ratification of the annual financial statements, no later than 6 (six) months after the end of the relevant fiscal year. During this meeting, the Board of Directors presents:

- i. The Annual Report.
- ii. Proposals for the use of the Company's Net Profit.
- iii. Other matters requiring GMS approval for the benefit of the Company.

The GMS provides ratification of the draft Company Work Plan and Budget (RKAP) no later than 30 (thirty) days after the current fiscal year, during which the Board of Directors presents:

- i. The draft Company Work Plan and Budget, including financial projections.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- ii. Hal-hal yang perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk kepentingan Perseroan yang belum dicantumkan dalam rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

- ii. Matters requiring GMS approval for the benefit of the Company that are not included in the draft Company Work Plan and Budget.

2. RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu, jika dianggap perlu, berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. RUPS Luar Biasa dapat dilakukan secara *on paper* (sirkuler), yaitu pengambilan keputusan oleh Pemegang Saham tanpa melakukan rapat secara fisik.

Tempat dan Pemanggilan RUPS, Ketua dan Berita Acara RUPS, Korum, Hak Suara dan Keputusan diatur dalam Anggaran Dasar.

2. Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)

The Extraordinary General Meeting of Shareholders can be held at any time, if deemed necessary, based on the needs of the Company. The EGMS can be conducted in writing (circular resolution), where decisions are made by the Shareholders without a physical meeting.

The location and convening of the GMS, the Chairperson and Minutes of the GMS, quorum requirements, voting rights, and decisions are regulated in the Articles of Association.

PELAKSANAAN RUPS DI TAHUN 2024

Sepanjang tahun 2024, Perseroan menyelenggarakan 3 (tiga) kali RUPS yaitu RUPS RKAP 2024, dan RUPS Tahun Buku 2023.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IMPLEMENTATION IN 2024

Throughout 2024, the Company convened three General Meetings of Shareholders, namely the 2024 Work Plan and Budget (RKAP) GMS, and the Annual GMS for the 2023 Fiscal Year.

RUPS RKAP Tahun 2024

GMS for the Ratification of 2024 Work Plan and Budget (RKAP)

Tahapan Penyelenggaraan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2024

Stages of Organizing the GMS for the Approval of the 2024 Work Plan and Budget

Pemanggilan RUPS AGMS Invitation

Pemanggilan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2024 kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham PT PELNI (Persero) disampaikan melalui Surat Undangan No.01.12/03/S-B/DU/2024 tanggal 12 Januari 2024 perihal Undangan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2024 PT PELNI (Persero).

The notice for the GMS to Ratify the 2024 RKAP was submitted to the Minister of State-Owned Enterprises as the Shareholder of PT PELNI (Persero) through Invitation Letter No. 01.12/03/S-B/DU/2024 dated 12 January 2024 regarding the Invitation to the GMS for the Ratification of the 2024 RKAP of PT PELNI (Persero).

Pelaksanaan RUPS AGMS Implementation

1. RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 di Hotel Aryaduta.
2. RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2024 dipimpin oleh Ibu Desty Arlaini (Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN) selaku wakil Pemerintah sebagai Pemegang Saham

1. The GMS for the Ratification of the 2024 RKAP was held on Monday, 29 January 2024, at the Aryaduta Hotel.
2. The meeting was chaired by Ms. Desty Arlaini (Deputy Assistant for Logistics Services, Ministry of SOEs), representing the Government as Shareholder.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Risalah RUPS Minutes of the AGMS	Risalah RUPS RKAP Tahun 2024 diaktakan dalam Akta No. 48 tanggal 29 Januari 2024 mengenai Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Emmy Yatmini, S.H. di Jakarta. The minutes of the 2024 RKAP GMS were notarized under Deed No. 48 dated 29 January 2024 concerning the Ratification of the 2024 Work Plan and Budget (RKAP), drawn up before Notary Emmy Yatmini, S.H., in Jakarta.

Peserta RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2024

Participants of the GMS for the Approval of the 2024 Work Plan and Budget (RKAP)

Pemegang Saham Shareholders	Desty Arlaini (Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN), sebagaimana Surat Kuasa Menteri BUMN Nomor: SKU-25/MBU/01/2024 tanggal 26 Januari 2024. Desty Arlaini (Assistant Deputy for Logistics Services at the Ministry of SOEs), as per the Power of Attorney from the Minister of SOEs Number: SKU-25/MBU/01/2024 dated January 26, 2024.
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir: 1. Muhammad Awaluddin (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) 2. Budi Mantoro (Komisaris) 3. Eddy Susanto Soepadmo (Komisaris) 4. Kristia Budiarto (Komisaris Independen) 5. Faturohman (Komisaris) Tidak Hadir: Nihil Attendance: 1. Muhammad Awaluddin (President Commissioner and Independent Commissioner) 2. Budi Mantoro (Commissioner) 3. Eddy Susanto Soepadmo (Commissioner) 4. Kristia Budiarto (Independent Commissioner) 5. Faturohman (Commissioner) Absent: None
Direksi Directors	Hadir: 1. Tri Andayani (Direktur Utama) 2. Heri Purnomo (Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum) 3. Nuraini Dessy Winiastuty (Direktur Usaha Angkutan Penumpang) 4. Robert MP Sinaga (Direktur Armada dan Teknik) 5. Yossianis Marciano (Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut) 6. Anik Hidayati (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko) Tidak Hadir: Nihil Attendance: 1. Tri Andayani (President Director) 2. Heri Purnomo (Director of Human Capital and General Affairs) 3. Nuraini Dessy Winiastuty (Director of Passenger Transport Services) 4. Robert MP Sinaga (Director of Fleet and Engineering) 5. Yossianis Marciano (Director of Freight and Sea Toll Services) 6. Anik Hidayati (Director of Finance and Risk Management) Absent: None

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kuorum Kehadiran RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2024

RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2024 telah dihadiri seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta perwakilan Pemegang Saham. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2024 tersebut telah terpenuhi sebagaimana yang disyaratkan dalam anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelibatan Pihak Eksternal dalam RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2024

Dalam penyelenggaraan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2024, PT PELNI (Persero) melibatkan pihak eksternal independen, yaitu Notaris Emi Yatmini, S.H. selaku pihak yang Menyusun notulensi rapat dan mengesahkan akta RUPS.

Quorum Attendance of the 2024 RKAP Approval GMS

The 2024 RKAP Approval General Meeting of Shareholders (GMS) was attended by all members of the Board of Commissioners and Directors, as well as the representative of the Shareholder. The quorum for attendance and decisions for the 2024 RKAP Approval GMS was met as required by the articles of association and the prevailing laws and regulations.

Involvement of External Parties in the 2024 RKAP Approval GMS

In the organization of the 2024 RKAP Approval GMS, PT PELNI (Persero) involved an independent external party, Notary EmiYatmini, S.H., who was responsible for recording the minutes of the meeting and certifying the GMS deed.

Keputusan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2024

Resolution of the GMS on the Ratification of the 2024 Work Plan and Budget (RKAP)

AGENDA PERTAMA FIRST AGENDA	
Agenda	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 serta Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2024. Ratification of the 2024 Work Plan and Budget (RKAP) and the 2024 Work Plan and Budget of the Board of Commissioners
Hasil Keputusan Resolution	Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 serta Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2024 PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dengan pokok-pokok sebagai berikut: - Laba (Rugi) Konsolidasi - Pendapatan sebesar Rp6.498.772.913.550,- - Laba Usaha sebesar Rp196.178.163.497,- - EBITDA sebesar Rp663.243.314.004,- - Laba Bersih sebesar Rp185.256.582.480,- - Laba Bersih (Atribusi Induk) sebesar Rp184.390.359.507,- - Posisi Keuangan Konsolidasi - Total Aset sebesar Rp11.423.870.959.453,- - Ekuitas sebesar Rp10.254.964.883.443,- - Interest Bearing Debt sebesar Rp218.835.977.925,- - Net Operating Cashflow sebesar Rp352.136.870.369,- - Capital Expenditure sebesar Rp1.322.053.344.800,- The General Meeting of Shareholders ratified the 2024 Work Plan and Budget (RKAP) as well as the 2024 Work Plan and Budget of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), with the following key highlights: - Consolidated Profit (Loss): - Revenue: Rp6,498,772,913,550 - Operating Profit: Rp196,178,163,497 - EBITDA: Rp663,243,314,004 - Net Profit: Rp185,256,582,480 - Net Profit (attributable to the parent): Rp184,390,359,507 - Consolidated Financial Position: - Total Assets: Rp11,423,870,959,453 - Equity: Rp10,254,964,883,443 - Interest Bearing Debt: Rp218,835,977,925 - Net Operating Cash Flow: Rp352,136,870,369 - Capital Expenditure: Rp1,322,053,344,800

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

AGENDA KEDUA SECOND AGENDA

Agenda	Pengesahaan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun 2024. Ratification of the 2024 Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program (RKA-TJSL)
Hasil Keputusan Resolution	Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun 2024 PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dengan Total Pendanaan PUMK sebesar Rp1.200.000.000,- dan Community Involvement & Development (CID) sebesar Rp6.900.000.000,- Ratified the 2024 Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility (TJSL) Program of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), with total funding consisting of Rp1,200,000,000 for the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) and Rp6,900,000,000 for Community Involvement & Development (CID) initiatives.

AGENDA KETIGA THIRD AGENDA

Agenda	Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat Target <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Direksi secara Kolegial dan Dewan Komisaris Tahun 2024. Determination of the Annual Management Contract Containing the 2024 Key Performance Indicator (KPI) Targets for the Board of Directors and the Board of Commissioners.
Hasil Keputusan Resolution	Menetapkan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) antara Direksi dan Dewan Komisaris secara kolegial Tahun 2024, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Approved the Annual Management Contract outlining the collegial Key Performance Indicator (KPI) targets for the Board of Directors and the Board of Commissioners for the year 2024, as attached and forming an integral part of this resolution.

AGENDA KEEMPAT FOURTH AGENDA

Agenda	Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai masing-masing program investasi sepanjang tidak mengubah total nilai investasi. Approval of the delegation of authority to the Board of Commissioners to provide approval if there are actions that result in changes to the investment budget allocation with a maximum value of 10% (ten percent) of the value of each investment program as long as it does not change the total investment value.
Hasil Keputusan Resolution	Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai masing-masing program investasi sepanjang tidak mengubah total nilai investasi. Approve the delegation of authority to the Board of Commissioners to provide approval if there are actions that result in changes to the investment budget allocation with a maximum value of 10% (ten percent) of the value of each investment program as long as it does not change the total investment value.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

AGENDA KELIMA

FIFTH AGENDA

Agenda	Persetujuan Rencana Penugasan Khusus Perseroan pada Tahun 2024. Approval of the Company's 2024 Special Assignment Plan.
Hasil Keputusan Resolution	Menyetujui rencana penugasan khusus PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) tahun 2024 dalam rangka: - Penyelenggaraan kewajiban pelayanan public angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal dan/ atau wilayah terpencil; - Penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis milik negara; dan - Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut dari dan ke daerah Tertinggal, Terpinggal, Terluar dan Perbatasan. Persetujuan tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, yang mengatur bahwa apabila penugasan tersebut secara finansial tidak fisibel, Pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN, termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan. The General Meeting of Shareholders approved the 2024 special assignment plan of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), which includes: - The implementation of public service obligations for sea transportation to underdeveloped and/or remote areas; - The operation of public service activities using state-owned pioneer vessels; and - The implementation of public service obligations for freight transportation to and from underdeveloped, remote, outermost, and border areas. This approval is granted with due regard to the provisions of Article 66 of Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and other applicable laws and regulations, which stipulate that if such assignment is financially unfeasible, the Government must provide compensation for all costs incurred by the SOE, including a reasonable margin in accordance with the scope of the assigned duties.

Arahan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2024 dan Tindak Lanjutnya

Dalam melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024, Dewan Komisaris dan Direksi diminta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Gms Directions for Approval of The 2024 RKAP and Follow-Up

In implementing the 2024 Company Work Plan and Budget (RKAP), the Board of Commissioners and Directors are asked to pay attention to the following matters:

Arahan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2024 dan Tindak Lanjutnya

GMS Directions for Approval of the 2024 RKAP and Follow-Up

No	Arahan Pemegang Saham Shareholders Direction	Tindak Lanjut Follow-up
1	Program komersialisasi melalui pemanfaatan kapal pengganti untuk penugasan Tol Laut agar dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi value added berupa kontribusi tambahan pendapatan bagi Perusahaan yang disertai dengan jaminan untuk memberikan kepastian bahwa apabila kapal pengganti dibutuhkan untuk penugasan Tol Laut maka PT PELNI menjamin ketersediaan kapal dimaksud. The commercialization program through the utilization of substitute vessels for Sea Toll assignments must be implemented with due consideration to potential value added in the form of additional revenue for the Company, while ensuring a commitment that PT PELNI guarantees the availability of such vessels if required for Sea Toll assignments.	Sudah ditindaklanjuti Completed
2	Pelaksanaan investasi agar sesuai dengan timeline, dengan berpedoman pada rencana (<i>cost & schedule</i>), utamanya untuk pengadaan 1 (satu) unit Kapal RoRo yang sumber dananya berasal dari sisa dana PMN TA 2015, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan targetnya. Investment implementation must follow the set timeline and refer to the planned cost and schedule, particularly for the procurement of one RoRo vessel funded by the remaining 2015 State Capital Injection (PMN), ensuring timely completion in line with the target.	Sudah ditindaklanjuti Completed
3	Direksi agar meningkatkan pembinaan pada anak Perusahaan mengingat adanya peningkatan target yang cukup signifikan untuk tahun 2024, sehingga kinerja anak Perusahaan dapat tumbuh dan mencapai target. The Board of Directors must strengthen oversight of subsidiaries, considering the significant increase in performance targets for 2024, to ensure growth and achievement of targets by the subsidiaries.	Sudah ditindaklanjuti Completed



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No	Arahan Pemegang Saham Shareholders Direction	Tindak Lanjut Follow-up
4	Dalam rangka perbaikan tata kelola penugasan untuk menjaga sustainability Perusahaan, Direksi agar melakukan reviu skema penugasan secara menyeluruh dan menyusun perbaikan yang harus dilakukan, dalam pelaksanaannya agar tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kapasitas usaha dan kondisi keuangan BUMN agar dapat berjalan beriringan, pelaksanaan perbaikan skema tersebut termasuk yang mendukung program penggantian kapal secara mandiri dalam jangka Panjang. In improving the governance of government-assigned tasks to maintain the Company's sustainability, the Board of Directors must conduct a comprehensive review of the current assignment scheme and formulate necessary improvements. Implementation should strike a balance between the Government's interest in providing public service and the SOE's business capacity and financial condition. Improvements may include support for the long-term vessel replacement program through self-financing schemes.	Sudah ditindaklanjuti Completed
5	Direksi agar menyusun rencana jangka panjang secara komprehensif yang selanjutnya dapat dirinci ke dalam program-program, termasuk <i>roadmap</i> investasi kapal serta rencana pembiayaannya. The Board of Directors must formulate a comprehensive long-term plan, broken down into actionable programs, including a vessel investment roadmap and its corresponding financing plan.	Sudah ditindaklanjuti Completed
6	Melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka memperluas jangkauan <i>market</i> kegiatan usaha Perusahaan melalui optimalisasi pelaksanaan strategi marketing serta intensif melaksanakan <i>canvassing</i> kepada <i>potential partners</i>. Strategic efforts should be undertaken to expand the market reach of the Company's business activities through optimized marketing strategies and intensive canvassing of potential partners.	Sudah ditindaklanjuti Completed
7	Atas rencana inisiatif strategis <i>spin off Strategic Business Unit</i> (SBU) Galangan Pelni Surya menjadi bagian dari anak Perusahaan (PT Pelita Indonesia Djaya) dalam rangka pengembangan bisnis <i>shipchandler</i>, Direksi agar menyusun kajian yang komprehensif atas rencana dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri BUMN untuk mendapatkan persetujuan. Regarding the strategic initiative to spin off the Pelni Surya Shipyard Strategic Business Unit (SBU) as part of a subsidiary (PT Pelita Indonesia Djaya) for the development of the shipchandler business, the Board of Directors is instructed to prepare a comprehensive study of the proposed plan and submit it to the Minister of SOEs for approval.	Sudah ditindaklanjuti Completed
8	RKAP yang disahkan merupakan pedoman bagi Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha dan pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan perusahaan Tahun 2024 dan berkomitmen untuk mencapai target-target RKAP 2024 dan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) tahun 2024. RKAP tersebut agar dirinci menjadi program dan target bulanan dan triwulanan untuk memudahkan monitoring dan evaluasi pencapaiannya, dan dilakukan cascading ke seluruh jajaran Perusahaan, serta dalam pelaksanaannya senantiasa berpedoman pada prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG). The ratified RKAP serves as a reference for the Board of Directors in carrying out business activities and for the Board of Commissioners in supervising the Company in 2024. Both are expected to commit to achieving the 2024 RKAP targets and Key Performance Indicators (KPIs). The RKAP should be detailed into monthly and quarterly programs and targets to facilitate monitoring and evaluation, cascaded throughout the Company, and implemented in accordance with Good Corporate Governance (GCG) principles.	Sudah ditindaklanjuti Completed
9	Direksi agar menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas temuan, serta saran dan rekomendasi auditor, baik auditor eksternal (BPK RI dan/atau KAP) maupun auditor internal (SPI) di tahun 2023 maupun tahun-tahun sebelumnya. Tindak lanjut penyelesaian temuan/saran auditor agar dibahas secara komprehensif dengan Dewan Komisaris dan dilaporkan secara tertulis kepada Pemegang Saham. The Board of Directors must follow up on and fully resolve findings, suggestions, and recommendations from both external (BPK RI and/or Public Accounting Firms) and internal auditors (Internal Audit Unit/SPI) from 2023 and prior years. The follow-up process must be discussed comprehensively with the Board of Commissioners and reported in writing to the Shareholder.	Sudah ditindaklanjuti Completed
10	Menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik selambat-lambatnya minggu ke-1 April 2024 dan melakukan <i>Audit Upon Procedure</i> (AUP) atas paket informasi laporan audit dan selanjutnya menyampaikan beserta laporan audit paling lambat minggu ke-2 April 2024. Submit the Company's Annual Report, including the 2023 Audited Financial Statements, no later than the first week of April 2024, and perform an Audit Upon Procedure (AUP) on the audited report package, to be submitted with the audit report by no later than the second week of April 2024.	Sudah ditindaklanjuti Completed



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No	Arahan Pemegang Saham Shareholders Direction	Tindak Lanjut Follow-up
11	Surat Menteri BUMN No: 491/MBU/09/2023 tanggal 29 September 2023 perihal Aspirasi Pemegang Saham untuk Penyusunan RKAP Tahun 2024, Buku RKAP 2024, surat Dewan Komisaris Nomor: 01/DK/PI/I-2024 tanggal 3 Januari 2024 perihal Tanggapan atas Usulan RKAP Tahun 2024, <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Direksi secara Kolegial yang tertuang dalam Kontra Manajemen dan KPI Dewan Komisaris, serta Risalah Rapat TJSL Nomor: RIS-18/DSI.MBU.B/12/2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini dan agar mendapat perhatian serius serta ditindaklanjuti. The Minister of SOEs' Letter No. 491/MBU/09/2023 dated 29 September 2023 regarding Shareholder Aspirations for the 2024 RKAP Preparation; the Board of Commissioners' Letter No. 01/DK/PI/I-2024 dated 3 January 2024 regarding Response to the 2024 RKAP Proposal; the collegial KPIs of the Board of Directors as stated in the Management Contract; the KPIs of the Board of Commissioners; and the TJSL Meeting Minutes No. RIS-18/DSI.MBU.B/12/2023, form an integral part of this resolution and must be given serious attention and followed up accordingly.	Sudah ditindaklanjuti Completed

RUPS Tahunan

Annual GMS

Tahapan Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

Stages of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2023 Fiscal Year

Pemanggilan RUPS AGMS Invitation	Pemanggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham PT PELNI (Persero) disampaikan melalui Surat Undangan Nomor 05.20/01/S-B/DU/2024 tanggal 20 Mei 2024 perihal Undangan RUPS Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Tahun Buku 2023. The invitation for the 2022 Annual GMS to the Minister of BUMN as the Shareholder of PT PELNI (Persero) was conveyed via Invitation Letter Number 06.07/02/SB/DU/2023 dated 7 June 2023 regarding the Invitation to the GMS for the 2022 Financial Report of PT PELNI (Persero).
Pelaksanaan RUPS AGMS Implementation	- RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024 pukul 15.30 WIB di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta. - RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dipimpin oleh Ibu Desty Arlaini (Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN) selaku wakil Pemerintah sebagai Pemegang Saham. - The Annual General Meeting of Shareholders for the 2023 Fiscal Year was held on Tuesday, 4 June 2024, at 3:30 PM Western Indonesia Time (WIB) at Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta. - The meeting was chaired by Ms. Desty Arlaini (Deputy Assistant for Logistics Services, Ministry of State-Owned Enterprises), representing the Government as Shareholder.
Risalah RUPS Minutes of the AGMS	Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 diaktakan dalam Akta No. 01 tanggal 04 Juni 2024 mengenai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan PT PELNI (Persero) yang dibuat di hadapan Notaris Emmy Yatmini, S.H. di Jakarta. The minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2023 Fiscal Year were notarized under Deed No. 01 dated 4 June 2024 concerning the Minutes of the General Meeting of Shareholders of PT PELNI (Persero), drawn up before Notary Emmy Yatmini, S.H., in Jakarta.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Peserta RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

Participants of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2023 Fiscal Year

Pemegang Saham Shareholders	Desty Arlaini (Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN), sebagaimana Surat Kuasa Menteri BUMN Nomor: SKU-64/MBU/05/2024 tanggal 31 Mei 2024. Desty Arlaini (Assistant Deputy for Logistics Services at the Ministry of SOEs), as per the Power of Attorney from the Minister of SOEs Number: SKU-64/MBU/05/2024 dated May 31, 2024.
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir: 1. Muhammad Awaluddin (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) 2. Budi Mantoro (Komisaris) 3. Eddy Susanto Soepadmo (Komisaris) 4. Kristia Budiarto (Komisaris Independen) 5. Faturohman (Komisaris) Tidak Hadir: Nihil Attendance: 1. Muhammad Awaluddin (President Commissioner and Independent Commissioner) 2. Budi Mantoro (Commissioner) 3. Eddy Susanto Soepadmo (Commissioner) 4. Kristia Budiarto (Independent Commissioner) 5. Faturohman (Commissioner) Absent: None
Direksi Directors	Hadir: 1. Tri Andayani (Direktur Utama) 2. Heri Purnomo (Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum) 3. Nuraini Dessy Winiastuty (Direktur Usaha Angkutan Penumpang) 4. Robert MP Sinaga (Direktur Armada dan Teknik) 5. Yossianis Marciano (Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut) 6. Anik Hidayati (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko) Tidak Hadir: Nihil Attendance: 1. Tri Andayani (President Director) 2. Heri Purnomo (Director of Human Capital and General Affairs) 3. Nuraini Dessy Winiastuty (Director of Passenger Transport Services) 4. Robert MP Sinaga (Director of Fleet and Engineering) 5. Yossianis Marciano (Director of Freight and Sea Toll Services) 6. Anik Hidayati (Director of Finance and Risk Management) Absent: None

Kuorum Kehadiran RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 telah dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta perwakilan Pemegang Saham. Kuorum kehadiran dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tersebut telah terpenuhi sebagaimana yang disyaratkan dalam anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Quorum for Attendance at the Annual GMS for Fiscal Year 2023

The Annual GMS for Fiscal Year 2023 was attended by all members of the Board of Commissioners and Directors as well as representatives of Shareholders. The attendance quorum and decisions of the 2023 Annual GMS have been fulfilled as required in the articles of association and applicable laws and regulations.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Pelibatan Pihak Eksternal dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

Dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023, PT PELNI (Persero) melibatkan pihak eksternal independen, yaitu Notaris Emmy Yatmini, S.H sebagai penyusun notulensi rapat dan akta RUPS.

Involvement of External Parties in the Annual GMS for Fiscal Year 2023

In holding the Annual GMS for Fiscal Year 2023, PT PELNI (Persero) involved an independent external party, namely Notary Emi Yatmini, SH as the compiler of meeting minutes and GMS deeds.

Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2023 Fiscal Year

AGENDA PERTAMA FIRST AGENDA	
Agenda	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggungjawab sepenuhnya (<i>Volledig Acquit et de Charge</i>) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2023; Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements, Approval of the Board of Commissioners' Supervisory Report, and Ratification of the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2023 Fiscal Year, along with the Full Release and Discharge (<i>Volledig Acquit et de Charge</i>) of the Board of Directors for the Management Actions and the Board of Commissioners for the Supervisory Actions Carried Out During the 2023 Fiscal Year;
Hasil Keputusan Resolution	- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada 31 Desember 2023. - Mengesahkan: - Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan Tahun Buku 2023 yang berakhir pada 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik dan Indra sesuai Laporannya Nomor: 00056/2.0999/AU.1/06/0139-3/1/IV/2024 tanggal 1 April 2024 dengan opini "wajar dalam semua hal yang material" dengan pokok-pokok sebagai berikut: Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 ditutup dengan: - Total Aset sebesar Rp8.036.032.497.605 - Total Liabilitas sebesar Rp1.212.291.504.600 - Ekuitas sebesar Rp6.823.740.993.005 Laporan Laba (Rugi) Konsolidasian Laba Bersih setelah Pajak Konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp201.631.226.495. - Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang menjadi bagian dari Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik dan Indra sesuai laporannya Nomor: 00045/2.0999/AU.2/0139-3/1/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 dengan opini "wajar dalam semua hal yang material" dengan pokok-pokok sebagai berikut: Laporan Posisi Keuangan Posisi Keuangan Program TJSL per 31 Desember 2023 ditutup dengan jumlah Aset Bersih sebesar Rp7.407.812.803. Efektivitas Penyaluran Dana Program PUMK Realisasi dana Program PUMK per 31 Desember 2023 ditutup dengan jumlah Dana Tersedia sebesar Rp1.809.793.376 dan Dana Disalurkan sebesar Rp1.650.000.000. - Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab sepenuhnya (<i>Volledig Acquit et de Charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 yang berakhir pada 31 Desember 2023 sepanjang Tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Approved the Company's Annual Report, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners, for the 2023 Fiscal Year ending on 31 December 2023.
2. Ratified:
 - a. The Company's Consolidated Financial Statements for the 2023 Fiscal Year ending on 31 December 2023, which were audited by the Public Accounting Firm Djoko, Sidik and Indra in accordance with their Report No. 00056/2.0999/AU.1/06/0139-3/1/IV/2024 dated 1 April 2024, with an unqualified opinion ("fair in all material respects"), with the following highlights:
 - Consolidated Statement of Financial Position
As of 31 December 2023, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) reported:
 - Total Assets: Rp8,036,032,497,605
 - Total Liabilities: Rp1,212,291,504,600
 - Equity: Rp6,823,740,993,005
 - Consolidated Statement of Profit or Loss
Net Profit after Tax for the year ending 31 December 2023 amounted to Rp201,631,226,495.
 - b. The Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2023 Fiscal Year ending on 31 December 2023, as part of the Social and Environmental Responsibility Report, audited by the Public Accounting Firm Djoko, Sidik and Indra in accordance with their Report No. 00045/2.0999/AU.2/0139-3/1/III/2024 dated 19 March 2024, with an unqualified opinion ("fair in all material respects"), with the following highlights:
 - Statement of Financial Position
As of 31 December 2023, the net assets of the TJSL (Social and Environmental Responsibility) Program stood at Rp7,407,812,803.
 - Effectiveness of PUMK Fund Distribution
As of 31 December 2023, PUMK Program Fund realization showed Available Funds of Rp1,809,793,376 and Disbursed Funds of Rp1,650,000,000.
3. Granted full release and discharge (Volledig Acquit et de Charge) to all members of the Board of Directors for management actions and to all members of the Board of Commissioners for supervisory actions carried out during the 2023 Fiscal Year ending on 31 December 2023, to the extent that such actions were not criminal offenses and/or in violation of prevailing laws, regulations, and legal procedures, and are properly reflected in the Company's records.

AGENDA KEDUA SECOND AGENDA

Agenda	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023; Determination of the Allocation of the Company's Net Profit for the 2023 Fiscal Year;
Hasil Keputusan Resolution	Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2023 sebesar Rp201.201.847.651,- seluruhnya sebagai Cadangan. Applying the use of the for the 2023 Financial Year amounting to Rp201.201.847.651, entirely as reserves.

AGENDA KETIGA THIRD AGENDA

Agenda	Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, dan tunjangan) Tahun 2024 dan Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; Determination of Remuneration (salaries/honorariums, facilities, and allowances) for 2024 and Performance Incentives (Tantiem) for the 2023 Fiscal Year for the Board of Directors and the Board of Commissioners
Hasil Keputusan Resolution	Penetapan Tantiem bagi Dewan Komisaris dan Direksi atas kinerja Tahun Buku 2023, Gaji bagi Direksi, Honorarium bagi Dewan Komisaris, berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2024 ditetapkan tersendiri. Tantiem for the 2023 Financial Year, Salaries for Directors and Honorarium for the Board of Commissioners along with other Facilities and Allowances for the 2024 Financial Year will be determined separately.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

AGENDA KEEMPAT

FOURTH AGENDA

Agenda	Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) serta Non PUMK untuk Tahun Buku 2024; Appointment of a Public Accountant (AP) and/or Public Accounting Firm (KAP) to Audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) and Non-PUMK for the 2024 Fiscal Year
Hasil Keputusan Resolution	- Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik dan Indra untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) Perseroan serta Non-PUMK untuk Tahun Buku 2024. - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2024 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan. - Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik dan Indra, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2024 termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut. - Appoint KAP Djoko, Sidik, and Indra to conduct a general audit of the Company's Consolidated Financial Report for the 2024 Financial Year and the Financial Report of the Company's Micro and Small Business Funding Program (PUMK) and Non-PUMK for the 2024 financial year. - Grant authority and power to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm and/or a Public Accountant to conduct an audit of the Company's Financial Report for other periods in the 2024 Financial Years for the purposes and interests of the Company. - Grant delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the amount of compensation for audit services, increase the scope of work required and other reasonable requirements for the Public Accounting Firm as well as determine a replacement Public Accounting Firm in the case of the Djoko, Sidik and Indra Public Accounting Firm, for any reason unable to complete the audit of the Company's Financial Report, Financial Report of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) and other reports for the 2024 Financial Years including determine fees for audit services and other requirements for the substitute Public Accounting Firm.

AGENDA KELIMA

FIFTH AGENDA

Agenda	Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara. Report on the Realization of the Use of Additional State Capital Injection Funds.
Hasil Keputusan Resolution	Menerima Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2015 untuk periode Tahun Buku 2023 dengan ketentuan semua kegiatan dan penggunaan telah sesuai dengan Kajian Bersama PMN dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, sepanjang tidak ditemukan adanya penyimpangan di kemudian hari. Receive the Realization Report on the Use of Additional State Capital Participation Funds (PMN) originating from the 2015 Fiscal Year of APBN for the 2023 Financial Year period provided that all activities and use are in accordance with PMN Joint Review and BUMN Ministerial Regulation Number: PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines of Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, as long as no irregularities are found in the future.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

ARAHAN RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 DAN TINDAK LANJUTNYA

Dewan Komisaris dan Direksi diminta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Arahan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dan Tindak Lanjutnya

Directives of the AGMS for the 2023 Fiscal Year and Follow-Up Actions

DIRECTIONS FOR THE 2023 ANNUAL GMS AND FOLLOW-UP ACTIONS

The Board of Commissioners and Directors are asked to pay attention to the following matters:

No	Arahan Pemegang Saham Shareholders Direction	Tindak Lanjut Follow-up
1	Direksi agar mengupayakan peningkatan pendapatan usaha pada seluruh segmen usaha utamanya yang belum mencapai target, termasuk pendapatan dari usaha sampingan, usaha penunjang, dan anak perusahaan, serta melakukan inovasi dalam pengembangan bisnis komersial perusahaan secara konsisten dan optimal, guna mengurangi ketergantungan terhadap PSO dan subsidi. The Board of Directors is advised to improve revenue across all main business segments that have not met their targets, including revenue from auxiliary businesses, supporting services, and subsidiaries, as well as to foster innovation in the development of the Company's commercial ventures consistently and optimally, in order to reduce reliance on PSO and subsidies.	Sudah ditindaklanjuti Completed
2	Direksi agar senantiasa melakukan evaluasi atas pelayanan perusahaan, khususnya pada masa puncak liburan (Angkutan Lebaran dan Nataru), dengan melakukan koordinasi bersama pihak/instansi terkait agar ke depan kualitas pelayanan terus meningkat, termasuk kesiapan armada kapal dan aplikasi pemesanan tiket. The Board of Directors should continuously evaluate the Company's service performance, especially during peak holiday seasons (Eid and Christmas/New Year transport periods), by coordinating with relevant stakeholders to ensure continuous improvement in service quality, including fleet readiness and ticket reservation systems.	Sudah ditindaklanjuti Completed
3	Melakukan evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan perawatan armada kapal (<i>docking</i>), termasuk optimalisasi jadwal dan mekanisme <i>docking</i>, agar aktivitas operasional berjalan secara optimal. Conduct a comprehensive evaluation of ship maintenance (<i>docking</i>) implementation, including optimization of docking schedules and mechanisms to ensure optimal operational activities.	Sudah ditindaklanjuti Completed
4	Direksi agar meningkatkan langkah-langkah efisiensi di seluruh bidang serta memperkuat pengendalian biaya, khususnya Biaya <i>Overhead</i>, dengan tetap menjaga produktivitas dan kualitas pelayanan. The Board of Directors should intensify efficiency measures across all areas and strengthen cost control, particularly for overhead expenses, while maintaining productivity and service quality.	Sudah ditindaklanjuti Completed
5	Menyusun langkah-langkah strategis untuk memperluas jangkauan pasar kegiatan usaha perusahaan, khususnya angkutan barang, melalui optimalisasi strategi pemasaran serta pelaksanaan canvassing dan kunjungan langsung (<i>site visit</i>) kepada calon pelanggan. Develop strategic measures to expand the market reach of the Company's business operations, especially freight transportation, by optimizing marketing strategies and intensively conducting canvassing activities and site visits to potential customers.	Sudah ditindaklanjuti Completed
6	Meningkatkan penyerapan investasi, khususnya investasi yang berdampak langsung terhadap pendapatan dan bersifat produktif, seperti kapal RoRo dan kapal tongkang-<i>tugboat</i>, agar berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas operasional dan mendukung pelayanan perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah percepatan pemanfaatan sisa dana Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2025 serta pelaporan realisasinya secara berkala sesuai ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/03/2023. Increase the absorption of investments, particularly those with a direct and productive impact on revenue, such as RoRo vessels and barge-tugboat units, to enhance operational capacity and support the Company's services. This includes accelerating the utilization of the remaining 2025 State Capital Injection (PMN) funds and reporting the realization periodically in accordance with Ministry of SOEs Regulation No. PER-02/MBU/03/2023.	Sudah ditindaklanjuti Completed
7	Meningkatkan pembinaan terhadap anak perusahaan dan cabang yang belum mencapai target, melalui langkah-langkah strategis untuk peningkatan pelayanan dan percepatan tindak lanjut kerja sama, sehingga kinerja mereka dapat meningkat dan memberikan kontribusi positif bagi perusahaan induk. Strengthen the supervision of subsidiaries and branches that have not met their targets by implementing strategic measures to improve services and accelerate follow-up on cooperation initiatives so that their performance can improve and contribute positively to the Parent Company.	Sudah ditindaklanjuti Completed

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No	Arahan Pemegang Saham Shareholders Direction	Tindak Lanjut Follow-up
8	Dalam rangka peningkatan kualitas dan kenyamanan sistem dan aplikasi bagi pengguna, Direksi agar senantiasa melakukan evaluasi serta meningkatkan keamanan seluruh sistem dan aplikasi yang telah dikembangkan, dengan memperhatikan umpan balik dan ulasan dari pengguna. In order to enhance the quality and convenience of systems and applications for users, the Board of Directors shall consistently evaluate and improve the security of all systems and applications developed, taking into account user feedback and reviews.	Sudah ditindaklanjuti Completed
9	Direksi agar memastikan seluruh kegiatan usaha perusahaan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan, dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. The Board of Directors must ensure that all of the Company's business activities are carried out consistently and sustainably in compliance with the principles of Good Corporate Governance (GCG), based on applicable laws and regulations.	Sudah ditindaklanjuti Completed
10	Direksi agar menindaklanjuti dan menyelesaikan setiap temuan, catatan, serta saran/rekomendasi dari auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), serta auditor internal dan instansi pengawasan lainnya yang belum diselesaikan. Progres tindak lanjut agar dibahas secara komprehensif dengan Dewan Komisaris dan dilaporkan secara tertulis dan berkala kepada Pemegang Saham. The Board of Directors is required to follow up and thoroughly resolve all findings, notes, and recommendations from external auditors (Public Accounting Firm), the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK-RI), as well as internal auditors and other authorized supervisory institutions. The progress of such follow-ups shall be discussed comprehensively with the Board of Commissioners and reported in writing on a regular basis to the Shareholders.	Sudah ditindaklanjuti Completed
11	Direksi agar menjaga konsistensi dalam melakukan monitoring dan pemutakhiran data pada Portal BUMN, yaitu Portal Silaba, Portal <i>Human Capital</i> (HC), Portal TJSL, dan Portal Publik. Perkembangan pemutakhiran data agar dilaporkan dalam laporan manajemen triwulanan dan laporan tahunan. The Board of Directors must maintain consistency in monitoring and updating data on the SOE Portals, namely the Silaba Portal, Human Capital (HC) Portal, TJSL Portal, and Public Portal. The data update progress must be reported in the quarterly management reports and the annual report.	Sudah ditindaklanjuti Completed
12	Direksi agar menindaklanjuti hal-hal yang menjadi rekomendasi dari Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebagaimana disampaikan dalam surat Nomor: 77/DK/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan Audited PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). The Board of Directors should follow up on the recommendations made by the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) as stated in Letter No. 77/DK/V/2024 dated May 13, 2024, concerning the Board of Commissioners' Response to the Audited Financial Statements of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).	Sudah ditindaklanjuti Completed
13	Direksi agar menindaklanjuti hasil pembahasan laporan keuangan dan pelaksanaan program TJSL Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan Asisten Deputi TJSL sebagaimana Risalah Rapat Pembahasan Nomor: RIS-47/DSI.MBU.B/5/2024 tanggal tujuh belas Mei dua ribu dua puluh empat (17-05-2024) dengan pengawasan Dewan Komisaris. The Board of Directors shall follow up on the results of the discussion regarding the financial statements and the implementation of the TJSL program for the 2023 Fiscal Year with the Assistant Deputy for TJSL, as stated in the Minutes of Meeting No. RIS-47/DSI.MBU.B/5/2024 dated May 17, 2024, under the supervision of the Board of Commissioners	Sudah ditindaklanjuti Completed

PELAKSANAAN RUPS TAHUN SEBELUMNYA (2023)

Selama tahun 2023, PT PELNI (Persero) menyelenggarakan RUPS Tahunan untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebanyak 1 (satu) kali dan RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan sebanyak 1 (satu) kali.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IMPLEMENTATION IN PREVIOUS YEAR (2023)

During 2023, PT PELNI (Persero) held one Annual General Meeting of Shareholders to approve the Company's Work Plan and Budget and one Annual General Meeting of Shareholders to approve the Annual Report.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

RUPS RKAP 2023

RUPS Tahunan mengenai Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023.

GMS for the Ratification of 2023 Work Plan and Budget (RKAP)

The Annual General Meeting of Shareholders for the Approval of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2023.

Tahapan Penyelenggaraan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2023

Stages of Organizing the AGMS for the Approval of the 2023 Work Plan and Budget

Pemanggilan RUPS AGMS Invitation	Pemanggilan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2023 kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham PT PELNI (Persero) disampaikan melalui Surat Undangan No. 01.27/01/S-B/DUA/2023 tanggal 15 Januari 2023 perihal Undangan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2023 PT PELNI (Persero). The invitation for the AGMS to approve the 2023 Work Plan and Budget was sent to the Minister of State-Owned Enterprises as the Shareholder of PT PELNI (Persero) through Invitation Letter No. 01.27/01/S-B/DUA/2023 dated January 15, 2023, regarding the Invitation to the AGMS for the Approval of the 2023 Work Plan and Budget of PT PELNI (Persero).
Pelaksanaan RUPS AGMS Implementation	1. RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2023 dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 pukul 16.42-17.32 WIB dilaksanakan di Hotel Aryaduta. 2. RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2022 dipimpin oleh Ibu Desty Arlaini (Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN) selaku wakil Pemerintah sebagai Pemegang Saham 1. The AGMS for the Approval of the 2023 Work Plan and Budget was held on Monday, January 30, 2023, from 16:42 to 17:32 WIB at the Aryaduta Hotel. 2. The AGMS for the Approval of the 2023 Work Plan and Budget was chaired by Mrs. Desty Arlaini (Assistant Deputy for Logistics Services at the Ministry of State-Owned Enterprises), representing the Government as the Shareholder.
Risalah RUPS Minutes of the AGMS	Risalah RUPS RKAP Tahun 2023 diaktakan dalam Akta No. 39 tanggal 30 Januari 2023 mengenai Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Emi Yatmini, S.H. di Jakarta. The minutes of the AGMS for the Approval of the 2023 Work Plan and Budget (RKAP) were notarized in Deed No. 39 dated January 30, 2023, concerning the Approval of the 2023 Work Plan and Budget, prepared before Notary Emi Yatmini, S.H., in Jakarta.

Peserta RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2023

Participants of the AGMS for the Approval of the 2023 Work Plan and Budget (RKAP)

Pemegang Saham Shareholders	Desty Arlaini (Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN), sebagaimana Surat Kuasa Menteri BUMN Nomor: SKU-28/MBU/01/2023 tanggal 27 Januari 2023. Desty Arlaini (Assistant Deputy for Logistics Services at the Ministry of SOEs), as per the Power of Attorney from the Minister of SOEs Number: SKU-28/MBU/01/2023 dated January 27, 2023.
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Hadir: 1. Ali Masykur Musa (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) 2. Wahyu Adji Herpriarsono (Komisaris) 3. Eddy Susanto Soepadmo (Komisaris) 4. Kristia Budiarto (Komisaris Independen) 5. Faturohman (Komisaris) Tidak Hadir: Nihil Present: 1. Ali Masykur Musa (President Commissioner and Independent Commissioner) 2. Wahyu Adji Herpriarsono (Commissioner) 3. Eddy Susanto Soepadmo (Commissioner) 4. Kristia Budiarto (Independent Commissioner) 5. Faturohman (Commissioner) Absent: None

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Direksi Directors

Hadir:

1. Tri Andayani (Direktur Utama)
2. Rainoc (Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum)
3. Yahya Kuncoro (Direktur Usaha Angkutan Penumpang)
4. Robert MP Sinaga (Direktur Armada dan Teknik)
5. Yossianis Marciano (Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut)
6. Anik Hidayati (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko)

Tidak Hadir: Nihil

Present:

1. Tri Andayani (President Director)
2. Rainoc (Director of Human Resources and General Affairs)
3. Yahya Kuncoro (Director of Passenger Transport Business)
4. Robert MP Sinaga (Director of Fleet and Technical)
5. Yossianis Marciano (Director of Freight and Sea Toll Business)
6. Anik Hidayati (Director of Finance and Risk Management)

Absent: None

Kuorum Kehadiran RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2023

RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2023 telah dihadiri seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta perwakilan Pemegang Saham. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2023 tersebut telah terpenuhi sebagaimana yang disyaratkan dalam anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelibatan Pihak Eksternal dalam RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2023

Dalam penyelenggaraan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2023, PT PELNI (Persero) melibatkan pihak eksternal independen, yaitu Notaris Emi Yatmini, S.H. selaku pihak yang menyusun notulensi rapat dan mengesahkan akta RUPS.

Quorum Attendance of the 2023 RKAP Approval GMS

The 2023 RKAP Approval General Meeting of Shareholders (GMS) was attended by all members of the Board of Commissioners and Directors, as well as the representative of the Shareholder. The quorum for attendance and decisions for the 2023 RKAP Approval GMS was met as required by the articles of association and the prevailing laws and regulations.

Involvement of External Parties in the 2023 RKAP Approval GMS

In the organization of the 2023 RKAP Approval GMS, PT PELNI (Persero) involved an independent external party, Notary Emi Yatmini, S.H., who was responsible for recording the minutes of the meeting and certifying the GMS deed.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Keputusan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2023

Resolution of the GMS on the Ratification of the 2023 Work Plan and Budget (RKAP)

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

FIRST MEETING AGENDA

Agenda	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 Termasuk di dalamnya Penetapan Klasifikasi Risiko Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2023 Ratification of the company work plan and budget (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan – RKAP) for the year 2023 which includes determination of the risk classification of state-owned enterprises (BUMN), and the Board of Commissioner' work plan and budget for the year 2023.

Hasil Keputusan Resolution	Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 termasuk didalamnya Penetapan Klasifikasi Risiko PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) pada Kuadran Sistemik B serta Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2023 PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dengan pokok-pokok sebagai berikut:

Ratifying the company work plan and budget (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan – RKAP) for the year 2023 including the determination of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Risk Classification in Systemic Quadrant B, as well as work plans and budget of the Board of Commissioners, with the following key points:

Pokok-pokok Laporan Keuangan (Rp Miliar)

Key of Financial Reports Points (in Billion Rupiah)

Uraian Description	RKAP 2023 Rp Miliar RKAP 2023 Rp Billion
Pendapatan (Revenue/Income)	6.480,64
Laba Usaha (Operating Profit)	223,09
EBITDA	657,02
Laba Bersih (Net profit)	190,32
Total Aset (Total Assets)	8.173,69
Ekuitas (Equity)	6.778,37
Interest Bearing Debt	172,85
Net Operating Cash Flow	218,51
Total Investasi CAPEX (Total CAPEX Investment)	1.075,92

MATA ACARA RAPAT KEDUA

SECOND MEETING AGENDA

Agenda	Pengesahaan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun 2023. Ratification of the 2023 Social and Environmental Responsibility Program Work Plan and Budget (RKA-TJSL).

Hasil Keputusan Resolution	Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun 2023 PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) , dengan Total Pendanaan Non-PUMK sebesar Rp25.652 Juta dan Dana PUMK sebesar Rp1.650 Juta..

Ratifying the 2023 Work Plan and Budget for the Social and Envirsonmental Responsibility Program (RKA-TJSL) of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), with total Non-PUMK Funding of IDR 25,652 million and PUMK Fund of IDR 1,650 million.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

MATA ACARA RAPAT KETIGA THIRD MEETING AGENDA								
Agenda	Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat Target <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Direksi secara Kolegial Tahun 2023. Establish an Annual Management Contract containing Key Performance Indicator (KPI) targets between the Directors collegiately in 2023, as attached which is an inseparable part of this Decree.							
Hasil Keputusan Resolution	Menetapkan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) antara Direksi secara kolegial Tahun 2023, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.							
No	KPI	ESG	PS 88	Satuan Unit	Target RKAP RKAP Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	
							Sub	Total
A. Nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia / Economic and Social Values for Indonesia								35
Financial / Financial								9
1	<i>Profitable Ratio</i>							
	a. EBITDA	C	-	Rp Miliar Rp Billion	657,024	Maximize	3	6
	b. ROIC-WACC	C	-	%	-1,80	Maximize	3	
2	<i>Rasio Interest Bearing Debt</i> Interest Ratio Bearing Debt							3
	<i>Interest Bearing Debt to EBITDA</i>	G		Kali Times	0,26	Minimize	1,5	
	<i>Interest Bearing Debt to Invested Capital</i>	G	-	%	2,49	Minimize	1,5	
Operasional / Operational								18
3	<i>Vessel Speed (On Time Performance)</i>	C	-	%	90,00	Maximize	6	
4	<i>Average Utilization of Vessel (Pax Factor)</i>	C	-	%	55,00	Maximize	6	
5	<i>Compliance to Safety</i>	S	-	%	80,00	Maximize	6	
Sosial / Social								8
6	Pemenuhan Jumlah Voyage Kapal Penugasan Quantity Fulfillment of Voyage Ship Assignments	S	-	%	80,00	Maximize	8	
B. Inovasi Model Bisnis / Business Model Innovation								17
7	Kontribusi Pendapatan Non Penugasa Non-Assignment Income Contribution	C	-	%	45,00	Maximize	9	
8	Kerjasama Angkutan Barang untuk Sinergi Kluster BUMN Goods Transport Cooperation for BUMN Cluster Strategy	C	-	Instansi Institution	3	Maximize	8	
C. Kepemimpinan Teknologi / Technological Leadership								16
9	Implementasi <i>Integrated Commercial System</i> Implementation of Integrated Commercial Systems	C	-	%	80,00	Maximize	8	

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No	KPI	ESG	PS 88	Satuan Unit	Target RKAP RKAP Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	
							Sub	Total
10	Implementasi Inovasi Teknologi pada Alat Produksi Implementation of Technological Innovation in Production	C	-	%	80,00	Maximize	8	
D. Peningkatan Investasi / Increased Investment								
11	Implementasi Investasi Penggantian Suku Cadang Permesinan Utama Kapal Investment Implementation on Replacement of Ship Main Machinery Parts	C	-	%	80,00	Maximize	7	
12	Implementasi Infrastruktur Logistik Maritim Implementation of Maritime Logistic Infrastructure	C	-	%	80,00	Maximize	7	
E. Pengembangan Talenta / Talent Development								18
13	Talent Management & Development							
	a. % Perempuan dalam Nominated Talent % (Percentage) of Talented Woman Nominee	S	-	%	25,00	Maximize	4	8
	b. % Milenial dalam Nominated Talent % (Percentage) of Talented Millennial Nominees	S	-	%	20,00	Maximize	4	
14	Penyelesaian Roadmap Penyehatan Dana Pensiun Manfaat Pasti Roadmap Completion of Restructured Pension Funds Defined Benefit	G	-	%	100,00	Maximize	5	
15	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko Risk Management Organ Qualification Fulfillment Ratio	G	-	%	40,00	Maximize	5	
Total							100	100



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

FOURTH MEETING AGENDA

Agenda	Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan (<i>Key Performance Indicator</i>) Dewan Komisaris Tahun 2023. Determination of the Board of Commissioners' Annual Management Contract (<i>Key Performance Indicator</i>) for 2023.
Hasil Keputusan Resolution	Menetapkan Kontrak Manajemen Tahunan (<i>Key Performance Indicator</i>) Dewan Komisaris Tahun 2023, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Establish the Annual Management Contract (<i>Key Performance Indicator</i>) for the Board of Commissioners for 2023, as attached which is an inseparable part of this decision.

No (1)	Aspek dan Parameter Aspect & Parameter (2)	Periode Period (3)	Satuan Output Output Unit (4)	Skor Score (5)	Rencana Output Output Plan (6)
I. Aspek Perencanaan / Planning Aspects					
1	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Komisaris 2024 Preparation for Board Commissioner' Work Plan and Budget, and Key Performance Indicator for the year 2024.	Tahunan Annually	Dokumen Documents	10	1
Sub Total I				10	
II. Aspek Pengawasan dan Nasihat / Supervision and Advisory Aspects					
1	Memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap: Provide response/recommendations to Shareholders regarding:				
	1. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Company Work Plan & Budget	Tahunan Annually	Surat Letter	5	1
	2. Laporan Tahunan Annual Report	Tahunan, Triwulan Annually, Quarterly	Surat Letter	5	1
	3. Analisis Kinerja Triwulanan Quarterly Performance Analysis		Surat Letter	5	3
2	Memberi nasihat kepada Direksi sesuai tugas Dewan Komisaris Provide advice to the Board of Directors in accordance with Board of Commissioners duties	Setahun Annually	Surat/Risalah Letter/ Pamphlet	10	12
3	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting				
	1. Jumlah Rapat Number of Meetings	Bulanan Monthly	Kali / Times %	10	12
	2. Kehadiran Rapat Meeting Attendance		Risalah / Minutes-of- meeting	5	100
	3. Penyelesaian Risalah Rapat Completion of Meeting Minutes			5	12
4	Rapat Komite Dewan Komisaris Board of Commissioners Committee Meeting	Tahunan Annually	Risalah Minutes-of- meeting	5	36
5	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Board of Commissioners Working Visit	Tahunan Annually	Kunjungan Times of Visit	5	12
6	Realisasi Rencana Kerja Dewan Komisaris Realization of the Board of Commissioners' Work Plan	Tahunan Annually	%	5	100
Sub Total II				60	



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No (1)	Aspek dan Parameter Aspect & Parameter (2)	Periode Period (3)	Satuan Output Output Unit (4)	Skor Score (5)	Rencana Output Output Plan (6)
III. Aspek Pelaporan / Reporting Aspects					
1	Laporan Realisasi Pelaksanaan KPI Dewan Komisaris Report on the Realization of the Implementation of the Board of Commissioners' KPI	Triwulanan Quarterly	Laporan Report	5	3
2	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Board of Commissioners Supervision Report	Tahunan Annually	Laporan Report	10	1
Sub Total III				15	
IV. Aspek Dinamis / Dynamic Aspects					
1	Pengusulan Kantor Akuntan Publik kepada Pemegang Saham Proposition of a Public Accounting Firm to Shareholders	Tahunan Annually	Surat Letter	4	1
2	Peningkatan kompetensi melalui seminar, <i>workshop</i> , dll Increasing competency through seminars, workshops, etc	Tahunan Annually	Kali Times	4	6
3	Hasil <i>Assessment</i> GCG Dewan Komisaris (<i>Self-Assessment/BPK</i>) Results of the Board of Commissioners' GCG Assessment (<i>Self-Assessment/BPK</i>)	Tahunan Annually	Surat Letter	4	89
4	Tanggapan terhadap tindak lanjut temuan Auditor/SPI Response to follow-up on Auditor/SPI findings	Tahunan Annually	Surat Letter	3	1
Sub Total IV				15	
Total (I+II+III+IV)				100	

MATA ACARA RAPAT KELIMA

FIFTH MEETING AGENDA

Agenda	Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk pengukuran Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2023 Determination of Operational Aspect Indicators for measuring Company Health Level in 2023
Hasil Keputusan Resolution	Menetapkan Indikator Aspek Operasional untuk pengukuran Tingkat Kesehatan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Tahun 2023, sebagai berikut: Determining Operational Aspect Indicators for measuring the Health Level of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) in 2023, as follows:

Indikator Aspek Operasional

Operational Aspect Indicator

No.	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight
Aspek Operasional / Operational Aspects			35,00
1	<i>Passenger Factor</i>	%	8,00
2	<i>Low Number of Breakdown</i>	%	5,00
3	<i>Commission Days</i>	Hari Day	9,00
4	<i>On Time Performance</i>	%	7,00
5	Efisiensi Pemakaian BBM / Fuel Usage Efficiency	%	6,00



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

MATA ACARA RAPAT KEENAM

SIXTH MEETING AGENDA

Agenda	Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai masing-masing program investasi sepanjang tidak mengubah total nilai investasi. Approval of the delegation of authority to the Board of Commissioners to provide approval if there are actions that result in changes to the investment budget allocation with a maximum value of 10% (ten percent) of the value of each investment program as long as it does not change the total investment value.
Hasil Keputusan Resolution	Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai masing-masing program investasi sepanjang tidak mengubah total nilai investasi. Approve the delegation of authority to the Board of Commissioners to provide approval if there are actions that result in changes to the investment budget allocation with a maximum value of 10% (ten percent) of the value of each investment program as long as it does not change the total investment value.

ARAHAN RUPS PENGESAHAN RKAP TAHUN 2023 DAN TINDAK LANJUTNYA

Dalam melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023, Dewan Komisaris dan Direksi diminta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

GMS DIRECTIONS FOR APPROVAL OF THE 2023 RKAP AND FOLLOW-UP

In implementing the 2023 Company Work Plan and Budget (RKAP), the Board of Commissioners and Directors are asked to pay attention to the following matters:

Arahan RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2023 dan Tindak Lanjutnya

GMS Directions for Approval of the 2023 RKAP and Follow-Up

No	Arahan Pemegang Saham Shareholders Instruction	Tindak Lanjut Follow-up Actions
1	RKAP yang disahkan merupakan pedoman bagi Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha dan pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan perusahaan tahun 2023. RKAP tersebut termasuk di dalamnya program Manajemen Risiko agar dirinci menjadi program dan target bulanan dan triwulanan untuk memudahkan <i>monitoring</i> dan evaluasi pencapaiannya, serta dilakukan <i>cascading</i> ke seluruh jajaran perusahaan. The ratified RKAP is a guideline for the Board of Directors in carrying out business activities and a guideline for the Board of Commissioners in carrying out company supervision duties in 2023. The RKAP includes the Risk Management program so that it is broken down into monthly and quarterly programs and targets to facilitate monitoring and evaluation of its achievements and is carried out cascading throughout the company.	Sudah ditindaklanjuti Completed
2	Berkomitmen untuk mencapai target-target RKAP 2023 dan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) tahun 2023 dengan tetap melaksanakan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG). Committed to achieving the 2023 RKAP targets and Key Performance Indicators (KPI) in 2023 while continuing to implement the principles of Good Corporate Governance (GCG).	Sudah ditindaklanjuti Completed
3	Perbuatan-perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS sesuai Anggaran Dasar dan Peraturan Lainnya agar diajukan secara tersendiri dengan dilengkapi sekurang-kurangnya tanggapan Dewan Komisaris, Pakta Integritas Direksi, kajian teknis, kajian hukum, kajian ekonomi dan kajian risiko. Directors' actions that require approval from the GMS in accordance with the Articles of Association and other regulations must be submitted separately, accompanied by at least a response from the Board of Commissioners, the Directors' Integrity Pact, technical studies, legal studies, economic studies, and risk studies.	Sudah ditindaklanjuti Completed
4	Direksi agar menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas temuan, serta saran dan rekomendasi auditor, baik auditor eksternal (BPK RI dan/atau KAP) maupun auditor internal (SPI) di tahun 2022 maupun tahun-tahun sebelumnya. Tindak lanjut penyelesaian temuan/saran auditor agar dibahas secara komprehensif dengan Dewan Komisaris dan dilaporkan secara tertulis kepada Pemegang Saham. The Board of Directors must follow up and completely resolve the findings, as well as suggestions and recommendations of auditors, both external auditors (BPK RI and/or KAP) and internal auditors (SPI) in 2022 and in previous years. Follow-up actions to resolve the auditor's findings/suggestions should be discussed comprehensively with the Board of Commissioners and reported in writing to Shareholders.	Sudah ditindaklanjuti Completed

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No	Arahan Pemegang Saham Shareholders Instruction	Tindak Lanjut Follow-up Actions
5	Memastikan pemenuhan ketentuan terkait manajemen risiko pada Perusahaan dan Anak Perusahaan dengan mengacu pada ketentuan pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko/RMI secara berkala serta melaporkan hasilnya kepada Kementerian BUMN. Untuk hasil penilaian tingkat risiko/RMI tahun 2022 agar disampaikan paling lambat pertengahan Triwulan III Tahun 2023. Ensure compliance with provisions related to risk management at the Company and its subsidiaries by referring to the provisions in the Minister of BUMN Regulation Number PER-5/MBU/09/2022 concerning the Implementation of Risk Management/RMI on a regular basis and reporting the results to the Ministry of BUMN. The results of the 2022 risk level/RMI assessment must be submitted no later than the middle of Quarter III 2023.	Sudah ditindaklanjuti Completed
6	Menyampaikan laporan manajemen risiko, tata Kelola, dan audit intern yang menjadi satu kesatuan dengan laporan berkala triwulanan dan tahunan. Submitting risk management, governance and internal audit reports which are integrated into quarterly and annual periodic reports.	Sudah ditindaklanjuti Completed
7	Melakukan langkah-langkah efisiensi di segala bidang dengan tetap menjaga produktivitas dan kualitas pelayanan sehingga tingkat realisasi biaya tidak lebih tinggi dari tingkat realisasi pendapatan. Carry out efficiency measures in all fields while maintaining productivity and service quality so that the level of realized costs is not higher than the level of realized income.	Sudah ditindaklanjuti Completed
8	Pelaksanaan investasi agar memperhatikan skala prioritas, kemampuan keuangan perusahaan dan berpedoman pada rencananya (<i>cost & schedule</i>) serta dijaga supaya tidak terjadi <i>cost overrun</i>, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan targetnya. Investment implementation must pay attention to the priority scale, the company's financial capabilities and be guided by its plan (<i>cost & schedule</i>) and ensure that cost overruns do not occur, so that it can be completed according to the target.	Sudah ditindaklanjuti Completed
9	Direksi agar melaporkan realisasi program <i>blueprint</i> amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk Tahun 2023, serta menyusun dan melaksanakan strategi implementasinya pada tahun 2023. Apabila <i>blueprint</i> dimaksud belum disusun, Direksi diminta untuk memenuhinya pada tahun 2023 di mana dapat dilakukan melalui kolaborasi/<i>benchmarking</i> dengan BUMN lain, sekaligus mengakselerasi implementasinya pada tahun 2023. The Board of Directors is required to report on the realization of the blueprint program mandated by Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities for 2023, as well as to prepare and implement an implementation strategy in 2023. If the blueprint in question has not been prepared, the Board of Directors is asked to fulfill it in 2023 which can be done through collaboration /benchmarking with other BUMN, while accelerating its implementation in 2023.	Sudah ditindaklanjuti Completed
10	Direksi agar melengkapi Data Pengurus BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Afiliasi Terkonsolidasi BUMN pada portal <i>Human Capital</i> BUMN. Directors must complete data on BUMN Management, BUMN Subsidiaries and BUMN Consolidated Affiliate Companies on the BUMN Human Capital portal.	Sudah ditindaklanjuti Completed
11	Direksi agar meningkatkan pembinaan Anak Perusahaan sehingga kinerjanya diharapkan senantiasa tumbuh dengan baik dan dapat memberikan kontribusi positif bagi Perusahaan Induk. The Board of Directors should improve the development of subsidiaries so that their performance is expected to continue to grow well and can make a positive contribution to the Parent Company.	Sudah ditindaklanjuti Completed
12	Menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik selambat-lambatnya minggu ke-1 April 2023 dan melakukan <i>Agreed Upon Procedures</i> (AUP) dan Jasa Reviu Penilaian <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Manajemen atas paket informasi laporan audit dan selanjutnya menyampaikan beserta laporan audit paling lambat minggu ke-2 April 2023. Submit the Company's Annual Report including the 2022 Financial Year Financial Report which has been audited by the Public Accounting Firm no later than the 1st week of April 2023 and carry out an Agreed Upon Procedures (AUP) and Review Services for Management Key Performance Indicators (KPI) Evaluation on the audit report information package and then submit the audit report no later than the 1st week April 2, 2023.	Sudah ditindaklanjuti Completed



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No	Arahan Pemegang Saham Shareholders Instruction	Tindak Lanjut Follow-up Actions
13	Mengimplementasikan hal-hal terkait aspek Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), antara lain: - Menindaklanjuti dan melaksanakan hasil rekomendasi pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran TJSL dengan Asisten Deputi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat Nomor: RIS-2020/DSI.MBU.B/12/2022. - Memastikan bahwa TJSL telah menjadi <i>tools</i> bagi Direksi untuk memitigasi dampak risiko usaha Perusahaan dan menjamin <i>sustainability</i> Perusahaan. - Mengoptimalkan pelaksanaan penagguhan program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) serta memberikan pembinaan terhadap UMK. - Menyusun program TJSL yang lebih kreatif dan berdampak lebih besar, untuk selanjutnya diukur kemanfaatannya melalui <i>social return on investment</i>. - Memprioritaskan program-program <i>creating shared values</i> sebagai program prioritas. <i>Implementing matters related to aspects of Social and Environmental Responsibility (TJSL), including:</i> - Follow up and implement the recommendations for discussing the TJSL Work Plan and Budget with the Assistant Deputy for Social and Environmental Responsibility as stated in the Minutes of Meeting Number: RIS-2020/DSI.MBU.B/12/2022. - Ensure that TJSL has become a tool for the Board of Directors to mitigate the impact of the Company's business risks and ensure the Company's sustainability. - Optimizing the implementation of collection for the Micro and Small Business (UMK) Funding program and providing guidance to MSEs. - Develop a TJSL program that is more creative and has a bigger impact, to then measure its benefits through social return on investment. - Prioritize programs creating shared values as priority programs.	Sudah ditindaklanjuti Completed
14	Direksi agar menyusun dan menerapkan <i>Master Plan</i> Teknologi Informasi, melakukan Asesmen IT <i>Maturity Level</i>, Asesmen Transformasi Digital, dan berpartisipasi dalam <i>Program Digital Talent</i> BUMN dan melaporkan dalam laporan berkala triwulanan dan tahunan. The Board of Directors must prepare and implement an Information Technology Master Plan, carry out an IT Maturity Level Assessment, a Digital Transformation Assessment, and participate in the BUMN Digital Talent Program and report in regular quarterly and annual reports.	Sudah ditindaklanjuti Completed
15	Melakukan Upaya penanganan permasalahan hukum dengan mengedepankan proses mediasi penyelesaian masalah hukum antar/terkait BUMN/Anak Perusahaan BUMN/Perusahaan yang terafiliasi, sebelum permasalahan tersebut diselesaikan melalui Lembaga peradilan. Make efforts to handle legal problems by prioritizing the mediation process for resolving legal problems between/related to BUMN/BUMN subsidiaries/affiliated companies before the problems are resolved through the judiciary.	Sudah ditindaklanjuti Completed
16	Direksi agar menyusun <i>roadmap</i> penggunaan produk dalam Negeri (P3DN) dan membentuk Tim P3DN serta SPI BUMN melakukan <i>monitoring/review</i> atas pelaksanaan program tersebut dan melaporkannya dalam laporan berkala triwulanan dan tahunan. The Board of Directors should prepare a roadmap for the use of domestic products (P3DN) and form a P3DN Team and BUMN SPI to monitor/review the implementation of the program and report it in regular quarterly and annual reports.	Sudah ditindaklanjuti Completed
17	Direksi agar melakukan evaluasi atas pengelolaan DPPK termasuk pengelolaan aset likuid dan non likuid DPPK serta menyusun <i>roadmap</i>/rencana inisiatif perbaikan/penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun bagi BUMN. The Board of Directors should evaluate the management of DPPK including the management of DPPK liquid and non-liquid assets as well as prepare a roadmap/plan for improvement/completion initiatives in accordance with statutory regulations in the field of pension funds for BUMN.	Sudah ditindaklanjuti Completed



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

RUPS Tahunan mengenai Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022

Annual GMS regarding Approval of the 2022 Financial Year Annual Report

Tahapan Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

Stages of holding the Annual GMS for the 2022 Financial Year

Pemanggilan RUPS GMS Invitation	Pemanggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham PT PELNI (Persero) disampaikan melalui Surat Undangan Nomor 06.07/02/S-B/DU/2023 tanggal 7 Juni 2023 perihal Undangan RUPS Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 PT PELNI (Persero). The invitation for the 2022 Annual GMS to the Minister of BUMN as the Shareholder of PT PELNI (Persero) was conveyed via Invitation Letter Number 06.07/02/SB/DU/2023 dated 7 June 2023 regarding the Invitation to the GMS for the 2022 Financial Report of PT PELNI (Persero).
Pelaksanaan RUPS GMS Implementation	1. RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 pukul 10.07- 11.23 WIB di Auditorium Kantor Pusat PT PELNI (Persero) Lantai 2 Jalan Gajah Mada No.14-Jakarta. 1. The Annual GMS for the 2022 Fiscal Year will be held on Wednesday, June 21, 2023, at 10.07-11.23 WIB at the PT PELNI (Persero) Head Office Auditorium, Floor 2, Jalan Gajah Mada No.14-Jakarta. 2. RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dipimpin oleh Ibu Desty Arlaini (Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN) selaku wakil Pemerintah sebagai Pemegang Saham. 2. The 2022 Annual GMS is chaired by Mrs. Desty Arlaini (Assistant Deputy for Logistics Services at the Ministry of BUMN) as the Government's representative as Shareholder.
Risalah RUPS Minutes of the AGMS	Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 diaktakan dalam Akta No. 32 tanggal 21 Juni 2023 mengenai Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Emi Yatmini, S.H. di Jakarta. The minutes of the 2022 Annual GMS are notarized in Deed No. 32 dated 21 June 2023 concerning Ratification of the 2022 Fiscal Year Annual Report prepared before Notary Emi Yatmini, SH in Jakarta.

Peserta RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

Participants in the Annual GMS for Fiscal Year 2022

Pemegang Saham Shareholders	Desty Arlaini (Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN), sebagaimana Surat Kuasa Menteri BUMN Nomor: SKU-107/MBU/06/2023 tanggal 19 Juni 2023. Desty Arlaini (Assistant Deputy for Logistics Services at the Ministry of SOEs), as per the Power of Attorney from the Minister of SOEs Number: SKU-107/MBU/06/2023 dated June 19, 2023.
Dewan Komisaris Board of Commissioner	Hadir: 1. Ali Masykur Musa (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) 2. Wahyu Adji Herpriarsono (Komisaris) 3. Raden Suhartono (Komisaris) 4. Eddy Susanto Soepadmo (Komisaris) 5. Kristia Budiarto (Komisaris Independen) 6. Faturohman (Komisaris) Tidak Hadir: Nihil Present: 1. Ali Masykur Musa (President Commissioner and Independent Commissioner) 2. Wahyu Adji Herpriarsono (Commissioner) 3. Raden Suhartono (Commissioner) 4. Eddy Susanto Soepadmo (Commissioner) 5. Kristia Budiarto (Independent Commissioner) 6. Faturohman (Commissioner) Absent: None



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Direksi Board of Directors

Hadir:

1. Tri Andayani (Direktur Utama)
2. Rainoc (Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum)
3. Yahya Kuncoro (Direktur Usaha Angkutan Penumpang)
4. Robert MP Sinaga (Direktur Armada dan Teknik)
5. Yossianis Marciano (Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut)
6. Anik Hidayati (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko)

Tidak Hadir: Nihil

Present:

1. Tri Andayani (President Director)
2. Rainoc (Director of Human Resources and General Affairs)
3. Yahya Kuncoro (Director of Passenger Transport Business)
4. Robert MP Sinaga (Director of Fleet and Technical)
5. Yossianis Marciano (Director of Freight and Sea Toll Business)
6. Anik Hidayati (Director of Finance and Risk Management)

Absent: None

Kuorum Kehadiran RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 telah dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta perwakilan Pemegang Saham. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tersebut telah terpenuhi sebagaimana yang disyaratkan dalam anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelibatan Pihak Eksternal dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

Dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022, PT PELNI (Persero) melibatkan pihak eksternal independen, yaitu Notaris Emi Yatmini, S.H sebagai penyusun notulensi rapat dan akta RUPS.

Quorum for Attendance at the Annual GMS for Fiscal Year 2022.

The Annual GMS for Fiscal Year 2022 was attended by all members of the Board of Commissioners and Directors as well as representatives of Shareholders. The attendance quorum and decisions of the 2022 Annual GMS have been fulfilled as required in the articles of association and applicable laws and regulations.

Involvement of External Parties in the Annual GMS for Fiscal Year 2022

In holding the Annual GMS for Fiscal Year 2022, PT PELNI (Persero) involved an independent external party, namely Notary Emi Yatmini, SH as the compiler of meeting minutes and GMS deeds.

Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

MATA ACARA RAPAT PERTAMA FIRST MEETING AGENDA

Agenda Agenda

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Tahun Buku 2022 serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022.

Approval of the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report and Social and Environmental Responsibility Implementation Report for the 2022 Financial Year as well as Ratification of the Company's Consolidated Financial Report for the 2022 Financial Year.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Hasil Keputusan Resolution	1. Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022 dan Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Tahun Buku 2022 serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022, yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik, & Indra sebagaimana dimuat dalam Lapornya Nomor 00061/2.0999/AU.1/06/0139-2/1/IV/2023 tanggal 13 April 2023 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material", dengan pokok-pokok sebagai berikut: a. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 ditutup dengan: - Total Aset sebesar Rp7.713.978.371.331 - Total Liabilitas sebesar Rp1.028.153.820.099 - Ekuitas Rp6.685.824.551.232 b. Laporan Laba (Rugi) Konsolidasian Laba Setelah Pajak Konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp173.247.926.578. 2. Memberikan penunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada seluruh Anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan. 1. Approve the Annual Report for the Fiscal Year 2022, including the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners for the Fiscal Year 2022 and the Social and Environmental Responsibility Implementation Report for the Fiscal Year 2022, as well as ratify the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2022, which ended on December 31, 2022. The financial statements have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Djoko, Sidik, & Indra as stated in their Report Number 00061/2.0999/AU.1/06/0139-2/1/IV/2023 dated April 13, 2023, with an opinion of "fair, in all material respects," with the following key points: a. Consolidated Statement of Financial Position The Consolidated Statement of Financial Position of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) for the year ended December 31, 2022, concluded with: - Total Assets of IDR 7,713,978,371,331 - Total Liabilities of IDR 1,028,153,820,099 - Equity IDR 6,685,824. 551.232 b. Consolidated Profit (Loss) Report Consolidated Profit After Tax of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) for the year ending 31 December 2022 amounted to IDR 173,247,926,578. 2. Grant full release and discharge (<i>volledig acquit et de charge</i>) to all Members of the Board of Directors for their management actions and to the Board of Commissioners for their supervisory actions undertaken during the Fiscal Year ended December 31, 2022, insofar as these actions are not criminal in nature and are reflected in the Company's report books.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

SECOND MEETING AGENDA

Agenda Agenda	Pengesahaan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022 . <i>Ratification of the Financial Report for the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2022 Financial Year.</i>
Hasil Keputusan Resolution	1. Mengesahkan Laporan Keuangan Program PUMK Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang menjadi bagian dari Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik, & Indra sebagaimana dimuat dalam Lapornya Nomor 00052/2.0999/AU.1/06/0139-1/1/III/2023 tanggal 6 Maret 2022 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material" dengan pokok-pokok sebagai berikut: a. Laporan Posisi Keuangan Posisi Keuangan Program PUMK per 31 Desember 2022 ditutup dengan Jumlah Aset serta Kewajiban dan Aset Bersih sebesar Rp7.372.850.975. b. Efektivitas Penyaluran Dana Program PUMK Realisasi dana Program PUMK per 31 Desember 2022 ditutup dengan jumlah Dana Tersedia sebesar Rp1.656.944,035 dan jumlah Dana disalurkan sebesar Rp1.565.000.000, -. 1. Ratifying the PUMK Program Financial Report for the 2022 Financial Year ending on December 31, 2022 which is part of the Social and Environmental Responsibility Report which has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Djoko, Sidik, & Indra as contained in Report Number 00052/2.0999/ AU.1/06/0139-1/1/III/2023 dated March 6 2022 with an opinion of "fair, in all material respects" with the following points: a. Financial Position Report of the PUMK Program as of 31 December 2022 closed with Total Assets and Liabilities and Net Assets of IDR 7,372,850,975. b. Effectiveness of Distribution of PUMK Program Funds Realization of PUMK Program funds as of 31 December 2022 closed with total available funds amounting to IDR 1,656,944,035 and total funds distributed amounting to IDR 1,565,000,000.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan Perseroan pada Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah dijalankan dalam Tahun Buku 2022 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin di dalam laporan-laporan tersebut.
2. Provide full repayment and release of responsibility (*volledig acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors for their management actions of the Company and the Company's Board of Commissioners for their supervisory actions in the Micro and Small Business Funding Program which has been carried out in the 2022 Fiscal Year throughout these actions. is not a criminal act and is reflected in these reports.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

THIRD MEETING AGENDA

Agenda Agenda	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022. Determination of the Use of the Company's Net Profit for the 2022 Financial Year.
Hasil Keputusan Resolution	Menerapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022 sebesar Rp173.247.926.578, - seluruhnya sebagai cadangan. Applying the use of the Company's Net Profit for the 2022 Fiscal Year amounting to IDR 173,247,926,578, - entirely as reserves.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

FOURTH MEETING AGENDA

Agenda Agenda	Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas, dan Tunjangan) Tahun 2023 dan Tantiem Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Determination of Remuneration (Salary/Honorarium, Facilities and Allowances) for 2023 and Tantiem for the 2022 Financial Year for Directors and Board of Commissioners.
Hasil Keputusan Resolution	Besaran Tantiem Tahun Buku 2022, Gaji untuk Direksi dan Honorarium untuk Dewan Komisaris berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2022, akan ditetapkan secara tersendiri. The amount of Tantiem for the 2022 Financial Year, Salaries for Directors and Honorarium for the Board of Commissioners along with other Facilities and Allowances for 2022, will be determined separately.

MATA ACARA RAPAT KELIMA

FIFTH MEETING AGENDA

Agenda Agenda	Penunjukan Akuntan Publik (KAP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023. Appointment of a Public Accountant (KAP) and/or Public Accounting Firm (KAP) to Audit the Company's Consolidated Financial Report and the Financial Report of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2023 Financial Year.
Hasil Keputusan Resolution	1. Menetapkan KAP Djoko, Sidik, & Indra untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2023 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan untuk Tahun Buku 2023. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2023 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan. 1. Appoint KAP Djoko, Sidik, & Indra to conduct a general audit of the Company's consolidated financial report for the 2023 financial year and the Financial Report of the Company's Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2023 financial year. 2. Grant authority and power to the Board of Commissioners The Company to appoint a Public Accounting Firm and/or Public Accountant to conduct an audit of the Company's Financial Statements for other periods in the 2023 Financial Year for the purposes and interests of the Company.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik, & Indra, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan laporan lainnya untuk tahun buku 2023, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.
- Grant delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the amount of compensation for audit services, increase the scope of work required and other reasonable requirements for the Public Accounting Firm, as well as determine a replacement Public Accounting Firm in the case of the Djoko, Sidik, & Indra Public Accounting Firm, for any reason unable to complete the audit of the Company's Financial Report, Financial Report of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) and other reports for the 2023 financial year, including determining fees for audit services and other requirements for the Substitute Public Accounting Firm.

MATA ACARA RAPAT KEENAM

SIXTH MEETING AGENDA

Agenda Agenda	Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Report on the Realization of Additional Use of State Capital Participation Funds
Hasil Keputusan Resolution	Menerima Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2015 untuk periode Tahun Buku 2022 dengan ketentuan semua kegiatan dan penggunaan telah sesuai dengan Kajian Bersama PMN dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-2/MBU.03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Miliki Negara, sepanjang tidak ditemukan adanya penyimpangan di kemudian hari. Receive the Realization Report on the Use of Additional State Capital Participation Funds (PMN) originating from the 2015 Fiscal Year APBN for the 2022 Financial Year period provided that all activities and use are in accordance with the PMN Joint Review and BUMN Ministerial Regulation Number: Per-2/MBU.03/ 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, as long as no irregularities are found in the future.

ARAHAN RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2022 DAN TINDAK LANJUTNYA

Dewan Komisaris dan Direksi diminta memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

DIRECTIONS FOR THE 2022 ANNUAL GMS AND FOLLOW-UP ACTIONS

The Board of Commissioners and Directors are asked to pay attention to the following matters:

Arahan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dan Tindak Lanjutnya

Directions for the 2022 Annual GMS and Follow-up Actions

No	Arahan Pemegang Saham Shareholder Instructions	Tindak Lanjut Follow-up Actions
1	Direksi agar mempertajam strategi perencanaan secara terukur dan melakukan inovasi untuk pengembangan bisnis komersil Perusahaan, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap PSO dan subsidi. The Board of Directors should sharpen planning strategies in a measurable manner and innovate to develop the Company's commercial business, thereby reducing dependence on PSO and subsidies.	Sudah ditindaklanjuti Finished
2	Direksi terus melakukan evaluasi secara menyeluruh atas pelayanan perusahaan khususnya saat masa puncak liburan (<i>peak season</i>) dengan melakukan koordinasi bersama pihak/instansi terkait, sehingga ke depan peningkatan kualitas pelayanan terus semakin baik, termasuk kesiapan armada kapal dan aplikasi pemesanan tiket. The Board of Directors continues to carry out a comprehensive evaluation of the company's services, especially during the peak season, by coordinating with related parties/agencies, so that in the future the quality of service will continue to improve, including the readiness of the ship fleet and ticket booking applications.	Sudah ditindaklanjuti Finished



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No	Arahan Pemegang Saham Shareholder Instructions	Tindak Lanjut Follow-up Actions
3	Direksi agar memastikan modifikasi armada kapal penumpang berjalan sesuai dengan target sehingga potensi pendapatan dapat dimaksimalkan. The Board of Directors must ensure that modifications to the passenger ship fleet are carried out according to targets so that potential income can be maximized.	Sudah ditindaklanjuti Finished
4	Direksi agar melaksanakan evaluasi dan mengkaji kembali terkait keberlangsungan usaha Hotel Bahtera Cipayung yang mengalami kerugian. The Board of Directors should carry out an evaluation and review the sustainability of the Bahtera Cipayung Hotel business which is experiencing losses.	Sudah ditindaklanjuti Finished
5	Direksi agar memperhatikan langkah-langkah efisiensi di segala bidang, terutama Biaya <i>Overhead</i> dan tetap menjaga produktivitas serta kualitas pelayanan. Directors must pay attention to efficiency measures in all areas, especially overhead costs and maintain productivity and service quality.	Sudah ditindaklanjuti Finished
6	Direksi agar memperhatikan penyerapan investasi mengingat capaian penyerapan investasi lebih rendah dibandingkan target agar berdampak terhadap peningkatan kapasitas operasional. The Board of Directors should pay attention to investment absorption considering that the achievement of investment absorption is lower than the target so that it has an impact on increasing operational capacity.	Sudah ditindaklanjuti Finished
7	Direksi agar segera merealisasikan rencana pengadaan 1 (satu) unit Kapal RoRo sebagai pemanfaatan sisa dana PMN TA 2015 dan melaporkan realisasi secara berkala sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023. The Board of Directors should immediately realize the plan to procure 1 (one) unit of RoRo Ship to utilize the remaining PMN funds for FY 2015 and report the realization periodically in accordance with Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number: PER-2/MBU/03/2023.	Sudah ditindaklanjuti Finished
8	Direksi agar meningkatkan pembinaan Anak Perusahaan sehingga kinerjanya diharapkan senantiasa meningkat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi Perusahaan Induk. The Board of Directors should improve the development of subsidiaries so that their performance is expected to continue to improve and can make a positive contribution to the Parent Company.	Sudah ditindaklanjuti Finished
9	Direksi agar menindaklanjuti hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam Risalah Rapat Pembahasan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program TJSL PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Nomor: RSI-38/DSI/MBU.B/6/2023. The Board of Directors should follow up on matters that need attention in the Minutes of Meeting for Discussion of Financial Reports and Implementation of the TJSL Program of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Number: RSI-38/DSI/MBU.B/6/2023.	Sudah ditindaklanjuti Finished
10	Direksi dan Dewan Komisaris perlu memastikan agar setiap pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku. The Board of Directors and Board of Commissioners need to ensure that every implementation of the Company's business activities is carried out by considering the principles of Good Corporate Governance (GCG) consistently and sustainably, guided by the applicable rules and regulations.	Sudah ditindaklanjuti Finished
11	Direksi agar menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas terhadap setiap temuan, catatan serta saran/rekomendasi baik dari auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik/KAP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP, dan Badan Pemeriksa Keuangan RI/BPK-RI termasuk instansi pengawasan berwenang lainnya) maupun auditor internal Perseroan yang belum dinyatakan selesai ditindak lanjuti. Progres tindak lanjut penyelesaian temuan-temuan dimaksud agar dapat dibahas secara komprehensif dengan Dewan Komisaris dan disampaikan tertulis secara berkala kepada Pemegang Saham. The Board of Directors must follow up and complete thoroughly any findings, notes and suggestions/recommendations from external auditors (Public Accounting Firm/KAP, Financial and Development Supervisory Agency/BPKP, and the Indonesian Financial Audit Agency/BPK-RI including other authorized supervisory agencies) as well as the Company's internal auditors whose follow-up has not been declared complete. The progress of the follow-up to the completion of the findings in question can be discussed comprehensively with the Board of Commissioners and submitted in writing periodically to Shareholders.	Sudah ditindaklanjuti Finished



No	Arahan Pemegang Saham Shareholder Instructions	Tindak Lanjut Follow-up Actions
12	Direksi agar senantiasa menjaga konsistensi dalam melakukan <i>monitoring</i> dan <i>updating</i> data pada Portal BUMN, yakni Portal Silaba, Portal <i>Human Capital</i> (HC), Portal TJSL, dan Portal Publik. Progres pemutakhiran data dalam portal tersebut agar dilaporkan dalam laporan manajemen triwulanan dan laporan tahunan. The Board of Directors must always maintain consistency in monitoring and updating data on the BUMN Portal, namely the Silaba Portal, Human Capital (HC) Portal, TJSL Portal and Public Portal. The progress of updating data in the portal so that it is reported in quarterly management reports and annual reports.	Sudah ditindaklanjuti Finished
13	Direksi agar menindaklanjuti hal-hal yang menjadi rekomendasi dari Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sesuai surat yang disampaikan Nomor 58/DK/V-2023 tanggal 10 Mei 2023. The Board of Directors should follow up on matters recommended by the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) in accordance with the letter submitted Number 58/DK/V-2023 dated 10 May 2023.	Sudah ditindaklanjuti Finished
14	Laporan Keuangan, Laporan Keuangan PUMK, Laporan Evaluasi Kinerja, Laporan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Internal yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik, & Indra serta tanggapan Dewan Komisaris baik yang dibacakan dalam rapat ini maupun yang disampaikan tertulis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah RUPS. Financial Reports, PUMK Financial Reports, Performance Evaluation Reports, Compliance Reports with Legislation, and Internal Control which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Djoko, Sidik, & Indra as well as the Board of Commissioners' responses both read at this meeting and submitted in writing is an inseparable part of the Minutes of the GMS.	Sudah ditindaklanjuti Finished

DIREKSI BOARD OF DIRECTORS

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia PER-2/MBU/03/2023 Bab I Pasal 1, Direksi adalah Organ Persero yang bertanggung jawab atas kepengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.

According to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia PER-2/MBU/03/2023 Chapter I Article 1, the Board of Directors is the corporate body responsible for the management of state-owned enterprises (SOEs) in the interest and purpose of the SOE and represents the SOE both in and out of court.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

1. Persyaratan

Terdapat 3 (tiga) persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang Direksi. Persyaratan tersebut mencakup persyaratan materiil, persyaratan formal, dan persyaratan lain:

APPOINTMENT AND DISMISSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. Requirements

There are three requirements that must be met by a member of the Board of Directors. These requirements include material requirements, formal requirements, and other requirements:



DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

a. Persyaratan Materiil

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi BUMN seseorang harus memenuhi persyaratan materiil, yaitu:

- 1) Keahlian;
- 2) Integritas;
- 3) Kepimpinan;
- 4) Pengalaman;
- 5) Jujur;
- 6) Perilaku yang baik; dan
- 7) Dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.

b. Persyaratan Formal

Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada point a, untuk dapat diangkat sebagai Direksi Persero, seseorang harus memenuhi syarat formal sebagai berikut:

- 1) Orang Perseorangan
- 2) Mampu melaksanakan perbuatan hukum
- 3) Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
- 4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dan
- 5) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMN, Anak Perusahaan, badan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

c. Persyaratan Lain

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi BUMN, selain memenuhi syarat materiil dan syarat formal, seseorang juga harus memenuhi syarat lain sebagai berikut:

- 1) Bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat,

a. Material Requirements

To be appointed as a member of the Board of Directors of an SOE, a person must meet the following material requirements:

- 1) Expertise;
- 2) Integrity;
- 3) Leadership;
- 4) Experience;
- 5) Honesty;
- 6) Good behavior; and
- 7) High dedication to advancing and developing the company.

b. Formal Requirements

In addition to meeting the criteria as specified in point a, to be appointed as a member of the Board of Directors, a person must meet the following formal requirements:

- 1) An individual;
- 2) Capable of performing legal acts;
- 3) Has not been declared bankrupt within the last 5 (five) years before the appointment;
- 4) Has not served as a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners/Supervisory Board who was found guilty of causing an SOE, Subsidiary, or other business entity to be declared bankrupt within the last 5 (five) years before the appointment; and
- 5) Has not been convicted of a crime that harmed the state's finances, SOEs, subsidiaries, other business entities, and/or the financial sector within the last 5 (five) years before the appointment.

c. Other Requirements

To be appointed as a member of the Board of Directors of an SOE, in addition to meeting the material and formal requirements, a person must also meet the following other requirements:

- 1) Not a political party official, legislative candidate, and/or member of the legislature in the House of



DIREKSI BOARD OF DIRECTORS

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- 2) Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk penjabat kepala/wakil kepala daerah;
- 3) Tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada BUMN atau Anak Perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode;
- 4) Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada kementerian/Lembaga, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN lain, anggota Direksi pada BUMN lain, anggota Direksi pada Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya;
- 5) Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi;
- 6) Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan;
- 7) Sehat jasmani dan rohani, yakni tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit; dan
- 8) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

Representatives, Regional Representative Council, Provincial Regional House of Representatives, and Regency/Municipal Regional House of Representatives;

- 2) Not a candidate for regional head/deputy head and/or regional head/deputy head, including acting regional head/deputy head;
- 3) Has not served as a member of the Board of Directors of the relevant SOE or subsidiary for 2 (two) periods;
- 4) Not holding a position in ministries/agencies, a member of the Board of Commissioners/Supervisory Board in other SOEs, a member of the Board of Directors in other SOEs, a member of the Board of Directors in subsidiaries and/or other business entities;
- 5) Not holding a position prohibited by law from being concurrently held with the position of a member of the Board of Directors;
- 6) Has dedication and provides full time to perform their duties, as stated in a declaration letter from the person concerned;
- 7) Physically and mentally healthy, not suffering from any illness that may hinder the performance of duties as a member of the Board of Directors, as evidenced by a health certificate from a hospital; and
- 8) Possesses a Taxpayer Identification Number (NPWP) and has fulfilled tax obligations for the last 2 (two) years.

Mekanisme penetapan daftar dan rekam jejak Direksi Perusahaan dan/atau calon Direksi Perusahaan dilaksanakan melalui proses:

1. pengumpulan data daftar dan rekam jejak;
2. validasi data daftar dan rekam jejak; dan
3. penetapan daftar dan rekam jejak.

The mechanism for establishing the list and track record of the company's Board of Directors and/or candidates for the Board of Directors is carried out through the process of:

1. Collecting data on the list and track record;
2. Validating data on the list and track record; and
3. Establishing the list and track record.



DIREKSI BOARD OF DIRECTORS

Manajemen Talenta dilaksanakan melalui proses:

1. penjaringan dan pemilihan Talenta;
2. penilaian Talenta;
3. pengklasifikasian Talenta;
4. pengembangan Talenta; dan
5. perputaran Talenta.

Pengangkatan Direksi

1. RUPS/Menteri dapat menetapkan Kandidat yang diusulkan oleh Komite Suksesi menjadi anggota Direksi BUMN.
2. Bagi BUMN tertentu, penetapan seseorang menjadi anggota Direksi BUMN dapat dilakukan setelah dinyatakan lulus UKK sesuai ketentuan sektoral.
3. Dalam hal penetapan anggota Direksi BUMN dilakukan sebelum UKK sesuai ketentuan sektoral maka Direksi BUMN berwenang melakukan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota Direksi BUMN terhitung sejak dinyatakan lulus UKK sesuai ketentuan sektoral.
4. Anggota Direksi BUMN sebagaimana dimaksud pada angka 3 memiliki masa jabatan yang berlaku efektif sejak ditetapkan oleh RUPS/Menteri.
5. Dalam hal anggota Direksi BUMN tertentu dinyatakan tidak lulus UKK sesuai dengan ketentuan sektoral, RUPS/Menteri dapat memberhentikan anggota Direksi BUMN tersebut dengan memperhatikan ketentuan sektoral.
6. Penetapan seseorang menjadi anggota Direksi BUMN dapat dilakukan melalui:
 - 1) Keputusan Menteri selaku RUPS/pemilik modal apabila seluruh saham/modal BUMN dimiliki oleh Negara; atau
 - 2) Keputusan RUPS atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler, apabila tidak seluruh saham dimiliki oleh Negara.

Talent management is carried out through the process of:

1. Screening and selecting talents;
2. Assessing talents;
3. Classifying talents;
4. Developing talents; and
5. Rotating talents.

Appointment of the Board of Directors

1. The General Meeting of Shareholders (GMS)/Minister may appoint candidates proposed by the Succession Committee as members of the Board of Directors of the SOE.
2. For certain SOEs, the appointment of a person as a member of the Board of Directors can be made after passing the Sectoral Competence Test (UKK) according to sectoral regulations.
3. If the appointment of members of the Board of Directors is made before the UKK according to sectoral regulations, the Board of Directors of the SOE has the authority to perform actions, duties, and functions as members of the Board of Directors of the SOE starting from the date of passing the UKK according to sectoral regulations.
4. Members of the Board of Directors of the SOE as referred to in point 3 have a term of office that becomes effective from the date determined by the GMS/Minister.
5. If certain members of the Board of Directors of the SOE are declared not to have passed the UKK according to sectoral regulations, the GMS/Minister may dismiss those members of the Board of Directors of the SOE with due regard to sectoral regulations.
6. The appointment of a person as a member of the Board of Directors of the SOE can be made through:
 - 1) Ministerial Decision as the GMS/owner of capital if all shares/capital of the SOE are owned by the state; or
 - 2) GMS Decision or circular decision of all shareholders if not all shares are owned by the state.



DIREKSI BOARD OF DIRECTORS

7. Sebelum ditetapkan menjadi anggota Direksi BUMN, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi BUMN terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Direksi BUMN.
 8. Dalam hal yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka jabatannya sebagai anggota Direksi BUMN berakhir pada batas waktu tersebut.
 9. Dalam hal keputusan pengangkatan dilakukan dengan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler maka Deputy memproses penyerahan Surat Keputusan kepada anggota Direksi BUMN terpilih setelah Keputusan ditetapkan.
 10. Dalam proses penyerahan Surat Keputusan, Deputy dibantu oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang bertanggung jawab di bidang hukum, Asisten Deputy dan Asisten Deputy Sektor.
 11. Setelah penyerahan Surat Keputusan dilakukan, seluruh dokumen diserahkan kepada Deputy untuk diadministrasikan.
 12. Dalam hal pengangkatan akan ditetapkan dalam RUPS, penyampaian hasil UKK kepada Menteri disertai dengan surat penetapan calon dan surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS.
 13. Setelah RUPS dilaksanakan, seluruh dokumen terkait dengan pengangkatan anggota Direksi BUMN diserahkan kepada Deputy untuk diadministrasikan.
 14. Proses administrasi oleh Deputy sebagaimana dimaksud pada poin 11 dan poin 12 termasuk dokumentasi proses pengangkatan dan penilaian.
 15. Anggota Direksi mulai menjabat secara efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri/RUPS/seluruh pemegang saham secara sirkuler.
 16. Format surat pernyataan yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Direksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
7. Before being appointed as a member of the Board of Directors of the SOE, the person concerned must sign a resignation letter from other positions that are prohibited from being concurrently held with the position of a member of the Board of Directors of the SOE, effective from the date of appointment as a member of the Board of Directors of the SOE.
 8. If the person concerned does not resign within the period specified in the regulations, their position as a member of the Board of Directors of the SOE will terminate at the end of that period.
 9. If the appointment decision is made through a Ministerial Decision or circular decision of all shareholders, the Deputy will process the delivery of the Decree to the selected member of the Board of Directors of the SOE after the decision is made.
 10. During the delivery of the Decree, the Deputy is assisted by senior primary officials responsible for legal affairs, Assistant Deputy, and Assistant Deputy Sector.
 11. After the delivery of the Decree, all documents are handed over to the Deputy for administration.
 12. If the appointment is to be determined in the GMS, the UKK results are submitted to the Minister along with the candidate's appointment letter and a power of attorney to attend and make decisions in the GMS.
 13. After the GMS is held, all documents related to the appointment of members of the Board of Directors of the SOE are handed over to the Deputy for administration.
 14. The administration process by the Deputy as referred to in points 11 and 12 includes documenting the appointment and evaluation process.
 15. Members of the Board of Directors start their tenure effectively from the date specified in the Ministerial/GMS/all shareholders' circular decision.
 16. The format of the declaration letter related to the appointment and dismissal of the Board of Directors is as stated in Appendix IV, which is an

DIREKSI BOARD OF DIRECTORS

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/2023/03.

Pemberhentian Direksi

1. Anggota Direksi BUMN dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS/Menteri dengan menyebutkan alasannya.
2. Alasan pemberhentian anggota Direksi BUMN sebagaimana dimaksud pada poin 1 adalah sebagai berikut:
 - a. tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam Kontrak Manajemen dan/atau kontrak manajemen tahunan Direksi BUMN;
 - b. adanya perubahan strategi bisnis pada BUMN;
 - c. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau keuangan Negara;
 - e. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar;
 - f. telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh pihak yang berwenang dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau keuangan Negara;
 - g. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan;
 - h. melakukan tindakan yang melanggar kode etik Direksi BUMN;
 - i. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - j. berhalangan tetap, termasuk sakit keras/sakit berkepanjangan.
3. Selain alasan pemberhentian Direksi BUMN sebagaimana dimaksud pada poin 2, anggota Direksi BUMN dapat diberhentikan berdasarkan alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS/Menteri demi kepentingan dan tujuan BUMN.
4. Selain alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 2, pemberhentian Direksi BUMN memperhatikan alasan pemberhentian sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BUMN yang bersangkutan.

integral part of the Ministerial Regulation of SOEs Number PER-3/MBU/2023/03.

Dismissal of the Board of Directors

1. Members of the Board of Directors of SOEs can be dismissed at any time based on the decision of the GMS/Minister with reasons stated.
2. The reasons for dismissing members of the Board of Directors of SOEs as referred to in point 1 are as follows:
 - a. Failure to fulfill obligations agreed upon in the Management Contract and/or annual management contract of the Board of Directors of the SOE;
 - b. Changes in business strategy at the SOE;
 - c. Inability to perform duties properly;
 - d. Involvement in actions that harm the SOE and/or state finances;
 - e. Violation of laws and/or bylaws;
 - f. Being designated as a suspect or defendant by the authorities in actions that harm the SOE and/or state finances;
 - g. Conduct that violates ethics and/or propriety;
 - h. Conduct that violates the code of ethics of the Board of Directors of the SOE;
 - i. Being found guilty by a final and binding court decision; or
 - j. Permanent incapacity, including severe/prolonged illness.
3. In addition to the reasons for dismissal of the Board of Directors of SOEs as referred to in point 2, members of the Board of Directors of SOEs can be dismissed based on other reasons deemed appropriate by the GMS/Minister in the interest and purpose of the SOE.
4. Apart from the reasons for dismissal as referred to in points 1 and 2, the dismissal of the Board of Directors of SOEs considers the reasons for dismissal as stipulated in the relevant SOE's bylaws.

DIREKSI BOARD OF DIRECTORS

5. Selain alasan tersebut di atas, RUPS berwenang memberhentikan Anggota Direksi apabila antara para Anggota Direksi dan antara Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
6. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan kerugian terhadap Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Pemegang Saham dan Direksi.
8. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut. Penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris. Dalam RUPS tersebut, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
9. Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat dan RUPS diatas tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal
5. In addition to the above reasons, the GMS has the authority to dismiss members of the Board of Directors if there are family relationships up to the third degree, both in a direct line and in a lateral line, including relationships arising from marriage, between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.
6. Members of the Board of Directors can be temporarily dismissed by the Board of Commissioners if they act against the bylaws or are suspected of causing harm to the company or neglecting their duties or if there are urgent reasons for the company.
7. The temporary dismissal must be notified in writing to the person concerned with reasons for the action, with a copy to the shareholders and the Board of Directors.
8. Within a maximum of 30 (thirty) days after the temporary dismissal, a General Meeting of Shareholders must be held to decide whether to revoke or confirm the temporary dismissal. The GMS is held by the Board of Commissioners. In the GMS, the member of the Board of Directors concerned is given the opportunity to defend themselves.
9. If the 30 (thirty) days period has elapsed and the GMS has not been held or the GMS cannot make a decision, the temporary dismissal becomes void.

Komposisi Anggota Direksi

1. Perusahaan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dan paling sedikit (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Anggota Direksi diangkat dari calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.

Composition of the Board of Directors

1. The company is managed and led by a Board of Directors consisting of at least two members, one of whom is appointed as the President Director.
2. Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders.
3. Members of the Board of Directors are appointed from candidates proposed by the shareholders, and this nomination binds the GMS.

DIREKSI BOARD OF DIRECTORS

4. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
 5. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada penjelasan di atas tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
4. If the Board of Directors consists of two or more members, the distribution of duties and authorities among the members of the Board of Directors is determined by the GMS decision.
 5. If the GMS as described above does not determine the distribution, the distribution of duties and authorities among the members of the Board of Directors is determined by the Board of Directors' decision.

Pada tahun 2024, komposisi Direksi PT PELNI (Persero) mengalami 1 (satu) kali perubahan, sebagaimana dituangkan dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor: SK-70/MBU/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia.

In 2024, the composition of PT PELNI (Persero) Board of Directors underwent one change, as stipulated in the Copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of the State-Owned Company (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia, Number: SK-70/MBU/03/2024 dated 18 March 2024, concerning the Appointment of Members of the Board of Directors of the State-Owned Company (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia.

No.	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Periode Awal Tahun Buku 2024 - 25 Maret 2024 Beginning of the Financial Year 2024 - March 25, 2024			
1.	Tri Andayani	Direktur Utama President Director	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-57/MBU/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-57/MBU/02/2022 dated February 25, 2022
2.	Anik Hidayati	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-263/MBU/11/2022 tanggal 21 November 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-263/MBU/11/2022 dated November 21, 2022
3.	Nuraini Dessy W	Direktur Usaha Angkutan Penumpang Director of Passenger Transportation Business	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-262/MBU/09/2023 tanggal 21 September 2023 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-262/MBU/09/2023 dated September 21, 2023
4.	Robert M.P. Sinaga	Direktur Armada dan Teknik Director of Fleet and Engineering	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-12/MBU/01/2021 tanggal 12 Januari 2021 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-12/MBU/01/2021 dated January 12, 2021
5.	Rainoc	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Resources and General Affairs	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-571/MBU/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-571/MBU/02/2022 dated February 25, 2022
6.	Yossianis Marciano	Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Director of Freight and Sea Toll Business	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-57/MBU/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-57/MBU/02/2022 dated February 25, 2022

DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

No.	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
25 Maret 2024 – Akhir Tahun Buku 2024 March 25, 2024 – End of Fiscal Year 2024			
1.	Tri Andayani	Direktur Utama President Director	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-57/MBU/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-57/MBU/02/2022 dated February 25, 2022
2.	Anik Hidayati	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-263/MBU/11/2022 tanggal 21 November 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-263/MBU/11/2022 dated November 21, 2022
3.	Nuraini Dessy W	Direktur Usaha Angkutan Penumpang Director of Passenger Transportation Business	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-262/MBU/09/2023 tanggal 21 September 2023 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-262/MBU/09/2023 dated September 21, 2023
4.	Robert M.P. Sinaga	Direktur Armada dan Teknik Director of Fleet and Engineering	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-12/MBU/01/2021 tanggal 12 Januari 2021 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-12/MBU/01/2021 dated January 12, 2021
5.	Rainoc	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Resources and General Affairs	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-571/MBU/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-571/MBU/02/2022 dated February 25, 2022
6.	Kokok Susanto	Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Director of Freight and Sea Toll Business	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-70/MBU/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number: SK-70/MBU/03/2024 dated March 18, 2024

HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

Kriteria hubungan afiliasi antara Direksi meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara sesama anggota Direksi;
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris;
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Seluruh anggota Direksi PT PELNI (Persero) yang menjabat selama tahun 2024 tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

PENGATURAN RANGKAP JABATAN

1. Para Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu:

AFFILIATION RELATIONSHIPS OF DIRECTORS

Criteria for affiliation relationships among the Directors include:

1. Affiliation relationships between fellow Directors;
2. Affiliation relationships between Directors and members of the Board of Commissioners;
3. Affiliation relationships between Directors and major and/or controlling shareholders.

All members of the Board of Directors of PT PELNI (Persero) who served during 2024 did not have any affiliation relationships with fellow Directors, members of the Board of Commissioners, or major and/or controlling shareholders.

CONCURRENT POSITIONS REGULATIONS

1. Directors are prohibited from holding concurrent positions as outlined below:



DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

- a. Direksi pada BUMN dan badan usaha lainnya;
 - b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN lainnya;
 - c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - e. Pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - f. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
 - g. Calon legislatif atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
2. Selain jabatan rangkap sebagaimana dimaksud di atas, Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai Anggota Dewan Komisaris pada badan usaha lain, kecuali:
 - a. Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan BUMN/perusahaan terafiliasi BUMN yang bersangkutan, selain sebagai Komisaris Utama; dan
 - b. Dewan Komisaris pada badan usaha lain untuk mewakili/memperjuangkan kepentingan BUMN sepanjang memperoleh izin dari Menteri.
 3. Masa Jabatan Anggota Direksi BUMN yang memegang jabatan rangkap sebagaimana dimaksud di atas sebagai anggota Direksi BUMN berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan tersebut.
 4. Berakhirnya jabatan Direksi BUMN sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf a, huruf b, dan huruf d dikukuhkan pemberhentian dengan Keputusan Menteri atau RUPS.
- a. Directors in State-Owned Enterprises (BUMN) and other businesses;
 - b. Members of the Board of Commissioners/Supervisory Board in other State-Owned Enterprises;
 - c. Other structural and functional positions in central and/or regional government agencies/institutions;
 - d. Other positions in accordance with statutory regulations;
 - e. Political party officials, legislators, and/or candidates for regional head/deputy regional head;
 - f. Other positions that may cause conflicts of interest; and/or
 - g. Legislative candidates or candidates for regional head/deputy regional head.
2. Besides the concurrent positions mentioned above, Directors are prohibited from holding concurrent positions as members of the Board of Commissioners in other enterprises, except:
 - a. As members of the Board of Commissioners in subsidiaries or affiliated companies of the BUMN, other than as the Chief Commissioner;
 - b. As members of the Board of Commissioners in other enterprises to represent/promote the interests of the BUMN, provided they have obtained permission from the Minister.
 3. The term of office for Directors who hold concurrent positions as described above as BUMN Directors shall end upon assuming the concurrent position.
 4. The termination of BUMN Directors as mentioned in point 1 (a), (b), and (d) shall be confirmed by a Ministerial Decision or a General Meeting of Shareholders (RUPS).



DIREKSI BOARD OF DIRECTORS

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Direksi PT PELNI (Persero) berkewajiban untuk melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada PT PELNI (Persero) dan perusahaan lain. Seluruh anggota Direksi yang menjabat selama tahun buku 2024 maupun keluarga dari masing-masing anggota Direksi tidak memiliki kepemilikan saham di PT PELNI (Persero) maupun di perusahaan lain.

PEDOMAN KERJA DIREKSI

Direksi berperan penting dalam mengelola jalannya usaha Perseroan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu pedoman kerja sebagai pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dalam upaya memenuhi kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Direksi telah memiliki Pedoman Kerja sebagaimana diatur dalam Salinan Surat Keputusan Bersama antara Direksi PT PELNI (Persero) dengan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) Nomor: 11.15/01/SK/HKO.01/2023 tanggal 15 November 2023 tentang Pedoman Tata Laksana Kerja (*Board Manual*) Direksi dan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) dan telah dipublikasikan di *website* resmi Perseroan.

Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi adalah pedoman yang menjelaskan secara garis besar hal-hal yang menjelaskan tata laksana bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta proses hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi, dan antara kedua organ perusahaan secara terstruktur dan Tata Laksana Kerja Direksi dalam *Board Manual* diatur dalam Bab II, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Umum
2. Pengaturan Rangkap Jabatan
3. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi
4. Pengunduran Diri Direksi
5. Pelaksanaan Tugas Anggota Direksi yang Lowong
6. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas

SHARE OWNERSHIP BY DIRECTORS

The Directors of PT PELNI (Persero) are required to report their share ownership and/or their family's share ownership in PT PELNI (Persero) and other companies to the Company. All Directors who served during the fiscal year 2024 and their families did not have any share ownership in PT PELNI (Persero) or other companies.

DIRECTORS' WORK GUIDELINES

The Directors play a crucial role in managing the Company's business operations. Therefore, a work guideline is necessary to guide the Directors in carrying out their duties, responsibilities, and authorities in the interest of the shareholders and other stakeholders.

The Directors have established a Work Guideline as regulated in the Joint Decree between the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) Number: 11.15/01/SK/HKO.01/2023 dated November 15, 2023, concerning the Board Manual for the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero), which has been published on the Company's official website.

The Board Manual for the Board of Commissioners and Directors is a guideline that broadly explains the governance for the Directors and the Board of Commissioners, as well as the working relationship processes between them and other company organs in a structured manner and the Directors' Governance in the Board Manual is regulated in Chapter II, which covers the following:

1. General Policies
2. Regulations on Concurrent Positions
3. Appointment and Termination of Directors
4. Directors' Resignation
5. Implementation of Duties for Vacant Director Positions
6. Introduction and Capability Enhancement Programs

DIREKSI BOARD OF DIRECTORS

7. Tanggung Jawab Direksi
8. Tugas Direksi
9. Direktur Penanggungjawab GCG
10. Wewenang Direksi
11. Kewajiban Direksi
12. Hak-Hak Direksi
13. Etika Jabatan
14. Penetapan Kebijakan
15. Pengelolaan Perusahaan Oleh Direksi
16. Komposisi dan Pembidangan Tugas Direksi
17. Rapat Direksi
18. Organ Pendukung Direksi

Selain itu, dalam *Board Manual* tersebut juga mengatur mekanisme hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Tugas Umum Direksi

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
2. Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengurusan Perusahaan.
4. Direksi wajib mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Directors' Responsibilities
8. Directors' Duties
9. Director Responsible for Good Corporate Governance (GCG)
10. Directors' Authorities
11. Directors' Obligations
12. Directors' Rights
13. Office Ethics
14. Policy Establishment
15. Company Management by the Directors
16. Composition and Task Division of Directors
17. Directors' Meetings
18. Supporting Organs for Directors

Additionally, the Board Manual regulates the working relationship mechanism between the Board of Commissioners and the Directors.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE DIRECTORS

General Duties of the Directors

1. The Directors are responsible for conducting all actions related to the management of the Company for the benefit of the Company, in accordance with the Company's purposes and objectives, and representing the Company both in and out of court on all matters and events with the limitations as stipulated in laws, the Articles of Association, and/or the decisions of the General Meeting of Shareholders (RUPS).
2. Each member of the Board of Directors is required to carry out their duties in good faith and full responsibility for the interest and business of the Company, in compliance with applicable laws and regulations.
3. The Directors are fully responsible for the management of the Company.
4. The Directors must manage the Company in accordance with their authority and responsibilities as outlined in the Articles of Association and statutory regulations.



DIREKSI BOARD OF DIRECTORS

5. Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perusahaan.
 6. Direksi wajib menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari:
 - a. Fungsi Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Audit Intern;
 - b. Temuan Auditor Eksternal;
 - c. Nasihat dan hasil pengawasan Dewan Komisaris;
 - d. Laporan BPK;
 - e. Laporan BPKP; dan/atau
 - f. Temuan dan rekomendasi lainnya yang wajib ditindaklanjuti Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
 8. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada RUPS/Menteri.
 9. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya, mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
 10. Menetapkan struktur organisasi sampai dengan satu tingkat dibawah Direksi.
 11. Untuk memenuhi syarat akuntabilitas, keterbukaan, dan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Direksi wajib:
 - a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS/surat Menteri, dan risalah rapat Direksi;
 - b. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perusahaan;
5. One member of the Board of Directors is appointed by the Board meeting to be responsible for the implementation and monitoring of Good Corporate Governance in the Company.
 6. The Directors must follow up on findings and recommendations from:
 - a. Risk Management, Compliance, and Internal Audit functions;
 - b. External Auditor findings;
 - c. Advice and supervision results from the Board of Commissioners;
 - d. Audit Board (BPK) reports;
 - e. Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) reports; and/or
 - f. Other findings and recommendations that must be followed up by the Directors as required by statutory regulations.
 7. Members of the Board of Directors are prohibited from granting general powers to others that result in the transfer of the duties and functions of the Directors.
 8. The Directors must be accountable for their duties to the RUPS/Minister.
 9. Perform all other actions and deeds regarding the management or ownership of the Company's assets, binding the Company with other parties and/or other parties with the Company, and representing the Company both in and out of court on all matters and events, with the limitations as stipulated in laws, the Articles of Association, and/or the decisions of the RUPS.
 10. Establish the organizational structure up to one level below the Board of Directors.
 11. To meet the requirements of accountability, transparency, and orderly administration in accordance with statutory regulations, the Directors must:
 - a. Create a list of shareholders, a special register, minutes of RUPS/Ministerial letters, and minutes of Directors' meetings;
 - b. Prepare annual reports and financial documents of the company;

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

- c. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perusahaan dan dokumen lainnya; dan
 - d. Menyimpan di tempat kedudukan perusahaan, seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan perusahaan, dan dokumen lainnya.
12. Dalam menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada poin 11. a atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS/surat Menteri dan laporan tahunan serta mendapatkan Salinan risalah RUPS dan laporan tahunan.
 13. Dalam menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada poin 11. d, Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan arsip di lingkungan Perusahaan.
 14. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan.
 15. Pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
 16. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para pemegang saham.

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab Direksi menurut *Board Manual* PT PELNI (Persero):

1. Tugas Direksi terkait Hubungan dengan RUPS.
2. Tugas Direksi terkait dengan Strategi dan Rencana Kerja.
3. Tugas Direksi terkait dengan Penyusunan RJPP.
4. Tugas Direksi terkait dengan Penyusunan RKAP.
5. Tugas Direksi terkait dengan Penyusunan Laporan Tahunan.

- c. Maintain all lists, minutes, and financial documents of the company and other documents; and
 - d. Store all lists, minutes, financial documents, and other documents at the company's domicile.
12. In carrying out the obligations referred to in point 11.a, upon written request from a shareholder, the Directors must allow the shareholder to inspect the list of shareholders, special register, minutes of RUPS/Ministerial letters, and annual reports, and obtain copies of the minutes of RUPS and annual reports.
 13. In fulfilling the obligations referred to in point 11.d, the Directors are responsible for the management of archives within the Company.
 14. Each member of the Board of Directors is fully personally responsible for the Company's losses if they are at fault or negligent in performing their duties in accordance with regulations.
 15. The division of duties and authorities of each member of the Board of Directors is determined by the General Meeting of Shareholders. If the General Meeting of Shareholders does not determine the division of duties and authorities, the division of duties and authorities among the Directors shall be determined by the decision of the Board of Directors.
 16. Provide explanations on any matters asked or requested by members of the Board of Commissioners and shareholders.

The following are the duties and responsibilities of the Directors according to the Board Manual of PT PELNI (Persero):

1. Directors' duties related to the relationship with the RUPS.
2. Directors' duties related to strategy and work plans.
3. Directors' duties related to the preparation of the Long-Term Corporate Plan (RJPP).
4. Directors' duties related to the preparation of the Work Plan and Budget (RKAP).
5. Directors' duties related to the preparation of the annual report.

DIREKSI BOARD OF DIRECTORS

6. Tugas Direksi terkait dengan Laporan Triwulanan. 7. Tugas Direksi terkait dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi. 8. Tugas Direksi terkait dengan Etika Berusaha dan Anti Korupsi. 9. Tugas Direksi Kebijakan Operasional dan SOP. 10. Tugas Direksi terkait Manajemen Risiko. 11. Tugas Direksi terkait dengan Pengendalian Internal. 12. Tugas Direksi terkait dengan Perubahan Lingkungan Bisnis dan Permasalahan yang Berdampak Besar bagi Usaha dan Kinerja Perusahaan. 13. Tugas Direksi terkait dengan Sistem Akuntansi dan Pembukuan. 14. Tugas Direksi terkait Informasi Perseroan kepada <i>Stakeholder</i>. 15. Tugas Direksi terkait dengan Pemenuhan Target Kinerja. 16. Tugas Direksi terkait dengan Teknologi Informasi (TI). 17. Tugas Direksi terkait dengan Mutu dan Pelayanan. 18. Tugas Direksi terkait dengan Pengadaan Barang Jasa. 19. Tugas Direksi terkait dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. 20. Tugas Direksi terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM). 21. Tugas Direksi terkait dengan Anak Perusahaan (<i>Subsidiary Perusahaan</i>) dan/atau Perusahaan Patungan. 22. Tugas Direksi terkait dengan Pengendalian Operasional dan Keuangan. 23. Tugas Direksi terkait dengan Pengurusan Perseroan. 24. Tugas Direksi terkait dengan <i>Stakeholder</i>. 25. Tugas Direksi terkait dengan Benturan Kepentingan.	6. Directors' duties related to the preparation of quarterly reports. 7. Directors' duties related to transparency and confidentiality of information. 8. Directors' duties related to business ethics and anti-corruption. 9. Directors' duties related to operational policies and Standard Operating Procedures (SOP). 10. Directors' duties related to risk management. 11. Directors' duties related to internal control. 12. Directors' duties related to changes in the business environment and issues significantly impacting the business and performance of the Company. 13. Directors' duties related to the accounting and bookkeeping system. 14. Directors' duties related to providing information to stakeholders. 15. Directors' duties related to meeting performance targets. 16. Directors' duties related to information technology (IT). 17. Directors' duties related to quality and service. 18. Directors' duties related to procurement of goods and services. 19. Directors' duties related to corporate social responsibility. 20. Directors' duties related to human resources (HR). 21. Directors' duties related to subsidiaries and/or joint ventures. 22. Directors' duties related to operational and financial control. 23. Directors' duties related to company management. 24. Directors' duties related to stakeholders. 25. Directors' duties related to conflicts of interest.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Perseroan, Direksi dapat melakukan pembidangan tugas, dengan tetap tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi secara kolektif dalam pengurusan Perseroan. Pembidangan tugas Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembidangan tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan

To enhance the effectiveness and efficiency of the Company's management, the Directors may assign task areas while maintaining collective responsibility for the Company's management. The division of tasks among the Directors is determined by the RUPS; if the RUPS does not determine the task division, it will be determined by the Directors' decision. Any organizational structure changes must be approved in writing by the Board



DIREKSI BOARD OF DIRECTORS

keputusan Direksi, dan apabila terjadi perubahan struktur organisasi, sebelum ditetapkan harus mendapat persetujuan tertulis dan Dewan Komisaris. Pembidangan tugas masing-masing anggota Direksi per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

of Commissioners before implementation. The task division for each member of the Board of Directors as of December 31, 2024, is as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Tugas Duties
1.	Tri Andayani	Direktur Utama President Director	- Menjalankan pengurusan Perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi perusahaan dan melakukan tugas lain sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemegang Salam; - Mengendalikan pelaksanaan kebijakan Direksi yang diselenggarakan oleh para Direktur; - Mengendalikan pelaksanaan tugas <i>Internal Audit</i>, DPA- QHSSE, <i>Corporate Secretary</i>, <i>Corporate Planning & Risk Management</i>, Legal, bersama dengan para Direktur dalam kedudukannya selaku Direksi perusahaan mengendalikan pelaksanaan fungsi staf Kantor Pusat; - Mengendalikan pelaksanaan kebijakan Direksi yang diselenggarakan oleh unit kerja Kapal dan Kantor Cabang/<i>Terminal Point</i> serta Unit Bisnis Strategis/<i>Strategic Business Unit</i> (SBU) perusahaan secara menyeluruh. - To manage the Company in accordance with applicable regulations and perform other tasks as determined by the Shareholders. - To oversee the implementation of the Board of Directors' policies executed by the Directors. - To oversee the execution of Internal Audit, DPA-QHSSE, Corporate Secretary, Corporate Planning & Risk Management, and Legal functions. Together with the Directors, manage the staff functions at the Head Office. - To control the implementation of the Board of Directors' policies carried out by the Ship and Branch Office/<i>Terminal Point</i> units and the company's Strategic Business Units (SBUs).
2.	Anik Hidayati	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Membina pengelolaan keuangan perusahaan yang meliputi pengelolaan kegiatan akuntansi, perbendaharaan, serta kewajiban layanan publik (<i>Public Service Obligation</i>/PSO) dan subsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dicapai kinerja pengelolaan keuangan, serta PSO dan subsidi yang optimal, pengelolaan teknologi informasi, serta manajemen risiko dan kepatuhan To oversee the financial management of the company, which includes accounting activities, treasury, public service obligations (PSO), and subsidies, ensuring compliance with prevailing regulations to achieve optimal financial management performance, and the efficient management of PSO and subsidies, information technology, risk management, and compliance.
3.	Nuraini Dessy W	Direktur Usaha Angkutan Penumpang Director of Passenger Transportation Business	Membina pengelolaan pemasaran, operasi dan pelayanan kapal penumpang dan perintis serta ke agen & <i>tour</i> agar dicapai kinerja citra produk jasa (<i>brand image</i>), pangsa pasar (<i>market share</i>), volume penjualan jasa, pertumbuhan pelanggan jasa perusahaan, pendapatan usaha jasa angkutan penumpang perusahaan yang optimal serta mengutamakan kinerja keselamatan pelayaran, kualitas layanan jasa dan kepuasan pengguna jasa yang optimal. To oversee the management of marketing, operations, and services of passenger and pioneering vessels, as well as agency and tour services, to achieve optimal performance in brand image, market share, service sales volume, customer growth, and revenue. Prioritize optimal performance in maritime safety, service quality, and customer satisfaction.
4.	Robert M.P. Sinaga	Direktur Armada dan Teknik Director of Fleet and Engineering	Membina pengelolaan kegiatan penyediaan dan penyiapan pakai sertifikat, fasilitas serta peralatan nautika, teknika, penyediaan dan modifikasi kapal, bahan bakar kapal dan <i>surveyor</i> serta <i>parenting</i> SBU Galangan PT PELNI (Persero) Surya Surabaya agar dicapai kinerja kelaikan laut (<i>seaworthiness</i>), kesiapan pakai (<i>semi capability performance</i>), keandalan (<i>reliability performance</i>), efektivitas dan efisiensi penyediaan serta penyiapan pakai alat produksi jasa angkutan laut perusahaan yang optimal. To supervise the activities related to the provision and preparation of certificates, facilities, and nautical and technical equipment, the provision and modification of vessels, fuel supply, and surveyors. Also, to parent the PT PELNI (Persero) Surya Surabaya shipyard SBU to achieve optimal performance in seaworthiness, readiness, reliability, and the effective and efficient provision and preparation of maritime transportation production tools.

DIREKSI BOARD OF DIRECTORS

No.	Nama Name	Jabatan Position	Tugas Duties
5.	Rainoc	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Resources and General Affairs	Membina kegiatan pengelolaan sumber daya manusia dan organisasi, administrasi dan pelayanan umum kerumahtanggaan kantor, pengamanan di wilayah kerja perusahaan serta pengelolaan aset dan sebagai <i>parenting</i> untuk SBU Hotel Bahtera sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dicapai kinerja produktivitas sumber daya manusia dan organisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan pengawakan, ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan administrasi serta layanan umum kerumahtanggaan kantor, pengamanan dan ketertiban umum serta pemanfaatan aset pada wilayah kerja perusahaan yang optimal, serta pengadaan barang dan jasa. To oversee the management of human resources and organization, administration and general office housekeeping services, security within the company's working area, asset management, and the parenting of the Bahtera Hotel SBU in compliance with applicable regulations. Ensure optimal productivity and organizational performance, improve human resource quality, manage staffing, maintain order and smooth administrative operations, and provide general housekeeping services, security, public order, asset utilization, and procurement of goods and services.
6.	Kokok Susanto	Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Director of Freight and Sea Toll Business	Membina pengelolaan kegiatan pemasaran angkutan barang kapal penumpang & perintis, pemasaran kapal tol laut dan ternak, operasi dan pelayanan kapal tol laut & ternak serta pengembangan usaha angkutan barang & tol laut sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat dicapai kinerja citra produk jasa (<i>brand image</i>), pangsa pasar (<i>market share</i>), volume penjualan jasa, pertumbuhan pelanggan jasa perusahaan, pendapatan usaha jasa angkutan barang perusahaan yang optimal serta mengutamakan kinerja keselamatan pelayaran, kualitas layanan jasa dan kepuasan pengguna jasa yang optimal. To manage the marketing of cargo transport for passenger and pioneering vessels, the marketing of sea toll and livestock vessels, the operations and services of sea toll and livestock vessels, and the development of cargo and sea toll transport business in accordance with applicable regulations. Aim to achieve optimal performance in brand image, market share, service sales volume, customer growth, and cargo transport business revenue, while prioritizing optimal performance in maritime safety, service quality, and customer satisfaction.

DIREKTUR PENANGGUNGJAWAB GCG

Salah seorang Direksi ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di Perusahaan, dalam hal ini Direktur yang ditunjuk menjadi penanggung jawab GCG. Dengan tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja yang diperlukan untuk memastikan Perusahaan memenuhi Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Perusahaan dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
3. Memantau dan menjaga kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga.

DIRECTOR RESPONSIBLE FOR GCG

One of the Directors is appointed as the person responsible for the implementation and monitoring of GCG within the Company, in this case, the appointed Director is responsible for GCG. The responsibilities are as follows:

1. Developing a work plan necessary to ensure the Company complies with the Guidelines for Good Corporate Governance Implementation and other regulations to implement good corporate governance principles;
2. Monitoring and ensuring that the Company's business activities do not deviate from the applicable provisions;
3. Monitoring and ensuring the Company's compliance with all agreements and commitments made with third parties.

DIREKSI BOARD OF DIRECTORS

Direktur Penanggung Jawab GCG juga berkewajiban untuk membuat laporan pelaksanaan GCG minimal setahun sekali, disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, dengan muatan laporan, sebagai berikut:

1. Rencana Kerja (*action plan*) untuk penerapan GCG;
2. Pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada *stakeholders*.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PELNI (Persero) Nomor 09.05/01/SK/HKO.01/2024 tentang Penetapan dan Penunjukan Direktur Sebagai Penanggung Jawab Dalam Penerapan Dan Pemantauan Good Corporate Governance (GCG) PT PELNI (Persero) ditunjuk Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko sebagai Direktur Penanggung Jawab GCG.

PENYELENGGARAAN RAPAT DIREKSI

Kebijakan Penyelenggaraan Rapat Direksi

Kebijakan terkait rapat diatur dalam Salinan Surat Keputusan Bersama antara Direksi PT PELNI (Persero) dengan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) Nomor: 11.15/01/SK/HKO.01/2023 tanggal 15 November 2023 tentang Pedoman Tata Laksana Kerja (*Board Manual*) Direksi dan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) dan telah dipublikasikan di *website* resmi Perseroan.

Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi setiap kali dianggap perlu, namun sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Direksi dapat diadakan di luar jadwal rutin, jika dianggap perlu. Pada umumnya, penyelenggaraan rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk maksud itu oleh Direktur Utama.

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota Direksi atau wakilnya. Terdapat pengaturan mengenai

The Director responsible for GCG is also required to prepare an annual GCG implementation report, submitted to the Board of Commissioners and Shareholders, containing the following:

1. Work Plan (action plan) for GCG implementation;
2. Monitoring of compliance with applicable provisions and commitments to stakeholders.

Based on the Decree of the Board of Directors of PT PELNI (Persero) Number 09.05/01/SK/HKO.01/2024 concerning the Appointment and Designation of a Director Responsible for the Implementation and Monitoring of Good Corporate Governance (GCG), the Director of Finance and Risk Management was appointed as the Director in Charge of GCG at PT PELNI (Persero).

BOARD OF DIRECTORS MEETING

Policy on Holding Board of Directors Meetings

The policy regarding meetings is regulated in the Joint Decree between the Board of Directors of PT PELNI (Persero) and the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) Number: 11.15/01/SK/HKO.01/2023 dated November 15, 2023, concerning the Board Manual of PT PELNI (Persero) and has been published on the Company's official website.

The Board of Directors' meeting is held whenever deemed necessary, but at least once a month. The Board of Directors' meeting can be held outside the regular schedule if deemed necessary. Generally, the Board of Directors' meeting is chaired by the President Director. In the absence of the President Director, the meeting is chaired by a designated member of the Board of Directors.

The Board of Directors' meeting is valid and has the authority to make binding decisions if attended by more than 50% of the members of the Board of Directors or their representatives. There are provisions regarding the formal decision-making mechanism of the Board of



DIREKSI BOARD OF DIRECTORS

mekanisme pengambilan keputusan Direksi secara formal, terdiri dari (1) pengambilan keputusan melalui rapat Direksi; (2) pengambilan keputusan di luar rapat (melalui sirkuler dan lain-lain).

Dalam hal Direksi mengambil keputusan yang mengikat di Rapat Direksi secara fisik, maka keputusan tersebut harus disetujui secara tertulis oleh semua anggota Direksi. Keputusan Direksi tersebut mempunyai daya mengikat dengan ketentuan hukum yang sama dengan keputusan Direksi yang dihasilkan Rapat Direksi secara fisik. Direksi juga dapat mengambil keputusan di luar rapat atau secara sirkuler, asalkan pengambilan keputusan tersebut dan usul yang akan diputuskan disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh semua Direksi.

Pengambilan keputusan pada rapat Direksi maupun di luar rapat Direksi sesuai dengan tingkat kesegeraan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya usulan yang diajukan kepada Direksi dan/atau disetujui secara tertulis oleh semua anggota Direksi dalam hal Direksi mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Direksi secara fisik (sirkuler).

Hasil keputusan Direksi dikomunikasikan kepada tingkatan organisasi di bawah Direksi yang terkait dengan keputusan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak disahkan dan atau ditandatanganinya keputusan tersebut.

REALISASI PENYELENGGARAAN RAPAT DIREKSI TAHUN 2024

Rapat Direksi

Selama tahun 2024, Direksi PT PELNI (Persero) menyelenggarakan rapat sebanyak 50 (lima puluh) kali, sesuai dengan jumlah Rapat Direksi yang direncanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direksi.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi

Berikut ini merupakan frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Direksi dalam rapat yang diselenggarakan selama tahun 2024:

Directors, which include (1) decision-making through Board of Directors meetings; (2) decision-making outside meetings (via circulars, etc.).

If the Board of Directors makes binding decisions at a physical Board of Directors meeting, the decision must be approved in writing by all members of the Board of Directors. These decisions have the same legal binding force as decisions made at physical Board of Directors meetings. The Board of Directors can also make decisions outside of meetings or by circular, provided that the decision-making and the proposal to be decided are approved in writing and signed by all members of the Board of Directors.

Decision-making at the Board of Directors meeting or outside the Board of Directors meeting is based on the urgency within 14 working days from the receipt of the proposal submitted to the Board of Directors and/or approved in writing by all members of the Board of Directors when making binding decisions outside the physical Board of Directors meeting (circular).

The decisions made by the Board of Directors are communicated to the relevant organizational levels below the Board of Directors within 7 days at the latest after the decision is ratified and/or signed.

IMPLEMENTATION OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETINGS IN 2024

Board of Directors Meetings

Throughout 2024, the Board of Directors of PT PELNI (Persero) held 50 meetings, in line with the number of Board of Directors meetings planned in the Board of Directors' Work Plan and Budget (RKA).

Frequency and Attendance Rate of the Board of Directors in Meetings

Below is the frequency and attendance rate of each member of the Board of Directors in meetings held during 2024:

DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi

Frequency and Attendance Rate of Directors in Board of Directors Meetings

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
1	Tri Andayani	Direktur Utama President Director	50	49	98%
2	Anik Hidayati	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	50	50	100%
3	Nuraini Dessy W	Direktur Usaha Angkutan Penumpang Director of Passenger Transportation Business	50	49	98%
4	Robert M.P. Sinaga	Direktur Armada dan Teknik Director of Fleet and Engineering	50	47	94%
5	Rainoc	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Resources and General Affairs	50	49	98%
6	Kokok Susanto*	Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Director of Freight and Sea Toll Business	36	35	97%
7	Yossianis Marciano**	Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Director of Freight and Sea Toll Business	14	12	86%

*) Mulai menjabat pada tanggal 25 Maret 2024 | Assumed office on March 25, 2024

**) Berakhir masa jabatan pada tanggal 25 Maret 2024 | Term of office ended on March 25, 2024

RISALAH RAPAT DIREKSI

Berikut ini merupakan risalah Rapat Direksi yang memuat waktu pelaksanaan rapat, agenda rapat, dan daftar Direksi yang hadir dalam rapat internal selama tahun 2024:

MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

Below are the minutes of the Board of Directors meetings, including the time of the meeting, agenda, and list of Directors present at internal meetings throughout 2024:

Risalah Rapat Direksi

Minutes of the Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants
1	1 Januari 2024 January 1, 2024	Progress Serah Terima Kapal Perintis Progress on the Handover of Pioneer Ship	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dessy W. 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano



DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants
2	09 Januari 2024 January 09, 2024	1. Pembahasan Aset PT PELNI (Persero) & Pelindo 2. Pembahasan pemisahan <i>Overhead Cost</i> 3. Pembahasan perubahan Struktur Organisasi Perusahaan 4. Implementasi Kantor Cabang Koordinasi dan <i>talent</i> 5. PMO : Tupoksi dan Target KPI PMO 2024 1. Discussion on PT PELNI (Persero) & Pelindo Assets 2. Discussion on the Separation of Overhead Costs 3. Discussion on Changes to the Company's Organizational Structure 4. Implementation of Coordinating Branch Offices and Talent Management 5. PMO: Duties and Responsibilities, and 2024 KPI Targets	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dess W. 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano
3	16 Januari 2024 January 16, 2024	1. Laporan Manajemen Unaudited 2023 2. Pembahasan Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan 3. Implementasi Kantor Cabang Koordinasi dan SDMnya 4. PMO : Tupoksi dan Target KPI PMO 2024 5. Pemenuhan Organ Pengelola Risiko sesuai Permen & Juknis KBUMN dg target KPI 90% dan APS 2024. 6. Pemetaan SDM Darat 1. 2023 Unaudited Management Report 2. Discussion on Changes to the Company's Organizational Structure 3. Implementation of Coordinating Branch Offices and Associated Human Resources 4. PMO: Duties and Responsibilities, and 2024 KPI Targets 5. Fulfillment of Risk Management Governance Structures in accordance with SOE Ministry Regulations and Technical Guidelines, with a 2024 KPI target of 90% and APS target 6. Mapping of Onshore Human Resources	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dess W. 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano
4	22 Januari 2024 January 22, 2024	UsulanPMN Proposed State Capital Injection (PMN)	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dess W. 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano
5	23 Januari 2024 January 23, 2024	1. <i>Envisioning</i> RJP PT PELNI (Persero) Tahun 2025 - 2029 (w/ PwC) 2. Laporan Manajemen Unaudited 2023 3. Pembahasan Organ Pengelola Risiko 4. Pembahasan asesmen ABK <i>ex-outsourcing</i> 5. Pembahasan SDM Laut 1. Envisioning PT PELNI (Persero) Long-Term Plan (RJP) for 2025-2029 (with PwC) 2. 2023 Unaudited Management Report 3. Discussion on the Risk Management Governance Structure 4. Discussion on the Assessment of Former Outsourced Crew 5. Discussion on Marine Human Resources	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dess W. 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano
6	31 Januari 2024 January 31, 2024	1. Pembahasan KPI Cabang dan Kapal Tahun 2024 2. Pembahasan Konsep Rapat Pimpinan Tahun 2024 3. Laporan Monitoring Pengamanan 1. Discussion on Branch and Vessel KPI Targets for 2024 2. Discussion on the 2024 Leadership Meeting Concept 3. Security Monitoring Report	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dess W. 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano



DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants
7	06 Februari 2024 February 06, 2024	1. Pemaparan PMN dan Opsi Skema Pendanaan Kapal PT PELNI (Persero). 2. Pemaparan Kajian Pusat Pembelajaran PT PELNI (Persero). 3. Tindaklanjuti atas Pengalihan Pegawai di RS PT PELNI (Persero). 4. Pembahasan Iklan di atas Kapal dan Revitalisasi KM Nggapulu & KM Awu 5. Pembahasan Pengelolaan Hiburan di atas Kapal. 6. Gladi Bersih Townhall 7. Laporan Monitor Pengamanan. 8. Pembahasan asesmen ABK <i>ex-Outsourcing</i>. 1. Presentation on State Capital Injection (PMN) and Funding Scheme Options for PT PELNI (Persero) Vessels 2. Presentation on the Feasibility Study of PT PELNI (Persero) Learning Center 3. Follow-up on Employee Transfer at PT PELNI (Persero) Hospital 4. Discussion on Onboard Advertising and the Revitalization of KM Nggapulu & KM Awu 5. Discussion on Onboard Entertainment Management 6. Final Rehearsal for Townhall Meeting 7. Security Monitoring Report 8. Discussion on the Assessment of Former Outsourced Crew (ABK <i>ex-Outsourcing</i>)	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dess W. 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano
8	15 Februari 2024 February 15, 2024	Arahan Direktur Utama President Director's Directives	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dess W. 4. Rainoc 5. Yossianis Marciano
9	20 Februari 2024 February 20, 2024	1. Pembahasan Laporan Manajemen bulan Januari 2024 2. Pembahasan Asesmen ABK <i>Ex-Outsourcing</i> 3. Laporan Monitor Pengamanan 4. Tindaklanjuti Agenda Kemenkomarves terkait <i>Bilateral Maritime Dialogue</i> RI - Perancis. 1. Discussion on the January 2024 Management Report 2. Discussion on the Assessment of Former Outsourced Crew (ABK <i>ex-Outsourcing</i>) 3. Security Monitoring Report 4. Follow-up on the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment Agenda regarding the Indonesia-France Bilateral Maritime Dialogue	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dess W. 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano
10	26 Februari 2024 February 26, 2024	1. <i>Progress</i> Realisasi Investasi PT PELNI (Persero) - Pengadaan Kapal Penumpang dari dana PMN - Pengadaan Tongkang dan Tugboat - Pengadaan Kapal Roro 2. Optimalisasi penggunaan kontainer pada Kapal Penumpang dan kapal barang Tol Laut 1. Progress on Investment Realization at PT PELNI (Persero): - Procurement of Passenger Ships funded by State Capital Injection (PMN) - Procurement of Barges and Tugboats - Procurement of RoRo Vessels 2. Optimization of Container Utilization on Passenger Ships and Sea Toll Cargo Vessels	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dess W. 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano
11	27 Februari 2024 February 27, 2024	1. Tindak lanjut Ageda Kemenko Marves terkait <i>Bilateral Maritime Dialogue</i> RI-Perancis 2. Optimalisasi Aset PT PELNI (Persero) 3. Pembahasan Ke-SDM-an 1. Follow-up on the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment Agenda regarding the Indonesia-France Bilateral Maritime Dialogue 2. Optimization of PT PELNI (Persero) Assets 3. Discussion on Human Capital Matters	1. Anik Hidayati 2. Robert M.P. Sinaga 3. Rainoc



DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants
12	18 Maret 2024 March 18, 2024	Rapat Pimpinan membahas Persiapan Peak Season Angkutan Lebaran PT PELNI (Persero) Tahun 2024 The Board Meeting Discussed Preparations for the 2024 Eid Transportation Peak Season at PT PELNI (Persero)	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dess W. 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc
13	19 Maret 2024 March 19, 2024	1. Optimalisasi dan skema bisnis penggunaan kontainer pada Kapal Penumpang dan kapal barang Tol Laut (Remidi) 2. Pembahasan Konsep HUT PELNI 72 3. Pembahasan MoU PT PELNI (Persero) dengan Baharkam - Polri 4. Pembahasan Ke-SDM-an 1. Optimization and Business Scheme for Container Utilization on Passenger Ships and Sea Toll Cargo Vessels (Remedial Discussion) 2. Discussion on the Concept for PT PELNI (Persero) 72nd Anniversary Celebration 3. Discussion on the MoU between PT PELNI (Persero) and Baharkam - Indonesian National Police 4. Discussion on Human Capital Matters	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dess W. 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano
14	21 Maret 2024 March 21, 2024	Laporan Manajemen sampai dengan Februari 2024 Management Report until February 2024	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dess W. 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano
15	15 April 2024 April 15, 2024	Pembahasan Talenta SDM PT PELNI (Persero) Discussion on PT PELNI (Persero) Human Capital Talent	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dess W. 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Kokok Susanto
16	23 April 2024 April 23, 2024	1. <i>Progress Report</i> Rencana Investasi (PMN, Roro dan Tongkang) 2. Laporan Manajemen Bulan Maret 2024 dan s/d Triwulan I/2024 3. Penawaran Pembiayaan Perbankan Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi 4. Progres Penghapusbukuan CJN III-22 1. Progress Report on Investment Plans (PMN, RoRo, and Barges) 2. March 2024 Management Report and Q1/2024 Report 3. Bank Financing Offers for Working Capital and Investment Credit 4. Progress on Write-Off of CJN III-22	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dess W. 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano
17	24 April 2024 April 24, 2024	1. Optimalisasi dan skema bisnis penggunaan kontainer pada Kapal Penumpang dan kapal barang Tol Laut 2. Progres Penghapusbukuan CJN III-22 3. Progres Report Aset Bermasalah : Jalan Gajah Mada Jakarta dan Pelindo 4. Pembahasan Draft Laporan Strategi Rencana Jangka Panjang PT PT PELNI (Persero) Tahun 2025 - 2029 oleh PwC 1. Optimization and Business Scheme for Container Utilization on Passenger Ships and Sea Toll Cargo Vessels 2. Progress on Write-Off of CJN III-22 3. Progress Report on Non-Performing Assets: Jalan Gajah Mada, Jakarta and Pelindo 4. Draft Review of PT PT PELNI (Persero) Long-Term Strategic Plan 2025-2029 by PwC	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dess W. 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants
18	07 Mei 2024 May 07, 2024	- Progres <i>Report</i> Aset Bermasalah : Jalan Gajah Mada Jakarta dan Pelindo - Progres <i>Report</i> Revitalisasi Kapal Penumpang (Toilet, Dapur, <i>Tenant</i> dan Cat Kapal) - Kesiapan <i>Docking</i> KM Kendhaga Nusantara 8 (skema kapal pengganti atau tanpa kapal pengganti - Persetujuan Pembayaran Selisih KM Sanus 46 <i>Closing</i> polis asuransi tahun 2020 dan 2021 - Penyelesaian hasil <i>stock opname</i> Gudang Persmart - Review SK Dir Nomor: 06.06/I/SK/HKO.01/2016 tentang Tim Pemeriksaan Kecelakaan Kapal di PT PELNI (Persero) - Implementasi Cabang Koordinator dan Penyesuaian Kelas Cabang - Pembagian Tugas dan Wewenang PMO - Ke-SDM-an (terbatas)	- Tri Andayani - Anik Hidayati - Rainoc - Kokok Susanto
19	14 Mei 2024 May 14, 2024	- Progress Report on Non-Performing Assets: Jalan Gajah Mada, Jakarta and Pelindo - Progress on Passenger Vessel Revitalization (Toilets, Kitchens, Tenants, and Vessel Painting) - Readiness for Docking of KM Kendhaga Nusantara 8 (with or without substitute vessel scheme) - Approval for Settlement of KM Sanus 46 Payment Discrepancy - Closure of Insurance Policies for 2020 and 2021 - Settlement of Warehouse Inventory Audit (Persmart) - Review of Director's Decree No. 06.06/I/SK/HKO.01/2016 on the Vessel Accident Investigation Team at PT PELNI (Persero) - Implementation of Coordinating Branches and Branch Class Adjustments - Division of Duties and Authorities of PMO - Human Capital (limited scope)	- Tri Andayani - Anik Hidayati - Nuraini Dess W. - Robert M.P. Sinaga - Rainoc - Kokok Susanto
20	20 Mei 2024 May 20, 2024	- Progres <i>Report</i> RJPP 2025 - 2029 oleh PwC - Laporan Manajemen April 2024 dan s/d April 2024 - Pembahasan Aset Bermasalah Jalan Gajah Mada No. 14 - Integrasi Data Penumpang dengan Jamintel dan Imigrasi - Progres <i>Report</i> Revitalisasi Kapal Penumpang (Toilet, Dapur, <i>Tenant</i> dan Cat Kapal) - Pembahasan Insiden Kapal dan tindaklanjutnya dari 2023 s/d Mei 2024 - Review SK Dir Nomor 06.06/I/SK/HKO.01/2016 tentang Tim Pemeriksaan kecelakaan Kapal di PT PELNI (Persero)	- Tri Andayani - Anik Hidayati - Nuraini Dess W. - Robert M.P. Sinaga - Rainoc - Kokok Susanto



DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants
21	29 Mei 2024 May 29, 2024	a. Tindaklanjuti ABK PKL Ex. <i>Outsourcing</i> b. Penyelesaian Dana Manfaat YKKP untuk Pegawai Ex. PELNI di RS. Pelni - Pembahasan Aset Bermasalah : Gajah Mada No. 14 Peserta a. Progres Report Investasi: PMN 2024 & 2025, b. Progres Report Tongkang & Tug Boat dan Kapal Roro a. Pembahasan Insiden Kapal dan Tindaklanjutnya dari 2023 s/d Mei 2024 b. Review SK Direksi No. 06.06/I/SK/HKO.01/2016 tentang Tim Pemeriksaan Kecelakaan Kapal di PT PELNI a. Persiapan Konsiyering PELINDO dengan PELNI b. Biaya operasi yang tidak bisa ditanggung PM a. Follow-Up on Apprentice Crew (ABK PKL) ex-Outsourcing b. Settlement of YKKP Benefit Funds for Former PELNI Employees at RS PELNI - Further Discussion on the Non-Performing Asset: Jalan Gajah Mada No. 14 a. Progress Report on Investments: PMN 2024 & 2025 b. Progress Report on Barge, Tugboat, and RoRo Vessel Procurement a. Discussion on Vessel Incidents and Follow-Up Actions (2023-May 2024) b. Review of Director's Decree No. 06.06/I/SK/HKO.01/2016 on the Vessel Accident Investigation Team at PT PELNI a. Preparations for the PELINDO-PELNI Reconciliation (Konsiyering) b. Discussion on Operational Costs Not Covered by the Ministry of Transportation	- Tri Andayani - Anik Hidayati - Nuraini Dess W. - Robert M.P. Sinaga - Rainoc - Kokok Susanto
22	30 Mei 2024 May 30, 2024	- Progress PMN 2024 - 2025 - Progress Pengadaan Tongkang & Tugboat dan Roro - Progress on State Capital Injection (PMN) for 2024-2025 - Progress on the Procurement of Barges, Tugboats, and RoRo Vessels	- Tri Andayani - Anik Hidayati - Nuraini Dess W. - Robert M.P. Sinaga - Rainoc - Kokok Susanto
23	11 Juni 2024 June 11, 2024	- Progres Report Investasi: Progres Report Tongkang & Tug Boat dan Kapal Roro - Availability Pegawai Laut - Pembahasan Tenaga Pengamanan Darat dan Laut - Usulan Tindaklanjuti RUPS PT Rumah Sakit - Program Transformasi Layanan: <i>Mystery Shopper</i> - Pembahasan Perhitungan Kinerja 2023 - Optimalisasi Pengoperasian Kapal pada Trayek T-6 dan T-26 - Investment Progress Report: Progress on the Procurement of Barges, Tugboats, and RoRo Vessels - Availability of Marine Personnel - Discussion on Security Personnel for Land and Sea Operations - Proposed Follow-Up to the General Meeting of Shareholders of PT Rumah Sakit - Service Transformation Program: Mystery Shopper Initiative - Discussion on 2023 Performance Evaluation - Optimization of Vessel Operations on Routes T-6 and T-26	- Tri Andayani - Anik Hidayati - Nuraini Dess W. - Robert M.P. Sinaga - Rainoc - Kokok Susanto
24	13 Juni 2024 June 13, 2024	Progres Report RJPP 2025 - 2029 oleh PwC Progress Report on the 2025-2029 Long-Term Plan (RJPP) by PwC	- Tri Andayani - Anik Hidayati - Nuraini Dess W. - Robert M.P. Sinaga - Rainoc - Kokok Susanto
25	12 Juli 2024 July 12, 2024	- Pembahasan Perencanaan Tim Pengadaan Kapal PMN - Pembahasan ke-SDM-an - Discussion on the Planning of the PMN Vessel Procurement Team - Discussion on Human Capital Matters	- Tri Andayani - Anik Hidayati - Nuraini Dess W. - Robert M.P. Sinaga - Rainoc - Kokok Susanto

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants
26	17 Juli 2024 July 17, 2024	1. <i>Availability</i> Pegawai Laut 2. Pembentukan Divisi <i>Learning & Development</i> 3. Rapat Pengesahan Laporan Tahunan Tahun 2023 Dana Pensiun PT PELNI (Persero) 4. Pembahasan Laporan Perkembangan PT Asuransi Purna Artanugraha (DL) 5. Ke-SDM-an	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dess W. 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Kokok Susanto
		1. Availability of Marine Personnel 2. Establishment of the Learning & Development Division 3. Meeting for the Ratification of the 2023 Annual Report of PT PELNI (Persero) Pension Fund 4. Discussion on the Progress Report of PT Asuransi Purna Artanugraha (DL) 5. Human Capital	
27	25 Juli 2024 July 25, 2024	1. Pembahasan Rencana Penanganan KM Umsini 2. Progres Penghapusbukuan Kapal CJN 3. Pembahasan Kajian Divisi <i>Learning & Development</i>	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dess W. 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Kokok Susanto
		1. Discussion on the Action Plan for KM Umsini 2. Progress on the Write-Off of CJN Vessel 3. Discussion on the Feasibility Study of the Learning & Development Division	
28	30 Juli 2024 July 30, 2024	1. - Laporan Kondisi Alat Bongkar Muat & Palkah Kapal (TEK) - Evaluasi Program Tol Laut dan Isu Ketersediaan Kontainernya (UBN & OAB) 2. - Laporan Asesmen Keselamatan dan Navigasi di KM Bukit Siguntang (DPA) - Progress Inisiatif <i>Strategi of Safety Awareness</i> (PMO Transformasi) 3. <i>Progress Report</i> Investasi Kapal Roro dan Kapal Tongkang & <i>Tugboat</i>	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dess W. 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Kokok Susanto
		1. - Report on the Condition of Vessel Unloading Equipment & Cargo Holds (TEK) - Evaluation of the Sea Toll Program and Container Availability Issues (UBN & OAB) 2. - Safety and Navigation Assessment Report for KM Bukit Siguntang (DPA) - Progress on the Strategic Initiative for Safety Awareness (PMO Transformation) 3. Progress Report on Investment in RoRo Vessels, Barges, and Tugboats	
29	13 Agustus 2024 August 13, 2024	1. - Pemaparan Laporan Manajemen s/d Juli 2024 - Stress Test Semester I/2024 2. Laporan Survey Kepuasan Pelanggan oleh Konsultan 3. Laporan Transformasi Korporasi oleh Konsultan 4. Pembahasan Kajian Transfer <i>Business</i> SBU Galangan Surya 5. - <i>Progress Report</i> Tongkang & <i>Tugboat</i> dan Kapal Roro (UBK & PGN) - Buku Putih PMN 2024 - 2025 6. Pembahasan Rencana Penanganan KM Umsini	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dess W. 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Kokok Susanto
		1. - Presentation of Management Report up to July 2024 - Semester I/2024 Stress Test 2. Customer Satisfaction Survey Report by Consultant 3. Corporate Transformation Report by Consultant 4. Discussion on the Feasibility Study for Business Transfer of the Surya Shipyard SBU 5. - Progress Report on Barge, Tugboat, and RoRo Vessel Investments (UBK & PGN) - PMN 2024-2025 White Paper 6. Discussion on the Action Plan for KM Umsini	



DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants
30	14 Agustus 2024 August 14, 2024	Rapat Pimpinan Bulanan PT PELNI (Persero) PT PELNI (Persero) Monthly Board Meeting	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dess W. 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Kokok Susanto
31	16 Agustus 2024 August 16, 2024	Finalisasi RJPP 2025-2029 Finalization of the 2025-2029 Long-Term Plan (RJPP)	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dess W. 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Kokok Susanto
32	19 Agustus 2024 August 19, 2024	- Tindaklanjuti Audiensi dg Wamen BUMN - Progres Report Investasi Kapal RoRo Bukan Baru [1] & [2], Investasi Kapal Tongkang Tugboat - Pembahasan Buku Putih PMN 2024 - 2025 - Follow-Up on the Meeting with the Deputy Minister of SOEs - Progress Report on RoRo Vessel Investments (Non-New Builds) [1] & [2], and Barge & Tugboat Investments - Discussion on the PMN 2024-2025 White Paper	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dess W. 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Kokok Susanto
33	28 Agustus 2024 August 28, 2024	- Pembahasan Rencana Tindaklanjuti dan Perbaikan Dekom - Laporan Konsep Materi Rapim semester II/2024 - Finalisasi Biaya Operasional Tahun 2025 - Discussion on Follow-Up and Improvements to the Board of Commissioners (Dekom) - Report on the Concept for the Leadership Meeting Materials for Semester II/2024 - Finalization of the 2025 Operational Budget	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dess W. 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Kokok Susanto
34	29 Agustus 2024 August 29, 2024	- Pembahasan Kajian Kapal Roro ke-2 - Pembahasan Materi Rapat Pimpinan PT PELNI (Persero) Smt II/2024 - Discussion on the Study of the Second RoRo Vessel - Discussion on the Materials for PT PELNI (Persero) Leadership Meeting, Semester II/2024	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dess W. 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Kokok Susanto
35	02 September 2024 September 02, 2024	- Laporan Hasil Tindaklanjuti KM Umsini dan Laporan Tindaklanjuti atas kecelakaan kapal - Pembahasan Kinerja Anak Perusahaan - Pembahasan Tarif Angkutan Barang dan Penataan Muatan/Barang di atas kapal - Laporan Program Investasi Tongkang Tugboat - Review Biaya Operasional Kapal - Report on Follow-Up Actions for KM Umsini and Ship Incident Reports - Discussion on Subsidiary Performance - Discussion on Freight Tariffs and Cargo/Stowage Management on Board - Report on the Tugboat and Barge Investment Program - Review of Vessel Operating Costs	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dess W. 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Kokok Susanto
36	09 September 2024 September 09, 2024	- Penyampaian Kinerja Anak Perusahaan - Laporan Manajemen Agustus 2024 - Pembahasan Galangan Surya - Laporan Progres Kajian Ship Management - Pembahasan Tarif Angkutan Barang di atas kapal - Presentation of Subsidiary Performance - August 2024 Management Report - Discussion on Galangan Surya - Progress Report on Ship Management Study - Discussion on Freight Tariffs Onboard	1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dess W. 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Kokok Susanto



DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants
37	24 September 2024 September 24, 2024	- Persiapan Pembahasan Rapat RJPP 2025 - 2029 - Pembahasan Hasil Tindaklanjut KM Umsini - Pembahasan Tarif Muatan Barang - Penyampaian Trayek Kapal Penumpang Tahun 2025 <i>Progress Report</i> Pengadaan: (Kapal Tongkang & Tugboat, Kapal Roro Bukan Baru) - Pembahasan Pengoperasian Kapal Rede Tahun 2024 - Preparation for Discussion of the 2025-2029 Long-Term Plan (RJPP) - Follow-Up Discussion on KM Umsini - Discussion on Cargo Tariff Arrangements - Presentation of 2025 Passenger Vessel Routes - Progress Report on Procurement: (Barges & Tugboats, Non-New RoRo Vessels) - Discussion on Operation of Rede Ships in 2024	- Tri Andayani - Anik Hidayati - Nuraini Dess W. - Robert M.P. Sinaga - Rainoc - Kokok Susanto
38	30 September 2024 September 30, 2024	- Penyampaian Kajian Komprehensif Transfer <i>Strategic Business Unit</i> (SBU) Pelni <i>Maintenance Facility</i> PT PELNI - Diskusi Direksi Terbatas : LHA ADTT Galangan Surya - Pembahasan SO Divisi <i>Learning & Development</i> - Laporan <i>Progress</i> Investasi Kapal Tongkang & Tugboat - Presentation of Comprehensive Study on the Transfer of Strategic Business Unit (SBU) Pelni Maintenance Facility - Limited Board Discussion: Audit Report (LHA ADTT) on Galangan Surya - Discussion on Standard Operating Procedures for the Learning & Development Division - Progress Report on Investment in Barges & Tugboats	- Tri Andayani - Anik Hidayati - Nuraini Dess W. - Robert M.P. Sinaga - Rainoc - Kokok Susanto
39	15 Oktober 2024 October 15, 2024	- Pemaparan Kajian Transfer SBU Pelni <i>Maintenance Facility</i> PT PELNI (Persero) - Laporan Manajemen September dan s.d September 2024 - Usulan KPI Kontrak Manajemen 2025 - Progres Pengadaan Tongkang dan Tugboat dan Kapal Roro bukan baru - Penetapan Ruang Muat <i>General Cargo</i> di Kapal Penumpang - Tindak Lanjut dan Tuntutan akibat Kejadian Tabrakan KM Labobar dengan Kapal Swasta di Pelabuhan Bitung - Presentation of the Study on SBU Transfer of PT PELNI (Persero) Maintenance Facility - September 2024 and YTD Management Report - Proposal for 2025 Management Contract KPIs - Progress on Procurement of Barges, Tugboats, and Non-New RoRo Vessels - Allocation of General Cargo Space on Passenger Ships - Follow-Up and Legal Actions Related to the Collision Between KM Labobar and a Private Vessel at Bitung Port	- Tri Andayani - Anik Hidayati - Nuraini Dess W. - Robert M.P. Sinaga - Rainoc - Kokok Susanto
40	22 Oktober 2024 October 22, 2024	- Progres Pengadaan Tongkang dan Tugboat dan Kapal Roro bukan baru - Penetapan Ruang Muat General Cargo di Kapal Penumpang - Tindaklanjut Insiden: - KM. Logistik Nusantara 1 menabrak dermaga Kaimana - KM. Labobar menabrak TB. Nelly dan LCT di Bitung - Evaluasi Renovasi Kamar Mandi dengan Pindad Enjiniring - Progress on Procurement of Barges, Tugboats, and Non-New RoRo Vessels - Allocation of General Cargo Space on Passenger Ships - Incident Follow-Ups: - KM Logistik Nusantara 1 collision at Kaimana Port - KM Labobar collision with TB Nelly and LCT at Bitung - Evaluation of Bathroom Renovation in Collaboration with Pindad Engineering	- Tri Andayani - Anik Hidayati - Nuraini Dess W. - Robert M.P. Sinaga - Rainoc - Kokok Susanto
41	24 Oktober 2024 September 24, 2024	Rapat Pembahasan RKAP & KPI tahun 2024 Meeting on the 2024 RKAP and KPI Discussion	- Tri Andayani - Anik Hidayati - Nuraini Dess W. - Robert M.P. Sinaga - Rainoc - Kokok Susanto



DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants
42	24 Oktober 2024 October 24, 2024	- Pembahasan Hasil Rapat bersama Bapak Menteri Perhubungan RI - Progres Pengadaan Tongkang dan Tugboat dan Kapal Roro bukan baru - Penetapan Ruang Muat General Cargo di Kapal Penumpang - Tindaklanjut Insiden: - KM. Logistik Nusantara 1 menabrak dermaga Kaimana - KM. Labobar menabrak TB. Nelly dan LCT di Bitung - Evaluasi Renovasi Kamar Mandi dengan Pindad Enjiniring - Discussion on the Results of the Meeting with the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia - Progress on the Procurement of Barges, Tugboats, and Non-New RoRo Vessels - Allocation of General Cargo Space on Passenger Ships - Follow-up on Incidents: - KM Logistik Nusantara 1 collided with Kaimana Pier - KM Labobar collided with TB Nelly and LCT in Bitung - Evaluation of Bathroom Renovation in Collaboration with Pindad Engineering	- Tri Andayani - Anik Hidayati - Nuraini Dess W. - Robert M.P. Sinaga - Rainoc - Kokok Susanto
43	30 Oktober 2024 October 30, 2024	- Penyampaian Kajian Komprehensif Transfer <i>Strategic Business Unit</i> (SBU) Pelni <i>Maintenance Facility</i> PT PELNI (Remidi) - Keputusan Hasil dari LHA SPI Galangan Surya - Laporan <i>Progress</i> Kapal Roro Bukan Baru dan Tongkang & <i>Tugboat</i> - Rencana Perawatan dan Perbaikan Kapal Penumpang Tahun 2025 - Laporan Progres Penghapusbukuan Pintu Galangan, <i>Reefer</i> Kontainer, dan Kapal CJN III-22 - Laporan Pengamanan oleh Koordinator LO TNI Angkutan Laut dan Strategi Pengamanan Nataru 2024 - Presentation of the Comprehensive Study on the Transfer of the Strategic Business Unit (SBU) Pelni Maintenance Facility (Remedial) - Final Decision from SPI Audit Report (LHA) on Galangan Surya - Progress Report on Non-New RoRo Vessels and Barges & Tugboats 2025 Passenger Vessel Maintenance and Repair Plan - Progress Report on the Write-Off of Dock Gates, Reefer Containers, and Vessel CJN III-22 - Security Report by the Naval LO Coordinator and Security Strategy for Christmas and New Year 2024	- Tri Andayani - Anik Hidayati - Nuraini Dess W. - Rainoc
44	05 November 2024 November 05, 2024	- Laporan Progres Penyelesaian Sengketa Aset PT PELNI (Persero) di Gajah Mada dan Pelindo - Penyampaian Kajian Komprehensif Transfer <i>Strategic Business Unit</i> (SBU) Pelni <i>Maintenance Facility</i> PT PELNI (Remidi) - Pembahasan Materi RJPP 2025 - 2029 dan Kinerja TW III / 2024 - Rencana Perawatan dan Perbaikan Kapal Penumpang Tahun 2025 - Laporan Pengamanan oleh Koordinator LO TNI Angkutan Laut dan Strategi Pengamana Nataru 2024 - Progress Report on the Settlement of Asset Disputes at Gajah Mada and Pelindo - Presentation of the Comprehensive Study on the Transfer of the Strategic Business Unit (SBU) Pelni Maintenance Facility (Remedial) - Discussion on RJPP 2025-2029 Materials and Q3/2024 Performance 2025 Passenger Vessel Maintenance and Repair Plan - Security Report by the Naval LO Coordinator and Security Strategy for Christmas and New Year 2024	- Tri Andayani - Anik Hidayati - Nuraini Dess W. - Robert M.P. Sinaga - Rainoc - Kokok Susanto
45	11 November 2024 November 11, 2024	- Pembahasan Kinerja Triwulan III / 2024 - Kesiapan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. - Discussion on Q3/2024 Performance - Readiness for Christmas 2024 and New Year 2025	- Tri Andayani - Anik Hidayati - Nuraini Dess W. - Robert M.P. Sinaga - Rainoc - Kokok Susanto

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants
46	12 November 2024 November 12, 2024	- Pembahasan Kinerja Manajemen s/d Oktober 2024 - Rencana Perawatan dan Perbaikan Kapal Penumpang Tahun 2025 - Pembahasan SK Tim Pembangunan Kapal Penumpang - Laporan Progres Penghapusbukuan Pintu Galangan, Reefer Kontainer, dan Kapal CJN III-22 (Remidi) - Laporan Pengamanan oleh Koordinator LO TNI Angkatan Laut dan Strategi Pengamanan Nataru 2024 - Discussion on Management Performance through October 2024 2025 Passenger Vessel Maintenance and Repair Plan - Discussion on the Decree for the Passenger Vessel Development Team - Progress Report on the Write-Off of Dock Gates, Reefer Containers, and Vessel CJN III-22 (Remedial) - Security Report by the Naval LO Coordinator and Security Strategy for Christmas and New Year 2024	- Tri Andayani - Anik Hidayati - Nuraini Dess W. - Robert M.P. Sinaga - Kokok Susanto
47	26 November 2024 November 26, 2024	- Pembahasan Aset Bermasalah (PELINDO dan Gajah Mada No. 14) - Pembahasan Kantor <i>Representative</i> PELNI Singapura - Persetujuan Pemberian IK Dapen & Penempatan Kesehatan Pensiunan - Rapat dengan Kementerian BUMN perihal Pembahasan Proyek Strategis PT PELNI (Persero) 2025-2029 - Pembahasan SK Tim Pembangunan Kapal - Progress Pemutakhiran SOP - Rencana Perawatan dan Perbaikan Kapal Penumpang Tahun 2025 - Pembahasan Sanksi Disiplin atas Insiden KM Umsini. - Progress Pengadaan Kapal Tongkang dan Tugboat - Discussion on Non-Performing Assets (PELINDO and Gajah Mada No. 14) - Discussion on the PELNI Singapore Representative Office - Approval for Pension Fund Incentive Disbursement and Retiree Health Placement - Meeting with the Ministry of SOEs Regarding Strategic Projects of PT PELNI (Persero) 2025-2029 - Discussion on the Decree for the Vessel Development Team - Progress on SOP Updates 2025 Passenger Vessel Maintenance and Repair Plan - Discussion on Disciplinary Sanctions Related to the KM Umsini Incident - Progress on Barge and Tugboat Procurement	- Tri Andayani - Anik Hidayati - Nuraini Dess W. - Robert M.P. Sinaga - Rainoc - Kokok Susanto
48	10 Desember 2024 December 10, 2024	- Jadwal Monitoring Nataru; - Rencana Perawatan dan Perbaikan Kapal Penumpang Tahun 2025; - Tindak Lanjut Audiensi Bareskrim; - Progress Pemutakhiran SOP; - Christmas & New Year Monitoring Schedule 2025 Passenger Vessel Maintenance and Repair Plan - Follow-up on Meeting with the Criminal Investigation Unit (Bareskrim) - SOP Update Progress	- Tri Andayani - Anik Hidayati - Nuraini Dess W. - Robert M.P. Sinaga - Rainoc - Kokok Susanto
49	17 Desember 2024 December 17, 2024	- Rencana Perawatan dan Perbaikan Kapal Penumpang Tahun 2025 - Pemaparan <i>Sail Agent</i> - Tindaklanjuti hasil audiensi dengan Bareskrim - Pembahasan Laporan Manajemen s/d November 2024 - Pembahasan Aset Bermasalah : Pelindo dan Gajah Mada No. 14 - Progres Pemukhtahiran SOP 2025 Passenger Vessel Maintenance and Repair Plan - Sail Agent Presentation - Follow-Up on the Results of the Bareskrim Meeting - Discussion on Management Report through November 2024 - Discussion on Non-Performing Assets: Pelindo and Gajah Mada No. 14 - SOP Update Progress	- Tri Andayani - Anik Hidayati - Nuraini Dess W. - Robert M.P. Sinaga - Rainoc - Kokok Susanto



DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants
50	31 Desember 2024 December 31, 2024	- Proses Pengalihan <i>Outsourcing</i> Pengamanan menjadi <i>Crew Maning</i> melalui PT PBN - Pembahasan SK Tim Pembangunan Kapal - Pemaparan Sail Agent	- Tri Andayani - Anik Hidayati - Nuraini Dess W. - Robert M.P. Sinaga - Rainoc - Kokok Susanto
		- Outsourced Security Transition Process to Crew Manning via PT PBN - Discussion on the Decree for the Vessel Development Team - Sail Agent Presentation	

RAPAT GABUNGAN DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2024, Direksi PT PELNI (Persero) mengikuti rapat gabungan bersama anggota Dewan Komisaris sebanyak 12 (dua belas) kali.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN DIREKSI DALAM RAPAT GABUNGAN ANTARA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI

Berikut ini merupakan frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Direksi dalam Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2024:

JOINT MEETINGS WITH THE BOARD OF COMMISSIONERS

Throughout 2024, the Board of Directors of PT PELNI (Persero) participated in 12 (twelve) joint meetings with the members of the Board of Commissioners.

FREQUENCY AND ATTENDANCE RATE OF DIRECTORS IN JOINT MEETINGS WITH THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD MEMBERS

Below is the frequency and attendance rate of each member of the Board of Directors in the joint meetings with the Board of Commissioners and Board Members held during 2024:

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Gabungan

Frequency and Attendance Rate of Directors in Joint Meetings

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
1.	Tri Andayani	Direktur Utama President Director	12	12	100%
2.	Anik Hidayati	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	12	12	100%
3.	Nuraini Dessy W	Direktur Usaha Angkutan Penumpang Director of Passenger Transportation Business	12	12	100%
4.	Robert M.P. Sinaga	Direktur Armada dan Teknik Director of Fleet and Engineering	12	12	100%
5.	Rainoc	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Resources and General Affairs	12	12	100%



DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
6.	Kokok Susanto*	Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Director of Freight and Sea Toll Business	10	10	100%
7.	Yossianis Marciano**	Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Director of Freight and Sea Toll Business	2	2	100%

*) Mulai menjabat pada tanggal 25 Maret 2024 | Assumed office on March 25, 2024

**) Berakhir masa jabatan pada tanggal 25 Maret 2024 | Term of office ended on March 25, 2024

**RISALAH RAPAT GABUNGAN ANTARA
DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA
DIREKSI**

**MINUTES OF JOINT MEETINGS WITH
THE BOARD OF COMMISSIONERS**

Risalah Rapat Gabungan
Minutes of Joint Meetings

.No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants
1.	Selasa, 30 Januari 2024 Tuesday, January 30, 2024	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Pembahasan Laporan Keuangan s.d Unaudited Tahun 2023 PT PELNI (Persero); dan 3. Lain-Lain	Dewan Komisaris Board of Commissioners 1. Muhammad Awaluddin 2. Kristia Budiarto 3. Faturrohman 4. Wahyu Adji Hepriarsono 5. Raden Suhartono 6. Eddy Susanto Soepadmo Direksi Board of Directors 1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dessy W 4. Robert M.P. Sinag 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano
2.	Rabu, 28 Februari 2024 Wednesday, February 28, 2024	1. Pembahasan tindak lanjut <i>List of Concern</i> Dewan Komisaris atas kinerja s.d Desember 2023; 2. Penyampaian <i>List of Concern</i> Dewan Komisaris atas kinerja bulan Januari 2024; 3. Laporan manajemen bulan Januari 2024; 4. Isu strategis lainnya; 5. Agenda lain-lain: a. Pembentukan <i>Task Force</i> Isu Strategis b. Kinerja Per Kapal Januari 2024 c. Pengadaan Kapal Ropax	Dewan Komisaris Board of Commissioners 1. Muhammad Awaluddin 2. Kristia Budiarto 3. Faturrohman 4. Wahyu Adji Hepriarsono 5. Raden Suhartono 6. Eddy Susanto Soepadmo Direksi Board of Directors 1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dessy W 4. Robert M.P. Sinag 5. Rainoc 6. Yossianis Marciano



DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

.No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants
3.	Rabu, 27 Maret 2024 Wednesday, March 27, 2024	- Update tindak lanjut <i>List of Concern</i> Dewan Komisaris atas kinerja s.d Januari 2024; - Penyampaian <i>List of Concern</i> Dewan Komisaris atas kinerja bulan Februari 2024; - Laporan manajemen bulan Februari 2024; - Isu strategis lainnya; - Agenda lain-lain: - Kesiapan Data <i>Talent Pool</i> PT PELNI (Persero) sebagaimana surat Kementerian BUMN terkait Laporan dan Pembahasan pada <i>Cluster Talent Committee</i> (CTC) Jasa Logistik - Tinjauan tentang Tata Kelola Pengaturan Kepelabuhanan dan Rute Kapal Angkutan Penumpang dan Barang PT PELNI (Persero) - Tinjauan tentang Penataan Segmentasi Layanan Angkutan Barang Penumpang <i>Over Baggage vs Red Pack</i> - Progress Pengadaan Kapal	Dewan Komisaris Board of Commissioners - Muhammad Awaluddin - Kristia Budiarto - Faturohman - Wahyu Adji Hepriarsono - Raden Suhartono - Eddy Susanto Soepadmo Direksi Board of Directors - Tri Andayani - Anik Hidayati - Nuraini Dessy W - Robert M.P. Sinaga - Rainoc - Kokok Susanto
4.	Selasa, 30 April 2024 Tuesday, April 30, 2024	- Update tindak lanjut <i>List of Concern</i> Dewan Komisaris atas kinerja YTD Februari 2024; - Penyampaian <i>List of Concern</i> Dewan Komisaris atas kinerja YTD Maret 2024; - Pembahasan Prognosa Keuangan dan Operasional kinerja YTD April 2024; - Lain-lain: - Laporan Tindak Lanjut Pasca Insiden Kebakaran KM Bukit Raya - Laporan progress Pengadaan Kapal <i>Ro-Ro Passengers</i>	Dewan Komisaris Board of Commissioners - Muhammad Awaluddin - Kristia Budiarto - Faturohman - Wahyu Adji Hepriarsono - Raden Suhartono - Eddy Susanto Soepadmo Direksi Board of Directors - Tri Andayani - Anik Hidayati - Nuraini Dessy W - Robert M.P. Sinaga - Rainoc - Kokok Susanto
5.	Jumat, 31 Mei 2024 Friday, May 31, 2024	- Update tindak lanjut <i>List of Concern</i> Dewan Komisaris atas kinerja YTD Maret 2024; - Penyampaian <i>List of Concern</i> Dewan Komisaris atas kinerja YTD April 2024; - Pembahasan Usulan Tantiem BoD & BoC 2023 dan Remunerasi BoD & BoC 2024; - Agenda Lain-lain.	Dewan Komisaris Board of Commissioners - Muhammad Awaluddin - Kristia Budiarto - Faturohman - Wahyu Adji Hepriarsono - Raden Suhartono - Eddy Susanto Soepadmo Direksi Board of Directors - Tri Andayani - Anik Hidayati - Nuraini Dessy W - Robert M.P. Sinaga - Rainoc - Kokok Susanto

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

.No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants
6.	Kamis, 27 Juni 2024 Thursday, June 27, 2024	1. Update tindak lanjut <i>List of Concern</i> Dewan Komisaris atas kinerja YTD Mei 2024; 2. Penyampaian <i>List of Concern</i> Dewan Komisaris atas kinerja YTD Mei 2024; 3. Agenda Lain-lain 1. Update on the Follow-Up to the Board of Commissioners' List of Concerns YTD May 2024 2. Presentation of the List of Concerns YTD May 2024 3. Miscellaneous	Dewan Komisaris Board of Commissioners 1. Muhammad Awaluddin 2. Kristia Budiarto 3. Fatur Rahman 4. Wahyu Adji Hepriarsono 5. Raden Suhartono 6. Eddy Susanto Soepadmo Direksi Board of Directors 1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dessy W 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Kokok Susanto
7.	Rabu, 31 Juli 2024 Wednesday, July 31, 2024	1. Update tindakan lanjut <i>List of Concern</i> Dewan Komisaris atas kinerja YTD Juni 2024; 2. Penyampaian <i>List of Concern</i> Dewan Komisaris atas kinerja YTD Juni 2024; 3. Agenda Lain-lain 1. Update on the Follow-Up to the Board of Commissioners' List of Concerns YTD June 2024 2. Presentation of the List of Concerns YTD June 2024 3. Miscellaneous	Dewan Komisaris Board of Commissioners 1. Muhammad Awaluddin 2. Kristia Budiarto 3. Fatur Rahman 4. Wahyu Adji Hepriarsono 5. Raden Suhartono 6. Eddy Susanto Soepadmo Direksi Board of Directors 1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dessy W 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Kokok Susanto
8.	Kamis, 29 Agustus 2024 Thursday, August 29, 2024	1. Penyampaian RTP YTD Juni 2024 dan <i>List of Concern</i> Dewan Komisaris atas kinerja YTD Juli 2024; 2. Penyampaian Tindak Lanjut <i>List of Concern</i> Dewan Komisaris atas kinerja YTD Juli 2024; 3. Paparan atas Kinerja YTD Juli; 4. Agenda lain-lain 1. Presentation of RTP YTD June 2024 and the List of Concerns YTD July 2024 2. Presentation of the Follow-Up to the List of Concerns YTD July 2024 3. Presentation on Performance YTD July 4. Miscellaneous	Dewan Komisaris Board of Commissioners 1. Muhammad Awaluddin 2. Kristia Budiarto 3. Fatur Rahman 4. Wahyu Adji Hepriarsono 5. Raden Suhartono 6. Eddy Susanto Soepadmo Direksi Board of Directors 1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dessy W 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Kokok Susanto



DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

.No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants
9.	Jumat, 27 September 2024 Friday, September 27, 2024	- Pembahasan Tindak Lanjut RTP Dewan Komisaris YtD Agustus 2024; - Penyampaian Tindak Lanjut <i>List of Concern</i> Dewan Komisaris atas kinerja YTD Agustus 2024; - Agenda lain-lain - Discussion on Follow-Up to the Board of Commissioners' RTP YTD August 2024 - Presentation of the Follow-Up to the List of Concerns YTD August 2024 - Miscellaneous	Dewan Komisaris Board of Commissioners - Muhammad Awaluddin - Kristia Budiarto - Faturohman - Wahyu Adji Hepriarsono - Raden Suhartono - Eddy Susanto Soepadmo Direksi Board of Directors - Tri Andayani - Anik Hidayati - Nuraini Dessy W - Robert M.P. Sinaga - Rainoc - Kokok Susanto
10.	Jumat, 25 Oktober 2024 Friday, October 25, 2024	- Pembahasan Tindak Lanjut RTP dan <i>List of Concern</i> Dewan Komisaris atas kinerja YtD September 2024; - Pembahasan Prognosa YtD Desember 2024; - Pembahasan Usulan RKAP PT PELNI (Persero) Tahun 2025; - Agenda lain-lain - Discussion on Follow-Up to the Board of Commissioners' RTP and List of Concerns YTD September 2024 - Discussion on Performance Forecast YTD December 2024 - Discussion on the 2025 RKAP Proposal of PT PELNI (Persero) - Miscellaneous	Dewan Komisaris Board of Commissioners - Muhammad Awaluddin - Kristia Budiarto - Faturohman - Wahyu Adji Hepriarsono - Raden Suhartono - Eddy Susanto Soepadmo Direksi Board of Directors - Tri Andayani - Anik Hidayati - Nuraini Dessy W - Robert M.P. Sinaga - Rainoc - Kokok Susanto
11.	Kamis, 28 November 2024 Thursday, November 28, 2024	- Pembahasan Tindak Lanjut RTP dan <i>List of Concern</i> Dewan Komisaris atas kinerja YtD Oktober 2024; - Pembahasan Prognosa Kinerja YtD Desember 2024; - Agenda lain-lain - Discussion on Follow-Up to the RTP and List of Concerns YTD October 2024 - Discussion on Performance Forecast YTD December 2024 - Miscellaneous	Dewan Komisaris Board of Commissioners - Muhammad Awaluddin - Kristia Budiarto - Faturohman - Wahyu Adji Hepriarsono - Raden Suhartono - Eddy Susanto Soepadmo Direksi Board of Directors - Tri Andayani - Anik Hidayati - Nuraini Dessy W - Robert M.P. Sinaga - Rainoc - Kokok Susanto

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

.No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants
12.	Jumat, 27 Desember 2024 Friday, December 27, 2024	1. Pembahasan Tindak Lanjut RTP dan <i>List of Concern</i> Dewan Komisaris atas kinerja YtD November 2024; 2. Agenda lain-lain 1. Discussion on Follow-Up to the RTP and List of Concerns YTD November 2024 2. Miscellaneous	Dewan Komisaris Board of Commissioners 1. Muhammad Awaluddin 2. Kristia Budiarto 3. Fatur Rahman 4. Wahyu Adji Hepriarsono 5. Raden Suhartono 6. Eddy Susanto Soepadmo Direksi Board of Directors 1. Tri Andayani 2. Anik Hidayati 3. Nuraini Dessy W 4. Robert M.P. Sinaga 5. Rainoc 6. Kokok Susanto

KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI DALAM RUPS

Informasi terkait kehadiran anggota Direksi dalam RUPS tercantum dalam Bab Tata Kelola Perusahaan bagian RUPS.

PENETAPAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN OLEH DIREKSI

Setiap kebijakan pengelolaan Perseroan harus ditetapkan dalam suatu kebijakan tertulis. Kebijakan tertulis tersebut ditetapkan oleh Direksi, baik dengan keputusan Direksi atau keputusan Direksi terkait. Bentuk-bentuk Kebijakan Pengurusan Perusahaan seperti Surat Keputusan dan lain- lain, diatur dalam Dokumen Perusahaan tersendiri.

Kebijakan terkait pengelolaan PT PELNI (Persero) yang ditetapkan oleh Direksi selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

PRESENCE OF BOARD MEMBERS IN THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

Information regarding the presence of Board members in the GMS is detailed in the Corporate Governance Chapter, specifically in the GMS section.

ESTABLISHMENT OF CORPORATE MANAGEMENT POLICIES BY THE BOARD OF DIRECTORS

Every corporate management policy must be established in written form. Such written policies are determined by the Board of Directors, either through a Board decision or a relevant Board decision. The various forms of Corporate Management Policies, such as Decrees and others, are regulated in separate Company Documents.

The policies related to the management of PT PELNI (Persero) established by the Board of Directors during 2024 are as follows:



DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

No.	No. SK Decree No.	Keterangan Description	Tanggal Date
1	01.02/03/SK/HKO.01/2024	Tentang Batas Usia Pensiun Pegawai di PT PELNI (Persero) Regarding the Retirement Age Limit for Employees at PT PELNI (Persero)	01 Desember 2024 December 01, 2024
2	01.03/03/SK/HKO.01/2024	Tentang Biaya Makanan dan Minuman untuk Penumpang Kelas 1 (satu) dan Kelas 2 (dua) di Atas Kapal Penumpang PT PELNI (Persero) Regarding Food and Beverage Costs for Class 1 and Class 2 Passenger Services on Passengers Ship of PT PELNI (Persero)	16 Januari 2024 January 16, 2024
3	01.03/04/SK/HKO.01/2024	Tunjangan Makan dan Minum untuk Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) di Kapal Penumpang; Meal and Beverage Allowance for Captains and Crew	16 Januari 2024 January 16, 2024
4	01.24/02/SK/HKO.01/2024	Tentang tarif layanan tambahan (ADD ON) untuk penumpang kapal PT PELNI (Persero) Additional Service (ADD ON) Tariff for Passengers	25 Januari 2024 January 25, 2024
5	02.02/01/SE/HKO.04/2024	Kurs Pembukuan Valuta Asing Per 31 Januari 2024 Foreign Currency Accounting Exchange Rate as of January 31, 2024	02 Mei 2024 May 02, 2024
6	02.01/02/SK/HKO.01/2024	Pemberian Manfaat Pensiun Provision of Pension Benefits	02 Mei 2024 May 02, 2024
7	02.02/03/SK/HKO.01/2024	Tentang Komite Kapital dan Anak Perusahaan PT PELNI (Persero) Regarding the Capital and Subsidiary Committee of PT PELNI (Persero)	02 Mei 2024 May 02, 2024
8	02.02/02/SK/HKO.01/2024	<i>Standard Operating Procedure</i> Layanan Penumpang PT PELNI (Persero) Standard Operating Procedure for Passenger Services of PT PELNI (Persero)	02 Mei 2024 May 02, 2024
9	02.19/01/SK/HKO.01/2024	Penetapan Aset Tanah Dan/Atau Bangunan Milik PT PELNI (Persero) Determination of Land and/or Building Assets Owned by PT PELNI (Persero)	20 Februari 2024 February 20, 2024
10	02.19/02/SK/HKO.01/2024	Tim <i>Counterpart</i> Percepatan Penyusunan Serta Pemutakhiran Pedoman & <i>Standard Operating Procedure</i> PT PELNI (Persero) Counterpart Team for Accelerated Preparation and Implementation of Guidelines & Standard Operating Procedure of PT PELNI (Persero)	28 Februari 2024 February 28, 2024
11	03.01/04/SK/HKO.01/2024	Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Di Lingkungan PT PELNI (Persero) Employees Uniform Guidelines of PT PELNI (Persero)	03 April 2024 April 03, 2024
12	03.06/01/SE/HKO.04/2024	Kurs Pembukuan Valuta Asing Per 29 Februari 2024 Foreign Currency Accounting Exchange Rate as of February 29, 2024	03 November 2024 November 03, 2024
13	03.22/03/SK/HKO.01/2024	TIM Penilai Internal Indeks Kematangan Risiko (<i>Risk Maturity Index</i>) PT PELNI (Persero) Internal Assessment Team for Risk Maturity Index of PT PELNI (Persero) in 2024	25 Maret 2024 March 25, 2024
14	03.26/01/SE/HKO.04/2024	Penggunaan dan Perubahan <i>Password</i> Aplikasi PT PELNI (Persero) Use and Change of Passwords for PT PELNI (Persero) Applications	27 Maret 2024 March 27, 2024
15	03.25/01/SK/HKO.01/2024	Tim <i>Counterpart Audit Surveillance</i> I Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Tim <i>Counterpart</i> Sertifikasi ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan Tahun 2024 di PT PELNI (Persero) Counterpart Team for the First Surveillance Audit of ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System Certification and Counterpart Team for the ISO 37301:2021 Compliance Management System Certification for the Year 2024 at PT PELNI (Persero)	25 Maret 2024 March 25, 2024
16	03.26/02/SK/HKO.01/2024	Tim Posko Angkutan Lebaran (1445H) Tahun 2024 di PT PELNI (Persero) 2024 Eid Transport Command Team of PT PELNI (Persero)	04 Januari 2024 January 04, 2024
17	01.17/01/SK/HKO.01/2024		04 Januari 2024 January 04, 2024
18	03.27/01/SK/HKO.01/2024	Pengurus Persekutuan Oikumene Umat Kristiani PT PELNI (Persero) Periode 2024 - 2026 Board of the Ecumenical Christian Fellowship of PT PELNI (Persero) for the 2024-2026 Term	04 Februari 2024 February 04, 2024
19	04.02/01/SE/HKO.04/2024	Kurs Pembukuan Valuta Asing Per 28 Maret 2024 Foreign Currency Accounting Exchange Rate as of March 28, 2024	04 Maret 2024 March 04, 2024



DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

No.	No. SK Decree No.	Keterangan Description	Tanggal Date
20	04.03/01/SK/HKO.01/2024	Tim <i>Counterpart</i> Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Konsultan Perancangan Kapal Penumpang Baru Counterpart Team for the Preparation of the Terms of Reference (ToR) for the Procurement of a Consultant for the Design of a New Passenger Ship	04 November 2024 November 04, 2024
21	04.05/01/SK/HKO.01/2024	Pengurus Badan Kerohanian Islam PT PELNI (Persero) Periode 2024 - 2027 Management of the Islamic Religious Body of PT PELNI (Persero) (Persero) for the 2024-2027 Period	24 April 2024 April 24, 2024
22	04.17/02/SK/HKO.01/2024	Formasi Unit Kerja dan Jabatan pada Lingkup Kantor Pusat Work Unit and Position Formation at the HQ	29 April 2024 April 29, 2024
23	04.17/01/SK/HKO.01/2024	Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Kantor Pusat di PT PELNI (Persero) Organizational Structure, Main Duties, and Functions of PT PELNI (Persero) HQ	29 April 2024 April 29, 2024
24	04.29/01/SK/HKO.01/2024	Penanggung Jawab Keselematan dan Kesehatan Kerja (K3) di Lingkungan PT PELNI (Persero) Person in Charge of Occupational Safety and Health (K3) in the Work Environment of PT PELNI (Persero)	05 Februari 2024 February 05, 2024
25	02.05/01/SE/HKO.04/2024	Kurs Pembukuan Valuta Asing Per 30 April 2024 Foreign Currency Accounting Exchange Rate as of April 30, 2024	05 Juni 2024 June 05, 2024
26	05.15/01/SK/HKO.01/2024	Superuser Layanan Aplikasi PT PELNI (Persero) Superuser of Application Services of PT PELNI (Persero)	19 Mei 2024 May 19, 2024
27	05.31/01/SE/HKO.04/2024	Kurs Pembukuan Valuta Asing Per 31 Mei 2024 Foreign Currency Accounting Exchange Rate as of May 31, 2024	06 Juni 2024 June 06, 2024
28	06.03/01/SK/HKO.01/2024	Tentang Penunjukan Tim Penilai Perilaku Pegawai Berbasis "AKHLAK" Regarding the Appointment of the Employee Behavior based on "AKHLAK" Assessment Team	06 Desember 2024 December 06, 2024
29	06.19/01/SK/HKO.01/2024	Tentang Tim Penghapusbukuan & Pemindahtanganan Aktiva Tetap Kendaraan Dinas dan Kendaraan Alat Berat Regarding the Write-Off and Transfer Team for Fixed Assets of Service Vehicles and Heavy Equipment Vehicles	21 Juni 2024 June 21, 2024
30	06.19/02/SK/HKO.01/2024	Pengakhiran Tarif Promo Return Cargo di Kapal Penumpang PT PELNI (Persero) Termination of Promotional Return Cargo Tariff on Passenger Ship of PT PELNI (Persero)	24 Juni 2024 June 24, 2024
31	06.21/01/SE/HKO.04/2024	Spesifikasi dan Persebaran Perangkat Kerja Teknologi Informasi PT PELNI (Persero) Specifications and Distribution of Information Technology Work Devices at PT PELNI (Persero)	07 Januari 2024 January 07, 2024
32	07.02/03/SK/HKO.01/2024	Standard Operating Procedure Penjualan & Operasional Keagenan PT PELNI (Persero) Standard Operating Procedure for Sales & Operations of Passenger Services of PT PELNI (Persero)	07 April 2024 April 07, 2024
33	07.02/02/SK/HKO.01/2024	<i>Standard Operating Procedure</i> Pemasaran Keagenan PT PELNI (Persero) Standard Operating Procedure for Agency Marketing Services of PT PELNI (Persero)	07 April 2024 April 07, 2024
34	07.01/01/SE/HKO.04/2024	Kurs Pembukuan Valuta Asing Per 28 Juni 2024 Foreign Currency Accounting Exchange Rate as of June 28, 2024	07 Oktober 2024 October 07, 2024
35	07.08/01/SK/HKO.01/2024	Penunjukkan Tim Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR) Appointment of the National Public Service Complaint Management System Team for the Online Aspirations and Complaints Service (SP4N LAPOR)	Senin, 07 Oktober 2024
36	07.31/01/SE/HKO.01/2024	Standar Baku Surat Pengadaan Langsung (SPL) Standard Format for Direct Procurement Letter (SPL)	08 Juni 2024 June 08, 2024
37	08.05/01/SK/HKO.01/2024	Tim Counterpart Implementasi Sistem Manajemen Terintegrasi PT PELNI (Persero) Counterpart Team for Implementation of Integrated Management System of PT PELNI (Persero)	08 Juni 2024 June 08, 2024



DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

No.	No. SK Decree No.	Keterangan Description	Tanggal Date
38	08.01/01/SE/HKO.04/2024	Kurs Pembukuan Valuta Asing Per 31 Juli 2024 Foreign Currency Accounting Exchange Rate as of July 31, 2024	08 Juli 2024 July 08, 2024
39	08.09/01/SK/HKO.01/2024	Pedoman Risk Based Audit Risk-Based Audit Guidelines	19 Agustus 2024 August 19, 2024
40	07.19/02/SK/HKO.01/2024	Penetapan Kelas Cabang Branch Classification Determination	19 Agustus 2024 August 19, 2024
41	09.03/01/SE/HKO.04/2024	Kurs Pembukuan Valuta Asing Per 30 Agustus 2024 Foreign Currency Accounting Exchange Rate as of August 30, 2024	09 Mei 2024 May 09, 2024
42	09.03/02/SK/HKO.01/2024	Tim Counterpart Audit Sertifikasi <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) Pada Pengelolaan Layanan Permakanan di Kapal Penumpang PT PELNI (Persero) Counterpart Team for the Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) Certification Audit of Catering Service Management on Passenger Ships of PT PELNI (Persero)	09 September 2024 September 09, 2024
43	09.05/01/SK/HKO.01/2024	Penetapan dan Penunjukan Direktur Sebagai Penanggung Jawab Dalam Penerapan dan Pemantauan Good Corporate Governance (GCG) PT PELNI (Persero) Appointment and Designation of Director as Responsible Officer for Impelementation and Supervision on Good Corporate Governance (GCG) of PT PELNI (Persero)	13 September 2024 September 13, 2024
44	09.03/01/SE/HKO.05/2024	Pengelolaan Kebersihan Kapal Penumpang di Cabang PT PELNI (Persero) Management of Passenger Ship Cleanliness at PT PELNI (Persero) Branch	13 September 2024 September 13, 2024
45	09.11/03/SK/HKO.01/2024	Tim <i>Counterpart Assessment Good Corporate Governance</i> (GCG) Tahun 2024 di PT PELNI (Persero) Counterpart Team for Good Corporate Governance (GCG) Assessment of PT PELNI (Persero)	16 September 2024 September 16, 2024
46	09.18/01/SE/HKO.05/2024	Implementasi Standar Menu Makanan dan Minuman Penumpang Menggunakan Variasi Menu Ready Meal Tahap 1 Implementation of Food and Beverage Standard Menu for Passangers with Ready Meal Menu Variation Phase 1	23 September 2024 September 23, 2024
47	09.20/01/SE/HKO.05/2024	Standar Pelayanan Penumpang Passenger Service Standards	26 September 2024 September 26, 2024
48	09.27/01/SK/HKO.01/2024	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT PELNI (Persero) Information and Documentation Management Officer (PPID) at PT PELNI (Persero)	10 April 2024 April 10, 2024
49	10.02/03/SK/HKO.01/2024	Surat Keputusan Direksi tentang Panduan dan Alur Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHPKN) di PT PELNI (Persero) Board of Directors' Decree on the Guidelines and Procedure for Submitting the State Official Wealth Report (LHPKN) at PT PELNI (Persero)	17 Oktober 2024 October 17, 2024
50	10.07/01/SK/HKO.01/2024	Surat Keputusan Direksi Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan PT PELNI (Persero) Board of Directors' Decree on the Guidelines for Public Information Services within PT PELNI (Persero)	17 Oktober 2024 October 17, 2024
51	10.21/02/SK/HKO.01/2024	Pedoman <i>Business Continuity Management System</i> PT PELNI (Persero); Guidelines for the Business Continuity Management System (BCMS) of PT PELNI (Persero)	26 Oktober 2024 October 26, 2024
52	10.21/03/SK/HKO.01/2024	<i>Standard Operating Procedure</i> Perangkat Kerja Teknologi Informasi PT PELNI (Persero) Standard Operating Procedure for Information Technology Work Devices at PT PELNI (Persero)	28 Oktober 2024 October 28, 2024
53	10.25/03/SK/HKO.01/2024	Tarif Angkutan <i>Empty Dry Container</i> dan <i>Empty Reefer Container Shipper Owned Container</i> (SOC) dengan Menggunakan Kapal Penumpang Milik PT PELNI (Persero) Transport Tariff for Empty Dry Containers and Empty Reefer Containers Shipper Owened Container (SOC) on Passengers Ship of PT PELNI (Persero)	30 Oktober 2024 October 30, 2024
54	10.30/01/SK/HKO.01/2024	Tarif Angkutan <i>Dry Container</i> dan <i>Reefer Container</i> dengan Menggunakan Kapal Penumpang Milik PT PELNI (Persero) Transport Tariff for Dry Containers and Reefer Containers on Passenger Ship of PT PELNI (Persero)	30 Oktober 2024 October 30, 2024



DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

No.	No. SK Decree No.	Keterangan Description	Tanggal Date
55	10.30/03/SK/HKO.01/2024	Ketentuan dan Tarif Muatan Berlabel Red Pack Provisions and Tariffs for Red Pack Labeled Cargo	11 Januari 2024 January 11, 2024
56	10.30/02/SK/HKO.01/2024	Tarif Muatan General Cargo di PT PELNI (Persero) General Cargo Tariff at PT PELNI (Persero)	11 Januari 2024 January 11, 2024
57	11.04/01/SE/HKO.04/2024	Kurs Pembukuan Valuta Asing Per 31 October 2024 Foreign Currency Accounting Exchange Rate as of October 31, 2024	11 Mei 2024 May 11, 2024
58	11.05/05/SK/HKO.01/2024	Ketentuan Pelaksanaan Medical Check UP (MCU) Pegawai PT PELNI (Persero) Implementation Provisions for Employee Medical Check-Ups (MCU) of PT PELNI (Persero)	11 Juli 2024 July 11, 2024
59	11.05/07/SK/HKO.01/2024	Perubahan Surat Keputusan Direksi Nomor 03.01/04/SK/HKO.01/2024 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan PT PELNI (Persero) Amendment to Directors' Decree Number 03.01/02/SK/HKO.01/2024 regarding Guidelines on Employee Uniform of PT PELNI (Persero)	11 Juli 2024 July 11, 2024
60	11.05/04/SK/HKO.01/2024	Tarif Angkutan Kendaraan KM Ciremai dan KM Dobonsolo di PT PELNI (Persero) Vehicle Transport Tariff for KM Ciremai and KM Dobonsolo Ships	11 Juli 2024 July 11, 2024
61	11.05/06/SK/HKO.01/2024	Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Perkantoran PT PELNI (Persero) No Smoking Area in the Office Environment of PT PELNI (Persero)	11 November 2024 November 11, 2024
62	11.05/08/SK/HKO.01/2024	Harga Jual Minimum Aktiva Tetap KM Caraka Jaya Niaga III-22 Milik PT PELNI (Persero) Minimum Sale Price of Fixed Assets of KM Caraka Jaya Niaga III-4 of PT PELNI (Persero)	11 November 2024 November 11, 2024
63	11.14/01/SK/HKO.01/2024	Tarif Angkutan Kendaraan dengan Kapal Roro KM Egon di PT PELNI (Persero) Vehicle Transport Tariff with Roro Ship KM Egon of PT PELNI (Persero)	22 November 2024 November 22, 2024
64	09.09/01/SK/HKO.01/2024	Pedoman Sistem Manajemen Terintegrasi PT PELNI (Persero) Integrated Management System Guidelines for PT PELNI (Persero)	12 Februari 2024 February 12, 2024
65	11.25/01/SE/HKO.04/2024	Ketentuan Penggunaan dan Kapasitas Email & Cloud PT PELNI (Persero) Regulations on the Use and Capacity of Email & Cloud Storage of PT PELNI (Persero)	29 November 2024 November 29, 2024
66	11.26/01/SE/HKO.03/2024	Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya di Lingkungan PT PELNI (Persero) Playing the National Anthem "Indonesia Raya" at PT PELNI (Persero)	29 November 2024 November 29, 2024
67	11.25/01/SK/HKO.01/2024	Alokasi Penjualan General Cargo pada 8 (Delapan) Kapal Penumpang di PT PELNI (Persero) Allocation of General Cargo Sales in 8 (Eight) Passengers Ship at PT PELNI (Persero)	12 April 2024 April 12, 2024
68	12.03/01/SE/HKO.04/2024	Kurs Pembukuan Valuta Asing Per 29 November 2024 Foreign Currency Accounting Exchange Rate as of November 29, 2024	12 April 2024 April 12, 2024
69	09.03/04/SK/HKO.01/2024	Pedoman Sistem Manajemen Keamanan Informasi PT PELNI (Persero) Information Security Management System Guidelines for PT PELNI (Persero)	13 Desember 2024 December 13, 2024
70	09.03/05/SK/HKO.01/2024	Pedoman Pengendalian Keamanan Informasi di PT PELNI (Persero) Information Security Control Guidelines at PT PELNI (Persero)	13 Desember 2024 December 13, 2024
71	12.13/01/SK/HKO.01/2024	Tim Counterpart Pembangunan Aplikasi Ticketing System PT PELNI (Persero) Counterpart Team for Development of Ticketing System Application of PT PELNI (Persero)	16 Desember 2024 December 16, 2024
72	12.18/02/INS/HKO.01/2024	Larangan Gratifikasi Terkait Momen Hari Natal 2024 Dan Tahun Baru 2025 Prohibition of Gratuities Related to 2024 Christmas and 2025 New Year Celebrations	18 Desember 2024 December 18, 2024
73	12.19/03/SK/HKO.01/2024	Tim Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) PT PELNI (Persero) Information Security Management System Team of PT PELNI (Persero)	20 Desember 2024 December 20, 2024



DIREKSI BOARD OF DIRECTORS

KEBIJAKAN PROGRAM PENGENALAN

Kebijakan terkait program pengenalan diatur dalam Salinan Surat Keputusan Bersama antara Direksi PT PELNI (Persero) dengan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) Nomor: 11.15/01/SK/HKO.01/2023 tanggal 15 November 2023 tentang Pedoman Tata Laksana Kerja (*Board Manual*) Direksi dan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) dan telah dipublikasikan di *website* resmi Perseroan.

PROGRAM PENGENALAN DIREKSI

Direksi menetapkan kebijakan untuk diadakan program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru diangkat. Program pengenalan dimaksudkan agar Direksi yang berasal dari berbagai latar belakang dan pengalaman dapat mengenal dan memahami kegiatan dan kondisi Perseroan. Program pengenalan ini dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pengangkatan anggota Direksi baru. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.

Materi program pengenalan setidaknya memuat:

1. Pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik oleh Perusahaan;
2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan masalah strategis lainnya;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, Audit Intern dan Audit Ekstern, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk komite audit; dan
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi serta hal yang tidak diperbolehkan.

INTRODUCTION PROGRAM POLICY

The policy related to the introduction program is regulated in the Joint Decree between the Board of Directors of PT PELNI (Persero) and the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) Number: 11.15/01/SK/HKO.01/2023 dated November 15, 2023, regarding the Board Manual for the Board of Directors and Board of Commissioners of PT PELNI (Persero), and has been published on the Company's official website.

INTRODUCTION PROGRAM FOR THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors has established a policy to implement an introduction program for newly appointed members of the Board of Directors. This program is intended to help new Directors, coming from various backgrounds and experiences, to familiarize themselves with the company's activities and conditions. The introduction program must be conducted no later than 3 (three) months after the appointment of a new Director. The responsibility for organizing the introduction program lies with the Corporate Secretary or whoever performs the function of the Corporate Secretary.

The content of the introduction program includes at least:

1. Implementation of Good Corporate Governance principles by the Company;
2. An overview of the Company, including its objectives, nature and scope of activities, financial and operational performance, short-term and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues;
3. Information regarding delegated authorities, Internal and External Audits, internal control systems and policies, including the audit committee; and
4. Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Directors and prohibitions.

DIREKSI BOARD OF DIRECTORS

Pada tahun 2024, Perseroan menyelenggarakan Program Pengenalan Perusahaan kepada anggota Direksi baru, yaitu Bapak Kokok Susanto selaku Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut. Adapun metode program pengenalan dilakukan dengan cara presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perusahaan, kunjungan ke kantor-kantor cabang, serta pengkajian dokumen Perusahaan.

In 2024, the Company conducted a Corporate Induction Program for the newly appointed member of the Board of Directors, Mr. Kokok Susanto, who serves as Director of Freight and Sea Toll Services. The introduction program methods included presentations, meetings, visits to Company facilities, visits to branch offices, and review of Company documents.

KEBIJAKAN PELATIHAN

Kebijakan terkait peningkatan kapabilitas diatur dalam Salinan Surat Keputusan Bersama antara Direksi PT PELNI (Persero) dengan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) Nomor: 11.15/01/SK/HKO.01/2023 tanggal 15 November 2023 tentang Pedoman Tata Laksana Kerja (*Board Manual*) Direksi dan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) dan telah dipublikasikan di *website* resmi Perseroan.

TRAINING POLICY

The policy related to capability enhancement is regulated in the Joint Decree between the Board of Directors of PT PELNI (Persero) and the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) Number: 11.15/01/SK/HKO.01/2023 dated November 15, 2023, regarding the Board Manual for the Board of Directors and Board of Commissioners of PT PELNI (Persero), and has been published on the Company's official website.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Pada tahun 2024, program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM FOR THE BOARD OF DIRECTORS

In 2024, the competency development programs attended by the Board of Directors of the Company were as follows:

No	Nama dan Jabatan Name and Position	Tanggal Date	Nama Pelatihan Training Name	Penyelenggara Organizer
1	Tri Andayani Direktur Utama President Director	29-30 April 2024 April 29-30, 2024	<i>Masterclass: Integrated Governance, Risk, & Compliance</i>	CRMS (<i>Center for Risk Management & Sustainability</i>)
		4-6 Desember 2024 December 4-6, 2024	<i>Resilient Leadership: ESG, AI, and GRC in Modern Risk Governance & Risk Beyond</i> (Zoom Meeting)	CRMS (<i>Center for Risk Management & Sustainability</i>)
2	Heri Purnomo Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Resources and General Affairs	18 Oktober 2023 October 18, 2023	Profesional Tata Kelola Risiko Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
		1-2 Maret 2024 March 1-2, 2024	Sertifikasi Akuntan Profesional Tingkat Dasar Basic Level Professional Accountant Certification	BSE School of Excellent bersama Ikatan Akuntan Indonesia
		Maret-Mei 2024 March to May, 2024	Sertifikasi Akuntan Profesional Tingkat Profesional Professional Level Professional Accountant Certification	BSE School of Excellent bersama Ikatan Akuntan Indonesia
		Juni-Agustus 2024 June to August, 2024	Sertifikasi Akuntan Profesional Tingkat Lanjutan Advanced Level Professional Accountant Certification	BSE School of Excellent bersama Ikatan Akuntan Indonesia



DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

No	Nama dan Jabatan Name and Position	Tanggal Date	Nama Pelatihan Training Name	Penyelenggara Organizer
3	Anik Hidayati Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	7-8 Maret 2024 March 7-8, 2024	Workshop: <i>Navigating Reputation Risk: Strategies For Effective Crisis Management</i>	GRC Management, Supported by Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR)
		21 Mei 2024 May 21, 2024	PDP - Anti Fraud Risk Management <i>Seri 1 Fundamentals on Anti Fraud Risk Management</i>	IRMAPA Indonesia Risk Management Professional Association
		28 Mei 2024 May 28, 2024	PDP - Anti Fraud Risk Management <i>Seri 2 Anti Fraud Risk Management Framework</i>	IRMAPA Indonesia Risk Management Professional Association
		4 Juni 2024 June 4, 2024	PDP - Anti Fraud Risk Management <i>Seri 3 Anti Fraud Risk Management Implementation</i>	IRMAPA Indonesia Risk Management Professional Association
		31 Mei 2024 May 31, 2024	Sertifikasi Manajemen Risiko (CRGP) Certified in Risk Governance and Professional (CRGP)	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR)
		25-26 Juli 2024 July 25-26, 2024	Master Class Program Series XXIII "A master class on Life Cycle Assessment (LCA) and Carbon Reduction Strategy"	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR)
		6-8 Agustus 2024 August 6-8, 2024	7th Global Conference: ESG Management & Sustainability	ASEEC Tower, Universitas Airlangga, Surabaya
		25-27 September 2024 September 25-27, 2024	Chief Financial Officer (CFO) School Tahun 2024	Kementerian BUMN berkolaborasi dengan BUMN School of Excellence, INSEAD Campus Singapore
		18 Oktober 2024 October 18, 2024	Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA) Qualified Internal Auditor (QIA) Certification	Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor
		4 Desember 2024 December 4, 2024	Resilient Leadership ESG, AI dan GRC in Modern Risk Governance	CRMS (Center for Risk Management & Sustainability)
		5-6 Desember 2024 December 5-6, 2024	Risk Beyond 2024 on Enterprise Risk Management	Enterprise Risk Management Academy (ERMA)
		14-16 November 2024 November 14-16, 2024	Sertifikasi Akuntan Profesional Tingkat Dasar Basic Level Professional Accountant Certification	BSE School of Excellent bersama Ikatan Akuntan Indonesia
		28 November - 21 Desember 2024 November 28 to December 21, 2024	Sertifikasi Akuntan Profesional Tingkat Profesional Level Professional Accountant Certification	BSE School of Excellent bersama Ikatan Akuntan Indonesia
4	Nuraini Dessy Winiastuty Direktur Usaha Angkutan Penumpang Director of Passenger Transport Business	3-4 Oktober 2024 October 3-4, 2024	Integrated Anti-Fraud Management System	CRMS (Center for Risk Management & Sustainability)
		14-15 November 2024 November 14-15, 2024	Risk Management Maturity Assessment	CRMS (Center for Risk Management & Sustainability)
		18-19 November 2024 November 18-19, 2024	Risk Control Self Assessment	CRMS (Center for Risk Management & Sustainability)
		6 November 2024 November 6, 2024	Riskhub International Webinar	Enterprise Risk Management Academy (ERMA)

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

No	Nama dan Jabatan Name and Position	Tanggal Date	Nama Pelatihan Training Name	Penyelenggara Organizer
5	Robert MP Sinaga Direktur Armada dan Teknik Director of Human Resources and General Affairs	4-5 Maret 2024 March 4-5, 2024	Pelatihan & Sertifikasi Manajemen Risiko (QRGP) - <i>Qualified Risk Governance Professional</i> Risk Management Training & Certification (QRGP) - <i>Qualified Risk Governance Professional</i>	CRMS (Center for Risk Management & Sustainability)
		14 Oktober 2024 October 14, 2024	Seminar Pelatihan <i>Daihatsu Engine</i> Daihatsu Engine Training Seminar	Daihatsu Diesel Asia Pacific PTE. LTD.
		17 Oktober 2024 October 17, 2024	<i>Alfa Laval High Speed Separator basic Training</i>	PT Alfa Laval Indonesia
		6 November 2024 November 6, 2024	<i>Data-Driven Resilience: Shaping the future of enterprise risk management</i>	ERMA X IRMAPA
		4 Desember 2024 December 4, 2024	<i>Resilient Leadership ESG, AI dan GRC in Modern Risk Governance</i> Resilient Leadership ESG, AI and GRC in Modern Risk Governance	CRMS (Center for Risk Management & Sustainability)
		12-13 Desember 2024 December 12-13, 2024	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko IX 9 th National Conference of Risk Management Professionals	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR)
6	Kokok Susanto Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut	7-8 Mei 2024 May 7-8, 2024	Pelatihan Managing Legal Risk ISO 31000 Series: <i>Managing Legal Risk Based on ISO 31022:2020</i> Training on Managing Legal Risk - ISO 31000 Series: <i>Managing Legal Risk Based on ISO 31022:2020</i>	CRMS (Center for Risk Management & Sustainability)
		19-20 September 2024 September 19-20, 2024	<i>Risk Based Decision Making</i>	CRMS (Center for Risk Management & Sustainability)
		25 September 2024 September 25, 2024	Seminar Nasional <i>Good Corporate Governance</i> National Seminar on Good Corporate Governance	indonews.id
		28-31 Oktober 2024 October 28-31, 2024	Pelatihan Kepatuhan berbasis ISO 37301 (<i>Full day meeting</i>) + Sertifikasi ISO 37301-Based Compliance Training (<i>Full-Day Session</i>) + Certification	CRMS (Center for Risk Management & Sustainability)
		18-19 November 2024 November 18-19, 2024	<i>Risk Control Self Assessment</i>	CRMS (Center for Risk Management & Sustainability)
		5-6 Desember 2024 December 5-6, 2024	<i>Risk Beyond, Risk Governance & Leadership Master</i>	CRMS (Center for Risk Management & Sustainability)

PENILAIAN KINERJA TERHADAP KINERJA KOMITE YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI

Pada tahun 2024, Direksi belum memiliki Komite di bawah Direksi sehingga tidak terdapat informasi terkait:

1. Prosedur penilaian kinerja; dan
2. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES SUPPORTING THE BOARD OF DIRECTORS

In 2024, the Board of Directors did not have any committees under its supervision, therefore, there is no information available regarding:

1. Performance assessment procedures; and
2. The criteria used, such as performance achievements during the fiscal year, competencies, and attendance at meetings.



DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

1. Persyaratan

Syarat Anggota Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) meliputi syarat materiil, syarat formal dan syarat lain.

a. Syarat Materiil

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris PT PELNI (Persero), seseorang harus memenuhi syarat materiil yaitu:

- 1) Integritas;
- 2) Dedikasi;
- 3) Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- 4) Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha di mana yang bersangkutan dicalonkan; dan
- 5) Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

a. Syarat Formal

Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada poin a, untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris PT PELNI (Persero), seseorang harus memenuhi syarat formal sebagai berikut:

- 1) Orang perseorangan;
- 2) Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- 3) Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
- 4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dan

Based on Article 1 paragraph (6) of Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007, the Board of Commissioners is a corporate organ responsible for general and/or specific supervision in accordance with the Articles of Association and providing advice to the Board of Directors.

APPOINTMENT AND DISMISSAL OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. Requirements

The requirements for members of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) include material, formal, and other requirements.

a. Material Requirements

To be appointed as a member of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero), an individual must meet the following material requirements:

- 1) Integrity;
- 2) Dedication;
- 3) Understanding of company management issues related to one of the management functions;
- 4) Sufficient knowledge in the business field in which they are nominated; and
- 5) Ability to allocate adequate time to perform their duties.

a. Formal Requirements

In addition to the criteria mentioned in point a, an individual must meet the following formal requirements to be appointed as a member of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero):

- 1) An individual person;
- 2) Capable of legal action;
- 3) Not declared bankrupt within 5 (five) years before the appointment;
- 4) Not previously a member of the Board of Directors or Board of Commissioners found guilty of causing a State-Owned Enterprise, Subsidiary, and/or other business entity to go bankrupt within 5 (five) years before the appointment; and

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

- 5) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMN, Anak Perusahaan, badan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
- b. Syarat lain
- 1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan, selain memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud poin a dan b, seseorang juga harus memenuhi syarat lain sebagai berikut:
 - a) Bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b) bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk penjabat kepala/wakil kepala daerah;
 - c) tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan;
 - d) tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan atau Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan selama 2 (dua) periode;
 - e) tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris;
 - f) sehat jasmani dan rohani, yang tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit; dan
- b. Other Requirements
- 1) To be appointed as a member of the Company's Board of Commissioners, in addition to meeting the material and formal requirements as specified in points a and b, an individual must also meet the following other requirements:
 - a) Not a political party official, legislative candidate, and/or member of the legislature at the House of Representatives, Regional Representatives Council, Provincial House of Representatives, or Regency/City House of Representatives;
 - b) Not a candidate for regional head/deputy head and/or regional head/deputy head, including acting regional head/deputy head;
 - c) Not holding a position that could potentially cause a conflict of interest with the Company;
 - d) Not serving as a member of the Board of Commissioners of the Company or a subsidiary's Board of Commissioners for more than 2 (two) terms;
 - e) Not holding a position that, by law, cannot be concurrently held with the position of a member of the Board of Commissioners;
 - f) Physically and mentally healthy, not suffering from any disease that could hinder the performance of duties as a member of the Board of Commissioners, as proven by a health certificate from a hospital; and



DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

- g) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- 2) Selain memenuhi kriteria pada poin 1) di atas, anggota Dewan Komisaris juga harus memenuhi syarat lain sebagai berikut:
 - a) bagi bakal calon dari kementerian teknis atau instansi pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dari pimpinan instansi yang bersangkutan; dan
 - b) bagi bakal calon anggota Dewan Komisaris yang berasal dari penyelenggara Negara harus melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan bukti lapor LHKPN kepada institusi yang berwenang.

- g) Possessing a Taxpayer Identification Number (NPWP) and having fulfilled tax payment obligations for the last 2 (two) years.
- 2) Besides meeting the criteria in point 1 above, members of the Board of Commissioners must also meet the following other requirements:
 - a) For candidates from technical ministries or other government agencies, a nomination letter from the relevant agency's leadership is required; and
 - b) For candidates from state officials, they must report their Wealth Report for State Officials (LHKPN) for the last 2 (two) years, as evidenced by the LHKPN report receipt to the competent authority.

PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

1. RUPS/Menteri dapat menetapkan calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat formal dan syarat lain serta telah dilakukan penilaian dengan kriteria 'Disarankan' menjadi anggota Dewan Komisaris Perusahaan;
 - a. Penetapan seseorang menjadi anggota Dewan Komisaris Perusahaan dapat dilakukan setelah dinyatakan lulus penilaian sesuai ketentuan sektoral;
 - b. Dalam hal penetapan anggota Dewan Komisaris Perusahaan dilakukan sebelum UKK sesuai ketentuan sektoral maka tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan terhitung sejak dinyatakan lulus UKK sesuai ketentuan sektoral;
 - c. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan memiliki masa jabatan yang berlaku efektif sejak ditetapkan oleh RUPS/Menteri;

APPOINTMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. The General Meeting of Shareholders (GMS)/ Minister can appoint candidates who meet formal and other requirements and have been assessed with the criteria of 'Recommended' to become members of the Company's Board of Commissioners;
 - a. The appointment of an individual as a member of the Company's Board of Commissioners can be made after passing the sectoral assessment;
 - b. If the appointment of the Company's Board of Commissioners is made before the sectoral assessment, their actions, duties, and functions as members of the Board of Commissioners commence from the date they pass the sectoral assessment;
 - c. Members of the Company's Board of Commissioners have a term of office effective from the date of appointment by the GMS/ Minister;

DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

- d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris Perusahaan dinyatakan tidak lulus UKK sesuai dengan ketentuan sektoral, RUPS/Menteri dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris Perusahaan tersebut dengan memperhatikan ketentuan sektoral;
- e. Penetapan seseorang menjadi anggota Dewan Komisaris Perusahaan dapat dilakukan melalui cara Keputusan Menteri selaku RUPS/pemilik modal;
- f. Penetapan Anggota Dewan Komisaris oleh RUPS/Pemegang Saham selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir;
- g. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Anggota Direksi;
- h. Sebelum ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisaris Perusahaan, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Perusahaan terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris;
- i. Dalam hal yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan berakhir pada batas waktu tersebut;
- j. Dalam hal keputusan pengangkatan dilakukan dengan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler maka setelah keputusan ditetapkan, Deputy memproses penyerahan surat keputusan kepada anggota Dewan Komisaris Perusahaan terpilih.
- k. Dalam proses penyerahan, Wakil Menteri atau Deputy dibantu oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang bertanggung jawab di bidang hukum, Asisten Deputy, dan Asisten Deputy Sektor;
- d. If a member of the Company's Board of Commissioners fails the sectoral assessment, the GMS/Minister may dismiss the member by considering sectoral regulations;
- e. The appointment of a member of the Company's Board of Commissioners can be made through a Ministerial Decree as the GMS/owner of capital;
- f. The appointment of the Board of Commissioners by the GMS/Shareholders must be completed within 30 (thirty) days from the end of the term;
- g. The appointment of the Board of Commissioners is not concurrent with the appointment of the Board of Directors;
- h. Before being appointed as a member of the Company's Board of Commissioners, the individual must sign a resignation letter from other positions prohibited from being held concurrently with the position of a member of the Company's Board of Commissioners, effective from the date of appointment;
- i. If the individual does not resign within the timeframe stipulated by law, their tenure as a member of the Company's Board of Commissioners ends at the deadline;
- j. If the appointment is made by Ministerial Decree or circular decision of all shareholders, the Deputy processes the delivery of the decision letter to the selected member of the Company's Board of Commissioners;
- k. During the delivery process, the Deputy Minister or Deputy is assisted by high-ranking primary officials responsible for legal affairs, Assistant Deputy, and Sector Assistant Deputy;



DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

- l. Setelah penyerahan dilakukan, seluruh dokumen diserahkan kepada Deputy untuk diadministrasikan;
 - m. Dalam hal pengangkatan akan ditetapkan dalam RUPS, penyampaian hasil penilaian kepada Menteri disertai dengan surat penetapan calon dan surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS;
 - n. Setelah RUPS dilaksanakan, seluruh dokumen diserahkan kepada Deputy untuk diadministrasikan;
 - o. Proses administrasi oleh Deputy termasuk dokumentasi proses pengangkatan dan penilaian;
 - p. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan Menteri/RUPS, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri BUMN Nomor PER3-/MBU/2023/03;
 - q. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan mulai menjabat secara efektif terhitung sejak tanggal penyerahan keputusan;
 - r. Penetapan Anggota Dewan Komisaris oleh RUPS/Pemegang Saham selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir;
 - s. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Anggota Direksi;
 - t. Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, pengangkatan Anggota Dewan Komisaris mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS;
 - u. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana telah diatur, batal karena hukum sejak saat Anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan;
- l. After the delivery, all documents are handed over to the Deputy for administration;
 - m. If the appointment is to be determined at the GMS, the assessment results are submitted to the Minister with a candidate appointment letter and a power of attorney to attend and make decisions at the GMS;
 - n. After the GMS, all documents are handed over to the Deputy for administration;
 - o. The administration process by the Deputy includes documentation of the appointment and assessment process;
 - p. The selected member of the Company's Board of Commissioners signs a statement of willingness to perform their duties well and to be dismissed at any time based on the Minister's/GMS's consideration, as stated in Appendix VII, which is an inseparable part of the Minister of SOE Regulation No. PER-3/MBU/2023/03;
 - q. Members of the Company's Board of Commissioners begin their tenure effectively from the date of the decision delivery;
 - r. The appointment of the Board of Commissioners by the GMS/Shareholders must be completed within 30 (thirty) days from the end of the term;
 - s. The appointment of the Board of Commissioners is not concurrent with the appointment of the Board of Directors;
 - t. If the GMS does not specify the effective date of the appointment, the appointment of the Board of Commissioners takes effect from the closing of the GMS;
 - u. The appointment of the Board of Commissioners that does not meet the stipulated requirements is null and void from the moment other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors become aware of the non-compliance;

DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

- v. Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris untuk dan atas nama Dewan Komisaris sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan;
- w. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 23 tidak mengurangi tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan;
- x. Penetapan pengangkatan Dewan Komisaris melalui RUPS/Pelantikan Dewan Komisaris yang didukung dengan Berita Acara RUPS/ Pelantikan Dewan Komisaris.

- v. Legal actions performed by the Board of Commissioners for and on behalf of the Board of Commissioners before the appointment remains binding and become the Company's responsibility;
- w. The provisions as mentioned in point 23 do not reduce the responsibility of the respective member of the Board of Commissioners for the Company's losses;
- x. The appointment of the Board of Commissioners through the GMS/Board of Commissioners inauguration is supported by the Minutes of the GMS/Board of Commissioners inauguration.

PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

1. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya;
2. Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: meninggal dunia, masa jabatannya berakhir, diberhentikan berdasarkan RUPS, dan/ atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya;
3. Bagi Anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun pada masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS;
4. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada poin 3 dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, antara lain:
 - a. Tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;

DISMISSAL OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. Members of the Board of Commissioners can be dismissed at any time by the decision of the General Meeting of Shareholders, stating the reasons;
2. The term of office of the Board of Commissioners members ends if: they pass away, their term ends, they are dismissed based on the GMS, and/or they no longer meet the requirements as members of the Board of Commissioners based on the Articles of Association and other laws and regulations;
3. For members of the Board of Commissioners who resign before or at the end of their term, except due to death, they remain responsible for their actions that have not been accounted for to the GMS;
4. The dismissal of members of the Board of Commissioners as referred to in point 3 is carried out if, based on reality, the respective member, among others:
 - a. Cannot perform their duties properly;
 - b. Does not comply with the laws and regulations and/or the Articles of Association;
 - c. Engages in actions detrimental to the Company and/or the State;



DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

d. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; e. Melakukan tindakan yang melanggar dengan etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Anggota Dewan Komisaris; f. Menggundurkan diri; g. Telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh pihak yang berwenang dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau keuangan Negara; atau h. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.	d. Is declared guilty by a court decision with legal force; e. Engages in actions violating the ethics and/or propriety expected of a member of the Board of Commissioners; f. Resigns; g. Is designated as a suspect or defendant by the authorities in actions detrimental to SOEs and/or State finances; or h. Other reasons deemed appropriate by the GMS for the Company's interests and objectives.
5. Rencana Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada poin 4 diberitahukan kepada Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham;
 6. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud poin 4 a, b, dan h diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri;
 7. Dalam hal pemberhentian dilakukan di luar forum RUPS, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud di atas disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud tersebut di atas;
 8. Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada poin 4, maka Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
 9. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada poin 4 c dan ini merupakan pemberhentian secara tidak hormat;
 10. Antara para Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan karena perkawinan sampai dengan sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping;
5. The plan to dismiss a member of the Board of Commissioners as referred to in point 4 is notified to the respective member verbally or in writing by the Shareholders;
 6. The decision to dismiss for reasons as referred to in point 4 a, b, and h is taken after the respective member is given an opportunity to defend themselves;
 7. If the dismissal is done outside the GMS forum, the self-defense as mentioned above is submitted in writing to the Shareholders within 14 (fourteen) days from the date the respective member is notified as mentioned above;
 8. During the plan to dismiss as referred to in point 4, the respective member of the Board of Commissioners must perform their duties as usual;
 9. Dismissal for reasons as referred to in point 4 c and his constitutes dismissal without honor;
 10. There should be no blood relations or marital relations up to the third degree, both in a direct line and a side line, between the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;

DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

11. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang diantara mereka;
12. Selain alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada poin 4, anggota Dewan Komisaris Perusahaan dapat diberhentikan oleh RUPS/Menteri berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS/Menteri demi kepentingan dan tujuan BUMN, antara lain:
 - a. dalam rangka restrukturisasi perusahaan;
 - b. dalam rangka penataan susunan keanggotaan Dewan Komisaris Perusahaan; atau
 - c. memasuki masa usia pensiun dari aparatur sipil negara, untuk anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang merupakan penerima penugasan dari kementerian teknis atau instansi pemerintah lain.

KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Komposisi Dewan Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lain dan terhadap Direksi. Anggota Dewan Komisaris memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Selama tahun 2024 terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris. Pada tanggal 16 Januari 2024, Perseroan mengangkat Komisaris Utama yaitu Muhammad Awaluddin dimana sebelumnya jabatan tersebut belum diisi sejak 13 November 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-9/MBU/01/2024 tanggal 16 Januari 2024. Pada tanggal yang sama, Perseroan juga mengangkat Budi Mantoro sebagai Komisaris menggantikan Wahyu Adji Herpriarsono. Berikut adalah komposisi anggota Dewan Komisaris selama tahun 2024:

11. In the event of the situation as referred to, the GMS is authorized to dismiss one of them;
12. Besides the reasons for the dismissal of members of the Company's Board of Commissioners as referred to in point 4, members of the Board of Commissioners can be dismissed by the GMS/Minister for other reasons deemed appropriate by the GMS/Minister for the interests and objectives of SOEs, including:
 - a. In the context of company restructuring;
 - b. In the context of reorganizing the composition of the Company's Board of Commissioners; or
 - c. Entering the retirement age for civil servants, for members of the Board of Commissioners who are assigned by technical ministries or other government agencies.

COMPOSITION OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The composition of the Board of Commissioners should be established to enable effective, precise, and quick decision-making and allow acting independently, meaning without interests that could interfere with their ability to perform their duties independently and critically in relation to each other and the Board of Directors. Members of the Board of Commissioners have a term of office of 5 (five) years and can be reappointed for one term.

In 2024, there was a change in the composition of the Board of Commissioners. On 16 January 2024, the Company appointed Muhammad Awaluddin as President Commissioner, a position that had been vacant since 13 November 2023, pursuant to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOE) Number: SK-9/MBU/01/2024 dated 16 January 2024. On the same date, the Company also appointed Budi Mantoro as Commissioner, replacing Wahyu Adji Herpriarsono. The composition of the Board of Commissioners during 2024 is as follows:



DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS

No.	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Akhir Tahun Buku 2024 - 16 Januari 2024 End of Fiscal Year 2024 - January 16, 2024			
1.	-	Komisaris Utama Merangkap - Komisaris Independen President Commissioner Concurrently Independent Commissioner	
2.	Kristia Budiarto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-354/MBU/11/2020 tanggal 2 November 2020 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number:SK-354/MBU/11/2020 dated November 2, 2020
3.	Faturohman	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-121/MBU/05/2022 tanggal 19 Mei 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number:SK-121/MBU/05/2022 dated May 19, 2022
4.	Waju Adji Herpriarsono	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-234/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number:SK-234/MBU/10/2019 dated October 17, 2019
5.	Raden Suhartono	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-121/MBU/05/2022 tanggal 19 Mei 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number:SK-121/MBU/05/2022 dated May 19, 2022
6.	Eddy Susanto Soepadmo	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 84/MBU/03/2020 tanggal 19 Maret 2020 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number:SK-84/MBU/03/2020 dated March 19, 2020
16 Januari 2024 - Akhir Tahun Buku 2024 January 16, 2024 - End of Fiscal Year 2024			
1.	Muhammad Awaluddin	Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen President Commissioner Concurrently Independent Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-9/MBU/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number:SK-9/MBU/01/2024 dated January 16, 2024
2.	Kristia Budiarto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-354/MBU/11/2020 tanggal 2 November 2020 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number:SK-354/MBU/11/2020 dated November 2, 2020
3.	Faturohman	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-121/MBU/05/2022 tanggal 19 Mei 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number:SK-121/MBU/05/2022 dated May 19, 2022
4.	Budi Mantoro	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-9/MBU/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number:SK-9/MBU/01/2024 dated January 16, 2024
5.	Raden Suhartono	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-121/MBU/05/2022 tanggal 19 Mei 2022 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number:SK-121/MBU/05/2022 dated May 19, 2022
6.	Eddy Susanto Soepadmo	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 84/MBU/03/2020 tanggal 19 Maret 2020 Ministerial Decree of the State-Owned Enterprises (BUMN) Number:SK-84/MBU/03/2020 dated March 19, 2020

DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

KOMISARIS INDEPENDEN

Anggota Dewan Komisaris independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

KOMPOSISI ANGGOTA KOMISARIS INDEPENDEN

Jumlah anggota Komisaris Independen PT PELNI (Persero) yang menjabat selama tahun 2024 telah memenuhi batas minimum jumlah anggota Dewan Komisaris Independen sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 pasal 15 ayat 3, yaitu Komposisi Dewan Komisaris paling sedikit 20% (dua puluh persen) merupakan anggota Dewan Komisaris independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya.

PERSYARATAN KOMISARIS INDEPENDEN

PT PELNI (Persero) telah menetapkan persyaratan Komisaris Independen dalam Board Manual, dengan merujuk pada Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Berikut adalah pemenuhan persyaratan dari masing-masing Komisaris Independen PT PELNI (Persero) pada tahun 2024:

INDEPENDENT COMMISSIONERS

Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who have no financial, managerial, shareholding, and/or familial relationships with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or controlling shareholders, or relationships with the relevant State-Owned Enterprise (SOE), which could affect their ability to act independently.

COMPOSITION OF INDEPENDENT COMMISSIONERS

The number of Independent Commissioners of PT PELNI (Persero) serving during 2024 met the minimum requirements for the number of Independent Commissioners as stipulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 Article 15 paragraph 3, which states that at least 20% of the composition of the Board of Commissioners must be independent, as specified in their appointment decision.

REQUIREMENTS FOR INDEPENDENT COMMISSIONERS

PT PELNI (Persero) has established the requirements for Independent Commissioners in the Board Manual, referring to the Decision of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Corporate Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. Below is the fulfillment of the requirements by each Independent Commissioner of PT PELNI (Persero) in 2024:



DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

Persyaratan komisaris independen Requirements for Independent Commissioners

Komisaris independen PT PELNI (Persero) Tahun 2024 Independent Commissioners of PT PELNI (Persero) in 2024

Kristia Budiarto

Memiliki Kompetensi di bidang *auditing*, keuangan, dan akuntansi
Possesses expertise in the fields of auditing, finance, and accounting.

✓

Tidak menjabat sebagai Direksi Perusahaan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
Has not held a position as a Director in the concerned company for at least one (1) year.

✓

Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya.

✓

Is not an individual who has worked or had the authority and responsibility to plan, lead, control, or oversee the company's activities in the last six (6) months, except for reappointment as an Independent Commissioner for the next period.

Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.
Does not own shares, either directly or indirectly, in the company.

✓

Tidak mempunyai afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perusahaan.
Does not have affiliations with the company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or major shareholders of the company.

✓

Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan
Does not have business relations, either directly or indirectly, related to the company's business activities.

✓

PERNYATAAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

STATEMENT OF INDEPENDENCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS



DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS

Kriteria hubungan afiliasi antara Dewan Komisaris meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara sesama anggota Dewan Komisaris;
2. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi;
3. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) yang menjabat selama tahun 2024 tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris Perusahaan dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya, dengan ketentuan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral.
2. Dewan Komisaris Perusahaan yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada poin 1 harus memenuhi persentase kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris Perusahaan selama 1 (satu) tahun paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) kehadiran, sebagai persyaratan untuk memperoleh Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus bagi yang bersangkutan.
3. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dilarang memegang jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan, kecuali berdasarkan penugasan khusus dari Menteri.
4. Anggota Dewan Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada Perusahaan, badan usaha lainnya atau menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan

AFFILIATION RELATIONSHIPS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The criteria for affiliation relationships among the Board of Commissioners include:

1. Affiliation relationships between members of the Board of Commissioners;
2. Affiliation relationships between members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors;
3. Affiliation relationships between members of the Board of Commissioners and Major and/or Controlling Shareholders.

All members of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) who served during 2024 had no affiliation relationships with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major and/or Controlling Shareholders.

CONCURRENT POSITIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. Members of the Company's Board of Commissioners may hold concurrent positions as members of the Board of Commissioners in other business entities, provided they comply with sectoral regulations.
2. Members of the Company's Board of Commissioners who hold concurrent positions as members of the Board of Commissioners in other business entities as mentioned in point 1 must attend at least 75% of the Company's Board of Commissioners meetings in one year to be eligible for performance bonuses/incentives/special incentives.
3. Members of the Company's Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as members of the Board of Commissioners of the Company unless assigned by the Minister.
4. Members of the Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as members of the Board of Directors in the Company, other business entities, or positions that are legally prohibited from being held concurrently



DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

anggota Dewan Komisaris Perusahaan, atau jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan yang bersangkutan, serta menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan.

5. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang memegang jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada poin 3 dan 4, berakhir karena hukum sejak anggota Dewan Komisaris BUMN bersangkutan lainnya atau anggota Direksi atau RUPS/Menteri mengetahui perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud.
6. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud pada poin 3 dan 4, anggota Dewan Komisaris BUMN bersangkutan lainnya atau anggota Direksi BUMN, harus menyampaikan pemberitahuan kepada RUPS/Menteri terkait perangkapan jabatan dimaksud, untuk selanjutnya dilakukan proses penetapan pemberhentian.
7. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama BUMN oleh anggota Dewan Komisaris BUMN setelah berakhir karena hukum sebagaimana dimaksud pada poin 5 adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris BUMN yang bersangkutan.
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 7 tidak mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Komisaris BUMN yang bersangkutan terhadap kerugian BUMN yang disebabkan kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris BUMN yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya.
9. Apabila anggota Dewan Komisaris Perusahaan terdiri dari 2 (dua) anggota Dewan Komisaris BUMN atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 8 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perusahaan.

Pada tahun 2024, terdapat Dewan Komisaris yang merangkap jabatan.

with the position of the Company's Board of Commissioners, or positions that may cause a conflict of interest with the Company. They must sign a statement of willingness to resign from such positions if elected as members of the Company's Board of Commissioners.

5. The term of office for members of the Company's Board of Commissioners holding concurrent positions as mentioned in points 3 and 4 ends automatically when other members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors or the General Meeting of Shareholders (GMS)/Minister become aware of such concurrent positions.
6. Within seven days from the discovery of concurrent positions as mentioned in points 3 and 4, other members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors must notify the GMS/Minister regarding the concurrent positions to initiate the termination process.
7. Any legal acts performed for and on behalf of the Company by members of the Board of Commissioners after their term has ended as per point 5 are invalid and become the personal responsibility of the respective members of the Board of Commissioners.
8. The provisions in point 7 do not reduce the responsibility of the respective members of the Board of Commissioners for any losses incurred by the Company due to their mistakes or negligence in performing their duties.
9. If the Company's Board of Commissioners consists of two or more members, the responsibility as mentioned in point 8 is shared jointly and severally among all members of the Board of Commissioners.

In 2024, there were members of the Board of Commissioners holding concurrent positions.

DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

Nama Name	Jabatan Position	Rangkap Jabatan Concurrent Positions
Kristia Budiarto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Staff Asisten Khusus Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Staff to the Special Assistant of the Deputy Minister of Defense of the Republic of Indonesia
Faturohman	Komisaris Commissioner	PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitas Dukungan Strategis di Kementerian BUMN (2022 - Januari 2024) Acting Head of the Bureau of Public Relations and Strategic Support Facilities at the Ministry of State-Owned Enterprises (2022-January 2024)
Raden Suhartono	Komisaris Commissioner	Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (2021- sekarang) Deputy Head of BPKP for Regional Financial Management Supervision (2021-present)

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) berkewajiban untuk melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada PT PELNI (Persero) dan perusahaan lain. Seluruh anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2024 maupun keluarga dari masing-masing anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan saham di PT PELNI (Persero) maupun di perusahaan lain.

SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) is obligated to report to the Company regarding their own share ownership and that of their families in PT PELNI (Persero) and other companies. Throughout the fiscal year 2024, neither the members of the Board of Commissioners nor their families held shares in PT PELNI (Persero) or in any other company.

PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki peran strategis sebagai pengawas jalannya usaha Perseroan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu pedoman kerja sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dalam upaya memenuhi kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya.

WORK GUIDELINES FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners holds a strategic role in overseeing the operations of the Company. Therefore, a set of work guidelines is necessary to guide the Board of Commissioners in executing their duties, responsibilities, and authorities in a manner that meets the interests of Shareholders and other Stakeholders.

Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman Kerja sebagaimana diatur dalam Salinan Surat Keputusan Bersama antara Direksi PT PELNI (Persero) dengan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) Nomor: 11.15/01/SK/HKO.01/2023 tanggal 15 November 2023 tentang Pedoman Tata Laksana Kerja (*Board Manual*) Direksi dan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) dan telah dipublikasikan di *website* resmi Perseroan.

The Board of Commissioners has established Work Guidelines as stipulated in the Joint Decree between the Directors of PT PELNI (Persero) and the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero), Number: 11.15/01/SK/HKO.01/2023 dated November 15, 2023, concerning the Board Manual for the Directors and Board of Commissioners of PT PELNI (Persero), which has been published on the Company's official website.

Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi adalah pedoman yang menjelaskan secara garis besar hal-hal yang menjelaskan tata laksana bagi Direksi dan

The Board Manual for the Board of Commissioners and Directors serves as a guideline that outlines the general procedures for the Board of Commissioners



DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris serta proses hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi, dan antara kedua organ Perusahaan secara terstruktur dan sistematis agar mudah dipahami dan dapat dijalankan dalam melaksanakan tugas sesuai peran dan fungsinya, agar tercipta pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan, dan efisien.

Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dalam Board Manual diatur dalam Bab 3, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Umum;
2. Pengaturan Rangkap Jabatan;
3. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris;
4. Pengunduran Diri Dewan Komisaris;
5. Pengisian Anggota Dewan Komisaris yang Lowong;
6. Komisaris Independen;
7. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas;
8. Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris;
9. Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
10. Tugas Dewan Komisaris;
11. Wewenang Dewan Komisaris;
12. Hak Dewan Komisaris;
13. Etika Jabatan;
14. Rapat Dewan Komisaris;
15. Organ Pendukung Dewan Komisaris.

Selain itu, dalam *Board Manual* tersebut juga mengatur mekanisme hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DEWAN

Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertanggung jawab dan berwenang mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya,

and Directors, as well as the structured and systematic processes for their working relationship, making it easy to understand and implement in carrying out their roles and functions. This aims to ensure the Company is managed professionally, transparently, and efficiently.

The governance procedures for the Board of Commissioners in the Board Manual are detailed in Chapter 3, covering the following aspects:

1. General Policies
2. Regulation of Concurrent Positions
3. Appointment and Dismissal of the Board of Commissioners
4. Resignation of the Board of Commissioners
5. Filling Vacant Positions on the Board of Commissioners
6. Independent Commissioners
7. Orientation and Capability Enhancement Programs
8. Performance Indicators for the Board of Commissioners
9. Responsibilities of the Board of Commissioners
10. Duties of the Board of Commissioners
11. Authorities of the Board of Commissioners
12. Rights of the Board of Commissioners
13. Professional Ethics
14. Meetings of the Board of Commissioners
15. Supporting Organs of the Board of Commissioners

Additionally, the Board Manual outlines the mechanisms for the working relationship between the Board of Commissioners and the Directors.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is a corporate body responsible for overseeing the management of the Company by the Directors and providing them with advice. The supervision and advice provided by the Board of Commissioners are guided by the following principles:

1. The Board of Commissioners is responsible for overseeing the management policies and the general course of the Company's management,

DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

- baik mengenai Perusahaan maupun usaha PT PELNI (Persero) dan memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Pengawasan dan pemberian nasihat, dilakukan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.
 3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan kecuali ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perusahaan.
 5. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris bertindak secara kolektif dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri.
 6. Pengawasan yang dilaksanakan Dewan Komisaris tidak boleh berubah menjadi pelaksanaan tugas-tugas eksekutif dan pengambilan keputusan operasional yang menjadi tugas Direksi, kecuali dalam hal Perusahaan tidak mempunyai Direksi, dengan kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tidak ada Direksi harus memanggil RUPS untuk mengangkat Direksi.
 7. Pengawasan dilaksanakan kepada keputusan-keputusan yang sudah diambil atau terhadap putusan-putusan yang akan diambil yang dimintakan persetujuan/rekomendasinya kepada Dewan Komisaris.
 8. Apabila anggota Dewan Komisaris Perusahaan terdiri dari 2 (dua) anggota Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) atau lebih, tanggung terhadap kerugian BUMN yang disebabkan kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
- including the business of PT PELNI (Persero), and providing advice to the Directors.
2. Supervision and advice are carried out in the interest of the Company and in line with the Company's objectives, without serving the interests of specific parties or groups.
 3. In exercising their oversight role, the Board of Commissioners is prohibited from participating in the decision-making of the Company's operational activities unless specified in the Company's articles of association or regulatory provisions.
 4. Any decision-making on operational activities by the Board of Commissioners as part of their oversight duties does not absolve the Directors of their management responsibilities.
 5. The Board of Commissioners acts collectively in performing their oversight duties and cannot act individually.
 6. The supervision by the Board of Commissioners should not evolve into executive tasks or operational decision-making, which are the responsibilities of the Directors, except in cases where the Company lacks Directors. In such instances, the Board of Commissioners is required to convene a General Meeting of Shareholders to appoint new Directors within 30 days.
 7. Supervision covers decisions already made or those requiring approval/recommendation from the Board of Commissioners.
 8. If the Board of Commissioners comprises two or more members, they are collectively liable for any loss incurred by the Company due to the actions or negligence of any Commissioner in performing their duties.



DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

Adapun tugas Dewan Komisaris secara umum adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha PT PELNI (Persero) dan memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani RJPP dan RKAP Perseroan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP.
4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan.
5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan.
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai laporan tahunan, apabila diminta.
8. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam RKAP.
9. Membentuk Komite Audit.
10. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS.
11. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
12. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
13. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
14. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

The general duties of the Board of Commissioners are as follows:

1. Oversee the management policies and the general course of the Company's management, including the business of PT PELNI (Persero), and provide advice to the Directors.
2. Review, examine, and sign the Company's Long-Term Plan (RJPP) and Annual Work Plan and Budget (RKAP) prepared by the Directors, in accordance with the articles of association.
3. Provide opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders (GMS) regarding the RJPP and RKAP, including the reasons for signing these plans.
4. Monitor the Company's activities, providing opinions and suggestions to the GMS on any significant issues concerning the Company's management.
5. Immediately report to the GMS any signs of declining Company performance.
6. Review periodic and annual reports prepared by the Directors and sign the annual report.
7. Provide explanations, opinions, and suggestions to the GMS on the annual report, upon request.
8. Develop an annual work program to be included in the RKAP.
9. Establish an Audit Committee.
10. Propose a Public Accountant to the GMS.
11. Document minutes of Board meetings and retain copies.
12. Report their and their families' shareholdings in the Company and other companies to the Company.
13. Report to the GMS on the supervisory duties performed during the past fiscal year.
14. Fulfill other obligations related to supervisory and advisory duties, as long as they do not conflict with regulations, the articles of association, and/or GMS resolutions.

DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

15. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar. 16. Beritikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. 17. Memantau dan memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. 18. Mengevaluasi kinerja auditor eksternal sesuai ketentuan dan standar yang berlaku. 19. Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan, serta memberikan penetapan tertulis (setuju atau tidak setuju) terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan. 20. Dewan Komisaris mengusulkan calon Anggota Direksi kepada Pemegang Saham sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan. 21. Dewan Komisaris menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham. 22. Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi. 23. Menelaah laporan-laporan dari komite-komite yang ada dibawah Dewan Komisaris.	15. Comply with regulatory provisions and/or the articles of association in carrying out their duties. 16. Act in good faith, with caution, and responsibly in performing their supervisory and advisory roles. 17. Monitor and ensure the effective and sustainable implementation of Good Corporate Governance. 18. Evaluate the performance of external auditors according to applicable standards and regulations. 19. Assess the appointment process of Directors and Commissioners of Subsidiaries/Joint Ventures, providing written approvals or disapprovals. 20. Recommend candidates for Directors to Shareholders based on established policies and selection criteria. 21. Evaluate the performance of the Directors and report the results to Shareholders. 22. Recommend remuneration for the Directors according to applicable regulations and based on performance evaluations. 23. Review reports from committees under the Board of Commissioners.

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris menurut *Board Manual* PT PELNI (Persero):

1. Tugas Pengawasan.
2. Tugas Dewan Komisaris terkait Pemberian Arah dan Persetujuan Atas Rancangan RJPP.
3. Tugas Dewan Komisaris terkait Pemberian Arah dan Persetujuan Atas Rancangan RKAP.
4. Tugas Arah terkait dengan Perubahan Lingkungan Bisnis.
5. Tugas Arah terkait dengan Hubungan *Stakeholder*.
6. Tugas Arah terkait Sistem Pengendalian Internal.
7. Tugas Arah terkait Manajemen Risiko.

The specific duties and responsibilities of the Board of Commissioners according to the Board Manual of PT PELNI (Persero) are:

1. Supervisory Duties
2. Duties related to Providing Directions and Approval for the RJPP Draft
3. Duties related to Providing Directions and Approval for the RKAP Draft
4. Duties related to Adapting to Changes in the Business Environment
5. Duties related to Stakeholder Relations
6. Duties related to Internal Control Systems
7. Duties related to Risk Management



DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

8. Tugas Arahan terkait Sistem Teknologi Informasi. 9. Tugas Arahan terkait Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Karir. 10. Tugas Arahan terkait Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan. 11. Tugas Arahan terkait Pengadaan Barang dan/atau Jasa. 12. Tugas Arahan terkait Mutu dan Pelayanan. 13. Tugas Pengawasan terkait Kepatuhan Direksi dalam Menjalankan Peraturan Perundangan yang Berlaku dan Perjanjian Dengan Pihak Ketiga. 14. Tugas Pengawasan terkait Kepatuhan Direksi Sesuai RKAP dan/atau RJPP. 15. Tugas Pengawasan terkait Persetujuan Atas Transaksi. 16. Tugas Pengawasan terkait Pengajuan Calon Auditor Eksternal. 17. Tugas Pengawasan Efektivitas Audit Internal dan Audit Eksternal. 18. Tugas Pengawasan terkait Gejala Menurunnya Kinerja Perusahaan. 19. Tugas Pengawasan terkait Kebijakan Pengelolaan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan. 20. Tugas Pengawasan terkait Pencalonan Anggota Direksi, Penilaian Kinerja Direksi (Individu Dan Kolegial) dan Pengajuan Usulan Tantiem/Insentif Kinerja Sesuai Ketentuan yang Berlaku dan Mempertimbangkan Kinerja Direksi. 21. Tugas Pengawasan terkait Potensi Benturan Kepentingan yang Menyangkut Dewan Komisaris. 22. Tugas Pengawasan terkait Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	8. Duties related to Information Technology Systems 9. Duties related to Career Development Policies and Implementation 10. Duties related to Accounting Policies and Financial Reporting 11. Duties related to Procurement of Goods and/or Services 12. Duties related to Quality and Service 13. Supervisory Duties related to Compliance of the Directors with Applicable Regulations and Agreements with Third Parties 14. Supervisory Duties related to Compliance of the Directors with the RKAP and/or RJPP 15. Supervisory Duties related to Transaction Approvals 16. Supervisory Duties related to the Appointment of External Auditors 17. Supervisory Duties related to the Effectiveness of Internal and External Audits 18. Supervisory Duties related to Signs of Declining Company Performance 19. Supervisory Duties related to Subsidiaries/Joint Ventures Management Policies 20. Supervisory Duties related to the Nomination of Directors, Individual and Collective Performance Assessments of Directors, and the Proposal of Performance Incentives in accordance with applicable regulations and based on Directors' performance. 21. Supervisory Duties related to Potential Conflicts of Interest involving the Board of Commissioners 22. Supervisory Duties related to Good Corporate Governance Practices

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dapat melakukan pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris. Pembahasan mengenai pembagian tugas Dewan Komisaris dilakukan melalui rapat internal Dewan Komisaris, dengan memperhatikan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing Dewan Komisaris dan pembagian per Direktorat Direksi. Adapun pembagian tugas Dewan Komisaris pada tahun 2024 telah ditetapkan dalam Surat Keputusan

To enhance the effectiveness and success of its supervisory functions, the Board of Commissioners may delegate responsibilities among its members. The discussion regarding the distribution of tasks within the Board of Commissioners is conducted through internal meetings, taking into account the competencies of each Commissioner and the division per Directorate of the Board of Directors. The delegation of tasks for the Board of Commissioners in 2024 has been stipulated in the Board of Commissioners Decree No. KEP-4/

DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris Nomor: KEP-4/DK/II-2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dengan uraian sebagai berikut:

DK/II-2024 dated February 15, 2024, concerning the Allocation of Duties of the Members of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), with the details as follows:

Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Division of Responsibilities of the Board of Commissioners

No	Nama Name	Posisi Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
1.	Muhammad Awaluddin	Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen President Commissioner Concurrently Independent Commissioner	Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi mengenai pengurusan usaha Perusahaan bidang akuntansi, keuangan dan anggaran serta pengawasan internal. Sekaligus merangkap sebagai Ketua Komite Audit. Supervising and provides direction to the Board of Directors regarding the Company's business management in the areas of accounting, finance, budgeting, and internal audit. Also serves concurrently as Chairperson of the Audit Committee.
2.	Kristia Budiarto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Mengkoordinir semua pelaksanaan tugas dan kegiatan pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan arahan kepada Direksi mengenai hal-hal strategis dan <i>good corporate governance</i> . Sekaligus merangkap sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. Coordinates all supervisory duties and activities of the Board of Commissioners and provides direction to the Board of Directors on strategic matters and good corporate governance. Also concurrently serves as Chairperson of the Nomination and Remuneration Committee.
3.	Budi Mantoro	Komisaris Commissioner	Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi mengenai pengurusan usaha Perusahaan dalam bidang <i>core business</i> dan komersial serta pengelolaan teknologi informasi. Sekaligus merangkap sebagai Wakil Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko. Carries out supervisory duties and provides direction to the Board of Directors regarding the Company's business management in the areas of core business, commercial operations, and information technology management. Also concurrently serves as Vice Chairperson of the Risk Monitoring Committee.
4.	Eddy Susanto Soepadmo	Komisaris Commissioner	Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi mengenai pengurusan usaha dalam bidang transformasi perusahaan, pengelolaan Anak Perusahaan dan <i>non-core business</i> , serta merangkap sebagai Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko. Supervising and providing direction to the Board of Directors regarding the management of corporate transformation, subsidiary management, and non-core business operations, while also serving as the Chairman of the Risk Management Monitoring Committee.
5.	Faturohman	Komisaris Commissioner	Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi mengenai pengurusan usaha Perusahaan bidang sumber daya manusia, hukum dan organisasi. Sekaligus merangkap sebagai Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. Carries out supervisory duties and provides direction to the Board of Directors regarding the Company's business management in the areas of human resources, legal affairs, and organizational matters. Also concurrently serves as Vice Chairperson of the Nomination and Remuneration Committee.
6.	Raden Suhartono	Komisaris Commissioner	Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi mengenai pengurusan usaha Perusahaan bidang investasi, perkapalan, armada dan teknik. Sekaligus merangkap sebagai Wakil Ketua Komite Audit. Carries out supervisory duties and provides direction to the Board of Directors regarding the Company's business management in the areas of investment, shipping, fleet, and engineering. Also concurrently serves as Vice Chairperson of the Audit Committee.



DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

PENYELENGGARAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan terkait rapat diatur dalam Salinan Surat Keputusan Bersama antara Direksi PT PELNI (Persero) dengan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) Nomor: 11.15/01/SK/HKO.01/2023 tanggal 15 November 2023 tentang Pedoman Tata Laksana Kerja (*Board Manual*) Direksi dan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) dan telah dipublikasikan di *website* resmi Perseroan.

Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris setiap kali dianggap perlu, namun sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di luar jadwal rutin, jika dianggap perlu. Pada umumnya, penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang khusus ditunjuk untuk maksud itu oleh Komisaris Utama.

Keputusan Rapat Dewan Komisaris ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk Anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya. Dalam pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris, apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sama dengan pendapat pimpinan rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban.

Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat Dewan Komisaris. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Standar kesegeraan waktu dalam pengambilan keputusan Dewan Komisaris yaitu maksimal 14 (empat

CONDUCTING BOARD OF COMMISSIONERS MEETINGS

Policy on Conducting Board of Commissioners Meetings

The policy regarding meetings is regulated by the Joint Decision Letter between the Directors of PT PELNI (Persero) and the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) Number: 11.15/01/SK/HKO.01/2023 dated November 15, 2023, concerning the Board Manual of the Directors and the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero), which has been published on the official website of the Company.

Board of Commissioners meetings are held whenever deemed necessary, but at least once a month. Meetings may be convened outside of the regular schedule if considered necessary. Generally, the meetings are chaired by the President Commissioner. If the President Commissioner is absent or unable to attend, the meeting is chaired by a designated member of the Board of Commissioners appointed specifically by the President Commissioner.

Decisions at the Board of Commissioners meetings are made through deliberation to reach a consensus. If a consensus is not reached, decisions are made by a majority vote. Each member of the Board of Commissioners has one vote, plus one vote for each member they represent. In the event of a tie, the decision aligns with the opinion of the meeting chair, while adhering to the accountability provisions.

Abstentions are considered as agreeing to the proposal presented in the Board of Commissioners meeting. Invalid votes are disregarded and not counted in determining the total number of votes cast. The standard timeframe for decision-making by the Board of Commissioners is a maximum of 14 working days

DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

belas) hari kerja sejak dimintakan pengambilan keputusan oleh pihak terkait. Jika terdapat Anggota Dewan Komisaris yang mempunyai pendapat yang berbeda terhadap keputusan yang dibuat, maka pendapat tersebut harus dicantumkan dalam Risalah Rapat sebagai bentuk dari dissenting *opinion*.

Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan seluruh anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

REALISASI PENYELENGGARAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS TAHUN 2024

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) menyelenggarakan rapat dengan mengundang Komite di Bawah Dewan Komisaris sebanyak 12 (dua belas) kali, sesuai dengan jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Komite di Bawah Dewan Komisaris yang direncanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DALAM RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Berikut ini merupakan frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris dan Komite di Bawah Dewan Komisaris yang diselenggarakan selama tahun 2024:

from the time a decision is requested by the relevant party. If a member of the Board of Commissioners has a differing opinion on a decision, that opinion must be recorded in the meeting minutes as a dissenting opinion.

The Board of Commissioners can also make valid and binding decisions without holding a meeting, provided that all members are informed in writing about the proposed decisions, all members approve the proposals in writing, and sign the written agreement.

IMPLEMENTATION OF BOARD OF COMMISSIONERS MEETINGS IN 2024

During 2024, the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) held meetings with the Committees under the Board of Commissioners 12 times, as planned in the Board of Commissioners' Work Plan and Budget (RKA).

FREQUENCY AND ATTENDANCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN MEETINGS

The following table shows the frequency and attendance of each member of the Board of Commissioners in the meetings held during 2024:



DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris dan Komite di Bawah Dewan Komisaris

Frequency and Attendance Rate of the Board of Commissioners in Board of Commissioners Meetings and Committees under the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Muhammad Awaluddin	Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen President Commissioner Concurrently Independent Commissioner	12	12	100%
Kristia Budiarto	Komisaris Independen Independent Commissioner	12	12	100%
Faturohman	Komisaris Commissioner	12	12	100%
Budi Mantoro	Komisaris Commissioner	12	12	100%
Raden Suhartono	Komisaris Commissioner	12	12	100%
Eddy Susanto Soepadmo	Komisaris Commissioner	12	12	100%

RISALAH RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Berikut ini merupakan risalah Rapat Dewan Komisaris dan Komite di Bawah Dewan Komisaris yang memuat waktu pelaksanaan rapat, agenda rapat, dan daftar Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris dan Komite di Bawah Dewan Komisaris selama tahun 2024:

MINUTES OF THE MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

The following table contains the minutes of the meetings of the Board of Commissioners and the Committees under the Board of Commissioners, including the time of the meeting, the agenda, and the list of attendees:

Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris

Minutes of the Meetings of the Board of Commissioners and Committees Under the Board of Commissioners

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Organizer
1.	29 Januari 2024 January 29, 2024	- Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; - Pembahasan Laporan Keuangan s.d Desember PT PELNI (Persero) Tahun 2023 (<i>Unaudited</i>); - Laporan Komite Dewan Komisaris.	- Muhammad Awaluddin - Kristia Budiarto - Budi Mantoro - Faturohman - Eddy Susanto Soepadmo - Raden Suhartono
2.	22 Februari 2024 February 22, 2024	- Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; - Laporan Keuangan s.d Januari 2024 PT PELNI (Persero) Tahun 2023; - Laporan Komite Dewan Komisaris.	- Muhammad Awaluddin - Kristia Budiarto - Budi Mantoro - Faturohman - Eddy Susanto Soepadmo - Raden Suhartono

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Organizer
3.	22 Maret 2024 March 22, 2024	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Laporan Keuangan s.d Februari 2024 PT PELNI (Persero) Tahun 2024; 3. Laporan Komite Dewan Komisaris; 1. Evaluation of Previous Meeting Results; 2. Discussion of the Financial Report up to February 2024 of PT PELNI (Persero); 3. Report of Board of Commissioners Committee.	1. Muhammad Awaluddin 2. Kristia Budiarto 3. Budi Mantoro 4. Faturohman 5. Eddy Susanto Soepadmo 6. Raden Suhartono
4.	25 April 2024 April 25, 2024	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya 2. Laporan Keuangan s.d Maret 2024 PT PELNI (Persero) Tahun 2024 3. Laporan Komite Dewan Komisaris 1. Evaluation of Previous Meeting Results; 2. Discussion of the Financial Report up to March 2024 of PT PELNI (Persero); 3. Report of Board of Commissioners Committee.	1. Muhammad Awaluddin 2. Kristia Budiarto 3. Budi Mantoro 4. Faturohman 5. Eddy Susanto Soepadmo 6. Raden Suhartono
5.	27 Mei 2024 May 27, 2024	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Laporan Keuangan s.d April 2024 PT PELNI (Persero) Tahun 2024; 3. Laporan Komite Dewan Komisaris. 1. Evaluation of Previous Meeting Results; 2. Discussion of the Financial Report up to April 2024 of PT PELNI (Persero); 3. Report of Board of Commissioners Committee.	1. Muhammad Awaluddin 2. Kristia Budiarto 3. Budi Mantoro 4. Faturohman 5. Eddy Susanto Soepadmo 6. Raden Suhartono
6.	25 Juni 2024 July 25, 2024	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Laporan Keuangan s.d Mei 2024 PT PELNI (Persero) Tahun 2024; 3. Laporan Komite Dewan Komisaris. 1. Evaluation of Previous Meeting Results; 2. Discussion of the Financial Report up to May 2024 of PT PELNI (Persero); 3. Report of Board of Commissioners Committee.	1. Muhammad Awaluddin 2. Kristia Budiarto 3. Budi Mantoro 4. Faturohman 5. Eddy Susanto Soepadmo 6. Raden Suhartono
7.	24 Juli 2024 July 24, 2024	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya 2. Laporan Keuangan s.d Juni 2024 PT PELNI (Persero) Tahun 2024 3. Laporan Komite Dewan Komisaris 1. Evaluation of Previous Meeting Results; 2. Discussion of the Financial Report up to June 2024 of PT PELNI (Persero); 3. Report of Board of Commissioners Committee.	1. Muhammad Awaluddin 2. Kristia Budiarto 3. Budi Mantoro 4. Faturohman 5. Eddy Susanto Soepadmo 6. Raden Suhartono
8.	26 Agustus 2024 August 26, 2024	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya 2. Laporan Keuangan s.d Juli 2024 PT PELNI (Persero) Tahun 2024 3. Laporan Komite Dewan Komisaris 1. Evaluation of Previous Meeting Results; 2. Discussion of the Financial Report up to July 2024 of PT PELNI (Persero); 3. Report of Board of Commissioners Committee.	1. Muhammad Awaluddin 2. Kristia Budiarto 3. Budi Mantoro 4. Faturohman 5. Eddy Susanto Soepadmo 6. Raden Suhartono
9.	Kamis, 26 September 2024 Thursday, September 26, 2024	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya 2. Laporan Keuangan s.d Agustus 2024 PT PELNI (Persero) Tahun 2024 3. Laporan Komite Dewan Komisaris 1. Evaluation of Previous Meeting Results; 2. Discussion of the Financial Report up to August 2024 of PT PELNI (Persero); 3. Report of Board of Commissioners Committee.	1. Muhammad Awaluddin 2. Kristia Budiarto 3. Budi Mantoro 4. Faturohman 5. Eddy Susanto Soepadmo 6. Raden Suhartono
10.	23 Oktober 2024 October 23, 2024	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Laporan Keuangan YtD September 2024 serta Prognosa YtD Desember 2024 3. Pembahasan Usulan RKAP PT PELNI (Persero) Tahun 2025 4. Laporan Komite Dewan Komisaris dan Lain-Lain 1. Evaluation of Previous Meeting Results; 2. Discussion of the September 2024 Year-to-Date Financial Statements and December 2024 Year-to-Date Prognosis 3. Discussion of the Budget and Work Plan for the year 2025 of PT PELNI; 4. Report of Board of Commissioners Committee, and Miscellaneous.	1. Muhammad Awaluddin 2. Kristia Budiarto 3. Budi Mantoro 4. Faturohman 5. Eddy Susanto Soepadmo 6. Raden Suhartono



DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Organizer
11.	25 November 2024 November 2, 2024	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya 2. Pembahasan Laporan Manajemen YtD Oktober 2024 3. Pembahasan Prognosa Kinerja YtD Desember 2024 4. Laporan Komite Dewan Komisaris, dan Lain-Lain	1. Muhammad Awaluddin 2. Kristia Budiarto 3. Budi Mantoro 4. Fatur Rahman 5. Eddy Susanto Soepadmo 6. Raden Suhartono
12.	19 Desember 2024 December 19, 2024	1. Evaluasi Hasil Rapat Sebelumnya; 2. Pembahasan Laporan Manajemen YtD November 2024 3. Pembahasan Prognosa Kinerja YtD November 2024 4. Laporan Komite Dewan Komisaris; dan Lain-lain	1. Muhammad Awaluddin 2. Kristia Budiarto 3. Budi Mantoro 4. Fatur Rahman 5. Eddy Susanto Soepadmo 6. Raden Suhartono

RAPAT GABUNGAN ANTARA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) menyelenggarakan rapat gabungan bersama anggota Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali, sesuai dengan jumlah Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang direncanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris.

JOINT MEETINGS BETWEEN THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE DIRECTORS

In 2024, the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) held joint meetings with the Directors 12 times, as planned in the Board of Commissioners' Work Plan and Budget (RKA).

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DALAM RAPAT GABUNGAN ANTARA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI

Berikut ini merupakan frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2024:

FREQUENCY AND ATTENDANCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN JOINT MEETINGS

The following table shows the frequency and attendance of each member of the Board of Commissioners in the joint meetings held during 2024:

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Frequency and Attendance Rate of the Board of Commissioners in Joint Meetings with the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Muhammad Awaluddin	Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen President Commissioner Concurrently Independent Commissioner	12	12	100%
Kristia Budiarto	Komisaris Independen Independent Commissioner	12	12	100%



DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Faturohman	Komisaris Commissioner	12	12	100%
Budi Mantoro	Komisaris Commissioner	12	12	100%
Raden Suhartono	Komisaris Commissioner	12	12	100%
Eddy Susanto Soepadmo	Komisaris Commissioner	12	12	100%

RISALAH RAPAT GABUNGAN ANTARA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI

Informasi terkait risalah Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Anggota Direksi tercantum dalam Bab Tata Kelola Perusahaan bagian Direksi.

MINUTES OF JOINT MEETINGS BETWEEN THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE DIRECTORS

Information related to the minutes of the joint meetings between the Board of Commissioners and the Directors is included in the Corporate Governance section, under the Directors.

KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DALAM RUPS

Informasi terkait kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam RUPS tercantum dalam Bab Tata Kelola Perusahaan bagian RUPS.

ATTENDANCE OF BOARD OF COMMISSIONERS MEMBERS IN THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

Information regarding the attendance of the Board of Commissioners members in the GMS is included in the Corporate Governance section, under the GMS.

PENYAMPAIAN LAPORAN DEWAN KOMISARIS KEPADA PEMEGANG SAHAM

Pada tahun 2024, Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) telah menyusun beberapa laporan dan menyampaikannya kepada Pemegang Saham, antara lain:

1. Talenta BOD-1/“Nominated Talent” PT PELNI (Persero)
2. Evaluasi terhadap Direksi PT PELNI (Persero)
3. Talenta BOD-1/“Nominated Talent” PT PELNI (Persero)
4. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) selama Tahun Buku 2023

REPORTS SUBMISSION BY THE BOARD OF COMMISSIONERS TO SHAREHOLDERS

In 2024, the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) has compiled and submitted several reports to the Shareholders, including:

1. BOD-1 Talent / “Nominated Talent” of PT PELNI (Persero)
2. Evaluation of the Board of Directors of PT PELNI (Persero)
3. BOD-1 Talent / “Nominated Talent” of PT PELNI (Persero) (duplicate listing retained if intentional)
4. Supervisory Report of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) for the 2023 Fiscal Year



DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

5. Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan Audited PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Tahun 2023 6. Tanggapan Dewan Komisaris atas Kinerja PT PELNI (Persero) sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 7. Tanggapan Dewan Komisaris atas Kinerja PT PELNI (Persero) YtD Juni 2024/Semester I Tahun 2024 8. Penjelasan Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Audited PT PELNI (Persero) Tahun Buku 2023 9. Tanggapan atas 3 (tiga) Top Risks Semester I Tahun 2024 PT PELNI (Persero) 10. Laporan Hasil Pelaksanaan Workshop Keselamatan Kapal 11. Tanggapan Atas Usulan Rencana Jangka Panjang Tahun 2025-2029 PT PELNI (Persero) 12. Tanggapan Atas Usulan Rencana Jangka Panjang Tahun 2025-2029 PT PELNI (Persero) 13. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) YtD Triwulan III/2024 14. Tanggapan Dewan Komisaris atas Kinerja PT PELNI (Persero) YtD September 2024/Triwulan III Tahun 2024 15. Tanggapan dan Konfirmasi Pentahapan Implementasi ICOFR PT PELNI (Persero) 16. Tanggapan Atas Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 PT PELNI (Persero)	5. Response of the Board of Commissioners to the 2023 Audited Financial Statements of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) 6. Response of the Board of Commissioners to the Performance of PT PELNI (Persero) up to Q1 2024 7. Response of the Board of Commissioners to the Performance of PT PELNI (Persero) Year-to-Date June 2024 / First Semester of 2024 8. Explanation Regarding the Delay in Submission of the 2023 Audited Financial Statements of PT PELNI (Persero) 9. Response to the Top 3 Risks for the First Semester of 2024 of PT PELNI (Persero) 10. Report on the Implementation of the Vessel Safety Workshop 11. Response to the Proposed 2025-2029 Long-Term Plan of PT PELNI (Persero) 12. Response to the Proposed 2025-2029 Long-Term Plan of PT PELNI (Persero) (duplicate listing retained if intentional) 13. Supervisory Report of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Year-to-Date Q3/2024 14. Response of the Board of Commissioners to the Performance of PT PELNI (Persero) Year-to-Date September 2024 / Q3 2024 15. Response and Confirmation on the Phased Implementation of ICOFR at PT PELNI (Persero) 16. Response to the Proposed 2025 Work Plan and Budget (RKAP) of PT PELNI (Persero)

KEBIJAKAN PROGRAM PENGENALAN

Kebijakan terkait program pengenalan diatur dalam Salinan Surat Keputusan Bersama antara Direksi PT PELNI (Persero) dengan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) Nomor: 11.15/01/SK/HKO.01/2023 tanggal 15 November 2023 tentang Pedoman Tata Laksana Kerja (*Board Manual*) Direksi dan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) dan telah dipublikasikan di *website* resmi Perseroan.

ORIENTATION PROGRAM POLICY

The orientation program policy is governed by the Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) No. 11.15/01/SK/HKO.01/2023 dated November 15, 2023, concerning the Board Manual for the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) and has been published on the company's official website.



DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

PROGRAM PENGENALAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris menetapkan kebijakan untuk diadakan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat. Program pengenalan dimaksudkan agar Dewan Komisaris yang berasal dari berbagai latar belakang dan pengalaman dapat mengenal dan memahami kegiatan dan kondisi Perseroan. Program pengenalan ini dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris baru. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.

Materi program pengenalan setidaknya memuat:

1. Pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik oleh Perusahaan;
2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan masalah strategis lainnya;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, Audit Intern dan Audit Ekstern, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk komite audit; dan
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta hal yang tidak diperbolehkan.

Pada tahun 2024 telah dilakukan program pengenalan dan orientasi untuk Dewan Komisaris, yaitu kepada Bapak Muhammad Awaluddin selaku Komisaris Utama dan Bapak Budi Mantoro selaku Komisaris.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2024, program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

ORIENTATION PROGRAM FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners has established a policy to conduct an orientation program for newly appointed members. This program aims to help the new Commissioners understand the company's activities and conditions. The orientation program must be conducted no later than three months after the appointment of new Commissioners. The responsibility for organizing this program lies with the Corporate Secretary or whoever is performing the role.

The orientation program material includes:

1. Implementation of Good Corporate Governance principles by the company;
2. An overview of the company related to its objectives, nature, scope of activities, financial and operational performance, strategies, short and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues;
3. Information regarding delegated authority, internal and external audits, internal control systems, and policies, including the audit committee;
4. Information on the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and prohibited actions.

In 2024, an induction and orientation program was conducted for members of the Board of Commissioners, specifically for Mr. Muhammad Awaluddin as President Commissioner and Mr. Budi Mantoro as Commissioner.

COMPETENCE DEVELOPMENT PROGRAM FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

In 2024, the competence development programs attended by the Board of Commissioners were as follows:



DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS

No.	Nama dan Jabatan Name of Position	Tanggal Date	Nama Pelatihan Name of Training	Penyelenggara Organizer
1.	Muhammad Awaluddin Komisaris Utama dan Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	19, 20, 26 & 27 Maret 2024 March 19, 20, 26, and 27, 2024	<i>Certified Risk Professional (CRP) - LSPPM (BNSP)</i>	MfW Consulting Training
		28-30 Mei 2024 May 28-30, 2024	Pejabat Perlindungan Data Pribadi Bersertifikat Certified Personal Data Protection Officer	Asosiasi Profesional Privasi Data Indonesia (APPD)
		18-25 Juli 2024 July 18-25, 2024	<i>Chartered Accountants (CA) Batch 3 Kelas 1A - Foundation Level</i>	Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)
		20-21 Agustus 2024 August 20-21, 2024	<i>The 2nd Dry Bulk Shipping Mastery Workshop</i>	Petromindo.com
		25-26 September 2024 September 25-26, 2024	<i>FORDIGI SUMMIT 2024</i>	
2.	Kristia Budiarto Komisaris Independen Independent Commissioner	12-27 Oktober 2024 October 12-27, 2024	<i>Certificate Data Analytics (CertDA)</i>	Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)
		21-22 November 2024 November 21-22, 2024	<i>Expensive Leadership Program</i>	MSE
3.	Budi Mantoro Komisaris Commissioner	10-13 Desember 2024 December 10-13, 2024	<i>Masterclass: Implementing GRC with CGRCRO</i>	CRMS
		19, 20, 26 & 27 Maret 2024 March 19, 20, 26 and 27, 2024	<i>Certified Risk Professional (CRP) - LSPPM (BNSP)</i>	MfW Consulting Training
4.	Faturohman Komisaris Commissioner	7-8 Agustus 2024 August 7-8, 2024	<i>Onboarding Commissioner Program Angkatan 8</i>	BUMN School of Excellence
		26-28 September 2024 September 26-28, 2024	<i>CFO School</i>	BUMN School of Excellence
5.	Eddy Susanto Soepadmo Komisaris Commissioner	10-13 Desember 2024 December 10-13, 2024	<i>Masterclass: Implementing GRC with CGRCRO</i>	CRMS
		18-20 September 2024 September 18-20, 2024	<i>Masterclass: Internal Audit with CIAL-CCIA</i>	CRMS
6.	Raden Suhartono Komisioner Commissioner	4 Desember 2024 December 4, 2024	<i>Masterclass: Risk Governance</i>	CRMS
		18-20 September 2024 September 18-20, 2024	<i>Masterclass: Internal Audit with CIAL-CCIA</i>	CRMS
6.	Raden Suhartono Komisioner Commissioner	4 Desember 2024 December 4, 2024	<i>Masterclass: Risk Governance</i>	CRMS
		18-20 September 2024 September 18-20, 2024	<i>Masterclass: Internal Audit with CIAL-CCIA</i>	CRMS

DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

PENILAIAN KINERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS SERTA MASING- MASING ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Penilaian Kinerja Direksi

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Dewan Komisaris menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham.

1. Menyusun kebijakan Dewan Komisaris mengenai penilaian kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham.
2. Menyusun rencana Dewan Komisaris mengenai pemantauan kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham.
3. Direksi wajib menjabarkan KPI Direksi secara kolegal menjadi KPI Direksi secara individual dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
4. Direksi PT PELNI (Persero) melakukan pemantauan dan melaporkan pencapaian target kinerja kepada Dewan Komisaris Perusahaan c.q. Komite Nominasi dan Remunerasi setiap tahun.
5. Pencapaian KPI Direksi secara kolegal dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan.
6. Perhitungan pencapaian KPI Direksi secara kolegal dan secara individual direviu oleh kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan perusahaan.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi secara Kolegal

Indikator Kinerja Utama atau yang disebut sebagai *Key Performance Indicators* (KPI) yang digunakan untuk mengukur kinerja Direksi Perseroan, terdiri dari 5 (lima) perspektif berikut:

1. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia
2. Inovasi Model Bisnis
3. Kepemimpinan Teknologi
4. Peningkatan Investasi
5. Pengembangan Talenta

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS

Performance Assessment of the Board of Directors

Performance Assessment Procedures

The Board of Commissioners evaluates the Board of Directors and reports the results to the Shareholders.

1. Develop the Board of Commissioners' policy on performance evaluation of the Board of Directors and reporting to Shareholders.
2. Develop the Board of Commissioners' plan for monitoring the performance of the Board of Directors and reporting to Shareholders.
3. The Board of Directors must detail the collective KPI of the Board of Directors into individual KPIs and submit them to the Board of Commissioners for approval.
4. The Board of Directors of PT PELNI (Persero) monitors and reports on the achievement of performance targets to the Company's Board of Commissioners c.q. Nomination and Remuneration Committee annually.
5. The collective KPI achievement of the Board of Directors is reported in quarterly and annual reports.
6. The collective and individual KPI achievement calculations are reviewed by the public accounting firm auditing the company's financial statements.

Collective Performance Assessment Criteria for the Board of Directors

The Key Performance Indicators (KPI) used to measure the performance of the Board of Directors consist of five perspectives:

1. Economic and Social Value for Indonesia
2. Business Model Innovation
3. Technological Leadership
4. Investment Enhancement
5. Talent Development

DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS

HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI

PERFORMANCE ASSESSMENT RESULTS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Nomor Number		Uraian Description	Satuan Unit	Bobot Weight	RKAP 2024 2024 Budget Plan (RKAP)	Realisasi Tahun 2024 2024 Realization	Nilai Capaian Tahun 2024 2024 Achievement Value	Nilai Capaian Maksimal Tahun 2024 2024 Maximum Achievement Value	Skor KPI 2024 2024 KPI Score
Perspektif Perspective	Indikator Indicator			A	B	C	D=C:B	E	F
A	NILAI EKONOMI DAN SOSIAL UNTUK INDONESIA ECONOMIC AND SOCIAL VALUE FOR INDONESIA								
		Finansial Financial		25,00					26,26
	1.	EBITDA	Rupiah (Miliar) Rupiah (Billion)	5,00	663,24	713,43	107,57%	5,38	5,38
	2.	ROIC-WACC	Persen	5,00	-2,20%	-1,38%	110,00%	5,50	5,50
	3.	Interest Bearing Debt To EBITDA	Kali Times	4,00	0,33	0,02	110,00%	4,40	4,40
	4.	Interest Bearing Debt to Invested Capital	Persen Percent	4,00	2,93%	0,16%	110,00%	4,40	4,40
	5.	Penyelesaian dan Penyampaian Laporan Keuangan Audit Tahun 2023 Completion and Submission of Audit Financial Statements for 2023	Persen Percent	7,00	100,00%	94,000%	94.00%	6.58	6,58
		Operasional Operational		15,00					16,28
	6.	Vessel Speed (On Time Performance)	Persen Percent	4,00	90,00%	93,98%	104,42%	4,18	4,18
	7.	Average Utilization of Vessel (Pax Factor)	Persen Percent	4,00	65,00%	75,04%	110,00%	4,40	4,40
	8.	Compliance to Safety Regulation	Persen Percent	7,00	80,00%	92,86%	110,00%	7,70	7,70
		Sosial Social		10,00					11,00
	9.	Pemenuhan Jumlah Voyage Kapal Penumpang Fulfillment of Passenger Ship Voyage Number	Persen Percent	5,00	85,00%	96,78%	110,00%	5,50	5,50



DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Nomor Number		Uraian Description	Satuan Unit	Bobot Weight	RKAP 2024 Budget Plan (RKAP)	Realisasi Tahun 2024 Realization	Nilai Capaian Tahun 2024 2024 Achievement Value	Nilai Capaian Maksimal Tahun 2024 2024 Maximum Achievement Value	Skor KPI 2024 2024 KPI Score
Perspektif Perspective	Indikator Indicator			A	B	C	D=C:B	E	F
	10.	Pemenuhan Produk Dalam Negeri Untuk Pengadaan Barang Jasa Fulfillment of Domestic Products for the Procurement of Goods and Services	Persen Percent	5,00	65,00%	77,75%	110,00%	5,50	5,50
		Jumlah Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia Total Economic and Social Value for Indonesia		50,00					53,54
B.		INOVASI MODEL BISNIS BUSINESS MODEL INNOVATION		15,00					15,40
	11.	Kontribusi Pendapatan Non Penugasan Contribution of Non-Assignment Revenue	Persen Percent	3,00	45,00%	39,57%	87,93%	2,64	2,64
	12.	Implementasi Pengembangan Bisnis Pelayaran & Logistik Maritim Implementation of Maritime Shipping & Logistics Business Development	Persen Percent	3,00	80,00%	88,41%	110,00%	3,30	3,30
	13.	Implementasi Sinergi dan Integrasi Logistik Ekosistem BUMN Implementation of SOE's Synergy and Integration in Logistics Ecosystem	Instansi Agency	5,00	5,00	6,00	110,00%	5,50	5,50
	14.	Implementasi Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko Implementation of Roadmap for Improving Risk Management Implementation	Persen Percent	4,00	100,00%	100,00%	100,00%	4,00%	4,00%
		Jumlah Inovasi Model Bisnis Total Business Model Innovation		15,00					15,44

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Nomor Number		Uraian Description	Satuan Unit	Bobot Weight	RKAP 2024 Budget Plan (RKAP)	Realisasi Tahun 2024 Realization	Nilai Capaian Tahun 2024 Achievement Value	Nilai Capaian Maksimal Tahun 2024 Maximum Achievement Value	Skor KPI 2024 KPI Score
Perspektif Perspective	Indikator Indicator			A	B	C	D=C:B	E	F
C.		KEPEMIMPINAN TEKNOLOGI Technology Leadership		10,00					10,89
	15.	Implementasi Digitalisasi Proses Bisnis Implementation of Digitalization Business Process	Persen Percent	5,00	60,00%	73,05%	110,00%	5,50	5,50
	16.	Implementasi Inovasi Teknologi Pada Alat Produksi Implementation of Technology Innovation in Production Equipment	Persen Percent	5,00	85,00%	91,67%	107,84%	5,39	5,39
		Jumlah Kepemimpinan Teknologi Total Technology Leadership		10,00					10,89
D.		PENINGKATAN INVESTASI INVESTMENT INCREASE		10,00					8,92
	17.	Pengembangan Infrastruktur Logistik Maritim Development of Maritime Logistics Infrastructure	Persen Percent	5,00	80,00%	54,70%	68,38%	3,42	3,42
	18.	Implementasi Investasi Penggantian Suku Cadang Permesinan Utama Kapal Implementation of Investment in Main Ship Machinery Spare Parts Replacement	Persen Percent	5,00	75,00%	133,77%	110,00%	5,50	5,50
		Jumlah Pengembangan Investasi Total Investment Development		10,00					8,92



DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Nomor Number	Uraian Description	Satuan Unit	Bobot Weight	RKAP 2024 2024 Budget Plan (RKAP)	Realisasi Tahun 2024 2024 Realization	Nilai Capaian Tahun 2024 2024 Achievement Value	Nilai Capaian Maksimal Tahun 2024 2024 Maximum Achievement Value	Skor KPI 2024 2024 KPI Score
				A	B	C	D=C:B	E
E.	PENGEMBANGAN TALENTA TALENT DEVELOPMENT		15,00					16,50
19.	% Perempuan dalam Nominated Talent % of Women in Nominated Talent	Persen Percent	4,00	27,00%	33,33%	110,00%	4,40	4,40
20.	% Millennial dalam Nominated Talent % of Millennials in Nominated Talent	Persen Percent	4,00	27,00%	50,00%	110,00%	4,40	4,40
21.	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelolaan Risiko Qualification Fulfillment Ratio of Risk Management Organ	Persen Percent	4,00	90,00%	100,00%	110,00%	4,40	4,40
22.	Implementasi Roadmap Penyehatan Dana Pensiun Implementation of Pension Fund Health Roadmap	Persen Percent	3,00	80,00%	90,00%	110,00%	3,30	3,30
	Jumlah Pengembangan Talenta Total Talent Development		15,00					16,50
	Jumlah Total		100,00					105,28

Total skor *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi Secara Kolegial (Kontrak Manajemen) PT PELNI (Persero) Tahun 2024 Audited secara keseluruhan dari total bobot 100,00 tercapai sebesar 105,28.

The total *Key Performance Indicators* (KPI) score for the collective performance (Management Contract) of the Board of Directors of PT PELNI (Persero) in 2024 was 105.28 out of a total weight of 100.00.



DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

PROSEDUR PENILAIAN KINERJA DIREKSI SECARA INDIVIDU

Metode penilaian KPI Individu Direksi menggunakan format yang tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK-306/MBU/11/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) Pada Badan Usaha Milik Negara

HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI SECARA INDIVIDU

Pelaksanaan assesmen atau audit hasil pencapaian KPI Individu Direksi sesuai Per-02/MBU-03/2023 Pasal 105 yang menyatakan bahwa "Perhitungan pencapaian KPI Direksi secara kolegal dan secara individual direviu oleh Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan". Sehingga untuk perhitungan pencapaian KPI Direksi Individu ini telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik & Indra.

Adapun pencapaian skor akhir untuk masing-masing KPI Individu Direksi PT PELNI (Persero) tahun 2024 adalah sebagai berikut:

INDIVIDUAL PERFORMANCE ASSESSMENT PROCEDURES FOR THE BOARD OF DIRECTORS

The individual KPI assessment method for the Board of Directors follows the format outlined in the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. SK-306/MBU/11/2023 on the Technical Guidelines for the Preparation of Key Performance Indicators for State-Owned Enterprises.

INDIVIDUAL DIRECTOR PERFORMANCE EVALUATION RESULTS

The assessment or audit of the Individual Director KPI achievement results is carried out in accordance with Per-02/MBU-03/2023 Article 105, which states that "The calculation of the KPI achievement of Directors collegially and individually is reviewed by the Public Accounting Firm that audits the Company's Financial Statements." Therefore, the calculation of the Individual Director KPI achievement has been conducted by the Public Accounting Firm (KAP) Djoko, Sidik & Indra.

The final score achievements for each Individual Director KPI of PT PELNI (Persero) for the year 2024 are as follows:

No	Direksi Board of Directors	Skor Akhir KPI Final KPI Score
1	Usaha Angkutan Penumpang Passenger Transportation Business	101,91
2	Usaha Angkutan Barang & Tol Laut Freight Transportation & Sea Toll Business	97,14
3	Armada & Teknik Fleet & Engineering	104,51
4	SDM & Umum Human Resources & General Affairs	103,06
5	Keuangan & Manajemen Risiko Finance & Risk Management	105,41



DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi secara berkala oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bersamaan dengan penyampaian Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku. Evaluasi dan penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan kinerja kolektif maupun individual.

Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris oleh RUPS menjadi bagian tak terpisahkan dalam penentuan skema dan besaran remunerasi dan kompensasi Dewan Komisaris maupun pertimbangan dalam penunjukan kembali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Selain itu, hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris menjadi salah satu bahan bagi perbaikan dan peningkatan efektivitas Dewan Komisaris di masa mendatang.

PROSEDUR PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja yang dilakukan selama tahun buku secara mandiri atau dengan sistem *self assessment* atau *peer evaluation*. Indikator yang menjadi penilaian tersebut mengacu pada Indikator Pencapaian Kinerja (KPI) yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris beserta target-target yang akan dicapai. Selanjutnya, KPI tersebut disetujui oleh RUPS setiap tahun berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris yang bersangkutan. KPI merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

Dewan Komisaris menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasi KPI kepada para Pemegang Saham melalui RUPS dan/atau melalui sirkuler. Adapun kebijakan penyusunan KPI Dewan Komisaris dilakukan sebagai berikut:

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The performance of the Board of Commissioners is periodically evaluated by the Shareholders at the General Meeting of Shareholders (GMS) alongside the submission of the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report for the financial year. The performance evaluation of the Board of Commissioners is conducted collectively and individually.

The results of the performance evaluation of the Board of Commissioners by the GMS are integral to determining the remuneration and compensation scheme for the Board of Commissioners and considering the reappointment of the concerned members. Additionally, the performance evaluation results serve as a basis for improving and enhancing the effectiveness of the Board of Commissioners in the future.

PERFORMANCE ASSESSMENT PROCEDURES FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners conducts self-assessment or peer evaluation of their performance for the financial year. The evaluation indicators refer to the Key Performance Indicators (KPI) set by the Board of Commissioners and the targets to be achieved. These KPIs are approved by the GMS annually based on the Board of Commissioners' proposal. KPIs measure the success of supervisory duties and advisory responsibilities performed by the Board of Commissioners according to legal regulations and/or the articles of association.

The Board of Commissioners submits quarterly reports on KPI achievement progress to the Shareholders through the GMS and/or circulars. The KPI policy for the Board of Commissioners includes:



DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

1. Sebagai bagian dari pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, Dewan Komisaris mengukur pencapaian kinerja/KPI berdasarkan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dan KPI Tahunan Dewan Komisaris;
2. KPI Dewan Komisaris dirancang untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan, pengarahan dan penasehatan, dalam hal:
 - a. Pelaksanaan GCG;
 - b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - c. Pelaksanaan RJPP dan RKAP;
 - d. Operasional kerja/bidang;
 - e. Penyusunan laporan perusahaan.

Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasi Indikator Pencapaian Kinerja kepada para Pemegang Saham. Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

KRITERIA YANG DIGUNAKAN UNTUK PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

1. Aspek Perencanaan
2. Aspek Pengawasan dan Nasihat
3. Aspek Pelaporan
4. Aspek Dinamis

HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2024, diperoleh hasil penilaian Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan KPI sebagai berikut:

Commissioners measures KPI achievement based on targets set in the Annual Work Plan and Budget and the Annual KPI of the Board of Commissioners;

2. The KPI of the Board of Commissioners is designed to measure the effectiveness and success of supervisory, guidance, and advisory functions in:
 - a. GCG implementation;
 - b. Compliance with regulations;
 - c. RJPP and RKAP implementation;
 - d. Operational work/field;
 - e. Company report preparation.

The Board of Commissioners must submit quarterly progress reports on KPI achievement to the Shareholders. The performance evaluation results of the Board of Commissioners are reported in the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report.

PERFORMANCE ASSESSMENT CRITERIA FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. Planning Aspect
2. Supervisory and Advisory Aspect
3. Reporting Aspect
4. Dynamic Aspect

PERFORMANCE ASSESSMENT RESULTS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In 2024, the performance evaluation results of the Board of Commissioners based on KPI are as follows:

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Realisasi KPI Dewan Komisaris 31 Desember 2024

Realization of the Board of Commissioners' KPI as of December 31, 2024

Key Performance Indicators	Periode Period	Satuan Output Unit of Output	Bobot Weight	OUTPUT 2024 2024 OUTPUT		%	
				Rencana Plan	Realisasi Realization		
Aspek Perencanaan Planning Aspect							
1	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Komisaris 2025 Formulating the 2025 Work Plan, Budget, and KPI of the Board of Commissioners	Tahunan Annually	Dokumen Document	10%	1 Dokumen 1 Document	1 Dokumen 1 Document	100%
Sub Total I				10,0%	100%		
Aspek Pengawasan dan Nasehat Supervision and Advisory Aspect							
1	Memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap: Providing feedback/recommendations to Shareholders on:						
a.	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Company's Work Plan and Budget	Tahunan Annually	Surat Letters	5%	1 Surat 1 Letters	1 Surat 1 Letters	100%
b.	Laporan Tahunan Annual Report	Tahunan Annually	Surat Letters	5%	1 Surat 1 Letters	1 Surat 1 Letters	100%
c.	Analisis Kinerja Triwulanan Quarterly Performance Analysis	Triwulanan Quarterly	Surat Letters	5%	3 Surat 3 Letters	3 Surat 3 Letters	100%
2	Memberi Nasehat kepada Direksi sesuai Bidang Tugas Dewan Komisaris Providing advices to Directors based on the Board of Commissioners Duties	Tahunan Annually	Surat/ Risalah Letters/ Minutes	10%	12 Surat/ Risalah 12 Letters/ Minutes	12 Surat/ Risalah 12 Letters/ Minutes	100%
3	Rapat Dewan Komisaris: Board of Commissioners Meetings:						
a.	Jumlah Rapat Number of Meetings	Bulanan Monthly	Kali Times	10%	12 Kali 12 Times	12 Kali 12 Times	100%
b.	Kehadiran Rapat Meeting Attendance	Bulanan Monthly	%	5%	100%	100%	100%
c.	Penyelesaian Risalah Rapat Completion of Meeting Minutes	Bulanan Monthly	Risalah Minutes	5%	12 Risalah 12 Minutes	12 Risalah 12 Minutes	100%
4	Rapat Komite Dewan Komisaris Board of Commissioners Committee Meetings	Tahunan Annually	Risalah Minutes	5%	36 Risalah 36 Minutes	36 Risalah 36 Minutes	100%
5	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris dan Komite Work Visits by the Board of Commissioners and Committees	Tahunan Annually	Kunjungan Visits	5%	12 Kunjungan 12 Visits	32 Kunjungan 32 Visits	100%
6	Realisasi Rencana Kerja Dewan Komisaris Realization of the Board of Annually Commissioners' Work Plan	Tahunan Annually	%	5%	100%	100%	100%
Sub Total II				60,0%	60,0%		
Aspek Pelaporan Reporting Aspect							
1	Laporan Realisasi Pelaksanaan KPI Dewan Komisaris Report on the Realization of the Board of Commissioners' KPI Implementation	Triwulanan Quarterly	Laporan Report	5%	3 Laporan 3 Reports	3 Laporan 3 Reports	100%

DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS

Key Performance Indicators	Periode Period	Satuan Output Unit of Output	Bobot Weight	OUTPUT 2024 2024 OUTPUT		%
				Rencana Plan	Realisasi Realization	
2 Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners	Tahunan Annually	Laporan Report	10%	1 Laporan 1 Reports	1 Laporan 1 Reports	100%
Sub Total III			15,0%			15,0%
Aspek Dinamis Dynamic Aspect						
1 Pengusulan Kantor Akuntan Publik kepada Pemegang Saham Proposal of Public Accounting Firm to Shareholders	Tahunan Annually	Surat Letters	4%	1 Surat 1 Letters	1 Surat 1 Letters	100%
2 Peningkatan Kompetensi melalui Seminar, Workshop, dll Competence Enhancement through Seminars, Workshops, etc.	Setahun Annually	Kali Times	4%	6 Kali 6 Times	10 Kali 10 Times	100%
3 Hasil Assessment GCG Dewan Komisaris (self assessment/BPK) Results of the GCG Assessment of the Board of Commissioners (self-assessment/BPK)	Tahunan Annually	Skor Score	4%	91,2 Skor 91,2 Score	91,8 Skor 91,8 Score	100%
4 Tanggapan terhadap Tindak Lanjut Temuan Auditor/SPI Response to Follow-Up on Auditor/SPI Findings	Setahun Annually	Surat Letters	3%	1 Surat 1 Letters	1 Surat 1 Letters	100%
Sub Total IV			15,0%			15,0%
			100%			100%

PENILAIAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP KINERJA KOMITE YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Penilaian Kinerja Komite Audit

Prosedur Penilaian Kinerja Komite Audit

Prosedur Penilaian Kinerja Komite audit menggunakan pembobotan aspek realisasi program kinerja Komite Audit dengan yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Komite Tahun 2024.

Kriteria yang Digunakan untuk Penilaian Kinerja Komite audit

1. Aspek Perencanaan (25%)
2. Aspek Pelaksanaan (25%)
3. Aspek Pelaporan (25%)
4. Aspek Dinamis (25%)

PERFORMANCE EVALUATION OF THE COMMITTEES SUPPORTING THE BOARD OF COMMISSIONERS

Performance Assessment of the Audit Committee

Performance Assessment of the Audit Committee Procedures

The performance assessment procedures of the Audit Committee use the weighting aspect of the realization of the Audit Committee's performance program against the planned 2024 Work Plan.

Performance Assessment Criteria of the Audit Committee

1. Planning Aspect (25%)
2. Implementation Aspect (25%)
3. Reporting Aspect (25%)
4. Dynamic Aspect (25%)

DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

Hasil Penilaian Kinerja Komite audit

Hasil penilaian kinerja Komite Audit adalah 100%.

Penilaian Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Prosedur Penilaian Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Prosedur Penilaian Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi menggunakan pembobotan aspek realisasi program kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dengan yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Komite Tahun 2024.

Kriteria yang Digunakan untuk Penilaian Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Aspek Perencanaan (30%)
2. Aspek Pelaksanaan (40%)
3. Aspek Pelaporan (30%)

Hasil Penilaian Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Hasil penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi adalah 100%.

Penilaian Kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko

Prosedur Penilaian Kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko

Prosedur Penilaian Kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko menggunakan pembobotan aspek realisasi program kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko dengan yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Komite Tahun 2024.

Kriteria yang Digunakan untuk Penilaian Kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko

1. Aspek Perencanaan (30%)
2. Aspek Pelaksanaan (40%)
3. Aspek Pelaporan (30%)

Performance Assessment Results of the Audit Committee

The performance evaluation results of the Audit Committee are 100%.

Performance Assessment of the Nomination and Remuneration Committee

Performance Assessment of the Nomination and Remuneration Committee Procedures

The performance assessment procedures of the Nomination and Remuneration Committee use the weighting aspect of the realization of the Nomination and Remuneration Committee's performance program against the planned 2024 Work Plan.

Performance Assessment Criteria of the Nomination and Remuneration Committee

1. Planning Aspect (30%)
2. Implementation Aspect (40%)
3. Reporting Aspect (30%)

Performance Assessment Results of the Nomination and Remuneration Committee

The performance evaluation results of the Nomination and Remuneration Committee are 100%.

Performance Assessment of the Risk Management Monitoring Committee

Performance Assessment Procedures

The performance assessment procedures of the Risk Management Monitoring Committee use the weighting aspect of the realization of the Risk Management Monitoring Committee's performance program against the planned 2024 Work Plan.

Performance Assessment Criteria of the Risk Management Monitoring Committee

1. Planning Aspect (30%)
2. Implementation Aspect (40%)
3. Reporting Aspect (30%)



DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

Hasil Penilaian Kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko

Hasil penilaian kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah 100%.

Penilaian Kinerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

1. Aspek Perencanaan (30%)
2. Aspek Pelaksanaan (40%)
3. Aspek Pelaporan (30%)

Hasil Penilaian Kinerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Hasil penilaian kinerja Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah 100%.

Performance Assessment Results of the Risk Management Monitoring Committee

The performance evaluation results of the Risk Management Monitoring Committee are 100%.

Performance Assessment of the Integrated Governance Committee

1. Planning Aspect (30%)
2. Implementation Aspect (40%)
3. Reporting Aspect (30%)

Performance Assessment Results of the Integrated Governance Committee

The performance evaluation results of the Integrated Governance Committee are 100%.

NOMINASI DAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

NOMINATION AND REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS
AND THE BOARD OF COMMISSIONERS

KEBIJAKAN DAN PROSES NOMINASI ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Dewan Komisaris dalam memberikan arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir, adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menugaskan Komite Dewan Komisaris terkait untuk melakukan telaah terhadap kualitas kebijakan suksesi manajemen dan penerapan untuk mendapatkan kualitas yang memadai atas arahan Dewan Komisaris tersebut.
2. Menyampaikan arahan tentang penerapan kebijakan suksesi manajemen perusahaan kepada Direksi.
3. Dewan Komisaris Perusahaan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi atas daftar Talenta Terseleksi (*selected talent*) berdasarkan kinerja dan kapasitas.
4. Memastikan bahwa seluruh permasalahan kebijakan suksesi manajemen dan pelaksanaannya dibahas dalam rapat Dewan Komisaris.

POLICIES AND NOMINATION PROCESS FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners' policies on providing guidance regarding career development policies and implementation are as follows:

1. The Board of Commissioners assigns the relevant committee to review the quality of the management succession policy and its implementation to ensure it meets the Board of Commissioners' directives.
2. The Board of Commissioners provides directives on the implementation of the company's management succession policy to the Board of Directors.
3. Through the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Commissioners evaluates the list of selected talent based on performance and capacity.
4. The Board of Commissioners ensures that all issues related to management succession policies and their implementation are discussed in the Board of Commissioners' meetings.

NOMINASI DAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

NOMINATION AND REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS
AND THE BOARD OF COMMISSIONERS

Mekanisme penetapan daftar dan rekam jejak Direksi Perusahaan dan/atau calon Direksi Perusahaan dilaksanakan melalui proses:

1. Pengumpulan data daftar dan rekam jejak;
2. Validasi data daftar dan rekam jejak; dan
3. Penetapan daftar dan rekam jejak.

Manajemen Talenta dilaksanakan melalui proses:

1. Penjaringan dan pemilihan Talenta;
2. Penilaian Talenta;
3. Pengklasifikasian Talenta;
4. Pengembangan Talenta; dan
5. Perputaran Talenta.

Sumber Bakal Calon

Sumber bakal calon Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) berasal dari:

1. Mantan Direksi BUMN;
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
3. Pejabat struktural dan pejabat fungsional pemerintah; atau
4. Sumber lain.

Penjaringan

1. Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Kementerian, dan/atau Deputy mencari bakal calon dari berbagai sumber.
2. Semua bakal calon diadministrasikan oleh Deputy.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris dibantu Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan telaah terhadap pengusulan remunerasi Direksi. Pengusulan tantien/insentif kinerja mempertimbangkan hasil penilaian kinerja Direksi (KPI) dan pencapaian tingkat kesehatan Perusahaan. Dewan Komisaris menyampaikan usulan remunerasi (gaji, tunjangan, dan fasilitas serta tantiem/insentif kinerja) Direksi kepada RUPS.

The process for establishing the list and track record of the company's directors and/or prospective directors includes:

1. Collecting data on the list and track record.
2. Validating the data on the list and track record.
3. Finalizing the list and track record.

Talent Management is carried out through the following process:

1. Screening and selecting talent.
2. Assessing talent.
3. Classifying talent.
4. Developing talent.
5. Rotating talent.

Sources of Candidates

The sources of candidates for the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) include:

1. Former directors of SOEs.
2. Members of the Board of Commissioners/Board of Supervisors of SOEs.
3. Government structural and functional officials.
4. Other sources.

Screening

1. The Minister, Deputy Minister, Secretary of the Ministry, and/or Deputy conduct searches for candidates from various sources.
2. All candidates are administered by the Deputy.

PROCEDURES FOR DETERMINING THE REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners, assisted by the Nomination and Remuneration Committee, reviews the proposed remuneration for the Board of Directors. The proposal for bonuses/performance incentives takes into account the performance evaluation results of the Board of Directors (KPI) and the achievement of the Company's health level. The Board of Commissioners submits the proposed remuneration (salaries, allowances, and facilities as well as bonuses/performance incentives) for the Board of Directors to GMS.

NOMINASI DAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

NOMINATION AND REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS
AND THE BOARD OF COMMISSIONERS

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diberikan mengacu kepada:

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
2. Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-181/MBU/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara Tahun 2023, serta
3. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT PELNI (Persero) tentang Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2024 yang disahkan pada tanggal RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 tanggal 14 Mei 2025.

STRUKTUR REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SR-37/Wk.MBU.11/08/24 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Gaji/Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas
 - a. Gaji Direktur Utama ditetapkan sebesar Rp232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) per bulan. Gaji Anggota Direksi lainnya sebesar 85% dari Gaji Direktur Utama.
 - b. Honorarium Komisaris Utama ditetapkan sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama, dan honorarium Komisaris ditetapkan sebesar 90% dari honorarium Komisaris Utama.
 - c. Tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris diberikan sebagaimana tabel terlampir. Direksi dan Dewan Komisaris dilarang untuk menerima jenis tunjangan dan/atau fasilitas lainnya di luar yang telah ditetapkan dalam Surat ini.

The remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors is based on:

1. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023, concerning the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.
2. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-181/MBU/07/2023 dated July 4, 2023, concerning the Determination of Income for the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Supervisory Board of State-Owned Enterprises for the year 2023, and
3. Resolution of the General Meeting of Shareholders of PT PELNI (Persero) regarding the Ratification of the Annual Report for the Fiscal Year 2024, ratified at the Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2024 on May 14, 2025.

REMUNERATION STRUCTURE OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

Based on the letter from the Ministry of SOE No. : SR-37/Wk.MBU.11/08/24 dated August 23, 2024, regarding the Determination of Income for the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) for 2024 is as follows:

1. Salaries/Honorariums, Allowances, and Facilities
 - a. The salary of the President Director is set at Rp232,000,000 (two hundred thirty two million rupiahs) per month. The salaries of other members of the Board of Directors are set at 85% of the President Director's salary.
 - b. The honorarium for the President Commissioner is set at 45% of the President Director's salary, and the honorarium for Commissioners is set at 90% of the President Commissioner's honorarium.
 - c. Allowances and facilities for the Board of Directors and the Board of Commissioners shall be provided as set forth in the attached table. The Board of Directors and the Board of Commissioners are prohibited from receiving any other types of allowances and/or facilities beyond those stipulated in this Letter.



NOMINASI DAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

NOMINATION AND REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS
AND THE BOARD OF COMMISSIONERS

Tunjangan dan Fasilitas Direksi

Allowances and Facilities for the Board of Directors

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Keputusan Decision	Keterangan Description
1.	Tunjangan Allowances		
	Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowance	1 (satu) kali gaji 1 (one) month salary	Sesuai PER-3/MBU/03/2023 According to PER-3/MBU/03/2023
	Asuransi Purna Jabatan Post-Retirement Insurance	Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar maksimal 25% dari Gaji dalam 1 tahun Premiums covered by the company up to a maximum of 25% of the annual salary	Sesuai PER-3/MBU/03/2023 According to PER-3/MBU/03/2023
	Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Rp27.500.000,00 per bulan Rp27,500,000.00 per month	Sesuai PER-3/MBU/03/2023. Apabila Direksi BUMN masih mendapatkan fasilitas rumah dinas, maka tetap dapat menggunakan fasilitas tersebut paling lambat tanggal 31 Desember 2023. According to PER-3/MBU/03/2023. If the Board of Directors of the SOE still receives official housing facilities, they may continue to use such facilities until December 31, 2023.
2.	Fasilitas Facilities		
	Fasilitas Kendaraan Vehicle Facility	1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perusahaan 1 (one) unit, including maintenance and operational costs, considering the company's financial condition	Spesifikasi dan jenis kendaraan diatur oleh Dewan Komisaris dengan batas maksimal 3.500 cc untuk kendaraan berbahan bakar minyak atau batas maksimal 100 kWh untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (<i>battery electric vehicle</i>) Specifications and types of vehicles are regulated by the Board of Commissioners with a maximum limit of 3,500 cc for fuel-powered vehicles or a maximum limit of 100 kWh for battery electric vehicles
	Fasilitas Kesehatan Health Facility	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan sebesar pemakaian (<i>at cost</i>) In the form of health insurance or reimbursement of medical expenses at cost	Sesuai PER-3/MBU/03/2023 According to PER-3/MBU/03/2023
	Fasilitas Bantuan Hukum Legal Aid Facility	Sebesar pemakaian (<i>at cost</i>) At cost	Sesuai PER-3/MBU/03/2023 According to PER-3/MBU/03/2023

Tunjangan dan Fasilitas Dewan Komisaris

Allowances and Facilities for the Board of Commissioners

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Keputusan Decision	Keterangan Description
1.	Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowance		
	Asuransi Purna Jabatan Post-Retirement Insurance	1 (satu) kali gaji 1 (one) month salary	Sesuai PER-3/MBU/03/2023 According to PER-3/MBU/03/2023
	Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar maksimal 25% dari Gaji dalam 1 tahun Premiums covered by the company up to a maximum of 25% of the annual honorarium	Sesuai PER-3/MBU/03/2023 According to PER-3/MBU/03/2023
	Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowance	20% dari honorarium per bulan 20% of the monthly honorarium	Sesuai PER-3/MBU/03/2023 According to PER-3/MBU/03/2023

NOMINASI DAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

NOMINATION AND REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS
AND THE BOARD OF COMMISSIONERS

No	Jenis Penghasilan Type of Income	Keputusan Decision	Keterangan Description
2.	Fasilitas Facilities		
	Fasilitas Kesehatan Health Facility	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan sebesar pemakaian (<i>at cost</i>) In the form of health insurance or reimbursement of medical expenses at cost	Sesuai PER-3/MBU/03/2023 According to PER-3/MBU/03/2023
	Fasilitas Bantuan Hukum Legal Aid Facility	Sebesar pemakaian (<i>at cost</i>) At cost	Sesuai PER-3/MBU/03/2023 According to PER-3/MBU/03/2023

- d. Gaji/honorarium serta tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2024 berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024.
- d. Salaries/honorariums, allowances, and facilities for the Board of Directors and the Board of Commissioners for the year 2024 are effective from January 1, 2024.
2. Total Tantiem/IK untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas Kinerja Tahun Buku 2023 ditetapkan sebesar Rp19.363.000.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah), dengan ketentuan:
2. The total tantiem/IK for the Board of Directors and the Board of Commissioners based on the performance for the 2023 financial year is determined at Rp19,363,000,000.00 (nineteen billion three hundred sixty-three million rupiah), subject to the following provisions:
- a. Tantiem/IK bagi Direktur Utama, Anggota Direksi lainnya, Komisaris Utama, dan Komisaris dengan faktor jabatan sebagai berikut:
- a. Bonuses/IK for the President Director, other Directors, President Commissioner, and Commissioners with position factors as follows:
- 1) Direktur Utama: 100%
- 1) President Director: 100%
- 2) Anggota Direksi lainnya: 85% dari Direktur Utama
- 2) Other Directors: 85% of the President Director
- 3) Komisaris Utama : 45% dari Direktur Utama
- 3) President Commissioner: 45% of the President Director
- 4) Komisaris : 90% dari Komisaris Utama
- 4) Commissioners: 90% of the President Commissioner
- b. Besaran Tantiem/IK dihitung proporsional sesuai dengan masa jabatan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Tahun Buku 2022.
- b. The amount of bonuses/IK is calculated proportionally based on the tenure of each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners during the Fiscal Year 2022.
- c. Pembayaran Tantiem/IK bagi anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada perusahaan selain BUMN, agar berpedoman pada ketentuan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
- c. The payment of bonuses/IK to members of the Board of Commissioners who concurrently serve as commissioners in companies other than State-Owned Enterprises (BUMN) must comply with the provisions of Article 72 paragraph (2) of the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organization and Human Resources of State-Owned Enterprises.

NOMINASI DAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

NOMINATION AND REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS
AND THE BOARD OF COMMISSIONERS

- d. Sebesar 21% dari nilai Tantiem/IK sebagaimana dimaksud pada angka 2 agar ditangguhkan selama 3 (tiga) tahun, dengan mekanisme yang tercantum pada Lampiran II Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SR -37/Wk.MBU.11.08/2024 tanggal 23 Agustus 2024.
 - e. Pajak penghasilan (PPH) atas Tantiem/IK menjadi beban penerima dan tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya perusahaan.
3. Direksi yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi BUMN dilarang menerima seluruh penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris yang dirangkapnya di anak perusahaan/ patungan/perusahaan terafiliasi BUMN sebagaimana ketentuan Pasal 120 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Penghasilan dimaksud menjadi pendapatan lain-lain BUMN induk (*holding*) yang dibayarkan oleh anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi BUMN.
 4. BUMN dapat memberlakukan pedoman penetapan penghasilan yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, dalam menetapkan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan BUMN yang bersangkutan.
- d. 21% of the value of the bonuses/IK as referred to in point 2 shall be deferred for 3 (three) years, following the mechanism outlined in Attachment II of the Ministry of State-Owned Enterprises' Letter Number: SR -37/Wk.MBU.11.08/2024 dated August 23, 2024.
 - e. Income tax (PPH) on bonuses/IK is the responsibility of the recipient and must not be charged as a company expense.
3. Directors who concurrently serve as members of the Board of Commissioners in subsidiaries/ joint ventures/affiliated companies of BUMN are prohibited from receiving any income as members of the Board of Commissioners in such subsidiaries/ joint ventures/affiliated companies of BUMN as per the provisions of Article 120 of the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organization and Human Resources of State-Owned Enterprises. Such income shall become other income for the parent BUMN (holding) paid by the subsidiary/joint venture/affiliated company of BUMN.
 4. BUMN may apply the income determination guidelines stipulated in the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organization and Human Resources of State-Owned Enterprises when determining the income of the Board of Directors and the Board of Commissioners in the relevant BUMN Subsidiaries.

NILAI REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2024

Rincian jumlah nominal remunerasi yang diterima oleh masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

REMUNERATION VALUE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS FOR 2024

The detailed nominal amount of remuneration received by each member of the Board of Commissioners and Directors during the year 2024 is as follows:



NOMINASI DAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

NOMINATION AND REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS
AND THE BOARD OF COMMISSIONERS

Perhitungan Tantiem Direksi Dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024

Calculation of Bonuses for the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Fiscal Year 2024

No.	Nama Name	Jabatan Position	Tantiem Bonus
Direksi Board of Directors			
1.	Tri Andayani	Direktur Utama President Director	Rp 1.488.280.470
2.	Anik Hidayati	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Rp 1.213.959.745
3.	Nuraini Dessy W	Direktur Usaha Angkutan Penumpang Director of Passenger Transportation Business	Rp 337.067.949
4.	Robert M.P. Sinaga	Direktur Armada dan Teknik Director of Fleet and Engineering	Rp 1.275.481.991
5.	Rainoc	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Resources and General Affairs	Rp 1.265.038.400
6.	Kokok Susanto	Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Director of Freight and Sea Toll Business	-
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
1.	Muhammad Awaluddin	Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen President Commissioner Concurrently Independent Commissioner	-
2.	Kristia Budiarto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Rp 607.729.654
3.	Faturohman	Komisaris Commissioner	Rp 595.244.258
4.	Budi Mantoro	Komisaris Commissioner	-
5.	Raden Suhartono	Komisaris Commissioner	Rp 595.244.258
6.	Eddy Susanto Soepadmo	Komisaris Commissioner	Rp 607.729.654



NOMINASI DAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

NOMINATION AND REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS
AND THE BOARD OF COMMISSIONERS

Gaji Direksi Tahun 2024 per Bulan

Remuneration of the Board of Directors for 2024 per Month

No	Nama Name	Jabatan Position	Gaji Pokok Basic Salary	Tunjangan Rumah Housing Allowance	Potongan Jamsostek Jamsostek Deduction		Jumlah yang di Terima Total Received
					JHT	JP	
1	Tri Andayani	Direktur Utama President Director	232.000.000	27.500.000	5.190.000	100.423	245.209.577
2	Robert MP Sinaga	Direktur Armada Dan Teknik Director of Fleet and Technical Affairs	197.200.000	27.500.000	4.494.000	100.423	220.105.577
3	Anik Hidayat	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Resources and General Affairs	197.200.000	27.500.000	4.494.000	-	220.206.000
4	Rainoc	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Resources and General Affairs	197.200.000	27.500.000	4.494.000	100.423	220.105.577
5	Kokok Susanto	Direktur Usaha Angkutan Barang Dan Tol Laut Director of Cargo and Sea Toll Business	197.200.000	27.500.000	4.494.000	100.423	220.105.577
6	Nuraini Dessy W	Direktur Usaha Angkutan Penumpang Director of Passenger Transport Business	197.200.000	27.500.000	4.494.000	100.423	220.105.577

Gaji Dewan Komisaris Tahun 2024 per Bulan

Remuneration of the Board of Commissioners for 2024 per Month

No	Nama Name	Jabatan Position	Gaji Pokok Basic Salary	Tunjangan Rumah Housing Allowance	Potongan Jamsostek Jamsostek Deduction		Jumlah yang di Terima Total Received
					JHT	JP	
1	Muhammad Awaluddin	Komisaris Utama President Commissioner	104.400.000	20.880.000	2.505.600	100.423	122.673.977
2	Kristia Budiyarto	Komisaris Commissioner	93.960.000	18.792.000	2.255.040	100.423	110.396.537
3	Eddy Susanto Soepadmo	Komisaris Commissioner	93.960.000	18.792.000	2.255.040	-	110.496.960
4	Budi Mantoro	Komisaris Commissioner	93.960.000	18.792.000	2.255.040	100.423	110.396.537
5	Raden Suhartono	Komisaris Commissioner	93.960.000	18.792.000	2.255.040	-	110.496.960
6	Faturohman	Komisaris Commissioner	93.960.000	18.792.000	2.255.040	100.423	110.396.537



KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

DIVERSITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan bagian dari upaya Perseroan untuk mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih obyektif, komprehensif, optimal, dan memiliki dampak positif terhadap pengawasan dan pengelolaan Perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan perkembangan dinamika bisnis yang semakin masif, sehingga keberadaan level manajemen yang profesional dengan beragam latar belakang disiplin ilmu sangat penting dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha di masa depan.

Selain itu, adanya komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang beragam juga dapat memperkaya sudut pandang dan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan baik di tubuh Dewan Komisaris maupun Direksi, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi aspek operasional dan usaha Perseroan, serta penerapan praktik GCG di lingkup PT PELNI (Persero).

Hingga akhir tahun 2024, Perseroan belum memiliki kebijakan spesifik yang mengatur mengenai keberagaman dalam komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Namun, dalam kebijakan Tata Laksana Kerja (*Board Manual*) Direksi dan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) telah mengatur kriteria bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, yang secara umum kebijakan tersebut mendorong terpilihnya orang-orang dari latar belakang yang beragam sebagai kandidat anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Berikut ini merupakan indikator keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan kewarganegaraan, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan keahlian/*skill* yang dimiliki oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

The diversity of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors is part of the Company's efforts to foster a decision-making process that is more objective, comprehensive, optimal, and has a positive impact on the supervision and management of the Company. This aligns with the increasing dynamics of business, making it crucial to have a professional management level with diverse academic backgrounds to ensure the sustainability of the business in the future.

Furthermore, the diverse composition of the Board of Commissioners and Directors also enriches the perspectives and interests in the decision-making process within both bodies, thereby adding value to the operational and business aspects of the Company, as well as to the implementation of Good Corporate Governance (GCG) practices within PT PELNI (Persero).

As of the end of 2024, the Company has not yet established a specific policy regarding diversity in the composition of the Board of Commissioners and Directors. However, the Board Manual of Directors and Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) outlines the criteria for members of the Board of Commissioners and Directors, which generally encourages the selection of candidates from diverse backgrounds.

Below are the indicators of diversity within the Company's Board of Commissioners and Directors based on nationality, gender, age, highest level of education, and the skills/expertise of each member:

KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

DIVERSITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Nama dan Jabatan Name and Position	Kewarganegaraan Citizenship	Jenis Kelamin Gender	Usia (per 31 Desember 2024) Age (as of December 31, 2024)	Pendidikan Terakhir Highest Level of Education	Keahlian Expertise
Dewan Komisaris Board of Commissioners					
Muhammad Awaluddin (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently Independent Commissioner)	WNI Indonesian citizen	Laki-laki Male	56 tahun 56 years old	S3 Doctoral Degree	Manajemen Bisnis, Teknik Elektro Business Management, Electrical Engineering
Kristia Budiarto Komisaris Independen Independent Commissioner	WNI Indonesian citizen	Laki-laki Male	46 tahun 46 years old	S1 Bachelor's Degree	Komunikasi Communications
Faturohman Komisaris Commissioner	WNI Indonesian citizen	Laki-laki Male	48 tahun 48 years old	S2 Master's Degree	Akuntansi dan Manajemen Accounting and Management
Budi Mantoro Komisaris Commissioner	WNI Indonesian citizen	Laki-laki Male	52 tahun 52 years old	S2 Master's Degree	Ilmu Nautika Nautical Science
Raden Suhartono Komisaris Commissioner	WNI Indonesian citizen	Laki-laki Male	59 tahun 59 years old	S2 Master's Degree	Ekonomi, Akuntansi, dan Keuangan Economics, Accounting, and Finance
Eddy Susanto Soepadmo Komisaris Commissioner	WNI Indonesian citizen	Laki-laki Male	65 tahun 65 years old	S1 Bachelor's Degree	Ekonomi Economics
Direksi Board of Directors					
Tri Andayani Direktur Utama President Director	WNI Indonesian citizen	Perempuan Female	51 tahun 51 years old	S2 Master's Degree	Akuntansi, Manajemen Accounting, Management
Anik Hidayati Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	WNI Indonesian citizen	Perempuan Female	50 tahun 50 years old	S2 Master's Degree	Akuntansi, Keuangan, Pemasaran, Manajemen SDM Accounting, Finance, Marketing, Human Resource Management
Nuraini Dessy W Direktur Usaha Angkutan Penumpang Director of Passenger Transport Operations	WNI Indonesian citizen	Laki-laki Male	47 tahun 47 years old	S2 Master's Degree	Manajemen Transportasi Laut, Teknik Industri Maritime Transportation Management, Industrial Engineering
Robert M.P. Sinaga Direktur Armada dan Teknik Director of Fleet and Technical Services	WNI Indonesian citizen	Laki-laki Male	48 tahun 48 years old	S1 Bachelor's Degree	Manajemen Transportasi Laut Maritime Transportation Management

KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

DIVERSITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Nama dan Jabatan Name and Position	Kewarganegaraan Citizenship	Jenis Kelamin Gender	Usia (per 31 Desember 2024) Age (as of December 31, 2024)	Pendidikan Terakhir Highest Level of Education	Keahlian Expertise
Rainoc Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Resources and General Affairs	WNI Indonesian citizen	Laki-laki Male	56 tahun 56 years old	S2 Master's Degree	Manajemen Logistik, Teknik Transportasi, Teknik Industri Logistics Management, Transportation Engineering, Industrial Engineering
Kokok Susanto* Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Director of Freight Transport and Sea Toll Operations	WNI Indonesian citizen	Laki-laki Male	53 tahun 53 years old	S1 Bachelor's Degree	Ekonomi Economics
Yossianis Marciano** Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Director of Freight Transport and Sea Toll Operations	WNI Indonesian citizen	Laki-laki Male	53 tahun 53 years old	S1 Bachelor's Degree	Ekonomi Economics

Keterangan | Explanation:

*) Mulai menjabat pada tanggal 25 Maret 2024 | Assumed office on March 25, 2024

**) Berakhir masa jabatan pada tanggal 25 Maret 2024 | Term of office ended on March 25, 2024

ORGAN DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

ORGAN UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris diberi kewenangan untuk membentuk organ-organ pendukung dalam rangka mendorong efektivitas fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

The Board of Commissioners is authorized to establish supporting bodies to enhance the effectiveness of their supervisory functions and advisory roles to the Board of Directors. This policy is guided by the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines on Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, and Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 regarding the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.



ORGAN DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

ORGAN UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

Per tahun 2024, Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) memiliki organ di bawah Dewan Komisaris, terdiri dari Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Sekretariat Dewan Komisaris.

As of 2024, the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) includes subsidiary organs under its governance, comprising the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, the Risk Management Monitoring Committee, the Integrated Governance Committee, and the Secretariat of the Board of Commissioners.

KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam memastikan sistem pengendalian internal Perusahaan telah berfungsi secara efisien dan efektif. Komite Audit juga membantu menjamin bahwa pelaksanaan audit eksternal maupun internal berjalan dengan lancar. Komite Audit merupakan salah satu organ pendukung Komisaris yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

The Audit Committee is a committee established by the Board of Commissioners to assist in the execution of the duties and functions of the Board of Commissioners in ensuring that the Company's internal control system operates efficiently and effectively. The Audit Committee also helps ensure that both external and internal audits run smoothly. The Audit Committee is one of the supporting organs of the Commissioners, formed based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris. Komite Audit bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

The Audit Committee works collectively in carrying out its duties to assist the Board of Commissioners. The Audit Committee operates independently both in the execution of its tasks and in its reporting, and it reports directly to the Board of Commissioners.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Audit

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Dalam mengangkat Komite Audit, Dewan Komisaris perlu memperhatikan persyaratan yang harus dipenuhi, sebagai berikut:

Appointment and Dismissal of the Audit Committee

The appointment and dismissal of the Audit Committee members are carried out by the Board of Commissioners based on a Decree issued by the Board of Commissioners and reported to the General Meeting of Shareholders (GMS). In appointing the Audit Committee, the Board of Commissioners must consider the following requirements:



KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE

1. Pihak eksternal yang diangkat menjadi Komite Audit tidak mempunyai hubungan usaha maupun hubungan afiliasi dengan Perseroan, Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham Mayoritas.
2. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam bidang tugasnya serta mampu berkomunikasi dengan baik
3. Salah seorang dari Anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang Pendidikan Akuntansi atau Keuangan.

Pemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Komposisi Komite Audit

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Dasar penetapan Komite Audit tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP-05/DK/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Sebagai Anggota Komite Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). Berikut ini adalah komposisi Komite Audit yang menjabat selama tahun buku 2024:

1. External parties appointed to the Audit Committee must not have business or affiliation relationships with the Company, Directors, Commissioners, or Majority Shareholders.
2. Possess high integrity, capabilities, adequate knowledge, and experience in their field of duties, as well as good communication skills.
3. At least one member of the Audit Committee must have an educational background in Accounting or Finance.

The dismissal of Audit Committee members can occur when their term of office ends, and based on the decision of the Board of Commissioners, they are dismissed due to not meeting the established performance criteria and/or incompetence in carrying out their duties.

Composition of the Audit Committee

The tenure of the Audit Committee members must not exceed the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Company's Articles of Association, and they can only be re-elected for one subsequent period.

The basis for the establishment of the Audit Committee is outlined in the Decree of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP-05/DK/II/2024 dated February 15, 2024, concerning the Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) as Members of the Audit Committee of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). Below is the composition of the Audit Committee serving throughout the 2024 fiscal year:

KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE

Komposisi Komite Audit Tahun 2024

Composition of the Audit Committee in 2024

Nama Name	Jabatan Position	Posisi di Perusahaan Position in the Company	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Muhammad Awaluddin	Ketua Komite Audit Audit Committee Chairman	Komisaris Utama President Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-05/DK/II/2024 Board of Commissioners Decision No. KEP-05/DK/II/2024	15 Februari 2024 - Sekarang (periode 1) Februari 15, 2024 - Present (period 1)
Raden Suhartono	Wakil Ketua Komite Audit Audit Committee Chairman	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-07/DK/VII/2022 Board of Commissioners Decision No. KEP-07/DK/VII/2022	29 Juli 2022 - Sekarang (periode 1) July 29, 2022 - Present (period 1)
Baliya Munadjat	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	Pihak Eksternal External Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-14/DK/XI-2020, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-07/DK/VII/2022 Board of Commissioners Decision No. KEP-14/DK/XI-2020, as amended by Board of Commissioners Decision No. KEP-07/DK/VII/2022	30 Juli 2020 - Sekarang (periode 2) July 30, 2020 - Present (period 2)
Maman Sulaeman	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	Pihak Eksternal External Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-08/DK/VIII/2024 Board of Commissioners Decision No. KEP-08/DK/VIII/2024	1 Agustus 2024 - Sekarang (periode 1) August 1, 2024 - Present (period 1)

Profil Komite Audit

Audit Committee Profile

Muhammad Awaluddin

Ketua Komite Audit
Chairman of the Audit Committee

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-08/DK/VIII/2024
Board of Commissioners Decision No. KEP-08/DK/VIII/2024

Profil lengkap Bapak Muhammad Awaluddin telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
The complete profile of Mr. Muhammad Awaluddin is detailed in the Company Profile section of this Annual Report.

Raden Suhartono

Wakil Ketua Komite Audit
Vice Chairman of the Audit Committee

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-07/DK/VII/2022
Board of Commissioners Decision Letter. KEP-07/DK/VII/2022

Profil lengkap Bapak Raden Suhartono telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
The complete profile of Mr. Raden Suhartono is detailed in the Company Profile section of this Annual Report.

KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE

Baliya Munadjat

Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-14/DK/XI-2020, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-07/DK/VII/2022 Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-14/DK/XI-2020, as amended by Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-07/DK/VII/2022
Periode Jabatan Term of Office	30 Juli 2020 – Sekarang (2 periode) July 30, 2020 – Present (2 periods)
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Tempat Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Balikpapan, 12 Januari 1977 Balikpapan, January 12, 1977
Usia per 31 Desember 2024 Age as of December 31, 2024	46 tahun 46 years old
Domisili Domicile	Jakarta
Pendidikan Terakhir Last Education	Magister Management Pamulang University (2017)
Riwayat Pekerjaan Employment History	- Dosen Universitas Pamulang (2017 – Sekarang) - Anggota Komite Audit PT PELNI (Persero) (2020 – Sekarang) - Lecturer at Pamulang University (2017 – Present) - Member of the Audit Committee of PT PELNI (Persero) (2020 – Present)

Maman Sulaeman

Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-08/DK/VIII/2024 Board of Commissioners Decision No. KEP-08/DK/VIII/2024
Periode Jabatan Term of Office	1 Agustus 2024 – Sekarang (periode 1) Agustus 1, 2024 – Present (1st period)
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Tempat Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Kuningan, 27 Januari 1979 Kuningan, January 27, 1979
Usia per 31 Desember 2024 Age as of December 31, 2024	45 tahun 45 years old
Domisili Domicile	Depok
Pendidikan Terakhir Last Education	- S2 Magister Ilmu Administrasi - S2 Magister Manajemen Transportasi - S1 Ilmu Komputer - Master Degree of Administration - Master Degree of Transportation Management - Bachelor Degree of Computer Science
Riwayat Pekerjaan Employment History	- Kepala Bagian Akuntansi, Biro Keuangan, Setjen, Kementerian Perhubungan (2023 - Sekarang) - Anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Distrik Navigasi Tanjung Priok (2023 - 2024) - Kepala Sub Bagian Akuntansi Transportasi Laut, Bagian Akuntansi (2018 - 2023) - Head of Accounting Division, Finance Bureau, Secretariat General, Ministry of Transportation (2023 - Present) - Member of the Supervisory Board, Public Service Agency of Tanjung Priok Navigation District (2023 - 2024) - Head of Marine Transportation Accounting Subdivision, Accounting Division (2018 - 2023)

KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE

PEDOMAN KERJA KOMITE AUDIT

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit PT PELNI (Persero) memiliki pedoman kerja sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Komite Audit Nomor: 01/DK/I/2016 yang disahkan tanggal 8 Januari 2016 dan diperbarui tanggal 30 September 2020 dengan Nomor: 96/DK/IX-2020. Piagam Komite Audit mengatur hal-hal mengenai Struktur Komite Audit, Persyaratan Keanggotaan, Tanggung Jawab Komite Audit, Tugas Komite Audit, Wewenang Komite Audit, Rapat Komite Audit, Tanggung Jawab Pelaporan dan Masa Tugas.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dari Komite Audit Perseroan terutama adalah untuk membantu Dewan Komisaris menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

Tugas Komite Audit berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan berpedoman pada Piagam Komite Audit PT PELNI (Persero) sebagai berikut:

1. Menilai efektivitas pelaksanaan Satuan Pengawasan Intern (SPI), yaitu
 - a. Reviu perencanaan audit SPI (Program Kerja Pengawasan Tahunan atau Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) Tahun 2023, termasuk penentuan sample *auditee* berbasis risiko.
 - b. Mereviu/menelaah pelaksanaan audit untuk memastikan bahwa audit SPI telah dilaksanakan sesuai rencana dan supervisi audit telah dilakukan secara memadai untuk menjamin mutu pelaksanaan audit.
 - c. Mereviu pelaporan SPI terutama mengevaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SPI dan secara uji petik menguji Kertas Kerja Pemeriksaannya untuk mendapat keyakinan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan yang disajikan telah didukung dengan bukti-bukti memadai.

AUDIT COMMITTEE WORK GUIDELINES

In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee of PT PELNI (Persero) adheres to the work guidelines as outlined in the Audit Committee Charter Number: 01/DK/I/2016, ratified on January 8, 2016, and updated on September 30, 2020, with Number: 96/DK/IX-2020. The Audit Committee Charter governs matters regarding the Audit Committee Structure, Membership Requirements, Responsibilities of the Audit Committee, Duties of the Audit Committee, Authority of the Audit Committee, Audit Committee Meetings, Reporting Responsibilities, and Term of Office.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

The primary duty of the Company's Audit Committee is to assist the Board of Commissioners in performing its supervisory functions over the Company, with the details as follows:

The duties of the Audit Committee are based on the principles of good corporate governance and guided by the Audit Committee Charter of PT PELNI (Persero) as follows:

1. Assessing the effectiveness of the Internal Audit Unit (SPI) implementation, which includes:
 - a. Reviewing the audit plan of the SPI (Annual Work Supervision Program or Annual Work and Budget Plan) for 2023, including the risk-based determination of audit samples.
 - b. Reviewing/assessing the execution of audits to ensure that SPI audits have been conducted as planned and that audit supervision has been adequately performed to guarantee the quality of the audit execution.
 - c. Reviewing SPI reports, primarily evaluating the Internal Audit Report (LHP) and selectively testing the Working Papers to ensure that the presented Internal Audit Reports are supported by adequate evidence.



KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE

- d. Memonitor tindak lanjut hasil audit untuk kemudian mengambil langkah- langkah yang diperlukan dalam hal audite tidak menindaklanjuti laporan SPI.
 - e. Melakukan komunikasi secara periodik dengan SPI dalam rangka mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang menjadi perhatian Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
2. Menelaah kualitas informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan seperti laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran, dan laporan tahunan serta rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) dan informasi keuangan lainnya.
 3. Menelaah efektivitas sistem pengendalian intern.
 4. Menelaah tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku.
 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris.

Wewenang Komite Audit

1. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Dalam setiap penugasan yang berhubungan dengan permintaan data dan informasi kepada unit selain SPI, dilakukan dengan surat tugas yang ditandatangani Dewan Komisaris.

Kewajiban Komite Audit

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan Komite Audit tersebut, maka kewajibanyang harus dijalankan oleh Komite Audit adalah:

1. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan melalui Dewan Komisaris.

- d. Monitoring the follow-up on audit findings and taking necessary steps in cases where the audit reports are not addressed by the auditee.

- e. Periodically communicating with the SPI to discuss issues of concern to the Board of Commissioners and/or the Audit Committee.

2. Reviewing the quality of financial information presented by the company, such as monthly reports, quarterly reports, semi-annual reports, and annual reports, as well as the company's work plans and budgets (RKAP) and other financial information.
3. Reviewing the effectiveness of the internal control system.
4. Reviewing the company's compliance with applicable laws and regulations.
5. Performing other duties assigned by the Board of Commissioners.

Authority of the Audit Committee

1. To perform its duties, the Audit Committee is authorized to fully, freely, and unrestrictedly access records, employees, resources and funds, and other company assets related to its duties.
2. For any assignment related to requests for data and information from units other than the SPI, it must be carried out with an assignment letter signed by the Board of Commissioners.

Obligations of the Audit Committee

In carrying out the duties and authority of the Audit Committee, the obligations to be fulfilled by the Audit Committee are:

1. Monitoring the Company's activities, providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders on issues deemed important for the Company's management through the Board of Commissioners.

KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE

2. Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya Kinerja Perseroan.
3. Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham

2. Reporting immediately to the General Meeting of Shareholders if there are signs of declining Company performance.
3. Proposing the appointment of a Public Accountant to the General Meeting of Shareholders.

Independensi Komite Audit

Komite Audit melaksanakan fungsi dan tugasnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Piagam Komite Audit, kualifikasi independensi dari anggota Komite Audit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

Independence of the Audit Committee

The Audit Committee performs its functions and duties professionally and independently, without interference from any parties that are inconsistent with the laws and regulations. According to the Audit Committee Charter, the independence qualifications of the Audit Committee members must meet the following criteria:

Kriteria Independensi Komite Audit Independence Criteria of the Audit Committee	Komite Audit PT PELNI (Persero) Audit Committee of PT PELNI (Persero)			
	Muhammad Awaluddin	Raden Suhartono	Baliya Munadjat	Maman Sulaeman
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi. Has no financial relationship with other members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors.	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Anak Perusahaan, maupun Perusahaan Afiliasi. Does not have managerial relationships within the Company, its Subsidiaries, or Affiliated Companies.	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Does not hold shares, either directly or indirectly, in the Company.	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Does not have business relationships, either directly or indirectly, related to the Company's business activities.	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah. Does not serve as an official in political parties, or as a government or public official.	✓	✓	✓	✓

Program Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Selama tahun 2024, bagi anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan, program pengembangan kompetensi yang diikuti selama tahun 2024 telah tercantum dalam Bab Tata Kelola Perusahaan bagian Dewan Komisaris. Sedangkan, anggota Komite Audit dari eksternal Perseroan tidak mengikuti program pengembangan kompetensi.

Audit Committee Competency Development Program

Throughout 2024, for members of the Audit Committee who are also members of the Company's Board of Commissioners, the competency development programs attended throughout 2024 are listed in the Corporate Governance section of the Board of Commissioners. However, external members of the Company's Audit Committee did not participate in the competency development program.

Rapat Komite Audit

Kebijakan Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.

Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak Manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir. Komite Audit mengadakan rapat koordinasi dengan SPI sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Penyelenggaraan Rapat Komite Audit Tahun 2024

Selama tahun 2024, Komite Audit telah menyelenggarakan rapat internal sebanyak 22 (dua puluh dua) kali. Selain itu, Komite Audit juga mengikuti Rapat Dewan Komisaris dan Organ di Bawah Dewan Komisaris serta Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi. Berikut ini merupakan frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Audit dalam seluruh rapat yang diselenggarakan oleh internal Komite Audit maupun yang diikuti selama tahun 2024:

Audit Committee Meetings

Audit Committee Meeting Policy

The Audit Committee holds meetings at least as frequently as the minimum number of Board of Commissioners meetings stipulated in the Company's Articles of Association. The Audit Committee meetings are chaired by the Chairman of the Audit Committee or the most senior member of the Audit Committee if the Chairman is unable to attend.

If deemed necessary, the Audit Committee may invite members of Management related to the meeting material to attend the Audit Committee meetings. Each Audit Committee meeting is documented in minutes of the meeting, which are signed by all Audit Committee members present. The Audit Committee holds coordination meetings with the Internal Audit Unit (SPI) at least once every three months.

Conduct of Audit Committee Meetings in 2024

Throughout 2024, the Audit Committee held internal meetings a total of 22 (twenty two) times. In addition, the Audit Committee also attended meetings of the Board of Commissioners and its Subsidiary Bodies, as well as Joint Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors. The following is the frequency and attendance rate of each Audit Committee member in all meetings organized by the internal Audit Committee and those attended throughout 2024:

KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Internal Komite Audit Internal Audit Committee Meeting			Rapat Dewan Komisaris dan Organ di Bawah Dewan Komisaris Board of Commissioners and Subordinate Bodies Meetings			Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi Joint Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Muhammad Awaluddin	Ketua Komite Audit Chairman of the Audit Committee	22	22	100%	22	22	100%	22	22	100%
Raden Suhartono	Wakil Ketua Komite Audit Vice Chairman of the Audit Committee	22	22	100%	22	22	100%	22	22	100%
Baliya Munadjat	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	22	22	100%	22	22	100%	22	22	100%
Maman Sulaeman	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	22	22	100%	22	22	100%	22	22	100%

Adapun agenda rapat internal Komite Audit diuraikan pada tabel berikut ini:

The agenda of the internal Audit Committee meetings is outlined in the following table:

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agendas
26 Januari 2024 January 26, 2024	Pembahasan Laporan Manajemen s.d. Desember Tahun 2023 Discussion on Management Report up to December 2023
26 Januari 2024 January 26, 2024	Pembahasan Persetujuan Kajian Pengajuan PMN dari Cadangan Investasi Discussion on Approval of PMN Submission Study from Investment Reserves
28 Januari 2024 January 28, 2024	Rapat Komdit dengan SPI TW IV 2023 Committee Meeting with Internal Audit - Q4 2023
21 Februari 2024 February 21, 2024	Pembahasan Laporan Manajemen s.d. Januari 2024 Discussion on Management Report up to January 2024
22 Maret 2024 March 22, 2024	Rapat Internal Komite Audit- Pembahasan Laporan Manajemen s.d. Februari Internal Audit Committee Meeting - Discussion on Management Report up to February
24 Maret 2024 March 24, 2024	Rapat Komite Audit dengan VP UAB- Redpack & Overbagasi Audit Committee Meeting with VP UAB - Redpack & Excess Baggage
20 April 2024 April 20, 2024	Pembahasan Laporan Manajemen s.d. Maret Tahun 2024 Discussion on Management Report up to March 2024
8 Mei 2024 May 8, 2024	Rapat Komite Audit dengan SPI Lap. Kinerja SPI TW I Th 2024 Audit Committee Meeting with Internal Audit - Q1 2024 Performance Report



KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agendas
16 Mei 2024 May 16, 2024	Pembahasan Persetujuan Penghapusbukuan KM Caraka Niaga III-22 Discussion on Write-Off Approval for KM Caraka Niaga III-22
20 Mei 2024 May 20, 2024	Pembahasan Laporan Manajemen s.d. April Tahun 2024 Discussion on Management Report up to April 2024
22 Juni 2024 June 22, 2024	Pembahasan Laporan Manajemen s.d. Mei Tahun 2024 Discussion on Management Report up to May 2024
18 Juli 2024 July 18, 2024	Pembahasan Laporan Manajemen s.d. Juni Tahun 2024 Discussion on Management Report up to June 2024
13 Agustus 2024 August 13, 2024	Pembahasan Hasil Assessment GCG Tahun 2023 PT PELNI Komite Audit Discussion on GCG Assessment Results 2023 – PT PELNI Audit Committee
24 Agustus 2024 August 24, 2024	Pembahasan Laporan Manajemen s.d. Juli Tahun 2024 Discussion on Management Report up to July 2024
20 September 2024 September 20, 2024	Pembahasan Laporan Manajemen s.d. Agustus Tahun 2024 Discussion on Management Report up to August 2024
30 September 2024 September 20, 2024	ND-MS-Realisasi Kinerja SPITWII ND-MS – Q2 Internal Audit Performance Realization
15 Oktober 2024 October 15, 2024	Pembahasan Pengadaan 5 Set Kapal Tugboat dan Tongkang Discussion on Procurement of 5 Tugboat and Barge Sets
21 Oktober 2024 October 21, 2024	Pembahasan Laporan Manajemen sd September Tahun 2024 Discussion on Management Report up to September 2024
5 November 2024 November 5, 2024	Pembahasan Permohonan Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusbukuan Reefer Container Milik PT PELNI (Persero) Discussion on Request for Approval of Transfer and Write-Off of Reefer Containers Owned by PT PELNI (Persero)
18 November 2024 November 18, 2024	Pembahasan Laporan Manajemen s.d. Oktober Discussion on Management Report up to October
15 Desember 2024 December 15, 2024	Pembahasan Laporan Manajemen s.d. November Discussion on Management Report up to November
15 Desember 2024 December 15, 2024	Laporan Kinerja SPITWIII Q3 Internal Audit Performance Report

Sedangkan agenda rapat Dewan Komisaris dengan Organ di Bawah Dewan Komisaris serta Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi yang dihadiri oleh Komite Audit telah diuraikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan ini.

Laporan Pelaksanaan Kinerja Komite Audit

Pada tahun 2024, Komite Audit PT PELNI (Persero) telah merealisasikan program dan kegiatan kerja, sebagai berikut:

- Komite Audit telah melakukan evaluasi/reviu atas Laporan Keuangan (Laporan Manajemen) bulan Januari s.d. Desember 2024.

Meanwhile, the agenda of the Board of Commissioners' meetings with the Organs under the Board of Commissioners and Joint Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors attended by the Audit Committee has been outlined in the Corporate Governance Chapter of this Report.

Audit Committee Performance Report

In 2024, the Audit Committee of PT PELNI (Persero) has realized the following programs and work activities:

- The Audit Committee has conducted an evaluation/ review of the Financial Reports (Management Reports) for the period of January to December 2024.



KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE

2. Melakukan koordinasi rutin dengan SPI serta melakukan reviu atas laporan kinerja SPI sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024.
3. Komite Audit sesuai surat Nomor 37/K.Audit/V-2023 tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan KAP sebagai Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian dan PUMK tahun 2023 memberikan persetujuan KAP Djoko, Sidik & Indra sebagai KAP yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.
4. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, Komite Audit selain melaksanakan tugas sesuai program kerja juga melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Dewan Komisaris yaitu kunjungan kerja lapangan dan workshop keselamatan kapal. Kunjungan kerja Komisaris PT. Pelni (Persero) ke lapangan dalam rangka monitoring kegiatan pelayanan PT. Pelni (Persero) merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan serta penasehatan Dewan Komisaris.
2. Regular coordination has been carried out with the Internal Audit Unit (SPI), including a review of SPI's performance reports up to the fourth quarter of 2024.
3. In accordance with Letter No. 37/K.Audit/V-2023 dated May 29, 2023, regarding the appointment of a Public Accounting Firm (PAF) for the audit of the Consolidated Financial Statements and the Smallholder Business Credit Program (PUMK) for the 2023 fiscal year, the Audit Committee approved the appointment of KAP Djoko, Sidik & Indra as the auditor of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)'s Consolidated Financial Statements and Partnership and Community Development Program Financial Statements for the year ending December 31, 2023.
4. Up to the fourth quarter of 2024, in addition to implementing its work program, the Audit Committee has also carried out other duties assigned by the Board of Commissioners, including field visits and ship safety workshops. The site visits by the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) were conducted as part of the monitoring of service operations and form an integral part of the Board's supervisory and advisory functions.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan salah satu organ pendukung Komisaris yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris memenuhi tanggung jawabnya dalam melaksanakan fungsi nominasi dan fungsi remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris dengan mengacu pada Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor:

The Nomination and Remuneration Committee is one of the supporting organs of the Commissioners, established based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. The Company's Nomination and Remuneration Committee was formed to assist the Board of Commissioners in fulfilling their responsibilities in carrying out the nomination and remuneration functions for the Board of Directors and the Board of Commissioners, referring to the Letter of



S254/MBU/04/2020 tanggal 17 April 2020 perihal *Talent & Succession Management* Direksi BUMN.

Adapun dasar pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP- 02/DK/IV-2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi pada Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

KOMPOSISI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) Nomor KEP-10/DK/VIII/2024 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pelayaran Indonesia (Indonesia) i, susunan Komite Nominasi dan Remunerasi PT PELNI (Persero) adalah sebagai berikut:

the Minister of State-Owned Enterprises Number: S-254/MBU/04/2020 dated April 17, 2020, regarding Talent & Succession Management of SOEs Directors.

The basis for the establishment of the Nomination and Remuneration Committee is outlined in the Decree of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP-02/DK/IV-2020 dated April 20, 2020, concerning the Establishment of the Nomination and Remuneration Committee in the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

COMPOSITION OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) Number: KEP-10/DK/VIII/2024, concerning the Appointment of the Membership Structure of the Nomination and Remuneration Committee of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), the composition of the Nomination and Remuneration Committee of PT PELNI (Persero) is as follows:

Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2024

Composition of the Nomination and Remuneration Committee in 2024

Nama Name	Jabatan Position	Posisi di Perusahaan Position in the Company	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Kristia Budiarto	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Chairman of the Nomination and Remuneration Committee	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-10/DK/VIII/2024 Board of Commissioners' Decision Letter No. KEP-10/DK/VIII/2024	9 Agustus 2024 - Sekarang (periode 1) August 9, 2024 - Present (First Period)
Faturohman	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Member of the Nomination and Remuneration Committee	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-07/DK/VII/2022 Board of Commissioners' Decision Letter No. KEP-07/DK/VII/2022	29 Juli 2022-sekarang (periode 1) July 29, 2022 -present (First Period)
Murdiyoto	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Member of the Nomination and Remuneration Committee	Pihak Eksternal External Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-10/DK/VIII/2024 Board of Commissioners' Decision Letter No. KEP-10/DK/VIII/2024	9 Agustus 2024 - Sekarang (periode 1) August 9, 2024 - Present (First Period)



KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee Profile

Kristia Budiarto

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-10/DK/VIII/2024
Board of Commissioners' Decision Letter No. KEP-10/DK/VIII/2024

Profil lengkap Bapak Ali Masykur Musa telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
The complete profile of Mr. Ali Masykur Musa is detailed in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Faturohman

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination and Remuneration Committee

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-07/DK/VII/2022
Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-07/DK/VII/2022

Profil lengkap Bapak Faturohman telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
The complete profile of Mr. Faturohman is detailed in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Murdiyoto

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination and Remuneration Committee

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-10/DK/VIII/2024
Board of Commissioners' Decision Letter No. KEP-10/DK/VIII/2024

Periode Jabatan Term of Office

9 Agustus 2024 - Sekarang (periode 1)
August 9, 2024 - Present (First Period)

Kewarganegaraan Citizenship

Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Tempat Tanggal Lahir Place and Date of Birth

Jakarta, 21 Maret 1966
Jakarta, March 21, 1966

Usia per 31 Desember 2024 Age as of December 31, 2024

Jakarta

Domisili Domicile

- Magister Manajemen Universitas Artha Bodhi Iswara Surabaya (2014)
- Sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (1999)
- Master of Management, Artha Bodhi Iswara University, Surabaya (2014)
- Bachelor's Degree, Merchant Marine Academy (Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran) (1999)

Pendidikan Terakhir Last Education

- Direktur Operasi PT PBM SBN (2013 - Sekarang)
- Komisaris PT Sarana Bandar Indo Trading (2018 - 2022)
- Kepala Cabang Surabaya PT PELNI (Persero) (2012 - 2013)
- Director of Operations, PT PBM SBN (2013 - Present)
- Commissioner, PT Sarana Bandar Indo Trading (2018 - 2022)
- Surabaya Branch Head, PT PELNI (Persero) (2012 - 2013)

Riwayat Pekerjaan Employment History

1. Dosen Universitas Pamulang (2017 - Sekarang)
2. Anggota Komite Audit PT PELNI (Persero) (2020 - Sekarang)
1. Lecturer at Pamulang University (2017 - Present)
2. Member of the Audit Committee of PT PELNI (Persero) (2020 - Present)



KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan pribadi yang profesional, berpengalaman, dan tidak memiliki hubungan bisnis baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, hal ini untuk menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.

Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, pengalaman dan integritas yang dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku. Berikut adalah tabel pengungkapan independensi dari Komite Nominasi dan Remunerasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024:

Independence of the Nomination and Remuneration Committee

All members of the Nomination and Remuneration Committee are professionals with experience who do not have direct or indirect business relationships related to the Company's business activities. This is to maintain independence in carrying out their duties and responsibilities as committee members.

The Nomination and Remuneration Committee has met the criteria for independence, expertise, experience, and integrity as required by applicable regulations. The following table discloses the independence of the Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2024:

Kriteria Independensi Criteria of Independence	Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee		
	Kristia Budyarto	Faturohman	Murdiyoto
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi. Does not have financial relationships with fellow members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, dengan anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi. Does not have familial relationships through marriage and descent up to the second degree, either horizontally or vertically, with members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Anak Perusahaan, maupun Perusahaan Afiliasi. Does not have managerial relationships in the Company, its Subsidiaries, or Affiliate Companies.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Does not hold shares, either directly or indirectly, in the Company.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Does not have business relationships, either directly or indirectly, related to the Company's business activities.	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah. Does not hold positions as political party officials, government officials, or public officials.	✓	✓	✓

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Program Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Selama tahun 2024, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan, program pengembangan kompetensi yang diikuti selama tahun 2024 telah tercantum pada bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Sedangkan bagi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dari eksternal Perseroan tidak mengikuti program pengembangan kompetensi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Mengacu pada tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT PELNI (Persero) Nomor 5/DK/IV-2021 tanggal 22 April 2021 adalah sebagai berikut:

1. Menilai efektivitas pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu:
 - a. Mereviu perencanaan SDM terutama dengan cara:
 - 1) Mengevaluasi Program Kerja pengelolaan SDM.
 - 2) Mengevaluasi Kebijakan Manajemen terkait Pengelolaan SDM.
 - 3) Memberikan saran dan rekomendasi terkait Perencanaan SDM.
 - b. Mereviu pelaksanaan pengelolaan SDM yang dilakukan Divisi SDM untuk memastikan bahwa pengelolaan SDM telah dilaksanakan sesuai rencana yang disepakati.
 - c. Memonitor dan menilai tindak lanjut hasil pengelolaan SDM. untuk kemudian mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal pengelolaan SDM yang lebih baik.
 - d. Melakukan komunikasi secara periodik dengan Divisi SDM dalam rangka mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang menjadi perhatian Komite Nominasi dan Remunerasi

Competency Development Program for the Nomination and Remuneration Committee

Throughout 2024, the competency development programs attended by members of the Nomination and Remuneration Committee who are also members of the Company's Board of Commissioners have been detailed in the Corporate Governance chapter of this Annual Report. However, external members of the Nomination and Remuneration Committee did not participate in any competency development programs.

Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee

Referring to the duties and responsibilities as stipulated in the Charter of the Nomination and Remuneration Committee of PT PELNI (Persero) Number 5/DK/IV-2021 dated April 22, 2021, they are as follows:

1. Assessing the effectiveness of Human Resources (HR) management, which includes:
 - a. Reviewing HR planning, particularly by:
 - 1) Evaluating the HR management work program.
 - 2) Evaluating management policies related to HR management.
 - 3) Providing suggestions and recommendations related to HR planning.
 - b. Reviewing the implementation of HR management carried out by the HR Division to ensure that HR management has been executed according to the agreed plan.
 - c. Monitoring and evaluating the follow-up results of HR management to then take necessary steps for better HR management.
 - d. Conducting periodic communication with the HR Division to discuss issues of concern to the Nomination and Remuneration Committee.



KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

2. Menelaah efektivitas pengelolaan SDM.
3. Menelaah tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan komisaris.

Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Dalam setiap penugasan yang berhubungan dengan permintaan data dan informasi kepada unit/divisi selain SDM dengan surat tugas yang ditandatangani Komisaris.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT PELNI (Persero) Nomor 5/DK/IV-2021 tanggal 22 April 2021.

Kebijakan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki kebijakan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki yang tercantum dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT PELNI (Persero) Nomor 5/DK/IV-2021 tanggal 22 April 2021.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Selama tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan rapat internal sebanyak 12 (dua belas) kali. Selain itu, Komite Nominasi dan Remunerasi juga mengikuti Rapat Dewan Komisaris dan Organ di Bawah Dewan Komisaris serta Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi. Berikut ini merupakan frekuensi dan tingkat kehadiran masing-

2. Reviewing the effectiveness of HR management.
3. Reviewing the company's compliance with applicable laws and regulations.
4. Performing other duties assigned by the commissioners.

Authority of the Nomination and Remuneration Committee

1. To carry out its duties, the Nomination and Remuneration Committee has the authority to fully, freely, and unrestrictedly access records, employees, resources and funds, and other company assets related to its duties.
2. For any assignment related to requests for data and information from units/divisions other than HR, an assignment letter signed by the commissioners is required.

Charter of the Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee has the Charter of the Nomination and Remuneration Committee of PT PELNI (Persero) Number 5/DK/IV-2021 dated April 22, 2021.

Meeting Policy of the Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee's meeting policy is stipulated in the Charter of the Nomination and Remuneration Committee of PT PELNI (Persero) Number 5/DK/IV-2021 dated April 22, 2021.

Meetings of the Nomination and Remuneration Committee

Throughout 2024, the Nomination and Remuneration Committee held 12 (twelve) internal meetings. Additionally, the Nomination and Remuneration Committee also attended Board of Commissioners meetings and meetings with the Organs under the Board of Commissioners as well as Joint Meetings between the Board of Commissioners and the Board of

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam seluruh rapat yang diselenggarakan oleh internal Komite Nominasi dan Remunerasi maupun yang diikuti selama tahun 2024:

Directors. The following table shows the frequency and attendance rate of each Nomination and Remuneration Committee member in all meetings held internally by the Nomination and Remuneration Committee and those attended throughout 2024:

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Internal Komite Nominasi dan Remunerasi Internal Meeting of the Nomination and Remuneration Committee			Rapat Dewan Komisaris dan Organ di Bawah Dewan Komisaris Board of Commissioners and Subordinate Bodies Meetings			Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi Joint Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Kristia Budiarto	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Chairman of the Nomination and Remuneration Committee	11	11	100%	12	12	100%	12	12	100%
Faturuhman	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Member of the Nomination and Remuneration Committee	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%
Murdiyoto	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Member of the Nomination and Remuneration Committee	12	12	100%	12	12	100%	12	11	92%

Adapun agenda rapat internal Komite Nominasi dan Remunerasi diuraikan pada tabel berikut ini:

The agenda of the internal meetings of the Nomination and Remuneration Committee is outlined in the following table:

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agendas
19 Februari 2024 February 19, 2024	Pengisian Jabatan Baru (SVP) dan Penyesuaian dan Pengisian Jabatan Kosong sesuai Nomenklatur Baru PT PELNI (Persero) Filling of New Positions (SVP) and Adjustment and Filling of Vacant Positions According to the New Nomenclature of PT PELNI (Persero)
18 Maret 2024 March 18, 2024	1. Pengelolaan Absensi Pegawai PT PELNI (Persero) 2. Penyelesaian Pegawai P2 yang menjadi PUK 3. Evaluasi Kerjasama dengan AL tentang Pengaman di atas Kapal dan Cabang 4. Pengisian Jabatan di Kantor Pusat dan Kantor Cabang 1. Employee Attendance Management at PT PELNI (Persero) 2. Resolution of P2 Employees who have become PUK 3. Evaluation of Cooperation with the Navy regarding Security on Board and at Branch Offices 4. Filling of Positions at the Head Office and Branch Offices



KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agendas
24 April 2024 April 24, 2024	Tindak Lanjut <i>Crewwing</i> dan Remunerasi Pegawai PT. Pelni (Persero) Follow-up on <i>Crewwing</i> and Employee Remuneration of PT. Pelni (Persero)
22 Mei 2024 May 22, 2024	1. Pengelolaan Aset (Darat, Di Atas Kapal, Kantor Pusat, Cabang, dan Anak Cabang) 2. Pengelolaan dana pensiun, BPJS Kesehatan, dan tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada karyawan PT PELNI (Persero)
30 Mei 2024 May 30, 2024	Mengenai Usulan Penyesuaian Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelni (Persero) Regarding the Proposal for Adjustment of the Income of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelni (Persero)
24 Juni 2024 June 24, 2024	Program Strategis SDM dari Januari 2024 sampai Mei 2024 Strategic HR Programs from January 2024 to May 2024
23 Juli 2024 July 23, 2024	1. Jaspro Nahkoda dan Crew Kapal periode Tahun 2023 2. <i>Terminal Point</i> PT PELNI (Persero) di seluruh cabang se-Indonesia
20 Agustus 2024 August 20, 2024	1. Pendalaman pada aspek Tata Kelola SDM Kapal 2. Progress pengolahan IT Triwulan
20 September 2024 September 20, 2024	Pengelolaan SDM pada Anak dan Cucu Perusahaan PT PELNI (Persero) Human Resource Management in PT PELNI (Persero)'s Subsidiaries and Sub-Subsidiaries
22 Oktober 2024 October 22, 2024	1. Pengelolaan SDM <i>Terminal Point</i> 2. Jam kerja karyawan Pusat dan Cabang
20 November 2024 November 20, 2024	1. Remunerasi Perawat Kapal dan Pola Karir Krani Kapal 2. Progres Seragam Pegawai Pusat, Cabang, ABK Kapal dan Anak Perusahaan setelah ganti Logo 2023 3. Distribusi APD untuk Karyawan Kapal
18 Desember 2024 December 20, 2024	1. Progres Pengangkatan Pegawai Organik Eks PKWT/PKL Kapal 2. Temuan Marine Inspektur atas Perjanjian Kerja Laut security dan perlunya TOT 6.09 bagi Perwira kapal

Sedangkan agenda rapat Dewan Komisaris dan Organ di Bawah Dewan Komisaris serta Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi telah diuraikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan ini.

Meanwhile, the agenda of the Board of Commissioners' meetings and the Organs under the Board of Commissioners, as well as the Joint Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors, has been outlined in the Corporate Governance Chapter of this Report.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Laporan Pelaksanaan Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Pada tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi PT PELNI (Persero) telah merealisasikan program dan kegiatan kerja, sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja/Program Kerja.
2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dengan Manajemen.
3. Rapat Internal Komite Nominasi dan Remunerasi.
4. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dengan Dewan Komisaris.

Nomination and Remuneration Committee Performance Report

In 2024, the Nomination and Remuneration Committee of PT PELNI (Persero) has realized the following programs and work activities:

1. Preparation of Work Plans/Work Programs.
2. Nomination and Remuneration Committee meetings with Management.
3. Internal meetings of the Nomination and Remuneration Committee.
4. Nomination and Remuneration Committee meetings with the Board of Commissioners.

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

Komite Pemantau Manajemen Risiko merupakan salah satu organ pendukung Komisaris yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Komite Pemantau Manajemen Risiko Perseroan dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris memenuhi tanggung jawabnya dalam melaksanakan kewajiban pemantauan, pengawasan dan penilaian atas efektivitas manajemen risiko yang mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-5/MBU/09/2022 Tentang Penerapan Manajemen Risiko pada BUMN.

The Risk Management Monitoring Committee is one of the supporting organs of the Commissioners, established based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. The Company's Risk Management Monitoring Committee was formed to assist the Board of Commissioners in fulfilling their responsibilities in monitoring, supervising, and assessing the effectiveness of risk management, referring to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-5/MBU/09/2022 concerning the Implementation of Risk Management in State-Owned Enterprises.

Komposisi Komite Pemantau Manajemen Risiko

Organisasi Komite Pemantau Manajemen Risiko saat ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor : Kep-04/DK/XI/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang pemberhentian dan

Composition of the Risk Management Monitoring Committee

The current organization of the Risk Management Monitoring Committee was formed based on the Decree of the Board of Commissioners Number: Kep-04/DK/XI/2017 dated December 4, 2017, concerning



KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko. Adapun susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko berdasarkan keputusan tersebut adalah sebagai berikut:

the dismissal and appointment of Members of the Risk Management Monitoring Committee. The composition of the Risk Management Monitoring Committee based on these decisions is as follows:

Komposisi Komite Pemantau Manajemen Risiko

Composition of the Risk Management Monitoring Committee

Nama Name	Jabatan Position	Posisi di Perusahaan Role in the Company	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Eddy Susanto Supadmo	Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko Chairman of the Risk Management Monitoring Committee	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-05/DK/II/2024 Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-05/DK/II/2024	15 Februari 2024 - Sekarang (1 periode) November 3, 2020 - Present (First period)
Budi Mantoro	Wakil Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko Vice Chairman of the Risk Management Monitoring Committee	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-05/DK/II/2024 Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-05/DK/II/2024	15 Februari 2024 - Sekarang (1 periode) November 3, 2020 - Present (First period)
Mahrudhin Harahap	Anggota Manajemen Risiko Member of Risk Management	Pihak Eksternal External Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-1/DK/IV/2023 Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-1/DK/IV/2023	18 April 2023- Sekarang (1 periode) April 18, 2023 - Present (First period)
Reza Hertantyo	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Member of the Risk Management Monitoring Committee	Pihak Eksternal External Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-09/DK/VIII/2024 Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-09/DK/VIII/2022	1 Agustus 2024 - Sekarang (1 periode) August 1, 2024 - Present (First period)

Profil Komite Pemantau Manajemen Risiko

Risk Management Oversight Committee Profile

Eddy Susanto Soepadmo

Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko
Chairman of the Risk Management Oversight Committee

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-15/DK/XI-2020, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-07/DK/VII/2022
Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-15/DK/XI-2020, as amended by Decision of the Board of Commissioners No. KEP-07/DK/VII/2022

Profil lengkap Bapak Eddy Susanto Soepadmo telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
The complete profile of Mr. Eddy Susanto Soepadmo has been outlined in the Company Profile chapter of this Annual Report.



KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

Budi Mantoro

Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko
Member of the Risk Management Oversight Committee

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-15/DK/XI-2020, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-07/DK/VII/2022
Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-15/DK/XI-2020, as amended by the Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-07/DK/VII/2022

Profil lengkap Bapak Kristia Budiarto telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
The complete profile of Mr. Kristia Budiarto has been outlined in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Mahrudin Harahap

Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko
Member of the Risk Management Oversight Committee

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Kep-1/DK/XI-2020, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-01/DK/IV/2023
Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-1/DK/XI-2020, as amended by the Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-01/DK/XI/2023

Periode Jabatan Term of Office

18 April 2023 - Sekarang
April 18, 2023 - Present

Kewarganegaraan Citizenship

Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Tempat Tanggal Lahir Place and Date of Birth

Lubuk Pakam, Sumatera Utara 14 Oktober 1981
Lubuk Pakam, North Sumatera October, 14 1981

Usia per 31 Desember 2024 Age as of December 31, 2024

44 tahun
44 years old

Domisili Domicile

Depok

Pendidikan Terakhir Last Education

- Diploma III Sekolah Tinggi Akuntansi Negara/STAN Jakarta
- Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Magister Bisnis Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor
- Diploma III: State College of Accountancy (STAN), Jakarta
- Extension Program: Faculty of Economics, University of Indonesia
- Master of Business: Business School, Bogor Agricultural Institute (IPB)

Riwayat Pekerjaan Employment History

- Staf Bagian Perencanaan Sekretariat Kementerian BUMN (Oktober 2010 - September 2013)
- Pemeriksa Anggaran Inspektorat Kementerian BUMN (Oktober 2013 - Desember 2017)
- Auditor Muda Kementerian BUMN (Januari 2018 - sekarang)
- Staff of the Planning Section, Secretariat of the Ministry of State-Owned Enterprises (October 2010 - September 2013)
- Budget Examiner, Inspectorate of the Ministry of State-Owned Enterprises (October 2013 - December 2017)
- Junior Auditor, Ministry of State-Owned Enterprises (January 2018 - present)



KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

Reza Hertantyo

Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko
Member of the Risk Management Oversight Committee

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-09/ DK/VIII/2024 Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-09/DK/VIII/2022
Periode Jabatan Term of Office	1 Agustus 2024 - Sekarang (1 periode) August 1, 2024 - Present (First period)
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Tempat Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Semarang, 9 Juli 1981 Semarang, July 9, 1981
Usia per 31 Desember 2024 Age as of December 31, 2024	43 tahun 43 years old
Domisili Domicile	Jakarta
Pendidikan Terakhir Last Education	• Magister Manajemen (2016) • Sarjana Hukum Universitas Trisakti (2004) • Master Degree of Management (2016) • Bachelor Degree of Law form Trisakti University (2004)
Riwayat Pekerjaan Employment History	• Kepala Bagian Karier Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan (2022 - Sekarang) • Kepala Bagian Mutasi, Kesejahteraan, dan Disiplin Pegawai (2022) • Kepala Bagian Kepegawaian Setditjen Hubla (2019 - 2022) • Kepala Bagian Tata Usaha (2019) • Kepala Sub-bagian Data dan Formasi Pegawai (2014 - 2019) • Kepala Sub-bagian Transportasi Darat, Laut dan Udara (2013 - 2014) • Kepala Sub-bagian Organisasi Transportasi Udara (2011 - 2013) • Head of Human Resources Career Division, Ministry of Transportation (2022 - Present) • Head of Employee Transfer, Welfare, and Discipline Division (2022) • Head of Personnel Division, Directorate General of Sea Transportation Secretariat (2019 - 2022) • Head of General Affairs Division (2019) • Head of Employee Data and Staffing Subdivision (2014 - 2019) • Head of Land, Sea, and Air Transportation Subdivision (2013 - 2014) • Head of Air Transportation Organization Subdivision (2011 - 2013)

Independensi Komite Pemantau Manajemen Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko merupakan pribadi yang profesional, berpengalaman, dan tidak memiliki hubungan bisnis baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, hal ini untuk menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.

Komite Pemantau Manajemen Risiko telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, pengalaman dan integritas yang dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku. Berikut adalah tabel pengungkapan Independensi dari Komite Pemantau Manajemen Risiko sampai dengan tanggal 31 Desember 2024:

Independence of the Risk Management Monitoring Committee

All members of the Risk Management Monitoring Committee are professionals with experience who do not have direct or indirect business relationships related to the Company's business activities. This is to maintain independence in carrying out their duties and responsibilities as committee members.

The Risk Management Monitoring Committee has met the criteria for independence, expertise, experience, and integrity as required by applicable regulations. The following table discloses the independence of the Risk Management Monitoring Committee as of December 31, 2024:

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

Kriteria Independensi Independence Criteria	Komite Pemantau Manajemen Risiko PT PELNI (Persero) Risk Management Monitoring Committee			
	Kristia Budyarto	Budi Mantoro	Mahrudin Harahap**	Reza Hertantyo
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi. Does not have financial relationships with fellow members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors.	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, dengan anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi. Does not have family relationships through marriage or descent up to the second degree, either horizontally or vertically, with members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors.	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Anak Perusahaan, maupun Perusahaan Afiliasi. Does not hold management positions in the Company, Subsidiaries, or Affiliated Companies.	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Does not own shares directly or indirectly in the Company.	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Does not have business relationships, either directly or indirectly, related to the Company's business activities.	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah. Does not serve as a political party official, public official, or government official.	✓	✓	✓	✓

Program Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Manajemen Risiko

Selama tahun 2024, anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko yang merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan, program pengembangan kompetensi yang diikuti selama tahun 2024 telah tercantum pada bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Sedangkan bagi anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dari eksternal Perseroan tidak mengikuti program pengembangan kompetensi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Manajemen Risiko

Komite Pemantau Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab yang tercantum pada Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP-04/DK/VIII/2017 tanggal 4 Desember 2017, dengan uraian sebagai berikut:

Competency Development Program for the Risk Management Monitoring Committee

Throughout 2024, the competency development programs attended by members of the Risk Management Monitoring Committee who are also members of the Company's Board of Commissioners have been detailed in the Corporate Governance chapter of this Annual Report. Meanwhile, external members of the Risk Management Monitoring Committee did not participate in any competency development programs.

Duties and Responsibilities of the Risk Management Monitoring Committee

The Risk Management Monitoring Committee has duties and responsibilities as stipulated in the Decree of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP-04/DK/VIII/2017 dated December 4, 2017, with the following details:

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

1. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai penyusunan dan perbaikan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko semua bidang Perusahaan sebelum mendapat persetujuan Dewan Komisaris;
2. Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan manajemen risiko, jika diperlukan;
3. Mempelajari, mengkaji ulang kebijakan dan peraturan-peraturan tentang kebijakan manajemen risiko yang dibuat oleh Direksi;
4. Melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kebijakan manajemen risiko beserta pedoman pelaksanaannya serta semua perubahan serta penyesuaian kebijakan manajemen risiko tersebut;
5. Melakukan evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko; dan
6. Menyampaikan masukan kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang mendapat perhatian dan yang perlu dibicarakan dengan Direksi, agar melakukan tidak lanjut dari hasil evaluasi manajemen risiko oleh Komite.

Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko

Komite Pemantau Manajemen Risiko memiliki Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko yaitu 114/KPMR/XII-2023.

Kebijakan Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko

Kebijakan rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko tercantum dalam 114/KPMR/XII-2023.

Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko

Selama tahun 2024, Komite Pemantau Manajemen Risiko telah menyelenggarakan rapat internal sebanyak 12 (dua belas) kali. Selain itu, Komite Pemantau Manajemen Risiko juga mengikuti Rapat Dewan Komisaris dan Organ di Bawah Dewan Komisaris serta Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi.

1. Provide input to the Board of Commissioners regarding the formulation and improvement of risk management related to risk control in all areas of the Company before obtaining the approval of the Board of Commissioners;
2. Engage in discussions with the Board of Directors or relevant work units concerning risk management, if necessary;
3. Study and review the policies and regulations regarding risk management policies formulated by the Board of Directors;
4. Conduct periodic reviews of risk management policies and their implementation guidelines, as well as all changes and adjustments to these risk management policies;
5. Evaluate the accuracy of the models and the validity of the data used to measure risk; and
6. Provide input to the Board of Commissioners on matters requiring attention and discussion with the Board of Directors to take follow-up actions based on the risk management evaluation results by the Committee.

Charter of the Risk Management Monitoring Committee

The Risk Management Monitoring Committee has a Charter, numbered 114/KPMR/XII-2023.

Meeting Policy of the Risk Management Monitoring Committee

The meeting policy of the Risk Management Monitoring Committee is outlined in 114/KPMR/XII-2023.

Meetings of the Risk Management Monitoring Committee

Throughout 2024, the Risk Management Monitoring Committee held 12 (twelve) internal meetings. Additionally, the Risk Management Monitoring Committee also attended Board of Commissioners meetings and meetings with the Organs under the Board of Commissioners, as well as Joint Meetings

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

Berikut ini merupakan frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dalam seluruh rapat yang diselenggarakan oleh internal Komite Pemantau Manajemen Risiko maupun yang diikuti selama tahun 2024:

between the Board of Commissioners and the Board of Directors. The following table shows the frequency and attendance rate of each Risk Management Monitoring Committee member in all internal meetings of the Risk Management Monitoring Committee and those attended throughout 2024:

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Internal Pemantau Manajemen Risiko Internal Risk Management Monitoring Committee Meeting			Rapat Dewan Komisaris dan Organ di Bawah Dewan Komisaris Board of Commissioners and Subordinate Bodies Meetings			Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi Joint Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Eddy Susanto Supadmo	Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko Chairman of the Risk Management Monitoring Committee	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%
Budi Mantoro	Wakil Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko Deputy Chairman of the Risk Management Monitoring Committee	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%
Mahrudin Harahap	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Member of the Risk Management Monitoring Committee	12	12	100%	12	12	100%	12	12	92%
Reza Hertantyo	Anggota Pemantau Manajemen Risiko Member of the Risk Management Monitoring Committee	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%
Sukirno Dwi Susilo	Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Member of the Risk Management Monitoring Committee	8	8	100%	8	8	100%	8	8	100%

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

Adapun agenda rapat internal Komite Pemantau Manajemen Risiko diuraikan pada tabel berikut ini:

The agenda of the internal meetings of the Risk Management Monitoring Committee is outlined in the following table:

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agendas
8 Januari 2024 January 8, 2024	1. Kualifikasi Organ Pengelola Risiko 2. RKAP berbasis Manajemen Risiko
13 Februari 2024 February 13, 2024	1. Qualifications of Risk Management Officers 2. Risk Management-Based Corporate Work Plan and Budget (RKAP)
6 Maret 2024 March 6, 2024	1. Mekanisme Pencatatan Penghasilan dan Pencairan PSO Tahun 2023 2. Koreksi SOP/Prosedur dan Pengembangan Verifikasi PSO 3. Progress PSO dan Subsidi Tahun 2023 serta Tindak Lanjut Mitigasi Risiko Tahun 2024 4. Implementasi Taksonomi <i>Practical</i> 2024
22 April 2024 April 22, 2024	1. Mechanism for Recording Income and Disbursement of Public Service Obligation (PSO) for the Year 2023 2. SOP/Procedure Corrections and Development of PSO Verification 3. Progress of PSO and Subsidies in 2023 and Follow-up on 2024 Risk Mitigation 4. Implementation of Practical Taxonomy 2024
8 Mei 2024 May 8, 2024	1. Laporan hal evaluasi peak season Lebaran Tahun 2023 dan rekomendasi serta tindak lanjut untuk <i>Peak Season</i> Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 2. Peningkatan layanan dan fasilitas atas naiknya PSO dalam persiapan <i>Peak Season</i> Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024
14 Juni 2024 June 14, 2024	1. Evaluation Report on the 2023 Eid Al-Fitr Peak Season and Recommendations and Follow-up Actions for the 2024 Eid Al-Fitr Peak Season 2. Service and Facility Improvements in Response to Increased PSO in Preparation for the 2024 Eid Al-Fitr Peak Season
8 Juli 2024 July 8, 2024	1. Risiko Angkutan Barang Komersial 2. Progress Pengadaan Kapal Roro
	1. Risks in Commercial Freight Transport 2. Progress on Ro-Ro Vessel Procurement
	1. Perencanaan capaian Target Penghasilan Keagenan Tahun 2024 2. Rencana Tindak Lanjut Mitigasi atas Risiko Ketidaktercapaian Revenue Keagenan 3. Risiko Keselamatan dan Operasi Kapal 4. Risiko Perawatan dan Pemeliharaan pada Electrical Kurang Optimal
	1. Planning for the Achievement of Agency Revenue Targets in 2024 2. Follow-up Mitigation Plan for the Risk of Not Achieving Agency Revenue 3. Ship Safety and Operational Risks 4. Risks Related to Suboptimal Electrical Maintenance and Repairs
	1. Progress Penyusunan <i>Root Cause Analysis</i> Risiko kecelakaan kapal dan LED Tahun 2019-2024 2. Progress dan rencana tindak lanjut revitalisasi ruang komersial Kapal Penumpang dan peningkatan layanan fasilitas Kapal Penumpang
	1. Progress on the Preparation of Root Cause Analysis for Ship Accidents and LED for the Years 2019-2024 2. Progress and Follow-up Plans for the Revitalization of Commercial Areas on Passenger Ships and the Improvement of Passenger Ship Facility Services
	1. Risk assessment pendapatan (<i>revenue</i>) penumpang dan barang di kapal penumpang dampak KM Bukit Raya & tidak beroperasinya KM Umsini: a. Prognosa penurunan <i>revenue pax/container & cargo</i> kapal penumpang Tahun 2024 b. Rencana mitigasi atas risiko tersebut 2. Risk assessment ketidaktercapaian target pendapatan (<i>revenue</i>) kapal Roro I & II (terkait progress pengadaan Roro), dan rencana mitigasi atas risiko tersebut 3. Risk assessment Informasi dan Teknologi: a. Masterplan Divisi Teknologi dan Informasi alignment RJPP PT PELNI (Persero) b. Realisasi progress Tindak Lanjut atas <i>GAP IT Maturity Index</i>
	1. Risk Assessment of Passenger and Cargo Revenue on Passenger Ships due to the Impact of KM Bukit Raya and the Inoperability of KM Umsini: a. Forecast of Decline in Passenger/Container & Cargo Revenue on Passenger Ships for 2024 b. Mitigation Plans for the Identified Risks 2. Risk Assessment of Revenue Target Shortfall for Ro-Ro Ships I & II (Related to Progress of Ro-Ro Vessel Procurement), and Corresponding Mitigation Plans 3. Information and Technology Risk Assessment: a. Technology and Information Division Masterplan Alignment with PT PELNI (Persero) Long-Term Corporate Plan (RJPP) b. Realization of Follow-up Progress on <i>GAP IT Maturity Index</i>

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agendas
9 Agustus 2024 August 9, 2024	- Persiapan <i>Workshop</i> Tata Kelola Pemeliharaan Kapal (<i>Fleet Reliability Risk</i>) PMS, RR, & FRD mulai tahapan: - Perencanaan Kegiatan PMS, RR & FRD - Pelaksanaan Kegiatan PMS, RR, & FRD - Evaluasi Kegiatan PMS, RR, & FRD - Mitigasi Risiko dan Rencana Tindak Lanjut - Preparation for the Workshop on Ship Maintenance Governance (<i>Fleet Reliability Risk</i>) covering PMS, RR, & FRD, starting from the following stages: - Planning of PMS, RR, & FRD Activities - Implementation of PMS, RR, & FRD Activities - Evaluation of PMS, RR, & FRD Activities - Risk Mitigation and Follow-Up Plans
9 September 2024 September 9, 2024	Capaian Pendapatan Kontainer di Kapal Penumpang dan Kinerja Tol Laut sampai dengan Agustus 2024 Container Revenue Achievement on Passenger Ships and Sea Toll Performance as of August 2024
9 Oktober 2024 October 9, 2024	- Informasi Progress Pengadaan 5 (Lima) Set Tongkang & Tugboat, dan Analisis Bisnis serta Analisis Risikonya - Risiko Penyusunan RAB Kapal Perintis - Progress Information on the Procurement of 5 (Five) Sets of Barge Ships & Tugboats, and its Business and Risk Analysis - Risks in the Preparation of the Pioneer Ship Budget (RAB)
12 November 2024 November 12, 2024	Optimalisasi Layanan Penumpang menjelang Peak Season Natal dan Tahun Baru 2025 Optimization of Passenger Services ahead of the 2025 Christmas and New Year Peak Season
18 Desember 2024 December 18, 2024	- Cascading RJP terhadap RKAP pada tahap <i>Strategic Roadmap & Pillar Strategic</i> Tahun 2025 - Progress penghapusbukuan KM Caraka - Cascading of the Long-Term Corporate Plan (RJP) into the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) at the 2025 Strategic Roadmap and Strategic Pillars Stage - Progress on the Write-off of KM Caraka

Sedangkan agenda rapat Dewan Komisaris dengan Organ di Bawah Dewan Komisaris serta Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi telah diuraikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan ini.

Meanwhile, the agenda of the Board of Commissioners' meetings with the Organs under the Board of Commissioners, as well as the Joint Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors, has been outlined in the Corporate Governance Chapter of this Report.

Laporan Pelaksanaan Kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko

Pada tahun 2024, Komite Pemantau Manajemen Risiko PT PELNI (Persero) telah merealisasikan program dan kegiatan kerja, sebagai berikut:

- Mengadakan Rapat Internal.
- Melakukan Rapat dengan Divisi Manajemen Risiko.
- Melakukan pertemuan dengan Direktorat dan Divisi.
- Melakukan evaluasi Manajemen Risiko Perusahaan.
- Melakukan telaah terhadap Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan.
- Melakukan evaluasi pengelolaan risiko secara langsung di lapangan pada Kantor Cabang.

Risk Management Monitoring Committee Performance Report

In 2024, the Risk Management Monitoring Committee of PT PELNI (Persero) has realized the following programs and work activities:

- Held Internal Meetings.
- Conducted Meetings with the Risk Management Division.
- Held meetings with the Directorate and Divisions.
- Conducted evaluations of the Company's Risk Management.
- Reviewed the Company's Risk Management Guidelines.
- Conducted direct evaluations of risk management at branch offices.

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

7. Melakukan pemantauan terhadap Proses pelaksanaan Teknologi Informasi di Perseroan.
8. Melakukan telaah terhadap sistem manajemen mutu Perseroan.
9. Melakukan telaah terhadap Penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

7. Monitored the implementation process of Information Technology in the Company.
8. Reviewed the Company's quality management system.
9. Reviewed the implementation of Integrated Governance.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

Komite Tata Kelola Terintegrasi merupakan salah satu organ pendukung Komisaris yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Komite Tata Kelola Terintegrasi Perseroan dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris memenuhi tanggung jawabnya dalam melaksanakan kewajiban pemantauan, pengawasan dan evaluasi atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

The Integrated Governance Committee is one of the supporting organs of the Commissioners, established based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-3/MBU/03/2023 concerning the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. The Company's Integrated Governance Committee was formed to assist the Board of Commissioners in fulfilling their responsibilities in monitoring, supervising, and evaluating the implementation of Integrated Governance, referring to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

Komposisi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Organisasi Komite Tata Kelola Terintegrasi saat ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor : Kep-05/DK/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023 tentang Komite Tata Kelola Terintegrasi. Adapun susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan keputusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dengan keanggotaan:
 - a. Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagai Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi;

Composition of the Integrated Governance Committee

The current organization of the Integrated Governance Committee was formed based on the Decree of the Board of Commissioners Number: Kep-05/DK/VIII/2023 dated August 2, 2023, concerning the Integrated Governance Committee. The composition of the Integrated Governance Committee based on this decree is as follows:

1. Risk Management Monitoring Committee of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), with the following membership:
 - a. Chairman of the Risk Management Monitoring Committee as Chairman of the Integrated Governance Committee;

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

- b. Wakil Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagai Wakil Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi;
 - c. Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
 2. Komite Pemantau Manajemen Risiko PT PBM Sarana Bandar Nasional, dengan keanggotaan:
 - a. Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi;
 - b. Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
 3. Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Pelita Indonesia Djaya, dengan keanggotaan:
 - a. Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi;
 - b. Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- b. Vice Chairman of the Risk Management Monitoring Committee as Vice Chairman of the Integrated Governance Committee;
 - c. Members of the Risk Management Monitoring Committee as Members of the Integrated Governance Committee.
 2. Risk Management Monitoring Committee of PT PBM Sarana Bandar Nasional, with the following membership:
 - a. Chairman of the Risk Management Monitoring Committee as a Member of the Integrated Governance Committee;
 - b. Members of the Risk Management Monitoring Committee as Members of the Integrated Governance Committee.
 3. Risk Management Monitoring Committee of PT Pelita Indonesia Djaya, with the following membership:
 - a. Chairman of the Risk Management Monitoring Committee as a Member of the Integrated Governance Committee;
 - b. Members of the Risk Management Monitoring Committee as Members of the Integrated Governance Committee.

Komposisi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Composition of the Integrated Governance Committee

Nama Name	Jabatan Position	Posisi di Perusahaan Position in the Company	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Eddy Susanto Supadmo	Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi Chairman of the Integrated Governance Committee	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-15/DK/XI-2020, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-07/DK/VII/2022 Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-15/DK/XI-2020, as amended by the Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-07/DK/VII/2022	3 November 2020 - Sekarang (1 periode) 3 November 2020 - Present (1 term)
Luqmanul Hakim	Wakil Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi Deputy Chairman of the Integrated Governance Committee	Pihak Eksternal External Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-07/DK/IX-2023 Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-07/DK/IX-2023	30 September 2023- Sekarang (1 periode) 30 September 2023 - Present (1 term)

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

Profil Komite Tata Kelola Terintegrasi

Integrated Governance Committee Profile

Eddy Susanto Soepadmo

Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi
Chairman of Integrated Governance Committee Profile

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-15/DK/XI-2020, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-07/DK/VII/2022
Board of Commissioner Decision Letter No. KEP-15/DK/XI-2020, as amended by the Board of Commissioner Decision Letter No. KEP-07/DK/VII/2022

Profil lengkap Bapak Eddy Susanto Soepadmo telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
The complete profile of Mr. Eddy Susanto Soepadmo is detailed in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Luqmanul Hakim

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Member of Integrated Governance Committee Profile

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-07/DK/IX-2023.
Board of Commissioner Decision Letter No. KEP-07/DK/XI-2023

Periode Jabatan Term of Office

30 September 2023- sekarang (periode 1)
September 30, 2023 - Present (Period 1)

Kewarganegaraan Citizenship

Warga Negara Indonesia
Indonesian Citizen

Tempat Tanggal Lahir Place and Date of Birth

Jember, 5 juni 1965
Jember, June 5, 1965

Usia per 31 Desember 2024 Age as of December 31, 2024

59 Tahun
59 Years old

Domisili Domicile

Kota Tangerang, Banten
Tangerang City, Banten

Pendidikan Terakhir Last Education

S2
Master's Degree

Riwayat Pekerjaan Employment History

VP Aero Retail Management SBU Garuda Indonesia
SM Corporate and Sales PT. Garuda Indonesia

Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Seluruh anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi merupakan pribadi yang profesional, berpengalaman, dan tidak memiliki hubungan bisnis baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, hal ini untuk menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.

Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, pengalaman dan integritas yang dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku. Berikut adalah tabel pengungkapan Independensi dari

Independence of the Integrated Governance Committee

All members of the Integrated Governance Committee are professionals with experience who do not have direct or indirect business relationships related to the Company's business activities. This is to maintain independence in carrying out their duties and responsibilities as committee members.

The Integrated Governance Committee has met the criteria for independence, expertise, experience, and integrity as required by applicable regulations. The following table discloses the independence of the Risk



KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

Komite Pemantau Manajemen Risiko sampai dengan tanggal 31 Desember 2024:

Management Monitoring Committee as of December 31, 2024:

Kriteria Independensi Criteria of Independence	Komite Tata Kelola Terintegrasi PT PELNI (Persero) Integrated Governance Committee of PT PELNI (Persero)	
	Eddy Susanto Soepadmo	Luqmanul Hakim
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi. Does not have financial relationships with fellow members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors.	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, dengan anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi. Does not have familial relationships through marriage and descent up to the second degree, either horizontally or vertically, with members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors.	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, Anak Perusahaan, maupun Perusahaan Afiliasi. Does not have managerial relationships in the Company, its Subsidiaries, or Affiliate Companies.	✓	✓
Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Does not hold shares, either directly or indirectly, in the Company.	✓	✓
Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan. Does not have business relationships, either directly or indirectly, related to the Company's business activities.	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah. Does not hold positions as political party officials, government officials, or public officials.	✓	✓

Program Pengembangan Kompetensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Selama tahun 2024, anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan, program pengembangan kompetensi yang diikuti selama tahun 2024 telah tercantum pada bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Sedangkan bagi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dari eksternal Perseroan tidak mengikuti program pengembangan kompetensi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

1. Fungsi Manajemen Risiko:
 - a. Melakukan evaluasi kebijakan serta strategi Manajemen Risiko;

Competency Development Program for the Integrated Governance Committee

Throughout 2024, the competency development programs attended by members of the Integrated Governance Committee who are also members of the Company's Board of Commissioners have been detailed in the Corporate Governance chapter of this Annual Report. Meanwhile, external members of the Integrated Governance Committee did not participate in any competency development programs.

Duties and Responsibilities of the Integrated Governance Committee

1. Risk Management Function:
 - a. Evaluate risk management policies and strategies;



KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

- b. Melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri;
 2. Fungsi Audit Intern:
 - a. Memastikan bahwa Direksi BUMN dan Anak Perusahaan BUMN memiliki SPI yang menjalankan fungsi Audit Intern;
 - b. Memberikan persetujuan atas pengangkatan dan pemberhentian kepala SPI yang diusulkan oleh Direksi;
 - c. Memastikan SPI memiliki akses terhadap informasi dan/atau data mengenai BUMN yang perlu untuk melaksanakan tugasnya;
 - d. memberikan persetujuan atas piagam Audit Intern (internal audit *charter*) yang diusulkan oleh Direksi dengan memperhatikan usulan dari SPI;
 - e. mengkaji efektivitas dan efisiensi Sistem Pengendalian Intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SPI paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun;
 - f. menunjuk pengendali mutu independen dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SPI (*quality assurance review*) paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun; dan
 - g. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri.
 3. Fungsi Tata Kelola Terintegrasi:
 - a. melakukan evaluasi dan persetujuan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
 - b. mengawasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Anak Perusahaan BUMN agar selaras dengan kebijakan Manajemen Risiko BUMN Induk;
- b. Evaluate the Board of Directors' accountability for implementing the risk management policies and strategies as mentioned in point a;
 - c. Supervise and provide advice on the implementation of the risk management function in accordance with statutory regulations, articles of association, and/or decisions of the GMS/Minister.
 2. Internal Audit Function:
 - a. Ensure that the SOE Board of Directors and its subsidiaries have an Internal Audit Unit (SPI) that performs the internal audit function;
 - b. Approve the appointment and dismissal of the head of SPI as proposed by the Board of Directors;
 - c. Ensure SPI has access to information and/or data regarding the SOE necessary for carrying out its duties;
 - d. Approve the internal audit charter proposed by the Board of Directors, considering suggestions from SPI;
 - e. Review the effectiveness and efficiency of the internal control system based on information obtained from SPI at least once a year;
 - f. Appoint an independent external quality controller to review SPI performance (quality assurance review) at least once every three years; and
 - g. Supervise and provide advice on the implementation of other internal audit functions in accordance with statutory regulations, articles of association, and/or decisions of the GMS/Minister.
 3. Integrated Governance Function:
 - a. Evaluate and approve integrated governance policies;
 - b. Supervise the implementation of integrated governance in SOE subsidiaries to ensure alignment with the parent SOE's risk management policies;



KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

- c. mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi BUMN Induk, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi BUMN Induk atas pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
- d. mengevaluasi kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan untuk penyempurnaan;
- e. mengawasi penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Anak Perusahaan BUMN agar selaras dengan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi BUMN Induk dan Anak Perusahaan BUMN; dan
- f. melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri.

- c. Supervise the duties and responsibilities of the parent SOE's Board of Directors and provide direction or advice on implementing integrated governance policies;
- d. Evaluate integrated governance policies and direct improvements;
- e. Supervise the implementation of integrated governance in SOE subsidiaries to ensure alignment with the integrated governance policies of the parent SOE and its subsidiaries; and
- f. Supervise and provide advice on the implementation of other integrated governance functions in accordance with statutory regulations, articles of association, and/or decisions of the GMS/Minister.

Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi yaitu 09/KTKT/XII-2023.

Charter of the Integrated Governance Committee

The Integrated Governance Committee has a Charter, numbered 09/KTKT/XII-2023.

Kebijakan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Kebijakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi tercantum dalam Bab 3. Poin B pasal 1 dan 2 Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Meeting Policy of the Integrated Governance Committee

The meeting policy of the Integrated Governance Committee is stipulated in Chapter 3, Points B, Articles 1 and 2 of the Integrated Governance Committee Charter.

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Selama tahun 2024, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan rapat internal sebanyak sebanyak 13 kali. Selain itu, Tata Kelola Terintegrasi juga mengikuti Rapat Dewan Komisaris dan Organ di Bawah Dewan Komisaris serta Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi. Berikut ini merupakan frekuensi dan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam seluruh rapat yang diselenggarakan oleh internal Tata Kelola Terintegrasi maupun yang diikuti selama tahun 2024:

Meetings of the Integrated Governance Committee

Throughout 2024, the Integrated Governance Committee held 13 internal meetings. Additionally, the Integrated Governance Committee also attended Board of Commissioners meetings and meetings with the Organs under the Board of Commissioners, as well as Joint Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors. The following table shows the frequency and attendance rate of each Integrated Governance Committee member in all internal Integrated Governance Committee meetings and those attended throughout 2024:



KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

Nama	Jabatan	Rapat Internal Komite Tata Kelola Terintegrasi Internal Integrated Governance Committee Meeting			Rapat Dewan Komisaris dan Organ di Bawah Dewan Komisaris Board of Commissioners and Subordinate Bodies Meetings			Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi Joint Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Eddy Susanto Soepadmo	Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi Chairman of the Integrated Governance Committee	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%
Luqmanul Hakim	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Member of the Integrated Governance Committee	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%

Adapun agenda rapat internal Komite Tata Kelola Terintegrasi diuraikan pada tabel berikut ini:

The agenda of the internal meetings of the Integrated Governance Committee is outlined in the following table:

Agenda Rapat Internal Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2024

Internal Meeting Agenda of the Integrated Governance Committee in 2024

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agendas
5 Januari 2024 January 5, 2024	Pembahasan Koordinasi Tim Teknis Komite Tata Kelola Terintegrasi Discussion on Coordination of the Technical Team of the Integrated Governance Committee
12 Februari 2024 February 12, 2024	Pembahasan <i>Progress Area Of Improvement (AoI) Self Assessment</i> GCG PT PELNI dan anak perusahaan Tahun 2023 dan rencana pemenuhannya Discussion on the Progress of Areas of Improvement (AoI) from the 2023 GCG (Good Corporate Governance) Self-Assessment of PT PELNI and Its Subsidiaries, and the Fulfillment Plan
19 Maret 2024 March 19, 2024	- Pembahasan <i>Exit Meeting Skor Self Assessment</i> GCG Tahun 2023 <i>Progress Area of Improvement (AoI)</i> - Penilaian Skor Laporan Gratifikasi Online (GOL) KPK - Discussion on the Exit Meeting for the 2023 GCG (Good Corporate Governance) Self-Assessment Score - Progress on Areas of Improvement (AoI) - Assessment Score of the Online Gratification Report (GOL) by the KPK
27 April 2024 April 27, 2024	Pembahasan Pelaporan Program Kerja PT PELNI Group pada Triwulan 1 Discussion on the Work Program Reporting of PT PELNI Group for the First Quarter
16 Mei 2024 May 16, 2024	Pembahasan Tindak Lanjut Surat Deputy Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor S-19/DKU/MBU/V/2024 tentang Arahan Penyusunan dan Penguatan Implementasi Kebijakan Tata Kelola Benturan Kepentingan (COI) Discussion on the Follow-Up to the Letter from the Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of State-Owned Enterprises Number S-19/DKU/MBU/V/2024 regarding the Directive on the Preparation and Strengthening of the Implementation of Conflict of Interest (COI) Governance Policy
20 Juni 2024 June 20, 2024	Pembahasan Persiapan Laporan Tata Kelola Terintegrasi Semester 1 Discussion on the Preparation of the First Semester Integrated Governance Report
18 Juli 2024 July 18, 2024	Pembahasan Progress Integrasi Sistem Manajemen PT PELNI (Persero) Discussion on the Progress of the Management System Integration of PT PELNI (Persero)

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agendas
21 Agustus 2024 August 21, 2024	Pembahasan Tindak Lanjut <i>Area of Improvement (Aol) Self Assessment</i> Perusahaan Induk dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2023 sampai dengan Periode Pelaporan bulan Agustus Discussion on the Follow-Up to Areas of Improvement (Aol) from the 2023 Fiscal Year Self-Assessment of the Parent Company and Subsidiaries up to the Reporting Period of August
17 September 2024 September 17, 2024	1. Pembahasan Tindak Lanjut <i>Area of Improvement (Aol) Self Assessment</i> Perusahaan Induk dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2023 sampai dengan Periode Pelaporan bulan September 2024 2. Pembahasan terkait Tata Kelola SDM Perusahaan Induk dan anak perusahaan 1. Discussion on the Follow-Up to Areas of Improvement (Aol) from the 2023 Fiscal Year Self-Assessment of the Parent Company and Subsidiaries up to the Reporting Period of September 2024 2. Discussion on Human Resource Governance of the Parent Company and Subsidiaries
17 Oktober 2024 October 17, 2024	Pembahasan Integrasi Tata Kelola Teknologi Informasi dalam Proses Bisnis PT PELNI (Persero) Discussion on the Information Technology Integrated Governance into PT PELNI (Persero) Business Processes
15 November 2024 November 15, 2024	Pembahasan Tata Kelola Integrasi Keuangan PT PELNI Group Discussion on the Financial Integrated Governance of the PT PELNI Group
10 Desember 2024 December 10, 2024	1. Pembahasan Progress Penyelesaian Aol Tahun 2023 2. Persiapan <i>Self Assessment</i> GCG Tahun 2024 1. Discussion on the Progress of Completing Aol for 2023 2. Preparation for the 2024 GCG Self-Assessment
15 Desember 2023 December 15, 2023	<i>Review Pedoman/Kebijakan Tentang KTKT</i> Review of Guidelines/Policies on KTKT

Sedangkan agenda rapat Dewan Komisaris dengan Organ di Bawah Dewan Komisaris serta Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi telah diuraikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan ini.

Meanwhile, the agenda of the Board of Commissioners' meetings with the Organs under the Board of Commissioners, as well as the Joint Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors, has been outlined in the Corporate Governance Chapter of this Report.

Laporan Pelaksanaan Kinerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pada tahun 2024, Komite Tata Kelola Terintegrasi PT PELNI (Persero) telah merealisasikan program dan kegiatan kerja, sebagai berikut:

- Komite Tata Kelola Terintegrasi menyelenggarakan rapat Tematik setiap bulan dengan melibatkan unsur Pimpinan dan anggota komite TKT bersama Direksi Induk dan Anak Perusahaan serta VP unit terkait pada perusahaan Induk.
- Komite Tata Kelola Terintegrasi menghadiri Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi dan jajaran VP setiap bulan.

Integrated Governance Committee Performance Report

In 2024, the Integrated Governance Committee of PT PELNI (Persero) has realized the following programs and work activities:

- The Integrated Governance Committee holds monthly Thematic Meetings involving the leadership and members of the Integrated Governance Committee (IGC), together with the Board of Directors of the parent company and subsidiaries, as well as relevant Vice Presidents of the parent company.
- The Integrated Governance Committee attends monthly Joint Meetings between the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Vice President level management.



3. Komite Tata Kelola Terintegrasi bersama dengan Divisi Hukum & Kepatuhan berkoordinasi dalam merancang dan membuat laporan kepada direksi secara triwulan dan kepada kementrian BUMN setiap semester (6 bulanan).
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi melakukan kegiatan monitoring sebagai tindaklanjut atas hasil rapat rapat Tematik yang dilakukan setiap bulan dan *onsite visit*
5. Komite Tata Kelola Terintegrasi melakukan telaah atas Nota Dinas dari Komisaris Utama atas usulan dan laporan direksi
6. Komite Tata Kelola Terintegrasi Menyusun RKAP Tahun 2025 dan telah disampaikan kepada Komisaris Utama pada tanggal 10 Oktober 2024 melalui Nota Dinas Nomor : 18 /KTKT/X-2024 perihal Penyusunan RKA Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) Tahun 2025
7. Melaksanakan Penugasan khusus dari Dewan Komisaris.
3. The Integrated Governance Committee coordinates with the Legal & Compliance Division in drafting and preparing quarterly reports for the Board of Directors and semi-annual reports (every six months) for the Ministry of State-Owned Enterprises.
4. The Integrated Governance Committee conducts monitoring activities as a follow-up to the monthly Thematic Meetings and through onsite visits.
5. The Integrated Governance Committee reviews internal memos from the President Commissioner regarding proposals and reports submitted by the Board of Directors.
6. The Integrated Governance Committee prepared the 2025 Work Plan and Budget (RKAP), which was submitted to the President Commissioner on October 10, 2024, through Memo Number: 18/KTKT/X-2024 concerning the Preparation of the 2025 RKAP for the Integrated Governance Committee (IGC).
7. Carrying out special assignments from the Board of Commissioners.



SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS

SECRETARIAT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Sekretariat Dewan Komisaris diangkat untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris, khususnya di bidang kesekretariatan dan penghubung Dewan Komisaris dengan pihak lain, termasuk Direksi.

The Secretariat of the Board of Commissioners is appointed to facilitate the smooth execution of the Board of Commissioners' duties, particularly in the fields of secretarial work and liaison between the Board of Commissioners and other parties, including the Board of Directors.

KEANGGOTAAN SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS

Sekretariat Dewan Komisaris Perseroan dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris dan dibantu oleh seorang Staf Sekretariat Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris maupun Staf Sekretariat Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris PT PELNI (Persero).

MEMBERSHIP OF THE SECRETARIAT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Secretariat of the Board of Commissioners is led by a Secretary of the Board of Commissioners, supported by a Staff of the Secretariat of the Board of Commissioners. Both the Secretary of the Board of Commissioners and the Staff of the Secretariat of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero).

Masa jabatan Sekretaris Dewan Komisaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan maksimal 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

The term of office for the Secretary of the Board of Commissioners and the Staff of the Secretariat of the Board of Commissioners is determined by the Board of Commissioners of the Company, with a maximum of 3 (three) years, and may be reappointed for a maximum of 2 (two) years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners/Supervisory Board to dismiss them at any time.

Adapun keanggotaan Sekretariat Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

The members of the Secretariat of the Board of Commissioners of the Company who served in 2024 are as follows:

Keanggotaan Sekretariat Dewan Komisaris

Membership of the Board of Commissioners Secretariat

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment
R. Yudha Praja Kusumah	Sekretaris Dewan Komisaris Board of Commissioners Secretary	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-11/DK/VIII/2024 Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-11/DK/VIII/2024
Ajeng Eka Yandini	Staf Sekretariat Dewan Komisaris Staff of the Board of Commissioners Secretariat	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-02/DK/I-2022 Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-02/DK/I-2022
Arum Puspita Maharani	Staf Sekretariat Dewan Komisaris Staff of the Board of Commissioners Secretariat	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-12/DK/XI/2024 Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-12/DK/XI/2024
M. Amal Amrullah	Staf Sekretariat Dewan Komisaris Staff of the Board of Commissioners Secretariat	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-04/DK/IV-2021 Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-04/DK/IV-2021
Ati Irawati	Staf Sekretariat Dewan Komisaris Staff of the Board of Commissioners Secretariat	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-6/DK/VII/2022 Board of Commissioners Decision Letter No. KEP-06/DK/VII/2022



SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS

SECRETARIAT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Profile of the Board of Commissioners Secretary

R. Yudha Praja Kusumah

Sekretaris Dewan Komisaris

Board of Commissioners Secretary

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-11/DK/VIII/2024 Board of Commissioners Decision Letter KEP-11/DK/VIII/2024
Kewarganegaraan Citizenship	Warga Negara Indonesia Indonesian Citizen
Tempat Tanggal Lahir Place and Date of Birth	Jakarta, 23 November 1976 Jakarta, November 23, 1976
Usia per 31 Desember 2024 Age as of December 31, 2024	48 tahun 48 years old
Domisili Domicile	Bekasi
Pendidikan Terakhir Last Education	S1 Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kampus Ungu (2003) Bachelor's Degree in Accounting from Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kampus Ungu (2003)
Riwayat Pekerjaan Employment History	Analisis Hukum, Kementerian BUMN (2014 - Sekarang) Legal Analyst, Ministry of State-Owned Enterprises (2014 - Present)

Informasi Rangkap Jabatan Sekretariat Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris BUMN tidak boleh merangkap sebagai:

1. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/ perusahaan lain;
2. Sekretaris/Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/perusahaan lain;
3. Anggota komite lain pada Perusahaan; dan/atau
4. Anggota komite pada BUMN/Perusahaan lain.

Baik Sekretaris Dewan Komisaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) yang menjabat sepanjang tahun 2023 tidak memiliki rangkap jabatan yang dilarang dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023.

Information on Concurrent Positions of the Secretariat of the Board of Commissioners

Based on the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, the Secretary and Staff of the Secretariat of the Board of Commissioners of SOEs are prohibited from concurrently holding positions as:

1. Members of the Board of Commissioners/Supervisory Board in other SOEs/companies;
2. Secretary/Staff of the Secretariat of the Board of Commissioners/Supervisory Board in other SOEs/companies;
3. Members of other committees within the Company; and/or
4. Members of committees in other SOEs/companies.

Neither the Secretary of the Board of Commissioners nor the Staff of the Secretariat of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) who served throughout 2023 held any concurrent positions prohibited under the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023.

SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS SECRETARIAT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretariat Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretariat Dewan Komisaris menjalankan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
5. Menyusun rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris;
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Sekretariat Dewan Komisaris juga melaksanakan tugas lain berupa:

1. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
4. Bertindak sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

Duties and Responsibilities of the Secretariat of the Board of Commissioners

The duties and responsibilities of the Secretariat of the Board of Commissioners include the following:

1. Preparing meetings, including briefing sheets for the Board of Commissioners;
2. Drafting the minutes of the Board of Commissioners' meetings according to regulations;
3. Administering documents of the Board of Commissioners, including incoming and outgoing letters, meeting minutes, and other documents;
4. Preparing the Work Plan and Budget for the Board of Commissioners;
5. Drafting reports of the Board of Commissioners;
6. Performing other tasks assigned by the Board of Commissioners.

The Secretariat of the Board of Commissioners also undertakes additional tasks such as:

1. Ensuring that the Board of Commissioners complies with laws and regulations and applies the principles of good corporate governance;
2. Providing information required by the Board of Commissioners periodically and/or upon request;
3. Coordinating committee members when necessary to facilitate the duties of the Board of Commissioners;
4. Acting as a liaison officer between the Board of Commissioners and other parties.



KESEKRETARIATAN PERUSAHAAN CORPORATE SECRETARIAT

Direksi membentuk Kesekretariatan Perusahaan sebagai pelaksana fungsi Sekretaris Perusahaan dalam rangka membantu Direksi dalam penerapan prinsip-prinsip GCG serta memenuhi ketentuan terhadap praktik GCG di PT PELNI (Persero). Pembentukan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

PROFIL KEPALA KESEKRETARIATAN PERUSAHAAN

Posisi Kepala Kesekretariatan Perusahaan hingga saat ini dijabat oleh Bapak Evan Eryanto, dengan dasar pengangkatan tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 11.10/01/SK/HKO.01/2023 tanggal 10 November 2023. Profil lengkap Bapak Evan Eryanto telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Kedudukan dan Keanggotaan Kesekretariatan Perusahaan

Secara struktural, Kesekretariatan Perusahaan PT PELNI (Persero) berada di bawah wewenang Direktorat Utama dan diketuai oleh seorang Kepala Kesekretariatan Perusahaan. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kesekretariatan Perusahaan dilakukan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris. Kepala Kesekretariatan Perusahaan bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Direktur Utama dan apabila diminta dapat memberikannya kepada Dewan Komisaris.

Kesekretariatan Perusahaan terbagi dalam 3 (tiga) departemen, terdiri atas Departemen Kesekretariatan Direksi dan Dewan Komisaris, Departemen Dokumen Korporat, Departemen Komunikasi Internal dan Eksternal. Jumlah anggota Kesekretariatan Perusahaan per 31 Desember 2024 sebanyak 36 (tiga puluh enam) karyawan.

The Board of Directors has established the Corporate Secretariat to execute the functions of the Corporate Secretary in order to assist the Board of Directors in implementing GCG principles and fulfilling the requirements of GCG practices at PT PELNI (Persero). This establishment refers to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

PROFILE OF THE HEAD OF CORPORATE SECRETARIAT

The position of Head of Corporate Secretariat is currently held by Mr. Evan Eryanto, based on the appointment outlined in the Board of Directors Decree Number: 11.10/01/SK/HKO.01/2023 dated November 10, 2023. The complete profile of Mr. Evan Eryanto has been detailed in the Company Profile Chapter of this Annual Report.

Position and Membership of the Corporate Secretariat

Structurally, the Corporate Secretariat of PT PELNI (Persero) is under the authority of the Main Directorate and is headed by the Head of Corporate Secretariat. The appointment and dismissal of the Head of Corporate Secretariat are carried out by the President Director based on the Company's internal mechanisms with the approval of the Board of Commissioners. The Head of Corporate Secretariat is responsible for and reports on the execution of their duties periodically to the President Director and, upon request, to the Board of Commissioners.

The Corporate Secretariat is divided into three departments: the Secretariat Department of the Board of Directors and Board of Commissioners, the Corporate Documents Department, and the Internal and External Communication Department. As of December 31, 2024, the Corporate Secretariat had 36 (thirty-six) employees.

KESEKRETARIATAN PERUSAHAAN CORPORATE SECRETARIAT

Fungsi dan Tugas Pokok Kesekretariatan Perusahaan

Fungsi sekretaris perusahaan, meliputi:

1. memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
2. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. sebagai penghubung dengan pemangku kepentingan; dan
4. menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada daftar pemegang saham, daftar khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS/Menteri.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Direktur Utama dan apabila diminta dapat memberikannya kepada Dewan Komisaris.

Selain melaksanakan fungsi pokok tersebut di atas, Sekretaris Perusahaan menjalankan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Menghadiri Rapat Direksi dan membuat risalah rapat;
2. Menyiapkan Daftar Khusus;
3. Membuat Daftar Pemegang Saham;
4. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan laporan/kegiatan rutin Direksi yang akan disampaikan kepada pihak luar;
5. Mempersiapkan bahan-bahan/materi yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan keputusan Direksi berkenaan dengan pengelolaan Perusahaan;
6. Memfasilitasi rapat-rapat dalam lingkungan Direksi, baik yang bersifat rutin maupun non-rutin;
7. Menindaklanjuti setiap keputusan Direksi dengan jalan mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam rapat Direksi dan memantau serta mengecek tindak lanjut hasil rapat.

Functions and Main Duties of the Corporate Secretariat

The functions of the corporate secretary include:

1. Ensuring the Company complies with regulations on disclosure requirements in line with the implementation of Good Corporate Governance principles;
2. Providing information required by the Board of Directors and Board of Commissioners periodically and/or upon request;
3. Acting as a liaison with stakeholders; and
4. Administering and storing company documents, including but not limited to the list of shareholders, special registers, and minutes of meetings of the Board of Directors, Board of Commissioners, and GMS/Minister.

The Corporate Secretary is responsible for and reports on the execution of their duties periodically to the President Director and, upon request, to the Board of Commissioners.

In addition to performing the core functions mentioned above, the Corporate Secretary carries out the following tasks:

1. Attending Board of Directors meetings and preparing the minutes of meetings;
2. Preparing the Special Register;
3. Compiling the List of Shareholders;
4. Preparing materials related to routine reports/activities of the Board of Directors to be submitted to external parties;
5. Preparing materials related to matters requiring the Board of Directors' decisions concerning the management of the Company;
6. Facilitating meetings within the Board of Directors, both routine and non-routine;
7. Following up on each decision of the Board of Directors by recording each decision made in the meetings of the Board of Directors and monitoring and checking the follow-up results of the meetings.



KESEKRETARIATAN PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARIAT

Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris Perusahaan.

The Board of Directors must maintain and evaluate the quality of the corporate secretary function.

Pelatihan Sekretaris Perusahaan

Pada tahun 2024, program pelatihan yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Corporate Secretary Training

In 2024, the training programs attended by the Corporate Secretary were as follows:

No	Nama dan Jabatan Name and Position	Tanggal Date	Nama Pelatihan Name of Training	Penyelenggara Organizer
1	Evan Eryanto	1 April 2024 April 1, 2024	<i>Business Leader Upskilliing for Great Performance</i>	In-house
2	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	26 April 2024 April 26, 2024	<i>Workshop Penyusunan RJP PT PELNI (Persero) Tahun 2025 - 2029</i> Workshop on the Preparation of the Long-Term Plan (RJP) of PT PELNI (Persero) for 2025-2029	In-house
3		7 Juni 2024 June 7, 2024	<i>Servant Leadership dalam Rangkaian Program Pengembangan Pimpinan PT PELNI (Persero)</i> <i>Servant Leadership as Part of the Leadership Development Program Series of PT PELNI (Persero)</i>	In-house
4		30 Juli 2024 - 2 Agustus 2024 July 30 2024 - August 2 2024	Business Acumen	PPM Manajemen
5		8 November 2024 November 8, 2024	<i>Profit Planning & Capital Budgeting</i>	PPM Manajemen

Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris perusahaan

Selama tahun 2024, Ksekretariat Perusahaan telah melakukan berbagai kegiatan, sebagai berikut:

Report on the Execution of Corporate Secretary

Throughout 2024, the Corporate Secretariat has undertaken various activities, as follows:

No	Program/Kegiatan Program/Activity	Deskripsi Ringkas Brief Descwription
1	Penyusunan Laporan Tahunan Annual Report Preparation	Menyusun Annual Report dan Sustainability Report 2024, mengacu pada GRI, serta berhasil meraih Gold Rank ASRAT untuk keempat kalinya. Prepared the 2024 Annual and Sustainability Reports based on GRI standards and successfully secured the ASRAT Gold Rank for the fourth consecutive year.
2	Pengelolaan Remunerasi Remuneration Management	Mengelola penghasilan, asuransi purna, tantiem, dan dana tantiem yang ditangguhkan bagi Direksi & Komisaris sepanjang tahun. Managed the remuneration of the Board of Directors and Commissioners throughout the year, including income, retirement insurance, and deferred tantiem payments.
3	Pengelolaan Fasilitas Direksi/ Komisaris Facilities Management for Directors/Commissioners	Menjamin pemenuhan fasilitas kesehatan, kendaraan, dan bantuan hukum sesuai regulasi BUMN. Ensured the provision of facilities such as healthcare, vehicles, and legal support for Directors and Commissioners in accordance with BUMN regulations.
4	Go-Live e-Risalah	Implementasi sistem digital risalah rapat mulai Maret 2024, diuji coba di rapat Direksi, akan digunakan lebih luas tahun 2025. Launched a digital meeting minutes system in March 2024, piloted in Board meetings and planned for wider use in 2025.
5	Pengelolaan Rapat Dinas Internal Meeting Management	Mengelola rapat internal Direksi, Komisaris, dan dengan <i>stakeholder</i> seperti Kementerian BUMN dan anak perusahaan. Coordinated management-level meetings throughout the year including Board, Joint, and RUPS-related meetings with key stakeholders.

KESEKRETARIATAN PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARIAT

No	Program/Kegiatan Program/Activity	Deskripsi Ringkas Brief Description
6	<i>Townhall Meetings</i>	Menyelenggarakan dua sesi <i>Townhall Meeting Internal</i> (Februari dan Juli) membahas strategi, kinerja, dan implementasi AKHLAK. Held two internal <i>Townhall Meetings</i> in February and July to communicate corporate strategy, evaluate performance, and reinforce AKHLAK values.
7	Audit Identitas Perusahaan Corporate Identity Audit	Melakukan audit dan standarisasi implementasi logo baru PT PELNI (Persero) di seluruh cabang dan perangkat kerja. Conducted audits to standardize the use of PT PELNI (Persero) new logo across branches and work equipment.
8	Media Relation	Menjalankan <i>media briefing</i> , <i>media setting</i> , <i>press release</i> (60 kali), talkshow, dan konferensi pers untuk membangun citra perusahaan. Executed 60 press releases, 7 briefings, and several media-related engagements to enhance corporate image.
9	Pengelolaan Media Sosial Social Media Management	Mengelola akun sosial media resmi dengan capaian impresi dan pertumbuhan follower yang signifikan di Instagram, TikTok, dan lainnya. Managed official social media channels with impressive follower growth and content reach across multiple platforms.
10	Alih Media Arsip Archival Digitization	Melakukan retensi arsip dan digitalisasi dokumen ke DMS, termasuk pengelolaan arsip Kantor Pusat dan Cabang. Digitized and relocated archival documents to improve accessibility and support business operations.
11	Sistem Dokumen Digital Digital Document System	Mengembangkan sistem e-materai, tanda tangan digital, dan penerimaan dokumen untuk mempercepat proses hukum dan bisnis. Developed digital documentation systems including e-stamps and digital signatures for more agile and adaptive corporate governance.
12	Layanan Contact Center Contact Center Services	Menyediakan layanan <i>contact center</i> terintegrasi (<i>blended</i>) dan peningkatan fitur serta personel untuk menjawab kebutuhan pelanggan. Provided an integrated contact center with blended functionality to enhance customer service experience.
13	Survey Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Survey	Melaksanakan survei terhadap 26 kapal penumpang dan 3 kapal perintis untuk peningkatan kualitas layanan. Conducted customer satisfaction surveys across 26 passenger ships and 3 pioneer ships to gain service insights.
14	Hari Pelanggan Nasional National Customer Day	Menyelenggarakan kegiatan apresiasi pelanggan, talkshow, Direksi menyapa penumpang di Surabaya dan Tarakan. Held customer appreciation events, including direct engagement from top management during National Customer Day celebrations.
15	Pemasangan Iklan & Konten Promosi Advertising & Promotional Content	Memasang billboard digital dan konvensional di Balikpapan dan Ambon, serta <i>push pop-up</i> dan konten media promosi digital. Installed outdoor and digital ads in strategic areas and launched promotional push notifications and campaigns.



SATUAN PENGAWASAN INTERN

INTERNAL AUDIT UNIT

Dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip GCG, Perseroan membentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang menjalankan fungsi Audit Internal untuk mengamankan aset dan kepentingan perusahaan. Pembentukan SPI tersebut mengacu kepada Bab VI Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Profil Kepala Satuan Pengawasan Intern

SPI diketuai oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Intern (KaSPI) yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Posisi KaSPI hingga saat ini dijabat oleh Ibu Lenggo Geni, dengan dasar pengangkatan tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 11.10/01/SK/HKO.01/2023 tanggal 10 November 2023. Adapun profil lengkap beliau telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Dalam melaksanakan tugasnya, KaSPI dalam pelaksanaan pekerjaannya dibantu oleh Pengawas Intern Area I, Pengawas Intern Area II, Pengawas investigasi, Pengawas Administrasi & Evaluasi. Saat ini, jumlah pegawai SPI Perseroan berjumlah 20 (dua puluh) orang dengan susunan internal auditor Perseroan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

In an effort to implement GCG principles, the Company has established an Internal Audit Unit (SPI) that performs the internal audit function to safeguard the company's assets and interests. The establishment of SPI refers to Chapter VI of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, Government Regulation No. 12 of 1998 concerning Limited Liability Companies (Persero), and the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

Profile of the Head of Internal Audit Unit

The SPI is led by a Head of the Internal Audit Unit (KaSPI) who is appointed and dismissed by the President Director after obtaining approval from the Board of Commissioners. The position of KaSPI is currently held by Mrs. Lenggo Geni, based on the appointment outlined in the Board of Directors Decree Number: 11.10/01/SK/HKO.01/2023 dated November 10, 2023. Her complete profile has been detailed in the Company Profile Chapter of this Annual Report.

In carrying out her duties, the KaSPI is assisted by the Area I Internal Auditor, Area II Internal Auditor, Investigative Auditor, and Administration & Evaluation Auditor. Currently, the Company's SPI has 20 (twenty) employees, and the composition of the Company's internal auditors as of December 31, 2024, is as follows:

No	Nama Name	Jabatan Position
1	Lenggo Geni	Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit Unit
2	M. Suwadi	Pengawas Intern Area I Internal Audit Supervisor, Area I
3	Yusman Sugeng Kurniawan	Pengawas Intern Area II Internal Audit Supervisor, Area II
4	Ralna Ayu Utami	Pengawas Investigasi Investigation Supervisor
5	Sundari	Pengawas Administrasi & Evaluasi Administration & Evaluation Supervisor

SATUAN PENGAWASAN INTERN

INTERNAL AUDIT UNIT

No	Nama Name	Jabatan Position
6	Maria Afriyanti	Pemeriksa Utama Area I Senior Auditor, Area I
7	Deni Hendayana	Pemeriksa Utama Area I Senior Auditor, Area I
8	Susidawati	Pemeriksa Utama Area II Senior Auditor, Area II
9	Siti Parwita Eka Kirana	Pemeriksa Utama Area II Senior Auditor, Area II
10	Linda Polontalo	Pemeriksa Utama Investigasi Senior Investigation Auditor
11	Rinna Oktantia	Pemeriksa Madya Investigasi Intermediate Investigation Auditor
12	Anisa Mega Pratiwi	Pemeriksa Muda Area I Junior Auditor, Area I
13	Arifiningtiyas Widyaningrum	Pemeriksa Pratama Area I Junior Auditor, Area I
14	Chicah Nurliyan	Pemeriksa Pratama Area II Junior Auditor, Area II
15	Della Marda Hakiky	Pemeriksa Pratama Area II Junior Auditor, Area II
16	Denny Prayitno	Pemeriksa Pratama Investigasi Junior Investigation Auditor
17	Khariz Arighi	Pemeriksa Pratama Investigasi Junior Investigation Auditor
18	Isnawati Septi Santoso	Staff Administrasi & Evaluasi Administration & Evaluation Staff
19	Istinganatun Ruhaniyah	Staff Administrasi & Evaluasi Administration & Evaluation Staff
20	Rega Pratama Putra	Staff Administrasi & Evaluasi Administration & Evaluation Staff

Sertifikasi Internal Auditor

Per 31 Desember 2024, seluruh karyawan SPI telah memiliki beberapa sertifikasi sebagai Internal Auditor, sebagai berikut:

Internal Auditor Certification

As of December 31, 2024, all SPI employees have obtained several certifications as Internal Auditors, as follows:

No.	Nama Sertifikasi Certification Name	Jumlah Karyawan SPI Number of SPI Employee
1	PIA - Dasar-Dasar Audit PIA - Fundamentals of Auditing	8
2	PIA - Audit Operasional PIA - Operational Audit	2
3	PIA - Pengelolaan Tugas-Tugas Audit PIA - Audit Task Management	1
4	Audit Internal 1 Akuntansi & Keuangan Internal Audit 1 - Accounting & Finance	1
5	QIA - Tingkat Dasar QIA - Basic Level	11
6	QIA - Tingkat Lanjutan QIA - Advanced Level	1

SATUAN PENGAWASAN INTERN

INTERNAL AUDIT UNIT

No.	Nama Sertifikasi Certification Name	Jumlah Karyawan SPI Number of SPI Employee
7	Audit Forensik Dasar Basic Forensic Audit	1
8	Pencegahan dan Pendeteksian Fraud Fraud Prevention and Detection	1

Program Pengembangan Kompetensi Satuan Pengawasan Intern

Demi menunjang kebutuhan, tingkat efektifitas dan lancarnya operasional perusahaan dalam melakukan audit internal, maka selama tahun 2024, Perseroan telah memberikan pelatihan bagi para personil SPI. Rincian pelatihan yang diikuti oleh masing-masing internal auditor, sebagai berikut:

Competency Development Program for the Internal Audit Unit

To support the needs, effectiveness, and smooth operation of the company in conducting internal audits, throughout 2024, the Company has provided training for SPI personnel. The details of the training attended by each internal auditor are as follows:

No.	Pelatihan atau Sertifikasi Training or Certification	Jumlah Peserta Number of Participants
Pelatihan Training		
1	<i>Internal Audit Capability Model: Raising The Bar</i>	1
2	Audit Pengadaan Barang dan Jasa Audit of Goods and Services Procurement	3
3	<i>Fraud Detection & Investigation for Internal Auditor</i>	5
4	<i>Fundamentals of IT Auditing</i>	1
5	Psikologi dan Komunikasi dalam Audit Psychology and Communication in Audit	2
6	<i>Integrated Risk Based Internal Auditing</i>	1
7	Audit atas Fungsi <i>Procurement</i> Audit on the Procurement Function	1
8	<i>Fundamentals of Risk-based Auditing</i>	2
9	<i>Internal Control COSO-2013</i>	1
10	<i>Audit Report Writing Effectively</i>	1
11	Quality Assurance atas <i>Self Assessment</i> Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PELNI (Persero) Quality Assurance on the Self-Assessment of the Internal Supervisory Unit (SPI) of PT PELNI (Persero)	18
12	Workshop dan Quality Assurance atas <i>Self Assessment</i> Evaluasi Efektivitas Pengendalian Intern PT PELNI (Persero) Workshop and Quality Assurance on Self Assessment of the Effectiveness of Internal Control at PT PELNI (Persero)	18
Sertifikasi Certification		
1	<i>Certified Internal Audit Executive</i> (CIAE)	1
2	Komunikasi dan Psikologi Audit Audit Communication and Psychology	1
3	<i>Qualified Internal Auditor</i> (QIA)	
	a. Tingkat Dasar Basic Level	7

SATUAN PENGAWASAN INTERN

INTERNAL AUDIT UNIT

No.	Pelatihan atau Sertifikasi Training or Certification	Jumlah Peserta Number of Participants
	b. Tingkat Lanjutan Advance Level	8
	c. Tingkat Manajerial Managerial Level	1
4	<i>Certified Corporate Risk Manager (CCRM)</i>	5
5	<i>Certified Corporate Risk Analyst (CCRA)</i>	13

Kedudukan dan Keanggotaan Satuan Pengawasan Intern

Perseroan telah membentuk SPI yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Kedudukan SPI sebagai organ yang membantu Direktur Utama ditempatkan dalam struktur organisasi yang setara dengan peran dan tanggung jawabnya, dan dalam mengungkapkan pandangan dan pemikiran terkait dengan pelaksanaan pengawasan kepada Manajemen yang dilakukan secara bebas dan tidak dapat dipengaruhi ataupun ditekan oleh Manajemen maupun pihak lainnya dalam organisasi Perusahaan.

Kedudukan Satuan Pengawasan Intern di Perseroan dijelaskan sebagai berikut:

1. SPI berkedudukan di Kantor Pusat dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
2. SPI dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Intern
3. Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris
4. Dalam melakukan pemeriksaan, dibentuk Tim Audit dengan posisi fungsional tertentu dan waktu tertentu terdiri dari Pengawas, Ketua Tim dan Anggota Tim

Berikut ini adalah Struktur Organisasi SPI pada tahun 2024:

Position and Membership of the Internal Audit Unit

The Company has established an Internal Audit Unit (SPI) that reports directly to the President Director. The position of the SPI as an organ assisting the President Director is placed within the organizational structure to match its role and responsibilities. The SPI expresses its views and thoughts related to oversight independently, without influence or pressure from Management or any other parties within the organization.

The position of the Internal Audit Unit in the Company is described as follows:

1. The SPI is headquartered at the Central Office and reports directly to the President Director.
2. The SPI is led by a Head of the Internal Audit Unit.
3. The Head of SPI is appointed and dismissed by the President Director after obtaining approval from the Board of Commissioners.
4. For conducting audits, an Audit Team is formed with specific functional positions and time frames, consisting of Supervisors, Team Leaders, and Team Members.

The following is the Organizational Structure of the SPI in 2024:

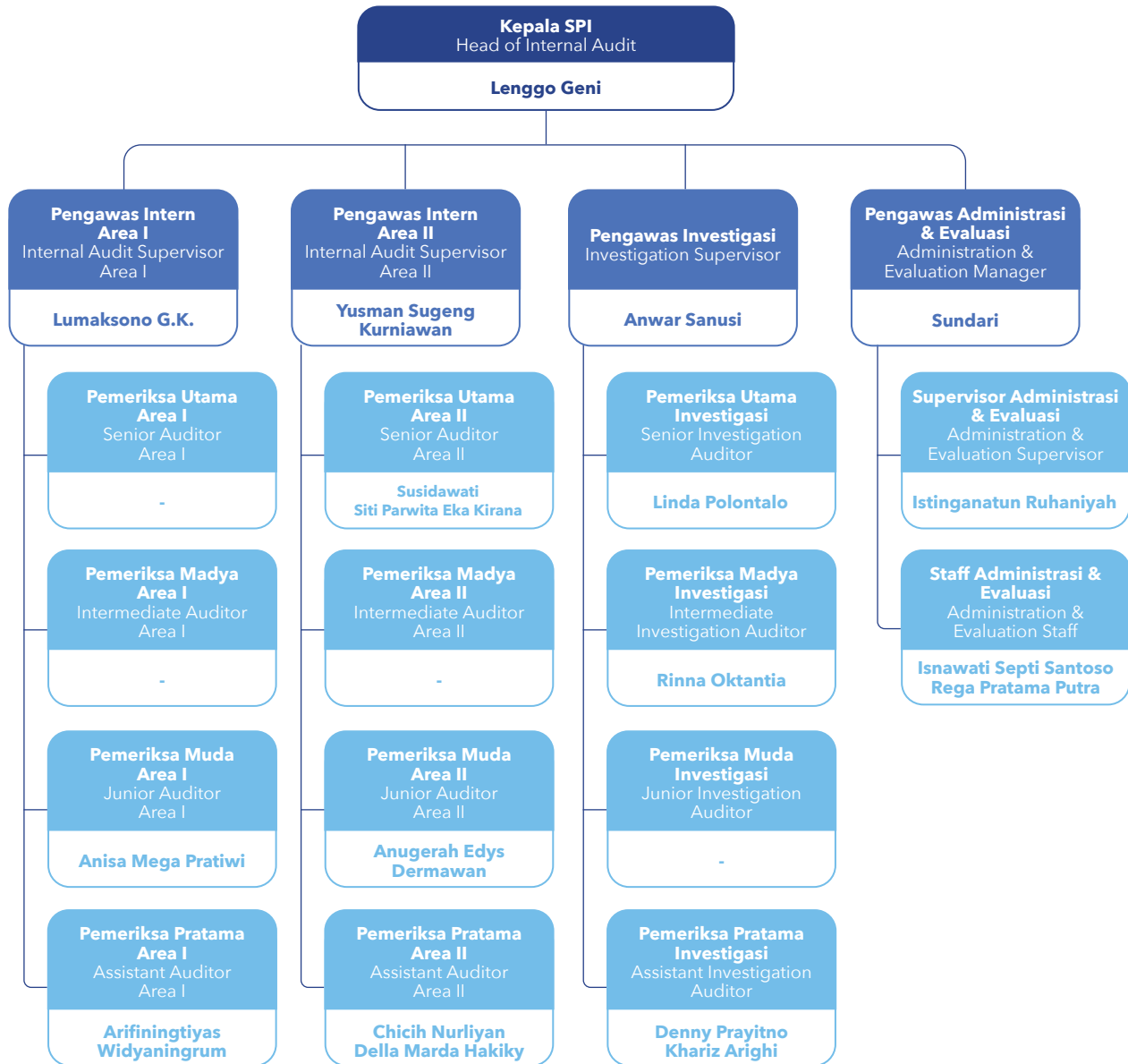


SATUAN PENGAWASAN INTERN

INTERNAL AUDIT UNIT

Struktur Organisasi SPI

Organizational Structure of the SPI



Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pengawasan Intern

Uraian Tugas dan tanggung jawab SPI yang ditetapkan berdasarkan Internal Audit *Charter* adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran serta Program Kerja Audit Tahun (PKAT) berdasarkan prioritas risiko sesuai dengan tujuan Perusahaan;

Duties and Responsibilities of the Internal Audit Unit

The duties and responsibilities of the SPI, as outlined in the Internal Audit Charter, are as follows:

1. Prepare and implement the Work Plan and Budget as well as the Annual Audit Work Program (PKAT) based on risk priorities in line with the Company's objectives.



SATUAN PENGAWASAN INTERN

INTERNAL AUDIT UNIT

2. Menyusun program kerja audit berbasis risiko untuk menjamin mutu kegiatan Audit Internal;
 3. Mengevaluasi integritas dan keandalan informasi dan sarana yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklarifikasi, dan melaporkan informasi tersebut;
 4. Mengevaluasi sistem yang diciptakan untuk menjamin kepatuhan terhadap kebijakan, rencana kerja, prosedur, peraturan perundangan yang memiliki dampak besar terhadap organisasi Perusahaan;
 5. Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola Perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan;
 6. Melakukan audit dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan penggunaan aset/alat produksi serta kegiatan lainnya;
 7. Melakukan audit atas badan usaha afiliasi dan Anak Perusahaan, atas perintah Direktur Utama dan laporan disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris anak perusahaan;
 8. Melakukan audit terhadap objek audit Yayasan atau Lembaga Keuangan Non Bank yang didirikan oleh PT PELNI (Persero) dan/atau PELNI Group atas perintah Direktur Utama;
 9. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
 10. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, up. Komite Audit;
 11. Membuat laporan dan evaluasi hasil monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil audit;
 12. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan oleh SPI dan/atau Auditor Eksternal;
 13. Melakukan evaluasi mutu kegiatan dan hasil audit sesuai standar audit;
 14. Melakukan Audit Khusus, atas:
 - a. Perintah Direktur Utama;
 - b. Pengembangan hasil audit sebelumnya;
2. Develop a risk-based audit work program to ensure the quality of internal audit activities.
 3. Evaluate the integrity and reliability of information and the means used to identify, measure, clarify, and report such information.
 4. Evaluate systems designed to ensure compliance with policies, work plans, procedures, and regulations that have a significant impact on the Company's organization.
 5. Assess the effectiveness of internal control implementation, risk management, and corporate governance processes in accordance with laws and Company policies.
 6. Conduct audits and assessments of the efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, and the use of assets/production tools and other activities.
 7. Audit affiliated entities and subsidiaries upon the President Director's order, with reports submitted to the President Director and the subsidiary's Board of Commissioners.
 8. Audit foundations or non-bank financial institutions established by PT PELNI (Persero) and/or PELNI Group upon the President Director's order.
 9. Provide improvement suggestions and objective information about the activities being audited at all management levels.
 10. Prepare audit reports and submit them to the President Director and the Board of Commissioners, to the Audit Committee.
 11. Prepare reports and evaluate the monitoring results of the audit recommendations follow-up.
 12. Monitor, analyze, and report the implementation of corrective actions suggested by SPI and/or External Auditors.
 13. Evaluate the quality of activities and audit results according to audit standards.
 14. Conduct Special Audits based on:
 - a. Orders from the President Director;
 - b. Development of previous audit results;

SATUAN PENGAWASAN INTERN

INTERNAL AUDIT UNIT

- c. Menindaklanjuti hasil temuan audit eksternal; Setelah mendapat disposisi penugasan audit khusus dari Direktur Utama;
15. Melakukan kegiatan konsultasi berkaitan dengan pengelolaan risiko, sistem pengendalian intern, serta praktik GCG dalam upaya meningkatkan kinerja dan nilai Perusahaan secara berkesinambungan;
16. Bertindak sebagai *counterpart* dengan pihak Auditor Eksternal dan Komite Audit dalam kegiatan Pemeriksaan di Perusahaan;
17. Meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan Auditor Internal di SPI secara profesional dengan sertifikasi.

- c. Follow-up on external audit findings; After obtaining the special audit assignment disposition from the President Director.
15. Provide consultation on risk management, internal control systems, and GCG practices to continuously improve the Company's performance and value.
16. Act as a counterpart with External Auditors and the Audit Committee in the Company's audit activities.
17. Enhance the knowledge, skills, and capabilities of Internal Auditors in SPI professionally through certification.

Pedoman Kerja Satuan Pengawasan Intern

Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya secara kompeten, independen dan dapat dipertanggungjawabkan, SPI memiliki pedoman kerja sebagaimana tertuang dalam Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 10.28/01/SK/HKO.01/2022.

Piagam Pengawasan Internal memuat:

1. Latar Belakang
2. Visi dan Misi
3. Tujuan
4. Struktur dan Kedudukan
5. Persyaratan SPI
6. Akuntabilitas
7. Independensi dan Objektivitas
8. Tugas dan Tanggung Jawab
9. Wewenang
10. Lingkup Pekerjaan
11. Standar
12. Kode Etik
13. Larangan Rangkap Tugas
14. Hubungan dengan Auditee
15. Hubungan dengan Auditor Eksternal
16. Hubungan dengan Komite Audit
17. Reviu Internal Audit Charter
18. Masa Berlaku dan Evaluasi

Internal Audit Unit Work Guidelines

To exercise its authority, duties, and responsibilities competently, independently, and accountably, SPI follows the work guidelines as stipulated in the Internal Audit Charter set forth in the Board of Directors Decree No. 10.28/01/SK/HKO.01/2022.

The Internal Audit Charter includes:

1. Background
2. Vision and Mission
3. Objectives
4. Structure and Position
5. SPI Requirements
6. Accountability
7. Independence and Objectivity
8. Duties and Responsibilities
9. Authority
10. Scope of Work
11. Standards
12. Code of Ethics
13. Prohibition of Concurrent Duties
14. Relationship with Auditee
15. Relationship with External Auditors
16. Relationship with Audit Committee
17. Internal Audit Charter Review
18. Validity Period and Evaluation



SATUAN PENGAWASAN INTERN

INTERNAL AUDIT UNIT

Rapat Satuan Pengawasan Intern dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Komite Audit

Satuan Pengawasan Intern melakukan pembahasan terkait audit Perseroan bersama Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Komite Audit secara berkala melalui mekanisme rapat kerja. Pada 2024, Satuan Pengawasan Intern menyelenggarakan rapat kerja dengan dihadiri anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Komite Audit sejumlah 4 kali, dengan uraian sebagai berikut:

Meetings of the Internal Audit Unit with the Board of Commissioners, Directors, and/or Audit Committee

The Internal Audit Unit discusses the Company's audit matters with the Board of Commissioners, Directors, and/or Audit Committee regularly through work meetings. In 2024, the Internal Audit Unit held four work meetings attended by members of the Board of Commissioners, Directors, and/or Audit Committee, as follows:

No.	Tanggal Date	Agenda Pembahasan Discussion Agenda
1	28 Januari 2024 January 28, 2024	Penyampaian Laporan Kegiatan Satuan Pengawasan Intern Triwulan IV Tahun 2023 Presentation of the Internal Audit Unit Activity Report for the Fourth Quarter of 2023
2	8 Mei 2024 May 8, 2024	Penyampaian Laporan Kegiatan Satuan Pengawasan Intern Triwulan I Tahun 2024 Presentation of the Internal Audit Unit Activity Report for the First Quarter of 2024
3	30 September 2024 September 30, 2024	Penyampaian Laporan Kegiatan Satuan Pengawasan Intern Triwulan II Tahun 2024 Presentation of the Internal Audit Unit Activity Report for the Second Quarter of 2024
4	15 Desember 2024 December 15, 2024	Laporan Kegiatan SPI Triwulan III Tahun 2024 Internal Audit Unit Activity Report for the Third Quarter of 2024

Laporan Pelaksanaan Tugas Satuan Pengawasan Intern

Selama tahun 2024, SPI telah melakukan berbagai kegiatan, sebagai berikut:

1. Pemeriksaan sebanyak 3 (dua) obyek audit pada Divisi Kantor Pusat;
2. Pemeriksaan sebanyak 14 (empat belas) obyek audit pada Kantor Cabang;
3. Pemeriksaan sebanyak 12 (sebelas) obyek audit pada Kapal Penumpang;
4. Pemeriksaan sebanyak 2 (dua) obyek audit pada Kapal Perintis;
5. Pemeriksaan / Audit Khusus pada 2 obyek audit
6. Reviu atas Penghasilan dan Biaya PSO Tahun Anggaran 2024.
7. Evaluasi system pengendalian internal
8. Pendampingan auditor eksternal
9. Sosialisasi dan konsultasi
10. Pengembangan system audit management

Report on the Execution of Internal Audit Unit Duties

Throughout 2024, the SPI has undertaken various activities, as follows:

1. Conducted audits on 3 (three) audit objects at Head Office Divisions;
2. Conducted audits on 14 (fourteen) audit objects at Branch Offices;
3. Conducted audits on 12 (twelve) audit objects on Passenger Vessels;
4. Conducted audits on 2 (two) audit objects on Pioneer Vessels;
5. Conducted Special Audits on 2 audit objects;
6. Reviewed PSO (Public Service Obligation) Revenue and Expenses for Fiscal Year 2024;
7. Evaluated the internal control system;
8. Provided assistance to external auditors;
9. Conducted socialization and consultancy activities;
10. Developed the audit management system.



AKUNTAN PUBLIK PUBLIC ACCOUNTANT

Dalam upaya memperkuat kualitas implementasi GCG di Perseroan, fungsi pengawasan terhadap aspek keuangan juga dilakukan secara eksternal (audit eksternal) yang dijalankan oleh Akuntan Publik. Dalam menjalankan tugasnya, Akuntan Publik melaksanakan standar auditing yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Dalam standar tersebut, akuntan publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Audit yang dilakukan meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara menyeluruh dan *independent*.

MEKANISME PENUNJUKKAN AKUNTAN PUBLIK

Pada umumnya, penunjukan Akuntan Publik dilakukan bersamaan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Berdasarkan Keputusan RUPST Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2023, Pemegang Saham menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik, & Indra untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT PELNI (Persero) dan Entitas Anaknya serta Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2024 dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.

In an effort to strengthen the quality of GCG implementation in the Company, external supervision of financial aspects is also conducted (external audit) by a Public Accountant. In performing their duties, Public Accountants adhere to auditing standards established and approved by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI) in the Professional Standards of Public Accountants (SPAP). According to these standards, public accountants are required to plan and conduct audits to obtain reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement.

The audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. The audit also includes evaluating the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as assessing the overall presentation of the financial statements independently.

PUBLIC ACCOUNTANT APPOINTMENT MECHANISM

Generally, the appointment of a Public Accountant is conducted simultaneously with the Public Accounting Firm (KAP) through the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) based on the recommendations of the Board of Commissioners and the Audit Committee. Based on the AGMS Resolution for the Approval of the Annual Report for the 2023 Fiscal Year, the Shareholders appointed the Public Accounting Firm (KAP) Djoko, Sidik, & Indra to audit the Consolidated Financial Statements of PT PELNI (Persero) and its Subsidiaries as well as the Financial Statements of the Company's Partnership and Community Development Program for the 2024 Fiscal Year and delegated the authority to the Company's Board of Commissioners to determine the audit service fees and other reasonable appointment terms for the KAP.

AKUNTAN PUBLIK PUBLIC ACCOUNTANT

Berdasarkan keputusan RUPS tersebut, Komite Audit menyusun draft Kerangka Acuan Kerja beserta rencana anggaran biaya untuk dapat disetujui oleh Dewan Komisaris. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, Manajemen melakukan proses pengadaan melalui mekanisme Penunjukan langsung. Selama proses penunjukan berlangsung, Manajemen memberikan laporan progres rutin kepada Komite Audit sampai dengan terbitnya Perjanjian Audit.

PENUGASAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN AKUNTAN PUBLIK TAHUN BUKU 2024

Mengacu pada mekanisme penunjukan KAP dan Akuntan Publik di atas, pada tahun 2024 PT PELNI (Persero) menugaskan KAP Djoko, Sidik, & Indra (*International member of Alliance of Independent Firms (ANTEA)*) dengan Nomor Surat Tanda Terdaftar (STTD) KAP di OJK STTD.KAP-00025/PM.22/2017 dan Akuntan Publik Indra Soesetiawan, Ak., CA., CPA., ACPA., CPI dengan Nomor Register Akuntan Publik (NRAP) AP. 0139 sebagai auditor eksternal yang bertugas untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian PT PELNI (Persero) beserta Entitas Anaknya dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PELNI (Persero) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Dasar penunjukan dan penugasan KAP Djoko Sidik & Indra dan Akuntan Publik Indra Soesetiawan, Ak., CA., CPA., ACPA., CPI, antara lain:

1. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 01 tanggal 4 Juni 2024;
2. Surat Tanggapan Dewan Komisaris perihal Penunjukan Kantor Akuntan Publik Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian dan PUMK Tahun 2024 Nomor 111/DK/VII-2024 tanggal 15 Juli 2024.

Based on this AGMS resolution, the Audit Committee drafted the Terms of Reference and budget plan for approval by the Board of Commissioners. After obtaining approval from the Board of Commissioners, Management conducted the procurement process through a direct appointment mechanism. During the appointment process, Management provided routine progress reports to the Audit Committee until the Audit Agreement was issued.

ASSIGNMENT OF PUBLIC ACCOUNTING FIRM AND PUBLIC ACCOUNTANT FOR THE 2024 FISCAL YEAR

Referring to the above mechanism for the appointment of KAP and Public Accountant, in 2024 PT PELNI (Persero) assigned KAP Djoko, Sidik, & Indra (an international member of the Alliance of Independent Firms (ANTEA)) with OJK Registered Public Accountant Firm Number STTD.KAP-00025/PM.22/2017 and Public Accountant Indra Soesetiawan, Ak., CA., CPA., ACPA., CPI with Public Accountant Registration Number (NRAP) AP. 0139 as the external auditor responsible for auditing the Consolidated Financial Statements of PT PELNI (Persero) and its Subsidiaries and the Financial Statements of the Partnership and Community Development Program of PT PELNI (Persero) for the fiscal year ending December 31, 2024.

The basis for the appointment and assignment of KAP Djoko Sidik & Indra and Public Accountant Indra Soesetiawan, Ak., CA., CPA., ACPA., CPI includes:

1. Minutes of the General Meeting of Shareholders (AGMS) Number 01 dated June 4, 2024;
2. Letter of Response from the Board of Commissioners regarding the Appointment of the Public Accounting Firm for the Audit of Consolidated Financial Statements and PUMK for 2024 Number 111/DK/VII-2024 dated July 15, 2024.



AKUNTAN PUBLIK PUBLIC ACCOUNTANT

JASA YANG DIBERIKAN OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN AKUNTAN PUBLIK TAHUN BUKU 2024 DAN PERIODE PENUGASANNYA

Jasa Utama

Jasa utama yang diberikan oleh KAP Djoko, Sidik, & Indra dan Akuntan Publik Indra Soesetiawan, Ak., CA., CPA., Asean CPA., CPI adalah melakukan audit dan review Laporan Keuangan Konsolidasian PT PELNI (Persero) beserta Entitas Anaknya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Akuntan Publik berkewajiban memberikan pendapat tentang kewajaran dan kesesuaian Laporan Keuangan dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Jasa Lainnya

Selain melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, jasa lain yang diberikan oleh KAP Djoko, Sidik, & Indra dan Akuntan Publik Indra Soesetiawan, Ak., CA., CPA., ACPA., CPI untuk tahun buku 2024 antara lain adalah Jasa *Agreed Upon Procedures* (AUP) dan Jasa *Reviu Penilaian Key Performance Indicators* (KPI) Manajemen.

Periode Penugasan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Mulai Pekerjaan sampai dengan 20 April 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit Laporan Keuangan terhitung sejak Berita Acara Mulai Pekerjaan selambat-lambatnya sampai tanggal 20 April 2024;
2. Pelaksanaan audit Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) dimulai pada tanggal 1 November 2023 sampai dengan penerbitan laporan yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 20 April 2024.

SERVICES PROVIDED BY THE PUBLIC ACCOUNTING FIRM AND PUBLIC ACCOUNTANT FOR THE 2024 FISCAL YEAR AND ASSIGNMENT PERIOD

Main Services

The main services provided by KAP Djoko, Sidik, & Indra and Public Accountant Indra Soesetiawan, Ak., CA., CPA., ACPA., CPI include auditing and reviewing the Consolidated Financial Statements of PT PELNI (Persero) and its Subsidiaries for the fiscal year ending December 31, 2024. The Public Accountant is responsible for providing an opinion on the fairness and conformity of the Financial Statements with generally accepted accounting principles and standards in Indonesia.

Other Services

In addition to auditing the Company's Financial Statements for the 2024 fiscal year, other services provided by KAP Djoko, Sidik, & Indra and Public Accountant Indra Soesetiawan, Ak., CA., CPA., ACPA., CPI for the 2024 fiscal year include Agreed-Upon Procedures and Review Services for Management Key Performance Indicators Assessment.

Assignment Period

The work execution period begins from the date of signing the Work Commencement Report until April 20, 2024, with the following details:

1. The audit of the Financial Statements starts from the Work Commencement Report and must be completed by April 20, 2024, at the latest;
2. The audit of the Implementation of Prudential Principles (KPPK) starts on November 1, 2023, and the report must be issued by April 20, 2024, at the latest.

AKUNTAN PUBLIK PUBLIC ACCOUNTANT

Daftar Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Perusahaan dalam Lima Tahun Terakhir

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, bahwa Pemberian Jasa Audit Umum atas Laporan Keuangan oleh KAP dapat dilakukan paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut, sedangkan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Adapun nama Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) yang mengaudit Laporan Keuangan PT PELNI (Persero) dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

List of Public Accounting Firms and Public Accountants for the Company in the Last Five Years

Referring to the Regulation of the Minister of Finance No. 17/PMK.01/2008 concerning Public Accountant Services, the provision of General Audit Services for Financial Statements by a KAP can be performed for a maximum of 6 (six) consecutive fiscal years, while by a Public Accountant for a maximum of 3 (three) consecutive fiscal years.

The names of the Public Accounting Firms (KAP) and Public Accountants (AP) that audited the Financial Statements of PT PELNI (Persero) in the last 5 (five) years are as follows:

Tahun Buku Financial Year	Nama KAP Accounting Firm Name	Nama AP Auditor's Name	Biaya Audit (Rp) Audit Fee (Rp)	Opini Audit Audit Opinion
2024	Djoko, Sidik, & Indra	Indra Soesetiawan, Ak., CA., CPA., Asean CPA., CPI	575.000.000	Wajar, dalam semua hal yang material Fair, in all material respects
2023	Djoko, Sidik, & Indra	Indra Soesetiawan, Ak., CA., CPA., Asean CPA., CPI	527.250.000	
2022	Djoko, Sidik, & Indra	Indra Soesetiawan, Ak., CA., CPA., Asean CPA., CPI	414.000.000	
2021	Djoko, Sidik, & Indra	Indra Soesetiawan Ak., CA., CPA	410.300.000	
2020	Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo	Welly Adrianto, CPA	440.000.000	



SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL INTERNAL CONTROL SYSTEM

Selain mengoptimalkan pengelolaan risiko di seluruh aspek bisnis dan operasional, Perseroan juga mengaplikasikan Sistem Pengendalian Internal secara terstruktur dan komprehensif di semua lini bisnis guna meminimalisir *error* dan agar terhindar dari aksi kecurangan. Pada implementasinya, Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan di Perseroan merupakan sebuah proses penyatuan tindakan dan kegiatan secara berkesinambungan baik yang dilakukan oleh pimpinan Perseroan maupun karyawan untuk memberi keyakinan bahwa tujuan Perseroan telah terealisasi melalui kinerja yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Agar implementasi Sistem Pengendalian Internal Perseroan senantiasa berjalan efektif dan efisien, Direksi telah menetapkan sistem pengendalian internal yang ketat untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan. Lingkup sistem pengendalian internal yang dijalankan Perseroan terdiri dari Lingkungan Pengendalian Internal, Pengkajian terhadap Pengelolaan Risiko Usaha (*risk assessment*), Aktivitas Pengendalian, Sistem Informasi dan Komunikasi, serta *Monitoring* terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal yang berjalan di Perseroan.

Pengendalian Keuangan dan Operasional

Pengendalian Keuangan dan Operasional Sistem pengendalian internal yang diterapkan di Perseroan mencakup aktivitas pengendalian keuangan dan operasional, yaitu:

1. Pengendalian Keuangan

Sistem pengendalian internal dalam hal keuangan dilakukan guna memberikan jaminan kebenaran informasi keuangan, efektivitas dan efisiensi proses pengelolaan Perseroan serta aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan.

In addition to optimizing risk management across all business and operational aspects, the Company also applies a structured and comprehensive Internal Control System in all business lines to minimize errors and avoid fraudulent actions. In its implementation, the Internal Control System applied in the Company is a continuous process of integrating actions and activities conducted by both the Company's leadership and employees to ensure that the Company's objectives are achieved through effective and efficient performance, the reliability of financial reporting, asset security, and compliance with laws and regulations.

To ensure that the implementation of the Company's Internal Control System remains effective and efficient, the Board of Directors has established a stringent internal control system to safeguard the Company's investments and assets. The scope of the internal control system implemented by the Company consists of the Internal Control Environment, Business Risk Management Assessment, Control Activities, Information and Communication Systems, and Monitoring of the Effectiveness of the Internal Control System in the Company.

Financial and Operational Controls

The internal control system implemented in the Company includes financial and operational control activities, namely:

1. Financial Control

The internal control system in terms of finance is carried out to ensure the accuracy of financial information, the effectiveness and efficiency of the Company's management processes, and compliance with related laws and regulations. The Board of Directors must establish an effective internal control system to safeguard the Company's investments and assets.



SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

INTERNAL CONTROL SYSTEM

2. Pengendalian Operasional

Pengendalian dalam kegiatan operasional yang meliputi kegiatan produksi, penjualan, operasi maupun investasi dilakukan agar tercapainya target Perseroan yang terbebas dari kecurangan dan sesuai dengan peraturan di dalam Perseroan.

Efektivitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Tahun 2024

Manajemen Perseroan bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal yang andal dan efektif serta berbasis Manajemen Risiko. Setiap level organisasi memiliki kewajiban untuk meningkatkan budaya sadar risiko.

Satuan Pengawasan Intern (SPI) bertanggung jawab dalam melakukan *review* terkait pengendalian risiko di seluruh aktivitas di unit kerja. Dan untuk menjaga efektivitas pengendalian SPI bekerja sama dengan Bagian Devisi Manajemen Risiko dan DPA QHSSE dalam melaksanakan audit baik di unit, proyek, maupun Divisi Kantor Pusat.

Hasil Evaluasi atas Pengendalian internal disampaikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Perseroan memastikan penerapan pengendalian internal untuk periode 2024 telah dilaksanakan secara efektif, mencakup seluruh unsur penerapan sesuai standar yang digunakan. Temuan yang didapat melalui evaluasi telah dilaporkan dan mendapat pembahasan untuk segera ditindaklanjuti guna menjamin kualitas pengendalian internal dapat terjaga secara berkesinambungan.

Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap penerapan Sistem Pengendalian Internal pada 2024, manajemen PT PELNI (Persero) menilai bahwa Perseroan telah melaksanakan pengendalian internal dengan optimal, melalui perangkat infrastruktur dan kebijakan

2. Operational Control

Operational controls, including production, sales, operations, and investments, are carried out to achieve the Company's targets free from fraud and in accordance with the Company's regulations.

Effectiveness of the Implementation of the Internal Control System in 2024

The Company's management is responsible for ensuring a reliable and effective Internal Control System based on Risk Management. Every level of the organization is obliged to enhance a culture of risk awareness.

The Internal Audit Unit (SPI) is responsible for reviewing risk controls in all activities within the work units. To maintain the effectiveness of control, SPI collaborates with the Risk Management and DPA QHSSE Department in conducting audits in units, projects, and the Central Office Bureau.

The results of the internal control evaluation are submitted to the Board of Directors for follow-up and monitoring. Based on these evaluation results, the Company ensures that the implementation of internal controls for the period 2024 has been carried out effectively, covering all implementation elements in accordance with the standards used. Findings from the evaluation have been reported and discussed for immediate follow-up to ensure the quality of internal controls is continuously maintained.

Statement of the Board of Commissioners and the Board of Directors on the Adequacy of the Internal Control System

Based on the evaluation conducted on the implementation of the Internal Control System in 2024, the management of PT PELNI (Persero) assesses that the Company has optimally implemented internal controls through adequate infrastructure and policies.



SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

INTERNAL CONTROL SYSTEM

yang memadai. Terdapat sejumlah catatan sebagai *area improvement*, untuk segera ditindaklanjuti oleh SPI Perseroan pada penerapan pengendalian internal di periode 2025. Manajemen Perseroan optimistis Sistem Pengendalian Internal yang terlaksana secara lebih baik akan berperan sebagai perangkat yang kuat guna mendukung sejumlah aksi korporasi yang akan dilakukan pada tahun mendatang.

There are several notes as areas for improvement to be immediately followed up by the Company's SPI in the implementation of internal controls in the 2025 period. The Company's management is optimistic that a better-implemented Internal Control System will serve as a strong tool to support several corporate actions to be undertaken in the coming year.

MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

Direksi dan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) memahami pentingnya pelaksanaan Manajemen Risiko Perusahaan dalam upaya mencapai tujuan Perusahaan secara efektif dan berkesinambungan. Mengingat pentingnya kontribusi manajemen risiko bagi keberhasilan Perusahaan, maka PT PELNI (Persero) dalam mengelola risiko Perusahaan melakukan integrasi antara *Balance Scorecard* dengan *Risk Management Based on ISO 31000:2018* sehingga dapat ditemukan dan dilakukan pengelolaan *Key Performance Indicator* (KPI) Perusahaan yang berkualitas untuk mendorong kinerja organisasi dengan menetapkan *Key Risk Indicator* (KRI) sebagai *early warning system* untuk mengendalikan ancaman terhadap pencapaian *strategic objective* Perusahaan. Sehingga dapat dikendalikan dan diminimalisir faktor-faktor penghambat kegagalan pencapaian sasaran strategis Perusahaan.

The Board of Directors and the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) understand the importance of implementing Corporate Risk Management in an effort to achieve the company's objectives effectively and sustainably. Given the significant contribution of risk management to the company's success, PT PELNI (Persero) integrates the *Balanced Scorecard* with Risk Management based on ISO 31000:2018. This integration allows for the identification and management of quality Key Performance Indicators (KPI) to drive organizational performance by establishing Key Risk Indicators (KRI) as an early warning system to control threats to the achievement of the company's strategic objectives. Consequently, this helps control and minimize factors that could impede the achievement of the company's strategic goals.

Di samping itu, tetap dilakukan *risk assessment* terhadap risiko-risiko lain yang berbasis di luar risiko integrasi tersebut. Risiko-risiko di luar *integrated BSC* tersebut ditetapkan sebagai *Corporate Risk*. Untuk mendapatkan proses manajemen risiko yang efektif, sebuah standar kerangka kerja manajemen risiko perlu dibangun dan diterapkan secara konsisten dan menyeluruh. Oleh sebab itu, semua pemilik risiko maupun fasilitator manajemen risiko diharuskan untuk melaksanakan kerangka kerja dan proses manajemen risiko dengan basis prioritas. Direksi menetapkan

In addition, risk assessments are conducted for other risks that fall outside of this integration. Risks outside of the integrated BSC are designated as Corporate Risks. To achieve an effective risk management process, a standard risk management framework needs to be built and applied consistently and comprehensively. Therefore, all risk owners and risk management facilitators are required to implement the risk management framework and process based on priority. The Board of Directors prioritizes major risks, which are those that would have a significant impact if not

MANAJEMEN RISIKO

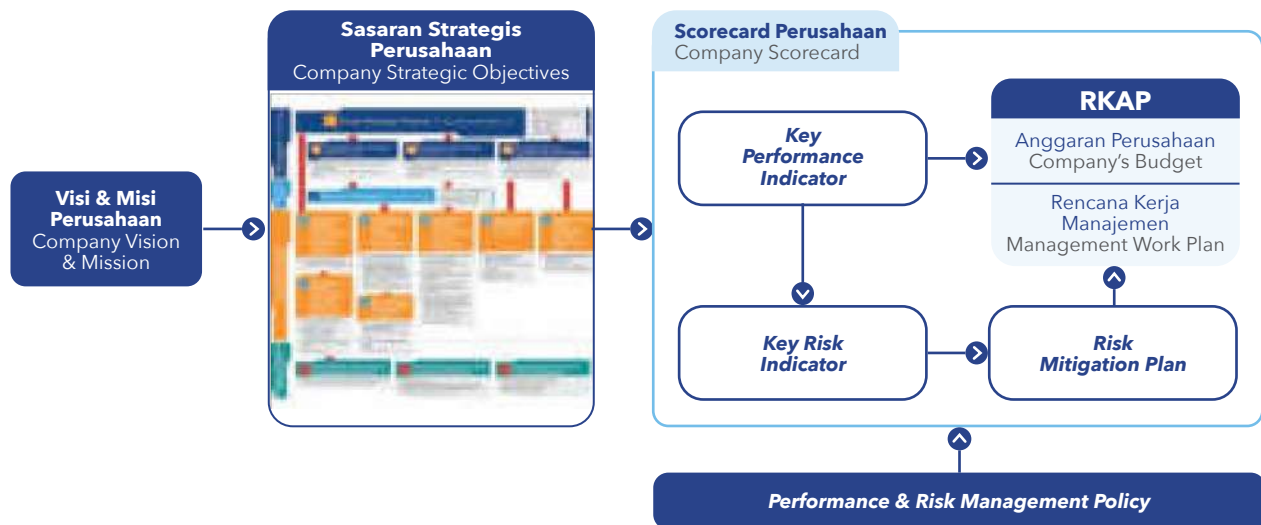
RISK MANAGEMENT

risiko-*risiko* utama sebagai prioritas, yaitu risiko yang mempunyai dampak besar jika tidak ditangani secara baik. Penanganan risiko utama dapat ditambahkan seiring dengan meningkatnya kemampuan internal dalam menangani risiko.

properly addressed. The handling of major risks can be expanded as internal capabilities in risk management improve.

Basis Integrasi Balance Scorecard dengan Enterprise Risk Management

Basis Integrasi Balance Scorecard dengan Enterprise Risk Management



TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO

Pengelolaan manajemen risiko di PT PELNI (Persero) dilakukan berdasarkan ISO 31000: 2018 yang tertuang dalam Pedoman Manajemen Risiko sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: 01.14/03/SK/HKO.01/2022 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000:2018 PT PELNI (Persero). Pedoman Manajemen Risiko mempunyai tujuan untuk memberikan kepastian yang memadai (*reasonable assurance*) dalam mencapai tujuan perusahaan, menjaga dan meningkatkan nilai dari pemegang saham. Hal tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran risiko di seluruh lapisan organisasi, membangun ketahanan dan melakukan mitigasi risiko serta menjaga risiko yang tersisa (*residual risk*) pada tingkat yang dapat ditoleransi (*tolerable level*).

RISK MANAGEMENT GOVERNANCE

Risk management at PT PELNI (Persero) is conducted based on ISO 31000: 2018, as outlined in the Risk Management Guidelines in accordance with the Board of Directors Decree Number: 01.14/03/SK/HKO.01/2022 concerning ISO 31000:2018-based Risk Management Guidelines for PT PELNI (Persero). The Risk Management Guidelines aim to provide reasonable assurance in achieving the company's objectives, preserving and enhancing shareholder value. This is achieved by increasing risk awareness across all levels of the organization, building resilience, mitigating risks, and maintaining residual risks at a tolerable level.

MANAJEMEN RISIKO

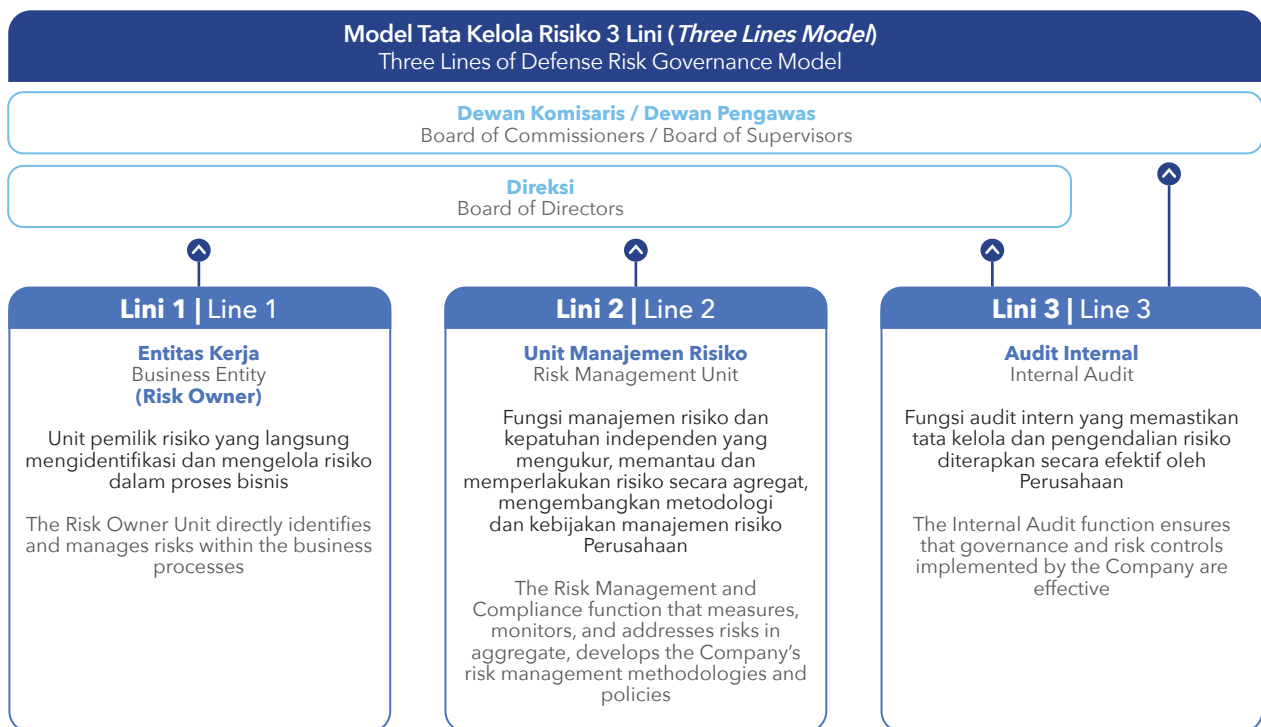
RISK MANAGEMENT

Ruang lingkup dari Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan berlaku untuk seluruh pihak dan seluruh aktivitas usaha yang dilakukan oleh PT PELNI (Persero). Hal ini dimaksudkan agar daya saing (*competitiveness*) dan kelangsungan usaha (*going concern*) Perusahaan dapat selalu terjaga.

The scope of the Company's Risk Management Guidelines applies to all parties and all business activities conducted by PT PELNI (Persero). This ensures the company's competitiveness and business continuity are always maintained.

Three Lines Model

Three Lines Model



Penerapan *Three Lines Model* pada PT PELNI (Persero), sesuai dengan Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-3/ DKU.MBU/05/2023.

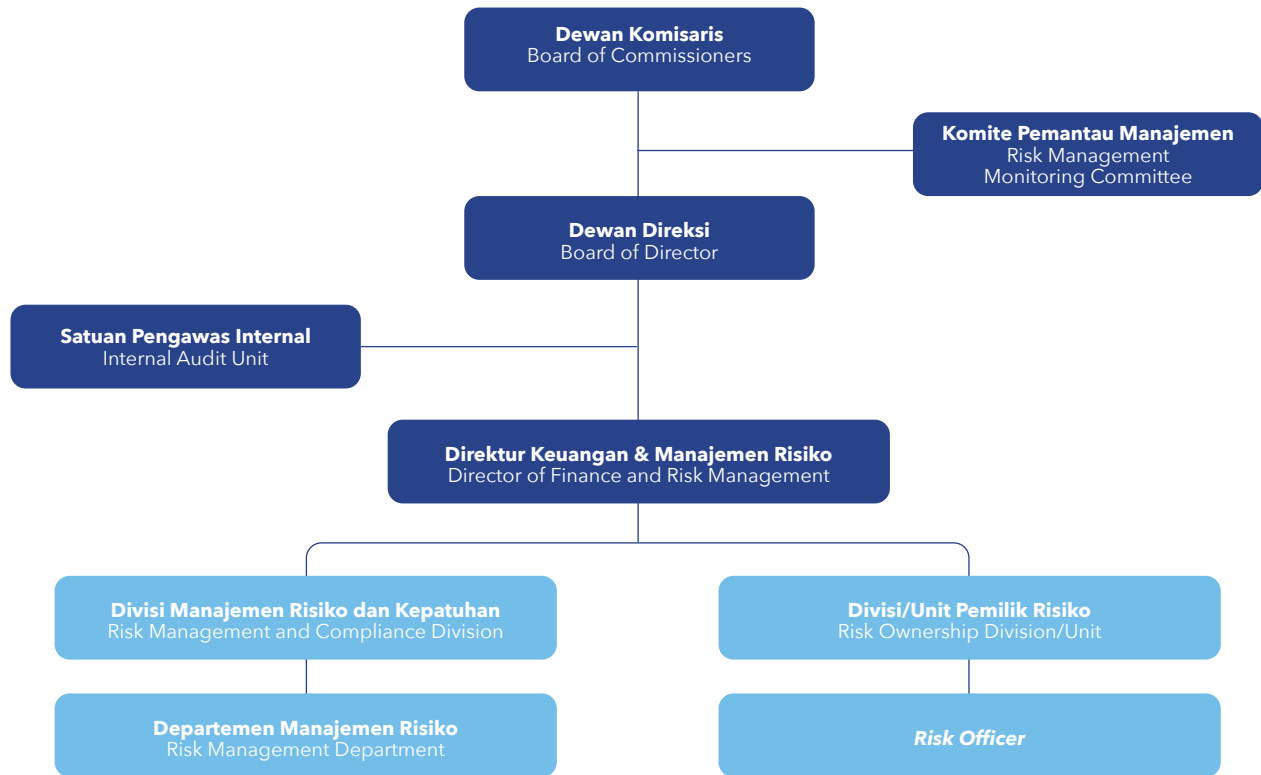
The implementation of the Three Lines Model at PT PELNI (Persero) follows the Technical Guidelines for the Composition and Qualification of Risk Management Organs within State-Owned Enterprises, Number SK-3/ DKU.MBU/05/2023.

MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

Struktur Manajemen Risiko di PT PELNI (Persero)

Risk Management Structure at PT PELNI (Persero)



Dari masing-masing struktur manajemen risiko tersebut, memiliki peran dan tanggung jawab adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris

- Memberikan arahan atas kebijakan Manajemen Risiko.
- Melaksanakan pengawasan dan memberikan saran perbaikan kepada Dewan Direksi atas penerapan kebijakan Manajemen Risiko.

2. Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR)

Pembentukan Komite Pemantau Manajemen Risiko merupakan bagian dari upaya Perusahaan untuk memperkuat praktik pengawasan terhadap kebijakan dan sistem manajemen risiko di Perseroan sebagai bagian dari implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Komite Pemantau Manajemen Risiko bertugas untuk:

Each structure within the risk management system has the following roles and responsibilities:

1. Board of Commissioners

- Provide guidance on Risk Management policies.
- Supervise and provide improvement suggestions to the Board of Directors on the implementation of Risk Management policies.

2. Risk Management Monitoring Committee (KPMR)

The establishment of the Risk Management Monitoring Committee is part of the Company's efforts to strengthen oversight practices over risk management policies and systems as part of Good Corporate Governance (GCG) implementation. The Committee's duties include:

MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

- a. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai penyusunan perbaikan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko semua bidang Perusahaan sebelum mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- b. Melakukan diskusi dengan Dewan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan manajemen risiko, jika diperlukan.
- c. Dan lainnya sesuai pada pedoman manajemen risiko PT PELNI (Persero)

3. Dewan Direksi

- a. Menetapkan Kebijakan, Pedoman Penerapan Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif.
- b. Menetapkan *risk appetite* dan batas toleransi risiko yang digunakan sebagai ukuran kriteria nilai risiko.
- c. Bertanggung jawab atas penerapan Kebijakan Manajemen Risiko.
- d. Dan lainnya sesuai pada pedoman manajemen risiko PT PELNI (Persero).

4. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

- a. Memastikan bahwa organisasi yang dibentuk untuk mengelola Manajemen Risiko telah berfungsi secara independen.
- b. Melaksanakan evaluasi kebijakan Manajemen Risiko secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi asesmen risiko dan kecukupan implementasi *system*.
- c. Dan lainnya sesuai pada pedoman manajemen risiko PT PELNI (Persero).

5. Satuan Pengawas Intern (SPI)

- a. Memiliki fungsi pengawasan atas pelaksanaan manajemen risiko.
- b. Berperan dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas dan proses bisnis yang dilakukan oleh *risk owner* telah sesuai dengan kebijakan, standar, prosedur kerja, dan manual yang ditetapkan oleh Direksi, termasuk di dalamnya kebijakan manajemen risiko.

- a. Providing input to the Board of Commissioners on improving risk management related to controlling risks across all Company areas before approval by the Board of Commissioners.
- b. Discussing with the Board of Directors or work units related to risk management, if necessary.
- c. Other duties as specified in the risk management guidelines of PT PELNI (Persero).

3. Board of Directors

- a. Establish written and comprehensive Risk Management Policies and Guidelines.
- b. Set the risk appetite and risk tolerance limits used as criteria for risk value measurement.
- c. Responsible for implementing Risk Management Policies.
- d. Other duties as specified in the risk management guidelines of PT PELNI (Persero).

4. Director of Finance and Risk Management

- a. Ensure that the organization formed to manage Risk Management functions independently.
- b. Conduct periodic evaluations of Risk Management policies to ensure the accuracy of risk assessment methodologies and the adequacy of system implementation.
- c. Other duties as specified in the risk management guidelines of PT PELNI (Persero).

5. Internal Audit Unit (SPI)

- a. Oversee the implementation of risk management.
- b. Ensure that all activities and business processes carried out by risk owners comply with the policies, standards, work procedures, and manuals set by the Board of Directors, including risk management policies.



MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

- c. Dan lainnya sesuai pada pedoman manajemen risiko PT PELNI (Persero).

6. Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan

- a. Menyusun dan mengusulkan Kebijakan, Pedoman dan Prosedur Penerapan Manajemen Risiko kepada Dewan Direksi.
- b. Membangun arsitektur, SOP dan strategi manajemen risiko.
- c. Memastikan proses manajemen risiko berjalan dengan efektif di seluruh lingkungan perusahaan.
- d. Dan lainnya sesuai pada pedoman manajemen risiko PT PELNI (Persero).

7. Departemen Manajemen Risiko

- a. Melakukan penjabaran *risk appetite* dan *risk tolerance level* korporat.
- b. Melakukan penjabaran *risk tolerance* ke *level* unit kerja pemilik risiko sebagai acuan bagi pemilik risiko dalam memutuskan tentang seberapa besar risiko yang dapat diambil.
- c. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua upaya pengelolaan risiko diseluruh Perusahaan.
- d. Dan lainnya sesuai pada pedoman manajemen risiko PT PELNI (Persero).

8. Divisi / Unit Pemilik Risiko

- a. Mengelola risiko-risiko yang ada di unit kerjanya.
- b. Mengendalikan pengendalian risiko dan melaporkan hasilnya secara berkala.
- c. Bertanggung jawab atas kerugian dan risiko yang terjadi sebagai akibat penyimpangan dan /atau pelanggaran terhadap keputusan Direksi.
- d. Dan lainnya sesuai pada pedoman manajemen risiko PT PELNI (Persero).

9. Risk Officer

- a. Merupakan fungsi yang diintegrasikan dengan *risk performance management officer* pada jabatan setingkat manager serta dikukuhkan melalui SK Direksi.

- c. Other duties as specified in the risk management guidelines of PT PELNI (Persero).

6. Risk Management and Compliance Division

- a. Develop and propose Risk Management Policies, Guidelines, and Procedures to the Board of Directors.
- b. Build the architecture, SOPs, and risk management strategies.
- c. Ensure the risk management process runs effectively throughout the company.
- d. Other duties as specified in the risk management guidelines of PT PELNI (Persero).

7. Risk Management Department

- a. Articulate the corporate risk appetite and risk tolerance levels.
- b. Translate risk tolerance into the work unit level as a reference for risk owners in deciding the extent of acceptable risk.
- c. Coordinate and integrate all risk management efforts throughout the Company.
- d. Other duties as specified in the risk management guidelines of PT PELNI (Persero).

8. Risk Owner Division/Unit

- a. Manage risks within their respective work units.
- b. Control risks and report results periodically.
- c. Responsible for losses and risks arising from deviations and/or violations of Board of Directors' decisions.
- d. Other duties as specified in the risk management guidelines of PT PELNI (Persero).

9. Risk Officer

- a. Integrated with the risk performance management officer at the managerial level and formalized through a Board of Directors Decree.



MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

- b. Penugasan fungsi *risk officer* dapat diberikan secara berkala.
- c. Menjadi pendamping para *risk owner* dan unit kerja untuk membantu proses implementasi manajemen risiko.
- d. Dan lainnya sesuai pada pedoman manajemen risiko PT PELNI (Persero).

10. Seluruh Pegawai

Seluruh pegawai mempunyai peran dalam mewujudkan Manajemen Risiko yang efektif dan secara aktif berpartisipasi mengidentifikasi risiko potensial yang ada di lingkungannya dan membantu melaksanakan tindakan Penanganan Risiko yang tepat.

Dalam pengelolaan risiko di Perusahaan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Membangun Kesadaran dan Budaya Risiko

Risiko dapat timbul karena pemilik risiko tidak memahami atau tidak mengetahui secara utuh aktifitas proses bisnis yang dijalankan. Untuk jangka panjang, manajemen risiko dengan pendekatan kesadaran dan budaya risiko jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan dengan cara lain.

2. Risiko Sebagai Tanggungjawab Bersama

Sadar risiko merupakan bagian dari satu rangkaian proses yang dimulai dengan pengetahuan tentang manajemen risiko, dari pengetahuan lalu timbul kesadaran, terakhir menjadi komitmen dilaksanakan. Komitmen yang terus menerus diperagakan atau dilaksanakan akan menjadi budaya.

3. Integrasi Manajemen Risiko dengan Manajemen Kinerja

Dalam Prinsip Risk Management ISO 31000:2018, tujuan Manajemen Risiko adalah menciptakan Nilai (*Value Creation*). Dalam upaya mencapai hal tersebut, maka melalui manajemen risiko dilakukan suatu langkah strategis yaitu proses integrasi antara *Balance Scorecard* dengan *Risk Management* ISO 31000:2018. Proses integrasi *performance* yang

- b. The assignment of the Risk Officer function can be conducted periodically.
- c. Assist risk owners and work units in the risk management implementation process.
- d. Other duties as specified in the risk management guidelines of PT PELNI (Persero).

10. All Employees

Play a role in realizing effective Risk Management and actively participate in identifying potential risks in their environment and helping implement appropriate Risk Handling actions.

In managing risk, the Company considers the following aspects:

1. Building Risk Awareness and Culture

Risk can arise because the risk owner does not fully understand or know the business process activities being carried out. In the long term, risk management through awareness and risk culture is far more effective than other approaches.

2. Risk as a Shared Responsibility

Risk awareness is part of a process that begins with knowledge about risk management, leading to awareness, and ultimately becoming a commitment. Continuous commitment will turn into a culture.

3. Integration of Risk Management with Performance Management

According to the Risk Management Principle ISO 31000:2018, the goal of Risk Management is to create Value (*Value Creation*). To achieve this, strategic steps such as integrating the *Balance Scorecard* with *Risk Management* ISO 31000:2018 are taken. By integrating performance measurement tools (KPIs) with Risk Management



MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT

menggunakan alat *measurement*-nya KPI dengan *Risk Management* alat *measurement*-nya KRI maka Perusahaan akan mampu mencapai *Strategic Objective* Perusahaan secara efektif dan merubah risiko - risiko yang ada menjadi peluang bisnis Perusahaan.

4. Manajemen Risiko dan Manajemen Kinerja Mempunyai Orientasi kepada Sasaran Strategis Perusahaan dan Unit Kerja

Manajemen kinerja mendorong *Critical Success Factor* untuk pencapaian Sasaran Strategis, sedangkan Manajemen Risiko adalah mengendalikan *Critical Risk Factor* agar Sasaran Strategis selamat dari ancaman risiko.

5. Audit Berbasis Risiko (*Risk-Based Audit*)

Pendekatan audit ini berfokus dalam mengevaluasi risiko - risiko baik strategis, finansial, operasional, regulasi, dan lainnya yang dihadapi oleh Perusahaan. Pendekatan berbasis risiko ini meliputi kegiatan *assurance* dan konsultasi, dimana kesuksesan kedua kegiatan tersebut ditentukan oleh Manajemen Risiko, *internal control*, dan *Good Corporate Governance*.

6. Anggaran Berbasis Risiko (*Risk-Based Budgeting*)

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran pada tingkat divisi sudah harus mempertimbangkan profil risiko di unitnya masing-masing yang disusun oleh masing-masing divisi. Demikian pula pada tingkat Direktorat dan Korporat, RJPP dan RKAP yang disusun oleh Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan dan Divisi Perbendaharaan juga mempertimbangkan profil risiko di tingkat Direktorat dan Korporat.

7. Penetapan Selera Risiko (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

Risk appetite atau selera risiko merupakan besaran risiko yang bersedia diambil Perusahaan dalam rangka mencapai target komersial yang ditetapkan. Toleransi risiko adalah besaran risiko tertentu yang boleh melewati *risk appetite* sampai limit tertentu.

measurement tools (KRIs), the Company can achieve its Strategic Objectives effectively and turn existing risks into business opportunities.

4. Risk Management and Performance Management Oriented to Strategic Objectives

Performance management encourages Critical Success Factors for achieving Strategic Objectives, while Risk Management controls Critical Risk Factors to protect Strategic Objectives from risk threats.

5. Risk-Based Audit

This audit approach focuses on evaluating strategic, financial, operational, regulatory, and other risks faced by the company. The risk-based approach includes assurance and consulting activities, where the success of both is determined by Risk Management, internal control, and Good Corporate Governance.

6. Risk-Based Budgeting

The preparation of the Work Plan and Budget at the divisional level must consider the risk profile of each unit, compiled by each division. Similarly, at the Directorate and Corporate levels, the RJPP and RKAP prepared by the Risk Management and Compliance Division and the Treasury Division must consider the risk profile at the Directorate and Corporate levels.

7. Setting Risk Appetite and Risk Tolerance

Risk appetite is the amount of risk the Company is willing to take to achieve set commercial targets. Risk tolerance is the specific amount of risk that can exceed the risk appetite up to a certain limit. The Annual Work Plan must be made with regard to



MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

Rencana Kerja Tahunan Perusahaan wajib dibuat dengan memperhatikan batasan dari selera risiko dan toleransi risiko untuk memastikan Perusahaan dalam melaksanakan strategi tidak melampaui limit risiko.

the risk appetite and risk tolerance limits to ensure that the Company does not exceed risk limits while implementing its strategy.

Jenis Risiko dan Cara Pengelolaannya

Berdasarkan pemetaan risiko yang telah dilakukan didapatkan top risk PT PELNI (Persero) tahun 2024 dengan mitigasinya sebagai berikut:

Types of Risks and Their Management

Based on the risk mapping conducted, the top risks of PT PELNI (Persero) in 2024 along with their respective mitigation measures are as follows:

No.	Risiko dan Mitigasi Risks and Mitigation
1	Risiko: Koreksi atas Realisasi Anggaran PSO Risk: Correction to PSO Budget Realization Mitigasi: 1. Pengumpulan Dokumen Pendukung Penagihan PSO Kapal Penumpang via Aplikasi PSO & Subsidi dan Cloud 2. Pembahasan Hasil Verifikasi dengan Kementerian Perhubungan Mitigation: 1. Collection of Supporting Documents for PSO Billing of Passenger Ships via the PSO & Subsidy Application and Cloud System 2. Discussion of Verification Results with the Ministry of Transportation
2	Risiko: Koreksi atas Realisasi Anggaran Subsidi Risk: Correction to Subsidy Budget Realization Mitigasi: 1. Pengumpulan Dokumen Pendukung Penagihan Subsidi Kapal Perintis, Rede, Tol Laut & Ternak via Aplikasi PSO & Subsidi dan Cloud 2. Pembahasan Hasil Verifikasi dengan Kementerian Perhubungan Mitigation: 1. Collection of Supporting Documents for Subsidy Billing of Pioneer Ships, Rede, Sea Toll, and Livestock Programs via the PSO & Subsidy Application and Cloud System 2. Discussion of Verification Results with the Ministry of Transportation
3	Risiko: Kecelakaan di Kapal Risk: Ship Accident Mitigasi: 1. Sosialisasi terkait <i>Safety Operation</i> dalam kegiatan Internal Audit ISM Code 2. Mereview isi dari Manual SMK. 3. Sosialisasi seluruh Nakhoda Kapal terkait keselamatan dalam operasional kapal 4. Monitoring aspek keselamatan di atas kapal melalui <i>Self Assesment</i> Kelaiklautan Kapal. 5. Melaksanakan rapat bersama <i>Top Management</i> PT PELNI terkait isu keselamatan dan target <i>zero accident</i>. 6. Diskusi terkait kecelakaan kapal dengan Divisi Pengawakan Mitigation: 1. Socialization related to Safety Operation during the Internal Audit of the ISM Code 2. Reviewing the contents of the Safety Management Manual (SMM) 3. Conducting safety awareness sessions for all Ship Masters regarding onboard operational safety 4. Monitoring safety aspects onboard vessels through the Ship Seaworthiness Self-Assessment 5. Holding meetings with PT PELNI Top Management regarding safety issues and the zero-accident target 6. Discussions on ship accidents with the Crewing Division

MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

No.	Risiko dan Mitigasi Risks and Mitigation
4	Risiko: Serangan Cyber Pada Aplikasi Ticketing PT PELNI (Persero) Risk: Cyber Attack on PT PELNI (Persero) Ticketing Application Mitigasi: 1. Mengimplementasikan dan sertifikasi SMK ISO 27001 (Pendampingan Implementasi dan Sertifikasi SMK ISO 27001) 2. Divisi TI akan melakukan Penetration Testing aplikasi (<i>Penetration Testing</i>) 3. Divisi TI akan menerapkan sistem <i>firewall</i> aplikasi (Penerapan Sistem <i>Firewall</i> Aplikasi) Mitigation: 1. Implementing and certifying the Information Security Management System (ISMS) ISO 27001 (Assistance for ISO 27001 ISMS Implementation and Certification) 2. The IT Division will conduct penetration testing on the application (Penetration Testing) 3. The IT Division will implement an application firewall system (Application Firewall Implementation)
5	Risiko: Kontribusi <i>Non-Captive</i> Anak Perusahaan Belum Optimal Risk: Non-Captive Subsidiaries' Contribution Remains Suboptimal Mitigasi: 1. PT PBM Sarana Bandar Nasional • Meningkatkan <i>canvassing</i> di cabang untuk kegiatan <i>non captive</i> • Percepatan tindaklanjut kerjasama kegiatan <i>non captive</i> dengan BUMN, BUMD, BUMS • Melakukan perhitungan tarif secara komprehensif 2. PT Pelita Indonesia Djaya • Melakukan canvassing kepada BUMN (<i>follow up</i> ke PIS, PTK) • Melakukan canvassing kepada calon klien baru dan klien lama (PIS,PTK) • Menambah intensitas promosi via medsos • Mencari pembeli sapi di Jakarta yg via kupang • Finalisasi sewa lahan untuk penanaman produk indikasi geografis (kacang panjang, buncis, wortel, labu siam, sawi putih, terong, kol) Mitigation: 1. PT PBM Sarana Bandar Nasional • Increase canvassing activities at branch offices for non-captive business opportunities • Accelerate follow-up on non-captive business collaborations with SOEs, regional-owned enterprises (BUMD), and private companies (BUMS) • Conduct comprehensive tariff calculations 2. PT Pelita Indonesia Djaya • Conduct canvassing to SOEs (follow-up with PIS, PTK) • Conduct canvassing to prospective and existing clients (PIS, PTK) • Increase promotional activities via social media • Identify potential cattle buyers in Jakarta (via Kupang) • Finalize land lease agreements for the cultivation of geographically indicated products (yardlong beans, green beans, carrots, chayote, napa cabbage, eggplant, cabbage)
6	Risiko: Performa/Speed Kapal Menurun Risk: Decline in Vessel Performance/Speed



MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

No.	Risiko dan Mitigasi Risks and Mitigation
	Mitigasi: 1. Pengadaan Suku Cadang Mak motor induk, PO untuk 6 kapal yang sudah di bea cukai akan dikirim ke kapal 2. Pengadaan Suku Cadang Daihatsu Motor Bantu, seluruh suku cadang telah diterima kapal akan dipasang untuk pemenuhan jatuh tempo CMS dan PO tambahan akan dikirim ke kapal 3. Pengadaan <i>Charge Air Cooler</i> Motor induk, seluruh suku cadang telah diterima kapal akan dipasang 4. Pengadaan Suku Cadang Mesin pendingin merk Jhonson control seluruh suku cadang telah diterima kapal akan dipasang 5. Pengadaan Suku Cadang <i>Turbo Charge</i> merk ABB, PO yang diterima rekanan akan dikirim ke kapal 6. Pengadaan Suku Cadang Governor merk Woodward, seluruh suku cadang telah diterima kapal akan dipasang 7. Pengadaan Suku Cadang <i>Seperator, Cooler & Boiler</i>, seluruh suku cadang telah diterima kapal akan dipasang Mitigation: 1. Procurement of Spare Parts for Main Engine (Mak): Purchase Orders (POs) for 6 vessels have been cleared through customs and will be delivered to the ships 2. Procurement of Spare Parts for Daihatsu Auxiliary Engines: All spare parts have been received by the vessels and will be installed to meet CMS deadlines; additional POs will be delivered to the ships 3. Procurement of Charge Air Coolers for Main Engines: All spare parts have been received by the vessels and will be installed 4. Procurement of Spare Parts for Johnson Controls Cooling System: All spare parts have been received by the vessels and will be installed 5. Procurement of ABB Turbocharger Spare Parts: POs received by the vendor will be delivered to the ships 6. Procurement of Woodward Governor Spare Parts: All spare parts have been received by the vessels and will be installed 7. Procurement of Spare Parts for Separator, Cooler & Boiler: All spare parts have been received by the vessels and will be installed
7	Risiko: Pengadaan Kapal Ro-ro Terlambat Risk: Ro-Ro Vessel Procurement Delayed Mitigasi: Melakukan tender kembali dan melanjutkan tahapan pengadaan Kapal Roro. Mitigation: Re-tender and proceeding with the next stages of the Ro-Ro vessel procurement process.
8	Risiko: Penambahan Dotasi Dalam Penyehatan Dana Pensiun Risk: Additional Allocation for Pension Fund Recovery Mitigasi: 1. Melaksanakan Pembayaran Iuran Tambahan tepat waktu (TW I-IV) 2. Melakukan perubahan arahan investasi (TW IV) 3. Pelaksanaan kajian perubahan arahan investasi Mitigation: 1. Timely payment of additional contributions (Q1-Q4) 2. Adjustment of investment directives (Q4) 3. Implementation of a study on changes to investment directives
9	Risiko: Target Penghasilan Muatan di Kapal Ternak Gagal Tercapai Risk: Livestock Vessel Cargo Revenue Target Not Achieved Mitigasi: Percepatan pemetaan kuota hewan ternak selama 1 tahun dan kolaborasi dengan Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mendapatkan jenis hewan ternak lain yang dapat dikirim Mitigation: Acceleration of annual livestock quota mapping and collaboration with the Livestock Agency of East Nusa Tenggara (NTT) Province to identify other types of livestock that can be shipped.

MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

No.	Risiko dan Mitigasi Risks and Mitigation
10	Risiko: Target Laba Tol Laut Gagal Tercapai Risk: Sea Toll Profit Target Not Achieved Mitigasi: 1. Canvassing secara masif 2. Kordinasi dengan Divisi Operasi Angkutan Barang untuk persediaan stok container 3. Perencanaan sistem sewa <i>container</i> untuk di Cabang yang mengalami <i>shortage</i> container 4. Perencanaan penggunaan kontainer merah putih milik Kementerian Perhubungan Mitigation: 1. Massive canvassing efforts 2. Coordination with the Cargo Transport Operations Division regarding container stock availability 3. Planning a container leasing system for branches experiencing container shortages 4. Planning the use of "Merah Putih" containers owned by the Ministry of Transportation
11	Risiko: Target Penghasilan Kontainer di Kapal Penumpang Gagal Tercapai Risk: Container Revenue Target on Passenger Vessels Not Achieved Mitigasi: 1. Melakukan Canvassing 2. Evaluasi tarif 3. Pemberian diskon tarif 4. Penggunaan SOC Reefer Kontainer Mitigation: 1. Conducting canvassing 2. Tariff evaluation 3. Providing tariff discounts 4. Utilization of SOC reefer containers
12	Risiko: Target Penghasilan <i>Charter</i> Gagal Tercapai Risk: Charter Revenue Target Not Achieved Mitigasi: 1. Koordinasi dengan divisi terkait atas Pengoperasian Kapal Lognus 6 untuk di komersialkan 2. Kolaborasi dengan mitra <i>cargo owner</i> dan <i>ship owner</i> yang ada 3. <i>End-to-end Logistic</i> dengan kolaborasi dengan anak usaha (PT SBN & SBL) 4. <i>Joint Marketing</i> bersama dengan mitra BUMS (PML) 5. Mengunjungi <i>source</i> PT ICA di Pontianak 6. Mengunjungi <i>source</i> PT Masagena Intibara di Samarinda Mitigation: 1. Coordination with relevant divisions for the operation and commercialization of Lognus 6 vessel 2. Collaboration with cargo owners and existing ship owners 3. End-to-end logistics collaboration with subsidiaries (PT SBN & SBL) 4. Joint marketing efforts with private shipping partners (PML) 5. Visiting the sourcing location of PT ICA in Pontianak 6. Visiting the sourcing location of PT Masagena Intibara in Samarinda
13	Risiko: Kerusakan <i>Crane</i> Risk: Crane Damage Mitigasi: Membuat standard checklist surveyor untuk pengecekan kondisi crane di kapal. Mitigation: Development of a Standard Checklist for Surveyors to Inspect Crane Conditions on Board



MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

Sertifikasi Manajemen Risiko

Berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : SK-3/DKU.MBU/05/2023 Tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Sampai dengan Desember 2024, divisi manajemen risiko telah didukung oleh tenaga profesional yang telah memiliki sertifikasi profesi, program pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk peningkatan pengetahuan dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Sertifikasi Type of Certification	Jumlah Total
ERM Implementation: Qualified Chief of Risk Officer (QCRO)	1
Directorship Development Program	1
ERM Fundamentals (with Enterprise Risk Management Associate Professional Certification)	1
Qualified Risk Management Professional (QRMA)	4
Certified Compliance Professional (CCP)	1
Certified Governance Professional (CGP)	1

Evaluasi Manajemen Risiko Tahun 2024

PT PELNI (Persero) telah melaksanakan pengukuran *Risk Maturity Index* (RMI) Tahun 2024 atas kinerja manajemen risiko Tahun 2023, Tujuan Penilaian RMI berbasis kinerja adalah meyakinkan bahwa Tingkat Kematangan Risiko sinkron dengan hasil kinerja. Penilaian Kinerja berbasis Risiko Menggabungkan antara Penilaian RMI berdasarkan Dimensi dengan realisasi kinerja yang terdiri dari Tingkat Kesehatan Peringkat Akhir (*Final Rating*) dan Peringkat Komposit Risiko. RMI Berbasis Kinerja diukur berdasarkan aspek (1) Aspek Dimensi dan (2) Aspek Kinerja. Berikut disampaikan hasil Penilaian yaitu :

Risk Management Certification

Based on the Decision of the Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number: SK-3/DKU.MBU/05/2023 on Technical Guidelines for the Composition and Qualification of Risk Management Organs in State-Owned Enterprises. As of December 2024, the risk management division has been supported by professionals with certification, training programs, and competency development for knowledge enhancement with the following details:

Risk Management Evaluation for 2024

PT PELNI (Persero) has conducted the Risk Maturity Index (RMI) assessment for the year 2024, based on the risk management performance in 2023. The objective of the performance-based RMI assessment is to ensure that the level of risk maturity is aligned with actual performance results. The Risk-Based Performance Assessment integrates the RMI dimension assessment with the actual performance realization, which includes:



MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

Aspek Dimensi

Dimension Aspect

Parameter	Dimensi Dimension	Deskripsi Description	Skor Dimensi Dimension Score	Skor Score
1 - 3	1	Budaya dan Kapabilitas Risiko Risk Culture and Capability	3,7	
4 - 19	2	Organisasi dan Tata Kelola Risiko Risk Organization and Governance	4,0	
20 - 33	3	Kerangka Risiko dan Kepatuhan Risk Framework and Compliance	3,8	
34 - 39	4	Proses dan Kontrol Risiko Risk Process and Control	3,7	
40 - 42	5	Model, Data, dan Teknologi Risiko Risk Model, Data, and Technology	3,0	
1 - 42	Skor Aspek Dimensi Dimension Aspect Score			3,8

No	Parameter	Bobot Weight	Skala Scale	Standar Penilaian Assessment Standard	Hasil Penilaian Assessment Result
Indikator Pencapaian Kinerja Performance Achievement Indicators					
1	Capaian KPI Kolegial Collegial KPI Achievement	30%	4	100	30
2	Capaian Kinerja Keuangan Financial Performance Achievement	30%	3	82,5	24,75
3	Capaian Kinerja Operasi/Produksi Utama Main Operational/Production Performance Achievement	40%	4	100	40
Total Nilai Total Score					94,75
Kinerja Performance					BAIK Good
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Risk Management Implementation Quality Rating					
1	Pencapaian Nilai Eksposur Risiko sesuai dengan target Risiko Residual Achievement of Risk Exposure Value according to Residual Risk Target	30%	1	90	27
2	Pencapaian output pelaksanaan kegiatan perlakuan Risiko sesuai dengan target Achievement of Risk Treatment Activity Outputs according to Target	20%	5	100	20
3	Realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan perlakuan Risiko sesuai dengan anggaran Realization of Risk Treatment Activity Budget according to Plan	20%	2	80	16
4	Ketepatan penilaian Risiko Accuracy in Risk Assessment	30%	2	80	24
Total Nilai Total Score					87
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Risk Management Implementation Quality Rating					Satisfactory

MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

Aspek Kinerja

Performance Aspect

No	Aspek Aspect	Nilai Aspek Aspect Score	Nilai Konversi Converted Score	Bobot Weight	Nilai Konversi x Bobot Weighted Score	Skor Score
1	Tingkat Kesehatan Peringkat Akhir (Final Rating) Final Health Rating	AAA	100	50%	50	
2	Peringkat Komposit Risiko Composite Risk Rating	2	78	50%	39	
Skor Aspek Kinerja Performance Aspect Score						89
Penyesuaian Skor Score Adjustment						-0,25
Skor RMI RMI Score						3,6

Berdasarkan Hasil Penilaian PT PELNI (Persero) Memperoleh Skor RMI Sebesar 3,6 dengan deskripsi Fase Praktik Yang Baik (+) Artinya, Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko PT PELNI (Persero) saat ini sudah melampaui Fase Praktik Yang Baik dan sedang menuju Fase Praktik Yang Lebih Baik.

Based on the Assessment Results, PT PELNI (Persero) obtained an RMI score of 3.6 with the description "Good Practice Phase (+)." This indicates that the maturity level of PT PELNI (Persero) risk management implementation has surpassed the Good Practice Phase and is progressing toward the Better Practice Phase.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Direksi PT PELNI (Persero) meningkatkan kesadaran risiko di seluruh lapisan organisasi, membangun ketahanan dan melakukan mitigas risiko serta menjaga risiko yang tersisa (residual *risk*) pada Tingkat yang dapat ditoleransi (*tolerable level*) sesuai Pedoman Manajemen Risiko berbasis ISO 31000:2018 dan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku serta prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Untuk meningkatkan kesadaran risiko, Direksi PT PELNI (Persero) menetapkan selera risiko sebagai berikut:

Statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or Audit Committee on the Adequacy of the Risk Management System

The Board of Directors of PT PELNI (Persero) increases risk awareness across all organizational levels, builds resilience, and mitigates risks while maintaining residual risk at a tolerable level in accordance with ISO 31000:2018-based Risk Management Guidelines and based on applicable regulations and the principles of Good Corporate Governance (GCG). To enhance risk awareness, the Board of Directors of PT PELNI (Persero) establishes the following risk appetite:

MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

Sikap Terhadap Risiko*) Risk Appetite*)	Pernyataan Selera Risiko Statement of Risk Appetite
Tidak Toleran Intolerant	- Direksi PT PELNI (Persero) tidak memberikan ruang pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk perusakan terhadap lingkungan dan kelalaian terhadap keamanan siber dan perlindungan data pribadi. - Direksi PT PELNI (Persero) akan menjalankan bisnis dengan menerapkan tata kelola Perusahaan yang baik dan manajemen risiko yang terintegrasi, melengkapi, dan menjalankan organ pengelola risiko secara aktif dan prudent serta menjunjung tinggi core value AKHLAK. - The Board of Directors of PT PELNI (Persero) does not tolerate any violations of laws and regulations, including environmental damage, cybersecurity negligence, and breaches of personal data protection. - The Board of Directors of PT PELNI (Persero) is committed to conducting business by implementing good corporate governance and an integrated risk management system, complemented by active and prudent operation of risk management bodies while upholding the AKHLAK core values.
Konservatif Conservative	- Direksi PT PELNI (Persero) akan mengerjakan penugasan pemerintah dalam bentuk proyek strategis nasional atau untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan ketentuan secara finansial fisibel atau apabila tidak fisibel secara finansial diberikan kompensasi/subsidi atau pembiayaan dari PMN untuk memperoleh margin yang wajar. - Direksi PT PELNI (Persero) memenuhi kewajiban keuangan dan mempertahankan struktur keuangan yang sehat dan menjaga keberlangsungan usaha secara berkesinambungan - Direksi PT PELNI (Persero) berfokus menjalankan kegiatan bisnis utamanya secara tepat waktu, tepat sasaran, dan menjalankan dengan itikad baik. - The Board of Directors of PT PELNI (Persero) shall carry out government mandates in the form of national strategic projects or public service obligations, provided they are financially feasible, or if not financially feasible, with compensation/subsidies or funding from state capital injection (PMN) to ensure a fair margin. - The Board of Directors of PT PELNI (Persero) shall fulfill all financial obligations, maintain a sound financial structure, and ensure sustainable business continuity. - The Board of Directors of PT PELNI (Persero) is focused on executing its core business activities in a timely and targeted manner, and always with good faith.
Moderat Moderate	- Direksi PT PELNI (Persero) melakukan optimalisasi pengelolaan volatilitas pasar dan makroekonomi dengan menerima konsekuensi beban secara terukur. - The Board of Directors of PT PELNI (Persero) will optimize the management of market and macroeconomic volatility while accepting measured risk burdens.
Strategis Strategic	- Direksi PT PELNI (Persero) secara aktif dan dengan mempertimbangkan kalkulasi risiko yang matang untuk menciptakan nilai melalui inovasi model bisnis, eksplorasi, dan pengembangan, optimalisasi penataan portofolio, dan pertumbuhan anorganik yang mempertimbangkan aspek environmental, social, dan governance (ESG) dengan menerima konsekuensi peningkatan penambahan biaya modal (CAPEX) dengan risiko yang wajar dan terukur serta sepadan dengan kemalian investasi. - The Board of Directors of PT PELNI (Persero) actively and prudently takes calculated risks to create value through business model innovation, exploration and development, portfolio restructuring optimization, and inorganic growth, while taking into account environmental, social, and governance (ESG) aspects and accepting the consequences of increased capital expenditure (CAPEX) within reasonable, measurable, and proportional investment return risks.

***)Keterangan:**

- 1. Tidak Toleran**
 - Sangat berhati-hati dalam mengambil risiko dan lebih memilih menjaga stabilitas dan konsistensi dalam operasi bisnis.
 - Keputusan bisnis didasarkan pada pemeliharaan modal.
- 2. Konservatif**
 - Berhati-hati dalam mengambil risiko, dengan memilih beberapa risiko yang terkendali tetapi tetap memprioritaskan kestabilan usaha.
 - Keputusan bisnis didasarkan pada Upaya untuk melindungi nilai dari risiko besar yang tidak terduga termasuk didalamnya menghindari paparan terhadap fluktuasi pasar yang signifikan serta dapat menanggung beban yang kecil.
- 3. Moderat**
 - Bersedia mengambil risiko dalam batas tertentu untuk mencapai pertumbuhan dan keuntungan, tetapi tetap memperhatikan perlindungan terhadap kerugian besar.
 - Keputusan bisnis mempertimbangan peluang pertumbuhan dan dampak risiko secara bersamaan dan dapat menanggung beban yang sedang.
- 4. Strategis**
 - Secara aktif menerapkan strategi yang melibatkan pengelolaan risiko sebagai bagian integral dari rencana bisnis, mengambil risiko lebih tinggi dalam rangka mencapai pertumbuhan dan inovasi yang lebih besar.
 - Keputusan bisnis didasarkan pada analisis risiko dan potensi pengembalian investasi jangka panjang serta dapat menanggung beban yang besar.

***)Explanation:**

- 1. Not Tolerant**
 - Very cautious in taking risks and prefers to maintain stability and consistency in business operations.
 - Business decisions are based on capital preservation.
- 2. Conservative**
 - Cautious in taking risks, choosing controlled risks while prioritizing business stability.
 - Business decisions are based on efforts to protect against unforeseen significant market fluctuations and manage minor burdens.
- 3. Moderate**
 - Willing to take risks within certain limits to achieve growth and profit, while still focusing on protecting against major losses.
 - Business decisions balance growth opportunities and risk impacts, able to manage moderate burdens.
- 4. Strategic**
 - Actively implements strategies involving risk management as an integral part of business planning, taking higher risks to achieve greater growth and innovation.
 - Business decisions are based on risk analysis, long-term investment potential, and can manage significant burdens.



PERKARA PENTING YANG DIHADAPI

SIGNIFICANT CASES FACED

Per 31 Desember 2024, Perseroan mencatat beberapa perkara penting yang melibatkan Perseroan maupun Entitas Anak, antara lain:

As of December 31, 2024, the Company recorded several significant cases involving the Company and its Subsidiaries, including:

Pokok Perkara/Gugatan Subject Matter/Claims	Status Penyelesaian Perkara/Gugatan per 31 Desember 2024 Completion Status of Cases/Lawsuits as of December 31, 2024	Pengaruhnya Terhadap Kondisi Perusahaan The Impact on Company Conditions
Dugaan Tindak Pidana yang terjadi di atas KM Labobar Alleged Criminal Act Occurred on Board KM Labobar	- Penyidik Polda Papua sedang melakukan penyelidikan atas perkara dimaksud dan telah dilakukan permintaan keterangan kepada Pegawai PT PELNI (Persero); - Dalam perkembangannya, telah dilakukan pertemuan dengan Perwakilan Keluarga Korban dan Kuasa Hukum Korban dengan hasil penyelesaian perkara secara <i>Restorative Justice</i> (RJ) dan telah ditandatangani Surat Pernyataan dan Surat Kesepakatan Perdamaian; - Saat ini, PT PELNI (Persero) masih berkoordinasi dengan Penyidik Ditreskrimum Polda Papua terkait perkembangan perkara dimaksud.	Akan adanya preseden buruk terhadap tata kelola di Perusahaan It may set a negative precedent for the Company's governance
Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan dan Penggelapan terkait Kegiatan Operasional di Kantor PT PELNI (Persero) Cabang Namlea Alleged Criminal Acts of Forgery and Embezzlement Related to Operational Activities at PT PELNI (Persero) Namlea Branch Office	PT PELNI (Persero) melaporkan dugaan tindak pidana dimaksud dimana saat ini perkara dimaksud sedang dalam tahap penyelidikan oleh Penyidik pada Polres Pulau Buru dengan pelaksanaan pengumpulan dokumen pendukung dan keterangan kepada Pegawai PT PELNI (Persero) untuk kelengkapan Berkas Perkara. PT PELNI (Persero) has reported the alleged criminal act, which is currently under investigation by investigators at the Buru Island Police. The case is in the evidence-gathering stage, including the collection of supporting documents and statements from PT PELNI (Persero) employees to complete the case file.	Perusahaan mengalami kerugian finansial atas perkara dimaksud The Company has incurred financial losses as a result of the aforementioned case.
Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Kasasi perkara Nomor: 176 K/TUN/2024 Judicial Review (PK) Legal Effort Against the Cassation Decision in Case Number: 176 K/TUN/2024	- PT PELNI (Persero) memiliki atas aset yang terletak di Jl. Lambung Mangkurat No. 25, Banjarmasin, Kalimantan Selatan sebagaimana SHGB No: 02405 tanggal 20 Maret 2019, dalam perkembangannya terdapat pihak ketiga yang mengklaim atas aset, yakni atas nama Prajogo Pangestu sehingga diperlukan proses penanganan aset melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin; - Dalam perkembangannya PT PELNI (Persero) akan melakukan upaya hukum kasasi atas putusan Banding Nomor: 70/B/2023/PT TUN.BJM; - Pada tanggal 23 April 2024 majelis hakim menolak upaya hukum dari PT PELNI (Persero) sebagaimana putusan kasasi perkara Nomor: 176 K/TUN/2024; - Pada tanggal 15 Juli 2024 PT PELNI (Persero) melalui kuasa hukum melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) atas perkara Nomor: 176 K/TUN/2024. - Untuk selanjutnya menunggu hasil putusan PK atas perkara tersebut.	Perusahaan tidak dapat memanfaatkan aset dan menimbulkan preseden buruk terhadap perusahaan The Company is unable to utilize the asset, and the situation sets a negative precedent for the Company.



PERKARA PENTING YANG DIHADAPI

SIGNIFICANT CASES FACED

Pokok Perkara/Gugatan Subject Matter/Claims	Status Penyelesaian Perkara/Gugatan per 31 Desember 2024 Completion Status of Cases/Lawsuits as of December 31, 2024	Pengaruhnya Terhadap Kondisi Perusahaan The Impact on Company Conditions
	1. PT PELNI (Persero) holds ownership of an asset located at Jl. Lambung Mangkurat No. 25, Banjarmasin, South Kalimantan, as stated in SHGB No. 02405 dated March 20, 2019. However, a third party, Prajogo Pangestu, has filed a claim over the asset, which necessitated legal proceedings through the Banjarmasin Administrative Court (PTUN); 2. PT PELNI (Persero) intended to file a cassation appeal against the appellate decision Number: 70/B/2023/PT TUN.BJM; 3. On April 23, 2024, the panel of judges rejected PT PELNI (Persero)'s cassation appeal as stipulated in Cassation Decision Number: 176 K/TUN/2024; 4. On July 15, 2024, PT PELNI (Persero), through its legal counsel, filed a Judicial Review (Peninjauan Kembali/PK) against Case Number: 176 K/TUN/2024; 5. The Company is currently awaiting the outcome of the Judicial Review.	
Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Kasasi perkara Nomor: 178 K/TUN/2024	1. PT PELNI (Persero) memiliki atas aset yang terletak di Jl. Lambung Mangkurat No. 25, Banjarmasin, Kalimantan Selatan sebagaimana SHGB No: 02405 tanggal 20 Maret 2019, dalam perkembangannya terdapat pihak ketiga yang mengklaim atas aset, yakni atas nama Prajogo Pangestu sehingga diperlukan proses penanganan aset melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin; 2. Dalam perkembangannya PT PELNI (Persero) akan melakukan upaya hukum kasasi atas putusan Banding Nomor: 69/B/2023/PT TUN.BJM; 3. Pada tanggal 23 April 2024 majelis hakim menolak upaya hukum dari PT PELNI (Persero) sebagaimana putusan kasasi perkara Nomor: 178 K/TUN/2024; 4. Pada tanggal 15 Juli 2024 PT PELNI (Persero) melalui kuasa hukum melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) atas perkara Nomor: 176 K/TUN/2024. 5. Untuk selanjutnya menunggu hasil putusan PK atas perkara tersebut.	Perusahaan tidak dapat memanfaatkan aset dan menimbulkan preseden buruk terhadap perusahaan The Company is unable to utilize the asset, and the situation sets a negative precedent for the Company.
Judicial Review (PK) Legal Effort Against the Cassation Decision in Case Number: 178 K/TUN/2024	1. PT PELNI (Persero) holds ownership of an asset located at Jl. Lambung Mangkurat No. 25, Banjarmasin, South Kalimantan, as stated in SHGB No. 02405 dated March 20, 2019. However, a third party, namely Prajogo Pangestu, has filed a claim over the asset, which necessitated legal proceedings through the Banjarmasin Administrative Court (PTUN); 2. As the case developed, PT PELNI (Persero) intended to file a cassation appeal against the appellate decision No. 69/B/2023/PT TUN.BJM; 3. On April 23, 2024, the panel of judges rejected PT PELNI (Persero)'s cassation appeal as stipulated in Cassation Decision No. 178 K/TUN/2024; 4. On July 15, 2024, PT PELNI (Persero), through its legal counsel, filed a Judicial Review (Peninjauan Kembali/PK) against Case No. 178 K/TUN/2024; 5. The Company is currently awaiting the outcome of the Judicial Review.	
Gugatan PMH Nomor: 130/Pdt.G/2024/PN/Kdi	1. Bahwa Sdr.Sukman Ali Putra menggugat PT PELNI (Persero) dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap aset Jl. Moh. Hatta. Kendari dengan perkara Nomor: 130/Pdt.G/2024/PN.Kdi; 2. Saat ini sedang dilakukan proses penyusunan gugatan dan menunggu panggilan sidang selanjutnya yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2025.	Perusahaan tidak dapat memanfaatkan aset dan menimbulkan preseden buruk terhadap perusahaan
Tort Lawsuit Number: 130/Pdt.G/2024/PN/Kdi	1. Mr. Sukman Ali Putra has filed a Tort Lawsuit (Perbuatan Melawan Hukum) against PT PELNI (Persero) concerning an asset located on Jl. Moh. Hatta, Kendari, under Case Number: 130/Pdt.G/2024/PN.Kdi; 2. The case is currently in the process of preparing the defense, and the next court hearing is scheduled to take place on January 13, 2025.	The Company is unable to utilize the asset, and the case sets a negative precedent for the Company.



SANKSI ADMINISTRASI

ADMINISTRATIVE SANCTIONS

Selama periode tahun 2024, Perseroan tidak menerima sanksi administrasi baik yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris maupun Direksi baik oleh Kementerian BUMN sebagai pemegang saham maupun otoritas lainnya yang terkait dengan Perseroan.

Throughout the 2024 period, the Company did not receive any administrative sanctions imposed on the company, members of the Board of Commissioners, or the Board of Directors, either by the Ministry of State-Owned Enterprises as the shareholder or by other authorities related to the Company.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

ACCESS TO INFORMATION AND COMPANY DATA

PT PELNI (Persero) secara berkala memperbarui informasi dan memberikan kemudahan akses informasi mengenai aktivitas dan kinerja Perusahaan kepada para stakeholders agar mengetahui kondisi Perusahaan secara jelas dan terbuka. PT PELNI (Persero) memiliki berbagai sarana yang berfungsi sebagai saluran pengungkapan informasi, di antaranya sebagai berikut:

PT PELNI (Persero) regularly updates information and provides easy access to information regarding the Company's activities and performance to stakeholders to ensure a clear and transparent understanding of the Company's condition. PT PELNI (Persero) has various means that serve as information disclosure channels, including the following:

Media	Keterangan Description
Email: info.corporate@pelni.co.id infopelni162@pelni.co.id	Email info.corporate@pelni.co.id dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi seputar kebijakan (contoh Surat Keputusan Direksi) kepada seluruh pegawai. Email infopelni162@pelni.co.id dimanfaatkan untuk penyampaian keluhan pelanggan. The email info.corporate@pelni.co.id is utilized for disseminating information regarding policies (e.g., Board of Directors' Decisions) to all employees. The email infopelni162@pelni.co.id is used for customer complaint submissions.
Website: www.pelni.co.id	Biro Teknologi dan Informasi bertindak sebagai admin, dengan penyuplai konten dari tiap divisi yang berkepentingan. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk konten Berita & Informasi. The Technology and Information Bureau acts as the administrator, sourcing content from relevant divisions. The Corporate Secretary is responsible for News & Information content.
Portal BUMN State-Owned Enterprises Portal	Majalah Camar dengan 62 halaman diterbitkan secara berkala. Memuat informasi tentang peristiwa Perusahaan yang disebarkan ke kantor pusat, cabang dan kapal. The 62-page Camar Magazine is published periodically, containing updates on Company events distributed to headquarters, branches, and vessels.

PT PELNI (Persero) juga menyediakan akses informasi lain bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi relevan mengenai berita dan kinerja Perseroan, melalui media, sebagai berikut:

PT PELNI (Persero) also provides access to additional information for shareholders and stakeholders to obtain relevant updates and the company's performance through the following media:

 021-162 atau 162	 PELNI162
 pelni162	 INFO PELNI162
 PELNI Point (Fan Page: Pelayaran Nasional Indonesia)	 PT. PELNI (Persero)
 @pelni162_ID	 infopelni162@pelni.co.id

PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA CODE OF CONDUCT

Perseroan menyusun Pedoman Perilaku dan Etika (*Code of Conduct*) yang menjadi acuan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Perseroan. Pedoman Perilaku berlaku bagi seluruh Insan PELNI di seluruh tingkat organisasi. Pedoman Perilaku dan Etika PT PELNI (Persero) telah diperbarui dan disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 11.15/03/SK/HKO.01/2023 tentang Pedoman Perilaku dan Etika (*Code of Conduct*) di Lingkungan PT PELNI (Persero).

ISI PEDOMAN PERILAKU

Perseroan dengan konsisten mengaitkan *Code of Conduct* dengan nilai-nilai utama Perusahaan, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Pengertian Pedoman Etika & Perilaku
3. Maksud & Tujuan Pedoman Etika & Perilaku
4. Landasan Hukum
5. Visi & Misi Perusahaan
6. Tata Nilai Utama PT PELNI (Persero)
7. Manfaat Pedoman Perilaku dan Etika
8. Daftar Istilah

BAB II Pedoman Etika Usaha

- A. Etika yang Terkait dengan *Stakeholders*
 1. Hubungan dengan Pemegang Saham
 2. Hubungan dengan Karyawan
 3. Hubungan dengan Pelanggan
 4. Hubungan dengan Pemasok & Penyedia Barang dan Jasa
 5. Hubungan dengan Mitra Kerja
 6. Hubungan dengan Masyarakat & Lingkungan
 7. Hubungan dengan Kreditur
 8. Hubungan dengan Pemerintah
 9. Hubungan dengan *Principal* Kapal Keagenan
 10. Hubungan dengan Media Massa
 11. Kepatuhan terhadap Hukum dan Perundang-Undangan
 12. Persaingan Usaha

The Company has developed a Code of Conduct that serves as a behavioral guideline for the Board of Commissioners, Directors, and Employees of the Company. This Code of Conduct applies to all individuals within PELNI throughout all levels of the organization. The Code of Conduct of PT PELNI (Persero) has been updated and ratified through Board of Directors Decree No. 11.15/03/SK/HKO.01/2023 regarding the Code of Conduct within PT PELNI (Persero) Environment.

CONTENTS OF THE CODE OF CONDUCT

Consistently, the Company aligns the Code of Conduct with its core values, as follows:

CHAPTER I Introduction

1. Background
2. Definition of Ethics & Conduct Guidelines
3. Purpose & Objectives of Ethics & Conduct Guidelines
4. Legal Foundation
5. Company Vision & Mission
6. Core Values of PT PELNI (Persero)
7. Benefits of the Code of Conduct
8. Glossary

CHAPTER II Business Ethics Guidelines

- A. Ethics Related to Stakeholders
 1. Relations with Shareholders
 2. Relations with Employees
 3. Relations with Customers
 4. Relations with Suppliers & Service Providers
 5. Relations with Business Partners
 6. Relations with Community & Environment
 7. Relations with Creditors
 8. Relations with Government
 9. Relations with Ship Agency Principals
 10. Relations with Mass Media
 11. Compliance with Laws and Regulations
 12. Business Competition



PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA CODE OF CONDUCT

- B. Standar Etika Pengelolaan Perusahaan
1. Integritas Laporan Keuangan
 2. Penggunaan Aset Perusahaan
 3. Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan
 4. Pengelolaan Anak Perusahaan

BAB III Pedoman Kerja Etika Kerja

- A. Menjaga Citra Perusahaan
- B. Tanggung Jawab Terhadap Perusahaan
1. Integritas
 2. Kepatuhan Terhadap Hukum & Peraturan Perundang-Undangan
 3. Kerahasiaan Informasi
 4. Pencatatan Data, Pelaporan & Dokumentasi
 5. Perlindungan Aset/Harta Perusahaan, Informasi Perusahaan dan *Intangible Asset*
 6. Penggunaan Komunikasi Elektronik
 7. Kepedulian terhadap Kesehatan dan keselamatan Kerja, serta Pelestarian dan Masyarakat
 8. Penyalahgunaan Obat-Obatan dan Alkohol.
 9. Keterlibatan Sosial dan Politik.
- C. Benturan Kepentingan
1. Menghindari Benturan Kepentingan
 2. Investasi dan Kepemilikan Saham Pribadi Karyawan
 3. Kegiatan di Luar Perusahaan
 4. Perlakuan Terhadap Keluarga dan Teman
 5. Pemberian dan Penerimaan Suap, Hadiah, Jamuan, Hiburan dan Pemberian Donasi.
- D. Hubungan Kerja
1. Lingkungan Kerja yang Bebas dari Diskriminasi, Pelecehan, Perbuatan Asusila, Ancaman dan Kekerasan.
 2. Kerja sama Atasan dan Bawahan.
- E. Hubungan Dengan Konsumen
1. Pelayanan Kepada Konsumen
 2. Perlakuan Adil dan Tidak Diskriminatif
- F. Perlakuan Terhadap Mitra Bisnis
- G. Perlakuan Terhadap Pesaing
- H. Hubungan Dengan Pemerintah
1. Kepatuhan terhadap Ketentuan/ Peraturan Terkait
 2. Pola Hubungan dan Komunikasi

- B. Standards of Corporate Management Ethics
1. Integrity of Financial Reporting
 2. Use of Company Assets
 3. Health, Safety, and Environmental Management
 4. Management of Subsidiaries

CHAPTER III Workplace Ethics Guidelines

- A. Upholding Company Image
- B. Responsibility to the Company
1. Integrity
 2. Compliance with Laws & Regulations
 3. Confidentiality of Information
 4. Data Recording, Reporting & Documentation
 5. Protection of Company Assets, Company Information, and Intangible Assets
 6. Use of Electronic Communication
 7. Concern for Health and Safety at Work, Conservation, and Society
 8. Misuse of Drugs and Alcohol
 9. Social and Political Involvement
- C. Conflict of Interest
1. Avoiding Conflict of Interest
 2. Employee Personal Stock Ownership and Investment
 3. Activities Outside the Company
 4. Treatment of Family and Friends
 5. Giving and Receiving Bribes, Gifts, Hospitality, and Donations
- D. Employment Relations
1. Discrimination-Free Workplace, Harassment, Indecent Acts, Threats, and Violence-Free Environment
 2. Collaboration between Superiors and Subordinates
- E. Relations with Consumers
1. Service to Consumers
 2. Fair and Non-Discriminatory Treatment
- F. Treatment towards Business Partners
- G. Treatment towards Competitors
- H. Relations with Government
1. Compliance with Relevant Regulations
 2. Patterns of Relationship and Communication



PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA

CODE OF CONDUCT

- I. Hubungan Dengan Masyarakat
 1. Pelayanan Masyarakat
 2. Pemberian Donasi
 3. Kesadaran akan Lingkungan Alam

BAB IV Penerapan Pedoman Perilaku dan Etika

- A. Sosialisasi Pedoman.
- B. Pernyataan Kepatuhan Insan PT PELNI (Persero).
- C. Mekanisme Penegakan Pedoman Perilaku Termasuk Pelaporan atas Pelanggaran
- D. Pelanggaran dan Sanksi Pedoman Perilaku dan Etika
- E. Penghargaan atas Pelaksanaan Pedoman Perilaku dan Etika

BAB V Penutup

Lampiran

PENERAPAN DAN PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA

Pedoman GCG dan *Code of Conduct* telah di-upload pada website PELNI www.pelni.co.id dan dapat diunduh secara langsung. Seluruh Insan PT PELNI (Persero) wajib menandatangani Surat Pernyataan Komitmen Kepatuhan Pedoman Perilaku dan Etika Perusahaan dalam rangka meningkatkan penerapan tata Kelola perusahaan yang baik.

Bagi setiap Insan Perseroan yang mengetahui suatu situasi yang diyakini berpotensi melanggar *Code of Conduct* harus segera melaporkan kepada atasan atau pimpinan yang lebih tinggi secara tertulis dengan mencantumkan identitas pelapor berdasarkan bukti-bukti yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak mengandung unsur fitnah dan kepentingan pribadi. Perusahaan akan melindungi kerahasiaan setiap Insan PELNI yang telah melaporkan pelanggaran dan akan segera menindaklanjutinya kecuali laporannya tidak benar dan kepada pelapor dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran *Code of Conduct* dilakukan untuk menegakkan *Code of Conduct* Perusahaan.

- I. Relations with the Community
 1. Community Service
 2. Donations
 3. Awareness of Environmental Conservation

CHAPTER IV Implementation of the Code of Conduct

- A. Dissemination of Guidelines
- B. Statement of Compliance by PELNI Personnel
- C. Mechanism for Enforcing the Code of Conduct Including Reporting Violations
- D. Violations and Sanctions of the Code of Conduct and Ethics
- E. Recognition for Implementing the Code of Conduct

CHAPTER V Conclusion

Appendices

IMPLEMENTATION AND ENFORCEMENT OF THE CODE OF CONDUCT AND ETHICS

The GCG Guidelines and Code of Conduct have been uploaded to the PELNI website www.pelni.co.id and can be downloaded directly. All PELNI Personnel are required to sign a Statement of Commitment to Compliance with the Company's Code of Conduct and Ethics to enhance the implementation of good corporate governance.

Any PELNI Personnel who becomes aware of a situation believed to potentially violate the Code of Conduct must immediately report it in writing to their immediate supervisor or higher management, providing complete and verifiable evidence, free from defamation and personal interest. The Company will protect the confidentiality of any PELNI Personnel who report violations and promptly follow up, unless the report is found to be untrue, in which case the reporter may be subject to sanctions as per applicable regulations. Sanctions for violations of the Code of Conduct are enforced to uphold the Company's Code of Conduct.

PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA

CODE OF CONDUCT

Setiap Insan Perseroan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap *Code of Conduct* akan diberikan sanksi. Pemberian sanksi akan diatur dengan Peraturan perusahaan yang mengatur tentang sanksi disiplin.

SOSIALISASI PEDOMAN PERILAKU

PT PELNI (Persero) menumbuhkan budaya korporasi yang memastikan bahwa seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta seluruh karyawannya memahami dan berkomitmen menjalankan tanggung jawab mereka untuk berperilaku yang sesuai pedoman tentang Perilaku dan Etika (*code of conduct*). Direksi mengomunikasikan secara efektif pedoman tentang Perilaku dan Etika (*code of conduct*) kepada Dewan Komisaris dan seluruh karyawan.

Perseroan senantiasa melakukan sosialisasi Pedoman Perilaku Perusahaan, karena sosialisasi merupakan tahapan penting dalam terciptanya insan PELNI yang berperilaku sesuai dengan Budaya Perusahaan. Pedoman Perilaku dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi serta seluruh pegawai yaitu antara lain melalui penandatanganan Pakta Integritas yang memuat komitmen pelaksanaan Pedoman Perilaku.

Dalam ketentuan Bab IV mengenai sosialisasi Pedoman, disebutkan bahwa seluruh Insan PELNI harus membaca dan memahami dengan baik isi Buku Pedoman dan bertanggung jawab untuk menaatinya. Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko Department Kepatuhan berkewajiban untuk mensosialisasikan Pedoman Perilaku kepada seluruh Insan PELNI dengan menyampaikan daftar baca. Setiap Insan PELNI dapat meminta penjelasan dari atasan langsung apabila kurang memahami kebijakan Pedoman Perilaku.

Any PELNI Personnel found to have violated the Code of Conduct will be sanctioned. Sanctions will be governed by specific regulations established in accordance with government regulations.

DISSEMINATION OF THE CODE OF CONDUCT

PT PELNI (Persero) cultivates a corporate culture ensuring that all members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and all employees understand and commit to fulfilling their responsibilities to behave in accordance with the Code of Conduct and Ethics. The Board of Directors effectively communicates the Code of Conduct and Ethics to the Board of Commissioners and all employees.

The Company consistently conducts the dissemination of the Company's Code of Conduct as it is a crucial step in creating PELNI personnel who behave according to the Company's Culture. The Code of Conduct is communicated and disseminated to the Board of Commissioners and its supporting organs, Directors, and officials one level below Directors, as well as all employees, through the signing of an Integrity Pact containing a commitment to adhere to the Code of Conduct.

As stipulated in Chapter IV regarding the dissemination of guidelines, all PELNI Personnel must read and fully understand the contents of the Guidelines Book and are responsible for adhering to them. The Finance Directorate and Risk Management Compliance Department are responsible for disseminating the Code of Conduct to all PELNI Personnel by delivering a reading list. Any PELNI Personnel may request clarification from their immediate supervisor if they do not fully understand the Policy Guidelines.

PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA CODE OF CONDUCT

KEBIJAKAN PENEGAKKAN DISIPLIN DAN PENANGANAN PELANGGARAN

Seluruh insan PELNI wajib menandatangani Surat Pernyataan Kepatuhan Pedoman Perilaku sebagai wujud komitmen untuk memenuhi Pedoman Perilaku. Pedoman Penandatanganan Surat Kepatuhan Pedoman perilaku dilakukan secara berkala setiap tahun. Direktorat SDM dan Umum mendokumentasikan Surat Pernyataan Kepatuhan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Perilaku Perseroan.

Pemberian sanksi terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku dijabarkan dalam Bab IV, yaitu dilakukan untuk menegakkan Pedoman Perilaku Perseroan. Setiap Insan PELNI yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku diberikan sanksi. Pemberian sanksi akan diatur dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan sesuai Peraturan Perseroan. sanksi akan diatur dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan sesuai Peraturan Perseroan.

Setiap insan PELNI yang mengetahui suatu situasi yang diyakini berpotensi melanggar Pedoman Perilaku harus segera melaporkan kepada atasan langsung atau pimpinan yang lebih tinggi secara tertulis dengan mencantumkan identitas pelapor berdasarkan buktibukti yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak mengandung unsur fitnah dan kepentingan pribadi. Pelaporan pelanggaran juga dapat dilakukan melalui mekanisme whistleblowing system (WBS) dan email: wbs@pelni.co.id.

Perseroan akan melindungi kerahasiaan setiap insan PELNI yang telah melaporkan pelanggaran dan akan segera menindaklanjutinya, kecuali laporannya tidak benar dan kepada pelapor dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

DISCIPLINE ENFORCEMENT POLICY AND VIOLATION HANDLING

All PELNI personnel are required to periodically sign a Statement of Compliance with the Code of Conduct as a commitment to complying with the Code of Conduct. The signing of the Code of Conduct Compliance Statement is conducted annually. The Human Resources and General Directorate documents the Compliance Statement as an integral part of the Company's Code of Conduct.

Sanctions for violations of the Code of Conduct are detailed in Chapter IV, enforced to uphold the Company's Code of Conduct. Any PELNI Personnel found to have violated the Code of Conduct will be sanctioned. Sanctions will be governed by specific regulations established in accordance with Company Regulations. Sanctions will be governed by specific regulations established in accordance with Company Regulations.

Any PELNI personnel who becomes aware of a situation believed to potentially violate the Code of Conduct must immediately report it to their immediate supervisor or higher management in writing, including the identity of the reporter based on complete and verifiable evidence, free from defamation and personal interest. Reporting violations can also be done through the whistleblowing system (WBS) mechanism and email: wbs@pelni.co.id.

The Company will protect the confidentiality of any PELNI personnel who report violations and promptly follow up, unless the report is found to be untrue, in which case the reporter may be subject to sanctions as per applicable regulations.



PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA

CODE OF CONDUCT

EVALUASI EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ETIKA PERUSAHAAN

Evaluasi terhadap penerapan Pedoman Perilaku dilakukan secara berkala kepada Insan PELNI. Berdasarkan Evaluasi ini diharapkan mampu mendorong dan meningkatkan rasa kepemilikan dari setiap Insan PELNI serta diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dan kemampuan karyawan secara konsisten. Sebagai pedoman yang bersifat dinamis, Pedoman Perilaku akan dikaji secara berkala dan berkelanjutan.

JUMLAH PELANGGARAN ETIKA PERUSAHAAN TAHUN 2024

Pada tahun 2024, terdapat pelanggaran etika Perusahaan dan terdapat sanksi yang diberikan untuk pelanggaran etika Perusahaan.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF CORPORATE ETHICS IMPLEMENTATION

Evaluation of the implementation of the Code of Conduct is periodically conducted on PELNI personnel. Based on this evaluation, it is expected to encourage and enhance ownership among every PELNI personnel, consistently improving employee competence and capabilities. As a dynamic guideline, the Code of Conduct will be periodically and continuously reviewed.

NUMBER OF COMPANY ETHICS VIOLATIONS IN 2024

In 2024, there were violations of Company ethics, and sanctions were imposed for these violations.

No.	Jenis Hukuman Type of Punishment	Pegawai Employee		Jumlah Total
		Darat Onshore	Laut Offshore	
1	Peringatan Lisan Verbal Warning	2	11	13
2	Peringatan Tertulis Written Warning	2	4	6
3	Peringatan Keras Final Warning	9	13	22
4	Skorsing Suspension	5	7	12
5	PHK Termination	8	6	14
Jumlah Total				67



PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN/ MANAJEMEN (ESOP/ MSOP)

EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PROGRAM (ESOP) /
MANAGEMENT STOCK OWNERSHIP PROGRAM (MSOP)

Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan (*Employee Stock Ownership Program/ESOP*) dan/atau program kepemilikan saham oleh manajemen (*Management Stock Ownership Program/MSOP*).

As of December 31, 2024, the Company does not have an Employee Stock Ownership Program (ESOP) and/or Management Stock Ownership Program (MSOP).

KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN INFORMASI MENGENAI KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

POLICY ON DISCLOSURE OF INFORMATION REGARDING DIRECTORS' AND
COMMISSIONERS' SHARE OWNERSHIP

Sampai dengan 31 Desember 2024, Perseroan tidak menawarkan sahamnya kepada publik melalui Penawaran Umum Perdana (IPO). Oleh sebab itu, Perseroan tidak memiliki kebijakan pengungkapan informasi mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka.

As of December 31, 2024, the Company has not offered its shares to the public through an Initial Public Offering (IPO). Therefore, the Company does not have a policy for disclosing information regarding the share ownership of Directors and Commissioners within 3 (three) working days after the acquisition or any changes in ownership of shares of a Publicly Listed Company.



SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing System adalah sistem untuk memproses pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan PT PELNI (Persero).

Landasan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran di PT PELNI (Persero) merujuk pada SK Pedoman WBS No. 11.15/04/SK/HKO.01/2023 tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan PT PELNI (Persero). Merujuk pada pedoman tersebut, implementasi WBS di PT PELNI (Persero) bertujuan untuk membangun, menerapkan dan mengelola suatu Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) agar berbagai permasalahan dalam Perseroan yang tidak sesuai dengan standar etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat terdeteksi secara dini (*early warning system*) dan dapat mengurangi/ meminimalisir risiko yang dihadapi oleh Perseroan akibat pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja dan reputasi yang berdampak pada pengurangan biaya (*cost reduction*) dalam mengelola akibat dari terjadinya suatu pelanggaran.

PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pegawai dilakukan secara tertulis dan berjenjang, dengan mekanisme pada jenjang pertama dapat disampaikan melalui saluran penyampaian sebagai berikut:

- Website : www.pelni.co.id
- E-mail perusahaan : wbs@pelni.co.id
- Nomor Whatsapp : 0811-2804-162

Dalam hal terdapat pengaduan terkait anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) maka pengelola WBS PT PELNI (Persero) wajib meneruskan pengaduan tersebut kepada pengelola WBS Kementerian BUMN.

The Whistleblowing System (WBS) is a system designed to process complaints/information submitted directly or indirectly related to actions that violate laws, regulations/standards, codes of ethics, policies, and similar actions threatening public interests, as well as Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN) within PT PELNI (Persero).

The policy foundation for the Whistleblowing System at PT PELNI (Persero) refers to Decree No. 11.15/04/SK/HKO.01/2023 regarding the Guidelines for Handling Reports of Alleged Violations (*Whistleblowing System*) within PT PELNI (Persero). According to these guidelines, the implementation of WBS at PT PELNI (Persero) aims to establish, implement, and manage a Reporting Violations System (WBS) so that various issues within the Company that do not comply with ethical standards and applicable laws can be detected early (*early warning system*). This helps reduce/minimize risks faced by the Company due to violations, including financial, operational, legal, occupational safety, and reputational risks, which in turn reduce costs in managing the consequences of such violations.

REPORTING VIOLATIONS

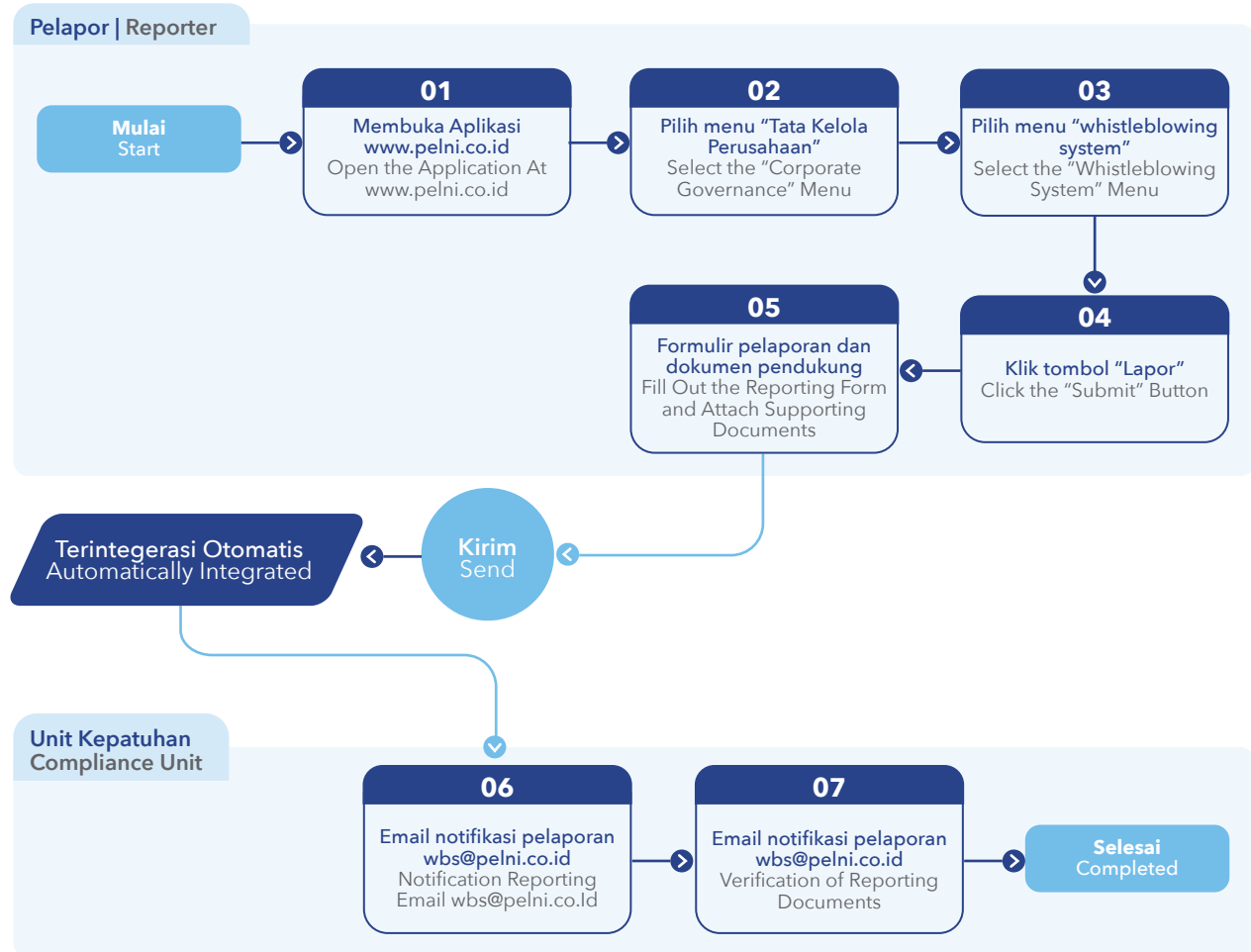
Complaints alleging employee misconduct are submitted in writing and through hierarchical channels. Initially, complaints can be submitted through the following channels:

- Website: www.pelni.co.id
- Company Email: wbs@pelni.co.id
- WhatsApp Number: 0811-2804-162

In cases where complaints involve Directors or Commissioners of PT PELNI (Persero), the WBS manager at PT PELNI (Persero) is obligated to forward such complaints to the WBS manager at the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN).



SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN WHISTLEBLOWING SYSTEM



SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

WHISTLEBLOWING SYSTEM

FORMULIR PENYAMPAIAN PELAPORAN PELANGGARAN (WBS)

Identitas Pelapor

NIK *

No. Hp /
Whatsaap *

Nama lengkap *

Email *

Alamat *

Pekerjaan *

Informasi Laporan

Upload Dokumen Pendukung

KTP Pelapor * (jpg)

Chosen File

No file chosen

Dokumentasi Kejadian *

Chosen File

No file chosen

Rekaman Audio

Chosen File

No file chosen

Bukti Pendukung Lainnya

Chosen File

No file chosen

Upload Dokumen Pendukung

KTP Pelapor * (jpg)

Chosen File

No file chosen

Dokumentasi Kejadian *

Chosen File

No file chosen

Rekaman Audio

Chosen File

No file chosen

Bukti Pendukung Lainnya

Chosen File

No file chosen

☐ * Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan dapat di pertanggungjawabkan serta bersedia untuk dihubungi untuk keterangan lebih lanjut



SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

MEDIA PENYAMPAIAN PELAPORAN WBS

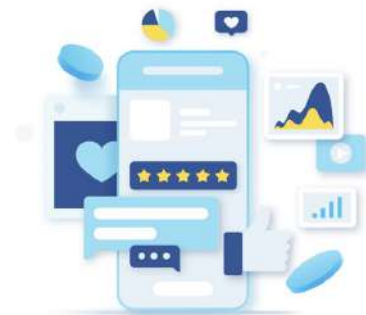


1. Korupsi
2. Kecurangan
3. Perbuatan melanggar hukum (termasuk pencurian, penggunaan kekerasan terhadap Karyawan atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan, perbuatan kriminal lainnya);
4. Pelanggaran ketentuan perpajakan, atau perundang-undangan lainnya (lingkungan hidup, mark up, under invoice, keternagakerjaan, dll);
5. Pelanggaran Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan atau pelanggaran norma-norma kesopnan pada umumnya;
6. Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, atau membahayakan keamanan Perusahaan;
7. Pelanggaran Prosedur operasi standar (SOP) Perusahaan, terutama terkait dengan pengadaan jasa, pemberian manfaat dan remunerasi;
8. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan atau kepentingan lain di luar Perusahaan;
10. Pembocoran Rahasia;
11. Penerimaan dan/atau pemberian Gratiifikasi;
12. Penyelewangan Aset;
13. Penggelapan Aset;
14. Penipuan
15. Kecurangan



Loading...

TAMPILAN PENYAMPAIAN PELAPORAN PELANGGARAN MELALUI WEBSITE PT PELNI (PERSERO)









**Laporkan kepada kami
jika Anda melihat, mengetahui,
mengalami...**

Identitas pelapor terlindungi sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 02.14/04/SK/HKO.01/2023 Tentang Pedoman (Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran Whistleblowing System) di Lingkungan PT PELNI (Persero)



SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

3. Pelapor diarahkan untuk klik "Lapor"



TENTANG KAMI RESERVASI TIKET JASA LOGISTIK LAYANAN GALERI BERITA TATA KELOLA

ID ▾



6. Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kenyamanan kerja, atau membahayakan keamanan Perusahaan;
7. Pelanggaran prosedur operasi standar (SOP) Perusahaan atau tata laksana dengan pengadaan jasa, pemberian manfaat dan remunerasi;
8. Penyalahgunaan dan pemisahan data dan/atau pembayaran klaim;
9. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/dyakeuntungan atau kepentingan lain di luar Perusahaan;
10. Pembocoran rahasia;
11. Penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi;
12. Penyalahgunaan uang Perusahaan;
13. Pengalihan Aset;
14. Perbuatan;

Pesyaratan pelaporan whistleblowing system antara lain:

1. Email: wbs@pelni.co.id
2. Website: www.pelni.co.id
3. Wa: 08112804162

Unduh Pedoman WBS PT PELNI

LAPOR

Bagikan Ke:   



4. Pelapor diarahkan untuk melengkapi form : Identitas Pelapor (NIK, Nama, Alamat lengkap, dan nomor telepon) Informasi Laporan

- Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui?;
- Dimana perbuatan tersebut dilakukan?;
- Kapan Perbuatan tersebut dilakukan?;
- Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut?;
- Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan?;

Setelah lengkap maka, klik tombol "kirim" Laporan akan diterima oleh Tim pengelola Melalui email : wbs@pelni.co.id

PEDOMAN URG

PEDOMAN ELMHRI

PEDOMAN DHAP

PEDOMAN RESGAGARAN

BARANG DAN JASA

PIAGAM AUDIT INTERNAL

LAPORAN GCG

NIK*		No. Hp / Whatsapp*	
Nama Lengkap*		Email*	
Alamat*		Pejabat*	

Informasi Laporan

Jenis Tindakan Pelanggaran*			
Siapa yang Terlibat Pelanggaran*	Nama	NBP	Jabatan
Dimana Pelanggaran Dilakukan*			
Kapan Terjadinya Pelanggaran*			
Bagaimana Pelanggaran Dilakukan*			



SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR PELANGGARAN

Perlindungan kepada Pelapor Pelanggaran adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Perusahaan untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap Pelapor Pelanggaran atau Saksi dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya termasuk keluarganya.

PT PELNI (Persero) memberikan perlindungan terhadap Pelapor baik dari segi pekerjaan, fisik, remunerasi dan fasilitas pekerjaan yang diterima Pelapor yang beritikad baik. Dalam hal tertentu, Pelaporan dapat diberikan perlindungan sebagaimana diatur dalam skema perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

Dalam menyelenggarakan WBS, PT PELNI (Persero) memiliki pedoman pengaduan pelanggaran yang dapat digunakan untuk mendorong diadukannya perilaku yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak etis, yang di dalamnya mencakup juga suatu pedoman tentang bagaimana Perusahaan melindungi pengadu yang beritikad baik. Setiap pelapor dan saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang wajib diberikan perlindungan khusus baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk melindungi pelapor pelanggaran yang beritikad baik untuk mendorong sistem penanganan pengaduan dugaan pelanggaran dan sekaligus menjamin keamanan pelapor maupun keluarganya. Berikut merupakan beberapa langkah perusahaan dalam memberikan perlindungan kepada pelapor:

1. Perusahaan memiliki komitmen yang jelas dan tidak memihak untuk mendukung dan melindungi semua pelapor yang menginformasikan kejadian pelanggaran yang terjadi di perusahaan. Perusahaan memberikan fasilitas dan perlindungan sebagai berikut:
 - a. Fasilitas saluran pelaporan (website perusahaan dengan alamat <https://pelni.co.id>, whatsapp nomor: 08112804162 dan email: wbs@pelni.co.id yang bebas dan rahasia;

PROTECTION FOR WHISTLEBLOWERS

Protection for Whistleblowers is a form of safeguard provided by the Company to ensure the safety of Whistleblowers or Witnesses from potential threats that may endanger their lives, well-being, and/or assets, including those of their families.

PT PELNI (Persero) extends protection to Whistleblowers in terms of employment, physical safety, remuneration, and job facilities received by well-intentioned Whistleblowers. In specific cases, protection may be provided in accordance with the legal protection scheme during the performance of official duties.

In implementing the Whistleblowing System (WBS), PT PELNI (Persero) has guidelines for reporting violations intended to encourage the reporting of violations of legal regulations or ethical standards. This includes guidelines on how the Company protects well-intentioned reporters. Every whistleblower and witness in cases of money laundering crimes must be provided with special protection before, during, and after the investigation process. The Board of Commissioners and Directors are committed to protecting well-intentioned whistleblowers to promote the handling of alleged violations and ensure the safety of both the whistleblower and their family. The following are several steps taken by the Company to protect whistleblowers:

1. The Company has a clear and impartial commitment to support and protect all reporters who inform about violations occurring within the Company. The Company provides facilities and protections such as:
 - a. Reporting channels (company website at <https://pelni.co.id>, WhatsApp number: 08112804162, and email: wbs@pelni.co.id) that are free and confidential;



SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

- b. Perlindungan kerahasiaan identitas pelapor selama pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun. Perlindungan ini diberikan bila pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor;
 - c. Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau organisasi. Perlindungan dari tekanan, dari penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, gugatan hukum, harta benda, hingga tindakan fisik. Perlindungan ini tidak hanya untuk pelapor tetapi juga dapat diperluas hingga ke anggota keluarga pelapor;
 - d. Informasi pelaksanaan tindak lanjut, berupa kapan dan bagaimana serta kepada institusi mana tindak lanjut diserahkan. Informasi ini disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang lengkap identitasnya;
 - e. Perlindungan terhadap pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/penyingkapan tersebut.
 2. Perlindungan dan jaminan kerahasiaan tidak diberikan kepada pelapor yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan/atau fitnah. Apabila hasil investigasi menyimpulkan dan dapat dibuktikan bahwa pelaporan yang disampaikan mengandung laporan palsu, fitnah, tanpa dasar yang jelas, maka Pelapor dapat digugat balik atau dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan misalnya KUHP pasal 310 dan 311 atau peraturan internal perusahaan seperti Pedoman Perilaku dan Etika Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.
 3. Apabila hasil investigasi menyimpulkan dan dapat dibuktikan bahwa pelaporan yang disampaikan oleh pelapor mengandung kebenaran dan dapat mengembalikan uang/aset Perusahaan, maka Perusahaan memberikan penghargaan/*reward* kepada pelapor sesuai dengan peraturan internal Perusahaan.
- b. Confidentiality of the whistleblower's identity as long as they maintain the confidentiality of the reported violation to any party. This protection is provided if the whistleblower provides their identity and information that can be used to contact them;
 - c. Protection against retaliation from the accused or organization. Protection from pressure, delay in promotions, dismissal, legal action, property loss, and physical actions. This protection extends not only to the whistleblower but also to their family members;
 - d. Information on the follow-up actions, including when and how the follow-up is handed over to which institution. This information is provided confidentially to fully identified whistleblowers;
 - e. Protection for whistleblowers also applies to parties conducting investigations and those providing information related to the complaint/disclosure.
 2. Protection and confidentiality guarantees are not provided to whistleblowers proven to have made false reports and/or defamation. If an investigation concludes and proves that the reported complaint contains false, defamatory, or unfounded allegations, the whistleblower may be subject to countersuits or sanctions according to legal regulations such as Criminal Code articles 310 and 311, or internal company regulations such as the Company's Code of Conduct and Ethics or Collective Employment Agreement.
 3. If an investigation concludes and proves that the whistleblower's report is truthful and can recover Company funds/assets, the Company rewards the whistleblower according to internal Company regulations.



SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

4. Selain perlindungan di atas, untuk pelapor yang beritikad baik, perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum, sejalan dengan yang diatur pada pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:
 - a. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata;
 - b. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental;
 - c. Perlindungan terhadap harta pelapor;
 - d. Perahasaan dan penyamaran identitas pelapor;
 - e. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor, pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan.

PENANGANAN PENGADUAN

1. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi atas laporan yang masuk dan akan memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi atas pengaduan pelanggaran dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja dan dapat diperpanjang menjadi 30 (tiga puluh) hari kerja.
2. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengaduan tidak benar dan tidak ada bukti maka tidak akan diproses lebih lanjut.
3. Hasil verifikasi pengaduan pelanggaran yang melibatkan Karyawan Perusahaan yang memenuhi kriteria indikasi pelanggaran dilaporkan kepada Direktur Utama/Direktur yang ditunjuk untuk dilakukan investigasi.
4. Hasil verifikasi pengaduan pelanggaran yang melibatkan Direksi yang memenuhi kriteria indikasi pelanggaran, dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk dilakukan investigasi.

4. In addition to the protections above, for well-intentioned whistleblowers, the Company also provides legal protection, in line with Article 43 of Law No. 15 of 2002 as amended by Law No. 25 of 2003 regarding Money Laundering Crimes, Article 13 of Law No. 13 of 2006 regarding Witness and Victim Protection, and Article 5 of Government Regulation No. 57 of 2003 regarding Procedures for Special Protection for Reporters and Witnesses in Money Laundering Crimes, namely:
 - a. Protection from criminal and/or civil lawsuits;
 - b. Protection of personal security for the whistleblower and/or their family from physical and/or mental threats;
 - c. Protection of the whistleblower's assets;
 - d. Confidentiality and identity concealment of the whistleblower;
 - e. Providing testimony without face-to-face confrontation with the accused, at every level of case review in the event of disputes in court.

HANDLING COMPLAINTS

1. The Violations Complaint Management Team verifies incoming reports and decides within 15 (fifteen) working days whether an investigation into the reported violation is necessary, which may be extended to 30 (thirty) working days.
2. If verification results indicate that the complaint is false and lacks evidence, it will not be further processed.
3. Verification results of violations complaints involving Company Employees meeting the criteria for indications of violations are reported to the CEO/Director designated for investigation.
4. Verification results of violations complaints involving Directors meeting the criteria for indications of violations are reported to the Board of Commissioners for investigation.



SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

WHISTLEBLOWING SYSTEM

- Hasil verifikasi pengaduan pelanggaran yang melibatkan Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Komisaris, yang memenuhi kriteria indikasi pelanggaran, dilaporkan kepada Pemegang Saham/Kementerian BUMN untuk dilakukan investigasi.

PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN

- Tim Pengelola *Whistle Blowing System*
Pengelola *Whistle Blowing System* adalah unit yang melekat pada Departement Kepatuhan. Tugas tim meliputi: menerima Pengaduan Pelanggaran, menindaklanjuti sesuai ketentuan, menyiapkan laporan, melakukan Evaluasi secara berkala dan melaksanakan sosialisasi WBS.

Direktur utama PT PELNI (Persero) bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan.

- WBS pada Perusahaan yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh pengelola WBS BUMN.
- Untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan, maka Direksi membentuk Tim yang ditetapkan oleh Direksi dengan susunan Tim sebagai berikut:
 - Penanggung Jawab : Direktur Utama
 - Pengawas : Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
 - Ketua Tim : Kepala Satuan Internal
 - Anggota :
 - VP Manajemen Risiko & Kepatuhan
 - VP Hukum
 - VP SDM
 - Pengawas Investigasi
 - Manager Penilaian Kinerja Pegawai
 - Manager Perencanaan SDM Darat
 - Manager Perencanaan SDM Laut
 - Manager Peraturan Bantuan Hukum
 - Manager Kepatuhan

- Verification results of violations complaints involving the Board of Commissioners and Commissioner Support Organs meeting the criteria for indications of violations are reported to Shareholders/the Ministry of State-Owned Enterprises for investigation.

MANAGEMENT OF COMPLAINTS

- Whistleblowing System Management Team
The Whistleblowing System Management Team is a unit attached to the Compliance Department. The team's tasks include: receiving Violations Complaints, following up according to provisions, preparing reports, conducting periodic evaluations, and conducting WBS socialization.

The President Director of PT PELNI (Persero) is responsible for implementing.

- The WBS at the Company is assisted in daily duties by the State-Owned Enterprises WBS Manager.
- For violations allegedly committed by Employees, the Board forms a team designated by the President Director with the following composition:
 - Responsible Person: President Director
 - Supervisor: Director of Finance and Risk Management
 - Team Leader: Head of Internal Units
 - Members:
 - VP Risk Management & Compliance
 - VP Legal Affairs
 - VP Human Resources
 - Investigation Supervisor
 - Employee Performance Assessment Manager
 - Land HR Planning Manager
 - Sea HR Planning Manager
 - Legal Assistance Regulations Manager
 - Compliance Manager



SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

WHISTLEBLOWING SYSTEM

4. Dalam hal terdapat pengaduan terkait anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) maka pengelola WBS PT PELNI (Persero) wajib meneruskan pengaduan tersebut kepada pengelola WBS Kementerian BUMN.
5. Penanggung jawab WBS PT PELNI (Persero) menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kepada pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi penanganan pengaduan di Kementerian BUMN secara periodik setiap semester, paling lambat 1 (satu) bulan setelah periodik tersebut berakhir.
4. In cases involving complaints against Directors or Commissioners of PT PELNI (Persero), the PT PELNI (Persero) WBS manager must forward such complaints to the Ministry of State-Owned Enterprises WBS manager.
5. The PT PELNI (Persero) WBS responsible person submits a report on the handling of violations complaints to the mid-level executive who oversees complaint handling functions at the Ministry of State-Owned Enterprises periodically every semester, no later than 1 (one) month after the end of each period.

Jumlah Pengaduan yang Masuk dan Diproses pada Tahun Buku Terakhir

Per 31 Desember 2024, terdapat 2 pengaduan tindakan pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang diterima oleh Divisi Hukum & Kepatuhan .

Number of Complaints Received and Processed in the Last Fiscal Year

As of December 31, 2024, two whistleblowing report was received by the Legal & Compliance Division

Sanksi/Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Telah Selesai Diproses pada Tahun Buku

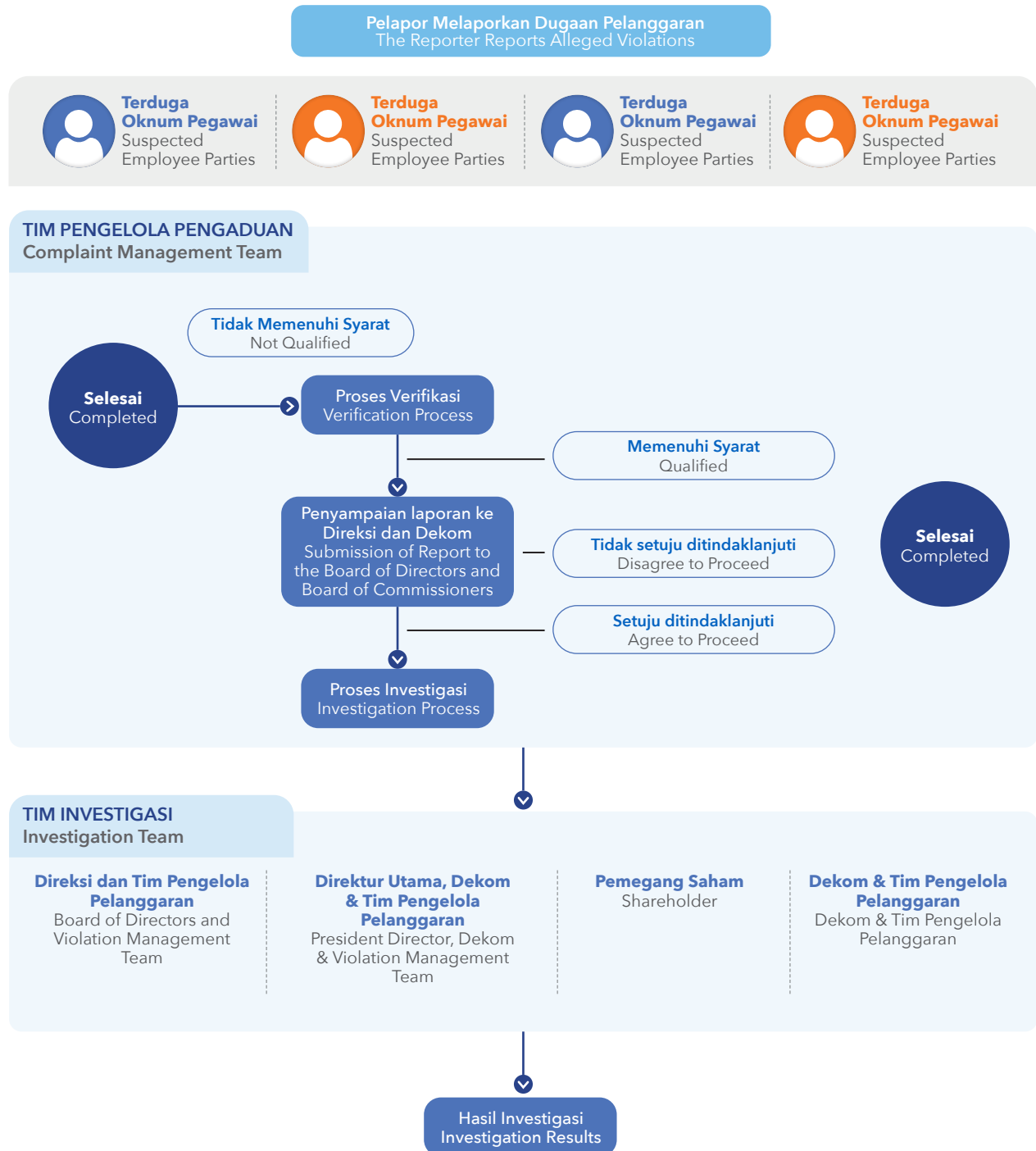
Sampai dengan 31 Desember 2024, dua pengaduan yang diterima telah ditindaklanjuti dan telah diselesaikan.

Sanctions/Follow-up on Complaints Processed in the Fiscal Year

As of December 31, 2024, the two reports received has been followed up and resolved.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

ALUR PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN (WBS)



KEBIJAKAN DAN PRAKTIK ANTI-KORUPSI

ANTI-CORRUPTION POLICY AND PRACTICES

PROGRAM DAN PROSEDUR YANG DILAKUKAN DALAM MENGATASI PRAKTIK KORUPSI, BALAS JASA (KICKBACKS), FRAUD, SUAP DAN/ATAU GRATIFIKASI DALAM PERSEROAN

PT PELNI (Persero) berkomitmen dalam menerapkan kejujuran dan menjunjung integritas dalam menjalin hubungan antara Pemegang Saham dengan Pemangku Kepentingan, antara lain melalui penerapan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) sesuai ISO 37001:2016. Atas komitmen tersebut, PT PELNI (Persero) menyusun dan menerapkan pedoman SMAP yang berfungsi sebagai acuan dalam mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan di lingkungan PT PELNI (Persero) sehingga proses bisnis yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Perseroan menerapkan SMAP berdasarkan kebijakan internal yang disahkan melalui Keputusan Direksi Nomor 09.09/01/SK/HKO.01/2024 tentang Pedoman Sistem Manajemen Terintegrasi di Lingkungan PT PELNI (Persero).

Dasar Penerapan

Pedoman SMAP PT PELNI (Persero) diterapkan sesuai peraturan perundang-undangan dengan perincian sebagai berikut:

1. ISO 37001:2016 terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
2. ISO 37301:2021 terkait Sistem Manajemen Kepatuhan
3. ISO 9001:2015 terkait Sistem Manajemen Mutu
4. ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen K3
5. ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia PER 02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara

PROGRAMS AND PROCEDURES IMPLEMENTED TO ADDRESS CORRUPTION, KICKBACKS, FRAUD, BRIBERY, AND/OR GRATIFICATION WITHIN THE COMPANY

PT PELNI (Persero) is committed to upholding honesty and integrity in its relationships between Shareholders and Stakeholders, including through the implementation of an Anti-Bribery Management System (ABMS) in accordance with ISO 37001:2016. In line with this commitment, PT PELNI (Persero) has developed and implemented ABMS guidelines to serve as a framework for implementing the Anti-Bribery Management System within PT PELNI (Persero), ensuring that business processes adhere to Good Corporate Governance (GCG) principles.

The company implements ABMS based on internal policies ratified through Board of Directors Decree Number 09.09/01/SK/HKO.01/2024 concerning the Integrated Management System Guidelines at PT PELNI (Persero).

Basis for Implementation

The Integrated Management System Guidelines are implemented in accordance with:

1. ISO 37001:2016 - Anti-Bribery Management System (ABMS)
2. ISO 37301:2021 - Compliance Management System
3. ISO 9001:2015 - Quality Management System
4. ISO 45001:2018 - Occupational Health and Safety Management System
5. ISO 14001:2015 - Environmental Management System
6. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-02/MBU/03/2023 - Guidelines for Governance and Significant Corporate Actions of State-Owned Enterprises

KEBIJAKAN DAN PRAKTIK ANTI-KORUPSI

ANTI-CORRUPTION POLICY AND PRACTICES

7. Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara
8. Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan

7. Indicators/Parameters for the Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprises
8. Government Regulation No. 50 of 2012 - Implementation of Occupational Health and Safety Management System
9. Minister of Transportation Regulation No. 45 of 2012 - Safety Management System

Sertifikasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

Komitmen PT PELNI (Persero) dalam menerapkan SMAP di lingkungan Perseroan antara lain terwujud melalui pemerolehan sertifikasi Sistem Manajemen Anti-Penyuapan SNI ISO 37001:2016. Sertifikat terkait penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan telah diperbaharui di Tahun 2024, dengan auditor eksternal PT Tuvnord Indonesia.

Certification of Anti-Bribery Management System

PT PELNI (Persero)'s commitment to implementing ABMS within the company is realized through the acquisition of certification for the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System. The ABMS certification was obtained on July 22, 2020, valid until July 21, 2024, with plans for renewal on May 22, 2023.



KEBIJAKAN DAN PRAKTIK ANTI-KORUPSI

ANTI-CORRUPTION POLICY AND PRACTICES

Pelatihan/Sosialisasi Anti Korupsi Kepada Karyawan Emiten Atau Perusahaan Publik

Perseroan telah melaksanakan program sosialisasi dan workshop kepada karyawan terkait anti korupsi dalam kegiatan sosialisasi Pedoman Soft Strcuture, Whistleblowing System, dan Pengendalian Gratifikasi pada tanggal 13 Februari 2024.

Training/Socialization on Anti- Corruption for Employees of Listed Companies or Public Companies

The Company conducted a socialization and workshop program for employees on anti-corruption as part of the dissemination of the Soft Structure Guidelines, Whistleblowing System, and Gratification Control on February 13, 2024.

No	Lokasi Location	Pelaksanaan Implementation	Tanggal Date
Kapal On Ship			
1	KM. Leuser	On Site	11 Februari 2024
2	KM. Nggapulu		16 Mei 2024
3	KM. Sanus 106		17 Mei 2024
4	KM. Sanus 71		18 Mei 2024
5	KM. Gunung Dempo		3 Oktober 2024
6	KM. Sanus 97		3 Oktober 2024
7	KM. Sanus 75		20 November 2024
8	KM. Sanus 42		21 November 2024
Kantor Cabang Branch Office			
1	Galangan Pelni Surya	On Site	12 Februari 2024
2	Cabang Surabaya	Hybrid	13 Februari 2024
3	Cabang Tual	On Site	15 Mei 2024
4	Cabang Jayapura		3 Oktober 2024
5	Cabang Biak		4 Oktober 2024
6	Cabang Tarakan		2 Oktober 2024
7	Cabang Nunukan		3 Oktober 2024
8	Cabang Nabire		7 Oktober 2024
9	Cabang Denpasar		17 Oktober 2024
10	Cabang Sorong		22 November 2024
11	Cabang Ambon		15 Oktober 2024
12	Cabang Jakarta		4 Maret 2024



PELAPORAN LHKPN REPORTING OF WEALTH REPORT (LHKPN)

PT PELNI (Persero) berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan negara yang bersih dan terbebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Lebih dari itu, PT PELNI (Persero) memahami arti penting penyampaian Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yang diterapkan menyeluruh sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT PELNI (Persero) juga memahami bahwa pelaporan LHKPN yang terselenggara secara baik merupakan wujud pemenuhan prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai best practices GCG. Atas komitmen dan pemahaman tersebut, PT PELNI (Persero) menerapkan praktik pelaporan LHKPN yang secara menyeluruh telah diatur melalui kebijakan internal berupa Surat Keputusan Direksi nomor 10.02/03/SK/HKO.01/2024 tentang Panduan dan alur Penyampaian Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN) di PT PELNI (Persero).

DASAR PENERAPAN

Pelaporan LHKPN di lingkungan PT PELNI (Persero) diterapkan sesuai sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

PT PELNI (Persero) is committed to supporting clean governance and freedom from Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN) practices. Moreover, PT PELNI (Persero) understands the importance of submitting the Wealth Report of State Officials (LHKPN), implemented comprehensively in accordance with applicable regulations. PT PELNI (Persero) also recognizes that effective LHKPN reporting demonstrates accountability and transparency principles aligned with best practices in Good Corporate Governance (GCG). In pursuit of this commitment and understanding, PT PELNI (Persero) applies comprehensive LHKPN reporting practices governed by internal policies under Board of Directors Decree Number 10.02/03/SK/HKO.01/2024 concerning the Guidelines and Procedures for Submitting the State Official Wealth Report (LHKPN) at PT PELNI (Persero).

BASIS OF IMPLEMENTATION

The LHKPN reporting at PT PELNI (Persero) is applied in accordance with several laws and regulations, including:

1. Law Number 28 of 1999 concerning Clean Governance Free from Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN) (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1999 Number 75, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3851);
2. Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2001 Number 134, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4150);
3. Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2002 Number 137, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4250);
4. Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2003 Number 70, Supplement to State Gazette Number 4297);



PELAPORAN LHKPN

REPORTING OF WEALTH REPORT (LHKPN)

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
- Instruksi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor INS-02/MBU/2007 tanggal 21 September 2007 tentang Penyelenggara Negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan BUMN;
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2007 Number 106, Supplement to State Gazette Number 4756);
- Minister of State-Owned Enterprises Instruction Number INS-02/MBU/2007 dated September 21, 2007 concerning State Officials' Obligation to Submit Wealth Reports (LHKPN) within SOEs;
- Corruption Eradication Commission Regulation Number 3 of 2024 concerning the Second Amendment to Regulation of the Corruption Eradication Commission Number 07 of 2016 on Procedures for the Registration, Announcement, and Verification of State Officials' Asset Declarations.

Lebih dari itu, pelaporan LHKPN PT PELNI (Persero) diterapkan sesuai sejumlah dasar hukum internal, dengan perincian sebagai berikut:

- Pedoman Perilaku dan Etika PT PELNI (Persero) telah diperbarui dan disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 11.15/03/SK/HKO.01/2023 tentang Pedoman Perilaku dan Etika (*Code of Conduct*) di Lingkungan PT PELNI (Persero).
- Surat Keputusan Bersama Direksi dan Komisaris Nomor 11.15/02/SK/HKP.01/2023 tanggal 15 November 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) di lingkungan PT PELNI (Persero).
- Struktur Organisasi disahkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 01.27/01/SK/HKO.01/2023 tanggal 27 Januari 2023 sebagaimana dibuuh terakhir kali dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 02.02/01/SK/HKO.01/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Kantor Pusat di PT PELNI (Persero).

PIHAK PENGELOLA LHKPN

PT PELNI (Persero) menetapkan sejumlah pihak pengelola pelaporan LHKPN dengan perincian sebagai berikut:

Ketua Koordinator: *Vice President* Manajemen Risiko & Kepatuhan

Furthermore, LHKPN reporting at PT PELNI (Persero) is governed by several internal legal bases, detailed as follows:

- The Code of Conduct and Ethics Guide of PT PELNI (Persero) updated and ratified through Board of Directors Decree No. 11.15/03/SK/HKO.01/2023 concerning the Code of Conduct in the Environment of PT PELNI (Persero).
- Joint Decree of the Board of Directors and Commissioners No. 11.15/02/SK/HKP.01/2023 dated November 15, 2023 concerning Guidelines for Good Corporate Governance within PT PELNI (Persero).
- Organizational Structure ratified in Board of Directors Decree No. 01.27/01/SK/HKO.01/2023 dated January 27, 2023, last amended by Board of Directors Decree No. 02.02/01/SK/HKO.01/2023 dated February 2, 2023 concerning Organizational Structure, Main Duties, and Functions of the Headquarters at PT PELNI (Persero).

MANAGEMENT OF LHKPN REPORTING

PT PELNI (Persero) appoints several parties to manage LHKPN reporting, detailed as follows:

Chairman Coordinator: *Vice President* Risk Management & Compliance



PELAPORAN LHKPN REPORTING OF WEALTH REPORT (LHKPN)

Wakil Ketua 1 : Kepala Satuan Pengawasan Intern

Wakil Ketua 2 : Kepala Kesekretariatan Perusahaan

Sekretaris : Vice President SDM

Admin Instansi : Manager Kepatuhan

Admin Unit Kerja :

1. Direktorat Utama Pengawas Pratama Keselamatan, Kesehatan & Lingkungan Hidup (K3LH)
2. Direktorat Usaha Angkutan Penumpang Spv Jaminan Kualitas Angkutan Penumpang
3. Direktorat SDM & Umum Supervisor Sistem Informasi SDM & Pengelolaan Budaya
4. Direktorat Usaha Angkutan Barang & Tol Laut Analis Kajian Pengembangan Usaha & Produk Angkutan Barang
5. Direktorat Armada & Teknik Supervisor Sertifikasi Kapal & Pemeliharaan Kenautikan
6. Direktorat Keuangan & Manajemen Risiko Analis Kepatuhan

Deputy Chairman 1: Head of Internal Audit Unit

Deputy Chairman 2: Head of Corporate Secretariat

Secretary: Vice President Human Resources

Agency Admin: Compliance Manager

Unit Admin:

1. Main Directorate of Primary Safety, Health & Environment (K3LH) Supervisors
2. Passenger Transport Business Directorate Quality Assurance Supervisor
3. HR & General Directorate Supervisor HR Information Systems & Culture Management
4. Cargo Transport Business Directorate & Sea Toll Development Analyst Business & Cargo Product Development Studies
5. Fleet & Engineering Directorate Ship Certification & Maritime Maintenance Supervisor
6. Finance & Risk Management Directorate Compliance Analyst

WAJIB LAPOR LHKPN

Sesuai Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat PT PELNI (Persero), sejumlah pejabat perseroan sebagai wajib lapor LHKPN adalah sebagai berikut:

1. Direksi PT PELNI (Persero);
2. Komisaris Anak Perusahaan PT PELNI (Persero);
3. Direksi Anak Perusahaan PT PELNI (Persero);
4. Komisaris Perusahaan terafiliasi yang mewakili kepentingan PT PELNI (Persero);
5. Direksi Perusahaan terafiliasi yang mewakili kepentingan PT PELNI (Persero);
6. Dewan Pengawas Dana Pensiun Pelni;
7. Pegawai PT.PELNI (Persero) 1 level di bawah Direksi.

Realisasi Pelaporan LHKPN 2024

Realisasi pelaporan LHKPN PT PELNI (Persero) untuk periode tahun 2024 adalah sebagai berikut:

MANDATORY LHKPN REPORTING

According to the Guidelines for Reporting the Wealth of Officials at PT PELNI (Persero), several corporate officials are mandated to report LHKPN, including:

1. Board of Directors of PT PELNI (Persero);
2. Subsidiary Company Commissioners of PT PELNI (Persero);
3. Directors of Subsidiary Companies of PT PELNI (Persero);
4. Commissioners of affiliated companies representing the interests of PT PELNI (Persero);
5. Directors of affiliated companies representing the interests of PT PELNI (Persero);
6. Board of Trustees of Pelni Pension Fund;
7. Employees of PT PELNI (Persero) one level below the Board of Directors.

Realization of LHKPN Reporting 2024

The realization of LHKPN reporting at PT PELNI (Persero) for 2024 is as follows:



PELAPORAN LHKPN

REPORTING OF WEALTH REPORT (LHKPN)

Uraian Description	Jumlah Wajib Laport Total Mandatory Reports	Sudah Laport Reported	Belum Laport Not Yet Reported	Persentase Percentage
Dewan Komisaris Board of Commissioners	6	6	-	100,00%
Direksi Board of Directors	6	6	-	100,00%
Vice President	25	25	-	100,00%
Kepala Cabang Branch Managers	7	7	-	100,00%

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

GRATIFICATION CONTROL

PT PELNI (Persero) menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan korupsi di lingkungan perusahaan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya terus menerus dalam meningkatkan nilai perusahaan dan tata perilaku dalam hubungan bisnis antara Perusahaan dan mitra perusahaan. Sebagai implementasi atas hal tersebut, PT PELNI (Persero) memiliki pedoman gratifikasi yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 02.14/05/SK/HKO.01/2023 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT PELNI (Persero) dan Surat Keputusan Direksi Nomor: 02.14/06/SK/HKO.01/2023 tentang Pedoman Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan PT PELNI (Persero).

Secara mendasar, kebijakan gratifikasi PT PELNI (Persero) disusun dan diterapkan dengan mengacu pada Peraturan Badan Usaha Milik Negara Nomor Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-9/MBU/06/2021 Tahun 2021 tentang Pelaporan Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi tersebut telah dipublikasikan dalam portal internal dan *website* Perusahaan.

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Untuk memperkuat pengendalian gratifikasi di dalam Perusahaan, PT PELNI (Persero) memiliki Unit

PT PELNI (Persero) implements gratification control to support anti-corruption efforts within the company. This initiative serves as a continuous effort to enhance corporate values and business conduct in relationships between the Company and its business partners. As part of this commitment, PT PELNI (Persero) has established guidelines for gratification control outlined in Board of Directors Decree No. 02.14/05/SK/HKO.01/2023 regarding Guidelines for Gratification Control at PT PELNI (Persero) and Board of Directors Decree No. 02.14/06/SK/HKO.01/2023 concerning Guidelines for the Gratification Control Unit (UPG) at PT PELNI (Persero).

Fundamentally, PT PELNI (Persero)'s gratification policy is developed and implemented in accordance with State-Owned Enterprise Regulation Minister Regulation Number PER-9/MBU/06/2021 concerning Gratification Reporting within the Ministry of State-Owned Enterprises. This Gratification Control Policy has been published on the internal portal and the Company's website.

GRATIFICATION CONTROL UNIT

To strengthen gratification control within the Company, PT PELNI (Persero) has established a Gratification



PENGENDALIAN GRATIFIKASI

GRATIFICATION CONTROL

Pengendalian Gratifikasi (UPG). Unit Pengendalian Gratifikasi memiliki kedudukan yang independen dan berada pada divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

Unit Pengendalian Gratifikasi PT PELNI (Persero) memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menerima, menganalisis dan mengadministrasikan laporan penerimaan gratifikasi dari penerima gratifikasi di lingkungan PT PELNI (Persero);
2. Menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan gratifikasi, dalam hal penerima gratifikasi melaporkan penolakan gratifikasi;
3. Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi;
4. Melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi secara periodik kepada Komisi;
5. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing.
6. Melakukan sosialisasi ketentuan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal;
7. Melakukan pemeliharaan barang gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut;
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian gratifikasi di lingkungan PT PELNI (Persero).

Selain tugas utama tersebut di atas, UPG juga mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan perangkat aturan terkait penerapan pengendalian praktik Gratifikasi di lingkungan Perusahaan;
2. Menyiapkan perangkat kerja dan fasilitas terkait pengendalian praktik Gratifikasi, baik dari penerimaan laporan Gratifikasi sampai dengan pengiriman Surat Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Penerima dan/ atau Pelapor serta penyimpanan bukti penyetoran uang yang diterima dari Gratifikasi apabila diputuskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi milik Negara;
3. Menindaklanjuti laporan dugaan praktik Gratifikasi yang berasal dan/ atau bersumber dari WBS;

Control Unit (UPG). The Gratification Control Unit operates independently under Risk Management and Compliance Division.

The tasks of PT PELNI (Persero)'s Gratification Control Unit are as follows:

1. Receive, analyze, and administer reports on the receipt of gratuities from gratuity recipients within PT PELNI (Persero).
2. Receive and administer reports on the rejection of gratuities, in cases where gratuity recipients report the rejection of gratuities.
3. Forward reports on the receipt of gratuities to the Commission.
4. Periodically report summaries of gratuity receipt and rejection reports to the Commission.
5. Present the results of managing gratuity receipt and rejection reports and proposals for gratification control policies to respective agency leaders.
6. Conduct socialization of gratuity provisions to internal and external parties.
7. Maintain gratuity items until their status is determined.
8. Monitor and evaluate gratification control within PT PELNI (Persero).

In addition to these primary tasks, the UPG also has the following responsibilities:

1. Prepare regulations related to the implementation of gratification practice control within the Company.
2. Prepare tools and facilities related to the control of gratification practices, from receiving gratuity reports to sending Corruption Eradication Commission Decrees to recipients and/or reporters, as well as storing evidence of money deposits received from gratuities if decided by the Corruption Eradication Commission to belong to the State.
3. Follow up on reports of alleged gratification practices originating from or involving SOE work



PENGENDALIAN GRATIFIKASI

GRATIFICATION CONTROL

- Menyusun rencana kerja UPG setiap tahunnya melalui Aplikasi GOL yang dikembangkan oleh KPK, termasuk melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi dan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali;
- Membuat laporan pelaksanaan tugas UPG setiap triwulan kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

MEKANISME PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

Mekanisme Pelaporan

- Penerimaan, pemberian, permintaan, dan penolakan gratifikasi yang wajib dilaporkan kepada UPG PELNI dan dapat dilaporkan secara mandiri melalui Aplikasi GOL (Gratifikasi *Online*) KPK.
- Gratifikasi *Online* (GOL) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan Insan PELNI dalam melaporkan penerimaan gratifikasi.
- Insan PELNI dapat memilih metode pelaporan penerimaan gratifikasi secara individu maupun melalui UPG PELNI.
- Aplikasi GOL tersedia dalam versi *web* dan versi *mobile*, baik itu Android maupun iOS.
- Untuk membuka *Website* Gratifikasi Online diakses mengikuti aplikasi yang dikembangkan oleh KPK melalui <https://gol.kpk.go.id>.
- Insan PELNI apabila ingin melaporkan secara individu melalui aplikasi GOL dapat melakukan registrasi akun, kemudian Insan PELNI dapat memilih menu Pelapor yang akan mengarahkan pada pengisian identitas pelapor.
- Apabila melalui UPG PELNI, maka UPG PELNI dapat menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi disertai dengan dokumen pendukung kepada KPK paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan laporan gratifikasi.
- UPG PELNI membuat rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi sesuai aplikasi GOL KPK dan melaporkannya kepada Direktur Penanggung Jawab *Good Corporate Governance* secara berkala setiap triwulan.

units.

- Develop UPG work plans annually through the GOL Application developed by the Corruption Eradication Commission, including mapping vulnerable points for receiving and giving gratuities on a periodic basis, annually.
- Prepare quarterly UPG task implementation reports to the Director of Finance and Risk Management.

MECHANISM OF GRATIFICATION REPORTING AND DETERMINATION OF STATUS

Mechanism for Reporting Gratuities

- The receipt, giving, request, and rejection of gratifications must be reported to the PELNI UPG (Gratification Control Unit) and can also be independently reported through the GOL (Gratification Online) KPK Application.
- GOL (Gratification Online) is an application developed by KPK to facilitate PELNI employees in reporting gratifications.
- PELNI employees can choose to report the receipt of gratifications individually or through the PELNI UPG.
- The GOL application is available in both web and mobile versions, for Android and iOS.
- To access the Gratification Online website, follow the application developed by KPK via <https://gol.kpk.go.id>.
- If PELNI employees wish to report individually through the GOL application, they can register an account, then choose the Reporter menu, which will direct them to fill in the reporter's identity.
- If reporting through the PELNI UPG, the UPG can submit the gratification receipt report along with supporting documents to KPK no later than 14 (fourteen) days from the date of receipt of the gratification report.
- The PELNI UPG compiles a summary of gratification receipt and rejection reports according to the GOL KPK application and reports them to the Director in Charge of Good Corporate Governance on a quarterly basis.

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

GRATIFICATION CONTROL

9. Untuk penerimaan yang merupakan barang yang mudah kadaluwarsa, busuk, atau rusak dalam Batasan kewajaran (misal: makanan dan minuman), maka dapat diserahkan kepada panti asuhan, panti jompo, pihak-pihak yang membutuhkan, atau Lembaga Sosial lainnya selanjutnya melaporkan kepada UPG PELNI dengan melampirkan bukti tanda penyerahan kepada UPG PELNI selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan sebagai dimaksud.
10. Untuk penerimaan yang merupakan barang yang tidak cepat kadaluwarsa (misal: uang, emas, dan lainnya) disimpan oleh penerima gratifikasi yang bersangkutan, sampai dengan ditentukannya status kepemilikan atas penerimaan tersebut oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan menyampaikan laporan dan bukti tanda penyimpanan kepada UPG PELNI selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan sebagaimana dimaksud.
11. Apabila diketahui adanya Insan PELNI menerima/memberi gratifikasi yang tidak diperbolehkan atau berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang/jabatan dan Insan PELNI dimaksud tidak melaporkannya maka dapat dilaporkan melalui mekanisme *Whistleblowing System* (WBS) PELNI dan saluran lainnya.
12. Mekanisme pelaporan akan dituangkan lebih lanjut dalam Pedoman Unit Pengendali Gratifikasi (UPG PELNI).
9. For receipts that are perishable, spoiled, or damaged within reasonable limits (e.g., food and beverages), they can be donated to orphanages, nursing homes, those in need, or other social institutions, and reported to the PELNI UPG with proof of handover within 14 (fourteen) days from the date of receipt.
10. For receipts that are not perishable (e.g., money, gold, and others), they are kept by the respective gratification recipient until the ownership status is determined by the Corruption Eradication Commission (KPK), with a report and proof of storage submitted to the PELNI UPG no later than 14 (fourteen) days from the date of receipt.
11. If it is found that a PELNI employee receives or gives a gratification that is not permitted or potentially involves misuse of authority/position and the employee does not report it, it can be reported through the PELNI Whistleblowing System (WBS) and other channels.
12. The reporting mechanism will be further outlined in the Guidelines for the Gratification Control Unit (UPG PELNI).

LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI 2024

Selama tahun 2024, terdapat 3 (tiga) laporan penerimaan gratifikasi dan telah disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) serta telah ditindaklanjuti.

GRATIFICATION RECEIPT REPORT 2024

Throughout 2024, there were 3 (three) reports of gratification receipt submitted to the Corruption Eradication Commission through the Gratification Online (GOL) application and have been followed up.



PENGADAAN BARANG DAN JASA PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

PT PELNI (Persero) menjalankan kegiatan usahanya dengan melibatkan Perusahaan lain, mencakup Perusahaan-Perusahaan penyedia barang dan jasa penunjang pada industri transportasi. Atas hal tersebut, Perseroan menerapkan praktik pengadaan barang dan jasa dengan senantiasa mengacu pada peraturan perundang-undangan dan standar penerapan GCG yang berlaku.

Secara internal, proses pengadaan barang dan jasa Perseroan dilakukan dengan mengacu pada *Standard Operational Procedure* Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di PT PELNI (Persero) yang ditetapkan sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 10.23/01/SK/HKO.01/2019 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 07.26/03/ SK/HKO.01/2021 dan kewenangan Direksi dalam proses pengadaan barang dan jasa atau penggunaan anggaran sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 01.17/3/SK/HKO.01/2017. Kebijakan internal pengadaan barang dan jasa Perseroan secara mendasar mengacu pada Peraturan Menteri BUMN terkait Pengadaan Barang dan Jasa dengan Nomor PER-08/MBU/12/2019.

Manajemen rantai pasok PT PELNI (Persero) juga mencakup *assessment* pada pemasok terkait *quality*, *delivery*, dan *service* (QDS), yang dilakukan dengan memberikan formulir penilaian kepada user untuk pekerjaan *repeat order*.

Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di PT PELNI (Persero) yang diatur di dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 05.27/01/SK/HKO.01/2022 tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan Direksi Nomor 10.23/01/ SK/HKO.01/2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, diagram alur pengadaan barang dan jasa Perseroan adalah sebagai berikut:

PT PELNI (Persero) conducts its business activities involving other companies, including providers of goods and services supporting the transportation industry. Accordingly, the Company implements practices for the procurement of goods and services, always adhering to applicable laws and GCG standards.

Internally, the procurement process of the Company is conducted in accordance with the Standard Operational Procedure for Procurement of Goods and Services at PT PELNI (Persero) established under Board of Directors Decree No. 10.23/01/SK/HKO.01/2019 as amended by Board of Directors Decree No. 07.26/03/ SK/HKO.01/2021, and the authority of the Board of Directors in the procurement process or budget utilization as per Board of Directors Decree No. 01.17/3/ SK/HKO.01/2017. The Company's internal procurement policy fundamentally complies with the State-Owned Enterprises Ministerial Regulation concerning Procurement of Goods and Services, Number PER-08/ MBU/12/2019.

PT PELNI (Persero)'s supply chain management also includes assessment of suppliers related to quality, delivery, and service (QDS), conducted by providing assessment forms to users for repeat order jobs.

Mechanism of Procurement of Goods and Services

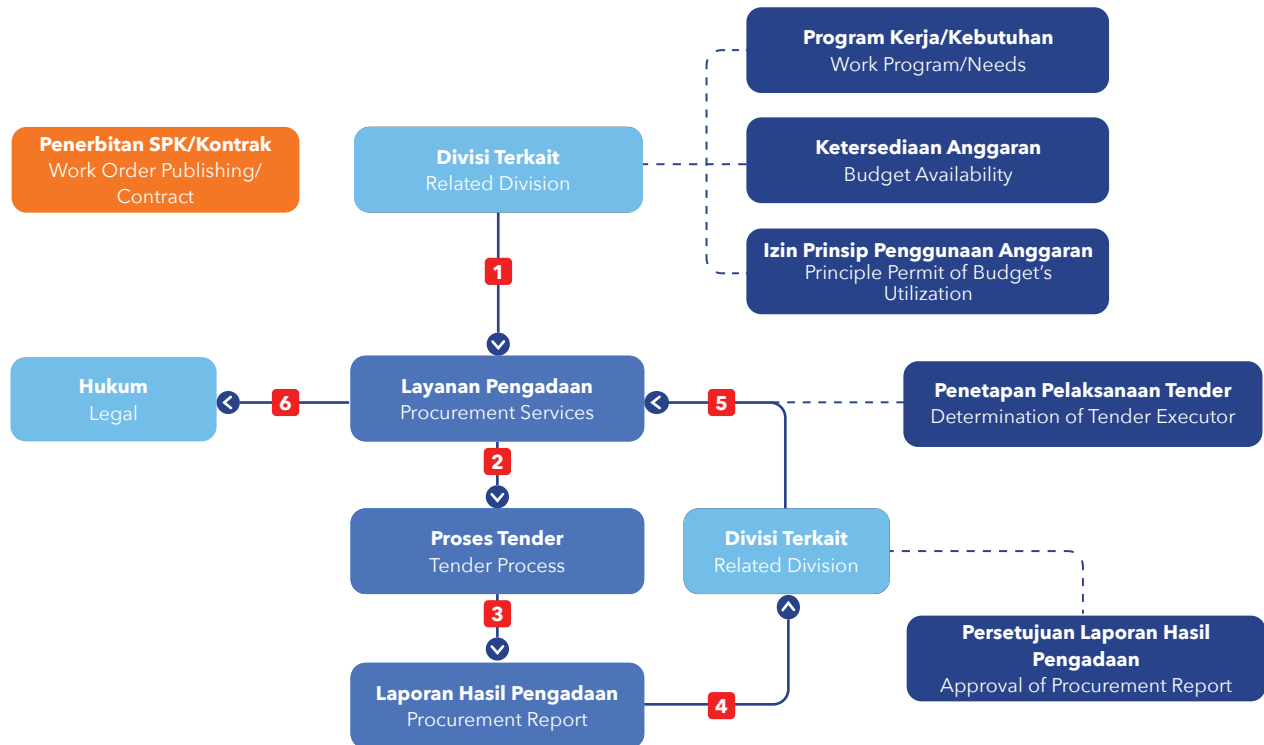
Based on the Procurement of Goods and Services Guidelines applicable at PT PELNI (Persero) regulated under Board of Directors Decree No. 05.27/01/SK/HKO.01/2022, which amended the Second Board of Directors Decree No. 10.23/01/SK/HKO.01/2019 concerning Guidelines for Procurement of Goods and Services, the procurement process diagram of the Company is as follows:

PENGADAAN BARANG DAN JASA

PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa PELNI

PELNI Goods and Services Procurement Mechanism



PENILAIAN PENERAPAN GCG

ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

PT PELNI (Persero) telah menerapkan penilaian terhadap penerapan GCG untuk periode tahun 2024, yang dilakukan oleh BPKP untuk tahun buku 2024 dilakukan pada 24 Januari 2025 - 27 Maret 2025. Aspek-aspek yang digunakan sebagai kriteria penilaian adalah sebagai berikut:

Aspek-aspek yang digunakan sebagai kriteria penilaian adalah sebagai berikut:

1. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan.
2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal.
3. Dewan Komisaris.
4. Direksi.
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi.

Hasil Penilaian GCG

Atas penilaian GCG tersebut, PT PELNI (Persero) memperoleh hasil penilaian yang secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

PT PELNI (Persero) has implemented an assessment of Good Corporate Governance (GCG) practices for the 2024 period, conducted by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) for the 2024 fiscal year. The assessment took place from January 24, 2025, to March 27, 2025. The aspects used as assessment criteria are as follows:

The criteria used for assessment are as follows:

1. Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance.
2. Shareholders and General Meeting of Shareholders/ Owners.
3. Board of Commissioners.
4. Board of Directors.
5. Information Disclosure and Transparency

GCG Assessment Results

Based on this GCG assessment, PT PELNI (Persero) achieved detailed results as presented in the table below:

Aspek Pengujian/Indikator/ Parameter Testing Aspect/Indicator/Parameter		Bobot Weight	Capaian Tahun 2022 2022 Achievement		Capaian Tahun 2023 2023 Achievement		Capaian Tahun 2024 2024 Achievement	
			Skor Score	% Capaian Achievement	Skor Score	% Capaian Achievement	Skor Score	% Capaian Achievement
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7	6,183	88,33%	6,816	97,373%	6,772	96,74%
II	Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and General Meeting of Shareholders (GMS)	9	8,143	90,48%	7,557	83,971%	7,549	83,87%
III	Dewan Komisaris Board of Commissioners	35	31,166	89,05%	32,153	91,865%	31,996	91,42%
IV	Direksi Board of Directors	35	30,956	88,45%	32,062	91,605%	32,014	91,47%
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9	7,953	88,37%	8,223	91,480%	8,180	90,88%
Sub Total Subtotal		95	84,401		86,821		86,511	
VI	Aspek Lainnya Other Aspects	5	-		-		0,625	
SKOR KESELURUHAN OVERALL SCORE			84,401	Sangat Baik Very Good	86,821	Baik Good	87,136	Sangat Baik Very Good



PENILAIAN PENERAPAN GCG

ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Berdasarkan *Assessment* terhadap penerapan GCG untuk periode tahun 2024 oleh BPKP, dapat disimpulkan bahwa kondisi penerapan GCG Perusahaan mencapai skor 87,136. Capaian skor tersebut berada dalam kategori predikat "SANGAT BAIK".

Rekomendasi Penilaian GCG

Terhadap kelemahan pelaksanaan GCG dan dalam upaya memperbaiki kinerja pencapaian praktik-praktik terbaik penerapan GCG, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi prioritas tindak lanjut oleh organ Perseroan sebagai berikut:

Aspek Komitmen

1. SKB Direksi PT PELNI (Persero) Nomor 11.15/03/SK/HKO.01/2023 tgl 15 November 2023 tentang Pedoman Prilaku (CoC) di Lingkungan PT PELNI (Persero) hanya disahkan oleh Direktur Utama yang seharusnya disahkan pula oleh Komisaris Utama, sebagai gambaran COC disetujui hingga Dewan Komisaris.
2. SKB Direksi PT PELNI (Persero) Nomor 11.15/03/SK/HKO.01/2023 tgl 15 November 2023 tentang Pedoman Perilaku (CoC) di Lingkungan PT PELNI (Persero) belum mengatur larangan tindakan pencucian uang dan larangan pendanaan terorisme, baik dalam kegiatan perusahaan maupun secara individu insan PT PELNI (Persero)

Aspek Pemegang Saham

1. Penetapan anggota Direksi yang definitif oleh RUPS lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan berakhir
2. Keputusan RUPS belum memuat alasan pemberhentian Direksi
3. Penetapan anggota Komisaris yang Definitif oleh RUPS lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan berakhir
4. Pengesahan persetujuan rancangan RJPP atau revisi RJPP belum dilaksanakan tepat waktu
5. Pengesahan/persetujuan rancangan RKAP belum dilaksanakan tepat waktu

Based on the Assessment of GCG implementation for 2024 by BPKP, it is concluded that the Company's GCG implementation achieved a score of 87.136. This score falls within the category of "VERY GOOD."

GCG Assessment Recommendations

Regarding weaknesses in GCG implementation and efforts to improve the performance of best practice GCG application, there are several priorities for follow-up action by the Company's organs as follows:

Commitment Aspect

1. Joint Decree (SKB) of the Directors of PT PELNI (Persero) No. 11.15/03/SK/HKO.01/2023 dated November 15, 2023, regarding the Code of Conduct (CoC) at PT PELNI (Persero) was signed only by the President Director. It should have also been ratified by the President Commissioner, as the CoC must be approved up to the Board of Commissioners level.
2. The CoC does not yet include prohibitions against money laundering and terrorism financing, either within corporate activities or by individuals within PT PELNI (Persero).

Shareholder Aspect

1. Definitive appointment of Directors by the GMS was made more than 30 days after the term ended.
2. GMS resolutions did not include reasons for the dismissal of Directors.
3. Definitive appointment of Commissioners by the GMS was made more than 30 days after the term ended.
4. Ratification or approval of the RJPP (Long-Term Corporate Plan) or its revision was not conducted on time.
5. Ratification/approval of the RKAP (Annual Work Plan and Budget) was not conducted on time.



PENILAIAN PENERAPAN GCG

ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

6. Persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan Pemegang Saham belum dilaksanakan tepat waktu (lebih 30 hari) 7. Penilaian Kinerja anggota Direksi (individu) oleh Pemegang Saham belum dituangkan dalam risalah RUPS 8. Belum ada Pedoman penyusunan laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang ditetapkan Pemegang Saham/RUPS 9. Besaran honorarium KAP belum dituangkan dalam risalah RUPS 10. RUPS belum menetapkan sistem penerimaan laporan gejala penurunan kinerja dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris	6. Approval/decision on corporate actions requiring shareholder consent was not provided in a timely manner (beyond 30 days). 7. Performance assessments of individual Directors by shareholders were not recorded in the GMS minutes. 8. No guidelines exist for preparing the Board of Commissioners' supervisory report as mandated by the Shareholders/GMS. 9. Auditor's fee has not been stated in the GMS minutes. 10. The GMS has not yet established a reporting system for early warnings of declining performance from the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.

Aspek Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan pelatihan bagi Dewan Komisaris tetapi kebijakan tersebut belum mengatur jumlah minimal jam pelatihan bagi setiap komisaris dan adanya analisa kebutuhan pelatihan.
2. Rencana Kerja Dewan Komisaris belum memuat kegiatan untuk mengikuti program-program yang diselenggarakan *Forum Human Capital Indonesia* (FHCI) atau *BUMN Center of Excellence* (BCE) yang diperuntukan bagi Dewan Komisaris BUMN
3. Belum terdapat usulan pelatihan dari komite nominasi remunerasi- *Internal control report*.
4. Dewan Komisaris telah melakukan Kajian/telaah atas Kebijakan/rancangan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern tetapi belum ada telaah atas:
 - Hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas.
 - Hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat operasional/aktivitas.
 - *Internal control report*.
5. Dalam usulan auditor eksternal kepada Pemegang Saham belum mencantumkan besarnya honorarium/imbal jasa (imbal jasa audit maupun imbal jasa non-audit) auditor eksternal tersebut.

Board of Commissioners Aspect

1. The Board has a training policy, but it does not specify minimum training hours per commissioner or include a training needs analysis.
2. The Board Work Plan does not include participation in programs held by FHCI or BUMN Center of Excellence (BCE).
3. The Nomination and Remuneration Committee has not proposed any training programs.
4. The Board has reviewed the internal control system policy/design and implementation but has not reviewed:
 - The results of entity-level internal control effectiveness evaluations.
 - The results of operational/activity-level internal control effectiveness evaluations.
 - The internal control report.
5. Proposals to appoint external auditors did not include details of audit and non-audit service fees.

PENILAIAN PENERAPAN GCG

ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

6. Belum terdapat dokumentasi atas penunjukan pengendali mutu independen dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SPI (<i>quality assurance review</i>) 7. Belum terdapat dokumentasi Dewan Komisaris melakukan telaah atau kajian sebelum memberikan persetujuan atas permohonan calon Direksi/Dekom anak Perusahaan 8. Belum terdapat dokumentasi Dewan Komisaris memberikan persetujuan pengangkatan Calon Anggota Direksi/Dewan Komisaris Anak Perusahaan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen yang dibutuhkan secara lengkap dari Direksi 9. Belum terdapat dokumentasi keterlibatan pihak independen dalam menilai kinerja dekom minimal sekali dalam masa jabatan dekom 10. Tugas pokok dan fungsi komite-komite di bawah dekom belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pada permen 2, 3 dan aturan turunannya 11. Asli piagam komite Dewan Komisaris belum disampaikan kepada Direksi untuk didokumentasikan	6. No documentation exists on the appointment of an independent external quality assessor to review SPI's performance. 7. No documentation of Board review prior to approving candidates for subsidiary Directors/Commissioners. 8. No documentation showing Board approval of subsidiary Directors/Commissioners within 15 days of receiving complete documentation from the Directors. 9. No documentation of independent party involvement in evaluating the Board's performance at least once during their term. 10. The duties and functions of committees under the Board are not yet fully aligned with Ministerial Regulations No. 2, 3, and their derivatives. 11. Original committee charters have not been submitted to the Directors for documentation.

Aspek Direksi

1. Materi program pengenalan belum memuat Tugas dan tanggungjawab Dekom dan kewenangan yg didelegasikan
2. Dalam Kebijakan tentang pelatihan bagi anggota Direksi, belum mengatur Program pengembangan selaras dengan usulan program pengembangan dari Komite Remunerasi dan Nominasi yang disusun dari kebutuhan Perusahaan
3. SOP yang telah dimutakhirkan selama tahun 2024 masih rendah jika dilihat dari prioritas reviu SOP Perusahaan
4. Database pegawai perusahaan telah ada tetapi masih belum menjadi satu kesatuan dan belum terintegrasi (database terkait KPI, pelatihan, pengalaman kerja masih terpisah-pisah)

Board of Directors Aspect

1. Onboarding materials do not include duties and responsibilities of the Board of Commissioners or delegated authorities.
2. The training policy for Directors does not align with the development programs proposed by the Nomination and Remuneration Committee based on company needs.
3. SOP updates in 2024 were minimal compared to the prioritized SOPs.
4. The employee database exists but is not integrated (KPI, training, and work experience data are still fragmented).



PENILAIAN PENERAPAN GCG

ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

5. Perusahaan telah memiliki mekanisme dalam merespon setiap usulan peluang bisnis yang mengatur dokumentasi terhadap setiap proses yang dilakukan oleh Direksi dalam merespon usulan bisnis tetapi mekanisme tersebut belum mengatur kewajiban Direksi untuk melakukan analisa dengan memperhatikan risiko yang akan dihadapi dalam memilih peluang bisnis.
 6. Dalam Pedoman Tata kelola TI belum memuat Pelaporan penyelenggaraan TI
 7. Dokumentasi sosialisasi atas Kebijakan kompensasi bila mutu tidak terpenuhi kepada pelanggan belum ada
 8. Perusahaan telah menyusun dan menetapkan kebijakan pada tingkat BUMN Induk yang diharmonisasikan dengan kebijakan pada tingkat Anak Perusahaan BUMN, tetapi dalam kebijakan tersebut belum memuat:
 - a. Pedoman penilaian kinerja Direksi individu
 - b. Kebijakan komite Tata Kelola Terintegrasi pada Anak Perusahaan terhadap entitas dibawahnya;
 9.
 - a. Belum ada piagam Dewan Komisaris
 - b. Belum ada tata hubungan Dewan Komisaris BUMN Induk dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN
 10.
 - a. Perusahaan telah memiliki profile aset tetapi belum secara terperinci
 - b. Persentase nilai aset non-produktif (idle) terhadap total aset belum mengalami penurunan
 11. Perusahaan memiliki kebijakan mengenai perlindungan hak dan kepentingan kreditur, tetapi belum memuat terkait kebijakan *covenant* yaitu jaminan perusahaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk melindungi kepentingan kreditur.
 12. Direksi menyampaikan laporan triwulanan dan tahunan kepada Dewan Komisaris bersamaan dengan penyampaian kepada Pemegang Saham.
5. The Company has established a mechanism for responding to proposed business opportunities, which includes documentation of each process undertaken by the Board of Directors in responding to such proposals. However, the existing mechanism does not yet require the Board of Directors to conduct an analysis that takes into account the potential risks involved in selecting a business opportunity.
 6. The IT governance guidelines do not include a section on IT performance reporting.
 7. No documentation exists on the dissemination of compensation policies related to unmet quality standards.
 8. The Company has developed and established a policy at the Parent SOE level that has been harmonized with the policies at the Subsidiary level. However, the policy does not yet include:
 - a. Guidelines for evaluating individual Director performance
 - b. Governance committee policies for subsidiaries toward their own sub-entities
 9.
 - a. No charter for the Board of Commissioners exists
 - b. No protocol for communication between parent and subsidiary Boards of Commissioners
 10.
 - a. Asset profiling is available but not detailed
 - b. The proportion of idle assets to total assets has not decreased
 11. The Company has a policy regarding the protection of creditors' rights and interests; however, it does not yet include provisions related to covenants, the Company's commitment to undertake or refrain from certain actions to safeguard the interests of creditors.
 12. Quarterly and annual reports are submitted to the Board of Commissioners simultaneously with submission to Shareholders.

PENILAIAN PENERAPAN GCG

ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

13. Laporan Tahunan unaudited belum memuat evaluasi RJPP.
14. Laporan *assessment* atas program jaminan kualitas dan peningkatan fungsi pengawasan intern belum disampaikan kepada Dewan Komisaris.
15. Substansi dalam panggilan RUPS RKAP dan RUPS Laporan Tahunan belum mencantumkan terkait bahan paparan/materi RUPS.
16. RUPS/Keputusan Pemilik Modal untuk pengesahan/persetujuan RJPP belum dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum periode RJPP berikutnya berjalan.

Aspek Pengungkapan

1. Laporan Tahunan 2023 telah memuat uraian mengenai aktivitas berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen, tetapi belum mencantumkan biaya yang telah dikeluarkan.
2. Laporan Tahunan 2023 telah memuat uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai "*community development* program" yang telah dilakukan dan aktivitas lingkungan, tetapi biaya yang dikeluarkan belum dirinci sesuai dengan masing-masing kegiatan

13. The unaudited Annual Report does not include an RJPP evaluation.
14. The internal quality assurance and internal audit enhancement program report has not been submitted to the Board of Commissioners.
15. GMS invitations for the RKAP and Annual Report do not include presentation materials.
16. RJPP approval by the GMS/shareholders has not been completed within 60 days after the full draft was received or before the next RJPP period began.

Disclosure Aspect

1. The 2023 Annual Report includes a description of the Company's social responsibility activities, especially regarding consumer protection commitment, but does not disclose the related expenditures.
2. The 2023 Annual Report includes information and expenses related to social responsibility activities such as community development and environmental programs, but the expenses are not itemized by activity.



PENILAIAN PENERAPAN GCG

ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

No	Parameter	Uraian Description	AOI
1	18	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengangkatan anggota dan komposisi Direksi. The Shareholders/AGM/Capital Owners determine the appointment of members and the composition of the Board of Directors.	Penetapan anggota Direksi yang definitif oleh RUPS lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan berakhir. The appointment of definitive Board of Directors members by the AGM has been delayed for more than thirty (30) days after the term of office has ended.
2	20	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberhentikan anggota Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. The Shareholders/AGM/Capital Owners dismiss the members of the Board of Directors in accordance with the applicable laws and regulations.	Keputusan RUPS belum memuat alasan pemberhentian Direksi. The AGM decision does not include the reasons for the dismissal of the Board of Directors.
3	24	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan komposisinya. The Shareholders/AGM/Capital Owners determine the appointment of members and the composition of the Board of Commissioners/Supervisory Board.	Penetapan anggota Komisaris yang Definitif oleh RUPS lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan berakhir. The appointment of definitive members of the Board of Commissioners by the AGM has been delayed for more than thirty (30) days after the term of office has ended.
4	27	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) atau Revisi RJPP. The Shareholders/AGM/Capital Owners approve the Company's Long-Term Plan (RJPP) or its Revision.	Pengesahan persetujuan rancangan RJPP atau revisi RJPP belum dilaksanakan tepat waktu The approval of the draft RJPP or its revision has not been carried out on time.
5	28	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). The Shareholders/AGM/Capital Owners approve the ratification of the Company's Work and Budget Plan (RKAP).	Pengesahan/persetujuan rancangan RKAP belum dilaksanakan tepat waktu The ratification/approval of the draft RKAP has not been carried out on time.

PENILAIAN PENERAPAN GCG

ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Usulan Rekomendasi Recommendation Proposal	Progres dan & Rencana Perbaikan Progress & Improvement Plan
Penetapan anggota Direksi yang definitif oleh RUPS tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan berakhir. The appointment of definitive Board of Directors members by the AGM is made no later than thirty (30) days after the term of office has ended.	1. Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-70/MBU/03/2024 tentang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia (SK Pemberhentian Sdr. Yossianis Marciano Sebagai Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut, dan Mengangkat Sdr. Kokok Susanto sebagai Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut 2. Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-6/MBU/01/2024 tentang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia (SK Pemberhentian Sdr. Rainoc ebagai Direktur SDM dan Umum, dan Mengangkat Sdr. Heri Purnomo sebagai SDM dan Umum. (Selesai) 1. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-70/MBU/03/2024 regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) (Decree on the Dismissal of Mr. Yossianis Marciano as Director of Cargo Transport and Sea Toll, and the Appointment of Mr. Kokok Susanto as Director of Cargo Transport and Sea Toll). 2. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-6/MBU/01/2024 regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) (Decree on the Dismissal of Mr. Rainoc as Director of HR and General Affairs, and the Appointment of Mr. Heri Purnomo as Director of HR and General Affairs). (Finished)
Keputusan RUPS memuat alasan pemberhentian Direksi. The AGM decision includes the reasons for the dismissal of the Board of Directors.	
Penetapan anggota Komisaris yang Definitif oleh RUPS tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan berakhir. The appointment of definitive members of the Board of Commissioners by the AGM is made no later than thirty (30) days after the term of office has ended.	Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-9/MBU/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota - Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Selesai) Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-9/MBU/01/2024 dated January 16, 2024, regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). (Finished)
Pengesahan/persetujuan rancangan RJPP atau revisi RJPP dilaksanakan tepat waktu. The approval of the draft RJPP or its revision is carried out on time.	Direksi Telah melakukan penyampaian atas Buku Rencana Jangka Panjang (RJP) PT PELNI (Persero) kepada Menteri BUMN melalui surat Nomor 09.30/01/S-B/DU/2024 tanggal 30 September 2024 (Selesai) The Board of Directors has submitted the Long-Term Plan (RJP) book of PT PELNI (Persero) to the Minister of State-Owned Enterprises through letter No. 09.30/01/S-B/DU/2024 dated September 30, 2024. (Finished)
Pengesahan/persetujuan rancangan RKAP dilaksanakan tepat waktu. The ratification/approval of the draft RKAP was carried out on time.	Pengesahan dan Persetujuan rancangan RKAP telah tepat waktu, tertuang dalam Akta Notaris Berita Acara RUPS tentang Pengesahan dan Persetujuan RKAP Nomor 48. tanggal 29 Januari Tahun 2024 (Selesai) The ratification and approval of the draft RKAP were carried out on time, as stated in the Notarial Deed of the AGM Minutes on the Ratification and Approval of the RKAP, Number 48, dated January 29, 2024. (Finished)



PENILAIAN PENERAPAN GCG

ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

No	Parameter	Uraian Description	AOI
6	29	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS/Pemilik Modal. The Shareholders/AGM/Capital Owners approve the proposal for corporate actions that require approval/decision from the AGM/Capital Owners.	Persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan Pemegang Saham belum dilaksanakan tepat waktu (lebih 30 hari) The approval/decision on the proposed corporate actions that require approval/decision from the Shareholders has not been carried out on time (more than 30 days).
7	30	RUPS/Pemilik Modal memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dan kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. The AGM/Capital Owners assess the performance of the Board of Directors and the performance of the Board of Commissioners/Supervisory Board.	Penilaian Kinerja anggota Direksi (oleh Pemegang Saham) belum dituangkankan dalam risalah RUPS The performance assessment of the Board of Directors members (by the Shareholders) has not been recorded in the AGM minutes.
8	30	RUPS/Pemilik Modal memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dan kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. The AGM/Capital Owners provide an assessment of the performance of the Board of Directors and the performance of the Board of Commissioners/Supervisory Board.	Penilaian Kinerja anggota Direksi (oleh Pemegang Saham) belum dituangkankan dalam risalah RUPS The performance assessment of the Board of Directors members (by the Shareholders) has not been recorded in the AGM minutes.
9	32	Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal menetapkan auditor eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan perusahaan. The Shareholders/AGM/Capital Owners appoint the external auditor to audit the company's financial statements.	Besaran honorarium KAP belum dituangkankan dalam risalah RUPS The amount of the audit firm's honorarium has not been recorded in the AGM minutes.
10	40	Pemegang Saham/Pemilik Modal merespon terhadap informasi yang diterima dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai gejala penurunan kinerja dan kerugian perusahaan yang signifikan. The Shareholders/Capital Owners respond to the information received from the Board of Directors and/or the Board of Commissioners/Supervisory Board regarding signs of declining performance and significant losses of the company.	RUPS belum menetapkan sistem penerimaan laporan gejala penurunan kinerja dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris. The AGM has not established a system for receiving reports on signs of declining performance from the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.

Aspek Dewan Komisaris / Aspects of the Board of Commissioners

1	48	Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi. The Board of Commissioners approves the draft RKAP submitted by the Board of Directors.	Pendapat dan saran terhadap rancangan RKAP belum memuat simpulan bahwa rancangan RKAP selaras dan/ atau tidak selaras dengan RJPP The opinions and recommendations on the draft RKAP do not yet include a conclusion on whether the draft RKAP is aligned and/or not aligned with the RJPP.

PENILAIAN PENERAPAN GCG

ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Usulan Rekomendasi Recommendation Proposal	Progres dan & Rencana Perbaikan Progress & Improvement Plan
Persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/ keputusan Pemegang Saham dilaksanakan tepat waktu. The approval/decision on the proposed corporate actions that require approval/ decision from the Shareholders was carried out on time.	Kementerian BUMN selaku RUPS PT PELNII (Persero) telah memberikan Persetujuan atas Tindak Lanjut Penghapusbukuan KM Caraka Jaya Niaga III-22 dengan Penyesuaian Harga terhadap Nilai Jual melalui Surat Surat Menteri BUMN selaku RUPS Pelni Nomor S-499/MBU/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024 Hal Persetujuan Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan KM Caraka Jaya III - 22 Milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Selesai) The Ministry of State-Owned Enterprises, as the AGM of PT PELNI (Persero), has granted approval for the Follow-up on the write-off of KM Caraka Jaya Niaga III-22 with Price Adjustment to the Selling Value through the Letter of the Minister of State-Owned Enterprises as the AGM of Pelni, Number S-499/MBU/10/2024, dated October 11, 2024, regarding the Approval of the Write-off and Transfer of KM Caraka Jaya III-22 owned by PT Pelayaran Nasional Indonesia. (Finished)
Penilaian Kinerja anggota Direksi (Individu) oleh Pemegang Saham dituangkan dalam risalah RUPS. The performance assessment of individual members of the Board of Directors by the Shareholders is recorded in the AGM minutes.	
Menetapkan Pedoman penyusunan laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris. Establish the Guidelines for the Preparation of the Board of Commissioners' Supervisory Report.	Terdapat pada Agenda Pembahasan di Akta Notaris Berita Acara RUPS tentang Pengesahan dan Persetujuan RKAP Nomor 48. tanggal 29 Januari Tahun 20024 (Selesai) It is included in the Agenda Discussion in the Notarial Deed of the AGM Minutes on the Ratification and Approval of the RKAP, Number 48, dated January 29, 2024. (Finished)
Besaran honorarium KAP dituangkan dalam risalah RUPS./ The amount of the audit firm's honorarium is recorded in the AGM minutes.	
Menetapkan sistem penerimaan laporan gejala penurunan kinerja dari Direksi dan/ atau Dewan Komisaris. Establish a system for receiving reports on signs of declining performance from the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.	
Menyampaikan tanggapan RKAP dengan memuat kesimpulan atas keselarasan terhadap RJPP. Provide a response to the RKAP that includes a conclusion on its alignment with the RJPP.	• Hasil tanggapan atas usulan RJPP tahun 2025 s.d. 2029 telah dikirimkan kepada kementerian BUMN dengan nomor surat 135/DK/IX/2024 tanggal 25 September 2024; • Hasil tanggapan atas usulan RKAP tahun 2025 s.d. 2029 telah dikirimkan kepada kementerian BUMN dengan nomor surat 138/DK/X/2024 tanggal 31 Oktober 2023 • The response to the proposed RJPP for the years 2025 to 2029 has been submitted to the Ministry of State-Owned Enterprises with letter number 135/DK/IX/2024 dated September 25, 2024. • The response to the proposed RKAP for the years 2025 to 2029 has been submitted to the Ministry of State-Owned Enterprises with letter number 138/DK/X/2024 dated October 31, 2023.



PENILAIAN PENERAPAN GCG

ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

No	Parameter	Uraian Description	AOI
2	50	Dewan Komisaris dalam batas kewenangannya, merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari <i>Stakeholders</i> (pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris ataupun penyampaian oleh Direksi. The Board of Commissioners, within its authority, responds to suggestions, expectations, issues, and complaints from stakeholders (customers, suppliers, creditors, and employees) that are directly submitted to the Board of Commissioners or conveyed by the Board of Directors.	Penyampaian saran penyelesaian atas saran, harapan permasalahan dan keluhan dari <i>stakeholder</i> secara tertulis kepada Direksi belum ada The written submission of suggested resolutions for the suggestions, expectations, issues, and complaints from stakeholders to the Board of Directors has not been made.
3	51	Dewan Komisaris memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian intern perusahaan. The Board of Commissioners provides guidance on strengthening the company's internal control system.	Belum sepenuhnya melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan 1. Sistem pengendalian intern 2. Manajemen risiko Perusahaan 3. Sistem teknologi informasi Perusahaan 4. Pengadaan barang dan jasa 5. Mutu dan pelayanan The supervision and provision of advice on the following policies have not been fully implemented: 1. Internal control system 2. Company risk management 3. Company information technology system 4. Procurement of goods and services 5. Quality and service
4	52	Dewan Komisaris memberikan arahan tentang manajemen risiko perusahaan. The Board of Commissioners provides guidance on the company's risk management.	Belum sepenuhnya melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan 1. Sistem pengendalian intern 2. Manajemen risiko Perusahaan 3. Sistem teknologi informasi Perusahaan 4. Pengadaan barang dan jasa 5. Mutu dan pelayanan The supervision and provision of advice on the following policies have not been fully implemented: 1. Internal control system 2. Company risk management 3. Company information technology system 4. Procurement of goods and services 5. Quality and service
5	53	Dewan Komisaris memberikan arahan tentang sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan. The Board of Commissioners provides guidance on the information technology system used by the company.	Belum sepenuhnya melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan 1. Sistem pengendalian intern 2. Manajemen risiko Perusahaan 3. Sistem teknologi informasi Perusahaan 4. Pengadaan barang dan jasa 5. Mutu dan pelayanan The supervision and provision of advice on the following policies have not been fully implemented: 1. Internal control system 2. Company risk management 3. Company information technology system 4. Procurement of goods and services 5. Quality and service

PENILAIAN PENERAPAN GCG

ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Usulan Rekomendasi Recommendation Proposal	Progres dan & Rencana Perbaikan Progress & Improvement Plan
Permasalahan dan keluhan dari <i>Stakeholders</i> dibahas secara intensif dan pembahasan menghasilkan simpulan berupa saran penyelesaian serta menyampaikannya kepada Direksi. Issues and complaints from stakeholders are discussed intensively, and the discussions result in conclusions with suggested resolutions, which are then communicated to the Board of Directors.	Pembahasan terkait dengan tindak lanjut atas saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari <i>Stakeholders</i> (pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawan) dilakukan dalam agenda Rapat Gabungan Antara Dewan Komisaris dan Direksi (Selesai) Discussions regarding the follow-up on suggestions, expectations, issues, and complaints from stakeholders (customers, suppliers, creditors, and employees) are held in the joint meeting agenda between the Board of Commissioners and the Board of Directors. (Finished)
Memberi arahan kepada Direksi untuk melakukan evaluasi <i>Internal Control</i> Perusahaan secara entitas/korporat dan melakukan telaah serta masukan atas efektivitas pengendalian intern secara korporat. Provide guidance to the Board of Directors to conduct an evaluation of the company's internal control at the entity/corporate level and to review and provide input on the effectiveness of corporate internal controls.	Telah dimuat dalam surat Komisaris Nomor: 75/DK/V-2024 tanggal 13 Mei 2024 perihal Tanggapan atas Laporan Satuan Pengawas Internal PT PELNI (Persero) Triwulan I Tahun 2024 pada poin 4c yang menyatakan "Dengan keterbatasan SDM, Satuan Pengawas Internal dapat menerapkan dan membangun sistem aplikasi <i>continuous monitoring and continuous auditing</i> (CACM) untuk membantu pengawasan seluruh proses bisnis perusahaan dengan sistem informasi dan dapat mengetahui lebih dini (<i>early warning</i>) atas kejadian kecurangan/<i>fraud</i> aktivitas perusahaan". (Selesai) It has been included in the letter from the Commissioners, Number: 75/DK/V-2024 dated May 13, 2024, regarding the Response to the Internal Audit Unit's Report of PT PELNI (Persero) for the First Quarter of 2024, in point 4c, which states, "With the limited human resources, the Internal Audit Unit can implement and develop a continuous monitoring and continuous auditing (CACM) application system to assist in supervising the entire business process of the company with an information system, and provide early warning of fraudulent activities within the company." (Finished)
Melakukan telaah atas kebijakan manajemen risiko perusahaan. Conduct a review of the company's risk management policies.	Rekomendasi tersebut sesuai dengan kajian Komite Audit yang disampaikan dalam ND Nomor: 35/K.Audit/V/2024 tanggal 9 Mei 2024 (Selesai) The recommendation is in accordance with the Audit Committee's review, as stated in the ND Number: 35/K.Audit/V/2024 dated May 9, 2024. (Finished)
Melakukan telaah terhadap kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan yang ada. Conduct a review of the existing information technology system policies of the company.	Telah dilakukan pengawasan dan pemberian nasehat terkait kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan (Selesai) Supervision and provision of advice regarding the company's information technology system policies have been carried out. (Finished)



PENILAIAN PENERAPAN GCG

ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

No	Parameter	Uraian Description	AOI
6	57	Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut. The Board of Commissioners provides guidance on the quality and service policies and their implementation.	Belum sepenuhnya melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan 1. Sistem pengendalian intern 2. Manajemen risiko Perusahaan 3. Sistem teknologi informasi Perusahaan 4. Pengadaan barang dan jasa 5. Mutu dan pelayanan The supervision and provision of advice on the following policies have not been fully implemented: 1. Internal control system 2. Company risk management 3. Company information technology system 4. Procurement of goods and services 5. Quality and service
7	70	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memastikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. The Board of Commissioners/Supervisory Board ensures that the principles of Good Corporate Governance have been effectively and sustainably implemented.	Pemantauan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik belum sepenuhnya dilaksanakan The monitoring of the implementation of Good Corporate Governance principles has not been fully carried out.
8	71	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. The Board of Commissioners/Supervisory Board conducts measurement and assessment of the performance of the Board of Commissioners/Supervisory Board.	Belum melakukan evaluasi pencapaian kinerja masing masing anggota Dewan Komisaris (<i>Self Assesment</i> Komisaris) dan dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris The evaluation of the performance achievements of each member of the Board of Commissioners (Self-Assessment of Commissioners) has not been conducted and recorded in the minutes of the Board of Commissioners' meeting.
9	81	Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki piagam/ <i>charter</i> dan program kerja tahunan. The Board of Commissioners/Supervisory Board Committee has a charter and an annual work program.	Program kerja tahunan Komite Audit belum sesuai dengan ketentuan yaitu belum memuat telaah untuk <i>Self assesment</i> kinerja Komite Audit The Audit Committee's annual work program does not fully comply with the regulations, as it does not include a review for the self-assessment of the Audit Committee's performance.

Aspek Direksi / Aspects of the Board of Directors

1	87	- Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan standard operasional baku (SOP) untuk proses bisnis inti (<i>core business</i>) perusahaan - Direksi menetapkan kebijakan tentang pedoman penyusunan SOP di perusahaan Nomor: 12.19/01/SK/HKO.01/2023 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedure PT PELNI (Persero) - The Board of Directors establishes operational policies and standard operating procedures (SOP) for the company's core business processes. - The Board of Directors establishes a policy on the guidelines for the preparation of SOPs in the company, Number: 12.19/01/SK/HKO.01/2023, regarding the Guidelines for the Preparation of Standard Operating Procedures of PT PELNI (Persero).	Beberapa SOP yang sudah tidak up date telah dilakukan pemutakhiran, namun masih ada beberapa SOP yang masih dalam proses pemutakhiran, terutama SOP Pola Karier dan SOP Penyusunan RKAP Several SOPs that were outdated have been updated; however, there are still some SOPs in the process of being updated, particularly the Career Pattern SOP and the RKAP Preparation SOP.

PENILAIAN PENERAPAN GCG

ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Usulan Rekomendasi Recommendation Proposal	Progres dan & Rencana Perbaikan Progress & Improvement Plan
Melakukan telaah dan memberi masukan terhadap kebijakan mutu dan pelayanan Perusahaan Conduct a review and provide input on the company's quality and service policies.	Telah dilakukan pembahasan <i>Hazard Risk</i> dan <i>Operational Risk</i> dengan rekomendasi Dewan Komisaris yaitu: - Berkaitan dengan docking kapal agar Manajemen melakukan pengawasan dan memastikan kapal selesai <i>dock</i> tepat waktu dan siap beroperasi sebelum Angkutan Lebaran dimulai. - Berkaitan dengan <i>crane</i> kapal yang tidak optimal agar Manajemen melakukan perbaikan dan perawatan fasilitas kapal (<i>crane</i>) oleh teknisi yang ahli pada bidangnya dan memiliki sertifikat standar. (Selesai) Discussions on Hazard Risk and Operational Risk have been conducted, with the following recommendations from the Board of Commissioners: - Regarding the ship docking, Management is advised to monitor and ensure that the ships are docked on time and ready to operate before the Eid transportation season begins. - Regarding the suboptimal crane performance, Management is advised to carry out repairs and maintenance of the ship's crane facilities by qualified technicians with the appropriate certification. (Finished)
Melakukan telaah secara khusus atas laporan hasil <i>assessment</i> pelaksanaan Tata Kelola tindak lanjut area of improvement hasil <i>assessment</i> GCG oleh Direksi. Conduct a specific review of the assessment report on the implementation of Governance, focusing on the follow-up actions for the areas of improvement identified in the GCG assessment by the Board of Directors.	
Mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris (<i>Self-assessment</i>) dan dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris. Evaluate the performance achievements of each member of the Board of Commissioners (Self-assessment) and record it in the minutes of the Board of Commissioners' meeting.	
	Telah dilakukan penyesuaian terhadap Program kerja tahunan Komite Audit sesuai dengan ketentuan yaitu memuat telaah untuk <i>Self assesment</i> kinerja Komite Audit (Selesai) Adjustments have been made to the Audit Committee's annual work program in accordance with the regulations, including a review for the self-assessment of the Audit Committee's performance. (Finished)
Menyelesaikan proses pemutakhiran SOP Pola Karier dan SOP Penyusunan RKAP dan menetapkan dengan Keputusan Direksi Complete the process of updating the Career Pattern SOP and the RKAP Preparation SOP, and establish them with a Board of Directors' Decision.	Telah dilakukannya penyusunan SOP terkait Penyusunan RKAP oleh Divisi Perencanaan dan Transformasi Perusahaan dan SOP Pengembangan Pola Karir Jabatan Pegawai oleh Divisi SDM (Selesai) The SOP for RKAP Preparation has been developed by the Planning and Corporate Transformation Division, and the SOP for Employee Career Pattern Development has been developed by the HR Division. (Finished)



PENILAIAN PENERAPAN GCG

ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

No	Parameter	Uraian Description	AOI
2	91	Direksi menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam perusahaan. The Board of Directors places employees at all levels of positions according to the job specifications and has a succession plan for all positions within the company.	Belum ada penyampaian usulan calon pejabat satu level di bawah Direksi kepada Dewan Komisaris, sehingga Dewan Komisaris belum memberikan arahan terhadap rencana promosi dan mutasi tersebut sebelum ditetapkan. There has been no submission of proposed candidates for positions one level below the Board of Directors to the Board of Commissioners, so the Board of Commissioners has not yet provided guidance on the promotion and transfer plans before they are finalized.
3	92	Direksi memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan, penghematan/efisiensi perusahaan, pendayagunaan aset, dan manfaat lainnya. The Board of Directors responds to proposals for business opportunities that have the potential to increase the company's revenue, achieve cost savings/efficiencies, optimize assets, and provide other benefits.	Peluang bisnis yang sudah di targetkan belum secara maksimal dalam pelaksanaannya The business opportunities that have been targeted have not been fully maximized in their implementation.
4	95	Direksi memiliki sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan dalam organisasi (struktural) yang diterapkan secara obyektif dan transparan. The Board of Directors has a performance measurement and evaluation system/guideline for units and positions within the organization (structural) that is applied objectively and transparently.	Sistem pengukuran kinerja pegawai individu untuk Kapal Perintis dan Kapal Rede belum menggunakan sistem aplikasi kinerja. The individual performance measurement system for Pioneer Ship and Rede Ship employees has not yet utilized a performance application system.
5	100	Direksi menerapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. The Board of Directors implements an information technology system in accordance with the policies that have been established.	Meningkatkan kapabilitas proses TI Perusahaan, sehingga tercapai tingkat kapabilitas seperti yang dipersyaratkan oleh Kementerian BUMN dalam PER-02/MBU/2023 yaitu Level 3.00. Enhancing the Company's IT process capabilities to achieve the required maturity level of 3.00, as mandated by the Ministry of State-Owned Enterprises under Regulation PER-02/MBU/2023.
6	101	Direksi melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan The Board of Directors implements a continuous quality improvement system for products and services.	Jumlah keluhan tahun 2022 sebanyak 217 dan tahun 2023 sebanyak 421. Kenaikan yang signifikan terjadi pada aspek Penjualan Tiket Online, hal ini karena perusahaan memperomosisikan secara gencar penjualan tiket secara online, yang disebabkan kendala sistem dan kendala uncontrollable dari Bank yang bekerja sama dengan PT Peln. The number of complaints in 2022 was 217, while in 2023 it reached 421. A significant increase occurred in the Online Ticket Sales aspect, driven by the company's aggressive promotion of online ticket purchases, as well as system constraints and uncontrollable issues from partner banks collaborating with PT Peln.



PENILAIAN PENERAPAN GCG

ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

	Usulan Rekomendasi Recommendation Proposal	Progres dan Rencana Perbaikan Progress & Improvement Plan
	Menyampaikan kepada Dewan Komisaris calon pejabat satu level dibawah Direksi, untuk pemberian arahan terhadap rencana promosi dan mutasi tersebut sebelum ditetapkan. Submit the proposed candidates for positions one level below the Board of Directors to the Board of Commissioners for guidance on the promotion and transfer plans before they are finalized.	Divisi SDM akan melakukan telaah lebih lanjut The HR Division will conduct further review.
	Melaksanakan penyebaran kuesioner kepada insan Pelni terkait manfaat investasi Pembelian Reefer Container. Conduct the distribution of questionnaires to PT PELNI employees regarding the benefits of the Reefer Container investment.	Telah dilakukannya survei atas Kepuasan Shipper Reefer Container PT PELNI (Persero) oleh Divisi Usaha Barang NonKomersil berdasarkan Nota Dinas Nomor 09.26/05/ND-B/UBN/2024 tanggal 26 September 2024 perihal Penyampaian Hasil Survey Kepuasan Shipper Reefer Container PT PELNI (Persero) oleh Divisi Usaha Barang NonKomersil (Selesai) A survey on the satisfaction of Reefer Container shippers at PT PELNI (Persero) has been conducted by the Non-Commercial Goods Division, based on the Memorandum Number 09.26/05/ND-B/UBN/2024 dated September 26, 2024, regarding the Submission of the Reefer Container Shipper Satisfaction Survey Results by the Non-Commercial Goods Division. (Finished)
	Pengukuran kinerja pegawai individu untuk Kapal Perintis dan Kapal Rede dilaksanakan menggunakan sistem aplikasi kinerja. Individual performance measurement for Pioneer Ship and Rede Ship employees is carried out using a performance application system.	Masih dalam proses tahap pembahasan/pengkajian internal SDM terkait media pengukuran kinerja pegawai kapal perintis dan rede. The process is still in the stage of internal HR discussion/review regarding the performance measurement media for the pioneer ship and rede employees.
	Meningkatkan kapabilitas proses TI Perusahaan, sehingga tercapai tingkat kapabilitas seperti yang dipersyaratkan oleh Kementerian BUMN dalam PER-02/MBU/2023 yaitu Level 3.00. Enhancing the Company's IT process capabilities to achieve the required maturity level of 3.00, as mandated by the Ministry of State-Owned Enterprises under Regulation PER-02/MBU/2023.	1. Melakukan monitoring tindak lanjut hasil assessment tingkat kematangan tata kelola TI tahun 2024. 2. <i>Assessment</i> tingkat kematangan tata kelola TI telah dilaksanakan pada 25 Oktober 2024 berdasarkan Berita Acara Mulai Pekerjaan perihal PENGADAAN JASA KONSULTAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PERIODE 2025-2029 (Selesai) 1. Conducting follow-up monitoring on the results of the 2024 IT governance maturity level assessment. 2. The IT governance maturity level assessment was carried out on 25 October 2024, as stated in the Work Commencement Report regarding the PROCUREMENT OF CONSULTANCY SERVICES FOR THE DEVELOPMENT OF THE 2025-2029 STRATEGIC PLAN AND INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE (Finished)
	Meningkatkan pelayanan utamanya layanan penjualan tiket secara online, serta berkoordinasi dengan mitra operator yaitu Bank - Bank yang melakukan kerjasama dengan PT Pelni, dengan lebih meningkatkan sistem penjualan tiket online untuk meminimalisir jumlah keluhan pelanggan. Enhancing core services, particularly online ticket sales, and strengthening coordination with partner banks collaborating with PT Pelni. This includes further optimizing the online ticketing system to minimize customer complaints.	Telah dilakukan perbaikan informasi biaya layanan pada channel pembayaran Briva untuk channel penjualan Website dan Pelni Mobile (Selesai) Service fee information has been improved for BRIVA payment channels on both the Website and Pelni Mobile sales platforms. (Finished)



PENILAIAN PENERAPAN GCG

ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

No	Parameter	Uraian Description	AOI
7	107	Direksi menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern untuk melindungi mengamankan investasi dan aset perusahaan. The Board of Directors establishes and implements an internal control system to safeguard and secure the company's investments and assets	Belum melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas dan menerbitkan <i>Internal Control Report</i> yang mencakup suatu pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara suatu struktur pengendalian intern The company has not yet conducted an evaluation/assessment of the effectiveness of internal controls at the entity level or issued an Internal Control Report containing a statement that management is responsible for establishing and maintaining an internal control structure.
8	108	Direksi menindaklanjuti hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal (KAP dan BPK). The Board of Directors follows up on the findings of the internal audit unit (SPI) and external auditors (Public Accounting Firm and BPK).	Rekomendasi hasil audit SPI dan hasil audit eksternal belum sepenuhnya ditindaklanjuti. The recommendations from the internal audit (SPI) and external audit have not been fully implemented.
9	111	Pelaksanaan hubungan dengan pelanggan. Customer relationship management implementation.	Tingkat kepuasan pelanggan belum optimal, terlihat dari hasil survei kepuasan pelanggan tahun 2022 dengan capaian 4,11 dari skala 5, masih terdapat area yang masih harus diperbaiki. (Survei tahun 2023 sedang berjalan) Customer satisfaction levels have not yet reached optimal levels, as evidenced by the 2022 customer satisfaction survey results of 4.11 on a 5-point scale, indicating areas requiring improvement. (The 2023 survey is currently in progress).

PENILAIAN PENERAPAN GCG

ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

	Usulan Rekomendasi Recommendation Proposal	Progres dan & Rencana Perbaikan Progress & Improvement Plan
	Melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas dan menerbitkan <i>Internal Control Report</i> yang mencakup suatu pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara suatu struktur pengendalian intern pada akhir tahun buku Perusahaan. The company will conduct an evaluation/assessment of the effectiveness of internal controls at the entity level and issue an Internal Control Report, including a statement that management is responsible for establishing and maintaining an internal control structure by the end of the fiscal year.	- Telah dilaksanakan Asistensi <i>Self Assessment</i> dan <i>Quality Assurance</i> Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PELNI (Persero) Tahun 2023 bersama BPKP Perwakilan DKI Jakarta Pelaksanaan evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas (secara korporat) oleh pihak eksternal independen, dalam hal ini BPKP telah dianggarkan di Tahun 2025 (Selesai) - Assisted in conducting the 2023 Self-Assessment and Quality Assurance of the Internal Audit Unit (SPI) capability of PT PELNI (Persero) in collaboration with BPKP Representative of DKI Jakarta. An evaluation/assessment of the effectiveness of internal controls at the entity level (corporate-wide) by an independent external party, in this case BPKP, has been budgeted for 2025. (Finished)
	Meningkatkan progress tindak lanjut hasil audit SPI dan hasil audit eksternal. Improving the follow-up progress on internal audit (SPI) and external audit results	Progres Per 06 November 2024 - Progress pelaksanaan tindak lanjut Audit Internal Tahun 2014 s.d 2024 dengan rincian: TLS = 79,04% (1565/1980) TDD = 0,10% (2/1980) Total Terselesaikan (TLS + TDD) = 79,14% - Progress pelaksanaan tindak lanjut Audit BPK TA.2007 s.d 2022 dengan rincian: SR = 65,24% (291/446) TDD = 1,57% (7/446) DS = 9,2% (41/446) Total Selesai Ditindaklanjuti = 76,01% (Selesai) Progress as of November 6, 2024 - Progress of the follow-up actions of the Internal Audit from 2014 to 2024 with details: TLS = 79.04% (1565/1980) TDD = 0.10% (2/1980) Total Completed (TLS + TDD) = 79.14% - Progress of the follow-up actions of the BPK Audit from fiscal year 2007 to 2022 with details: SR = 65.24% (291/446) TDD = 1.57% (7/446) DS = 9.2% (41/446) Total Completed Follow-ups = 76.01% (Finished)
	Meningkatkan pelayanan lebih baik lagi, sehingga hasil survai tingkat kepuasan pelanggan meningkat. Enhancing service quality to improve customer satisfaction survey results.	Telah disampaikan kepada Direksi pada tanggal 9 Juli 2024 terkait Laporan Akhir SKP berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Perusahaan kepada Seluruh Direksi Nomor 09.09/01/ND-B/KSP/2024 Perihal : Hasil Laporan Survei Kepuasan Pelanggan Kapal Penumpang PT PELNI (Persero) Tahun 2023/2024 (Selesai) The final SKP report was submitted to the Board of Directors on July 9, 2024, based on the Corporate Secretary's Memorandum to All Directors No. 09.09/01/ND-B/KSP/2024 regarding: Results of the PT PELNI (Persero) Passenger Ship Customer Satisfaction Survey Report for 2023/2024. (Finished)



PENILAIAN PENERAPAN GCG

ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

No	Parameter	Uraian Description	AOI
10	115	Hubungan dengan karyawan Employee relations	Belum ada kebijakan mengenai metode penilaian untuk mengukur kepuasan karyawan/survey kepuasan karyawan No policy has been established regarding assessment methods for measuring employee satisfaction/employee satisfaction surveys.
11	116	Terdapat prosedur tertulis menampung dan menindaklanjuti keluhan - keluhan <i>stakeholders</i>. A written procedure exists for addressing and following up on stakeholder complaints.	Belum menetapkan prosedur tertulis untuk menampung dan menindaklanjuti keluhan - keluhan <i>stakeholders</i>. No written procedure has been established for receiving and following up on stakeholder complaints.
12	129	SPI/Fungsi Audit Internal dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya. The Internal Audit Unit/Function is equipped with supporting factors to ensure successful execution of its duties	SPI/Fungsi Audit Internal belum melakukan penilaian atas program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal yang mencakup seluruh aspek dari aktivitas fungsi pengawasan intern (oleh Asesor Independen minimal 3 tahun sekali) The Internal Audit Unit/Function has not yet conducted an assessment of the quality assurance program and Internal Audit Function improvement, which covers all aspects of internal oversight activities (to be performed by Independent Assessors at least once every 3 years)

PENILAIAN PENERAPAN GCG

ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Usulan Rekomendasi Recommendation Proposal	Progres dan Rencana Perbaikan Progress & Improvement Plan
Menetapkan kebijakan mengenai metode penilaian untuk mengukur kepuasan karyawan/survey kepuasan karyawan Establishing policies regarding assessment methods to measure employee satisfaction/employee satisfaction surveys.	- Terkait dengan survei kepuasan pegawai, Divisi SDM telah memiliki acuan dalam menentukan metode penilaian dengan merujuk kepada Standard yang ditetapkan oleh Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia - Kebijakan mengenai metode penilaian untuk mengukur kepuasan karyawan/survey kepuasan karyawan telah dilakukan review oleh Divisi Perencanaan dan Transformasi Perusahaan Sesuai dengan ND Vice President SDM Nomor 09.19/15/ND-B/SDM/2024 tanggal 19 September 2024 (Selesai) - Regarding the employee satisfaction survey, the HR Division has established an assessment methodology framework based on standards set by the Applied Psychology Institute of Universitas Indonesia. - The policy concerning assessment methods for measuring employee satisfaction/employee satisfaction survey has been reviewed by the Corporate Planning and Transformation Division in accordance with Memorandum No. 09.19/15/ND-B/HR/2024 dated September 19, 2024 from the HR Vice President. (Finished)
Menyetujui draft prosedur tertulis untuk menampung dan menindaklanjuti keluhan - keluhan <i>stakeholders</i>. Approving the draft written procedure for receiving and following up on stakeholder complaints.	Telah dilakukan penyusunan SOP untuk menindaklanjuti Keluhan Pelanggan Dan telah disampaikan kepada Divisi Perencanaan dan Transformasi Perusahaan berdasarkan Nota Dinas Nomor 10.01/13/ND-B/KSP/2024 tanggal 01 Oktober 2024 (Selesai) The company has completed the development of a Standard Operating Procedure (SOP) for handling customer complaints, which has been formally submitted to the Corporate Planning and Transformation Division under Memorandum No. 10.01/13/ND-B/KSP/2024 dated October 1, 2024. (Finished)
Menyesuaikan komposisi tenaga auditor SPI pada level Pemeriksa Utama dan Madya serta menginstruksikan Audit Internal untuk melakukan penilaian atas program jaminan kualitas dan peningkatan Fungsi Audit Internal yang mencakup seluruh aspek dari aktivitas fungsi pengawasan intern. (oleh Asesor Independen minimal 3 tahun sekali) (Selesai) Adjusting the composition of internal audit personnel at the Principal and Intermediate Auditor levels, and instructing the Internal Audit function to conduct an assessment of the quality assurance program and Internal Audit Function improvement covering all aspects of internal oversight activities (to be performed by Independent Assessors at least once every three years). (Finished)	- Jumlah personil SPI telah terpenuhi 23 dari formasi 22 orang. - Surat tugas dari BPKP Perwakilan DKI Jakarta Nomor PE.05.02/S-773/PW09/4.1/2024 tanggal 16 Agustus 2024 perihal Asistensi <i>self assessment</i> dan <i>quality assurance</i> atas <i>self assessment</i> kapabilitas satuan pengawasan internal SPI PT PELNI (Persero). penilaian dilaksanakan terhitung mulai tanggal 9 September - 31 Oktober 2024 - Laporan Hasil Penilaian berdasarkan Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor: PE.05.03/SP-1024/PW09/4.1/2024 tanggal 23 Oktober 2024 Perihal Hasil Asistensi <i>Self Assessment</i> dan <i>Quality Assurance Self Assessment</i> Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT PELNI (Persero) Tahun 2023. (Selesai) - The SPI personnel count has been fulfilled with 23 staff against an authorized establishment of 22 positions. - Assignment letter from BPKP Jakarta Representative Office No. PE.05.02/S-773/PW09/4.1/2024 dated August 16, 2024, regarding assistance for self-assessment and quality assurance of the internal audit unit (SPI) capability self-assessment at PT PELNI (Persero). The assessment was conducted from September 9 to October 31, 2024. - Assessment Results Report based on Letter No. PE.05.03/SP-1024/PW09/4.1/2024 dated October 23, 2024, from the Head of BPKP Jakarta Provincial Representative Office regarding the Results of Assistance for Self-Assessment and Quality Assurance of the Internal Audit Unit (SPI) Capability Self-Assessment at PT PELNI (Persero) for 2023. (Finished)



PENILAIAN PENERAPAN GCG

ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

No	Parameter	Uraian Description	AOI
13	134	Direksi menyelenggarakan RUPS sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. The Board of Directors shall hold the General Meeting of Shareholders in accordance with the procedures established in the Articles of Association and the laws and regulations.	Penyelenggaraan RUPS pengesahan/persetujuan RJPP belum dilaksanakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum periode RJPP berikutnya berjalan. The GMS to ratify/approve the RJPP has not been conducted within 60 (sixty) days after receiving the complete RJPP Draft or before the next RJPP period begins
14	134		

Aspek Pengungkapan / Disclosure Aspects

1	137	Tingkat kepatuhan perusahaan yang memadai terhadap kebijakan pengendalian informasi perusahaan. The company maintains adequate compliance with corporate information control policies.	Tingkat kepatuhan perusahaan berdasarkan persepsi responden internal terhadap kebijakan pengendalian informasi perusahaan masih perlu ditingkatkan. The company's compliance level based on internal respondents' perception of corporate information control policies still requires improvement.
2	146	Laporan Tahunan memuat profil perusahaan secara lengkap The Annual Report contains a comprehensive company profile	Struktur Organisasi dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan belum mencantumkan nama. Organizational structure in chart form, including names and positions, has not yet listed the names.
3	150	Perusahaan mengikuti Annual Report Award (ARA) The company participates in the Annual Report Award (ARA)	Perusahaan belum mendapatkan penghargaan dari penyajian <i>Annual report Award</i> (ARA) The company has not yet received an award for its Annual Report presentation in the Annual Report Award (ARA)



PENILAIAN PENERAPAN GCG

ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Usulan Rekomendasi Recommendation Proposal	Progres dan & Rencana Perbaikan Progress & Improvement Plan
Undangan RUPS mencantumkan penjelasan bahwa bahan yang akan dibicarakan tersedia di kantor Perusahaan. The invitation for the General Meeting of Shareholders includes an explanation that the materials to be discussed are available at the Company's office.	- Materi bahasan telah dijelaskan dalam undangan (Selesai) - Pelaksanaan RUPS tepat waktu pada tahun 2024 (Selesai) - The discussion materials have been outlined in the invitation. (Finished) - The 2024 GMS was conducted in a timely manner. (Finished)
Menyelenggarakan RUPS tepat waktu, yaitu untuk RUPS pengesahan/persetujuan RJPP dilaksanakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum periode RJPP berikutnya berjalan. The GMS notice includes an explanation that the discussion materials are available at the Company's office. The GMS is conducted on time - for the RJPP ratification/approval meeting, it must be held within 60 (sixty) days after receiving the complete RJPP Draft or before the next RJPP period begins.	
Meningkatkan kepatuhan perusahaan yang memadai terhadap kebijakan pengendalian informasi perusahaan. Enhancing the company's adequate compliance with corporate information control policies.	Telah dilakukan Penilaian Layanan Informasi Publik Tahun 2023 oleh Komisi Informasi Pusat RI dan PT PELNI (Persero) meraih predikat Informatif Peringkat 4 dari 26 BUMN dengan Skor 97,33 naik 2 Peringkat dari sebelumnya pada tahun 2022 meraih predikat informatif peringkat 6 (Selesai) PT PELNI (Persero) achieved an Informative ranking of 4th out of 26 SOEs with a score of 97.33 in the 2023 Public Information Services Assessment conducted by the Central Information Commission of Indonesia, rising 2 ranks from its 2022 position of 6th place. (Finished)
Struktur Organisasi dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan agar mencantumkan nama yang menjabat. Organizational structure in chart form, including names and positions, must list the names of current officeholders.	sudah ada pada AR 2023 (Selesai) Already included in the 2023 Annual Report. (Finished)
Berpartisipasi dalam ARA, dan berupaya untuk mendapatkan penghargaan. Participating in the ARA and striving to receive an award.	Tahun ini telah mendaftar AR sedang dalam proses penjurian (Selesai) This year's Annual Report has been submitted and is currently under judging process. (Finished)



TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI)

INFORMATION TECHNOLOGY (IT) GOVERNANCE

PENDAHULUAN

Divisi Teknologi Informasi adalah unit kerja pengelola teknologi informasi di PT PELNI (Persero) yang berada di bawah Direktorat Keuangan dan Manajemen Informasi berdasarkan SK Direksi Nomor: 04.17/01/SK/HKO.01/2024. Divisi Teknologi Informasi mempunyai fungsi penyiapan rumusan kebijakan, pelaksanaan, penelaahan, pengendalian dan pelaporan pengelolaan kegiatan penyediaan, penyiapan pakai, keamanan (*security*) dan kehandalan fasilitas, peralatan serta perangkat (*hardware & software*) teknologi informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat dicapai kinerja kesiapan pakai (*serviceability performance*), keamanan (*security*) dan kehandalan (*reliability performance*) fasilitas, peralatan serta perangkat teknologi informasi perusahaan yang optimal. Dalam menjalankan fungsinya, Divisi Teknologi Informasi memiliki tugas-tugas pokok sebagai berikut:

1. Menyiapkan rencana kerja (jangka panjang, menengah dan pendek) dan program kerja perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan penyediaan, penyiapan pakai, keamanan (*security*) dan kehandalan fasilitas, peralatan serta perangkat (*hardware & software*) teknologi informasi;
2. Menyiapkan konsep peraturan kebijakan dan sistem prosedur dalam pengelolaan kegiatan penyediaan, penyiapan pakai, keamanan (*security*) dan kehandalan fasilitas, peralatan serta perangkat (*hardware & software*) teknologi informasi yang menjamin dapat dicapainya kinerja kesiapan pakai (*serviceability performance*) dan kehandalan (*reliability performance*) fasilitas, peralatan serta perangkat teknologi informasi perusahaan yang optimal;
3. Menyelenggarakan kegiatan penyediaan, perawatan, dan perbaikan untuk penyiapan pakai dan kehandalan fasilitas, peralatan serta perangkat (*hardware & software*) teknologi informasi perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

INTRODUCTION

The Information Technology Division is the work unit responsible for managing information technology at PT PELNI (Persero), operating under the Directorate of Finance and Information Management in accordance with the Decree of the Board of Directors No. 04.17/01/SK/HKO.01/2024. The Information Technology Division is tasked with formulating policies, executing initiatives, conducting evaluations, exercising control, and reporting on the management of activities related to the provision, readiness, security, and reliability of the Company's information technology infrastructure, including facilities, equipment, and both hardware and software, in compliance with prevailing regulations. These efforts are aimed at ensuring optimal serviceability performance, security, and reliability of the Company's IT systems and infrastructure. In carrying out its mandate, the Information Technology Division performs the following core functions:

1. Preparing long-term, medium-term, and short-term work plans, as well as corporate programs related to the management of activities concerning the provision, operational readiness, security, and reliability of the Company's information technology infrastructure, including facilities, equipment, and hardware & software systems;
2. Developing policy frameworks and procedural systems for managing the provision, operational readiness, security, and reliability of IT facilities, equipment, and devices (*hardware & software*) to ensure the achievement of optimal serviceability and reliability performance of the Company's IT infrastructure;
3. Conducting activities related to the provisioning, maintenance, and repair of IT infrastructure (*hardware & software*) to ensure operational readiness and reliability in accordance with applicable regulations;



TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI)

INFORMATION TECHNOLOGY (IT) GOVERNANCE

4. Memantau, mengkoordinir dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan penyediaan, penyiapan pakai dan kehandalan fasilitas, peralatan serta perangkat (*hardware & software*) teknologi informasi di Kantor Pusat, Kapal, Kantor Cabang, dan SBU;
5. Melakukan pengelolaan dan mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan, penyiapan pakai, dan kehandalan fasilitas, peralatan, serta perangkat (*hardware & software*) teknologi informasi;
6. Menyiapkan laporan berkala dan atau laporan khusus kegiatan penyediaan, penyiapan pakai, dan kehandalan fasilitas, peralatan, serta perangkat (*hardware & software*) teknologi informasi perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Monitoring, coordinating, and controlling the implementation of IT provisioning, operational readiness, and reliability activities across the Head Office, vessels, branch offices, and Strategic Business Units (SBUs);
5. Managing and mitigating risks associated with the implementation of IT provisioning, operational readiness, and reliability activities for the Company's facilities, equipment, and devices;
6. Preparing periodic and/or special reports on the provisioning, operational readiness, and reliability of the Company's information technology infrastructure in compliance with prevailing regulations.

TEMA STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2020-2024

PT PELNI (Persero) memiliki tema strategis perusahaan tahun 2020-2024 yaitu *Business Strengthen* (2020-2021) dan *Business Growth* (2022-2024). Untuk mendukung tema strategis perusahaan tersebut, teknologi informasi perusahaan memiliki tema strategis yang diselaraskan yaitu *Accelerating Digital Transformation* (2022), *Nurturing New Business Innovation* (2023), *Operational and Service Excellence Through IT Implementation* (2024). Adapun strategi-strategi yang mendukung tema strategis teknologi informasi dijabarkan pada tabel di bawah ini:

INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGIC THEMES FOR 2020-2024

PT PELNI (Persero) has established its corporate strategic themes for the 2020-2024 period as *Business Strengthen* (2020-2021) and *Business Growth* (2022-2024). In support of these corporate strategic themes, the Company's information technology has adopted aligned strategic themes as follows: *Accelerating Digital Transformation* (2022), *Nurturing New Business Innovation* (2023), and *Operational and Service Excellence Through IT Implementation* (2024). The strategies supporting the information technology strategic themes are outlined in the table below:

Tema Strategis Perusahaan Company Strategic Theme	Tema Strategis Teknologi Informasi Strategic Themes of Information Technology	Tahun Year	Strategi Teknologi Informasi Information Technology Strategy
<i>Business Growth</i> (2022-2024)	<i>Accelerating Digital Transformation</i>	2022	Peningkatan dukungan layanan TI untuk bisnis-bisnis <i>core</i> perusahaan Enhancing IT service support for the Company's core businesses
	<i>Nurturing New Business Innovation</i>	2023	Peningkatan layanan TI untuk bisnis <i>non-core</i> serta monitoring proses operasional perusahaan Improving IT services for non-core businesses and monitoring of the Company's operational processes
	<i>Operational & Service Excellence Through IT Implementation</i>	2024	Peningkatan dukungan layanan TI secara merata ke seluruh unit kerja sehingga dapat menciptakan <i>operational excellence</i> Strengthening IT service support across all work units to achieve operational excellence



TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI)
INFORMATION TECHNOLOGY (IT) GOVERNANCE

PENCAPAIAN KINERJA 2024

Divisi Teknologi Informasi dalam menjalankan pekerjaannya di tahun 2024 didasarkan RKAP 2024 dan Kontrak Kerja Manajemen tahun 2024. Pada RKAP 2024, Divisi Teknologi Informasi menjalankan berbagai program kerja yang diamanatkan baik melalui Rencana Strategis Teknologi Informasi PT PELNI (Persero) periode 2022-2024 maupun permintaan-permintaan dari unit-unit kerja yang ada.

Divisi Teknologi Informasi memiliki program-program kerja yang mampu mendukung percepatan transformasi digital perusahaan. Program-program kerja tersebut dikategorikan sebagai program kerja *quick win* dan strategis. Program-program kerja yang termasuk dalam program kerja *quick win* dan strategis adalah sebagai berikut:

2024 PERFORMANCE ACHIEVEMENTS

In 2024, the Information Technology Division carried out its duties based on the 2024 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) and the 2024 Management Performance Contract. Within the framework of the 2024 RKAP, the Information Technology Division implemented various work programs mandated through both the PT PELNI (Persero) Information Technology Strategic Plan for the 2022-2024 period and requests submitted by internal work units.

The Information Technology Division developed a series of work programs aimed at accelerating the Company's digital transformation. These work programs were categorized into quick win initiatives and strategic programs. The quick win and strategic work programs are as follows:

No.	Program Kerja Work Program	Deskripsi Description	Kategori Program Kerja Work Program Categories	Pencapaian Achievement
1	Pengembangan E-Boarding Pass Development of E-Boarding Pass	Pengembangan Fitur E-Boarding Pass pada aplikasi Pelni Mobile. Development of E-Boarding Pass Feature on the Pelni Mobile Application	Quick Win 2024	Fitur E-Boarding Pass dan Check-In Online pada Pelni Mobile telah <i>go live</i> pada September 2024. Pelanggan dapat secara mandiri melakukan proses <i>check-in</i> dan langsung mendapatkan <i>boarding pass</i> dalam bentuk elektronik (<i>e-boarding pass</i>) melalui aplikasi Pelni Mobile. The E-Boarding Pass and Online Check-In features on the Pelni Mobile application went live in September 2024. Customers can independently complete the check-in process and receive an electronic boarding pass (<i>e-boarding pass</i>) directly through the Pelni Mobile app.
2	Pengembangan Warehouse Management System Development of Warehouse Management System	Pengembangan aplikasi yang digunakan untuk mengelola proses bisnis pergudangan mulai dari penerimaan barang, penempatan barang di dalam gudang, hingga pengeluaran barang dari gudang. Development of an application used to manage warehouse business processes, including the receipt of goods, placement of goods within the warehouse, and the release of goods from the warehouse.	Quick Win 2024	Aplikasi <i>Warehouse Management System</i> (WMS) telah rilis pada Desember 2024 dan saat ini diimplementasikan di Gudang PELNI Tanjung Priok. Adapun untuk Pengembangan <i>Warehouse Management System</i> (WMS) Tahap 2 akan dilakukan pada tahun 2025 untuk diimplementasikan pada Gudang Surabaya dan Gudang Makassar. The Warehouse Management System (WMS) application was released in December 2024 and is currently being implemented at the PELNI Warehouse in Tanjung Priok. The development of Warehouse Management System (WMS) Phase 2 will take place in 2025 and will be implemented at the Surabaya and Makassar Warehouses.



TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI)

INFORMATION TECHNOLOGY (IT) GOVERNANCE

No.	Program Kerja Work Program	Deskripsi Description	Kategori Program Kerja Work Program Categories	Pencapaian Achievement
3	Pengembangan <i>Dashboard Monitoring</i> Transaksi Sea-Wifi Development of Sea-Wifi Transaction Monitoring Dashboard	Pengembangan <i>dashboard</i> untuk monitoring transaksi penjualan internet di atas kapal. Development of a dashboard for monitoring internet sales transactions on board the vessels.	Program Strategis TI 2024 2024 IT Strategic Programs	Dalam mendukung proses monitoring transaksi penjualan internet di atas kapal (Sea-Wifi) telah dikembangkan sebuah <i>Dashboard Monitoring Transaksi Sea-Wifi</i> yang <i>Go Live</i> pada Mei 2024. To support the monitoring of internet sales transactions on board the vessels (Sea-Wifi), a Sea-Wifi Transaction Monitoring Dashboard was developed and went live in May 2024.
4	Pengembangan Aplikasi Satuan Dasar Unit Muatan (SDUM) Development of the Basic Unit Load (SDUM) Application	Pengembangan aplikasi yang digunakan untuk percepatan perhitungan satuan dasar unit muatan. Development of an application used to accelerate the calculation of basic unit load (SDUM).	Program Strategis TI 2024 2024 IT Strategic Programs	Untuk mendukung proses percepatan perhitungan satuan dasar unit muatan pada proses bisnis PSO & Subsidi telah dikembangkan Aplikasi SDUM yang rilis di bulan Juni 2024. Aplikasi SDUM ini terintegrasi antara <i>Data Warehouse</i> dengan aplikasi legacy penjualan layanan commerce PT PELNI (Persero). To support the acceleration of basic unit load (SDUM) calculations in the PSO & Subsidi business processes, the SDUM application was developed and released in June 2024. This SDUM application is integrated between the Data Warehouse and PT PELNI (Persero) legacy commerce service sales application.
5	Pengembangan <i>New E-Recruitment</i> Development of New E-Recruitment	Pembaruan website untuk menampilkan informasi dan pengelolaan proses rekrutmen pegawai darat dan laut PELNI. Website update to display information and manage the recruitment process for both onshore and offshore employees at PELNI.	Program Strategis TI 2024 2024 IT Strategic Programs	PT PELNI (Persero) telah melakukan proses pembaruan website rekrutmen yang telah rilis pada Oktober 2024. Pembaruan website rekrutmen ini membantu pengelolaan proses rekrutmen PELNI maupun PELNI Group secara terpusat baik untuk rekrutmen pegawai darat maupun pegawai laut. PT PELNI (Persero) has completed the update of its recruitment website, which was released in October 2024. This updated recruitment website facilitates the centralized management of the recruitment process for both PELNI and the PELNI Group, covering recruitment for both onshore and offshore employees.
6	Pengembangan Dashboard Kemenhub (Monitoring, Produksi, Penghasilan & Biaya PSO) Development of the Ministry of Transportation Dashboard (Monitoring, Production, Revenue & PSO Costs)	Pengembangan dashboard yang menyajikan informasi terkait Laporan Data Operasional, Biaya dan Penghasilan PT PELNI (Persero). Development of a dashboard that presents information related to Operational Data Reports, Costs, and Income of PT PELNI (Persero).	Program Strategis TI 2024 2024 IT Strategic Programs	Untuk memudahkan proses monitoring dan pelaporan terkait Biaya Produksi, Penghasilan dan PSO ke Kementerian Perhubungan. Divisi TI telah melakukan proses pengembangan aplikasi Dashboard Kemenhub yang telah <i>go live</i> pada bulan Desember 2024.. To facilitate the monitoring and reporting process related to Production Costs, Revenues, and PSO to the Ministry of Transportation, the IT Division has developed the Kemenhub Dashboard application, which go live in December 2024.



TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI)

INFORMATION TECHNOLOGY (IT) GOVERNANCE

No.	Program Kerja Work Program	Deskripsi Description	Kategori Program Kerja Work Program Categories	Pencapaian Achievement
7	Pengembangan <i>Risk Management Information System (RMIS)</i> Development of the Risk Management Information System (RMIS)	Pengembangan aplikasi untuk pengelolaan dan monitoring risiko di setiap unit kerja dan kantor cabang. Development of an application for managing and monitoring risks across each work unit and branch office.	Program Strategis TI 2024 2024 IT Strategic Programs	Pada Desember 2024, PT PELNI (Persero) telah melakukan pengembangan untuk aplikasi RMIS. Aplikasi ini dirancang untuk memfasilitasi proses identifikasi, penilaian, mitigasi, hingga monitoring risiko secara <i>real-time</i> . In December 2024, PT PELNI (Persero) developed the RMIS application. This application is designed to facilitate the processes of risk identification, assessment, mitigation, and real-time monitoring.
8	Pengembangan <i>Dashboard Cash on Hand (Finance)</i> Development of the Cash on Hand Dashboard (Finance)	Pengembangan dashboard keuangan (<i>finance</i>) yang digunakan untuk melihat data mutasi bank dengan data mutasi kas Development of a financial dashboard used to view bank transaction data alongside cash transaction data.	Program Strategis TI 2024 2024 IT Strategic Programs	Progress pencapaian keseluruhan program kerja <i>Dashboard Cash on Hand</i> hingga Desember 2024 yakni sebesar 92% (masih dalam tahapan pengujian aplikasi). Adapun untuk proses <i>go live</i> Pengembangan <i>Dashboard Cash On Hand</i> ini ditargetkan pada TW 2 2025 The overall progress of the Cash on Hand Dashboard work program as of December 2024 is 92% (currently in the application testing phase). The go-live for the development of the Cash on Hand Dashboard is targeted for Q2 2025.
9	Pengembangan Aplikasi QHSSE Management PELNI Development of the PELNI QHSSE Management Application	Pengembangan aplikasi yang digunakan untuk mengelola sistem manajemen keselamatan, keamanan, sistem mutu dan KL3H Development of an application used to manage the safety, security, quality management, and KL3H systems.	Program Strategis TI 2024 2024 IT Strategic Programs	Progress pencapaian keseluruhan program kerja Pengembangan QHSSE Management PELNI hingga Desember 2024 yakni sebesar 64% (masih dalam proses tahapan pengembangan aplikasi). Adapun untuk proses <i>go live</i> Pengembangan Aplikasi <i>QHSSE Management</i> PELNI ini ditargetkan pada TW 2 2025 The overall progress of the PELNI QHSSE Management Application development work program as of December 2024 is 64% (currently in the application development phase). The go-live for the PELNI QHSSE Management Application is targeted for Q2 2025.
10	Pengembangan <i>New Ticketing System</i> Development of the New Ticketing System	Pengembangan baru untuk sistem ticketing PT PELNI (Persero) Development of a new ticketing system for PT PELNI (Persero).	Program Strategis TI 2024 2024 IT Strategic Programs	Progress pencapaian keseluruhan program kerja Pengembangan <i>New Ticketing System</i> hingga Desember 2024 yakni sebesar 49% (masih dalam proses tahapan pengembangan aplikasi). Adapun untuk proses <i>go live</i> Pengembangan <i>New Ticketing System</i> ini ditargetkan pada TW 2 2025 The overall progress of the New Ticketing System development work program as of December 2024 is 49% (currently in the application development phase). The go-live for the New Ticketing System development is targeted for Q2 2025.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI)

INFORMATION TECHNOLOGY (IT) GOVERNANCE

No.	Program Kerja Work Program	Deskripsi Description	Kategori Program Kerja Work Program Categories	Pencapaian Achievement
11	Pengembangan Lanjutan Aplikasi IT Service Management Further Development of the IT Service Management Application	Pengembangan modul aplikasi yang digunakan untuk pelaporan perubahan layanan TI dan pengelolaan portfolio layanan TI. Pengembangan lanjutan aplikasi IT Service Management ini dibagi menjadi 2 modul, yakni: - Modul Service Portfolio Management - Modul Change Management Development of a module application used for reporting IT service changes and managing the IT service portfolio. The further development of the IT Service Management application is divided into two modules, namely: - Service Portfolio Management Module - Change Management Module	KPI Divisi TI 2024 IT Division KPIs 2024	Dalam mendukung proses pengelolaan portfolio layanan TI, telah dikembangkan Aplikasi ITSM - Service Portfolio Management yang telah go live pada Desember 2024. Adapun untuk Progress pencapaian keseluruhan program kerja Pengembangan ITSM - Change Management hingga Desember 2024 yakni sebesar 51% (masih dalam proses tahapan pengembangan aplikasi) dan ditargetkan go live pada TW 2 2025 To support the management of the IT service portfolio, the ITSM - Service Portfolio Management application was developed and went live in December 2024. As for the overall progress of the ITSM - Change Management development work program, it stands at 51% as of December 2024 (currently in the application development phase), with the go-live targeted for Q2 2025.

PEMENUHAN INISIATIF TI PADA RENCANA STRATEGIS TI TAHUN 2022-2024

Sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: 09.07/01/SK/HKO.01/2022 tanggal 07 September 2022 tentang Pedoman Rencana Strategis dan Tata Kelola Teknologi Informasi Periode 2022-2024, Divisi Teknologi PT PELNI (Persero) memiliki *roadmap* pengembangan teknologi informasi perusahaan periode 2022-2024. Divisi Teknologi Informasi sebagai unit kerja pengelola teknologi informasi, menjalankan inisiatif-inisiatif yang telah diamanatkan dalam *roadmap* rencana strategis tersebut. Tabel berikut ini pencapaian inisiatif- inisiatif tersebut.

FULFILLMENT OF IT INITIATIVES IN THE 2022-2024 IT STRATEGIC PLAN

In accordance with the Decree of the Board of Directors No. 09.07/01/SK/HKO.01/2022 dated September 7, 2022, concerning the Guidelines for the Information Technology Strategic Plan and Governance for the 2022-2024 period, the IT Division of PT PELNI (Persero) has developed a roadmap for the company's information technology development for the 2022-2024 period. As the unit responsible for managing information technology, the Information Technology Division has implemented the initiatives outlined in this strategic roadmap. The table below shows the achievements of these initiatives.

No	Inisiatif Initiative	Status Status	Penjelasan Explanation
Inisiatif Aplikasi/Sistem Informasi Application/System Information Initiatives			
1	Peningkatan Agency Reservation System Enhancement of Agency Reservation System	Sudah Dilakukan Already Done	Sudah dilakukan pengembangan modul Agencies Services pada Pelni Mobile yang telah go live pada bulan Desember 2023. The development of the Agencies Services module on Pelni Mobile has been completed and went live in December 2023.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI)

INFORMATION TECHNOLOGY (IT) GOVERNANCE

No	Inisiatif Initiative	Status Status	Penjelasan Explanation
2	Peningkatan Aplikasi Portal - Asset Management Enhancement of Portal Application - Asset Management	Sudah Dilakukan Already Done	Sudah dilakukan peningkatan aplikasi Portal - Asset Management, salah satunya yakni Pembaruan Website Winona & Portal - Asset Management. Enhancements to the Portal - Asset Management application have been carried out, including the Website Update for Winona and the Asset Management Portal.
3	Peningkatan Fedrik Enhancement of Fedrik	Tidak Dilakukan Not Accomplished	Aplikasi FEDRIK dinyatakan <i>retired</i> dan telah digantikan dengan Aplikasi Moka POS (yang ditangani langsung oleh pihak ketiga) sehingga untuk peningkatan fedrik tidak dilakukan. The FEDRIK application has been retired and replaced with the Moka POS application (managed directly by a third party), so no further enhancements to FEDRIK have been made.
4	Peningkatan Aplikasi MyCargoo! Enhancement of the MyCargoo! Application	Sudah Dilakukan Already Done	Peningkatan aplikasi MyCargoo sudah dilakukan seperti Pengembangan fitur <i>login</i> (registrasi) <i>customer</i> , penambahan <i>filter</i> ETD laporan transaksi, informasi ketentuan pembatalan, penambahan menu dan dokumen baru Surat Perintah Bongkar Muat (SPBM), konfirmasi syarat dan ketentuan pada proses booking di cabang, perubahan dokumen SPK PBM, fitur <i>closing time</i> , integrasi data muatan ke aplikasi SDUM, integrasi Berita Acara Bongkar Muat (BABM), integrasi aplikasi MyCargoo dengan MyDepo. Enhancements to the MyCargoo application have been completed, including the development of customer login (registration) features, addition of ETD transaction report filters, cancellation policy information, addition of new menu and documents for the Surat Perintah Bongkar Muat (SPBM), confirmation of terms and conditions during booking at branches, changes to SPK PBM documents, closing time feature, integration of cargo data with the SDUM application, integration of Berita Acara Bongkar Muat (BABM), and integration of the MyCargoo application with MyDepo.
5	Peningkatan <i>Online Logistic Platform</i> Enhancement of the Online Logistic Platform	Sudah Dilakukan Already Done	Salah satu bentuk peningkatan <i>Online Logistic Platform</i> yakni pengembangan aplikasi MyCargoo yang telah diintegrasikan dengan Aplikasi MyDepo dan MyBM milik PT PBM SBN (Pelni Logistics). One of the enhancements to the Online Logistic Platform is the development of the MyCargoo application, which has been integrated with the MyDepo and MyBM applications owned by PT PBM SBN (Pelni Logistics).
6	Peningkatan PPSS Enhancement of PPSS	Sudah Dilakukan Already Done	Beberapa peningkatan pada aplikasi PPSS sudah dilakukan yakni sebagai berikut: penambahan <i>payment channel</i> , integrasi dengan <i>mobile banking</i> untuk proses pemesanan tiket, integrasi data penumpang ke aplikasi SDUM dan <i>upgrade</i> versi PHP untuk menutup celah-celah keamanan yang mungkin timbul karena versi PHP yang lama. Several enhancements have been made to the PPSS application, including the addition of payment channels, integration with mobile banking for ticket booking, integration of passenger data with the SDUM application, and an upgrade of the PHP version to close security vulnerabilities that may arise from the previous PHP version.
7	Peningkatan Petisy Enhancement of Petisy	Sudah Dilakukan Already Done	Sudah dilakukan peningkatan aplikasi Petisy berupa <i>enhancement</i> pada aplikasi Petisy seperti penyesuaian tarif, penambahan menu potongan harga (diskon), penambahan penjualan kabin kelas kapal perintis, jenis tiket pada cetakan tiket kapal perintis. Enhancements have been made to the Petisy application, including adjustments to fare rates, the addition of a discount menu, the inclusion of cabin sales for pioneer ship classes, and the addition of ticket types on the pioneer ship ticket printout.
8	Pengembangan dan Penerapan Hotel Reservation System Development and Implementation of Hotel Reservation System	Belum dilakukan / Not Yet Implemented	Akan dilakukan pengembangan dan penerapan Hotel Reservation System sesuai dengan kebutuhan dan strategi bisnis perusahaan. The development and implementation of the Hotel Reservation System will be carried out in accordance with the company's business needs and strategic objectives.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI)

INFORMATION TECHNOLOGY (IT) GOVERNANCE

No	Inisiatif Initiative	Status Status	Penjelasan Explanation
9	Peningkatan Pelni Mobile Enhancement of Pelni Mobile	Sudah Dilakukan Already Done	Sudah dilakukan peningkatan aplikasi Pelni Mobile seperti penambahan fitur Check in Online dan E-Boarding Pass, Review & Rating Layanan, Transfer Tiket, Referral Pegawai dan Status Pemesanan. Enhancements to the Pelni Mobile application have been completed, including the addition of features such as Online Check-In and E-Boarding Pass, Service Review & Rating, Ticket Transfer, Employee Referral, and Booking Status.
10	Pengembangan Sistem CRM Development of CRM System	Sudah Dilakukan Already Done	Sudah dilakukan pengembangan sistem CRM yakni Aplikasi Bitrix24 (Layanan Keagenan). Selanjutnya pengembangan CRM untuk semua layanan bisnis akan diakomodir pada Pengembangan <i>New Commercial System</i> sesuai RJPP 2025 - 2029. The CRM system development has been completed with the Bitrix24 application (Agency Services). Moving forward, CRM development for all business services will be accommodated under the development of the New Commercial System as outlined in the RJPP 2025 - 2029.
11	Pengembangan Vessel Management System Development of Vessel Management System	Sudah Dilakukan Already Done	Salah satu pengembangan <i>Vessel Management System</i> adalah pembangunan aplikasi Route Management System (RMS). Aplikasi RMS telah dilakukan proses <i>go live</i> aplikasi pada Desember 2023. One of the developments of the Vessel Management System is the construction of the Route Management System (RMS) application. The RMS application went live in December 2023.
12	Pengembangan <i>Dashboard Business Intelligence</i> Development of Business Intelligence Dashboard	Sudah Dilakukan Already Done	Sudah dilakukan pengembangan Dashboard Operation menggunakan <i>upgrade</i> fitur SISKOMKAP pada tahun 2023. The development of the Operation Dashboard has been completed with an upgrade of the SISKOMKAP features in 2023.
13	Penerapan <i>Planned Maintenance System</i> Implementation of Planned Maintenance System	Sudah Dilakukan Already Done	Implementasi aplikasi Planned Maintenance System (PMS) sudah dilakukan di 26 Kapal Penumpang dan 6 Kapal Barang. The implementation of the Planned Maintenance System (PMS) has been completed on 26 Passenger Ships and 6 Cargo Ships.
14	Peningkatan SIPARSEL Enhancement of SIPARSEL	Sudah Dilakukan Already Done	Peningkatan aplikasi SIPARSEL sudah dilakukan seperti penambahan menu pengelolaan suku cadang aset, pengembangan aplikasi SIPARSEL - Gudang (WMS) dan lainnya. Adapun Implementasi aplikasi SIPARSEL sudah dilakukan di 26 Kapal Penumpang dan 1 Kapal Barang. Enhancements to the SIPARSEL application have been completed, including the addition of a spare parts asset management menu, development of the SIPARSEL - Warehouse (WMS) application, and other improvements. The implementation of the SIPARSEL application has been carried out on 26 Passenger Ships and 1 Cargo Ship.
15	Penerapan e-Procurement/ Implementation of e-Procurement	Sudah Dilakukan Already Done	Pada tahun 2024, Aplikasi e-Procurement sudah diimplementasikan pada Seluruh Divisi PT PELNI (Persero). In 2024, the e-Procurement application has been implemented across all divisions of PT PELNI (Persero).
16	Peningkatan Oracle EBS Enhancement of Oracle EBS	Sudah Dilakukan Already Done	Sudah dilakukan peningkatan pada aplikasi Oracle EBS Finance sebagai berikut: integrasi dengan aplikasi E-Billing System, penyesuaian Report Buku Besar dan lainnya. Enhancements have been made to the Oracle EBS Finance application, including integration with the E-Billing System application, adjustments to the General Ledger Report, and other improvements.
17	Pengembangan <i>Billing Management System</i> Development of Billing Management System	Sudah Dilakukan Already Done	Aplikasi <i>Billing Management System (E-Billing System)</i> telah rilis pada Desember 2023. Adapun pada tahun 2024, implementasi penggunaan aplikasi telah dilakukan di Seluruh Divisi PT PELNI (Persero). The Billing Management System (E-Billing System) application was released in December 2023. In 2024, the implementation of the application has been carried out across all divisions of PT PELNI (Persero).



TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI)

INFORMATION TECHNOLOGY (IT) GOVERNANCE

No	Inisiatif Initiative	Status Status	Penjelasan Explanation
18	Pengembangan Portal-PSO Subsidi Development of Portal-PSO Subsidy	Sudah Dilakukan Already Done	Sudah dilakukan pengembangan pada Portal - PSO Subsidi seperti integrasi data penumpang ke aplikasi SDUM, penambahan fitur dan perubahan rumus. Enhancements have been made to the Portal - PSO Subsidy, including the integration of passenger data with the SDUM application, the addition of new features, and changes to the formulas.
19	Peningkatan ERP Galangan Pelnis Surya Enhancement of ERP Pelnis Surya Shipyard	Tidak Dilakukan Not Accomplished	Peningkatan ERP Galangan Pelnis Surya tidak dilakukan dikarenakan Galangan Pelnis Surya akan dikelola oleh Anak Perusahaan PT PELNI (Persero) (PT PID). The enhancement of ERP Pelnis Surya Shipyard was not carried out as Pelnis Surya Shipyard will be managed by PT PELNI (Persero) subsidiary, PT PID.
20	Peningkatan E-Rekrutmen Enhancement of E-Recruitment	Sudah Dilakukan Already Done	Sudah dilakukan pembaruan <i>website</i> rekrutmen PELNI dan telah <i>go live</i> pada Oktober 2024. The PELNI recruitment website has been updated and went live in October 2024.
21	Peningkatan Portal - HRM Enhancement of Portal - HRM	Sudah Dilakukan Already Done	Sudah dilakukan peningkatan pada aplikasi Portal - HRM seperti penambahan modul Management KPI, penambahan pengaturan absensi, perubahan organisasi dan lainnya; Enhancements have been made to the Portal - HRM application, including the addition of the KPI Management module, the inclusion of attendance management features, organizational changes, and other improvements.
22	Implementasi <i>Knowledge Management System</i> Implementation of Knowledge Management System	Sudah Dilakukan Already Done	Sudah dikembangkan dan digunakan oleh seluruh pegawai PT PELNI (Persero). It has been developed and is now used by all employees of PT PELNI (Persero).
23	Penerapan <i>Collaboration Apps</i> Implementation of Collaboration Apps	Sudah Dilakukan Already Done	Salah satu penerapan <i>collaboration apps</i> yakni penggunaan aplikasi Pelnis One. Adapun aplikasi Pelnis One telah dilakukan proses pembaruan aplikasi yakni perubahan tampilan aplikasi, penambahan fitur <i>geolocation</i> untuk absensi dan <i>device lock</i> . One of the implementations of collaboration apps is the use of the Pelnis One application. The Pelnis One application has undergone an update, including changes to the app's interface, the addition of a geolocation feature for attendance, and device lock functionality.
24	Peningkatan Aplikasi QPR Enhancement of QPR Application	Tidak dilakukan Not Accomplished	Peningkatan Aplikasi QPR tidak dilakukan karena terdapat perubahan prioritas pengembangan aplikasi baru yakni aplikasi E-Regulation. The enhancement of the QPR application was not carried out due to a change in priority for the development of a new application, namely the E-Regulation application.
25	Peningkatan Portal - Audit Management Enhancement of Portal - Audit Management	Sudah Dilakukan Already Done	Sudah dilakukan peningkatan aplikasi Portal - Audit Management berupa pemenuhan pengembangan ITCR, salah satunya yakni penambahan <i>filter & view</i> lampiran dokumen detail temuan. Enhancements have been made to the Portal - Audit Management application, including the fulfillment of ITCR development, such as the addition of filters and the ability to view detailed attachments of findings.
26	Peningkatan Portal - ESS Enhancement of Portal - ESS	Sudah Dilakukan Already Done	Sudah dilakukan peningkatan aplikasi Portal - ESS berupa pemenuhan pengembangan ITCR, salah satunya yakni penambahan fitur edit tanggal lahir, penambahan fitur <i>upload excel</i> pada form 1721-A1 dan usia pensiun pegawai. The Portal - ESS application has been enhanced with the completion of ITCR development, including the addition of features such as the ability to edit birth dates, upload Excel files on the 1721-A1 form, and the employee retirement age feature.



TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI)

INFORMATION TECHNOLOGY (IT) GOVERNANCE

No	Inisiatif Initiative	Status Status	Penjelasan Explanation
27	Peningkatan Portal – Pelni Doc/ Enhancement of Portal – Pelni Doc	Sudah Dilakukan Already Done	Beberapa peningkatan aplikasi Portal – Pelni Doc sudah dilakukan seperti pembaruan fitur pada aplikasi surat keluar dan surat masuk, tanda tangan digital (<i>qr code</i>), pemindahan penyimpanan dokumen dan perubahan penamaan lampiran nota dinas. Several enhancements have been made to the Portal – Pelni Doc application, including updates to the outgoing and incoming letter features, digital signatures (QR code), relocation of document storage, and changes to the naming of official memorandum attachments.
28	Peningkatan Pelni One Enhancement of Pelni One	Sudah Dilakukan Already Done	Sudah dilakukan pembaruan pada aplikasi Pelni One seperti perubahan tampilan aplikasi, fitur <i>device lock</i> , serta fitur <i>geolocation</i> untuk absensi. The Pelni One application has been updated, including changes to the app's interface, the addition of a device lock feature, and a geolocation feature for attendance.
29	Peningkatan <i>Trouble Ticketing System</i> Enhancement of Trouble Ticketing System	Sudah Dilakukan Already Done	Sudah dikembangkan aplikasi ITSM (<i>IT Service Management</i>) untuk mengakomodir tiket <i>troubleshooting</i> , insiden, <i>request</i> dan pengelolaan portofolio layanan TI. The ITSM (<i>IT Service Management</i>) application has been developed to accommodate troubleshooting tickets, incidents, requests, and the management of IT service portfolios.
Inisiatif Teknologi Technology Initiatives			
1	Peremajaan <i>hardware infrastructure</i> Revitalization of hardware infrastructure	Sudah Dilakukan Already Done	Sudah dilakukan pada Data Center di Gedung PELNI Lantai 2 (<i>backup offline</i> dan penambahan <i>storage</i>). This has been implemented at the Data Center on the 2nd Floor of the PELNI Building, including offline backups and additional storage.
2	Penyusunan <i>Capacity Plan</i> Development of Capacity Plan	Sudah Dilakukan Already Done	Sudah dilakukan penyusunan <i>Disaster Recovery Plan</i> , <i>IT Capacity Plan</i> , dan <i>IT Availability Plan</i> . The Disaster Recovery Plan, IT Capacity Plan, and IT Availability Plan have been successfully formulated.
3	Pembaharuan versi <i>software infrastructure</i> Software infrastructure version updates	Sudah Dilakukan Already Done	Sudah dilakukan pembaruan versi <i>Software Infrastructure</i> . The software infrastructure version has been successfully updated.
4	Penyediaan Redudansi Perangkat Provision of Device Redundancy	Sudah Dilakukan Already Done	Pada tahun 2024, sudah dilakukan penyediaan redudansi perangkat dan sedang dalam proses implementasi. In 2024, device redundancy provision has been carried out and is currently in the implementation phase.
5	Penerapan DMZ (<i>Demilitarized Zone</i>) Implementation of DMZ (Demilitarized Zone)	Sudah Dilakukan Already Done	Penerapan <i>Demilitarized Zone</i> (DMZ) pada Jaringan PT PELNI (Persero) sedang dilakukan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan keamanan dan mencegah serangan siber. The implementation of a Demilitarized Zone (DMZ) within PT PELNI (Persero) network is currently underway as a strategic measure to enhance security and prevent cyberattacks.
6	Penyediaan <i>Firewall</i> Tambahan Provision of Additional Firewalls	Sudah Dilakukan Already Done	Seluruh kapal penumpang sudah menggunakan <i>firewall</i> . All passenger vessels have been equipped with firewall systems.
7	Penghitungan <i>Availability</i> Jaringan TI Calculation of IT Network Availability	Sudah Dilakukan Already Done	Perhitungan <i>availability</i> Jaringan TI telah dilakukan untuk realisasi KPI tiap triwulan. The calculation of IT Network Availability has been carried out to support the realization of KPI targets on a quarterly basis.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI)

INFORMATION TECHNOLOGY (IT) GOVERNANCE

No	Inisiatif Initiative	Status Status	Penjelasan Explanation
8	<i>Penetration Testing Jaringan</i> Network Penetration Testing	Belum dilakukan Not Yet Implemented	Pada tahun 2024, difokuskan untuk <i>penetration testing</i> pada aplikasi kritikal sehingga <i>penetration testing</i> jaringan akan dilakukan pada tahun 2025. In 2024, the focus was placed on penetration testing for critical applications; therefore, network penetration testing is scheduled to be conducted in 2025.
9	<i>Penetration Testing Aplikasi</i> Application Penetration Testing	Sudah Dilakukan Already Done	Sudah dilakukan proses <i>penetration testing</i> pada aplikasi kritikal PT PELNI (Persero) (PPSS dan MyCargo). Penetration testing has been conducted on PT PELNI (Persero) critical applications, namely PPSS and MyCargo.
10	Pemisahan <i>environment area production & development</i> Separation of production and development environment areas	Sudah Dilakukan Already Done	Untuk aplikasi telah dilakukan pemisahan <i>environment</i> antara <i>production</i> dan <i>development</i> , namun dari sisi <i>server</i> masih sedang dilakukan untuk pemisahan <i>environment</i> tersebut dengan target penyelesaian di tahun 2025. For the application side, the separation between production and development environments has been implemented. However, on the server side, the environment separation is still in progress and is targeted for completion in 2025.
11	Pembenahan CCTV di area <i>Data Center</i> dan Penomoran Perangkat <i>Data Center</i> Improvement of CCTV in the Data Center area and Device Numbering in the Data Center.	Sudah Dilakukan Already Done	Pembenahan CCTV di area <i>Data Center</i> sudah dilakukan, namun untuk penomoran perangkat <i>Data Center</i> akan dilakukan pada TW 1 2025. The improvement of CCTV in the Data Center area has been completed; however, the device numbering in the Data Center will be carried out in Q1 2025.
12	Penyusunan dokumen <i>Disaster Recovery Plan</i> Preparation of the Disaster Recovery Plan document.	Sudah Dilakukan Already Done	Sudah dilakukan penyusunan SK Direksi Nomor: 12.18/07/SK/HKO.01/2023 tentang Pedoman Disaster Recovery Plan (DRP) PT PELNI (Persero). The Director's Decree Number: 12.18/07/SK/HKO.01/2023 regarding the Guidelines for the Disaster Recovery Plan (DRP) of PT PELNI (Persero) has been prepared.
13	Peningkatan & optimalisasi pengelolaan <i>backup & restore</i> Enhancement and optimization of backup and restore management.	Sudah Dilakukan Already Done	Sudah dilakukan optimalisasi dan pengelolaan <i>backup & restore</i> sesuai Nota Dinas VP TI Nomor: 12.10/11/ND-B/ICT/2024 terkait Prosedur Backup dan Restore. Selain itu, Pelni sudah menyiapkan sistem <i>backup</i> baik di DRC maupun <i>offline</i> (Synologi) untuk aplikasi kritikal. The optimization and management of backup and restore have been carried out in accordance with the Vice President of IT's Memorandum Number: 12.10/11/ND-B/ICT/2024 regarding the Backup and Restore Procedure. Additionally, PELNI has prepared both a DRC and offline (Synology) backup system for critical applications.
Inisiatif Tata Kelola Governance Initiatives			
1	Pelaksanaan sosialisasi <i>Digital Transformation</i> Implementation of Digital Transformation Socialization	Sudah Dilakukan Already Done	Sudah dilakukan sosialisasi program transformasi digital perusahaan kepada seluruh pegawai. The company's digital transformation program has been socialized to all employees.
2	Penentuan <i>Champion & Change Agent Digital Transformation</i> Determination of Digital Transformation Champion & Change Agent	Sudah Dilakukan Already Done	Sudah dilakukan penunjukan <i>champion & change agent digital transformation</i> pada tahun 2023. The champions and change agents for digital transformation have been appointed in 2023.
3	Penentuan & Penerapan KPI <i>Digital Transformation</i> Determination & Implementation of Digital Transformation KPIs	Sudah Dilakukan Already Done	Sudah ditentukan dan diterapkan KPI Digital Transformasi pada KPI Divisi Teknologi Informasi dan KPI Kontrak Manajemen 2024 (Kepemimpinan Teknologi). The Digital Transformation KPIs have been determined and implemented for the Information Technology Division KPIs and the 2024 Management Contract KPIs (Technology Leadership).

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI)

INFORMATION TECHNOLOGY (IT) GOVERNANCE

No	Inisiatif Initiative	Status Status	Penjelasan Explanation
4	Penyesuaian Struktur Organisasi TI Adjustment of IT Organizational Structure	Sudah Dilakukan Already Done	Struktur Organisasi Divisi TI sudah dilakukan penyesuaian Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 01.27/01/SK/HKO.01/2023 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pusat di PT PELNI (Persero). The organizational structure of the IT Division has been adjusted based on the Board of Directors' Decree Number: 01.27/01/SK/HKO.01/2023 regarding the Organizational Structure, Main Duties, and Functions of the Central Office at PT PELNI (Persero).
5	Pelaksanaan <i>Manpower Planning</i> Divisi TI Implementation of IT Division Manpower Planning	Sudah Dilakukan Already Done	Sudah dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 03.02/01/SK/HKO.01/2023 tentang Formasi Unit Kerja dan Jabatan pada Lingkup Kantor Pusat. This has been carried out based on the Board of Directors' Decree Number: 03.02/01/SK/HKO.01/2023 regarding the Formation of Work Units and Positions within the Central Office.
6	Pemenuhan Personil Divisi TI Fulfillment of IT Division Personnel	Sudah Dilakukan Already Done	Sudah dilakukan proses rekrutmen pegawai PKWT Divisi TI hingga tahun 2024. The recruitment process for PKWT employees in the IT Division has been carried out until 2024.
7	Pembentukan <i>IT Steering Committee</i> Formation of IT Steering Committee	Sudah Dilakukan Already Done	Sudah dilakukan pembentukan <i>IT Steering Committee</i> berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 07.24/01/SK/HKO.01/2023 Tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT STEERING COMMITTEE) PT PELNI (Persero). The IT Steering Committee has been established based on the Director's Decree Number: 07.24/01/SK/HKO.01/2023 regarding the Information Technology Steering Committee (IT STEERING COMMITTEE) of PT PELNI (Persero).
8	Pelaksanaan <i>ITSC Meeting</i> ITSC Meeting Implementation	Belum dilakukan Not Yet Implemented	<i>ITSC Meeting</i> akan dilaksanakan pada Januari 2025 dengan pembahasan rencana strategis dan tata kelola TI periode 2025-2029. The ITSC Meeting will be held in January 2025, with discussions focusing on the strategic plans and IT governance for the period 2025-2029
9	Pelaksanaan & Pemenuhan <i>Evidence</i> Tata Kelola TI Execution & Fulfillment of IT Governance Evidence	Sudah Dilakukan Already Done	Beberapa pemenuhan evidence tata kelola TI sudah dilakukan seperti: • Penyusunan Pedoman Sistem Keamanan Informasi (Proses COBIT2019: DSS01, DSS04); • Penyusunan Pedoman Pengendalian Keamanan Informasi, beserta SOP turunannya dengan detail sebagai berikut: - SOP Manajemen Perubahan TI (BAI06) - SOP Instalasi Perangkat Lunak (Software) TI (BAI09) - SOP Pemberian & Review Hak Akses (DSS05) - SOP Pengelolaan Kapasitas (BAI04) - SOP Pengelolaan Kerentanan Teknis dan <i>Patch Management</i> (BAI07) - SOP Pengelolaan Konfigurasi TI (DSS01) - SOP Penghapusan Informasi Fisik dan Logis TI (BAI09) - SOP Pengujian Keamanan Aplikasi (<i>Penetration Test</i>) (DSS05) - SOP Perlindungan Ancaman Keamanan Siber (DSS05) - SOP Deployment & Release (BAI07) • Pembentukan Tim Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) PT PELNI (Persero) (Proses COBIT 2019: APO13); • Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber / <i>Computer Security Incident Response Team</i> (CSIRT) PT PELNI (Persero) Tahun 2024(Proses COBIT 2019: APO13); • Melaksanakan kegiatan simulasi DRP untuk Aplikasi PPSS (Proses COBIT2019: DSS04); • Penyusunan Pedoman <i>Backup</i> dan <i>Restore</i> PT PELNI (Persero) (Proses COBIT2019: DSS01, DSS04); • Penyusunan Dokumen <i>Incident Response Plan</i> PT PELNI (Persero) (Proses COBIT2019: DSS05); • Pengembangan Aplikasi untuk mengelola portfolio layanan aplikasi perusahaan (Proses COBIT2019: APO05);

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI)

INFORMATION TECHNOLOGY (IT) GOVERNANCE

No	Inisiatif Initiative	Status Status	Penjelasan Explanation
			Several IT governance evidence requirements have been fulfilled, including: • Preparation of the Information Security System Guidelines (COBIT 2019 Process: DSS01, DSS04); • Preparation of Information Security Control Guidelines, along with the following detailed SOPs: - SOP for IT Change Management (BAI06) - SOP for IT Software Installation (BAI09) - SOP for Access Rights Provision & Review (DSS05) - SOP for Capacity Management (BAI04) - SOP for Vulnerability and Patch Management (BAI07) - SOP for IT Configuration Management (DSS01) - SOP for Physical and Logical Information Disposal (BAI09) - SOP for Application Security Testing (Penetration Test) (DSS05) - SOP for Cybersecurity Threat Protection (DSS05) - SOP for Deployment & Release (BAI07) • Establishment of the Information Security Management System (ISMS) Team at PT PELNI (Persero) (COBIT 2019 Process: APO13); • Establishment of the Cyber Incident Response Team / Computer Security Incident Response Team (CSIRT) at PT PELNI (Persero) in 2024 (COBIT 2019 Process: APO13); • Conducting DRP simulation activities for the PPSS application (COBIT 2019 Process: DSS04); • Preparation of the Backup and Restore Guidelines at PT PELNI (Persero) (COBIT 2019 Process: DSS01, DSS04); • Preparation of the Incident Response Plan Document at PT PELNI (Persero) (COBIT 2019 Process: DSS05); • Development of an application to manage the company's application service portfolio (COBIT 2019 Process: APO05).
10	Pelaksanaan <i>review</i> dan <i>update</i> kebijakan, standar dan prosedur pengelolaan insiden dan permintaan layanan TI Execution of Review and Update of Policies, Standards, and Procedures for Incident and Service Request Management	Sudah Dilakukan Already Done	Prosedur pengelolaan insiden dan permintaan layanan TI sudah dilakukan berdasarkan SK Direksi Nomor: 03.15/02/SK/HKO.01/202 tentang Kebijakan Pengelolaan Aplikasi PT PELNI (Persero). The procedure for managing IT incidents and service requests has been implemented based on the Director's Decree No. 03.15/02/SK/HKO.01/202 regarding the Application Management Policy of PT PELNI (Persero).
11	Pembuatan dan implementasi kebijakan, standar dan prosedur pengelolaan <i>problem</i> layanan TI The creation and implementation of policies, standards, and procedures for IT service problem management have been carried out.	Sudah Dilakukan Already Done	Sedang dilakukan penyusunan prosedur pengelolaan <i>problem</i> layanan TI. The procedure for managing IT service problems is currently being developed.
12	Penyusunan <i>Data Governance</i> Data Governance has been developed.	Belum dilakukan Not Yet Implemented	Penyusunan <i>Data Governance</i> akan dilakukan setelah penyusunan <i>Enterprise Architecture</i> selesai. Adapun untuk pelaksanaan pekerjaan ini akan dilakukan pada tahun 2025. The development of Data Governance will be carried out after the completion of the Enterprise Architecture. This work is scheduled to be carried out in 2025.
13	Pelaksanaan <i>Data Cleansing & Konsolidasi Data</i> Data Cleansing & Data Consolidation have been implemented.	Belum dilakukan Not Yet Implemented	Pelaksanaan <i>Data Cleansing & Konsolidasi Data</i> akan dilakukan setelah Penyusunan <i>Data Governance</i> selesai. The implementation of Data Cleansing & Data Consolidation will be carried out once the Data Governance development is completed.



TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI)

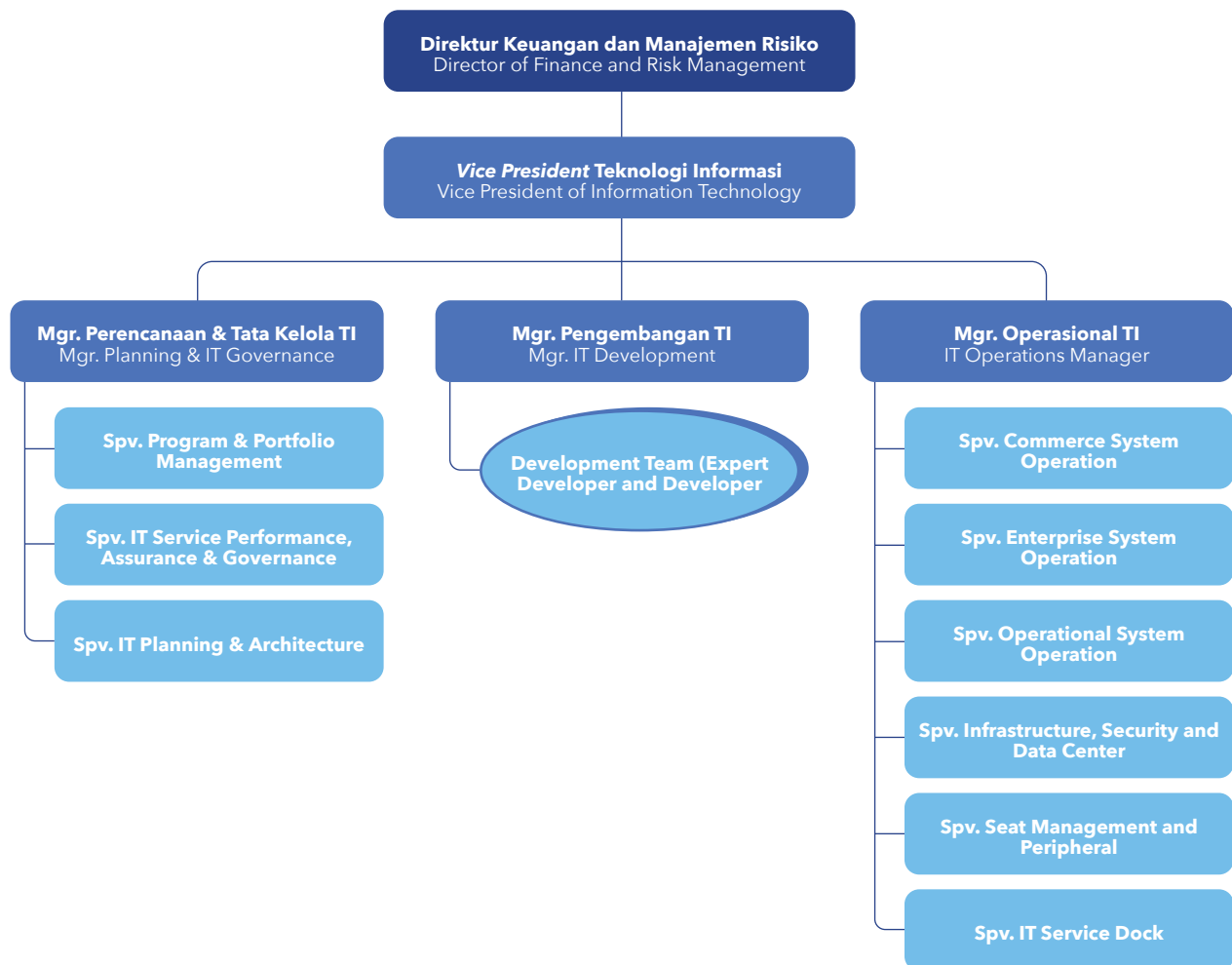
INFORMATION TECHNOLOGY (IT) GOVERNANCE

STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai SK Direksi Nomor: 04.17/02/SK/HKO.01/2024, pada tahun 2024 tentang Formasi Unit Kerja dan Jabatan pada Lingkup Kantor Pusat, berikut ini gambaran struktur organisasi Divisi Teknologi Informasi sesuai SK Direksi:

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

In accordance with the Board of Directors' Decree No. 04.17/02/SK/HKO.01/2024, issued in 2024 regarding the Formation of Work Units and Positions within the Headquarters, the following is an overview of the organizational structure of the Information Technology Division as per the Board of Directors' Decree:



JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA

Sampai dengan 31 Desember 2024, jumlah pegawai Divisi Teknologi Informasi sebanyak 45 orang, dengan 26 orang pegawai organik dan 12 orang pegawai non-organik serta 7 orang manage service (5 orang Helpdesk, 2 orang petugas NOC). Berdasarkan SK Direksi Nomor: 04.17/02/SK/HKO.01/2024 tentang Formasi Unit Kerja dan Jabatan pada Lingkup Kantor

HUMAN RESOURCES

As of December 31, 2024, the Information Technology Division has 45 employees, consisting of 26 organic employees, 12 non-organic employees, and 7 managed services personnel (5 Helpdesk staff and 2 NOC officers). Based on the Board of Directors' Decree No. 04.17/02/SK/HKO.01/2024 regarding the Formation of Work Units and Positions within the Headquarters, the IT



TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI)

INFORMATION TECHNOLOGY (IT) GOVERNANCE

Pusat, Divisi TI memiliki 48 formasi pegawai. Oleh karena itu, pada tahun 2025 Divisi TI bekerja sama dengan Divisi SDM merencanakan rekrutmen untuk memenuhi formasi pegawai yang masih kosong.

APLIKASI/SISTEM INFORMASI

Aplikasi-aplikasi dan sistem informasi yang ada di PT PELNI dibangun berdasarkan kebutuhan dari setiap unit kerja/ fungsi bisnis yang ada di Perusahaan. Berdasarkan RKAP 2024 dan *roadmap* inisiatif aplikasi/ sistem informasi pada tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana Strategis Teknologi Informasi 2022-2024, ada beberapa aplikasi yang telah berhasil diimplementasikan dan ada beberapa aplikasi yang sudah masuk tahapan pembangunan. Berikut pencapaian pengembangan aplikasi-aplikasi penting di PT PELNI (Persero).

1. Pengembangan Fitur *Check-In Online* dan *E-Boarding Pass*

Dalam rangka mendukung transformasi digital di PT PELNI (Persero), pada Tahun 2024, Divisi Teknologi Informasi PT PELNI (Persero) telah mengembangkan fitur *Check-In Online* dan *E-Boarding Pass* pada aplikasi PELNI Mobile.

Division has 48 employee positions. Therefore, in 2025, the IT Division, in collaboration with the HR Division, plans to recruit to fill the vacant positions.

APPLICATIONS/INFORMATION SYSTEMS

The applications and information systems at PT PELNI (Persero) are built based on the needs of each work unit/business function within the company. Based on the 2024 RKAP (Company Work Plan and Budget) and the 2024 application/information systems initiative roadmap outlined in the 2022-2024 IT Strategic Plan, several applications have been successfully implemented, and others are in the development stage. Below are the key application development achievements at PT PELNI (Persero):

1. Development of *Check-In Online* and *E-Boarding Pass* Features

In support of PT PELNI (Persero)'s digital transformation, in 2024, the IT Division developed the *Check-In Online* and *E-Boarding Pass* features for the PELNI Mobile application.



TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI) INFORMATION TECHNOLOGY (IT) GOVERNANCE

Dengan adanya fitur ini, penumpang dapat secara mandiri melakukan proses *check in* dan langsung mendapatkan *boarding pass* dalam bentuk elektronik (*e-boarding pass*) melalui aplikasi PELNI Mobile. Adapun dengan adanya fitur *Check-In Online* dan *E-Boarding Pass* ini memberikan beberapa manfaat seperti

- Penumpang dapat mengakses *boarding pass* langsung dari ponsel tanpa perlu mencetak dokumen fisik
- Penumpang tidak perlu mengantri untuk mencetak *boarding pass*
- *Boarding pass* tersimpan di perangkat pribadi, risiko kehilangan atau rusak lebih kecil dibandingkan dengan *boarding pass* kertas
- Penggunaan kertas dapat diminimalkan dan mendukung upaya ramah lingkungan.

With this feature, passengers can independently check in and immediately receive an electronic boarding pass (e-boarding pass) via the PELNI Mobile application. The introduction of Check-In Online and E-Boarding Pass provides several benefits, including:

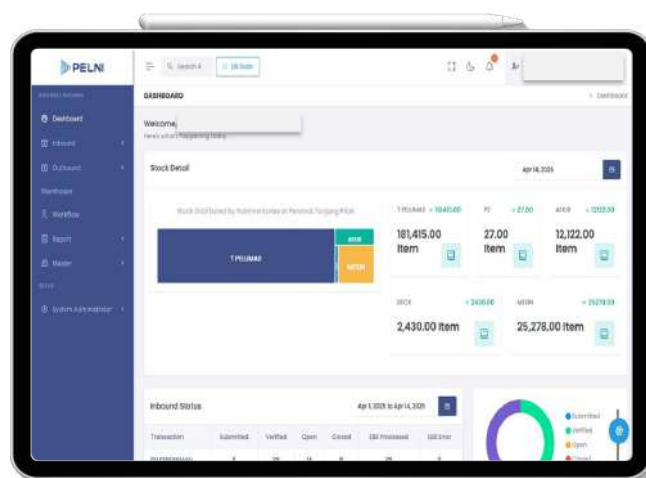
- Passengers can access the boarding pass directly from their phone without needing to print a physical document.
- Passengers do not need to wait in line to print the boarding pass.
- The boarding pass is stored on personal devices, reducing the risk of loss or damage compared to paper boarding passes.
- Paper usage is minimized, supporting environmentally friendly initiatives.

2. Pengembangan Warehouse Management System

Dalam rangka meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi pengelolaan inventaris di gudang. PT PELNI (Persero) telah mengembangkan aplikasi *Warehouse Management System* yang rilis pada bulan Desember 2024. Aplikasi ini dirancang untuk mengotomatisasi berbagai proses penting seperti penerimaan barang, penempatan barang di dalam gudang hingga pengeluaran barang. Saat ini implementasi aplikasi WMS ini diterapkan di Gudang PT PELNI (Persero) Tanjung Priok

2. Development of Warehouse Management System

To enhance operational efficiency and accuracy in warehouse inventory management, PT PELNI (Persero) has developed the Warehouse Management System (WMS), which was released in December 2024. This application is designed to automate various critical processes such as goods receipt, placement in the warehouse, and goods dispatch. The WMS application is currently implemented at PT PELNI (Persero) Tanjung Priok Warehouse.



TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI)

INFORMATION TECHNOLOGY (IT) GOVERNANCE

3. New E-Recruitment (Pembaruan Website Rekrutmen)

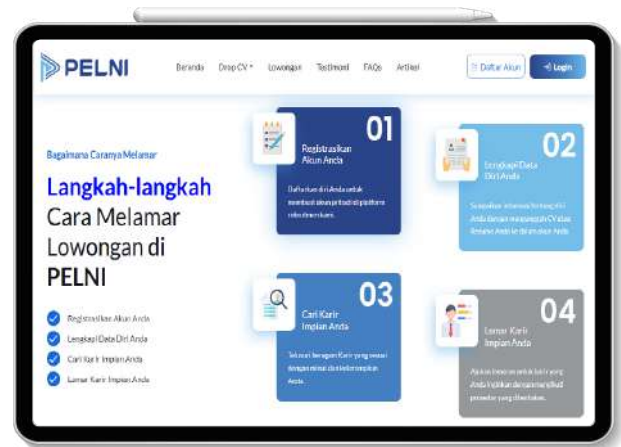
Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan akurasi proses seleksi karyawan, pengembangan aplikasi rekrutmen dilakukan sebagai langkah strategis untuk mendigitalisasi seluruh tahapan rekrutmen, mulai dari pemasangan lowongan hingga penilaian kandidat. Pada tahun 2024, PT PELNI (Persero) telah melakukan proses pembaruan website rekrutmen yang rilis pada Oktober 2024.



Aplikasi ini dirancang dengan fitur-fitur yang adaptif dan *user-friendly*, seperti pelacakan status pelamar secara real-time, pengelolaan proses rekrutmen PELNI maupun PELNI Group secara terpusat baik untuk rekrutmen pegawai darat maupun pegawai laut. Dengan hadirnya aplikasi ini, perusahaan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan pengalaman kandidat, serta memastikan transparansi dan objektivitas dalam setiap proses seleksi.

3. New E-Recruitment (Recruitment Website Update)

In an effort to enhance the efficiency and accuracy of the employee selection process, the recruitment application was developed as a strategic step to digitalize all stages of recruitment, from posting job vacancies to candidate assessment. In 2024, PT PELNI (Persero) successfully updated its recruitment website, which went live in October 2024.



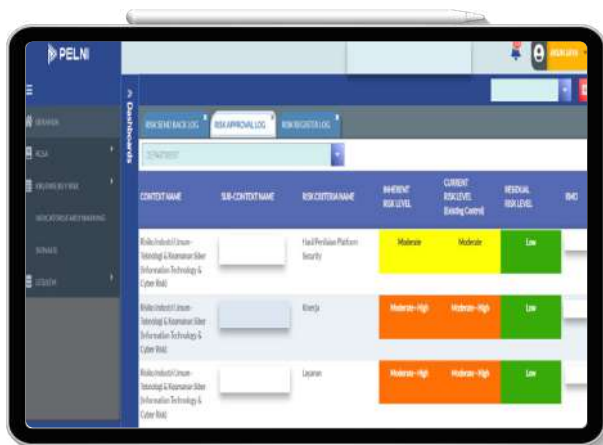
This application is designed with adaptive and user-friendly features, such as real-time applicant status tracking and centralized management of the recruitment process for both PT PELNI (Persero) and the PELNI Group, covering both land-based and sea-based employee recruitment. With the launch of this application, the company can accelerate decision-making processes, enhance candidate experience, and ensure transparency and objectivity in every stage of the selection process.



TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI) INFORMATION TECHNOLOGY (IT) GOVERNANCE

4. Pengembangan *Risk Management Information System (RMIS)*

Sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat tata kelola risiko yang efektif, pengembangan aplikasi *Risk Management Information System (RMIS)* dilakukan untuk menyediakan platform digital yang terintegrasi dalam pengelolaan risiko secara menyeluruh. Pengembangan Aplikasi RMIS ini telah *go live* pada Desember 2024 dan akan dilakukan implementasi penggunaan aplikasi pada tahun 2025.



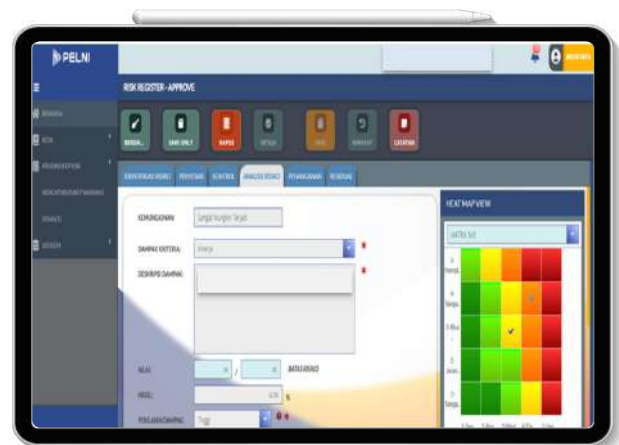
Aplikasi ini dirancang untuk memfasilitasi proses identifikasi, penilaian, mitigasi, hingga monitoring risiko secara *real-time*. Dengan RMIS, proses pelaporan menjadi lebih cepat dan akurat, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih responsif berdasarkan data yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Pengembangan ini juga turut mendukung terciptanya budaya sadar risiko di seluruh lini organisasi.

5. Pengembangan ITSM Service Portfolio Management

Aplikasi *Service Portfolio Management* merupakan alat penting dalam manajemen layanan TI yang membantu organisasi dalam merancang, mengelola, dan memantau seluruh siklus hidup layanan, mulai dari perencanaan hingga penghapusan layanan. Pengembangan Aplikasi ITSM - *Service Portfolio Management* ini telah *go live* pada Desember 2024 dan akan dilakukan implementasi penggunaan aplikasi pada tahun 2025.

4. Development of the Risk Management Information System (RMIS)

As part of the company's commitment to strengthening effective risk governance, the development of the Risk Management Information System (RMIS) application has been carried out to provide an integrated digital platform for comprehensive risk management. The RMIS application went live in December 2024, and its implementation will take place in 2025.



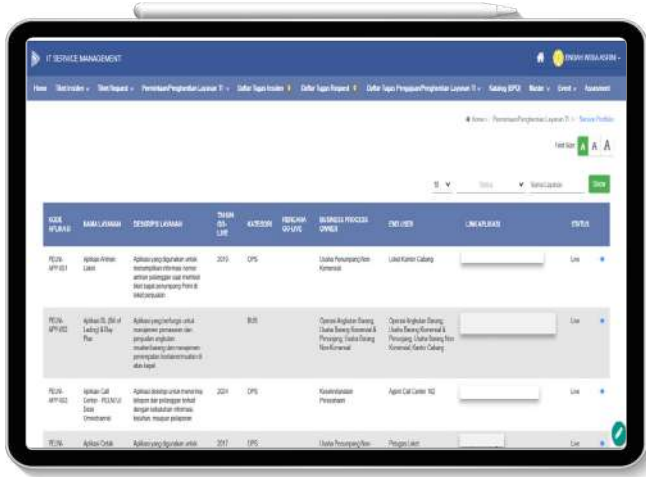
This application is designed to facilitate the processes of risk identification, assessment, mitigation, and real-time monitoring. With RMIS, reporting becomes faster and more accurate, enabling more responsive decision-making based on well-structured and properly documented data. This development also supports the creation of a risk-aware culture across all levels of the organization.

5. Development of ITSM Service Portfolio Management

The Service Portfolio Management application is a crucial tool in IT service management that helps organizations design, manage, and monitor the entire service lifecycle, from planning to service retirement. The development of the ITSM - Service Portfolio Management application went live in December 2024, with implementation scheduled for 2025.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI)

INFORMATION TECHNOLOGY (IT) GOVERNANCE



Aplikasi ini memungkinkan perusahaan untuk memiliki visibilitas menyeluruh terhadap layanan yang ditawarkan, baik yang sedang dikembangkan (*service pipeline*), yang sedang berjalan (*service catalog*), maupun yang sudah tidak digunakan (*retired services*).

This application enables the company to have comprehensive visibility into the services offered, including those in development (*service pipeline*), those in operation (*service catalog*), and those no longer in use (*retired services*).

6. Pengembangan Dashboard Kemenhub

Untuk memudahkan proses *monitoring* dan pelaporan terkait Biaya Produksi, Penghasilan dan PSO ke Kementerian Perhubungan. Divisi TI telah melakukan proses pengembangan aplikasi Dashboard Kemenhub yang telah *go live* pada bulan Desember 2024. Pengembangan dashboard ini menyajikan informasi terkait Laporan Data Operasional, Biaya dan Penghasilan PT PELNI (Persero) yang dapat diakses secara *realtime* oleh Kementerian Perhubungan sehingga memberikan kemudahan dalam proses pelaporan dan transparansi data.

6. Development of Kemenhub Dashboard

To facilitate monitoring and reporting related to Production Costs, Revenue, and PSO to the Ministry of Transportation, the IT Division has developed the Kemenhub Dashboard application, which went live in December 2024. This dashboard provides real-time access to Operational Data Reports, Costs, and Revenue of PT PELNI (Persero), enabling the Ministry of Transportation to streamline reporting processes and ensure data transparency.

7. Pengembangan Aplikasi SDUM (Satuan Dasar Unit Muatan)

Untuk mendukung proses percepatan perhitungan satuan dasar unit muatan pada proses bisnis PSO & Subsidi telah dikembangkan Aplikasi SDUM yang rilis di bulan Juni 2024. Aplikasi SDUM ini terintegrasi antara *Data Warehouse* dengan aplikasi *legacy* penjualan layanan *commerce* PT PELNI.

7. Development of SDUM (Satuan Dasar Unit Muatan) Application

To support the acceleration of the unit load calculation process in the PSO & Subsidy business, the SDUM application was developed and released in June 2024. This application integrates the Data Warehouse with the legacy sales service applications of PT PELNI.



TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI) INFORMATION TECHNOLOGY (IT) GOVERNANCE

8. Pengembangan Dashboard Monitoring Transaksi Sea Wifi

Salah satu produk layanan tambahan (*Add-Ons*) yang ditawarkan oleh PT PELNI (Persero) adalah penjualan layanan internet di atas kapal yakni Sea Wifi. Dalam mendukung proses monitoring transaksi penjualan internet di atas kapal (*Sea-Wifi*) telah dikembangkan sebuah Dashboard Monitoring Transaksi *Sea-Wifi* yang *Go Live* pada Mei 2024. Dengan adanya *dashboard* ini tentunya memberikan kemudahan untuk memantau transaksi penjualan secara *realtime* dan dapat membantu para manajemen untuk proses pengambilan keputusan.

8. Development of Sea Wifi Transaction Monitoring Dashboard

One of the additional services offered by PT PELNI (Persero) is the Sea Wifi internet service on board. To support the monitoring of Sea Wifi transaction sales, a Sea Wifi Transaction Monitoring Dashboard was developed and went live in May 2024. This dashboard facilitates real-time monitoring of transaction sales and aids management in decision-making processes.

PENDAMPINGAN DAN SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI ISO 27001:2022

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023, BUMN diwajibkan untuk menjaga keamanan siber sesuai dengan prinsip utama keamanan informasi yang meliputi kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*). Selain itu, BUMN juga diwajibkan untuk mengidentifikasi ancaman dan kerentanan pada aset teknologi informasi yang dimiliki dan menyusun rencana atau prosedur penanggulangan dan pemulihan insiden siber.

Terkait dengan keamanan siber ini, Divisi Teknologi Informasi sebagai unit pengelola teknologi informasi telah membangun infrastruktur keamanan jaringan guna menanggulangi ancaman dan kerentanan terkait keamanan siber. Adapun pada tahun 2024, Divisi TI sedang menjalani proses pendampingan dan sertifikasi ISO 27001:2022 dengan tujuan yakni sebagai berikut:

- Menerapkan pengendalian keamanan informasi mencakup kebijakan dan prosedur, serta teknologi terkait.
- Implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi
- Mengidentifikasi risiko Keamanan Informasi dan rencana mitigasinya

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM (ISMS) ISO 27001:2022 ASSISTANCE AND CERTIFICATION

In accordance with the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023, State-Owned Enterprises (SOEs) are required to uphold cybersecurity by adhering to the core principles of information security: confidentiality, integrity, and availability. Additionally, SOEs are mandated to identify threats and vulnerabilities to their IT assets and establish response and recovery procedures for cyber incidents.

To align with these requirements, the Information Technology Division, as the unit responsible for IT management, has built a robust network security infrastructure to address cyber threats and vulnerabilities. In 2024, the Division is undergoing the ISO 27001:2022 assistance and certification process with the following objectives:

- Implementing information security controls, including related policies, procedures, and technologies;
- Establishing an Information Security Management System (ISMS);
- Identifying information security risks and developing mitigation plans;



TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI)

INFORMATION TECHNOLOGY (IT) GOVERNANCE

- d. Mengelola rencana penanggulangan insiden siber dan *fraud activity*.
- e. Memenuhi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

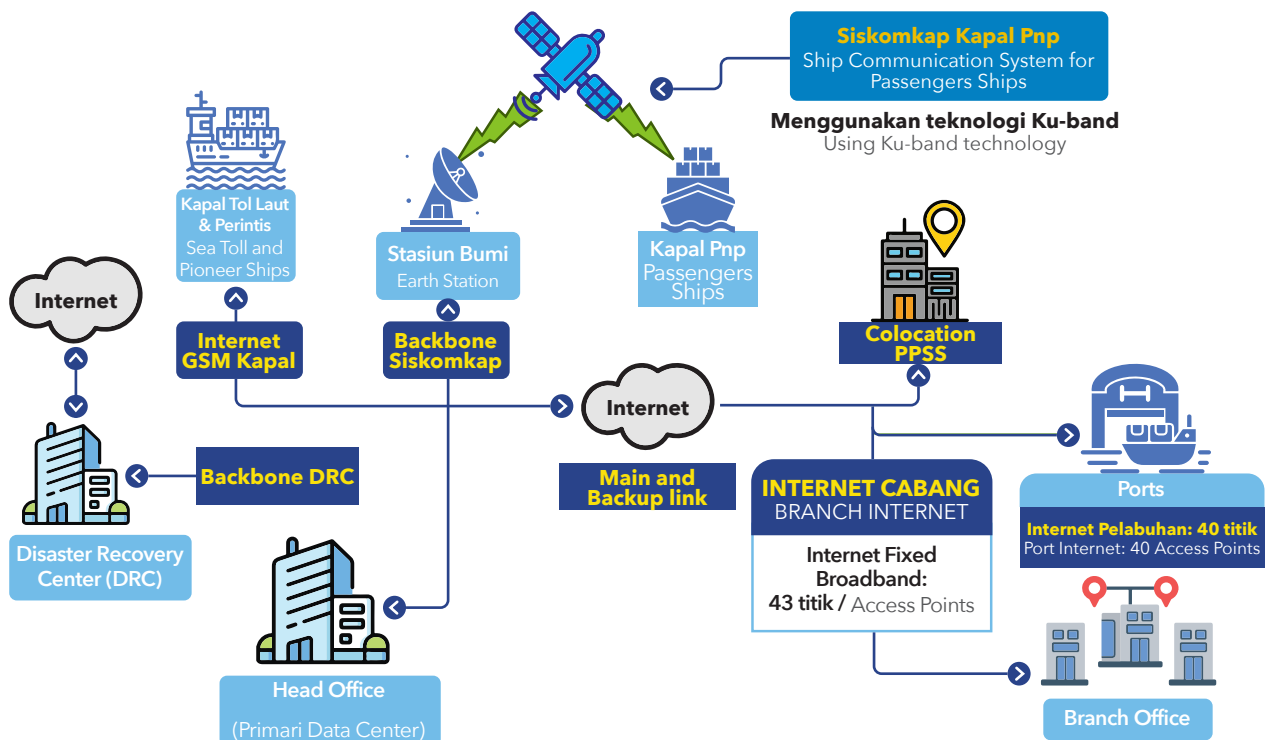
INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI

Untuk memperkuat infrastruktur teknologi informasi PT PELNI (Persero) pada 2024, Divisi TI telah membangun dan mengimplementasikan *Disaster Recovery Center* (DRC). Sistem DRC ini terkoneksi dengan data center primer milik PT PELNI (Persero). Data-data dan informasi yang penting secara regular disimpan di sistem DRC PT PELNI (Persero) sehingga perusahaan memiliki *backup data* yang akan berfungsi jika terjadi peristiwa/bencana yang menyebabkan *data center* primer PT PELNI (Persero) mengalami kerusakan. Berikut ini topologi infrastruktur teknologi informasi PT PELNI (Persero)

- d. Managing incident response plans for cyber threats and fraud activities;
- e. Ensuring compliance with applicable laws and regulations.

INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE

To strengthen the IT infrastructure of PT PELNI (Persero) in 2024, the IT Division has developed and implemented a Disaster Recovery Center (DRC). The DRC is directly connected to the company's primary data center, with critical data regularly backed up to the DRC to ensure data availability in the event of a disaster or primary data center failure.



TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI) INFORMATION TECHNOLOGY (IT) GOVERNANCE

Pada tahun 2024 Divisi Teknologi Informasi melanjutkan peremajaan perangkat-perangkat jaringan di kantor pusat dengan metode managed service. Pekerjaan ini meliputi pembuatan *centralized access point*, WLAN controller, perangkat *access point*, dan software pendukungnya. Pekerjaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas jaringan dan kemudahan manajemen infrastruktur jaringan di kantor pusat. Salah satu kontrol manajemen jaringan ini adalah para pegawai gedung kantor pusat dapat dengan mudah terhubung.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI & MANAJEMEN RISIKO

Tata kelola teknologi informasi dan manajemen risiko teknologi informasi merupakan bagian penting dalam pengelolaan teknologi informasi di semua perusahaan. Tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi yang tinggi akan mempengaruhi kinerja dan kualitas dari layanan teknologi informasi yang dihasilkan, sedangkan manajemen risiko yang baik akan melindungi pengelolaan layanan teknologi informasi perusahaan.

Sesuai SK Direksi Nomor: 09.07/01/SK/HKO.01/2022 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023, tata kelola teknologi informasi PELNI mengadopsi proses-proses yang ada pada *framework* (kerangka kerja) COBIT 5. Gambar berikut ini merupakan kerangka kerja tata kelola teknologi informasi di PELNI:

Additionally, in 2024, the IT Division continued the network equipment renewal at the Head Office through a managed service approach. This initiative included the deployment of centralized access points, WLAN controllers, access point devices, and supporting software. These efforts aim to enhance network performance and simplify infrastructure management at the Head Office, enabling employees to connect seamlessly.

IT GOVERNANCE AND RISK MANAGEMENT

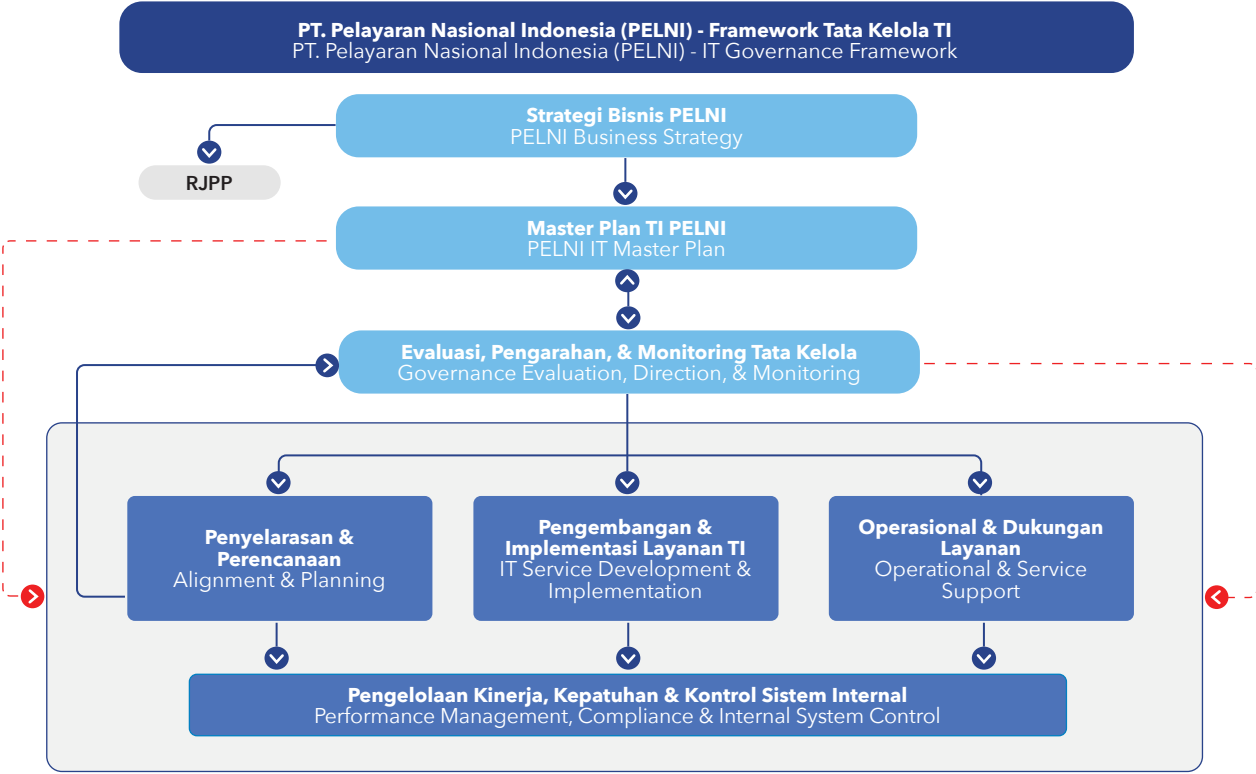
Effective IT governance and risk management are fundamental to the overall IT management framework of an organization. A mature IT governance structure enhances the performance and quality of IT services, while strong risk management safeguards IT operations.

Referring to the Board of Directors Decree No.09.07/01/SK/HKO.01/2022 and Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023, PT PELNI (Persero) has adopted the COBIT 5 framework for IT governance.



TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI)

INFORMATION TECHNOLOGY (IT) GOVERNANCE



Framework Tata Kelola TI yang digambarkan di atas memperlihatkan keseluruhan proses tata kelola TI yang dilaksanakan oleh Divisi TI PT PELNI (Persero). Segala kegiatan yang dijalankan oleh segenap personil Divisi TI PT PELNI (Persero) tidak terlepas dari tujuan dan strategi yang ditetapkan, yaitu strategi TI yang selaras dengan tujuan dan strategi bisnis PT PELNI (Persero).

ASSESMEN TINGKAT KEMATANGAN TATA KELOLA TI

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara yang berisi setiap BUMN harus melaksanakan asesmen tingkat kematangan tata kelola TI secara mandiri (internal) atau secara independen melibatkan pihak eksternal.

The following diagram illustrates PT PELNI (Persero) IT Governance Framework, which encapsulates the entire governance process managed by the IT Division and is fully aligned with the company's business strategies and objectives.

IT GOVERNANCE MATURITY LEVEL ASSESSMENT

In accordance with the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, every SOE is required to conduct an IT governance maturity level assessment, either independently (internal) or with the involvement of an external assessor.



TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI)

INFORMATION TECHNOLOGY (IT) GOVERNANCE

Pada tahun 2023, Kementerian BUMN mensyaratkan setiap BUMN melakukan assessment dengan framework COBIT 5 atau COBIT 2019. Atas arahan tersebut, Divisi Teknologi Informasi telah melakukan assessment Tingkat Kematangan Tata Kelola TI pada November – Desember 2024.

Kegiatan *assessment* dilakukan oleh assesor independent yaitu, PT Altha Dyanusa Consulting. PT PELNI (Persero) berinisiatif menggunakan framework COBIT 2019. Adapun proses-proses tata kelola TI PELNI yang dinilai terdiri dari 24 kontrol minimum berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN dan Kerangka Kerja Penilaian Penyelenggaraan Teknologi Informasi BUMN Nomor: S-562/MBU/DSI/10/2024.

Skor yang didapatkan dari hasil *assessment IT Maturity Level* Tahun 2024 adalah 3.00, skor ini meningkat sebesar 1.00 dari tahun sebelumnya (2023) yakni 2.00.

In response to this mandate, in 2023 the Ministry of SOEs required all SOEs to conduct such assessments using the COBIT 5 or COBIT 2019 framework. Based on this directive, the Information Technology Division of PT PELNI (Persero) conducted an IT Governance Maturity Level Assessment in November-December 2024.

The assessment was carried out by an independent assessor, PT Altha Dyanusa Consulting. PT PELNI (Persero) proactively adopted the COBIT 2019 framework for this initiative. The assessment evaluated 24 minimum control processes as stipulated in the Minister of SOEs' Decree and the IT Governance Assessment Framework (Letter No. S-562/MBU/DSI/10/2024).

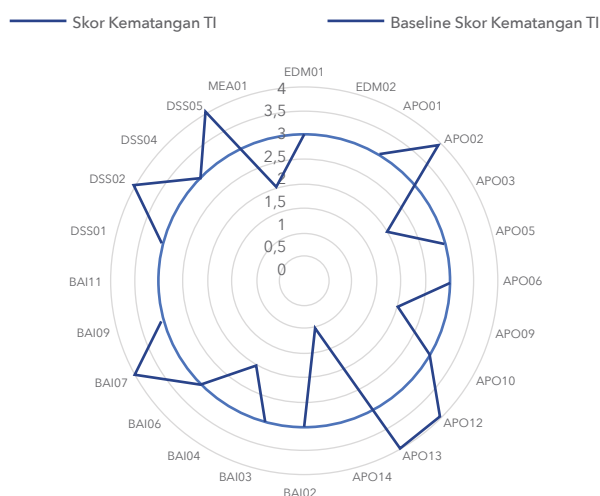
As a result, PT PELNI (Persero) achieved an IT Maturity Level score of 3.00 in 2024, marking a significant improvement from the 2023 score of 2.00.

Skor IT Maturity PELNI

PELNI IT Maturity Score

Skor IT Maturity untuk 24 proses PT PELNI (Persero) adalah sebesar 3.00 (Defined)
The IT Maturity score for 24 processes of PT PELNI (Persero) is 3.00 (Defined)

Persebaran Skor Kematangan TI PT Pelayaran Nasional Indonesia Sementara



Target	3.0
Skor	3.00
Gap	0.00

Skor Kematangan TI PELNI	
Tahun 2023	Tahun 2024
2.00 (Managed)	3.00 (Defined)
<i>The process achieves its purpose in a much more organized way using organizational assets. Process typically are well defined.</i>	

0 Incomplete	1 Initial	2 Managed	3 Defined	4 Quantitative	5 Optimizing

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI)

INFORMATION TECHNOLOGY (IT) GOVERNANCE

Berdasarkan hasil penilaian *IT Maturity Level*, saat ini nilai kapabilitas proses TI di PT PELNI (Persero) berada pada level 3 (*Defined*) dengan nilai kapabilitas proses secara keseluruhan adalah 3.00.

KUESIONER KEPUASAN LAYANAN TI STAKEHOLDER

Divisi Teknologi Informasi mengadakan kegiatan pengisian Kuesioner Kepuasan Layanan TI dengan jangka waktu pengisian tanggal 04 – 22 November 2024. Pengisian kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan stakeholder pada layanan aplikasi, jaringan, maupun infrastruktur yang disajikan oleh Divisi TI.

Berdasarkan hasil 3 (tiga) kategori survei di atas, maka rata-rata nilai survei tingkat kepuasan stakeholder layanan TI PELNI tahun 2024 adalah 4,37 meningkat sebesar 0,18 dari tahun 2023 yaitu, sebesar 4,19. Nilai tahun 2024 sebesar 4,37 ini telah melampaui target KPI Divisi TI yaitu 3,5. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

No	Kategori	2023	2024	GAP
1	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan TI PELNI	4,13	4,15	+0,02
2	Tingkat Kepuasan Vendor Terhadap Layanan TI PELNI	4,47	4,35	-0,12
3	Tingkat Kepuasan Mitra Terhadap Layanan TI PELNI	3,96	4,60	+0,64
Nilai Rata-Rata Keseluruhan Overall Average Value		4,19	4,37	+0,18

Hasil survei ini menjadi cerminan bagi Divisi TI untuk meningkatkan mutu layanan yang lebih baik lagi di masa mendatang. Walaupun nilai KPI tahun 2024 telah dilampaui, namun Divisi TI harus meningkatkan layanan yang mengalami penurunan serta kinerja yang belum memenuhi harapan. Oleh karena itu, Divisi TI perlu melakukan berbagai strategi sesuai yang telah disampaikan di atas.

This outcome reflects that the organization has reached Level 3 (*Defined*) in its IT process capability, indicating that IT processes are well-established, standardized, and documented across the organization.

IT SERVICE SATISFACTION SURVEY

The IT Division conducted a stakeholder satisfaction survey for IT services between 4-22 November 2024. The survey aimed to evaluate stakeholder satisfaction across various IT service domains, including applications, network performance, and infrastructure.

Based on the results across the three surveyed categories, the average satisfaction score in 2024 was 4.37—an increase of 0.18 points from the 2023 score of 4.19. This 2024 score surpassed the IT Division's KPI target of 3.5, demonstrating improved service delivery and increased stakeholder satisfaction, as illustrated in the following table:

The survey results serve as a reflection for the IT Division to continue improving service quality in the future. Although the Division has exceeded its 2024 KPI target, it remains essential to enhance services that showed a decline in satisfaction and address areas where performance has yet to meet stakeholder expectations. Accordingly, the IT Division will pursue a series of strategic initiatives as outlined above to ensure continuous service improvement and alignment with user needs.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI) INFORMATION TECHNOLOGY (IT) GOVERNANCE

PENGHARGAAN TOP DIGITAL AWARDS 2024

Pada tanggal 05 Desember 2024, PT PELNI (Persero) mendapatkan sejumlah penghargaan TOP DIGITAL Awards 2024 dengan tema *Business Solutions, AI and Cyber Security for Excellence Business and Services*, untuk kategori:

TOP DIGITAL AWARDS 2024

On December 5, 2024, PT PELNI (Persero) received several awards at the TOP DIGITAL Awards 2024 under the theme Business Solutions, AI and Cyber Security for Excellence Business and Services, in the following categories:

Kategori Penghargaan Award Categories	Pemenang Penghargaan Award Winner
Top Digital Implementation 2024 #Level Star 4	PT PELNI (Persero)
Top Leader on Digital Implementation 2024	Direktur Utama PT PELNI (Persero) Tri Andayani

Kegiatan TOP DIGITAL Awards 2024 ini diselenggarakan oleh majalah It Works yang bekerja sama dan didukung oleh beberapa Asosiasi dan Perusahaan Konsultan TI dan TELCO. Berikut ini foto penghargaan TOP DIGITAL Awards 2024 yang dimenangkan oleh PT PELNI (Persero).

The TOP DIGITAL Awards 2024 event was organized by It Works magazine in collaboration with and supported by several IT and TELCO associations and consulting firms. Below is a photo of the TOP DIGITAL Awards 2024 received by PT PELNI (Persero).



TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI)
INFORMATION TECHNOLOGY (IT) GOVERNANCE

MANAJEMEN RISIKO TEKNOLOGI
INFORMASI

Manajemen risiko teknologi informasi dilakukan mengikuti implementasi perusahaan berdasarkan SK Direksi Nomor: 12.31/01/SK/HKO.01/2024 tentang Pedoman Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000 di PT PELNI (Persero). Setiap unit kerja/cabang/SBU diminta menyampaikan laporan *risk register* dan response plan per triwulan kepada Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan untuk dilaporkan kepada manajemen (Direksi dan Komisaris). Sesuai laporan *risk register* TW IV pada tahun 2024, terdapat 4 (empat) risiko beserta mitigasi risikonya yang ada pada teknologi informasi perusahaan, yaitu:

MANAGEMENT OF INFORMATION
TECHNOLOGY RISKS

Information technology risk management is carried out following the company's implementation based on the Director's Decree Number: 12.31/01/SK/HKO.01/2024 on Risk Management Guidelines Based on ISO 31000 at PT PELNI (Persero). Each work unit/branch/SBU is required to submit a risk register and response plan quarterly to the Risk Management and Compliance Division for reporting to management (Board of Directors and Board of Commissioners). According to the IV Quarter 2024 risk register report, there are 4 (four) risks along with their mitigation strategies in the company's information technology, namely:

No	Risiko Risk	Konsekuensi Consequences	Rencana Mitigasi Mitigation Plan
1	Tidak Tersedianya Layanan TI Perusahaan Unavailability of Company IT Services	- Proses bisnis kurang efektif dan efisien - Layanan perusahaan terganggu <i>Loss Opportunity</i> dalam potensi bisnis - The business processes are less effective and efficient. - The company's services are disrupted. - Lost opportunities in business potential.	- Melakukan pemeliharaan layanan TI - Melakukan monitoring ketersediaan layanan aplikasi - Perform IT service maintenance. - Monitor the availability of application services.
2	Terganggunya Layanan Data Center Disruption of Data Center Services	- Kegiatan operasional perusahaan terganggu - Hilangnya data krusial perusahaan - Aplikasi error - The company's operational activities are disrupted. - Loss of crucial company data. - Application errors.	- Pemeliharaan rutin <i>data center</i> agar beroperasi secara optimal - Penyediaan redudansi perangkat - Routine maintenance of the data center to operate optimally - Provision of device redundancy
3	Kegagalan Integrasi Aplikasi Operasional Kapal Failure of Ship Operational Application Integration	<i>Loss Opportunity</i> dalam potensi bisnis - Proses bisnis kurang efektif dan efisien - Tidak tersedianya data operasional perkapalan - Lost opportunities in business potential. - Business processes are less effective and efficient. - Unavailability of shipping operational data.	Melakukan pengembangan pada dashboard operation yang terintegrasi dengan aplikasi Portal - Emplooi, VWA, dan <i>Route Management System</i> serta memonitoring progress pekerjaan secara periodik dan menyelesaikan kendala yang timbul. Develop the operation dashboard integrated with the Emplooi Portal application, VWA, and Route Management System, while periodically monitoring work progress and addressing any issues that arise.
4	Serangan Cyber pada Aplikasi Ticketing PT PELNI (Persero) Cyber Attacks on PT PELNI (Persero) Ticketing Application	<i>Loss Opportunity</i> dalam potensi bisnis - Hilangnya data Perusahaan - Lost opportunities in business potential. - Loss of company data.	- Mengimplementasikan dan sertifikasi SMKI ISO 27001 - Melakukan <i>Penetration Testing</i> Aplikasi <i>Ticketing</i> - Menerapkan Sistem Firewall Aplikasi - Implement and certify ISO 27001 SMKI. - Conduct penetration testing on the ticketing application. - Implement application firewall systems.







Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Social and Environmental Responsibility



06

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY





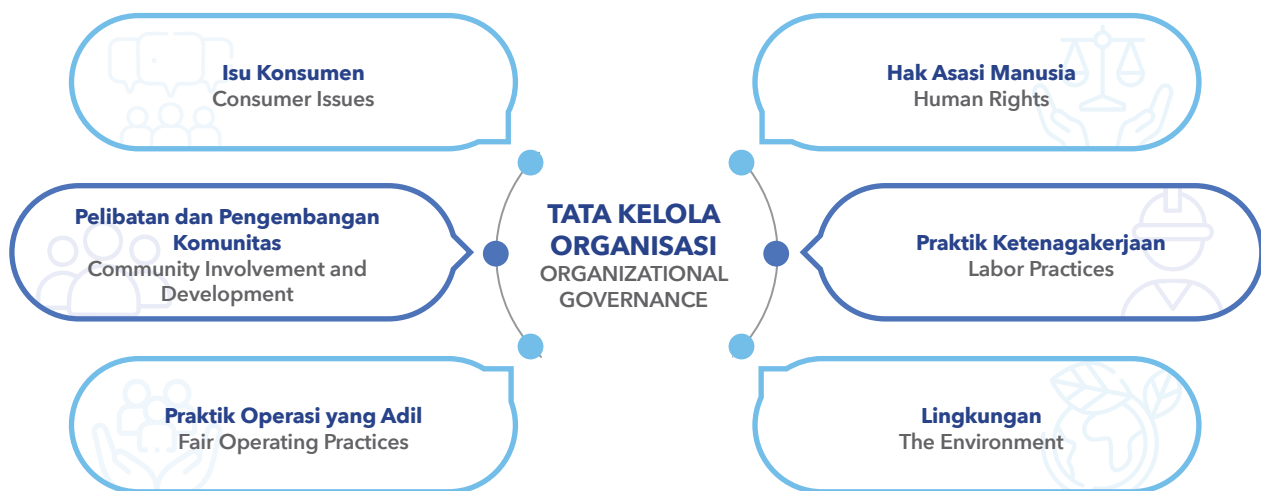
KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

POLICY AND PLANNING OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAMS

Sebagai BUMN, PT PT PELNI (Persero) tidak hanya berfokus pada pencapaian laba, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan sosial yang berkelanjutan. Salah satu bentuk kontribusi tersebut adalah melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Kegiatan TJSL PT PT PELNI (Persero) didasarkan pada peraturan perundang-perundangan berikut:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-1/MBU/03/2023, tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; dan
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Selain itu, Pelaksanaan TJSL di PT PELNI (Persero) juga mengacu pada 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan 7 Core Subject ISO 26000 berikut:



Pada tahun 2024, Perseroan telah melaksanakan berbagai program TJSL yang dirancang untuk mengatasi dan mengelola risiko yang teridentifikasi berdasarkan 7 Core Subjects ISO 26000, dengan rincian sebagai berikut:

As a SOE, PT PELNI (Persero) not only focuses on achieving profits but also contributes to the welfare of society and sustainable social development. One of the forms of this contribution is through the Social and Environmental Responsibility (CSR) program. PT PELNI (Persero) CSR activities are based on the following regulations:

1. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-1/MBU/03/2023, dated March 3, 2023, on Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises; and
2. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

In addition, the implementation of CSR at PT PELNI (Persero) also refers to the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) and the 7 Core Subjects of ISO 26000 as follows:

In 2024, the Company has implemented various Corporate Social Responsibility (CSR) programs designed to address and manage identified risks based on the 7 Core Subjects of ISO 26000, with the following details:

Fu

KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

POLICY AND PLANNING OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAMS

Tata kelola Organisasi Organizational Governance		
Program TJSL CSR Programs	<i>Risk assessment</i> , Sosialisasi implementasi GCG, fasilitas Pas Kecil untuk nelayan	Risk assessment, Socialization of CGC implementation, Small Fisherman Pass facility
Analisa Risiko Risk Analysis	Risiko ketidakpatuhan dan risiko penurunan <i>branding</i>	Non-compliance risks and brand reputation decline risks
Hak Asasi Manusia Human Rights		
Program TJSL CSR Programs	Fasilitas daycare, klinik kesehatan, dan kesejahteraan pegawai (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan)	Daycare facility, health clinic, and employee welfare (Health BPJS and Employment BPJS)
Analisa Risiko Risk Analysis	Risiko kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pegawai	Non-compliance risks and brand reputation decline risks
Praktik Ketenagakerjaan Labor Practices		
Program TJSL CSR Programs	Pelatihan untuk Anak Buah Kapal (ABK), diklat muda dan madya pegawai darat, audit eksternal sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, dan beasiswa calon kadet	Training for Crew Members (ABK), junior and mid-level staff training, external audit of occupational health and safety management system, and scholarships for prospective cadets
Analisa Risiko Risk Analysis	Risiko keselamatan serta kesehatan pegawai dan risiko kekurangan pegawai ABK	Employee safety and health risks, as well as a shortage of crew members
Lingkungan The Environment		
Program TJSL CSR Programs	Implementasi manajemen energi dan penghitungan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), program dekarbonisasi, restorasi terumbu karang Karimunjawa, penanaman pohon, dan konservasi penyu di Aceh	Implementation of energy management and Greenhouse Gas (GHG) emission calculations, decarbonization program, coral reef restoration in Karimunjawa, tree planting, and turtle conservation in Aceh
Analisa Risiko Risk Analysis	Risiko ketidakpatuhan, risiko kerusakan terumbu karang dan ekosistem laut lainnya akibat kecelakaan kapal	Non-compliance risks, coral reef damage risks, and other marine ecosystem damage risks due to ship accidents
Praktik Operasi yang Adil Fair Operating Practices		
Program TJSL CSR Programs	Sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)	Socialization of the Anti-Bribery Management System (ABMS)
Analisa Risiko Risk Analysis	Risiko ketidakpatuhan dan risiko korupsi	Non-compliance risks and corruption risks
Isu Konsumen Consumer Issues		
Program TJSL CSR Programs	Tindak lanjut laporan dari <i>contact center</i>	Follow-up on reports from the contact center
Analisa Risiko Risk Analysis	Risiko penurunan <i>branding</i> dan risiko penurunan penjualan	Brand reputation decline risks and sales decline risks



KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN PROGRAM
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
POLICY AND PLANNING OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAMS

Pelibatan & Pengembangan Masyarakat Community Involvement & Development		
Program TJSL CSR Programs	Kampung Nelayan, pemberdayaan masyarakat adat nelayan Wakatobi, desa mandiri, RKS Denpasar	Fishermen's Village, empowerment of indigenous fishermen community, independent villages, and RKS Denpasar
Analisa Risiko Risk Analysis	Risiko finansial anak perusahaan dan pencemaran lingkungan	Subsidiary financial risks and environmental pollution risks

Selain itu, Perseroan juga telah mengidentifikasi berbagai isu eksternal yang berkaitan dengan pelaksanaan program TJSL serta melakukan pemetaan terhadap *stakeholder* yang terlibat dalam setiap isu tersebut. Adapun isu eksternal yang menjadi fokus perhatian Perseroan pada tahun 2024 antara lain:

1. Meningkatnya permasalahan sampah di *homebase* kapal PT PELNI (Persero).
2. Kerusakan ekosistem bawah air.
3. Keterbatasan ketersediaan air bersih dan listrik bagi warga pondok pesantren.
4. Kurangnya pengetahuan UMKM terkait perizinan, kemasan (*packaging*), dan pemasaran produk.
5. Pemberdayaan petani dalam budidaya sayuran untuk memasok bahan makanan di atas kapal, yang dilakukan oleh anak perusahaan (PT Pelita Indonesia Djaya).
6. Kesulitan nelayan dalam memperoleh subsidi pemerintah karena tidak memiliki Pas Kecil (surat tanda kebangsaan kapal yang penting untuk mengidentifikasi dan memastikan kapal memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah), dan
7. Keterbatasan bahan bakar fosil sebagai pemasok utama energi nasional, yang semakin mahal dan terbatas.

Adapun uraian mengenai latar belakang, peran program TJSL, serta pemangku kepentingan yang dilibatkan di setiap isu eksternal antara lain:

rthermore, the Company has identified various external issues related to the implementation of the CSR program and has mapped out the stakeholders involved in each of these issues. The external issues that are the focus of the Company's attention in 2024 include:

1. The increasing waste problem at PT PELNI (Persero) homebase port.
2. The deterioration of underwater ecosystems.
3. The limited availability of clean water and electricity for residents of Islamic boarding school.
4. The lack of knowledge among SMEs regarding permits, packaging, and product marketing.
5. The empowerment of farmers in vegetable cultivation to supply food materials on board, carried out by the subsidiary (PT Pelita Indonesia Djaya).
6. The difficulties faced by fishermen in obtaining government subsidies due to the lack of a Small Vessel Registration (a document crucial for identifying and ensuring that vessels meet government standards), and
7. The limited availability of fossil fuels as the main source of national energy, which is becoming more expensive and scarce.

The following provides an explanation of the background, the role of the CSR program, and the stakeholders involved in each external issue:



KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

POLICY AND PLANNING OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAMS

Meningkatnya Permasalahan Sampah di *Homebase Kapal* PT PELNI (Persero) The Increasing Waste Problem At PT PELNI (Persero) Homebase Port

Latar Belakang	Background
- Kapal PT PELNI (Persero) turut berkontribusi dalam penyumbangan sampah di Kota Denpasar, sehingga Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan sampah tersebut. - Sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, PT PELNI (Persero) berkomitmen untuk mengurangi jumlah residu yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). - PT PELNI (Persero) berupaya membentuk wilayah yang memiliki sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan efektif, serta mampu menangani masalah sampah dengan tepat. Hal ini diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik. - Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan kaidah kesehatan lingkungan, salah satunya melalui pemanfaatan sampah sebagai barang yang bernilai ekonomis. - PT PELNI (Persero) berfokus pada pembentukan kader-kader lingkungan yang dapat memberikan edukasi mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat, khususnya kepada generasi muda, untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan.	- PT PELNI (Persero) ships contribute to the accumulation of waste in the city of Denpasar, thus the company has a responsibility to participate in addressing this waste problem. - As part of its efforts to achieve sustainable waste management, PT PELNI (Persero) is committed to reducing the amount of residual waste sent to the Final Disposal Site (TPA). - PT PELNI (Persero) aims to establish an area with an integrated and effective waste management system capable of addressing waste issues properly. This initiative is expected to raise public awareness of the importance of proper waste management. - The program's goal is to increase public awareness of environmental health practices, including utilizing waste as a resource with economic value. - PT PELNI (Persero) focuses on training environmental cadres who can educate the community, especially the younger generation, on waste management to create a sustainable impact.
Peran Kegiatan TJSL	Role of CSR Activities
PT PELNI (Persero) telah melaksanakan Program Rumah Kelola Sampah (RKS) di Denpasar dengan berbagai kegiatan berikut: - Membangun fasilitas RKS yang dapat mengelola sampah secara efektif dan efisien. - Menyelenggarakan pelatihan bagi relawan mengenai cara memilah dan mengolah sampah menjadi produk yang bernilai jual. - Memberikan mesin <i>crusher</i> untuk mendukung proses pengolahan sampah menjadi bahan yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut. - Menyediakan kendaraan angkut sampah guna meningkatkan efisiensi biaya angkut sampah untuk operasional PT PELNI (Persero) Cabang Denpasar.	PT PELNI (Persero) has implemented the Waste Management House (RKS) Program in Denpasar through the following activities: - Establishing RKS facilities capable of managing waste effectively and efficiently. - Organizing training for volunteers on how to sort and process waste into valuable products. - Providing a crusher machine to support the processing of waste into materials that can be further utilized. - Supplying waste transport vehicles to improve the cost efficiency of waste transportation for PT PELNI (Persero) Denpasar Branch operations.
Pemangku Kepentingan	Stakeholders
- Masyarakat dan Komunitas <i>Local Hero</i> - Tokoh Masyarakat (Banjar Bidang Lingkungan) - Pemerintah Daerah (Dinas Lingkungan Hidup) - Pegawai PT PELNI (Persero)	- The Public and Communities - Local Heroes - Community Leaders (Banjar Environmental Sector) - Local Government (Environmental Agency) - PT PELNI (Persero) Employees

Kerusakan Ekosistem Bawah Air The Deterioration of Underwater Ecosystems

Latar Belakang	Background
- Meskipun masyarakat setempat telah melakukan upaya konservasi, penutupan karang keras alami di kawasan tersebut masih kurang dari 30%. - Kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan bahan kimia berbahaya oleh nelayan setempat, menyebabkan kerusakan parah pada terumbu karang. Kerusakan ini terjadi antara tahun 1980 hingga 2000. - Salah satu upaya untuk mengurangi kerusakan terumbu karang adalah dengan pembuatan terumbu buatan. Terumbu buatan ini bertujuan untuk menjadi media penempelan larva karang, yang nantinya akan berkembang menjadi karang dewasa (Ampou et al., 2021).	- Although local communities have made efforts toward conservation, the coverage of natural hard coral reefs in the area remains below 30%. - Environmentally harmful fishing practices, such as the use of hazardous chemicals by local fishermen, have caused severe damage to coral reefs. This damage occurred between 1980 and 2000. - One of the efforts to reduce coral reef damage is the creation of artificial reefs. These artificial reefs aim to serve as substrates for coral larvae attachment, which will later develop into mature corals (Ampou et al., 2021).

KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN PROGRAM
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
POLICY AND PLANNING OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAMS

Kerusakan Ekosistem Bawah Air The Deterioration of Underwater Ecosystems	
Peran Kegiatan TJSL	Role of CSR Activities
PT PELNI (Persero) telah melaksanakan Program Rehabilitasi Terumbu Karang di Bangsring <i>Underwater</i> bekerja sama dengan Universitas Brawijaya melalui kegiatan-kegiatan berikut: 1. Pembuatan terumbu buatan dengan penanaman 1000 media transplantasi. 2. Sosialisasi kepada nelayan setempat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pelestarian biota laut. 3. Pembagian 100 <i>life jacket</i> kepada Kelompok Nelayan Samudra Bakti. 4. Identifikasi dan pemantauan biota-biota laut yang ada di sekitar terumbu karang. 5. Monitoring rekrutmen dan pertumbuhan karang yang dilakukan setiap bulan untuk memastikan efektivitas program rehabilitasi.	PT PELNI has implemented the Coral Reef Rehabilitation Program at Bangsring Underwater in collaboration with Universitas Brawijaya through the following activities: 1. Creation of artificial reefs by planting 1,000 transplantation media. 2. Conducting outreach to local fishermen to raise awareness and participation in marine life conservation. 3. Distributing 100 life jackets to the Samudra Bakti Fishermen Group. 4. Identifying and monitoring marine life surrounding the coral reefs. 5. Monthly monitoring of coral recruitment and growth to ensure the effectiveness of the rehabilitation program.
Pemangku Kepentingan	Stakeholders
1. Pegawai PT PELNI (Persero) 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi 3. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya 4. Kelompok Nelayan Samudra Bakti 5. <i>Local Hero</i>	1. PT PELNI (Persero) Employees 2. Banyuwangi Environmental Agency 3. Faculty of Fisheries and Marine Science, Universitas Brawijaya 4. Samudra Bakti Fishermen Group 5. Local Heroes

Keterbatasan Ketersediaan Air Bersih dan Listrik bagi Warga Pondok Pesantren The Limited Availability of Clean Water and Electricity for Residents of Islamic Boarding School	
Latar Belakang	Background
1. Sumber air yang digunakan untuk kegiatan mandi, cuci, dan MCK di Pondok Pesantren berasal dari tampungan air hujan. 2. Debit air yang terbatas dan tingginya beban listrik telah menjadi masalah yang berlangsung selama bertahun-tahun. 3. Pembatasan pembuatan sumur bor di Kota Batam berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2014 tentang Lingkungan Hidup menambah tantangan dalam penyediaan air bersih. 4. Kurangnya fasilitas air bersih menyebabkan berkurangnya jumlah santri dan ustadz di Pondok Pesantren.	1. The water source used for bathing, washing, and sanitation activities at the Islamic boarding school comes from rainwater collection systems. 2. Limited water flow and high electricity demand have been ongoing issues for several years. 3. Restrictions on the construction of deep wells in Batam City, based on Regional Regulation No. 4 of 2014 concerning Environmental Protection, have added challenges in providing clean water. 4. The lack of clean water facilities has led to a decrease in the number of students and teachers at the Islamic boarding school.
Peran Kegiatan TJSL	Role of CSR Activities
PT PELNI (Persero) telah melaksanakan Program Kolaborasi TJSL BUMN di Pondok Pesantren Darussalam Al-Gontory Batam dengan berbagai kegiatan, antara lain: 1. Melakukan konversi air laut menjadi air tawar melalui teknologi <i>Reverse Osmosis</i> (RO). 2. Menciptakan energi ramah lingkungan dengan implementasi teknologi panel surya untuk memenuhi kebutuhan listrik di Pondok Pesantren Darussalam Al-Gontory. 3. Memberikan pendampingan dalam penyusunan strategi jangka pendek dan jangka panjang berbasis partisipatif, melibatkan pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Al-Gontory melalui kerangka kerja SOAR (<i>Strength, Opportunity, Aspiration, Result</i>). 4. Melakukan social mapping kualitatif untuk mengidentifikasi peran Pondok Pesantren sebagai lembaga sosial di masyarakat.	PT PELNI (Persero) has implemented the BUMN CSR Collaboration Program at Darussalam Al-Gontory Batam Islamic boarding school through the following activities: 1. Converting seawater into fresh water using Reverse Osmosis (RO) technology. 2. Creating environmentally friendly energy by implementing solar panel technology to meet the electricity needs at Darussalam Al-Gontory . 3. Providing support in the development of short-term and long-term participatory strategies, involving the management of Darussalam Al-Gontory Islamic boarding school through the SOAR framework (Strength, Opportunity, Aspiration, Result). 4. Conducting qualitative social mapping to identify the role of the Islamic boarding school as a social institution in the community.
Pemangku Kepentingan	Stakeholders
1. Pengurus dan santri Pondok Pesantren 2. <i>Local Hero</i> 3. BUMN lain yang terlibat 4. Masyarakat sekitar Pondok Pesantren	1. Management and students of the Islamic boarding school 2. Local Heroes 3. Other involved SOEs 4. The surrounding community of the Islamic boarding school



KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

POLICY AND PLANNING OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAMS

Kurangnya Pengetahuan UMKM terkait Perizinan, Kemasan (*Packaging*), dan Pemasaran Produk

The Lack of Knowledge among SMEs regarding Permits, Packaging, and Product Marketing

Latar Belakang	Background
1. Banyak pelaku UMKM yang belum mendapatkan dukungan optimal dari pemerintah untuk mengembangkan usaha mereka sehingga kesulitan dalam naik kelas dan meningkatkan daya saing di pasar. 2. Beberapa pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam memenuhi permintaan pasar, baik dari segi kualitas produk maupun kapasitas produksi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan terkait perizinan, pengemasan produk, dan strategi pemasaran yang efektif. 3. Peraturan Walikota Bitung Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 mengenai Tata Cara Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Perseroan Terbatas (CSR) di Kota Bitung. 4. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 396/KMK.01/2022 mengenai Program Sinergi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini menyarankan kolaborasi berbagai inisiatif pemberdayaan dengan dukungan basis data UMKM yang terintegrasi dalam Daftar Sasaran Bersama (DSB) pada Program UMKM Kemenkeu Satu Tahun 2023.	1. Many MSME actors have not received optimal support from the government to develop their businesses, making it difficult for them to advance and improve their competitiveness in the market. 2. Some MSME actors face challenges in meeting market demand, both in terms of product quality and production capacity. This is due to limited knowledge regarding licensing, product packaging, and effective marketing strategies. 3. The Mayor of Bitung Regulation No. 31 of 2022 concerning the Amendment to the Mayor of Bitung Regulation No. 24 of 2015 regarding the Facilitation of Corporate Social Responsibility (CSR) in Bitung City. 4. The Minister of Finance Decree (KMK) No. 396/KMK.01/2022 regarding the Synergy Program for Empowering Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). This program suggests collaboration among various empowerment initiatives with support from integrated MSME data in the Joint Target List (DSB) for the Ministry of Finance's MSME Program in 2023.
Peran Kegiatan TJSL	Role of CSR Activities
PT PELNI (Persero) telah berperan aktif dalam pemberdayaan UMKM melalui program pelatihan di Kota Bitung. Program ini diselenggarakan bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bitung, dengan peserta sebanyak 30 UMKM, yang diisi oleh narasumber sebagai berikut: 1. Digitalisasi UKM oleh Drs. E. Lomboan 2. Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan KUMKM oleh Drs. Sikamang, M.AP 3. Pengaruh Digital dalam Peningkatan Wirausaha oleh Ir. C. Simbala 4. Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif oleh Drs. Yahya P. Gultom, M.AP 5. Pembiayaan/Permodalan Perbankan (BRI) oleh Moh. Nursan	PT PELNI (Persero) has actively participated in MSME empowerment through a training program in Bitung City. This program was organized in collaboration with the Cooperative and MSME Office of Bitung City, with 30 MSME participants and speakers including: 1. MSME Digitalization by Drs. E. Lomboan 2. Government Policy on MSME Empowerment by Drs. Sikamang, M.AP 3. The Impact of Digitalization on Entrepreneurship by Ir. C. Simbala 4. Development of Creative Economy Enterprises by Drs. Yahya P. Gultom, M.AP 5. Banking Financing/Capital (BRI) by Moh. Nursan
Pemangku Kepentingan	Stakeholders
1. Pemerintah Kota Bitung 2. Kelompok UMK 3. Pegawai PT PELNI (Persero) 4. Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara	1. Bitung City Government 2. MSME Groups 3. PT PELNI (Persero) Employees 4. Cooperative and MSME Office of North Sulawesi Province

Pemberdayaan Petani dalam Budidaya Sayuran untuk Memasok Bahan Makanan di Atas Kapal, yang dilakukan Oleh Anak Perusahaan (PT Pelita Indonesia Djaya)

The Empowerment of Farmers in Vegetable Cultivation to Supply Food Materials on Board, Carried out by the Subsidiary (PT Pelita Indonesia Djaya)

Latar Belakang	Background
Pola pertanian yang masih bersifat konvensional dan dilakukan secara turun temurun mengakibatkan kapasitas hasil pertanian yang belum optimal. 1. Modal usaha pertanian yang tergolong tinggi, mencakup biaya sewa lahan, pembelian benih atau bibit tanaman, pupuk petrokimia, pestisida, dan upah tenaga kerja yang terus meningkat. 2. Petani sering kali menghadapi risiko gagal panen serta penurunan harga jual hasil pertanian pada saat panen raya. 3. Ketersediaan pupuk petrokimia bersubsidi yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan luas lahan yang ada, sementara harga pupuk petrokimia non-subsidi masih tergolong mahal. 4. Penggunaan pupuk petrokimia dan pestisida yang diluar ketentuan dosis yang dianjurkan oleh petani, karena anggapan bahwa penggunaan pupuk yang berlebihan akan meningkatkan hasil pertanian. 5. Pola pembibitan yang masih konvensional berdampak pada durasi masa panen yang lebih panjang dan berpengaruh terhadap kualitas produk pertanian.	The conventional farming methods that have been passed down through generations result in suboptimal agricultural yields. 1. The high capital investment required for farming, including land rental, purchase of seeds or plant seedlings, petrochemical fertilizers, pesticides, and rising labor costs, presents a challenge. 2. Farmers often face the risk of crop failure and a decrease in the selling price of agricultural products during harvest season. 3. The availability of subsidized petrochemical fertilizers is insufficient to meet the needs of the land area, while non-subsidized petrochemical fertilizers remain expensive. 4. Farmers frequently use fertilizers and pesticides beyond the recommended dosages, under the belief that excessive use will increase agricultural yields. 5. The conventional seedling methods result in longer harvest periods, which affect the quality of agricultural products.

KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

POLICY AND PLANNING OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAMS

Peran Kegiatan TJSL	Role of CSR Activities
Melalui anak perusahaannya (PT Pelita Indonesia Djaya), PT PELNI (Persero) telah melaksanakan Program Desa Mandiri di Desa Sukanagalih, Cianjur, Jawa Barat. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam program tersebut: 1. Survei lapangan dan pemetaan potensi pertanian sayuran di Desa Sukanagalih. 2. Koordinasi dengan perangkat desa, kelompok tani, BUMDes, dan pihak terkait lainnya. 3. Sosialisasi program kepada kelompok tani, BUMDes, dan perangkat desa. 4. Pelatihan dan praktik pembuatan pupuk organik dan pestisida. 5. Pelatihan dan praktik pembibitan sayuran. 6. Pelatihan dan praktik budidaya sayuran. 7. Pengembangan komunitas tani melalui pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan. 8. Pelatihan dan praktik penanganan pasca panen, dan 9. Pelatihan manajemen pemasaran produk pertanian.	Through its subsidiary company (PT Pelita Indonesia Djaya), PT PELNI (Persero) has implemented the Independent Village Program in Sukanagalih Village, Cianjur, West Java. The following activities have been carried out as part of this program: 1. Conducting field surveys and mapping agricultural potential for vegetable farming in Sukanagalih Village. 2. Coordinating with village officials, farmer groups, BUMDes (Village-Owned Enterprises), and other relevant stakeholders. 3. Socializing the program to farmer groups, BUMDes, and village officials. 4. Providing training and practical sessions on the production of organic fertilizers and pesticides. 5. Offering training and practical sessions on vegetable seedling techniques. 6. Providing training and practical sessions on vegetable cultivation. 7. Developing a farming community through a collaborative and sustainable approach. 8. Offering training and practical sessions on post-harvest handling. 9. Providing training on marketing management for agricultural products.
Pemangku Kepentingan	Stakeholders
1. Petani di Desa Sukanagalih, Cianjur, Jawa Barat 2. Masyarakat sekitar Desa Sukanagalih, Cianjur, Jawa Barat 3. Anak perusahaan PT PELNI (Persero), yaitu PT Pelita Indonesia Djaya (PID) 4. Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara	1. Farmers in Sukanagalih Village, Cianjur, West Java 2. The local community surrounding Sukanagalih Village, Cianjur, West Java 3. PT PELNI (Persero) subsidiary company, PT Pelita Indonesia Djaya (PID) 4. Cooperative and MSME Office of North Sulawesi Province

Kesulitan nelayan dalam memperoleh subsidi pemerintah karena tidak memiliki Pas Kecil (surat tanda kebangsaan kapal yang penting untuk mengidentifikasi dan memastikan kapal memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah)

The difficulties faced by fishermen in obtaining government subsidies due to the lack of a Small Vessel Registration (a document crucial for identifying and ensuring that vessels meet government standards)

Latar Belakang	Background
1. Pemerintah memberikan berbagai bentuk subsidi kepada nelayan, yang meliputi permodalan, akses bahan bakar, serta program lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. 2. Pulau Barrang Caddi, yang merupakan bagian dari Kota Makassar, sangat bergantung pada aktivitas perikanan skala kecil, terutama perikanan demersal. 3. Sebagian besar masyarakat di Pulau Barrang Caddi bekerja sebagai nelayan yang menggunakan kapal kecil dalam kegiatan penangkapan ikan sehari-hari mereka.	1. The government provides various forms of subsidies to fishermen, including capital, fuel access, and other programs aimed at improving the welfare of fishermen. 2. Barrang Caddi Island, which is part of Makassar City, heavily relies on small-scale fishing activities, particularly demersal fishing. 3. The majority of the population on Barrang Caddi Island works as fishermen using small boats for their daily fishing activities.
Peran Kegiatan TJSL	Role of CSR Activities
PT PELNI (Persero) telah melaksanakan Program Fasilitasi Pas Kecil Kapal Nelayan Skala Kecil di Pulau Barrang Caddi, Makassar. Rincian kegiatan program ini adalah sebagai berikut: 1. Program ini akan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, termasuk tahap pelaporan kegiatan, dengan menggunakan 3 (tiga) metode utama, yaitu sosialisasi, pendampingan, dan penyerahan pas kecil kapal nelayan. 2. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi 100 kapal nelayan skala kecil di Pulau Barrang Caddi, Kota Makassar, agar dapat memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. 3. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan branding positif bagi PT PELNI melalui penyebaran 10 berita terkait kegiatan ini di media massa, baik lokal maupun nasional.	PT PELNI (Persero) has implemented the Small-Scale Fishermen's Vessel Registration Facilitation Program on Barrang Caddi Island, Makassar. The details of this program are as follows: 1. This program will be carried out over the course of 1 (one) month, including a reporting phase, using 3 (three) main methods: socialization, assistance, and distribution of the Small Vessel Registration (Pas Kecil) for fishermen's boats. 2. The objective of this activity is to facilitate 100 small-scale fishing boats on Barrang Caddi Island, Makassar, to meet the standards set by the government. 3. Additionally, this activity is expected to generate positive branding for PT PELNI (Persero) through the dissemination of 10 news articles related to this activity in both local and national media outlets.
Pemangku Kepentingan	Stakeholders
1. Nelayan di Pulau Barrang Caddi, Makassar 2. Dinas Perikanan Kota Makassar	1. Fishermen on Barrang Caddi Island, Makassar 2. Makassar City Fisheries Office



KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

POLICY AND PLANNING OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAMS

Keterbatasan bahan bakar fosil sebagai pemasok utama energi nasional, yang semakin mahal dan terbatas
The limited availability of fossil fuels as the main source of national energy, which is becoming more expensive and scarce

Latar Belakang	Background
Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya energi non-fosil, khususnya energi yang dapat diperbaharui, sebagai alternatif untuk menggantikan bahan bakar fosil yang semakin terbatas dan mahal. 1. Dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional, pengembangan bahan bakar alternatif yang murah, mudah diperoleh, hemat, dan dapat diproduksi secara massal, termasuk pada skala rumah tangga, perlu menjadi perhatian utama. 2. Harga bahan bakar yang murah dapat tercapai apabila bahan baku yang digunakan tersedia dalam jumlah banyak dan proses produksi menggunakan teknologi yang sederhana. Salah satu bahan bakar yang memenuhi kriteria ini adalah biogas. 3. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki potensi besar dalam sektor peternakan, terutama ternak ruminansia, sehingga dijuluki sebagai "lumbung ternak". 4. Kupang, sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki populasi ternak yang besar, dengan jumlah sapi potong mencapai 7.840 ekor, kerbau 35 ekor, dan kuda 93 ekor. Selain itu, PT PELNI (Persero) juga memiliki kapal ternak KM Camara Nusantara 1 yang melayani rute Kupang-Waingapu-Tanjung Priok.	The Indonesian government continues to strive to develop and utilize non-fossil energy sources, particularly renewable energy, as an alternative to replace increasingly limited and expensive fossil fuels. 1. In order to maintain national energy security, the development of alternative fuels that are inexpensive, readily available, cost-efficient, and capable of being mass-produced, including at the household level, must be a primary focus. 2. Affordable fuel prices can be achieved if the raw materials used are abundant and the production process utilizes simple technology. One such fuel that meets these criteria is biogas. 3. East Nusa Tenggara (NTT) province has significant potential in the livestock sector, particularly ruminant livestock, earning it the nickname "cattle barn." 4. Kupang, the capital of East Nusa Tenggara, has a large livestock population, with 7,840 beef cattle, 35 buffaloes, and 93 horses. In addition, PT PELNI (Persero) operates the livestock ship KM Camara Nusantara 1, which serves the Kupang-Waingapu-Tanjung Priok route.
Peran Kegiatan TJSL	Role of CSR Activities
PT PELNI (Persero) telah melaksanakan program Biogas di Kupang dengan rincian kegiatan sebagai berikut: 1. Pembuatan 4 (empat) unit digester biogas model Fixed Dome, yang dapat digunakan untuk mendukung aktivitas peternakan atau dimanfaatkan secara bersama oleh 1 (satu) hingga 2 (dua) keluarga peternak. 2. Pelatihan pembuatan dan perawatan digester biogas yang ditujukan kepada masyarakat setempat, untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi biogas secara mandiri. 3. Instalasi biogas diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak atau gas, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun peternakan. Selain itu, program ini juga berpotensi mengurangi biaya pembelian pupuk untuk lahan pertanian dan mengembangkan usaha kecil berskala rumah tangga. 4. Untuk melaksanakan program tersebut, PT PELNI (Persero) menggandeng Pusat Studi Pembangunan Desa (PSPD) Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRPM) Universitas Brawijaya sebagai pelaksana program.	PT PELNI (Persero) has implemented the Biogas Program in Kupang, with the following activities: 1. The construction of 4 (four) fixed dome model biogas digesters, which can support livestock activities or be used collectively by 1 (one) or 2 (two) farming families. 2. Training on the construction and maintenance of biogas digesters aimed at local communities to enhance understanding and capacity to independently utilize biogas technology. 3. The installation of biogas is expected to reduce dependence on oil or gas for both household and livestock needs. Furthermore, this program may also reduce the cost of purchasing fertilizers for agricultural land and develop small household-scale businesses. 4. To carry out this program, PT PELNI (Persero) has partnered with the Center for Village Development Studies (PSPD) of the Research and Community Service Directorate (DRPM) at Brawijaya University as the program implementer.
Pemangku Kepentingan	Stakeholders
1. Peternak sapi di Kupang 2. Masyarakat sekitar lokasi instalasi biogas 3. Local hero 4. Dinas Peternakan setempat	1. Cattle farmers in Kupang 2. Local communities around the biogas installation site 3. Local heroes 4. Local Livestock Office

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang, peran program TJSL, serta pemangku kepentingan yang dilibatkan di setiap isu eksternal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *stakeholder* utama TJSL PT PELNI (Persero) terdiri dari 6 *Key Partner* dan 1 *Key Resources* berikut:

- **Key Partner:**
 1. Pemegang Saham (Kementerian BUMN);
 2. Pemerintah dan Regulator (DPR RI, Kementerian Perhubungan);

Based on the description of the background, the role of the CSR program, and the stakeholders involved in each of these external issues, it can be concluded that the main stakeholders of the CSR program at PT PELNI (Persero) consist of 6 *Key Partners* and 1 *Key Resource* as follows:

- **Key Partners:**
 1. Shareholders (Ministry of SOEs);
 2. Government and Regulators (Indonesian House of Representatives, Ministry of Transportation);



KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

POLICY AND PLANNING OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAMS

3. Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa); 4. Lembaga dan Institusi (Sekolah/Universitas, Asosiasi, BUMDes, Yayasan, dan lainnya); 5. Masyarakat Sekitar Perusahaan (Komunitas dan UMKM); dan 6. Media • <i>Key Resources:</i> 1. Pegawai	3. Local Government (Provincial Government, Regency, Sub-district, and Village Governments); 4. Institutions and Organizations (Schools/ Universities, Associations, Village-Owned Enterprises, Foundations, and others); 5. Local Communities (Community Groups and SMEs); and 6. Media • <i>Key Resource:</i> 1. Employees

PENERAPAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

IMPLEMENTATION OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ENVIRONMENTAL PROGRAM

Penerapan Program TJSL di PT PELNI (Persero) mengacu pada 7 (tujuh) *Core Subjects* ISO 26000, yang mencakup Tata Kelola Organisasi, Hak Asasi Manusia, Praktik Ketenagakerjaan, Lingkungan Hidup, Praktik Operasi yang Adil, Isu Konsumen, serta Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat.

TATA KELOLA ORGANISASI

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dalam setiap aktivitas operasionalnya. Komitmen ini dijalankan sesuai dengan ketentuan internal Perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta mengacu pada *best practice* dalam penerapan GCG dengan berpedoman pada 5 (lima) prinsip utama, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, dan Kewajaran.

Informasi lebih lanjut mengenai penerapan GCG di lingkungan PT PELNI (Persero) dapat ditemukan pada bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The implementation of the CSR program at PT PELNI refers to the 7 (seven) *Core Subjects* of ISO 26000, which include Organizational Governance, Human Rights, Labor Practices, Environment, Fair Operating Practices, Consumer Issues, and Community Involvement and Development.

ORGANIZATIONAL GOVERNANCE

Implementation of Good Corporate Governance

The Company is committed to implementing Good Corporate Governance (GCG) in all of its operational activities. This commitment is executed in accordance with the Company's internal regulations, the applicable laws and regulations in Indonesia, and is guided by best practices in GCG, adhering to 5 (five) key principles: Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness.

Further information regarding the implementation of GCG within PT PELNI can be found in the Corporate Governance section of this Annual Report.



PENERAPAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

IMPLEMENTATION OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ENVIRONMENTAL PROGRAM

Struktur Organisasi

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur tata kelola perusahaan mencakup 3 (tiga) organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Adapun organ pengelola bidang TJSL PT PELNI (Persero) adalah Divisi Treasury, yang telah ditetapkan melalui SK Direksi PT PELNI (Persero) No. 04.17/01/SK/HKO.01/2024 tanggal 17 April 2024, tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pusat PT PELNI (Persero) (Persero).

Berikut adalah struktur organisasi Divisi Treasury C.q. Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT PELNI (Persero) pada tahun 2024:



Adapun tugas dan tanggung jawab Divisi Treasury di bidang TJSL antara lain:

1. Melakukan seleksi dan menetapkan calon Mitra Binaan secara langsung dan yang diusulkan oleh cabang PT PELNI (Persero) atau dari daftar disusun oleh BUMN Koordinator;

Organizational Structure

In accordance with Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the corporate governance structure includes 3 (three) main organs: the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors. The organ responsible for managing the CSR and environmental aspects at PT PELNI is the Treasury Division, which has been designated through the Director's Decree of PT PELNI (Persero) No. 04.17/01/SK/HKO.01/2024 dated April 17, 2024, concerning the Organizational Structure, Main Duties, and Functions of PT PELNI (Persero) Head Office.

The following is the organizational structure of the Treasury Division, specifically the Social and Environmental Responsibility Department at PT PELNI in 2024:

The duties and responsibilities of the Treasury Division in the field of CSR are as follows:

1. Conducting selection and appointing potential partners directly or as proposed by PT PELNI (Persero) branches or from a list compiled by the BUMN Coordinator;



PENERAPAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

IMPLEMENTATION OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ENVIRONMENTAL PROGRAM

2. Menyalurkan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; 3. Melakukan administrasi atas pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; 4. Menyusun dan menyampaikan perencanaan kerja dan anggaran serta laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan kepada Menteri BUMN cq. Bidang Sumber Daya Manusia BUMN, Teknologi dan Informasi - Asisten Deputi bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; 5. Melaporkan hasil audit dari auditor atas pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan kepada Menteri BUMN cq. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi; dan 6. Melaksanakan kerja sama dengan instansi Pemerintah terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.	2. Distributing CSR funds; 3. Administering the implementation of CSR programs; 4. Preparing and submitting work plans and budgets, as well as reports on the implementation of CSR programs to the Minister of State-Owned Enterprises, through the Ministry's Assistant Deputy for CSR and Environmental Responsibility; 5. Reporting the results of audits conducted by auditors regarding CSR program implementation to the Minister of State-Owned Enterprises, through the Deputy Minister for Human Resources, Technology, and Information; 6. Collaborating with relevant government agencies and Non-Governmental Organizations (NGOs) in the implementation of CSR programs.

Dengan demikian, tugas dan tanggung jawab divisi Treasury C.q. Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan mencakup pengelolaan program TJSL di bidang CID (*Community Involvement and Development*), sedangkan tugas dan tanggung jawab di bidang Non-CID berada di luar departemen TJSL.

HAK ASASI MANUSIA

Untuk menghindari potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM), PT PELNI (Persero) secara rutin melakukan uji tuntas dan penilaian risiko HAM dalam pengambilan keputusan strategis. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang dapat berdampak pada HAM, seperti kondisi kerja yang tidak layak, diskriminasi terhadap pekerja, masalah terkait kesehatan dan keselamatan kerja, serta potensi pelanggaran terhadap hak masyarakat adat dan kelompok rentan.

Selain itu, Perseroan juga memastikan untuk menghindari keterlibatan dalam tindakan yang dapat dianggap sebagai complicity (komplikasi), dengan memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnis yang dilakukan tidak mendukung atau memperburuk pelanggaran HAM, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Thus, the duties and responsibilities of the Treasury Division, specifically the CSR Department, include managing CSR programs in the field of CID (*Community Involvement and Development*), whereas the responsibilities in the Non-CID field fall outside the scope of the CSR Department.

HUMAN RIGHTS

To avoid potential human rights violations, PT PELNI regularly conducts due diligence and human rights risk assessments in strategic decision-making. This process aims to identify and mitigate risks that could impact human rights, such as poor working conditions, discrimination against workers, health and safety issues, and potential violations of the rights of indigenous peoples and vulnerable groups.

Additionally, the company ensures it avoids involvement in actions that could be considered complicity by ensuring that all business activities do not support or exacerbate human rights violations, either directly or indirectly.



PENERAPAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

IMPLEMENTATION OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ENVIRONMENTAL PROGRAM

Perusahaan juga memiliki sistem penanganan keluhan yang transparan dan objektif, dengan investigasi yang tepat dan solusi yang adil, serta menjamin tidak ada pembalasan atau intimidasi terhadap pihak yang mengajukan keluhan. PT PELNI (Persero) berkomitmen untuk memperlakukan semua karyawan secara setara, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang, jenis kelamin, atau status sosial, serta memberikan kesempatan yang sama bagi kelompok rentan, seperti perempuan dan minoritas.

Selain itu, Perusahaan menghormati hak sipil dan politik setiap individu, memberikan kebebasan untuk berbicara, beragama, dan berserikat, serta menghindari praktik pekerja anak atau kerja paksa. PT PELNI (Persero) juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar hak pekerja, memastikan akses terhadap pekerjaan yang layak, pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang memadai, serta menyediakan upah yang adil dan kesempatan pengembangan karir.

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat laporan atau insiden terkait HAM yang terjadi di lingkungan Perseroan.

PRAKTIK KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan

PT PELNI (Persero) berkomitmen untuk menciptakan hubungan kerja yang adil dan transparan, serta memberikan perlindungan sosial yang memadai bagi pekerja guna mendukung kesejahteraan mereka. Komitmen ini diwujudkan melalui forum dialog sosial antara manajemen dan Serikat Pekerja, yang memberi kesempatan bagi pekerja untuk menyampaikan aspirasi dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan kondisi kerja yang optimal.

Hak dan kewajiban masing-masing manajemen dan pegawai dipaparkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disusun dan disahkan oleh PT PELNI (Persero) bersama dengan SP PELNI. Pada tahun 2024,

The company also has a transparent and objective grievance handling system, ensuring proper investigations, fair solutions, and guarantees that no retaliation or intimidation occurs against those filing complaints. PT PELNI (Persero) is committed to treating all employees equally, without discrimination based on background, gender, or social status, and provides equal opportunities for vulnerable groups such as women and minorities.

Furthermore, the company respects the civil and political rights of every individual, ensuring freedom of speech, religion, and association, while avoiding practices like child labor or forced labor. PT PELNI also upholds fundamental labor rights principles, ensuring access to decent jobs, education, adequate healthcare, and fair wages, as well as career development opportunities.

In 2024, no reports or incidents related to human rights occurred within the company.

EMPLOYMENT PRACTICES

Employment

PT PELNI is committed to creating fair and transparent labor relations, providing adequate social protection for employees to support their welfare. This commitment is realized through social dialogue forums between management and the Workers' Union, offering employees the opportunity to express aspirations and contribute to decision-making regarding employment and optimal working conditions.

The rights and obligations of management and employees are outlined in the Collective Labor Agreement (PKB), which is drafted and ratified by PT PELNI in collaboration with the SP PELNI union. In 2024,



PENERAPAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

IMPLEMENTATION OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ENVIRONMENTAL PROGRAM

jumlah pegawai yang tercakup dalam SP PT PELNI (Persero) tercatat sebanyak 2.135 orang atau 47,10% dari total seluruh pegawai PT PELNI.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)

P2K3 dibentuk sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam mendukung penerapan K3 di lingkungan kerja, sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1970 dan Permenaker RI Nomor 04/MEN/1987. Pembentukan P2K3 juga merupakan upaya untuk memenuhi PP No. 50 Tahun 2012 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), yang mewajibkan perusahaan dengan lebih dari 100 pegawai dan risiko tinggi untuk membentuk SMK3, LH, serta P2K3.

P2K3 PT PELNI (Persero) berkoordinasi dengan SMK3 dan bertanggung jawab terhadap seluruh pegawai PT PELNI (Persero). Tugas utama P2K3 adalah memberikan saran dan pertimbangan terkait masalah K3, serta memastikan pelaporan sesuai dengan peraturan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta. Sepanjang tahun 2024, SMK3 PT PELNI (Persero) telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Audit ISM-Code, ISPS-Code, dan SMK3

PT PELNI (Persero) secara periodik melaksanakan audit K3 melalui program DPA-QHSSE, yang mencakup ISM-Code dan ISPS-Code, sesuai dengan regulasi dari *International Maritime Organization* (IMO). Regulasi ini terintegrasi dalam SOLAS 1974 Chapter IX (untuk ISM-Code) dan XI-2 (untuk ISPS-Code), serta SMK3 yang mengacu pada konvensi *International Labour Organization* (ILO) dan peraturan terkait, seperti UU No. 1 Tahun 1970 dan PP No. 50 Tahun 2012.

Fasilitas Kesehatan Pegawai

Perseroan memberikan fasilitas kesehatan bagi pegawai sesuai PKB PT PELNI (Persero) Tahun 2014, Bab XII, Pasal 57 tentang Pelayanan Fasilitas Kesehatan dan Pasal 58 tentang Keselamatan, Keamanan,

the number of employees covered by the SP PELNI union amounted to 2,135 people or 47.10% of the total employees at PT PELNI.

Occupational Health and Safety (OHS)

OHS Committee (P2K3)

The P2K3 was established as a manifestation of the company's commitment to supporting the implementation of OHS in the workplace, in accordance with Law No. 1 of 1970 and Minister of Manpower Regulation No. 04/MEN/1987. The establishment of P2K3 is also part of an effort to comply with Government Regulation No. 50 of 2012 regarding the Occupational Safety and Health Management System (SMK3), which requires companies with more than 100 employees and high risks to establish SMK3, LH, and P2K3.

The P2K3 of PT PELNI (Persero) coordinates with SMK3 and is responsible for all PT PELNI (Persero) employees. The main tasks of P2K3 are to provide advice and recommendations on OHS matters and ensure reporting in compliance with the regulations of the DKI Jakarta Department of Manpower and Transmigration. Throughout 2024, the SMK3 of PT PELNI (Persero) operated in accordance with the applicable regulations.

ISM-Code, ISPS-Code, and SMK3 Audits

PT PELNI (Persero) periodically conducts OHS audits through the DPA-QHSSE program, which includes the ISM-Code and ISPS-Code, in accordance with the regulations of the *International Maritime Organization* (IMO). These regulations are integrated into SOLAS 1974 Chapter IX (for ISM-Code) and Chapter XI-2 (for ISPS-Code), as well as SMK3, which refers to *International Labour Organization* (ILO) conventions and relevant regulations such as Law No. 1 of 1970 and Government Regulation No. 50 of 2012.

Employee Health Facilities

The company provides health facilities for employees as outlined in the PT PELNI (Persero) 2014 Collective Labor Agreement, Chapter XII, Article 57 on Health Services and Article 58 on Safety, Security, Health, and

PENERAPAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

IMPLEMENTATION OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ENVIRONMENTAL PROGRAM

Kesehatan, dan Lingkungan. Fasilitas tersebut meliputi dokter Perusahaan di klinik pegawai dekat lobby auditorium, serta asuransi kesehatan BPJS, Bringinlife, dan Jamsostek untuk pegawai dan keluarganya.

Laporan Keadaan Darurat Kapal

Jika terjadi insiden atau keadaan darurat pada salah satu kapal Perusahaan, *Management Response Team* (MRT) sebagai tim lintas direktorat akan segera mengadakan rapat untuk menindaklanjuti laporan tersebut. MRT bertugas merespons dan memberikan panduan setelah menerima laporan terkait insiden atau keadaan darurat. Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat insiden dan keadaan darurat pada kapal PT PELNI (Persero) yang dilaporkan kepada Mahkamah Pelayaran.

Sistem Manajemen Mutu

PT PELNI (Persero) menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang dirancang untuk meningkatkan jasa pelayanan transportasi kapal laut dengan fokus pada pengelolaan Pelayanan dan Keselamatan Kapal sesuai prosedur berbasis ISO 9001:2015. Ruang lingkup penetapan Sistem Manajemen Mutu adalah "*Management Procedure of Passenger Service and Safety*," dan pedoman ini digunakan sebagai manual dalam pelaksanaan sertifikasi ISO 9001:2015.

Pelatihan dan Pengembangan SDM

PT PELNI (Persero) memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pegawai untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan jabatan masing-masing. Informasi lebih lanjut mengenai program pendidikan dan pelatihan pegawai PT PELNI (Persero) tahun 2024 dapat ditemukan pada bagian Sumber Daya Manusia dalam bab Fungsi Pendukung Bisnis pada Laporan Tahunan ini.

LINGKUNGAN

Pencegahan Polusi

PT PELNI (Persero) mengimplementasikan kebijakan pencegahan polusi dalam setiap lini operasionalnya. Perusahaan bekerja sama dengan vendor bersertifikat

Environment. These facilities include company doctors at the employee clinic near the auditorium lobby, as well as BPJS health insurance, Bringinlife, and Jamsostek for employees and their families.

Emergency Ship Report

In the event of an incident or emergency on any of the company's ships, the Management Response Team (MRT), a cross-directorate team, will immediately hold a meeting to address the report. The MRT's role is to respond and provide guidance after receiving reports related to incidents or emergencies. Throughout 2024, no incidents or emergencies on PT PELNI (Persero) ships were reported to the Maritime Court.

Quality Management System

PT PELNI (Persero) applies a Quality Management System designed to enhance maritime transport services, focusing on the management of Passenger Service and Ship Safety procedures based on ISO 9001:2015 standards. The scope of the Quality Management System is defined as "*Management Procedure of Passenger Service and Safety*," and this guideline is used as a manual for ISO 9001:2015 certification.

Training and Development of Human Resources

PT PELNI (Persero) provides equal opportunities for all employees to participate in education and training programs, both internally and externally, in accordance with the company's needs and individual job requirements. More detailed information about the 2024 employee education and training programs at PT PELNI (Persero) can be found in the Human Resources section under Business Support Functions in this Annual Report.

THE ENVIRONMENTAL

Pollution Prevention

PT PELNI (Persero) implements pollution prevention policies across all operational lines. The company collaborates with certified vendors for the management



PENERAPAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

IMPLEMENTATION OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ENVIRONMENTAL PROGRAM

untuk pengelolaan dan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Kapal-kapal yang beroperasi dilengkapi dengan sistem pengolahan efluen, seperti *sewage tank dan deck scupper*, yang memastikan limbah cair yang dibuang memenuhi standar internasional MARPOL. Selain itu, Perusahaan juga memilih bahan bakar biodiesel B35 yang lebih ramah lingkungan sebagai pilihan utama dalam operasional pelayaran untuk mengurangi emisi udara.

Penggunaan Sumber Daya yang Berkelanjutan

Komitmen PT PELNI (Persero) terhadap keberlanjutan tercermin dari penggunaan sumber daya yang efisien. Peralihan ke bahan bakar biodiesel B35, yang mengandung 35% komponen terbarukan dari minyak sawit, adalah langkah penting dalam hal ini. Di tingkat operasional kantor, berbagai inisiatif efisiensi energi juga diterapkan, seperti penggunaan lampu LED. Perusahaan juga mengelola sumber daya air dengan memasang kran otomatis dan mengedukasi karyawan serta penumpang kapal tentang cara penghematan air.

Mitigasi dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

PT PELNI (Persero) menyadari pentingnya mitigasi perubahan iklim, sehingga Perusahaan melakukan penghitungan dan pelaporan emisi GRK. Perusahaan juga mematuhi regulasi terkait emisi dan berpartisipasi dalam inisiatif dekarbonisasi sektor maritim. Penggunaan bahan bakar rendah karbon dan optimalisasi rute pelayaran untuk mengurangi konsumsi energi menjadi fokus utama dalam operasional Perusahaan. Selain itu, PT PELNI terus memperbarui sistem pemantauan cuaca dan kondisi laut untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap operasi pelayaran.

Perlindungan Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati

Kebijakan perlindungan lingkungan PT PELNI (Persero) mencakup desain rute pelayaran yang menghindari kawasan konservasi dan habitat sensitif. Perusahaan turut berperan dalam program restorasi ekosistem

and disposal of hazardous and toxic waste (B3). Operating ships are equipped with effluent treatment systems, such as sewage tanks and deck scuppers, ensuring that liquid waste disposal meets international MARPOL standards. Additionally, the company opts for environmentally friendly biodiesel B35 fuel to reduce air emissions.

Sustainable Resource Use

PT PELNI (Persero) commitment to sustainability is reflected in efficient resource use. The transition to biodiesel B35 fuel, which contains 35% renewable palm oil components, is a significant step in this regard. At the operational office level, energy efficiency initiatives such as LED lighting are implemented. The company also manages water resources by installing automatic faucets and educating employees and ship passengers on water conservation.

Climate Change Mitigation and Adaptation

PT PELNI (Persero) recognizes the importance of mitigating climate change, and therefore, the company calculates and reports its greenhouse gas emissions. The company complies with emissions regulations and participates in decarbonization initiatives in the maritime sector. Using low-carbon fuel and optimizing shipping routes to reduce energy consumption are key focuses in the company's operations. Additionally, PT PELNI continuously updates weather and sea condition monitoring systems to anticipate climate change impacts on maritime operations.

Environmental and Biodiversity Protection

PT PELNI (Persero) environmental protection policy includes designing shipping routes that avoid conservation areas and sensitive habitats. The company participates in ecosystem restoration programs such



PENERAPAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

IMPLEMENTATION OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ENVIRONMENTAL PROGRAM

seperti rehabilitasi terumbu karang dan penanaman mangrove, yang melibatkan kolaborasi dengan akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. Perseroan juga memastikan bahwa operasionalnya mematuhi peraturan perlindungan lingkungan hidup melalui pemantauan isu-isu eksternal yang relevan.

as coral reef rehabilitation and mangrove planting, involving collaboration with academics, local governments, and communities. The company also ensures that its operations comply with environmental protection regulations through monitoring relevant external issues.

PRAKTIK BISNIS YANG ADIL

Anti-Korupsi

PT PELNI (Persero) menerapkan kebijakan anti-korupsi dan pengendalian gratifikasi berdasarkan Pedoman Perilaku dan Etika (Code of Conduct), serta mengimplementasikan ISO 37001 - Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah dan menangani praktik korupsi, termasuk gratifikasi, suap, dan pencucian uang, dalam interaksi antara pegawai dan pemangku kepentingan. Untuk mendukung kebijakan ini, Perseroan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan.

Sebagai wujud komitmen untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi dan gratifikasi, PT PELNI (Persero) mengeluarkan maklumat Penandatanganan Kesepakatan Anti-Penyuapan pada 7 Juni 2020, yang mewajibkan seluruh pegawai untuk menandatangani pakta integritas yang melarang segala bentuk praktik korupsi, serta menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan anti-korupsi secara berkala. Melalui berbagai upaya tersebut, tidak terdapat insiden korupsi yang terbukti melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, maupun pegawai aktif pada tahun 2024.

Keterlibatan Politik yang Bertanggung Jawab

Setiap individu di PT PELNI (Persero) memiliki hak untuk berkumpul, berserikat, berorganisasi, serta menyalurkan aspirasi politik dan sosial. Perseroan tidak akan mempengaruhi partisipasi individu dalam politik, dan segala konsekuensi akibat keterlibatan politik menjadi tanggung jawab pegawai tersebut. Pegawai

FAIR BUSINESS PRACTICES

Anti-Corruption

PT PELNI (Persero) implements an anti-corruption policy and controls gratification based on its Code of Conduct, and has implemented ISO 37001 - Anti-Bribery Management System (ABMS). This policy aims to prevent and address corruption practices, including gratification, bribery, and money laundering, in interactions between employees and stakeholders. To support this policy, the company has established an independent Gratification Control Unit (UPG) responsible directly to the Risk Management & Compliance division.

As part of its commitment to creating a corruption-free environment, PT PELNI (Persero) issued a Declaration on Anti-Bribery Commitment on June 7, 2020, requiring all employees to sign an integrity pact prohibiting all forms of corruption practices. The company also regularly holds anti-corruption socialization and training. As a result of these efforts, no corruption incidents involving the Board of Commissioners, Directors, or active employees were reported in 2024.

Responsible Political Participation

Every individual at PT PELNI (Persero) has the right to assemble, associate, organize, and express political and social aspirations. The company does not influence individuals' political participation, and any consequences of such involvement are the responsibility of the employee. Employees who run for



PENERAPAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

IMPLEMENTATION OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ENVIRONMENTAL PROGRAM

yang mencalonkan diri sebagai pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif harus non-aktif selama masa pencalonan, dan harus mengundurkan diri jika terpilih. Berikut adalah prosedur yang harus dipatuhi oleh setiap pegawai terkait dengan keterlibatan dalam kegiatan politik:

1. Meminta izin kepada atasan dan memberitahukan Divisi SDM/Direktur SDM & Umum, serta cc Divisi Kesekretariatan Perusahaan jika terlibat aktif dalam partai politik, baik sebagai anggota maupun pengurus.
2. Menjaga citra dan reputasi Perusahaan selama terlibat dalam kegiatan politik.

Adapun hal-hal yang harus dihindari oleh setiap pegawai terkait keterlibatan politik adalah sebagai berikut:

1. Mengatasnamakan PT PELNI (Persero) dalam aktivitas politik.
2. Menggunakan dana, harta benda, fasilitas, atau sumber daya Perusahaan untuk kegiatan politik.
3. Menggunakan atribut partai politik atau melakukan kampanye politik di lingkungan kerja.

Persaingan yang Sehat

Perseroan berkomitmen untuk menjaga persaingan sehat dalam industri angkutan laut. Sebagai BUMN yang melayani seluruh wilayah Indonesia, PT PELNI (Persero) bertanggung jawab untuk menciptakan pasar yang adil dan kompetitif serta menghindari praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Setiap kebijakan yang diterapkan bertujuan untuk memberikan akses yang setara bagi seluruh pihak dalam pasar angkutan laut.

Dalam rangka mendukung perkembangan sektor transportasi laut yang inklusif dan berkeadilan, Perseroan juga berkolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta untuk terus berinovasi, meningkatkan daya saing, serta menghindari kesepakatan tidak wajar yang dapat merugikan pelanggan. Melalui berbagai upaya tersebut, tidak terdapat kasus terkait praktik monopoli yang dilakukan oleh PT PELNI (Persero) pada tahun 2024.

political party positions or legislative seats must be non-active during the candidacy period and must resign if elected. The procedures to be followed by employees regarding political involvement are as follows:

1. Seek permission from their supervisor and notify the HR Department/Director of HR & General Affairs, with a cc to the Corporate Secretariat if actively involved in political parties as members or officials.
2. Maintain the company's image and reputation while engaging in political activities.

Employees are prohibited from:

1. Using PT PELNI (Persero) name in political activities.
2. Using company funds, property, facilities, or resources for political activities.
3. Using political party attributes or conducting political campaigns at the workplace.

Healthy Competition

The company is committed to maintaining fair competition in the maritime transport industry. As a state-owned enterprise serving all regions of Indonesia, PT PELNI (Persero) is responsible for creating a fair and competitive market while avoiding monopoly practices and unhealthy competition. All policies implemented aim to provide equal access to all parties in the maritime transport market.

In support of an inclusive and equitable maritime transport sector, the company collaborates with the government and private sector to innovate, improve competitiveness, and avoid unfair agreements that may harm customers. No cases of monopoly practices by PT PELNI (Persero) were reported in 2024.

PENERAPAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

IMPLEMENTATION OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ENVIRONMENTAL PROGRAM

Mendorong Penerapan Tanggung Jawab Sosial dalam Rantai Nilai

PT PELNI (Persero) bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk memperluas dampak positif sosial dan lingkungan. Dengan melibatkan mitra bisnis dan pemasok, Perusahaan memastikan operasionalnya mendukung keberlanjutan, termasuk pengurangan dampak lingkungan dan penciptaan nilai sosial. Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan, serta mendorong pengembangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Penghormatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Sebagai bagian dari komitmen terhadap praktik bisnis yang adil, Perseroan berfokus pada penghormatan dan perlindungan HKI, baik yang dimiliki sendiri maupun oleh pihak ketiga. Seluruh produk, teknologi, dan desain yang digunakan dalam operasional Perusahaan diperoleh secara sah dan terdaftar sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran HKI dan menciptakan ekosistem bisnis yang transparan. Selain itu, PT PELNI (Persero) juga memberikan edukasi kepada pegawai mengenai pentingnya penghormatan terhadap HKI dan dampak hukum yang dapat timbul akibat pelanggaran HKI. Hal ini dilakukan untuk mendukung perkembangan inovasi yang berkelanjutan serta memastikan bahwa penggunaan HKI selalu dilakukan secara etis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

ISU KONSUMEN

PT PELNI (Persero) berkomitmen untuk memastikan pemasaran yang adil dalam layanan pelayaran, memberikan informasi yang akurat dan tidak bias mengenai jadwal keberangkatan, harga tiket, dan fasilitas yang tersedia, serta memastikan bahwa praktik kontrak dengan pelanggan dijalankan secara transparan dan adil. Perusahaan juga melindungi kesehatan dan keselamatan pelanggan dengan memastikan bahwa seluruh armada kapal memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan, serta menyediakan fasilitas medis dan perlindungan lainnya selama perjalanan laut.

Promoting the Implementation of CSR in the Value Chain

PT PELNI (Persero) collaborates with stakeholders to expand the positive social and environmental impacts of its operations. By involving business partners and suppliers, the company ensures its operations support sustainability, including reducing environmental impact and creating social value. This collaboration aims to deliver greater benefits to communities and the environment, while fostering inclusive and sustainable development.

Intellectual Property Rights (IPR) Respect

As part of its commitment to fair business practices, the company focuses on respecting and protecting IPR, both its own and that of third parties. All products, technologies, and designs used in company operations are acquired legally and registered in accordance with applicable laws. This aims to prevent IPR violations and create a transparent business ecosystem. PT PELNI (Persero) also educates its employees about the importance of respecting IPR and the legal consequences of IPR violations. This is done to support sustainable innovation development and ensure that IPR use is always ethical and in compliance with regulations.

CONSUMER ISSUES

PT PELNI (Persero) is committed to ensuring fair marketing practices in its maritime services, providing accurate and unbiased information about departure schedules, ticket prices, and available facilities, and ensuring that contractual practices with customers are conducted transparently and fairly. The company also protects the health and safety of passengers by ensuring that all ships meet safety standards, and by providing medical facilities and other protections during sea travel.



PENERAPAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

IMPLEMENTATION OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ENVIRONMENTAL PROGRAM

Pusat Pengaduan Konsumen

Perseroan berkomitmen penuh terhadap perlindungan konsumen dengan membentuk pusat pengaduan konsumen yang terintegrasi dan mudah diakses. Melalui pusat pengaduan ini, Perseroan menyediakan layanan konsumen yang responsif dan dukungan yang memadai, serta memastikan mekanisme penyelesaian keluhan dan perselisihan yang adil, transparan, dan cepat. Seluruh pengaduan dan keluhan konsumen ditangani dengan serius tanpa adanya pembalasan atau intimidasi terhadap pihak yang mengajukan keluhan.

Sebagai wujud implementasi, mekanisme penyampaian serta tindak lanjut dari pengaduan dan keluhan pelanggan diatur dalam SK Direksi No. 04.28/03/SK/HKO.01/2016 tentang Penetapan Standard Operating Procedures (SOP) Contact Center Info PT PELNI (Persero), yang mengatur tentang standar pelayanan pelanggan melalui "Info PELNI 162". PT PELNI (Persero) menyediakan layanan contact center sebagai pusat pengaduan konsumen melalui berbagai saluran berikut:

 021-162 atau 162

 pelni162

 PELNI Point (Fan Page: Pelayaran Nasional Indonesia)

 @pelni162_ID

Consumer Complaint Center

The Company is fully committed to consumer protection by establishing an integrated and easily accessible consumer complaint center. Through this center, the Company provides responsive customer service and adequate support, ensuring a fair, transparent, and prompt mechanism for resolving complaints and disputes. All consumer complaints and grievances are handled seriously, without any retaliation or intimidation toward the complainants.

As a form of implementation, the procedures for submitting and following up on customer complaints and grievances are regulated in the Board of Directors' Decree No. 04.28/03/SK/HKO.01/2016 concerning the Establishment of Standard Operating Procedures (SOP) for the PT PELNI (Persero) Info Contact Center, which governs the standards of customer service through "Info PELNI 162." PT PELNI (Persero) provides a contact center service as the consumer complaint center through the following channels:

 PELNI162

 INFO PELNI162

 PT. PELNI (Persero)

 infopelni162@pelni.co.id

PT PELNI (Persero) berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan data pribadi pelanggan dan hanya menggunakan informasi sesuai peraturan yang berlaku. Perusahaan juga memastikan akses layanan transportasi laut yang aman, terjangkau, serta meningkatkan edukasi dan kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka, keselamatan pelayaran, pengelolaan lingkungan, dan hak penumpang.

PT PELNI (Persero) is committed to safeguarding the confidentiality of customer personal data and utilizing information in accordance with applicable regulations. The company also ensures safe and affordable maritime transportation services and works to enhance consumer education and awareness regarding their rights, maritime safety, environmental management, and passenger rights.



PENERAPAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

IMPLEMENTATION OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ENVIRONMENTAL PROGRAM

Program Peningkatan Layanan kepada Konsumen

Pada tahun 2024, PT PELNI (Persero) melaksanakan program TJSL berupa pemberian bantuan tiket kapal kepada pelajar dan relawan. Program ini merupakan wujud nyata komitmen Perusahaan dalam meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen, khususnya dalam hal aksesibilitas dan keterjangkauan layanan transportasi laut. Melalui pemberian bantuan tiket gratis dan/atau bersubsidi, Perseroan memberikan kemudahan bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk tetap dapat memanfaatkan layanan kapal penumpang PT PELNI (Persero) dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pengabdian masyarakat. Hal ini sekaligus memperluas jangkauan layanan Perusahaan kepada segmen pengguna jasa yang selama ini kurang terlayani secara optimal.

Kegiatan ini dilaksanakan di berbagai wilayah, antara lain Kendari, Makassar, Jakarta, dan Papua. Melalui pendekatan yang bersifat langsung terhadap konsumen, program ini secara konkret menjadi bagian dari strategi peningkatan layanan PT PELNI (Persero) yang mengedepankan prinsip inklusivitas dan kebermanfaatan sosial. Adapun total biaya yang telah dikeluarkan untuk pelaksanaan program ini sepanjang tahun 2024 tercatat sebesar Rp128,75 juta. Program ini mencerminkan sinergi antara fungsi pelayanan publik dan tanggung jawab sosial perusahaan, sekaligus memperkuat citra PT PELNI (Persero) sebagai penyedia layanan transportasi laut yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

PELIBATAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

PT PELNI (Persero) berperan aktif dalam pelibatan dan pengembangan masyarakat di sekitar Perusahaan dengan meningkatkan akses pendidikan dan mendukung pelestarian budaya lokal. Sebagai bagian dari upaya pemberdayaan, Perusahaan membuka peluang kerja dan membantu masyarakat dalam mengembangkan keterampilan yang relevan di dunia kerja. Selain itu, Perseroan juga menyediakan akses teknologi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Customer Service Improvement Program

In 2024, PT PELNI (Persero) implemented a Corporate Social Responsibility (CSR) program in the form of providing ship ticket assistance to students and volunteers. This program represents the Company's tangible commitment to enhancing the quality of service to customers, particularly in terms of accessibility and affordability of maritime transportation services. By offering free and/or subsidized ticket assistance, the Company facilitates economically disadvantaged groups to continue utilizing PT PELNI (Persero) passenger ship services in support of educational activities and community service. This initiative also expands the Company's service reach to customer segments that have previously been underserved.

The activities were carried out in various regions, including Kendari, Makassar, Jakarta, and Papua. Through a direct consumer engagement approach, this program concretely forms part of PT PELNI (Persero) service improvement strategy, which prioritizes principles of inclusivity and social benefit. The total expenditure for the implementation of this program throughout 2024 was recorded at IDR 128.75 million. This program reflects a synergy between public service functions and corporate social responsibility, while also strengthening PT PELNI (Persero) image as a maritime transportation provider responsive to community needs.

COMMUNITY INVOLVEMENT AND DEVELOPMENT

PT PELNI (Persero) plays an active role in the engagement and development of the surrounding community by improving access to education and supporting the preservation of local culture. As part of its empowerment efforts, the company creates job opportunities and assists the community in developing relevant skills for the workforce. In addition, the company also provides access to technology aimed at improving community well-being.



Melalui program TJSL yang dijalankan, Perseroan turut berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Tidak hanya itu, PT PELNI (Persero) juga berperan dalam peningkatan sistem kesehatan di komunitas yang dilayani, serta berinvestasi dalam program-program yang mendukung pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Informasi lebih lanjut mengenai pelibatan dan pengembangan masyarakat dalam program TJSL yang dijalankan oleh PT PELNI pada tahun 2024 dapat ditemukan dalam subbab Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2024 pada bab Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Laporan Tahunan ini.

Through the Corporate Social Responsibility and Environment (CSR) program, the company contributes to increasing community income. Moreover, PT PELNI (Persero) is also involved in enhancing the healthcare system in the served communities and investing in programs that support social development and overall community welfare.

Further information regarding community involvement and development in the CSR program implemented by PT PELNI in 2024 can be found in the 2024 Corporate Social Responsibility and Environmental Program section of the Social and Environmental Responsibility chapter in this Annual Report.

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TAHUN 2024

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAM IN 2024

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis program, yaitu:

1. CID

Program TJSL yang dikelola oleh Departemen TJSL dan berfokus pada salah satu dari 7 Core Subjects ISO 26000, yaitu "*Community Involvement and Development*", yang mencakup program keterlibatan dan pengembangan masyarakat secara langsung.

a. CID Non-PUMK

Program ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan sosial yang tidak melibatkan pemberian permodalan langsung kepada UMK. Beberapa program TJSL CID Non-PUMK juga dikategorikan ke dalam salah satu atau beberapa program berikut:

- **CSV (Creating Shared Value)**
CSV adalah konsep strategis dalam program TJSL yang bertujuan untuk menciptakan nilai bersama bagi

The Company's Social and Environmental Responsibility (CSR) program is categorized into 2 (two) types of programs, namely:

1. CID

The CSR program managed by the CSR Department focuses on one of the 7 Core Subjects of ISO 26000, specifically "*Community Involvement and Development*," which includes programs for direct community involvement and development.

a. Non-PUMK CID

This program focuses on community empowerment through social activities that do not involve direct capital funding for Small and Medium Enterprises (SMEs). Some Non-PUMK CID CSR programs are also categorized into one or more of the following programs:

- **CSV (Creating Shared Value)**
CSV is a strategic concept within the CSR program that aims to create shared value for the Company, society, and the



Perusahaan, masyarakat, dan lingkungan secara simultan.

- **Program Unggulan**

Program keterlibatan dan pengembangan masyarakat yang menjadi program TJSL unggulan bagi Perusahaan dan memiliki dampak signifikan.

- **Program Prioritas**

Program TJSL BUMN yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN untuk mencapai dampak yang nyata dan berkelanjutan. Program ini terdiri dari Program Prioritas Pendidikan, Prioritas Lingkungan, dan Pengembangan UMK.

b. PUMK (Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil)

Program dari Kementerian BUMN yang bertujuan memberikan kemudahan akses permodalan bagi pelaku UMK.

2. Non-CID

Program TJSL ini berfokus pada *Core Subjects* ISO 26000 di luar CID dan dikelola oleh unit atau divisi yang berbeda dari Departemen TJSL. Program ini tidak melibatkan masyarakat secara langsung, melainkan lebih berfokus pada struktur internal Perusahaan, seperti tata kelola organisasi, hak asasi manusia, praktik tenaga kerja, operasi yang adil, isu konsumen, dan lingkungan internal.

Setiap program tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam 4 (empat) Pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berikut:

environment simultaneously.

- **Excellence Program**

This is a community involvement and development program that serves as the Company's excellence CSR program and has a significant impact.

- **Priority Program**

The SOEs priority program set by the Ministry of SOEs to achieve real and sustainable impacts. This program consists of the Education Priority Program, Environmental Priority Program, and SME Development Program.

b. PUMK (Micro and Small Business Funding)

This program from the Ministry of SOEs aims to provide easier access to funding for micro and small business players.

2. Non-CID

This CSR program focuses on Core Subjects of ISO 26000 outside of CID and is managed by a unit or division different from the CSR Department. This program does not directly involve the community but instead focuses on the internal structure of the Company, such as organizational governance, human rights, labor practices, fair operations, consumer issues, and internal environmental matters.

Each of these programs is then grouped into 4 (four) Sustainable Development Goals (SDG) pillars as follows:





PROGRAM TJSL TAHUN 2024

Seluruh dana program TJSL yang direalisasikan oleh Perseroan pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp37,43 miliar, yang mencapai 98,25% dari target RKAP, atau meningkat sebesar 46,49% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang mencapai Rp25,55 miliar. Berikut adalah perbandingan antara target dan realisasi penyaluran seluruh dana TJSL dalam 2 (dua) tahun terakhir:

CSR PROGRAM IN 2024

The total funds for the CSR program disbursed by the Company in 2024 amounted to Rp37.43 billion, which is 98.25% of the RKAP target, representing an increase of 46.49% compared to the realization in 2023, which was Rp25.55 billion. Below is a comparison between the target and the actual disbursement of all CSR funds in the last 2 (two) years:

Program Programs	2024			2023			YoY 2023 2024 (%)
	Anggaran Budget (Rp)	Realisasi Realization (Rp)	Pemenuhan Fulfillment (%)	Anggaran Budget (Rp)	Realisasi Realization (Rp)	Pemenuhan Fulfillment (%)	
1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5	8=3/6
Pilar Sosial Social Pillar							
CID Non-PUMK	3.280.000.000	3.279.170.904	99,97	3.050.000.000	3.151.410.457	103,32	4,05
Non-CID	23.878.446.250	23.986.067.959	100,45	16.792.000.000	15.243.938.828	90,78	57,35
Total Pilar Sosial Total Social Pillar	27.158.446.250	27.265.238.863	100,39	19.842.000.000	18.395.349.285	92,71	48,22
Pilar Ekonomi Economic Pillar							
CID Non-PUMK	2.520.000.000	2.445.142.696	97,03	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	144,51



PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TAHUN 2024

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAM IN 2024

Program Programs	2024			2023			YoY 2023 2024 (%)
	Anggaran Budget (Rp)	Realisasi Realization (Rp)	Pemenuhan Fulfillment (%)	Anggaran Budget (Rp)	Realisasi Realization (Rp)	Pemenuhan Fulfillment (%)	
1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5	8=3/6
PUMK	1.200.000.000	1.200.000.000	100,00	1.650.000.000	1.650.000.000	100,00	(27,27)
Total Pilar Ekonomi Total Economic Pillar	3.720.000.000	3.645.142.696	97,99	2.650.000.000	2.650.000.000	100,00	37,55
Pilar Lingkungan Environmental Pillar							
CID Non-PUMK	2.200.000.000	2.275.686.400	103,44	2.750.000.000	2.648.589.543	96,31	(14,08)
Non-CID	697.000.000	648.609.000	93,06	390.000.000	472.510.000	121,16	37,27
Total Pilar Lingkungan Total Environmental Pillar	2.897.000.000	2.924.295.400	100,94	3.140.000.000	3.121.099.543	99,40	(6,31)
Pilar Hukum dan Tata Kelola Legal and Governance Pillar							
CID Non-PUMK	100.000.000	100.000.000	100,00	100.000.000	100.000.000	100,00	0,00
Non-CID	4.220.000.000	3.495.000.000	82,82	1.570.000.000	1.284.534.632	81,82	172,08
Total Pilar Hukum dan Tata Kelola Total Legal and Governance Pillar	4.320.000.000	3.595.000.000	83,22	1.670.000.000	1.384.534.632	82,91	159,65
Grand Total	38.095.446.250	37.429.676.959	98,25	27.302.000.000	25.550.983.460	93,59	46,49

Berikut adalah uraian singkat mengenai pelaksanaan program TJSL pada tahun 2024 yang dikelompokkan berdasarkan 4 (empat) pilar TPB:

Program yang tercakup dalam pilar sosial meliputi pengembangan pendidikan, perbaikan kesehatan, dan pengembangan seni budaya. Adapun pilar ekonomi berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, program PUMK, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Sedangkan pilar lingkungan mencakup berbagai aktivitas pelestarian dan pengelolaan lingkungan serta sertifikasi ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan. Adapun pilar hukum dan tata kelola mencakup penerapan prinsip-prinsip GCG, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program.

Here is a brief description of the implementation of the CSR program in 2024, categorized based on the 4 (four) pillars of the SDGs:

The programs encompassed within the social pillar include the development of education, improvement of healthcare, and the promotion of arts and culture. The economic pillar focuses on community economic empowerment, MSEs programs, and the creation of sustainable employment opportunities. Meanwhile, the environmental pillar covers various activities related to environmental conservation and management, as well as the implementation of ISO 14001:2015 Environmental Management System certification. The legal and governance pillar involves the implementation of GCG principles, as well as enhancing accountability and transparency in resource management and program execution.



PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TAHUN 2024

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAM IN 2024

Berikut adalah uraian singkat mengenai pelaksanaan program TJSL pada tahun 2024 yang dikelompokkan berdasarkan 4 (empat) pilar TPB:

Here is a brief description of the implementation of the CSR program in 2024, categorized based on the 4 (four) pillars of the SDGs:

Pilar Sosial Social Pillar



Tanpa Kemiskinan No Poverty

- Bantuan Donor Darah dan Santunan Anak Yatim dalam rangka HUT POMAL ke-78 (Maluku Utara)
- Bantuan Mudik Gratis Rute Balikpapan-Surabaya dengan KM Labobar (Kalimantan Timur)
- Bantuan Mudik Gratis 4 Tiket Rute Jakarta-Sorong (DKI Jakarta)
- Bantuan Mudik Gratis Rute Balikpapan-Surabaya dengan KM Labobar (Maluku Utara)
- Kontribusi dalam Peringatan HUT Armada ke-79 Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut Merauke (Papua)
- Bantuan Makan Bergizi Gratis untuk SMKN Restorasi, Pulau Komodo (NTT)
- Bantuan Sembako untuk Cabang Labuan Bajo (NTT)
- Blood Donation Assistance and Orphan Aid in Commemoration of the 78th POMAL Anniversary (North Maluku)
- Free Eid Travel Assistance on the Balikpapan-Surabaya Route with KM Labobar (East Kalimantan)
- Free Eid Travel Assistance: 4 Tickets for the Jakarta-Sorong Route (DKI Jakarta)
- Free Eid Travel Assistance on the Balikpapan-Surabaya Route with KM Labobar (North Maluku)
- Contribution to the 79th Fleet Anniversary Commemoration, Commanding Officer of the Main Naval Base Merauke (Papua)
- Free Nutritious Meal Assistance for SMKN Restoration, Komodo Island (East Nusa Tenggara)
- Food Package Assistance for the Labuan Bajo Branch (East Nusa Tenggara)



Tanpa Kelaparan Zero Hunger

- Bantuan Kegiatan Ramadhan 1445 H oleh Bakis PT PELNI (Persero) Tahun 2024 (DKI Jakarta)
- Pembayaran Jasa EO untuk Kegiatan Safari Ramadhan BUMN Tahun 2024 di Pare-Pare (Sulawesi Selatan)
- Bantuan Hewan Qurban dalam Rangka Idul Adha 1445 H (DKI Jakarta)
- Bantuan Hewan Qurban dalam Rangka Idul Adha 1445 H di Medan (Sumatera Utara)
- Bantuan Hewan Qurban dalam Rangka Idul Adha 1445 H di Labuan Bajo (NTT)
- Pembayaran Pengadaan Komoditas Pangan dalam Kegiatan Sembako Murah "Safari Ramadhan" di Pare-Pare Bulan Maret 2024 (Sulawesi Selatan)
- Program Bantuan Kegiatan Kepedulian Sosial di Bidang Kesehatan untuk Masyarakat di Surabaya (Jawa Timur)
- Bantuan Bencana Alam Gunung Meletus Lewotobi Laki-Laki di Lantuka (NTT)
- Bantuan Dana Sembako kepada Panti Asuhan St. Vincentius Yayasan Bhakti Luhur Merauke Oikumene (Papua Selatan)
- Assistance for Ramadan Activities 1445 H by Bakis PT PELNI (Persero) Year 2024 (DKI Jakarta)
- Payment for EO Services for BUMN Ramadan Safari Activities in Pare-Pare (South Sulawesi) Year 2024
- Assistance for Qurban Animals in Commemoration of Idul Adha 1445 H (DKI Jakarta)
- Assistance for Qurban Animals in Commemoration of Idul Adha 1445 H in Medan (North Sumatra)
- Assistance for Qurban Animals in Commemoration of Idul Adha 1445 H in Labuan Bajo (East Nusa Tenggara)
- Payment for Procurement of Food Commodities in the Cheap Staple Food Program "Ramadan Safari" in Pare-Pare March 2024 (South Sulawesi)
- Social Welfare Program Assistance in the Field of Health for the Community in Surabaya (East Java)
- Assistance for the Natural Disaster of the Eruption of Mount Lewotobi Laki-Laki in Lantuka (East Nusa Tenggara)
- Assistance for Staple Food Funds to St. Vincentius Orphanage Foundation Bhakti Luhur Merauke Oikumene (South Papua)



PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TAHUN 2024

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAM IN 2024



Kehidupan Sehat dan Sejahtera Good Health and Well-Being

- Bantuan Sosial Sembako untuk Korban Bencana Gunung Lewotobi (NTT)
- Bantuan Bencana Alam Banjir di Demak (Jawa Tengah)
- Pembayaran Termin II Pengadaan Mobil Ambulans untuk Masjid Al Haq, Lumbu Ganti (Sulawesi Tengah)
- Tes Urine bagi ABK KM Bukit Siguntang dan KM Tidar (Sulawesi Selatan)
- Kampanye Perubahan Iklim dengan Pembagian Tumbler Sebagai Ganti Botol Plastik (Sulawesi Selatan)
- Bantuan Bencana Banjir di Kendari (Sulawesi Tenggara)
- Pembayaran Termin III Pengadaan Mobil Ambulans untuk Masjid Al Haq, Lumbu Ganti (Sulawesi Tengah)
- Bantuan Air Bersih untuk Bencana Banjir dan Tanah Longsor (Sumatera Barat)
- Bantuan *Life Jacket* di Kumai (Kalimantan Tengah)
- Bantuan Kursi Roda untuk Fasilitas Pelayanan Penumpang Prioritas di PT PELNI Batam (Kepulauan Riau)
- Bantuan Pengiriman Kursi Roda ke Flores (NTT)
- Pengiriman Bantuan Baju Layak Pakai ke Luwu (Sulawesi Selatan)
- Bantuan Kemanusiaan untuk Bencana Alam Banjir Bandang (Gorontalo)
- Bantuan *Life Jacket* dalam Rangka Peringatan Harhubnas (Maluku Utara)
- Bantuan Program Bulan Dana PMI Kabupaten Kepulauan Seribu (DKI Jakarta)
- Pembayaran Tiket Program TJSL Dukungan Transportasi Jetliner dalam Program Sapa Pulau 2.0 Kendari-Wakatobi untuk 79 Orang (Sulawesi Tenggara)
- Pembayaran Tiket Program TJSL Dukungan Transportasi Jetliner dalam Program Fastra Kendari-Wakatobi untuk 8 Orang (Sulawesi Tenggara)
- Program Bantuan Kegiatan Kepedulian Sosial di Bidang Kesehatan untuk Masyarakat di Surabaya (Jawa Timur)
- Bantuan 100 *Life Jacket* di Sorong (Papua Barat)
- Kegiatan Tes Urine ABK KM Labobar dan KM Egon di Surabaya (Jawa Timur)
- Bantuan Dana TJSL untuk Korban Bencana Kebakaran di Kemayoran (DKI Jakarta)
- Bantuan Pengiriman Bantuan untuk Bencana Lewotobi (Sulawesi Selatan)
- Social Assistance for the Victims of Mount Lewotobi Disaster (NTT)
- Natural Disaster Assistance for Flood Victims in Demak (Central Java)
- Second Term Payment for the Procurement of Ambulance Vehicles for Al Haq Mosque, Lumbu Ganti (Central Sulawesi)
- Urine Test for Crew Members of KM Bukit Siguntang and KM Tidar (South Sulawesi)
- Climate Change Campaign with the Distribution of Tumblers as a Replacement for Plastic Bottles (South Sulawesi)
- Flood Disaster Assistance in Kendari (Southeast Sulawesi)
- Third Term Payment for the Procurement of Ambulance Vehicles for Al Haq Mosque, Lumbu Ganti (Central Sulawesi)
- Clean Water Assistance for Flood and Landslide Disasters (West Sumatra)
- Life Jacket Assistance in Kumai (Central Kalimantan)
- Wheelchair Assistance for Priority Passenger Services at PT PELNI Batam (Riau Islands)
- Wheelchair Delivery Assistance to Flores (NTT)
- Sending Clothing Assistance to Luwu (South Sulawesi)
- Humanitarian Assistance for Flash Floods (Gorontalo)
- Life Jacket Assistance for the National Transportation Day Celebration (North Maluku)
- Support for the PMI Fundraising Program in the Thousand Islands Regency (DKI Jakarta)
- Ticket Payment for the CSR Jetliner Transportation Support Program in the Sapa Pulau 2.0 Kendari-Wakatobi Program for 79 People (Southeast Sulawesi)
- Ticket Payment for the CSR Jetliner Transportation Support Program in the Fastra Kendari-Wakatobi Program for 8 People (Southeast Sulawesi)
- Social Responsibility Program Assistance for Health Activities for the Community in Surabaya (East Java)
- Assistance of 100 Life Jackets in Sorong (West Papua)
- Urine Test Activities for Crew Members of KM Labobar and KM Egon in Surabaya (East Java)
- CSR Fund Assistance for Fire Victims in Kemayoran (DKI Jakarta)
- Assistance for the Delivery of Aid to Lewotobi Disaster Victims (South Sulawesi)

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TAHUN 2024

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAM IN 2024



Pendidikan Berkualitas Quality Education

- Bantuan Rehabilitasi Kamar Mandi SMP Swasta GKPS 06 Haranggaol (Sumatera Utara)
- Bantuan Dukungan Dana TJSL PT PELNI (Persero) untuk Kegiatan Pengelolaan Madrasah Diniyah Takmiliyah Amaliyah, Yayasan Nurul PT PELNI (Persero) Sukmajaya (Jawa Barat)
- Bantuan Pembangunan Gedung PAUD-TK Muhammad Husen DB (NTT)
- Pembangunan WC Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Gembong (Jawa Tengah)
- Program Kolaborasi Srikandi PT PELNI (Persero): Bantuan Perlengkapan Sekolah di 15 Cabang PT PELNI (Persero) (DKI Jakarta)
- Bantuan Perlengkapan Sekolah di SD Inpres Palu (Sulawesi Tengah)
- Bantuan Transportasi untuk Pelajar Papua dalam Menempuh Pendidikan di Jakarta (Papua)
- Bantuan Pembelian Tiket Peserta dalam Kegiatan Lomba Menggambar & Mewarnai (DKI Jakarta)
- Bantuan TJSL PT PELNI (Persero) untuk Sarana dan Prasarana Pendidikan Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) di Sekolah Khusus Melati Ceria Sampit (Kalimantan Tengah)
- Bantuan TJSL PT PELNI (Persero) untuk Pemasangan Paving Block di SD YPPK KMS Santa Ursula (Papua Barat)
- Bantuan TJSL PT PELNI (Persero) untuk Renovasi dan Pemeliharaan Sekolah TK Nurul Ulum Yapis Kaimana (Papua Barat)
- Bantuan TJSL PT PELNI (Persero) untuk Pembangunan Asrama Santri Pondok Pesantren Hidayatullah Nunukan (Kalimantan Utara)
- Program Beasiswa Pendidikan Taruna/Taruni Poltekpel Surabaya (Jawa Timur)
- Bantuan TJSL DPN PT PELNI (Persero) untuk Pembangunan Gedung Pra-Postulan Sentani, Kabupaten Jayapura (Papua)
- Bantuan TJSL DPN PT PELNI (Persero) untuk Pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium IPA SMAK Seminari Yohanes Penginjil Asmat, Papua Selatan (Papua)
- Bantuan Tiket Kongres XXXI PB PMI di Palembang (Sumatera Selatan)
- Bantuan Renovasi SD 51 Mulaeno Bombana (Sulawesi Tenggara)
- Pembangunan Pondok Pesantren Bahrurrohman Al Hidayah 4, Desa Kedondong RT 5 RW 3, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak (Jawa Tengah)
- Permohonan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelompok Bermain MEKARSARI (Jawa Tengah)
- Assistance for the Rehabilitation of Bathrooms at SMP Swasta GKPS 06 Haranggaol (North Sumatra)
- Financial Support from PT PELNI (Persero) for the Management Activities of Madrasah Diniyah Takmiliyah Amaliyah, Yayasan Nurul PT PELNI (Persero) Sukmajaya (West Java)
- Assistance for the Construction of PAUD-TK Muhammad Husen DB Building (NTT)
- Construction of Bathrooms at Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Gembong (Central Java)
- Srikandi PT PELNI (Persero) Collaboration Program: School Supplies Assistance at 15 PELNI Branches (DKI Jakarta)
- School Supplies Assistance at SD Inpres Palu (Central Sulawesi)
- Transportation Assistance for Papua Students Pursuing Education in Jakarta (Papua)
- Ticket Purchase Assistance for Participants in the Drawing & Coloring Competition (DKI Jakarta)
- Financial Support from PT PELNI (Persero) for Educational Facilities and Infrastructure for Special Needs Students at Sekolah Khusus Melati Ceria Sampit (Central Kalimantan)
- Financial Support from PT PELNI (Persero) for the Installation of Paving Blocks at SD YPPK KMS Santa Ursula (West Papua)
- Financial Support from PT PELNI (Persero) for Renovation and Maintenance of TK Nurul Ulum Yapis Kaimana School (West Papua)
- Financial Support from PT PELNI (Persero) for the Construction of a Dormitory at Pondok Pesantren Hidayatullah Nunukan (North Kalimantan)
- Education Scholarship Program for Cadets of Poltekpel Surabaya (East Java)
- Financial Support from PT PELNI (Persero) for the Construction of the Pre-Postulan Building in Sentani, Jayapura Regency (Papua)
- Financial Support from PT PELNI (Persero) for the Procurement of Science Lab Equipment and Materials for SMAK Seminari Yohanes Penginjil Asmat, South Papua (Papua)
- Ticket Assistance for the XXXI PB PMI Congress in Palembang (South Sumatra)
- Renovation Assistance for SD 51 Mulaeno Bombana (Southeast Sulawesi)
- Construction of Pondok Pesantren Bahrurrohman Al Hidayah 4, Kedondong Village RT 5 RW 3, Gajah District, Demak Regency (Central Java)
- Request for the Construction of Facilities and Infrastructure for the MEKARSARI Playgroup (Central Java)



PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TAHUN 2024

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAM IN 2024

• Pembayaran Tiket Program TJSL Dukungan Transportasi Jetliner dalam Program Sapa Pulau 2.0 Kendari-Wakatobi untuk 79 Orang (Sulawesi Tenggara) • Bantuan TJSL PT PELNI (Persero) untuk Penambahan Pembangunan Ruang Belajar Kelas serta Fasilitas Pendidikan Madrasah Diniyah Hidayatullah Aulad Kudus (Jawa Tengah) • Bantuan TJSL PT PELNI (Persero) untuk Sarana dan Prasarana Pendidikan Bagi Peserta Didik SMP IT Assa'idiyyah (Jawa Tengah) • Bantuan TJSL PT PELNI (Persero) untuk Sarana dan Prasarana Pendidikan Bagi Peserta Didik MI Al Fatah (Jawa Timur) • Bantuan TJSL PT PELNI (Persero) untuk Sarana dan Prasarana Pendidikan bagi Peserta Didik RA Raudlatul Ulum Sumberkatimoho Krejengan, Probolinggo (Jawa Timur) • Bantuan TJSL PT PELNI (Persero) untuk Pembangunan Aula RA MNU Babul Ulum (Jawa Timur) • Bantuan TJSL PT PELNI (Persero) untuk Sarana dan Prasarana Pendidikan bagi Peserta Didik MTS Mambaul Falah Kudus (Jawa Tengah) • Program Kolaborasi TJSL Ata Modo Tahun 2024 (NTT) • Pembayaran Program TJSL BUMN Pelita Warna Tahun 2024 di Rutan Pondok Bambu (DKI Jakarta) • Bantuan Pengadaan Komputer MTS Nurul Falah, Yayasan Nurul Falah Kimak (Bangka Belitung) • Bantuan Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Pembelajaran di TK Alam Ma'had Islam Pekalongan (Jawa Tengah) • Bantuan dari PT PELNI (Persero) untuk Paving Area Bermain PAUD Aisyiyah Krapyak Lor (Jawa Tengah) • Bantuan TJSL Dana Pembangunan Nasional untuk Pembangunan Asrama Pondok Pesantren Bahrul Ulum (Jawa Timur) • Bantuan Dana Pembangunan Nasional (DPN) PT PELNI (Persero) untuk Alat Peraga Pendidikan dan Fasilitas Sekolah Kawedusan, Blitar (Jawa Timur)	• Payment for Jetliner Transportation Support Tickets in the Sapa Pulau 2.0 Program Kendari-Wakatobi for 79 People (Southeast Sulawesi) • Financial Support from PT PELNI (Persero) for the Expansion of Learning Spaces and Educational Facilities at Madrasah Diniyah Hidayatullah Aulad Kudus (Central Java) • Financial Support from PT PELNI (Persero) for Educational Facilities and Infrastructure for Students at SMP IT Assa'idiyyah (Central Java) • Financial Support from PT PELNI (Persero) for Educational Facilities and Infrastructure for Students at MI Al Fatah (East Java) • Financial Support from PT PELNI (Persero) for Educational Facilities and Infrastructure for Students at RA Raudlatul Ulum Sumberkatimoho Krejengan, Probolinggo (East Java) • Financial Support from PT PELNI (Persero) for the Construction of a Hall at RA MNU Babul Ulum (East Java) • Financial Support from PT PELNI (Persero) for Educational Facilities and Infrastructure for Students at MTS Mambaul Falah Kudus (Central Java) • CSR Ata Modo Collaboration Program for 2024 (NTT) • Payment for the BUMN Pelita Warna CSR Program in 2024 at Pondok Bambu Detention Center (DKI Jakarta) • Computer Procurement Assistance for MTS Nurul Falah, Yayasan Nurul Falah Kimak (Bangka Belitung) • Assistance for the Procurement of Learning Support Facilities at TK Alam Ma'had Islam Pekalongan (Central Java) • Assistance from PT PELNI (Persero) for Paving the Playground Area at PAUD Aisyiyah Krapyak Lor (Central Java) • National Development Fund Support for the Construction of the Dormitory at Pondok Pesantren Bahrul Ulum (East Java) • National Development Fund (DPN) Assistance from PT PELNI (Persero) for Educational Tools and School Facilities at Kawedusan, Blitar (East Java)



PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TAHUN 2024

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAM IN 2024

Pilar Ekonomi Economic Pillar

7 ENERGI BERSIH
DAN TERJANGKAU



Energi Bersih dan Terjangkau Affordable and Clean Energy

- Program Kolaborasi Pengolahan Energi Terbarukan (Batam)
- Program Bantuan TJSL PT PELNI (Persero) untuk Pemberdayaan Pengolah Limbah Cangkang Kerang (DKI Jakarta)
- Collaboration Program for Renewable Energy Processing (Batam)
- CSR Assistance Program by PT PELNI (Persero) for Empowering Shellfish Shell Waste Processors (DKI Jakarta)

8 PEKERJAAN LAYAK
DAN PERTUMBUHAN
EKONOMI



Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Decent Work and Economic Growth

- Dukungan Dana Kegiatan *Ramadhan Fair* Srikandi PT PELNI (Persero) 1445 H (DKI Jakarta)
- Penyaluran Program PUMK (DKI Jakarta)
- Biaya Penyewaan Vending Machine selama 1 Tahun (DKI Jakarta)
- Penyaluran Dana PUMK (DKI Jakarta)
- Bantuan Mesin Tempel melalui Program Pemberdayaan Nelayan di Ternate (Maluku Utara)
- Dukungan Dana Kegiatan *Ramadhan Fair* Srikandi PT PELNI (Persero) 1445 H Activities (DKI Jakarta)
- Disbursement of the PUMK Program (DKI Jakarta)
- Vending Machine Rental Fees for 1 Year (DKI Jakarta)
- Pemberdayaan Nelayan dan Penanganan Ikan yang Baik bersama MDPI (Maluku)
- Termin 2 Program Peningkatan Kapasitas Kelompok Nelayan dan Perempuan Perikanan Skala Kecil dalam Mendukung Implementasi Fair Trade USA (Maluku)
- Bantuan TJSL Dana Pembangunan Nasional PT PELNI (Persero) untuk Pembelian Peralatan Usaha KUBE (Kalimantan Timur)
- Penajam Berkarya (Lampung)
- Pembinaan UMK (Lampung)
- Support for the Ramadhan Fair Srikandi PT PELNI (Persero) 1445 H Activities (DKI Jakarta)
- Disbursement of the PUMK Program (DKI Jakarta)
- Assistance with Outboard Engines through the Fishermen Empowerment Program in Ternate (North Maluku)
- Fishermen Empowerment and Proper Fish Handling with MDPI (Maluku)
- Term 2 of the Capacity Building Program for Small-Scale Fishermen and Women in Fisheries to Support the Implementation of Fair Trade USA (Maluku)
- CSR Assistance for National Development Funds from PT PELNI (Persero) for the Purchase of KUBE Business Equipment (East Kalimantan)
- Penajam Berkarya (Lampung)
- MSEs Development (Lampung)

9 INDUSTRI INOVASI
DAN INFRASTRUKTUR



Industri, Inovasi, dan Infrastruktur Industry, Innovation, and Infrastructure

- Pembayaran Kolaborasi Bazar UMK Labuan Bajo dan Sarinah (NTT dan DKI Jakarta)
- Payment for the MSEs Labuan Bajo and Sarinah Bazaar Collaboration (NTT and DKI Jakarta)

10 BERKURANGNYA
KESENJANGAN



Berkurangnya Kesenjangan Reduced Inequalities

- Bantuan Mesin Tempel melalui Program Pemberdayaan Nelayan di Ternate (Maluku Utara)
- Bantuan TJSL PT PELNI (Persero) untuk Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok KUBE "Sejahtera Abadi" Desa Babalan, Kec. Wedung, Kab. Demak dalam Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Jawa Tengah)
- Program Bantuan TJSL PT PELNI (Persero) untuk Pemberdayaan Pengolah Limbah Cangkang Kerang (DKI Jakarta)
- Pembayaran Kolaborasi Bazar UMK Labuan Bajo dan Sarinah (DKI Jakarta)
- Pembayaran Termin 1 Pengembangan Desa Mandiri di Cianjur (Jawa Barat)
- Assistance with Outboard Motors through the Fishermen Empowerment Program in Ternate (North Maluku)
- CSR Assistance from PT PELNI (Persero) for Facilities and Infrastructure for the "Sejahtera Abadi" KUBE Group in Babalan Village, Wedung Subdistrict, Demak Regency for the Empowerment of People's Salt Business (Central Java)
- CSR Assistance Program from PT PELNI (Persero) for the Empowerment of Shellfish Shell Waste Processors (DKI Jakarta)
- Payment for Collaboration of UMK Bazaar in Labuan Bajo and Sarinah (DKI Jakarta)
- First Term Payment for Independent Village Development in Cianjur (West Java)



PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TAHUN 2024

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAM IN 2024



Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Partnerships for the Goals

- Pelatihan Ekspor dan Impor untuk UMKM (DKI Jakarta)
- Termin 1 Jasa Pelatihan untuk Pembinaan Mitra Binaan TJSL PT PELNI (Persero) di Makassar (Sulawesi Selatan)
- Pembayaran Termin 2 untuk Pelatihan Ekspor UMKM Bersama PPEJP (DKI Jakarta)
- Pembayaran Termin 2 untuk Program Pembinaan Mitra Binaan TJSL PT PELNI (Persero) di Makassar (Sulawesi Selatan)
- Export and Import Training for MSMEs (DKI Jakarta)
- Term 1 Training Services for the Development of CSR Partner Mentors by PT PELNI (Persero) in Makassar (South Sulawesi)
- Term 2 Payment for MSME Export Training with PPEJP (DKI Jakarta)
- Term 2 Payment for the Partner Mentor Development Program of CSR PT PELNI (Persero) in Makassar (South Sulawesi)

Pilar Lingkungan Environmental Pillar



Air Bersih dan Sanitasi Layak Clean Water and Sanitation

Program Kolaborasi Air Bersih dengan BSI Masalahat (Kalimantan Barat) Clean Water Collaboration Program with BSI Masalahat (West Kalimantan)



Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan Sustainable Cities and Communities

- Bantuan Renovasi Atap Rumah Panti Asuhan ST Maria, Ahuru, Ambon (Maluku)
- Bantuan Pembangunan Musholla Al Jannah Perum America 2, Batam (Kepulauan Riau)
- Bantuan Renovasi Sayap Gereja Pentakosta, Nabire (Papua Tengah)
- Bantuan Pembangunan Masjid Baburahman (NTT)
- Bantuan Pembangunan Akses Difabel dan Kanopi untuk Pemotongan Hewan Qurban (Jawa Barat)
- Bantuan TJSL PT PELNI (Persero) untuk Pembangunan Masjid Al-Azhar Kelurahan Wangurer (Sulawesi Utara)
- Bantuan TJSL PT PELNI (Persero) untuk Pembangunan POS PI Tana Wurung Gereja Kemah Injil Jemaat Okahapi (NTT)
- Bantuan Dana Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT PELNI (Persero) kepada Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Klasik Yapen Selatan (Papua)
- Bantuan TJSL DPN (Dana Pembangunan Nasional) PT PELNI (Persero) untuk Pembangunan Bale Gong Pura Dalem Pakerisan (Bali)
- Bantuan TJSL DPN (Dana Pembangunan Nasional) PT PELNI (Persero) untuk Pura Dalem Pamecutan (Bali)
- Permohonan Bantuan Dana Perehaban Pelinggih Gedong Agung Pura Panti Ratu Masning (Bali)
- Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Renovasi Masjid Al Mujaddidin Pincuran Basobok (Sumatera Barat)
- Permohonan Bantuan Pembangunan Lapangan Serbaguna (Banten)
- Bantuan Dana Pembangunan dan Pengembangan Masjid Jami' Baitul Mukmin
- Bantuan Renovasi Masjid Al Huda Barata (Banten)
- Assistance for Roof Renovation of ST Maria Orphanage, Ahuru, Ambon (Maluku)
- Assistance for the Construction of Al Jannah Mosque in America 2 Housing Complex, Batam (Riau Islands)
- Assistance for the Renovation of the Pentecostal Church Wing, Nabire (Central Papua)
- Assistance for the Construction of Baburahman Mosque (East Nusa Tenggara)
- Assistance for the Construction of Disability Access and Canopy for Qurban Animal Slaughtering (West Java)
- Corporate Social Responsibility (CSR) Assistance from PT PELNI (Persero) for the Construction of Al-Azhar Mosque in Wangurer Village (North Sulawesi)
- CSR Assistance from PT PELNI (Persero) for the Construction of POS PI Tana Wurung Church of the Gospel Camp Congregation Okahapi (East Nusa Tenggara)
- CSR Funding from PT PELNI (Persero) for the Evangelical Christian Church in the Land of Papua, South Yapen Classis (Papua)
- CSR Funding from PT PELNI (Persero) for the Construction of Bale Gong Pura Dalem Pakerisan (Bali)
- CSR Funding from PT PELNI (Persero) for Pura Dalem Pamecutan (Bali)
- Request for Assistance for the Restoration of Pelinggih Gedong Agung Pura Panti Ratu Masning (Bali)
- Request for Assistance for the Renovation of Al Mujaddidin Mosque in Pincuran Basobok (West Sumatra)
- Request for Assistance for the Construction of a Multi-purpose Field (Banten)
- Assistance for the Construction and Development of Jami' Baitul Mukmin Mosque
- Assistance for the Renovation of Al Huda Barata Mosque (Banten)

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TAHUN 2024
SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAM IN 2024

- Bantuan TJSL PT PELNI (Persero) untuk Pembangunan Musholla sebagai Sarana Wisata Religi Nyai Pandansari Makam Sedapu di Desa Boja (Banten)
 - Bantuan TJSL Dana Pembangunan Nasional untuk Pengadaan Soundsystem PC Fatayat NU Tulungagung (Jawa Timur)
 - Bantuan Dana Pembangunan Masjid Jami' As-Salam (Banten)
- CSR Assistance from PT PELNI (Persero) for the Construction of a Musholla as a Religious Tourism Facility at Nyai Pandansari Sedapu Tomb in Boja Village (Banten)
 - CSR Funding from National Development Fund for the Procurement of Sound System for PC Fatayat NU Tulungagung (East Java)
 - Assistance for the Construction of Jami' As-Salam Mosque (Banten)



Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
Responsible Consumption and Production

- Pembayaran Termin 7 dan 8 RKS PELNI Denpasar (Bali)
 - Pembayaran Tahap 1 Pengelolaan Sampah Gedung Kantor Pusat PT PELNI (Persero) (DKI Jakarta)
- Payment for Term 7 and 8 of the RKS PELNI Denpasar (Bali)
 - Payment for Phase 1 of Waste Management at the PT PELNI (Persero) Headquarters Building (DKI Jakarta)



Penanganan Perubahan Iklim
Climate Action

- Pembayaran Termin 1 Proyek Biogas di Kupang (NTT)
- Payment for Term 1 of the Biogas Project in Kupang (NTT)



Ekosistem Lautan
Life below Water

- Pembayaran Termin 2-5 Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang dengan Teknologi Fragmentasi Buatan dan Mineral Akresi untuk Menunjang Ekowisata Bahari Berbasis Kelompok Masyarakat di Pantai Bangsring, Banyuwangi (Jawa Timur)
 - Partisipasi dalam Kegiatan Program Laut Bersih Lantamal I Tahun 2024 (Sumatera Utara)
 - Program TJSL Konservasi Penyu (Aceh)
 - Pembayaran Termin 1 Pelaksanaan Restorasi atas Kerusakan Terumbu Karang di Kawasan Perairan Pulau Menjangan Besar, Taman Nasional Karimunjawa (Jawa Tengah)
 - Penanaman Mangrove di Cirebon (Jawa Barat)
- Payment for Term 2-5 of the Coral Reef Ecosystem Rehabilitation Project using Artificial Fragmentation Technology and Accretion Minerals to Support Community-Based Marine Ecotourism at Bangsring Beach, Banyuwangi (East Java)
 - Participation in the Clean Sea Program of Lantamal I for the Year 2024 (North Sumatra)
 - CSR Program for Sea Turtle Conservation (Aceh)
 - Payment for Term 1 of the Restoration of Coral Reef Damage in the Waters of Menjangan Besar Island, Karimunjawa National Park (Central Java)
 - Mangrove Planting in Cirebon (West Java)



PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TAHUN 2024

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAM IN 2024



Ekosistem Daratan Life on Land

- Penghijauan Area Terbuka Kolaborasi dengan Cabang Nunukan (Kalimantan Utara)
- Biaya Kegiatan Penghijauan Area Terbuka di Wilayah Ring Satu Operasional PT PELNI (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun (Kalimantan Utara)
- Kegiatan Penghijauan Area Terbuka di Wilayah Ring Satu Operasional PT PELNI (Persero) Cabang Ende (NTT)
- Kegiatan Penghijauan Area Terbuka di Wilayah Ring Satu Operasional PT PELNI (Persero) Cabang Luwuk (Sulawesi Tengah)
- Kegiatan Penghijauan Area Terbuka di Wilayah Ring Satu Operasional PT PELNI (Persero) Cabang Namlea (Maluku)
- Kegiatan Penghijauan Area Terbuka di Wilayah Ring Satu Operasional PT PELNI (Persero) Cabang Tanjung Pandan (Bangka Belitung)
- Bantuan dari PT PELNI (Persero) untuk Kampung Alpukat Tegalrejo, Desa Lerep, Semarang (Jawa Tengah)
- Penghijauan Area Terbuka Kolaborasi dengan 10 Cabang PT PELNI (Persero) Cabang Tual (Maluku)
- Greening of Open Areas in Collaboration with the Nunukan Branch (North Kalimantan)
- Cost of Greening Activities in the Open Areas within the First Ring Operational Area of PT PELNI (Persero) Tanjung Balai Karimun Branch (North Kalimantan)
- Greening Activities in the Open Areas within the First Ring Operational Area of PT PELNI (Persero) Ende Branch (NTT)
- Greening Activities in the Open Areas within the First Ring Operational Area of PT PELNI (Persero) Luwuk Branch (Central Sulawesi)
- Greening Activities in the Open Areas within the First Ring Operational Area of PT PELNI (Persero) Namlea Branch (Maluku)
- Greening Activities in the Open Areas within the First Ring Operational Area of PT PELNI (Persero) Tanjung Pandan Branch (Bangka Belitung)
- Assistance from PT PELNI (Persero) for the Tegalrejo Avocado Village, Lerep Village, Semarang (Central Java)
- Greening of Open Areas in Collaboration with 10 PT PELNI (Persero) Branches, including the Tual Branch (Maluku)

Pilar Hukum dan Tata Kelola Legal and Governance Pillar



Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat Peace, Justice, and Strong Institutions

- Pelaksanaan Program Penyuluhan Hukum bagi Petambak dan Monitoring Mitra Binaan TJSL PT PELNI (Persero) di Demak dan Pemalang (Jawa Tengah)
- Program Pelatihan Administrasi dan Ketahanan Layanan Termin 1 (Sulawesi Selatan)
- Sosialisasi Nelayan tentang Destructive Fishing di Bima (NTB)
- Pembayaran Termin Kedua Kegiatan Fasilitasi Pas Kecil Kapal Nelayan Skala Kecil di Pulau Barrang Caddi (Sulawesi Selatan)
- Implementation of the Legal Counseling Program for Fishermen and Monitoring of CSR Partner Assistance of PT PELNI (Persero) in Demak and Pemalang (Central Java)
- Training Program on Administration and Service Resilience for Term 1 (South Sulawesi)
- Socialization for Fishermen on Destructive Fishing in Bima (NTB)
- Second-Term Payment for Small-Scale Fishermen's Boat Facilitation Activities in Barrang Caddi Island (South Sulawesi)

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TAHUN 2024

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAM IN 2024

PROGRAM CID NON-PUMK

Pada tahun 2024, total dana program CID Non-PUMK yang direalisasikan oleh Perseroan tercatat sebesar Rp8,10 miliar, yang mencapai 100,00% dari target RKAP, atau meningkat sebesar 17,39% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang mencapai Rp25,55 miliar. Berikut adalah perbandingan antara target dan realisasi penyaluran dana program CID Non-PUMK dalam 2 (dua) tahun terakhir:

CID NON-PUMK PROGRAM

In 2024, the total funds for the CID Non-PUMK program realized by the Company amounted to Rp8.10 billion, achieving 100.00% of the RKAP target, which represents an increase of 17.39% compared to the realization in 2023, which reached Rp25.55 billion. Below is a comparison between the target and the realization of the CID Non-PUMK program fund distribution over the last 2 (two) years:

Pilar Pillars	2024			2023			YoY 2023 2024 (%)
	Anggaran Budget (Rp)	Realisasi Realization (Rp)	Pemenuhan Fulfillment (%)	Anggaran Budget (Rp)	Realisasi Realization (Rp)	Pemenuhan Fulfillment (%)	
1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5	8=3/6
Sosial Social	3.280.000.000	3.279.170.904	99,97	3.050.000.000	3.151.410.457	103,32	4,05
Ekonomi Economic	2.520.000.000	2.445.142.696	97,03	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	144,51
Lingkungan Environmental	2.200.000.000	2.275.686.400	103,44	2.750.000.000	2.648.589.543	96,31	(14,08)
Hukum dan Tata Kelola Legal and Governance	100.000.000	100.000.000	100,00	100.000.000	100.000.000	100,00	0,00
Total	8.100.000.000	8.100.000.000	100,00	6.900.000.000	6.900.000.000	100,00	17,39

Program Unggulan

Dari sejumlah program TJSL CID tahun 2024, Perseroan memiliki beberapa program yang dikategorikan sebagai program unggulan. Pada tahun 2024, total dana TJSL program unggulan yang direalisasikan oleh Perseroan tercatat sebesar Rp1,07 miliar, yang mencapai 73,97% dari target RKAP, atau meningkat sebesar 44,94% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang mencapai Rp737,43 juta. Berikut adalah uraian mengenai program unggulan TJSL PT PELNI pada tahun 2024:

Excellence Program

Among the various CSR CID programs for 2024, the Company has several programs categorized as excellence programs. In 2024, the total funding for the excellence programs realized by the Company amounted to Rp1.07 billion, which represents 73.97% of the RKAP target, reflecting an increase of 44.94% compared to the realization in 2023, which was Rp737.43 million. Below is a description of the excellence programs of PT PELNI (Persero) CSR in 2024:

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TAHUN 2024

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAM IN 2024



Kolaborasi Pengolahan Energi Terbarukan

Collaboration Program for Renewable Energy Processing

Dana Fund	Anggaran: Rp100.000.000	Budget: Rp100,000,000
	Realisasi: Rp100.000.000	Realization: Rp100,000,000
	Pemenuhan: 100,00%	Fulfillment: 100.00%
Lokasi Location	Batam	Batam
Jenis Bantuan Type of Assistance	• Pendampingan dalam pembuatan sistem reverse osmosis untuk mengubah air laut menjadi air baku. • Pendampingan dalam pembuatan panel surya sebagai sumber energi terbarukan. • Pendampingan dalam pembuatan instalasi penampungan air baku. • Pendampingan kepada pengelola pondok pesantren dan santri untuk memperkuat aspek sosial dan kelembagaan.	
Penerima Manfaat Beneficiary	Santriwan, Santriwati, dan Pengurus Pondok Pesantren.	Students and the management of Islamic boarding schools.
Dampak bagi Penerima Manfaat Impact on the Beneficiary	Meningkatkan aksesibilitas terhadap air bersih bagi santriwan, santriwati, dan pengurus pondok pesantren. Mengurangi ketergantungan pada listrik PLN, mengingat sulitnya akses ke pondok pesantren. Meningkatkan kemampuan santriwan dan santriwati dalam mengembangkan soft skills, terutama dalam memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Mengenalkan budaya khas Nusa Tenggara Timur kepada masyarakat sekitar.	

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TAHUN 2024
SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAM IN 2024

9

INDUSTRI INOVASI DAN INFRASTRUKTUR

Kolaborasi Bazar UMKM
SMEs Bazaar Collaboration

Dana Fund	Anggaran: Rp300.000.000	Budget: Rp300,000,000
	Realisasi: Rp300.000.000	Realization: Rp300,000,000
	Pemenuhan: 100,00%	Fulfillment: 100.00%
Lokasi Location	Labuan Bajo (NTT) dan Jakarta	Labuan Bajo (NTT) and Jakarta
Jenis Bantuan Type of Assistance	- Memfasilitasi UMKM dengan menyediakan booth untuk mempromosikan produk mereka. - Memberikan pendampingan dan pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas UMKM.	
Penerima Manfaat Beneficiary	189 UMKM	189 SMEs
Dampak bagi Penerima Manfaat Impact on the Beneficiary	- Memberikan fasilitas kepada pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka kepada konsumen, baik di Jakarta maupun di Labuan Bajo. - Memperkenalkan budaya khas Nusa Tenggara Timur kepada masyarakat luas.	

13

PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

Program Biogas
Biogas Program

Dana Fund	Anggaran: Rp225.000.000	Budget: Rp225,000,000
	Realisasi: Rp225.000.000	Realization: Rp225,000,000
	Pemenuhan: 100,00%	Fulfillment: 100.00%
Lokasi Location	Kupang	Kupang
Jenis Bantuan Type of Assistance	- Pembangunan 4 unit sumur digester - Pembangunan instalasi pipa biogas ke rumah-rumah warga - Penyediaan kompor dan lampu biogas - Sosialisasi dan pendampingan kelompok ternak	
Penerima Manfaat Beneficiary	4 Kelompok masyarakat	4 Community Groups
Dampak bagi Penerima Manfaat Impact on the Beneficiary	- Mengurangi ketergantungan masyarakat pada gas LPG yang harganya mahal - Memanfaatkan residu biogas sebagai pupuk untuk tanaman atau dijual - Mengurangi pencemaran limbah	



PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TAHUN 2024

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAM IN 2024



Rumah Kelola Sampah (RKS) Denpasar Waste Management House (RKS) Program in Denpasar

Dana Fund	Anggaran: Rp250.000.000	Budget: Rp250.000.000
	Realisasi: Rp158.840.000	Realization: Rp158,840,000
	Pemenuhan: 63,54%	Fulfillment: 63.54%
Lokasi Location	Denpasar, Bali	Denpasar, Bali
Jenis Bantuan Type of Assistance	- Pembangunan rumah kelola sampah - Pengadaan 2 unit mesin crasher sampah organik - Pengadaan 1 unit kendaraan roda 3 - Pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan sampah hingga menjadi komoditas bernilai jual, diversifikasi produk dari sampah, serta pemasaran produk kepada penerima manfaat	
Penerima Manfaat Beneficiary	5 Relawan	5 Volunteers
Dampak bagi Penerima Manfaat Impact on the Beneficiary	- Meningkatkan penghasilan dari penjualan plastik press (sekitar 50 kg per bulan) dengan harga Rp1.500/kg - Mendapatkan pembinaan terkait pengolahan sampah, diversifikasi produk sampah, dan pemasaran produk kerajinan tangan - Menghasilkan produk pertanian sayuran - Mendapatkan penghasilan dari penjualan sampah organik (sekitar 50 kg per ritase) kepada peternak, digunakan sebagai bahan pakan ternak dengan harga Rp15.000/kg	



Pemberdayaan Desa Mandiri Empowerment of Self-Sufficient Villages

Dana Fund	Anggaran: Rp570.000.000	Budget: Rp570,000,000
	Realisasi: Rp285.000.000	Realization: Rp285,000,000
	Pemenuhan: 50,00%	Fulfillment: 50.00%
Lokasi Location	Cianjur, Jawa Barat	Cianjur, West Java
Jenis Bantuan Type of Assistance	- Pelatihan dan praktik pembuatan pupuk organik serta pestisida - Pelatihan dan praktik pembibitan sayuran	
Penerima Manfaat Beneficiary	Kelompok Tani dan BUMDes Setempat	Farmer Groups and Local Village-Owned Enterprises (BUMDes)
Dampak bagi Penerima Manfaat Impact on the Beneficiary	- Meningkatkan kemampuan petani dalam pembibitan dan pengolahan sayuran, sehingga kualitas hasil pertanian meningkat - Mengurangi risiko gagal panen	

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TAHUN 2024

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAM IN 2024

Program Prioritas

Dari sejumlah program TJSL CID tahun 2024, Perseroan memiliki beberapa program yang dikategorikan sebagai program prioritas, yang terdiri dari prioritas Pendidikan, lingkungan, dan pengembangan UMK.

Program Prioritas Pendidikan

Pada tahun 2024, total dana TJSL program prioritas pendidikan yang direalisasikan oleh Perseroan tercatat sebesar Rp1,17 miliar, yang mencapai 78,66% dari target RKAP, atau menurun sebesar 35,48% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang mencapai Rp1,82 miliar. Berikut adalah perbandingan antara target dan realisasi penyaluran dana TJSL program prioritas pendidikan pada tahun 2024:

Program Programs	Anggaran Budget (Rp)	Realisasi Realization (Rp)	Pemenuhan Fulfillment (%)
1	2	3	4=3/2
Program Beasiswa Pendidikan Taruna/Taruni Poltekpel Surabaya Educational Scholarship Program for Cadets of Poltekpel Surabaya	100.000.000	100.000.000	100,00
Sarana & Prasarana Pendidikan (Jakarta, Surabaya, Semarang, Sumatera Utara, NTT, Purbalingga, Sampit, Palu, Kaimana, Papua, Nunukan, Jayapura dan Sulawesi Tenggara) Educational Facilities & Infrastructure (Jakarta, Surabaya, Semarang, North Sumatra, East Nusa Tenggara, Purbalingga, Sampit, Palu, Kaimana, Papua, Nunukan, Jayapura, and Southeast Sulawesi)	1.340.000.000	1.026.545.904	76,61
Bantuan Tiket Kapal Pelnis untuk Pelajar dan Relawan Pendidikan (Kendari, Makassar, Jakarta, Papua) Pelnis Ship Ticket Assistance for Students and Education Volunteers (Kendari, Makassar, Jakarta, Papua)	50.000.000	45.545.904	91,09
Total	1.490.000.000	1.172.091.808	78,66

Program Prioritas Lingkungan

Pada tahun 2024, total dana TJSL program prioritas lingkungan yang direalisasikan oleh Perseroan tercatat sebesar Rp1,20 miliar, yang mencapai 64,28% dari target RKAP, atau meningkat sebesar 25,34% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang mencapai Rp954,80 juta. Berikut adalah perbandingan antara target dan realisasi penyaluran dana TJSL program prioritas lingkungan pada tahun 2024:

Priority Programs

Out of the various CSR CID programs for 2024, the Company has identified several programs categorized as priority programs, which include priorities in Education, Environment, and MSME Development.

Education Priority Program

In 2024, the total funds for the CSR education priority program realized by the Company amounted to Rp1.17 billion, which accounts for 78.66% of the RKAP target, or a decrease of 35.48% compared to the realization in 2023, which reached Rp1.82 billion. The following is a comparison between the target and realization of the CSR education priority program funds distribution in 2024:

Environmental Priority Program

In 2024, the total funds for the CSR environmental priority program realized by the Company amounted to Rp1.20 billion, which represents 64.28% of the RKAP target, or an increase of 25.34% compared to the realization in 2023, which reached Rp954.80 million. The following is a comparison between the target and realization of the CSR environmental priority program funds distribution in 2024:

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TAHUN 2024

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAM IN 2024

Program Programs	Anggaran Budget (Rp)	Realisasi Realization (Rp)	Pemenuhan Fulfillment (%)
1	2	3	4=3/2
Renovasi Sarana & Prasarana Umum (Jakarta, Ambon) Renovation of Public Facilities & Infrastructure (Jakarta, Ambon)	650.000.000	384.689.000	59,18
Renovasi Sarana & Prasarana Rumah Ibadah (Nabire, Batam, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Serui, Waingapu, Bali) Renovation of Religious Facility Infrastructure (Nabire, Batam, West Sulawesi, North Sulawesi, Serui, Waingapu, Bali)	400.000.000	291.335.000	72,83
Rumah Kelola Sampah (RKS) Denpasar (Bali) Waste Management House (RKS) Program in Denpasar (Bali)	300.000.000	127.000.000	42,33
Program Laut Bersih (Medan) Clean Sea Program (Medan)	10.000.000	10.000.000	100,00
Penghijauan di area terbuka (Luwuk, Nunukan, Ende, Waingapu, Tanjung Balai Karimun) Greening of Open Areas (Luwuk, Nunukan, Ende, Waingapu, Tanjung Balai Karimun)	100.000.000	50.000.000	50,00
Program Biogas (Kupang) Biogas Program (Kupang)	150.000.000	112.500.000	75,00
Pengelolaan sampah di Kantor Pusat (Jakarta) Waste Management at Head Office (Jakarta)	130.000.000	115.000.000	88,46
Kolaborasi Air Bersih dengan BSI Maslahat (Pontianak) Collaboration for Clean Water with BSI Maslahat (Pontianak)	120.000.000	105.000.000	87,50
Total	1.860.000.000	1.195.524.000	64,28

Program Prioritas Pengembangan UMK

Pada tahun 2024, total dana TJSL program prioritas pengembangan UMK yang direalisasikan oleh Perseroan tercatat sebesar Rp1,00 miliar, yang mencapai 114,39% dari target RKAP, atau meningkat sebesar 0,09% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang mencapai Rp1,00 miliar. Berikut adalah perbandingan antara target dan realisasi penyaluran dana TJSL program prioritas pengembangan UMK pada tahun 2024:

Priority MSME Development Program

In 2024, the total funds for the CSR priority MSME development program realized by the Company amounted to Rp1.00 billion, which represents 114.39% of the RKAP target, or an increase of 0.09% compared to the realization in 2023, which also reached Rp1.00 billion. The following is a comparison between the target and realization of the CSR priority MSME development program funds distribution in 2024:

Program Programs	Anggaran Budget (Rp)	Realisasi Realization (Rp)	Pemenuhan Fulfillment (%)
1	2	3	4=3/2
Pembinaan 16 UMK (Makassar) Development of 16 SMEs (Makassar)	100.000.000	90.857.380	90,86
Vending Machine Kantor Pusat (DKI Jakarta) Vending Machine at the Head Office (DKI Jakarta)	75.000.000	40.043.120	53,39
Bazar UMK (Labuan Bajo dan DKI Jakarta) SME Bazaar (Labuan Bajo and DKI Jakarta)	400.000.000	300.000.000	75,00
Pengembangan Desa Mandiri (Cirebon, Jawa Barat) Independent Village Development (Cirebon, West Java)	300.000.000	570.000.000	190,00
Total	875.000.000	1.000.900.500	114,39

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TAHUN 2024
SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAM IN 2024

Program Creating Shared Value (CSV)

Pada tahun 2024, total nilai manfaat dari program CSV tercatat sebesar Rp596,34 juta, mengalami penurunan sebesar 2,36% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp610,43 juta. Berikut adalah uraian mengenai program CSV Perusahaan pada tahun 2024:

Creating Shared Value (CSV) Program

In 2024, the total value of benefits from the CSV program amounted to Rp596.34 million, representing a decrease of 2.36% compared to 2023, which reached Rp610.43 million. The following is a description of the Company's CSV program in 2024:

Program Programs	Nilai Manfaat CSV bagi Perusahaan Value of CSV Benefits for the Company	Nilai Value (Rp)
RKS (Rumah Kelola Sampah) Denpasar RKS (Waste Management House) Denpasar	Pengolahan sampah kapal PT PELNI melalui CSV, yang menghasilkan efisiensi biaya sebesar 10%, serta pengiriman bibit plastik ke Surabaya menggunakan kapal PT PELNI. The processing of PT PELNI ship waste through CSV, which results in a cost efficiency of 10%, as well as the shipment of plastic seedlings to Surabaya using PT PELNI ships.	158.840.000
Beasiswa Pendidikan Educational Scholarships	Memberikan bantuan beasiswa kepada 4 taruna/taruni Poltekpel Surabaya, berkolaborasi dengan program campus hiring divisi pengawakan, sehingga para penerima beasiswa dapat bekerja di Pelni setelah lulus. Providing scholarships to 4 students at Poltekpel Surabaya, in collaboration with the campus hiring program from the crew division, so that the scholarship recipients can work at Pelni after graduation.	40.000.000
Program Biogas Biogas Program	Pengembangan digester biogas ini dapat mengurangi pembelian bahan bakar minyak atau gas untuk kebutuhan kandang dan rumah tangga peternak, serta mengurangi biaya pembelian pupuk untuk lahan pertanian. Program ini juga berpotensi mengembangkan usaha kecil skala rumah tangga. The development of this biogas digester can reduce the purchase of fuel oil or gas for livestock pens and household needs, as well as reduce the cost of purchasing fertilizers for agricultural land. This program also has the potential to develop small-scale household businesses.	112.500.000
Program Desa Mandiri Independent Village Program	Program Desa Mandiri bertujuan untuk membantu petani mengembangkan hasil produk mereka, sekaligus memangkas biaya perusahaan dalam penyediaan bahan makanan. The Independent Village Program aims to help farmers develop their products while also reducing the company's costs in providing food supplies.	285.000.000
Total		596.340.000

PROGRAM PUMK

Pada tahun 2024, total dana program PUMK yang direalisasikan oleh Perseroan tercatat sebesar Rp1,20 miliar, yang mencapai 100,00% dari target RKAP, atau menurun sebesar 27,27% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang mencapai Rp1,65 miliar. Berikut adalah perbandingan antara target dan realisasi penyaluran dana program PUMK dalam 2 (dua) tahun terakhir:

PUMK PROGRAM

In 2024, the total funds for the PUMK program realized by the Company amounted to Rp1.20 billion, which accounts for 100.00% of the RKAP target, or a decrease of 27.27% compared to the realization in 2023, which reached Rp1.65 billion. The following is a comparison between the target and realization of the PUMK program funds distribution over the last 2 (two) years:



PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TAHUN 2024

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAM IN 2024

Pilar Pillars	2024			2023			YoY 2023- 2024 (%)
	Anggaran Budget (Rp)	Realisasi Realization (Rp)	Pemenuhan Fulfillment (%)	Anggaran Budget (Rp)	Realisasi Realization (Rp)	Pemenuhan Fulfillment (%)	
1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5	8=3/6
Ekonomi Economic	1.200.000.000	1.200.000.000	100,00	1.650.000.000	1.650.000.000	100,00	(27,27)
Total	1.200.000.000	1.200.000.000	100,00	1.650.000.000	1.650.000.000	100,00	(27,27)

Adapun rincian mengenai ketersediaan dan penggunaan dana PUMK dalam 2 (dua) tahun terakhir diuraikan pada tabel berikut:

The details regarding the availability and utilization of PUMK funds over the last 2 (two) years are outlined in the following table:

Uraian Description	2024			2023			YoY 2023 2024 (%)
	Anggaran Budget (Rp)	Realisasi Realization (Rp)	Pemenuhan Fulfillment (%)	Anggaran Budget (Rp)	Realisasi Realization (Rp)	Pemenuhan Fulfillment (%)	
1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5	8=3/6
Penerimaan Reception							
Saldo Awal Opening Balance	94.920.318	159.793.376	168,34	-	91.944.035	-	73,79
Pengembalian Pinjaman Pokok Principal Loan Repayment	1.108.734.861	1.052.141.144	94,90	1.543.409.870	1.643.485.349	106,48	(35,98)
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman Loan Administration Fee Revenue	77.811.440	37.429.031	48,10	105.490.130	73.819.760	69,98	(49,30)
Pendapatan Jasa Giro Current Account Interest Income	640.633	1.589.656	248,14	1.100.000	2.267.546	206,14	(29,90)
Kelebihan Pembayaran Angsuran Overpayment of Installments	-	2.795.623	-	-	3.097.465	-	(9,74)
Total Penerimaan Total Reception	-	1.253.748.829	-	1.650.000.000	1.814.614.155	-	(30,91)
Penyaluran Disbursements							
Penyaluran Dana PUMK* PUMK Funds Disbursements*	1.200.000.000	1.200.000.000	100,00	1.650.000.000	1.650.000.000	100,00	(27,27)
Pengembalian Kelebihan Angsuran Repayment of Excess Installments	-	2.795.625	-	-	3.127.470	-	(10,61)

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TAHUN 2024
 SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAM IN 2024

Uraian Description	2024			2023			YoY 2023 2024 (%)
	Anggaran Budget (Rp)	Realisasi Realization (Rp)	Pemenuhan Fulfillment (%)	Anggaran Budget (Rp)	Realisasi Realization (Rp)	Pemenuhan Fulfillment (%)	
1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5	8=3/6
Biaya Administrasi Bank Bank Administration Fees	-	1.660.631	-	-	1.693.309	-	(1,93)
Total Penyaluran Total Disbursements	1.200.000.000	1.204.456.256	100,37	1.650.000.000	1.653.127.470	100,19	(27,14)
Saldo Akhir Closing Balance	-	49.292.574	-	-	159.793.376	-	(69,15)

*) Melalui Kerjasama dengan PT BRI (Persero) Tbk | Through Collaboration with PT BRI (Persero) Tbk

Selain itu, perbandingan jumlah mitra binaan beserta saldo piutang pinjaman yang diberikan kepada mitra binaan berdasarkan provinsi dan sektor usaha dalam 2 (dua) tahun terakhir diuraikan pada tabel-tabel berikut:

In addition, a comparison of the number of foster partners along with the loan receivables provided to the foster partners based on province and business sector over the last 2 (two) years is outlined in the following tables:

Jumlah Mitra Binaan dan Saldo Piutang Pinjaman berdasarkan Provinsi
 Number of Foster Partners and Loan Receivables by Province

Provinsi Provinces	2024		2023		% 2024/2023	
	Mitra Binaan Fostered Partners (Unit)	Pinjaman Loan (Rp)	Mitra Binaan Fostered Partners (Unit)	Pinjaman Loan (Rp)	Mitra Binaan Fostered Partners	Pinjaman Loan
1	2	3	4	5	6=2/4	7=3/6
Aceh	1	25.030.769	1	43.890.521	100,00	57,03
Bali	1	15.802.729	1	15.802.729	100,00	100,00
Banten	11	268.635.547	13	399.398.815	84,62	67,26
DI Yogyakarta	1	2.314.333	1	2.314.333	100,00	100,00
DKI Jakarta	17	545.782.964	19	610.852.182	89,47	89,35
Jambi	2	66.401.874	2	96.953.854	100,00	68,49
Jawa Barat West Java	116	2.327.057.546	130	2.761.903.515	89,23	84,26
Jawa Tengah Central Java	66	1.639.137.943	71	1.882.721.346	92,96	87,06
Jawa Timur East Java	4	180.758.361	4	203.309.926	100,00	88,91
Lampung	24	590.793.973	27	692.538.156	88,89	85,31
Nusa Tenggara Barat (NTB) West Nusa Tenggara (NTB)	1	16.636.527	1	20.808.333	100,00	79,95
Total	244	5.678.352.566	270	6.730.493.710	90,37	84,37



PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TAHUN 2024

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAM IN 2024

Jumlah Mitra Binaan dan Saldo Piutang Pinjaman berdasarkan Sektor Usaha

The Number of Foster Partners and Loan Receivables by Business Sector

Provinsi Provinces	2024		2023		% 2024/2023	
	Mitra Binaan Fostered Partners (Unit)	Pinjaman Loan (Rp)	Mitra Binaan Fostered Partners (Unit)	Pinjaman Loan (Rp)	Mitra Binaan Fostered Partners	Pinjaman Loan
1	2	3	4	5	6=2/4	7=3/6
Industri Industry	1	25.030.769	1	43.890.521	100,00	57,03
Perdagangan Trade	1	15.802.729	1	15.802.729	100,00	100,00
Pertanian Agriculture	11	268.635.547	13	399.398.815	84,62	67,26
Perikanan Fisheries	1	2.314.333	1	2.314.333	100,00	100,00
Peternakan Livestock	17	545.782.964	19	610.852.182	89,47	89,35
Jasa Services	2	66.401.874	2	96.953.854	100,00	68,49
Usaha Lainnya Other Business	116	2.327.057.546	130	2.761.903.515	89,23	84,26
Total	244	5.678.352.566	270	6.730.493.710	90,37	84,37

PROGRAM NON-CID

Pada tahun 2024, total dana program Non- CID yang direalisasikan oleh Perseroan tercatat sebesar Rp28,13 miliar, yang mencapai 97,69% dari target RKAP, atau meningkat sebesar 65,46% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang mencapai Rp17,00 miliar. Berikut adalah perbandingan antara target dan realisasi penyaluran dana program Non- CID dalam 2 (dua) tahun terakhir:

NON-CID PROGRAM

In 2024, the total funds for the Non-CID program realized by the Company amounted to Rp28.13 billion, reaching 97.69% of the RKAP target, an increase of 65.46% compared to the realization in 2023, which amounted to Rp17.00 billion. Below is a comparison between the target and realization of the Non-CID program fund distribution over the past 2 (two) years:

Pilar Pillars	2024			2023			YoY 2023- 2024 (%)
	Anggaran Budget (Rp)	Realisasi Realization (Rp)	Pemenuhan Fulfillment (%)	Anggaran Budget (Rp)	Realisasi Realization (Rp)	Pemenuhan Fulfillment (%)	
1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5	8=3/6
Sosial Social	23.878.446.250	23.986.067.959	100,45	16.792.000.000	15.243.938.828	90,78	57,35
Ekonomi Economic	-	-	-	-	-	-	-
Lingkungan Environmental	697.000.000	648.609.000	93,06	390.000.000	472.510.000	121,16	37,27

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN TAHUN 2024

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAM IN 2024

Pilar Pillars	2024			2023			YoY 2023- 2024 (%)
	Anggaran Budget (Rp)	Realisasi Realization (Rp)	Pemenuhan Fulfillment (%)	Anggaran Budget (Rp)	Realisasi Realization (Rp)	Pemenuhan Fulfillment (%)	
1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5	8=3/6
Hukum dan Tata Kelola Legal and Governance	4.220.000.000	3.495.000.000	82,82	1.570.000.000	1.284.534.632	81,82	172,08
Total	28.795.446.250	28.129.676.959	97,69	18.752.000.000	17.000.983.460	90,66	65,46

KPI PROGRAM TJSL TAHUN 2024

Perseroan telah menetapkan Key Performance Indicators (KPI) untuk Program TJSL sebagai bagian dari upaya untuk memastikan pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Pada tahun 2024, realisasi pencapaian KPI Program TJSL mencapai 95% dari target yang ditetapkan dengan bobot total 100%. Berikut adalah rincian pencapaian KPI Program TJSL tahun 2024:

KPI OF THE 2024 CSR PROGRAM

The company has established Key Performance Indicators (KPIs) for the CSR Program as part of its efforts to ensure the achievement of the planned objectives. In 2024, the actual achievement of the CSR Program's KPIs reached 95% of the established target with a total weight of 100%. Below is the detailed breakdown of the KPI achievements for the 2024 CSR Program:

Indikator Indicator	Target	Realisasi Realization	Bobot Weight	Nilai Value
Melakukan pengukuran dampak terhadap program TJSL dengan menggunakan metode <i>Social Return On Investment</i> (SROI) minimal 3 (tiga) program Conducting impact measurement of the CSR program using the Social Return On Investment (SROI) method for at least 3 (three) programs	3 Program 3 Programs	3 Program 3 Programs	20%	20%
Menetapkan kebijakan levelling unit kerja ESG menjadi setingkat BOD-1 atau disesuaikan dengan hasil kajian terkait hal tersebut Establishing a policy for the levelling of ESG work units to a BOD-1 level or adjusting it based on relevant studies	BOD-1 dengan kajian BOD-1 with study	BOD-2 dengan kajian BOD-2 with study	20%	15%
Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam program TJSL, termasuk untuk pemenuhan pengisian sistem informasi berbasis teknologi informasi Kementerian BUMN Increasing the utilization of information technology in the CSR program, including fulfilling the information system submission based on the Ministry of SOEs' IT framework	7 periode laporan dilaporkan dengan tepat waktu dan lengkap 7 reporting periods submitted on time and complete	7 periode dilaporkan dengan tepat waktu dan lengkap 7 reporting periods submitted on time and complete	20%	20%
Meningkatkan kolaborasi antar BUMN maupun dengan pihak lain yang sesuai kompetensinya dalam pelaksanaan program TJSL minimal 1 (satu) program kolaborasi pada setiap bidang Enhancing collaboration between SOEs and with other relevant stakeholders in implementing the CSR program, with at least 1 (one) collaborative program in each field	3 Program 3 Programs	3 Program kolaborasi 3 Collaborative Programs	20%	20%
Melibatkan peran serta karyawan secara aktif dalam program TJSL Actively involving employees in the CSR program	Seluruh pegawai tetap All permanent employees	Melibatkan pegawai kantor pusat, cabang & kapal Involving employees from the head office, branches & ships	20%	20%
Total			100%	95%





REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021:
CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS
OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
I. Ketentuan Umum		I. General Provision
1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:		1. In this Financial Services Authority Circular Letter what is meant by:
a. Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Tahunan emiten atau perusahaan publik.	√	a. Annual Report is a report on the accountability of the Board of Directors and the Board of Commissioners in managing and supervising issuers or public companies within a period of 1 (one) financial year to the General Meeting of Shareholders based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation regarding the Annual Report of Issuers or Public Companies.
b. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.	N/A	b. Issuers are parties who make public offerings.
c. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	N/A	c. Public Company is a company whose shares are by at least 300 (three hundred) shareholders and has a paid-up capital of at least Rp. 3,000,000,000.00 (three billion rupiah) or a number of shareholders and paid-up capital as determined by the Financial Services Authority.
d. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.	N/A	d. Public Company is an Issuer that has made a public offering of equity securities or a Public Company.
e. Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.	√	e. A Sustainability Report is a report published to the public that contains the economic, financial, social, and environmental performance of a financial service institution, Issuer, and Public Company in running a sustainable business.
f. Direksi:	√	f. Board of Directors:
1) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan	√	2) for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, the Board of Directors as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company; and
3) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melaksanakan pengurusan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum tersebut.	√	4) for an Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company is an organ that runs the management of the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.
g. Dewan Komisaris:	√	g. Board of Commissioners:
1) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan	√	2) for an Issuer or Public Company in the form of a limited liability company is the Board of Commissioners as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies; and



REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021:
CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS
OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
2) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melakukan pengawasan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum tersebut.	✓	2) for an Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company is the organ that supervises the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.
h. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS:	✓	h. General Meeting of Shareholders hereinafter abbreviated as GMS:
1) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan	✓	1) for an Issuer or Public Company in the form of a limited liability company is the GMS as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company; and
2) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar yang mengatur badan hukum tersebut.	✓	2) for an Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company is an organ that has authority that could not be given to an organ that carries out management and supervisory functions, within the limits specified in the laws and/or articles of association governing the legal entity.
2. Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.	✓	2. The Annual Report of a listed company is one of the most important sources as the base for investors or shareholders in making an investment decision, and is a means of monitoring an issuer or public company.
3. Seiring dengan perkembangan pasar modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk menyajikan informasi yang berkualitas, akurat, dan akuntabel melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.	✓	3. Along with the development of the Capital Market and the growing needs of investors or shareholders regarding information disclosure, the Board of Directors and the Board of Commissioners are required to improve the quality of information disclosure through an annual report.
4. Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.	✓	4. Annual Report should be prepared in an orderly manner and should be informative to provide conveniences for the investors or shareholders in getting the information they need.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan.	✓	5. This Circular Letter of the Financial Service Agency serves guidelines for Issuers or Public Companies that should be applied in preparing their Annual Report.
II. Bentuk Laporan Tahunan		II. Format of Annual Report
1. Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan dokumen elektronik.	✓	1. Annual Report should be presented in the printed format and in electronic document copy.
2. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik.	✓	2. The printed version of the Annual Report should be printed on light-colored paper of fine quality, in A4 size, bound and can be reproduced in good quality.
3. Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami.	✓	3. Annual Report may present the information in form of images, charts, tables, and diagrams are presented by mentioning the title and/or clear description, that is easy to read and be understood;
4. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam portable document format (PDF).	✓	4. The Annual Report presented in electronic document format is the Annual Report converted into pdf format.



REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021:
CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS
OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
III. Isi Laporan Tahunan		III. Content of Annual Report
1. Laporan Tahunan paling sedikit memuat:		1. Annual Report should contain at least the following information:
a. Ikhtisar data keuangan penting;	✓	a. Summary of key financial information;
b. Informasi Saham (jika ada);	✓	b. Stock information (if any);
c. Laporan Direksi;	✓	c. The Board of Directors report;
d. Laporan Dewan Komisaris;	✓	d. The Board of Commissioners report;
e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik;	✓	e. Profile of Issuer or Public Company;
f. Analisis dan pembahasan manajemen;	✓	f. Management Discussion and Analysis;
g. Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	✓	g. Corporate governance applied by the Issuer or Public Company;
h. Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik;	✓	h. Corporate social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company;
i. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan	✓	i. Audited annual report; and
j. Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.	✓	j. Statement that the Board of Directors and the Board of Commissioners are fully responsible for the Annual Report
2. Uraian Isi Laporan Tahunan		3. Description of Content of Annual Report
a. Ikhtisar Data Keuangan Penting Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:	✓	a. Summary of Key Financial Information Summary of Key Financial Information contains financial information presented in comparison with previous 3 (three) fiscal years or since the commencement of business if the Issuers or the Public Company commencing the business less than 3 (three) years, at least contain:
1) Pendapatan/penjualan;	12	1) Income/sales;
2) Laba bruto;	12	2) Gross profit;
3) Laba (rugi);	13	3) Profit (loss);
4) Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	13	4) Total profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non-controlling interests;
5) Total laba (rugi) komprehensif;	13	5) Total comprehensive profit (loss);
6) Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	13	6) Total comprehensive profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non controlling interest;
7) Laba (rugi) per saham;	13	7) Earning (loss) per share;
8) Jumlah aset;	12	8) Total assets;
9) Jumlah liabilitas;	12	9) Total liabilities;
10) Jumlah ekuitas;	12	10) Total equities;
11) Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;	14	11) Profit (loss) to total assets ratio;
12) Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;	14	12) Profit (loss) to equities ratio;
13) Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/ penjualan;	14	13) Profit (loss) to income ratio;
14) Rasio lancar;	14	14) Current ratio;



**REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021:
TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN
EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK**

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021:
CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS
OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
15) Rasio liabilitas terhadap ekuitas;	14	16) Liabilities to equities ratio;
17) Rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan	14	17) Liabilities to total assets ratio; and
18) Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya.	14	18) Other information and financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and type of industry;
b. Informasi Saham Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat:	√	b. Stock Information Stock Information for Public Company at least contains:
1) Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat:	N/A	1) Shares issued for each three-month period in the last 2 (two) fiscal years (if any), at least covering:
a) Jumlah saham yang beredar;	16	a) Number of outstanding shares;
b) Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan;	N/A	b) Market capitalization based on the price at the Stock Exchange where the shares listed on
c) Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan	N/A	c) Highest share price, lowest share price, closing share price at the Stock Exchange where the shares listed on; and
d) Volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan.	N/A	d) Share volume at the Stock Exchange where the shares list
Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek;	√	Information in point b), point c), and point d) only be disclosed if the Issuer is a public company whose shares is listed in the Stock Exchange;
2) Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	16	2) In the event of corporate actions, including stock split, reverse stock, dividend, bonus share, and change in par value of shares, then the share price referred to in point 1), should be added with explanation on:
a) Tanggal pelaksanaan aksi korporasi;	N/A	a) Date of corporate action;
b) Rasio pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham;	N/A	b) Stock split ratio, reverse stock, dividend, bonus shares, and change in par value of shares;
c) Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi;	N/A	c) Number of outstanding shares prior to and after corporate action; and
d) Jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan	N/A	d) Number of conversion effects performed (if any)
e) Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi;	N/A	e) Share price prior to and after corporate action;
3) Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut; dan	N/A	3) In the event that the company's shares were suspended and/or delisted from trading during the year under review, then the Issuers or Public Company should provide explanation on the reason for the suspension and/or delisting; and



REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021:
CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS
OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
4) Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut.	N/A	4) In the event that the suspension and/or delisting as referred to in point 3) was still in effect until the date of the Annual Report, then the Issuer or the Public Company should also explain the corporate actions taken by the company in resolving the suspension and/or delisting;
c. Laporan Direksi Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	√	c. The Board of Directors Report The Board of Directors Report should at least contain the following items:
1) Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	√	1) The performance of the Issuer or Public Company, at least covering:
a) Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	48-49	a) Strategy and strategic policies of the Issuer or Public Company;
b) Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	49-50	b) The Board of Directors roles in formulating strategies and strategic policies of Issuers or Public Companies;
c) Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik;	51-52	c) The process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer or Public Company strategy;
d) Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan	52-54	d) Comparison between achievement of results and targets by the issuer or Public Company; and
e) Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik;	54-55	e) Challenges faced by the Issuer or Public Company;
2) Gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan	56-58	2) Description on business prospects; or Public Company; and
3) Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	55-56	3) Implementation of good corporate governance by Issuer or Public Company;
d. Laporan Dewan Komisaris Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	√	d. The Board of Commissioners report The Board of Commissioners Report should at least contain the following items:
1) Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi;	38-40	1) Assessment of the performance of the Board of Directors in managing the Issuer or the Public Company, including the supervision of the Board of Commissioners in the formulation and implementation of the strategy of the Issuer or Public Company carried out by the Board of Directors;
2) Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan	43-44	2) View on the business prospects of the Issuer or Public Company as established by the Board of Directors;
3) Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	40-41	3) View on the implementation of the corporate governance by the Issuer or Public Company;
e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi:		e. Profile of the Issuer or Public Company Profile of the Issuer or Public Company should cover at least:
1) Nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku;	64, 69	1) Name of Issuer or Public Company, including change of name, the reason for the change, and the effective date of the change of name during the year under review



REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021:
CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS
OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
2) Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	√	2) Access to Issuer or Public Company, including branch office or representative office, where the public can have access of information of the Issuer or Public Company, which include:
a) Alamat;	65	b) Address
c) Nomor telepon;	65	c) Telephone number;
d) Alamat surat elektronik; dan	65	d) E-mail address; and
e) Alamat situs web;	65	e) Website address;
3) Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	66-69	3) Brief history of the Issuer or Public Company;
4) Visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) atau nilai-nilai perusahaan;	74-77	4) Vision and mission of the Issuer or Public Company as well as corporate culture or values
5) Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/ atau jasa yang dihasilkan;	78-89	5) Line of business according to the latest Articles of Association, and types of products and/or services produced;
6) Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan.	90-100	6) The operational area of the Issuer or Public Company; operational area is the area or district for implementing operational activities or the range of the company's operational activities.
7) Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan;	102-103	7) Structure of organization of the Issuer or Public Company in chart form, at least 1 (one) level below the Board of Directors, with the names and titles;
8) Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan;	104	8) A list of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance;
9) Profil Direksi, paling sedikit memuat:	√	9) The Board of Directors profiles include:
a) Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;	106-112	a) Name and short description of duties and functions;
b) Foto terbaru;	106-112	b) Latest photograph;
c) Usia;	106-112	c) Age;
d) Kewarganegaraan	106-112	d) Citizenship
e) Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi;	106-112	e) Education and/or certification;
f) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	√	f) History position, covering information on:
(1) Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	106-112	(1) Legal basis for appointment as member of the Board of Directors to the said Issuer or Public Company;
(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan	106-112	(2) Concurrent position, as member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/ or member of committee, and other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Directors does not have concurrent positions, then this is disclosed; and



REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021:
CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS
OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	106-112	(3) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
g) Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan	106-112	g) Disclosure of affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and major or controlling shareholders, either directly or indirectly, to individual owners, including the names of affiliated parties. In the event that a member of the Board of Directors has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; and
h) Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	113	h) Changes in the composition of the Board of Directors and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the Board of Directors, this matter shall be disclosed;
10) Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	√	10) Board of Commissioners Profile, include:
a) Nama dan jabatan;	114-119	a) Name and position;
b) Foto terbaru;	114-119	b) Latest photograph;
c) Usia;	114-119	c) Age;
d) Kewarganegaraan;	114-119	d) Citizenship
e) Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi;	114-119	e) Education and/or certification;
f) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	√	f) History position, covering information on:
(1) Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris;	114-119	(1) Legal basis for appointment as member of the Board of Commissioners
(2) Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	114-115	(2) Legal bases for the first appointment as member of the Board of Commissioners who also Independent Commissioner at the said Issuer or Public Company;
(3) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan	114-119	(3) Concurrent position, as member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of committee, and other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Directors does not have concurrent positions, then this is disclosed; and
(4) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	114-119	(4) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
g) Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut;	114-119	g) Disclosure of affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and major or controlling shareholders, either directly or indirectly, to individual owners, including the names of affiliated parties. In the event that a member of the Board of Directors has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; and



REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021:
CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS
OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
h) Pernyataan independensi Komisaris Independen dalam hal Komisaris Independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan	358	h) Statement of independence of Independent Commissioner in the event that the Independent Commissioner has been appointed more than 2 (two) periods; and
i) Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	120	i) Changes in the composition of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this matter shall be disclosed;
11) Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya;	113, 120	12) In the event that there were changes in the composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors occurring between the period after year-end until the date the Annual Report submitted, then the last and the previous composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors shall be stated in the Annual Report;
12) Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	124-128	12) Number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contracted) in the financial year; Disclosure of information can be presented in table form.
13) Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai:	√	13) Names of shareholders and ownership percentage at the end of the fiscal year, including:
a) Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;	164	a) Shareholders having 5% (five percent) or more shares of Issuer or Public Company;
b) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan	164	b) Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who own shares in Issuers or Public Companies. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not own shares, then this matter is disclosed; and
c) Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik;	164	c) Groups of public shareholders, or groups of shareholders, each with less than 5% (five percent) ownership shares of the Issuers or Public Company;
14) Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	164	14) The percentage of indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the financial year, including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners; In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not have indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company, this matter shall be disclosed.





REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021:
CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS
OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
15) Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:	√	15) Number of shareholders and ownership percentage at the end of the fiscal year, based on:
a) Kepemilikan institusi lokal;	164	a) Ownership of local institutions;
b) Kepemilikan institusi asing;	164	b) Ownership of foreign institutions;
c) Kepemilikan individu lokal; dan	164	c) Ownership of local individual; and
d) Kepemilikan individu asing;	164	d) Ownership of foreign individual;
16) Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	164	16) Information on major shareholders and controlling shareholders the Issuers of Public Company, directly or indirectly, and also individual shareholder, presented in the form of scheme or diagram;
17) Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama; Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut.	165-168	17) Name of subsidiaries, associated companies, joint venture controlled by Issuers or Public Company, with entity, percentage of stock ownership, line of business, total assets and operating status of the Issuers of Public Company (if any); For subsidiaries, include the addresses of the said subsidiaries;
18) Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada);	169	18) Chronology of share listing, number of shares, par value, and bid price from the beginning of listing up to the end of the financial year, and name of Stock Exchange where the Issuers of Public Company shares are listed;
19) Informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada);	169	19) Other securities listing information other than securities as referred to in number 18), which have not matured in the financial year at least containing the name of the securities, year of issue, interest rate/yield, maturity date, offering value, and rating of securities (if any);
20) Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi:	√	20) Information on public accounting services (AP) and public accounting firms (KAP) and their networks/associations/allies includes:
a) Nama dan alamat;	170	a) Name and address;
b) Periode penugasan;	170	b) Assignment period
c) Informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan;	170	c) Information on audit and/or non-audit services provided;
d) Biaya jasa (<i>fee</i>) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan	170	d) Audit and/or non-audit fee for each assignment given during the financial year; and
e) Dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/ aliannya dapat disajikan dalam bentuk tabel.	170	e) In the event that AP and KAP and their network/association/alliance, which are appointed do not provide non-audit services, then the information is disclosed; and Disclosure of information on AP and KAP services and their networks/associations/ allies can be presented in table form.



**REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021:
TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN
EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK**

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021:
CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS
OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
21) Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP.	170-171	21) Name and address of capital market supporting institutions and/or professions other than AP and KAP.
f. Analisis dan Pembahasan Manajemen Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:	√	f. Management Discussion and Analysis Management Analysis and Discussion Annual should contain discussion and analysis on financial statements and other material information emphasizing material changes that occurred during the year under review, at least including:
1) Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	√	1) Operational review per business segment, according to the type of industry of the Issuer or Public Company including:
a) Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;	185-197	a) Production, which includes process, capacity and its development;
b) Pendapatan/penjualan; dan	186-197	b) Income/sales; and
c) Profitabilitas;	186-197	c) Profitability;
2) Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:	√	2) Comprehensive financial performance analysis which includes a comparison between the financial performance of the last 2 (two) fiscal years, and explanation on the causes and effects of such changes, among others concerning:
a) Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;	201-204	a) Current assets, non-current assets, and total assets;
b) Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;	204-207	b) Short term liabilities, long term liabilities, total liabilities;
c) Ekuitas;	207	c) Equities;
d) Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan	208-213	d) Sales/operating revenues, expenses and profit (loss), other comprehensive revenues, and total comprehensive profit (loss); and
e) Arus kas;	214-217	e) Cash flows;
3) Kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	219-220	3) The capacity to pay debts by including the computation of relevant ratios;
4) Tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	221	4) Accounts receivable collectability of the Issuer or Public Company, including the computation of the relevant ratios;
5) Struktur modal (<i>capital structure</i>) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure</i>) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud;	222-224	5) Capital structure and management policies concerning capital structure, including the basis for determining the said policy;
6) Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat:	224	6) Discussion on material ties for the investment of capital goods, including the explanation on at least:
a) Tujuan dari ikatan tersebut;	N/A	a) The purpose of such ties;
b) Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut;	N/A	b) Source of funds expected to fulfill the said ties;
c) Mata uang yang menjadi denominasi; dan	N/A	c) Currency of denomination; and
d) Langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;	N/A	d) Steps taken by the Issuer of Public Company to protect the position of a related foreign currency against risks;



REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021:
CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS
OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
7) Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat:	√	7) Discussion on investment of capital goods which was realized in the last fiscal year, at least include:
a) Jenis investasi barang modal;	224-225	a) Type of investment of capital goods;
b) Tujuan investasi barang modal;	224-225	b) Objective of the investment of capital goods;and
c) Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan;	224-225	c) Value of the investment of capital goods;
8) Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada);	226	8) Material Information and facts that occurring after the date of the accountant's report (if any);
9) Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya;	250-251	9) Information on the prospects of the Issuer or the Company in connection with industry,economy in general, accompanied with supporting quantitative data if there is a reliable data source;
10) Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:	√	10) Comparison between target/projection at beginning of year and result (realization), concerning:
a) Pendapatan/penjualan;	227-228	a) Income/sales;
b) Laba (rugi);	228	b) Profit (loss);
c) Struktur modal (<i>capital structure</i>); atau	228	c) Capital structure; or
d) Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	227-228	d) Others that deemed necessary for the Issuer or Public Company;
11) Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:	√	11) Target/projection at most for the next one year of the Issuer or Public Company, concerning:
a) Pendapatan/penjualan;	256	a) Income/sales;
b) Laba (rugi);	256	b) Profit (loss);
c) Struktur modal (<i>capital structure</i>);	257	c) Capital structure;
d) Kebijakan dividen; atau	233	d) Dividend policy; or
e) Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	251-257	e) Or others that deemed necessary for the Issuer or Public Company;
12) Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;	198-200	12) Marketing aspects of the company's products and/or services the Issuer or Public Company, among others marketing strategy and market share;
13) Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit:	√	13) Description regarding the dividend policy during the last 2 (two) fiscal years, at least:
a) Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih;	233	a) Dividend policy, which includes information on the percentage of dividends distributed to net income;
b) Tanggal pembayaran dividen kas dan/ atau tanggal distribusi dividen non kas;	233	b) The date of the payment of cash dividend and/or date of distribution of non-cash dividend;
c) Jumlah dividen per saham (kas dan/ atau non kas); dan	233-234	c) Amount of cash per share (cash and/ or non cash); and
d) Jumlah dividen per tahun yang dibayar;	233-234	d) The amount of dividends paid per year;
Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	√	Disclosure of information can be presented in table form.



REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021:
CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS
OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	233-234	In the event that the Issuer or Public Company does not distribute dividends in the last 2 (two) years, this matter shall be disclosed.
14) Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan:	234	14) Use of proceeds from Public Offerings, under the condition of:
a) Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan	N/A	a) During the year under review, on which the Issuer has the obligation to report the realization of the use of proceeds, then the realization of the cumulative use of proceeds until the year end should be disclosed; and
b) Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut;	N/A	b) In the event that there were changes in the use of proceeds as stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority on the Report of the Utilization of Proceeds from Public Offering, then Issuer should explain the said changes;
15) Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat:	√	15) Material information (if any), among others concerning investment, expansion, divestment, acquisition, debt/capital restructuring, transactions with related parties and transactions with conflict of interest that occurred during the year under review, along others include:
a) Tanggal, nilai, dan objek transaksi;	236-237	a) Transaction date, value and object;
b) Nama pihak yang melakukan transaksi;	239-242	b) Name of transacting parties;
c) Sifat hubungan afiliasi (jika ada);	239-242	c) The nature of the affiliate relationship (if any);
d) penjelasan mengenai kewajaran transaksi;	243	d) Description of the fairness of the transaction; dan
e) Pemenuhan ketentuan terkait; dan	243	e) Compliance with related rules and regulations;
f) Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi:	√	f) In the event that there is an affiliation relationship, in addition to disclosing the information as referred to in letter a) to letter e), the Issuer or Public Company also discloses information:
(1) Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>arm's length principle</i>); dan	243	(1) A statement from the Board of Directors that the affiliate transaction has conducted through adequate procedures to ensure that the affiliate transaction is in line with generally accepted business practices, among others, by complying with the arm's length principle; and
(2) Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>arm's length principle</i>);	243	(2) The Board of Commissioners and the audit committee roles in carrying out adequate procedures to ensure that affiliate transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, among others, by complying with the arm's length principle;



REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021:
CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS
OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
g) Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/ atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/ atau berkelanjutan; Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut.	238-243	g) For affiliate transactions or material transactions which are business activities carried out in order to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/ or continuously, an explanation is added that the affiliate transactions or material transactions are business activities carried out in order to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/ or continuously; In the event that the affiliated transactions or material transactions referred to have been disclosed in the annual financial statements, additional information regarding the disclosure reference in the annual financial statements is added.
h) Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/ atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/ atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/ atau transaksi benturan kepentingan tersebut;	N/A	h) For disclosure of affiliate transactions and/ or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliate transactions and/ or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/ or conflict of interest transactions is added;
i) Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/ atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	N/A	i) In the event that there is no affiliate transaction and/ or conflict of interest transaction, then this matter shall be disclosed;
16) Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	244-245	16) Changes in regulation which have a significant effect on the Issuer or Public Company and impacts on the company (if any); and
17) Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada).	245-246	18) Changes in the accounting policy, rationale and impact on the financial statement (if any);
g. Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	√	g. Corporate Governance of the Issuer or Public Company Corporate Governance of the Issuer or Public Company contains at least:
1) RUPS, paling sedikit memuat:	√	1) GMS, at least contains:
a) Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi:	√	a) Information on the resolution from the AGM of the previous 1 (one) year, covering:
(1) Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan	277-279, 283-285	(1) Resolutions of the GMS in the financial year and 1 (one) year before the financial year are realized in the financial year; and
(2) Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan;	N/A	(2) Resolutions of the GMS for the financial year and 1 (one) year prior to the financial year that have not been realized and the reasons for not realizing them;



REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021:
CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS
OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
b) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	277, 283, 289, 299	b) In the event that the Issuer or Public Company uses an independent party in GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed;
2) Direksi, paling sedikit memuat:	√	2) Board of Directors, at least contains:
a) Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;	319-320	a) Duties and responsibilities of each member of the Board of Directors;
Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel.	√	Information regarding the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is described and can be presented in table.
b) Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Direksi;	314-315	b) Statement that the Board of Directors has already have board manual or charter;
c) Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS;	276, 282, 321-339	c) Policies and frequency of Board of Directors meetings, joint meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and the attendance of members of the Board of Directors in the meeting including attendance at the GMS;
Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	√	Information on the attendance of members of the Board of Directors at the meeting of the Board of Directors, joint meeting of the Board of Directors with the Board of Commissioners, or the GMS can be presented in table.
d) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi:	√	d) Training and/or competency of members of the Board of Directors:
(1) Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan	344-345	(1) Policies related to training and/ or the competence improvement of members of the Board of Directors, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); and
(2) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada);	345-347	(2) Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the financial year (if any);
e) Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat:	N/A	e) The Board of Directors' assessment of the committees' performance that support the implementation of the Board of Directors' duties for the financial year shall at least contain:
(1) Prosedur penilaian kinerja; dan	N/A	(1) Performance appraisal procedures; and
(2) Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan	N/A	(2) The criteria used such as performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings; and
f) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	37	f) In the event that the Issuer or Public Company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, then this shall be disclosed.
3) Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	√	3) The Board of Commissioners, cover:



REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021:
CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS
OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
a) Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;	362-367	a) Duties and responsibilities of the Board of Commissioners
b) Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Dewan Komisaris;	361-362	b) Statement that the Board of Commissioner has already have the board manual or charter;
c) Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS;	276, 282, 368-373, 335-339	c) Policies and the frequency of the Board of Commissioners meetings, joint meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the attendance of members of the Board of Commissioners at the meeting including attendance at the GMS;
Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	√	Information on the attendance of members of the Board of Commissioners at the meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors, or the GMS can be presented in table.
d) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris:	√	d) Training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners:
(1) Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan	374-375	(1) Policies on training and/or the competency improvement of members of the Board of Commissioners, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and
(2) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada);	375-376	(2) Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Commissioners in the financial year (if any);
e) Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	√	e) Performance appraisal of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners, at least contain:
(1) Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja;	377, 382, 383-384	(1) Procedure for the implementation of performance assessment;
(2) Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan	377-382, 384-386	(2) The criteria used such as performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings; and
(3) Pihak yang melakukan penilaian; dan	377, 382, 383	(3) Assessor;
f) Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi:	√	f) The Board of Commissioners' assessment of the Committees' performance that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the financial year includes:
(1) Prosedur penilaian kinerja; dan	386-388	(1) Performance appraisal procedures; and
(2) Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat;	386-388	(2) The criteria used such as performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings;



**REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021:
TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN
EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK**

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021:
CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS
OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
4) Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	√	4) The nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall at least contain:
a) Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan	388-389	a) Nomination procedure, including a brief description of the policies and process for nomination of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and
b) Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:	√	b) Procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, including:
(1) Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;	389-390	(1) The procedure for determining the remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners;
(2) Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan	390-395	(2) The remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus and others; and
(3) Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	390-395	(3) The amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners; Disclosure of information can be presented in table.
5) Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat:	N/A	6) Sharia Supervisory Board, for Issuer or Public Company that conduct business based on sharia law, as stipulated in the articles of association, at least containing:
a) Nama;	N/A	a) Name;
b) Dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah;	N/A	b) Legal basis of appointment of Sharia Supervisory Board
c) Periode penugasan dewan pengawas syariah;	N/A	c) Term of office of Sharia Supervisory Board
d) Tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan	N/A	d) Duty and responsibility of Sharia Supervisory Board; and
e) Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;	N/A	e) Frequency and procedure in providing advice and suggestion, as well as the compliance of Sharia Principles of the Issuer or Public Company in the Capital Market;
6) Komite audit, paling sedikit memuat:	√	6) Audit Committee, among others covering:
a) Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	401-402	a) Name and position in the committee;
b) Usia;	402	b) Age;
c) Kewarganegaraan;	402	c) Citizenship;
d) Riwayat pendidikan;	402	d) Education background;
e) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	√	f) History of position; including:
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	401-402	(1) Legal basis for the appointment as member of the committee;



REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021:
CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS
OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	402	(2) Dual position, as a member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or member of committee, and other position (if any); and
(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	402	(2) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
f) Periode dan masa jabatan anggota komite audit;	401-402	f) Period and terms of office of the member of Audit Committee;
g) Pernyataan independensi komite audit;	405	g) Statement of independence of the Audit Committee;
h) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada);	405	h) Training and competency development participated in during the book year.
i) Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan	406-408	i) Policies and implementation of the frequency of meeting of the Audit Committee and attendance of member of Audit Committee; and
j) Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (<i>charter</i>) komite audit;	408-409	j) The activities of the Audit Committee in the year under review, in accordance with the Audit Committee Charter;
7) Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	√	7) Committee or remuneration and nomination functions of Issuer or Public Company at least contains;
a) Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	410-411	a) Name and position in the committee;
b) Usia;	411	b) Age;
c) Kewarganegaraan;	411	c) Citizenship;
d) Riwayat pendidikan;	411	d) Education background;
e) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	√	e) History of position; including:
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	410-411	(1) Legal basis for the appointment as member of the committee;
(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	411	(2) Dual position, as a member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or member of committee, and other position (if any); and
(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	411	(3) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
f) Periode dan masa jabatan anggota komite;	410-411	f) Period and terms of office of the member of Audit Committee;
g) Pernyataan independensi komite;	412	g) Statement of independence of the Committee;
h) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada);	413	h) Training and/or competency development participated in during the book year
i) Uraian tugas dan tanggung jawab;	413-414	i) Description of duty and responsibility;
j) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) komite;	414	i) The statement that the Committee has already had the Charter;



REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021:
CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS
OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
k) Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut;	414-416	l) Policies and frequency of meeting of the committee, and attendance of each member of the committee in the said meetings;
l) Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan	417	l) Brief description on the activities of the committee;
m) Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan:	N/A	m) In the event that nomination and remuneration committee is not formed, the Issuer or Public Company is sufficient to disclose the information as referred to in letter i) to letter l) and disclose:
(1) Alasan tidak dibentuknya komite; dan	N/A	(1) The reason why does not form the committee
(2) Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;	N/A	(2) The party who carries out the nomination and remuneration function;
8) Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	√	8) Other committees owned by the Issuer or Public Company in order to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees that support the functions and duties of the Board of Commissioners, at least contains;
a) Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	418-420, 427-428	a) Name and position in the committee;
b) Usia;	419-420, 428	b) Age;
c) Kewarganegaraan;	419-420, 428	c) Citizenship;
d) Riwayat pendidikan;	419-420, 428	d) Education background;
e) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	√	e) History of position; including:
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	418-420, 427-428	(1) Legal basis for the appointment as member of the committee;
(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	419-420, 428	(2) Dual position, as a member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or member of committee, and other position (if any); and
(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	419-420, 428	(3) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
f) Periode dan masa jabatan anggota komite;	418-420, 427-428	f) Period and terms of office of the member of Audit Committee;
g) Pernyataan independensi komite;	420-421, 428-429	g) Statement of independence of the Committee;
h) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	421, 429	h) Training and/or Competency Development participated in during the book year; i) Uraian tugas dan tanggung jawab;
i) Uraian tugas dan tanggung jawab;	421-422, 429-431	i) Description of duty and responsibility
j) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) komite;	422, 431	j) The statement that the Committee has already had the Charter;



REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021:
CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS
OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
k) Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan	422-425, 431-433	k) Policies and frequency of meeting of the committee, and attendance of each member of the committee in the said meetings;
l) Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku;	425-426, 433-434	l) Brief description on the activities of the committee;
9) Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat:		10) Corporate Secretary, including:
a) Nama;	438	a) Name;
b) Domisili;	157	b) Domicile;
c) Riwayat jabatan, meliputi:	√	c) History of position, including:
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan	157, 438	(1) Legal basis for the appointment as Corporate Secretary; and
(2) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	157	(2) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
d) Riwayat pendidikan;	157	d) Education background;
e) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan	440	e) Training and competency development participated in during the book year
f) Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku;	440-441	f) Brief description on the implementation of duties of the Corporate Secretary in the year under review;
10) Unit audit internal, paling sedikit memuat:	√	10) Internal Audit Unit, among others including:
a) Nama kepala unit audit internal;	442	a) Name of Head of Internal Audit Unit;
b) Riwayat jabatan, meliputi:	√	b) History of position, including:
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan	155, 442	(1) Legal basis for the appointment as Head of Internal Audit Unit; and
(2) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	155	(2) Working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
c) Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);	443-444	c) Qualification or certification as internal auditor (if any);
d) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku;	444-445	d) Training and/or Competency Development participated in during the book year
e) Struktur dan kedudukan unit audit internal;	445-446	e) Structure and position of Internal Audit Unit;
f) Uraian tugas dan tanggung jawab;	447-448	f) Description of duties and responsibilities;
g) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) unit audit internal; dan	448	g) Statement that the Internal Audit Unit has already have Internal Audit Unit charter; and
h) Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit;	449	h) Brief description of the duties implementation of the internal audit unit in the financial year including the policy and implementation of the frequency of meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or audit committee;
11) Uraian mengenai sistem pengendalian internal (<i>internal control</i>) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	√	11) Description on internal control system adopted by the Issuer or Public Company, at least covering:



REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021:
CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS
OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
a) Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya;	454-455	a) Financial and operational control, and compliance to the other prevailing rules; and
b) Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan	455	b) Review on the effectiveness of internal control systems;
c) Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal;	455-456	c) Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;
12) Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	√	12) Risk management system implemented by the company, at least includes:
a) Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	456-464	a) General description about the company's risk management system the Issuer or Public Company;
b) Jenis risiko dan cara pengelolaannya;	464-467	b) Types of risk and the management; and
c) Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan	468-470	c) Review the effectiveness of the risk management system applied by the Issuer or Public Company; and
d) Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko;	470-471	d) Statement of the Board of Directors and/ or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system;
13) Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat:	√	13) Legal cases that have a material impact faced by Issuers or Public Companies, subsidiaries, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners (if any), at least contain:
a) Pokok perkara/gugatan;	472-473	a) Substance of the case/claim;
b) Status penyelesaian perkara/gugatan; dan	472-473	b) Status of settlement of case/claim; and
c) Pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;	473-473	c) Potential impacts on the condition of the Issuer or Public Company;
14) Informasi tentang sanksi administratif/ sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada);	474	14) Information about administrative sanctions imposed to Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, by the Capital Market Authority and other authorities during the last fiscal year (if any);
15) Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi:	√	15) Information about codes of conduct of the Issuer or Public Company, includes:
a) Pokok-pokok kode etik;	475-477	a) Key points of the code of conduct;
b) Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan	477-479	b) Socialization of the code of conduct and enforcement; and
c) Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	477-479	c) Statement that the code of conduct is applicable for the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees of the Issuer of Public Company;



REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021:
CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS
OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
16) Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/ atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (<i>management stock ownership program/ MSOP</i>) dan/ atau program kepemilikan saham oleh karyawan (<i>employee stock ownership program/ ESOP</i>); Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (<i>management stock ownership program/ MSOP</i>) dan/ atau program kepemilikan saham oleh karyawan (<i>employee stock ownership program/ ESOP</i>), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat:	481	16) A brief description of the policy for providing long-term performance-based compensation to management and/ or employees owned by the Issuer or Public Company (if any), including the management stock ownership program (ESOP) and/ or program employee stock ownership (ESOP); In terms of providing compensation in the form of a management stock ownership program (ESOP) and/ or employee stock ownership program (ESOP), the information disclosed must at least contain:
a) Jumlah saham dan/atau opsi;	N/A	a) Number of share and/or option;
b) Jangka waktu pelaksanaan;	N/A	b) Period;
c) Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan	N/A	c) The requirement for eligible employee and/or management; and
d) Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan;	N/A	d) Exercised price;
17) Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai:	481	17) A brief description of the information disclosure policy regarding:
a) Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan	N/A	a) Share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a Public Company; and
b) Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud;	N/A	b) Implementation of that policy;
18) Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	√	18) A description of the whistleblowing system in the Issuer or Public Company, at least contains;
a) Cara penyampaian laporan pelanggaran;	482-487	a) Mechanism for violation reporting;
b) Perlindungan bagi pelapor;	488-490	b) Protection for the whistleblower;
c) Penanganan pengaduan;	490-491	c) Handling of violation reports;
d) Pihak yang mengelola pengaduan; dan	491-493	d) Unit responsible for handling of violation report; and
e) Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit:	√	e) Results from violation report handling, at least includes:
(1) Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan	492	(1) Number of complaints received and processed during the fiscal year; and
(2) Tindak lanjut pengaduan;	492	(2) Follow up of complaints;
Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>), maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	N/A	In the event that the Issuer or Public Company does not have a whistleblowing system, it is disclosed regarding this matter
19) Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	√	19) A description of the anti-corruption policy of the Issuer or Public Company, at least contains;



REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021:
CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS
OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
a) Program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>fraud</i> , suap dan/ atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan	494-495, 500-503	a) Programs and procedures implemented in overcoming corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratuities in Issuers or Public Companies; and
b) Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	496	b) Anti-corruption training/socialization to employees of Issuers or Public Companies;
Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud.	N/A	In the event that the Issuer or Public Company does not have an anti-corruption policy, the reasons for not having the said policy are explained.
20) Penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi:	√	20) Implementation of the Guidelines of Corporate Governance for Public Companies for Issuer issuing Equity-based Securities or Public Company, including:
a) Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau	506-527	a) Statement regarding the recommendation that has been implemented; and/or
b) Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada).	506-527	b) Description of recommendation that has not been implemented, along with the reason and alternatives of implementation (if any);
Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	√	Disclosure of information can be presented in table.
h. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik	√	h. Social and Environmental Responsibility of the Issuer or Public Company
1) Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	√	1) Information disclosed in the social and environmental responsibility section is a Sustainability Report as referred to in the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, containing at least:
a) Penjelasan strategi keberlanjutan;	√	a) Sustainability strategy explanation;
b) Ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup);	√	b) Sustainability aspects overview (economic, social and environmental);
c) Profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	√	c) Brief Profile of Issuers or Public Company;
d) Penjelasan Direksi;	√	d) The Board of Directors explanation;
e) Tata kelola keberlanjutan;	√	e) Good corporate governance;
f) Kinerja keberlanjutan;	√	f) Sustainability Governance;
g) Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada;	√	g) Written verification from an Independent Party (if any);
h) Lembar umpan balik (<i>feedback</i>) untuk pembaca, jika ada; dan	√	h) Feedback sheet for stakeholders (if any);
i) Tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya;	√	i) The Issuer or Public Company response to the previous year's report feedback;



REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: TENTANG BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

REFERENCE TO SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021:
CONCERNING THE FORM AND CONTENT OF ANNUAL REPORTS OF ISSUERS
OR PUBLIC COMPANIES

Keterangan	Halaman Page	Description
j. Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal Emiten merupakan perusahaan efek.	625-812	j. Audited Financial Statements The annual financial statements contained in the Annual Report are prepared in accordance with financial accounting standards in Indonesia and have been audited by a public accountant registered with the Financial Services Authority. The said annual financial report contains a statement regarding the accountability for financial statements as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the Board of Directors' responsibility for financial reports or the laws and regulations in the capital market sector which regulates the periodic reports of securities companies in the event that the Issuer is a securities company.
k. Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	60-61	k. Letter of Statement of the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the Responsibility for Annual Reporting Letter of statement of the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the responsibility for Annual Reporting should be prepared according to the format of letter of statement of member of Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the responsibility for Annual Reporting as attached in the Attachment, which is an integral part of this Circulation Letter of the Financial Services Authority



**Laporan Keuangan
Konsolidasian**
Consolidated Financial Report

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN / AND
ENTITAS ANAK / ITS SUBSIDIARIES
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN /
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
DAN / AND
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN /
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
*As of December 31, 2024 and for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)*

Nomor / Number : 00126/2.0999/AU.1/06/0139-4/1/IV/2025
Tanggal / Date : 08 April / April 08, 2025

DAFTAR ISI**TABLE OF CONTENTS**Halaman /
Pages**SURAT PERNYATAAN DIREKSI****DIRECTOR'S REPRESENTATIVE LETTER****LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN****INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT****LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK****CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF
PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**

• LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2024 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023) • LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 (Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023) • LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 (Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023) • LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 (Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023) • CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2024 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)	1 - 2 3 4 5 6 - 171	• CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (BALANCE SHEETS) <i>As of Desember 31, 2024 (With Comparative as of December 31, 2023)</i> • CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME <i>For the Year Ended December 31, 2024 (With Comparative for The Year Ended December 31, 2023)</i> • CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY <i>For the Year Ended December 31, 2024 (With Comparative for The Year Ended December 31, 2023)</i> • CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS <i>For the Year Ended December 31, 2024 (With Comparative for The Year Ended December 31, 2023)</i> • NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS <i>As of December 31, 2024 and for The Year then Ended (With Comparative as of December 31, 2023 and for The Year then Ended)</i>

Informasi Tambahan:**Additional Information:****LAPORAN KEUANGAN POKOK
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)****FINANCIAL STATEMENTS OF
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)****(Informasi Keuangan - Entitas Induk Saja sebagai
Laporan Keuangan Tersendiri)****(Financial Information - Parent Entity Only, As a
Separate Financial Statements)**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)

As of December 31, 2024 and for The Year then Ended (With Comparative as of December 31, 2023 and for The Year then Ended)

• Laporan Posisi Keuangan (Neraca) - Induk Saja • Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain - Induk Saja • Laporan Perubahan Ekuitas - Induk Saja • Laporan Arus Kas - Induk Saja	• <i>Statements of Financial Position (Balance Sheets) - Parent Only</i> • <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income - Parent Only</i> • <i>Statements of Changes in Equity - Parent Only</i> • <i>Statement of Cash Flows - Parent Only</i>

SURAT PERNYATAAN DIREKSI /
DIRECTOR'S REPRESENTATIVE LETTER

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS
AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024
PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) AND
ITS SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Andayani
Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No. 14 Jakarta, 10130
NIK : 3175076907730002
Jabatan : Direktur Utama / President Director

: We, the undersigned
: Name
: Office Address
: ID Number
: Position

Nama : Anik Hidayati
Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No. 14 Jakarta, 10130
NIK : 3578036010660003
Jabatan : Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
/ Finance and Risk Management Director

: Name
: Office Address
: ID Number
: Position

Menyatakan bahwa :

State that :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Entitas Anaknya untuk memungkinkan penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

1. We are responsible for preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and its Subsidiaries;
2. The consolidated financial statements of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and its Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information contained in the consolidated financial statements of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and its Subsidiaries are complete and correct;
b. The consolidated financial statements of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and its Subsidiaries do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;
4. We are responsible for the internal control system within PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and its Subsidiaries to enable the preparation of the Consolidated Financial Statements to be free from material misstatement, whether caused by fraud or error.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 08 April 2025/ April 08, 2025
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

**Direktur Utama
/ President Director**

**Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
/ Finance and Risk Management Director**




Anik Hidayati

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN /
*INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT***

Nomor :

00126/2.0999/AU.1/06/0139-4/1/IV/2025

Number :

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
**Pemegang Saham, Dewan dan Direksi Komisaris
 PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)**
**Shareholders, Boards of Commissioners and Directors
 PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)**
Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Entitas Anak ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan konsolidasian.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas Laporan Keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir dilaksanakan dengan tujuan merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan tambahan PT Pelayaran Nasional Indonesia (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Pelayaran Nasional Indonesia and its subsidiaries ("the Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2024, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies. We also conduct tests of adherence to laws and regulations and internal control direct and material effect on the consolidated financial statements.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2024, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Other matters

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of the PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and its Subsidiaries as at December 31, 2024 and for the year then ended was performed for the purpose of forming an opinion on these consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Pelayaran Nasional Indonesia (parent entity only), which comprises the statement of financial position as at December 31, 2024, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purpose of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

HEAD OFFICE :

Graha Mandiri d/h Plaza Bumi Daya 17th Floor Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat 10310 Indonesia
 Phone : 62-21 39838734, 39838735, Fax : 62-21 39832081
 Website : www.kapdsi.com, E-mail : kapdsi.kpusat@gmail.com
 NIKAP : 959/KM.1/2014

Selanjutnya, mendasar pada pengalaman penagihan PSO selama 5 (lima) tahun terakhir (2019 - 2023), maka Grup menerapkan kebijakan pencadangan PSO pada tahun buku 2024 sebagaimana tersebut pada catatan 5, huruf i dan catatan 22.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola Terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Furthermore, based on the PSO collection experience over the last 5 (five) years (2019 - 2023), the Group has implemented a PSO reserve policy in the 2024 financial year as stated in note 5, letter i and note 22.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standard on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standard on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK DJOKO, SIDIK & INDRA
DJOKO, SIDIK & INDRA REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS


 Indra Soesetawan, Ak., CA., CPA., ASEAN CPA., CPI.
 NRAP / Public Accountant License AP. 0139

08 April / April 08, 2025



NOTICE TO READERS

The above auditor's report and the accompanying consolidated financial statements are English translations of the Indonesian auditor's report and consolidated financial statements enclosed prepared for and used in Indonesia. The accompanying consolidated financial statements were prepared using accounting principles, procedures and reporting practices generally accepted in Indonesia and are not intended to present the financial positions, financial performances and their cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices utilized to audit such consolidated financial statements are conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN /
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (NERACA)
Tanggal 31 Desember 2024
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (BALANCE SHEETS)
As of December 31, 2024
(With Comparative as of December 31, 2023)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	31 Des./ Dec. 31, 2024	31 Des./ Dec. 31, 2023	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	4c;4g;4h;4k;6	4.114.738.607.336	3.494.572.510.108	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha (Setelah dikurangi provisi penurunan nilai tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp66.067.747.913 dan Rp54.379.676.429)	4g;4h;7	125.898.446.328	118.837.699.666	Accounts Receivables (Net of provision for impairment as of December 31, 2024 and 2023 amounting to Rp66,067,747,913 and Rp54,379,676,429, respectively)
Aset Keuangan Lancar Lainnya (Setelah dikurangi provisi penurunan nilai tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp7.005.188.441 dan Rp7.339.359.681)	4g;4h;4l;8	2.053.078.385.342	811.020.551.456	Other Current Financial Assets (Net of provision for impairment as of December 31, 2024 and 2023 amounting to Rp7,005,188,441 and Rp7,339,359,681, respectively)
Persediaan	4m;9	482.189.938.978	375.462.947.659	Inventories
Pajak Dibayar Dimuka	4y;10a	56.360.049.198	39.966.597.357	Prepaid Taxes
Uang Muka	4n;11	223.879.880.785	154.888.050.845	Advances Payment
Biaya Dibayar Dimuka	4n;12	81.663.773.832	67.295.671.788	Prepaid Expenses
Jumlah Aset Lancar		7.137.809.081.799	5.062.044.028.878	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON CURRENT ASSETS
Investasi pada Entitas Asosiasi	4o;13	218.729.401.463	240.324.819.715	Investment in Associate
Properti Investasi	4p;4s;14	208.542.334.575	183.938.230.000	Investment Properties
Alat Produksi (Setelah dikurangi akumulasi penyusutan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp7.432.488.543.956 dan Rp7.094.083.503.857)	4q;4s;15	2.089.723.250.209	2.157.776.604.669	Production Equipment (Net of accumulated depreciation as of December 31, 2024 and 2023, amounting to Rp7,432,488,543,956 and Rp7,094,083,503,857, respectively)
Aset Tetap (Setelah dikurangi akumulasi penyusutan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp267.064.981.056 dan Rp266.643.327.207)	4q;4s;16	337.056.643.917	298.020.673.453	Production Equipment (Net of accumulated depreciation as of December 31, 2024 and 2023, amounting to Rp267,064,981,056 and Rp266,643,327,207, respectively)
Aset Tak Berwujud	4r;4s;17	18.945.661.304	18.294.398.360	Intangible Assets
Aset Hak Guna	4u;18	5.074.483.144	3.903.429.867	Right of Use Assets
Aset Pajak Tangguhan	4y;10d	67.851.977.285	71.660.641.912	Deferred Tax Assets
Aset Tidak Lancar Lainnya	19	155.472.091	69.670.750	Other Non Current Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		2.946.079.223.988	2.973.988.468.726	Total Non Current Assets
JUMLAH ASET		10.083.888.305.787	8.036.032.497.605	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan /
The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (NERACA)
Tanggal 31 Desember 2024
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (BALANCE SHEETS)
As of Desember 31, 2024
(With Comparative as of December 31, 2023)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	31 Des./ Dec. 31, 2024	31 Des./ Dec. 31, 2023	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				SHORT TERM LIABILITIES
Pinjaman Jangka Pendek	4g;4i;20	7.000.000.000	22.000.000.000	Short-Term Loans
Utang Usaha	4g;4i;21	218.134.048.166	205.462.829.587	Trade Payable
Beban Akrua	4i;22	918.686.105.264	599.334.661.433	Accrued Expenses
Liabilitas Kontrak	4i;4t;23	94.463.591.779	78.061.221.471	Contract Liability
Utang Pajak	4y;10b	31.199.706.642	59.340.710.336	Tax Payables
Bagian Lancar atas:				Current Portion of:
Utang Kepada Negara	4g;4i;25	3.560.447.790	3.621.510.600	Debt to the State
Liabilitas Jangka Panjang	4i;26	278.815.061	4.519.052.786	Long-Term Liabilities
Liabilitas Keuangan				Other Short Term
Jangka Pendek Lainnya	4i;24	149.448.170.961	39.898.210.351	Financial Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		1.422.770.885.663	1.012.238.196.564	Total Short-term Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				LONG TERM LIABILITIES
Utang Kepada Negara	4g;4i;25	24.923.134.530	28.972.084.800	Debt to the State
Liabilitas Jangka Panjang	4i;26	10.114.309.854	8.228.142.102	Long-term Liabilities
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja				Long term
Jangka Panjang	4v;27	103.029.481.167	162.853.081.134	Employee Benefits
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		138.066.925.551	200.053.308.036	Total Long-term Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		1.560.837.811.214	1.212.291.504.600	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal Saham - nilai nominal	28	7.629.900.000.000	7.629.900.000.000	Shares Capital - par value of
Rp 1.000.000 per saham. Modal				Rp 1,000,000 per share. Authorized
dasar 13.000.000 saham Modal				capital 13,000,000 shares Issued
ditempatkan dan disetor penuh –				and fully paid capital - 7,629,900
7.629.900 saham per 31 Desember				shares as of December 31, 2024 and
2024 dan 2023				2023
Penyertaan Modal Pemerintah	29	1.500.143.585.642	143.585.642	Government Capital
Tambahan Modal Disetor	30	397.878.907.714	397.878.907.714	Additional paid in Capital
Cadangan	4z;31	1.543.866.979.147	1.342.665.131.496	Appropriated Related Earnings
Saldo Laba (Defisit)	4z;32	(2.460.466.230.027)	(2.453.137.655.701)	Accumulated Deficit
Komponen Ekuitas Lainnya	4v;33	(92.536.781.736)	(97.593.396.190)	Other Equity Component
Jumlah ekuitas yang dapat				Total equity attributable
diatribusikan kepada				to owners of
pemilik entitas induk		8.518.786.460.740	6.819.856.572.960	the company
Kepentingan Non Pengendali	4d;34	4.264.033.833	3.884.420.045	Non Controlling Interest
JUMLAH EKUITAS		8.523.050.494.573	6.823.740.993.005	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN				TOTAL LIABILITIES AND
EKUITAS		10.083.888.305.787	8.036.032.497.605	EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan /
The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended December 31, 2024
(With Comparative for The Year
Ended December 31, 2023)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2024	2023	
Pendapatan Usaha, Bersih	4x;35	6.177.056.564.719	5.766.618.594.021	Operating Revenues, Netto
Beban Pokok Usaha	4x;36	5.130.011.101.665	4.894.057.572.901	Operating Expenses
Laba Kotor		1.047.045.463.054	872.561.021.120	Gross Profit
Beban Pemasaran dan Distribusi	4x;37	24.615.051.082	21.181.336.363	Distribution and Marketing Expenses
Beban Umum dan Administrasi	4x;38	828.673.798.430	732.263.704.100	General and Administrative Expenses
Laba (Rugi) Usaha		193.756.613.542	119.115.980.657	Operating Profit or (Loss)
Pendapatan Non Usaha - Bersih	4x;39	108.669.103.118	179.404.869.552	Non Operating Income - Net
Laba Sebelum Pajak		302.425.716.660	298.520.850.209	Profit Before Tax
Beban Pajak	4y;10c	(108.175.281.889)	(96.889.623.714)	Tax Expenses
Laba Tahun Berjalan		194.250.434.771	201.631.226.495	Profit for the Current Year
Penghasilan Komprehensif Lain				Other Comprehensive Income
Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:				Items That Will Not be Reclassified Subsequently To Profit or Loss:
Keuntungan (Kerugian)				Actuarial Gain (Loss)
Aktuarial Periode Berjalan	4v	4.201.114.453	(69.936.652.767)	for the Period
Keuntungan (Kerugian)				Fair Values of Property
Nilai Wajar Aset Tetap	4v	855.500.000	6.164.655.000	Gain (Loss) Current Period
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain		5.056.614.453	(63.771.997.767)	Total Other Comprehensive Income
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan		199.307.049.224	137.859.228.728	Total Comprehensive Income of The Current Year
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:				Profit for the Current Year Attributable to:
Pemilik Entitas Induk		193.873.273.327	201.201.847.651	Owner of the Company
Kepentingan Nonpengendali		377.161.444	429.378.844	Non Controlling Interest
Jumlah		194.250.434.771	201.631.226.495	Total
Jumlah Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada:				Total Comprehensive Income Attributable to:
Pemilik Entitas Induk		198.927.435.431	137.427.636.840	Owners of the Company
Kepentingan Nonpengendali		379.613.793	431.591.888	Non Controlling Interest
Jumlah		199.307.049.224	137.859.228.728	Total
Laba Bersih Per Saham Dasar	4aa	25.459,11	26.426,46	Basic Earnings Per Share

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan/
The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2024
(With Comparative for The Year Ended December 31, 2023)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid of Shares Capital	Penyertaan Modal Pemerintah/ Government Capital	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Cadangan Ditetapkan Penggunaannya/ Appropriated Retained Earnings	Saldo Rugi (Defisit)/ Retained Earnings (Deficits)	Komponen Ekuitas Lainnya/ Other Equity Components	Kepentingan Non- Pengendali/ Non-Controlling Interest	Jumlah Ekuitas/ Total Equity
Saldo per 31 Desember 2022		7.629.900.000.000	143.585.642	397.878.907.714	1.169.417.204.918	(2.481.091.576.776)	(33.821.398.422)	3.397.828.157	6.685.824.551.233
Laba Tahun Berjalan	42;32	-	-	-	-	201.201.847.651	-	429.378.844	201.631.226.495
Cadangan	42;31	-	-	-	173.247.926.578	(173.247.926.578)	-	-	-
Keuntungan (Kerugian) Aktuaria		-	-	-	-	-	(69.936.652.767)	2.213.044	(69.934.439.723)
Keuntungan (Kerugian)		-	-	-	-	-	-	-	-
Nilai Wajar Aset Tetap		-	-	-	-	-	6.164.655.000	-	6.164.655.000
Investasi Entitas Grup		-	-	-	-	-	-	55.000.000	55.000.000
Saldo per 31 Desember 2023		7.629.900.000.000	143.585.642	397.878.907.714	1.342.665.131.496	(2.453.137.655.703)	(97.593.396.189)	3.884.420.045	6.823.740.993.005
Laba Tahun Berjalan	42;32	-	-	-	-	193.873.273.327	-	377.161.444	194.250.434.771
Cadangan	42;31	-	-	-	201.201.847.651	(201.201.847.651)	-	-	-
Keuntungan (Kerugian) Aktuaria		-	-	-	-	-	4.201.114.453	2.452.344	4.203.566.797
Keuntungan (Kerugian)		-	-	-	-	-	-	-	-
Nilai Wajar Aset Tetap		-	-	-	-	-	855.500.000	-	855.500.000
Investasi Entitas Grup		-	-	-	-	-	-	-	-
Penambahan (Pengurangan)		-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah		-	1.500.000.000.000	-	-	-	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2024		7.629.900.000.000	1.500.143.585.642	397.878.907.714	1.543.866.979.147	(2.460.466.230.027)	(92.536.781.736)	4.264.033.933	8.523.050.494.573

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan/
The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Year Ended December 31, 2024
(With Comparative for The Year
Ended December 31, 2023)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2024	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Kas dari Pelanggan	3.042.912.255.547	2.705.259.725.324	Receipt from Customers
Penerimaan <i>Public Service Obligation (PSO)</i> dan Subsidi	3.992.715.323.628	3.040.918.105.872	Receipt from Public Service Obligation (PSO) and Subsidies
Pembayaran kepada Pemasok	(4.128.524.237.888)	(3.575.041.576.030)	Payment to Suppliers
Penerimaan dari Aktivitas Operasi Lainnya	41.621.610.503	50.650.602.746	Receipt of other operating activities
Pembayaran Biaya Operasional	(592.975.594.424)	(680.014.559.618)	Payment of Operating Expenses
Pembayaran Biaya <i>Overhead</i>	(1.180.010.477.131)	(1.017.018.870.360)	Payment of Overhead Expenses
Pengeluaran dari Aktivitas Operasi Lainnya	(56.535.884.866)	(95.382.065.949)	Payment of Other Operating Expenses
Pembayaran Pajak	(448.838.995.834)	(341.174.367.438)	Tax Payments
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	670.363.999.535	88.196.994.547	Net Cash Flows from Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penjualan Aset Tetap	11.345.255.653	24.840.295.346	Sale of Fixed Assets
Penerimaan Bunga Deposito dan Jasa Giro	154.142.775.836	105.674.751.984	Interest Deposit and Demand Deposit Receipt
Penerimaan Dividen	7.707.055.925	-	Dividend Receipt
Perolehan Alat Produksi dan Aset Tetap	(169.893.179.075)	(183.409.165.381)	Acquisition Production Equipment and Fixed Assets
Perolehan Aset Dalam Konstruksi	(19.449.616.391)	(932.430.801)	Acquisition of Asset Under Construction
Perolehan Aset Takberwujud	-	(1.290.900.000)	Acquisition Intangible Assets
Penambahan Investasi	-	55.000.000	Increase on Investment
Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi	(16.147.708.052)	(55.062.448.852)	Net Cash Flows used to Investment Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan Pinjaman Bank	451.000.000.000	226.500.000.000	Acceptance of Bank Loan
Pembayaran Pinjaman Bank	(485.050.194.255)	(205.832.879.012)	Bank Loan Payments
Arus Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Pendanaan	(34.050.194.255)	20.667.120.988	Net Cash Flows from (used to) Financing Activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	620.166.097.228	53.801.666.683	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENT
KAS DAN SETARA KAS - SALDO AWAL	3.494.572.510.108	3.440.770.843.425	CASH AND CASH EQUIVALENT BEGINNING BALANCE
KAS DAN SETARA KAS - SALDO AKHIR	4.114.738.607.336	3.494.572.510.108	CASH AND CASH EQUIVALENT ENDING BALANCE

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan/
The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN /
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. U M U M

1.1. Pendirian Perusahaan

Berdirinya PT PELNI (Persero) bermula dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perhubungan dengan Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 5 September 1950 yang isinya mendirikan Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-kapal (PEPUSKA).

Pada tanggal 28 April 1952 Yayasan Pepuska resmi dibubarkan. Pada saat yang sama didirikanlah PT PELNI (Persero) dengan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. M.2/1/2 tanggal 28 Februari 1952 dan No. A.2/1/2 tanggal 19 April 1952, serta Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 20 Juni 1952.

Perusahaan mengalami beberapa kali perubahan bentuk Badan Usaha. Pada tahun 1961 pemerintah menetapkan perubahan status dari Perusahaan Perseroan menjadi Perusahaan Negara (PN) dan dicantumkan dalam Lembaran Negara RI No. LN 1961. Kemudian pada tahun 1975 status perusahaan diubah dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Perseroan Terbatas (PT) PELNI sesuai dengan Akte Pendirian No. 31 tanggal 30 Oktober 1975. Perubahan tersebut dicantumkan dalam Berita Negara RI No. 562-1979 dan Tambahan Berita Negara RI No. 60 tanggal 27 Juni 1976. Dan Akte Perubahan No. 22 tanggal 4 Maret 1998 tentang Anggaran Dasar PT PELNI (Persero) yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 April 1999 No. 31 Tambahan Berita Negara No.2203.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan dituangkan dengan Akta Notaris Ida Adiningsih, SH.,No. 02 tanggal 7 Februari 2022 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-0010660.AH.01.02 tanggal 11 Februari 2022.

1.2. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta Notaris Ida Adiningsih, SH.,No. 02 tanggal 7 Februari 2022, maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dibidang:

- a. Aktivitas jasa penunjang pertambangan;
- b. Reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan;

1. G E N E R A L

1.1. Company Establishment

The establishment of PT PELNI (Persero) began with the issuance of a Joint Decree (SKB) between the Minister of Transportation and the Minister of Public Works on September 5, 1950, which contained the establishment of the Ship Center Mastery Foundation (PEPUSKA).

On April 28, 1952 the Pepuska Foundation was officially dissolved. At the same time PT PELNI (Persero) was established based on the Decree of the Minister of Transportation No. M.2/1/2 dated February 28, 1952 and No. A.2/1/2 dated April 19, 1952, and State Gazette of the Republic of Indonesia No. 50 dated June 20, 1952.

The Company underwent several changes in the form of the Business Entity. In 1961 the government stipulated a change in status from a Company to a State Company (PN) and was included in the Indonesian State Gazette No. LN 1961. Then in 1975 the company's status was changed from State Company (PN) to Limited Liability Company (PT) PELNI in accordance with the Establishment Deed No. 31 dated October 30, 1975. The changes were included in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 562-1979 and Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 60 dated June 27, 1976. And Deed of Amendment No. 22 dated March 4, 1998 concerning the Articles of Association of PT PELNI (Persero) which was announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia dated April 16, 1999 No. 31 Additional State Gazette No.2203.

The latest amendment to the Company's Articles of Association is set forth in Notarial Deed No. 02 of Ida Adiningsih, S.H. dated February 7, 2022 which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0010660.AH.01.02 dated February 11, 2022: AHU-0010660.AH.01.02 dated February 11, 2022.

1.2. Purposes and Objectives

Based on the Notarial Deed of Ida Adiningsih, SH, No. 02 dated February 7, 2022, the purpose and objective of the Company is to engage in the field of:

- a. Mining support service activities;*
- b. Repair and installation of machines and equipment;*

1. U M U M (lanjutan)

1.2. Maksud dan Tujuan (lanjutan)

- c. Perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor;
- d. Perdagangan eceran, bukan mobil dan motor;
- e. Angkutan perairan;
- f. Pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan;
- g. Penyediaan akomodasi;
- h. Aktivitas jasa informasi;
- i. *Real estate*;
- j. Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen;
- k. Aktivitas agen perjalanan, penyelenggara tur dan jasa reservasi lainnya;
- l. Aktivitas administrasi kantor, aktivitas penunjang kantor dan aktivitas penunjang usaha lainnya;
- m. Pendidikan.

Adapun untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Angkutan laut dalam negeri *liner* dan *tramper* untuk penumpang;
- b. Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk penumpang;
- c. Angkutan laut dalam negeri untuk wisata;
- d. Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang;
- e. Angkutan laut luar negeri *liner* dan *tramper* untuk penumpang;
- f. Angkutan laut luar negeri untuk wisata;
- g. Angkutan laut dalam negeri untuk umum;
- h. Angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang;
- i. Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus;
- j. Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang;
- k. Angkutan laut luar negeri untuk barang umum;
- l. Angkutan laut luar negeri untuk barang khusus;
- m. Aktivitas penunjang pertambangan penggalian lainnya;
- n. Pengadaan armada dan kelengkapannya untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan barang;
- o. Pergudangan dan penyimpanan;
- p. Aktivitas *cold storage*;

1. G E N E R A L (continued)

1.2. Purposes and Objectives (continued)

- c. *Wholesale trade, not cars and motorcycles*;
- d. *Retail trade, not cars and motorcycles*;
- e. *Water transportation*;
- f. *Warehousing and transportation support activities*;
- g. *Provision of accommodation*;
- h. *Information service activities*;
- i. *Real estate*;
- j. *Head office activities and management consulting*;
- k. *Activities of travel agents, tour operators and other reservation services*;
- l. *Office administration activities, office support activities and other business support activities*;
- m. *Education*.

In order to achieve the aforementioned purposes and objectives, the Company may carry out the following business activities:

- a. *Liner and tramper domestic sea transportation for passengers*;
- b. *Domestic sea transportation for passengers*;
- c. *Domestic sea transportation for tourism*;
- d. *Pioneering domestic sea transportation for passengers*;
- e. *Liner and tramper foreign sea transportation for passengers*;
- f. *Overseas sea transportation for tourism*;
- g. *Domestic sea transportation for the public*;
- h. *Sea transportation of domestic port waters for goods*;
- i. *Domestic sea transportation for special goods*;
- j. *Pioneering domestic sea transportation for goods*;
- k. *Overseas sea transportation for general goods*;
- l. *Overseas sea transportation for special goods*;
- m. *Other excavation mining supporting activities*;
- n. *Procurement of the fleet and its equipment to carry out the transportation of passengers and goods*;
- o. *Warehousing and storage*;
- p. *Cold storage activities*;

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. U M U M (lanjutan)

1.2. Maksud dan Tujuan (lanjutan)

- q. Aktivitas *Bounded Warehousing* atau wilayah kawasan berikat;
- r. Pengelola gudang sistem resi gudang;
- s. Pergudangan dan penyimpanan lainnya;
- t. Aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut;
- u. Aktivitas pengelolaan kapal;
- v. Aktivitas penunjang angkutan perairan lainnya;
- w. Jasa pengurusan transportasi (JPT);
- x. Aktivitas ekspedisi muatan kapal (EMKL);
- y. Angkutan multimoda;
- z. Jasa keagenan kapal/agen perkapalan perusahaan pelayaran;
- aa. Aktivitas penunjang angkutan lainnya YTDL;
- ab. Portal *web* dan/atau *platform* digital dengan tujuan komersial;
- ac. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak;
- ad. Perdagangan besar hasil perikanan;
- ae. Perdagangan besar beras;
- af. Perdagangan besar buah-buahan;
- ag. Perdagangan besar sayuran;
- ah. Perdagangan besar kopi, teh dan kakao;
- ai. Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya;
- aj. Perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan;
- ak. Perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan;
- al. Perdagangan besar daging dan daging olahan;
- am. Perdagangan besar hasil olahan perikanan;
- an. Perdagangan besar telur dan hasil olahan telur;
- ao. Perdagangan besar susu dan produk susu;
- ap. Perdagangan besar minyak dan lemak hewani;
- aq. Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya;
- ar. Perdagangan eceran hasil perikanan;
- as. Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya;
- at. Perdagangan eceran beras;
- au. Reparasi mesin untuk keperluan umum;
- av. Reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung;
- aw. Aktivitas konsultasi pariwisata;
- ax. Aktivitas konsultasi transportasi, dan
- ay. Kegiatan penunjang pendidikan;

1. G E N E R A L (continued)

1.2. Purposes and Objectives (continued)

- q. *Bounded Warehousing* activities or bonded zone areas;
- r. *Warehouse manager of warehouse receipt* system;
- s. *Warehousing and other storage*;
- t. *Sea port service* activities;
- u. *Ship management* activities;
- v. *Other water transportation supporting* activities;
- w. *Transportation management* services (JPT);
- x. *Ship cargo expedition* activities (EMKL);
- y. *Multimodal transportation*;
- z. *Ship agency services/shipping agency* shipping companies;
- aa. *Other transportation support* activities YTDL;
- ab. *Web portals and/or digital platforms* for commercial purposes;
- ac. *Large trading on the basis of fees or contracts*;
- ad. *Wholesale trade of fishery* products;
- ae. *Rice wholesale* trade;
- af. *Wholesale trade of fruit*;
- ag. *Wholesale trade of vegetables*;
- ah. *Wholesaling of coffee, tea and cocoa*;
- ai. *Wholesale trade of food and other agricultural* products;
- aj. *Wholesale of beef and processed beef*;
- ak. *Wholesale trade of chicken meat and processed* chicken meat;
- al. *Wholesale of meat and processed meat*;
- am. *Wholesale trade of processed fishery* products;
- an. *Wholesale trade of eggs and processed eggs*;
- ao. *Wholesale of milk and milk products*;
- ap. *Wholesale trade of animal oils and fats*;
- aq. *Wholesale trade of food and other beverages*;
- ar. *Retail trade of fishery* products;
- as. *Retail trade of other agricultural* products;
- at. *Rice retail* trade;
- au. *Repair of machines for general* purposes;
- av. *Repair of ships, boats and floating structures*;
- aw. *Tourism consulting* activities;
- ax. *Transportation consulting* activities, and
- ay. *Educational support* activities;

1. U M U M (lanjutan)

1.2. Maksud dan Tujuan (lanjutan)

Selain kegiatan usaha utama, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:

- a. *Real estate* yang dimiliki sendiri atau sewa;
- b. Penyewaan *venue* penyelenggaraan aktivitas MICE dan *event* khusus;
- c. Hotel bintang;
- d. Hotel melati;
- e. Penyediaan akomodasi jangka pendek;
- f. Penyediaan akomodasi lainnya;
- g. Penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (MICE);
- h. Jasa penyelenggara *event* khusus (*special event*);
- i. Aktivitas agen perjalanan wisata;
- j. Aktivitas agen perjalanan lainnya;
- k. Aktivitas biro perjalanan wisata;
- l. Aktivitas biro perjalanan lainnya;
- m. Jasa informasi pariwisata;
- n. Jasa informasi daya tarik wisata;
- o. Jasa pramuwisata;
- p. Jasa *interpreter* wisata;
- q. Jasa reservasi lainnya;

1.3. Modal

Modal saham yang disetor ke Entitas merupakan 100% Penyertaan Pemerintah sesuai dengan Akta Notaris Ida Adiningsih, SH tanggal 01 Februari 2016 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-AH.01.030012165 Tahun 2016 tanggal 02 Februari 2016. Penambahan modal dasar tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 melalui konversi uang pokok *Subsidiary Loan Agreement (SLA)* serta kapitalisasi sebagian cadangan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sampai dengan tahun buku 2015. Perubahan Akta Terakhir No.2 tanggal 7 April 2017, dari Notaris Ida Adiningsih, S.H. Notaris di Jakarta, dengan yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: AHU-AH.01.03-0126086 tahun 2017.

1. G E N E R A L (continued)

1.2. Purposes and Objectives (continued)

In addition to the main business activities, the Company can carry out business activities in order to optimize the utilization of its resources for:

- a. *Real estate* owned or rented;
- b. Rental of venues for organizing MICE activities and special events;
- c. Star hotels;
- d. Jasmine hotels;
- e. Provision of short term accommodation;
- f. Provision of other accommodations;
- g. Organizers of meetings, incentive trips, conferences and exhibitions (MICE);
- h. Special event organizer services;
- i. Travel agent activities;
- j. Other travel agency activities;
- k. Tour and travel agency activities;
- l. Other travel agency activities;
- m. Tourism information services;
- n. Information services on tourist attractions;
- o. Tour guide services;
- p. Travel interpreter services;
- q. Other reservation services;

1.3. Capital

The share capital paid up to the Entity represents 100% Government Participation in accordance with the Notarial Deed of Ida Adiningsih, SH dated February 01, 2016 which has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.030012165 Year 2016 dated February 02, 2016. The additional authorized capital was sourced from the 2016 State Budget through the conversion of principal of *Subsidiary Loan Agreement (SLA)* and capitalization of part of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) reserves until the 2015 financial year. Last Deed Amendment No.2 dated April 7, 2017, from Notary Ida Adiningsih, S.H. Notary in Jakarta, with which has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03: AHU-AH.01.03-0126086 of 2017.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. U M U M (lanjutan)

1.3. Modal (lanjutan)

Total 100% dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan atau seluruhnya berjumlah Rp7.629.900.000.000 telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia (Pemegang Saham) dengan cara sebagai berikut:

- Sebesar Rp7.065.092.000.000 merupakan setoran modal lama sesuai dengan Akta No. 1, tanggal 01 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ida Adiningsih, SH., yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0012165 tanggal 02 Februari 2016.
- Sebesar Rp564.807.589.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 melalui konversi utang pokok *Subsidiary Loan Agreement (SLA)* PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) kepada Negara Republik Indonesia berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor 1144/DP3/2001 tanggal 25 Februari 2001 dan Nomor 1151/DP3/2002 tanggal 30 Mei 2002 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2016.
- Sebesar Rp411.000 yang berasal dari kapitalisasi sebagian cadangan Perseroan sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai Laporan Auditor Independen No. LAI_AU-015/KAP. BM&W/BM/VI/2016, tanggal 01 April 2016.

1.4. Tempat dan Kedudukan

Perseroan berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 14, Jakarta Pusat.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki Kantor Cabang, Terminal Point, Kantor Perwakilan dan Unit Bisnis Strategi, dengan rincian sebagai berikut:

- 4 Cabang Kelas 1;
- 7 Cabang Kelas 2;
- 20 Cabang Kelas 3;
- 12 Cabang Kelas 4;
- 23 Terminal Penghubung Kelas A;
- 297 Terminal Penghubung Kelas B;
- 1 Kantor Perwakilan di Singapura; dan
- 2 Unit Bisnis Strategi (Galangan Surya, Surabaya dan Hotel Bahtera, Cipayung).

1. G E N E R A L (continued)

1.3. Capital (continued)

A total of 100% of the nominal value of each issued share or a total of Rp7,629,900,000,000 has been fully paid up by the Republic of Indonesia (Shareholders) in the following manner:

- Amounting to Rp7,065,092,000,000 represents old capital deposits in accordance with Deed No. 1, dated February 1, 2016 made before Notary Ida Adiningsih, SH., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHUAH.01.03-0012165 dated February 02, 2016.
- Amounting to Rp564,807,589,000 sourced from the 2016 State Budget through the conversion of principal debt of *Subsidiary Loan Agreement (SLA)* of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) to the Republic of Indonesia based on Loan Forwarding Agreement Number 1144/DP3/2001 dated February 25, 2001 and Number 1151/DP3/2002 dated May 30, 2002 as stipulated in Government Regulation Number 87 of 2016.
- Amounted to Rp411,000 originating from the capitalization of part of the Company's reserves as recorded in the Financial Statements for the Financial Year 2015 which has been audited by a Public Accountant in accordance with the Independent Auditor's Report No. LAI_AU-015/KAP. BM&W/BM/VI/2016, dated April 01, 2016.

1.4. Place and Domicile

The Company domiciled at Jalan Gajah Mada No. 14, Central Jakarta.

In carrying out its business activities, the Company has Branch Offices, Terminal Points, Representative Offices and Strategic Business Units, with details as follows:

- 4 Branches of Class 1
- 7 Branches of Class 2
- 20 Branches of Class 3
- 12 Branches of Class 4
- 23 Terminal Point of Class A
- 297 Terminal Point of Class B
- 1 Representative Office in Singapore
- 2 Strategy Business Units (Galangan Surya, Surabaya dan Hotel Bahtera, Cipayung)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. U M U M (lanjutan)

1.5. Pengurus Perusahaan

Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-9/MBU/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 dan Akta Notaris Ida Adiningsih, SH., No.8 tanggal 25 Maret 2024, tentang Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan (Persero). Susunan Dewan Komisaris untuk tahun 2024 sebagai berikut:

Komisaris Utama	:	Muhammad Awaluddin
Komisaris Independen	:	Kristia Budiarto
Komisaris	:	Eddy Susanto Soepadmo
Komisaris	:	Faturohman
Komisaris	:	Raden Suhartono
Komisaris	:	Budi Mantoro

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-121/MBU/05/2022 tanggal 19 Mei 2022 dan Akta Notaris Ida Adiningsih, SH., No.1 tanggal 02 Juni 2022, tentang Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan (Persero). Susunan Dewan Komisaris untuk tahun 2023 sebagai berikut:

Komisaris Utama	:	Ali Masykur Musa
Komisaris Independen	:	Kristia Budiarto
Komisaris	:	Wahju Adji Herpriarsono
Komisaris	:	Eddy Susanto Soepadmo
Komisaris	:	Faturohman
Komisaris	:	Raden Suhartono

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-6/MBU/01/2024 tanggal 9 Januari 2024 dan SK-70/MBU/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia dan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia, No. 8, tanggal 25 Maret 2024, susunan Direksi untuk tahun 2024 sebagai berikut:

1. G E N E R A L (continued)

1.5. Management of Company

Boards of Commissioners and Directors

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number SK-9/MBU/01/2024 dated January 16, 2024 and Notarial Deed of Ida Adiningsih, SH, No.8 dated March 25, 2024, concerning the Decree of the Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero). The composition of the Board of Commissioners for 2024 is as follows:

	:	President Commissioner
	:	Independent Commissioner
	:	Commissioner
	:	Commissioner
	:	Commissioner
	:	Commissioner

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number SK-121/MBU/05/2022 dated May 19, 2022 and Notarial Deed of Ida Adiningsih, SH, No.1 dated June 02, 2022, concerning the Decree of the Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero). The composition of the Board of Commissioners for 2023 is as follows:

	:	President Commissioner
	:	Independent Commissioner
	:	Commissioner
	:	Commissioner
	:	Commissioner
	:	Commissioner

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-6/MBU/01/2024 dated January 9, 2024 and SK-70/MBU/03/2024 dated March 18, 2024 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia and Deed of Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia, No. 8, dated March 25, 2024, the composition of the Board of Directors for 2024 is as follows:

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. U M U M (lanjutan)

1.5. Pengurus Perusahaan (lanjutan)

Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

Direktur Utama	:	Tri Andayani
Direktur Usaha		
Angkutan Penumpang	:	Nuraini Dessy Winiastuty
Direktur Keuangan		
dan Manajemen Resiko	:	Anik Hidayati
Direktur Usaha		
Angkutan Barang dan Tol Laut	:	Kokok Susanto
Direktur Sumber Daya		
Manusia dan Umum	:	Heri Purnomo
Direktur Armada dan Teknik	:	Robert MP Sinaga

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-262/MBU/09/2023 tanggal 21 September 2023 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia dan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia, No. 1 tanggal 3 Oktober 2023, susunan Direksi untuk tahun 2023 sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Tri Andayani
Direktur Usaha		
Angkutan Penumpang	:	Nuraini Dessy Winiastuty
Direktur Keuangan		
dan Manajemen Resiko	:	Anik Hidayati
Direktur Usaha		
Angkutan Barang dan Tol Laut	:	Yossianis Marciano
Direktur Sumber Daya		
Manusia dan Umum	:	Rainoc
Direktur Armada dan Teknik	:	Robert MP Sinaga

Sesuai Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SR-3/Wk.MBU.11/08/2024, tanggal 23 Agustus 2024, perihal Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Tahun 2024, bahwa Gaji/Honorarium Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Tahun 2024 serta Tantiem/Insentif Kerja atas kinerja Tahun Buku 2023 sebagai berikut:

1. G E N E R A L (continued)

1.5. Management of Company (continued)

**Boards of Commissioners and Directors
(continued)**

	:	President Director
		Director of
	:	Passenger Transportation
	:	Director of Finance
	:	and Risk Management
	:	Director of Maritime Goods
	:	and Toll Road Transport
	:	Director of Human Resources and
	:	General Affairs
	:	Director of Fleet and Engineering

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-262/MBU/09/2023 dated September 21, 2023 concerning the Appointment of Members of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia and the Deed of Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia, No. 1 dated October 3, 2023, the composition of the Board of Directors for 2023 is as follows:

	:	President Director
		Director of
	:	Passenger Transportation
	:	Director of Finance
	:	and Risk Management
	:	Director of Maritime Goods
	:	and Toll Road Transport
	:	Director of Human Resources and
	:	General Affairs
	:	Director of Fleet and Engineering

In accordance with the Letter of the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. SR-3/Wk.MBU.11/08/2024, dated August 23, 2024, regarding the Determination of the Income of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) in 2024, that the Salary/Honorarium of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) in 2024 and Tantiem/Work Incentives for the performance of the Fiscal Year 2023 are as follows:

1. U M U M (lanjutan)

1.5. Pengurus Perusahaan (lanjutan)

Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

- a. Gaji Direktur Utama ditetapkan sebesar Rp232.000.000 per bulan. Gaji Anggota Direksi lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.
- b. Honorarium Komisaris Utama ditetapkan sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama, dan honorarium Komisaris ditetapkan 90% dari honorarium Komisaris Utama.
- c. Tunjangan dan fasilitas Direksi sebagai berikut:
 - 1) Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebesar 1 (satu) kali gaji;
 - 2) Asuransi Purna Jabatan, premi yang ditanggung Perusahaan sebesar maksimal 25% dari gaji dalam 1 tahun;
 - 3) Tunjangan Perumahan sebesar Rp27.500.000 per bulan;
 - 4) Fasilitas Kendaraan 1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan operasional, dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan, dengan spesifikasi maksimal 3.500 cc;
 - 5) Fasilitas Kesehatan, dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan sebesar pemakaian (*at cost*);
 - 6) Fasilitas Bantuan Hukum, sebesar pemakaian (*at cost*);
- d. Tunjangan dan fasilitas Dewan Komisaris sebagai berikut:
 - 1) Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebesar 1 (satu) kali honorarium;
 - 2) Asuransi Purna Jabatan, ditanggung Perusahaan sebesar maksimal 25% dari honorarium dalam 1 tahun;
 - 3) Tunjangan Transportasi, sebesar 20% dari honorarium per bulan;
 - 4) Fasilitas Kesehatan, dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan sebesar pemakaian (*at cost*);
 - 5) Fasilitas Bantuan Hukum, sebesar pemakaian (*at cost*);

1. GENERAL (continued)

1.5. Management of Company (continued)

Boards of Commissioners and Directors (continued)

- a. The President Director's salary is Rp232,000,000 per month. The salary of the other members of the Board of Directors is 85% of the President Director's salary.
- b. The honorarium of the President Commissioner is set at 45% of the salary of the President Director, and the honorarium of the Commissioners is set at 90% of the honorarium of the President
- c. Directors' allowances and facilities are as follows:
 - 1) Religious Holiday Allowance of 1 (one) time salary;
 - 2) Post-employment insurance, the premium borne by the Company at a maximum of 25% of salary in 1 year;
 - 3) Housing Allowance of Rp27,500,000 per month;
 - 4) Vehicle facilities: 1 (one) unit along with maintenance and operational costs, taking into account the company's financial condition, with a maximum specification of 3.500 cc;
 - 5) Health Facilities, in the form of health insurance or reimbursement of medical costs at cost;
 - 6) Legal Aid Facilities, at cost;
- d. The allowances and facilities of the Board of Commissioners are as follows:
 - 1) Religious Holiday Allowance of 1 (one) time honorarium;
 - 2) Post-employment Insurance, borne by the Company at a maximum of 25% of the honorarium in 1 year;
 - 3) Transportation Allowance, 20% of the honorarium per month;
 - 4) Health Facilities, in the form of health insurance or reimbursement of medical costs at cost;
 - 5) Legal Aid Facilities, at cost;

1. U M U M (lanjutan)

1.5. Pengurus Perusahaan (lanjutan)

Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

Sesuai Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SR-1/Wk.MBU.11/07/2023, tanggal 24 Juli 2023, perihal Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Tahun 2023, bahwa Gaji/Honorarium Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Tahun 2023 serta Tantiem/Insentif Kerja atas kinerja Tahun Buku 2022 sebagai berikut:

- a. Gaji Direktur Utama ditetapkan sebesar Rp223.000.0000 per bulan. Gaji Anggota Direksi lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.
- b. Honorarium Komisaris Utama ditetapkan sebesar 45 % dari Gaji Direktur Utama dan honorarium Komisaris ditetapkan sebesar 90 % dari honorarium Komisaris Utama.

Selain itu Direksi dan Dewan Komisaris juga menerima Tantiem/Insentif Kerja atas Kinerja Tahun Buku 2023 ditetapkan sebesar Rp19.363.000.000 dengan ketentuan sebagai berikut:

- Insentif Kinerja Direktur Utama, Anggota Direksi lainnya dan Komisaris Utama masing-masing 100%, 85% dan 45% dari insentif kinerja Direktur Utama sedangkan insentif Dewan Komisaris sebesar 90% dari insentif Komisaris Utama dan pembayarannya dihitung proporsional dengan memperhitungkan masa kerja efektif tahun buku 2023.
- PPh atas Tantiem/Insentif Kerja menjadi beban penerima dan tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Dalam menunjang pelaksanaan fungsi dan efektivitas peran Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretariat Dewan Komisaris yang beranggotakan Raden Yudha Praja Kusumah dan Ajeng Eka Yandini.

1. G E N E R A L (continued)

1.5. Management of Company (continued)

Boards of Commissioners and Directors (continued)

In accordance with the Letter of the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. SR-1/Wk.MBU.11/07/2023, dated July 24, 2023, regarding the Determination of the Income of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) in 2023, that the Salary/Honorarium of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) in 2023 as well as Tantiem/Work Incentives for the performance of the Financial Year 2022 as follows:

- a. The President Director's salary is set at Rp223,000,000 per month. The salaries of the other members of the Board of Directors is 85% of the President Director's salary.*
- b. The honorarium of the President Commissioner is set at 45% of the salary of the President Director and the honorarium of the Commissioner is set at 90% of the honorarium of the President Commissioner.*

In addition, the Board of Directors and the Board of Commissioners also received Tantiem/Work Incentive for the Performance of the Financial Year 2023 set at Rp19,363,000,000 with the following conditions:

- The Performance Incentive of the President Director, other members of the Board of Directors and the President Commissioner are 100%, 85% and 45% of the President Director's performance incentive respectively, while the Board of Commissioners' incentive is 90% of the President Commissioner's incentive and the payment is calculated proportionally by taking into account the effective service period in the financial year 2023.*
- Income Tax on Tantiem/Work Incentive is borne by the recipient and is not allowed to be charged as a company expense.*

In supporting the implementation of the functions and effectiveness of the role of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners is assisted by the Secretariat of the Board of Commissioners, which consists of Raden Yudha Praja Kusumah and Ajeng Eka Yandini.

1. U M U M (lanjutan)

1.5. Pengurus Perusahaan (lanjutan)

Komite Audit

Komite Audit merupakan organ dari Dewan Komisaris yang dibentuk oleh Dewan Komisaris sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Komite Audit berfungsi untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasannya. Komite Audit bersifat independen dan mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP-12/DK/XI/2024, tanggal 11 November 2024, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), susunan Komite Audit untuk tahun buku 2024 sebagai berikut:

Ketua Komite Audit	:	Muhammad Awaluddin
(juga selaku Dewan Komisaris)		
Wakil Ketua	:	
(juga selaku Dewan Komisaris)	:	Raden Suhartono
Anggota	:	Baliya Munadjat
Anggota	:	Maman Sulaeman
Staff	:	Arum Puspita Maharani

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP-03/DK/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), susunan Komite Audit untuk tahun buku 2023 sebagai berikut:

1. G E N E R A L (continued)

1.5. Management of Company (continued)

The Audit Committee

The Audit Committee is an organ of the Board of Commissioners established by the Board of Commissioners as mandated by Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises. The Audit Committee functions to assist the Board of Commissioners in carrying out its supervisory duties. The Audit Committee is independent and self-sufficient both in carrying out its duties and in reporting, and is directly responsible to the Board of Commissioners.

Audit Committee members are appointed and dismissed by the Board of Commissioners and reported to the GMS. The term of office of the Audit Committee members may not exceed the term of office of the Board of Commissioners in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association and may be re-elected only for the next 1 (one) period.

Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP-12/DK/XI/2024, dated November 11, 2024, concerning the Dismissal and Appointment of Audit Committee Members of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), the composition of the Audit Committee for the fiscal year 2024 is as follows:

Chairman of Audit Committee	:	
(also as Commissioner)		
Vice Chairman of the Audit Committee	:	
(also as Commissioner)	:	
Members	:	
Members	:	
Staff	:	

Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP-03/DK/VII/2023, dated July 31, 2023, concerning the Dismissal and Appointment of Audit Committee Members of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), the composition of the Audit Committee for the fiscal year 2023 is as follows:

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. U M U M (lanjutan)

1.5. Pengurus Perusahaan (lanjutan)

Komite Audit (lanjutan)

Ketua Komite Audit	:	Raden Suhartono	:	Chairman of Audit Committee
(juga selaku Dewan Komisaris)				(also as Commissioner)
Anggota				Members
(juga selaku Dewan Komisaris)	:	Wahju Adjie Herpriarsono	:	(also as Commissioner)
Anggota	:	Muryati Nini Utami	:	Members
Anggota	:	Baliya Munadjat	:	Members

Pelaksanaan tugas Komite Audit PT PELNI (Persero) berlandaskan pada Piagam Komite Audit yang disahkan pada tanggal 8 Januari 2016 dan diperbaharui tanggal 30 September 2020 dengan No:96/DK/IX-2020.

The implementation of the duties of the Audit Committee of PT PELNI (Persero) is based on the Audit Committee Charter which was approved on January 8, 2016 and renewed on September 30, 2020 with No: 96/DK/IX-2020.

Komite Pemantau Manajemen Risiko

Pembentukan Komite Pemantau Manajemen Risiko merupakan bagian dari upaya Perusahaan untuk menerapkan GCG. Terkait implementasi GCG, peran dan fungsi Komite Kebijakan Risiko menjadi sangat strategis untuk membantu dan meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Risk Management Monitoring Committee

The establishment of the Risk Management Monitoring Committee is part of the Company's efforts to implement GCG. Regarding GCG implementation, the role and function of the Risk Policy Committee is very strategic to assist and enhance the role of the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function.

Berdasarkan perubahan terakhir serta Keputusan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP-9/DK/VIII/2024, tanggal 1 Agustus 2024, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko tahun buku 2024 sebagai berikut:

Based on the latest changes and Decree of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP-9/DK/VIII/2024, dated August 1, 2024, concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Risk Management Monitoring Committee of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), the composition of the Risk Management Monitoring Committee for the fiscal years 2024 is as follows:

Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko				Chairman of the Risk Policy Committee
(merangkap Komisaris)	:	Eddy Susanto Soepadmo	:	(also as Commissioner)
Wakil Ketua				Vice Chairman
(merangkap Komisaris Independen)	:	Budi Martono	:	(also as Commissioner Independent)
Anggota	:	Mahruddin Harahap	:	Members
Anggota	:	Reza Hertantyo	:	Members
Staff	:	M. Amal Amrullah	:	Staff

Berdasarkan perubahan terakhir serta Keputusan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP-1/DK/IV/2023, tanggal 18 April 2023, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko tahun buku 2023 sebagai berikut:

Based on the latest changes and Decree of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP-1/DK/IV/2023, dated April 18, 2023, concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Risk Management Monitoring Committee of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), the composition of the Risk Management Monitoring Committee for the fiscal years 2023 is as follows:

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. U M U M (lanjutan)

1.5. Pengurus Perusahaan (lanjutan)

Komite Pemantau Manajemen Risiko (lanjutan)

Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko (merangkap Komisaris)	:	Eddy Susanto Soepadmo	:
Wakil Ketua (merangkap Komisaris Independen)	:	Kristia Budiarto	:
Anggota	:	Mahrudin Harahap	:
Anggota	:	Sukirno Dwi Susilo	:

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasar Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: S254/MBU/04/2020 tanggal 17 April 2020 perihal Talent & Succession Management Direksi BUMN, Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasar Keputusan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP-02/DK/IV-2020 tanggal 20 April 2020 Tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi pada Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

Berdasarkan perubahan terakhir serta Keputusan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP-10/DK/VIII/2024, tanggal 9 Agustus 2024, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), maka susunan Komite Nominasi dan Remunerasi tahun buku 2024 sebagai berikut:

Ketua Komite Nominasi dan dan Remunerasi	:	:	:
(merangkap Komisaris Independen)	:	Kristia Budiarto	:
Wakil Ketua (merangkap Komisaris)	:	Faturohman	:
Anggota	:	Murdiyoto	:
Staff	:	Ati Irawati	:

Berdasarkan perubahan terakhir serta Keputusan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP-2/DK/IV/2023, tanggal 18 April 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), susunan Komite Nominasi dan Remunerasi tahun buku 2023 sebagai berikut:

1. G E N E R A L (continued)

1.5. Management of Company (continued)

Risk Management Monitoring Committee
(continued)

Chairman of the Risk Policy Committee (also as Commissioner)
Vice Chairman (also as Independent Commissioner)
Members
Members

Nomination and Remuneration Committee

Based on the Letter of the Minister of State-Owned Enterprises Number: S254/MBU/04/2020 dated April 17, 2020 regarding Talent & Succession Management of the Board of Directors of SOEs, the Board of Commissioners formed a Nomination and Remuneration Committee based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP-02/DK/IV-2020 dated April 20, 2020 concerning the Establishment of the Nomination and Remuneration Committee of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

Based on the latest changes and Decree of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP-10/DK/VIII/2024, dated August 9, 2024, concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Nomination and Remuneration Committee of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), the composition of the Nomination and Remuneration Committee for the fiscal year 2024 is as follows:

Chairman of the Numeration and Remuneration Committee
(also as Independent Commissioner)
Vice Chairman (also as Commissioner)
Members
Staff

Based on the latest changes and Decree of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP-2/DK/IV/2023, dated April 18, 2023 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Nomination and Remuneration Committee of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), the composition of the Nomination and Remuneration Committee for the fiscal years 2023 is as follows:

1. U M U M (lanjutan)

1.5. Pengurus Perusahaan (lanjutan)

Komite Nominasi dan Remunerasi (lanjutan)

Ketua Komite Nominasi
dan Remunerasi :
Wakil Ketua
(merangkap Komisaris) :
Anggota :

Ali Masykur Musa

Faturohman
Fadli Yasir

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang tercantum pada Keputusan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No.KEP-02/DK/IV-2020 tanggal 20 April 2020 Tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi pada Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP-07/DK/IX/2023, tanggal 30 September 2023, tentang Tenaga Pendukung Tata Kelola Terintegrasi PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi tahun buku 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tenaga Pendukung Komite
Tata Kelola Terintegrasi :

Luqmanul Hakim

1.6. Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki

Usaha pokok PT PELNI (Persero) adalah menyediakan jasa angkutan transportasi laut yang meliputi jasa angkutan penumpang dan jasa angkutan muatan barang antar pulau. Berdasarkan usaha pokok tersebut, bidang usaha yang dijalankan oleh PT PELNI (Persero) antara lain:

- Jasa pengangkutan penumpang dan barang dengan jaringan pelayaran tetap teratur dan terjadwal maupun pelayaran yang melayani permintaan tertentu;
- Jasa keagenan;
- Jasa operasi terminal, pergudangan dan ekspedisi/forwarding;
- Jasa pemeliharaan kapal dan usaha dok atau reparasi kapal;
- Charter dan broker kapal;
- Jasa konsultan, pelatihan, dan usaha perhotelan.

1. GENERAL (continued)

1.5. Management of Company (continued)

**Nomination and Remuneration Committee
(continued)**

Chairman of the Numeration and
Remuneration Committee
Vice Chairman
(also as Commissioner)
Members

The Nomination and Remuneration Committee has duties and responsibilities listed in the Decree of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No.KEP-02/DK/IV-2020 dated April 20, 2020 concerning the Establishment of the Nomination and Remuneration Committee of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

Integrated Good Governance Committee

Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. KEP-07/DK/IX/2023, dated September 30, 2023, concerning Integrated Governance Support Personnel of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), the composition of the Integrated Governance Committee for the fiscal year 2024 and 2023 is as follows:

Support Personnel of Integrated
Good Governance Committee

1.6. Business Line and Owned Business Unit

The main business of PT PELNI (Persero) is to provide sea transportation services which include passenger transportation services and inter-island freight transportation services. Based on this main business, the business fields carried out by PT PELNI (Persero) include:

- Transportation services for passengers and goods with a regular and scheduled fixed shipping network or shipping that serves certain requests;
- Agency services;
- Terminal operation, warehouse and expedition/forwarding services;
- Ship maintenance and dock business or ship reparation services;
- Ship charter and broker;
- Consultant, training and hotel business.

1. U M U M (lanjutan)

1.6. Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki (lanjutan)

Jasa Perkapalan

a. Kapal 2 in 1

Kapal jenis 2 in 1 adalah kapal yang dapat mengangkut penumpang dan sejumlah kontainer, dirancang oleh Meyer Welf dan dibangun di galangan Pepenburg, Jerman. Kapal 2 in 1 ini memiliki kapasitas 1.583 penumpang dan 98 kontainer. Salah satu Kapal tipe 2 in 1 ini secara resmi diberi nama KM Gunung Dempo, dibuat sejak pertengahan 2006 dengan panjang 146,80 dan kecepatan berlayar lebih dari 20 knot.

b. Kapal Penumpang Serbaguna

Kapal jenis 3 in 1 adalah jenis kapal penumpang serbaguna yang mampu mengangkut kontainer, penumpang dan kendaraan sekaligus. Kapal Motor Dobonsolo dan Kapal Motor Ciremai adalah kapal penumpang yang telah dimodifikasi menjadi kapal jenis 3 in 1, yaitu kapal serbaguna yang dapat mengangkut kontainer di bagian depan dan belakang serta penumpang dan kendaraan. Kapal ini telah dimodifikasi di galangan Sembawang Singapura.

c. Kapal Barang

Untuk keperluan distribusi barang logistik ke seluruh wilayah Indonesia, PT PELNI (Persero) memiliki 1 kapal barang yaitu KM Caraka Jaya Niaga III – 22 untuk mengangkut kargo volume besar dengan layanan terbaik dan dukungan SDM profesional.

Selain itu, PT PELNI (Persero) mengoperasikan 9 (sembilan) armada Kapal Tol Laut yaitu KM.Logistik Nusantara I, KM.Logistik Nusantara II, KM.Logistik Nusantara III, KM.Logistik Nusantara IV, KM.Logistik Nusantara V dan KM.Logistik Nusantara VI, KM Kendhaga Nusantara 01, KM Kendhaga Nusantara 07, KM Kendhaga Nusantara 11.

1. G E N E R A L (continued)

1.6. Business Line and Owned Business Unit (continued)

Shipping Services

a. 2 in 1 Ship

The 2 in 1 is a ship that can carry passengers and a number of containers, designed by Meyer Welf and built at the Pepenburg shipyard in Germany. This 2 in 1 ship has a capacity of 1,583 passengers and 98 containers. One of these 2 in 1 type ships is officially named KM Gunung Dempo, built since mid-2006 with a length of 146.80 and a sailing speed of more than 20 knots.

b. Multipurpose Passenger Ship

A 3 in 1 ship is a type of multipurpose passenger ship that can carry containers, passengers and vehicles at the same time. Motorboat Dobonsolo and Motorboat Ciremai are passenger vessels that have been modified into 3-in-1 vessels, which are multipurpose vessels that can carry containers at the front and back as well as passengers and vehicles. These vessels have been modified at Singapore's Sembawang shipyard.

c. Cargo Ship

For the distribution of logistics goods to all parts of Indonesia, PT PELNI (Persero) has 1 cargo ship, namely KM Caraka Jaya Niaga III - 22 to transport large volumes of cargo with the best service and professional HR support.

In addition, PT PELNI (Persero) operates 9 (nine) Sea Toll Ship fleets, namely KM.Logistik Nusantara I, KM.Logistik Nusantara II, KM.Logistik Nusantara III, KM.Logistik Nusantara IV, KM.Logistik Nusantara V and KM.Logistik Nusantara VI, KM Kendhaga Nusantara 01, KM Kendhaga Nusantara 07, KM Kendhaga Nusantara 11.

1. U M U M (lanjutan)

**1.6. Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki
(lanjutan)**

Jasa Perkapalan (lanjutan)

c. Kapal Barang (lanjutan)

Kapal Tol Laut dioperasikan merujuk pada Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan dan Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 65 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut, PT PELNI (Persero) ditunjuk sebagai salah satu pelaksana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik tersebut atau yang disebut sebagai program Tol Laut (layanan angkutan barang yang terjadwal, tetap dan teratur).

d. Kapal Ternak

PT PELNI (Persero) mengoperasikan 1 (satu) armada Kapal Ternak yaitu KM Camara Nusantara I dengan rute Kupang – Waingapu – Bima – Lembar – Surabaya – Semarang – Cirebon – Tanjung Priok – Kupang. Kehadiran Kapal Ternak bertujuan untuk membantu Pemerintah menekan harga daging dan mensejahterakan para peternak di sentra peternakan sapi dalam negeri.

e. Kapal Perintis

Armada Kapal Perintis merupakan bagian dari penugasan Pemerintah kepada PT PELNI (Persero) selain Kapal Tol Laut dan Kapal Ternak.

PT PELNI (Persero) mengoperasikan 48 (empat puluh delapan) Kapal Perintis yang menjangkau daerah terpencil di seluruh Indonesia.

f. Kapal Rede

Kapal rede merupakan bagian dari penugasan pemerintah kepada PT PELNI (Persero) dengan mengoperasikan 16 (enam belas) kapal rede yang tersebar diseluruh Indonesia.

1. G E N E R A L (continued)

**1.6. Business Line and Owned Business Unit
(continued)**

Shipping Services (continued)

c. Cargo Ship (continued)

The Tol Laut ship is operated referring to the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 70 of 2017 concerning the Implementation of Public Service Obligations for the Transport of Goods from and to the most remote, remote, outermost and border areas and Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia No. PM 65 of 2018 concerning the implementation of public service obligations for transportation of goods at sea, PT PELNI (Persero) is appointed as one of the implementers of the implementation of these public service obligations or what is referred to as the Tol Laut program (scheduled, fixed and regular freight transportation services).

d. Cattle Ship

PT PELNI (Persero) operates 1 (one) Livestock Ship fleet, namely KM Camara Nusantara I with the route Kupang - Waingapu - Bima - Lembar - Surabaya - Semarang - Cirebon - Tanjung Priok - Kupang. The presence of the Livestock Ship aims to help the Government reduce meat prices and prosper farmers in domestic cattle breeding centers.

e. Pioneer Ship

The Pioneer Ship fleet is part of the Government's assignment to PT PELNI (Persero) in addition to the Sea Toll Ship and Livestock Ship.

PT PELNI (Persero) operates 48 (forty-eight) Pioneer Ships that reach remote areas throughout Indonesia.

f. Rede Ship

The rede ship is part of the government's assignment to PT PELNI (Persero) by operating 16 (sixteen) rede ships spread throughout Indonesia.

1. U M U M (lanjutan)

1.6. Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki
(lanjutan)

Unit Bisnis Strategis

a. Hotel Bahtera

Hotel dengan fasilitas untuk acara rapat dan pusat pelatihan dilengkapi dengan fasilitas ruang rapat berkapasitas lebih dari 200 orang dan fasilitas penunjang lainnya.

b. Galangan Surya

Berdiri sejak 20 Mei 1996 dan menjadi PELNI *Maintenance Facilities (PMF)*, proyek strategis yang diharapkan dapat menjamin *space* dok dan perbaikan bagi seluruh kapal (termasuk kapal besar) yang dioperasikan oleh PT PELNI (Persero).

Unit Usaha Lainnya

a. Keagenan Kapal

Jenis keagenan kapal meliputi:

- 1) *Clearance in / out*
- 2) *Bunker, Fresh Water and Provision Supply*
- 3) *Crew Attendance*
- 4) *Protecting Agent*
- 5) *Custom Clearance*
- 6) *Layanan Sea Pollution*
- 7) *Layanan Garbage Removal*

b. Pengusahaan Aset

Persewaan gedung atau ruang kantor dari aset gedung perusahaan yang tersebar di seluruh cabang PT PELNI (Persero). Selain itu, bisnis properti juga meliputi persewaan ruang beriklan di atas kapal PELNI serta persewaan toko dan cafe di atas kapal.

Sebagai perusahaan pelayaran, saat ini PT PELNI (Persero) mengoperasikan 26 unit armada kapal penumpang, dan mengoperasikan 9 unit armada kapal barang dengan total bobot mati sebesar 35.044 ton. Untuk melayani penumpang dan barang tersebut, PT Peln (Persero) membagi armada menjadi:

1. G E N E R A L (continued)

1.6. Business Line and Owned Business Unit
(continued)

Strategic Business Unit

a. Hotel Bahtera

The hotel with facilities for meetings and training centers is equipped with meeting rooms with a capacity of more than 200 people and other supporting facilities.

b. Galangan Surya

Established on May 20, 1996 and became PELNI *Maintenance Facilities (PMF)*, a strategic project that is expected to guarantee docking and repair space for all ships (including large ships) operated by PT PELNI (Persero).

Others Business Unit

a. Ship Agency

Type of Agency Services:

- 1) *Clearance in / out*
- 2) *Bunker, Fresh Water and Provision Supply*
- 3) *Crew Attendance*
- 4) *Protecting Agent*
- 5) *Custom Clearance*
- 6) *Sea Pollution Services*
- 7) *Garbage Removal Services*

b. Asset Management

Rental of buildings or office space from the company's building assets spread across all branches of PT PELNI (Persero). In addition, the property business also includes renting advertising space on board PELNI ships as well as renting shops and cafes on board.

As a shipping company, PT PELNI (Persero) currently operates 26 units of passenger vessels, and operates 9 units of freight vessels with a total deadweight of 35,044 tons. To serve these passengers and goods, PT Peln (Persero) divides the fleet into:

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. U M U M (lanjutan)

1.6. Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki
(lanjutan)

- 1) Tipe 3000 penumpang
- 2) Tipe 2000 penumpang (2 unit dimodifikasi 3 in 1)
- 3) Tipe 1000 penumpang
- 4) Tipe 500 penumpang
- 5) Ro-Ro tipe cargo
- 6) Kapal Barang Tipe Caraka
- 7) Kapal Logistik Nusantara (Tipe Kontainer)
- 8) *Type High Speed Vessel*

PT PELNI (Persero) dalam menjalankan kegiatan operasinya memiliki unit-unit usaha yang terdiri dari:

1. G E N E R A L (continued)

1.6. Business Line and Owned Business Unit
(continued)

- 1) *Type 3000 pax*
- 2) *Type 2000 pax (2 unit modified to be 3 in 1)*
- 3) *Type 1000 pax*
- 4) *Type 500 pax*
- 5) *Ro-Ro type cargo*
- 6) *Cargo Ship Type Caraka*
- 7) *Logistik Nusantara Ship (Type Container)*
- 8) *Type High Speed Vessel*

PT PELNI (Persero) in carrying out its operational activities has business units consisting of:

	Total	
• Kantor Pusat	1	• Head Office
• Kantor Cabang Kelas 1, lokasi di:	4	• Class 1 Branch Office, located at:
1) Jakarta		Jakarta 1)
2) Surabaya		Surabaya 2)
3) Makassar		Makassar 3)
4) Ambon		Ambon 4)
• Kantor Cabang Kelas 2, lokasi di:	7	• Class 2 Branch Office, located at:
1) Sorong		Sorong 1)
2) Balikpapan		Balikpapan 2)
3) Bau Bau		Bau Bau 3)
4) Bitung		Bitung 4)
5) Jayapura		Jayapura 5)
6) Kupang		Kupang 6)
7) Manokwari		Manokwari 7)
• Kantor Cabang Kelas 3, lokasi di:	20	• Class 3 Branch Office, located at:
1) Medan		Medan 1)
2) Ternate		Denpasar 2)
3) Pare-Pare		Batam 3)
4) Semarang		Ternate 4)
5) Tanjung Pinang		Namlea 5)
6) Batam		Biak 6)
7) Biak		Serui 7)
8) Denpasar		Pare-pare 8)
9) Fak-Fak		Nabire 9)
10) Kumai		Kumai 10)
11) Lantaka		Lantaka 11)
12) Maumere		Maumere 12)
13) Nabire		Nabire 13)
14) Namlea		Namlea 14)
15) Nunukan		Nunukan 15)
16) Pontianak		Pontianak 16)

1. U M U M (lanjutan)

1. G E N E R A L (continued)

1.6. Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki
(lanjutan)

1.6. Business Line and Owned Business Unit
(continued)

Total

• **Kantor Cabang Kelas 3** (lanjutan)

- 17) Sampit
- 18) Serui
- 19) Tarakan
- 20) Tual

• **Class 3 Branch Office** (continued)

- Sampit 17)
- Serui 18)
- Tarakan 19)
- Tual 20)

• **Kantor Cabang Kelas 4, lokasi di:**

12

- 1) Bima
- 2) Waingapu
- 3) Kaimana
- 4) Labuan Bajo
- 5) Palu
- 6) Dobo
- 7) Ende
- 8) Kendari
- 9) Kotabaru
- 10) Luwuk
- 11) Merauke
- 12) Timika

• **Class 4 Branch Office, located at:**

- Bima 1)
- Waingapu 2)
- Kaimana 3)
- Labuan Bajo 4)
- Palu 5)
- Dobo 6)
- Ende 7)
- Kendari 8)
- Kotabaru 9)
- Luwuk 10)
- Merauke 11)
- Timika 12)

• **Terminal Penghubung Kelas A, lokasi di:**

23

- 1) Bengkulu
- 2) Belinyu
- 3) Teluk Bayur
- 4) Bandanaira
- 5) Geser
- 6) Saumlaki
- 7) Bontang
- 8) Raha
- 9) Wanci
- 10) Gorontalo
- 11) Tahuna
- 12) Kalabahi
- 13) Waisior
- 14) Babang (Bacan)
- 15) Natuna
- 16) Tarempa
- 17) Tanjung Balai Karimun
- 18) Ampenan/Lembar
- 19) Banyuwangi
- 20) Lewoleba
- 21) Sanana
- 22) Banggai
- 23) Agats

• **Class A Terminal Point, location at:**

- Bengkulu 1)
- Belinyu 2)
- Teluk Bayur 3)
- Bandanaira 4)
- Geser 5)
- Saumlaki 6)
- Bontang 7)
- Raha 8)
- Wanci 9)
- Gorontalo 10)
- Tahuna 11)
- Kalabahi 12)
- Waisior 13)
- Babang (bacan) 14)
- Natuna 15)
- Tarempa 16)
- Tanjung Balai Karimun 17)
- Ampenan/Lembar 18)
- Banyuwangi 19)
- Lewoleba 20)
- Sanana 21)
- Banggai 22)
- Agats 23)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. U M U M (lanjutan)

1.6. Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki
(lanjutan)

• **Terminal Penghubung Kelas B, lokasi di:**

- 1) Enggano
- 2) Linau
- 3) Pangkal Pinang
- 4) Labuan Bajau
- 5) Muarasaibi
- 6) Pasapuat
- 7) Pei-Pei
- 8) Penasahan
- 9) Siberut
- 10) Sikabalu
- 11) Sikakap
- 12) Sinakak
- 13) Sioban
- 14) Tua Pejat
- 15) Ciwandan
- 16) Panjang
- 17) Patimban
- 18) Jangkar
- 19) Kalianget
- 20) Kangean
- 21) Keramaian
- 22) Masalembo
- 23) P. Raas
- 24) Pagerungan Besar
- 25) Sapeken
- 26) Sapudi
- 27) Tanjung Wangi
- 28) Jampea
- 29) Bantaeng
- 30) Bonerate
- 31) Doangdoang Caddi
- 32) Doangdoang Lompo
- 33) Jinato
- 34) Kalatoa/Latodo
- 35) Kayuadi
- 36) Macini Baji
- 37) Marasende
- 38) P. Balobaloang Lompo
- 39) P. Dewakang Lompo
- 40) P. Kalukalukuang
- 41) P. Kapoposang Bali
- 42) P. Matalaang
- 43) P. Pamantawang
- 44) P. Sailus Lompo
- 45) P. Sapuka Lompo
- 46) P. Sumanga
- 47) P. Tampaang
- 48) Selayar
- 49) Amahai
- 50) Werinama

1. G E N E R A L (continued)

1.6. Business Line and Owned Business Unit
(continued)

• **Class B Terminal Point, location at:**

- Enggano 1)
- Linau 2)
- Pangkal Pinang 3)
- Labuan Bajau 4)
- Muarasaibi 5)
- Pasapuat 6)
- Pei-Pei 7)
- Penasahan 8)
- Siberut 9)
- Sikabalu 10)
- Sikakap 11)
- Sinakak 12)
- Sioban 13)
- Tua Pejat 14)
- Ciwandan 15)
- Panjang 16)
- Patimban 17)
- Jangkar 18)
- Kalianget 19)
- Kangean 20)
- Keramaian 21)
- Masalembo 22)
- P. Raas 23)
- Pagerungan Besar 24)
- Sapeken 25)
- Sapudi 26)
- Tanjung Wangi 27)
- Jampea 28)
- Bantaeng 29)
- Bonerate 30)
- Doangdoang Caddi 31)
- Doangdoang Lompo 32)
- Jinato 33)
- Kalatoa/Latodo 34)
- Kayuadi 35)
- Macini Baji 36)
- Marasende 37)
- P. Balobaloang Lompo 38)
- P. Dewakang Lompo 39)
- P. Kalukalukuang 40)
- P. Kapoposang Bali 41)
- P. Matalaang 42)
- P. Pamantawang 43)
- P. Sailus Lompo 44)
- P. Sapuka Lompo 45)
- P. Sumanga 46)
- P. Tampaang 47)
- Selayar 48)
- Amahai 49)
- Werinama 50)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
*As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)*

1. U M U M (lanjutan)

**1.6. Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki
(lanjutan)**

• **Terminal Penghubung Kelas B (lanjutan)**

51) Bula
52) Gorom
53) Kelimuri
54) Kesui
55) Pulau Teor
56) Adaut
57) Amau
58) Arwala
59) Bebar
60) Dawera
61) Kisar
62) Kroing
63) Lakor
64) Larat
65) Lelang
66) Leti
67) Lewa
68) Luang
69) Marsela
70) Moa
71) Molu
72) Nila
73) Rumeau
74) Rumyaan
75) Seira
76) Sermata
77) Serua
78) Teon
79) Tepa
80) Tutukembong
81) Wetang
82) Wulur
83) Batu Merah
84) Buano
85) Tehoru
86) Babo
87) Hopmare
88) Kapadiri
89) Kwoor
90) Mega
91) P. Ayau
92) P. Fani
93) Saubeba
94) Susapor
95) Sopen
96) Waisai
97) Warmandi
98) Werur
99) Yellu
100) Banjarmasin

1. G E N E R A L (continued)

**1.6. Business Line and Owned Business Unit
(continued)**

• **Class B Terminal Point (continued)**

Bula 51)
Gorom 52)
Kelimuri 53)
Kesui 54)
Pulau Teor 55)
Adaut 56)
Amau 57)
Arwala 58)
Bebar 59)
Dawera 60)
Kisar 61)
Kroing 62)
Lakor 63)
Larat 64)
Lelang 65)
Leti 66)
Lewa 67)
Luang 68)
Marsela 69)
Moa ##
Molu 71)
Nila 72)
Rumeau 73)
Rumyaan 74)
Seira 75)
Sermata 76)
Serua 77)
Teon 78)
Tepa 79)
Tutukembong 80)
Wetang 81)
Wulur 82)
Batu Merah 83)
Buano 84)
Tehoru 85)
Babo 86)
Hopmare 87)
Kapadiri 88)
Kwoor 89)
Mega 90)
P. Ayau 91)
P. Fani 92)
Saubeba 93)
Susapor 94)
Sopen 95)
Waisai 96)
Warmandi 97)
Werur 98)
Yellu 99)
Banjarmasin 100)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. U M U M (lanjutan)

1.6. Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki
(lanjutan)

• **Terminal Penghubung Kelas B** (lanjutan)

- 101) Samarinda
- 102) Ereke
- 103) Kwandang
- 104) Bumbulan
- 105) Bengdarat
- 106) Manalu'
- 107) Damau
- 108) Dampulis
- 109) Beo
- 110) Bukide
- 111) Dapalan
- 112) Essang
- 113) Gemeh
- 114) Kahakitang
- 115) Kakarotan
- 116) Kalama
- 117) Karatung
- 118) Kawaluso
- 119) Kawio
- 120) Lipang
- 121) Lirung
- 122) Mangaran
- 123) Marampit
- 124) Marore
- 125) Matutuang
- 126) Melonguane
- 127) Miangas
- 128) Ngalipaeng
- 129) Petta
- 130) Rainins
- 131) Sawang
- 132) Amurang
- 133) Biaro
- 134) Makalehi
- 135) Munte (Likupang)
- 136) P. Mahangiang
- 137) P. Ruang
- 138) Para
- 139) Pehe
- 140) Siau
- 141) Tagulandang
- 142) Talise
- 143) Depapre
- 144) Kurudu
- 145) Miosnum
- 146) Sarmi
- 147) Ilwaki
- 148) Lirang
- 149) Lerokis
- 150) Upisera

1. G E N E R A L (continued)

1.6. Business Line and Owned Business Unit
(continued)

• **Class B Terminal Point** (continued)

- Samarinda 101)
- Ereke 102)
- Kwandang 103)
- Bumbulan 104)
- Bengdarat 105)
- Manalu' 106)
- Damau 107)
- Dampulis 108)
- Beo 109)
- Bukide 110)
- Dapalan 111)
- Essang 112)
- Gemeh 113)
- Kahakitang 114)
- Kakarotan 115)
- Kalama 116)
- Karatung 117)
- Kawaluso 118)
- Kawio 119)
- Lipang 120)
- Lirung 121)
- Mangaran 122)
- Marampit 123)
- Marore 124)
- Matutuang 125)
- Melonguane 126)
- Miangas 127)
- Ngalipaeng 128)
- Petta 129)
- Rainins 130)
- Sawang 131)
- Amurang 132)
- Biaro 133)
- Makalehi 134)
- Munte (Likupang) 135)
- P. Mahangiang 136)
- P. Ruang 137)
- Para 138)
- Pehe 139)
- Siau 140)
- Tagulandang 141)
- Talise 142)
- Depapre 143)
- Kurudu 144)
- Miosnum 145)
- Sarmi 146)
- Ilwaki 147)
- Lirang 148)
- Lerokis 149)
- Upisera 150)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. U M U M (lanjutan)

1.6. Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki
(lanjutan)

• **Terminal Penghubung Kelas B** (lanjutan)

151) Atapupu
152) Naikliu
153) Ndao
154) Rajjua
155) Rote
156) Sabu
157) Wini
158) Windesi
159) Yende
160) Yamakan
161) Bintuni
162) Mner
163) Oransbari
164) Sukorem
165) Waibem
166) Wanden
167) Wau
168) Gunung Sitoli
169) Kuala Tanjung
170) Lhokseumawe
171) Meulaboh
172) Pulau Banyak
173) Sibolga
174) Sinabang
175) Singkil
176) Tapaktuan
177) Dumai
178) Bataka
179) Dowora
180) Fluk
181) Galela
182) Gane Dalam
183) Gumumu/Manu
184) Jailolo
185) Laiwui
186) Maba
187) Madapolo
188) Mayau
189) Morotai
190) Moti
191) P. Dawora
192) Pigaraja
193) Sekeli
194) Soa Sio/Tidore
195) Sum
196) Tifure
197) Tobalai
198) Wayaloar
199) Weda
200) Woi

1. G E N E R A L (continued)

1.6. Business Line and Owned Business Unit
(continued)

• **Class B Terminal Point** (continued)

Atapupu 151)
Naikliu 152)
Ndao 153)
Rajjua 154)
Rote 155)
Sabu 156)
Wini 157)
Windesi 158)
Yende 159)
Yamakan 160)
Bintuni 161)
Mner 162)
Oransbari 163)
Sukorem 164)
Waibem 165)
Wanden 166)
Wau 167)
Gunung Sitoli 168)
Kuala Tanjung 169)
Lhokseumawe 170)
Meulaboh 171)
Pulau Banyak 172)
Sibolga 173)
Sinabang 174)
Singkil 175)
Tapaktuan 176)
Dumai 177)
Bataka 178)
Dowora 179)
Fluk 180)
Galela 181)
Gane Dalam 182)
Gumumu/Manu 183)
Jailolo 184)
Laiwui 185)
Maba 186)
Madapolo 187)
Mayau 188)
Morotai 189)
Moti 190)
P. Dawora 191)
Pigaraja 192)
Sekeli 193)
Soa Sio/Tidore 194)
Sum 195)
Tifure 196)
Tobalai 197)
Wayaloar 198)
Weda 199)
Woi 200)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. U M U M (lanjutan)

**1.6. Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki
(lanjutan)**

• **Terminal Penghubung Kelas B (lanjutan)**

201) Awerange
202) Majene
203) Tanjung Silopo
204) Cirebon
205) Karimun Jawa
206) Kijang
207) Dabo
208) Moro
209) P. Pekajang
210) Midai
211) Pulau Laut
212) Sedanau
213) Selat Lampa
214) Serasan
215) Subi
216) Kuala Maras
217) Letung
218) Tambelan
219) Kaipuri
220) Korido
221) Miosbipondi
222) P. Insobabi
223) P. Mapia
224) P. Mbromsi
225) P. Wundi
226) Randaway
227) Arandai
228) Karas
229) Kokas
230) Balairung
231) Baranusa
232) Mananga
233) Bade
234) Koweda
235) Napan Wainami
236) Puiway
237) Teluk Umar
238) Wapoga
239) Yaur
240) Bobong
241) Dofa
242) Fala
243) Lede
244) Malbufa
245) Sanuya
246) Tikong
247) Ambalau
248) Leksula

1. G E N E R A L (continued)

**1.6. Business Line and Owned Business Unit
(continued)**

• **Class B Terminal Point (continued)**

Awerange 201)
Majene 202)
Tanjung Silopo 203)
Cirebon 204)
Karimun Jawa 205)
Kijang 206)
Dabo 207)
Moro 208)
P. Pekajang 209)
Midai 210)
Pulau Laut 211)
Sedanau 212)
Selat Lampa 213)
Serasan 214)
Subi 215)
Kuala Maras 216)
Letung 217)
Tambelan 218)
Kaipuri 219)
Korido 220)
Miosbipondi 221)
P. Insobabi 222)
P. Mapia 223)
P. Mbromsi 224)
P. Wundi 225)
Randaway 226)
Arandai 227)
Karas 228)
Kokas 229)
Balairung 230)
Baranusa 231)
Mananga 232)
Bade 233)
Koweda 234)
Napan Wainami 235)
Puiway 236)
Teluk Umar 237)
Wapoga 238)
Yaur 239)
Bobong 240)
Dofa 241)
Fala 242)
Lede 243)
Malbufa 244)
Sanuya 245)
Tikong 246)
Ambalau 247)
Leksula 248)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. U M U M (lanjutan)

1.6. Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki
(lanjutan)

• **Terminal Penghubung Kelas B** (lanjutan)

249) Namrole
250) Tifu
251) P. Sebatik
252) Sintete
253) Ansus
254) Dawai
255) Poom
256) Saribi
257) Teba
258) Tindaret
259) Waren
260) Windesi/Yapen
261) Wooi
262) Elat
263) P. Kur
264) Romang
265) Badas
266) Badas/Khayangan
267) Calabai
268) P. Sailus
269) Mamboro
270) Waikelo
271) Lobo
272) Warifi
273) Reo
274) Toli-toli
275) Leok
276) Paleleh
277) Maumbawa
278) P. Ende
279) Waiwole/Waewole
280) Bungku (Marowali)
281) Molawe
282) Batulicin
283) Kotabaru
284) Marabatuan
285) Maradapan
286) Matasiri
287) Ampana
288) Kimaam
289) Wanam
290) Atsy
291) Eci
292) Ikisi
293) Sawa Erma

1. G E N E R A L (continued)

1.6. Business Line and Owned Business Unit
(continued)

• **Class B Terminal Point** (continued)

Namrole 249)
Tifu 250)
P. Sebatik 251)
Sintete 252)
Ansus 253)
Dawai 254)
Poom 255)
Saribi 256)
Teba 257)
Tindaret 258)
Waren 259)
Windesi/Yapen 260)
Wooi 261)
Elat 262)
P. Kur 263)
Romang 264)
Badas 265)
Badas/Khayangan 266)
Calabai 267)
P. Sailus 268)
Mamboro 269)
Waikelo 270)
Lobo 271)
Warifi 272)
Reo 273)
Toli-toli 274)
Leok 275)
Paleleh 276)
Maumbawa 277)
P. Ende 278)
Waiwole/Waewole 279)
Bungku (Marowali) 280)
Molawe 281)
Batulicin 282)
Kotabaru 283)
Marabatuan 284)
Maradapan 285)
Matasiri 286)
Ampana 287)
Kimaam 288)
Wanam 289)
Atsy 290)
Eci 291)
Ikisi 292)
Sawa Erma 293)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. U M U M (lanjutan)

1. G E N E R A L (continued)

**1.6. Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki
(lanjutan)**

**1.6. Business Line and Owned Business Unit
(continued)**

	Total		
• Terminal Penghubung Kelas B (lanjutan)		• Class B Terminal Point (continued)	
294) Tagemon		Tagemon 294)	
295) Boma		Boma 295)	
296) Moor		Moor 296)	
297) Pomako		Pomako 297)	
• SBU :	2	• SBU :	
1) Galangan Surya Surabaya		Galangan Surya Surabaya 1)	
2) Hotel Bahtera Cipayung		Hotel Bahtera Cipayung 2)	
• Kantor Perwakilan, lokasi di :	1	• Representative Branch :	
Singapore		Singapore	
Jumlah	367	Total	

1.7. Sumber Daya Manusia

1.7. Human Resources

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perseroan memiliki pegawai tetap masing-masing sebanyak 4.533 karyawan dan 5.011 karyawan. (Tidak Diaudit)

As of December 31, 2023 and 2022, the Company has 4.533 and 5.011 permanent employees, respectively. (Unaudited)

Dari jumlah karyawan tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, yang masuk dalam perhitungan kewajiban atas imbalan pasca kerja sebagai berikut:

From the total number of permanent employees of the Company as of December 31, 2024 and 2023 which are included in the calculation of liabilities for post-employment benefits as follows:

	31 Des./ Dec. 2024 (orang/person)	31 Des./ Dec. 2023 (orang/person)	
Program Santunan Meninggal dan Cacat.			Death and Disability Compensation Program
Program Pesangon Pensiun	2.482	3.105	Retirement Severance Program
Program Pendanaan Hari Tua	2.482	3.105	Old Age Funding Program
Program Penghargaan Kesetiaan	2.482	-	Loyalty Award Program
Program Pensiun dan Manfaat Lain	1.447	1.762	Pension and Other Benefit program
Program Kompensasi PKWT:			PKWT Compensation Program
- Kontrak ≤ 1 Tahun	355	-	Contract ≤ 1 Year
- Kontrak > 1 Tahun	16	-	Contract > 1 Year

1. U M U M (lanjutan)

1.8. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Perseroan menerapkan struktur dan mekanisme GCG dengan tujuan untuk menjalankan suatu proses dan struktur untuk mencapai target kinerja serta mewujudkan akuntabilitas Perseroan guna menghasilkan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya.

Penerapan Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) di PT PELNI (Persero) merujuk pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain Undang-Undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas dan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-117/MMBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023, tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), bahwa BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.

Komitmen pelaksanaan GCG di Perseroan diwujudkan dalam rangkaian pedoman terkait pelaksanaan GCG dan penandatanganan Pakta Integritas GCG oleh Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

- a. Pedoman GCG
- b. Pedoman *Code of Conduct*
- c. Tata Laksana Kerja (*Board Manual*) Direksi & Dewan Komisaris PT PELNI (Persero)
- d. Pedoman Benturan Kepentingan
- e. Pakta Integritas
- f. Pedoman Penanganan Gratifikasi

1. GENERAL (continued)

1.8. The Implementation of Good Corporate Governance (GCG)

The Company implements GCG structures and mechanisms with the aim of carrying out a process and structure to achieve performance targets and realize the Company's accountability in order to generate added value for shareholders and stakeholders while taking into account the interests of other stakeholders.

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) Practices at PT PELNI (Persero) refers to a number of laws and regulations applicable in Indonesia, including Law No. IX. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Decree of the Minister of State for State-Owned Enterprises Number: Kep-117 / MBU / 2002 dated July 31, 2002 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises (BUMN) and Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises Number PER-2 / MBU / 03/2023, concerning Guidelines for Good Corporate Governance, that SOEs are required to implement GCG consistently and sustainably based on this Ministerial Regulation while taking into account the provisions, and applicable norms and articles of association of SOEs.

The commitment to the implementation of GCG in the Company is realized in a series of guidelines related to the implementation of GCG and the signing of the GCG Integrity Pact by the Board of Commissioners and Directors, as follows:

- a. Manual of GCG
- b. Manual of Code of Conduct
- c. PT PELNI (Persero) Board Manual for Directors and Board of Commissioners
- d. Manual of Conflict of Interest
- e. Integrity Pact
- f. Anti-Gratification Manual

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan

untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2024 and

for The Year then Ended

(With Comparative as of December 31, 2023 and

for The Year then Ended)

(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. U M U M (lanjutan)

**1.8. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
(lanjutan)**

Perseroan melaksanakan evaluasi praktik GCG melalui kegiatan Asesmen GCG (GCG Assessment) secara berkala guna mengukur kualitas pelaksanaan GCG pada masing-masing Organ Perseroan. Untuk tahun buku 2024 dan 2023 (dilakukan secara mandiri), assesment GCG menghasilkan skor masing-masing 87,136 dan 86,821 atau predikat sangat baik.

1.9. Manajemen Risiko

PT PELNI (Persero) mengimplementasikan Sistem Manajemen Risiko sesuai dengan *framework* ISO 31000:2018 untuk menghasilkan praktik manajemen risiko dengan perspektif lebih luas, mudah dipahami, terukur serta mendukung koordinasi dan integrasi antar unit kerja di Perseroan.

Kebijakan Sistem Manajemen Risiko di Perseroan telah diperbarui berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 12.31/01/SK/HKO.01/2024, tanggal 31 Desember 2024 tentang Penetapan Pedoman Manajemen Risiko PT PELNI (Persero).

Guna mendukung penerapan Manajemen Risiko ISO 31000:2018, dilakukan peningkatan kesadaran risiko diseluruh lapisan organisasi, membangun ketahanan dan melakukan mitigasi risiko serta menjaga risiko yang tersisa (*residual risk*) pada tingkat yang dapat ditoleransi (*tolerable level*). Hal ini dimaksudkan agar daya saing (*competitiveness*) dan kelangsungan usaha (*going concern*) perusahaan dapat selalu terjaga. Pedoman ini dapat diterapkan juga pada anak usaha sepanjang telah disetujui oleh Direksi anak usaha. Penerapan manajemen risiko pada anak usaha perlu dilakukan dengan beberapa adaptasi mengingat karakter usaha yang berbeda dengan induk usaha.

1. GENERAL (continued)

1.8. The Implementation of Good Corporate Governance (GCG) (continued)

The Company periodically evaluates GCG practices through GCG Assessment activities to measure the quality of GCG implementation in each organ of the Company. For the financial years 2024 and 2023 (conducted independently), the GCG assessment resulted in a score of 87.136 and 86.821 respectively or a very good predicate.

1.9. Risk Management

PT PELNI (Persero) implements a Risk Management System in accordance with the ISO 31000: 2018 framework to produce risk management practices with a broader perspective, easy to understand, measurable and supports coordination and integration between work units in the Company.

The Risk Management System Policy in the Company has been updated based on Board of Directors Decree No. 12.31/01/SK/HKO.01/2024, dated December 31, 2024 concerning Establishment of PT PELNI (Persero) Risk Management

IoT support the implementation of ISO 31000:2018 Risk Management, risk awareness is increased at all levels of the organization, building resilience and mitigating risks and maintaining residual risk at a tolerable level. This is intended so that the competitiveness and going concern of the company can always be maintained. This guideline can also be applied to subsidiaries as long as it has been approved by the subsidiary's Board of Directors. The implementation of risk management in subsidiaries needs to be done with some adaptations given the different business character with the parent company.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. U M U M (lanjutan)

1. G E N E R A L (continued)

1.10. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu

1.10. Certification of Quality Management System

Perseroan telah memperoleh sertifikasi atas aset yang digunakan dalam kegiatan usaha utama dibidang pelayaran, meliputi:

The Company has obtained certification of assets used in the main business activities in the shipping sector, including:

No.	Nama Sertifikat/ Name of Certificate	Lembaga Penerbit Sertifikat/ Certificate Issuer Institution	Masa Berlaku/ Validity Period
1.	Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang / <i>Passengers Vessels Safety Certificate</i>	Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI / <i>Marine Transportation General Directorate, Ministry of Transportation Republic of Indonesia</i>	04 Maret 2026 30 April 2025 16 April 2025 20 Mei 2025 05 Juni 2025 23 April 2025 30 April 2025 24 April 2024 29 April 2025 08 Juni 2025 07 April 2025 30 April 2025 07 April 2025 30 April 2025 30 April 2025 23 April 2025 26 Agustus 2025 02 Oktober 2025 16 Maret 2025 17 Februari 2026 30 April 2025 24 Juni 2025 03 April 2025 23 Juni 2025 17 Maret 2025 29 Oktober 2025
2.	Dokumen Keselamatan Pengawakan <i>Minimum/Minimum Safe Manning Document</i>	Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI / <i>Marine Transportation General Directorate, Ministry of Transportation Republic of Indonesia</i>	03-01-2024 - 02-01-2025 02-12-2024 - 01-06-2025 27-03-2024 - 26-03-2025 15-11-2024 - 14-11-2025 12-11-2024 - 11-11-2025 13-05-2024 - 12-05-2025 17-05-2024 - 16-05-2025 20-05-2024 - 19-05-2025

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. U M U M (lanjutan)

1.10. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (lanjutan)

1. G E N E R A L (continued)

**1.10. Certification of Quality Management System
(continued)**

No.	Nama Sertifikat/ Name of Certificate	Lembaga Penerbit Sertifikat/ Certificate Issuer Institution	Masa Berlaku/ Validity Period
2.	Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum/Minimum Safe Manning Document (lanjutan/continued)	Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI / Marine Transportation General Directorate, Ministry of Transportation Republic of Indonesia (lanjutan/continued)	25-11-2024 - 24-11-2025 30-03-2024 - 29-09-2025 01-03-2024 - 01-06-2025 14-06-2024 - 13-06-2025 13-12-2024 - 12-12-2025 14-08-2024 - 13-08-2025 05-01-2024 - 04-01-2025 07-08-2024 - 06-08-2025 05-01-2024 - 04-01-2025 12-11-2024 - 11-11-2025 27-02-2025 - 16-04-2025 07-03-2025 - 06-06-2025 07-11-2024 - 06-05-2025 01-04-2024 - 31-03-2025 09-09-2024 - 08-09-2025 15-01-2024 - 14-01-2025 30-06-2024 - 29-09-2024
3.	Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal / National Certificate Of Prevention Of Pollution From Ships	Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI / Marine Transportation General Directorate, Ministry of Transportation Republic of Indonesia	27-12-2023 - 19-09-2026 25-01-2023 - 08-11-2025 31-08-2023 - 19-06-2024 22-09-2022 - 22-09-2025 05-08-2024 - 14-05-2027 04-05-2023 - 16-02-2026 24-10-2023 - 14-08-2026 08-10-2024 - 12-07-2027 03-06-2022 - 23-03-2025 14-08-2023 - 18-06-2026 09-01-2023 - 28-09-2025 13-06-2023 - 26-03-2026 28-06-2024 - 18-04-2027 21-05-2024 - 07-03-2027 02-09-2024 - 12-05-2027 08-06-2023 - 23-03-2026 23-04-2024 - 19-02-2027 02-05-2023 - 29-01-2026 09-10-2023 - 30-08-2026 14-02-2025 - 13-05-2025 15-08-2023 - 28-05-2026 20-11-2024 - 06-11-2027

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. U M U M (lanjutan)

1. G E N E R A L (continued)

1.10. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (lanjutan)

1.10. Certification of Quality Management System
(continued)

No.	Nama Sertifikat/ Name of Certificate	Lembaga Penerbit Sertifikat/ Certificate Issuer Institution	Masa Berlaku/ Validity Period
3.	Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal / <i>National Certificate Of Prevention Of Pollution From Ships</i> (lanjutan/continued) w. KM Umsini x. KM Pangrango y. KM Dobonsolo z. KM Dorolonda	Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI / <i>Marine Transportation General Directorate, Ministry of Transportation Republic of Indonesia</i> (lanjutan/continued)	29-09-2023 - 02-07-2026 05-01-2024 - 23-10-2026 05-07-2023 - 13-04-2026 17-10-2023 - 03-08-2026
4.	Sertifikat Garis Muat. Lambung dan Mesin - Kapal Penumpang/ <i>Load Line, Hull and Machine - Passenger Ships Certificate:</i> a. KM Awu b. KM Bukit Raya c. KM Binaiya d. KM B. Siguntang e. KM Ciremai f. KM Dobonsolo g. KM Dorolonda h. KM Egon i. KM G. Dempo j. KM Kelimutu k. KM Kelud l. KM Lawit m. KM Leuser n. KM Lambelu o. KM Labobar p. KM Nggapulu q. KM Pangrango r. KM Sirimau s. KM Sinabung t. KM Sangiang u. KM Tilong Kabila v. KM Tatamailau w. KM Tidar x. KM Umsini y. KM Wilis z. Jetliner	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	12-08-2021 - 08-06-2026 04-02-2024 - 30-12-2028 09-07-2024 - 25-03-2029 27-05-2021 - 23-05-2026 02-04-2024 - 01-08-2028 19-01-2024 - 10-03-2028 18-11-2021 - 11-07-2026 19-08-2020 - 29-06-2025 13-06-2024 - 20-06-2028 20-03-2020 - 04-02-2025 04-02-2024 - 27-10-2028 09-10-2024 - 31-08-2029 15-11-2024 - 14-05-2025 28-05-2022 - 15-05-2027 22-07-2024 - 26-06-2029 08-10-2022 - 05-04-2027 12-03-2022 - 09-11-2026 09-06-2020 - 17-05-2025 20-06-2022 - 18-04-2027 27-12-2024 - 26-06-2025 30-04-2020 - 04-03-2025 07-04-2020 - 25-03-2025 27-06-2022 - 26-11-2026 30-04-2020 - 31-03-2025 01-10-2024 - 25-10-2029 13-06-2024 - 04-06-2028

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. U M U M (lanjutan)

1.11. Entitas Anak

a. Pengendalian Langsung

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, entitas anak yang dikonsolidasikan termasuk persentase kepemilikan Perusahaan sebagai berikut:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Bidang Usaha/ Line of Business	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership	Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi)/ Total Assets (Before Elimination)	
				2024	2023
PT Perusahaan Bongkar Muat Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN)	Angkutan transportasi, bongkar muat, pengiriman barang, pergudangan, operator terminal laut, truk, custom clearance, pedalaman depo / transportation, loading, logistic, warehouse, marine terminal operator, truck, custom clearance, inland depo.	1987	99.47%	570.191.463.422	576.000.030.490
PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID)	Jasa perdagangan umum, jasa kepelabuhan, perusahaan pengutusan kepabeanan, jasa kebersihan, jasa pengamanan, jasa pengelolaan kasur, jasa penyediaan air minum dalam kemasan, jasa pengelolaan hotel, jasa penyediaan hiburan atas kapal/General trading services, port services, customs delivery companies, cleaning services, security services, mattress management services, bottled water supply services, hotel management services, entertainment services on board.	1970	99.50%	375.988.808.746	328.319.381.090

1. G E N E R A L (continued)

1.11. Subsidiaries

a. Direct Controlling

As of December 31, 2024 and 2023, the consolidated subsidiaries include the Company's ownership percentage as follows:

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. U M U M (lanjutan)

1.11. Entitas Anak (lanjutan)

b. Pengendalian Tidak Langsung

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, entitas anak yang dikonsolidasikan termasuk persentase kepemilikan Perusahaan sebagai berikut:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Bidang Usaha/ Line of Business	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership	Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi)/ Total Assets (Before Elimination)	
				2024	2023
PT Sarana Bandar Logistik	Bergerak dalam bidang transportasi, pergudangan, konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan dan bidang kepabeanan. / Engaged in transportation, warehousing, cargo consolidation, provision of cargo space and customs sector.	2015	99,96%	40.982.453.469	34.522.288.381
PT Pelita Bandar Nasional	Bongkar Muat / Unloading and loading	1989	98,00%	10.953.490.904	10.268.031.608
PT Sarana Bandar Indotrading	Perdagangan / Trading	2022	99,00%	39.370.901.191	34.013.419.144

1.11.1. PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN)

PT PBM Sarana Bandar Nasional didirikan berdasarkan Akta Notaris Soelaiman Arjasasmita di Jakarta No. 59 tanggal 31 Maret 1986 dan telah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Perundangundangan dengan Surat Keputusan Nomor 02-1932 HT 01.01 tahun 1987 tanggal 5 Maret 1987. Anggaran Dasar Entitas diperbaharui dengan Akta Notaris Ny. Imah Fatimah, SH No. 17 tanggal 12 Agustus 1998. Modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp15.000.000.000.

1. GENERAL (continued)

1.11. Subsidiaries (continued)

b. Indirect Controlling

As of December 31, 2024 and 2023, the consolidated subsidiaries include the Company's ownership percentage as follows:

1.11.1. PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN)

PT PBM Sarana Bandar Nasional was established based on Notarial Deed of Soelaiman Arjasasmita in Jakarta No. 59 dated March 31, 1986 and has been approved by the Minister of Law and Legislation with Decree No. 02-1932 HT 01.01 of 1987 dated March 5, 1987. The Articles of Association of the Entity were renewed by Notarial Deed No. 17 of Ny. Imah Fatimah, SH dated August 12, 1998. The issued and fully paid capital amounted to Rp15,000,000,000.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan

untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2024 and

for The Year then Ended

(With Comparative as of December 31, 2023 and

for The Year then Ended)

(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. U M U M (lanjutan)

1.11. Entitas Anak (lanjutan)

1.11.1. PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN) (lanjutan)

Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Akta No. 01 tanggal 02 Oktober 2019, dibuat dihadapan Ida Adiningsih, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. AHU-0078035.AH.01.02 tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perusahaan Bongkar Muat Sarana Bandar Nasional.

Modal Saham

Modal Dasar Perseroan ini sebagaimana tertuang pada pasal 4 Akta Anggaran Dasar Nomor: 11 tanggal 30 Nopember 2015 dibuat dihadapan Yulkhaizar Panuh. SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0947214.AH.01.02 tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT PBM Sarana Bandar Nasional adalah sebesar Rp60.000.000.000 terbagi atas 60.000 saham masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% atau sejumlah 15.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp15.000.000.000.

1. G E N E R A L (continued)

1.11. Subsidiaries (continued)

1.11.1. PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN) (continued)

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently through Deed No. 01 dated October 02, 2019, made before Ida Adiningsih, S.H., Notary in Jakarta, and has received approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, No. AHU-0078035.AH.01.02 of 2019 concerning Approval of Amendments to the Articles of Association of Limited Liability Company PT Perusahaan Bongkar Muat Sarana Bandar Nasional.

Shares Capital

The Company's authorized capital as stated in article 4 of the Deed of Association Number: 11 dated November 30, 2015 made before Yulkhaizar Panuh. SH, Notary in Jakarta and has obtained approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-0947214.AH.01.02 of 2016 concerning Approval of Amendments to the Articles of Association of Limited Liability Company PT PBM Sarana Bandar Nasional amounting to Rp60,000,000,000 divided into 60,000 shares each share with a nominal value of Rp1.000.000. From the authorized capital, 25% or 15.000 shares have been issued and paid up with a total nominal value of Rp15.000.000.000.

Pemegang Saham/ Shareholders	Jumlah Lembar Saham / Shares	Nilai Nominal/ Par Value (Rp)	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / Issued and Fully Paid Shares Capital (Rp)	Persentase Kepemilikan/ Ownership Percentage
PT PELNI (Persero)	14.920	1.000.000	14.920.000.000	99,47%
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni	80	1.000.000	80.000.000	0,53%
Jumlah / Total	15.000	1.000.000	15.000.000.000	100,00%

1. U M U M (lanjutan)

1.11. Entitas Anak (lanjutan)

1.11.1. PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN) (lanjutan)

Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT PBM Sarana Bandar Nasional dengan Nomor: 11.10/02/BA/DU/2023 pada tanggal 10 November 2023, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris dan Anggota Direksi PT PBM Sarana Bandar Nasional, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT PBM Sarana Bandar Nasional untuk tahun 2024 sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	A.A.N Budi Tresnawan	:
Komisaris	:	Mugen Suprihatin Sartoto	:
Komisaris	:	Tatang Ruskianta Dasuki	:

Direksi

Direktur Utama	:	Edward Tobing	:
Direktur Operasi dan Komersial	:	Antonius L. Gaol	:
Direktur Keuangan dan SDM	:	Affan Tauffan	:

Tempat dan Kedudukan

Dalam menjalankan usahanya PT Sarana Bandar Nasional berkedudukan di Jl. Cempaka Putih Tengah II Blok B 13-14 Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510.

Sumber Daya Manusia

Jumlah karyawan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebanyak 246 dan 255 karyawan. (Tidak Diaudit)

Ringkasan Informasi Keuangan Penting

	2024	2023
Aset	570.191.463.422	576.000.030.490
Liabilitas	55.264.291.330	100.856.230.268
Ekuitas	514.927.172.092	475.143.800.222
Pendapatan	532.298.284.743	541.110.100.160
Beban	(493.123.457.727)	(492.175.889.196)
Laba Tahun Berjalan	39.174.827.016	48.934.210.964

1. G E N E R A L (continued)

1.11. Subsidiaries (continued)

1.11.1. PT PBM Sarana Bandar Nasional (PT PBM SBN) (continued)

Board of Commissioners and Directors

Based on the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT PBM Sarana Bandar Nasional with Number: 11.10/02/BA/DU/2023 on November 10, 2023, concerning the Dismissal and Appointment of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors of PT PBM Sarana Bandar Nasional, the composition of the Board of Commissioners and Directors of PT PBM Sarana Bandar Nasional for the year 2024 is as follows:

Board Of Commissioners

President Commissioner	:
Commissioner	:
Commissioner	:

Director

President Director	:
Operation and Commercial Director	:
Finance and SDM Director	:

Place and Position

In carrying out its business PT Sarana Bandar Nasional is domiciled at Jl. Cempaka Putih Tengah II Blok B 13-14 Cempaka Putih Central Jakarta 10510.

Place and Position

The number of employees of the Company as of December 31, 2024 and 2023 were 246 and 255, respectively. (Unaudited)

Summary of Key Financial Information

	2024	2023
Assets	570.191.463.422	576.000.030.490
Liabilities	55.264.291.330	100.856.230.268
Equity	514.927.172.092	475.143.800.222
Revenues	532.298.284.743	541.110.100.160
Expenses	(493.123.457.727)	(492.175.889.196)
Profit for The Year	39.174.827.016	48.934.210.964

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan

untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2024 and

for The Year then Ended

(With Comparative as of December 31, 2023 and

for The Year then Ended)

(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. U M U M (lanjutan)

1.11. Entitas Anak (lanjutan)

1.11.2. PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID)

PT Pelita Indonesia Djaya Jakarta didirikan berdasarkan Akta Notaris Djojo Mulyadi, SH di Jakarta No. 3 tanggal 29 September 1969 dan telah mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 9 Desember 1969.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Akta Notaris No. 6, tanggal 31 Januari 2023, dibuat dihadapan Notaris Ida Adiningsih, S.H., dan telah mendapat Persetujuan Menhumkam Nomor : AHU-AH.01.09-0190153, tanggal 9 Februari 2023.

Modal Saham

Modal saham yang disetor ke entitas merupakan 99.5% penyertaan PT Pelayaran Nasional Indonesia dan 0.5% penyertaan Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni sesuai dengan Akta Notaris Raden Mas Soedarto Soenarto. SH No. 7 tanggal 10 Juni 2009 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.AHU-43800.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 4 September 2009.

1. GENERAL (continued)

1.11. Subsidiaries (continued)

1.11.2. PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID)

PT Pelita Indonesia Djaya Jakarta was established based on Notarial Deed of Djojo Mulyadi, SH in Jakarta No. 3 dated September 29, 1969 and was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia on December 9, 1969.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently through Notarial Deed No. 6, dated January 31, 2023, made before Notary Ida Adiningsih, S.H., and has received approval from the Minister of Law and Human Rights Number: AHU-AH.01.09-0190153, dated February 9, 2023.

Shares Capital

The equity capital invested in the entity consists of 99.5% ownership by PT Pelayaran Nasional Indonesia and 0.5% ownership by the Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni, as per the Deed of Notary Raden Mas Soedarto Soenarto, SH No. 7 dated June 10, 2009, which was legalized by the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-43800.AH.01.02 of 2009, dated September 4, 2009.

Pemegang Saham/ Shareholders	Jumlah Saham / Shares	Nilai Nominal/ Par Value (Rp)	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / Issued and Fully Paid Shares Value (Rp)	Persentase Kepemilikan/ Ownership Percentage
PT PELNI (Persero)	2.000	1.000.000	2.000.000.000	99.50%
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni	10	1.000.000	10.000.000	0.50%
Jumlah / Total	2.010	1.000.000	2.010.000.000	100%

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. U M U M (lanjutan)

1.11. Entitas Anak (lanjutan)

1.11.2. PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) (lanjutan)

Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham Sirkuler (KPSS) PT Pelita Indonesia Djaya tanggal 08 November 2024 dan Akta Notaris Ida Adiningsih, SH., No.8 tanggal 18 November 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris PT Pelita Indonesia Djaya, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU.AH.01.09-0277126 tanggal 20 November 2024. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2024 sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Mardiyanto
Komisaris Independen : Sosialisman Hidayat Hasibuan

Direksi

Direktur Utama : Sukendra
Direktur Keuangan : Suparno
Direktur Operasional : Didik Martono

Tempat dan Kedudukan

Dalam menjalankan usahanya PT Pelita Indonesia Djaya berkedudukan di Gedung Pelni Kemayoran Jl. Angkasa No. 18 Gunung Sahari Selatan Jakarta Pusat 10610.

Sumber Daya Manusia

Jumlah karyawan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebanyak 1.037 dan 1.771. (Tidak Diaudit)

Ringkasan Informasi Keuangan Penting

	2024	2023
Aset	375.988.808.751	328.319.381.090
Liabilitas	129.658.190.102	112.997.615.241
Ekuitas	246.330.618.649	215.321.765.849
Pendapatan	664.280.447.650	575.655.286.058
Beban	(633.112.156.914)	(547.482.605.482)
Laba Tahun Berjalan	31.168.290.736	28.172.680.577

1. GENERAL (continued)

1.11. Subsidiaries (continued)

1.11.2. PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) (continued)

Board of Commissioners and Directors

Based on the Circular Shareholders' Resolution (KPSS) of PT Pelita Indonesia Djaya dated November 08, 2024 and Notarial Deed of Ida Adiningsih, SH, No.8 dated November 18, 2024 concerning the Dismissal and Appointment of the Board of Commissioners of PT Pelita Indonesia Djaya, which has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. AHU.AH.01.09-0277126 dated November 20, 2024. The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors for 2024 is as follows:

Board Of Commissioners

Commissioner
Independent Commissioner

Director

President Director
Finance Director
Operation Director

Place and Position

In conducting its business, PT Pelita Indonesia Djaya is domiciled at Pelni Kemayoran Building Jl. Angkasa No. 18 Gunung Sahari Selatan Central Jakarta 10610.

Place and Position

The number of employees of the Company as of December 31, 2024 and 2023 were 1.037 and 1.771, respectively. (Unaudited)

Summary of Key Financial Information

Assets
Liabilities
Equity
Revenues
Expenses
Profit for The Year

2. KETENTUAN JASA PERKAPALAN

PT PELNI (Persero) dalam menjalankan kegiatan jasa perkapalan tunduk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, serta ketentuan - ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Beberapa ketentuan penting yang berkaitan dengan jasa perkapalan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara.
- b. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- c. Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan.
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 65 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut.
- e. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM. 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Kapal Perintis.
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 tahun 2019 diubah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2018 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) .
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 tahun 2019. Pemeriksaan kesehatan pelaut, tenaga penunjang keselamatan pelayaran dan lingkungan kerja pelayaran.
- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 119 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut.
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Komponen Biaya dan Pendapatan yang Diperhitungkan Dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi.

2. SHIPPING SERVICES REGULATION

PT PELNI (Persero) in carrying out its shipping services activities is subject to the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2008 concerning Shipping and the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 31 of 2021 concerning the Implementation of the Shipping Sector, as well as the provisions set by the Minister of Transportation. Some important provisions related to shipping services include:

- a. *President Regulation Number 2 of 2016 concerning the Implementation of Public Service Obligations for State-Owned Pioneer Vessels*
- b. *President Regulation Number 59 of 2020 concerning the Stipulation and Storage of Basic Needs and Essential Goods.*
- c. *President Regulation No. 27 of 2021 amending President Regulation Number 106 of 2015 concerning the Implementation of Public Service Obligations for Freight Transportation to and from Underdeveloped, Remote, Outermost, and Border Areas.*
- d. *Minister of Transportation Regulation Number PM. 65 of 2018 amending Minister of Transportation Regulation Number PM. 4 of 2018 concerning the Implementation of Public Service Obligations for Sea Freight Transportation.*
- e. *Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Regulation Number PM. 48 of 2018 concerning the Implementation of Public Service Obligations for Pioneer Vessels.*
- f. *Minister of Transportation Regulation Number 23 of 2019, which amends Minister of Transportation Regulation Number PM 29 of 2018, concerning the Second Amendment on Freight Transportation Tariffs at Sea in the Context of Public Service Obligation (PSO) Implementation.*
- g. *Minister of Transportation Regulation Number PM 40 of 2019 concerning the Health Examination for Seafarers, Supporting Personnel for Maritime Safety, and the Maritime Work Environment.*
- h. *Minister of Transportation Regulation Number PM 119 of 2015 concerning the Amendment to Minister of Transportation Regulation Number PM 37 of 2015 about the Passenger Service Standards for Sea Transportation.*
- i. *Minister of Transportation Regulation Number 10 of 2021 concerning the Components of Costs and Revenues to be Considered in the Implementation of Public Service Obligation for Sea Transportation of Economy Class Passengers.*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan

untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2024 and

for The Year then Ended

(With Comparative as of December 31, 2023 and

for The Year then Ended)

(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. KETENTUAN JASA PERKAPALAN (lanjutan)

- j. Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 59 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 49 tahun 2017 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan.
- k. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 109 tahun 2017 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi.
- l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 109 tahun 2018 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 182 tahun 2015 tentang Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Ternak.
- m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2019, tentang Komponen Biaya dan Pendapatan yang Diperhitungkan Dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi.

3. PERUBAHAN PADA PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK)

a. Amendemen dan revisi atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 201, "Penyajian Laporan Keuangan", tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang;
- Amendemen PSAK 201, "Penyajian Laporan Keuangan", tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan;
- Amendemen PSAK 116, "Sewa", tentang Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa Balik;
- Amendemen PSAK 207, "Laporan Arus Kas" dan dan amendemen PSAK 107 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", tentang Pengungkapan terkait Pengaturan Pembiayaan Pemasok.

Implementasi standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

2. SHIPPING SERVICES REGULATION (continued)

- j. Minister of Transportation Regulation Number PM 59 of 2021 concerning the Amendment to Minister of Transportation Regulation Number PM 49 of 2017 about the Implementation of Business Services Related to Transportation in Waterways.
- k. Minister of Transportation Regulation Number PM 109 of 2017 concerning the Maximum Fare for Domestic Sea Passenger Transportation in Economy Class.
- l. Minister of Transportation Regulation Number PM 76 of 2019 concerning the amendment to Minister of Transportation Regulation Number PM 109 of 2018, which is the fourth amendment to Minister of Transportation Regulation Number PM 182 of 2015 concerning the Freight Tariffs for the Subsidized Operation of Special Livestock Transport Vessels.
- m. Minister of Transportation Regulation Number PM 10 of 2021 concerning the Amendment to Minister of Transportation Regulation Number PM 2 of 2019, about the Components of Costs and Revenues to be Considered in the Implementation of Public Service Obligation for Sea Transportation of Economy Class Passengers.

3. CHANGES TO THE STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (PSAK)

a. Amendment and revised to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2024, are as follows:

- Amendment to PSAK 201, Presentation of Financial Statements about the classification of liabilities as current or non-current;
- Amendment to PSAK 201: Presentation of Financial Statements related to Non-Current Liabilities with Covenants;
- Amendment to PSAK 116: "Leases" about lease liability in a sales and leaseback"
- Amendment to PSAK 207: "Statement of Cash Flows" and PSAK 107: "Financial Instrument: Disclosure" regarding Supplier Finance Agreement;

The implementation of the above standards had no significant effect on the amounts reported for the current period or prior financial year.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**3. PERUBAHAN PADA PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) (lanjutan)**

**b. Amendemen dan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan Baru yang telah diterbitkan, namun
berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada
tanggal 1 Januari 2025, sebagai berikut:**

- PSAK 117, "Kontrak Asuransi";
- Amendemen PSAK 117, "Kontrak Asuransi" tentang Penerapan Awal PSAK 104 dan PSAK 109 - Informasi Komparatif;
- PSAK 103: "Kombinasi Bisnis"; PSAK 105: "Aset Tidak Lancar yang dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan"; PSAK 107: "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"; PSAK 109: "Instrumen Keuangan"; PSAK 115: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"; PSAK 201: "Penyajian Laporan Keuangan"; PSAK 207: "Laporan Arus Kas"; PSAK 216: "Aset Tetap"; PSAK 219: "Imbalan Kerja"; PSAK 228: "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"; PSAK 232: "Instrumen Keuangan: Penyajian"; PSAK 236: "Penurunan Nilai Aset"; PSAK 237: "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi"; PSAK 238: "Aset Takberwujud"; serta PSAK 240: "Properti Investasi" - Amendemen konsekuensial karena berlaku efektifnya PSAK 117: "Kontrak Asuransi";
- Amendemen PSAK 221, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" terkait Kekurangan Ketertukaran.
- PSAK 370: "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak" dan ISAK 335: "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba" - Amendemen konsekuensial karena berlaku efektifnya SAK Indonesia untuk Entitas Privat.

**3. CHANGES TO THE STATEMENTS OF FINANCIAL
ACCOUNTING STANDARDS (PSAK) (continued)**

**b. Amendments and New Financial Accounting
Standards Statements that have been issued, but
are effective for the financial year beginning
January 1, 2025, as follows:**

- PSAK 117, "Insurance Contracts";
- PSAK 117, "Insurance Contracts": Initial application of PSAK 104 and PSAK 109 - Comparative Information;
- PSAK 103: "Business Combinations"; PSAK 105: "Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations"; PSAK 107: "Financial Instruments: Disclosures"; PSAK 109: "Financial Instruments"; PSAK 115: "Revenue from Contracts with Customers"; PSAK 201: "Presentation of Financial Statements"; PSAK 207: "Statement of Cash Flows"; PSAK 216: "Property, Plant and Equipment"; PSAK 219: "Employee Benefits"; PSAK 228: "Investments in Associates and Joint Ventures"; PSAK 232: "Financial Instruments: Presentation"; PSAK 236: "Impairment of Assets"; PSAK 237: "Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets"; PSAK 238: "Intangible Assets"; and PSAK 240: "Investment Property" - Consequential amendments due to the effective implementation of PSAK 117: "Insurance Contracts";
- Amendment to PSAK 221, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates" related to Exchangeability Losses.
- PSAK 370: "Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities" and ISAK 335: "Presentation of Financial Statements of Non-Profit Oriented Entities" - Consequential amendments due to the effective implementation of Indonesian SAK for Private Entities.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan

untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2024 and

for The Year then Ended

(With Comparative as of December 31, 2023 and

for The Year then Ended)

(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**3. PERUBAHAN PADA PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) (lanjutan)**

c. Amendemen dan Penyesuaian Tahunan PSAK merujuk pada *IFRS Accounting Standards Annual Improvements – Volume 11*, yang berisi perubahan susunan kata atau pembetulan minor atas konsekuensi yang tidak diintensikan, kekeliruan, atau persyaratan yang bertentangan dalam SAK Indonesia yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2026.

- PSAK 109: "Instrumen Keuangan" dan PSAK 107: "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan;

Amendemen ini menambahkan dan mengklarifikasi ketentuan dalam PSAK 109 terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan, serta mengklarifikasi penilaian karakteristik arus kas untuk aset keuangan dengan fitur *ESG-linked*, aset keuangan dengan fitur *non-recourse*, dan instrumen yang terikat secara kontraktual seperti *tranche*.

Amendemen ini juga mengubah ketentuan dalam PSAK 107 terkait persyaratan pengungkapan investasi pada instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan menambah ketentuan terkait instrumen keuangan dengan persyaratan kontraktual yang mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amendemen dan penyesuaian tahunan sesuai karakteristik bidang usaha Grup terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI).

**3. CHANGES TO THE STATEMENTS OF FINANCIAL
ACCOUNTING STANDARDS (PSAK) (continued)**

c. Annual Amendments and Improvements to PSAK refer to *IFRS Accounting Standards Annual Improvements – Volume 11*, which contains changes to the wording or minor corrections to unintended consequences, errors, or conflicting requirements in Indonesian SAK which are effective from 1 January 2026.

- PSAK 109: "Financial Instruments" and PSAK 107: "Financial Instruments: Disclosures", on Classification and Measurement of Financial

This amendment adds and clarifies the provisions in PSAK 109 regarding the derecognition of financial liabilities, as well as clarifying the assessment of cash flow characteristics for financial assets with ESG-linked features, financial assets with non-recourse features, and contractually bound instruments such as tranches.

This amendment also changes the provisions in PSAK 107 regarding disclosure requirements for investments in equity instruments measured at fair value through other comprehensive income and adds provisions regarding financial instruments with contractual terms that change the timing or amount of contractual cash flows.

As of the date of issuance of these consolidated financial statements, the Group is evaluating the potential impacts of the adoption of new standards, amendments and annual adjustments according to the characteristics of the Group's business fields on the Group's consolidated financial statements.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

a. Compliance with the Financial Accounting Standards (SAK)

The consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board – Indonesian Institute of Accountant (DSAK – IAI).

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian yang menggunakan dasar kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, disusun dengan konsep harga perolehan dan basis akrual, kecuali disebutkan lain dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi investasi dan pendanaan. Untuk tujuan pelaporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 5.

Mata Uang Fungsional dan Pelaporan

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

Mata uang fungsional Perseroan dan entitas anak adalah Rupiah. Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam mata uang Rupiah.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

b. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements had been prepared on going concern assumption and accrual basis, except for the consolidated statements of cash flows using the cash basis. The basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs, except for certain accounts which had been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

The consolidated financial statements, except for the consolidated statement of cash flows, have been prepared on the historical cost concept and accrual basis, except as otherwise disclosed in the relevant notes herein.

The statements of cash flows prepared using the direct method the cash flows into operating investing and financing activities. For cash flows presentation purposes, cash and cash equivalents comprise of cash on hand, cash in bank and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

The preparation of the consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgment in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 5.

Functional Currencies and Reporting

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Rupiah which is the functional currency of the Company. Each entity in the Group determines its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency

The functional currency of the Company and subsidiaries is Rupiah. The consolidated financial statements are presented in Rupiah.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

c. Transaksi dan Saldo Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing secara umum diakui dalam laporan laba rugi.

Kurs penutup yang digunakan pada akhir periode pelaporan adalah kurs tengah Bank Indonesia sebagai berikut:

	31 Des./Dec. 2024	31 Des./Dec. 2023	
	(Rp)	(Rp)	
1 EURO	16.851	17.140	1 EURO
1 USD	16.162	15.416	1 USD
1 SGD	11.919	11.712	1 SGD
1 AUD	10.082	10.565	1 AUD
1 JPY	102	110	1 JPY

Selanjutnya, untuk pungutan dan penyetoran pajak-pajak (PPN dan PPh) berkenaan dengan tagihan dan kewajiban dalam mata uang asing dibayarkan dengan Rupiah dan dicatat sesuai dengan 'kurs pajak mingguan' yang berlaku pada tanggal diterbitkannya faktur pajak yang bersangkutan.

d. Prinsip-Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Grup seperti disebutkan pada Catatan 1.e

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

c. Foreign Currency Transactions and Balances

Foreign currency transactions are translated into Rupiah using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. Foreign currency monetary assets and liabilities are translated into Rupiah at the rates of exchange prevailing at end of the the reporting period.

Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at period-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are generally recognised in the profit or loss.

Closing exchange rate that used at the end of reporting is the middle exchange rate of Bank Indonesia as follows:

For the next, the collection and remittance of taxes (VAT and income tax) in relationship to claims and liabilities in foreign currency would be pay in dollars and it's recorded in accordance by 'weekly tax rate' that applicable at the date of issuance of tax invoice.

d. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Group as described in Note 1.e.

A subsidiary is an entity controlled by the Group, wherein the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity's relevant activities (power over the *investee*).

The existence and effect of substantive potential voting rights in which the Group has the practical ability to exercise (i.e, substantive rights) are considered when assessing whether the Group controls other entities.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

d. Prinsip-Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Laporan keuangan Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Grup dan seluruh entitas anak yang, secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Grup. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non pengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan non pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non pengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan non pengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:

- 1) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- 2) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non pengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non pengendali);

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

d. Principles of Consolidation (continued)

The Group's financial statements incorporate the results, cash flows, assets and liabilities of the Group and all of its directly and indirectly controlled subsidiaries. Subsidiaries are consolidated from the effective date of acquisition, which is the date on which the Group effectively obtains control of the acquired business, until that control ceases.

A parent prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows relating to transaction between entities are eliminated in full.

The Group attributed the profit or loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the noncontrolling interests having a deficit balance. The Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity of the owners of the parent.

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in cessation of control are equity transactions (which are transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Group adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognised directly in equity and attributed to the owners of the parent.

If the Group loses control, the Group:

- 1) Derecognizes the assets (including *goodwill*) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;
- 2) Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

d. Prinsip-Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:
(lanjutan)

- 3) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- 4) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- 5) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
- 6) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

e. Kombinasi Bisnis

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui terhadap pemilik pihak yang diakuisisi sebelumnya dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar aset atau liabilitas yang timbul dari kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontinjensi yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Grup mengakui kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi untuk setiap akuisisi yang dilakukan baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas aset neto pihak yang diakuisisi. Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Imbalan kontinjensi yang masih harus dialihkan oleh Grup diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjensi yang diakui akan berdampak pada aset atau liabilitas.

Biaya terkait akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

d. Principles of Consolidation (continued)

If the Group loses control, the Group: (continued)

- 3) *Recognizes the fair value of the consideration received, if any, from the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control;*
- 4) *Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;*
- 5) *Reclassifies to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other SAK, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the former subsidiary;*
- 6) *Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.*

e. Business Combinations

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred by the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values at the acquisition date.

The Group recognises any non-controlling interest in the acquiree on an acquisition-by-acquisition basis, either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's net assets. Noncontrolling interest is reported as equity in the consolidated statement of financial position, separate from the owner of the parent's equity.

Any contingent consideration to be transferred by the Group is recognised at fair value as at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration will impact the assets and liabilities.

Acquisition related costs are expensed as incurred.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

f. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Jika, setelah penilaian kembali jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi melebihi jumlah imbalan yang dialihkan jumlah dari setiap kepentingan non pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada). Selisih lebih diakui segera dalam laba rugi sebagai pembelian dengan diskon.

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan dimana aset dan liabilitas yang diperoleh dari kombinasi bisnis dicatat oleh pengakuisisi pada jumlah tercatatnya.

Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat disajikan sebagai tambahan modal disetor dan tidak diakui ke laba rugi pada saat kehilangan pengendali.

Metode penyatuan kepemilikan diterapkan seolah-olah entitas telah bergabung sejak periode dimana entitas yang bergabung berada dalam sepengendali.

g. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 224, Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau Entitas yang terkait dengan Entitas pelapor:

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor, jika orang tersebut:
 - 1) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - 2) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - 3) Personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

f. Business Combinations of Entities under Common Control

If after the reassessment the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and liabilities assumed exceeds the sum of the consideration transferred the amount of any non controlling interests in the acquiree and the fair value of the acquirer's previously held interest in the acquiree (if any), the excess is recognized immediately in profit or loss as a bargain purchase gain.

Business combination of entities under common control that qualifies as a business are accounted for under pooling of interest method where assets and liabilities acquired in the business combination are recorded by the acquirer at their book values.

The difference between the transfer price and the book value is presented as additional paid in capital and is not recycled to profit and loss when control is lost.

The difference between the transfer price and the book value is presented as additional paid in capital and is not recycled to profit and loss when control is lost.

g. Transactions with Related Parties

The Group enters into transactions with related parties as defined in PSAK 224, Related Party Disclosures.

Related party is a person or Entity that it's related to Entity complainant:

- a. *A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:*
 - 1) *Has control or joint control over the reporting entity;*
 - 2) *Has significant influence over the reporting entity; or*
 - 3) *Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan

untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2024 and

for The Year then Ended

(With Comparative as of December 31, 2023 and

for The Year then Ended)

(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

g. Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

- 1) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
- 2) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- 3) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- 4) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- 5) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- 6) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a).
- 7) Orang yang diidentifikasi dalam butir (a) angka (1) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- 8) Entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

g. Transactions with Related Parties (continued)

b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:

- 1) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
- 2) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
- 3) Both of entities are joint ventures of the same third parties.
- 4) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
- 5) The entity is a post-employment benefit plan for employees benefit from one of the reporting entities, or entity that are related to reporting entity. If the reporting entity is the entity that administers the program, the sponsoring entity is also related to the reporting entity.
- 6) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
- 7) A person who is identified in (a) (1) has significant influence over the entity or key of management entity personnel (or parent of the entity).
- 8) The entity or members of a group of which it's a part of the group it's provides key management personnel services to reporting entity or to parent of entity reporter.

All significant transactions with related parties are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

h. Aset Keuangan

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain; dan
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas.

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar, keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah grup telah melakukan pemilihan tak terbatalakan pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Grup mereklasifikasi investasi utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

Pengukuran

Pada pengakuan awal grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian.

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga.

• **Instrumen Utang**

Pengukuran instrumen utang selanjutnya tergantung pada model bisnis Grup untuk mengelola aset dan karakteristik arus kas aset tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup memiliki aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

h. Financial Assets

The Group classifies its financial assets in the following measurement categories:

- Financial assets measured at fair value through profit or loss ("FVTPL") or through other comprehensive income ("FVOCI"); and
- Those to be measured at amortised cost.

The classification depends on the entity's business model for managing the financial assets and the contractual terms of the cash flows.

For assets measured at fair value gains and losses will either be recorded in profit or loss or other comprehensive income. For investments in debt instruments, this will depend on the business model in which the investment is held.

For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the group has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment at fair value through other comprehensive income.

The group reclassifies debt investments when and only when its business model for managing those assets changes.

Measurement

At initial recognition, the group measures a financial asset at its fair value plus in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are expensed in consolidated profit or loss.

Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash flows are solely payment of principal and interest.

• **Debt Instrument**

Subsequent measurement of debt instruments depends on the Group's business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. As at 31 December 2024 and 2023, the Group has financial assets measured at amortised cost.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan

untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2024 and

for The Year then Ended

(With Comparative as of December 31, 2023 and

for The Year then Ended)

(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

h. Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran (lanjutan)

• **Instrumen Utang** (lanjutan)

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi adalah aset yang dimiliki untuk memperoleh arus kas kontraktual di mana arus kas tersebut semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penghasilan bunga dari aset keuangan ini termasuk dalam "penghasilan bunga" dalam laporan laba rugi konsolidasian menggunakan metode suku bunga efektif.

Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan diakui secara langsung dalam laporan laba rugi konsolidasian dan disajikan sebagai "lain-lain, bersih". Kerugian penurunan nilai disajikan sebagai item baris terpisah dalam laporan laba rugi konsolidasian. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, aset keuangan Grup yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, dan aset keuangan lancar lainnya dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

• **Instrumen Ekuitas**

Grup selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar. Jika manajemen Perseroan telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar atas investasi ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain. Tidak ada reklasifikasi keuntungan dan kerugian nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian pengakuan investasi tersebut. Dividen dari investasi semacam itu tetap diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lainnya ketika hak Perseroan untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui dalam keuntungan / (kerugian) lain-lain dalam laporan laba rugi sebagaimana berlaku.

Kerugian penurunan nilai (dan pemulihan kerugian penurunan nilai) atas investasi ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak dilaporkan secara terpisah dari perubahan nilai wajar lainnya.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

h. Financial Assets (continued)

Measurement (continued)

• **Debt Instrument** (continued)

Financial assets measured at amortised cost are assets that are held for collection of contractual cash flows where those cash flows represent solely payments of principal and interest are measured at amortised cost. Interest income from these financial assets is included in "interest income" in the consolidated statement of profit or loss using the effective interest rate method.

Any gain or loss arising on derecognition is recognised directly in the interim consolidated statement of profit or loss and presented in "others, net". Impairment losses are presented as a separate line item in the profit or loss. As at 31 December 2024 and 2023, the Group's financial assets measured at amortised cost comprise of cash and cash equivalents, trade receivables, and other current financial assets in the consolidated statement of financial position.

• **Equity Instrument**

The Group subsequently measures all equity investments at fair value. Where the group's management has elected to present fair value gains and losses on equity investments in other comprehensive income. There is no subsequent reclassification of fair value gains and losses to profit or loss following the derecognition of the investment. Dividends from such investments continue to be recognised in profit or loss as other income when the group's right to receive payments is established.

Changes in the fair value of financial assets at fair value through profit or loss are recognized in other gain/(loss) in the statement of profit or loss as applicable.

Impairment losses (and recovery of impairment) on equity investments measured at FVOCI are not reported separately from other changes in fair value.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

h. Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai dari Aset Keuangan

Perusahaan menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Saat membuat penilaian perusahaan menggunakan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama perkiraan umur instrumen keuangan bukan perubahan jumlah kerugian kredit yang diharapkan.

Untuk membuat penilaian tersebut, perusahaan membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal dan mempertimbangkan informasi yang wajar dan dapat didukung yaitu tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya yang merupakan indikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal.

Kerugian kredit diukur sebagai nilai sekarang dari semua kekurangan kas (yaitu perbedaan antara arus kas yang jatuh tempo pada entitas sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Grup). ("Expected Credit Loss - ECL") didiskontokan dengan suku bunga efektif dari aset keuangan.

Cadangan kerugian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dikurangkan dari jumlah tercatat bruto aset tersebut.

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit yang diharapkan ("Expected Credit Loss - ECL") tersebut untuk piutang usaha dan piutang lain-lain.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, penurunan nilai wajar efek yang signifikan dan berkepanjangan di bawah harga perolehan dapat dianggap sebagai indikator bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

h. Financial Assets (continued)

Derecognition of Financial Assets

The Company assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment the company uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses.

To make that assessment, the company compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and considers reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

Credit losses are measured as the present value of all cash shortfalls (i.e. the difference between the cash flows due to the entity in accordance with the contract and the cash flows that the Group expects to receive). Expected credit loss ("ECL") are discounted at the effective interest rate of the financial asset.

Loss allowances for financial assets measured at amortized cost are deducted from the gross carrying amount of the assets.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit loss ("ECL") for trade receivables and other receivables.

For investments in equity instruments classified as available-for-sale, a significant and prolonged decline in the fair value of the security below its cost is an indicator that the asset is impaired.

Derecognition of Financial Assets

The Group derecognises a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan

untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2024 and

for The Year then Ended

(With Comparative as of December 31, 2023 and

for The Year then Ended)

(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

h. Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan (lanjutan)

Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar.

Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

Penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Grup masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer). Grup mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer.

Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

h. Financial Assets (continued)

Derecognition of Financial Assets (continued)

If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Group recognises its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay.

If the Group retain substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Group continues to recognise the financial asset and also recognises a collateralised borrowing for the proceeds received

On derecognition of financial asset in its entirety, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss.

Derecognition of a financial asset for only one part (eg when the Group retains the right to repurchase part of the transferred asset). The Group allocates the previous carrying amount of these financial assets to the part that continues to be recognized on the basis of continuing involvement and the part that is no longer recognized based on the relative fair values of the two parts at the date of transfer.

The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the amount of payments received to the part that is no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to the part that is no longer recognized that was previously recognized in other comprehensive income is recognized in profit and loss. The cumulative gains and losses previously recognized in other comprehensive income are allocated between the part that continues to be recognized and the part that is derecognized based on the relative fair values of the two parts.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

i. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:

- liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dan
- liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup hanya memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang terdiri dari pinjaman jangka pendek, utang usaha, beban akrual, bagian lancar liabilitas jangka panjang, liabilitas kontrak, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya, utang non usaha jangka panjang dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Setelah pengakuan awal sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, Grup mencatat liabilitas keuangan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, jika dampak diskontonya signifikan. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika dibayar.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang membuktikan hak residual atas aset Grup setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil yang diterima setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

i. Financial Liabilities and Equity Instruments

The group classifies its financial liabilities in the following measurement categories:

- those to be measured subsequently at fair value through profit or loss, and
- those to be measured at amortised cost.

As at 31 December 2023 and 2022, the Group only has financial liabilities measured at amortised cost, which comprise of short-term loans, trade payables, accrued expenses, current portion of long-term liabilities, contract liabilities, other short-term financial liabilities, long-term non-trade payables and long-term liabilities. Financial liabilities are classified as non-current liabilities when the remaining maturity is more than 12 months, and as current liabilities when the remaining maturity is less than 12 months.

After initial recognition, which is at fair value plus transaction costs, the Group measures all financial liabilities at amortised cost using effective interest rate method, if the impact of discounting is significant. Financial liabilities are derecognised when extinguished.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial liability or (where appropriate) a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Equity instruments

An equity instruments is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Group after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan

untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2024 and

for The Year then Ended

(With Comparative as of December 31, 2023 and

for The Year then Ended)

(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

i. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas
(lanjutan)

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

j. Saling Hapus dari Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan (neraca) konsolidasian jika dan hanya jika saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan.

k. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai Setara Kas antara lain:

- 1) deposito berjangka yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya (termasuk *deposit on call*); dan
- 2) instrumen pasar uang yang diperoleh dan dapat dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

l. Kas dan Setaran Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas dan setara kas yang ditempatkan sebagai bank garansi, jaminan pelaksanaan dan lainnya untuk tujuan tertentu disajikan sebagai "kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya" dan dikelompokkan pada aset keuangan lancar lainnya jika jatuh tempo kurang dari 1 tahun.

m. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

i. Financial Liabilities and Equity Instruments
(continued)

Derecognition of financial liabilities

The Group derecognizes financial liabilities if and only if, their obligations are discharged cancelled or expired The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

j. Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statement of financial position (balance sheets) if and only if currently, has the legal entitlement to indemnify the recognized amount and there is an intention to settle the net or to realize assets and settle their obligations simultaneously.

k. Cash and Cash Equivalent

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, bank and instruments that can be classified as cash equivalents include:

- 1) time deposits with original maturities of three months or less from the date of placement and is unrestricted and not warranted (including deposits on call); and
- 2) market instruments and can be liquid within a period of not more than three (3) months.

l. Restricted cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents which are placed as bank guarantees, performance bond and others for a particular purpose are classified as "restricted cash and cash equivalents" and are classified into other current financial assets if maturity is less than 1 year .

m. Inventories

Inventories are stated at cost or net realizable value whichever is lower.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

m. Persediaan (lanjutan)

Biaya perolehan ditentukan dengan metode *First In First Out*. Nilai realisasi bersih merupakan taksiran harga jual persediaan dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dibentuk untuk menyesuaikan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih pada tahun berjalan.

Penyisihan atas persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Persediaan rusak atau persediaan yang alat induknya sudah tidak ada atau secara ekonomis tidak dapat digunakan, dipisahkan penyajiannya ke dalam kelompok "aset tidak lancar lainnya".

n. Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka

Biaya dibayar dimuka merupakan biaya yang telah dibayar untuk masa manfaat dua belas bulan atau lebih. Biaya dibayar dimuka diamortisasi sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya menggunakan metode garis lurus.

Pada akhir periode pelaporan biaya dibayar dimuka disajikan sebesar nilai barang/jasa/manfaat atau setaranya yang belum diakui pada periode berjalan. Biaya dibayar dimuka jangka panjang disajikan sebagai "Aset Tidak Lancar Lainnya" dalam Laporan Posisi Keuangan.

Uang muka merupakan sejumlah kas keluar atau biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk suatu kegiatan atau suatu hal yang nantinya akan mendapat pertanggungjawaban dalam waktu tertentu dan telah ditetapkan.

o. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah semua entitas dimana Grup memiliki pengaruh signifikan namun tidak mengendalikan, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas.

Berdasarkan metode ekuitas, investasi pada awalnya diakui sejumlah nilai perolehan dan nilai tercatat akan meningkat atau menurun untuk mengakui bagian laba atau rugi investor dari laba atau rugi entitas asosiasi setelah tanggal akuisisi.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

m. Inventories (continued)

Cost is determined using *First In First Out* method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less all estimated costs of completion and costs necessary to make the sale.

Allowance for decline in value of the inventories are provided to reduce the carrying value of inventories to their net realizable values in the current period.

The allowance for the obsolete inventories is determined using the periodic review on the condition of the inventory on the statements of financial position date.

Damaged inventories or inventories whose main equipment is no longer available or economically unusable, are presented separately into "other non-current assets" group.

n. Prepaid Expenses and Advance Payment

Prepaid expenses are expenses that have been paid for a useful life of twelve months or more. Prepaid expenses are amortized over the period of benefit of each expense using the straight-line method.

At the end of the reporting period prepaid expenses are stated at the value of the goods / services / benefits or equivalent which has not been recognized in the current period. Long-term prepaid expenses are presented as "Other Current Assets" in the Statement of Financial Position.

Advances are a number of cash out or costs incurred by the company for an activity or something that will have the responsibility in a certain time and have been assigned.

o. Investments in Associates

Associates are all entities over which the Group has significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights.

Under the equity method, an investment is initially recognized at cost and the carrying amount is increased or decreased to recognize the investor's share of profit or loss from the profit or loss of the associate after the acquisition date.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

o. Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

Jika kepemilikan kepentingan pada entitas asosiasi berkurang, namun tetap memiliki pengaruh signifikan, hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada penghasilan komprehensif lainnya yang direklasifikasi ke laporan laba rugi konsolidasian.

Bagian Grup atas laba atau rugi entitas asosiasi pasca akuisisi diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian dan bagian atas mutasi penghasilan komprehensif lainnya pasca akuisisi diakui di dalam penghasilan komprehensif lainnya dengan melakukan penyesuaian atas jumlah tercatat investasi.

Jika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tanpa agunan, Grup menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali jika Grup memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai atas investasi pada entitas asosiasi. Jika demikian, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada entitas asosiasi dan mengakui selisih tersebut pada "bagian atas hasil bersih entitas asosiasi" dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Perseroan menghentikan penggunaan metode ekuitas dari tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau ketika investasi diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. Ketika Perseroan mempertahankan kepentingan dalam entitas asosiasi terdahulu dan sisa kepentingan adalah aset keuangan. Perseroan mengukur setiap sisa kepentingan pada nilai wajar pada tanggal tersebut dan nilai wajar dianggap sebagai nilai wajarnya pada saat pengakuan awal sesuai dengan PSAK 109.

Selisih antara jumlah tercatat entitas asosiasi pada tanggal metode ekuitas dihentikan penggunaannya, dan nilai wajar setiap investasi yang tersisa dan setiap hasil dari pelepasan bagian kepentingan dalam entitas asosiasi termasuk dalam penentuan keuntungan atau kerugian pelepasan dari entitas asosiasi.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

o. Investments in Associates (continued)

If the ownership interest in an associate is reduced but significant influence is retained, only a proportionate share of the amount previously recognised in other comprehensive income is reclassified to the consolidated profit or loss where appropriate.

The Group's share of post-acquisition profits or losses is recognised in the consolidated profit or loss and its share of post-acquisition movements in other comprehensive income is recognised in other comprehensive income with a corresponding adjustment to the carrying amount of the investment.

When the Group's share of losses in associate equals to or exceeds its interest in the associate, including any other unsecured receivables, the Group does not recognise further losses, unless it has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.

The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the investment in associate and its carrying value and recognises the amount to "share of results of associates" in the consolidated profit or loss.

Company has been discontinued of equity method using from date when investment stopped to be associate entities investment or when investment is classified as held for sale. When Company maintain of interest in associate entities previously and remaining interest is financial asset. Company measured of interest remaining at fair value in the date and it's considered as it's fair value upon initial recognition in accordance with PSAK 109.

Difference between of carrying amount of associate entities on the date of equity method was discontinued, and fair value of any retained interest and any proceeds from disposing of a part interest in associate entities is included in the determination of gain or loss or loss of associate entities release.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan

untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2024 and

for The Year then Ended

(With Comparative as of December 31, 2023 and

for The Year then Ended)

(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

o. Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

Selanjutnya, Perseroan mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi tersebut dengan menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika entitas asosiasi telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas yang terkait. Oleh karena itu, jika keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain oleh entitas asosiasi akan direklasifikasi ke laba rugi pada saat pelepasan dari aset atau liabilitas terkait. Perseroan mereklasifikasi laba rugi dari ekuitas ke laba rugi (sebagai penyesuaian reklasifikasi) entitas asosiasi ketika metode ekuitas dihentikan penggunaannya.

p. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya.

Biaya-biaya setelah perolehan awal diakui dalam jumlah tercatat properti investasi jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan properti investasi tersebut akan mengalir ke perusahaan dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, dan tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari properti investasi.

Properti investasi awalnya diukur sebesar biaya perolehan yang meliputi harga pembelian dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung. Selanjutnya setelah penilaian awal, properti investasi dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Properti investasi mencakup juga properti dalam proses pembangunan dan akan digunakan sebagai properti investasi setelah selesai.

Akumulasi biaya perolehan dan biaya pembangunan (termasuk biaya pinjaman yang terjadi) diamortisasi pada saat selesai dan siap untuk digunakan.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepas atau tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya.

**4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

o. Investments in Associates (continued)

Continue, the Company recorded all amounts previously that recognized in other comprehensive income related to associate entities on same basis as required if associate entities had directly released of related assets and liabilities. Therefore, if gain or loss previously that recognized in other comprehensive income by an associate entities it's will be reclassified to profit or loss upon disposal of it's related to asset or liability. Company had reclassified of profit or loss from equity to profit or loss (as an adjustment to reclassification) of association entity when the equity method is terminated.

p. Investment Properties

Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held to earn rentals or for capital appreciation or both.

Costs after the initial acquisition is recognized in the carrying amount of investment property if and only if it is probable that future economic benefits in respect of the investment property will flow to the company and the cost of the item can be measured reliably, and does not include the cost of the maintenance of investment property.

Investment property is initially measured at cost which includes the purchase price and costs directly attributable. Furthermore, after the initial measurement, property investments valued using fair value. Gains or losses arising from changes in fair value recognized in profit or loss as incurred.

Investment property includes properties in the process of development and will be used as investment property after completion.

Accumulated acquisition and development costs (including borrowing costs incurred) are amortized when completed and ready for use.

Investment properties are derecognised upon disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan

untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2024 and

for The Year then Ended

(With Comparative as of December 31, 2023 and

for The Year then Ended)

(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

p. Properti Investasi (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan properti investasi (ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset) diakui dalam laba rugi konsolidasian pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

Pengalihan ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau selesainya pembangunan atau pengembangan. Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

q. Aset Tetap

Aset tetap, kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan (*acquisition cost*) setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Namun, tidak termasuk biaya perbaikan dan perawatan sehari-hari.

Perusahaan masih memilih menggunakan model biaya (*cost model*) dalam melakukan pengukuran untuk seluruh aset tetapnya setelah pengakuan awal aset tetap yang bersangkutan.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah dan biaya ini tidak disusutkan. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atas tanah.

Suku cadang utama dan peralatan siap pakai diklasifikasikan sebagai aset tetap bila diperkirakan akan digunakan dalam operasi selama lebih dari satu tahun.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

p. Investment Properties (continued)

Any gain or loss arising on derecognition of the property (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the consolidated profit or loss in the period in which the property is derecognised or disposed of.

Transfers to investment properties should be made when, and only when, there is a change in use, evidenced by the end of owner occupation, commencement of an operating lease to another party or end of construction or development. Transfers from investment properties should be made when, and only when, there is a change in use, evidenced by the commencement of owner occupation or commencement of development with a view to sell.

q. Fixed Assets

Fixed assets, except land are stated at the acquisition cost, after deducting accumulated depreciation and accumulated impairment losses if any. However, it does not include daily repairs and maintenance costs.

The Company still chooses to use the cost model in measuring all of its fixed assets after the initial recognition of the fixed assets concerned.

The initial cost of property and equipment consists of its purchase price, including import duties and taxes and any directly attributable costs in bringing the property and equipment to its working condition and location for its intended use.

Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognized as part of the acquisition cost of the land and these costs are not depreciated. Costs related to renewal of land rights are recognized as intangible assets and amortized during the period of the land rights.

Major spare parts and stand by equipment are classified as fixed assets when they are expected to be used in operations during more than one year.

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

q. Aset Tetap (lanjutan)

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan seperti beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (*derecognized*) pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Aset tetap yang dijual atau dilepaskan dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan dan amortisasi serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut.

Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut dan diakui dalam laporan rugi komprehensif konsolidasian pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Penyusutan (selain tanah) dimulai pada tanggal aset tersebut digunakan atau siap untuk digunakan, penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Metode/ Method	Tarif/ Rates	Umur Ekonomis/ Economic Life	Nilai Residu/ Residual Value	Type of Assets
<u>Alat Produksi</u>					<u>Production Equipments</u>
<u>Armada Niaga</u>					<u>Commercial Fleet</u>
- Kapal Penumpang	Garis Lurus/ Straight Line	3,33%	30 Tahun / Year	5,00%	Passenger Ship -
- Kapal Roro	Garis Lurus/ Straight Line	4,00%	25 Tahun / Year	5,00%	RoRo Ship -
- Kapal Barang	Garis Lurus/ Straight Line	5,00%	20 Tahun / Year	5,00%	Cargo Ship -
- Tug Boat dan Tongkang	Garis Lurus/ Straight Line	6,66%	15 Tahun / Year	2%	Tug Boats and Barges -
- Suku Cadang dan Perlengkapan Kapal	Garis Lurus/ Straight Line	33,30%	3 Tahun / Year		Parts -

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

q. Fixed Assets (continued)

Expenses incurred after fixed assets are used, such as repairs and maintenance expenses are charged to profit or loss when incurred. If these expenses lead to an increase in future economic benefits from the use of these fixed assets that can exceed their normal performance, then these expenses are capitalized in addition to the acquisition cost of fixed assets.

The carrying amount of fixed asset is derecognized at the time of disposal or no future economic benefit is expected from its use or disposal.

Fixed asset sold or disposed of are removed from the accounts with the accumulated depreciation and amortization and accumulated impairment losses associated with fixed asset.

Gains or losses arising from the termination of recognition of fixed assets are determined at the difference between the net amount of disposal proceeds if any and the carrying amount of fixed assets and recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in the year of the cessation of the recognition.

Depreciation (except for land) is applied from the date the assets are put into service or when the assets are ready for service, depreciation is recognized so as to write off the cost of assets less residual values based on the estimated useful lives of the assets as follows:

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

q. Aset Tetap (lanjutan)

q. Fixed Assets (continued)

Jenis Aset Tetap	Metode/ Method	Tarif/ Rates	Umur Ekonomis/ Economic	Nilai Residu/ Residual Value	Type of Assets
Container - Refeer Container/Container	Garis Lurus/ Straight Line	6,66%	15 Tahun / Year		Container Refeer - Container/Container
Alat Produksi Perhotelan - Bangunan Hotel	Garis Lurus/ Straight Line	2,50%	40 Tahun / Year		Hotel Production Tools Hotel Building -
- Fasilitas Penunjang Hotel	Garis Lurus/ Straight Line	6,66%	15 Tahun / Year		Hotel supporting facilities -
- Kolam Renang	Garis Lurus/ Straight Line	14,28%	7 Tahun / Year		Swimming Pool -
- Fasilitas Penunjang Hotel Lainnya	Garis Lurus/ Straight Line	20,00%	5 Tahun / Year		Other Hotel supporting facilities -
- Perlengkapan Hotel	Garis Lurus/ Straight Line	20,00%	5 Tahun / Year		Hotel Equipment -
- Perlengkapan Dapur	Garis Lurus/ Straight Line	20,00%	5 Tahun / Year		Kitchen Equipment -
Alat Produksi Galangan Kapal - Perlengkapan Galangan Kapal	Garis Lurus/ Straight Line	10%	10 Tahun / Year		Shipyard Production Equipment Shipyard Equipment -
- Peralatan Penunjang Galangan Kapal	Garis Lurus/ Straight Line	10%	10 Tahun / Year		Shipyard Support Equipment -
- Alat Angkut	Garis Lurus/ Straight Line	20,00%	5 Tahun / Year		Conveyance -
Aset Tetap - Bangunan	Garis Lurus/ Straight Line	2,50%	40 Tahun / Year		Fixed Assets Building -
- Kendaraan Bermotor	Garis Lurus/ Straight Line	20,00%	5 Tahun / Year		Vehicle -
- Peralatan Elektronik	Garis Lurus/ Straight Line	20,00%	5 Tahun / Year		Electronic Equipment -
- Peralatan Komunikasi	Garis Lurus/ Straight Line	20,00%	5 Tahun / Year		Communication Equipment -
- Perabotan Kantor/Rumah Tangga	Garis Lurus/ Straight Line	20,00%	5 Tahun / Year		Office/Household Furniture -
Aset Takberwujud - Piranti Lunak	Garis Lurus/ Straight Line	20,00%	5 Tahun		Intangible Assets Software -
- Sertifikat	Garis Lurus/ Straight Line		Sesuai Masa Berlaku Sertifikat/ Certificate Validity Period		Certificate -

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan

untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2024 and

for The Year then Ended

(With Comparative as of December 31, 2023 and

for The Year then Ended)

(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

q. Aset Tetap (lanjutan)

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Nilai residu, umur manfaat serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat didistribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian adalah biaya pinjaman yang dapat dihindari jika pengeluaran atas aset kualifikasian tidak dilakukan.

Pinjaman dana secara spesifik telah ditentukan penggunaannya, jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode dikurangi penghasilan investasi atas investasi sementara dari pinjaman tersebut.

Pinjaman dana secara umum lalu menggunakannya untuk memperoleh suatu aset kualifikasian dengan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi dengan menerapkan suatu tarif kapitalisasi terhadap pengeluaran atas aset tersebut.

Tarif kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman atas saldo pinjaman selama periode di luar pinjaman spesifik untuk memperoleh aset kualifikasian. Jumlah biaya pinjaman dikapitalisasi selama suatu periode tidak boleh melebihi jumlah biaya pinjaman yang terjadi pada periode tersebut.

Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat aktivitas yang berkaitan dengan perolehan dan pengembangan proyek telah selesai atau pada saat konstruksi selesai dan aset tersebut siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

Biaya bunga dan biaya pinjaman lain, seperti biaya diskonto atas pinjaman baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai konstruksi aset tertentu yang memenuhi syarat dikapitalisasi sampai konstruksi tersebut selesai.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

q. Fixed Assets (continued)

The carrying values of property and equipment are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable.

The asset's residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate at each financial year end.

Borrowing Costs

Borrowing costs that can be distributed directly with the acquisition, construction or manufacture of qualifying assets are borrowing costs that can be avoided if the expenditure on qualifying assets is not carried out.

Specific use of the loan has been determined. the amount of borrowing costs that can be capitalized is equal to the actual borrowing costs incurred during the period less investment income on the temporary investment of the loan.

Fund loans generally use it to obtain a qualifying asset the amount of borrowing costs that can be capitalized by applying a capitalization rate to the expenditure on the asset.

Rate capitalization is the weighted average borrowing cost for the loan balance during the period outside the specific loan to obtain the qualifying asset. The amount of borrowing costs capitalized during a period should not exceed the amount of borrowing costs incurred during that period.

Capitalization of borrowing costs discontinued when activities associated with the acquisition and development projects have been completed or when construction is completed and the asset is ready for its use.

Interest expense and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used to finance construction of certain assets are eligible are capitalized until construction is completed.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

q. Aset Tetap (lanjutan)

Aset Dalam Konstruksi

Aset dalam konstruksi merupakan aset tetap dalam tahap konstruksi dinyatakan sebesar biaya perolehan berdasarkan persentase fisik pekerjaan yang telah diselesaikan pada akhir tahun sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan.

Aset dalam konstruksi disajikan sebagai bagian dari aset tetap yang dinyatakan berdasarkan biaya perolehan yaitu harga perolehan biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap dan biaya pinjaman yang digunakan untuk membiayai aset selama masa

Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat konstruksi selesai secara substansial dan aset tersebut telah digunakan sesuai tujuannya yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pertama.

Aset Tetap Usul Hapus

Aset tetap yang tidak memberikan manfaat dalam aktivitas produksi / usahanya atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan / pelepasannya dikategorikan sebagai aset tetap usul hapus dan disajikan pada kelompok aset tidak lancar lainnya.

Aset tetap pada kategori tersebut dilakukan penurunan nilai sebesar nilai tercatatnya pada saat tidak lagi memberikan manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Akumulasi penurunan nilai aset tetap usul hapus dibentuk sebagai penerapan atas akuntansi penurunan nilai.

Penghapusbukuan dan pemindahtanganan aset tetap mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/2010, tentang Tata cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara dan SK Direksi No.04.09/02/SK/HKO.01/2021, tentang *Standard Operational Prosedure* (SOP) Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset Tetap PT Peln (Persero).

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

q. Fixed Assets (continued)

Construction in Progress

Construction in progress (CIP) are fixed assets in the construction phase. which are stated at cost based on the physical percentage of work completed at the end of the year in accordance with the Minutes of Physical Progress of Work.

CIP are presented as part of fixed assets. which are stated based on acquisition costs costs directly attributable costs. initial estimates of the costs of dismantling and moving fixed assets and restoring the location of fixed assets and borrowing costs used to finance assets during the period development.

The accumulated costs will be transferred to the respective fixed assets when the construction is substantially completed and the assets are ready for its intended use. as evidenced by the Minutes of First Taking Over.

Fixed Assets Write-off

Fixed assets that do not provide benefits in production activity / her business or no future economic benefits are expected from the use / disposal are categorized as write-off fixed assets and are presented in the other non-current assets group. .

Fixed assets in that category of impaired its carrying value at the time no longer provide future economic benefits are expected from its use. Accumulated impairment of write-off fixed assets created as the application of the accounting impairment.

The write off and the alienation of property and equipment following the regulation stated by the Minister of State Owned Enterprises No. PER-02/MBU/2010, regarding Procedure for Written off and Transfer of Fixed Assets of State Owned Company and Decree of the Board of Directors No. 04.09/02/SK/HKO.01/2021, concerning Standard Operational Procedures (SOP) for Write-offs and Transfers of PT Peln (Persero) Fixed Assets.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

q. Aset Tetap (lanjutan)

Aset Tetap Usul Hapus (lanjutan)

Aset tetap usup hapus dihentikan pengakuannya bilamana telah mendapat persetujuan penghapusan dari Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham. Keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari hasil penjualan aset tetap usul hapus diakui pada kelompok pendapatan (beban) non usaha.

r. Aset Takberwujud

Beban perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud. Beban tersebut diamortisasi selama mana yang lebih pendek antara umur legal atau umur ekonomi tanah. Jika beban pengurusan perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah tidak material, maka dibebankan pada periode berjalan.

Aset takberwujud dicatat pada biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Aset takberwujud diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya. Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset takberwujud.

Umur manfaat aset takberwujud dinilai sebagai terbatas atau tidak terbatas. Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi sesuai umur manfaat ekonomis dan diuji untuk penurunan nilai jika terdapat indikasi bahwa aset takberwujud mengalami penurunan nilai. Periode dan metode amortisasi aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah sekurang-kurangnya pada setiap akhir periode pelaporan.

Perubahan pada perkiraan umur manfaat atau pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut dijadikan pertimbangan dalam mengubah periode atau metode amortisasi dan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Beban amortisasi aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas dicatat sebagai beban pada laba rugi sesuai dengan fungsi aset takberwujud tersebut.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

q. Fixed Assets (continued)

Fixed Assets Write-off (continued)

Write-off fixed assets are derecognised when the the elimination has received approval from the Board of Commissioners and or Shareholders. Gain or loss realized from the sale of fixed assets proposed to be written off it was recognized in the group of other income (expenses).

r. Intangible Assets

Cost incurred for extension or renewal of land rights are recognized as intangible assets. Amortized over the period whichever is shorter between the legal life or economic life of the land. If the cost incurred are not material, then charged in the current period.

Intangible assets are recorded at acquisition cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses. Intangible assets are amortized over their useful lives. The Group estimates the recoverable value of its intangible assets.

The useful lives of intangible assets are assessed as either finite or indefinite. Intangible assets with finite lives are amortised over the useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation period and the amortisation method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at the end of each reporting period.

Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset are considered to modify the amortisation period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortisation expense on intangible assets with finite lives is recognised in the profit or loss as the expense category that is consistent with the function of the intangible assets.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan

untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2024 and

for The Year then Ended

(With Comparative as of December 31, 2023 and

for The Year then Ended)

(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

r. Aset Takberwujud (lanjutan)

Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi tetapi diuji setiap tahun untuk penurunan nilai secara individual atau pada tingkat unit penghasil kas. Apabila nilai tercatat aset takberwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali. Umur manfaat aset takberwujud yang tidak diamortisasi ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah peristiwa dan kondisi dapat terus mendukung penilaian bahwa umur manfaat tetap tidak terbatas. Jika tidak, maka perubahan umur manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas diterapkan secara prospektif.

Perangkat lunak diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset takberwujud selama 5 (lima) tahun.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya ketika aset tersebut dilepaskan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tersebut. Selisih dalam laporan antara nilai tercatat aset dengan hasil neto yang diterima dari pelepasannya diakui dalam laporan laba rugi.

Biaya-biaya yang tidak mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode tidak dapat ditangguhkan termasuk kerugian yang timbul dari kegiatan awal operasi dan biaya pra operasi / perintisan usaha.

s. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut.

Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam rangka mengukur penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

r. Intangible Assets (continued)

Intangible assets with indefinite useful lives are not amortised but are tested for impairment annually either individually or at the cashgenerating unit level. When the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount, the asset is written down to its estimated recoverable amount. The useful life of an intangible asset that is not being amortised shall be reviewed each period to determine whether events and circumstances continue to support an indefinite useful life assessment for that asset. If not, the change in useful life from indefinite to finite is made on a prospective basis.

Software is amortized using the straight line method, based on the estimated useful lives of the assets of 5 (five) year.

Intangible assets are derecognized when no further economic benefits are expected, either from further use or from disposal. The difference between the carrying amount and the net proceeds received from disposal is recognized in the statement of profit or loss.

The costs that do not have a useful life of more than one period can not be suspended including losses arising from the initial operation and cost of pre operative / pioneering effort.

s. Impairment of Non financial Assets

At the end of each reporting period, the Group reviews the carrying amounts of non-financial assets to determine whether there is any indication that the assets have suffered an impairment loss. An impairment loss is recognised for the amount by which the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount.

Recoverable amount is the higher of its fair value less cost to sell and the value in use of the assets. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan

untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2024 and

for The Year then Ended

(With Comparative as of December 31, 2023 and

for The Year then Ended)

(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

s. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan (lanjutan)

Setiap tanggal pelaporan, aset non-keuangan yang telah mengalami penurunan nilai ditelaah untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai. Pemulihan nilai langsung diakui dalam laba rugi konsolidasian, tetapi tidak boleh melebihi akumulasi rugi penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya.

Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk aset selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang disajikan pada jumlah revaluasi sesuai dengan PSAK lain.

Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan disusutkan sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dapat dibalik kembali.

t. Liabilitas Kontrak

Liabilitas kontrak merupakan kewajiban perusahaan untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan di mana perusahaan telah menerima imbalan (atau jumlah yang jatuh tempo) dari pelanggan sebelum kewajiban pelaksanaan direalisasikan.

u. Transaksi Sewa

Pada tanggal awal dimulainya suatu kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak mengandung sewa apabila kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, Grup mempertimbangkan apakah:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi; dan

**4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)**

s. Impairment of Non financial Assets (continued)

At each reporting date, non-financial assets that suffered impairment are reviewed for possible recoverable of the impairment. Recoverable amount is immediately recognised in the consolidated profit or loss, but not in excess of any accumulated impairment loss previously recognised.

An impairment loss, for assets other than goodwill, is recognized if, and only if, there has been a change in the estimate used in determining the asset's recoverable amount since the last impairment test. The reversal of the impairment loss is recognized immediately in profit or loss, except for assets which are presented at revalued amounts in accordance with other PSAK.

The reversal should not result in the carrying amount of an asset exceeding what the depreciated cost would have been had the impairment not been recognised at the date on which the impairment was reversed. Impairment losses relating to goodwill are

t. Contract Liabilities

Contract liabilities are obligations of the company to transfer goods or services to customers where the company has received consideration (or the amount due) from the customer before the performance obligation is realized.

u. Lease Transactions

On the initial date of a contract, the Group assesses whether the contract is or contains a lease. A contract contains a lease if the contract transfers the right to control the use of an identified asset for a period of time to be exchanged for compensation.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group considers whether:

- *The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan

untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2024 and

for The Year then Ended

(With Comparative as of December 31, 2023 and

for The Year then Ended)

(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

u. Transaksi Sewa (lanjutan)

- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang penentuan bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
 - a. Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
 - b. Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Aset yang diperoleh melalui sewa diakui sebagai aset hak guna dan liabilitas sewa. Pada tanggal permulaan, lessee mengukur aset hak guna pada biaya perolehan yang meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi dengan insentif yang diterima, biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh lessee, dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh lessee dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar serta biaya restorasi.

Aset hak guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang didasarkan pada indeks atau tingkat, pada awalnya diukur menggunakan indeks atau tingkat pada tanggal mulai;

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

u. Lease Transactions (continued)

- The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing the determination of how and for what purpose the asset is used and:

- a. The Group has the right to operate the asset; or
- b. The Group has designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose it will be used.

Assets obtained through lease are recognised as right of use of asset and lease liabilities. On the initial date, lessee measures right of use of asset at cost which include the initial measurement of lease liabilities, lease payments made on or before the commencement dates less the incentives received, the initial direct costs incurred by the lessee, and estimated cost to be incurred by the lessee in dismantling and moving the underlying assets and restoration costs.

The right of use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right of use asset or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprises the following:

- fixed payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives receivable;
- variable lease payment that are based on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

u. Transaksi Sewa (lanjutan)

- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai residu;
- harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk menggunakan opsi tersebut, dan
- pembayaran penalti untuk penghentian sewa, jika masa sewa mencerminkan penyewa yang melaksanakan opsi penghentian tersebut.

Setelah awal masa sewa, setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa.

Utang sewa yang terkait, dikurangi dengan beban keuangan, dimasukkan ke dalam "liabilitas sewa". Elemen bunga dari beban keuangan dibebankan pada laba rugi.

Aset hak-guna disajikan sebagai bagian dari Aset Tetap, sedangkan liabilitas sewa disajikan sebagai liabilitas jangka panjang kecuali untuk bagian yang jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang yang disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Grup tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa satu tahun atau kurang dan sewa dengan aset bernilai rendah.

Grup telah memilih untuk tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang, dan sewa yang aset dasarnya bernilai rendah. Grup mengakui pembayaran terkait dengan sewa ini sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

v. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek merupakan imbalan kerja yang dibayarkan dalam waktu kurang dari satu tahun, meliputi antara lain gaji, upah dan iuran jaminan sosial. Kewajiban pembayaran imbalan ini diakui sebesar jumlah tidak terdiskonto dan dibebankan pada laporan rugi komprehensif konsolidasi tahun berjalan serta dicatat sebagai beban yang masih harus dibayar/beban akrual.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

u. Lease Transactions (continued)

- amounts expected to be payable by the lessee under residual value guarantees,
- the exercise price of a purchase option if the lessee is reasonably certain to exercise that option; and
- payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the lessee exercising that termination option.

After the commencement date, each lease payment is allocated between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate on the finance balance outstanding.

The corresponding rental obligations, net of finance charges, are included in "lease liabilities". The interest element of the finance cost is charged to profit or loss.

Right of use of asset is presented as Fixed Asset, whereas lease liabilities are presented as long-term liabilities except for the parts that are due in 12 months or less that are presented as short-term liabilities. The Group does not recognise the right of use of asset and lease liabilities for short-term leases that have lease period of one year or less and leases with low-value assets.

The Group has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less, and leases with low value asset. The Group recognises the payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

v. Employment Benefits

Short Term Employee Benefits

Short term employee benefits are employee benefits payable in less than one year, including the following salaries, wages and social security contributions. The obligation to pay these benefits are recognized at its undiscounted amount and as an expense in the consolidated statement of comprehensive income for the year and recorded as accrued expenses.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan

untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2024 and

for The Year then Ended

(With Comparative as of December 31, 2023 and

for The Year then Ended)

(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

v. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan Kerja Jangka Panjang

Kewajiban Pensiun

Program Iuran Pasti

Program pensiun iuran pasti adalah sebuah program pensiun dimana Grup akan membayar iuran tetap kepada sebuah entitas yang terpisah (dana pensiun) dan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar kontribusi lebih lanjut apabila dana pensiun tersebut tidak memiliki aset yang memadai untuk membayar seluruh imbalan karyawan yang berhubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh karyawan pada tahun kini dan sebelumnya.

Perusahaan menerapkan kebijakan pembentukan cadangan beban kesejahteraan pegawai pada tahun buku 2023 melalui Surat Keputusan Direksi No. 01.02/01/SK/HKO.01/2023, tanggal 2 Januari 2023 sebagai bentuk tanggung jawab Perusahaan terkait kesejahteraan pegawai purna bakti dengan menjaga kecukupan dana pada Dana Pensiun Pelni, yang dilakukan secara akrual setiap bulannya. Pembentukan cadangan beban kesejahteraan pegawai PT PELNI (Persero) dengan menyesuaikan kinerja dan kemampuan Perusahaan. (Lihat Catatan 5)

Program Imbalan Pasti

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya berdasarkan pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja atau kompensasi.

Kewajiban program pensiun imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga obligasi korporat berkualitas tinggi dalam denominasi mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun. Apabila tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporat tersebut, digunakan bunga obligasi pemerintah.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

v. Employment Benefits (continued)

Long Term Employment Benefits

Pension obligations

Defined Contribution Plan

A defined pension contribution plan is a pension plan under which the Group pays fixed contributions into a separate entity (a pension fund) and will have no legal or constructive obligations to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee service in the current and prior years.

The Company implemented a policy of establishing employee welfare expense reserves in fiscal year 2023 through Board of Directors Decree No. 01.02/01/SK/HKO.01/2023, dated January 2, 2023 as a form of the Company's responsibility regarding the welfare of retired employees by maintaining sufficient funds in the Pelni Pension Fund, which is carried out on a monthly accrual basis. Establishment of PT PELNI (Persero) employee welfare expense reserves by adjusting the Company's performance and capabilities. (See Note 5)

Defined Benefits Plan

A defined pension benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit to be provided, usually as a function of one or more factors, such as age, years of service or compensation.

The liability recognised in the consolidated statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the consolidated statement of financial position date, less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected-unit-credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the interest rates of high-quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms of maturity approximating the terms of the related pension obligations. When there is no deep market for such bonds, the market rates of government bonds are used.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan

untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2024 and

for The Year then Ended

(With Comparative as of December 31, 2023 and

for The Year then Ended)

(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

v. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan Kerja Jangka Panjang (lanjutan)

Program Imbalan Pasti (lanjutan)

Biaya jasa kini dari program pensiun imbalan pasti diakui pada beban imbalan kerja dalam laporan laba rugi konsolidasian yang mencerminkan peningkatan kewajiban imbalan pasti yang dihasilkan dari jasa karyawan dalam tahun berjalan.

Pengukuran kembali imbalan pascakerja yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lainnya dan dilaporkan di saldo laba.

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi konsolidasian ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Biaya jasa lalu diakui secara langsung di laporan laba rugi konsolidasian.

Pada tanggal 4 April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Institut Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") menerbitkan siaran pers mengenai 'Mengatribusikan manfaat untuk masa kerja (PSAK 24)' sebagai tanggapan terhadap *International Financial Accounting Standard Interpretation Committee Agenda Decision: International Accounting Standard ("IAS") 19 Employee Benefit - Attributing Benefit to periods of service ("IFRIC")* yang diterbitkan di bulan Mei 2021. DSAK-IAI menilai bahwa skema manfaat pensiun yang diperkenalkan dalam UU Cipta Kerja sepertinya memiliki karakteristik yang serupa dengan pola fakta yang dibahas dalam IFRIC.

Manajemen telah mengkaji dampak siaran pers DSAK-IAI ini dan menyimpulkan bahwa dampak perubahan pola fakta tidak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup pada periode lalu, dan oleh karena itu telah membukukan dampak perubahan tersebut pada laporan laba rugi periode berjalan.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

v. Employment Benefits (continued)

Long Term Employment Benefits (continued)

Defined Benefits Plan (continued)

The current service cost of the defined benefit plan is recognised in the interim consolidated statement of profit or loss in employee benefit expense, which reflects the increase in the defined obligations resulting from employee service in the current year.

Remeasurement of post-employment benefits consists of actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are directly recognised in other comprehensive income and reported in retained earnings.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised in the consolidated statement of profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

Past-service costs are recognised immediately in the consolidated statement of profit or loss.

On 4 April 2022, the Financial Accounting Standards Boards of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") published a press release regarding 'Attributing benefit to periods of service (PSAK 24)' in response to the International Financial Accounting Standard Interpretation Committee Agenda Decision: International Accounting Standard ("IAS") 19 Employee Benefits - Attributing Benefit to periods of service ("IFRIC") published in May 2021. DSAK-IAI assessed that the pension benefit scheme introduced in the Job Creation Law shares similar characteristics with the fact patterns discussed in the IFRIC.

Management has assessed the impact of this DSAK-IAI press release and concluded that the impact of changes in the fact patterns is not significant to the Group's consolidated financial statements in the prior period, and has therefore accounted for the impact on current period profit or loss.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan

untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2024 and

for The Year then Ended

(With Comparative as of December 31, 2023 and

for The Year then Ended)

(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

v. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Grup memberikan program santunan meninggal dan cacat, uang pisah, tunjangan hari tua, dan masa persiapan pensiun untuk karyawan tertentu. Hak atas imbalan ini biasanya berdasarkan pencapaian masa kerja karyawan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama. Estimasi biaya imbalan ini diakui selama masa kerja. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metode yang sama dengan metode yang digunakan untuk program pensiun imbalan pasti, kecuali untuk keuntungan dan kerugian aktuarial yang diakui pada laporan laba rugi konsolidasian.

Kesejahteraan Karyawan

Untuk mensejahterakan karyawannya PT PELNI (Persero) memiliki beberapa program kesejahteraan, antara lain:

Tantiem

Tantiem dicadangkan berdasarkan estimasi manajemen Perseroan dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta dibukukan sebagai beban (*expense*) tahun berjalan.

Jasa Produksi/Bonus

Bonus dicadangkan berdasarkan estimasi manajemen Perseroan dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang saham (RUPS). dibukukan sebagai beban (*expense*) tahun berjalan.

Cuti Besar dan Cuti Tahunan

Perseroan memberikan kesempatan cuti tahunan (selama 12 hari per tahun) dan cuti besar (selama 30 hari) untuk melengkapi pelaksanaan cuti tersebut. Perseroan memberikan tunjangan cuti tahunan.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

v. Employment Benefits (continued)

Other Long Term Benefits

The Group provides died and disabled compensation programs, separating money, old age benefits, and retirement preparation periods of its employees. The entitlements to these benefits are usually based on the completion of a certain number of service years by the employees in accordance with the Collective Labor Agreement. The estimated costs of these benefits are recognised over the year of employment. These benefits are accounted for using the same method as for the defined benefit pension plan, except for actuarial gains and losses which are recognised in the consolidated statement of profit or loss.

Employee Welfare

For the welfare of their employees PT PELNI (Persero) has several welfare programs such as:

Tantiem

Tantiem is reserved by management estimation and authorized through the General Meeting of Shareholders (RUPS) and recorded as expenses in the current year.

Incentives for Employee/Bonus

Incetives for employee/Bonus is reserved by management estimation and authorized through the General Meeting of Shareholders (RUPS) charged to expenses of the current year.

Annual and Long Leave

The Company provides annual leave opportunities (for 12 days per year) and long leave (for 30 days) to complete the execution of such leave the Company provides annual vacation allowance.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

v. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan Kerja Jangka Panjang (lanjutan)

Kesejahteraan Karyawan (lanjutan)

Dana Pindah Rumah

Perseroan menyediakan uang pindah bagi karyawan Perusahaan yang dipindahtugaskan dan memasuki masa bebas tugas (MBT).

Asuransi Jiwa dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Perseroan membiayai program asuransi jiwa bagi karyawan. Perseroan bekerja sama dengan beberapa Perseroan asuransi untuk mendukung program tersebut. Perseroan juga mengikut sertakan karyawannya dalam program jaminan ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan.

w. Provisi

Provisi diakui apabila Grup memiliki kewajiban hukum atau konstruktif masa kini sebagai akibat peristiwa masa lalu; terdapat kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya; dan jumlah kewajiban tersebut dapat diukur secara andal. Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan.

Provisi diukur sebesar nilai kini dari estimasi terbaik manajemen atas pengeluaran yang diharapkan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai kini adalah tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban. Peningkatan provisi karena berlalunya waktu diakui sebagai beban bunga.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

v. Employment Benefits (continued)

Long Term Employment Benefits (continued)

Employee Welfare (continued)

Relocation Allowance

The Company provides moving allowance for the Company's employees who are transferred and entering the free of duty period (MBT).

Life Insurance and Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

The Company entitles its employees in the life insurance program. In supporting this program, the Company has agreement with several insurance companies to provide the insurance products. The Company's employees are also entitled to the social security of employee in BPJS Ketenagakerjaan.

w. Provision

A provision is recognised when the Group has a present legal or constructive obligation as a result of past events; it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; and the amount has been reliably estimated. Provision is not recognised for future operating losses.

Provisions are measured at the present value of management's best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period. The discount rate used to determine the present value is a pretax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the liability. The increase in the provision due to the passage of time is recognised as interest expense.

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

x. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Grup menerapkan PSAK 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

- 1) Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
- 2) Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan adalah janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan.
- 3) Tentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Jika pertimbangan yang dijanjikan dalam kontrak mencakup jumlah variabel. Perusahaan memperkirakan jumlah imbalan yang diharapkan berhak sebagai imbalan atas pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurangi perkiraan jumlah jaminan tingkat layanan yang akan dibayarkan selama masa kontrak.
- 4) Alokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diamati secara langsung harga jual berdiri sendiri relatif diestimasi berdasarkan biaya ekspektasian ditambah margin.
- 5) Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dalam kondisi sebagai berikut:

- a) Pada waktu tertentu (biasanya untuk janji dalam memindahkan barang ke pelanggan).
- b) Sepanjang waktu (biasanya untuk janji dalam memberikan layanan pada pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu. Perusahaan memilih ukuran kemajuan yang sesuai untuk menentukan jumlah pendapatan yang harus diakui ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

x. Revenue and Expense Recognition

The Group has adopted PSAK 72, which requires revenue recognition to fulfill 5 steps of assessment:

- 1) Identify contracts with customers.
- 2) Identification of performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer different goods or services to the customer.
- 3) Determine the transaction price. The transaction price is the amount of consideration expected to be entitled to the entity in exchange for transferring the promised goods or services to the customer. If the consideration promised in the contract includes a variable amount, the Company estimates the amount of consideration that is expected to be entitled in exchange for the transfer of goods or services promised to the customer less the estimated amount of guaranteed service levels to be paid during the contract period.
- 4) Allocate the transaction price for each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling price of each different goods or services promised in the contract. If this cannot be observed directly the relative stand-alone selling price is estimated based on expected cost plus a margin.
- 5) Recognizes revenue when performance obligations are fulfilled by transferring the promised goods or services to the customer (that is, when the customer gains control of the goods or services).

The implementation obligation can be fulfilled in the following conditions:

- a) A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer).
- b) Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Company selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

x. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pendapatan atas penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik atau Public Service Obligation (PSO) dan Subsidi

Pendapatan atas penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) dan subsidi diakui pada saat pengajuan klaim terhadap seluruh biaya yang terkait langsung dengan kegiatan PSO dan subsidi.

Selisih kekurangan pembayaran atau kelebihan pencairan dana penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik akan diperhitungkan setelah dilakukan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan oleh pihak yang ditunjuk dalam Perjanjian.

Perusahaan menerapkan kebijakan pembentukan cadangan PSO pada tahun buku 2023 maksimal 6% dari setiap pencatatan akrual bulanan penghasilan PSO untuk mengantisipasi dampak koreksi atas hasil verifikasi penagihan PSO oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK R.I.) melalui Surat Keputusan Direksi No. 01.02/01/SK/HKO.01/2023, tanggal 2 Januari 2023. Dasar pertimbangannya adalah jumlah koreksi dari hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, secara rata-rata prosentase koreksi sebesar 3,44% dari total penagihan PSO dan kriteria / acuan verifikasi yang digunakan oleh verifikator adalah PM No. 10 Tahun 2021 dan kontrak pelaksanaan PSO. Nilai cadangan PSO yang dibentuk diakui sebagai beban pengurang pendapatan PSO dan beban akrual pencadangan. Lihat Catatan 5

Pendapatan Tambang Pasasi dan Muatan

Pendapatan tambang pasasi dan muatan diakui saat kapal meninggalkan pelabuhan atas dasar uang tambang pasasi dan uang tambang muatan yang diterima.

Pendapatan Charter, Bongkar Muat, Komisi Keagenan, EMKL dan Reparasi

Pendapatan charter, bongkar muat, komisi keagenan, EMKL dan reparasi diakui pada saat jasa tersebut telah selesai dilaksanakan.

Pendapatan Sewa, Bunga dan Lainnya

Pendapatan sewa, bunga dan lainnya diakui dengan metode akrual.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

x. Revenue and Expense Recognition (continued)

Revenue for the implementation of Public Service Obligations (PSO) and subsidies

Revenue for the implementation of Public Service Obligations (PSO) and subsidies are recognized at the time of filing a claim against all costs associated directly with PSO and subsidy activities.

The difference in underpayment or excess disbursement of funds for the implementation of Public Service Obligations will be calculated after document verification and field verification by the party appointed in the Agreement.

The company implements a policy of establishing a PSO reserve in the 2023 financial year of a maximum of 6% of each monthly accrual recording of PSO income to anticipate the impact of corrections on the results of verification of PSO billing by the Indonesian Financial Audit Agency (BPK R.I.) through Directors' Decree No. 01.02/01/SK/HKO.01/2023, January 2 2023. The basis for consideration is the number of corrections from the results of document verification and field verification in the last 3 (three) years, with an average percentage of corrections of 3.44% of the total PSO billing and the verification criteria/reference used by the verifier is PM No. 10 of 2021 and the PSO implementation contract. The value of the PSO reserves formed is recognized as an expense reducing PSO income and accrued reserve expenses. See Note 5

Pasasi Mines and Cargo Revenues

Passenger and cargo ticket revenues are recognized when the ship leaves the port on the basis of the ticket and cargo fees received.

Revenue Charter, Stevedoring, Agency Commissions, EMKL and Reparations

Revenue charter, stevedoring, agency commissions and reparations EMKL recognized when services have been completed.

Rental Income, Interest and Other

Rental income, interest and other recognized on an accrual basis.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan

untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2024 and

for The Year then Ended

(With Comparative as of December 31, 2023 and

for The Year then Ended)

(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

x. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pendapatan Dividen dari Investasi Saham

Penghasilan dividen dari investasi saham diakui pada saat hak menerima dividen telah ditetapkan.

Uang yang diterima sehubungan dengan pelayanan jasa yang belum digunakan dicatat sebagai liabilitas jangka pendek dan disajikan sebagai liabilitas kontrak.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual.

y. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak penghasilan tangguhan. Pajak tersebut diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian, kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui ke ekuitas atau penghasilan komprehensif lain. Dalam hal ini, pajak tersebut diakui langsung pada ekuitas atau penghasilan komprehensif lain.

Pajak Kini

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Aset dan liabilitas pajak kini diakui jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut maka kelebihanannya diakui sebagai aset dan jika jumlah pajak kini yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas.

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

x. Revenue and Expense Recognition (continued)

Dividend Income from Shares Investment

Dividend income from investment in shares capital is recognized when the shareholders rights to receive such dividend have been established.

The cash received from customers related to unused services are recorded as current liabilities and presented as contract liabilities.

Expenses are recognised when incurred on an accrual basis.

y. Income Taxes

The income tax expense comprises current and deferred income tax. Tax is recognised in the consolidated statements of profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised directly in equity or other comprehensive income. In this case, the tax is also recognised directly in equity or other comprehensive income.

Current Taxes

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantially enacted at the reporting date. Management periodically evaluates positions taken in its annual tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes a provision, where appropriate, on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Current tax assets and liabilities are recognized if the amount of taxes paid for the current period and prior periods exceeds the amount of tax payable for that period then the excess is recognized as an asset. and if the amount of unpaid taxes is now recognized as a liability.

Current income tax assets and liabilities for the current year are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the tax authority. The tax rates and tax laws used as a basis for computation are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting dates.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

y. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Kini (lanjutan)

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan dicatat saat surat ketetapan pajak diterima atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan. Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini saling hapus jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui dan memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Pajak Tangguhan

Grup menggunakan metode neraca (*balance sheets method*) pada akuntansi pajak tangguhan yang timbul akibat perbedaan temporer yang ada antara aset dan liabilitas atas dasar pajak dengan nilai tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian. Untuk masing-masing entitas anak yang dikonsolidasi, aset atau liabilitas pajak tangguhan disajikan dalam jumlah bersih.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa mendatang.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

y. Income Taxes (continued)

Current Taxes (continued)

Corrections to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed, when the result of the appeal is decided. Shortage / excess income tax payments are recorded as part of the "Current Tax Expense" in the income statement and other comprehensive income.

Current tax assets and current tax liabilities are offset when there is a legal right to offset the recognized amounts and has the intention to finish with a net basis or realize the asset and settle the liability simultaneously.

Deferred Taxes

The Group applies the balance sheets liability method of deferred tax accounting which arises on temporary differences between tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. For each of the consolidated subsidiaries, the deferred tax assets or liabilities are shown at the applicable net amounts.

Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantively enacted as at reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realized or the deferred income tax liability is settled.

Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and tax losses carried forward can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the carrying amounts of existing assets and liabilities in the financial statements and their respective tax bases at each reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan

untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2024 and

for The Year then Ended

(With Comparative as of December 31, 2023 and

for The Year then Ended)

(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

y. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Nilai tercatat aset pajak tangguhan ditinjau kembali pada tanggal laporan posisi keuangan dan nilai tercatat tersebut diturunkan apabila laba fiskal tidak mungkin memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan. Penurunan tersebut harus disesuaikan kembali apabila besar kemungkinan laba fiskal memadai untuk kompensasi tersebut.

Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Pajak tangguhan yang berkaitan dengan transaksi baik yang ada di pendapatan komprehensif lainnya atau langsung dibebankan ke ekuitas, dicatat pada pendapatan komprehensif lainnya atau ekuitas bersangkutan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan serta Perseroan dan entitas anak yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

z. Penggunaan Saldo Laba

Penggunaan saldo laba yang dilakukan atas dasar keputusan/risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

aa. Laba (Rugi) Bersih Per Saham Dasar

Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham Grup dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Laba per saham dilusi dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

y. Income Taxes (continued)

Deferred Taxes (continued)

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each consolidated statement of financial position date and is reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. Any such reduction is reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable income would be available.

Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current year operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Deferred tax related to transactions both in other comprehensive income or directly charged to shareholders' equity, are recorded in other comprehensive income or equity in question.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority and the Company and its subsidiaries intend to settle their current tax assets and current tax liabilities on a net basis.

z. The Usage of Retained Earnings

The use of profit balance made on the basis of the decision/treatise of the general Meeting of Shareholders (AGM).

aa. Basic Net Earnings (Loss) Per Share

Basic earnings per share are calculated by dividing profit for the period attributable to owners of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

Diluted earnings per share is computed by dividing net profit attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding as adjusted for the effects of all dilutive potential ordinary shares.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)

aa. Laba (Rugi) Bersih Per Saham Dasar (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak ada efek yang berpotensi menjadi saham biasa. Oleh karena itu, laba per saham dilusian sama dengan laba per saham dasar.

ab. Informasi Segmen

Grup melakukan segmentasi pelaporan berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasi utama dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Direksi adalah pengambil keputusan operasional Grup. Segmentasi berdasarkan sifat usaha. Seluruh transaksi antar segmen telah dieliminasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- 1) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban;
- 2) yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya;
- 3) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Untuk tujuan manajemen, Grup membagi menjadi beberapa segmen operasi berdasarkan produk dan jasa yang dikelola secara independen oleh masing-masing pengelola segmen yang bertanggung jawab atas kinerja dari masing-masing segmen. Para pengelola segmen melaporkan secara langsung kepada manajemen yang secara teratur mengkaji hasil operasi sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya ke masing-masing segmen dan untuk menilai kinerja segmen.

ac. Kejadian Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan berjalan yang menyediakan informasi mengenai posisi keuangan Grup pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian sehingga perlu dilakukan penyesuaian, jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian. Kejadian-kejadian setelah tanggal laporan posisi keuangan yang tidak memerlukan penyesuaian, apabila jumlahnya material telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

4. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION
(continued)

aa. Basic Net Earnings (Loss) Per Share (continued)

As at December 31, 2024 and 2023, there were no existing instruments which could result in the issuance of further ordinary shares. Therefore, diluted earnings per share is the same as basic earnings per share.

ab. Segment Information

The Group segments its financial reporting based on the financial information used by the chief operating decision-maker in evaluating the performance of segments and in the allocation of resources. Directors are the Group's chief operating decision-maker. The segments are based on the nature of business. All transactions between segments have been eliminated.

An operating segment is a component of an entity:

- 1) that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses;
- 2) whose operating results are regularly reviewed by the entity's operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and value its performance;
- 3) for which discrete financial information is available.

For management purposes, the Group are divided into operating segments based on products and services which are independently managed by the respective segment managers responsible for the performance of each segment. The segment managers report directly to the management regularly review the operating results as a basis for allocating resources to each of the segments and to assess segment performance.

ac. Events After the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Group's financial position at the date of the consolidated statement of financial position (adjusting events), if any, are reflected in the consolidated financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to consolidated financial statements when material.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan

untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2024 and

for The Year then Ended

(With Comparative as of December 31, 2023 and

for The Year then Ended)

(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**5. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN
ASUMSI MANAJEMEN**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mensyaratkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas, serta pengungkapan liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Namun, ketidakpastian estimasi dan asumsi ini dapat menyebabkan hasil yang memerlukan penyesuaian material atas nilai tercatat aset atau liabilitas yang terpengaruh di masa mendatang.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling material dan signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

a. Ketidakpastian Kewajiban Perpajakan

Dalam situasi tertentu, Grup tidak dapat menentukan secara pasti jumlah utang pajak kini atau masa mendatang atau jumlah klaim restitusi pajak yang dapat terpulihkan karena proses pemeriksaan yang masih berlangsung atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan.

Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan utang pajak yang tidak pasti atau klaim restitusi pajak yang dapat terpulihkan terkait dengan ketidakpastian posisi perpajakan, Grup menerapkan pertimbangan yang sama yang akan digunakan dalam menentukan jumlah provisi yang harus diakui sesuai dengan PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi" dan PSAK 46, "Pajak Penghasilan". Grup membuat analisa untuk semua ketidakpastian posisi perpajakan untuk menentukan jika utang pajak atas manfaat pajak yang tidak pasti atau cadangan atas klaim restitusi pajak yang tidak dapat terpulihkan harus diakui.

**5. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS
AND ASSUMPTIONS**

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. However, uncertainty about these estimates and assumptions could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amounts of assets or liabilities affected in future periods.

The following judgments, estimates and assumptions were made by management in the process of applying the Group's accounting policies and have the most material and significant effects on the amounts recognised in the consolidated financial statements.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group accounting policies that have the significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

a. Uncertainty of tax exposures

In certain circumstances, the Group may not be able to determine the exact amount of its current or future tax liabilities or recoverable amount of the claim for tax refund due to ongoing investigations by, or negotiation with, the taxation authority. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income.

In determining the amount to be recognised in respect of an uncertain tax liability or the recoverable amount of the claim for tax refund related to uncertain tax positions, the Group applies similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognised in accordance with PSAK 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" and PSAK 46, "Income Taxes". The Group makes an analysis of all uncertain tax positions to determine if a tax liability for uncertain tax benefit or a provision for unrecoverable claim for tax refund should be recognised.

**5. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN
ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

b. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Grup mempunyai beberapa perjanjian sewa dimana Grup bertindak sebagai penyewa untuk beberapa aset tertentu. Grup mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir.

Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu saat sewa terjadi, dan mata uang dimana pembayaran sewa ditentukan.

c. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

d. Provisi Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Provisi yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Suatu evaluasi atas piutang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah penyisihan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai piutang tak tertagih yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

**5. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS
AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgments (continued)

b. Leases

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to control the use of an identifying asset throughout the period in exchange for consideration even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

The Group has various lease agreements where the Group acts as a lessee in respect of certain assets. The Group classifies each of its leases as either an operating lease or finance lease.

The Group could not readily determine the implicit rate, management uses the Group's incremental borrowing rate as a discount rate. There are a number of factors in determining an incremental borrowing rate, many of which need judgement in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates.

In determining an incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors: the Group's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

c. Classification of Financial Assets and Liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the group accounting policies.

d. Provision for Impairment of Financial Assets

The formed of provision is based on past collection experience and other factors that may affect collectability such as the probability of insolvency or significant financial difficulties of the debtors or significant delay in payments.

Evaluation on receivables to identify total allowance that should be provided, is performed periodically during the period. Therefore, timing and amount of allowances for impairment value of doubtful accounts recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that have been used.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan

untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2024 and

for The Year then Ended

(With Comparative as of December 31, 2023 and

for The Year then Ended)

(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**5. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN
ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

e. Cadangan Public Service Obligation (PSO)

Mendasar pada pengalaman penagihan PSO selama 3 (tiga) tahun berturut-turut (2020 - 2022) manajemen memutuskan untuk membentuk cadangan PSO maksimal sebesar 6% dari setiap pencatatan akrual bulanan penghasilan PSO sesuai Surat Keputusan Direksi No. 01.02/01/SK/HKO.01/2023, tanggal 2 Januari 2023 yang bertujuan untuk mengelola risiko dari dampak penurunan secara material dan signifikan apabila nilai koreksi BPK RI naik secara signifikan. (Lihat Catatan 4, huruf x)

f. Cadangan Beban Kesejahteraan Pegawai

Mendasar pada Laporan Valuasi Aktuaria tanggal 31 Desember 2022 atas Dana Pensiun Pelni, bahwa Dana Pensiun Pelni mengalami defisit pendanaan sebesar Rp28.172.151.980, maka PT PELNI (Persero) sebagai pendiri memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan pegawai purna bakti dengan menjaga kecukupan dana pada Dana Pensiun Pelni, melalui tambahan iuran sebesar nilai defisit tersebut. Selanjutnya, mendasar pada surat Dana Pensiun Pelni No. 001/DPP/KEU/I-2024, tanggal 4 Januari 2024, defisit pendanaan tersebut ditindaklanjuti dengan pengenaan iuran tambahan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. (Lihat Catatan 4, huruf v)

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai estimasi ketidakpastian di masa datang dan sumber utama estimasi tersebut pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam tahun/periode buku selanjutnya diungkapkan di bawah ini.

Grup membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, akan jarang sekali sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap hasil keuangan atau posisi keuangan konsolidasian Grup yang dilaporkan dalam tahun-tahun mendatang dipaparkan di bawah ini.

a. Cadangan Penurunan Nilai Piutang

Grup menghitung kerugian kredit ekspektasian piutang usaha dan piutang lain-lain dengan menggunakan tingkat provisi yang berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa.

**5. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS
AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgments (continued)

e. Provision for Public Service Obligation

Based on the experience of PSO billing for 3 (three) consecutive years (2020 - 2022), management decided to establish a PSO reserve of a maximum of 6% of each monthly accrual recording of PSO income in accordance with the Decree of the Board of Directors No. 01.02/01/SK/HKO.01/2023, dated January 2, 2023 which aims to manage the risk of a material and significant decline in the impact if the BPK RI correction value increases significantly. (See Note 4, letter x)

f. Employee Welfare Expense Reserves

Based on the Actuarial Valuation Report dated December 31, 2022 on the Pelni Pension Fund, that the Pelni Pension Fund has a funding deficit of Rp28,172,151,980, PT PELNI (Persero) as the founder has a responsibility for the welfare of retired employees by maintaining sufficient funds in the Pelni Pension Fund, through additional contributions of the deficit value. Furthermore, based on Pelni Pension Fund letter No. 001/DPP/KEU/I-2024, dated January 4, 2024, the funding deficit was followed up with the imposition of additional contributions for a period of 2 (two) years. (See Note 4, letter v)

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below.

The Group makes estimates and assumptions concerning the future. The resulting accounting estimates will, by definition, seldom equal the related actual results. The estimates and assumptions that have a significant risk of causing a material adjustment to the consolidated financial results or financial position of the Group reported in future years are addressed below.

a. Allowance for Impairment of Receivables

The Group calculates expected credit losses for trade receivables and other receivables by using the provision rates based on days past due for groupings of various customer segments that have similar credit risk characteristics.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan

untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2024 and

for The Year then Ended

(With Comparative as of December 31, 2023 and

for The Year then Ended)

(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**5. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN
ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

a. Cadangan Penurunan Nilai Piutang (lanjutan)

Grup menyesuaikan kerugian kredit historis masa lalu dengan informasi *forward-looking*. Sebagai contoh, jika prakiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama periode/tahun depan, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisis.

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi, prakiraan atas kondisi ekonomi dan kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi yang signifikan.

Jumlah kerugian kredit ekspektasian paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan prakiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

b. Cadangan Penurunan Nilai Persediaan

Grup menghitung pencadangan penurunan nilai persediaan berdasarkan estimasi persediaan yang akan digunakan pada masa datang dan kondisi dari persediaan. Ketidakpastian terkait dengan faktor-faktor ini dapat menyebabkan nilai realisasi yang berbeda dengan nilai tercatat dari persediaan.

c. Pemulihan dari Aset Pajak Tangguhan

Grup melakukan penelaahan atas nilai tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi nilai tersebut sampai dengan nilai dimana kemungkinan besar penghasilan kena pajak akan tersedia untuk penggunaan seluruh atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut. Penelaahan Grup atas pengakuan aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang masih dapat dimanfaatkan didasarkan atas tingkat dan waktu dari penghasilan kena pajak yang ditaksirkan untuk periode pelaporan berikutnya.

Taksiran ini berdasarkan hasil pencapaian Grup di masa lalu dan ekspektasi di masa depan terhadap pendapatan dan beban, sebagaimana juga dengan strategi perencanaan perpajakan di masa depan.

**5. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS
AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

a. Allowance for Impairment of Receivables (continued)

The Group adjusts the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if economic conditions forecast are expected to deteriorate over the next period/year, which can lead to an increased number of defaults, the historical default rates are adjusted. At each reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates, and economic conditions forecast and expected credit losses is a significant estimate.

The amount of expected credit losses is sensitive to changes in circumstances and of economic conditions forecast. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of the customer's actual default in the future.

b. Allowance for Impairment of Inventories

The Group provides allowance in decline in inventories based on estimated future usage and the condition of the inventories. Uncertainty associated with these factors may result in the realisable amount being different from the reported carrying amount of the inventories.

c. Recoverability of Deferred Tax Assets

The Group reviews the carrying amounts of deferred tax assets at the end of each reporting period and reduces these to the extent that it is probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilised. The Group's assessment on the recognition of deferred tax assets on deductible temporary differences and tax loss carried forward is based on the level and timing of forecasted taxable income of the subsequent reporting period.

This forecast is based on the Group's past results and future expectations on revenues and expenses as well as future tax planning strategies.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan

untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2024 and

for The Year then Ended

(With Comparative as of December 31, 2023 and

for The Year then Ended)

(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**5. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN
ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

c. Pemulihan dari Aset Pajak Tangguhan (lanjutan)

Namun, tidak terdapat kepastian bahwa Grup dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang cukup untuk memungkinkan penggunaan sebagian atau seluruh bagian dari aset pajak tangguhan tersebut.

d. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap dan Aset Takberwujud

Grup mengestimasi masa manfaat dari aset tetap dan aset takberwujud berdasarkan ekspektasi utilisasi dari aset dengan didukung rencana dan strategi usaha yang juga mempertimbangkan perkembangan teknologi di masa depan dan perilaku pasar. Estimasi masa manfaat aset tetap dan aset takberwujud didasarkan pada penelaahan Grup secara kolektif terhadap praktik industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara.

Estimasi masa manfaat ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain penggunaan aset. Namun, ada kemungkinan, hasil operasi di masa depan dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

Jumlah dan saat beban dicatat setiap periode akan terpengaruh oleh perubahan atas faktor-faktor dan kondisi tersebut. Pengurangan dalam estimasi masa manfaat dari aset tetap Grup akan meningkatkan beban usaha dan menurunkan aset tidak lancar yang tercatat. Penambahan dalam estimasi masa manfaat aset tetap Grup menurunkan beban usaha dan meningkatkan aset tidak lancar yang tercatat.

e. Nilai Wajar Properti Investasi

Nilai wajar dari properti investasi ditentukan menggunakan teknik valuasi yang dilakukan oleh penilai independen profesional yang memiliki kualifikasi yang relevan dan memiliki pengalaman yang berhubungan dengan properti investasi yang akan dinilai. Setiap perubahan dalam asumsi penilaian yang dilakukan oleh penilai independen eksternal akan berdampak pada nilai tercatat properti investasi.

**5. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS
AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

c. Recoverability of Deferred Tax Assets (continued)

However, there is no assurance that the Group will generate sufficient taxable income to allow all or part of the deferred tax assets to be utilised.

d. Estimated Useful Lives of Intangible Assets and Fixed Assets

The Group estimates the useful lives of its intangible assets and fixed assets based on expected asset utilisation as anchored on business plans and strategies that also consider expected future technological developments and market behavior. The estimation of the useful lives of intangible assets and fixed assets are based on the Group's collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets.

The estimated useful lives are reviewed at least each financial year end and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates brought about by changes in the factors mentioned above.

The amounts and timing of recorded expenses for any period are affected by changes in these factors and circumstances. A reduction in the estimated useful lives of the Group's fixed asset increases the recorded operating expenses and decreases recorded noncurrent assets. An extension in the estimated useful lives of the Group's fixed assets decreases the recorded operating expenses and increases noncurrent assets.

e. Fair Value of Investment Property

The fair value of investment property is determined by using valuation techniques which were applied by independent professionally qualified valuers who hold a recognised relevant professional qualification and have recent experience in the locations of the investment properties valued. Each change in assumption and valuation performed by external independent appraisers would affect the carrying amount of investment properties.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan

untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2024 and

for The Year then Ended

(With Comparative as of December 31, 2023 and

for The Year then Ended)

(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**5. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN
ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

f. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Aset tetap dan aset tidak lancar lainnya ditelaah untuk penurunan nilai apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat aset melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Nilai yang dapat diperoleh kembali suatu aset atau unit penghasil kas ditentukan berdasarkan yang lebih tinggi antara harga jual bersih dan nilai pakai, dihitung berdasarkan asumsi dan estimasi manajemen.

Asumsi penting untuk penurunan nilai aset non keuangan sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini. Rencana strategis mencakup perkiraan dampak perubahan iklim bisnis di masa depan terhadap Grup sejauh ini dapat diperkirakan dengan andal.

g. Liabilitas Imbalan Kerja

Nilai kini kewajiban imbalan kerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan dengan menggunakan sejumlah asumsi aktuarial. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya bersih untuk pensiun termasuk tingkat pengembalian jangka panjang yang diharapkan atas investasi dana program pensiun iuran pasti dan tingkat diskonto yang relevan. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat kewajiban imbalan kerja.

Asumsi penting lainnya untuk kewajiban imbalan kerja sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

h. Pajak Penghasilan

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal, provisi, dan perbedaan temporer lainnya, diakui hanya apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat dipulihkan nilainya, dimana hal ini tergantung pada kecukupan laba kena pajak di masa depan. Asumsi pembentukan laba kena pajak di masa depan bergantung pada estimasi manajemen atas arus kas di masa depan. Hal ini bergantung pada estimasi penjualan barang atau jasa, harga, biaya operasi, belanja modal dan transaksi lainnya di masa depan.

**5. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS
AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

f. Impairment of Non Financial Assets

Fixed assets and other non-current assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount of an asset or cash generating unit is determined based on the higher of its fair value less costs to sell and its value in use, calculated on the basis of management's assumptions and estimates.

Other key assumptions for the impairment of nonfinancial assets are based in part on current market conditions. Strategic plans include estimations of the future impact of business climate change on the Group to the extent these can be reliably estimated.

g. Liabilities for Employee Benefits

The present value of the employee benefits obligation depends on a number of factors that are determined based on a number of actuarial assumptions. The assumptions used in determining the net cost for pensions include the expected long-term rate of return on investment of the defined contribution pension fund and the relevant discount rate. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of the employee benefits obligation.

Other key assumptions for the employee benefits obligation are based in part on current market conditions.

h. Income Taxes

Deferred tax assets, including those arising from tax losses, provisions and other temporary differences, are recognised only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the sufficiency of the future taxable profits. Assumptions about the generation of future taxable profits depend on management's estimates of future cash flows. These depend on estimates of future sales of goods and services, prices, operating costs, capital expenditure and other future transactions.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan

untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2024 and

for The Year then Ended

(With Comparative as of December 31, 2023 and

for The Year then Ended)

(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**5. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN
ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

i. Cadangan Public Service Obligation (PSO)

Cadangan PSO dibentuk berdasarkan pengalaman penagihan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut (2020 - 2022) dimana risiko koreksi pendapatan PSO memiliki level risiko tinggi.

Koreksi PSO merupakan risiko yang dinilai memiliki level risiko moderat dengan kemungkinan terjadi hampir pasti sehingga dibutuhkan suatu kebijakan untuk meminimalisir dampak atas risiko tersebut.

Pada periode berjalan, Perseroan telah mencatat tagihan PSO sebesar Rp3.070.681.926.235. Dengan mempertimbangkan rata-rata koreksi BPK-RI atas verifikasi PSO selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 3,34% (tiga koma tiga puluh empat persen), dan mempertimbangkan selera risiko Perseroan terhadap koreksi verifikasi PSO sebesar 3% (tiga persen), maka Perseroan berkeyakinan sepenuhnya dengan keputusan membentuk cadangan sebesar Rp10.000.000.000 ekuivalen dengan 0,32% dari pencatatan Pendapatan PSO, sehingga risiko yang sebelumnya memiliki level moderat dengan tingkat kemungkinan hampir pasti dapat diturunkan menjadi low dengan kemungkinan terjadi hampir pasti.

Mengingat bahwa risiko merupakan efek dari ketidakpastian terhadap sasaran, maka penentuan nilai dan metode pencadangan PSO ini akan dievaluasi atau direviu kembali oleh manajemen sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. (Lihat Catatan 4, huruf x)

j. Cadangan Beban Kesejahteraan Pegawai

Berdasar pada rencana peningkatan fasilitas kesehatan pensiunan untuk pegawai organik yang diangkat mulai tahun 2007, maka Perseroan melakukan pencatatan Beban Kepegawaian Jangka Panjang. Pencatatan pencadangan Beban Kepegawaian Jangka Panjang sebesar Rp9.297.091.216 yang terdiri dari cadangan iuran Perseroan yang wajib dicadangkan sebesar Rp3.052.221.847 dan cadangan sebesar minimal 2 (dua) kali dari cadangan wajib yang disiapkan untuk pegawai yang mendekati masa pensiun sebagai pemenuhan saldo maksimal yang dibutuhkan. Manajemen berkeyakinan pencadangan tersebut cukup untuk memenuhi program peningkatan fasilitas kesehatan pensiunan. (Lihat Catatan 4, huruf v)

**5. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS
AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

i. Provision for Public Service Obligation

The PSO provision is formed based on the collection experience over the past 3 (three) consecutive years (2020 - 2022), where the risk of PSO revenue correction has a high level of risk.

PSO correction is a risk that is considered to have a moderate risk level with an almost certain possibility of occurring so that a policy is needed to minimize the impact of this risk.

In the current period, the Company has recorded PSO bills of Rp3,070,681,926,235. By considering the average BPK-RI correction to PSO verification for the last 5 (five) years of 3.34% (three point eighteen percent), and considering the Company's risk appetite for PSO verification corrections of 3% (three percent), the Company is fully confident in the decision to form a reserve of Rp10,000,000,000 equivalent to 0.32% of PSO Revenue recording, so that the risk that previously had a moderate level with a nearly certain probability level can be reduced to low with a nearly certain probability of occurring.

Given that risk is the effect of uncertainty on targets, the determination of the value and method of PSO reserves will be evaluated or reviewed by management at least once a year. (See Note 4, letter x)

j. Employee Welfare Expense Reserves

Based on the plan to improve health facilities for retirees for organic employees appointed starting in 2007, the Company recorded Long-Term Personnel Expenses. Recording of Long-Term Personnel Expenses reserves amounting to Rp9,297,091,216 consisting of the Company's mandatory contribution reserves of Rp3,052,221,847 and reserves of at least 2 (two) times the mandatory reserves prepared for employees approaching retirement as fulfillment of the maximum balance required. Management believes that these reserves are sufficient to fulfill the program to improve health facilities for retirees. (See Note 4, letter v)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

6. KAS DAN SETARA KAS

	<u>31 Desember/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>
Kas:		
<u>Rupiah</u>	2.677.993.316	4.047.219.979
Valuta Asing (2024: SGD 559,44 2023: SGD 451,03)	6.668.619	5.282.346
Jumlah Kas	<u>2.684.661.935</u>	<u>4.052.502.325</u>
Bank:		
Pihak Berelasi		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	245.112.369.365	197.126.092.338
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	87.348.745.962	217.475.518.385
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	22.107.246.763	15.563.940.308
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	1.798.663.772	1.737.458.217
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	1.200.025.779	3.781.896.822
PT Bank Jabar Banten, Tbk	391.673.465	15.232.475
Sub Jumlah	<u>357.958.725.106</u>	<u>435.700.138.544</u>
<u>Valuta Asing</u>		
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (2024: USD 2.982.184 dan 2023: USD 2.466.571)	48.198.055.545	38.024.659.923
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (2024: USD 27.948,75; SGD 17.454,09; EUR 6.575,49 dan 2023: USD 27.936,05; SGD 812,78; EUR 6.559,88)	770.410.188	634.224.608
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (2024: USD 10.667 dan 2023: USD 10.714)	172.395.205	165.163.941
Sub Jumlah	<u>49.140.860.938</u>	<u>38.824.048.472</u>
Pihak Ketiga		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Central Asia, Tbk	2.532.200.368	625.753.551
Sub Jumlah	<u>2.532.200.368</u>	<u>625.753.551</u>
Jumlah Bank	<u>409.631.786.412</u>	<u>475.149.940.567</u>

6. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash:	
<u>Rupiah</u>	
Foreign Currency (2024: SGD 559,44 2023: SGD 451,03)	
Total Cash	
Bank:	
Related Parties	
<u>Rupiah</u>	
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	
PT Bank Jabar Banten, Tbk	
Sub Total	
<u>Foreign Exchange</u>	
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (2024: USD 2.982.184 and 2023: USD 2.446.571)	
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (2024: USD 27.948,75; SGD 17.454,09; EUR 6.575,49 and 2023: USD 27.936,05; SGD 812,78; EUR 6.559,88)	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (2024: USD 10.667 and 2023: USD 10,714)	
Sub Total	
Third Parties	
<u>Rupiah</u>	
PT Bank Central Asia, Tbk	
Sub Total	
Total Bank	

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

6. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	<u>31 Desember/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>
Deposito:		
Pihak Berelasi		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	1.614.323.262.542	1.014.755.214.515
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	839.482.058.184	781.423.304.498
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	729.822.997.086	741.097.707.024
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	497.168.841.177	431.668.841.177
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	21.625.000.000	46.425.000.000
Jumlah Deposito	3.702.422.158.989	3.015.370.067.214
Jumlah Kas dan Setara Kas	4.114.738.607.336	3.494.572.510.107

Tingkatan bunga deposito Rupiah per tahun berkisar antara 2,60% - 7,00% pada tahun 2024 dan 3,25% - 7,00% pada tahun 2023.

Seluruh kas dan setara kas adalah milik Perseroan dan entitas anak dan tidak digunakan sebagai jaminan atas liabilitas dan pinjaman lainnya dan tidak dibatasi penggunaan.

Penjelasan pihak-pihak berelasi lihat Catatan 41.

6. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

Deposit:	
Related Parties	
<u>Rupiah</u>	
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	
Total Deposit	
Total Cash & Equivalents	

The annual Rupiah deposit interest rate ranges from 2,60% - 7,00% in 2024 and 3,25% - 7,00% in 2023.

All cash and cash equivalents belonging to the Company and its subsidiaries are not used as collateral for liabilities and other borrowings and are not restricted.

Explanations of related parties refer to Notes 41.

7. PIUTANG USAHA

a. Berdasarkan Pelanggan

	<u>31 Desember/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>
Pihak Berelasi:		
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	30.219.016.239	16.688.163.256
PT Rumah Sakit Pelni	17.982.184.411	18.305.626.414
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni	8.122.532.777	8.115.482.777
PT Semen Indogreen Sentosa	7.899.847.912	6.114.263.118
PT Jembatan Nusantara	5.252.492.526	8.445.206.939
PT Telekomunikasi Indonesia	2.614.260.530	1.233.546.730
PT Waskita Karya	1.067.443.000	1.067.443.000
Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat	863.069.200	1.829.078.586
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	860.817.498	860.817.498
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)	802.136.870	119.304.857
PT Pindad Internasional	700.000.000	700.000.000
PT PP Urban	687.171.496	1.037.171.496
PT Jasa Prima Logistik	648.281.446	-
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	547.259.239	1.093.148.035
Lain-lain (dibawah Rp500 juta)	2.015.071.655	18.936.067.735
Sub Jumlah - dipindahkan	80.281.584.799	84.545.320.441

Related Parties:	
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	
PT Rumah Sakit Pelni Health Foundation Pelni Pensioner	
PT Semen Indogreen Sentosa	
PT Jembatan Nusantara	
PT Telekomunikasi Indonesia PT Waskita Karya Central Maritime Transport Traffic Safety Improvement Work Unit	
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Pindad Internasional PT PP Urban PT Jasa Prima Logistik	
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	
Others (below Rp500 Million)	
Sub Total - carried forward	

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

7. PIUTANG USAHA (lanjutan)

a. Berdasarkan Pelanggan (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Sub Jumlah - pindahan	80.281.584.799	84.545.320.441
Pihak Ketiga:		
PT Lintang Daya Selaras	16.248.710.000	16.248.710.000
PT Cipta Batu Alam Sejahtera	7.883.299.695	1.515.662.512
PT Putera Master	4.778.298.000	4.534.090.000
CV Tri Putra Mandiri	4.159.519.105	4.159.519.105
Adi Persada Gedung	3.509.028.009	-
PT Cemindo Gemilang Tbk.	3.393.858.780	-
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	3.000.961.987	154.590.655
Linblad Expeditions LTD	2.858.878.576	1.632.824.430
Compagnie du Ponant	2.491.023.709	142.541.646
PT Equator Marindo	1.973.340.551	693.866.091
CV Indotrad Berkah Mandiri	1.884.456.112	1.884.456.112
PT ASA Internasional Line	1.834.323.412	1.834.323.412
PT Dock dan Perkapalan Immaniar	1.772.800.671	1.427.249.956
PT Asoka Dwi Rosid Internasional	1.664.427.970	-
CV Anambas Expedisi	1.152.813.370	1.152.813.370
PT Pelayaran Putra Sejati	1.115.604.542	922.180.990
Dharma Setya Nusantara	1.054.319.844	-
PT Selapura	1.051.008.798	596.394.528
PT Bahari Eka Nusantara	1.020.380.147	144.421.285
PT Tiga Lentera Abadi	930.000.000	930.000.000
UD Putra Sanjaya Cileungsi	923.614.960	923.614.960
Alamsyah	864.224.974	975.312.465
CV Fazza Mitra Usaha	840.790.750	840.790.750
PT Wahana Ria Cakrawala	828.760.052	56.800.000
CV MJP Log	752.107.650	-
PT DHL Supply Chain Indonesia	711.511.574	919.207.263
PT Aman Mandiri	688.988.350	560.988.351
PT Karya Bangun Tiga Bersaudara	686.400.000	686.400.000
PT Karya Retra	683.981.360	683.981.360
PT Elnusa	683.786.320	-
PT Geoprec Indonesia	676.381.628	676.381.628
Harry Surabaya (MRT)	653.330.881	653.330.881
PT Meratus Lines	626.172.376	258.353.150
PT Bahari Laju Anugerah	618.606.999	480.000
KAPP Nusa Wangi	584.829.000	1.494.245.378
PT Dharma Lautan Utama	580.000.000	-
Travel PT PID	569.724.699	571.143.500
PT Indoline Income Kita	550.382.441	-
PT Berkah Tata Baruna	547.684.912	-
PT Daya Satria Nusantara	-	1.389.180.944
PT Parani Artamandiri	-	1.164.772.050
PT Cakrawala Inti Persada	-	1.100.000.000
PT Prima Sejahtera Line	-	721.742.900
Sub Jumlah - dipindahkan	76.848.332.204	51.650.369.672

7. ACCOUNTS RECEIVABLE (continued)

a. Based on the Customer (continued)

Sub Total - brought forward

Third Parties:

PT Lintang Daya Selaras
PT Cipta Batu Alam Sejahtera
PT Putera Master
CV Tri Putra Mandiri
Adi Persada Gedung
PT Cemindo Gemilang Tbk.
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna
Linblad Expeditions LTD
Compagnie du Ponant
PT Equator Marindo
CV Indotrad Berkah Mandiri
PT ASA Internasional Line
PT Dock and Immaniar
Shipping
PT Asoka Dwi Rosid Internasional
CV Anambas Expedisi
PT Pelayaran Putra Sejati
Dharma Setya Nusantara
PT Selapura
PT Bahari Eka Nusantara
PT Tiga Lentera Abadi
UD Putra Sanjaya Cileungsi
Alamsyah
CV Fazza Mitra Usaha
PT Wahana Ria Cakrawala
CV MJP Log
PT DHL Supply Chain Indonesia
PT Aman Mandiri
PT Karya Bangun Tiga Bersaudara
PT Karya Retra
PT Elnusa
PT Geoprec Indonesia
Harry Surabaya (MRT)
PT Meratus Lines
PT Bahari Laju Anugerah
KAPP Nusa Wangi
PT Dharma Lautan Utama
Travel PT PID
PT Indoline Income Kita
PT Berkah Tata Baruna
PT Daya Satria Nusantara
PT Parani Artamandiri
PT Cakrawala Inti Persada
PT Prima Sejahtera Line

Sub Total - carried forward

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

7. PIUTANG USAHA (lanjutan)

a. Berdasarkan Pelanggan (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Sub Jumlah - pindahan	76.848.332.204	51.650.369.672
PT H.Hamzah	-	622.071.808
Logisly	-	606.436.947
PT TPIL	-	569.051.182
PT Surya Timur Line	-	511.106.000
Lainnya (dibawah Rp500 juta)	34.836.277.238	34.713.020.045
Sub Jumlah	111.684.609.442	88.672.055.654
Jumlah	191.966.194.241	173.217.376.095
Dikurangi:		
Provisi Kerugian Penurunan Nilai	(66.067.747.913)	(54.379.676.429)
Jumlah	125.898.446.328	118.837.699.666

Piutang kepada PT Rumah Sakit PELNI adalah tagihan atas iuran dana pensiun dan kesehatan pegawai.

Piutang kepada Yayasan Kesehatan Pensiunan PELNI merupakan piutang atas transaksi sewa ruangan, Toko/Kafe, dan Mini Teater di kapal.

Piutang kepada Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat merupakan piutang atas transaksi tagihan kegiatan mudik gratis.

Piutang kepada PT Jembatan Nusantara merupakan piutang atas kegiatan perbengkelan di SBU Galangan PELNI Surya.

Piutang kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Lintang Daya Selaras, PT Cipta Batu Alam Sejahtera, dan PT Semen Indogreen Sentosa merupakan piutang atas kegiatan usaha pada PT Sarana Bandar Nasional.

Piutang kepada PT Solusi Integrasi Internasional, PT Asoka Dwi Rosid Internasional dan PT Pindad Internasional merupakan piutang atas kegiatan usaha pada PT Pelita Indonesia Djaya.

b. Berdasarkan Jenis Usaha

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Entitas Induk:		
Perkapalan	24.747.225.030	24.823.906.411
Perbengkelan	17.375.893.543	21.161.098.947
Perhotelan	110.342.490	59.159.671
Usaha Lainnya	28.994.658.473	24.445.240.916
Sub Jumlah	71.228.119.536	70.489.405.945

7. ACCOUNTS RECEIVABLE (continued)

a. Based on the Customer (continued)

Sub Total - brought forward

PT H.Hamzah
Logisly
PT TPIL
PT Surya Timur Line
Others (below Rp500 Million)

Sub Total

Less:

Provision for Impairment Losses

Total

Receivables from PT Rumah Sakit PELNI are bills for pension and health fund contributions from employees.

Receivable to Yayasan Kesehatan Pensiunan PELNI are receivables for rent, Shop/Cafe, and Mini Theater transactions on board.

Receivables from Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat are receivables for bill transactions for free homecoming activities.

Receivables to PT Jembatan Nusantara represent receivables from shipyard activities at SBU Galangan PELNI Surya.

Receivables to PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Lintang Daya Selaras, PT Cipta Batu Alam Sejahtera, and PT Semen Indogreen Sentosa represent receivables from business activities at PT Sarana Bandar Nasional.

Receivables to PT Solusi Integrasi Internasional and PT Asoka Dwi Rosid Internasional represent receivables from business activities at PT Pelita Indonesia Djaya.

b. Based of Type Business

Parent Entity:

Shipping
Workshop
Hospitality
Others

Sub Total

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

7. PIUTANG USAHA (lanjutan)

b. Berdasarkan Jenis Usaha (lanjutan)

	<u>31 Desember/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>
<u>Dikurangi:</u>		
Provisi Kerugian Penurunan Nilai	(27.717.760.234)	(18.781.441.820)
Sub Jumlah	<u>43.510.359.302</u>	<u>51.707.964.125</u>
Entitas Anak:		
PT Sarana Bandar Nasional	107.850.230.526	90.077.137.080
PT Pelita Indonesia Djaya	12.887.844.179	12.650.833.071
Sub Jumlah	<u>120.738.074.705</u>	<u>102.727.970.151</u>
<u>Dikurangi:</u>		
Provisi Penurunan Nilai	(38.349.987.679)	(35.598.234.610)
Sub Jumlah	<u>82.388.087.026</u>	<u>67.129.735.541</u>
Jumlah	<u>125.898.446.328</u>	<u>118.837.699.666</u>

Mutasi provisi kerugian penurunan nilai selama tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Saldo Awal	54.379.676.430	54.173.144.041
Pembentukan (Pemulihan) Provisi	11.688.071.483	206.532.388
Saldo akhir	<u>66.067.747.913</u>	<u>54.379.676.430</u>

Terhadap piutang usaha yang berasal dari Pemerintah, Entitas Grup, dan Yayasan, Perseroan tidak membentuk cadangan provisi atas penurunan nilai, karena manajemen berkeyakinan jumlah piutang tersebut dapat tertagih.

Berdasarkan hasil penelaahan pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa provisi kerugian penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Penjelasan pihak-pihak berelasi lihat Catatan 41.

7. ACCOUNTS RECEIVABLE (continued)

b. Based of Type Business (continued)

	<u>31 Desember/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>
<u>Less:</u>		
Provision for Expected Credit Loss	(27.717.760.234)	(18.781.441.820)
Sub Total	<u>51.707.964.125</u>	<u>51.707.964.125</u>
Subsidiaries:		
PT Sarana Bandar Nasional	107.850.230.526	90.077.137.080
PT Pelita Indonesia Djaya	12.887.844.179	12.650.833.071
Sub Total	<u>120.738.074.705</u>	<u>102.727.970.151</u>
<u>Less:</u>		
Provision for Expected Credit Loss	(38.349.987.679)	(35.598.234.610)
Sub Total	<u>82.388.087.026</u>	<u>67.129.735.541</u>
Total	<u>125.898.446.328</u>	<u>118.837.699.666</u>

Movements of provision for expected credit losses during 2024 and 2023 as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Beginning Balance	54.379.676.430	54.173.144.041
Reserved (Recovery) Provision	11.688.071.483	206.532.388
Ending balance	<u>66.067.747.913</u>	<u>54.379.676.430</u>

For trade receivables originating from the Government, Group Entities, and Foundations, the Company does not provide a provision for impairment, because management believes that the receivables are collectible.

Based on the review at the end of the year, management believes that the provision for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible trade receivables.

Explanations of related parties refer to Notes 41.

8. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA

	<u>31 Desember/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>
Aset Kontrak	350.774.210.144	618.433.377.686
Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya	1.688.350.365.641	180.457.832.318
Piutang Lain-lain	13.953.809.557	12.072.041.452
Penempatan Jangka Pendek	-	57.300.000
Jumlah	<u>2.053.078.385.342</u>	<u>811.020.551.456</u>

Contract Asset
Restricted Cash
and Cash Equivalent
Other Receivables
Short-term Investment
Total

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

8. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA (lanjutan)

a. Rincian Aset Kontrak

	<u>31 Desember/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>
<i>Public Service Obligation (PSO)</i>		
dan subsidi	287.596.705.800	455.802.130.622
PT. Adhi Karya	17.555.993.126	532.617.005
PT. Semen Indogreen Sentosa	7.978.479.160	73.432.043.258
PT Netra Setya Santosa	2.838.825.000	-
PT Adhi Persada Gedung	2.194.900.000	-
PT Hakaaston	1.139.743.173	1.031.407.690
Bulog	-	3.984.116.400
Usaha Penunjang	26.369.990.697	59.756.733.705
Lainnya	5.099.573.188	23.894.329.006
Jumlah	<u>350.774.210.144</u>	<u>618.433.377.686</u>

Aset Kontrak *Public Service Obligation (PSO)* dan subsidi merupakan pendapatan PSO dan subsidi tahun berjalan yang belum terealisasi pencairan dananya sampai dengan akhir tahun berjalan sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-9999.07.1.985120/2024 pada tanggal 29 Desember 2023 dan Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-999.07.1.985120/2023 pada tanggal 30 Desember 2022.

Aset Kontrak pada Entitas Anak PT PBM Sarana Bandar Nasional dan PT Pelita Indonesia Djaya merupakan pengakuan pendapatan atas kegiatan pelayanan bongkar muat tol laut, *crane* dan *refeer* container yang pada akhir Desember 2024 dan 2023. Berdasarkan hasil penelaahan pada akhir tahun, manajemen berpendapat bahwa, tidak perlu dilakukan pembentukan provisi kerugian penurunan nilai karena jangka waktu pekerjaan masih berlangsung setelah akhir tahun.

b. Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya merupakan kas setara kas yang dicadangkan untuk tujuan tertentu seperti bank garansi, jaminan pelaksanaan dan sebagainya yang berjangka waktu 1 tahun atau kurang. Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya terdiri dari:

	<u>31 Desember/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>
Pihak Berelasi :		
Bank – Rupiah		
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	1.500.000.000.000	-
Sub Jumlah	<u>1.500.000.000.000</u>	<u>-</u>

8. OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS (continued)

a. Detail of Contract Asset

<i>Public Service Obligation (PSO)</i>	
and subsidies	
PT. Adhi Karya	
PT. Semen Indogreen Sentosa	
PT Netra Setya Santosa	
PT Adhi Persada Gedung	
PT Hakaaston	
Bulog	
Supporting Business	
Others	
Total	

Public Service Obligation (PSO) and subsidy contract assets represent PSO and subsidy revenues for the current year that have not been realized until the end of the current year in accordance with the State General Treasurer's Budget Implementation List for Fiscal Year 2024 Number: SP DIPA-9999.07.1.985120/2024 on date December 29, 2023 and Fiscal Year 2023 Number: SP DIPA-999.07.1.985120/2023 on December 30, 2022.

Contract assets in subsidiaries PT PBM Sarana Bandar Nasional and PT Pelita Indonesia Djaya represent revenue recognition for sea toll loading and unloading services, cranes and *refeer* containers at the end of December 2024 and 2023. Based on the review at the end of the year, management believes that no provision for impairment losses should be made because the period of work is still ongoing after the end of the year.

b. Restricted Cash and Cash Equivalents

Restricted cash and cash equivalents represent cash equivalents reserved for specific purposes such as bank guarantees, performance guarantees, etc. with a maturity of 1 year or less. Restricted cash and cash equivalents consist of:

Related Parties :	
Bank - Rupiah	
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	
Sub Total	

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

8. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA (lanjutan)

**b. Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya
(lanjutan)**

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Pihak Berelasi :		
Deposito – Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	160.000.000.000	160.000.000.000
Sub Jumlah	160.000.000.000	160.000.000.000
Pihak Berelasi :		
Bank Garansi – Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	27.076.944.823	20.182.740.328
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	499.228.828	-
Sub Jumlah	27.576.173.651	20.182.740.328
Pihak Ketiga :		
Deposit – Rupiah		
PT Unilever Indonesia	145.000.000	145.000.000
Dinas Peternakan Merauke	10.000.000	10.000.000
Lainnya	619.191.990	120.091.990
Sub Jumlah	774.191.990	275.091.990
Jumlah	1.688.350.365.641	180.457.832.318

Saldo tercatat merupakan sisa dana dari pemanfaatan PMN atas dasar PP No. 111 tahun 2015 dengan nilai dana PMN sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah) yang diperuntukkan untuk kegiatan pengadaan 6 (enam) unit kapal barang. Saldo dana PMN beserta bunga pengembangannya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebagai berikut:

The carrying balance represents the remaining funds from the utilization of PMN based on Government Regulation No. 111 of 2015 with the value of PMN funds amounting to Rp500,000,000,000 (five hundred billion rupiah) which is intended for the procurement of 6 (six) units of freighter. The balance of PMN funds along with development interest as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Pokok	90.967.349.309	90.967.349.309
Bunga Pengembangan	96.109.595.514	89.215.391.019
Jumlah	187.076.944.823	180.182.740.328

c. Piutang Lain-lain

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Pihak Berelasi :		
Pegawai	6.929.278.544	7.145.887.877
Yayasan Kesehatan		
Pensiunan Peln	1.530.400.369	1.530.400.369
Lainnya	2.634.352.739	1.010.563.899
Sub Jumlah	11.094.031.652	9.686.852.145

c. Other Receivables

Related Parties :
Employee
Health Foundation
Peln Pensioners
Others

Sub Total

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

8. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA (lanjutan)

c. Piutang Lain-lain (lanjutan)

Pihak Ketiga :

Koperasi Karyawan Sejahtera	614.223.898
PT Nirwana Lautan Cahaya	-
PT Lazada	-
Lainnya	9.250.742.448

Sub Jumlah **9.864.966.346**

Jumlah **20.958.997.998**

Provisi Kerugian Penurunan Nilai (7.005.188.441)

Sub Jumlah **(7.005.188.441)**

Jumlah **13.953.809.557**

Mutasi provisi kerugian penurunan nilai tahun 2024 dan 2023, sebagai berikut:

	2024
Saldo Awal	7.339.359.681
Pembentukan Provisi	334.171.240
Saldo Akhir	7.005.188.441

Berdasarkan hasil penelaahan pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang lain-lain.

d. Penempatan Jangka Pendek

	31 Desember/ December 31, 2024
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-
Jumlah	-

Merupakan penempatan deposito berjangka milik entitas anak PT Pelita Indonesia Djaya yang tidak dijaminkan sebesar Rp57.300.000 berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan namun tidak lebih dari dua belas bulan dengan tingkat bunga per tahun deposito Rupiah sebesar 3,5% dan 7,00% untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan pihak-pihak berelasi lihat Catatan 41.

8. OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS (continued)

c. Other Receivables (continued)

Third Parties :

Koperasi Karyawan Sejahtera	2.728.036.662
PT Nirwana Lautan Cahaya	561.972.688
PT Lazada	516.957.320
Others	5.917.582.318

Sub Total

Total

Provision for Impairment Losses

Sub Total

Total

Movements of allowance for impairment losses of 2024 and 2023, as follows:

	2023
Beginning Balance	4.129.777.958
Reserved Provision	3.209.581.723
Ending Balance	7.339.359.681

Based on the review at the end of the year, management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible uncollectible other receivables.

d. Short-term Placements

	31 Desember/ December 31, 2023
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	57.300.000
Total	57.300.000

Represents time deposits placements owned by subsidiaries PT Pelita Indonesia Djaya that are not pledged as collateral amounting to Rp57,300,000 with maturities of more than 3 (three) months but not more than twelve months with an annual interest rate on Rupiah deposits of 3.5% and 7.00% for the following year. ends December 31, 2023.

Explanations of related parties refer to Notes 41.

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

9. PERSEDIAAN

Entitas Induk:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Suku cadang	355.150.622.415	269.789.430.518
Bahan bakar	51.252.728.563	46.613.462.850
Pelumas	33.676.364.283	21.245.370.330
Makanan	13.045.501.075	8.935.096.280
Tiket Penumpang	860.439.262	899.307.052
Lainnya	506.913.789	270.974.929

Sub Jumlah

454.492.569.387

Entitas Anak:

PT Sarana Bandar Nasional	16.589.381.394	17.459.931.482
PT Pelita Indonesia Djaya	11.107.988.197	10.249.374.218

Sub Jumlah

27.697.369.591

Jumlah

482.189.938.978

Persediaan tidak diasuransikan terhadap risiko kebakaran, kemalingan dan resiko lainnya. Manajemen berkeyakinan bahwa persediaan Perseroan terletak pada beberapa lokasi sehingga kemungkinan timbulnya kerugian dalam waktu yang bersamaan untuk beberapa lokasi adalah tidak signifikan.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai tercatat dari persediaan tidak melebihi nilai pengganti atau nilai pemulihan aset dan tidak terdapat persediaan usang pada komponen aset lancar.

Persediaan usang telah dilakukan reklasifikasi kedalam aset tidak lancar lainnya.

9. INVENTORIES

Parent Entity:

Spareparts
Fuel
Lubricants
Food
Passenger Ticket
Others

Sub Total

Subsidiaries:

PT Sarana Bandar Nasional
PT Pelita Indonesia Djaya

Sub Total

Total

Inventories are not insured against fire, loss and other risks. Management believes that the Company's inventories are located in several locations so that the possibility of losses arising at the same time for several locations is not significant.

Management believes that the carrying value of inventories does not exceed the asset's replacement or recovery value and there are no obsolete inventories in the current assets component.

Obsolete inventory has been reclassified to other non-current assets.

10. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Dimuka

Entitas Induk:

Pajak Penghasilan	2.428.119.923	-
Pajak Pertambahan Nilai	3.155.000	3.210.000
Pajak Lainnya	554.777.925	12.137.676.119

Sub Jumlah

2.986.052.848

Entitas Anak:

Pajak Penghasilan	1.945.831.784	491.977.026
Pajak Pertambahan Nilai	51.379.603.066	27.333.734.212
Pajak Lainnya	48.561.500	-

Sub Jumlah

53.373.996.350

Jumlah

56.360.049.198

Pajak dibayar dimuka atas pajak lainnya merupakan pajak PPh Badan Tahunan yang lebih dibayar oleh Perseroan, dimana dilakukan restitusi Perseroan.

10. TAXATION

a. Prepaid Taxes

Parent Entity:

Income Tax
Value Added Tax
Other Tax

Sub Total

Subsidiaries:

Income Tax
Value Added Tax
Other Tax

Sub Total

Total

Prepaid tax on other taxes represents the Annual Corporate Income Tax overpaid by the Company, for which restitution is made by the Company..

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

10. TAXATION (continued)

b. Utang Pajak

b. Tax Payable

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Entitas Induk:			Parent Entity:
Pajak Pertambahan Nilai	1.786.141.443	12.081.040.532	Value Added Tax
Pajak Penghasilan Pasal 15	339.648.918	2.603.551.420	Tax Income Article 15
Pajak Penghasilan Pasal 21	6.597.337.809	21.695.025.028	Tax Income Article 21
Pajak Penghasilan Pasal 22	3.223.580.380	1.771.795.716	Tax Income Article 22
Pajak Penghasilan Pasal 23	2.727.539.893	2.778.583.172	Tax Income Article 23
Pajak Penghasilan Pasal 25	287.517.675	287.517.675	Tax Income Article 25
Pajak Penghasilan Pasal 29	3.843.230.896	3.422.178.368	Tax Income Article 29
Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	246.630.023	242.003.776	Tax Income Article 4 Paragraph 2
Pajak Daerah	38.440.741	37.039.062	Local Tax
Sub Jumlah	19.090.067.778	44.918.734.749	Sub Total
Entitas Anak:			Subsidiaries:
Pajak Pertambahan Nilai	10.719.523.126	9.797.236.432	Value Added Tax
Pajak Penghasilan Pasal 15	4.300.015	-	Tax Income Article 15
Pajak Penghasilan Pasal 21	286.387.173	759.110.018	Tax Income Article 21
Pajak Penghasilan Pasal 23	58.986.903	34.564.398	Tax Income Article 23
Pajak Penghasilan Pasal 25	401.131.494	352.654.408	Tax Income Article 25
Pajak Penghasilan Pasal 29	551.710.012	3.393.298.873	Tax Income Article 29
Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	36.995.786	54.511.503	Tax Income Article 4 Paragraph 2
Pajak Lainnya	50.604.355	30.599.955	Other Tax
Sub Jumlah	12.109.638.864	14.421.975.587	Sub Total
Jumlah	31.199.706.642	59.340.710.336	Total

c. Beban (Manfaat) Pajak

c. Tax Expense (Benefit)

	2024	2023	
Entitas Induk:			Parent Entity:
Beban Pajak Final	68.564.388.826	60.355.982.838	Final Tax Expense
Beban Pajak Kini	9.595.137.420	13.140.119.581	Current Tax Expense
Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan	4.815.574.196	(3.375.013.543)	Deffered Tax Expense (Benefits)
Sub Jumlah	82.975.100.442	70.121.088.876	Sub Total
Entitas Anak:			Subsidiaries:
Beban PajakTangguhan	(1.133.580.750)	347.857.464	Deffered Tax Expense
Beban Pajak Kini	26.333.762.197	26.420.677.374	Current Tax Expense
Sub Jumlah	25.200.181.447	26.768.534.838	Sub Total
Jumlah	108.175.281.889	96.889.623.714	Total

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Rekonsiliasi Fiskal

	2024	2023
Laba sebelum pajak penghasilan entitas Induk	276.848.383.773	271.322.936.527
Bagian laba entitas anak yang telah dipungut pajak penghasilan dan PPh Final	(55.961.383.908)	(109.079.263.413)
Sub Jumlah	220.886.999.865	162.243.673.114
Perbedaan Temporer:		
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	(41.500.902.137)	9.987.544.473
Penyisihan Piutang Usaha	6.008.785.820	4.860.332.745
Penyusutan Aset Tetap	472.204.191	493.093.432
Penurunan Nilai Persediaan	13.130.938.507	-
Sub Jumlah	(21.888.973.619)	15.340.970.650
Perbedaan Permanen:		
Pph 21 Ditanggung Entitas	33.713.351.958	31.581.876.065
Beban Pemasaran	9.477.530.037	8.652.577.534
Pendapatan Di Luar Usaha Lainnya	(281.518.118.687)	(172.016.836.032)
Sub Jumlah	(238.327.236.692)	(131.782.382.433)
Beban (Pendapatan) terkait yang telah dikenakan Pajak Final:		
Pph Final Usaha Perkapalan	(1.885.948.320.008)	(1.742.784.338.816)
Penghasilan PSO	(3.732.803.828.570)	(3.445.326.954.781)
Usaha Sampingan	(8.674.015.722)	(8.005.662.311)
Pendapatan Deposito Dan Jasa Giro	(151.553.962.224)	(105.630.921.759)
Beban Usaha Perkapalan	4.777.066.429.193	4.517.799.236.944
Beban Overhead	912.822.347.740	728.088.558.221
Beban Terkait Dengan Penghasilan yang Dikenakan PPh Final	172.034.821.690	46.409.364.941
Sub Jumlah	82.943.472.099	(9.450.717.561)
Penghasilan Kena Pajak	43.614.261.653	36.351.543.770
Pajak Penghasilan Badan Terutang	9.595.137.420	7.997.339.460
Kredit Pajak:		
Pajak Penghasilan Pasal 22	3.979.104.259	4.088.381.394
Pajak Penghasilan Pasal 23	590.144.545	352.729.582
Pajak Penghasilan Pasal 25	1.182.657.720	134.050.116
Sub Jumlah	5.751.906.524	4.575.161.092
Pajak Penghasilan Badan (Kurang) Lebih Bayar	(3.843.230.896)	(3.422.178.368)
Beban Pajak Penghasilan Kini:		
Entitas Induk	9.595.137.420	7.997.339.460
Entitas Anak:		
PT Sarana Bandar Nasional	14.977.483.180	15.402.554.000
PT Pelita Indonesia Djaya	11.303.103.240	10.927.846.917
Sub Jumlah	26.280.586.420	26.330.400.917
Jumlah	35.875.723.840	34.327.740.377

Profit before income tax of the Parent Entity

Income from subsidiaries And Final tax

Sub Total

Temporary Differences:

Employee Benefits Liability

Receivable Allowance

Fixed Assets Depreciation

Inventory Impairment

Sub Total

Permanent Differences:

Income tax article 21 by entity

Marketing Expenses

Other Revenues

Sub Total

Related Expenses (Income) that have been charged Final Tax:

Income Tax Shipping

PSO Income

Other Income

Deposit Income and

Current Accounts

Shipping Business Expenses

Overhead Expenses

Expenses Related to

Income Subject to Final Tax

Sub Total

Taxable Income

Corporate Income Tax

Tax Deduction :

Income Tax Article 22

Income Tax Article 23

Income Tax Article 25

Sub Total

Corporate Income

Corporate (Less) Overpayment

Current Income Tax Expense:

Parent Entity

Subsidiaries:

PT Sarana Bandar Nasional

PT Pelita Indonesia Djaya

Sub Total

Total

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

10. TAXATION (continued)

e. Pajak Tangguhan

e. Deferred Taxes

	2024				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Dibebankan ke Laba (Rugi)/ Charged to Profit (Loss)	Dibebankan ke Ekuitas/ Charged to Other Comprehensive Income	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo Akhir/ Ending Balance
Entitas Induk:/					
Parent Entity :					
Penurunan Nilai Piutang/Expected Credit Loss of Receivables	5.845.338.933	1.321.932.880	-	-	7.167.271.813
Penyusutan Aset Tetap/Depreciation of Fixed Assets	5.472.448.794	103.884.922	-	-	5.576.333.716
Liabilitas Imbalan Kerja/ Liability for Employee Benefits	43.770.230.426	(9.130.198.470)	-	-	34.640.031.956
Penurunan Nilai Persediaan/Expected Credit Loss of Inventory	-	2.888.806.472	-	-	2.888.806.472
Sub Jumlah/Sub Total	55.088.018.153	(4.815.574.196)	-	-	50.272.443.957
Entitas Anak/Subsidiaries :					
PT Sarana Bandar Nasional	13.483.079.285	(394.979.591)	(171.640.856)	-	12.916.458.838
PT Pelita Indonesia Djaya	3.089.544.474	1.528.560.342	44.969.674	-	4.663.074.490
Sub Jumlah/Sub Total	16.572.623.759	1.133.580.751	(126.671.182)	-	17.579.533.328
Jumlah/Total	71.660.641.912	(3.681.993.445)	(126.671.182)	-	67.851.977.285
	2023				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Dibebankan ke Laba (Rugi)/ Charged to Profit (Loss)	Dibebankan ke Ekuitas/ Charged to Other Comprehensive Income	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo Akhir/ Ending Balance
Entitas Induk:/					
Parent Entity :					
Penurunan Nilai Piutang/Expected Credit Loss of Receivables	4.776.065.730	1.069.273.203	-	-	5.845.338.933
Penyusutan Aset Tetap/Depreciation of Fixed Assets	5.363.968.240	108.480.554	-	-	5.472.448.794
Liabilitas Imbalan Kerja/ Liability for Employee Benefits	41.572.970.641	2.197.259.785	-	-	43.770.230.426
Sub Jumlah/Sub Total	51.713.004.611	3.375.013.542	-	-	55.088.018.153
Entitas Anak/Subsidiaries :					
PT Sarana Bandar Nasional	14.288.981.491	(767.739.972)	(38.162.234)	-	13.483.079.285
PT Pelita Indonesia Djaya	2.764.657.153	419.882.507	(94.995.186)	-	3.089.544.474
Sub Jumlah/Sub Total	17.053.638.644	(347.857.465)	(133.157.420)	-	16.572.623.759
Jumlah/Total	68.766.643.255	3.027.156.077	(133.157.420)	-	71.660.641.912

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

11. UANG MUKA

11. ADVANCES PAYMENT

	<u>31 Desember/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	
Entitas Induk:			Parent Entity:
Perkapalan	106.536.013.986	84.541.973.277	Shipping
Administrasi dan Umum	12.722.417.902	11.219.207.510	General and Administrative
Penunjang	12.811.829.428	1.185.699.801	Agency
Sub Jumlah	<u>132.070.261.316</u>	<u>96.946.880.588</u>	Sub Total
Entitas Anak:			Subsidiaries:
PT Sarana Bandar Nasional	52.433.687.280	29.434.317.965	PT Sarana Bandar Nasional
PT Pelita Indonesia Djaya	39.375.932.189	28.506.852.292	PT Pelita Indonesia Djaya
Sub Jumlah	<u>91.809.619.469</u>	<u>57.941.170.257</u>	Sub Total
Jumlah	<u>223.879.880.785</u>	<u>154.888.050.845</u>	Total

Uang muka perkapalan yang tercatat pada entitas induk merupakan pemberian uangmuka atas transaksi pembelian suku cadang kapal yang di biayai melalui fasilitas PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Shipping advances recorded on the parent entity is the provision of advance payment on the purchase transaction of the ship parts that are purchased through the facilities of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Uang muka administrasi dan umum merupakan uang muka operasional unit-unit kerja dilingkungan PT PELNI (Persero).

Administrative and general advances represent operational advances for work units within PT PELNI (Persero).

Uang muka usaha penunjang merupakan uang muka yang dibayarkan untuk kegiatan operasional perusahaan pada entitas anak.

Advances for supporting businesses represent advances paid for the company's operational activities in subsidiaries.

12. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

12. PREPAID EXPENSES

	<u>31 Desember/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	
Entitas Induk:			Parent Entity:
Usaha Perkapalan	11.244.029.324	16.482.928.900	Shipping
Umum dan Administrasi	999.395.332	201.036.856	General and Administrative
Usaha Perhotelan	72.422.349	65.840.829	Hotel
Sewa	215.475.794	152.337.022	Rent
Lainnya	23.838.372.496	22.150.495.801	Other
Sub Jumlah	<u>36.369.695.295</u>	<u>39.052.639.408,00</u>	Sub Total
Entitas Anak:			Subsidiary:
PT Sarana Bandar Nasional	44.937.376.065	27.911.528.711	PT Sarana Bandar Nasional
PT Pelita Indonesia Djaya	356.702.472	331.503.669	PT Pelita Indonesia Djaya
Sub Jumlah	<u>45.294.078.537</u>	<u>28.243.032.380</u>	Sub Total
Jumlah	<u>81.663.773.832</u>	<u>67.295.671.788</u>	Total

Biaya dibayar dimuka usaha perkapalan merupakan biaya yang berkaitan dengan kegiatan operasional usaha perkapalan.

Prepaid shipping costs are costs related to shipping business operational activities.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

12. BIAYA DIBAYAR DIMUKA (lanjutan)

Biaya dibayar dimuka umum dan administrasi merupakan biaya yang berkenaan dengan kegiatan operasional umum dan administrasi, seperti imbalan kerja dan asuransi.

Biaya dibayar dimuka pada entitas anak (PT Sarana Bandar Nasional) merupakan biaya yang berkaitan dengan kegiatan operasional pelabuhan, seperti kegiatan ekspedisi muatan kapal laut dan kegiatan operasional dipelabuhan lainnya yang telah dibayarkan namun pada akhir tahun buku, jasa belum seluruhnya dapat dimanfaatkan, dan akan ditagihkan setelah pekerjaan selesai.

12. PREPAID EXPENSES (continued)

Prepaid general and administrative expenses are expenses related to general operational activities and administration, such as employee benefits and insurance.

Prepaid expenses to a subsidiary (PT Sarana Bandar Nasional) are costs related to port operational activities, such as shiploading expedition activities and other port operations that have been paid but at the end of the financial year, services have not been fully utilized, and will be billed after the job is done.

13. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

13. INVESTMENT IN ASSOCIATES

	<u>31 Desember/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	
PT Rumah Sakit PELNI	218.729.401.463	240.324.819.715	PT Rumah Sakit PELNI
Jumlah	<u>218.729.401.463</u>	<u>240.324.819.715</u>	Total
Mutasi nilai penyertaan saham pada PT Rumah Sakit PELNI untuk tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:		Changes in the value of equity participation in PT Rumah Sakit PELNI for 2024 and 2023 are as follows:	
	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
Saldo Awal	240.324.819.715	208.284.214.875	Beginning Balance
Dividen	(7.707.055.925)	-	Dividen
Laba Tahun Berjalan	(14.004.572.402)	32.401.750.716	Profit for the Current Year
Laba Komprehensif	116.210.075	(361.145.876)	Comprehensive Income
Saldo Akhir	<u>218.729.401.463</u>	<u>240.324.819.715</u>	Ending Balance

Pengakuan kerugian pada entitas asosiasi PT Rumah Sakit PELNI tahun 2024 mendasar pada laporan keuangan PT Rumah Sakit PELNI tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sebelum audit. Hal ini dikarenakan sampai dengan tanggal laporan ini terbit, PT Rumah Sakit PELNI belum menyelesaikan Laporan Audited tahun buku 2024, sesuai dengan Surat Direktur Utama PT Rumah Sakit PELNI No.1.19/BRS/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal Penyampaian Laporan Keuangan Audited PT Rumah Sakit PELNI Tahun Buku 2024.

The recognition of losses in the associated entity PT Rumah Sakit PELNI in 2024 is based on the financial statements of PT Rumah Sakit PELNI as of December 31, 2024 and for the year ended on that date before the audit. This is because until the date of this report, PT Rumah Sakit PELNI has not completed the Audited Report for the 2024 financial year, in accordance with the Letter of the President Director of PT Rumah Sakit PELNI No. 1.19/BRS/III/2025 dated March 19, 2025 concerning the Submission of Audited Financial Reports of PT Rumah Sakit PELNI for the 2024 Financial Year.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

14. PROPERTI INVESTASI

14. INVESTMENT PROPERTIES

	2024				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Reduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Entitas Induk/ Parent Entity					
Tanah/Land	138.550.040.000	1.253.060.000	128.700.000	22.000.000	139.696.400.000
Gedung/Building	22.171.190.000	-	940.607.000	-	21.230.583.000
Sub Jumlah/Sub Total	160.721.230.000	1.253.060.000	1.069.307.000	22.000.000	160.926.983.000
Entitas Anak/ Subsidiary					
Tanah/Land	20.302.417.000	3.757.121.922	-	11.147.138.078	35.206.677.000
Gedung/Building	2.914.583.000	5.020.495.657	-	4.473.595.918	12.408.674.575
Sub Jumlah/Sub Total	23.217.000.000	8.777.617.579	-	15.620.733.996	47.615.351.575
Jumlah/Total	183.938.230.000	10.030.677.579	1.069.307.000	15.642.733.996	208.542.334.575
	2023				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Reduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Entitas Induk/ Parent Entity					
Tanah/Land	132.329.700.000	6.217.005.000	-	3.335.000	138.550.040.000
Gedung/Building	21.168.600.000	998.645.000	-	3.945.000	22.171.190.000
Sub Jumlah/Sub Total	153.498.300.000	7.215.650.000	-	7.280.000	160.721.230.000
Entitas Anak/ Subsidiary					
Tanah/Land	17.861.054.614	2.441.362.386	-	-	20.302.417.000
Gedung/Building	2.080.475.001	834.107.999	-	-	2.914.583.000
Sub Jumlah/Sub Total	19.941.529.615	3.275.470.385	-	-	23.217.000.000
Jumlah/Total	173.439.829.615	10.491.120.385	-	7.280.000	183.938.230.000

Penilaian atas nilai wajar properti investasi pada entitas induk untuk tahun 2024 dan 2023 dilakukan oleh penilai independen berdasarkan laporannya Nomor 00044/2.0055-00/TI/10/0469/1/II/2025, untuk properti investasi yang terletak di Jawa Timur untuk gedung kantor, Sulawesi Selatan untuk perkantoran dan Papua Tengah untuk perumahan desa dan pertanian lahan kering dan Nomor 00726/2.0053-0/PI/06/0095/1/XII/2023, 00727/2.0053-0/PI/06/0095/1/XII/2023, dan 00731/2.0053-0/PI/06/0095/1/XII/2023 masing-masing untuk properti investasi yang terletak di Medan untuk gedung kantor, rumah dinas dan Ampenan.

The assessment of the fair value of investment properties in the parent entity for the years 2024 and 2023 was conducted by an independent appraiser based on its report Number 00044/2.0055-00/TI/10/0469/1/II/2025, for investment properties located in East Java for office buildings, South Sulawesi for offices and Central Papua for village housing and dry land farming and Number 00726/2.0053-0/PI/06/0095/1/XII/2023, 00727/2.0053-0/PI/06/0095/1/XII/2023, and 00731/2.0053-0/PI/06/0095/1/XII/2023 respectively for investment properties located in Medan for office buildings, official houses and Ampenan.

14. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

Penurunan bersih nilai wajar properti investasi milik Entitas Induk PT Pelayaran Indonesia (Persero) untuk tahun 2024 sebesar Rp671.747.000 diakui sebagai pendapatan non usaha dan sebesar Rp855.500.000 diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya.

Penilaian nilai wajar properti investasi yang berlokasi di Surabaya dan Makassar didasarkan pada estimasi yang dilakukan oleh manajemen. Mendasar pada pertimbangan bahwa:

- a. Tanah memiliki umur ekonomis yang tidak terbatas sehingga nilai wajar tanah tidak mengalami penurunan, selain disebabkan hal-hal diluar kendali. Sehingga nilai wajar tanah akan mengalami peningkatan mengikuti perkembangan pasar dan perubahan lingkungan disekitarnya.
- b. Bangunan memiliki umur ekonomis yang terbatas, sehingga nilai wajar bangunan cenderung mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh kondisi atau keadaan fisik bangunan.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan perhitungan tahun-tahun sebelumnya, manajemen mengestimasi bahwa tanah mengalami kenaikan sebesar 5% dari nilai tercatatnya dan bangunan mengalami penurunan 5% dari nilai tercatatnya.

Penilaian atas nilai wajar properti investasi pada entitas Induk tahun berjalan yang dilakukan oleh manajemen menghasilkan kenaikan nilai tanah sebesar Rp525.900.000 sedangkan untuk bangunan mengalami penurunan nilai wajarnya sebesar Rp609.000.000, sehingga secara bersih mengalami penurunan nilai wajar sebesar Rp83.100.000 diakui sebagai beban non-usaha.

Manajemen PT Pelita Indonesia Djaya berkeyakinan bahwa nilai tercatat properti investasi per 31 Desember 2024 masih relevan dan mencerminkan nilai wajarnya, karena berdasarkan hasil pengamatan dilokasi obyek properti investasi, tidak terdapat perubahan yang signifikan pada lingkungan di sekitar obyek properti investasi yang dapat berdampak pada peningkatan nilai properti investasi tersebut. Oleh karena itu, Grup tidak melakukan penilaian Properti Investasi pada tahun 2024 melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) independen.

14. INVESTMENT PROPERTIES (continued)

The net decrease in the fair value of investment properties owned by the Parent Entity PT Pelayaran Indonesia (Persero) in 2024 amounting to Rp671,747,000 was recognized as non-operating income and Rp855,500,000 was recognized as other comprehensive income.

The fair value valuation of investment properties located in Surabaya and Makassar is based on estimates made by management. Based on the consideration that:

- a. Land has an indefinite economic life so that the fair value of the land does not decrease, other than due to things beyond control. So that the fair value of the land will increase following market developments and changes in the surrounding environment.
- b. Buildings have a limited economic life, so the fair value of the building tends to decrease which is influenced by the condition or physical condition of the building.

Based on the above considerations and calculations from previous years, management estimates that land has increased by 5% from its carrying value and buildings located in Ampenan have decreased by 5% from their carrying value and buildings located have decreased by 5%.

The assessment of the fair value of investment properties in the Parent entity during the year conducted by management resulted in an increase in the value of land amounting to Rp525,900,000 while for buildings decreased in fair value by Rp609,000,000, resulting in a net decrease in fair value of Rp83,100,000 recognized as non-operating expenses.

The management of PT Pelita Indonesia Djaya believes that the carrying value of investment property as of December 31, 2024 is still relevant and reflects its fair value, because based on observations at the location of the investment property object, there are no significant changes in the environment around the investment property object that could have an impact on increasing the value of the investment property. Therefore, the Group did not conduct an Investment Property valuation in 2024 through an independent Public Appraisal Service

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

14. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

Penilaian atas nilai wajar properti investasi pada entitas anak PT Pelita Indonesia Djaya untuk tahun berjalan dilakukan oleh penilai independen berdasarkan laporannya Nomor 00151/2.0167-05/PI/05/0638/I/XII/2023, Nomor 00152/2.0167-05/PI/05/0638/I/XII/2023 dan Nomor 00153/2.0167-05/PI/05/0638/I/XII/2023, masing-masing tanggal 28 Desember 2023. Peningkatan nilai wajar tanah dan bangunan Rp3.275.470.385 diakui sebagai keuntungan surplus nilai wajar pada kelompok pendapatan non usaha pada tahun terjadinya.

Pada tahun buku 2024, Entitas Anak Perusahaan PT PBM Sarana Bandar Nasional telah melakukan perubahan kebijakan penyajian aset tanah dan bangunan untuk direntalkan, dari aset tetap ke properti investasi dan selanjutnya pengukurannya dicatat dengan menggunakan nilai wajar. Perubahan tersebut berlaku secara prospektif, keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

Berdasarkan laporan penilaian aset tanah dan bangunan oleh penilai independen bernomor 000397/2.0053-00/PI/05/0506/1/XII/2024, tanggal 17 Desember 2024, nilai wajar tanah dan bangunan yang berlokasi di Banyuwangi sebesar Rp8.054.666.000, nilai wajar tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Bugis dan Green Sedayu, Jakarta, sebesar Rp16.224.688.000. Peningkatan nilai wajar tanah dan bangunan sebesar Rp8.658.620.004 diakui sebagai keuntungan surplus nilai wajar pada kelompok pendapatan non usaha pada tahun terjadinya.

14. INVESTMENT PROPERTIES (continued)

The appraisal of the fair value of investment properties in subsidiaries of PT Pelita Indonesia Djaya for the current year was conducted by an independent appraiser based on its reports Number 00151/2.0167-05/PI/05/0638/I/XII/2023, Number 00152/2.0167-05/PI/05/0638/I/XII/2023 and Number 00153/2.0167-05/PI/05/0638/I/XII/2023, each dated December 28, 2023. The increase in fair value of land and building of Rp3,275,470,385 was recognized as fair value surplus gain in non-business income group in the year of occurrence.

In the 2024, the Subsidiary Entity PT PBM Sarana Bandar Nasional has changed the policy of presenting land and building assets for rental, from fixed assets to investment properties and then the measurement is recorded using fair value. In the 2024 financial year, the Subsidiary Entity PT PBM Sarana Bandar Nasional has changed the policy of presenting land and building assets for rental, from fixed assets to investment properties and then the measurement is recorded using fair value.

Based on the land and building asset valuation report by an independent appraiser numbered 000397/2.0053-00/PI/05/0506/1/XII/2024, dated December 17, 2024, the fair value of land and buildings located in Banyuwangi is Rp8,054,666,000, the fair value of land and buildings located on Jalan Bugis and Green Sedayu, Jakarta, is Rp16,224,688,000. The increase in the fair value of land and buildings by Rp8,658,620,004 was recognized as a fair value surplus gain in the non-operating income group in the year it occurred.

2024					
	Nilai Tercatat/ Book Value	Reklasifikasi/ Reclassification	Nilai Wajar/ Fair Value	Kenaikan (Penurunan) atas Nilai Wajar/ Increase (Decrease) of Fair Value	
Entitas Induk					Parent Entity
Tanah	138.550.040.000	22.000.000	139.696.400.000	1.146.360.000	Land
Gedung	22.171.190.000	-	21.230.583.000	(940.607.000)	Building
Sub Jumlah	160.721.230.000	22.000.000	160.926.983.000	205.753.000	Sub Total
Entitas Anak					Subsidiary
Tanah	132.329.700.000	-	35.206.677.000	97.123.023.000	Land
Gedung	21.168.600.000	-	12.408.674.575	8.759.925.425	Building
Sub Jumlah	153.498.300.000	-	47.615.351.575	105.882.948.425	Sub Total
Jumlah	314.219.530.000	22.000.000	208.542.334.575	106.088.701.425	Total

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

14. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

14. INVESTMENT PROPERTIES (continued)

2023				
	Nilai Tercatat/ Book Value	Reklasifikasi/ Reclassification	Nilai Wajar/ Fair Value	Kenaikan (Penurunan) atas Nilai Wajar/ Increase (Decrease) of Fair Value
Entitas Induk				Parent Entity
Tanah	132.329.700.000	3.335.000	138.550.040.000	6.217.005.000 Land
Gedung	21.168.600.000	3.945.000	22.171.190.000	998.645.000 Building
Sub Jumlah	153.505.580.000	7.280.000	160.721.230.000	7.215.650.000 Sub Total
Entitas Anak				Subsidiary
Tanah	17.861.054.614	-	20.302.417.000	2.441.362.386 Land
Gedung	2.080.475.001	-	2.914.583.000	834.107.999 Building
Sub Jumlah	19.941.529.615	-	23.217.000.000	3.275.470.385 Sub Total
Jumlah	173.447.109.615	7.280.000	183.938.230.000	10.491.120.385 Total

15. ALAT PRODUKSI

15. PRODUCTION EQUIPMENT

2024				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Reduction	Saldo Akhir/ Ending Balance
Biaya Perolehan/ Acquisition Cost:				
<u>Perolehan Langsung/ Direct Acquisition</u>				
Kapal Penumpang/ Passanger Ship	8.405.267.544.881	286.799.430.980	(417.120.000)	7.298.526.822 8.698.948.382.683
Kapal Kargo/Cargo Ship	448.496.277.703	9.764.008.846	(23.116.252.376)	- 435.144.034.173
Kontainer/Container	154.694.553.376	2.381.219.679	(266.000.000)	- 156.809.773.055
Alat Produksi Lainnya/ Other Production Tools	204.016.792.209	8.319.088.250	3.579.182.871	- 208.756.697.588
Sub Jumlah/Sub Total	9.212.475.168.169	307.263.747.755	(20.220.189.505)	7.298.526.822 9.499.658.887.499
Aset Dalam Konstruksi/ Assets Under Construction	59.940.000	-	-	- 59.940.000
<u>Sewa Pembiayaan/ Leasing Financing</u>				
Kendaraan Bermotor/ Vehicle	39.325.000.357	3.187.875.298	(7.236.908.467)	- 35.275.967.188
Jumlah/Total	9.251.860.108.526	310.451.623.053	(27.457.097.972)	7.298.526.822 9.534.994.794.687

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

15. ALAT PRODUKSI (lanjutan)

15. PRODUCTION EQUIPMENT (continued)

	2024				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Reduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Akum. Penyusutan dan Penurunan Nilai/ Accum. Depreciation and Impairment:					
Kapal Penumpang/ Passanger Ship	6.748.691.116.645	320.560.583.941	-	3.900.150.272	7.073.151.850.858
Kapal Kargo/Cargo Ship	141.205.499.366	25.708.873.752	(22.562.500.489)	-	144.351.872.629
Kontainer/Container	98.396.101.002	7.093.396.410	266.000.000	-	105.223.497.412
Alat Produksi Lainnya Other Production Tools	86.580.812.373	19.600.990.286	(2.514.215.753)	-	103.667.586.906
Sub Jumlah/Sub Total	7.074.873.529.386	372.963.844.389	(24.810.716.242)	3.900.150.272	7.426.394.807.805
Sewa Pembiayaan/ Leasing Financing					
Kendaraan Bermotor/ Vehicle	19.209.974.471	6.093.736.151	6.426.973.949	-	18.876.736.673
Nilai Buku/Book Value	2.157.776.604.669	(68.605.957.487)	(9.073.355.679)	3.398.376.550	2.089.723.250.209
	2023				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Reduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Biaya Perolehan/ Acquisition Cost: Perolehan Langsung/ Direct Acquisition					
Kapal Penumpang/ Passanger Ship	8.306.137.056.172	117.450.548.029	-	(18.320.059.320)	8.405.267.544.881
Kapal Kargo/Cargo Ship	460.664.245.248	711.468.500	(12.879.436.045)	-	448.496.277.703
Kontainer/Container	100.177.696.237	24.365.375.811	-	30.151.481.328	154.694.553.376
Alat Produksi Lainnya/ Other Production Tools	155.556.954.983	50.633.108.451	(25.124.898)	(2.148.146.327)	204.016.792.209
Sub Jumlah/Sub Total	9.022.535.952.640	193.160.500.791	(12.904.560.943)	9.683.275.681	9.212.475.168.169
Aset Dalam Konstruksi/ Assets Under Construction	45.000.000	59.940.000	(45.000.000)	-	59.940.000
Sewa Pembiayaan/ Leasing Financing					
Kendaraan Bermotor/ Vehicle	46.803.495.616	2.746.999.668	(10.225.494.927)	-	39.325.000.357
Jumlah/Total	9.069.384.448.256	195.967.440.459	(23.175.055.870)	9.683.275.681	9.251.860.108.526

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

15. ALAT PRODUKSI (lanjutan)

15. PRODUCTION EQUIPMENT (continued)

	2023				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Reduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Akum. Penyusutan dan Penurunan Nilai/ Accum. Depreciation and Impairment:					
Kapal Penumpang/ Passanger Ship	6.386.995.626.849	380.015.549.114	-	(18.320.059.318)	6.748.691.116.645
Kapal Kargo/Cargo Ship	126.678.774.356	26.293.083.665	(11.766.358.655)	-	141.205.499.366
Kontainer/Container	58.006.897.027	10.195.449.147		30.193.754.828	98.396.101.002
Alat Produksi Lainnya Other Production Tools	69.439.515.419	19.291.351.119	(25.125.395)	(2.124.928.770)	86.580.812.373
Sub Jumlah/Sub Total	6.641.120.813.651	435.795.433.045	(11.791.484.050)	9.748.766.740	7.074.873.529.386

**Sewa Pembiayaan/
Leasing Financing**

Kendaraan Bermotor/ Vehicle	20.801.996.889	8.684.917.358	(10.276.939.776)	-	19.209.974.471
Nilai Buku/Book Value	2.407.461.637.716	(248.512.909.944)	(1.106.632.044)	(65.491.059)	2.157.776.604.669

Beban penyusutan dialokasikan pada:

Depreciation expense is allocated to:

	2024	2023	
Beban Pokok Pendapatan Usaha	367.918.373.553	428.276.086.972	Cost of Revenue
Beban Umum dan Administrasi	11.139.206.987	16.204.263.431	General and Administrative Expense
Jumlah	379.057.580.540	444.480.350.403	Total

Lihat Catatan 36 dan 37.

See Note 36 and 37

Berkurangnya Kapal Kargo karena atas penjualan KM.Caraka Jaya Niaga III-22. Sesuai Surat No. S-499/MBU/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024, perihal Persetujuan Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan KM. Caraka Jaya Niaga III-22.

Reduction of Cargo Ship due to the sale of KM Caraka Jaya Niaga III-22. In accordance with Letter No. S-499/MBU/10/2024 dated October 11, 2024, regarding Approval for the Write-off and Transfer of KM. Caraka Jaya Niaga III-22.

Berkurangnya alat produksi lainnya merupakan telah berakhirnya pengakuan alat produksi sehubungan berakhirnya masa jangka waktu penggunaannya pada Entitas Anak Perusahaan (PT SBN) dan pelepasan Alat Produksi Lainnya pada Entitas Anak Perusahaan (PT SBN).

The decrease in other production equipment represents the end of recognition of production equipment due to the expiration of the period of its use in the Subsidiary Company (PT SBN) and the disposal of Other Production Equipment in the Subsidiary Company (PT SBN).

Penambahan Kapal Penumpang adalah pemasangan suku cadang yang dikapitalisasi sesuai ketentuan Perseroan.

Passenger Vessel Addition is the installation of spare parts that are capitalised in accordance with the Company's provisions.

Penambahan Kapal Penumpang merupakan reklasifikasi penyajian kapal Phinisi pada Entitas Anak Perusahaan (PT PID) dari Aset Tetap ke Alat Produksi.

Addition of Passenger Vessels represents the reclassification of Phinisi vessels in a subsidiary (PT PID) from Fixed Assets to Production Equipment.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

15. ALAT PRODUKSI (lanjutan)

Penambahan Kontainer pada Perusahaan Induk PT PELNI sebesar Rp.1.050.185.199 dan Entitas Anak Perusahaan (PT SBN) sebesar Rp.1.331.034.480.

Penambahan Alat Produksi Lainnya merupakan penambahan Alat Reachstaker dan alat angkutan darat di Entitas Anak Perusahaan (PT SBN).

Penambahan dan pengurangan alat produksi melalui sewa pembiayaan merupakan penambahan dan pelepasan kendaraan pada Entitas Anak Perusahaan (PT PID).

Penambahan Kapal Penumpang tahun 2023 merupakan suku cadang untuk kapal penumpang sebesar Rp107.573.775.033 dan suku cadang perbaikan kapal penumpang sebesar Rp9.886.772.996

Pengurangan Alat Produksi Kapal Kargo tahun 2023 merupakan penjualan KM Caraka J.N.III-32.

Penambahan Alat Produksi Lainnya tahun 2023, antara

- a. 4 unit Trailer 40 feet, 5 unit trailer 20 feet, dan 1 unit trailer 20 feet type rangka sesuai kontrak No. SBN/AGR/08.28-01/2023.
- b. 2 unit truck sesuai kontrak No. SBN/AGR/08.28-02/2023.
- c. 3 unit head truck sesuai kontrak No. SPK/AGR/08.18-02/2023.
- d. 3 unit head truck sesuai kontrak No. SPK/AGR/09.15-01/2023.
- e. 1 unit truck sesuai kontrak No. SPK/SBN/PBJ/21.02/XII/2022.

Reklasifikasi Alat Produksi tahun 2023, antara Lain:

- a. Alat Produksi Kapal Penumpang ke Kontainer sebesar Rp18.320.059.320.
- b. Aset Tetap Kendaraan Bermotor ke Alat Produksi Kontainer sebesar Rp12.435.927.534.
- c. Alat Produksi Kontainer ke Aset Tidak Produktif sebesar Rp604.505.526.
- d. Alat Produksi Lainnya ke Aset Tidak Produktif sebesar Rp2.148.146.327.
- e. Penambahan Aset Kontainer tahun 2023 sebesar Rp16.897.875.811 yang dimiliki oleh Entitas Induk PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan sebesar Rp7.467.500.000 yang dimiliki oleh Entitas Anak PT PBM Sarana Bandar Nasional.

15. PRODUCTION EQUIPMENT (continued)

The addition of Containers at the Parent Company PT PELNI amounting to Rp.1,050,185,199 and Subsidiary Company (PT SBN) amounting to Rp.1,331,034,480.

The addition of Other Production Equipment represents the addition of Reach Stacker and land transport equipment in the Subsidiary Company (PT SBN).

Additions and reductions of production equipment through finance leases represent additions and disposals of vehicles at a subsidiary (PT PID).

Addition of Production Equipment for Cargo Vessels in 2023 Spare Parts for Cargo Vessels amounting to Rp107,573,775,033 and Repair of Passenger Parts amounting to Rp9,886,772,996.

Reduction of Cargo Ship Production Equipment in 2023 is the sale of KM Caraka J.N.III-32.

Addition of Forklift Equipment in 2023, including:

- a. 4 units of 40 feet trailer, 5 units of 20 feet trailer, and 1 unit of frame type 20 feet trailer according to contract No. SBN/AGR/08.28-01/2023.
- b. 2 trucks according to contract no. SBN/AGR/08.28-02/2023.
- c. 3 head truck units according to contract no. SPK/AGR/08.18-02/2023.
- d. 3 head truck units according to contract no. SPK/AGR/09.15-01/2023.
- e. 1 truck unit according to contract no. SPK/SBN/PBJ/21.02/XII/2022.

Reclassification of Production Equipment in 2023 Among Others:

- a Passenger Ship to Container Production Equipment Amounting to Rp18,320,059,320.
- b Motor Vehicle Fixed Assets to Container Production Equipment Rp12,435,927,534.
- c Container Production Equipment to Non-Productive Assets Amounting to Rp604,505,526.
- d Other Production Equipment to Non-Productive Assets Amounting to Rp2,148,146,327.
- e Addition of Container Assets in 2023 Amounted to Rp16,897,875,811 Owned by Parent Entity PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Amounted to Rp7,467,500,000 Owned by Subsidiary Entity PT PBM Sarana Bandar Nasional.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

15. ALAT PRODUKSI (lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai tercatat alat produksi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masih dibawah nilai wajarnya.

Alat produksi berupa armada kapal diasuransikan pada PT ACA Asuransi untuk tahun 2024 dan PT Asuransi Kredit Indonesia pada tahun 2023, dan Grup berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan cukup memadai untuk menutupi kemungkinan timbulnya kerugian

Tidak terdapat alat produksi yang digunakan sebagai jaminan atas kewajiban/pinjaman Grup.

15. PRODUCTION EQUIPMENT (continued)

Management believes that the carrying value of production equipment as of December 31, 2024, and 2023 is still below its fair value.

The production equipment in the form of the fleet of ships is insured with PT ACA Insurance for 2024 and PT Asuransi Kredit Indonesia for 2023. The Group believes that the coverage amount is sufficient to cover potential losses related to the insured assets.

There are no production assets used as collateral for the Group's obligations/loans.

16. ASET TETAP

16. FIXED ASSETS

	2024				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Reduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Biaya Perolehan/Acquisition Cost:					
<u>Perolehan Langsung/Direct Acquisition</u>					
Tanah/Land	39.617.173.648	2.745.000.000	-	9.199.621.398	51.561.795.046
Gedung/Building	283.696.455.544	27.774.866.591	-	(23.754.673.261)	287.716.648.874
Kendaraan Bermotor/Vehicle	37.671.682.680	1.552.480.905	(2.341.627.500)	(10.042.761.608)	26.839.774.477
Inventaris Kantor/Office Inventory	136.826.625.723	25.258.638.890	(4.758.427.905)	(3.328.427.337)	153.998.409.371
Aset Tetap Lainnya/ Other Fixed Asset	26.215.165.326	6.762.531.921	-	(830.006.320)	32.147.690.927
Sub Jumlah/Sub Total	524.027.102.921	64.093.518.307	(7.100.055.405)	(28.756.247.128)	552.264.318.695
Aset Dalam Konstruksi/					
<u>Assets Under Construction</u>					
	40.636.897.739	14.519.148.539	-	(3.298.740.000)	51.857.306.278
Jumlah/Total	564.664.000.660	78.612.666.846	(7.100.055.405)	(32.054.987.128)	604.121.624.973
Akumulasi Penyusutan dan					
<u>Penurunan Nilai/Accumulated</u>					
<u>Depreciation and Impairment:</u>					
Gedung/Building	117.628.495.417	7.785.631.986	-	(5.275.108.126)	120.139.019.277
Kendaraan Bermotor/Vehicle	30.859.828.185	884.928.238	(2.341.627.500)	(5.546.388.719)	23.856.740.204
Inventaris Kantor/Office Inventory	94.919.321.770	12.758.613.086	(4.758.427.905)	(3.251.170.607)	99.668.336.344
Aset Tetap Lainnya/ Other Fixed Asset	23.235.681.835	995.209.716	-	(830.006.320)	23.400.885.231
Sub Jumlah/Sub Total	266.643.327.207	22.424.383.026	(7.100.055.405)	(14.902.673.772)	267.064.981.056
Nilai Buku/Book Value	298.020.673.453				337.056.643.917

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

16. ASET TETAP (lanjutan)

16. FIXED ASSETS (continued)

	2023				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Reduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Biaya Perolehan/Acquisition Cost:					
<u>Perolehan Langsung/Direct Acquisition</u>					
Tanah/Land	37.361.635.237	50.783.695	-	2.204.754.716	39.617.173.648
Gedung/Building	266.123.266.227	15.173.726.797	-	2.399.462.520	283.696.455.544
Kendaraan Bermotor/Vehicle	49.720.287.181	910.533.033	150.000.000	(12.809.137.534)	37.671.682.680
Inventaris Kantor/Office Inventory	119.050.075.279	17.572.573.978	16.198.000	220.174.466	136.826.625.723
Aset Tetap Lainnya/ Other Fixed Asset	25.534.321.496	708.250.330	-	(27.406.500)	26.215.165.326
Sub Jumlah/Sub Total	497.789.585.420	34.415.867.833	166.198.000	(8.012.152.332)	524.027.102.921
Aset Dalam Konstruksi/ Assets Under Construction	29.315.323.617	18.650.641.356	-	(7.329.067.234)	40.636.897.739
Jumlah/Total	527.104.909.037	53.066.509.189	166.198.000	(15.341.219.566)	564.664.000.660
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai/Accumulated Depreciation and Impairment:					
Gedung/Building	110.496.576.496	7.135.864.401	-	(3.945.480)	117.628.495.417
Kendaraan Bermotor/Vehicle	41.671.876.222	2.147.089.497	150.000.000	(12.809.137.534)	30.859.828.185
Inventaris Kantor/Office Inventory	85.009.835.144	10.778.149.365	(16.198.000)	(852.464.739)	94.919.321.770
Aset Tetap Lainnya/ Other Fixed Asset	22.498.094.619	755.744.019	-	(18.156.803)	23.235.681.835
Sub Jumlah/Sub Total	259.676.382.481	20.816.847.282	133.802.000	(13.683.704.556)	266.643.327.207
Nilai Buku/Book Value	267.428.526.556				298.020.673.453

Penambahan Tanah merupakan kapitalisasi dari pengurusan sertifikat tanah di Balikpapan.

The addition of land represents the capitalization of land certificate processing in Balikpapan.

Penambahan Jalan dan Bangunan merupakan kapitalisasi biaya renovasi dan bangunan baru di Kantor Pusat dan Cabang PT PELNI.

The addition of Roads and Buildings represents the capitalization of renovation costs and new constructions at the Head Office and Branches of PT PELNI.

Penambahan Alat angkut di Entitas Anak Perusahaan (PT SBN).

The addition of Transportation Equipment at the Subsidiary Entity (PT SBN).

Penambahan pada Peralatan Elektronik merupakan pengadaan peralatan elektronik dan perabot kantor di Induk Perusahaan PT PELNI dan Entitas Anak Perusahaan (PT SBN dan PT PID).

The addition to Electronic Equipment represents the procurement of electronic devices and office furniture at the Parent Company PT PELNI and its Subsidiaries (PT SBN and PT PID).

Penambahan Aset Tetap Lainnya merupakan pengadaan peralatan perbengkelan di SBU Galangan Surya.

The addition to Other Fixed Assets represents the procurement of workshop equipment at SBU Galangan Surya.

Pengurangan pada Aset Kendaraan Bermotor adalah pelepasan kendaraan bermotor di Induk Perusahaan PT PELNI dan Entitas Anak Perusahaan (PT PID).

The reduction in Motor Vehicle Assets is due to the disposal of motor vehicles at the Parent Company PT PELNI and its Subsidiary (PT PID).

Pengurangan pada Inventaris Kantor di Induk Perusahaan PT PELNI.

The reduction in Office Inventory is at the Parent Company PT PELNI.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

16. ASET TETAP (lanjutan)

Penambahan pada aset tanah merupakan reklasifikasi penyajian yang sebelumnya melekat di Bangunan disajikan tersendiri sebagai aset tanah di Entitas Anak Perusahaan (PT PID).

Pengurangan pada Jalan dan Bangunan merupakan reklasifikasi penyajian bangunan menjadi properti investasi di Entitas Anak Perusahaan (PT PID).

Termasuk didalam pengurangan aset kendaraan bermotor adalah reklasifikasi penyajian aset Phinisi ke Alat Produksi pada kelompok Kapal Penumpang.

Pengurangan pada Inventaris Kantor merupakan reklasifikasi ke Aset Tetap Tidak Produktif.

Penambahan gedung tahun 2023, antara lain gedung yang dimiliki oleh entitas induk PT Pelayaran Indonesia (Persero) sebesar Rp14.238.726.797 dan entitas anak PT PBM Sarana Bandar Nasional Sebesar Rp935.000.000

Reklasifikasi aset tetap tahun 2023, antara lain:

- Aset dalam konstruksi Ke tanah sebesar Rp2.204.754.716
- Aset tetap ke alat produksi kontainer sebesar Rp12.435.927.534 dan aset tidak produktif sebesar Rp.373.210.000
- Inventaris Kantor Ke Aset Tidak Produktif Sebesar Rp.99.080.034

Penambahan Peralatan Elektronik tahun 2023, antara lain: 6 unit PC komputer sebesar Rp43.800.000, 35 unit Laptop sebesar Rp387.979.000, 3 unit Proyektor sebesar Rp36.946.000, 3 unit laptop sebesar Rp16.100.000.

Reklasifikasi ke Properti Investasi tahun 2023 milik entitas induk terdiri dari tanah Jl.Hasanudin No.29 Medan Sumatera Utara sebesar Rp3.335.000 dan bangunan sebesar Rp3.945.480.

Perseroan menilai tidak terdapat indikasi penurunan nilai pada aset tetap sehingga Perseroan tidak melakukan penilaian kembali dan tidak perlu membentuk cadangan kerugian penurunan nilai pada tahun berjalan.

Beban penyusutan dialokasikan pada:

	2024	2023
Beban Pokok Pendapatan Usaha	1.324.009.396	1.087.789.443
Beban Umum dan Administrasi	21.100.373.630	19.729.057.839
Jumlah	22.424.383.026	20.816.847.282

Lihat Catatan 36 da 37.

16. FIXED ASSETS (continued)

The addition to land assets represents a reclassification, where previously the land was presented as part of Buildings and is now separately presented as land assets at the Subsidiary (PT PID).

The reduction in Roads and Buildings represents a reclassification of buildings to investment property at the Subsidiary (PT PID).

Included in the reduction of motor vehicle assets is the reclassification of the Phinisi asset to Production Equipment under the Passenger Ship category.

The reduction in Office Inventory represents a reclassification to Non-Productive Fixed Assets.

Additional buildings in 2023 include buildings owned by the parent entity PT Pelayaran Indonesia (Persero) amounting to Rp14,238,726,797 and the subsidiary PT PBM Sarana Bandar Nasional amounting to Rp935,000,000

Reclassification of Fixed Assets in 2023 Among Others:

- Assets under construction to land amounting to Rp2,204,754,716
- Fixed Assets to Container Production Equipment amounted to Rp12,435,927,534 and non-productive assets amounted to Rp373,210,000
- Office Inventory to non-productive Assets Rp99,080,034

Additional Electronic Equipment in 2023, including: 6 PC computers amounting to Rp43,800,000, 35 laptop units amounting to Rp387,979,000, 3 projector units amounting to Rp36,946,000, 3 laptop units amounting to Rp16,100,000.

Reclassification to Investment Property in 2023 belonging to the parent entity consists of land on Jl. Hasanudin No. 29 Medan, North Sumatra amounting to Rp3,335,000 and buildings amounting to Rp3,945,480.

The company assesses no indication of impairment on fixed assets so that the company does not re evaluate and does not need to form a reserve of impairment losses in the year.

Depreciation expense is allocated to:

Cost of Revenue
General and Administrative Expense
Total

See Note 36 and 37.

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

17. ASET TAKBERWUJUD

17. INTANGIBLE ASSETS

	2024				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Reduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Biaya Perolehan / Acquisition Cost:					
Perangkat lunak/Software	40.926.604.736	3.690.645.080	-	1.416.970.000	46.034.219.816
HGB/Building Rights	2.930.535.430	93.000.000	-	-	3.023.535.430
Sub Jumlah/Sub Total	43.857.140.166	3.783.645.080	-	1.416.970.000	49.057.755.246
Aset Dalam Konstruksi/					
<i>Assets Under Construction</i>	7.135.728.560	1.625.309.350	-	(1.416.970.000)	7.344.067.910
Sub Jumlah/Sub Total	7.135.728.560	1.625.309.350	-	(1.416.970.000)	7.344.067.910
Akumulasi Amortisasi/					
<i>Amortization Accumulated:</i>					
Perangkat lunak/Software	29.908.210.036	4.751.595.945	-	-	34.659.805.981
HGB/Building Rights	2.790.260.330	6.095.541	-	-	2.796.355.871
Sub Jumlah/Sub Total	32.698.470.366	4.757.691.486	-	-	37.456.161.852
Nilai Buku/Book Value	18.294.398.360				18.945.661.304
	2023				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Reduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Biaya Perolehan / Acquisition Cost:					
Perangkat lunak/Software	40.013.704.736	1.290.900.000	-	(378.000.000)	40.926.604.736
HGB/Building Rights	2.925.863.688	4.671.742	-	-	2.930.535.430
Sub Jumlah/Sub Total	42.939.568.424	1.295.571.742	-	(378.000.000)	43.857.140.166
Aset Dalam Konstruksi/					
<i>Assets Under Construction</i>	6.868.737.560	266.991.000	-	-	7.135.728.560
Sub Jumlah/Sub Total	49.808.305.984	266.991.000	-	-	50.992.868.726
Akumulasi Amortisasi/					
<i>Amortization Accumulated:</i>					
Perangkat lunak/Software	26.204.399.978	3.703.810.058	-	-	29.908.210.036
HGB/Building Rights	2.784.681.455	5.578.875	-	-	2.790.260.330
Sub Jumlah/Sub Total	28.989.081.433	3.709.388.933	-	-	32.698.470.366
Nilai Buku/Book Value	20.819.224.551				18.294.398.360

Beban amortisasi dialokasikan pada:

Amortization expense is allocated to:

	2024	2023	
Beban Pokok Pendapatan Usaha	231.800.237	231.800.236	Cost of Revenue
Beban Umum dan Administrasi	4.528.118.770	3.477.588.697	General and Administrative Expense
Pendapatan Non-Usaha	(2.227.521)	-	Non-Business Income
Jumlah	4.757.691.486	3.709.388.933	Total

Lihat Catatan 36 dan 37.

See Note 36 and 37.

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

18. ASET HAK GUNA

18. RIGHT OF USE ASSETS

	2024				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Reduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Biaya Perolehan / Acquisition Cost:					
Gedung/ Building	4.559.678.090	2.051.238.982	771.387.859	-	5.839.529.213
Alat Angkut/ Vehicle	2.155.142.931	3.100.908.496	1.008.068.868	-	4.247.982.559
Sub Jumlah/Sub Total	6.714.821.021	5.152.147.478	1.779.456.727	-	10.087.511.772
Akumulasi Amortisasi/ Amortization Accumulated:					
Gedung/ Building	2.004.962.929	579.675.616	771.387.860	-	1.813.250.685
Alat Angkut/ Vehicle	806.428.224	3.401.418.586	1.008.068.867	-	3.199.777.943
Sub Jumlah/Sub Total	2.811.391.153	3.981.094.202	1.779.456.727	-	5.013.028.628
Nilai Buku/Book Value	3.903.429.868				5.074.483.144
	2023				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Reduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Biaya Perolehan / Acquisition Cost:					
Tanah/ Land	672.000.000	-	-	-	672.000.000
Gedung/ Building	170.000.000	3.717.678.090	-	-	3.887.678.090
Alat Angkut/ Vehicle	2.155.142.931	-	-	-	2.155.142.931
Sub Jumlah/Sub Total	2.997.142.931	3.717.678.090	-	-	6.714.821.021
Akumulasi Amortisasi/ Amortization Accumulated:					
Tanah/ Land	196.000.000	-	-	-	196.000.000
Gedung/ Building	155.833.330	1.653.129.599	-	-	1.808.962.929
Alat Angkut/ Vehicle	302.393.790	504.034.434	-	-	806.428.224
Sub Jumlah/Sub Total	654.227.120	2.157.164.033	-	-	2.811.391.153
Nilai Buku/Book Value	2.342.915.811				3.903.429.868

Penambahan aset hak guna usaha tahun 2024 merupakan objek sewa kantor di Batulicin dengan masa selama 2 (dua) tahun sejak 11 November 2024 hingga 10 November 2026, objek sewa 3 kendaraan untuk PT SBN dengan masa sewa selama 2 (dua) tahun sejak 22 Desember 2023 hingga 21 Desember 2025.

The addition of leasehold assets in 2024 is an office lease object in Batulicin with a period of 2 (two) years from November 11, 2024 to November 10, 2026, a lease object for 3 vehicles for PT SBN with a lease period of 2 (two) years from December 22, 2023 to December 21, 2025.

Penambahan aset hak guna usaha tahun 2023 merupakan objek sewa lahan penumpukan container di Tanjung Priok dengan masa sewa selama 3 (tiga) tahun sejak 01 Juni 2023 hingga 31 Mei 2026, dan objek sewa aset untuk PT SBI dengan masa sewa selama 2 (dua) tahun sejak 01 Januari 2023 hingga 31 Desember 2024.

The addition of leasehold assets in 2023 is a lease object for container stacking land in Tanjung Priok with a lease period of 3 (three) years from June 01, 2023 to May 31, 2026, and an asset lease object for PT SBI with a lease period of 2 (two) years from January 01, 2023 to December 31, 2024.

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

18. ASET HAK GUNA (lanjutan)

Penambahan aset hak guna usaha tahun 2022 merupakan objek sewa kendaraan untuk PT SBI dengan masa sewa selama 3 (tiga) tahun sejak 01 November 2022 hingga 31 Oktober 2025 dan objek sewa kendaraan untuk PT SBL dengan masa sewa selama 3 (tiga) tahun sejak 30 Desember 2022 hingga 29 Desember 2025.

Pengurangan aset hak guna usaha tahun 2024 merupakan objek sewa lahan di Surabaya, bangunan di Tarakan dan offset aset hak guna bangunan di Jakarta yang sudah habis masa sewanya.

Nilai perolehan dicatat sebesar nilai dibayar dimuka pada saat melakukan perjanjian sewa, nilai amortisasi dicatat sebesar perhitungan amortisasi dari awal masa sewa sampai dengan akhir masa sewa.

Beban amortisasi dialokasikan pada:

	2024	2023
Beban Pokok Pendapatan Usaha	1.800.116.159	194.306.276
Beban Umum dan Administrasi	2.180.978.043	1.962.857.757
Jumlah	3.981.094.202	2.157.164.033

Lihat Catatan 36 dan 37.

18. RIGHT OF USE ASSETS (continued)

The addition of leasehold assets in 2022 is a vehicle lease object for PT SBI with a lease period of 3 (three) years from November 01, 2022 to October 31, 2025 and a vehicle lease object for PT SBL with a lease period of 3 (three) years from December 30, 2022 to December 29, 2025.

The reduction of leasehold assets in 2024 is the object of land leases in Surabaya, buildings in Tarakan and the offset of building use rights assets in Jakarta whose leases have expired.

The acquisition value is recorded at the prepaid value at the time of entering into a lease agreement, the amortization value is recorded at the amortization calculation from the beginning of the lease period to the end of the lease period.

Amortization expense is allocated to:

Cost of Revenue
General and Administrative Expense
Ending Balance

19. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Biaya Perolehan:		
Piutang Usaha Tak Tertagih	87.909.366.196	85.232.771.433
Aset Tetap Tidak Berfungsi	50.929.997.768	45.518.725.354
Persediaan Tidak Dapat Digunakan	6.108.570.600	6.108.570.600
Lainnya	116.682.790	43.670.650
Jumlah	145.064.617.354	136.903.738.037
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai		
Piutang Usaha		
Tak Tertagih	(87.909.366.196)	(85.232.771.433)
Aset Tetap Tidak Berfungsi	(50.891.208.467)	(45.492.725.254)
Persediaan Tidak Dapat Digunakan	(6.108.570.600)	(6.108.570.600)
Jumlah	(144.909.145.263)	(136.834.067.287)
Nilai Buku	155.472.091	69.670.750

Acquisition Cost:
Account Receivable Not Collectible
Fixed Assets Damage
Inventory Damaged
Other
Total

Accumulated Depreciation and Impairment
Account Receivable
Not Collectible
Fixed Assets Damage
Inventory Damaged
Total
Book Value

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

19. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (lanjutan)

Piutang usaha yang tercatat pada aset tidak lancar lainnya merupakan piutang usaha tidak tertagih milik entitas induk sebesar Rp86.266.691.974 dan entitas anak (PT Pelita Indonesia Djaya) sebesar Rp1.642.674.222.

Aset tetap tidak produktif yang tercatat pada aset tidak lancar lainnya merupakan aset tetap yang tidak digunakan milik entitas induk sebesar Rp44.767.936.801 dan entitas anak (PT Sarana Bandar Nasional) sebesar Rp6.162.060.967.

Pengurangan Aset Tidak Lancar Lainnya Kapal Kargo merupakan penjualan KM Caraka J.N.III-4.

Persediaan tidak produktif yang tercatat pada aset tidak lancar lainnya merupakan persediaan yang tidak dapat digunakan milik entitas induk sebesar Rp6.108.570.600.

19. OTHER NON CURRENT ASSETS (continued)

Trade receivables recorded in other non-current assets represent uncollectible trade receivables of the parent entity amounting to Rp86,266,691,974 and subsidiary (PT Pelita Indonesia Djaya) amounting to Rp1,642,674,222.

Non-productive fixed assets recorded in other non-current assets represent unused fixed assets of the parent entity amounting to Rp44,767,936,801 and subsidiary (PT Sarana Bandar Nasional) amounting to Rp6,162,060,967.

Reduction of Other Non-Current Assets for Cargo Ships is the sale of KM Caraka J.N.III-4.

Non-productive inventories recorded in other non-current assets represent unusable inventories of the parent entity amounting to Rp6,108,570,600.

20. PINJAMAN JANGKA PENDEK

20. SHORT-TERM LOANS

	<u>31 Desember/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	7.000.000.000	22.000.000.000	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
Jumlah	<u>7.000.000.000</u>	<u>22.000.000.000</u>	Total

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pinjaman jangka pendek merupakan utang kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp22.500.000.000 dengan nomor surat RCO.JKB/0099/KMK/2021 dengan Tingkat suku bunga: 9,50% per tahun. Jangka Waktu Kredit 19 Juni 2023 s/d 18 Juni 2024 (12 bulan). Tujuan penggunaan kredit yaitu pembiayaan kebutuhan produktif usaha food and beverages, outshourching service, car rent, wisata, informastion technology service management (ITSM), maintenance service, crewing dan usaha penunjang lainnya untuk pelayani PT Peln (Persero). Penerima kredit menyerahkan agunan kepada Bank sebidang tanah SHGB rumah toko 4 (empat) lantai di komplek Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok Q No. 5 Jl. Letjen Suprpto, Kel Sumur Batu Kec Kemayoran Jakarta Pusat.

Short-term loans are payable to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp22,500,000,000 with letter number RCO.JKB/0099/KMK/2021 with an interest rate of: 9.50% per annum. Credit Period June 19, 2023 to June 18, 2024 (12 months). The purpose of using credit is to finance the productive needs of the food and beverages business, outshourching service, car rental, tourism, information technology service management (ITSM), maintenance service, crewing and other supporting businesses to serve PT Peln (Persero). The credit recipient submits collateral to the Bank as a plot of land SHGB of a 4 (four) storey shop house in the Mega Wholesale Cempaka Mas Block Q No. 5 shophouse complex Jl. Letjen Suprpto, Kel Sumur Batu Kec Kemayoran Central Jakarta.

20. PINJAMAN JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (lanjutan)

Perjanjian kredit ini telah dilakukan addendum I (kesatu) dengan Nomor Akta 01, tanggal 01 April 2021, dengan jangka waktu 01 April 2021 sampai dengan 31 Maret 2022, addendum II (kedua) dengan jangka waktu tanggal 01 November 2021 sampai dengan 31 Oktober 2023 dan terakhir addendum III (ketiga), dengan Akta No. 43, tanggal 14 Juni 2024.

Addendum III, tanggal 14 Juni 2024, tentang limit kredit sebesar Rp22.500.000.000 dan perpanjangan jangka waktu kredit terhitung mulai tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025. Agunan kredit dalam bentuk:

- a. Bukan Aset Tetap, berupa seluruh tagihan/piutang usaha kepada pihak ketiga, telah diikat Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W10.00331411.AH.05.02.Tahun 2023, tanggal 5 Juli 2023 dengan nilai penjaminan sebesar Rp17.500.000.000 dan persediaan, telah diikat Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W10.00331397.AH.05.02.Tahun 2023, tanggal 5 Juli 2023 dengan nilai penjaminan sebesar Rp5.000.000.000.
- b. Aset Tetap, yaitu tanah dan bangunan ruko, terletak di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok Q, Nomor 5, Jalan Letjen Suprpto, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan bukti kepemilikan berupa: Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1488/Sumur Batu, telah diikat Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00622/2022, tanggal 12 April 2021, dengan nilai pengikatan sebesar Rp8.487.000.000.

Tanah dan bangunan villa yang terletak di Jalan Wilis (Taman Wisata) Nomor 19, Kelurahan Pecalukan, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan berupa:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00804/Pecalukan, seluas 3.915 M2;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00805/Pecalukan, seluas 3.766 M2;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00806/Pecalukan, seluas 4.488 M2;

Ketiga sertifikat tersebut telah diikat Sertifikat Hak Tanggungan I (Pertama) Nomor 02783/2021, tanggal 19 Nopember 2021 sebesar Rp9.000.000.000 dan Nomor 02459/2023, tanggal 11 September 2023 sebesar Rp750.000.000. Sehingga total pengikatan menjadi sebesar Rp9.750.000.000.

20. SHORT-TERM LOANS (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (continued)

This credit agreement has been made addendum I (first) with Deed Number 01, dated April 01, 2021, with a period of April 01, 2021 to March 31, 2022, addendum II (second) with a period of November 01, 2021 to October 31, 2023 and finally addendum III (third), with Deed No. 43, dated June 14, 2024.

Addendum III, dated June 14, 2024, regarding credit limit of Rp22,500,000,000 and extension of credit period starting from June 19, 2024 until June 18, 2025. Credit collateral in the form of:

- a. *Non-Fixed Assets, in the form of all bills/trade receivables to third parties, have been bound by Fiducia Guarantee Certificate Number W10.00331411.AH.05.02.Tahun 2023, dated July 5, 2023 with a guarantee value of Rp17,500,000,000 and inventory, have been bound by Fiducia Guarantee Certificate Number W10.00331397.AH.05.02.Tahun 2023, dated July 5, 2023 with a guarantee value of Rp5,000,000,000.*
- b. *Fixed Assets, namely land and shophouse building, located at Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok Q, Number 5, Jalan Letjen Suprpto, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Central Jakarta, with proof of ownership in the form of: Building Rights Title Certificate Number 1488/Sumur Batu, has been bound by a Collateral Rights Certificate Number 00622/2022, dated April 12, 2021, with a binding value of IDR 8.487.000.000.*

Land and villa building located at Jalan Wilis (Taman Wisata) Number 19, Pecalukan Village, Prigen District, Pasuruan Regency, East Java, with proof of ownership in the form of:

- *Building Use Right Certificate Number 00804/Pecalukan, covering an area of 3,915 M2;*
- *Building Use Right Certificate Number 00805/Pecalukan, covering an area of 3,766 M2;*
- *Building Use Right Certificate Number 00806/Pecalukan, covering an area of 4,488 M2;*

The three certificates have been bound by Mortgage Certificate I (First) Number 02783/2021, dated November 19, 2021 in the amount of IDR 9,000,000,000 and Number 02459/2023, dated September 11, 2023 in the amount of IDR 750,000,000. So that the total binding amounted to IDR 9,750,000,000.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

20. PINJAMAN JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (lanjutan)

Tanah dan Bangunan Gudang, terletak di Jalan Cakung Cilincing, Komplek Pergudangan Centra Cakung Business Parak Blok G-2, Nomor 23, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, terdaftar atas nama Perseroan Terbatas PT Pelita Indonesia Djaya, dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3461/Rorotan, seluas 305 M2, yang telah diikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp4.300.000.000 sesuai Sertipikat Hak Tanggungan I (Pertama) Nomor : 03225/2023, tanggal 21 Agustus 2023.

Tidak ada pengingkaran kewajiban oleh Grup sehubungan dengan kewajiban tersebut diatas.

20. SHORT-TERM LOANS (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (continued)

Land and Warehouse Building, located at Jalan Cakung Cilincing, Warehousing Complex Centra Cakung Business Parak Blok G-2, Number 23, Rorotan Village, Cilincing Sub-district, North Jakarta Administrative City, Special Capital Region of Jakarta Province, registered in the name of Limited Liability Company PT Pelita Indonesia Djaya, with proof of ownership in the form of Building Rights Title Certificate Number: 3461/Rorotan, covering an area of 305 M2, which has been bound by First Mortgage in the amount of Rp4,300,000,000 in accordance with the First Mortgage Rights Certificate Number: 03225/2023, dated August 21, 2023.

There is no default by the Group in respect of the above obligations.

21. UTANG USAHA

Rincian utang usaha berdasarkan pemasok, sebagai berikut:

21. TRADE PAYABLE

Details of the trade payable by supplier, as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Pihak Berelasi:		
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	3.561.323.180	6.822.642.017
PT Pertamina Patra Niaga	1.619.081.607	6.200.424.585
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	1.483.691.265	2.469.768.877
PT Rumah Sakit PELNI	1.037.383.484	-
Kepala Operasi QQ Pelabuhan	1.023.757.967	748.301.885
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)	582.245.929	600.601.583
PT Sucofindo (Persero)	537.915.000	1.237.095.000
PT Dok Perkapalan Kodja Bahari	-	1.283.022.367
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	-	716.504.276
PT Pertamina (Persero)	-	628.552.000
Lainnya (dibawah Rp500 Juta)	11.142.683.534	14.980.358.738
Sub Jumlah	20.988.081.966	35.687.271.328
Pihak Ketiga:		
PT Dalekesa Asri Cemerlang	32.949.724.944	14.228.933.709
PT ITI Marine & Oilfield Utama	14.817.399.770	1.133.740.943
PT Pancura Cahaya Wahyu	14.046.082.170	9.637.719.197
PT Jotun Indonesia	7.815.288.854	1.215.497.047
PT Global Marinedo Safety Indonesia	7.152.838.719	8.335.082.795
PT Sarana Gama Sejahtera	6.845.770.383	3.931.063.578
PT Eastern Citra Bamanara	6.394.094.893	3.614.884.964
Koperasi Bina Sejahtera	5.610.668.716	5.181.264.681
PT Tisindo Jaya	4.619.986.854	4.995.152.350
Amidis Tirta Mulia	3.954.680.456	3.176.520.756
PT Luber Sukses	3.743.255.491	2.463.028.572
Sub Jumlah - dipindahkan	107.949.791.250	57.912.888.592

Related Parties:
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
PT Pertamina Patra Niaga
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
PT Rumah Sakit PELNI
Kepala Operasi QQ Pelabuhan
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)
PT Sucofindo (Persero)
PT Dok Perkapalan Kodja Bahari
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
PT Pertamina (Persero)
Others (below Rp500 Million)
Sub total

Thrid Parties:
PT Dalekesa Asri Cemerlang
PT ITI Marine & Oilfield Utama
PT Pancura Cahaya Wahyu
PT Jotun Indonesia
PT Global Marinedo Safety Indonesia
PT Sarana Gama Sejahtera
PT Eastern Citra Bamanara
Koperasi Bina Sejahtera
PT Tisindo Jaya
Amidis Tirta Mulia
PT Luber Sukses
Total - carried forward

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

21. UTANG USAHA (lanjutan)

21. TRADE PAYABLE (continued)

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Sub Jumlah - pindahan	107.949.791.250	57.912.888.592	Total - brought forward
Pihak Ketiga:			Thrid Parties:
Tri Agung Sinergi	3.610.855.861	4.091.003.753	Tri Agung Sinergi
PT Adhitrans Prima	3.346.162.518	4.091.475.065	PT Adhitrans Prima
PT Santhi Dharma Artha	3.065.747.097	1.172.072.079	PT Shanti Dharma Artha
Insan Kencana Perdana	2.826.870.424	5.424.321.528	Insan Kencana Perdana
PT Bahtera Biru	2.665.420.350	2.555.294.540	PT Bahtera Biru
Garuda Maritim Indonesia	2.634.635.275	1.415.530.362	Garuda Maritim Indonesia
PT Segara Permai	2.490.533.999	4.770.708.560	PT Segara Permai
PT Surya Segara Safety Marine	2.436.137.742	2.417.188.849	PT Surya Segara Safety Marine
PT Pahala Artha Lestari	2.393.035.387	1.133.628.231	PT Pahala Artha Lestari
PT Solusi Integrasi Utama	2.267.153.034	-	PT Solusi Integrasi Utama
PT Araya Internusa	2.188.058.555	3.616.607.363	PT Araya Internusa
PT Mekaeltri Bangun Persada	2.038.660.000	-	PT Mekaeltri Bangun Persada
PT Marmin	1.972.401.168	646.495.890	PT Marmin
PT Trijaya Lestari Food	1.871.897.300	-	PT Trijaya Lestari Food
PT Wartsila Indonesia	1.824.104.850	-	PT Wartsila Indonesia
PT Klasaman Indah Raya	1.760.772.626	2.181.861.854	PT Klasaman Indah Raya
Wahana Sejahtera Food	1.743.876.438	2.063.647.600	Wahana Sejahtera Food
Primaera Mandiri Perkasa	1.638.228.094	1.034.224.700	Primaera Mandiri Perkasa
Multi Diesel Service	1.570.536.179	2.020.695.255	Multi Diesel Service
PT Inspira Kreasi Utama	1.541.013.711	-	PT Inspira Kreasi Utama
PT Tenindo Makmur Sejahtera	1.430.824.301	-	PT Tenindo Makmur Sejahtera
PT Pertalube Nusajaya	1.414.829.469	1.791.025.500	PT Pertalube Nusajaya
PT Aalborg Industri Indonesia	1.182.912.689	-	PT Aalborg Industri Indonesia
PT Mahakarya Lintas Samudra	1.012.500.000	-	PT Mahakarya Lintas Samudra
PT Dinani Abadi	892.613.810	-	PT Dinani Abadi
PT Tesco Indomaritim	885.515.000	-	PT Tesco Indomaritim
PT Central Marine Indonesia	868.431.551	817.298.786	PT Central Marine Indonesia
PT Eksus Inti Usaha	855.837.575	-	PT Eksus Inti Usaha
PT Bumi Unggul Jaya	842.441.836	884.012.480	PT Bumi Unggul Jaya
PT Insekta Fokustama	795.580.857	-	PT Insekta Fokustama
PT Safitri Rejeki	749.637.361	-	PT Safitri Rejeki
PT Andalan Fluid Sistem	678.795.980	-	PT Andalan Fluid Sistem
Digital Prima Niaga Solusi	641.835.875	736.770.595	Digital Prima Niaga Solusi
PT Gading Mas Murni Utama	590.379.025	590.379.025	PT Gading Mas Murni Utama
PT Cahaya Nusantara Kusuma	536.671.062	-	PT Cahaya Nusantara Kusuma
PT Sumber Rejeki Raya	505.135.830	-	PT Sumber Rejeki Raya
PT Soge Mandiri Indonesia	504.910.570	-	PT Soge Mandiri Indonesia
PT Indo Boiler	-	3.203.935.680	PT Indo Boiler
PT Astra Graphia	-	3.052.700.000	PT Astra Graphia
Sub Jumlah - dipindahkan	168.224.744.649	107.623.766.287	Carried - forward balance

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

21. UTANG USAHA (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Saldo Jumlah - pindahan	168.224.744.649	107.623.766.287
PT Turbo Tech Indonesia	-	2.899.350.000
PT Radian Peninsula Indonesia	-	2.114.163.427
PT Karya Mandiri Makmur Sejati	-	1.888.365.223
PT Valentina Mandiri Indonesia	-	1.815.421.751
PT Skyreach	-	1.463.826.000
PT FED Insight Indonesia	-	690.815.622
PT Regina Electric	-	589.921.780
PT Landasindo Sahu Baruna Jaya	-	558.558.559
PT Karimun Marine Shipyard	-	796.412.595
PT Osami	-	786.480.830
PT Jaya Karya Makassar	-	764.163.544
Koperasi Karya Sejahtera	-	717.970.692
CV Sinar Terang	-	654.074.179
PT Anuta Karya Prima	-	543.528.334
Lainnya (dibawah Rp500 Juta)	28.921.221.551	45.868.739.436
Sub Jumlah	197.145.966.200	62.151.791.972
Jumlah	218.134.048.166	227.688.446.851

Utang usaha pada PT Dalekesa Asri Cemerlang, dan PT Pancura Jaya merupakan utang pekerjaan pemeliharaan kapal.

Utang usaha pada PT Pertamina Patra Niaga merupakan utang pekerjaan pengadaan bahan bakar kapal.

Utang usaha pada PT Global Marinedo Safety Indonesia, PT ITI Marine & Oilfield Utama dan PT Adhitrans Prima merupakan utang pengadaan perlengkapan kapal. Adapun Utang Usaha pada PT Jotun Indonesia merupakan utang atas pengadaan cat kapal.

Utang usaha pada PT Trijaya Lestari Food dan PT Wahana Sejahtera Foods terkait utang usaha PT Sarana Bandar Nasional.

Utang usaha pada PT Amidis Tirta Mulia dan PT Tisindo Jaya terkait utang usaha PT Pelita Indonesia Djaya.

21. TRADE PAYABLE (continued)

Brought - forward balance
PT Turbo Tech Indonesia
PT Radian Peninsula Indonesia
PT Karya Mandiri Makmur Sejati
PT Valentina Mandiri Indonesia
PT Skyreach
PT FED Insight Indonesia
PT Regina Electric
PT Landasindo Sahu Baruna Jaya
PT Karimun Marine Shipyard
PT Osami
PT Jaya Karya Makassar
Koperasi Karya Sejahtera
CV Sinar Terang
PT Anuta Karya Prima
Others (below Rp500 Million)
Sub Total
Total

Accounts payable to PT Dalekesa Asri Cemerlang, and PT Pancura Jaya represents debt for the ship maintenance.

Accounts payable to PT Pertamina Patra Niaga are debts for ship fuel procurement work.

Trade payables to PT Global Marine do Safety Indonesia, PT ITI Marine & Oilfield Utama and PT Adhitrans Prima are debts for ship equipment. Meanwhile, trade payables to PT Jotun Indonesia are payables for the procurement of ship paint.

Accounts payable to PT Trijaya Lestari Food and PT Wahana Sejahtera Foods related to accounts payable to PT Sarana Bandar Nasional.

Accounts payable to PT Amidis Tirta Mulia and PT Tisindo Jaya related to accounts payable to PT Pelita Indonesia Djaya.

22. BEBAN AKRUAL

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Entitas Induk:		
Usaha Perkapalan	511.887.303.811	301.175.095.837
Cadangan Beban Pengurang PSO	10.000.000.000	9.000.000.000
Cadangan Beban Kesejahteraan Pegawai	9.297.091.216	14.011.224.567
Lainnya	309.548.067.759	182.584.117.973
Sub Jumlah	840.732.462.786	506.770.438.377

Parent entity:
Shipping
PSO Reduction Expense Reserve
Employee Welfare Expense Reserves
Other
Sub Total

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

22. BEBAN AKRUAL (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Entitas Anak:		
PT Sarana Bandar Nasional	3.219.269.539	56.410.196.068
PT Pelita Indonesia Djaya	74.734.372.939	36.154.026.989
Sub Jumlah	77.953.642.478	92.564.223.056
Jumlah	918.686.105.264	599.334.661.433

Beban akrual jasa perkapalan merupakan pencatatan transaksi untuk usaha perkapalan, antara lain kepelabuhanan, penumpang serta muatan.

Beban pencadangan PSO merupakan nilai cadangan PSO yang dibentuk atas estimasi koreksi hasil verifikasi penagihan PSO oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (Lihat catatan 4x)

Beban akrual lainnya merupakan pencatatan transaksi untuk non-usaha perkapalan yang manfaatnya sudah diterima, tetapi belum diterima penagihannya. Termasuk di dalamnya estimasi dalam rangka penutupan Dana Pensiun PELNI sebesar Rp82.085.071.897.

Beban akrual yang tercatat pada entitas anak (PT Pelita Indonesia Djaya) merupakan transaksi untuk usaha permakanan, usaha jasa dan lainnya.

Beban akrual yang tercatat pada entitas anak (PT Sarana Bandar Nasional) merupakan transaksi untuk operasional bongkar muat.

22. ACCRUED EXPENSES (continued)

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Subsidiary:		
PT Sarana Bandar Nasional	56.410.196.068	56.410.196.068
PT Pelita Indonesia Djaya	36.154.026.989	36.154.026.989
Sub Total	92.564.223.056	92.564.223.056
Total	599.334.661.433	599.334.661.433

Accrued shipping service expenses are the recording of transactions for the shipping business, including ports, passengers and cargo.

PSO reserve expense is the value of PSO reserves which is formed based on estimated corrections from the verification results of PSO billing by the Indonesian Financial Audit Agency (BPK RI). (See note 4x)

Other accrued expenses represent the recording of transactions for non-shipbuilding businesses for which benefits have been received, but for which billing has not yet been received. This includes estimates in the context of closing the PELNI Pension Fund amounting to Rp82,085,071,897.

The accrual expenses in subsidiaries (PT Pelita Indonesia Djaya) are transactions for the business of food, service business and others.

The accrual expenses in the subsidiary (PT Sarana Bandar Nasional) is a transaction for the operation of loading and unloading.

23. LIABILITAS KONTRAK

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Pendapatan Diterima Dimuka		
Entitas Induk:		
Sewa	2.127.324.333	2.117.962.950
Lainnya	1.290.189.142	2.152.698.561
Sub Jumlah	3.417.513.475	4.270.661.511
Entitas Anak:		
PT Sarana Bandar Nasional	119.665.560	440.651.853
PT Pelita Indonesia Djaya	218.322.138	231.174.692
Sub Jumlah	337.987.698	671.826.545
Jumlah	3.755.501.173	4.942.488.056

Prepaid Revenues
Parent entity:
Rental
Others

Sub Total

Subsidiary:
PT Sarana Bandar Nasional
PT Pelita Indonesia Djaya
Sub Total
Total

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

23. LIABILITAS KONTRAK (lanjutan)

23. CONTRACT LIABILITIES (continued)

	<u>31 Desember/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	
Uang Muka Diterima			Advance Received
Entitas Induk:			Parent entity:
Usaha Perkapalan	43.972.880.358	37.694.013.732	Shipping Business
Uang Jaminan	7.923.616.034	7.308.629.004	Deposits
Usaha Keagenan	23.027.550.024	5.245.618.705	Agency
Usaha Sampingan	11.837.000	23.400.000	Side Business
Lainnya	9.092.174.430	14.427.986.514	Others
Sub Jumlah	84.028.057.846	64.699.647.955	Sub Total
Entitas Anak:			Subsidiary:
PT Sarana Bandar Nasional	3.012.505.023	4.918.643.931	PT Sarana Bandar Nasional
PT Pelita Indonesia Djaya	3.667.527.737	3.500.441.529	PT Pelita Indonesia Djaya
Sub Jumlah	6.680.032.760	8.419.085.460	Sub Total
Jumlah	90.708.090.606	73.118.733.415	Total
Jumlah Liabilitas Kontrak	94.463.591.779	78.061.221.471	Total Contract Liabilities

Liabilitas kontrak yang tercatat di entitas induk meliputi:

Contract Liabilities recorded on the parent entity include:

- Uang muka diterima usaha perkapalan merupakan uang muka yang diterima sehubungan dengan kegiatan usaha perkapalan, meliputi tambang pasasi, tambang muatan, *charter* kapal, sewa ruang kapal, wisata bahari dan lainnya.
- Uang muka jaminan merupakan uang muka/deposit sebagai jaminan atas hubungan kerja sesuai kontrak/ketentuan dan akan dikembalikan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kesepakatan/ketentuan yang berlaku, meliputi uang deposit agen/biro perjalanan dan uang jaminan rekanan.
- Uang muka diterima usaha keagenan merupakan uang muka diterima sehubungan dengan kegiatan pelayanan jasa keagenan.
- Pendapatan diterima dimuka lainnya antara lain pendapatan atas pelayanan kegiatan wisata bahari, pendapatan subsidi kapal rede, kapal ternak, dan tol laut.

- Advances received from shipping business represent advances received in connection with shipping business activities, including pasasi mining, cargo mining, ship charter, ship space rental, marine tourism and others.
- Advance guarantee is an advance/deposit as a guarantee for the working relationship according to the contract/determination and will be returned at once or gradually in accordance with the applicable agreement/determination, including agent/travel agency deposit and counterparty deposit.
- Advances received from agency business represent advances received in connection with agency service activities.
- Other unearned income includes revenue from marine tourism services, subsidy revenue for rede ships, livestock ships, and sea tolls.

Pendapatan diterima dimuka yang tercatat pada entitas anak (PT Sarana Bandar Nasional) merupakan pendapatan diterima dimuka atas pelayanan usaha kepelabuhanan termasuk didalamnya uang muka usaha pemuatan dan pembongkaran serta uang jaminan berkenaan dengan pelayanan kepelabuhanan.

Prepaid revenues in the subsidiaries (PT Sarana Bandar Nasional) is an acceptable income on the business services of port including the advance of loading and disassembling business as well as collateral money regarding the service of the port.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

24. LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK LAINNYA

24. OTHER SHORT-TERM FINANCIAL LIABILITIES

	<u>31 Desember/ December 31, 2024</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	
Entitas Induk:			Parent entity:
Pihak Berelasi			Related Parties
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	11.333.543.882	10.606.857.460	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
PT Jasa Raharja Putera	1.983.539.151	3.351.559.841	PT Jasa Raharja Putera
PT Jasa Raharja (Persero)	1.684.944.545	1.297.195.356	PT Jasa Raharja (Persero)
Pegawai	1.419.791.665	882.891.573	Employee
Lainnya	102.497.624.696	4.383.019.795	Others
Sub Jumlah	118.919.443.939	20.521.524.025	Sub Total
Pihak Ketiga			Related Parties
PT Asuransi Purna Artanugraha	2.994.068.909	2.991.524.909	PT Asuransi Purna Artanugraha
PT Altrak 1978	1.185.996.719	-	PT Altrak 1978
Lainnya	15.078.014.449	8.758.506.101	Others
Sub Jumlah	19.258.080.077	11.750.031.010	Sub Total
Sub Jumlah Entitas Induk	138.177.524.016	32.271.555.035	Sub Total Parent Entity
Entitas Anak:			Subsidiaries:
PT Pelita Indonesia Djaya	10.258.303.651	5.678.365.057	PT Pelita Indonesia Djaya
PT Sarana Bandar Nasional	1.012.343.294	1.948.290.259	PT Sarana Bandar Nasional
Sub Jumlah Entitas Anak	11.270.646.945	7.626.655.316	Sub Total Subsidiaries
Jumlah	149.448.170.961	39.898.210.351	Total

25. UTANG KEPADA NEGARA

25. DEBT TO THE STATE

<u>31 Desember/December 31, 2024</u>					
<u>Nama Kreditur/ Creditor</u>	<u>Tingkat Bunga / Interest Rate</u>	<u>Jatuh Tempo Tahun / Maturity Year</u>	<u>Saldo 31 Des 2024 / Balance Dec 31. 2024</u>	<u>Bagian Lancar Utang Jangka Panjang / Current Portion for Long Term Debt</u>	<u>Bagian Jatuh Tempo Lebih dari Setahun / Long Term Portion Maturity</u>
KFW - Spareparts	1.25%	2025	18.223.345.440	2.277.918.180	15.945.427.260
KFW - KM Labobar	1.25%	2025	10.260.236.880	1.282.529.610	8.977.707.270
Jumlah / Total			28.483.582.320	3.560.447.790	24.923.134.530
<u>31 Desember/December 31, 2023</u>					
<u>Nama Kreditur/ Creditor</u>	<u>Tingkat Bunga / Interest Rate</u>	<u>Jatuh Tempo Tahun / Maturity Year</u>	<u>Saldo 31 Des 2023 / Balance Dec 31. 2023</u>	<u>Bagian Lancar Utang Jangka Panjang / Current Portion for Long Term Debt</u>	<u>Bagian Jatuh Tempo Lebih dari Setahun / Long Term Portion Maturity</u>
KFW - Spareparts	1.25%	2025	20.852.866.800	2.316.985.200	18.535.881.600
KFW - KM Labobar	1.25%	2025	11.740.728.600	1.304.525.400	10.436.203.200
Jumlah / Total			32.593.595.400	3.621.510.600	28.972.084.800

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

25. UTANG KEPADA NEGARA (lanjutan)

**KFW Spareparts- Pemerintah Republik Indonesia:
SLA - 1144/DP3/2001-Nilai Pinjaman DM 44.000.000.**

Pinjaman kepada *Kreditanstalt fur Wiederaufbau* (KFW) merupakan pinjaman Pemerintah RI kepada KFW sebesar DM 44.000.000 sesuai dengan Loan Agreement 1999 66 383 tanggal 31 Juli 2000 yang diteruskan kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) melalui surat Menteri Keuangan No. S-047/MK.17/2001 tanggal 15 Januari 2001 sebagai *Project Executing Agency* dan *Sub borrower* dalam rangka pengadaan *spareparts* untuk kapal penumpang yang dituangkan dalam Perjanjian SLA No.1144/DP3/2001 tanggal 25 Februari 2001 antara Pemerintah RI dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan menunjuk PT Bank DKI Jakarta sebagai perantara dalam pelunasan pokok pinjaman dan biaya bunga dengan rincian pinjaman sebagai berikut:

- a. Bagian A sebesar DM 28.600.000 sebagai pinjaman lunak dengan tingkat bunga sebesar 1,25% per tahun.
- b. Bagian B sebesar DM 15.400.000 sebagai pinjaman komersil dengan tingkat bunga sebesar 9,54% per tahun.

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Dalam Rangka penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) pada PT Pelayaran Nasional Indonesia No. 33/PB4.1/PT Bank DKI/2007 tanggal 22 Mei 2007 dilakukan rekonsiliasi pinjaman dengan menetapkan *cut off date* pada tanggal 31 Maret 2007 dengan jumlah liabilitas PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar DM 28.468.125 atau setara dengan Euro 14.555.521 untuk pinjaman lunak yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2040 dan DM 15.328.990 atau setara dengan Euro 7.837.588.

Berdasarkan Perjanjian Perubahan (Amandemen) terhadap Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA- 1144/DP3/2001 tanggal 25 Februari 2001 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor ; AMA-488/SLA- 1144/DSMI/2015 tanggal 1 Desember 2015 diubah menjadi:

- a. Kewajiban pokok pinjaman senilai EUR 22.393.109,43 dijadikan Penyertaan Modal Negara melalui proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. yang terdiri dari:

- 1) pinjaman lunak sebesar EUR 14.555.521,09.
- 2) pinjaman komersil sebesar EUR 7.837.588,34.

25. DEBT TO THE STATE (continued)

**KFW Spareparts- Government of Republic Indonesia
: SLA - 1144/DP3/2001-Value of Loan DM 44,000,000.**

Loans to the *Kreditanstalt fur Wiederaufbau* (KFW) is the Government of Indonesia to the KFW loan amounting to DM 44,000,000 according to the 1999 66 383 Loan Agreement dated July 31, 2000 which was forwarded to PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) through the Ministry of Finance letter No. S-047 / MK.17 / 2001 dated January 15, 2001 as *Project Executing Agency* and *Sub-borrower* in order to procure spare parts for passenger ships as outlined in the Agreement SLA No.1144/DP3/2001 dated February 25, 2001 between the Government of Indonesia with PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and PT Bank DKI Jakarta appoint as an intermediary in the payment of principal and interest costs with details of the loan as follows:

- a. Part A of DM 28,600,000 as soft loans with an interest rate of 1.25% per year.
- b. Part B of DM 15,400,000 as a commercial loan with an interest rate of 9.54% per year.

Based on the Minutes of Reconciliation in the Context penyelesaian sourced from the State Receivables Manuscript Subsidiary Loan Agreement (NPPP) PT Pelayaran Nasional Indonesia No. 33/PB4.1/PT Bank DKI/2007 dated May 22, 2007 to be reconciliation loan by setting the cut off date of March 31, 2007 with total liabilities of the PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) amounting to DM 28,468,125 or equivalent to Euro 14,555,521 to soft loans ended June 30, 2040 and DM 15,328,990 equivalent to Euro 7,837,588.

Based on the Amendment Agreement (Amendment) on the Loan Settlement Agreement No. SLA-1144 / DP3 / 2001 dated February 25, 2001 between the Government of the Republic of Indonesia and company PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Number; AMA-488 / SLA-1144 / DSMI / 2015 dated December 1, 2015 changed to:

- a. The principal liability of EUR 22,393,109.43 is made into State Equity Participation through the process in accordance with the provisions of the law, which consists of:

- 1) a soft loan of EUR 14,555,521.09.
- 2) a commercial loan of EUR 7,837,588.34.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

25. UTANG KEPADA NEGARA (lanjutan)

**KFW Spareparts- Pemerintah Republik Indonesia :
SLA - 1144/DP3/2001-Nilai Pinjaman DM 44.000.000.
(lanjutan)**

b. Kewajiban non-pokok senilai EUR2.457.823.45
dibayarkan selama 10 tahun dari tahun 2016 sampai
dengan 2025 yang terdiri dari:

- 1) pinjaman lunak sebesar EUR 431.540,19.
- 2) pinjaman komersil sebesar EUR 2.026.283,26.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tanggal 30 Desember
2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara
Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia.
maka sisa pinjaman kepada Pemerintah Republik
Indonesia (SLA-1144/DP3/2001) sebesar
EUR2.457.823,45.

**KFW Kapal Penumpang - Pemerintah Republik
Indonesia: SLA - 1151/DP3/2002 - Nilai Pinjaman Euro
16.361.340.**

Pinjaman kepada *Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW)*
merupakan pinjaman Pemerintah RI kepada KFW
sebesar Euro 81.806.700 sesuai dengan *Loan
Agreement* 2001 65 159 tanggal 1 Februari 2002 yang
diteruskan kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia
(Persero) melalui surat Menteri Keuangan No. S-
115/MK.17/2002 tanggal 22 April 2002 sebesar Euro
16.361.340 dalam rangka pengadaan Kapal Penumpang
Nomor 23 Pelni yang dituangkan dalam Perjanjian SLA
No.1151/DP3/2002 tanggal 30 Mei 2002 antara
Pemerintah RI dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia
(Persero) dan menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk (BRI) sebagai perantara dalam pelunasan
pokok pinjaman dan biaya bunga, dengan rincian
pinjaman sebagai berikut:

- a. Bagian A sebesar Euro 8.180.670 sebagai pinjaman
lunak dengan tingkat bunga sebesar 1,25% per tahun.
- b. Bagian B sebesar Euro 8.180.670 sebagai pinjaman
komersil dengan tingkat bunga sebesar 6,39% per
tahun.

25. DEBT TO THE STATE (continued)

**KFW Spareparts- Government of Republic Indonesia
: SLA - 1144/DP3/2001-Value of Loan DM 44,000,000.
(continued)**

b. Non-principal liabilities of EUR 2,457,823.45 are
payable for 10 years from 2016 to 2025 consisting of:

- 1) a soft loan of EUR 431,540.19.
- 2) a commercial loan of EUR 2,026,283.26.

With the issuance of Government Regulation of the
Republic of Indonesia Number 87 Year 2016 dated
December 30, 2016 concerning the Addition of State
Equity Participation of the Republic of Indonesia into
Capital of Limited Liability Company (Persero) of PT
Pelayaran Nasional Indonesia, the remaining loan to the
Government of the Republic of Indonesia (SLA-1144 /
DP3 / 2001) of EUR2,457,823.45.

**KFW Passenger ship - Government of Republic
Indonesia: SLA - 1151/DP3/2002 - Value of Loan Euro
16,361,340.**

Loans to the *Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW)* is the
Government of Indonesia to the KFW loan amounting to
Euro 81,806,700 according to the 2001 65 159 Loan
Agreement dated February 1, 2002 which was forwarded
to PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) through
the Ministry of Finance letter No. S-115/MK.17/2002 April
22, 2002 amounted to Euro 16,361,340 in order to
procure Passenger Vessel No. 23 Pelni as outlined in the
Agreement SLA No.1151/DP3/2002 dated May 30, 2002
between the Government of Indonesia with PT Pelayaran
Nasional Indonesia (Persero) and appointed PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, (BRI) as an
intermediary in the payment of principal and interest
costs, with details of the loan as follows:

- a. Part A of Euro 8,180,670 as a soft loan with an
interest rate of 1.25% per year.
- b. Section B of Euro 8,180,670 as a commercial loan
with an interest rate of 6.39% per year

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

25. UTANG KEPADA NEGARA (lanjutan)

KFW Kapal Penumpang - Pemerintah Republik Indonesia: SLA - 1151/DP3/2002 - Nilai Pinjaman Euro 16.361.340. (lanjutan)

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) pada PT Pelayaran Nasional Indonesia No. 34/PB4.1/PT Bank DKI/2007 tanggal 22 Mei 2007 dilakukan rekonsiliasi pinjaman dengan menetapkan *cut off date* pada tanggal 31 Maret 2007 dengan jumlah liabilitas PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Euro 7.469.800 untuk pinjaman lunak yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2042 dan Euro 7.460.000 untuk pinjaman komersil yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

Berdasarkan Perjanjian Perubahan (Amandemen) terhadap Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA - 1151/DP3/2002 tanggal 30 Mei 2002 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor ; AMA- 489/SLA - 1151/DSMI/2015 tanggal 1 Desember 2015, diubah menjadi:

- a. Kewajiban pokok pinjaman senilai EUR 14.929.800 dijadikan Penyertaan Modal Negara melalui proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:
 - 1) pinjaman lunak sebesar EUR 7.469.800.
 - 2) pinjaman komersil sebesar EUR 7.460.000.
- b. Kewajiban non-pokok senilai EUR 1.383.833,45 dibayarkan selama 10 tahun dai tahun 2016 sampai dengan 2015 yang terdiri dari:
 - 1) pinjaman lunak sebesar EUR 220.414,14.
 - 2) pinjaman komersil sebesar EUR 1.163.419,31.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia. maka sisa pinjaman kepada Pemerintah Republik Indonesia (SLA-1151/DP3/2002) sebesar EUR 1.383.833,45. (Lihat Catatan 28).

25. DEBT TO THE STATE (continued)

KFW Passenger ship - Government of Republic Indonesia: SLA - 1151/DP3/2002 - Value of Loan Euro 16,361,340. (continued)

Based on the Minutes of Settlement Reconciliation in the Context of State Receivables sourced from Manuscript Subsidiary Loan Agreement (NPPP) PT Pelayaran Nasional Indonesia No. 34/PB4.1/PT Bank DKI/ 2007 dated May 22, 2007 to be reconciliation loan by setting the cut off date of March 31, 2007 with total liabilities of the PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) amounting to Euro 7,469,800 for soft loans ended June 30, 2042 and Euro 7,460,000 for commercial loans ended June 30, 2015.

Based on the Amended Agreement (Amendment) to the Loan Forwarding Agreement Number SLA-1151/DP3/2002 dated May 30, 2002 between the Government of the Republic of Indonesia and the Company (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Number; AMA-489/SLA-1151/DSMI/2015 dated December 1, 2015. changed to:

- a. The principal liability of EUR 14,929,800 is made into State Equity Participation through the process in accordance with the provisions of the law, which consists of:
 - 1) a soft loan of EUR 7,469,800.
 - 2) a commercial loan of EUR 7,460,000.
- b. Non-principal liabilities of EUR 1,383,833.45 are payable for 10 years from 2016 to 2015 consisting of:
 - 1) a soft loan of EUR 220,414.14.
 - 2) a commercial loan of EUR 1,163,419.31

With the issuance of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 87 Year 2016 dated December 30, 2016 concerning the Addition of State Equity Participation of the Republic of Indonesia into Capital of Limited Liability Company (Persero) of PT Pelayaran Nasional Indonesia, the remaining loan to the Government of the Republic of Indonesia (SLA-1151/DP3/2002) of EUR 1,383,833.45. (See Note 28)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

25. UTANG KEPADA NEGARA (lanjutan)

KFW Kapal Penumpang - Pemerintah Republik Indonesia: SLA - 1151/DP3/2002 - Nilai Pinjaman Euro 16.361.340. (lanjutan)

Pada tanggal 2 Oktober 2020, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) telah mengajukan usulan penghapusan Utang SLA Non Pokok atas pinjaman AMA-448/SLA-1144/DSMI/2015 dan AMA-489/SLA-1151/DSMI/2015 kepada Pemerintah berdasarkan surat Kementerian BUMN RI Nomor: SR-464/MBU/07/2020 tanggal 2 Juli 2020 perihal usulan Tambahan Dana PMN Non Tunai dan Penghapusan Piutang pada BUMN untuk APBN TA 2021.

Pada tanggal 29 November 2021, melalui Surat Nomor S-111/MK.5/2021 perihal Persetujuan Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Pinjaman SLA Nomor: SLA-1144/DP3/2001 dan SLA-1151/DP3/2002 pada PT PELNI (Persero).

Skema penyelesaian yang disetujui adalah penyelesaian piutang negara yang bersumber dari Perjanjian Pinjaman *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) Nomor SLA-1144/DP3/2001 dan SLA-1151/DP3/2002 dengan skema penjadwalan kembali pembayaran terhadap kewajiban non-pokok dengan jumlah sebesar EUR 2.112.911,70 selama 12 tahun termasuk masa tenggang 2 tahun yaitu tahun 2021-2022, dan pembayaran angsuran selama 10 tahun dimulai sejak tahun 2023 s.d 2032 sebesar EUR 211.291,17 per tahun.

26. LIABILITAS JANGKA PANJANG

	31 Desember/ December 31, 2024
Liabilitas Jangka Panjang:	
- Liabilitas Sewa Pembiayaan	6.923.726.433
- Liabilitas Sewa Hak Guna	3.469.398.482
Jumlah	10.393.124.915
Bagian Lancar Jt. Tempo 1 Tahun:	
- Liabilitas Sewa Pembiayaan	(278.815.061)
Bagian Jt. Tempo Lebih dari 1 Tahun	10.114.309.854

Utang sewa pembiayaan per tanggal 31 Desember 2021 tersebut terdiri dari pembelian kendaraan bermotor/alat angkut yang akan disewakan kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan kepada pihak ketiga lainnya.

Liabilitas sewa merupakan perjanjian sewa yang terdiri dari sewa bangunan dan alat angkut yang memiliki jangka waktu sewa lebih dari 1 tahun sampai dengan tahun 2026.

25. DEBT TO THE STATE (continued)

KFW Passenger ship - Government of Republic Indonesia: SLA - 1151/DP3/2002 - Value of Loan Euro 16,361,340. (continued)

On October 2, 2020, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) has submitted a proposal to write off Non-principal SLA Debt for loans AMA-448/SLA-1144/DSMI/2015 and AMA-489/SLA-1151/DSMI/2015 to the Government based on a letter The Ministry of SOEs of the Republic of Indonesia Number: SR-464/MBU/07/2020 dated July 2, 2020 regarding the proposal for Additional Non-Cash PMN Funds and the Elimination of Receivables from SOEs for the 2021 FY APBN.

On November 29, 2021, PT PELNI (Persero) received Approval for Settlement of State Receivables Sourced from SLA Loans Number: SLA-1144/DP3/2001 and SLA-1151/DP3/2002 at PT PELNI (Persero) which will be followed up immediately.

The agreed settlement scheme is the settlement of State receivables originating from the Subsidiary Loan Agreement (SLA) No. SLA-1144/DP3/2001 and SLA-1151/DP3/2002 with a scheme to reschedule payments for non-principal obligations in the amount of EUR 2,112,911.70 for 12 years including a grace period of 2 years, namely 2021-2022, and installment payments for 10 years starting from 2023 to 2032 amounting to EUR 211,291.17 per year.

26. LONG-TERM LIABILITIES

	31 Desember/ December 31, 2023	
		Long-Term Liabilities:
		Finance Lease Liabilities
		Right of Use Lease Liabilities
		Total
		Current Portion of Due to 1 year:
		Finance Lease Liabilities
		Portion Due more than 1 year

As of December 31, 2021 the financial lease payables consists of the purchase of a motorized vehicle / transportation tool that will be leased to PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and to other third parties.

Lease liabilities represent rental agreements which consist of rental of buildings and transportation equipment which have a rental period of more than 1 year until 2026.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

27. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG

27. LIABILITIES OF LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Entitas Induk:			Parent entity:
Tingkat diskonto	7,10%	5.70%	Discount Rate
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	5%	3%	The Projected rate of salary Increase
Usia pensiun normal	57 Tahun	57 Tahun	Normal retirement age
Tingkat mortalita	Indonesia - VI (2019)	Indonesia - VI (2019)	Mortality Rate
Tingkat cacat tetap	0.02% per tahun	0.02% per tahun	Permanent disability rate
	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Cadangan (Biaya Dibayar Dimuka) awal periode	155.430.687.812	95.148.220.006	Reserves (Prepaid Expenses) at beginning of period
Biaya Imbalan Pasti	(17.957.322.778)	107.532.243.935	Defined Benefit Cost
Pembayaran Imbalan kerja oleh Entitas	(526.380.422)	(3.350.697.784)	Employee Benefits Paid by Entity
Pembayaran Iuran Periode Berjalan	(41.691.099.147)	(43.899.078.345)	Payment of Current Period Contributions
Liabilitas Bersih Akhir Periode	95.255.885.465	155.430.687.812	Net Liability at the end of period
Entitas Anak	7.773.595.702	7.422.393.322	Subsidiaries
Jumlah	103.029.481.167	162.853.081.134	Total

Rincian beban yang diakui di laporan laba rugi:

Details of the expense recognized in the income

	2024	2023	
Biaya Jasa Kini	13.279.311.090	20.606.557.567	Current service cost
Biaya Bunga	37.434.344.949	47.597.239.843	Interest Cost
Pendapatan Bunga atas Aset	(65.032.729.010)	(40.852.633.283)	Interest Income on Assets
Jumlah	(14.319.072.971)	27.351.164.127	Total

28. MODAL SAHAM

28. SHARES CAPITAL

Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh masing
masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023,
sebagai berikut:

*Authorized Capital, issued and fully paid respectively on
December 31, 2024 and 2023, are as follows:*

Pemegang Saham/ Shareholders	Lembar Saham/Shares	Nilai Nominal per Lembar Saham/ Nominal Value per Share	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah Nilai Saham/ Total Value of Shares
Negara Republik Indonesia/ Republic of Indonesia	7.629.900	1.000.000	100%	7.629.900.000.000
Jumlah / Total	7.629.900	1.000.000	100%	7.629.900.000.000

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

28. MODAL SAHAM (lanjutan)

Total 100% dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan atau seluruhnya berjumlah Rp7.629.900.000.000 telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia (pemegang saham) dengan cara sebagai berikut:

- Sebesar Rp7.065.092.000.000 merupakan setoran modal lama sesuai dengan Akta No. 1, tanggal 01 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ida Adiningsih, SH., yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0012165 tanggal 02 Februari 2016.
- Sebesar Rp564.807.589.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 melalui konversi utang pokok *Subsidiary Loan Agreement (SLA)* PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) kepada Negara Republik Indonesia berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor 1144/DP3/2001 tanggal 25 Februari 2001 dan Nomor 1151/DP3/2002 tanggal 30 Mei 2002 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2016.
- Sebesar Rp411.000 yang berasal dari kapitalisasi sebagian cadangan Perseroan sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 yang telah diaudit oleh KAP Drs. Bambang Mudjiono & Widiarto sebagaimana suratnya nomor: LAI_AU-015/KAP.BM&W/BM/VI/2016 tanggal 01 April 2016.

28. SHARES CAPITAL (continued)

Total 100% of the nominal value of each issued share or a total of Rp7,629,900,000,000 has been fully paid-up by the Republic of Indonesia (shareholders) in the following manner:

- Amounting to Rp7,065,092,000,000 represents old capital deposits in accordance with Deed No. 1, dated February 1, 2016 made before the Notary Ida Adiningsih, SH., which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHUAH.01.03-0012165 dated February 02, 2016.
- Amounting to Rp564,807,589,000 originating from the 2016 State Budget through the conversion of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Subsidiary Loan Agreement (SLA) to the Republic of Indonesia based on the Loan Forwarding Agreement Number 1144/DP3/2001 dated February 25, 2001 and Number 1151/DP3/2002 dated May 30, 2002 as stipulated in Government Regulation Number 87 of 2016.
- amounting to Rp411,000 which comes from the capitalization of a portion of the Company's reserves as recorded in the Financial Statements for the 2015 Financial Year which has been audited by KAP Drs. Bambang Mudjiono & Widiarto as his letter number LAI_AU- 015/KAP.BM&W/BM/VI/2016 dated April 01, 2016.

29. PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH

Landasan Hukum/ Legal Foundation	Penyertaan Modal Pemerintah/ Government Capital
PP. RI No. 40 Tahun 1992	309.143.585.642
PP. RI No. 53 Tahun 2024	1.500.000.000.000
Jumlah / Total	1.809.143.585.642

Berdasar pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.40 Tahun 1992 menyatakan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah (PMN) kepada Perseroan. PMN tersebut terdiri dari 6 (enam) unit kapal motor, yaitu KM. Kerinci, KM. Kambuna, KM. Rinjani, KM. Umsini, KM. Kelimutu dan KM. Lawit beserta suku cadangnya.

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Non Tunai berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia dengan nilai sebesar Rp1.500.000.000 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024.

29. GOVERNMENT CAPITAL

Pengalihan/ Redirect	Jumlah / Total
(309.000.000.000)	143.585.642
-	1.500.000.000.000
(309.000.000.000)	1.500.143.585.642

Based on Government Regulation of the Republic of Indonesia No.40 of 1992, it states the addition of Government Capital Participation (PMN) to the Company. The PMN consists of 6 (six) units of motorboats, namely KM. Kerinci, KM. Kambuna, KM. Rinjani, KM. Umsini, KM. Kelimutu and KM. Lawit along with its spare parts.

The addition of Non-Cash Government Capital Participation based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 53 of 2024 concerning the Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Company (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia with a value of Rp1,500,000,000,000 sourced from the 2024 State Budget.

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

30. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Merupakan tambahan modal yang berasal dari pelepasan kepemilikan di PT RS PelnI per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Saldo Awal		
Nilai Pelepasan:	397.878.907.714	397.878.907.714
Jumlah	397.878.907.714	397.878.907.714

30. ADDITIONAL PAID IN CAPITAL

Represents additional capital from the disposal of ownership in PT RS PelnI as of December 31, 2024 and 2023 as follows:

Beginning balance
Disinvestment Values:

Total

31. CADANGAN DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

Merupakan cadangan yang dibentuk berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dari laba setelah pajak yang belum ditentukan peruntukannya sebagai berikut:

	2024	2023
Saldo Awal	1.342.665.131.496	1.169.417.204.918
Penggunaan Laba	201.201.847.651	173.247.926.578
Saldo Akhir	1.543.866.979.147	1.342.665.131.496

Beginning Balance
Distribution Profit

Ending Balance

Lihat Catatan 32.

See Note 32.

31. APPROPRIATED RETAINED EARNINGS

It is a proposal formed based on the General Meeting of Shareholders of the income after the unspecified tax as follows:

32. SALDO LABA (DEFISIT)

Merupakan akumulasi laba tahun berjalan sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

	2024	2023
Saldo Awal	(2.453.137.655.702)	(2.481.091.576.775)
Distribusi Saldo Laba Tahun Lalu:		
Cadangan	(201.201.847.651)	(173.247.926.578)
Laba Tahun Berjalan	(193.873.273.327)	(201.201.847.651)
Saldo Akhir	(2.460.466.230.026)	(2.453.137.655.702)

Beginning Balance
Distribution of Retained Earnings:
Appropriated Retained Earnings
Profit of Current Year

Ending Balance

Penggunaan laba tahun buku 2023 sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia No. 01, tanggal 04 Juni 2024.

The use of profit for the year 2023 is accordance with the Deed of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) of PT Pelayaran Nasional Indonesia No. 01, date June 04, 2024.

Lihat Catatan 31.

See Note 31.

32. RETAINED EARNINGS (DEFICITS)

Is the accumulated deficit of the year running up to 31 December 2024 and 2023 as follows:

33. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

Saldo Awal
Keuntungan (Kerugian) dari:
- Aktuarial
- Perubahan Nilai Wajar Aset Tetap
Saldo Akhir

	2024	2023
Saldo Awal	(97.593.396.190)	(33.821.398.423)
Keuntungan (Kerugian) dari:		
- Aktuarial	4.201.114.454	(69.936.652.767)
- Perubahan Nilai Wajar Aset Tetap	855.500.000	6.164.655.000
Saldo Akhir	(92.536.781.736)	(97.593.396.190)

Beginning Balance
Profit (Loss) from:
Current Actuarial -
Change in Fair Values of Property -
Ending Balance

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

34. KEPENTINGAN NON PENGENDALI

34. NON-CONTROLLING INTERESTS

31 Desember / December 31, 2024					
Pemegang Saham / Shareholders	% Penyertaan / Participation	Bagian dari pemilik saham kepentingan nonpengendali (awal) / Part of the owners of shares of non controlling interests	Dividen/Koreksi Cadangan/ Setoran Modal / Dividend / Correction Reserves / Deposits Capital	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Profit (Loss) Current Year	Bagian dari pemilik saham kepentingan nonpengendali (akhir) / Part of shareholders of non controlling interests (end)
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni / Pensioners Health Foundation Pelni	0.53% in SBN	80.000.000	2.456.889.818	208.910.309	2.745.800.127
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni / Pensioners Health Foundation Pelni	0.50% in PID	10.000.000	1.059.489.246	155.020.918	1.224.510.164
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni / Pensioners Health Foundation Pelni	2.00 % in PBN	60.000.000	134.989.401	9.086.254	204.075.655
Koperasi Sabanas/ Cooperative Sabanas	0.040 % in SBL	3.800.000	3.312.130	3.134.028	10.246.158
Koperasi Sabanas/ Cooperative Sabanas	1.00 % in SBI	50.000.000	28.391.794	1.009.935	79.401.729
Jumlah / Total		203.800.000	3.683.072.389	377.161.444	4.264.033.833
31 Desember / December 31, 2023					
Pemegang Saham / Shareholders	% Penyertaan / Participation	Bagian dari pemilik saham kepentingan nonpengendali (awal) / Part of the owners of shares of non controlling interests	Dividen/Koreksi Cadangan/ Setoran Modal / Dividend / Correction Reserves / Deposits Capital	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Profit (Loss) Current Year	Bagian dari pemilik saham kepentingan nonpengendali (akhir) / Part of shareholders of non controlling interests (end)
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni / Pensioners Health Foundation Pelni	0.53% in SBN	80.000.000	2.192.768.320	260.875.926	2.533.644.246
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni / Pensioners Health Foundation Pelni	0.50% in PID	10.000.000	920.161.708	140.120.763	1.070.282.471
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni / Pensioners Health Foundation Pelni	2.00 % in PBN	60.000.000	126.582.144	8.407.260	194.989.404
Koperasi Sabanas/ Cooperative Sabanas	0.040 % in SBL	3.800.000	2.039.356	1.272.774	7.112.130
Koperasi Sabanas/ Cooperative Sabanas	1.00 % in SBI	50.000.000	9.689.673	18.702.121	78.391.794
Jumlah / Total		203.800.000	3.251.241.201	429.378.844	3.884.420.045

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

35. PENDAPATAN USAHA

Pendapatan usaha merupakan penjualan jasa pelayaran dan jasa lainnya, terdiri dari:

	2024	2023
Pendapatan Usaha. Bruto:		
Penugasan Pemerintah	3.732.803.828.570	3.445.326.954.781
Tambang Pasasi	1.478.698.021.400	1.350.800.921.672
Tambang Muatan	344.656.684.770	361.100.297.428
Usaha Perkapalan Lainnya	65.461.822.986	36.029.980.734
Usaha Perbengkelan	23.082.823.243	22.741.760.881
Usaha Perhotelan	5.364.054.151	5.231.179.162
Usaha Penunjang Lainnya	529.857.538.747	550.534.360.381
Sub Jumlah	6.179.924.773.867	5.771.765.455.039
Dikurangi:		
Reduksi Tambang Pasasi	1.638.473.700	3.272.725.900
Reduksi Tambang Muatan	1.229.735.448	1.874.135.118
Sub Jumlah	2.868.209.148	5.146.861.018
Jumlah Pendapatan Usaha – Bersih	6.177.056.564.719	5.766.618.594.021

Pendapatan Penugasan Pemerintah merupakan kompensasi yang diterima dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perhubungan - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atas penyelenggaraan penugasan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation - PSO*) dan subsidi meliputi:

- Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi;
- Kegiatan Pengoperasian Kapal Ternak;
- Angkutan Barang di Laut (Tol Laut);
- Kapal Perintis Milik Negara; dan
- Kapal Rede.

a. Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi

Pendapatan penugasan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi didasarkan pada Perjanjian Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2024 Nomor: HK.201/7/19/DJPL/2023 dan Nomor: TH.12.29-01/KNP/2023.

Pendapatan penugasan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi didasarkan pada Perjanjian Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2023 Nomor: HK.201/I/3/DJPL/2023 dan Nomor: TH.01.02-02/KNP/2023.

35. OPERATING REVENUES

Operating revenues represent the sale of shipping services and other services, consisting of:

Gross Operating Revenue:
Government Assignments
Ticketing
Cargo
Other Shipping Business
Workshop Business
Hospitality Business
Other Supporting Enterprises
Sub Total

Less:
Ticketing Reduction
Cargo Reduction

Sub Total

Total Revenue - Net

Government Assignment Revenue is compensation received from the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Transportation - Directorate General of Sea Transportation for the implementation of Public Service Obligation (PSO) assignments and subsidies including:

- Sea Freight for Economy Class Passengers;
- Activities of Operation of Livestock Ships;
- Freight in the Sea (Sea Toll);
- State owned Pioneer ships; and
- Rede Ships.

a. Sea Freight for Economy Class Passengers

The revenue assignment for carrying out the obligations of public services for sea transportation for economy class passengers is based on the Agreement on the Implementation of Obligatory Services for Sea Transport for Economy Class Passengers for Fiscal Year 2024 Number: HK.201/7/19/DJPL/2023 and Number: TH.12.29-01/KNP/2023.

The revenue assignment for carrying out the obligations of public services for sea transportation for economy class passengers is based on the Agreement on the Implementation of Obligatory Services for Sea Transport for Economy Class Passengers for Fiscal Year 2023 Number: HK.201/I/3/DJPL/2023 and Number: TH.01.02-02/KNP/2023.

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

35. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)

a. Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi (lanjutan)

Nilai perjanjian penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi yang bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.870.509.993.000 dan Rp2.395.825.599.000, berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Pemerintah Pusat (BABUN-BPP) Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-999.07.1.985120/2024 pada tanggal 29 Desember 2023 dan Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-999.07.1.985120/2023 pada tanggal 30 Desember 2023.

Jumlah trip dan kompensasi per unit kapal yang melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebagai berikut:

35. OPERATING REVENUES (continued)

a. Sea Freight for Economy Class Passengers (continued)

The value of the agreement for the implementation of public service obligations in the field of sea transportation for economy class passengers sourced from APBN funds for fiscal years 2024 and 2023 amounted to Rp2.870.509.993.000 and Rp2.395.825.599.000, based on the Budget Implementation List (DIPA) of the Budget Section of the State General Treasurer of Central Government Expenditure (BABUN-BPP) for Fiscal Year 2024 Number: SP DIPA-999.07.1.985120/2024 on December 29, 2023 and Fiscal Year 2023 Number: SP DIPA-999.07.1.985120/2023 on December 30, 2023.

The number of trips and compensation per unit of ship carrying out the Sea Transport Sector Public Service Obligations for Economy Class Passengers for Fiscal Year 2024 and 2023 are as follows:

No.	Nama Kapal/ Name of Ship	Jumlah Trip/ Total Voyage		Jumlah Kompensasi/ Total Compensation (Rp)	
		2024	2023	2024	2023
1	KM. Awu	24	24	73.978.369.600	69.639.465.743
2	KM. Binaiya	23	24	83.025.954.434	63.247.405.584
3	KM. Bukit Raya	23	24	85.490.339.934	73.302.840.984
4	KM. Bukit Siguntang	24	23	151.763.493.540	126.844.100.983
5	KM. Ciremai	21	20	113.873.850.590	118.152.399.916
6	KM. Dobonsolo	21	24	117.197.051.875	123.659.935.736
7	KM. Dorolonda	26	25	167.763.622.926	149.457.058.205
8	KM. Egon	21	22	75.019.428.319	64.206.513.323
9	KM. Gunung Dempo	23	24	124.903.441.653	130.271.519.367
10	KM. Jet Liner	44	46	118.493.092.623	87.179.200.574
11	KM. Kelimutu	23	24	81.697.970.409	60.750.092.989
12	KM. Kelud	41	46	114.974.844.553	123.031.259.597
13	KM. Labobar	23	24	182.805.856.365	174.563.733.554
14	KM. Lambelu	24	22	187.479.865.061	136.571.788.229
15	KM. Lawit	22	24	86.776.748.490	75.159.756.053
16	KM. Leuser	13	12	98.694.912.781	76.968.846.448
17	KM. Nggapulu	26	23	178.962.051.526	144.552.295.425
18	KM. Pangrango	23	23	67.986.703.470	61.519.041.151
19	KM. Sangiang	24	24	72.450.303.115	58.634.287.878
20	KM. Sinabung	21	23	118.965.471.625	143.282.608.388
21	KM. Sirimau	12	13	93.622.410.915	82.164.167.937
22	KM. Tatamailau	23	25	86.511.655.491	80.583.508.044
23	KM. Tidar	24	24	165.543.367.180	150.950.745.352
24	KM. Tilongkabila	24	24	81.005.309.621	56.892.436.863
25	KM. Umsini	23	24	73.581.564.677	152.828.616.036
26	KM. Wilis	23	20	67.942.312.804	58.167.335.379
Jumlah/Total		619	631	2.870.509.993.577	2.642.580.959.738

35. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)

b. Kegiatan Pengoperasian Kapal Ternak

Pendapatan penugasan penyelenggaraan subsidi pengoperasian kapal ternak didasarkan pada Perjanjian Penyelenggaraan Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak Trayek RT-1 Tahun Anggaran 2024 Nomor: 01/SATKERLALA/RT-1/XII/2023 dan Nomor: TH.12.29-05/KNP/2023 pada tanggal 29 Desember 2023, yang di amandemen sebanyak 3 kali dengan Nomor: ADD.03/RT-1/LALA-2024 pada tanggal 30 September 2024.

Pekerjaan penyelenggaraan kegiatan subsidi pengoperasian kapal khusus ternak trayek RT-1 tahun anggaran 2024 berdasarkan jaringan trayek tetap dan teratur (*liner*) sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJL 739 Tahun 2023 dan lama waktu pelayaran kapal maksimal dalam 1 (satu) *round voyage* sesuai dengan trayek yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, terhitung dimulai sejak kapal tiba di pelabuhan pangkal (*home base*) sampai dengan kapal tiba kembali di pelabuhan pangkal, setelah berlayar menurut urutan pelabuhan yang telah ditetapkan.

Kapal yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan subsidi tahun anggaran 2024 untuk pengoperasian kapal ternak adalah KM. Camara Nusantara 1, tanpa menggunakan kapal pengganti dengan Trayek: RT-1 Kupang - 201 - Waingapu - 867 - Tanjung Priok - 1179 - Kupang. Waktu pelaksanaan kegiatan KM. Camara Nusantara 1 dengan target frekuensi per tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Nilai perjanjian penyelenggaraan kegiatan subsidi pengoperasian kapal ternak tahun anggaran 2024 sebesar Rp11.638.395.002 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-022.04.1.439454/2024 pada tanggal 23 November 2023.

Sedangkan pendapatan penugasan penyelenggaraan subsidi pengoperasian kapal ternak didasarkan pada Perjanjian Penyelenggaraan Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak Tahun Anggaran 2023 Nomor: 01/SATKERLALA/RT-1/XII/2022 dan Nomor: TH.12.28- 10/SS/2022 tanggal 12 Desember 2022, yang di amandemen sebanyak 2 kali dengan Nomor: ADD-II/SATKERLALA/RT-1/XII/2023 pada tanggal 08 Desember 2023.

35. OPERATING REVENUES (continued)

b. Activities of Operation of Livestock Ships

Revenue from the assignment of subsidies for the operation of livestock vessels is based on the Agreement for the Implementation of Subsidized Activities for the Operation of Livestock Vessels on RT-1 Route for Fiscal Year 2024 Number: 01/SATKERLALA/RT-1/XII/2023 and Number: TH.12.29-05/KNP/2023 on 29 December 2023, which was amended 3 times with Number: ADD.03/RT-1/LALA-2024 on 30 September 2024.

The work of organizing subsidy activities for the operation of livestock vessels year in 2024 is based on a fixed and regular route network according to the Decree of the Director General of Sea Transportation Number: KP-DJL 739, 2023 and the length of ship shipping takes a maximum of one round voyage in accordance with the route stipulated in the Decree of the Director General of Sea Transportation, starting from the time the ship arrives at the base port (*home base*) until the ship arrives back at the base port, after sailing according to the specified port order.

The ship used in the implementation of subsidy activities for fiscal year 2024 for the operation of livestock ships is KM. Camara Nusantara 1, without using a replacement ship with the route: RT-1 Kupang - 201 - Waingapu - 867 - Tanjung Priok - 1179 - Kupang. The implementation time of KM activities. Camara Nusantara 1 with target frequency from January 1, 2024 to December 31, 2024.

The value of the agreement for the implementation of subsidized activities for the operation of livestock vessels in fiscal year 2024 in the amount of Rp11,638,395,002 is charged to the Budget Implementation List (DIPA) Number: SP DIPA-022.04.1.439454/2024 on November 23, 2023.

Assignment income for subsidizing operation of livestock vessels is based on the implementation of subsidization activities subsidy operation of livestock vessel year 2023 Number: 01/SATKERLALA/RT-1/XII/2022 and Number: TH.12.28-10/SS/2022 dated December 12, 2022, which 2 times amended with Number: ADD-II/SATKERLALA/RT-1/XII/2023 dated December 08, 2023.

35. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)

b. Kegiatan Pengoperasian Kapal Ternak (lanjutan)

Pekerjaan penyelenggaraan kegiatan subsidi pengoperasian kapal ternak tahun anggaran 2023 berdasarkan jaringan trayek tetap dan teratur (*liner*) sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJL 679 tahun 2022 dan lama waktu pelayaran kapal maksimal dalam 1 (satu) *round voyage* sesuai dengan trayek yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, terhitung dimulai sejak kapal tiba di pelabuhan pangkal (*home base*) sampai dengan kapal tiba kembali di pelabuhan pangkal, setelah berlayar menurut urutan pelabuhan yang telah ditetapkan.

Kapal yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan subsidi tahun anggaran 2023 untuk pengoperasian kapal ternak adalah KM. Camara Nusantara 1, tanpa menggunakan kapal pengganti kode Trayek: RT-1, yaitu Kupang - 201 - Waingapu - 867 - Tanjung Priok/Patimban - 1179/1005 - Kupang. Waktu pelaksanaan kegiatan KM. Camara Nusantara 1 dengan target frekuensi per tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Nilai perjanjian penyelenggaraan kegiatan subsidi pengoperasian kapal ternak tahun anggaran 2023 sebesar Rp11.240.730.589 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-022.04.439454/2023 tanggal 30 November 2022.

Tarif penyelenggaraan kegiatan subsidi pengoperasian kapal ternak tahun anggaran 2024 dan 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 76 Tahun 2019 tentang Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Ternak.

c. Angkutan Barang di Laut (Tol Laut)

Pendapatan penugasan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut didasarkan pada Perjanjian Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut Tahun Anggaran 2024 Nomor: KTRK/TL-PELNI/XII/2023 dan Nomor: TH.12.29-04/KNP/2023 pada tanggal 29 Desember 2023, yang di amandemen sebanyak 4 kali dengan Nomor: ADD.04/KTRK/TL-PELNI/XII/2024 pada tanggal 04 Desember 2024.

35. OPERATING REVENUES (continued)

b. Activities of Operation of Livestock Ships (continued)

The work of organizing subsidy activities for the operation of livestock vessels year in 2023 is based on a fixed and regular route network according to the Decree of the Director General of Sea Transportation Number KP-DJL 679, 2023 and the length of ship shipping takes a maximum of one round voyage in accordance with the route stipulated in the Decree of the Director General of Sea Transportation, starting from the time the ship arrives at the base port (*home base*) until the ship arrives back at the base port, after sailing according to the specified port order.

The vessel used in the activities of subsidizing fiscal year in 2022 for operation of livestock vessels is KM. Camara Nusantara 1, without the use of a replacement vessel the code of route: RT- 1, namely Kupang - 201 - Waingapu - 867 - Tanjung Priok/Patimban - 1179/1005 - Kupang. The execution time of KM. Camara Nusantara 1 with a target frequency of January 1, 2023 to December 31, 2023.

The value of the activity of subsidizing operations of livestock vessel operation year 2023 amounted to Rp11.240.730.589 is charged to the Register of Budget (DIPA) registration Number: SP DIPA-022.04.439454/2023 dated November 30, 2022.

Rates implementation of the activities of livestock vessels operating subsidy of fiscal year 2024 and 2023 based on Regulation of the Minister of Transportation Republic of Indonesia Number 76 Year 2019 on Freight rates for Ships Operating Subsidies Livestock Event.

c. Freight in the Sea (Sea Toll)

Revenue from the assignment of public service obligations for freight transportation at sea is based on the Agreement for the Implementation of Public Service Obligations for Freight Transportation at Sea for Fiscal Year 2024 Number: KTRK/TL-PELNI/XII/2023 and Number: TH.12.29-04/KNP/2023 on December 29, 2023, which was amended 4 times with Number: ADD.04/KTRK/TL-PELNI/XII/2024 on December 04, 2024.

35. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)

c. Angkutan Barang di Laut (Tol Laut) (lanjutan)

Jumlah trip dan kompensasi per unit kapal dan kode trayek yang melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang di Laut Tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebagai berikut:

No.	Nama Kapal/ Name of Ship	Kode Trayek/ Route Code		Jumlah Trip/ Total Voyage		Jumlah Kompensasi/ Total Compensation (Rp)	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023
1	KM Logistik Nusantara 1	T-26	T-11	10	10	33.582.686.483	31.217.294.648
2	KM Logistik Nusantara 2	H-1	H-1	12	11	27.391.943.064	22.941.874.704
3	KM Logistik Nusantara 3	T-6	T-15	12	11	24.576.158.859	22.682.808.072
4	KM Logistik Nusantara 4	T-2	T-3	11	10	24.621.327.875	22.445.103.120
5	KM Logistik Nusantara 5	T-9	-	10	-	40.256.144.485	-
6	KM Logistik Nusantara 6	-	T-10	-	8	-	40.200.747.249
7	KM Kendhaga Nusantara 1	-	T-5	-	22	-	13.866.463.963
8	KM Kendhaga Nusantara 7	S-5B	T-14	31	10	26.275.421.770	10.093.335.069
9	KM Kendhaga Nusantara 7	-	13B & T-1	-	3	-	4.948.244.974
10	KM Kendhaga Nusantara 8	S-4	T-19A	14	8	17.581.502.979	12.596.211.165
11	KM Kendhaga Nusantara 8	-	T-19B	-	4	-	5.160.302.616
12	KM Kendhaga Nusantara 11	S-5A	T-13	20	10	20.015.586.551	10.878.991.803
TOTAL				120	107	214.300.772.066	197.031.377.383

Kapal Logistik Nusantara 6 merupakan kapal cadangan, sehingga tidak mendapatkan rute trayek normal.

35. OPERATING REVENUES (continued)

c. Freight in the Sea (Sea Toll) (continued)

The number of trips and compensation per unit of ship and route code that carry out the Public Service Transport Obligations in the Sea in the Fiscal Year 2024 and 2023 are as follows:

The Logistik Nusantara 6 ship is a reserve ship, so it does not get normal routes.

d. Kapal Perintis Milik Negara

Pendapatan penugasan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis milik Negara didasarkan pada Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara Tahun Anggaran 2024 Nomor: 01/KTRK/PRTS/PELNI/IXII/2023 dan Nomor TH.12.29-02/KNP/2023 tanggal 29 Desember 2023, yang di amandemen sebanyak 2 kali dengan Nomor: ADD.03/PRTS/PELNI/LALA/2024 pada tanggal 13 November 2024.

Nilai perjanjian penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis milik negara tahun anggaran 2024 sebesar Rp421.753.136.000, yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat Nomor : SP DIPA-022.04.1.439454/2024 pada tanggal 24 November 2023 Revisi ke 12 pada tanggal 03 November 2024.

d. State Owned Pioneer Ships

The revenue for the assignment of the implementation of public service activities of State-owned pioneer ships is based on the Implementation of Public Service Activities of State-Owned Pioneer Ships for Fiscal Year 2024 Number: 01/KTRK/PRTS/PELNI/IXII/2023 and Number TH.12.29-02/KNP/2023 dated December 29, 2023, which was amended 2 times with Number: ADD.03/PRTS/PELNI/LALA/2024 on November 13, 2024.

The value of the agreement for the implementation of public service activities for state-owned pioneer ships in fiscal year 2024 amounted to Rp421.753.136.000, which was charged to the List of Budget Implementation (DIPA) of the Central Sea Transportation Traffic Safety Improvement Work Unit Number: SP DIPA-022.04.1.439454/2024 on November 24, 2023 Revision to 12 on November 03, 2024.

35. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)

d. Kapal Perintis Milik Negara (lanjutan)

Pendapatan penugasan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis milik Negara didasarkan pada Perjanjian Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara Tahun Anggaran 2023 Nomor: 04/KTRK/PRTS/PELNI/IX/2023 dan Nomor TH.09.25-01/KNP/2023 tanggal 25 September 2023, yang di amandemen sebanyak 2 kali dengan Nomor: ADD.01/PRTS/PELNI/III/2023 pada tanggal 02 Maret 2023.

Nilai perjanjian penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis milik negara tahun anggaran 2023 sebesar Rp380.349.898.000, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-022.04.1.439454/2023 tanggal 30 November 2022.

e. Kapal Rede

Pendapatan Kapal Rede didasarkan pada Perjanjian Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Perairan Pelabuhan dengan Menggunakan Kapal Milik Negara (Kapal Rede) Tahun Anggaran 2024 dengan Nomor 01/KTRK/REDE/PELNI/XII/2023 dan Nomor:TH.12.29-03/KNP/2023 pada tanggal 28 Desember 2022, yang di amandemen sebanyak 2 kali dengan Nomor: ADD.04/REDE/XI/LALA/2024 pada tanggal 13 November 2024.

Nilai perjanjian penyelenggaraan kegiatan pelayanan angkutan perairan pelabuhan dengan menggunakan Kapal Milik Negara (Kapal Rede) tahun anggaran 2024 sebesar Rp52.410.233.000 yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat Nomor SP-DIPA 022.04.1.439454/2024 pada tanggal 24 November 2023 Revisi ke 12 tanggal 03 November 2024.

Pendapatan Kapal Rede didasarkan pada Perjanjian Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Perairan Pelabuhan dengan Menggunakan Kapal Milik Negara (Kapal Rede) Tahun Anggaran 2023 dengan Nomor 01/KTRK/REDE/PELNI/XII/2023 dan Nomor:TH.12.28-09/SS/2022 pada tanggal 28 Desember 2022.

35. OPERATING REVENUES (continued)

d. State Owned Pioneer Ships (continued)

The assignment income for public service activities of the State owned pioneer ship is based on the agreement on Organizing public service activities of the State owned pioneer ship fiscal year 2023 Number : 04/KTRK/PRTS/PELNI/IX/2023 and Number TH.09.25-01/KNP/2023 dated September 25, 2023, which 2 times amended with Number: ADD.01/PRTS/PELNI/III/2023 dated March 02, 2023.

The value of the agreement on the implementation of public service activities of pioneering vessels belonging to the State in 2023 fiscal year amounting to Rp380.349.898.000, is charged to the Budget Implementation Entry List (DIPA) No. : SP DIPA-022.04.1.439454/2023 dated November 30, 2022.

e. Rede Ships

Rede Ship Revenue is based on the Agreement for the Implementation of Port Water Transportation Activities Using State-Owned Ships (Rede Ship) for Fiscal Year 2024 with Number 01/KTRK/REDE/PELNI/XII/2023 and Number: TH.12.29-03/KNP/2023 on December 28, 2022, which was amended 2 times with Number: ADD.04/REDE/XI/LALA/2024 on November 13, 2024.

The value of the agreement for the implementation of port water transportation service activities using State-Owned Vessels (Rede Vessels) for fiscal year 2024 amounting to Rp52.410.233.000 which is charged to the List of Budget Implementation Lists (DIPA) of the Central Sea Transportation Traffic Safety Improvement Work Unit Number SP-DIPA 022.04.1.439454/2024 on November 24, 2023 Revision to 12 dated November 03, 2024.

The assignment income for Kapal Rede is based on the Agreement for the Implementation of Port Water Transportation Activities by Using State-Owned Vessels (Rede Ship) for Fiscal Year 2023 with Number 01/KTRK/REDE/PELNI/XII/2023 and Nomor:TH.12.28-09/SS/2022 dated December 28, 2022.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

35. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)

e. Kapal Rede (lanjutan)

Nilai perjanjian penyelenggaraan kegiatan pelayanan angkutan perairan pelabuhan dengan menggunakan Kapal Milik Negara (Kapal Rede) tahun anggaran 2023 sebesar Rp44.000.000.000 yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat Nomor SP-DIPA 022.04.1.439454/2023 Tanggal 30 November 2022.

Pendapatan Penugasan Pemerintah merupakan kompensasi yang diterima dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perhubungan - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atas penyelenggaraan penugasan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation - PSO*) dan Subsidi meliputi:

	2024	2023
Kapal Penumpang Kelas Ekonomi	3.089.914.722.514	2.642.580.959.738
Subsidi - Kapal Perintis	408.522.108.341	578.850.104.656
Subsidi - Kapal Tol Laut	172.005.054.457	174.248.581.339
Subsidi - Kapal Rede	51.484.775.360	41.054.068.289
Subsidi - Kapal Ternak	10.877.167.898	8.593.240.759
Jumlah	3.732.803.828.570	3.445.326.954.781

35. OPERATING REVENUES (continued)

e. Rede Ships (continued)

The amount of the agreement's port water transportation service activities using State Owned Ships (Rede Ship) for the 2023 fiscal year is equal to Rp44.000.000.000 is charged to the Budget Implementation Entry List (DIPA) (DIPA) Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat No. SP-DIPA 022.04.1.439454/2023 dated November 30, 2022.

Government Assignment Revenue is compensation received from the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Transportation - Directorate General of Sea Transportation for the implementation of Public Service Obligation (PSO) and Subsidies assignments including:

*Economy Class Passenger Ships
Subsidies - Pioneer Ships
Subsidies - Sea Toll Ship
Subsidies - Rede Ships
Subsidies - Cattle Ships
Total*

36. BEBAN POKOK PENDAPATAN USAHA

	2024	2023
Perkapalan	1.755.186.205.406	1.902.892.774.389
Pemeliharaan dan Perbaikan	1.094.568.118.496	725.217.535.128
Pegawai	762.188.167.042	788.042.238.070
Penumpang	608.931.545.088	540.459.666.057
Penyusutan dan Amortisasi ^{*)}	371.274.299.345	429.789.982.937
Asuransi	52.180.870.973	52.597.179.450
Sewa	17.801.001.714	2.931.855.970
Perbengkelan	16.539.567.425	16.661.809.803
Kendali Mutu Pelayanan	10.212.749.636	14.208.647.233
Muatan Ternak	6.361.567.616	9.106.349.542
Perhotelan	1.446.037.392	2.552.969.267
Pajak dan Retribusi	-	21.254.000
Beban Pokok Lainnya	433.320.971.532	409.575.311.056
Jumlah	5.130.011.101.665	4.894.057.572.901

^{*)} Lihat Catatan 15,16,17 dan 18

36. COST OF REVENUES

*Shipping
Maintenance and Repair
Employee
Passenger
Depreciation and Amortization ^{*)}
Insurance
Rent
Workshop
Quality Service Control
Livestock Cargo
Hospitality
Taxes and Levies
Other Cost of Revenues
Total*

^{*)} See Note 15, 16, 17, and 18.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

37. BEBAN PEMASARAN DAN DISTRIBUSI

	2024	2023
Kehumasan	14.212.296.899	10.076.245.376
Penjualan	3.175.779.750	5.009.469.814
Pemasaran Lainnya	3.259.972.080	5.275.699.163
Promosi dan Periklanan	3.967.002.353	819.922.010
Jumlah	24.615.051.082	21.181.336.363

*Public Relations
Sales
Others Marketing
Promotion and Advertising
Total*

38. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2024	2023
Pegawai	545.917.973.459	478.109.952.777
Pemeliharaan dan Perbaikan	48.165.870.287	41.218.342.131
Konsultan dan Audit	46.076.912.028	39.083.408.559
Penyusutan dan Amortisasi ^{*)}	38.948.677.430	41.373.767.717
Adminisitrasi Perkantoran	23.871.125.011	18.990.503.329
Rumah Tangga	18.335.224.772	18.637.729.842
Sewa	16.979.319.072	13.133.651.512
Imbalan Paska Kerja	16.529.214.989	17.417.655.411
Provisi Penurunan Nilai Piutang	14.911.900.890	5.448.745.350
PKBL	8.460.538.222	8.041.180.709
Asuransi	8.429.116.642	8.728.328.017
Pajak dan Restribusi	7.195.998.957	13.980.250.546
Keamanan dan Keselamatan	2.223.885.635	826.928.813
Perencanaan dan Pengembangan	1.361.154.726	1.586.561.865
Olah Raga dan Kesenian	1.181.539.275	447.645.873
Sumbangan	374.947.864	993.382.106
Denda/Klaim	36.512.932	23.139.173
Lainnya	29.673.886.239	24.222.530.370
Jumlah	828.673.798.430	732.263.704.100

*Employees
Maintenance and Repair
Audit and Consultant
Amortization and Depreciation ^{*)}
Office Administration
Household
Rent
Post Employment Benefits
Provision of Impairment of Receivables
PKBL
Insurance
Taxes and Levies
Security and Safety
Development and Planning
Sport and Art
Donations
Penalties / Claims
Others*

^{*)} Lihat Catatan 15,16,17 dan 18

^{*)} See Note 15, 16, 17, and 18.

39. PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA

	2024	2023
a. Pendapatan Non Usaha:		
Bunga	150.805.588.251	103.977.620.041
Laba Entitas Asosiasi	(14.004.572.402)	32.401.750.716
Keuntungan Penjualan Aset	10.880.855.648	22.578.587.055
Jasa Administrasi	19.916.668.439	15.724.561.910
Keuntungan Perubahan Nilai Wajar Aset Non Keuangan	84.971.878.744	12.449.175.490
Keuntungan Selisih Kurs	14.038.106.301	9.808.644.374
Jasa Giro	3.362.352.782	4.791.528.084
Klaim Asuransi	2.721.936.998	3.194.800.560
Denda	1.563.276.975	3.011.037.910
Pelunasan Piutang Dihapuskan	-	191.077.866
Lainnya	16.480.520.821	21.802.113.036
Sub Jumlah	290.736.612.557	229.930.897.042

39. NON OPERATING INCOME (EXPENSES)

a. Non-Operating Revenues:
*Interest
Associated Entity's Profit
Gains of Asset Sale
Administration Services
Gains of Changing Fair Value
of Non-Financial Assets
Foreign Exchange Gains
Current Account Service
Insurance Claim
Penalties
Repayment of Accounts Receivable
Others*
Sub Total

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

39. PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA

	2 0 2 4	2 0 2 3
b. Beban Non-Usaha:		
Kerugian Selisih Kurs	12.969.865.505	9.259.962.163
Administrasi Bank	2.815.577.398	3.486.765.288
Beban Keuangan	722.331.065	572.935.932
Lainnya	165.559.735.471	37.206.364.107
Sub Jumlah	182.067.509.439	50.526.027.490
Jumlah Pendapatan		
Non Usaha - Bersih	108.669.103.118	179.404.869.552

Keuntungan perubahan nilai wajar aset non-keuangan merupakan kenaikan perubahan nilai wajar properti investasi tanah dan gedung.

Keuntungan penjualan aset tahun 2024 merupakan penjualan KM Caraka III-22 sebesar Rp7.800.000.000 yang dimiliki oleh entitas induk PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

Keuntungan penjualan aset tahun 2023 merupakan penjualan KM Caraka III-32 dan III-4 Sebesar Rp18.225.225.225 yang dimiliki oleh entitas induk PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan penjualan alat angkut sebesar Rp4.119.611.830 yang dimiliki Entitas Anak PT Pelita Indonesia Djaya.

Pendapatan klaim asuransi merupakan pendapatan klaim KM Logistik Nusantara 4 sebesar Rp1.538.273.307, KM Sirimau sebesar Rp379.757.119, KM Sabuk Nusantara 95 sebesar Rp23.265.935, KM Sabuk Nusantara 91 sebesar Rp527.676.900, KM Wilis sebesar Rp163.069.367, dan KM Sabuk Nusantara 67 sebesar Rp89.894.610.

Laba (Rugi) entitas asosiasi merupakan pengakuan bagian laba (rugi) tahun berjalan PT Rumah Sakit PELNI.

39. NON OPERATING INCOME (EXPENSES)

b. Non-Operating Expenses:
Foreign Exchange Losses
Bank Administration
Financial Expenses
Others

Sub Total

Total Non Operating
Income - Net

The gains of changing the fair value of non-financial assets is an increase in the fair value of investment property of land and buildings.

Gain on sale of assets in 2024 represents the sale of KM Caraka III-22 amounting to Rp7,800,000,000 owned by the parent entity PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

The gain on sale of assets in 2023 represents the sale of KM Caraka III-32 and III-4 amounting to Rp18,225,225,225 owned by the parent entity PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and the sale of transport equipment amounting to Rp4,119,611,830 owned by the subsidiary PT Pelita Indonesia Djaya.

Insurance claim income represents claim income for KM Logistik Nusantara 4 amounting to Rp1,538,273,307, KM Sirimau amounting to Rp379,757,119, KM Sabuk Nusantara 95 amounting to Rp23,265,935, KM Sabuk Nusantara 91 amounting to Rp527,676,900, KM Willis amounting to Rp163,069,367, and KM Sabuk Nusantara 67 amounting to Rp89,894,610.

Profit (Loss) of associates represents the recognition of share of profit (loss) of PT Rumah Sakit PELNI for the year.

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

40. INFORMASI SEGMENT USAHA

40. SEGMENT INFORMATION

a. Segmen Penugasan dan Non Penugasan

a. Assignment and Non Assignment Segment

	2024		2023		
	Penugasan / Assignment	Non Penugasan / Non Assignment	Penugasan / Assignment	Non Penugasan / Non Assignment	
Pendapatan Usaha Bersih	5.076.940.662.329	1.100.115.902.390	4.812.113.075.593	954.505.518.428	Operating Revenues
Beban Pokok Usaha	(4.358.355.888.890)	(771.655.212.775)	(4.029.309.404.009)	(864.749.251.141)	Revenue/Operating Expenses
Laba Kotor	718.584.773.439	328.460.689.615	782.803.671.584	89.756.267.287	Gross Profit
Beban Pemasaran dan Distribusi	-	(24.615.051.082)	-	(21.181.336.363)	Distribution and Marketing Expense
Beban Umum dan Administrasi	(333.359.309.478)	(495.314.488.952)	(344.019.180.241)	(388.243.441.608)	General and Administration Expense
Laba (Rugi) Usaha - dipindahkan	385.225.463.961	(191.468.850.419)	438.784.491.343	(319.668.510.684)	Operating Profit or (Loss) - carried forward

a. Segmen Penugasan dan Non Penugasan

a. Assignment and Non Assignment Segment

	2024		2023		
	Penugasan / Assignment	Non Penugasan / Non Assignment	Penugasan / Assignment	Non Penugasan / Non Assignment	
Laba (Rugi) Usaha - pindahan	385.225.463.961	(191.468.850.419)	438.784.491.343	(319.668.510.684)	Operating Profit or (Loss) - brought forward
Pendapatan (Beban) Non Usaha Lainnya, Bersih	-	108.669.103.118	-	179.404.869.551	Non Operating Income (Expense) Net
Laba Sebelum Pajak	385.225.463.961	(82.799.747.301)	438.784.491.343	(140.263.641.133)	Profit Before Tax
Beban Pajak	(60.923.287.948)	(47.251.993.941)	(57.745.356.907)	(39.144.266.808)	Tax Expense
Laba Tahun Berjalan	324.302.176.013	(130.051.741.242)	381.039.134.436	(179.407.907.941)	Profit For The Current Year

b. Segmen Wilayah

b. Region Segment

b.1. Pendapatan Usaha menurut wilayah

b.1. Operating Revenue by Region

	2024		2023		
	Rp	%	Rp	%	
Sumatera	81.745.595.080	1,32%	81.445.789.799	1,41%	Sumatera
Jawa	5.084.386.315.036	82,31%	4.579.593.197.728	79,42%	Java
Kalimantan	135.183.385.648	2,19%	155.264.705.639	2,69%	Kalimantan
Bali dan Nusra	122.689.284.101	1,99%	148.205.906.534	2,57%	Bali and Nusra
Sulawesi, Maluku dan Papua	753.051.984.854	12,19%	802.108.994.321	13,91%	Sulawesi, Maluku and Papua
Jumlah	6.177.056.564.719	100,00%	5.766.618.594.021	100,00%	Total

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

40. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

b. Segmen Wilayah (lanjutan)

b.2. Hasil Usaha Laba (Rugi) Kotor menurut Wilayah

	2024		2023	
	Rp	%	Rp	%
Sumatera	54.784.019.346	5,23%	52.046.212.039	5,96%
Jawa	486.489.427.343	46,46%	262.526.727.122	30,09%
Kalimantan	97.050.621.305	9,27%	109.143.660.179	12,51%
Bali dan Nusra	30.549.984.021	2,92%	96.431.441.094	11,05%
Sulawesi, Maluku dan Papua	378.171.411.039	36,12%	352.411.898.436	40,39%
Jumlah	1.047.045.463.054	100,00%	872.559.938.870	100,00%

b.3. Aset menurut Wilayah

	2024		2023	
	Rp	%	Rp	%
Sumatera	248.435.710.761	2,46%	212.074.189.687	2,64%
Jawa	9.016.643.170.020	89,42%	6.780.310.176.021	84,37%
Kalimantan	59.084.272.034	0,59%	524.995.136.711	6,53%
Bali dan Nusra	369.881.578.230	3,67%	329.707.555.082	4,10%
Sulawesi, Maluku dan Papua	389.843.574.742	3,87%	188.945.440.102	2,35%
Jumlah	10.083.888.305.787	100,00%	8.036.032.497.603	100,00%

b.4. Properti Investasi, Alat Produksi, Aset Tetap, Aset Takberwujud dan Aset Hak Guna menurut Wilayah

	2024		2023	
	Rp	%	Rp	%
Sumatera	34.198.221.329	1,29%	33.330.260.196	1,25%
Jawa	2.383.079.775.602	89,61%	2.391.448.495.628	89,84%
Kalimantan	40.441.932.875	1,52%	37.519.103.924	1,41%
Bali dan Nusra	24.781.717.273	0,93%	22.623.609.709	0,85%
Sulawesi, Maluku dan Papua	176.840.726.070	6,65%	177.011.866.891	6,65%
Jumlah	2.659.342.373.149	100,00%	2.661.933.336.348	100,00%

40. SEGMENT INFORMATION (continued)

b. Region Segment (continued)

b.2. Results of Gross Operations Income (loss) by Region

	2024		2023	
	Rp	%	Rp	%
Sumatera	54.784.019.346	5,23%	52.046.212.039	5,96%
Jawa	486.489.427.343	46,46%	262.526.727.122	30,09%
Kalimantan	97.050.621.305	9,27%	109.143.660.179	12,51%
Bali and Nusra	30.549.984.021	2,92%	96.431.441.094	11,05%
Sulawesi, Maluku and Papua	378.171.411.039	36,12%	352.411.898.436	40,39%
Total	1.047.045.463.054	100,00%	872.559.938.870	100,00%

b.3. Assets by Region

	2024		2023	
	Rp	%	Rp	%
Sumatera	248.435.710.761	2,46%	212.074.189.687	2,64%
Jawa	9.016.643.170.020	89,42%	6.780.310.176.021	84,37%
Kalimantan	59.084.272.034	0,59%	524.995.136.711	6,53%
Bali and Nusra	369.881.578.230	3,67%	329.707.555.082	4,10%
Sulawesi, Maluku and Papua	389.843.574.742	3,87%	188.945.440.102	2,35%
Total	10.083.888.305.787	100,00%	8.036.032.497.603	100,00%

b.4. Investment Property, Production Equipment, Fixed Assets, Intangible Assets and Right to Use Assets by Region

	2024		2023	
	Rp	%	Rp	%
Sumatera	34.198.221.329	1,29%	33.330.260.196	1,25%
Jawa	2.383.079.775.602	89,61%	2.391.448.495.628	89,84%
Kalimantan	40.441.932.875	1,52%	37.519.103.924	1,41%
Bali and Nusra	24.781.717.273	0,93%	22.623.609.709	0,85%
Sulawesi, Maluku and Papua	176.840.726.070	6,65%	177.011.866.891	6,65%
Total	2.659.342.373.149	100,00%	2.661.933.336.348	100,00%

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

40. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

b. Segmen Wilayah (lanjutan)

b.5. Biaya penyusutan menurut wilayah

	2024		2023	
	Rp	%	Rp	%
Sumatera	882.420.225	0,22%	926.583.130	0,20%
Jawa	396.548.416.977	96,69%	457.468.815.503	97,31%
Kalimantan	2.414.131.917	0,59%	2.296.795.497	0,49%
Bali dan Nusra	984.072.797	0,24%	838.188.113	0,18%
Sulawesi, Maluku dan Papua	9.284.115.132	2,26%	8.595.827.017	1,83%
Jumlah	410.113.157.048	100,00%	470.126.209.260	100,00%

b.6. Liabilitas menurut wilayah

	2024		2023	
	Rp	%	Rp	%
Sumatera	12.182.276.319	0,78%	16.850.322.091	1,39%
Jawa	1.470.970.101.898	94,24%	1.081.420.616.303	89,20%
Kalimantan	25.091.804.942	1,61%	31.229.544.589	2,58%
Bali dan Nusra	13.127.876.781	0,84%	21.519.880.055	1,78%
Sulawesi, Maluku dan Papua	39.465.751.274	2,53%	61.271.141.563	5,05%
Jumlah	1.560.837.811.214	100,00%	1.212.291.504.601	100,00%

Sumatera
Java
Kalimantan
Bali and Nusra
Sulawesi, Maluku and
Papua
Total

40. SEGMENT INFORMATION (continued)

b. Region Segment (continued)

b.5. Depreciation costs by region

b.6. Liabilities by region

41. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak - pihak berelasi dengan rincian sebagai berikut :

41. RELATED PARTY TRANSACTION

The nature of relationship and type of material transactions with related parties with details as follow:

No.	Pihak-Pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan Pihak-Pihak Berelasi/ Nature of relationship Related Parties	Transaksi/ Transactions
1	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah R,I, / Financial Institution Controlled by Government of The Republic of Indonesia	Setara Kas, Piutang, Utang Usaha / Cash Equivalent, Receivable, Account Payable
2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah R,I, / Financial Institution Controlled by Government of The Republic of Indonesia	Setara Kas, Piutang / Cash Equivalent, Receivable
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah R,I, / Financial Institution Controlled by Government of The Republic of Indonesia	Setara Kas / Cash equivalent

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

41. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

41. RELATED PARTY TRANSACTION (continued)

No.	Pihak-Pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan Pihak-Pihak Berelasi/ Nature of relationship Related Parties	Transaksi/ Transactions
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah R.I. / Financial Institution Controlled by Government of The Republic of Indonesia	Setara Kas / Cash equivalent
5	PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah R.I. / Financial Institution Controlled by Government of The Republic of Indonesia	Setara Kas / Cash equivalent
6	PT Adhi Karya	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Piutang, Aset Keuangan Lancar Lainnya / Receivable, Other Current Financial Asset
7	PT Jembatan Nusantara	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Piutang / Receivable
8	Yayasan Kesehatan Pensiunan Peln	Personil Kunci / Common Key Management	Piutang, Aset Keuangan Lancar Lainnya / Receivable, Other Current
9	PT Hakaaston	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Aset Keuangan Lancar Lainnya / Other Current Financial Asset
10	Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Piutang / Receivable
11	PT Telekomunikasi Seluler	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Piutang / Receivable
12	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Utang, Piutang, Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya / Receivable - Payable - Other Short Term Financial Liabilities
13	PT PP Urban	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Piutang / Receivable
14	PT Waskita Karya	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Piutang / Receivable
15	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Piutang / Receivable
16	PT PINDAD Internasional	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Piutang / Receivable
17	PT Jasa Prima Logistik	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Piutang / Receivable
18	PT Semen Indogreen Sentosa	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Piutang, Aset Keuangan Lancar Lainnya / Receivable - Other Current Financial Asset

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

41. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan) **41. RELATED PARTY TRANSACTION (continued)**

19	Perum Bulog	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Aset Keuangan Lancar Lainnya / Other Current Financial Asset
20	PT Pertamina Patra Niaga	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Utang / Payable
21	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Utang / Payable
22	PT Dock Perkapalan Kodja Bahari	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Utang / Payable
23	PT Sucofindo (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Utang / Payable
24	Kepala Operasi QQ Pelabuhan	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Utang / Payable
25	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Utang / Payable
26	PT Pertamina (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Utang / Payable
27	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Utang Piutang / Receivable - Payable
28	PT Jasa Raharja Putera	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya / Other Short Term Financial Liabilities
29	PT Netra Setya Santosa	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Aset Keuangan Lancar Lainnya / Other Current Financial Asset
30	PT Adhi Persada Gedung	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Aset Keuangan Lancar Lainnya / Other Current Financial Asset
31	PT Jasa Raharja (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya / Other Short Term Financial Liabilities
32	PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / Entity Controlled by the Government of The Republic of Indonesia	Utang Piutang / Receivable - Payable

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

41. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI **41. RELATED PARTY TRANSACTION** (lanjutan) (continued)

Jumlah transaksi dengan pihak-pihak berelasi tahun 2024
dan 2023 sebagai berikut:

The amount of transactions with related parties in year
2024 and 2023 is as follows:

No.	Pihak-Pihak Berelasi/ Related Parties	Jenis Transaksi/Transaction Type	Jumlah (Rp)/ Amount (Rp)	
			2024	2023
1	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	Kas dan Setara Kas/Cash and Cash Equivalents	314.934.424.911	281.575.752.261
		Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya/ Restricted Cash and Cash Equivalent	187.076.944.823	180.182.740.328
		Piutang Usaha / Accounts Receivable	1.332.000	-
		Utang Usaha/Account Payable	73.447.082	-
2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	Kas dan Setara Kas/Cash and Cash Equivalents	861.761.700.152	797.152.408.747
		Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya/ Penempatan Jangka Pendek/Short Term Investment	-	57.300.000
		Piutang Usaha / Accounts Receivable	802.136.870	119.304.857
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	Kas dan Setara Kas/Cash and Cash Equivalents	585.287.997.327	649.778.584.170
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	Kas dan Setara Kas/Cash and Cash Equivalents	731.621.660.858	742.835.165.241
5	PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	Kas dan Setara Kas/Cash and Cash Equivalents	1.615.523.288.321	1.018.537.109.337
6	PT Adhi Karya	Piutang Usaha / Accounts Receivable	30.219.016.239	16.688.163.356
		Aset Keuangan Lancar Lainnya/Other Current Financial Assets	17.555.993.126	532.617.005
7	PT Jembatan Nusantara	Piutang Usaha / Accounts Receivable	5.252.492.526	8.445.206.939
8	Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni	Piutang Usaha/Accounts Receivable	8.122.532.777	8.115.482.777
		Utang Usaha/Account Payable	239.427.329	1.079.238.547
		Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya/ Other Short Term Financial Liabilities	-	1.946.534.199
9	PT Hakaaston	Piutang Usaha / Accounts Receivable	260.969.965	7.881.677.596
		Aset Keuangan Lancar Lainnya/Other Current Financial Assets	1.139.743.173	1.031.407.690
10	Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat	Piutang Usaha / Accounts Receivable	863.069.200	1.829.078.586
11	PT Telekomunikasi Indonesia	Piutang Usaha / Accounts Receivable	2.614.260.530	1.233.546.730
		Utang Usaha/Account Payable	582.245.929	
12	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Piutang Usaha/Accounts Receivable	547.259.239	1.093.148.035
		Utang Usaha/Account Payable	3.561.323.180	6.822.642.017
		Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya/ Other Short Term Financial Liabilities	11.333.543.882	10.606.857.460
13	PT PP Urban	Piutang Usaha / Accounts Receivable	687.171.496	1.037.171.496
14	PT Waskita Karya	Piutang Usaha / Accounts Receivable	1.067.443.000	1.067.443.000

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

41. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan) **41. RELATED PARTY TRANSACTION (continued)**

No.	Pihak-Pihak Berelasi/ Related Parties	Jenis Transaksi/Transaction Type	Jumlah (Rp)/ Amount (Rp)	
			2024	2023
15	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Piutang Usaha / Accounts Receivable	860.817.498	860.817.498
16	PT Jasa Prima Logistik	Piutang Usaha / Accounts Receivable	686.531.446	-
17	PT PINDAD Internasional	Piutang Usaha / Accounts Receivable	700.000.000	700.000.000
18	PT Semen Indogreen Sentosa	Aset Keuangan Lancar Lainnya/Other Current Financial Assets	7.978.479.160	73.432.043.258
		Piutang Usaha / Accounts Receivable	7.899.847.912	6.114.263.118
19	Perum Bulog	Aset Keuangan Lancar Lainnya/Other Current Financial Assets	-	3.984.116.400
20	PT Netra Setya Santosa	Aset Keuangan Lancar Lainnya/Other Current Financial Assets	2.838.825.000	-
21	PT Adhi Persada Gedung	Aset Keuangan Lancar Lainnya/Other Current Financial Assets	2.194.900.000	-
22	PT Pertamina Patra Niaga	Utang Usaha/Account Payable	1.619.081.607	6.200.424.585
23	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Utang Usaha/Account Payable	1.483.691.265	2.469.768.877
24	PT Dock Perkapalan Kodja Bahari	Utang Usaha/Account Payable	-	1.283.022.367
25	PT Sucofindo (Persero)	Utang Usaha/Account Payable	537.915.000	1.237.095.000
26	Kepala Operasi QQ Pelabuhan	Utang Usaha/Account Payable	1.023.757.967	748.301.885
26	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Utang Usaha/Account Payable	-	716.504.276
27	PT Pertamina (Persero)	Utang Usaha/Account Payable	-	628.552.000
28	PT Jasa Raharja Putera	Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya/ Other Short Term Financial Liabilities	1.983.539.151	1.297.195.356
29	PT Jasa Raharja (Persero)	Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya/ Other Short Term Financial Liabilities	1.684.944.545	77.660.652

42. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Berikut ikhtisar nilai tercatat dan estimasi nilai wajar instrumen keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian:

42. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

Here's an overview of the carrying value and the estimated fair value of financial instruments as stated in the statement of consolidated financial position:

	31 Desember/December 31, 2024	
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value
Aset Keuangan:		
Kas dan Setara Kas	4.114.738.607.336	4.114.738.607.336
Piutang Usaha	125.898.446.328	125.898.446.328
Aset Keuangan Lancar Lainnya	2.053.078.385.342	2.053.078.385.342
Jumlah	6.293.715.439.006	6.293.715.439.006

Financial Assets:
Cash and Cash Equivalent
Account Receivables
Other Current Financial Assets
Total

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

42. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan) **42. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)**

	31 Desember/December 31, 2024		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	
Liabilitas Keuangan:			Financial Liability:
Pinjaman Jangka Pendek	7.000.000.000	7.000.000.000	Short-Term Loans
Utang Usaha	218.134.048.166	218.134.048.166	Account Payables
Beban Akrua	918.686.105.264	918.686.105.264	Accrued Expenses
Bagian Lancar atas:			Current Portion of:
Utang Kepada Negara	3.560.447.790	3.560.447.790	Debt to the State
Liabilitas Jangka Panjang	278.815.061	278.815.061	Long-Term Liabilities
Liabilitas Kontrak	94.463.591.779	94.463.591.779	Contract Liability
Liabilitas Keuangan			Other Short Term
Jangka Pendek Lainnya	149.448.170.961	149.448.170.961	Financial Liabilities
Utang Kepada Negara	24.923.134.530	24.923.134.530	Debt to the State
Liabilitas Jangka Panjang	10.114.309.854	10.114.309.854	Long-Term Liabilities
Jumlah	1.426.608.623.405	1.426.608.623.405	Total
	31 Desember/December 31, 2023		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset Keuangan:			Financial Assets:
Kas dan Setara Kas	3.494.572.510.108	3.494.572.510.108	Cash and Cash Equivalent
Piutang Usaha	118.837.699.666	118.837.699.666	Account Receivables
Aset Keuangan Lancar Lainnya	811.020.551.456	811.020.551.456	Other Current Financial Assets
Jumlah	4.424.430.761.229	4.424.430.761.229	Total
Liabilitas Keuangan:			Financial Liability:
Pinjaman Jangka Pendek	22.000.000.000	22.000.000.000	Short-Term Loans
Utang Usaha	205.462.829.587	205.462.829.587	Account Payables
Beban Akrua	599.334.661.433	599.334.661.433	Accrued Expenses
Bagian Lancar atas:			Current Portion of:
Utang Kepada Negara	3.621.510.600	3.621.510.600	Debt to the State
Liabilitas Jangka Panjang	4.519.052.786	4.519.052.786	Long-Term Liabilities
Liabilitas Kontrak	78.061.221.471	78.061.221.471	Contract Liability
Liabilitas Keuangan			Other Short Term
Jangka Pendek Lainnya	39.898.210.351	39.898.210.351	Financial Liabilities
Utang Kepada Negara	28.972.084.800	28.972.084.800	Debt to the State
Liabilitas Jangka Panjang	8.228.142.102	8.228.142.102	Long-Term Liabilities
Jumlah	990.097.713.130	990.097.713.130	Total

43. RASIO PENGGUNAAN UTANG YANG TERKENA BUNGA **43. INTEREST BEARING DEBT RATIO**

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	Deviasi/ Deviation (%)	
Utang yang Terkena Bunga	13.923.726.433	32.427.093.158	20.833.291.144	Interest-Bearing Debt
Utang terkena Bunga/ Ekuitas	0,16%	0,48%	0,30%	Interest-Bearing Debt/ Equity

44. KAJIAN ATAS KELANGSUNGAN USAHA - TIDAK DIAUDIT

Z-score model dikembangkan dari kombinasi beberapa formula analisis rasio keuangan untuk perusahaan yang belum *go-public* oleh Edwards Altman dengan formula sebagai berikut:

Rasio/ Ratio		
Likuiditas	6,56	x
Profitabilitas	3,26	x

Z-score model dikembangkan dari kombinasi beberapa formula analisis rasio keuangan untuk perusahaan yang belum *go-public* oleh Edwards Altman dengan formula sebagai berikut: (lanjutan)

Rasio/ Ratio		
Profitabilitas	6,72	x
Solvabilitas	1,05	x

Untuk perusahaan non manufaktur, klasifikasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Jika hasilnya, $Z < 1,1$ mengindikasikan Perusahaan berpotensi besar pailit.
- Jika hasilnya, $1,1 < Z < 2,60$ mengindikasikan terdapat kondisi keuangan Perusahaan yang perlu perhatian khusus.
- Jika hasilnya, $Z > 2,60$ mengindikasikan Perusahaan bagus dan aman dari kepailitan.

44. REVIEW OF THE GOING CONCERN - UNAUDITED

Z-score model was developed from a combination of some formula of financial ratio analysis for companies that go public yet by Edwards Airman with the formula as follows:

Rumus/ Formula Altman Z-Score	
Modal Kerja Bersih / Net Working Capital Jumlah Aset / Total Assets	
Akumulasi Saldo / Retained Earning Jumlah Aset / Total Assets	

Z-score model was developed from a combination of some formula of financial ratio analysis for companies that go public yet by Edwards Airman with the formula as follows: (continued)

Rumus/ Formula Altman Z-Score	
Laba Sebelum Bunga & Pajak / Earning Before Tax & Interest Jumlah Aset / Total Assets	
Nilai Buku Ekuitas / Book Value of Equity Jumlah Kewajiban / Total Liabilities	

For non-manufacturing companies, the classification used is as follows:

- If the result is, $Z < 1.1$ indicates the Company has a great potential for bankruptcy.
- If the result, $1.1 < Z < 2.60$ indicates that there is a financial condition of the Company that needs special attention.
- If the result is, $Z > 2.60$ indicates that the Company is good and safe from bankruptcy.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

44. KAJIAN ATAS KELANGSUNGAN USAHA - TIDAK DIAUDIT (lanjutan)

Z-score model dikembangkan dari kombinasi beberapa formula analisis rasio keuangan untuk perusahaan yang belum *go-public* oleh Edwards Altman dengan formula sebagai berikut:

2024		
Rasio/ Ratio	Rumus/ Formula Altman Z-Score	Jumlah/Total
Likuiditas	$6,56 \times \frac{5.715.038.196.136}{10.083.888.305.787}$	3,72
Profitabilitas	$3,26 \times \frac{(916.599.250.880)}{10.083.888.305.787}$	(0,30)
Profitabilitas	$6,72 \times \frac{194.478.944.607}{10.083.888.305.787}$	0,13
Solvabilitas	$1,05 \times \frac{8.523.050.494.573}{1.560.837.811.214}$	5,73
Jumlah/Total		9,28

Berdasarkan hasil perhitungan Z-Score model pada tahun berjalan diperoleh skor sebesar 9,28 sehingga mengindikasikan sangat jauh diatas batas aman dari kepailitan ($Z > 2,60$) atau dapat diartikan bahwa, dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan dan entitas anaknya secara konsolidasi sangat mampu menjaga kelangsungan usahanya.

44. REVIEW OF THE GOING CONCERN - UNAUDITED (continued)

Z-score model was developed from a combination of some formula of financial ratio analysis for companies that go public yet by Edwards Airman with the formula as follows:

Based on the results of the Z-Score model calculation in the current year a score of 9,28 was obtained, indicating that it is very far above "safe from bankruptcy" limit or it can be interpreted that, in carrying out its activities, the company and its subsidiaries in a consolidated manner are very capable of maintaining business continuity.

2023		
Rasio/ Ratio	Rumus/ Formula Altman Z-Score	Jumlah/Total
Likuiditas	$6,56 \times \frac{4.049.805.832.315}{8.036.032.497.605}$	3,31
Profitabilitas	$3,26 \times \frac{(1.110.472.524.206)}{8.036.032.497.605}$	(0,45)
Profitabilitas	$6,72 \times \frac{299.093.786.141}{8.036.032.497.605}$	0,25
Solvabilitas	$1,05 \times \frac{6.823.740.993.005}{1.212.291.504.600}$	5,91
Jumlah/Total		9,02

44. KAJIAN ATAS KELANGSUNGAN USAHA - TIDAK DIAUDIT (lanjutan)

Berdasarkan hasil perhitungan Z-Score model pada tahun berjalan diperoleh skor sebesar 9,02 sehingga mengindikasikan sangat jauh diatas batas aman dari kepailitan ($Z > 2,60$) atau dapat diartikan bahwa, dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan dan entitas anaknya secara konsolidasi sangat mampu menjaga kelangsungan usahanya.

45. PERKARA-PERKARA LITIGASI

- a. Dugaan Tindak Pidana Penyediaan dan Pemeliharaan Layanan Sistem Komunikasi Kapal (SISKOMKAP) di Polda Metro Jaya

Penyelidikan atas dugaan tindak pidana terkait penyediaan dan pemeliharaan layanan Sistem Komunikasi Kapal (SISKOMKAP) Tahun Anggaran 2021 telah dilakukan. Dalam perkembangannya, berdasarkan Surat Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Nomor: B/289/I/RES.3.3/2024/Ditreskrimsus tanggal 24 Januari 2024 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), disampaikan bahwa hasil penyelidikan dugaan tindak pidana dalam proyek SISKOMKAP pada PT PELNI (Persero) Tahun Anggaran 2021 belum dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena belum ditemukan adanya peristiwa pidana maupun potensi kerugian keuangan negara.

Status hukum: Selesai

- b. Peninjauan Kembali atas Aset Jl. Angkasa No. 18, Kemayoran (Peninjauan Kembali Kedua).

Upaya Hukum terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Hasan Ismail yang diduga menyuruh menempatkan keterangan palsu atau pemalsuan surat atau akta otentik di tempat kejadian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Pasal 266 KUHP dan/atau 263 KUHP dan/atau 264 KUHP.

Status hukum: Dalam proses penyidikan dan akan dilakukan pemeriksaan terhadap terlapor serta para saksi ahli yakni saksi ahli pidana, ahli bahasa, ahli sejarah serta saksi-saksi dari KUA, Dukcapil, Badan Pertanahan untuk kemudian dilaksanakan gelar perkara di Bareskrim Polri.

44. REVIEW OF THE GOING CONCERN - UNAUDITED (continued)

Based on the results of the Z-Score model calculation in the current year a score of 9.02 was obtained, indicating that it is very far above "safe from bankruptcy" limit or it can be interpreted that, in carrying out its activities, the company and its subsidiaries in a consolidated manner are very capable of maintaining business continuity.

45. LITIGATION CASES

- a. The Alleged Criminal Act Related to the Provision and Maintenance of the Ship Communication System (SISKOMKAP) is Under Investigation by the Greater Jakarta Metropolitan Regional Police (Polda Metro Jaya).

An investigation into the alleged criminal act related to the provision and maintenance of the Ship Communication System (SISKOMKAP) for Fiscal Year 2021 has been conducted. In its development, based on the letter from the Greater Jakarta Metropolitan Regional Police Number: B/289/I/RES.3.3/2024/Ditreskrimsus dated January 24, 2024, regarding the Notification Letter on the Progress of Investigation Results (SP2HP), it was conveyed that the investigation into the alleged criminal act in the SISKOMKAP project at PT PELNI (Persero) for Fiscal Year 2021 cannot be elevated to the investigation stage, as no criminal offense or potential state financial loss has been identified.

Legal Status: Done

- b. Asset Review Jl. Angkasa No. 18, Kemayoran (Second Review).

Legal efforts related to the alleged crime committed by Hasan Ismail who allegedly ordered to place false statements or falsify authentic letters or deeds at the scene of the Central Jakarta District Court in accordance with Article 266 of the Criminal Code and/or 263 of the Criminal Code and/or 264 of the Criminal Code.

Legal Status: In the process of investigation and examination will be carried out on the reported party and expert witnesses, namely criminal expert witnesses, linguists, historians and witnesses from the KUA, Dukcapil, the Land Agency to then hold the case at Bareskrim Polri.

45. PERKARA-PERKARA LITIGASI (lanjutan)

- b. Peninjauan Kembali atas Aset Jl. Angkasa No. 18, Kemayoran (Peninjauan Kembali Kedua). (lanjutan)

Tindak lanjut tahun 2023: Proses penyidikan masih berlanjut pada tahap penyidik menunggu surat izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan dalam rangka sebagai dasar melakukan penyitaan terhadap alat bukti surat yang diduga palsu.

Status Hukum : Dalam Proses

- c. Dugaan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Pegawai atas tindakan Membuat Surat Palsu atau Memalsukan dan/atau Penggelapan yang terjadi di PT PELNI (Persero) Terminal Point Lhokseumawe pada Polres Lhokseumawe Tahun 2023.

Pegawai PT PELNI (Persero) yang bertugas di Terminal Point Lhokseumawe atas nama M. Aprian diduga telah melakukan penyalahgunaan keuangan perusahaan. PT PELNI (Persero) telah melaporkan yang bersangkutan ke Polres Lhokseumawe sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/235/VI/2023/SPKT/POLRESLHOKSEUMAWE/ POLDA ACEH tanggal 16 Juni 2023 atas dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP. Penanganan perkara dilakukan melalui pemeriksaan oleh Penyidik terhadap saksi-saksi baik dari PT PELNI (Persero) Kantor Pusat maupun Cabang Medan. Dalam perkembangannya, Penyidik Polres Lhokseumawe telah menetapkan M. Aprian sebagai tersangka sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Nomor: Sp. Tap/300.6/IX/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 22 September 2023. Selanjutnya, perkara dilanjutkan ke proses persidangan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dengan pemeriksaan saksi-saksi dari PT PELNI (Persero) dan Kuasa Hukum PT PELNI (Persero). Pada tanggal 5 Maret 2024, Pengadilan Negeri Lhokseumawe menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Muhammad Aprian Bin Rusli dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, serta menjatuhkan pidana penjara selama tiga (3) tahun sejak masa penangkapan pada tanggal 30 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Petikan Putusan

Status Hukum: Selesai

45. LITIGATION CASES (continued)

- b. Asset Review Jl. Angkasa No. 18, Kemayoran (Second Review) (continued)

Follow-up in 2023: The investigation process is still continuing at the investigator stage, waiting for a special confiscation permit to the chairman of the South Jakarta district court as a basis for confiscating documentary evidence that is suspected of being fake.

Legal Status: On Progress

- c. The Alleged Criminal Act Committed by an Employee Involving the Forging or Falsification of Documents and/or Embezzlement at PT PELNI (Persero) Terminal Point Lhokseumawe is Under Investigation by the Lhokseumawe Police Department in 2023.

An employee of PT PELNI (Persero) assigned to the Terminal Point Lhokseumawe, named M. Aprian, was suspected of misusing company funds. PT PELNI (Persero) reported the individual to the Lhokseumawe Police as stated in Police Report Number: LP/B/235/VI/2023/SPKT/POLRES LHOKSEUMAWE/POLDA ACEH dated June 16, 2023, concerning an alleged criminal act of embezzlement as referred to in Article 374 of the Indonesian Penal Code (KUHP). The case was handled through an investigation by the Lhokseumawe Police, including the examination of witnesses from both the PT PELNI (Persero) Head Office and the Medan Branch Office. Subsequently, the Lhokseumawe Police named M. Aprian as a suspect based on the Determination Letter Number: Sp. Tap/300.6/IX/RES.1.11/2023/Reskrim dated September 22, 2023. The case then proceeded to trial at the Lhokseumawe District Court, during which witnesses from PT PELNI (Persero) and the company's legal counsel were examined. On March 5, 2024, the Lhokseumawe District Court rendered a verdict against the defendant, Muhammad Aprian Bin Rusli, declaring him legally and convincingly guilty of the criminal act of embezzlement in office and sentencing him to three (3) years of imprisonment starting from his arrest on September 30, 2023, as stated in the Verdict Excerpt Number 194/Pid.B/2023/PN Lsm dated March 5, 2024.

Status Hukum: Selesai

45. PERKARA-PERKARA LITIGASI (lanjutan)

- d. Dugaan Tindak Pidana terkait Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang (Tol Laut) Tahun Anggaran 2021

Penyidik pada Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi terkait kegiatan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang (Tol Laut) Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/604/I/RES.3.3./2024/Ditreskrimsus tanggal 18 Januari 2024. Menindaklanjuti hal tersebut, Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya mengirimkan Surat Nomor: B/1347/I/RES.3.3./2024/Ditreskrimsus tanggal 31 Januari 2024 yang pada intinya meminta Direktur PT PELNI (Persero) untuk menunjuk pegawai yang dapat memberikan keterangan terkait kegiatan dimaksud pada Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2021, dengan membawa dokumen-dokumen pendukung. Dalam perkembangannya, berdasarkan Surat Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Nomor: B/1449/IV/RES.3.3./2024/Ditreskrimsus tanggal 19 April 2024 perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, disampaikan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana dalam kegiatan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang (Tol Laut) pada Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2021, tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara, sehingga untuk memberikan kepastian hukum, penyelidikan terhadap laporan informasi tersebut dihentikan.

Status Hukum: Selesai

45. LITIGATION CASES (continued)

- d. Alleged Criminal Act Related to the Implementation of Public Service Obligation for Freight Transportation (Tol Laut) in Fiscal Year 2021

Investigators from the Special Criminal Investigation Directorate (Ditreskrimsus) of the Greater Jakarta Metropolitan Regional Police have conducted an investigation into the alleged criminal act of corruption related to the implementation of the public service obligation (PSO) for freight transportation (Tol Laut) in the Fiscal Year 2021, as stated in the Investigation Order Number: SP.Lidik/604/I/RES.3.3./2024/Ditreskrimsus dated January 18, 2024. Following up on this matter, the Director of Special Criminal Investigation at the Greater Jakarta Metropolitan Regional Police issued Letter Number: B/1347/I/RES.3.3./2024/Ditreskrimsus dated January 31, 2024, essentially requesting the President Director of PT PELNI (Persero) to appoint an employee who could provide information regarding the said activity at the Work Unit for Maritime Traffic Safety Improvement of the Directorate General of Sea Transportation, Ministry of Transportation, for the Fiscal Year 2021, and to bring related supporting documents. In its development, based on the Letter from the Greater Jakarta Metropolitan Regional Police Number: B/1449/IV/RES.3.3./2024/Ditreskrimsus dated April 19, 2024, regarding notification on the progress of the investigation, it was conveyed that based on the results of the investigation into the alleged criminal act in the implementation of the public service obligation for freight transportation (Tol Laut) at the aforementioned work unit, no unlawful act causing state financial losses was found. Therefore, to provide legal certainty, the investigation into the information report has been discontinued.

Legal Status: Done

45. PERKARA-PERKARA LITIGASI (lanjutan)

e. Dugaan Tindak Pidana di KM Labobar

Terkait dengan dugaan kasus penumpang hilang di KM Labobar dalam perjalanan dari Pelabuhan Nabire menuju Pelabuhan Jayapura, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Papua telah melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana penculikan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp-Lidik/274/III/RES.1.5./2024/Ditreskrimum tanggal 19 Maret 2024, berdasarkan surat pengaduan dari LBH Papua kepada Direktur Reskrimum Polda Papua tanggal 12 Maret 2024. Menindaklanjuti hal tersebut, Divisi Hukum & Kepatuhan telah melakukan koordinasi dengan Penyidik Ditreskrimum Polda Papua, di mana telah diserahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kejadian dimaksud serta dilakukan permintaan keterangan (BAP) terhadap Pegawai PT PELNI (Persero) dan ABK KM Labobar. Terkait perkara tersebut, telah dilakukan pertemuan mediasi antara PT PELNI (Persero) yang diwakili oleh Kuasa Hukum, PT PELNI (Persero) Cabang Jayapura, dan perwakilan keluarga Sdr. Abed Pigome sebagaimana tertuang dalam Surat Ditreskrimum Polda Papua Nomor: B/1103/X/RES.1.5./2024/Ditreskrimum tanggal 29 Oktober 2024 perihal undangan mediasi di Ruang Unit IV Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Papua.

Dalam perkembangannya, Divisi Hukum & Kepatuhan bersama Kuasa Hukum PT PELNI (Persero) telah melakukan koordinasi dengan Penyidik Ditreskrimum Polda Papua untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan, dan telah dilakukan pertemuan untuk penyelesaian melalui mekanisme Restorative Justice (RJ), yang kemudian ditandatangani Surat Pernyataan dan Surat Kesepakatan Perdamaian. Berdasarkan kesepakatan tersebut, perwakilan keluarga Sdr. Abed Pigome telah membuat Surat Permohonan Pencabutan Laporan kepada Direktur Reskrimum Polda Papua pada tanggal 19 Desember 2024 yang pada intinya menyatakan bahwa perkara telah diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak akan menuntut secara hukum di kemudian hari terhadap pihak PT PELNI (Persero). Saat ini, Divisi Hukum & Kepatuhan masih menunggu SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) dari Penyidik Ditreskrimum Polda Papua, yang terus dikoordinasikan oleh Kuasa Hukum PT PELNI (Persero).

Status Hukum: Dalam Proses

45. LITIGATION CASES (continued)

e. Alleged Criminal Act on KM Labobar

In connection with the alleged case of a missing passenger on KM Labobar traveling from Nabire Port to Jayapura Port, investigators from the Directorate of General Criminal Investigation (Ditreskrimum) of the Papua Regional Police have conducted an investigation into the alleged criminal act of abduction, as outlined in Investigation Order Number: Sp-Lidik/274/III/RES.1.5./2024/Ditreskrimum dated March 19, 2024, following a complaint letter from LBH Papua to the Director of Ditreskrimum Papua Regional Police dated March 12, 2024. In response, the Legal & Compliance Division coordinated with the Ditreskrimum Papua investigators, during which relevant documents regarding the incident were submitted, and statements (BAP) were taken from PT PELNI (Persero) employees and the crew of KM Labobar. Regarding the case, a mediation meeting was held between PT PELNI (Persero), represented by its Legal Counsel, the Jayapura Branch Office, and the family representative of Mr. Abed Pigome, as per Letter Number: B/1103/X/RES.1.5./2024/Ditreskrimum dated October 29, 2024, regarding a mediation invitation held in the Room of Unit IV Sub-directorate III of General Crime Investigation at Papua Regional Police.

As the case progressed, the Legal & Compliance Division and PT PELNI's Legal Counsel coordinated with the Ditreskrimum investigators to pursue a familial resolution, and a meeting was held to settle the case through Restorative Justice (RJ), resulting in the signing of a Statement Letter and a Peace Agreement. Following this agreement, the family representative of Mr. Abed Pigome submitted a Letter of Withdrawal of the Complaint to the Director of Ditreskrimum Papua Regional Police on December 19, 2024, stating that the matter had been resolved amicably and that no legal action would be pursued against PT PELNI (Persero) in the future. Currently, the Legal & Compliance Division is awaiting the SP2HP (Notification Letter on the Progress of Investigation) from the Ditreskrimum Papua investigators, which continues to be coordinated by PT PELNI's Legal Counsel.

Legal Status: On Progress

45. PERKARA-PERKARA LITIGASI (lanjutan)

- f. Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan dan Penyalahgunaan Wewenang yang Merugikan Kepentingan PT PELNI (Persero)

Dugaan Pemalsuan Dokumen Perusahaan dan Penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Sdr. Ekoyunitriato, pegawai yang telah memasuki usia pensiun sejak tanggal 1 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 06.23/03/SK/HKO.01/2016 namun terdapat surat atas nama ybs selaku Enterprise Risk Management pada Surat Nomor: 010/SMO/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Penunjukan Konsultan Asuransi.

Status Hukum: Berdasarkan Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya Nomor: B/689/II/RES.1.9./2023/Ditreskrimum tanggal 10 Februari 2023 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), perkara sedang dalam tahap penyidikan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta permohonan persetujuan sita dari ketua PN Jakarta Selatan. Pemeriksaan akan dilakukan terhadap beberapa saksi lainnya.

Tindak Lanjut 2023 : Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya No. B/350/II/res.1.9/2024/Ditreskrimum tanggal 18 Januari 2024 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), perkara dalam tahap penyidikan dan telah dilakukan gelar perkara pada tanggal 28 Desember 2023 dengan hasil terlapor sdr Eko Yuni Triyanti ditingkatkan statusnya menjadi tersangka.

Status Hukum : Dalam Proses

45. LITIGATION CASES (continued)

- f. *Alleged Crime of Counterfeiting and Abuse of Authority which is Harmful to the Interests of PT PELNI (Persero)*

Alleged Falsification of Company Documents and Abuse of Authority committed by Mr. Ekoyunitriato, an employee who has entered retirement age since July 1 2016 based on the Decree of the Board of Directors Number: 06.23/03/SK/HKO.01/2016 but there is a letter on behalf of him as Enterprise Risk Management in Letter Number: 010/SMO/II/ 2017 dated 17 February 2017 concerning Appointment of Insurance Consultant.

Legal Status: Based on the Dirreskrimum Polda Metro Jaya Letter Number: B/689/II/RES.1.9./2023/Ditreskrimum dated 10 February 2023 regarding Notification Letter on the Progress of Investigation Results (SP2HP), the case is currently in the investigation stage and witnesses have been examined -witnesses and requests for confiscation approval from the chairman of the South Jakarta District Court. Examination will be carried out on several other witnesses.

Follow-up 2023 : Letter from the Director of Criminal Investigation of Polda Metro Jaya No. B/350/II/res.1.9/2024/Ditreskrimum dated January 18, 2024 regarding Notification Letter on the Progress of Investigation Results (SP2HP), the case is in the investigation stage and a case title has been held on December 28, 2023 with the result that the reported party Eko Yuni Triyanti was upgraded to a suspect.

Legal Status: On Progress

45. PERKARA-PERKARA LITIGASI (lanjutan)

g. Dugaan Tindak Pidana terkait Kebakaran di Kapal KM Bukit Raya

Sehubungan dengan kejadian kebakaran di Salon Deck 6 KM Bukit Raya pada tanggal 25 April 2024 pukul 14.01 WIB sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nakhoda KM Bukit Raya Nomor 04.25/07/BA/114/2024 tanggal 25 April 2024, Divisi Hukum dan Kepatuhan telah melakukan koordinasi serta pendampingan terhadap proses pemeriksaan kejadian tersebut. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Penyidik pada Direktorat Polairud Polda Kalimantan Barat, perkara ini ditangani oleh Polairud Polda Kalbar yang melibatkan Tim Laboratorium Forensik (Labfor) dan Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) Polda Kalbar dalam rangka penyelidikan atas dugaan tindak pidana, sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/29/IV/RES.1.24/2024/Ditpolairud tanggal 26 April 2024 atas dasar Laporan Informasi Nomor: LI/29/IV/2024/Ditpolairud tanggal 25 April 2024. Sebagai informasi, Divisi Hukum dan Kepatuhan telah berkoordinasi dengan Penyidik Polairud Polda Kalbar terkait perkembangan penyelidikan dan menerima informasi sebagaimana tertuang dalam Surat Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Direktorat Polairud Nomor: B/459/VII/2024/Ditpolairud tanggal 2 Juli 2024, yang pada intinya menyampaikan bahwa penyelidikan atas peristiwa terbakarnya Ruang Salon Perwira di Dek 6 KM Bukit Raya GT.6.022 yang terjadi pada Kamis, 25 April 2024 sekitar pukul 14.45 WIB di Perairan Muara Jungkat dihentikan karena tidak ditemukan adanya peristiwa pidana dalam kejadian tersebut.

Status Hukum: Selesai

45. LITIGATION CASES (continued)

g. *Alleged Criminal Act Related to the Fire on KM Bukit Raya*

In connection with the fire incident on Deck 6 (Salon area) of KM Bukit Raya on April 25, 2024, at 14:01 WIB, as stated in the Official Report of the Captain of KM Bukit Raya Number 04.25/07/BA/114/2024 dated April 25, 2024, the Legal and Compliance Division coordinated and provided assistance in the examination process of the incident. Based on coordination with investigators from the Directorate of Water and Air Police (Polairud) of the West Kalimantan Regional Police, the case was handled by Polairud Polda Kalbar with the involvement of the Forensic Laboratory Team (Labfor) and the Indonesian Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) Team of Polda Kalbar as part of the investigation into an alleged criminal offense, as stated in the Investigation Order Number: SP.Lidik/29/IV/RES.1.24/2024/Ditpolairud dated April 26, 2024, based on the Information Report Number: LI/29/IV/2024/Ditpolairud dated April 25, 2024. For information, the Legal and Compliance Division coordinated with Polairud Polda Kalbar investigators regarding the progress of the investigation and received notification as per the West Kalimantan Regional Police Directorate of Water and Air Police Letter Number: B/459/VII/2024/Ditpolairud dated July 2, 2024, which essentially stated that the investigation into the fire incident in the Officers' Salon Room on Deck 6 of KM Bukit Raya GT.6.022, which occurred on Thursday, April 25, 2024, at around 14:45 WIB in the waters of Muara Jungkat, had been closed due to the absence of any criminal offense found in the incident.

Legal Status: Done

45. PERKARA-PERKARA LITIGASI (lanjutan)

- h. Dugaan Tindak Pidana oleh pihak lain terhadap aset PT Pelni (Persero) di Jalan Jambi/Kutai/Cisadane, Surabaya

PT PELNI (Persero) melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak ketiga yang menguasai Aset di Jalan Jambi No 49-63 Kota Surabaya, kepada Polrestabes Surabaya sebagaimana Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/B/632/V/2022/SPKT/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JATIM tanggal 30 Mei 2022.

Status Hukum: Polrestabes Surabaya telah meminta keterangan kepada Lurah Darmo, Kantor Pertanahan, Aria Duta, Bambang Nunuk, Drg Vitria Dewi sebagaimana SP2HP Nomor: B/3363/SP2HP/VII/RES1.2./2022/Satreskrim dan salah satu penghuni aset di Jl. Cisadane No 24/1 atas nama Suarso telah menyerahkan terimakan aset dimaksud kepada PT Pelni (persero) berdasarkan serah terima tanggal 21 Oktober 2022.

Tindak Lanjut 2023 : Dilakukan pemeriksaan tambahan kepada saksi-saksi penyelidikan sebagaimana SP2HP No: B/4774/X/RES1.2/2023/Satreskrim tanggal 25 Oktober 2023.

Status Hukum : Dalam Proses

- i. Dugaan Tindak Pidana terkait Pengadaan Reefer Container High Cube ukuran 20 Feet pada PT PELNI (Persero) Tahun Anggaran 2023

Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana terkait Pengadaan Reefer Container High Cube ukuran 20 Feet pada PT PELNI (Persero) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/2582/V/RES.3.3./2024/Ditreskrimsus tanggal 31 Mei 2024 atas Laporan Informasi Nomor: LI/263/V/RES.3.3./2024/Ditreskrimsus tanggal 31 Mei 2024. Dalam perkembangannya, berdasarkan Surat Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Nomor: B/6065/X/RES.3.3./2024/Ditreskrimsus tanggal 08 Oktober 2024 perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, disampaikan bahwa penyelidikan atas perkara dimaksud dihentikan karena belum ditemukan peristiwa pidana dan potensi kerugian keuangan negara.

Status Hukum: Selesai

45. LITIGATION CASES (continued)

- h. Alleged Criminal Acts by other parties against the assets of PT Pelni (Persero) on Jalan Jambi/Kutai/Cisadane, Surabaya

PT PELNI (Persero) reported the alleged crime committed by a third party who controls assets on Jalan Jambi No. 49-63 Surabaya City, to the Surabaya Police as evidence of Report Number: TBL/B/632/V/2022/SPKT/POLRESTABES SURABAYA /POLDA JATIM May 30, 2022.

Legal Status: Surabaya Police have requested information from Darmo Village Head, Land Office, Aria Duta, Bambang Nunuk, Drg Vitria Dewi as per SP2HP Number: B/3363/SP2HP/VII/RES1.2./2022/Satreskrim and one of the occupants of the assets in Jl. Cisadane No 24/1 on behalf of Suarso has handed over the said assets to PT Pelni (Persero) based on the handover date of 21 October 2022.

Follow-up 2023: Additional examination of investigation witnesses was carried out as SP2HP No. B/4774/X/RES1.2/2023/Satreskrim dated October 25, 2023: B/4774/X/RES1.2/2023/Satreskrim dated October 25, 2023.

Legal Status: On Progress

- i. Alleged Criminal Act Related to the Procurement of 20-Foot High Cube Reefer Containers at PT PELNI (Persero) Fiscal Year 2023

Investigators from the Special Criminal Investigation Directorate (Ditreskrimsus) of the Jakarta Metropolitan Police conducted an investigation into an alleged criminal act related to the procurement of 20-foot High Cube Reefer Containers at PT PELNI (Persero) for the 2023 fiscal year, as stated in the Investigation Order Number: SP.Lidik/2582/V/RES.3.3./2024/Ditreskrimsus dated May 31, 2024, based on the Information Report Number: LI/263/V/RES.3.3./2024/Ditreskrimsus, dated May 31, 2024. In its development, based on the Letter from the Jakarta Metropolitan Regional Police Number: B/6065/X/RES.3.3./2024/Ditreskrimsus dated October 8, 2024, regarding the notification of the progress of the investigation, the Ditreskrimsus investigators conveyed that the investigation into the case was discontinued due to the absence of any criminal offense and no indication of potential state financial losses.

Legal Status: Done

45. PERKARA-PERKARA LITIGASI (lanjutan)

- j. Dugaan Tindak Pidana terkait Kebakaran di Kapal KM Umsini di Dermaga Pelabuhan Soekarno Makassar

Sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/05/VI/2024/SPKT tanggal 09 Juni 2024 di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar Sektor Kawasan Soekarno Hatta atas kejadian kebakaran pada KM Umsini di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, Divisi Hukum dan Kepatuhan telah melakukan koordinasi dan pendampingan pemeriksaan atas kejadian kebakaran di KM Umsini. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Penyidik Polres Pelabuhan Makassar, disampaikan bahwa perkara dimaksud ditangani oleh Polres Pelabuhan Makassar yang melibatkan Tim Bidang Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Sulawesi Selatan dalam rangka penyelidikan atas dugaan tindak pidana dalam kejadian tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/216/VI/Res.1.13/2024/Reskrim tanggal 10 Juni 2024 atas Laporan Polisi Nomor: LP/05/VI/2024/SPKT tanggal 09 Juni 2024.

- j. Dugaan Tindak Pidana terkait Kebakaran di Kapal KM Umsini di Dermaga Pelabuhan Soekarno Makassar (lanjutan)

Sebagai informasi tambahan, Divisi Hukum dan Kepatuhan bersama dengan Kuasa Hukum telah berkoordinasi dengan Penyidik Polres Pelabuhan Makassar terkait kejadian dimaksud dan telah menerima informasi sebagaimana tertuang dalam Surat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Direktorat Resor Pelabuhan Makassar Nomor: B/252/VII/RES.1.13/2024/Reskrim tanggal 01 Juli 2024 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, yang pada intinya menyampaikan bahwa penyelidikan atas perkara dimaksud dihentikan karena telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Status Hukum: Selesai

45. LITIGATION CASES (continued)

- j. *Alleged Criminal Act Related to the Fire on KM Umsini at the Soekarno Port Pier in Makassar*

In relation to Police Report Number: LP/05/VI/2024/SPKT dated June 9, 2024, at the Makassar Port Police – Soekarno Hatta Sector, concerning the fire incident on KM Umsini at Soekarno Hatta Port Makassar, the Legal & Compliance Division has coordinated and provided assistance during the investigation of the incident. Based on coordination with the Makassar Port Police investigators, it is conveyed that the case is being handled by the Makassar Port Police and involves the Forensic Laboratory Team (Labfor) of the South Sulawesi Regional Police as part of the investigation into the alleged criminal act related to the fire onboard KM Umsini, as referred to in Investigation Order Number: SP.Lidik/216/VI/Res.1.13/2024/Reskrim dated June 10, 2024, following Police Report Number: LP/05/VI/2024/SPKT dated June 9, 2024.

- j. *Alleged Criminal Act Related to the Fire on KM Umsini at the Soekarno Port Pier in Makassar (continued)*

As additional information, the Legal & Compliance Division along with Legal Counsel has coordinated with the investigators from Makassar Port Police regarding the incident, and have received information as outlined in the letter from the South Sulawesi Regional Police, Makassar Port Police Directorate Number: B/252/VII/RES.1.13/2024/Reskrim dated July 1, 2024, concerning the Notification of Progress on the Report Review, which essentially states that the investigation into the case has been discontinued as it has met both formal and material requirements as regulated under Police Regulation (Perkap) Number 8 of 2021 on the Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice.

Legal Status: Done

45. PERKARA-PERKARA LITIGASI (lanjutan)

- k. Dugaan Tindak Pidana Terkait Layanan Angkutan Perintis R-58 dan R-59 pada Satuan Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Makassar Tahun Anggaran 2023–2024

Penyidik pada Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar telah melakukan pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana terkait penggunaan anggaran Layanan Angkutan Laut Perintis R-58 dan R-59 pada Satuan Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Makassar serta PT PELNI (Persero) Tahun Anggaran 2023–2024 sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/49/VII/RES.3.3./2024/Ditreskrimsus tanggal 18 Juli 2024 atas Laporan Informasi Nomor: LI/263/V/RES.3.3./2024 tanggal 18 Juli 2024. Dalam perkembangannya, berdasarkan Surat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: B/102/IX/RES.3/2024/Reskrim tanggal 01 Oktober 2024 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, Penyidik Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar menyampaikan bahwa setelah dilakukan gelar perkara, penyelidikan atas perkara tersebut dihentikan karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ditemukan adanya kerugian negara.

Status Hukum : Selesai

- l. Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial dalam Perkara Nomor 228/Pdt.Sus PHI/2024/PN.Jkt.Pst atas nama Suyatno dkk.

Sehubungan dengan perkara perselisihan hubungan industrial antara Suyatno dkk sebagai Para Penggugat dengan PT PELNI (Persero) sebagai Tergugat I dan Dana Pensiun PELNI sebagai Tergugat II di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana Suyatno dkk merupakan mantan pegawai PT PELNI (Persero) yang dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena pensiun berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 06.21/01/SK/HKO.01/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dengan Manfaat Pensiun, maka atas pemberhentian tersebut, Suyatno dkk mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial yang terdaftar dalam perkara Nomor 228/Pdt.Sus PHI/2024/PN.Jkt.Pst.

45. LITIGATION CASES (continued)

- k. *Alleged Criminal Act Related to the Pioneer Transportation Services R-58 and R-59 under the Working Unit of the Port Authority and Harbormaster Office of Makassar for Fiscal Years 2023–2024*

Investigators at the Makassar Port Police Resort conducted an investigation into an alleged criminal offense related to the use of budget funds for Pioneer Sea Transport Services R-58 and R-59 under the Work Unit of the Makassar Harbor Master's Office and Port Authority, as well as PT PELNI (Persero), for Fiscal Years 2023–2024, as stated in Assignment Letter Number: SP.Gas/49/VII/RES.3.3./2024/Ditreskrimsus dated July 18, 2024, based on Information Report Number: LI/263/V/RES.3.3./2024 dated July 18, 2024. In its development, based on the South Sulawesi Regional Police Letter Number: B/102/IX/RES.3/2024/Reskrim dated October 1, 2024, regarding Notification of the Investigation Report Progress, the Makassar Port Police Resort investigators stated that, after a case review, the investigation into the case was discontinued as it was in accordance with the prevailing regulations and no state financial loss was found.

Legal Status: Done

- l. *Employment Dispute Lawsuit in Case Number 228/Pdt.Sus PHI/2024/PN.Jkt.Pst on behalf of Suyatno et al.*

In relation to the industrial relations dispute case between Suyatno et al. as the Plaintiffs and PT PELNI (Persero) as Defendant I and Dana Pensiun PELNI as Defendant II at the Industrial Relations Court of the Central Jakarta District Court, where Suyatno et al. are former employees of PT PELNI (Persero) whose employment was terminated due to retirement pursuant to the Board of Directors Decree Number: 06.21/01/SK/HKO.01/2023 dated 21 June 2023 concerning Honorary Dismissal with Retirement Benefits. Regarding this dismissal, Suyatno et al. filed a lawsuit for an industrial relations dispute at the Industrial Relations Court of the Central Jakarta District Court, registered under case number 228/Pdt.Sus PHI/2024/PN.Jkt.Pst.

45. PERKARA-PERKARA LITIGASI (lanjutan)

- l. Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial dalam Perkara Nomor 228/Pdt.Sus PHI/2024/PN.Jkt.Pst atas nama Suyatno dkk. (lanjutan)

Dalam pokok perkara, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan PT PELNI (Persero) untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada para penggugat berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang pisah atas dasar kekurangan pembayaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat & Pemutusan Hubungan Kerja, serta Perjanjian Kerja Bersama PT PELNI (Persero) dengan Serikat Pekerja PELNI Periode 2023–2025. PT PELNI (Persero) telah mengikuti proses persidangan dengan agenda Pemeriksaan Kelengkapan Legal Standing, Penyampaian Jawaban Tergugat, Replik-Duplik, Pembuktian, dan Kesimpulan. Adapun Putusan Majelis Hakim dijadwalkan dibacakan pada tanggal 16 Januari 2025 melalui E-Court.

Status Hukum : Dalam Proses

- m. Penanganan Aset yang Terletak di Jl. Moh. Hatta, Kendari, Sulawesi Tenggara

Pada tanggal 17 Oktober 2024, PT PELNI (Persero) telah membuat laporan polisi sebagaimana tercantum dalam LP/B/330/X/2024/SPKT/POLDA terkait penguasaan sebagian aset milik PT PELNI (Persero) oleh pihak ketiga yang dilaporkan, yakni Sdr. Sukma Ali Putra. Selanjutnya, pada tanggal 5 November 2024 telah dilakukan pemeriksaan saksi oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara terhadap Kepala Cabang Kendari dan Kepala Urusan Operasi & Layanan Cabang Kendari. Kemudian, pada tanggal 12 Desember 2024, penyidik juga melakukan pemeriksaan saksi terhadap Sdri. Fanny Puspita.

Status Hukum : Dalam Proses

45. LITIGATION CASES (continued)

- l. *Employment Dispute Lawsuit in Case Number 228/Pdt.Sus PHI/2024/PN.Jkt.Pst on behalf of Suyatno et al. (continued)*

In essence, the plaintiffs are requesting the panel of judges to rule that PT PELNI (Persero) pay in full and in a lump sum severance pay, long service awards, compensation rights, and separation pay to the plaintiffs, based on the underpayment as stipulated in Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Fixed-Term Employment Agreements, Outsourcing, Working Hours and Rest Periods & Termination of Employment, and the 2023–2025 Collective Labor Agreement between PT PELNI (Persero) and the PELNI Workers' Union. PT PELNI (Persero) has participated in the court proceedings, which included the examination of legal standing documents, submission of responses and rebuttals, presentation of evidence, and closing statements. The verdict is scheduled to be issued on 16 January 2025 via E-Court.

Legal Status: On Progress

- m. *Handling of Assets Located on Jl. Moh. Hatta, Kendari, Southeast Sulawesi*

On October 17, 2024, PT PELNI (Persero) filed a police report (LP/B/330/X/2024/SPKT/POLDA) regarding the unauthorized occupation of part of its property by a third party identified as Mr. Sukma Ali Putra. Following this, on November 5, 2024, the Southeast Sulawesi Regional Police conducted witness examinations of the Head of the Kendari Branch and the Head of Operations & Services of the Kendari Branch. Subsequently, on December 12, 2024, another witness, Ms. Fanny Puspita, was also examined by the investigators from the Southeast Sulawesi Regional Police.

Legal Status: On Progress

45. PERKARA-PERKARA LITIGASI (lanjutan)

- n. Gugatan PHI dalam Perkara Nomor 279/Pdt.Sus.PHI/2024/PN.Jkt.Pst a.n Firdaus Dkk

Perkara perselisihan hubungan industrial antara Firdaus dkk selaku Para Penggugat dengan PT PELNI (Persero) selaku Tergugat I diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana Firdaus dkk merupakan mantan pegawai PT PELNI (Persero) yang diberhentikan karena pensiun berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 06.21/01/SK/HKO.01/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dengan Manfaat Pensiun. Atas dasar pemberhentian tersebut, para penggugat mengajukan gugatan yang terdaftar dalam perkara Nomor 279/Pdt.Sus.PHI/2024/PN.Jkt.Pst, dengan pokok permohonan agar Majelis Hakim memutuskan PT PELNI (Persero) untuk membayarkan hak-hak normatif berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak atas istirahat tahunan, tambahan 15% dari pesangon, dan uang pisah, dengan dasar penghitungan upah sesuai ketentuan Pasal 3 angka 32 Perjanjian Kerja Bersama Periode 2023–2025 antara PT PELNI (Persero) dengan Serikat Pekerja PELNI.

Status Hukum : Dalam Proses

- o. Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan dan Penggelapan terkait Kegiatan Operasional di Kantor PT PELNI (Persero) Cabang Namlea

Sehubungan dengan dugaan tindak pidana dalam kegiatan operasional pada PT PELNI (Persero) Kantor Cabang Namlea, Divisi Hukum dan Kepatuhan telah melakukan analisa dan mendapati indikasi adanya tindak pidana pemalsuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh dua mantan pegawai saat menjalankan tugas kedinasan, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Keuangan dan Operasional dari Satuan Pengawasan Internal (SPI).

45. LITIGATION CASES (continued)

- n. *Industrial Relations Dispute Lawsuit in Case Number 279/Pdt.Sus.PHI/2024/PN.Jkt.Pst on behalf of Firdaus et al.*

The industrial relations dispute case between Firdaus et al. as the Plaintiffs and PT PELNI (Persero) as the Defendant I was filed with the Industrial Relations Court at the Central Jakarta District Court. Firdaus et al. are former employees of PT PELNI (Persero) who were terminated due to retirement based on the Board of Directors' Decree Number: 06.21/01/SK/HKO.01/2023 dated June 21, 2023, concerning Termination with Honor and Pension Benefits. Following this termination, the Plaintiffs filed a lawsuit, registered under case number 279/Pdt.Sus.PHI/2024/PN.Jkt.Pst, in which they request the Panel of Judges to rule that PT PELNI (Persero) must pay severance pay, long service awards, compensation for unused annual leave, an additional 15% of severance pay, and separation pay to the Plaintiffs. The basis for calculating the payments is the wage provisions outlined in Article 3 point 32 of the Collective Labor Agreement for the 2023–2025 period between PT PELNI (Persero) and the PELNI Workers' Union.

Legal Status: On Progress

- o. *Alleged Criminal Offense of Forgery and Embezzlement Related to Operational Activities at PT PELNI (Persero) Namlea Branch Office*

In connection with the alleged criminal offense related to operational activities at PT PELNI (Persero) Namlea Branch Office, the Legal and Compliance Division conducted an analysis and found indications of suspected forgery and embezzlement committed by two former employees during their official duties, as outlined in the Financial and Operational Audit Report by the Internal Audit Unit (SPI).

45. PERKARA-PERKARA LITIGASI (lanjutan)

- o. Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan dan Penggelapan terkait Kegiatan Operasional di Kantor PT PELNI (Persero) Cabang Namlea

Menindaklanjuti hal tersebut, Divisi Hukum dan Kepatuhan bersama Kuasa Hukum PT PELNI (Persero) telah berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Resor Pulau Buru dan secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana dimaksud sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/110/XII/2024/SPKT/POLRES BURU/POLDA MALUKU tanggal 05 Desember 2024, atas dugaan pelanggaran Pasal 263 dan/atau Pasal 374 KUHP. Saat ini, penyidik Polres Pulau Buru tengah melakukan pengumpulan dokumen pendukung serta pengambilan keterangan dari pegawai PT PELNI (Persero) guna melengkapi berkas perkara.

Status Hukum : Dalam Proses

- p. Dugaan Tindak Pidana di Jalan Jambi No. 63

Pada tanggal 30 Mei 2022, PT PELNI (Persero) melalui kuasa hukumnya telah melaporkan penghuni aset milik perusahaan yang berlokasi di Jl. Jambi/Kutei/Cisadane, Surabaya, sebagaimana tercantum dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/632/V/2022/SPKT/POLRES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Polres Surabaya, diketahui bahwa penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap sembilan orang saksi. Selanjutnya, pihak penyidik dijadwalkan akan melaksanakan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap lima saksi tambahan sebagai bagian dari proses penyidikan yang sedang berlangsung.

Status Hukum : Dalam Proses

45. LITIGATION CASES (continued)

- o. *Alleged Criminal Offense of Forgery and Embezzlement Related to Operational Activities at PT PELNI (Persero) Namlea Branch Office*

Following up on this matter, the Legal and Compliance Division, together with PT PELNI (Persero)'s Legal Counsel, coordinated with the Buru District Police and officially reported the alleged criminal offense as stated in Police Report Number: LP/B/110/XII/2024/SPKT/POLRES BURU/POLDA MALUKU dated December 5, 2024, concerning suspected violations of Articles 263 and/or 374 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). Currently, the Buru District Police investigators are collecting supporting documents and obtaining witness statements from PT PELNI (Persero) employees to complete the case files.

Legal Status: On Progress

- p. *Alleged Criminal Act at Jalan Jambi No. 63*

On May 30, 2022, PT PELNI (Persero), through its legal counsel, reported the occupants of the company's asset located at Jl. Jambi/Kutei/Cisadane, Surabaya, as stated in Police Report Number: LP/B/632/V/2022/SPKT/POLRES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR. According to the Notification Letter on the Progress of the Investigation from the Surabaya Police, the investigators have conducted examinations of nine witnesses. The next step in the investigation process will involve summoning and examining an additional five witnesses.

Legal Status: On Progress

45. PERKARA-PERKARA LITIGASI (lanjutan)

- q. Dugaan tindak pidana oleh pihak lain terhadap aset PT PELNI (Persero) di Jl. Jambi/Kutei/Cisadane, Surabaya, Jawa Timur

Pada tanggal 30 Mei 2022, PT PELNI (Persero) melalui kuasa hukumnya telah melaporkan penghuni aset di Jl. Jambi/Kutei/Cisadane, Surabaya sebagaimana tercantum dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/632/V/2022/SPKT/POLRES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Kepolisian Polres Surabaya, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap sembilan (9) orang saksi. Salah satu penghuni di Jl. Jambi No. 57 telah menyatakan kesediaannya untuk mengosongkan aset, dan untuk agenda selanjutnya Penyidik akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap lima (5) orang saksi lainnya.

Status Hukum : Dalam Proses

- r. Dugaan tindak pidana oleh pihak lain terhadap aset PT PELNI (Persero) di Jl. Jambi/Kutei/Cisadane, Surabaya, Jawa Timur

Pada tanggal 4 Maret 2021, PT PELNI (Persero) melalui kuasa hukumnya telah melaporkan pihak ketiga ke Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/74/III/2021/NTB/SPKT, terkait dugaan tindak pidana penguasaan aset milik PT PELNI (Persero) tanpa izin yang berlokasi di Jl. H. Moh. Faisal Nomor 6, RT 004 RW 002, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB. Selanjutnya, pada tanggal 4 September 2023, Polda NTB menerbitkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan Nomor: B/331/IX/RES.1.24/2023/Ditreskrimum. Pada tanggal 20 September 2023, PT PELNI (Persero) melalui kuasa hukumnya melakukan koordinasi dengan penyidik Polda NTB dan Aspidum Kejaksaan Tinggi NTB terkait status tersangka atas nama Sdr. Irpandardiri. Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Sdr. Irpandardiri sebagai tersangka dilaksanakan pada tanggal 23 September 2023. Pada tahun 2024, berkas perkara dari pihak kepolisian telah dilimpahkan kepada pihak kejaksaan.

Status Hukum : Dalam Proses

45. LITIGATION CASES (continued)

- q. Alleged criminal offense by a third party against the asset of PT PELNI (Persero) located at Jl. Jambi/Kutei/Cisadane, Surabaya, East Java.

On May 30, 2022, PT PELNI (Persero), through its legal counsel, reported the occupants of the property located at Jl. Jambi/Kutei/Cisadane, Surabaya, as stated in Police Report Number: LP/B/632/V/2022/SPKT/POLRES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR. Based on the Notice of Investigation Progress from the Surabaya Police, investigators have conducted examinations of nine (9) witnesses. One of the occupants at Jl. Jambi No. 57 has agreed to vacate the property, and the next agenda includes the summoning and examination of five (5) additional witnesses by the investigators.

Legal Status: On Progress

- r. Alleged Criminal Act Committed by a Third Party Regarding PT PELNI (Persero)'s Asset at Jl. Seruni No. 3, Selong.

On March 4, 2021, PT PELNI (Persero), through its legal counsel, reported a third party to the West Nusa Tenggara Regional Police (Polda NTB) under Police Report Number: LP/74/III/2021/NTB/SPKT, concerning the alleged unlawful occupation of PT PELNI (Persero)'s asset located at Jl. H. Moh. Faisal No. 6, RT 004 RW 002, Sandubaya Sub-district, Selong District, East Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province. Subsequently, on September 4, 2023, Polda NTB issued a notification letter of suspect designation under Number: B/331/IX/RES.1.24/2023/Ditreskrimum. PT PELNI (Persero), through its legal counsel, then coordinated with investigators at Polda NTB and the Head of the General Crimes Division at the NTB High Prosecutor's Office on September 20, 2023, regarding the suspect status of Mr. Irpandardiri. On September 23, 2023, Mr. Irpandardiri underwent an official examination (BAP) in his capacity as a suspect. In 2024, the case file was forwarded by the police to the public prosecutor's office.

Legal Status: On Progress

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

46. INFORMASI PENTING LAINNYA

a. Kontribusi Kepada Negara

Informasi terkait kontribusi Perseroan kepada Negara Republik Indonesia sesuai dengan Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-32/DKU.MBU/08/2024, tanggal 30 Agustus 2024, tentang Pengungkapan Kontribusi Fiskal BUMN. Berikut rincian kontribusi fiskal Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

No.	Jenis Kontribusi/Types of Contributions	2024 (Rp)	2023 (Rp)
A.	Pajak/Taxes		
1.	Pajak Penghasilan/Tax Income	193.712.195.879	161.657.007.593
2.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)/ Value Added Tax (VAT) and Sales Tax on Luxury Goods	269.179.814.682	195.231.045.791
3.	Bea Masuk/Keluar, Bea & Cukai, dan Bea Materai/ Import/Exit Duty, Customs & Excise, and Stamp Duty	20.389.939.000	-
4.	PBB P3 ((Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan	-	-
5.	Pajak Pemerintah Pusat Lainnya/Other Central Government Taxes	-	-
6.	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/Local Taxes and Contributions	6.692.774.738	5.292.368.706
	Jumlah Kontribusi Pajak/Total Tax Contribution	489.974.724.299	362.180.422.090
B.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)/Non-Tax State Revenue		
1.	Dividen/Dividend	-	-
2.	PNBP Lainnya/Other Non-Tax State Revenue	14.884.937.742	15.754.066.073
	Jumlah Kontribusi PNBP/Total Non-Tax State Revenue	14.884.937.742	15.754.066.073
	Jumlah Kontribusi kepada Negara/Total Contribution to the State	504.859.662.041	377.934.488.163

b. Peta Jalan Pelaksanaan Internal Control of Financial Reporting (ICoFR)

Berdasar pada Surat Pelaksana Tugas Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara No.S-5/DKU.MBU/02/2025, tentang Penetapan Peta Jalan Implementasi ICoFR BUMN dapat diinformasikan peta jalan untuk kategori Sistemik B sebagai berikut:

46. OTHER IMPORTANT INFORMATION

a. Contribution to the State

Information related to the Company's contribution to the Republic of Indonesia in accordance with the Letter of the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. S-32/DKU.MBU/08/2024, dated August 30, 2024, concerning Disclosure of Fiscal Contributions of BUMN. The following are details of the Company's fiscal contributions for the years ended December 31, 2024 and 2023:

b. Roadmap for Implementation of Internal Control of Financial Reporting (ICoFR)

Based on the Letter of the Acting Deputy for Finance and Risk Management of the Ministry of State-Owned Enterprises No. S-5/DKU.MBU/02/2025, concerning the Determination of the BUMN ICoFR Implementation Roadmap, the roadmap for the Systemic B category can be informed as follows:

46. INFORMASI PENTING LAINNYA (lanjutan)

**b. Peta Jalan Pelaksanaan Internal Control of
Financial Reporting (ICoFR) (lanjutan)**

Tahapan/ Phases	Laporan Keuangan/ Financial Reporting 2025	Laporan Keuangan/ Financial Reporting 2026	Laporan Keuangan/ Financial Reporting 2027	Laporan Keuangan 2028 dan Seterusnya/ Financial Report 2028 and Beyond
Perancangan dan Implementasi/ <i>Design and Implementation</i>	Tingkat Induk/ <i>Parent Level</i>	Tingkat Konsolidasi/ <i>Consolidation Level</i>	Tingkat Konsolidasi/ <i>Consolidation Level</i>	Tingkat Konsolidasi/ <i>Consolidation Level</i>
Pemantauan Berkelanjutan/ <i>Continuous Monitoring</i>		Tingkat Induk/ <i>Parent Level</i>	Tingkat Konsolidasi/ <i>Consolidation Level</i>	Tingkat Konsolidasi/ <i>Consolidation Level</i>
Evaluasi dan Remediasi/ <i>Evaluation and Remediation</i>		Tingkat Induk/ <i>Parent Level</i>	Tingkat Konsolidasi/ <i>Consolidation Level</i>	Tingkat Konsolidasi/ <i>Consolidation Level</i>
Asesmen Manajemen/ <i>Management Assessment</i>			Tingkat Induk/ <i>Parent Level</i>	Tingkat Konsolidasi/ <i>Consolidation Level</i>
Asurans oleh Praktisi Eksternal/ <i>Assurance by External Practitioners</i>			Tingkat Induk/ <i>Parent Level</i>	Tingkat Konsolidasi/ <i>Consolidation Level</i>

Sebagai tindak lanjut atas peta jalan yang ditetapkan tersebut, Perseroan membentuk tim yang bertanggung jawab atas pengimplementasian ICoFR pada Perseroan melalui Surat Keputusan Direksi No.03.13/01/SK/HKO.01/2025, tanggal 13 Maret 2025, tentang Tim Pelaksana Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan PT PELNI (Persero).

As a follow-up to the established roadmap, the Company has formed a team responsible for implementing ICoFR in the Company through the Decree of the Board of Directors No. 03.13/01/SK/HKO.01/2025, dated March 13, 2025, concerning the Internal Control Implementation Team for Financial Reporting of PT PELNI (Persero).

47. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

1) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Anggaran Dasar PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) tentang Modal Perseroan mengalami perubahan sesuai dengan Akta No. 6, tanggal 20 Maret 2025, dihadapan Notaris Ida Adiningsih, S.H., notaris di Jakarta, tentang Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan sebanyak 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) saham, masing-masing saham dengan nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya seharga Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia.

47. EVENT AFTER REPORTING PERIOD

1) Amendment to the Company's Articles of Association

The Articles of Association of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) concerning the Company's Capital have been amended in accordance with Deed No. 6, dated March 20, 2025, before Notary Ida Adiningsih, S.H., a notary in Jakarta, concerning the Approval of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of the PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), as follows:

- approve the issuance of shares in savings of 1.500.000 (one million five hundred thousand) shares, each share with a nominal value of Rp1.000.000 (one million rupiah) so that the total is worth Rp1.500.000.000.000 (one trillion five hundred billion rupiah) which will be fully taken up by the Republic of Indonesia.

47. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)

1) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (lanjutan)

- b. menyetujui penambahan modal yang ditempatkan dan disetor pada Perseroan sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) sehingga modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp7.629.900.000.000 (tujuh triliun enam ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp9.129.900.000.000 (sembilan triliun seratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah) yang bersumber dari Penambahan Penyertaan Modal Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2024, tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia.

Sehingga mengubah Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) menjadi berbunyi sebagai berikut:

**Modal
Pasal 4**

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 9.129.900 (sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham atau seluruhnya sebesar Rp9.129.900.000.000 (sembilan triliun seratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah).
3. 100% (seratus) persen dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah sebesar Rp9.129.900.000.000 (sembilan triliun seratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah) telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia (pemegang saham) dengan cara sebagai berikut:

47. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued)

1) Amendment to the Company's Articles of Association (continued)

- b. approved the addition of issued and paid-up capital in the Company by Rp1.500.000.000.000 (one trillion five hundred billion rupiah) so that the issued and paid-up capital which was originally Rp7.629.900.000.000 (seven trillion six hundred twenty nine billion nine hundred million rupiah) becomes Rp9.129.900.000.000 (nine trillion one hundred twenty nine billion nine hundred million rupiah) sourced from the Addition of State Capital Participation based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 53 of 2024, concerning the Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

So that Article 4 paragraph (2) and (3) of the Articles of Association of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) is changed to read as follows:

**Capital
Article 4**

2. Of the authorized capital, 9,129,900 (nine million one hundred twenty nine thousand nine hundred) shares or a total of Rp. 9,129,900,000,000 (nine trillion one hundred twenty nine billion nine hundred million rupiah) have been placed and taken up by the Republic of Indonesia.
3. 100% (one hundred) percent of the nominal value of each share placed above, or a total of Rp9.129.900.000.000 (nine trillion one hundred twenty nine billion nine hundred million rupiah) has been fully paid by the Republic of Indonesia (shareholders) in the following manner:

47. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan) **47. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued)**

1) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (lanjutan)

3. (lanjutan)

- a) Sebesar Rp7.629.900.000.000 (tujuh triliun enam ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah) merupakan setoran modal lama sesuai dengan akta nomor 2, tanggal 7 April 2017, yang dibuat dihadapan Notaris Ida Adiningsih, S.H., yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0126086, tanggal 11 April 2017.
- b) Sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2024.

Akta Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah terdaftar pada Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-0067130.AH.01.11.TAHUN 2025, tanggal 20 Maret 2025.

Selanjutnya, Anggaran Dasar PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) tentang Modal Perseroan mengalami perubahan kembali sesuai dengan Akta No. 7, tanggal 20 Maret 2025, dihadapan Notaris Ida Adiningsih, S.H., notaris di Jakarta, tentang Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan perubahan jenis saham pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) yang semula tanpa Seri menjadi terdiri dari saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B.

1) Amendment to the Company's Articles of Association (continued)

3. (continued)

- a) The amount of Rp7,629,900,000,000 (seven trillion six hundred twenty nine billion nine hundred million rupiah) is the old capital deposit in accordance with deed number 2, dated April 7, 2017, made before Notary Ida Adiningsih, S.H., which has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-AH.01.03-0126086, dated April 11, 2017.
- b) The amount of Rp1,500,000,000,000 (one trillion five hundred billion rupiah) originating from the 2024 State Revenue and Expenditure Budget as stipulated in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 53 of 2024.

The Deed of Amendment to the Articles of Association has been registered with the Ministry of Law of the Republic of Indonesia, Directorate General of General Legal Administration Number: AHU-0067130.AH.01.11.YEAR 2025, dated March 20, 2025.

Furthermore, the Articles of Association of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) concerning the Company's Capital were amended again in accordance with Deed No. 7, dated March 20, 2025, before Notary Ida Adiningsih, S.H., a notary in Jakarta, concerning the Approval of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), as follows:

1. Determining the change in the type of shares in PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) which was originally without a Series to consist of Series A Dwiwarna shares and Series B shares.

47. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)

1) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (lanjutan)

2. Menetapkan hak-hak istimewa saham Seri A Dwiwarna yang tidak dimiliki oleh saham Seri B, yaitu hak untuk melakukan:
- a. Hak untuk menyetujui dalam RUPS;
 - b. Hak untuk mengusulkan agenda RUPS;
 - c. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. Hak untuk menetapkan pedoman/kebijakan strategis dalam bidang:
 - 1) Akuntansi dan Keuangan;
 - 2) Pengembangan dan Investasi;
 - 3) Operasional dan pengadaan barang dan/atau jasa;
 - 4) Informasi teknologi;
 - 5) Sumber daya manusia;
 - 6) Manajemen risiko dan pengawasan internal;
 - 7) Hukum dan kepatuhan;
 - 8) Program tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
 - 9) Program Environmental, Social and Governance (ESG).
 - e. Hak untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris atas persetujuan Persiden; dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Sehingga mengubah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), menambah satu ayat pada Pasal 4, yaitu ayat (11), mengubah pasal 5 secara keseluruhan Anggaran Dasar PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) untuk disesuaikan dengan angka 1, angka 2, dan angka 3 tersebut di atas, menjadi berbunyi sebagai berikut:

Modal
Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan ini sebesar Rp13.000.000.000.000 (tiga belas triliun rupiah) yang terbagi atas:
- a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah); dan

47. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued)

1) Amendment to the Company's Articles of Association (continued)

2. Determine the special rights of Series A Dwiwarna shares that are not possessed by Series B shares, namely the right to:

- a. The right to approve in the GMS;
- b. The right to propose the agenda for the GMS;
- c. The right to request and access Company data and documents in accordance with laws and regulations;
- d. The right to establish strategic guidelines/policies in the fields of:
 - 1) Accounting and Finance;
 - 2) Development and Investment;
 - 3) Operations and procurement of goods and/or services;
 - 4) Information technology;
 - 5) Human Resources;
 - 6) Risk management and internal control;
 - 7) Law and compliance;
 - 8) Social and environmental responsibility programs; and
 - 9) Environmental, Social and Governance (ESG) programs.
- e. The right to appoint and dismiss the Board of Directors and Board of Commissioners with the approval of the President; with the mechanism for using the rights in question in accordance with the provisions in the Articles of Association and statutory regulations.

So that it changes Article 4 paragraph (1) and paragraph (2), adds one paragraph to Article 4, namely paragraph (11), changes Article 5 as a whole of the Articles of Association of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) to be adjusted to numbers 1, number 2, and number 3 above, to read as follows:

Capital
Article 4

1. The Company's authorized capital is Rp13,000,000,000,000 (thirteen trillion rupiah) which is divided into:
- a. 1 (one) Series A Dwiwarna share with a nominal value of Rp1,000,000 (one million rupiah); and

47. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)

1) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (lanjutan)

1. (lanjutan)

b. 12.999.999 (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp12.999.999.000.000 (dua belas triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sejumlah 9.129.900 (sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp9.129.900.000.000 (sembilan triliun seratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah), yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.000.000 (satu juta rupiah); dan
- b. 9.129.899 (sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta rupiah) atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp9.129.899.000.000 (sembilan triliun seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta

3. Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

47. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued)

1) Amendment to the Company's Articles of Association (continued)

1. (continued)

b. 12.999.999 (twelve million nine hundred ninety-nine million nine hundred ninety-nine) Series B shares, each with a nominal value of Rp1,000,000 (one million rupiah) or a total nominal value of Rp12,999,999,000,000 (twelve trillion nine hundred ninety-nine billion nine hundred ninety-nine million rupiah).

2. Of the authorized capital, the Republic of Indonesia has placed and taken part in the amount of 9.129.900 (nine million one hundred twenty nine thousand nine hundred) shares with a total nominal value of Rp9,129,900,000,000 (nine trillion one hundred twenty nine billion nine hundred million rupiah), consisting of:

- a. 1 (one) Series A Dwiwarna share with a total nominal value of Rp1,000,000 (one million rupiah); and
- b. 9.129.899 (nine million one hundred twenty nine thousand eight hundred ninety nine) Series B shares, each with a nominal value of Rp1,000,000 (one million rupiah) or a total nominal value of Rp9,129,899,000,000 (nine trillion one hundred twenty nine billion eight hundred ninety nine million rupiah).

3. The General Meeting of Shareholders as referred to in this Article must be attended by the Series A Dwiwarna Shareholders and the Decisions of the Meeting must be approved by the Series A Dwiwarna Shareholders.

47. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)

1) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (lanjutan)

Saham
Pasal 5

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari:
 - a. Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara Republik Indonesia, dan
 - b. Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat.
2. Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud dengan "saham" ialah saham Seri A Dwiwarna, saham Seri B, yang dimaksud dengan "Pemegang Saham" ialah pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pihak yang berwenang menjalankan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham.
4. a. Sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak ditetapkan lain, maka Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, Pemegang Saham Seri B mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara;
 - b. Menurut Anggaran Dasar ini, Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan hanya dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
 - c. Hak-hak istimewa saham Seri A Dwiwarna yang dimaksud dalam huruf b adalah hak mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - c.1 Hak untuk menyetujui dalam RUPS;
 - c.2 Hak untuk mengusulkan agenda RUPS;
 - c.3 Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-

47. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued)

1) Amendment to the Company's Articles of Association (continued)

Shareholder
Article 5

1. The Company's shares are shares registered with and issued in the name of their owner registered in the Shareholders Register, which consist of:
 - a. Series A Dwiwarna shares which can only be owned by the Republic of Indonesia, and
 - b. Series B shares that can be owned by the Republic of Indonesia and/or the public.
2. In the Articles of Association, "shares" are Series A Dwiwarna shares, Series B shares, and "Shareholders" are Series A Dwiwarna shareholders and Series B shareholders, unless expressly stated otherwise.
3. The Company only recognizes one person or one legal entity as the party authorized to exercise the rights granted by law over shares.
4. a. As long as the Articles of Association do not stipulate otherwise, Series A Dwiwarna Shareholders, Series B Shareholders have the same rights and every 1 (one) share gives 1 (one) voting right;
 - b. According to these Articles of Association, Series A Dwiwarna Shares are shares that provide their holders with special rights as stipulated in these Articles of Association and are exclusively owned by the Republic of Indonesia as the Holder of Series A Dwiwarna Shares;
 - c. The privileges of Series A Dwiwarna shares referred to in letter b are rights regarding the following matters:
 - c.1 The right to approve in the GMS;
 - c.2 The right to propose agenda for the GMS;
 - c.3 The right to request and access Company data and documents in accordance with laws and regulations;

47. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)

1) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (lanjutan)

4. c. Hak-hak istimewa saham Seri A Dwiwarna yang dimaksud dalam huruf b adalah hak mengenai hal-hal sebagai berikut: (lanjutan)
 - c.4 Hak untuk menetapkan pedoman/kebijakan strategis dalam bidang:
 - c.4.1 Akuntansi dan Keuangan;
 - c.4.2 Pengembangan dan Investasi;
 - c.4.3 Operasional dan pengadaan barang dan/atau jasa;
 - c.4.4 Informasi teknologi;
 - c.4.5 Sumber daya manusia;
 - c.4.6 Manajemen risiko dan pengawasan internal;
 - c.4.7 Hukum dan kepatuhan;
 - c.4.8 Program tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
 - c.4.9 Program *environmental, social and governance (ESG)*.
 - c.5 Hak untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris atas persetujuan Presiden; dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
5. Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan sebab-sebab lain menjadi milik lebih dari 1 (satu) orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil mereka bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut.
6. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan memperlakukan Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.

47. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued)

1) Amendment to the Company's Articles of Association (continued)

4. c. *The privileges of Series A Dwiwarna shares referred to in letter b are rights regarding the following matters: (continued)*
 - c.4 The right to establish strategic guidelines/policies in the fields of:*
 - c.4.1 Accounting and Finance;*
 - c.4.2 Development and Investment;*
 - c.4.3 Operations and procurement of goods and/or services;*
 - c.4.4 Information technology;*
 - c.4.5 Human Resources;*
 - c.4.6 Risk management and internal control;*
 - c.4.7 Law and compliance;*
 - c.4.8 Social and environmental responsibility programs; and*
 - c.4.9 Environmental, Social and Governance (ESG) programs.*
 - c.5 The right to appoint and dismiss the Board of Directors and Board of Commissioners with the approval of the with the mechanism for using the rights in question in accordance with the provisions in the Articles of Association and statutory regulations.*
- 5. If a share changes hands due to inheritance or for other reasons and becomes the property of more than 1 (one) person, then those who jointly own it are required to appoint one of them and the person appointed is recorded as their joint representative in the Register of Shareholders, who has the right to use the rights granted by law to the share.*
- 6. In the event that the joint owners fail to notify the Company in writing regarding the appointment of the joint representative, the Company shall treat the Shareholder whose name is registered in the Company's Shareholders Register as the sole legitimate holder of the shares (stocks).*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2024 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2024 and
for The Year then Ended
(With Comparative as of December 31, 2023 and
for The Year then Ended)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

47. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)

1) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (lanjutan)

7. Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar Perusahaan dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan.

2) Penyertaan Modal Negara (PMN)

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) menerima tambahan Penyertaan Modal Negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2024, tanggal 31 Desember 2024, tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia.

Nilai tambahan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp1.500.000.000.000, tujuan penggunaannya sebagai uang muka pengadaan 3 (tiga) unit kapal penumpang untuk penugasan angkutan penumpang.

Kedua peristiwa penting setelah periode pelaporan tersebut tidak berdampak pada penyesuaian terhadap laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

48. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian merupakan tanggung jawab manajemen dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 08 April 2025.

47. EVENT AFTER REPORTING PERIOD (continued)

1) Amendment to the Company's Articles of Association (continued)

7. Every Shareholder by law must comply with the Company's Articles of Association and all decisions legally taken at the General Meeting of Shareholders and statutory regulations.

2) The State Capital Participation

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) received additional State Capital Participation in accordance with Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 53 of 2024, dated December 31, 2024, concerning the Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

The additional value of State Capital Participation is IDR 1,500,000,000,000, the purpose of which is to be used as a down payment for the procurement of 3 (three) passenger ships for passenger transportation assignments.

These two important events after the reporting period have no impact on adjustments to the consolidated financial statements of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and Subsidiaries as of December 31, 2024 and for the year then ended.

48. MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements are the responsibility of management and have been approved by the Board of Directors for issue on the date April 08, 2025.

INFORMASI TAMBAHAN /
ADDITIONAL INFORMATION

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(NERACA) - ENTITAS INDUK
Tanggal 31 Desember 2024
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2023)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(BALANCE SHEETS) - PARENT ENTITY
As of Desember 31, 2024
(With Comparative as of December 31, 2023)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
ASET			ASSETS
ASET LANCAR			CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	3.992.841.996.992	3.340.274.232.991	Cash and Cash Equivalents
Piutang Usaha	64.806.643.456	71.119.772.632	Accounts Receivables
Aset Keuangan Lancar Lainnya	2.006.511.030.731	670.653.102.543	Other Current Financial Assets
Persediaan	454.492.569.387	347.753.641.959	Inventories
Pajak Dibayar Dimuka	2.986.052.848	12.140.886.119	Prepaid Taxes
Uang Muka	132.070.261.316	96.946.880.588	Advances Payment
Biaya Dibayar Dimuka	36.369.695.295	39.052.639.408	Prepaid Expenses
Jumlah Aset Lancar	6.690.078.250.025	4.577.941.156.240	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR			NON CURRENT ASSETS
Investasi pada Entitas Asosiasi	218.729.401.463	240.324.819.715	Investment in Associates
Investasi pada Entitas Anak	756.993.756.908	686.581.146.024	Investment in Subsidiaries
Properti Investasi	160.926.983.000	160.721.230.000	Investment Properties
Alat Produksi	1.970.136.345.555	2.030.269.253.987	Production Equipment
Aset Tetap	287.248.258.216	234.214.701.325	Fixed Assets
Aset Takberwujud	13.602.259.693	14.255.637.327	Intangible Assets
Aset Hak Guna	178.101.853	330.296.293	Use Right of Assets
Aset Pajak Tangguhan	50.272.443.957	55.088.018.153	Deferred Tax Assets
Aset Tidak Lancar Lainnya	85.382.890	69.670.750	Other Non Current Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	3.458.172.933.535	3.421.854.773.574	Total Non Current Asset
JUMLAH ASET	10.148.251.183.560	7.999.795.929.814	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS			LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK			SHORT-TERM LIABILITIES
Utang Usaha	221.941.567.167	212.445.399.077	Trade Payables
Beban Akruai	1.040.291.723.461	568.895.398.985	Accrued Expenses
Liabilitas Kontrak	87.445.571.321	68.970.309.466	Contract Liabilities
Utang Pajak	19.090.067.778	44.918.734.749	Tax Payables
Bagian Lancar atas Utang Kepada Negara	3.560.447.790	3.621.510.600	Current Portion of Debt to the State
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	136.956.325.308	96.685.231.365	Other Short-term Financial Assets
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.509.285.702.825	995.536.584.242	Total Short-term Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG			LONG-TERM LIABILITIES
Utang Kepada Negara	24.923.134.530	28.972.084.800	Debt to the State
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Jangka Panjang	95.255.885.465	155.430.687.812	Long-term Employee Benefits
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	120.179.019.995	184.402.772.612	Total Long-term Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	1.629.464.722.820	1.179.939.356.854	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS			EQUITY
Modal Saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham. Modal dasar 13.000.000 saham, modal ditempatkan dan disetor penuh 7.629.900 saham per 31 Desember 2024 dan 2023	7.629.900.000.000	7.629.900.000.000	Capital Stock - par value of Rp1.000.000 per share. Authorized - 13.000.000 share, issued and fully paid - 7.629.900 share as of December 31, 2024 and 2023
Penyertaan Modal Pemerintah	1.500.143.585.642	143.585.642	Government Equity
Tambahan Modal Disetor	397.878.907.714	397.878.907.714	Additional Paid-in Capital
Cadangan	1.543.866.979.147	1.342.665.131.496	Appropriate Retained Earnings
Saldo Laba (Defisit)	(2.460.466.230.027)	(2.453.137.655.703)	Retained Earnings (Defisits)
Komponen Ekuitas Lainnya	(92.536.781.736)	(97.593.396.189)	Other Component Equity
Jumlah Ekuitas	8.518.786.460.740	6.819.856.572.960	Total Equity
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	10.148.251.183.560	7.999.795.929.814	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN****KOMPREHENSIF LAIN - ENTITAS INDUK**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024

(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang

Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023)

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)**STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS****AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME - PARENT ENTITY**

For the Year Ended December 31, 2024

(With Comparative for The Year

Ended December 31, 2023)

(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2024	2023	
Pendapatan Usaha, Bersih	5.662.887.940.948	5.229.347.433.405	Operating Revenues, Netto
Beban Pokok Usaha	4.830.413.365.486	4.557.684.034.879	Operating Expenses
Laba Kotor	832.474.575.462	671.663.398.526	Gross Profit
Beban Pemasaran dan Distribusi	24.019.598.467	20.346.670.084	Distribution and Marketing Expenses
Beban Umum dan Administrasi	696.991.846.427	614.067.414.265	General and Administrative Expenses
Laba (Rugi) Usaha	111.463.130.568	37.249.314.177	Operating Profit or (Loss)
Pendapatan Non Usaha - Bersih	165.385.243.201	234.073.622.350	Non Operating Income - Net
Laba Sebelum Pajak	276.848.373.769	271.322.936.527	Profit Before Tax
Manfaat (Beban) Pajak	82.975.100.442	70.121.088.876	Tax Benefits (Expense)
Laba Tahun Berjalan	193.873.273.327	201.201.847.651	Profit for the Current Year
Penghasilan Komprehensif Lain			Other Comprehensive Income
Pos-pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:			Items That Will Not Be Reclassified Subsequently To Profit Or Loss :
- Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Periode Berjalan	4.201.114.453	(69.936.652.767)	Actuarial Gain (Loss) for the Period -
- Keuntungan (Kerugian) Nilai Wajar Aset Tetap	855.500.000	6.164.655.000	Fair Values of Property Gain (Loss) - Current Period
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	198.929.887.780	137.429.849.884	Total Comprehensive Income of The Current Year
Laba Bersih Per Saham Dasar	25.409,67	26.370,18	Basic Earnings Per Share

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - ENTITAS INDUK
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY - PARENT ENTITY
For the Year Ended December 31, 2024
(With Comparative for The Year Ended December 31, 2023)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh/ Share Capital	Penyertaan Modal Pemerintah/ Government Capital	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid- in Capital	Cadangan di Tentukan Penggunaannya/ Appropriated Retained Earning	Saldo Rugi (Defisit)/ Retained Earnings (Accumulated Deficits)	Komponen Ekuitas lainnya/ Other Equity Components	Jumlah Ekuitas/ Total Equity
Saldo per 31 Desember 2022	7.629.900.000.000	143.585.642	397.878.907.714	1.169.417.204.918	(2.481.091.576.775)	(33.821.398.422)	6.682.426.723.077
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	-	201.201.847.651	-	201.201.847.651
Cadangan	-	-	-	173.247.926.578	(173.247.926.578)	-	-
Keuntungan (Kerugian) Aktuaria	-	-	-	-	-	(69.936.652.767)	(69.936.652.767)
Keuntungan (Kerugian) Nilai Wajar Aset Tetap	-	-	-	-	-	6.164.655.000	6.164.655.000
Penyesuaian	-	-	-	-	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2023	7.629.900.000.000	143.585.642	397.878.907.714	1.342.665.131.496	(2.453.137.655.703)	(97.593.396.189)	6.819.856.572.960
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	-	193.873.273.327	-	193.873.273.327
Cadangan	-	-	-	201.201.847.651	(201.201.847.651)	-	-
Keuntungan (Kerugian) Aktuaria	-	-	-	-	-	4.201.114.453	4.201.114.453
Keuntungan (Kerugian) Nilai Wajar Aset Tetap	-	-	-	-	-	855.500.000	855.500.000
Penambahan (Pengurangan) Penyertaan Modal Pemerintah	-	1.500.000.000.000	-	-	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2024	7.629.900.000.000	1.500.143.585.642	397.878.907.714	1.543.866.979.147	(2.460.466.230.027)	(92.536.781.736)	8.518.786.460.740
Profit for the Current Year Reserve Actuarial Gain (Loss) Gain (Loss) on Fair Value of Fixed Assets Increase (Decrease) Adjustment							
Balance as of December 31, 2021							

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)**LAPORAN ARUS KAS - ENTITAS INDUK**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024

(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang

Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023)

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)**STATEMENTS OF CASH FLOWS - PARENT ENTITY**

For the Year Ended December 31, 2024

(With Comparative for The Year

Ended December 31, 2023)

(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2024	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Kas dari Pelanggan	1.862.141.147.724	1.805.920.242.902	Receipt from Customers
Penerimaan <i>Public Service Obligation</i> dan Subsidi	3.992.715.323.628	3.040.918.105.872	Receipt from Public Service Obligation and Subsidies
Pembayaran Kepada Pemasok	(3.417.571.636.314)	(3.060.170.334.392)	Payment to Suppliers
Penerimaan dari Aktivitas Operasi Lainnya	24.459.957.901	35.501.303.371	Receipt of other operating activities
Pembayaran Biaya Operasional	(392.788.543.098)	(340.757.891.470)	Payment of Operating Expenses
Pembayaran Biaya <i>Overhead</i>	(940.386.235.172)	(1.017.018.870.360)	Payment of Overhead Expense
Pengeluaran dari Aktivitas Operasi Lainnya	(46.601.152.113)	(21.944.135.554)	Payment of Other Operating Expenses
Pembayaran Pajak	(424.031.463.572)	(315.343.294.036)	Tax Payments
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	657.937.398.984	127.105.126.333	Net Cash Flows from Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan Bunga Deposito dan Jasa Giro	151.553.962.224	105.674.751.984	Interest Deposit and Demand Deposits Receipt
Penerimaan Dividen	7.707.055.925	-	Dividend Receipt
Penjualan Alat Produksi dan Aset Tetap	9.407.590.653	20.230.000.000	Acquisition of Production Equipment and Fixed Assets
Perolehan Alat Produksi dan Aset Tetap	(152.074.375.138)	(161.744.743.369)	Acquisition of Production Equipment and Fixed Assets
Perolehan Aset Dalam Konstruksi	(19.449.616.391)	(932.430.801)	Acquisition of Asset Under Construction
Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi	(2.855.382.727)	(36.772.422.186)	Net Cash Flows used to Investment Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan Pinjaman Bank	230.000.000.000	100.000.000.000	Acceptance of Bank Loan
Pembayaran Pinjaman Bank	(232.514.252.256)	(101.332.879.012)	Bank Loan Payments
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(2.514.252.256)	(1.332.879.012)	Net Cash Flows from Financing Activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	652.567.764.001	88.999.825.135	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENT
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	3.340.274.232.991	3.251.274.407.856	BEGINNING BALANCE CASH AND CASH EQUIVALENT
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	3.992.841.996.992	3.340.274.232.991	ENDING BALANCE CASH AND CASH EQUIVALENT

2024

Laporan Tahunan
Annual Report



PT. PELNI (Persero) HQ
Jl. Gajah Mada No. 14,
Jakarta Pusat, 10130
DKI Jakarta, Indonesia

Kontak Pusat
T. 162 (Jabodetabek)
F. +62 21 6385 4130

E. infopelni162@pelni.co.id